2023 Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan
Annual Report & Sustainability Report

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

WOMFinance
a member of Maybank group

INSPIRING OUR FORCES
TO GO BEYOND



DISCLAIMER DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB
DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY

Laporan Tahunan 2023 atau "Laporan" PT WOM Finance Tbk, selanjutnya disebut "WOM" atau "Perusahaan" ini berisi data dan informasi yang bersifat material bagi para pemangku kepentingan, dengan pengungkapan Laporan Tahunan mengacu pada ketentuan SEOJK No.16/SEOJK.04/2021 tentang Laporan Tahunan Perusahaan Publik. Laporan Tahunan ini disajikan bersama dengan Laporan Keberlanjutan 2023 PT WOM Finance Tbk yang disusun dengan mengacu pada ketentuan POJK 51/2017 dan GRI Standard dalam satu buku.

The 2023 Annual Report or "Report" of PT WOM Finance Tbk, hereinafter referred to as "WOM" or "the Company" contains data and information that is material for stakeholders, with the disclosure of the Annual Report referring to the provisions of SEOJK No.16/SEOJK.04/2021 concerning the Annual Report of Public Companies. This Annual Report is jointly presented in one book with PT WOM Finance Tbk 2023 Sustainability Report which is prepared by referring to the provisions of POJK 51/2017 and GRI Standard.

Isi Laporan Tahunan WOM berasal dari analisis internal, sumber dokumen dan narasumber yang dapat dipercaya. Terdapat pernyataan yang memuat data dan informasi tentang pandangan dan kondisi ke depan atau bersifat forward-looking statement, seperti target, harapan, perkiraan, prospek, atau proyeksi atas kinerja operasional dan kondisi usaha di masa mendatang. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki risiko dan ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang tertulis dalam pernyataan-pernyataan tersebut.

The content of the WOM Annual Report derives from internal analysis, reliable sources of documents and sources. Some statements include data and information about future views and conditions or forward-looking statements, such as targets, expectations, forecasts, prospects, or projections of operational performance and future business conditions. Such statements are subject to risks and uncertainties, and may result in actual developments materially different from those contained in such statements.

Demikian juga Laporan Keberlanjutan WOM, atau "Laporan" memuat pernyataan operasional, keuangan, proyeksi dan rencana, penerapan strategi dan kebijakan, serta tujuan Perusahaan yang digolongkan sebagai pandangan masa depan. Pernyataan yang tertuang memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan. Pernyataan-pernyataan prospektif tersebut dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan prediksi kondisi yang akan datang di lingkungan bisnis. Perusahaan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

WOM's Sustainability Report, or "Report" also contains operational, financial, projected and planned statements, implementation of strategies and policies, and objectives of the Company which are classified as future outlook. The stated statements have a prospect of risk, uncertainty, and may result in actual developments materially different from those reported. These prospective statements are made based on various assumptions about current conditions and predictions of future conditions in the business environment. The Company does not guarantee that documents that have been confirmed to be valid will bring certain results as expected.

Oleh sebab itu, WOM mengingatkan para pembaca bahwa Perusahaan tidak dapat memastikan data dan informasi mengenai pandangan ke depan yang dinyatakan dalam kedua Laporan ini adalah benar dan akurat, serta dapat terpenuhi seluruhnya. Apabila ada perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dengan versi Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

As such, WOM would like to remind readers that the Company cannot ensure that the data and information regarding the foresight stated in these two Reports are true and accurate, and can be fulfilled in their entirety. In the event of any discrepancy in interpretation between the Indonesian version and the English version, the Indonesian version shall prevail.

INSPIRING OUR FORCES
TO GO BEYOND

Perseroan terus melanjutkan transformasi digital yang telah dirintis sebelumnya untuk mendukung pengembangan usaha. Implementasi *Credit Approval Engine* pada awal tahun 2023 membuat proses bisnis menjadi lebih efisien dan meningkatkan kualitas pembiayaan yang berdampak pada pertumbuhan usaha.

Investasi Perseroan dalam pengembangan infrastruktur dan sistem digital selain untuk meningkatkan kinerja bisnis juga untuk menjadikan industri pembiayaan di tanah air yang lebih kuat, sehat, dan tumbuh secara berkelanjutan. Perseroan meyakini bahwa penguatan digitalisasi yang didukung kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) akan menginspirasi untuk membentuk ekosistem industri yang lebih berkualitas.

The Company sustains the digital transformation that it initially pioneered to facilitate business expansion. The introduction of the Credit Approval Engine in early 2023 will streamline business processes and improve the quality of financing, which will have an impact on business growth.

The Company's investment in infrastructure and digital system development aims not only to enhance business performance but also to foster a more robust, sustainable, and health-conscious financing sector in the country. The Company believes that by bolstering digitalization supported by Human Resources (HR) competencies, will inspire to form a more qualified industrial ecosystem.

Daftar Isi
Contents

Ikhtisar Utama
Performance Highlights

06	Ringkasan Kinerja 2023 | 2023 Performance Highlights
08	Ikhtisar Keuangan | Financial Highlights
13	Ikhtisar Saham | Shares Highlights
14	Ikhtisar Obligasi | Bonds Highlights
15	Aksi Korporasi | Corporate Actions
15	Penghentian Sementara Perdagangan Saham/ Penghapusan Pencatatan Saham | Suspension/ Delisting
16	Peristiwa Penting | Event Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

20	Laporan Dewan Komisaris | Board of Commissioners Report
30	Laporan Direksi | Board of Directors Report
48	Laporan Dewan Pengawas Syariah | Sharia Supervisory Board Report
54	Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2023 oleh Dewan Komisaris dan Direksi | Statements of Accountability of 2023 Annual Report by The Board of Commissioners and Board of Directors

Profil Perusahaan
Company Profile

58	Identitas Perusahaan | Corporate Identity
59	Skala Perusahaan | Company Scale
60	Sekilas Perusahaan | Company In Brief
63	Logo Perusahaan | Corporate Logo
64	Jejak Langkah | Milestone
66	Visi, Misi dan Nilai Perusahaan | Vision, Mission and Corporate Values
68	Bidang Usaha | Core Business
70	Produk & Layanan | Product & Services
71	Wilayah Operasional | Operational Areas
72	Struktur Organisasi | Organization Structure
74	Keanggotaan Asosiasi | Association Membership
75	Profil Dewan Komisaris | Board of Commissioners Profile
84	Profil Direksi | Board of Directors Profile
96	Profil Dewan Pengawas Syariah | Sharia Supervisory Board Profile
103	Pejabat Senior | Senior Management
106	Demografi Karyawan | Employees Demography
107	Komposisi Pemegang Saham | Shareholders & Ownership Percentage
110	Struktur Pemegang Saham Utama & Pengendali | Major & Controlling Shareholding Structure
112	Profil Pemegang Saham | Profile of Shareholders
116	Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi | Subsidiaries & Associates
117	Kronologi Penerbitan Saham | Shares Issuance Chronology
133	Kronologi Penerbitan Efek Lain | Other Stocks Chronology
136	Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) | Public Accountant and Public Accountant Firms
137	Nama dan Alamat Lembaga & Profesi Penunjang | Name and Address of Supporting & Institutions Professionals
138	Perusahaan Pemeringkat Efek | Share Rating Agency
139	Profesi Penunjang Pasar Modal | Capital Market Supporting Professionals
141	Penghargaan | Awards
145	Informasi pada Website Perusahaan | Corporate Website Information
147	Pendidikan & Pelatihan Manajemen | Education & Training of Management
152	Alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Selain Kantor Cabang | Head Office, Branch Office and Non-Branch Office Addresses

Analisa dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

168	Tinjauan Perekonomi | Economic Overview
173	Tinjauan Industri Pembiayaan | Financing Industry Overview
178	Tinjauan Operasional Segmen Usaha | Operational Review of Business Segments
182	Pembiayaan Sepeda Motor Baru | New Motorcycles Financing
184	Pembiayan Sepeda Motor Bekas | Used Motorcycle Financing
186	Pembiayaan Syariah | Sharia Financing
188	Pembiayaan Multiguna Jasa | Multipurpose Services Financing
190	Pembiayaan Investasi | Investment Financing
192	Pembiayaan Modal Kerja | Working Capital Financing
194	Prospek Usaha 2024 | Business Prospects 2024
196	Tinjauan Keuangan | Financial Review
254	Teknologi Informasi | Information Technology

Daftar Isi
Contents

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

260	Tata Kelola Perusahaan | Good Corporate Governance
290	Rapat Umum Pemegang Saham | General Meeting of Shareholders
333	Dewan Komisaris | Board of Commissioners
356	Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi | Board of Commissioners and Board of Directors Performance Assessment
362	Komite-Komite Dewan Komisaris | Committees of The Board of Commissioners
363	Komite Audit | Audit Committee
373	Komite Nominasi dan Remunerasi | Nomination and Remuneration Committee
377	Komite Pemantau Risiko | Risk Oversight Committee
383	Dewan Pengawas Syariah | Sharia Supervisory Board
393	Direksi | Board of Directors
416	Komite di Bawah Direksi | Committee Under The Board of Directors
417	Komite Manajemen Risiko | Risk Management Committee
422	Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah | Sharia Product and Business Development Committee
427	Komite Pengarah Teknologi Informasi | Information Technology Steering Committee
432	Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary
446	Akses Informasi & Data Perusahaan | Information Access & Corporate Data
451	Hubungan Investor | Investor Relations
452	Fungsi Kepatuhan | Compliance Function
458	Audit Internal | Internal Audit
464	Sistem Pengendalian Internal | Internal Control System
469	Akuntan Publik | Public Accountant
471	Manajemen Risiko | Risk Management
487	Perkara Hukum | Litigation
492	Sanksi Administrasi | Administrative Sanctions
493	Kode Etik | Code of Conduct
494	Sistem Pelaporan Pelanggaran | Whistleblowing System
496	Kebijakan Anti Korupsi | Anti-Corruption Policy
499	Ketentuan & Kebijakan Vendor Management dan Pengadaan Barang & Jasa | Goods and/or Services Procurement Policy in The Company

Laporan Keberlanjutan
Sustainability Report

510	Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan | Sustainability Performance Highlights
514	Strategi & Dukungan Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | Strategy & Support For The Sustainable Development Goals
519	Tentang Laporan Keberlanjutan | About Sustainability Report
526	Tata Kelola Keberlanjutan | Sustainability Governance
535	Mendistribusikan Kinerja Ekonomi yang Optimal | Disbursing Optimal Economic Performance
544	Berdaya bersama Masyarakat | Empowered with the Community
559	Berpartisipasi dalam Pelestarian Lingkungan| Participate in Environmental Conservati
567	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Human Resource Management and Development
585	Lingkungan Kerja yang Layak dan Aman | Decent and Safe Work Environment
590	Produk dan Layanan Terbaik yang Setara | Products and Services Equality Excellence
602	Indeks POJK 51/POJK.03/2017 | POJK 51/ POJK.03/2017 Index
605	Indeks Isi Standar GRI | GRI Sandard Content Index
608	Lembar Umpan Balik | Feedback Form

Laporan Keuangan 2023
2023 Financial Statements

IKHTISAR UTAMA

PERFORMANCE HIGHLIGHTS





Pencapaian kinerja Perseroan bertumbuh positif di tahun 2023 yang didukung dengan inovasi tepat guna

The Company's performance achieved positive growth in 2023, supported by outstanding innovation

Ringkasan Kinerja 2023

Performance Summary 2023

Laba Tahun Berjalan
Income for the Year

Rp236,41
(dalam Rp miliar | in Rp billion)

Total Laba tercatat sebesar Rp236,41 miliar pada tahun 2023, **naik** sebesar **19,64%** dibanding tahun 2022 sebesar Rp197,60 miliar.

Total Income was Rp236.41 billion in 2023, **an increase of 19.64%** compared to Rp197.60 billion in 2022.

Total Pendapatan
Total Revenues

Rp2,00
(dalam Rp triliun | in Rp trillion)

Total Pendapatan **naik** sebesar **17,76%** menjadi Rp2,00 triliun di tahun 2023 dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,69 triliun.

Total Revenues **increase by 17.76%** to Rp2.00 trillion in 2023 from Rp1.69 trillion in the previous year.

Total Pembiayaan
Total Financing

212.259
(dalam ribuan unit | in thousand unit)

Total Pembiayaan mencapai 212.259 unit di tahun 2023, yang terdiri dari produk MotorKu dan MobilKu sebanyak 143.784 unit, Pembiayaan Motor Baru sebanyak 67.431 unit dan Pembiayaan MasKu sebanyak 1.044 unit.

Total Financing reached 212,259 units in 2023, consisting of MotorKu and MobilKu that reached 143,784 units. New motorcycle financing reached 67,431 units and Gold Financing reached 1,044 units.

Total Penyaluran Pembiayaan
Total Financing Disbursement

Rp5,84
(dalam Rp triliun | in Rp trillion)

Total Penyaluran Pembiayaan tercatat sebesar Rp5,84 triliun, **naik 27,75%** dibanding tahun 2022 sebesar Rp4,57 triliun.

Total Financing Disbursement was recorded at Rp5.84 trillion, an **increase of 27.75%** from 2022 of Rp4.57 trillion.

Kinerja Keuangan
Financial Review

Total Aset
Total Assets

Rp6,64
(dalam Rp triliun | in Rp trillion)

Total Aset **meningkat** sebesar **17,52%** menjadi Rp6,64 triliun dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp5,65 triliun.

Total Assets was Rp6.64 trillion, **increased by 17.52%** from Rp5.65 trillion in 2022.

Total Liabilitas
Total Liabilities

Rp4,94
(dalam Rp triliun | in Rp trillion)

Total Liabilitas mencapai Rp4,94 triliun, **meningkat** sebesar **19,57%** dari tahun 2022 sebesar Rp4,13 triliun.

Total Liabilities reached Rp4.94 trillion, **increased by 19.57%** from Rp4.13 trillion in 2022.

Total Ekuitas
Total Equity

Rp1,70
(dalam Rp triliun | in Rp trillion)

Total Ekuitas sebesar Rp1,70 triliun di tahun 2023, **meningkat** sebesar **11,94%** dari Rp1,52 triliun di tahun 2022.

Total Equity was Rp1.70 trillion in 2023, **increased by 11.94%** from Rp1.52 trillion in 2022.

Rasio-Rasio Keuangan Penting
Key Financial Ratios

Rasio Pembiayaan Bermasalah Gross (NPF) | Gross Non-Performing Financing (NPF):
2,08%

Return on Equity (ROE):
14,97%

Return on Assets (ROA):
5,04%

Gearing Ratio:
2,40
(dalam kali lipat | in times)

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Consolidated Financial Position
dalam Rp juta/in Rp million

URAIAN	2023	2022	2021	2020	2019	DESCRIPTION
Pendapatan						Revenues
Pembiayaan Konsumen, Modal Usaha, dan Sewa Pembiayaan - Neto	1.700.753	1.414.831	1.241.703	1.588.206	2.073.049	Consumer Financing, Capital Financing, and Finance Lease - Net
Bunga	12.774	11.094	8.310	33.406	35.625	Interest
Administrasi	41.284	45.516	83.750	73.467	175.357	Administration
Lain-Lain	240.599	223.064	237.220	305.771	359.656	Others
Total Pendapatan	**1.995.410**	**1.694.505**	**1.570.983**	**2.000.850**	**2.643.687**	**Total Revenues**
Beban						Expenses
Umum dan Administrasi	593.561	563.850	510.697	568.520	736.503	General and Administrative
Gaji dan Tunjangan	378.391	356.283	308.655	344.523	440.393	Salaries and Benefits
Beban Pendanaan dan Keuangan	309.881	261.994	295.982	521.701	638.807	Financing Costs and Financing Charges
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	292.171	150.035	208.967	374.176	404.929	Provision for Impairment Losses
Penyusutan	78.434	63.071	70.708	78.491	44.929	Depreciation
Lain-Lain	20.363	17.023	21.432	19.484	7.060	Others
Total Beban	**1.672.801**	**1.412.256**	**1.416.441**	**1.906.895**	**2.272.621**	**Total Expenses**
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Beban Pajak Penghasilan	322.609	282.249	154.542	93.955	371.066	Income Before Final Tax Expense and Income Tax Expense
Beban Pajak Final dan Beban Pajak Penghasilan	86.202	84.646	44.479	36.577	111.395	Final Tax Expense and Income Tax Expense
Laba Tahun Berjalan	**236.407**	**197.603**	**110.063**	**57.378**	**259.671**	**Income for the Year**
Pos yang tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi						Items that will not be Reclassified to Profit or Loss
Keuntungan Aktuarial	4.702	6.558	14.534	17.494	4.870	Actuarial Gain
Pajak Penghasilan	(1.034)	(1.443)	(3.197)	(3.393)	(1.218)	Income Tax
Laba Komprehensif Lainnya - Neto Setelah Pajak	3.668	5.115	11.337	14.101	3.652	Other Comprehensive Income - Net of Tax
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	**240.075**	**202.718**	**121.400**	**71.479**	**263.323**	**Total Comprehensive Income for The Year**
Laba per Saham Dasar (dinyatakan dalam nilai Rupiah penuh)	**67,90**	**56,76**	**31,61**	**16,48**	**74,59**	**Basic Earnings per Share (expressed in full Rupiah amount)**

Laporan Posisi Keuangan
Statement of Financial Position
dalam Rp juta/in Rp million

URAIAN	2023	2022	2021	2020	2019	DESCRIPTION
Kas dan Setara Kas - Neto	342.970	483.969	448.752	634.520	751.561	Cash and Cash Equivalents - Net
Piutang Pembiayaan Konsumen, Modal Usaha, dan Sewa Pembiayaan - Neto	5.935.864	4.864.805	4.415.639	4.318.561	7.205.215	Consumer Financing, Capital Financing, and Finance Lease Receivables - Net
Piutang Lain-Lain - Neto	51.098	21.779	24.206	42.988	46.574	Other Receivables - Net
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka	26.010	12.606	12.048	6.218	76.904	Prepaid Expenses and Advances
Aset Tetap - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan	81.769	65.034	73.654	84.791	111.672	Property and Equipment - Net of Accumulated Depreciation
Aset Hak-Guna - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan	92.273	81.426	83.388	96.026	-	Right-of-Use Assets - Net of Accumulated Depreciation
Aset Tidak Berwujud - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan	49.463	42.834	32.352	32.579	32.084	Intangible Assets - Net of Accumulated Depreciation
Aset Pajak Tangguhan - Neto	14.495	14.983	16.220	21.537	33.938	Deferred Tax Assets - Net
Aset Lain-Lain	41.773	58.790	41.513	43.479	13.222	Other Assets
Total Aset	**6.635.715**	**5.646.226**	**5.147.772**	**5.280.699**	**8.271.170**	**Total Assets**
Utang Bank	2.626.237	2.350.136	1.967.885	1.743.411	3.622.876	Bank Loans
Biaya yang Masih Harus Dibayar	86.702	65.452	49.684	40.470	92.563	Accrued Expenses
Utang Pajak	50.699	41.097	23.689	2.564	39.337	Taxes Payable
Utang Lain-Lain	181.869	136.719	105.029	100.221	158.307	Other Payables
Liabilitas Sewa	41.142	46.396	50.978	57.488	-	Lease Liabilities
Utang Obligasi - Neto	1.660.253	1.200.615	1.319.928	1.799.567	2.651.540	Bonds Payable - Net
Liabilitas Imbalan Kerja	92.891	90.779	85.190	112.989	135.970	Liability for Employee Benefits
Utang Subordinasi	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Subordinated Loan
Total Liabilitas	**4.939.793**	**4.131.194**	**3.802.383**	**4.056.710**	**6.900.593**	**Total Liabilities**
Total Ekuitas	**1.695.922**	**1.515.032**	**1.345.389**	**1.223.989**	**1.370.577**	**Total Equity**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**6.635.715**	**5.646.226**	**5.147.772**	**5.280.699**	**8.271.170**	**Total Liabilities and Equity**

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

Total Pembiayaan – dalam Unit
Total Financing – in Unit

Kegiatan Pembiayaan Financing Activities	Jenis Produk Products	2023	2022	2021	2020	2019
Pembiayaan Multiguna Barang Multipurpose Financing Goods	Pembiayaan Motor Baru New Motorcycle Financing	61.184	53.873	71.146	39.597	142.089
	Pembiayaan Motor Bekas Used Motorcycle Financing	-	-	1	3.022	16.968
Pembiayaan Multiguna Jasa Multipurpose Financing Service	Pembiayaan Multiguna MotorKu Multipurpose Service Motorku	47.669	96.158	120.750	76.335	174.027
	Fasilitas Dana MotorKu Funding Facility MotorKu	65.536	19.173	11	31	-
	Pembiayaan Multiguna MobilKu Multipurpose Facility MobilKu	-	6	6.459	10.207	22.011
	Fasilitas Dana MobilKu Funding Facility MobilKu	10.179	9.220	10.402	1.661	-
Pembiayaan Investasi Investment Financing	*Sale and Leaseback* MobilKu	14.254	7.557	547	79	-
Pembiayaan Modal Kerja Working Capital Financing	Fasilitas Modal Usaha MotorKu Working Capital Facility MotorKu	-	-	-	-	-
	Fasilitas Modal Usaha MobilKu Working Capital Facility MobilKu	-	1.641	2.695	193	-
	Sale and Leaseback MobilKu	6.146	4.713	393	89	-
Pembiayaan Jual Beli (Akad Murabahah) Selling and Buying Financing (Murabahah Contracts)	Pembiayaan Syariah Motor Baru New Motorcycle Sharia Financing	6.247	7.636	-	-	-
	Pembiayaan Syariah Logam Mulia "MasKu" "MasKu" Precious Metals Sharia Financing	1.044	1.324	253	-	-

Total Pembiayaan – dalam Rp juta
Total Financing – in Rp million

Kegiatan Pembiayaan Financing Activities	Nama Produk Products Name	2023	2022	2021	2020	2019
Pembiayaan Multiguna Barang Multipurpose Financing Goods	Pembiayaan Motor Baru New Motorcycle Financing	1.330.806	1.129.397	1.407.807	790.302	2.702.397
	Pembiayaan Motor Bekas Used Motorcycle Financing	-	-	13	32.248	177.692
Pembiayaan Multiguna Jasa Multipurpose Financing Service	Pembiayaan Multiguna MotorKu Multipurpose Service Motorku	518.093	956.248	1.094.492	652.912	1.410.282
	Fasilitas Dana MotorKu Funding Facility MotorKu	709.776	185.787	111	259	-
	Pembiayaan Multiguna MobilKu Multipurpose Facility MobilKu	-	540	482.207	752.989	1.500.292
	Fasilitas Dana MobilKu Funding Facility MobilKu	791.722	661.835	771.433	126.655	-
Pembiayaan Investasi Investment Financing	*Sale and Leaseback* MobilKu	1.767.002	908.671	76.562	11.431	-
Pembiayaan Modal Kerja Working Capital Financing	Fasilitas Modal Usaha MotorKu Working Capital Facility MotorKu	-	-	-	-	-
	Fasilitas Modal Usaha MobilKu Working Capital Facility MobilKu	-	142.181	257.103	15.881	-
	Sale and Leaseback MobilKu	587.105	420.474	49.405	12.948	-
Pembiayaan Jual Beli (Akad Murabahah) Selling and Buying Financing (Murabahah Contracts)	Pembiayaan Syariah Motor Baru New Motorcycle Sharia Financing	131.917	161.458	-	-	-
	Pembiayaan Syariah Logam Mulia "MasKu" "MasKu" Precious Metals Sharia Financing	8.574	8.829	1.372	-	-

Rasio Keuangan Penting yang Relevan
Relevant Financial Ratios

Rasio Keuangan yang Relevan Relevant Financial Ratios	2023	2022	2021	2020	2019
Return on Assets (ROA) - (%)	5,04	5,26	3,17	1,27	4,39
Return on Equity (ROE) - (%)	14,97	14,09	8,69	4,67	21,09
Non-Performing Financing / NPF (*Gross*) - (%)	2,08	1,63	1,42	2,70	1,93
Borrowing and Debt Securities Issues - net / Total Assets (x)	0,68	0,66	0,68	0,71	0,78
Gearing Ratio (x)	2,40	2,22	2,30	2,68	4,19
Financing to Asset Ratio (%)	89,45	86,16	85,78	81,78	87,11
Current Ratio (x)	1,88	1,91	1,62	1,67	1,52

Informasi Lainnya
Other Information

Rasio Keuangan yang Relevan Relevant Financial Ratios	2023	2022	2021	2020	2019
Total Konsumen | Total Consumer	310.929	304.856	339.170	432.240	723.636
Total Karyawan | Total Employees	2.335	2.415	2.416	2.599	3.228
Jaringan Usaha | Business Network	202	164	166	175	186

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

Total Pembiayaan
Total Financing
(dalam unit | in units)

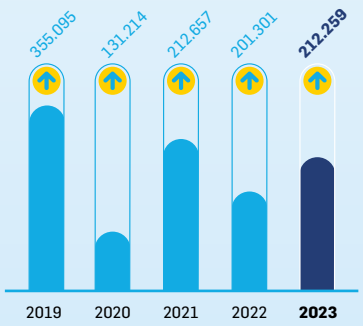

Total Pembiayaan
Total Financing
(dalam Rp juta | in Rp million)

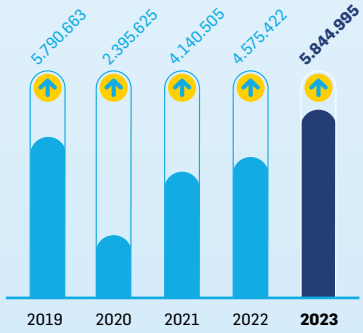

Total Aset
Total Assets
(dalam Rp juta | in Rp million)

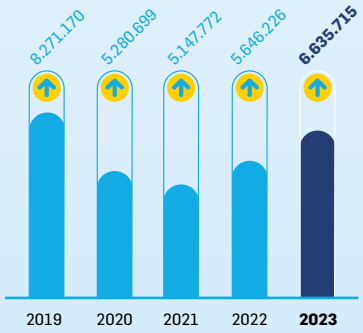

Total Liabilitas
Total Liabilities
(dalam Rp juta | in Rp million)

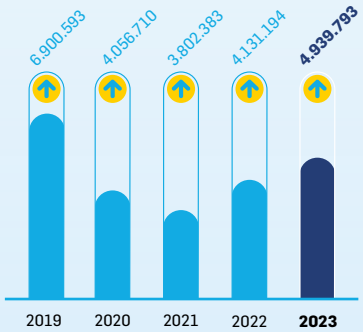

Total Ekuitas
Total Equity
(dalam Rp juta | in Rp million)

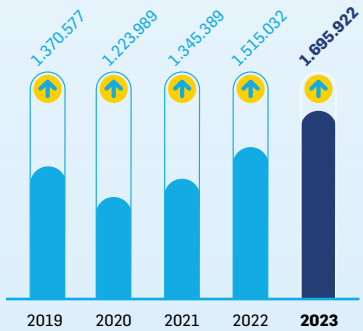

Total Pendapatan
Total Revenues
(dalam Rp juta | in Rp million)

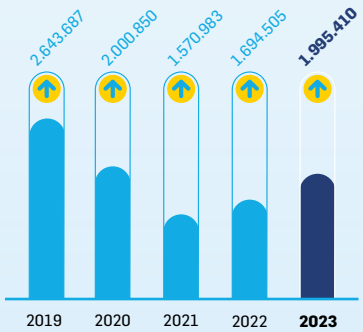

Laba Tahun Berjalan
Income for the Year
(dalam Rp juta | in Rp million)

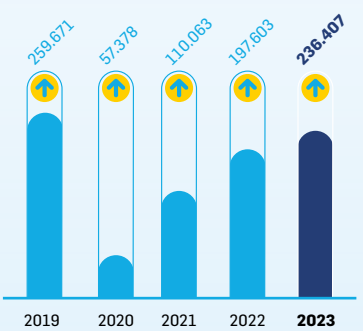

Non-Performing Financing
NPF (Gross)
(dalam persentase | in percentage(%))

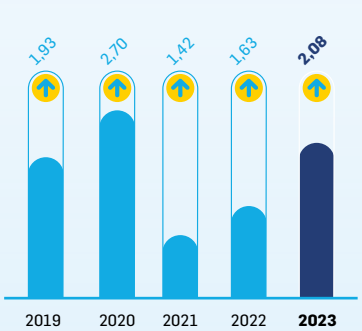

Ikhtisar Saham
Shares Highlights

Pergerakan Harga Saham 2023
Share Price Movement 2023



2023

Periode Period	Jumlah Saham yang Beredar Total Outstanding Shares	Harga Tertinggi Highest Nominal	Harga Terendah Lowest Nominal	Harga Penutupan Closing Nominal	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization
Triwulan 1 | Quarter 1	3.481.481.480	324	248	364	1.267.259.258.720
Triwulan 2 | Quarter 2	3.481.481.480	378	282	358	1.246.370.369.840
Triwulan 3 | Quarter 3	3.481.481.480	500	348	300	1.044.444.444.000
Triwulan 4 | Quarter 4	3.481.481.480	388	328	364	1.267.259.258.720

Pergerakan Harga Saham 2022
Share Price Movement 2022

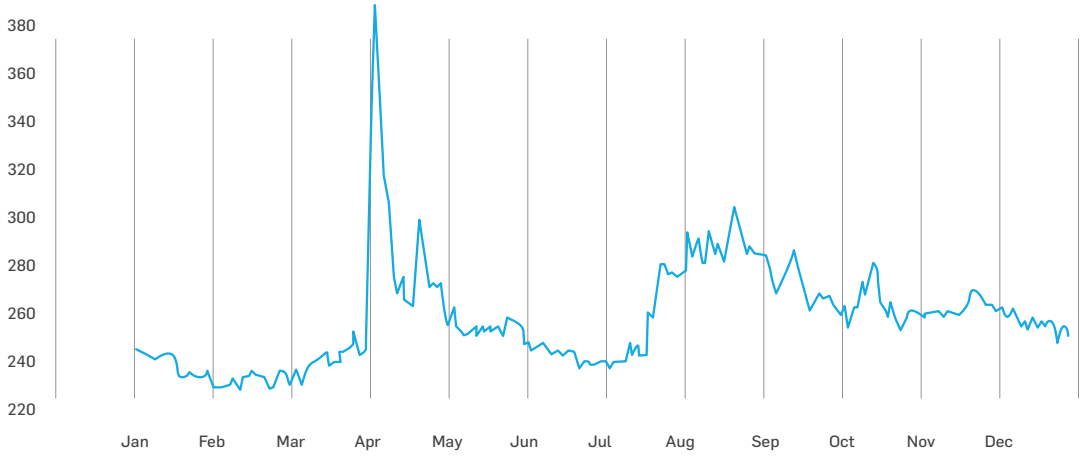

2022

Periode Period	Jumlah Saham yang Beredar Total Outstanding Shares	Harga Tertinggi Highest Nominal	Harga Terendah Lowest Nominal	Harga Penutupan Closing Nominal	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization
Triwulan 1 | Quarter 1	3.481.481.480	312	220	312	1.086.222.221.760
Triwulan 2 | Quarter 2	3.481.481.480	460	240	244	849.481.481.120
Triwulan 3 | Quarter 3	3.481.481.480	316	236	270	939.999.999.600
Triwulan 4 | Quarter 4	3.481.481.480	290	250	258	898.222.221.840

Ikhtisar Obligasi

Bonds Highlights

Nama Obligasi Bonds	**Seri** Series	**Tingkat Bunga** Coupon Rate	**Nominal**	**Tanggal Pencatatan** Listing Date	**Jatuh Tempo** Maturity	**Sisa Hutang Pokok Obligasi Per Seri yang Masih Belum Lunas di Tahun 2023** Outstanding Principal of the Bonds Per Series that has Not Been Paid off in 2023
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2021 | Shelf Bonds IV Phase I 2021	B	7,00%	198.000.000.000	29 Juli 2021 July 29, 2021	28 Juli 2024 July 28, 2024	198.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2022 | Shelf Bonds IV Phase II 2022	B	6,30%	465.000.000.000	11 April 2022 April 11, 2022	8 April 2025 April 8, 2025	465.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 | Shelf Bonds IV Phase III 2023	A	5,95%	221.000.000.000	12 April 2023 April 12, 2023	21 April 2024 April 21, 2024	1.000.000.000.000
	B	7,00%	779.000.000.000	12 April 2023 April 12, 2023	11 April 2026 April 11, 2026	

Nama Obligasi Bonds	**Peringkat** Ratings
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2021 | Shelf Bonds IV Phase I 2021	AA (idn)
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2022 | Shelf Bonds IV Phase II 2022	AA (idn)
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 | Shelf Bonds IV Phase III 2023	AA (idn)

Aksi Korporasi
Corporate Actions

Pada tahun 2023, Perseroan melakukan aksi korporasi, sebagai berikut:

- Menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III sebesar Rp1 triliun di mana penerbitan aksi korporasi ini dilaksanakan melalui mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB).

During 2023, the Company carried out the following corporate actions:

- Issued the WOM Finance Shelf Registration Bonds IV Phase III of Rp1 trillion, of which the issuance was exercised through the Rights Issue.

Penghentian Sementara Perdagangan Saham/Penghapusan Pencatatan Saham
Suspension/Delisting

Sampai dengan Laporan Tahunan 2023 ini diterbitkan, Perseroan tidak mengalami atau mendapat penghentian sementara dalam perdagangan saham ataupun penghapusan pencatatan saham Perseroan.

Until the publication of 2023 Annual Report, the Company did not experience or receive any suspension or delisting on the Company's shares.

Peristiwa Penting
Event Highlights

Rapat Umum Pemegang Saham | General Meeting of Shareholders

30

Jakarta, 30 Maret 2023
Jakarta, March 30, 2023

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Annual General Meeting of Shareholders

Function Room, Sentral Senayan III Lt. 28, Jl. Asia Afrika No.8, Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta 10270

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Extraordinary General Meeting of Shareholders

Function Room, Sentral Senayan III Lt. 28, Jl. Asia Afrika No.8, Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta 10270

Paparan Publik | Public Expose

31

Jakarta,
31 Oktober 2023
October 31, 2023

Paparan Publik
Public Expose

Function Room, Sentral Senayan III Lt. 28, Jl. Asia Afrika No.8, Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta 10270

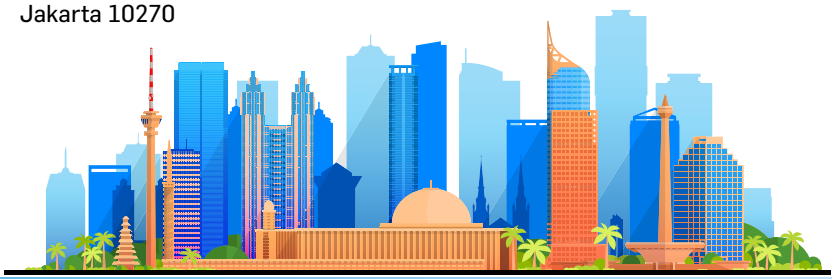

Pemberian Fasilitas Kredit | Loan Facilities

19

Jakarta,
19 Januari 2023
January 19, 2023

Fasilitas | Facilities
Working Capital Installment 2

Jumlah Fasilitas | Total Loans
Rp150.000.000.000

Pemberi Fasilitas | Lenders
PT Bank KEB Hana Indonesia

22

Jakarta,
22 Mei 2023
May 22, 2023

Fasilitas | Facilities
Kredit Modal Kerja *(Linkage Executing)*
Working Capital Loan (Linkage Executing)

Jumlah Fasilitas | Total Loans
Rp150.000.000.000

Pemberi Fasilitas | Lenders
PT Bank DKI

Jakarta,
8 Juni 2023
June 8, 2023

Fasilitas | Facilities
Installment Loan

Jumlah Fasilitas | Total Loans
Rp500.000.000.000

Pemberi Fasilitas | Lenders
PT Bank Digital BCA

Jakarta,
8 Juni 2023
June 8, 2023

Fasilitas | Facilities
Fixed Loan Sliding (FLS)

Jumlah Fasilitas | Total Loans
Rp295.000.000.000

Pemberi Fasilitas | Lenders
PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Jakarta,
26 Juli 2023
July 26, 2023

Fasilitas | Facilities
Kredit Modal Kerja - *Executing*
Working Capital Loan - Executing

Jumlah Fasilitas | Total Loans
Rp500.000.000.000

Pemberi Fasilitas | Lenders
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Jakarta,
8 September 2023
September 8, 2023

Fasilitas | Facilities
Working Capital - Executing

Jumlah Fasilitas | Total Loans
Rp150.000.000.000

Pemberi Fasilitas | Lenders
PT Bank IBK Indonesia Tbk

Penerbitan Obligasi | Bonds Issuance

Jakarta,
11 April 2023
April 11, 2023

Fasilitas | Facilities
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023
WOM Finance Shelf Registration Bond IV Phase III of 2023

Jumlah Fasilitas | Total Loans
Rp1.000.000.000.000

Pemberi Fasilitas | Lenders
Penawaran Umum Berkelanjutan IV Shelf-Registration IV



LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORTS





Implementasi strategi bisnis yang tepat berbasis inovasi digital merupakan kunci utama pertumbuhan usaha Perseroan

The implementation of an accurate business strategy based on digital innovation is the key driver of the Company's business growth

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report

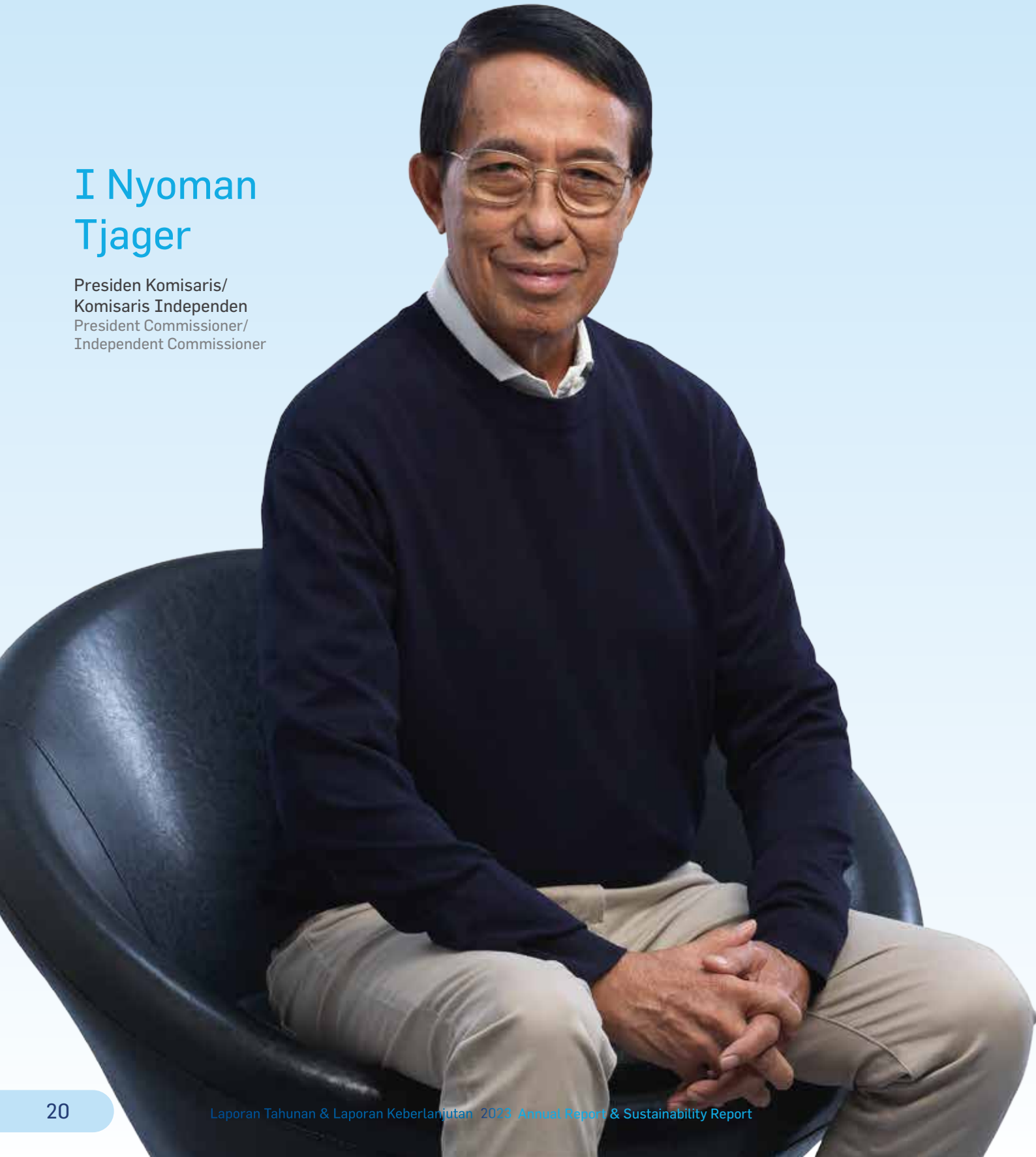

I Nyoman Tjager

Presiden Komisaris/
Komisaris Independen
President Commissioner/
Independent Commissioner

Sejalan dengan transformasi digital yang telah menghasilkan proses bisnis yang semakin efisien dan tepat guna, Dewan Komisaris menilai inisiatif Perseroan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya untuk meningkatkan energi bersih dalam sektor transportasi sangat tepat. Melalui beragam inisiatif strategis tersebut Perseroan berhasil mencapai pertumbuhan positif di tahun 2023. Dewan Komisaris berpandangan Direksi telah menjalankan strategi bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Tahunan 2023. Kami menilai Direksi secara umum telah berhasil mencapai target yang ditetapkan.

In line with the digital transformation, which has resulted in more efficient and appropriate business processes, the Board of Commissioners finds the Company's initiatives to support sustainable development goals, particularly the increase of clean energy in the transportation sector, to be highly suitable. The Company has achieved good growth in 2023 as a result of these various strategic initiatives. The Board of Directors has developed a business plan in line with the 2023 Annual Business Plan. We believe that the Board of Directors in general has succeeded in achieving the targets set.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa-Nya Perseroan dapat menutup tahun 2023 dengan pencapaian kinerja yang memuaskan dan membangun fondasi pertumbuhan berkelanjutan yang semakin kuat.

Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan, memberikan nasihat dan saran atas pengelolaan usaha oleh Direksi sepanjang tahun 2023. Kami juga terus menekankan kepada Direksi agar senantiasa melaksanakan praktik terbaik tata kelola perusahaan dalam mengembangkan usaha Perseroan.

Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

We praise God Almighty for through His grace; the Company was able to journey through 2023 with satisfactory performance achievements and establish a stronger foundation for sustainable growth.

Throughout 2023, the Board of Commissioners performed supervisory, counsel and advisory functions on business management by the Board of Directors. We also continue to urge the Board of Directors to employ best practices in corporate governance in developing the Company's business.

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report

Mewakili Dewan Komisaris, izinkan kami menyampaikan Laporan Dewan Komisaris atas pengelolaan usaha Perseroan. Laporan ini antara lain berisi tentang aktivitas fungsi pengawasan Dewan Komisaris, penilaian terhadap kinerja Direksi, pandangan terhadap prospek usaha Perseroan dan pandangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan selama tahun buku 2023.

Representing the Board of Commissioners, please allow us to submit the Board of Commissioners' Report on the management of the Company's business. This report includes, among others, the activities of the supervisory function of the Board of Commissioners, an assessment of the performance of the Board of Directors, views on the Company's business prospects and views on the implementation of corporate governance during the 2023 fiscal year.

ANALISIS ATAS KINERJA DIREKSI

Perseroan terus melanjutkan transformasi digital dengan meluncurkan *Credit Approval Engine* untuk menghasilkan proses bisnis yang semakin efisien dan tepat guna. Implementasi sistem ini berdampak pada kualitas pembiayaan yang semakin baik karena calon konsumen yang disetujui pembiayaannya memiliki rekam jejak yang bersih dan kemampuan memadai dalam menunaikan kewajibannya.

BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ANALYSIS

The Company continues its digital transformation by launching the Credit Approval Engine to produce more efficient and appropriate business processes. As prospective customers who are accepted for financing have a clean track record and the ability to execute their obligations, the deployment of this system has an impact on better financing quality.

Sejalan dengan transformasi digital, Dewan Komisaris menilai inisiatif Perseroan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya untuk meningkatkan energi bersih dalam sektor transportasi sangat tepat. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga pembiayaan Perseroan turut membantu konsumen yang ingin memiliki kendaraan listrik roda dua yang rendah emisi karbon.

In line with digital transformation, the Board of Commissioners considers the Company's initiatives to support sustainable development goals, particularly to increase clean energy in the transportation sector, are highly appropriate. In its capacity as a financing institution, the Company also assists consumers who seek to acquire two-wheeled electric vehicles with minimal carbon emissions.

Transisi menuju energi bersih merupakan agenda global dan nasional yang perlu mendapat dukungan dari dunia usaha. Oleh karena itu, Perseroan terus mencermati perkembangan permintaan dari masyarakat terhadap kendaraan listrik roda dua. Perseroan sangat siap untuk meningkatkan pembiayaan kendaraan listrik sesuai dengan dinamika pasar.

The transition to clean energy is a global and national objective that requires a commercial backing. As such, the Company continues to monitor the public's demand for two-wheeled electric vehicles. In response to market dynamics, the Company is well poised to boost electric vehicle financing.

Untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, Perseroan memperluas jaringan kantor cabang di beberapa wilayah yang potensial dan melakukan relokasi kantor cabang untuk lebih meningkatkan produktivitas. Penambahan maupun relokasi kantor cabang telah melalui kajian yang mendalam baik terkait perekonomian maupun prospek usaha.

To get closer to the community, the Company expanded its branch office network in several potential areas and relocated branch offices to further increase productivity. The addition and relocation of branch offices has gone through an in-depth study both related to the economy and business prospects.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia juga terus dilakukan melalui beragam kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk mendukung layanan prima kepada konsumen. Pengembangan jenjang karir karyawan berbasis meritokrasi juga terus diperkuat untuk memberikan kesempatan kepada karyawan terbaik meningkatkan *level* jabatan.

Improving the quality of human resources also continues to be carried out through various education and training activities to support excellent service to consumers. The development of meritocracy-based employee career paths also continues to be strengthened to provide opportunities for the best employees to increase position levels.

Dalam aspek pemasaran kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan digital terus diperkuat untuk meningkatkan penetrasi pasar dari produk-produk Perseroan. Strategi kolaborasi dengan mitra digital ini tepat karena tren digitalisasi semakin meningkat di tengah masyarakat karena lebih mudah, cepat dan efisien.

In the marketing aspect, collaboration with digital enterprises is being strengthened to increase market penetration of the Company's products. This collaboration strategy with digital partners is appropriate as the digitization trend in the community grows since it is easier, faster and more efficient.

Melalui beragam inisiatif strategis tersebut Perseroan berhasil mencapai pertumbuhan positif di tahun 2023. Pada tahun 2023, Perseroan mencatatkan pendapatan sebesar Rp2,00 triliun. Laba sebelum beban pajak penghasilan sebesar Rp320,05 miliar dan laba tahun berjalan sebesar Rp236,41 miliar. Laba komprehensif tahun berjalan tercatat sebesar Rp240,08 miliar.

Through these various strategic initiatives, the Company has succeeded in achieving positive growth in 2023. As of in 2023, the Company recorded revenue of Rp2.00 trillion. Income before income tax expense amounted to Rp320.05 billion and income for the year reached Rp236.41 billion. Comprehensive income for the year was recorded at Rp240.08 billion.

Total aset sebesar Rp6,64 triliun, naik sebesar 17,52% dari tahun 2022 sebesar Rp5,65 triliun. Pertumbuhan aset terutama dikontribusikan dari piutang pembiayaan. Liabilitas sebesar Rp4,94 triliun dan Ekuitas sebesar Rp1,70 triliun.

Total assets stood at Rp6.64 trillion, an increase of 17.52% from Rp5.65 trillion in 2022. Asset growth was mainly contributed by financing receivables. Liabilities amounted to Rp4.94 trillion and Equity was Rp1.70 trillion.

Dewan Komisaris berpandangan Direksi telah menjalankan strategi bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Tahunan tahun 2023. Kami menilai Direksi secara umum telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Sinergi Direksi dengan Dewan Komisaris juga berjalan dengan baik di mana Direksi senantiasa melaksanakan saran dan nasihat dari kami.

In our view, the Board of Directors has implemented a business strategy in line with the 2023 Annual Business Plan. It is our opinion that, in all counts, the Board of Directors was successful in achieving its set targets. The synergy between the Board of Directors and the Board of Commissioners is also working effectively, as the Board of Directors consistently takes our opinions and advise into account.

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report

PENGAWASAN IMPLEMENTASI STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan usaha Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-Komite dibawahnya, yakni Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko. Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan usaha yang dilakukan oleh Direksi.

Mekanisme fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan dalam Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan dengan Direksi. Selama tahun buku 2023, Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan sebanyak 11 (sebelas) kali dan Rapat Gabungan dengan Direksi sebanyak 11 (sebelas) kali. Frekuensi rapat sudah memenuhi regulasi yang berlaku.

Dalam rapat-rapat tersebut, Dewan Komisaris membahas antara lain implementasi strategi usaha, pencapaian target dalam Rencana Bisnis Tahunan, praktik tata kelola, pengembangan Sumber Daya Manusia, tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan usaha dan lain sebagainya. Seluruh keputusan rapat telah didokumentasikan dalam notulensi rapat.

Dewan Komisaris telah memberikan saran dan nasihat kepada Direksi untuk terus menjalankan praktik terbaik tata kelola dalam mengelola usaha Perseroan. Terhadap kinerja komite-komite yang berada dibawahnya, Dewan Komisaris berpandangan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam membantu Dewan Komisaris.

ANALISIS ATAS PROSPEK USAHA

Perseroan menyusun prospek usaha yang dilakukan oleh Direksi dengan menganalisis kondisi makro ekonomi di tingkat global dan nasional. Perkembangan industri pembiayaan juga menjadi pertimbangan utama. Selain itu, keunggulan Perseroan dan peluang usaha yang tersedia juga menjadi dasar dalam merumuskan prospek usaha Perseroan di tahun 2024.

OVERSIGHT OF BUSINESS STRATEGY

In carrying out the supervisory function of business management, the Board of Commissioners is assisted by the Committees, namely the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee as well as the Risk Oversight Committee. The Board of Commissioners has carried out the supervisory function for the business management carried out by the Board of Directors.

The supervisory function mechanism by the Board of Commissioners is done through the Meetings and Joint Meetings with the Board of Directors. During the 2023 fiscal year, the Board of Commissioners Meeting has been held 11 (eleven) times and the Joint Meeting with the Board of Directors 11 (eleven) times. The frequency of meetings has met applicable regulations.

The Board of Commissioners discussed, among others, the implementation of business plans, the achievement of Annual Business Plan's targets, governance practices, human resource development, challenges and constraints in business management, and other topics at these meetings. All meeting decisions have been documented in meeting minutes.

The Board of Commissioners has provided advice and opinion to the Board of Directors to continue to implement best governance practices in managing the Company's business. Regarding the performance of its committees, the Board of Commissioners is of the view that the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee along Risk Oversight Committee have carried out their duties properly in assisting the Board of Commissioners.

ANALYSIS OF BUSINESS PROSPECTS

The Board of Directors evaluates business prospects by analyzing macroeconomic conditions at the global and national levels. The growth of the financing industry is also a major consideration. Moreover, the Company's advantages and potential business opportunities serve as the foundation for determining the Company's business prospects in 2024.

Perekonomian global diproyeksi menghadapi risiko ketidakpastian yang meningkat di tahun 2024. Sumber ketidakpastian antara lain berasal dari pengetatan penyaluran kredit, tetap tingginya suku bunga acuan *Fed Fund Rate* dan inflasi serta ketegangan geopolitik di beberapa wilayah.

In 2024, the global economy is projected to encounter increased uncertainty risks. Sources of uncertainty include tighter lending, persistently high Fed Fund Rate benchmark interest rates and inflation as well as geopolitical tensions in several regions.

Dalam kondisi ekonomi global yang cenderung melambat, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,2% dan inflasi sebesar 2,8% sebagaimana tertuang dalam APBN 2024. Sumber pertumbuhan terutama berasal dari sisi konsumsi karena daya beli masyarakat yang tetap terjaga dan investasi asing yang meningkat.

In a weakening global economy, the government forecasts Indonesia's economic growth to be 5.2% and inflation to be 2.8% in 2024, as stated in the State Budget. Growth is primarily driven by consumption, as a result of sustained public purchasing power and increased foreign investment.

Di industri pembiayaan, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) memproyeksi pertumbuhan piutang pembiayaan *multif-finance* sebesar 12-13% pada tahun 2024. Terdapat dua hal yang menjadi katalis pembiayaan *multi-finance* pada tahun depan, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan daya beli masyarakat.

In the financing industry, the Indonesian Financial Services Association (APPI) forecasts a 12%-13% increase in multifinance financing receivables in 2024. Next year's multifinance financing will be driven by two catalyst factors: 5% economic growth and people's purchasing power.

Usaha pembiayaan sepeda motor baru tetap menjadi fokus utama Perseroan. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menargetkan penjualan sepeda motor baru sebesar 6,2 juta unit sampai dengan 6,5 juta unit, sedikit lebih tinggi dari realisasi penjualan tahun 2023 sebesar 6,2 juta unit kendaraan.

New motorcycle financing business remains the Company's main focus. The Indonesian Motorcycle Industry Association (AISI) targets new motorcycle sales of 6.2 million units to 6.5 million units, slightly higher than the projected sales realization of 6.2 million vehicles in 2023.

Proyeksi penjualan sepeda motor yang meningkat pada tahun 2024 merupakan peluang yang bagus bagi usaha Perseroan. Kerja sama dengan mitra seperti *dealer* maupun perusahaan mitra digital yang telah terjalin dengan baik selama ini akan lebih dioptimalkan untuk memanfaatkan potensi usaha tersebut.

The projected increase in motorcycle sales in 2024 is a good opportunity for the Company's business. Cooperation with partners such as dealers and digital partners that have been well established will be further optimized to take advantage of the potential of this business.

Perseroan akan terus melanjutkan implementasi *Credit Approval Engine* yang terbukti dapat mempercepat proses bisnis *end to end* dan menjaga kualitas pembiayaan. Sistem digital ini didukung dengan SDM yang memiliki kompetensi memadai untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan layanan kepada konsumen.

The Company will continue to implement a Credit Approval Engine that is proven to accelerate the end-to-end business process and maintain the quality of financing. This digital system is supported by human resources who have adequate competence to provide convenience and comfort of service to customers.

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report

Untuk mengoptimalkan peluang usaha, Perseroan akan meningkatkan pembiayaan kendaraan listrik roda dua sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Seluruh infrastruktur dan jaringan yang dimiliki Perseroan telah siap untuk membiayai kendaraan listrik dengan menyesuaikan sisi permintaan dari calon konsumen atau masyarakat.

To optimize business opportunities, the Company will increase two-wheeled electric vehicle financing in accordance with the existing developments. All infrastructure and networks owned by the Company are ready to finance electric vehicles by adjusting the demand of potential consumers or the public.

Perluasan jaringan kantor cabang di daerah-daerah potensial juga akan dilakukan untuk mengoptimalkan potensi usaha dan lebih mendekatkan layanan Perseroan kepada konsumen. Penambahan kantor cabang diyakini dapat meningkatkan penetrasi pasar dari produk-produk Perseroan.

The expansion of the branch office network in potential areas will also be carried out to optimize business potential and bring the Company's services closer to consumers. The addition of branch offices is believed to increase market penetration of the Company's products.

Dewan Komisaris mendukung prospek usaha yang disusun oleh Direksi. Kami menilai prospek usaha telah dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan keunggulan internal secara obyektif. Prospek usaha Perseroan pada tahun 2024 cukup realistis dan dapat dicapai serta masih dalam koridor dan Rencana Bisnis Tahunan.

We endorse the Board of Directors' business prospects. We are of the opinion that business prospects have been developed objectively by taking into account external and internal factors. The Company's business prospects in 2024 are reasonable and achievable, and they remain within the parameters of the Annual Business Plan.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Perseroan telah melaksanakan praktik terbaik tata kelola perusahaan dalam setiap aspek operasional. Secara struktur tata kelola, organ utama tata kelola perusahaan yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi serta Dewan Pengawas Syariah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

VIEWS ON GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The Company has implemented best corporate governance practices in every aspect of operations. On governance structure, the main organs of good corporate governance, namely the General Meeting Shareholders, The Board of Commissioners and Board of Directors as well as Sharia Supervisory Board have carried out their respective duties and functions in accordance with prevailing laws and regulations.

Dari sisi proses tata kelola Perseroan telah menjalankan standar operasi prosedur sesuai dengan aturan internal perusahaan dan mematuhi regulasi. Setiap organ Perseroan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai pedoman kerja. Sementara dari sisi hasil, Perseroan mencapai pertumbuhan usaha yang sesuai dengan yang ditargetkan.

In terms of governance process, the Company has carried out standard operating procedures in line with internal rules and complies with regulations. Each organ of the Company has carried out its duties and functions in line with work guidelines. Meanwhile, in terms of outcomes, the Company achieved business growth in accordance with the target.

Perseroan terus memperkuat pelaksanaan manajemen risiko untuk mendukung keberlanjutan usaha. Selain itu, melakukan peninjauan terhadap Pedoman *Whistleblowing System* untuk menghasilkan lingkungan bekerja yang lebih akuntabel sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Whistleblowing System dihadirkan untuk menampung, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan pelapor mengenai tindakan pelanggaran atas pengelolaan usaha Perseroan. Sistem ini telah dilengkapi dengan mekanisme pelaporan, proses tindak lanjut atas pelaporan sampai perlindungan terhadap pelapor.

Sepanjang tahun 2023, terdapat 54 (lima puluh empat) jumlah pengaduan yang dilaporkan dalam *whistleblowing system* baik di kantor pusat maupun kantor cabang. Perseroan telah menindaklanjuti seluruh aduan dari pelapor dan menyelesaikannya sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku dan pedoman internal Perseroan.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa Perseroan telah melaksanakan tata kelola dan manajemen risiko dengan baik untuk mendukung pertumbuhan usaha berkelanjutan. Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris dan senantiasa menjunjung tinggi kode etik.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2023, komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan mengalami perubahan dan susunan anggota Dewan Komisaris yang efektif menjabat per 31 Desember 2023 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 93 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris/
Komisaris Independen : I Nyoman Tjager
Komisaris : Thilagavathy Nadason
Komisaris Independen : Myrnie Zachraini Tamin

The Company continues to strengthen the implementation of risk management to support business sustainability. The Company also reviews the Whistleblowing System Guidelines to produce a more accountable work environment as part of implementing good governance principles.

The Whistleblowing System is presented to accommodate, process and follow up, as well as make reports on information submitted by the whistleblower regarding violations of the Company's business management. This system has been equipped with a reporting mechanism, a follow-up process for reporting to protection of whistleblowers.

Throughout 2023, 54 (fifty-four) complaints were reported in the whistleblowing system both at head offices and branch offices. The Company has followed up all complaints from whistleblowers and resolved them in compliance with prevailing laws and regulations and the Company's internal guidelines.

In our opinion, the Company has implemented good governance and risk management to support sustainable business growth. The Board of Commissioners has carried out its duties and functions in line with the Charter of the Board of Commissioners and continued to uphold the code of conduct.

BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION CHANGES

In 2023, the composition of the Company's Board of Commissioners has changed and the effective composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2023, based on the Deed of Statement of Meeting Decision of the Company No. 93 dated March 30, 2023, made before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta Administrative City, is as follows:

President Commissioner/
Independent Commissioner : I Nyoman Tjager
Commissioner : Thilagavathy Nadason
Independent Commissioner : Myrnie Zachraini Tamin

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report

APRESIASI
Mengakhiri laporan ini, kami atas nama Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada Direksi yang telah menjalankan pengelolaan usaha Perseroan dengan sangat baik. Ungkapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh karyawan yang telah bekerja dengan tulus untuk memberikan yang terbaik kepada Perseroan.

Tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada vendor, mitra kerja dan seluruh pihak yang telah mendukung usaha Perseroan. Kepada seluruh konsumen setia Perseroan kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini. Kami meyakini usaha Perseroan akan terus berkembang dengan dukungan dari pemegang saham dan pemangku kepentingan.

APPRECIATION
Concluding this report, we representing the Board of Commissioners, would like to express our gratitude to the Board of Directors for carrying out excellent business management. We also express our gratitude to all employees who have worked sincerely to provide the best to the Company.

We would like to express our gratitude to all of the vendors, business partners, and all other parties who have supported the Company's business. We would like to convey our appreciation to all of our loyal customers for the continued support. We are confident that with the support of shareholders and stakeholders, the Company's business will continue to thrive.

Jakarta, Maret | March 2024

Atas Nama Dewan Komisaris
On behalf of the Board of Commissioners



I Nyoman Tjager
Presiden Komisaris/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



01. I Nyoman Tjager
Presiden Komisaris/
Komisaris Independen
President Commissioner/
Independent Commissioner

02. Thilagavathy Nadason
Komisaris
Commissioner

03. Myrnie Zachraini Tamin
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Laporan Direksi
Board of Directors Report



Djaja
Suryanto Sutandar

Presiden Direktur
President Director

Transformasi digital yang dilakukan secara berkesinambungan dengan meluncurkan *credit approval engine* yang didukung dengan kompetensi Sumber Daya Manusia berhasil meningkatkan kinerja Perseroan pada tahun 2023. Perseroan juga menerapkan strategi perluasan jaringan kantor untuk lebih mendekatkan layanan kepada konsumen yang berdampak dalam meningkatkan penetrasi pasar. Selain itu, Perseroan terus memperkuat permodalan melalui penerbitan obligasi berkelanjutan untuk mendukung ekspansi bisnis yang direncanakan.

Continuous digital transformation by launching a credit approval engine supported by Human Resources competencies has succeeded in improving the Company's performance in 2023. The Company also implements a office network expansion strategy to bring services closer to consumers which has an impact in increasing market penetration. Moreover, the Company continues to strengthen its capital through the issuance of sustainable bonds to support its planned business expansion.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Inisiatif strategis layanan digital yang terus berlanjut dengan meluncurkan *Credit Approval Engine* menjadi katalis pertumbuhan positif yang dicapai Perseroan di tahun 2023. Infrastruktur digital *credit approval engine* menjadikan proses bisnis secara *end to end* lebih efisien dan tepat guna. Selain itu, merupakan filter pertama untuk menjaga kualitas pembiayaan yang semakin baik.

Sistem *credit approval engine* Perseroan telah dilengkapi dengan teknologi terkini yang lebih presisi untuk *profiling* calon konsumen seperti *geotagging* dan biometrik. Dengan implementasi sistem ini, Perseroan memperoleh informasi penting dari calon konsumen untuk membantu pengambilan keputusan memberikan pembiayaan.

Untuk memastikan operasional *credit approval engine* berjalan dengan baik, Perseroan telah melakukan

Dear Distinguished Shareholders and Stakeholders,

The ongoing strategic initiative of digital services by launching the Credit Approval Engine is a catalyst for positive growth achieved by the Company in 2023. Credit Approval Engine digital infrastructure makes end-to-end business processes more efficient and appropriate. Moreover, it is the first filter to maintain better financing quality.

The Company's credit approval engine system has been equipped with the latest technology that is more precise for profiling potential customers, such as geotagging and biometrics. With the implementation of this system, the Company obtains important information from potential customers to assist in making decisions on financing.

To ensure proper performance of credit approval engine operations, the Company has conducted socialization

Laporan Direksi
Board of Directors Report

sosialisasi dan edukasi dalam penggunaannya hingga di *level* surveyor. Selain itu, pada awalnya *credit approval engine* dilakukan secara terbatas di beberapa cabang tertentu. Setelah dilakukan evaluasi dan monitoring, sampai akhir tahun 2023 implementasinya sudah dilaksanakan di seluruh kantor cabang.

and education in its usage up to the surveyor level. In addition, credit approval engine were initially carried out on a limited basis in certain branches. After evaluation and monitoring, the implementation has been carried out in all branch offices as of the end of 2023.

Transformasi digital yang berkelanjutan juga dilakukan Perseroan dalam aspek pemasaran melalui jalinan kerja sama dengan mitra strategis digital seperti *e-commerce, marketplace otomotif, fintech aggregator* dan lainnya. Kolaborasi dalam ekosistem digital ini bertujuan untuk lebih memudahkan konsumen dalam mengakses layanan Perseroan.

Sustainable digital transformation is also carried out by the Company in the marketing aspect through cooperation with digital strategic partners, such as e-commerce, automotive marketplaces, fintech aggregators and others. Collaboration in the digital ecosystem aims to provide consumers with a convenience access to the Company's services.

Selain memperkuat kolaborasi dengan mitra digital, Perseroan mengembangkan jaringan dengan menambah kantor cabang baru di daerah potensial untuk meningkatkan penetrasi pasar dan mendekatkan diri dengan konsumen. Sampai dengan Desember 2023, Perseroan menambah jaringan kantor cabang baru sebanyak 22 kantor dan meningkatkan Kantor Selain Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang sebanyak 14 kantor serta merelokasi kantor cabang sebanyak 15 kantor untuk memberikan layanan yang lebih optimal kepada konsumen.

Apart from strengthening collaboration with digital partners, the Company develops networks by adding new branch offices in potential areas to increase market penetration and get closer to consumers. Until December 2023, the Company added 22 new branch offices, upgraded as many as 14 non-branch offices to branch offices, and relocated 15 branch offices to provide more optimal services to consumers.

Pengembangan digitalisasi layanan dan perluasan jaringan kantor cabang dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan yang dilaksanakan secara kontinu. Peningkatan kompetensi karyawan ini untuk memastikan pelayanan yang diberikan kepada mitra dan konsumen semakin berkualitas.

The development of digitalization of services and expansion of branch office networks is accompanied by improving the quality of human resources through continuous training. The employee competence enhancement is to ensure that the services provided to partners and consumers are of higher quality.

Selain pelatihan kepada karyawan, Perseroan memfasilitasi pelatihan dan pengembangan kompetensi kepada jajaran Direksi, Dewan Komisaris dan organ-organ pendukung tata kelola yaitu Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, maupun anggota-anggota komite di bawah Direksi dan/atau Dewan Komisaris agar lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

In addition to training for employees, the Company facilitates training and competency development for the Board of Directors, Board of Commissioners and governance supporting organs, namely Corporate Secretary, Internal Audit, as well as committee members under the Board of Directors and/or Board of Commissioners to be more optimal in carrying out their duties and functions.

Internalisasi nilai-nilai inti perusahaan yaitu *teamwork, integrity, growth, excellence & efficiency* dan *relationship building* (TIGER) juga terus dilaksanakan oleh Perseroan agar menjadi budaya kerja dalam setiap aktivitas operasional Perseroan.

Inisiatif strategis lain yang telah dilakukan Perseroan adalah mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan transportasi ramah lingkungan melalui pembiayaan motor listrik kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai *(Battery Electric Vehicle)* untuk Transportasi Jalan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023.

TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI PEMBIAYAAN

Perekonomian Dunia dan Indonesia

Perekonomian global pada tahun 2023 bergerak dalam risiko ketidakpastian yang meningkat dengan kecenderungan tumbuh melambat dibanding tahun sebelumnya. Berlarutnya efek pandemi Covid-19, ketegangan geopolitik seperti perang Rusia dengan Ukraina dan kawasan Timur Tengah serta inflasi yang meningkat merupakan sumber utama ketidakpastian pertumbuhan ekonomi dunia.

Dalam mengendalikan laju inflasi, bank sentral menaikkan suku bunga acuan seperti dilakukan The Federal Reserve Amerika Serikat. Suku bunga yang meningkat diikuti dengan kenaikan *yield* obligasi AS yang salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan utang pemerintah. Hal ini berdampak pada menguatnya nilai tukar Dollar AS terhadap mata uang negara lain.

Posisi Dollar AS yang menguat terhadap hampir seluruh mata uang negara lain meningkatkan risiko keluarnya modal asing (*capital flight*) terutama dari negara berkembang. Untuk menjaga kestabilan nilai tukar, bank sentral di banyak negara melakukan operasi moneter dalam jumlah yang cukup signifikan.

Internalization of the corporate core values, namely teamwork, integrity, growth, excellence & efficiency and relationship building (TIGER) is also continuously implemented by the Company in order to become a work culture in every operational activity.

Another strategic initiative that the Company has undertaken is to support the government's efforts in realizing environmentally friendly transportation through financing electric motors to the public. This is in accordance with Presidential Regulation Number 55 of 2019 concerning the Acceleration of the Battery Electric Vehicle Program for Road Transportation as last amended by Presidential Regulation Number 79 of 2023.

ECONOMIC AND FINANCING INDUSTRY REVIEW

Global and Indonesia Economy

In 2023, the global economy moves in the risk of increasing uncertainty with a tendency to slow down compared to the previous year. The protracted effects of the Covid-19 pandemic, geopolitical tensions such as Russia's war with Ukraine and the Middle East region and rising inflation are the main sources of uncertainty in the global economic growth.

In controlling the inflation rate, the central bank raises the benchmark interest rate as done by the United States Federal Reserve. Rising interest rates were followed by an increase in US bond yields, one of which was to meet government debt financing needs. This has an impact on the strengthening of the US Dollar exchange rate against other countries' currencies.

The strengthening position of the US Dollar against almost all currencies of other countries increases the risk of foreign capital flight, particularly from developing countries. To maintain exchange rate stability, central banks in many countries conduct monetary operations in significant amounts.

Laporan Direksi
Board of Directors Report

Pengetatan kredit akibat tingginya suku bunga acuan juga terjadi di tingkat global yang menyebabkan ekspansi dunia usaha terhambat. Perbankan lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan untuk memitigasi risiko kredit. Volume permintaan barang turut menurun sehingga perdagangan global melambat.

Credit tightening due to high benchmark interest rates also occurred at the global level, which hampered business expansion. Banks are more cautious in disbursing financing to mitigate credit risk. The volume of demand for goods also decreased, making the global trade to weaken.

Di tengah risiko ketidakpastian global yang meningkat, perekonomian Indonesia tetap kokoh. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05%. Pertumbuhan ekonomi nasional ditopang dari sektor konsumsi dan investasi.

Amidst the risk of increasing global uncertainty, Indonesia's economy remains solid. Based on the 2023 Central Statistics Agency (BPS) report, Indonesia's economy grew by 5.05%. National economic growth is supported by consumption and investment.

Daya beli masyarakat tetap terjaga dan optimis terhadap perkembangan ekonomi nasional yang tercermin dari hasil survei konsumen. Upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan harga barang dan memberikan insentif kepada kelompok rentan turut berkontribusi pada meningkatnya optimisme konsumen.

People's purchasing power is maintained and optimistic about national economic development as reflected in the results of consumer surveys. The government's efforts to maintain price stability and provide incentives to vulnerable groups have contributed to increasing consumer optimism.

Investasi yang tumbuh positif sepanjang tahun 2023 disebabkan berlanjutnya penyelesaian proyek-proyek strategis nasional seperti infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, proyek infrastruktur yang diinisiasi pemerintah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah di Indonesia dan sekaligus pemerataan ekonomi.

Positive investment growth throughout 2023 is due to the continued completion of national strategic projects such as infrastructure to support economic growth. In addition, infrastructure projects initiated by the government aim to reduce development inequality between regions in Indonesia and at the same time economic equity.

Faktor pembentuk pertumbuhan ekonomi yang terdampak dari situasi global adalah ekspor-impor barang yang mengalami kontraksi. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Desember 2023 mencapai US$258,82 miliar atau turun 11,33 % dibanding periode yang sama tahun 2022. Sementara ekspor nonmigas mencapai US$242,90 miliar atau turun 11,96%.

The factor generating economic growth affected by the global situation is the export-import of goods that has contracted. Cumulatively, Indonesia's export value from January to December 2023 reached US$258.82 billion, decreased 11.33% compared to the same period in 2022. Meanwhile, non-oil and gas exports reached US$242.90 billion, decreased 11.96%.

Penurunan riil ekspor disebabkan berkurangnya permintaan dari negara mitra dagang utama Indonesia, terutama Tiongkok dan penurunan harga komoditas andalan seperti batu bara dan CPO. Kondisi ekonomi domestik Tiongkok yang melambat menyebabkan permintaan barang dari negara lain turut melemah.

The decline in export demand was due to reduced demand from Indonesia's main trading partner countries, particularly China and lower prices of mainstay commodities, such as coal and CPO. China's slowing domestic economic condition has caused demand for goods from other countries to weaken.

Sementara nilai impor Indonesia selama tahun 2023 (Januari-Desember) mencapai US$221,88 miliar, turun 6,5% dibandingkan tahun 2022 sebesar US$237,45 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya impor migas US$4.586,0 juta (11,35%) dan nonmigas US$10.975,4 juta (5,57%). Penurunan nilai impor migas dipicu oleh turunnya impor seluruh komponen migas, yaitu minyak mentah US$313,3 juta (2,73%), hasil minyak US$3.059,7 juta (12,71%), dan gas US$1.213,0 juta (24,81%).

The value of Indonesia's imports in 2023 (January-December) reached US$221.88 billion, down 6.5% compared to US$237.45 billion in 2022. This decline was caused by a decrease in oil and gas imports of US$4,586.0 million (11.35%) and non-oil and gas imports of US$10,975.4 million (5.57%). The decline in the value of oil and gas imports was triggered by the decline in imports of all oil and gas components, namely crude oil US$313.3 million (2.73%), oil products US$3,059.7 million (12.71%), and gas US$1,213.0 million (24.81%).

Berdasarkan klasifikasi lapangan usaha, sektor transportasi dan pergudangan mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 13,96% dan diikuti jasa lainnya sebesar 10,52%. Pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan disebabkan meningkatnya mobilitas masyarakat, perdagangan melalui *platform* digital, penyelenggaraan *event* internasional dan persiapan pemilu 2024.

Based on business sector classification, the transportation and warehousing sector recorded the highest growth of 13.96%, followed by other services at 10.52%. The growth in the transportation and warehousing sector was due to increased public mobility, trade through digital platforms, the organization of international events, and preparations for the 2024 elections.

Laju inflasi tercatat sebesar 2,61% di tahun 2023. Penyumbang utama inflasi adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras, cabai merah, rokok kretek filter, cabai rawit, dan bawang putih. Namun demikian, laju inflasi masih dalam kisaran target pemerintah di *level* 2% sampai dengan 4%.

The inflation rate stood at 2.61% in 2023. The main contributors to inflation are food, beverages and tobacco. The main contributors to inflation in this group are rice, red chili, filter clove cigarettes, cayenne pepper, and garlic. Nevertheless, the inflation rate remains within the government's target range of 2% to 4%.

Untuk mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah, Bank Indonesia menaikan *7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR)* atau suku bunga acuan sebesar 50 basis point menjadi 6% pada Oktober 2023 dan tetap bertahan hingga akhir tahun 2023. Kenaikan suku bunga acuan ini juga bertujuan untuk mencegah keluarnya arus modal dari pasar domestik akibat menguatnya nilai tukar Dollar AS.

To control inflation and maintain the rupiah exchange rate, Bank Indonesia raised the 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) or the benchmark interest rate by 50 basis points to 6% in October 2023 and remain stable until the end of 2023. The increase in the benchmark interest rate also aims to prevent capital outflows from the domestic market due to the strengthening of the US Dollar exchange rate.

Upaya stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi juga dilakukan dengan pendalaman pasar keuangan melalui penerbitan instrumen moneter Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Selain itu, penerbitan regulasi tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam agar lebih banyak rupiah yang beredar di dalam negeri.

Efforts to stabilize the rupiah exchange rate and control inflation are also carried out through financial market deepening through the issuance of monetary instruments of Bank Indonesia Rupiah Certificates (SRBI). Furthermore, the issuance of regulations on Foreign Exchange from Natural Resources Exports, allowing more rupiah to circulate in the country.

Laporan Direksi
Board of Directors Report

Perkembangan Industri Pembiayaan

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, *outstanding* piutang pembiayaan - neto (konvensional dan syariah) sebesar Rp470,86 triliun, meningkat sebesar 13,23% secara tahunan dari tahun 2022 sebesar Rp415,86 triliun. Piutang pembiayaan konvensional neto tercatat sebesar Rp445,95 triliun dan piutang pembiayaan syariah sebesar Rp24,91 triliun.

Piutang pembiayaan konvensional sebagian besar berasal dari pembiayaan multiguna dan diikuti dengan pembiayaan investasi, modal kerja, dan pembiayaan lainnya. Rinciannya pembiayaan multiguna sebesar Rp245,22 triliun, atau 54,99% dari total outstanding pembiayaan kovensional. Piutang pembiayaan investasi sebesar Rp154,35 triliun, pembiayaan modal kerja Rp45,56 triliun, dan pembiayaan lainnya sebesar Rp823 miliar.

Rasio-rasio keuangan industri pembiayaan tetap positif di tahun 2023. Rasio pembiayaan terhadap aset *(financing to asset ratio*/FAR) tercatat sebesar 85,16%, dan gearing ratio sebesar 2,26 kali.

Industri pembiayaan nasional juga mampu mengelola risiko kredit yang ditunjukan dengan non performing financing (NPF) sebesar 2,44%. Selain itu, pengelolaan usaha yang efisien dengan rasio biaya operasional atas pendapatan operasional (BOPO) sebesar 76,89%. Implementasi digitalisasi layanan turut mendukung operasional usaha yang efisien di industri pembiayaan.

Kemampuan industri untuk memberikan nilai lebih kepada pemegang saham tetap terjaga dengan pencapaian imbal hasil atas aset (*return on assets*/ ROA) dan imbal hasil atas ekuitas (*return on equity*/ ROE) masing-masing sebesar 5,58% dan 14,96%. Hal ini menunjukan kemampuan industri dalam mengoptimalkan peluang pertumbuhan usaha.

Di segmen pembiayaan sepeda motor, penjualan sepeda motor yang meningkat berdampak terhadap naiknya pembiayaan sepeda motor baru. Berdasarkan data

Development of Financing Industry

Based on data from the Financial Services Authority (OJK) in 2023, outstanding financing receivables - net (conventional and sharia) was Ro470.86 trillion, an increase of 13.23% annually from Rp415.86 trillion in 2022. Net conventional financing receivables were recorded at Rp445.95 trillion and sharia financing receivables amounted to Rp24.91 trillion.

Conventional financing receivables mostly derived from multipurpose financing and are followed by investment financing, working capital, and other financing. The details are multipurpose financing amounting to Rp245.22trillion, or 54.99% of the total outstanding conventional financing. Investment financing receivables amounted to Rp154.35 trillion, working capital financing was Rp45.56 trillion, and other financing reached Rp823 billion.

The financial ratios of the financing industry will remain positive in 2023. The financing to asset ratio (FAR) was recorded at 85.16%, and gearing ratio at 2.26 times.

The national financing industry is also able to manage credit risk as indicated by non-performing financing (NPF) of 2.44%. In addition, efficient business management with an operating expense to operating income ratio (BOPO) of 76.89%. The implementation of service digitalization also supports efficient business operations in the financing industry.

The industry's ability to provide more value to shareholders was maintained with the achievement of return on assets (ROA) and return on equity (ROE) of 5.58% and 14.96% respectively. This indicates the industry's ability to optimize business growth opportunities.

In the motorcycle financing segment, increasing motorcycle sales have an impact on the increase in new motorcycle financing. The Indonesian Motorcycle

Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) pada tahun 2023, penjualan sepeda motor di pasar dalam negeri sebanyak 6,24 juta unit, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5,22 juta unit.

Penjualan sepeda motor untuk ekspor pada tahun 2023 tercatat sebesar 570.004 ribu unit, dimana pada tahun 2022 sebanyak 743.551 unit. Penjualan sepeda motor skuter mendominasi pasar domestik dan pasar ekpsor. Pencapaian penjualan motor di tahun 2023 tersebut sesuai dengan target AISI yang menargetkan penjualan sepeda motor sebesar 6,2 juta unit, lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya.

ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN

Transformasi digital berkelanjutan dengan meluncurkan *credit approval engine* yang didukung dengan kompetensi SDM berhasil meningkatkan kinerja Perseroan pada tahun 2023. Digitalisasi membuat proses bisnis lebih efisien dan menjadikan Perseroan memiliki daya saing yang lebih kuat di industri pembiayaan.

Beriringan dengan transformasi digital Perseroan menerapkan strategi perluasan jaringan kantor cabang untuk lebih mendekatkan layanan kepada konsumen yang berdampak dalam meningkatkan penetrasi pasar. Kemudahan layanan kepada konsumen juga terus dilakukan Perseroan melalui kerjasama dengan mitra-mitra strategis digital.

Perseroan juga terus memperkuat permodalan melalui penerbitan obligasi berkelanjutan untuk mendukung ekspansi bisnis yang direncanakan. Kondisi perekonomian nasional yang tetap kondusif dan terjaganya daya beli masyarakat berkontribusi dalam menopang sisi permintaan pembiayaan oleh masyarakat.

Inisiatif strategis yang dilakukan oleh Perseroan berdampak positif terhadap capaian kinerja keuangan. Pada tahun 2023, Perseroan mencatatkan pendapatan sebesar Rp2,00 triliun, naik dibanding tahun 2022 sebesar Rp1,69 triliun. Pendapatan terbesar berasal

Industry Association (AISI) stated that in 2023, motorcycle sales in the domestic market reached 6.24 million units, an increase from the previous year of 5.22 million units.

2023 motorcycle export sales were recorded at 570,004 thousand units, of which in 2022 were 743,551 units. Sales of motorcycle scooters dominate the domestic market and the export market. The achievement of motorcycle sales in 2023 is in line with AISI's target of motorcycle sales of 6.2 million units, higher than the realization of the previous year.

COMPANY PERFORMANCE ANALYSIS

Sustainable digital transformation by launching a credit approval engine supported by HR competencies has succeeded in improving the Company's performance in 2023. Digitalization makes business processes more efficient and leads the Company to have a stronger competitiveness in the financing industry.

Align with digital transformation, the Company implements a strategy of expanding its branch office network to bring services closer to consumers which has an impact on increasing market penetration. The Company also continues to provide convenience service to consumers through collaboration with digital strategic partners.

The Company also continues to strengthen its capital through the issuance of sustainable bonds to support its planned business expansion. National economic conditions that remain conducive and maintained public purchasing power contribute to supporting the public financing demand.

The strategic initiatives undertaken by the Company have a positive impact on the achievement of financial performance. As of 2023, the Company recorded revenue of Rp2.00 trillion, an increase compared to Rp1.69 trillion in 2022. The largest income derives from

Laporan Direksi
Board of Directors Report

dari pembiayaan konsumen, modal usaha, dan sewa pembiayaan. Beban sebesar Rp1,67 triliun, naik dari tahun 2022 sebesar Rp1,41 triliun. Komponen terbesar beban adalah beban umum dan administrasi yang diikuti gaji dan tunjangan.

Perseroan membukukan laba sebelum beban pajak penghasilan sebesar Rp320,05 miliar. Laba tahun berjalan sebesar Rp236,41 miliar, naik sebesar 19,64% dari tahun 2022 sebesar Rp197,60 miliar. Laba komprehensif tahun berjalan tercatat sebesar Rp240,08 miliar.

Total aset sebesar Rp6,64 triliun, naik sebesar 17,52% dari tahun 2022 sebesar Rp5,65 triliun. Pertumbuhan aset terutama dikontribusikan dari piutang pembiayaan konsumen - neto sebesar Rp3,59 triliun, piutang pembiayaan modal usaha - neto sebesar Rp51,89 miliar, dan piutang sewa pembiayaan - neto sebesar Rp2,29 triliun.

Liabilitas sebesar Rp4,94 triliun, naik sebesar 19,57% dari tahun 2022 sebesar Rp4,13 triliun. Peningkatan liabilitas terutama disebabkan dari naiknya komponen utang bank dan utang obligasi untuk mendukung ekspansi usaha Perseroan. Ekuitas sebesar Rp1,70 triliun, naik sebesar 11,94% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,52 triliun.

PERANAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Direksi telah menyusun sasaran dan strategi bisnis dalam jangka panjang, menengah dan pendek yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Tahunan (RBT). Selanjutnya, RBT diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan pengesahan dari Dewan Komisaris, Direksi menurunkan RBT keseluruh jenjang organisasi untuk direalisasikan dalam bisnis Perseroan.

Perseroan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RBT di dalam Rapat Direksi maupun Rapat Gabungan dengan Dewan

consumer financing, capital financing, and finance lease. The expenses reached Rp1.67 trillion, an increase from Rp1.41 trillion in 2022. The largest component of the expenses is the general and administrative expenses followed by salaries and benefits.

The Company booked income before income tax expense of Rp320.05 billion. The income for the year was Rp236.41 billion, a increase of 19.64% from Rp197.60 billion in 2022. Comprehensive income for the year was recorded at Rp240.08 billion.

Total assets amounted to Rp6.64 trillion, an increase of 17.52% from Rp5.65 trillion in 2022. Asset growth was mainly contributed by consumer financing receivables - net of Rp3.59 trillion, capital financing receivables - net of Rp51.89 billion, and finance lease receivables - net of Rp2.29 trillion.

Liabilities amounted to Rp4.94 trillion, an increase of 19.57% from Rp4.13 trillion in 2022. The increase in liabilities was mainly attributable to the increasing components of bank loans and bonds payable to support the Company's business expansion. Equity amounted to Rp1.70 trillion, an increase of 11.94% from the previous year of Rp1.52 trillion.

BOARD OF DIRECTORS ROLE IN THE FORMULATION OF STRATEGIC STRATEGIES AND POLICIES

The Board of Directors has formulated long-term, medium-term, and short-term business objectives and strategies, which are outlined in the Annual Business Plan (ABP). Subsequently, the ABP is submitted to the Board of Commissioners for approval. Following this approval, the Board of Directors cascades the ABP throughout all levels of the organization to be implemented in the Company's business operations.

The Company strives to conduct regular monitoring and evaluation of the implementation of RBT in the Board of Directors Meetings and Joint Meetings with the Board of

Komisaris. Dinamika kondisi eksternal dan internal menjadi pertimbangan Direksi dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis pengelolaan usaha Perseroan.

Commissioners. The dynamics of external and internal conditions are considered by the Board of Directors in implementing strategic policies for the Company's business management.

PERBANDINGAN ANTARA HASIL DAN TARGET

Direksi telah berupaya dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut pencapaian target dan realisasi Perseroan selama tahun 2023:

COMPARISON BETWEEN RESULTS AND TARGETS

The Board of Directors has strived to achieve the performance targets that have been set. The following are the achievements of the Company's targets and realization during 2023:

Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiahs

Uraian Description	*Target*	Realisasi Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)
Pendapatan | Revenues	1.960.412	1.995.410	101,79
Beban | Expenses	1.660.769	1.672.801	100,72
Pembiayaan | Financing	5.217.356	5.844.995	112,03
Aset | Assets	6.082.162	6.635.715	109,10
Liabilitas | Liabilities	4.446.402	4.939.793	111,10
Ekuitas | Equity	1.635.760	1.695.922	103,68
Laba Tahun Berjalan | Income for the Year	230.755	236.407	102,45

Dari sisi *top line* dan *bottom line*, Direksi berhasil melampaui target yang ditetapkan oleh Perseroan. Pencapaian ini merupakan hasil dari implementasi strategi bisnis dan dukungan dari semua pihak di internal maupun eksternal Perseroan.

In terms of top line and bottom line, the Board of Directors succeeded in exceeding the targets set by the Company. This achievement is the result of the implementation of business strategy and support from all internal and external parties of the Company.

KENDALA YANG DIHADAPI DAN CARA PENYELESAIAN

Dalam mengelola usaha Perseroan Direksi dihadapkan pada sejumlah kendala dan tantangan. Salah satunya dalam implementasi *Credit Approval Engine* yang merupakan proses bisnis yang baru diluncurkan. Pada praktiknya, SDM memerlukan waktu penyesuaian agar sistem tersebut dapat bekerja dengan optimal.

Kendala lain yang sempat dihadapi dalam implementasi *Credit Approval Engine* adalah dalam mengakses layanan Sistem Informasi Layanan Keuangan (SLIK) yang berkaitan dengan informasi calon konsumen. Pada awal pelaksanaannya terkadang membutuhkan waktu lama (*loading*) untuk mengakses layanan yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan.

CHALLENGES AND ITS MITIGATIONS

The Board of Directors confronts a number of obstacles and challenges in managing the Company's business. One of them is the setting up of a newly developed business process, the Credit Approval Engine. In practice, HR requires adjustment time for the system to function optimally.

Another challenge in implementing Credit Approval Engine was gaining access to Financial Service Information System (SLIK) services relating to prospective customer information. It occasionally takes a lengthy time (loading) to access Financial Services Authority managed services at the start of its installation.

Laporan Direksi
Board of Directors Report

Untuk mengatasi kendala SDM dalam mengoperasikan *Credit Approval Engine* Perseroan terus melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang tata cara menggunakan layanan tersebut. Edukasi dilakukan hingga level surveyor untuk memastikan kelancaran operasional *Credit Approval Engine*. Setelah dilakukan pelatihan secara kontinu, sampai akhir tahun 2023 SDM sudah terbiasa dan tidak menemukan kendala yang berarti.

To address HR constraints in operating the Credit Approval Engine the Company continues to conduct service socialization and education. To ensure the efficient operation of the Credit Approval Engine, education is provided up to the surveyor level. Human resources are accustomed to and have not found substantial barriers following continual training until the end of 2023.

Sementara untuk mengatasi kelambatan dalam mengakses layanan SLIK, Perseroan bekerja sama dengan vendor pihak ketiga. Dari hasil kolaborasi ini, layanan SLIK sudah dapat diakses sesuai dengan yang diharapkan dan sangat membantu Perseroan dalam mengidentifikasi data pribadi calon konsumen.

Meanwhile, to overcome the slowness in accessing SLIK services, the Company cooperates with third-party vendors. From the results of this collaboration, SLIK services can be accessed as expected and greatly assist the Company in identifying personal data of potential customers.

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam layanan jasa keuangan, Perseroan menyadari pentingnya kompetensi SDM. Untuk itu, Perseroan terus meningkatkan kompetensi karyawan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Seperti tahun sebelumnya, Perseroan menerapkan digitalisasi dalam program-program pendidikan dan pelatihan dengan konsep *Virtual Training*.

As a company engaged in financial services, the Company realizes the importance of HR competence. As such, the Company continues to improve employee competence through education and training activities. As in the previous year, the Company implemented digitalization in education and training programs with the concept of Virtual Training.

Beragam metode *Digital Learning* telah dilaksanakan dalam kegiatan pelatihan seperti: *Self Learning, Warming and Prime Quiz, Task Question, Online Training dengan metode Online Group Discussion, Role Play dan Video Learning*. Dalam pelaksanaannya Perseroan memanfaatkan *fitur G-Suite (Google Classroom & Google Meet)* dan ZOOM untuk menjangkau lebih banyak peserta dengan efisien. *Virtual Training* yang dilaksanakan oleh Perseroan dioptimalkan dengan *platform Learning Management System* (LMS) yang mudah diakses oleh karyawan sehingga karyawan dapat mengetahui informasi dan melakukan pendaftaran mandiri program pelatihan yang ingin diikuti.

Various Digital Learning methods have been implemented in training activities such as: Self Learning, Warming and Prime Quiz, Task Question, Online Training with Online Group Discussion methods, Role Play and Video Learning. In its implementation, the Company utilizes G-Suite features (Google Classroom & Google Meet) and ZOOM to reach more participants efficiently. Virtual training conducted by the Company is enhanced through a Learning Management System (LMS) platform that is readily accessible to employees. This allows employees to independently discover information and register for the training programs they wish to participate in.

Perseroan juga melanjutkan kegiatan *Development Program* sebagai sarana untuk mengembangkan kompetensi karyawan dalam aspek teknis maupun *soft skill*. Pelaksanaan *Development Program* ini juga

The Company also continues the Development Program activities as a means to develop employee competencies in technical aspects and soft skills. The implementation of this Development Program is also a means of improving

sarana peningkatan jenjang karir karyawan melalui *Management Trainee, Talent Pool Development, Key Position Development, WOM Managerial Program* dan *WOM Senior Managerial Program*.

Sementara untuk rekrutan baru, Perseroan fokus dalam mengoptimalkan "Digital WOM on Boarding Program" yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan internalisasi nilai-nilai Perseroan yaitu TIGER.

PROSPEK USAHA

Perekonomian Indonesia diproyeksikan tetap tumbuh positif pada tahun 2024 di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Dalam APBN 2024, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dan inflasi sebesar 2,8%. Pertumbuhan ekonomi nasional tetap akan ditopang dari sisi konsumsi dan investasi.

Suku bunga acuan diproyeksi akan tetap tinggi untuk meredam laju inflasi. Namun demikian, daya beli masyarakat diperkirakan akan tetap terjaga yang tercermin dari indeks keyakinan konsumen terhadap perekonomian Indonesia yang positif.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) memproyeksi pertumbuhan piutang pembiayaan *multifinance* sebesar 12-13% pada tahun 2024. Terdapat dua hal yang menjadi katalis pembiayaan *multifinance* masih dapat tumbuh *double digit* pada tahun depan yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan daya tahan konsumsi masyarakat.

Perseroan tetap fokus pada usaha pembiayaan sepeda motor baru. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menargetkan penjualan sepeda motor baru sebesar 6,2 juta unit sampai dengan 6,5 juta unit, lebih tinggi dari pencapaian tahun 2023.

Implementasi *credit approval engine* akan mempercepat proses binsis *end to end* dan menghasilkan kualitas pembiayaan yang semakin baik. Operasionalisasi sistem digital ini didukung dengan SDM yang terlatih

employee career paths through Management Trainee, Talent Pool Development, Key Position Development, WOM Managerial Program and WOM Senior Managerial Program.

On new recruits, the Company focuses on optimizing the "Digital WOM on Boarding Program" which aims to increase engagement and internalization of the Company's values, namely TIGER.

BUSINESS PROSPECT

Indonesia's economy is projected to maintain positive growth in 2024 amidst increasing global uncertainty. In the 2024 State Budget, the government targets economic growth of 5.2% and inflation of 2.8%. National economic growth will still be supported in terms of consumption and investment.

The benchmark interest rate is projected to remain high to dampen inflation. Nevertheless, people's purchasing power is expected to be maintained, as reflected in a positive consumer confidence index in the Indonesian economy.

The Indonesian Financial Services Association (APPI) forecasts a 12%-13% increase in multifinance financing receivables in 2024. There are two catalysts for multifinance financing to continue growing in the double digits next year: 5% economic growth and the resilience of public consumption.

The Company remains focused on financing new motorcycles. The Indonesian Motorcycle Industry Association (AISI) targets new motorcycle sales of 6.2 million units to 6.5 million units, higher than the achievement in 2023.

The implementation of credit approval engine will accelerate the end-to-end business process and result in better financing quality. The operationalization of this digital system is supported by trained and competent

Laporan Direksi
Board of Directors Report

dan memiliki kompetensi sehingga diyakini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala berarti untuk mendukung tercapainya tujuan Perseroan.

human resources, enabling it to run efficiently and without significant obstacles to support the achievement of the Company's goals.

Dalam upaya mengoptimalkan peluang usaha, Perseroan terus mengembangkan inovasi produk dan layanan. Perseroan berencana meluncurkan produk Haji berbasis logam mulia dengan menggunakan akad syariah pada tahun 2024. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen berhaji yang semakin meningkat setiap tahun.

In an effort to optimize business opportunities, the Company continues to develop innovative products and services. The Company plans to launch a precious metal-based Hajj product using a sharia contract in 2024. This is to meet the increasing needs of Hajj consumers every year.

Memerhatikan kondisi perekonomian dan industri pembiayaan yang tetap kondusif serta kesiapan internal dalam mengoptimalkan setiap peluang Perseroan meyakini pertumbuhan usaha terus meningkat pada tahun mendatang.

Taking into account the favorable economic and financing industry conditions and internal readiness in optimizing every opportunity, the Company believes that business growth will continue to increase in the coming year.

PRAKTIK TERBAIK TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam melaksanakan pengelolaan usaha Perseroan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/ GCG). Pelaksanaan GCG Perseroan memiliki kerangka kerja yang terdiri dari struktur tata kelola, proses tata kelola, dan hasil tata kelola.

CORPORATE GOVERNANCE BEST PRACTICES

In carrying out business management, the Company always adheres to the principles of Good Corporate Governance (GCG). The Company's GCG Implementation has a framework consisting of governance structure, governance process, and governance results.

Dengan penerapan praktik terbaik GCG, Perseroan dapat menjaga keseimbangan dalam mengendalikan risiko dan pemanfaatan peluang sehingga usaha Perseroan dapat terus bertumbuh secara positif sepanjang tahun 2023.

With the implementation of GCG best practices, the Company can maintain a balance in controlling risks and utilizing opportunities, enabling the Company's business to continue to positively grow throughout 2023.

Pada praktiknya, pelaksanaan GCG merupakan sebuah rangkaian proses kerja yang berkelanjutan dengan terus melakukan penyempurnaan. Pada tahun 2023, fokus utama pelaksanaan GCG tetap pada penguatan manajemen risiko melalui perumusan *risk appetite*, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko perusahaan.

In practice, GCG implementation is a series of continuous work processes by continuously making improvements. In 2023, the main focus of GCG implementation remains on strengthening risk management through the formulation of risk appetite, policies, procedures and setting corporate risk thresholds.

Perseroan telah memiliki struktur tata kelola yang lengkap terdiri dari organ utama RUPS, Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, terdapat organ-organ pendukung GCG seperti Sekretaris

The Company has a complete governance structure consisting of the main organs of the GMS, Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board. In addition, GCG supporting organs

Perusahaan, Audit Intenal, Legal Counsel & Anti Fraud Division, Risk Management Division dan komite-komite yang berada di bawah Direksi dan Dewan Komisaris.

Organ utama GCG Perseroan telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan dan piagam yang menjadi pedoman kerja masing-masing organ. Proses tata kelola juga telah dilaksanakan dengan baik di antaranya meliputi penyelenggaraan rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris maupun keterbukaan informasi yang diunggah di *website* Perseroan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Direksi memiliki satuan kerja atau komite yang secara struktural berada dibawahnya yakni Komite Manajemen Risiko, Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Sekretaris Perusahaan, Internal Audit Division, Legal Counsel & Anti Fraud (Unit Kerja yang didalamnya terdapat fungsi Kepatuhan) dan Risk Management Division.

Sepanjang tahun 2023, Direksi menilai seluruh komite tersebut telah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam membantu pengelolaan usaha Perseroan. Pencapaian kinerja Perseroan yang terus bertumbuh merupakan bukti nyata dari dukungan yang diberikan oleh komite-komite yang berada di bawah Direksi.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Sepanjang tahun buku 2023, Perseroan telah mengangkat kembali susunan anggota Direksi Perseroan yang menjabat pada periode sebelumnya untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2023 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2026 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 93 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

are also formed, such as Corporate Secretary, Internal Audit, Legal Counsel & Anti Fraud Division, Risk Management Division and committees under the Board of Directors and Board of Commissioners.

The Company's GCG main organs have carried out their duties and functions in compliance with the laws and regulations and charters that guide the work of each organ. The governance process has also been carried out properly, including the holding of Board of Directors meetings and Board of Commissioners Meetings, as well as information disclosure uploaded on the Company's website.

BOARD OF DIRECTORS COMMITTEES PERFORMANCE ASSESSMENT

The Board of Directors has a work unit or committee that is structurally subordinate, namely the Risk Management Committee, Sharia Product and Business Development Committee, Information Technology Steering Committee, Corporate Secretary, Internal Audit Division, Legal Counsel & Anti Fraud (Work Unit which include a Compliance function) and Risk Management Division.

Throughout 2023, the Board of Directors considers that all of these committees have carried out their respective duties and functions in assisting the management of the Company's business. The achievement of the Company's growing performance is a clear proof of the support provided by the committees under the Board of Directors.

BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION CHANGES

During the financial year 2023, the Company has reappointed the members of the Board of Directors of the Company who served in the previous period for the term of office commencing from the closing of the Annual GMS of 2023 until the closing of the Annual GMS of 2026 based on the Deed of Statement of the Meeting Resolutions of the Company Number 93 dated 30 March 2023 made before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta Administrative City.

Laporan Direksi
Board of Directors Report

DUKUNGAN PENCAPAIAN TUJUAN KEBERLANJUTAN [OJK D.1]

Perseroan senantiasa mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan masyarakat global untuk mencapai masa depan yang berkelanjutan. Strategi keberlanjutan Perseroan telah tercermin pada Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan POJK No. 51/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, selain sebagai wujud komitmen dukungan pencapaian tujuan keberlanjutan.

Pada aspek produk dan jasa keuangan berkelanjutan, pada tahun pelaporan ini, Perseroan telah memulai meluncurkan produk pembiayaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) roda dua dan mencatatkan sejumlah portofolio KBLBB di tahun 2023. Kendati *outstanding*nya masih sangat terbatas, langkah ini merupakan pencapaian strategis dari kegiatan Perseroan yang sejalan dengan prinsip keuangan berkelanjutan. Pada aspek lingkungan, Perseroan juga meningkatkan implementasi *Green Office and Lifestyle* melalui perhitungan kinerja lingkungan Perseroan dan kampanye kepada karyawan.

Sementara pada aspek sosial, Perseroan terus menjalankan Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) pada 4 (empat) Pilar yakni Pilar kesehatan, Pilar Sosial dan lingkungan, Pilar Pendidikan dan Pilar Permberdayaan Masyarakat. Selama periode pelaporan, Perseroan merealisasikan anggaran biaya TJSL sebesar Rp2,30 miliar yang di implementasikan melalui program dan aktivitas kegiatan. Perseroan juga semakin intensif menerapkan inisiatif strategis untuk meningkatkan kualitas layanan dengan mengintensifkan penerapan *Credit Approval Engine* dalam proses persetujuan pembiayaan, di samping terus menerapkan implementasi GCG di seluruh lini bisnis dan operasional.

SUPPORT FOR ACHIEVING SUSTAINABILITY GOALS [OJK D.1]

The Company strives to support the efforts made by the Government of Indonesia and the global community to achieve a sustainable future. The Company's sustainability strategy has been reflected in the Sustainable Finance Action Plan (RAKB), as a form of compliance with the provisions of POJK No. 51/POJK.03/2017 of 2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, apart from being a commitment to support the achievement of sustainability goals.

In the aspect of sustainable financial products and/services, in this reporting year, the Company has launched two wheeler Battery-based electric motor vehicle (KBLBB) financing products, and listed a number of KBLBB portfolios in 2023. Although the outstanding remained very limited, this step is a strategic achievement of the Company's activities that are in line with sustainable finance principles. In environmental aspect, the Company also increases the implementation of In the environmental aspect, the Company also improves the execution of Green Office and Lifestyle through the calculation of the Company's environmental performance and campaigns to employees.

Meanwhile, in the social aspect, the Company continues to carry out Corporate Social Responsibility (CSR) Programs on 4 (four) Pillars, namely the Health Pillar, Social and Environmental Pillar, Education Pillar and Community Empowerment Pillar. During the reporting period, the Company realized a CSR budget of Rp2.30 billion which was implemented through programs and activities. The Company is also intensively implementing strategic initiatives to improve service quality by intensifying the application of Credit Approval Engine in the financing approval process, apart from continuing to implement GCG implementation in all business and operational lines.

Perseroan menyadari adanya risiko yang hadir dari menguatnya keprihatinan hampir seluruh komponen masyarakat global maupun nasional terhadap kelestarian alam dan dampak sosial dari kegiatan usaha yang dijalankan, juga adanya risiko perubahan regulasi yang dikeluarkan Pemerintah untuk memitigasi dampak lingkungan dan sosial tersebut. Sebagai langkah antisipasi terhadap dampak lingkungan dan perubahan peraturan, Perseroan akan terus mengelola kinerja pembiayaan motor listrik selain menjalankan inisiatif kegiatan operasional ramah lingkungan dan memperkuat implementasi dan kinerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).

The Company is aware of the risks that arise from the growing concerns of almost all components of the global and national communities about the sustainability of nature and the social impacts of its business activities, as well as the risk of changes in government regulations aimed at mitigating environmental and social impacts. As a step to anticipate environmental impacts and regulatory changes, the Company will continue to manage the performance of electric motorcycle financing while also carrying out green operational initiatives and strengthening Environmental, Social, and Governance (ESG) implementation and performance.

Perseroan juga tetap konsisten menyelenggarakan beragam program pengembangan kompetensi keuangan berkelanjutan yang diikuti oleh jajaran manajemen maupun karyawan yang bertanggung jawab langsung dalam merealisasikan berbagai target-target spesifik yang disampaikan dalam RAKB. Perseroan berkeyakinan kesamaan kompetensi dan pemahaman jajaran karyawan dalam memahami tujuan keuangan berkelanjutan merupakan kunci keberhasilan dan tercapainya tujuan keberlanjutan Perseroan. Perseroan juga terus berupaya melengkapi infrastruktur keuangan keberlanjutan di lingkup internal guna memastikan tercapainya berbagai target keuangan berkelanjutan di tahun pelaporan maupun di tahun-tahun mendatang.

The Company also consistently organizes various sustainable finance competency development programs followed by management and employees that are directly in charge to achieve various specific targets stated in the RAKB. The Company believes that the common competence and understanding of employees in understanding sustainable finance goals is the key to successful and achievement of the Company's Sustainability goals. The Company also continues to strive to complete the sustainable finance infrastructure internally to ensure the achievement of various sustainable finance targets in the reporting year and in the years to come.

APRESIASI

Atas nama Direksi, kami menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan usaha. Ungkapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pemegang saham yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam menjalankan usaha Perseroan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh karyawan yang telah bekerja sama dengan baik untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra, dealer, dan konsumen serta pemangku kepentingan lainnya yang telah mendukung kelancaran usaha Perseroan.

APPRECIATION

Representing the Board of Directors, we would like to express our gratitude to the Board of Commissioners for carrying out the supervisory function of business management. We also express our gratitude to the shareholders who have given trust to us in managing the Company's business.

We would like to express our gratitude to all employees who have worked well together to support the achievement of company goals. Finally, we would like to thank all partners, dealers, and consumers as well as other stakeholders who have supported the efficient management of the Company's business.

Laporan Direksi
Board of Directors Report

Kami meyakini dengan dukungan dan kepercayaan dari pemegang saham dan seluruh pihak usaha Perseroan dapat terus bertumbuh pada masa mendatang.

We believe that with the support and trust of shareholders and all business parties, the Company shall continue to grow in the future.

Jakarta, Maret | March 2024

Atas Nama Direksi
On Behalf of the Board of Directors



Djaja Suryanto Sutandar
Presiden Direktur
President Director

Direksi
The Board of Directors



01. Djaja Suryanto Sutandar
Presiden Direktur
President Director

02. Anthony Yuarez Panggabean
Direktur
Director

03. Njauw Vido Onadi
Direktur
Director

04. Wibowo
Direktur
Director

05. Cincin Lisa Hadi
Direktur
Director

Laporan Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Report



Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA

Ketua
Chairman

Berdasarkan koordinasi bersama dengan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023, Dewan Pengawas Syariah berpandangan bahwa produk pembiayaan syariah dengan akad Murabahah Perseroan terus dilakukan pengembangan dan pengembangan tersebut dilakukan dengan terus memperhatikan pemenuhan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan fatwa DSN-MUI yang berlaku.

The Sharia Supervisory Board has carried out the coordination and supervision during the fiscal year 2023 and concluded that the Company's Sharia financing products with the Murabahah contract are being developed by continuously taking into account the Sharia principles and the relevant DSN-MUI fatwas.

Bismillahirrahmannirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua dan Perseroan dapat terus melanjutkan pencapaian kinerja positif serta turut berkontribusi dalam memberikan manfaat kepada masyarakat.

We praise Allah SWT's presence, who has bestowed blessings and gifts on all of us, ensuring the Company continues to achieve positive performance and contribute to the community's well-being.

Dewan Pengawas Syariah Perseroan telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan syariah terhadap produk dan layanan syariah Perseroan sepanjang tahun 2023. Sinergi dengan Dewan Komisaris dan Direksi terus kami lakukan untuk bersama-sama mengembangkan usaha Perseroan yang berlandaskan praktik terbaik tata kelola perusahaan.

Throughout 2023, the Company's Sharia Supervisory Board has carried out its duties and functions in conducting sharia oversight of the Company's sharia products and services. We continue to synergize with the Board of Commissioners and Board of Directors to jointly develop the Company's business based on best practices in corporate governance.

Izinkan saya mewakili Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk menyampaikan laporan pengawasan atas pemenuhan prinsip syariah dalam produk pembiayaan dengan menggunakan akad Murabahah di Perseroan. Laporan pengawasan ini memuat tentang

Representing the Company's Shariah Supervisory Board, I am pleased to present an oversight report on the adherence to sharia principles in financing products utilizing the Murabahah contract at the Company. This supervisory report details the Sharia Supervisory

Laporan Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Report

kegiatan Dewan Pengawas Syariah selama tahun buku 2023 dan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan terkait produk syariah.

Board's activities throughout the fiscal year 2023, as well as recommendations on sharia products.

PELAKSANAAN KEGIATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TAHUN 2023

Landasan operasional kegiatan pengawasan ketentuan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah Perseroan mengacu pada POJK No. 30/POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan perubahannya sebagaimana tercantum pada POJK No. 29/ POJK.05/2020 Tahun 2020 (POJK Tata Kelola).

POJK Tata Kelola Pasal 33 ayat 1 menyebutkan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah Perseroan telah melaksanakan fungsi pengawasan untuk memastikan produk pembiayaan syariah telah memenuhi prinsip syariah sepanjang tahun 2023. Selain itu, mengawasi proses pengembangan produk pembiayaan baru syariah agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai bagian dari pelaksanaan GCG.

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui serangkaian aktivitas sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat Dewan Pengawas Syariah yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas Syariah dan perwakilan dari Unit Usaha Syariah Perseroan serta unit kerja terkait secara berkala.
2. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk pembiayaan syariah atau aktivitas baru terkait pembiayaan syariah Perseroan.
3. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan Penyaluran pembiayaan Logam Mulia MASKu dan Motor Baru Syariah dengan menggunakan akad Murabahah.

IMPLEMENTATION OF SHARIA SUPERVISORY BOARD ACTIVITIES IN 2023

Operational basis for the supervision of sharia provisions by the Company's Sharia Supervisory Board refers to POJK No. 30/POJK.05/2014 Year 2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies and its amendments as stated in POJK No. 29/ POJK.05/2020 of 2020 (Governance POJK).

Governance POJK Article 33 paragraph 1 states that the Sharia Supervisory Board has at least the duty and authority to provide advice and opinion to the Board of Directors, supervise the sharia aspects of the operational activities of Sharia Finance Companies or Sharia Business Units (UUS) to be in line with sharia principles.

The Company's Sharia Supervisory Board has carried out its supervisory function to ensure that sharia financing products comply with sharia principles throughout 2023. In addition, supervise the process of developing new sharia financing products to comply with the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) as part of GCG implementation.

The implementation of the supervisory function by the Sharia Supervisory Board is carried out through a series of activities as follows:

1. Conduct regular Sharia Supervisory Board meetings attended by members of the Sharia Supervisory Board and representatives from the Company's Sharia Business Units and related units.
2. Supervise the development process of sharia financing products or new activities related to the Company's sharia financing.
3. Provide sharia opinion on the financing activities of MASKu Precious Metals and Sharia New Motorcycles using a Murabahah contract.

4. Melaksanakan sosialisasi fatwa-fatwa DSN-MUI yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Berdasarkan rapat-rapat dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023, Dewan Pengawas Syariah berpandangan bahwa produk pembiayaan syariah dengan akad Murabahah Perseroan terus dilakukan pengembangan dan pengembangan tersebut dilakukan dengan terus memperhatikan pemenuhan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan fatwa DSN-MUI yang berlaku.

Dewan Pengawas Syariah selain melakukan fungsi pengawasan telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi untuk terus mematuhi seluruh peraturan perundangan yang berlaku sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola dan mematuhi prinsip syariah untuk produk syariah yang telah ada maupun yang akan diluncurkan.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH TAHUN 2023

Pada tahun 2023, Bapak H. Muh. Taufik Darmansyah S.E., C.P.A., mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah per tanggal 8 September 2023.

Komposisi Dewan Pengawas Syariah per 31 Desember 2023 sebagai berikut:
Ketua : Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A.
Anggota : H. Muh. Taufik Darmansyah, S.E., C.P.A*)
Anggota : Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen

*) Mengundurkan diri per 8 September 2023 dan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 11 Januari 2024.

APRESIASI

Akhir kata, kami mengucapkan Alhamdulilah karena telah menjalankan fungsi pengawasan terkait dengan produk pembiayaan syariah Perseroan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas sinergi yang terus dibangun untuk membawa kemajuan usaha Perseroan.

4. Carry out dissemination of DSN-MUI fatwas related to the Company's business activities.

Based on the meetings and supervision conducted during the fiscal year 2023, the Sharia Supervisory Board concludes that the Company's Sharia financing products with the Murabahah contract are being developed and continuously carried out in accordance with Sharia principles and DSN-MUI fatwas.

Apart from performing supervisory functions, the Sharia Supervisory Board has provided advice and opinion to the Board of Directors to continue to comply with all prevailing laws and regulations as part of the implementation of governance and comply with sharia principles for existing and future sharia products.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF SHARIA SUPERVISORY BOARD MEMBERS IN 2023

In 2023, Mr. H. Muh. Taufik Darmansyah S.E., C.P.A., submitted his resignation from his position as a Member of the Sharia Supervisory Board as of September 8, 2023.

The composition of the Sharia Supervisory Board as of December 31, 2023 is as follows:
Chairman : Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A
Member : H. Muh. Taufik Darmansyah, S.E., C.P.A*)
Member : Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen

*) Resigned as of September 8, 2023 and has received approval from the Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 11, 2024

APPRECIATION

In closing, we would like to express our gratitude to God for entrusting us with oversight duties in relation to the Company's Sharia financing products. We'd like to extend our appreciation to the Board of Commissioners and the Board of Directors for the synergy that remained established to grow the Company's business progress.

Laporan Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Report

Ungkapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh karyawan yang telah bekerja keras dan kepada seluruh pemangku kepentingan yang turut membantu pengembangan usaha Perseroan, khususnya terkait dengan produk syariah.

We also express our gratitude to all employees who have worked hard and to all stakeholders who have helped the Company's business development, particularly related to sharia products.

Ke depan, kami mendoakan agar usaha Perseroan semakin berkembang dan terus memberikan manfaat bagi konsumen dan masyarakat.

Going forward, we pray that the Company's business will grow and continue to provide benefits to customers and the community.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Maret | March 2024

Atas Nama Dewan Pengawas Syariah
On Behalf of the Sharia Supervisory Board



Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A.
Ketua
Chairman

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board



01. Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A.
Ketua
Chairman

02. H. Muh. Taufik Darmansyah, S.E., C.P.A.*
Anggota
Member

03. Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen
Anggota
Member

*) Mengundurkan diri per 8 September 2023 dan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 11 Januari 2024
Resigned as of September 8, 2023 and has received approval from the Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 11, 2024

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Tahun 2023

Board of Commissioners Statements regarding Responsibility for 2023 Annual Report and Sustainability Report of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perusahaan. [GRI 2-14]

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report and Sustainability Report of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk for 2023 fiscal year has been presented comprehensively. Therefore, we are fully responsible for the accountability of the contents of these Annual Report and Sustainability Report. [GRI 2-14]

This statement is made truthfully.

Jakarta, Maret | March 2024

Dewan Komisaris | Board of Commissioners



I Nyoman Tjager
Presiden Komisaris/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner



Thilagavathy Nadason
Komisaris
Commissioner



Myrnie Zachraini Tamin
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Surat Pernyataan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Tahun 2023

Board of Directors Statements regarding Responsibility for 2023 Annual Report and Sustainability Report of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perusahaan. [GRI 2-14]

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report and Sustainability Report of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk for 2023 fiscal year has been presented comprehensively. Therefore, we are fully responsible for the accountability of the contents of these Annual Report and Sustainability Report. [GRI 2-14]

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, Maret | March 2024

Direksi | Board of Directors

Djaja Suryanto Sutandar
Presiden Direktur
President Director

Anthony Yuarez Panggabean
Direktur
Director

Njauw Vido Onadi
Direktur
Director

Wibowo
Direktur
Director

Cincin Lisa Hadi
Direktur
Director

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE





Perseroan melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan dan terus berupaya mengoptimalkan sumber-sumber pertumbuhan usaha baru.

The Company innovates to improve the quality of service and continuously strives to optimize sources of new business growth.

Identitas Perusahaan

Corporate Identity [OJK C.2, C.3, C.4, C.5 – GRI 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-13]

WOMFinance
a member of Maybank group

Nama Perusahaan Company Name [GRI 2-1]	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Nama Panggilan Common Name	WOM Finance
Bidang Usaha Line of Business [OJK C.4, GRI 2-2]	Perusahaan Pembiayaan Financing Company

Tanggal Didirikan
Date of Establishment

23 Maret 1982
March 23, 1982

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp500.000.000.000

Modal Disetor
Paid-up Capital

Rp348.148.148.000

Status dan Bentuk Badan Hukum
Company status & Legal form
[GRI 2-5]

Perusahaan Terbatas
Limited Liability Company

Wilayah Operasional
Operational Areas
[OJK C.3, GRI 2-4]

Indonesia

Pasar yang Dilayani
Market Served [GRI 2-6]

Indonesia

Kepemilikan Saham
Share Ownerships
[OJK C.3, GRI 2-5]

- PT Bank Maybank Indonesia
  (67,49%)
- PT Wahana Makmur Sejati
  (25,01%)
- Publik | Public
  (7,50%)

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

Akta Pendirian Nomor 179 tanggal 23 Maret 1982 yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian Nomor 96 tanggal 15 Desember 1982, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, SH., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor C2-3167-HT.01.01.TH.82 tanggal 23 Desember 1982.

Deed of Establishment Number 179 dated March 23, 1982, which was subsequently amended pursuant to the Deed of Amendment to the Deed of Establishment Number 96, dated December 15, 1982. Both of which were drawn up before Kartini Muljadi, SH., a notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by virtue of Decree Number C2-3167-HT.01.01.TH.82 dated December 23, 1982.

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address
[OJK C.2, GRI 2-3]

Altira Office Tower floor 32, 33, 35
Jl. Yos Sudarso Kav. 85
Sunter Jaya, Tanjung Priok
Jakarta Utara 14350

Kontak
Contact

+62 21 2188 2400
(fax.) +62 21 2188 2420

www.wom.co.id

corporate_secretary@wom.co.id

Media Sosial
Social Media

womfinanceku.id
@WOMFinance_id
@womfinance_id
womfinance_id
PT WOM Finance Tbk

Skala Perusahaan

[OJK C.3, GRI 2-7] Scale Of The Company

Total Aset
Total Assets

Rp6,64 triliun | in trillion

Laba Tahun Berjalan
Income for the Year

Rp236,41 miliar | in billion

Total Liabilitas
Total Liabilities

Rp4,94 triliun | in trillion

Total Ekuitas
Total Equity

Rp1,70 triliun | in trillion

Total Karyawan
Number of Employee [GRI 2-7]

2.335

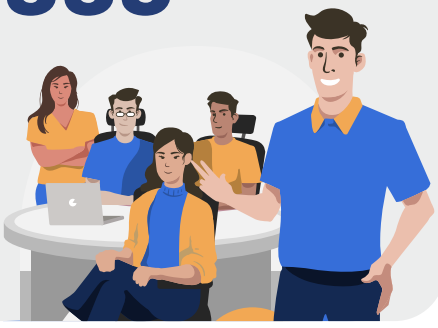

1	Kantor Pusat Head Office
10	Kantor Regional Regional Office
202	Kantor Layanan Service Offices
162	Kantor Cabang Branch Offices
41	Kantor Cabang Syariah Sharia Branch Offices
40	Kantor Selain Kantor Cabang Non-Branch Offices

Sekilas Perusahaan

Company in Brief [OJK C.3, GRI 2-7]



PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("WOM Finance" atau "Perseroan") - sebelumnya bernama PT Jakarta Tokyo Leasing - didirikan pada tahun 1982, yang bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor, khususnya pembiayaan untuk sepeda motor merek Honda.

Perubahan nama menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha dilakukan pada tahun 2000 sejalan dengan transformasi bisnis yang tidak hanya melayani pembiayaan sepeda motor merek Honda namun juga melayani pembiayaan sepeda motor merek Jepang lainnya, seperti Yamaha, Suzuki dan Kawasaki.

Pada tahun 2004, Perseroan mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan/OJK (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan/ Bapepam-LK) untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) dengan menawarkan sebanyak 200.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga penawaran sebesar

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("WOM Finance" or the "Company") - formerly known as PT Jakarta Tokyo Leasing - was established in 1982, which is engaged in motorcycle financing, particularly financing for Honda brand motorcycles.

The change of name to become PT Wahana Ottomitra Multiartha was carried out in 2000 in line with business transformation that not only provides Honda brand motorcycle financing however also financing for other Japanese brand motorcycles, such as Yamaha, Suzuki and Kawasaki.

In 2004, the Company received an effective statement from the Financial Services Authority/OJK (formerly the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency/ Bapepam-LK) to exercise an Initial Public Offering (IPO) by offering 200,000,000 shares with a par value of Rp100 per share and an offering price of Rp700 per share. The listing of the Company's shares

Rp700 per saham. Pencatatan saham Perseroan dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada 13 Desember 2004 dengan "WOMF" sebagai kode saham perusahaan.

was carried out on the Indonesia Stock Exchange on December 13, 2004 with "WOMF" as the company's stock code.

Setelah melakukan IPO, pada tahun 2005 PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MBI) mengakuisisi 43% kepemilikan saham Perseroan. Selanjutnya kepemilikan saham MBI di Perseroan meningkat menjadi 68,55% setelah Perseroan melakukan *right issue* terbatas dengan menerbitkan sebanyak 1.481.481.480 saham baru pada tahun 2015.

Following the IPO, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MBI) acquired 43% of the Company's share ownership in 2005. Furthermore, MBI's share ownership in the Company increased to 68.55% after the Company conducted a limited rights issue by issuing 1,481,481,480 new shares in 2015.

Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II WOM Finance Tahun 2017 sebesar Rp720,5 miliar dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III WOM Finance Tahun 2017 sebesar Rp867,5 miliar dengan peringkat AA-(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia.

The Company issued WOM Finance Shelf Registration Bond II Phase II Year 2017 amounted to Rp720.5 billion and WOM Finance Shelf Registration Bond II Phase III Year 2017 amounted to Rp867.5 billion with an AA-(idn) rating from PT Fitch Ratings Indonesia.

Perseroan terus memperkuat struktur pendanaan jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan bisnis, dengan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap IV Tahun 2018 dan Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap V Tahun 2018 masing-masing sebesar Rp793 miliar dan Rp360,5 miliar, serta Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap I Tahun 2018 sebesar Rp570,5 miliar.

The Company continued to strengthen its long-term funding structure to support business growth by issuing WOM Finance Shelf Registration Bond II Phase IV Year 2018 and WOM Finance Shelf Registration Bond II Phase V Year 2018 amounted to Rp793 billion and Rp360.5 billion, respectively, as well as WOM Finance Shelf Registration Bond III Phase I Year 2018 amounted to Rp570.5 billion.

Perseroan juga menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap II Tahun 2019 sebesar Rp1,675 triliun, Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap III Tahun 2020 sebesar Rp260,3 miliar, Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap IV Tahun 2020 sebesar Rp500 miliar dan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 sebesar Rp500 miliar.

The Company also issued WOM Finance Shelf Registration Bonds III Phase II Year 2019 amounted to Rp1.675 trillion, WOM Finance Shelf Registration Bonds III Phase III Year 2020 at Rp260.3 billion, WOM Finance Shelf Registration Bonds III Phase IV Year 2020 at Rp500 billion and WOM Finance Shelf Registration Bonds IV Phase I Year 2021 of Rp500 billion.

Selain dengan langkah memperkuat permodalan, Perseroan melakukan transformasi digital dengan sentralisasi kredit dan digitalisasi akuisisi untuk menghasilkan proses bisnis yang lebih efisien dan efektif serta sesuai dengan proses tata kelola perusahaan yang

In addition to strengthening its capital, the Company carried out digital transformation by centralizing credit and digitizing acquisitions to produce more efficient and effective business processes in accordance with good corporate governance processes. Digital transformations

Sekilas Perusahaan
Company in Brief

baik. Langkah transformasi digital didukung dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Perseroan juga melakukan pengembangan saluran pemasaran digital bekerja sama dengan *marketplace* Bukalapak, Tokopedia dan Gobills serta sinergi dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk dalam layanan pembayaran melalui QRIS *(Quick Respons Code Indonesian Standard).*

Perseroan juga mengembangkan digitalisasi untuk mendukung aktivitas operasional kerja karyawan melalui Aplikasi Google *Suite* (G-Suite) sehingga karyawan dapat melakukan koordinasi dan proses *approval* secara digital.

Pada tahun 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II Tahun 2022 sebesar Rp800 miliar di mana penerbitan aksi korporasi ini dilaksanakan melalui mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dan mendapatkan pemberian fasilitas kredit bank sebesar Rp1,985 triliun. Perseroan juga meluncurkan aplikasi KAWAN untuk mendukung digitalisasi pembiayaan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan.

Pada tahun 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023 sebesar Rp1 triliun, di mana penerbitan aksi korporasi ini dilaksanakan melalui mekanisme PUB dan mendapatkan pemberian fasilitas kredit bank sebesar Rp1,745 triliun.

are supported by enhancing the competence of human resources.

The Company also developed digital marketing channels in collaboration with Bukalapak, Tokopedia and Gobills marketplaces as well as synergy with PT Bank Maybank Indonesia Tbk in payment services through QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

The Company also developed digitalization to support employee work operational activities through the Google Suite Application (G-Suite) hence employees can coordinate and carry out approval processes digitally.

In 2022, the Company issued WOM Finance Shelf Registration Bonds IV Phase II Year 2022 amounted to Rp800 billion, of which the issuance was exercised through the Rights Issue and received a bank loan facility of Rp1.985 trillion. The Company also launched the KAWAN application to support credit digitization and provide convenience for consumers.

In 2023, the Company issued WOM Finance Shelf Registration Bonds IV Phase III Year 2023 amounted to Rp1 trillion, of which the issuance of this corporate action was conducted through the Rights Issue and received a bank loan facility of Rp1.745 trillion.

Logo Perusahaan

Corporate Logo



Logo Perseroan adalah instrumen komunikasi bagi sebuah perusahaan yang menjadi pembeda dengan perusahaan lain.

The Company logo is a communication instrument that differentiates the company from other companies.



Logo Utama dilahirkan dari dua komponen dasar - elemen nama dan simbol 'W'. Simbol 'W' melambangkan *(warmth)* kehangatan sebagai sebuah sikap kerja yang diberikan kepada rekanan, mitra dan pelanggan WOM Finance.

The main logo comprises two basic components: the name element and the "W" symbol. The "W" symbol signifies warmth - the work attitude toward WOM Finance's associates, partners and customers.



Lingkaran elips yang mengelilingi elemen 'W' merupakan komposisi yang mencerminkan sinergi pendorong untuk membangun WOM Finance sebagai perusahaan keuangan yang terbaik di Indonesia.

The ellipse surrounding the "W" element is a composition reflecting the supporting synergy to make WOM Finance the best multifinance company in Indonesia.



Bagian *"a member of Maybank group"* menegaskan bahwa Perseroan adalah anak usaha dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk

The part "a member of Maybank group" affirms the Company's position as the subsidiary of PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Jejak Langkah
Milestones

1982
Perseroan didirikan dengan nama PT Jakarta Tokyo Leasing. Nama Perseroan berganti menjadi PT Fuji Semeru Leasing.

The Company was established under the name of PT Jakarta Tokyo Leasing. The Company's name changed into PT Fuji Semeru Leasing.

1997
Nama Perseroan diubah menjadi PT Wahana Ometraco Multiartha.

The Company's name changed to PT Wahana Ometraco Multiartha.

2000
Nama Perseroan diubah menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha.

The Company's name changed to PT Wahana Ottomitra Multiartha.

2003
Menerbitkan Obligasi I WOMF, senilai Rp300 miliar yang memperoleh peringkat A- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

The Company issued WOMF Bonds I with nominal value of Rp300 billion; rated A- by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

2004
Perseroan mengubah Anggaran Dasar dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

The Company's Articles of Association was amended in line with the Initial Public Offering pursuant to the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders.

2005
Perubahan status kepemilikan saham PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, mayoritas menjadi milik PT Bank Maybank Indonesia Tbk

The share ownership status of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk changed, resulting in PT Bank Maybank Indonesia Tbk becoming the majority shareholder.

2011
Perseroan menerbitkan obligasi Rp1,4 triliun yang memperoleh peringkat AA dari PT Fitch Rating Indonesia (*Fitch Rating).*

The Company issued a Rp1.4 trillion bonds that was rated AA from PT Fitch Rating Indonesia (Fitch Rating).

2014
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance.

Shelf Public Offering of WOM Finance Shelf Registration Bonds I.

2015
Penerbitan 1.481.481.480 saham baru melalui Penawaran Umum Terbatas.

The Company issued 1,481,481,480 new shares through Limited Public Offering.

2016
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I WOM Finance.

Shelf Public Offering of WOM Finance Shelf Registration Bonds II Phase I.

2017

- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II WOM Finance.
- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III WOM Finance.

- Shelf Public Offering of WOM Finance Shelf Registration Bonds II Phase II.
- Shelf Public Offering of WOM Finance Shelf Registration Bonds II Phase III.

2018

- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV WOM Finance.
- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V WOM Finance.
- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I WOM Finance.

- Shelf Public Offering of WOM Finance Shelf Registration Bonds II Phase IV.
- Shelf Public Offering of WOM Finance Shelf Registration Bonds II Phase V.
- Shelf Public Offering of WOM Finance Shelf Registration Bonds III Phase I.

2019

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II WOM Finance.

Shelf Public Offering of WOM Finance Shelf Registration Bonds III Phase II.

2020

- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III WOM Finance.
- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV WOM Finance.

- Shelf Public Offering of WOM Finance Shelf Registration Bonds III Phase III.
- Shelf Public Offering of WOM Finance Shelf Registration Bonds III Phase IV.

2021

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I WOM Finance.

Shelf Public Offering of WOM Finance Shelf Registration Bonds IV Phase I.

2022

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II WOM Finance

Shelf Public Offering of WOM Finance Shelf Registration Bonds IV Phase II.

2023

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III WOM Finance.

Shelf Public Offering of WOM Finance Shelf Registration Bonds IV Phase III.

Visi, Misi & Nilai-Nilai Perseroan
Vision, Mission & Corporate Value

Visi
Vision

Menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terbaik di Indonesia dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik

To be one of the best financing companies in Indonesia through good corporate governance implementation

Misi
Mision

- Mengutamakan kepuasan pelanggan dan mitra kerja lainnya.
  Placing the satisfaction of the customers and business partners as the first priority.
- Membangun infrastruktur berbasis TI untuk melaksanakan proses yang baik.
  Establishing IT-based infrastructures to promote sound.
- Pengembangan dan perluasan jaringan usaha, terutama di daerah potensial.
  Developing and expanding business network, particularly in potential areas.
- Mengoptimalkan kinerja perusahaan.
  Optimizing company performance.



Nilai Perusahaan
Corporate Values





Teamwork
Kami bekerja sama sebagai satu tim yang didasari nilai saling menghargai dan rasa kebanggaan.

We work together as a team based on mutual respect and dignity.



Integrity
Kami jujur, profesional dan berlandaskan moral dalam semua kegiatan usaha kami.

We are honest, professional and ethical in all our dealings.



Growth
Kami memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan peningkatan dan pembaharuan secara konsisten.

We are passionate about constant improvement and innovation.



Excellence & Efficiency
Kami berkomitmen untuk menghasilkan kinerja yang sempurna dan layanan prima.

We are committed to deliver outstanding performance and superior services.



Relationship Building
Kami secara berkesinambungan membangun hubungan kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan.

We continuously build longterm and mutually beneficial partnership.

Bidang Usaha

Line of Business [OJK C.4, GRI 102-2]

Pada tahun 2023, Perseroan menjalankan usaha dan kegiatan di bidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan cara:
   1. Sewa Pembiayaan;
   2. Jual dan Sewa Balik;
   3. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
   4. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
   5. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran;
   6. Pembiayaan Proyek;
   7. Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
   8. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

B. Pembiayaan Modal Kerja yang dilakukan dengan cara:
   1. Jual dan Sewa Balik;
   2. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
   3. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
   4. Fasilitas modal usaha; dan/atau
   5. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

C. Pembiayaan Multiguna yang dilakukan dengan cara:
   1. Sewa Pembiayaan;
   2. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran;
   3. Fasilitas Dana; dan/atau
   4. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

D. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

In 2023 the Company will carry out business and activities in the field of finance companies in accordance with the Company's Articles of Association.

Based on Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company as a finance company can carry out the following business activities:

A. Investment Financing which is done by way of:
   1. Finance Lease;
   2. Sale and Leaseback;
   3. Factoring with Recourse;
   4. Factoring without Recourse;
   5. Purchase Payment by Installments;
   6. Project Financing;
   7. Infrastructure Financing; and/or
   8. Additional financing after prior approval from the OJK.

B. Working Capital Financing which is done by way of:
   1. Sale and Leaseback;
   2. Factoring with Recourse;
   3. Factoring without Recourse;
   4. Business capital facilities; and/or
   5. Additional financing after prior approval from the OJK.

C. Multipurpose Financing which is done by way of:
   1. Finance Lease;
   2. Purchase Payment by Installments;
   3. Funding Facility; and/or
   4. Additional financing after prior approval from the OJK.

D. Other financing activities prior approval from the OJK.

E. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, Pemerintah dan/atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berlaku sebagai berikut:
   1. Pembiayaan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan akad:
      - Murabahah;
      - Salam; dan/atau
      - Istishna;
   2. Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan menggunakan akad:
      - Mudharabah;
      - Musyarakah;
      - Mudharabah Musytarakah; dan/atau
      - Musyarakah Mutanaqishoh;
   3. Pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad:
      - Ijarah;
      - Ijarah Muntahiyah Bittamlik;
      - Hawalah atau Hawalah bil Ujrah;
      - Wakalah atau Wakalah bil Ujrah;
      - Kafalah atau Kafalah bil Ujrah;
      - Ju'alah; dan/atau
      - Qardh.

Selain kegiatan usaha tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang lainnya sebagai berikut:

a. Sewa operasi;
b. Kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan/atau
c. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

E. Providing financing and/or conducting business based on sharia principles, in accordance with conditions established by OJK, the Government and/or the National Sharia Board Indonesian Ulama Council apply as follows:
   1. Trade financing performed using the following types of contracts:
      - *Murabahah;*
      - Salam; and/or
      - *Istishna;*
   2. Investment financing performed using the following types of contracts:
      - *Mudharabah;*
      - *Musyarakah;*
      - *Mudharabah Musytarakah;* and/or
      - *Musyarakah Mutanaqishoh;*
   3. Service financing performed using the following types of contracts:
      - *Ijarah;*
      - *Ijarah Muntahiyah Bittamlik;*
      - *Hawalah* or *Hawalah bil Ujrah;*
      - *Wakalah* or *Wakalah bil Ujrah;*
      - *Kafalah* or *Kafalah bil Ujrah;*
      - *Ju'alah;* and/or
      - *Qardh.*

In addition to business activities, the Company can carry out other supporting business activities as follows:

a. Operating Lease;
b. Any fee-based activities, which do not violate the regulation in the financial services sector; and/or
c. Other business that deals directly or indirectly with the aforementioned purposes whose implementation does not conflict with the provisions of applicable laws and regulations in the territory of the Republic of Indonesia.

Produk & Layanan
Product & Services

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki beragam produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Produk dan layanan yang dimiliki sebagai berikut:

In performing its business, the Company has a variety of products and services that suit the needs of consumers. The products and services are as follows:



A. Pembiayaan Multiguna Barang
- Pembiayaan Motor Baru
- Pembiayaan Motor Bekas

Multipurpose Goods Financing
- New Motorcycle Financing
- Used Motorcycle Financing



B. Pembiayaan Multiguna Jasa
- Pembiayaan Multiguna MotorKu
- Fasilitas Dana MotorKu
- Pembiayaan Multiguna MobilKu
- Fasilitas Dana MobilKu

Multipurpose Services Financing
- MotorKu Multipurpose Financing
- MotorKu Funding Facility
- MobilKu Multipurpose Financing
- MobilKu Funding Facility



C. Pembiayaan Investasi
- *Sale and Leaseback* MobilKu

Investment Financing
- MobilKu Sale and Leaseback



D. Pembiayaan Modal Kerja
- Fasilitas Modal Usaha MobilKu
- *Sale and Leaseback* MobilKu

Working Capital Financing
- MobilKu Business Capital Facility
- MobilKu Sale and Leaseback



E. Pembiayaan Jual Beli (Akad *Murabahah*)
- Pembiayaan Syariah Motor Baru
- Pembiayaan Syariah Logam Mulia "MasKu"

Buying Selling Financing (Murabahah Contract)
- New Motorcycle Sharia Financing
- "MasKu" Precious Metals Sharia Financing

Wilayah Operasional

[OJK C.3, GRI 102-4] Operational Areas

Perseroan beroperasi di berbagai wilayah di Indonesia dan tidak beroperasi di negara lain, dengan persebaran sebagai berikut:

In performing its business, the Company has a variety of products and services that suit the needs of consumers. The products and services are as follows:



Kantor Regional Sumatera Bagian Utara:
Regional Offices of North Sumatera:

- 18 Kantor Cabang / Branch Offices
- 2 Kantor Cabang Unit Usaha Syariah* / Sharia Unit Branch Offices
- 4 Kantor Selain Kantor Cabang / Non-Branch Office

Kantor Regional Jawa Barat:
Regional Offices of West Java Regional Offices:

- 15 Kantor Cabang / Branch Offices
- 6 Kantor Cabang Unit Usaha Syariah* / Sharia Unit Branch Offices
- 2 Kantor Selain Kantor Cabang / Non-Branch Office

Kantor Regional Sulawesi:
Regional Offices of Sulawesi:

- 13 Kantor Cabang / Branch Offices
- 1 Kantor Cabang Unit Usaha Syariah* / Sharia Unit Branch Offices
- 2 Kantor Selain Kantor Cabang / Non-Branch Office

Kantor Regional Sumatera Bagian Selatan:
Regional Offices of South Sumatera:

- 18 Kantor Cabang / Branch Offices
- 1 Kantor Cabang Unit Usaha Syariah* / Sharia Unit Branch Offices
- 5 Kantor Selain Kantor Cabang / Non-Branch Office

Kantor Regional Jawa Tengah Utara:
Regional Offices of North Central Java:

- 13 Kantor Cabang / Branch Offices
- 2 Kantor Cabang Unit Usaha Syariah* / Sharia Unit Branch Offices
- 4 Kantor Selain Kantor Cabang / Non-Branch Office

Kantor Regional Kalimantan :
Regional Offices of Kalimantan :

- 10 Kantor Cabang / Branch Offices
- 2 Kantor Cabang Unit Usaha Syariah* / Sharia Unit Branch Offices
- 0 Kantor Selain Kantor Cabang / Non-Branch Office

Kantor Regional Banten:
Regional Offices of Banten:

- 15 Kantor Cabang / Branch Offices
- 7 Kantor Cabang Unit Usaha Syariah* / Sharia Unit Branch Offices
- 2 Kantor Selain Kantor Cabang / Non-Branch Office

Kantor Regional Jawa Tengah Selatan:
Regional Offices of South Central Java:

- 14 Kantor Cabang / Branch Offices
- 5 Kantor Cabang Unit Usaha Syariah* / Sharia Unit Branch Offices
- 9 Kantor Selain Kantor Cabang / Non-Branch Office

Kantor Regional Jakarta, Bogor, Depok & Bekasi:
Regional Offices of Jakarta, Bogor, Depok & Bekasi:

- 18 Kantor Cabang / Branch Offices
- 10 Kantor Cabang Unit Usaha Syariah* / Sharia Unit Branch Offices
- 4 Kantor Selain Kantor Cabang / Non-Branch Office

Kantor Regional Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara:
Regional Offices of East Java, Bali, Nusa Tenggara:

- 28 Kantor Cabang / Branch Offices
- 5 Kantor Cabang Unit Usaha Syariah* / Sharia Unit Branch Offices
- 8 Kantor Selain Kantor Cabang / Non-Branch Office

*) Jumlah KC pada region tersebut yang juga memiliki izin sebagai KC UUS dan dapat melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
*) Branch Office (KC) that also holds permit as a Sharia Business Unit Branch Office (KC UUS) and can carry out financing activities based on sharia principles.

Struktur Organisasi

Organization Stucture

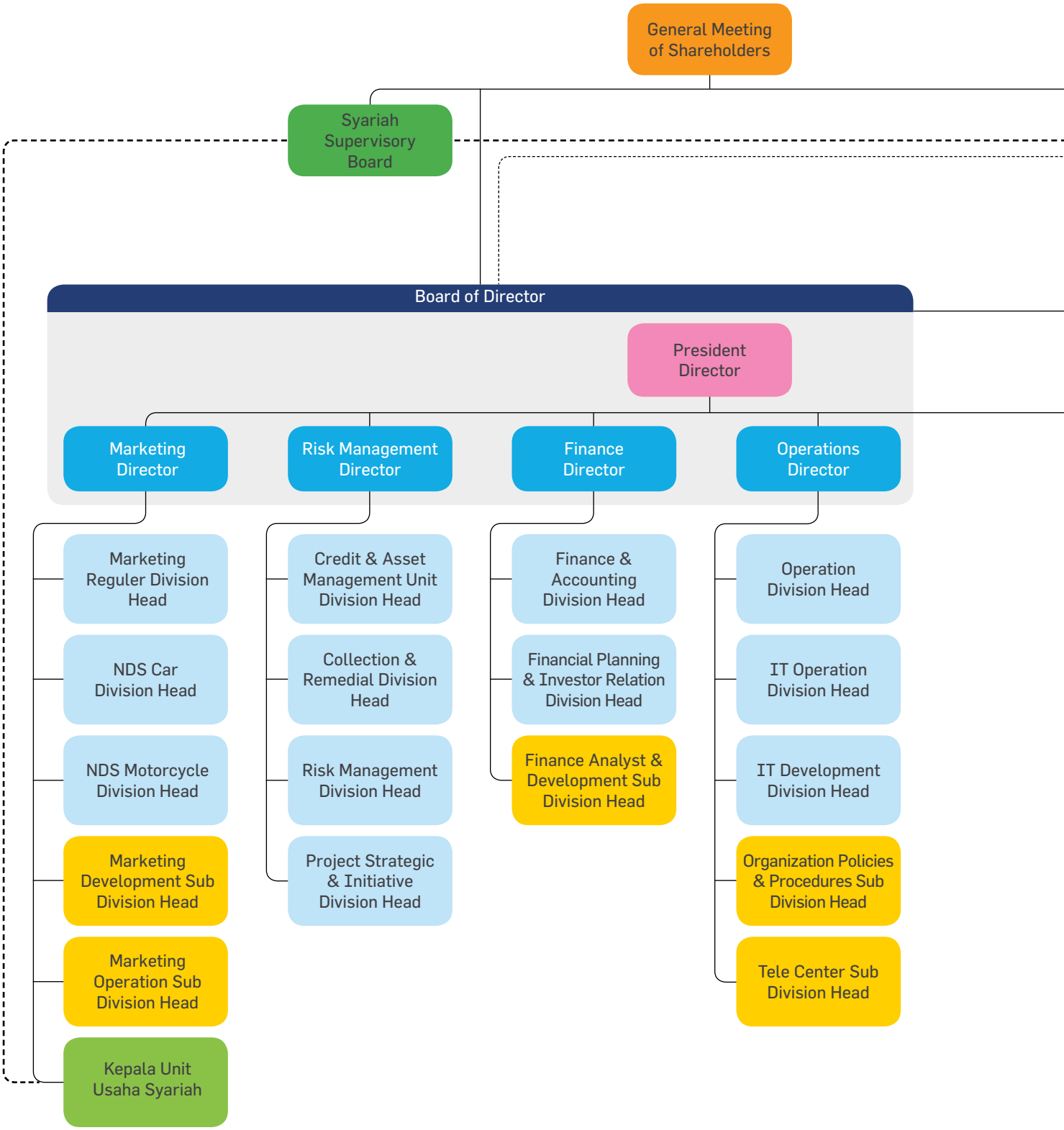

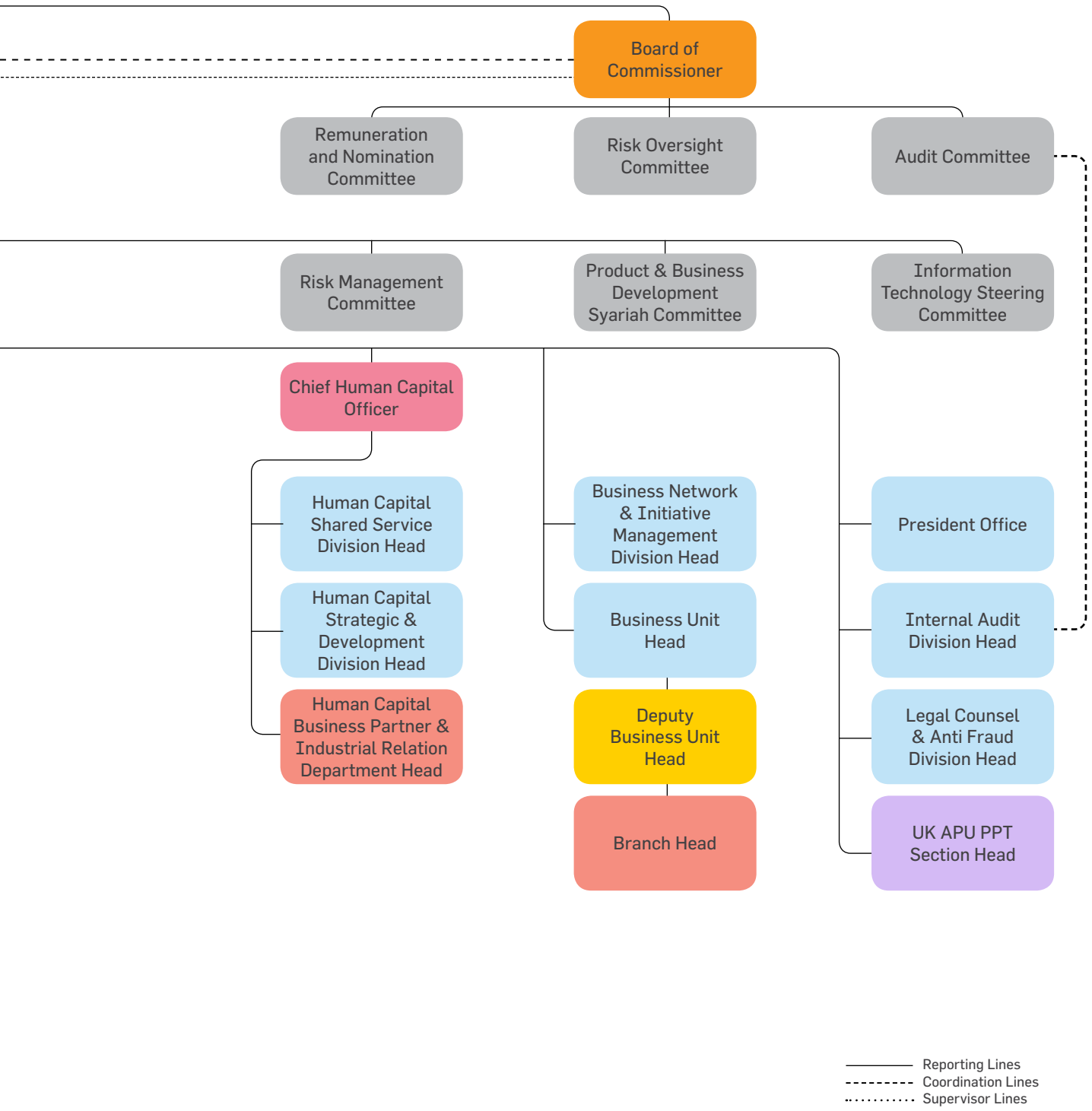
Board of Commissioner
Remuneration and Nomination Committee
Risk Oversight Committee
Audit Committee
Risk Management Committee
Product & Business Development Syariah Committee
Information Technology Steering Committee
Chief Human Capital Officer
Human Capital Shared Service Division Head
Human Capital Strategic & Development Division Head
Human Capital Business Partner & Industrial Relation Department Head
Business Network & Initiative Management Division Head
Business Unit Head
Deputy Business Unit Head
Branch Head
President Office
Internal Audit Division Head
Legal Counsel & Anti Fraud Division Head
UK APU PPT Section Head
Reporting Lines
Coordination Lines
Supervisor Lines

Keanggotaan Asosiasi

Association Memberships [OJK C.5, GRI 2-13, 2-28]

Keanggotaan Pada Organisasi Lain

1. Keanggotaan Perseroan Pada Asosiasi
   a. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).
   b. Indonesia *Corporate Secretary Association* (ICSA).
   c. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
   d. Asosiasi Emiten Indonesia (AEI).

2. Keanggotaan Perseroan Pada Lembaga Lainnya
   a. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
   b. Lembaga Pengelolaan Data Jaminan Perusahaan Pembiayaan dan Perbankan - PT Rapi Utama Indonesia (RAPINDO).
   c. Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan - PT PEFINDO Biro Kredit (PEFINDO).
   d. Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan - PT Kredit Biro Indonesia Jaya (KBIJ).
   e. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Memberships in Other Organizations

1. Memberships in Associations
   a. The Indonesia Financial Services Association (APPI).
   b. Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA).
   c. The Employers' Association of Indonesia (APINDO).
   d. Indonesian Public Listed Companies Association (AEI).

2. Memberships in Other Institutions
   a. Alternative Institution for Dispute Resolution at Financial Services (LAPS SJK).
   b. Financing and Banking Company Guarantee Data Management Institution - PT Rapi Utama Indonesia (RAPINDO).
   c. Credit Information Management Institute - PT PEFINDO Credit Bureau (PEFINDO).
   d. Credit Information Management Institute - PT Kredit Biro Indonesia Jaya (KBIJ).
   e. National Sharia Board - Indonesian Ulama Council.

Nama Asosiasi Associations	**Cakupan Asosiasi (Lokal, Nasional, Internasional)** Association Coverage (Local, National, International	**Status (Pengurus/ Anggota)** Status (Board/ Member)	**Iuran** | Fees (Dalam Rp Juta | In Rp Million)		
			2023	**2022**	**2021**
ICSA (*Indonesian Corporate Secretary Association*)	Nasional National	Anggota Member	5.000.000	5.000.000	4.000.000
APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia The Indonesia Financial Services Association	Nasional National	Anggota Member	78.810.000	67.100.000	67.100.000
APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) The Employers' Association of Indonesia	Nasional National	Anggota Member	30.000.000	30.000.000	30.000.000
AEI (Asosiasi Emiten Indonesia) Indonesian Public Listed Companies Association	Nasional National	Anggota Member	6.000.071	6.000.000	6.000.000
LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) Alternative Institution for Dispute Resolution at Financial Services	Nasional National	Anggota Member	12.500.000	12.500.000	11.000.000
RAPINDO (PT Rapi Utama Indonesia)	Nasional National	Anggota Member	77.700.000	1.110.000	50.000.000
Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan - PT PEFINDO Biro Kredit (PEFINDO)	Nasional National	Anggota Member	-	-	120.000.000
Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan - PT Kredit Biro Indonesia Jaya (KBIJ)	Nasional National	Anggota Member	80.000.000	-	-
DSN - MUI (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia) National Sharia Board - Indonesian Ulama Council	Nasional National	Anggota Member	18.000.000	18.000.000	18.000.000

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile

Per 31 Desember 2023, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang efektif menjabat sebagai berikut:

As of December 31, 2023, the effective composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:



I NYOMAN TJAGER
Presiden Komisaris/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner

Umur | Age
73 Tahun | 73 Years Old

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia | Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Hukum Dagang dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1976), gelar Master of Economic dari Fordham University, New York, USA (1987), dan meraih gelar Doktor Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2003).

Educational Background

He obtained a Degree in Commercial Law from University of Gajah Mada, Yogyakarta (1976), Master of Economic from Fordham University, New York, USA (1987) and obtained Doctor of Law degree from Gadjah Mada University, Yogyakarta (2003).

Dasar Hukum Pengangkatan

1. Sebagai Komisaris Independen
   a. Diangkat pertama kali: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Juli 2008.
   b. Tanggal efektif menjabat pertama kali: 23 Juli 2008.
   c. Diangkat kembali:
      - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011.
      - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2014 tanggal 16 April 2014.

2. Sebagai Presiden Komisaris/Komisaris Independen
   a. Diangkat pertama kali: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 23 April 2015.
   b. Tanggal efektif menjabat pertama kali: 5 Mei 2015.
   c. Diangkat kembali:
      - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017.
      - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020.
      - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 (untuk periode saat ini).

Basis of Appointment

1. As Independent Commissioner
   a. First appointed: Resolution of Extraordinary GMS dated July 23, 2008.
   b. Effective date for first term: July 23, 2008.
   c. Reappointed:
      - Resolution of Annual GMS in 2011 dated May 11, 2011.
      - Resolution of Annual GMS in 2014 dated April 16, 2014.

2. As President Commissioner/Independent Commissioner
   a. First appointed: Resolution of the Extraordinary GMS dated April 23, 2015.
   b. Effective date for first term: May 5, 2015.
   c. Reappointed:
      - Resolution of Annual GMS in 2017 dated May 31, 2017.
      - Resolution of Annual GMS in 2020 dated March 12, 2020.
      - Resolution of Annual GMS in 2023 dated March 30, 2023 (for the current period).

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile

Rangkap Jabatan

- Anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko PT Bank Nationalnobu Tbk (2011 - saat ini).
- Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Maybank Sekuritas Indonesia (d/h PT Maybank Kim Eng Securities) (2015 - saat ini).
- Komisaris Independen & Ketua Komite Audit PT Home Credit Indonesia (2015 - saat ini).
- Ketua Komite Audit Perseroan (Maret 2023 - saat ini).
- Ketua Komite Pemantau Risiko Perseroan (Maret 2023 - saat ini).
- Komisaris Independen dan Ketua Komite Nominasi & Remunerasi PT Sentul City Tbk (Maret 2023 – saat ini).

Concurrent Positions

- Member of Audit Committee & Risk Oversight Committee of PT Bank Nationalnobu Tbk (2011 - present).
- President Commissioner/Independent Commissioner of PT Maybank Sekuritas Indonesia (formerly PT Maybank Kim Eng Securities) (2015 - present).
- Independent Commissioner & Chairman of Audit Committee of PT Home Credit Indonesia (2015 - present).
- Chairman of Audit Committee of the Company (March 2023 - present).
- Chairman of Risk Oversight Committee of the Company (March 2023 - present).
- Independent Commissioner and Chairman of the Nomination & Remuneration Committee of PT Sentul City Tbk (March 2023 - present).

Pengalaman Kerja

- Staf Biro Hukum, Bapepam - Dept. Keuangan (1979 - 1988).
- Kepala Sub Bagian Pengendalian & Evaluasi Biro Hukum, Bapepam - Dept. Keuangan (1988 - 1990).
- Kepala Bagian Pemeriksaan & Evaluasi Biro Hukum, Bapepam - Dept. Keuangan (1990 - 1991).
- Kepala Bagian Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum Bapepam - Dept. Keuangan (1991).
- Kepala Biro Hukum Bapepam - Dept. Keuangan (1991 - 1999).
- Komisaris PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (1993 - 2001).
- Komisaris Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (1999 - 2003).
- Deputi Bidang Pengembangan Usaha Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (1999 - 2000).
- Deputi Menteri/Deputi Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi (2000).
- Sekretaris Menteri Negara/Sekretaris Utama Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN (2000).
- Direktur Jenderal Pembinaan BUMN, Dept. Keuangan (2000 - 2001).
- Komisaris PT (Persero) Pupuk Kalimantan Timur Tbk (2000 - 2002).
- Wakil Komisaris Utama dan Ketua Komite Audit PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (2001 - 2017).
- Komisaris PT Bhakti Capital Investment Indonesia Tbk (2001 - 2004).
- Staf Ahli Menteri Negara Bidang Kemitraan Usaha Kecil, BUMN - Kementerian BUMN (2001 - 2005).

Work Experience

- Legal Bureau Staff, Bapepam - Dept. of Finance (1979 - 1988).
- Head of Control & Evaluation Sub-Section of Legal Bureau, Bapepam - Dept. of Law Bureau, Bapepam - Dept. of Finance (1988 - 1990).
- Head of Examination & Evaluation Section of Legal Bureau, Bapepam-Dept. Finance (1990 - 1991).
- Head of Legislation and Legal Aid Section of Bapepam - Dept. of Finance (1991).
- Head of Legal Bureau Bapepam-Dept. Finance (1991 - 1999).
- Commissioner of PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (1993 - 2001).
- President Commissioner of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (1999 - 2003).
- Deputy for National Business Development, Investment Coordinating Board (BKPM) (1999 - 2000).
- Deputy Minister/Deputy Head of the Investment and Development Agency for SOEs for Restructuring and Privatization (2000).
- Secretary of the Minister of State/Chief Secretary of the Investment and Development Board of SOEs (2000).
- Director General of SOEs Development, Dept. of Finance (2000 - 2001).
- Commissioner of PT (Persero) Pupuk Kalimantan Timur Tbk (2000 - 2002).
- Vice President Commissioner and Chairman of Audit Committee of PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (2001 - 2017).
- Commissioner of PT Bhakti Capital Investment Indonesia Tbk (2001 - 2004).
- Expert Staff of the Minister of State for Small Business Partnerships, SOEs-Ministry of SOEs (2001 - 2005).

- Staf Pengajar Fakultas Hukum Program Notariat, Universitas Indonesia, Jakarta (2001 - 2007).
- Komisaris dan Ketua Komite Audit PT Bank Lippo Tbk (2003 - 2008).
- Staf Pengajar Program Magister Hukum Bisnis, Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta (2003 - 2012).
- Komisaris Utama PT Bursa Efek Indonesia (2008 - 2014).
- Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Ancora Indonesia Resources Tbk (2008 - 2014).

- Komisaris Independen Perseroan (2008 - 2015).

- Ketua Komite Audit Perseroan (2010).

- Ketua Komite Remunerasi & Nominasi Perseroan (2011 - 2013).
- Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Bank Nationalnobu Tbk (2011 - saat ini).

- Komisaris Independen PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk (2011 - 2016).
- Ketua Komite Audit Perseroan (2014 - 2016).

- Komisaris Utama PT Hanson International Tbk (2014 - 2017).
- Komisaris Independen & Wakil Ketua Komite GCG, Nominasi & Remunerasi AJB Bumiputera 1912 (2015 - 2016).
- Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Maybank Sekuritas Indonesia (d.h PT Maybank Kim Eng Securities) (2015 - saat ini).

- Presiden Komisaris/Komisaris Independen Perseroan (2015 - saat ini).
- Komisaris Independen & Ketua Komite Audit PT Home Credit Indonesia (2015 - saat ini).

- Komisaris Utama/Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk (2016 - 2020).
- Staf Ahli Bidang Perencanaan Komisi Pengawas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak & Gas Bumi (SKK Migas) (2016 - 2018).

- Tenaga Ahli Bidang Perencanaan Komisi Pengawas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak & Gas Bumi (SKK Migas) (2018 - 2020).
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia - PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2018 - saat ini).
- Ketua Komite Audit Perseroan (Maret 2023 - saat ini).

- Teaching Staff of Faculty of Law, Notarial Program, University of Indonesia, Jakarta (2001 - 2007).
- Commissioner and Chairman of Audit Committee of PT Bank Lippo Tbk (2003 - 2008).
- Teaching Staff of Master of Business Law Program, Gadjah Mada University - Yogyakarta (2003 - 2012)
- President Commissioner of PT Bursa Efek Indonesia (2008 - 2014).
- Independent Commissioner and Chairman of Audit Committee of PT Ancora Indonesia Resources Tbk (2008 - 2014).
- Independent Commissioner of the Company (2008 - 2015).
- Chairman of Audit Committee of the Company (2010).
- Chairman of Remuneration & Nomination Committee of the Company (2011 - 2013).
- Member of Audit Committee & Risk Oversight Committee of PT Bank Nationalnobu Tbk (2011 - present).
- Independent Commissioner of PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk (2011 - 2016).
- Chairman of Audit Committee of the Company (2014 - 2016).
- President Commissioner of PT Hanson International Tbk (2014 - 2017).
- Independent Commissioner & Vice Chairman of GCG Committee, Nomination & Remuneration of AJB Bumiputera 1912 (2015 - 2016).
- President Commissioner/Independent Commissioner of PT Maybank Sekuritas Indonesia (formerly PT Maybank Kim Eng Securities) (2015 - present).
- President Commissioner/Independent Commissioner of the Company (2015 - present).
- Independent Commissioner & Chairman of Audit Committee of PT Home Credit Indonesia (2015 - present).
- President Commissioner/Independent Commissioner and Chairman of the Audit Committee of PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk (2016 - 2020).
- Expert Staff for Planning of the Supervisory Commission of the Special Task Force for Upstream Oil & Gas Business Activities (SKK Migas) (2016 - 2018).
- Expert in Planning of the Supervisory Commission of the Special Task Force for Upstream Oil & Gas Business Activities (SKK Migas) (2018 - 2020).
- Member of the Maybank Indonesia Financial Conglomerate Integrated Governance Committee - PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2018 - present).
- Chairman of Audit Committee of the Company (March 2023 - present).

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile

- Ketua Komite Pemantau Risiko Perseroan (Maret 2023 - saat ini).
- Komisaris Independen dan Ketua Komite Nominasi & Remunerasi PT Sentul City Tbk (Maret 2023 – saat ini).

- Chairman of Risk Oversight Committee of the Company (March 2023 - present).
- Independent Commissioner and Chairman of the Nomination & Remuneration Committee of PT Sentul City Tbk (March 2023 - present).

Pernyataan Independensi (untuk periode saat ini)
Pernyataan independensi sebagai Presiden Komisaris/ Komisaris Independen telah dinyatakan dalam RUPS Tahunan tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023.

Declaration of Independence (for current period)
The statement of independence as President Commissioner/Independent Commissioner has been stated in the 2023 Annual GMS dated March 30, 2023.

Tugas dan Tanggung Jawab (*)
Bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.

Duties and Responsibilities (*)
Responsible for supervising the policies of the Board of Directors in managing the Company and providing advice to the Board of Directors.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Affiliated Relationship
Has no affiliations in financial relationships or family relationships with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or with the Major Shareholders and Controlling Shareholders of the Company.

*) Untuk tugas dan tanggung jawab lainnya dari masing-masing anggota Dewan Komisaris tersedia pada Bab Tata Kelola Perusahaan mengenai Dewan Komisaris.

*) Other duties and responsibilities of each Board of Commissioners member is presented in Corporate Governance Chapter on Board of Commissioners.



THILAGAVATHY NADASON

Komisaris
Commissioner

Umur | Age
62 Tahun | 62 Years Old

Kewarganegaraan | Citizenship
Malaysia | Malaysian

Domisili | Domicile
Jakarta

Riwayat Pendidikan
Meraih gelar Sarjana *Accounting* dari National University of Singapore, Singapura (1985).

Educational Background
She obtained a Bachelor of Accounting degree from National University of Singapore, Singapore (1985).

Dasar Hukum Pengangkatan
a. Diangkat pertama kali: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 23 April 2015.
b. Tanggal efektif menjabat pertama kali: 4 Juni 2015
c. Diangkat kembali:
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017.
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020.
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 (untuk periode saat ini).

Basis of Appointment
a. First appointed: Resolution of Extraordinary GMS dated April 23, 2015.
b. Effective date for first term: June 4, 2015.
c. Reappointed:
   - Resolution of Annual GMS in 2017 dated May 31, 2017.
   - Resolution of Annual GMS in 2020 dated March 12, 2020.
   - Resolution of Annual GMS in 2023 dated March 30, 2023 (for the current period).

Rangkap Jabatan
- Direktur PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2009 - saat ini).
- Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko Perseroan (Maret 2023 - saat ini).
- Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (Maret 2023 – saat ini).

Concurrent Positions
- Director of PT Bank Maybank Indonesia Tbk 2009 - present).
- Vice Chairman of the Risk Oversight Committee of the Company (March 2023 - present).
- Vice Chairman of Nomination and Remuneration Committee of the Company (March 2023 - present).

Pengalaman Kerja
- *Manager Assurance* dan Pelatihan Pricewaterhouse Coopers Singapore (1985 - 1992).
- Senior *Manager Assurance* Pricewaterhouse Coopers Hongkong (1993 - 1997).
- *Partner Transaction Services* Pricewaterhouse Coopers Indonesia (1998 - 2005).
- Direktur, *Chief Finance Officer*, Direktur Operations dan *Branch Service Center* PT Bank Lippo Tbk (2005 - 2008 (sebelum merger)) - PT Bank CIMB Niaga Tbk (2008-2009 (setelah merger)).
- Direktur PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2009 - saat ini).

Work Experience
- Training and Assurance Manager of Pricewaterhouse Coopers Singapore (1985 - 1992).
- Senior Manager Assurance of Pricewaterhouse Coopers Hongkong (1993 - 1997).
- Partner Transaction Services of Pricewaterhouse Coopers Indonesia (1998 - 2005).
- Director, Chief Finance Officer, Director Operations and Branch Service Center PT Bank Lippo Tbk (2005 - 2008 (before merging)) - PT Bank CIMB Niaga Tbk (2008-2009 (after merging)).
- Director of PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2009 - present).

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile

- Komisaris Perseroan (2015 - saat ini).
- Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko Perseroan (Maret 2023 - saat ini).
- Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (Maret 2023 - saat ini).

- Commissioner of the Company (2015 - present).
- Vice Chairman of the Risk Oversight Committee of the Company (March 2023 - present).
- Vice Chairman of Nomination and Remuneration Committee of the Company (March 2023 - present).

Tugas dan Tanggung Jawab (*)

Bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.

Duties and Responsibilities (*)

Responsible for supervising the policies of the Board of Directors in managing the Company and providing advice to the Board of Directors.

Hubungan Afiliasi

- Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan PT Wahana Makmur Sejati selaku Pemegang Saham Utama Perseroan dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
- Memiliki hubungan afiliasi berupa hubungan keuangan dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk selaku Pemegang Saham Utama Perseroan dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Affiliated Relationship

- Has no affiliations in family relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or with the Major Shareholders and Controlling Shareholders of the Company.
- Has no affiliations in financial relations with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and PT Wahana Makmur Sejati as the Company's Main Shareholder and Controlling Shareholder.
- Has an affiliate relationship in financial relationship with PT Bank Maybank Indonesia Tbk as the Company's Main Shareholder and Controlling Shareholder of the Company.

*) Untuk tugas dan tanggung jawab lainnya dari masing-masing anggota Dewan Komisaris tersedia pada Bab Tata Kelola Perusahaan mengenai Dewan Komisaris.

*) Other duties and responsibilities of each Board of Commissioners member is presented in Corporate Governance Chapter on Board of Commissioners.



MYRNIE ZACHRAINI TAMIN

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Umur | Age
60 Tahun | 60 Years Old

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia | Indonesian

Domisili | Domicile
Bogor

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (1987) dan meraih gelar Magister Hukum Bisnis/Program Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung (2006).

Educational Background

She obtained a Bachelor's degree in Accounting, Faculty of Economics from the University of Indonesia, Jakarta (1987) and a Master's in Business Law, Faculty of Law from Padjadjaran University, Bandung (2006).

Dasar Hukum Pengangkatan

a. Diangkat pertama kali: Keputusan RUPS Tahunan tahun 2010 tanggal 22 April 2010.
b. Tanggal efektif menjabat pertama kali: 5 Juli 2010.
c. Diangkat kembali:
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011.
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2014 tanggal 16 April 2014.
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017.
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020.
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 (untuk periode saat ini).

Basis of Appointment

a. First appointed: Resolution of Annual GMS in 2010 dated April 22, 2010.
b. Effective date for first term: July 5, 2010.
c. Reappointed:
   - Resolution of Annual GMS in 2011 dated May 11, 2011.
   - Resolution of Annual GMS in 2014 dated April 16, 2014.
   - Resolution of Annual GMS in 2017 dated May 31, 2017.
   - Resolution of Annual GMS in 2020 dated March 12, 2020.
   - Resolution of Annual GMS in 2023 dated March 30, 2023 (for the current period).

Rangkap Jabatan

- Anggota Komite Audit Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) (2014 - saat ini).
- Anggota Komite Audit PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) (2018 - saat ini).
- Anggota Komite Audit PT Medikaloka Hermina Tbk (2020 - saat ini).
- Anggota Komite Audit Universitas Indonesia (2020 - saat ini).
- Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bumi Resources Tbk (2022 – saat ini).
- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (Maret 2023 – saat ini).
- Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan (Maret 2023 - saat ini).
- Anggota Komite Audit PT AirAsia Indonesia Tbk (Juni 2023 - saat ini).

Concurrent Positions

- Member of Audit Committee of Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) (2014 - present).
- Member of Audit Committee of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) (2018 - present).
- Member of Audit Committee of PT Medikaloka Hermina Tbk (2020 - present).
- Member of Audit Committee of the University of Indonesia (2020 - present).
- Member of Risk Oversight Committee of PT Bumi Resources Tbk (2022 - present).
- Chairman of the Nomination and Remuneration Committee of the Company (March 2023 - present).
- Member of Risk Oversight Committee of the Company (March 2023 - present).
- Member of Audit Committee of PT AirAsia Indonesia Tbk (June 2023 - present).

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile

Pengalaman Kerja

- Direktur KAP Hadi Sutanto & Rekan (Price Waterhouse) (1987 - 2004).
- Non-Equity Partner KAP Haryanto Sahari & Rekan (Pricewaterhousecoopers) (2004 - 2007).
- Konsultan Tass Consulting (2007 - 2010).
- Dosen Yayasan Pendidikan Bakrie (2007 - 2009).
- Anggota Komite Audit PT Indo Tambangraya Megah Tbk (2008 - 2012).
- Komisaris Independen Perseroan (2010 - saat ini).
- Ketua Komite Audit Perseroan (2011 - 2014).
- Anggota Komite Audit PT Bumi Resources Tbk (2012 - 2022).
- Anggota Komite Audit PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2013 - 2018).
- Anggota Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia (2013 - 2016).
- Anggota Komite Audit Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) (2014 - saat ini).
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia - PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank International Indonesia Tbk) (2015 - saat ini).
- Ketua Ikatan Komite Audit Indonesia (2016 - 2019).
- Ketua Komite Audit Perseroan (2016 - 2020).
- Anggota Komite Audit PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) (2018 - saat ini).
- Anggota Dewan Sertifikasi Ikatan Komite Audit Indonesia (2019 - 2022).
- Anggota Komite Audit PT Medikaloka Hermina Tbk (2020 - saat ini).
- Anggota Komite Audit Universitas Indonesia (2020 - saat ini).
- Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bumi Resources Tbk (2022 – saat ini).
- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (Maret 2023 – saat ini).
- Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan (Maret 2023 – saat ini).
- Anggota Komite Audit PT AirAsia Indonesia Tbk (Juni 2023 - saat ini).

Work Experience

- Director KAP Hadi Sutanto & Partner (Price Waterhouse) (1987 - 2004).
- Non-Equity Partner KAP Haryanto Sahari & Partner (Pricewaterhousecoopers) (2004 - 2007).
- Consultant of Tass Consulting (2007 - 2010).
- Lecturer of Bakrie Education Foundation (2007 - 2009).
- Member of Audit Committee of PT Indo Tambangraya Megah Tbk (2008 - 2012).
- Independent Commissioner of the Company (2010 - Present).
- Chairman of Audit Committee of the Company (2011 - 2014).
- Member of Audit Committee of PT Bumi Resources Tbk (2012 - 2022).
- Member of Audit Committee of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2013 - 2018).
- Member of Management Board of Indonesian Audit Committee Association (2013 - 2016).
- Member of Audit Committee of Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) (2014 - present).
- Member of Integrated Governance Committee of Maybank Indonesia Financial Conglomerate - PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank International Indonesia Tbk) (2015 - present).
- Chairman of the Indonesia Audit Committee Association (2016 - 2019).
- Chairman of Audit Committee of the Company (2016 - 2020).
- Member of the Audit Committee of PT Professional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) (2018 - present).
- Member of Certification Board of Indonesian Audit Committee Association (2019 - 2022).
- Member of Audit Committee of PT Medikaloka Hermina Tbk (2020 - present).
- Member of the Audit Committee of the University of Indonesia (2020 - present).
- Member of Risk Oversight Committee of PT Bumi Resources Tbk (2022 - present).
- Chairman of the Nomination and Remuneration Committee of the Company (March 2023 - present).
- Member of Risk Oversight Committee of the Company (March 2023 - present).
- Member of the Audit Committee of PT AirAsia Indonesia Tbk (June 2023 - present).

Pernyataan Independensi (untuk periode saat ini)

Pernyataan independensi sebagai Komisaris Independen telah dinyatakan dalam RUPS Tahunan tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023.

Declaration of Independence (for current period)

The statement of independence as Independent Commissioner has been stated in the 2023 Annual GMS dated March 30, 2023.

Tugas dan Tanggung Jawab (*)
Bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.

Duties and Responsibilities (*)
Responsible for supervising the policies of the Board of Directors in managing the Company and providing advice to the Board of Directors.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Affiliated Relationship
Has no affiliations in financial relationships or family relationships with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or with the Major Shareholders and Controlling Shareholders of the Company.

*) Untuk tugas dan tanggung jawab lainnya dari masing-masing anggota Dewan Komisaris tersedia pada Bab Tata Kelola Perusahaan mengenai Dewan Komisaris.

*) Other duties and responsibilities of each Board of Commissioners member is presented in Corporate Governance Chapter on Board of Commissioners,

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 93 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Perseroan telah mengangkat kembali I Nyoman Tjager, Thilagavathy Nadason dan Myrnie Zachraini Tamin sebagai anggota Dewan Komisaris untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2023 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2024. Pada tanggal 11 Januari 2024 telah diselenggarakan RUPS Luar Biasa yang menyetujui adanya perubahan susunan Pengurus Perseroan sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang efektif menjabat per 31 Desember 2023 dan Per 31 Januari 2024 sebagaimana diungkapkan pada profil anggota Dewan Komisaris.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the decision of the Annual GMS in 2023 dated March 30, 2023, as outlined in the Deed of Statement of Meeting Decision of the Company No. 93 dated March 30, 2023, made before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta Administrative City, the Company has reappointed I Nyoman Tjager, Thilagavathy Nadason and Myrnie Zachraini Tamin as members of the Board of Commissioners for a term of office starting from the close of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders until the close of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. On January 11, 2024, an Extraordinary GMS was held that approved changes in the composition of the Company's management, hence the composition of the Company's Board of Commissioners members effectively serving as of December 31, 2023, and as of January 31, 2024, is disclosed in the profile of the Board of Commissioners members.

Profil Direksi
Board of Directors Profile

Per 31 Desember 2023, susunan anggota Direksi Perseroan yang efektif menjabat sebagai berikut:

As of December 31, 2023, the effective composition of the Company's Board of Directors is as follows:



DJAJA SURYANTO SUTANDAR
Presiden Direktur
President Director

Umur | Age
59 Tahun | 59 Years Old

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia | Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta

Riwayat Pendidikan
Meraih gelar Bsc Finance dari California State University of Sacramento, USA (1986).

Educational Background
He obtained a Bsc in Finance from California State University of Sacramento, USA (1986).

Dasar Hukum Pengangkatan
a. Diangkat pertama kali: Keputusan RUPS Tahunan tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011.
b. Tanggal efektif menjabat pertama kali: 20 Juli 2011.
c. Diangkat kembali:
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2014 tanggal 16 April 2014.
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017.
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020.
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 (untuk periode saat ini).

Basis of Appointment
a. First appointed: Resolution of Annual GMS in 2011 dated May 11, 2011.
b. Effective date for first term: July 20, 2011.
c. Reappointed:
   - Resolution of Annual GMS in 2014 dated April 16, 2014.
   - Resolution of Annual GMS in 2017 dated May 31, 2017.
   - Resolution of Annual GMS in 2020 dated March 12, 2020.
   - Resolution of Annual GMS in 2023 dated March 30, 2023 (for the current period).

Rangkap Jabatan
- Ketua Komite Manajemen Risiko Perseroan (2015 - saat ini).
- Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2015 - saat ini).
- Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan (2021 - saat ini).

Concurrent Positions
- Chairman of the Risk Management Committee of the Company (2015 - present).
- Member of Integrated Risk Management Committee of PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2015 - present).
- Chairman of the Information Technology Steering Committee of the Company (2021 - present).

Pengalaman Kerja
- *Management Trainee, all banking activities*, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) Cabang Juanda, Jakarta (1987 - 1988).

Work Experience
- Management Trainee, all banking activities, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) Juanda Branch, Jakarta (1987 - 1988).

- *Account Officer, Corporate Credit & Marketing*, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) Cabang Utama Thamrin, Jakarta (1988 - 1989).
- *Manager, Corporate Credit and Marketing*, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) Cabang Utama Thamrin, Jakarta (1990 - 1991).
- Senior *Manager,* Sub *Branch Manager*, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) Cabang Tanah Abang, Jakarta (1991 - 1992).
- AVP *Branch Manager*, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) Cabang Bandung, Jawa Barat (1993 - 1996).
- VP *Deputy* Area *Manager* untuk Area Jawa Tengah dan Jawa Barat., PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) Bandung, Jawa Barat (1996).
- VP *Branch Manager*, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) Cabang Kalibesar, Jakarta (1996 - 1999).
- SVP Regional *Head* untuk Sumatera PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia), Sumatera (1999 - 2002).
- VP *Temporary Head of Credit Review Division* PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) Thamrin *Head Office* (2000).

- SVP Regional *Head East Java & Eastern part of* Indonesia PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Surabaya (2002).
- Regional *Sales Head* Jawa Timur, Bali, NTT/ NTB PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Surabaya (2003 - 2005).
- Regional *Sales Head* PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Jakarta (2005).
- SVP *Chief National Sales Officer* PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) Jakarta (2005 - 2007).
- SVP *Chief Secured Loan Officer* PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) Jakarta (2007 - 2010).
- EVP Regional & *Branch Network Development Head* PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Jakarta (2011).
- Presiden Komisaris PT Maybank Indonesia Finance (d/h PT BII Finance), Jakarta (2007 - 2013).

- Presiden Direktur Perseroan (2011 - saat ini).

- Account Officer, Corporate Credit & Marketing, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) Thamrin Main Branch, Jakarta (1988 - 1989).
- Manager, Corporate Credit and Marketing, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) Thamrin Main Branch, Jakarta (1990 - 1991).
- Senior Manager, Sub Branch Manager, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) Tanah Abang Branch, Jakarta (1991 - 1992).
- AVP Branch Manager, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) Bandung Branch, West Java (1993 - 1996)
- VP Deputy Area Manager for Middle & West Java Area, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) Bandung, West Java (1996).
- VP Branch Manager, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) Kalibesar Branch Jakarta (1996 - 1999).
- SVP Regional Head for Sumatera PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Sumatera (1999 - 2002).
- VP Temporary Head of Credit Review Division PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) Thamrin Head Office (2000).
- SVP Regional Head East Java & Eastern part of Indonesia PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Surabaya (2002).
- Regional Sales Head East Java, Bali, NTT/NTB PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Surabaya (2003 - 2005).
- Regional Sales Head PT Bank Maybank Indonesia Tbk, (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Jakarta (2005).
- SVP Chief National Sales Officer PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Jakarta (2005 - 2007).
- SVP Chief Secured Loan Officer PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Jakarta (2007 - 2010).
- EVP Regional & Branch Network Development Head PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Jakarta (2011).
- President Commissioner of PT Maybank Indonesia Finance (formerly PT BII Finance), Jakarta (2007 - 2013).
- President Director of the Company (2011 - present).

Profil Direksi

Board of Directors Profile

- Komisaris PT Maybank Indonesia Finance (d/h PT BII Finance), Jakarta (2013 - 2017).
- Ketua Komite Manajemen Risiko Perseroan (2015 - saat ini).
- Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2015 - saat ini).
- Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan (2021 - saat ini).
- Sekretaris Perusahaan Perseroan (2021 - Mei 2022).

- Commissioner of PT Maybank Indonesia Finance (formerly PT BII Finance), Jakarta (2013 - 2017).
- Chairman of the Risk Management Committee of the Company (2015 - present).
- Member of Integrated Risk Management Committee of PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2015 - present).
- Chairman of the Information Technology Steering Committee of the Company (2021 - present).
- Corporate Secretary of the Company (2021 - May 2022).

Tugas dan Tanggung Jawab (*)

Memimpin dan mengelola Perseroan termasuk memberikan arahan strategis dalam hal kebijakan dan strategi di lingkup pengembangan bisnis, manajemen risiko, operasional, keuangan dan sumber daya manusia, agar sesuai dengan tujuan Perseroan.

Duties and Responsibilities (*)

In charge of leading and managing the Company including providing strategic directives in terms of policies and strategies in business development, risk management, operations, finance and human resources, in order to be in line with the Company's objectives.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Affiliated Relationship

Has no affiliations in financial relationships or family relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with the Major Shareholders and Controlling Shareholders of the Company.

*) Untuk tugas dan tanggung jawab lainnya dari masing-masing anggota Dewan Komisaris tersedia pada Bab Tata Kelola Perusahaan mengenai Dewan Komisaris.

*) Other duties and responsibilities of each Board of Commissioners member is presented in Corporate Governance Chapter on Board of Commissioners.



CINCIN LISA HADI

Direktur
Director

Umur | Age
44 Tahun | 44 Years Old

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia | Indonesian

Domisili | Domicile
Tangerang

Riwayat Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan sarjana dengan jurusan Akuntansi dari STIE Trisakti (2000).

Educational Background
She completed undergraduate education majoring in Accounting from STIE Trisakti (2000).

Dasar Hukum Pengangkatan
a. Diangkat pertama kali: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 13 Januari 2022.
b. Tanggal efektif menjabat pertama kali: 12 April 2022.
c. Diangkat kembali:
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 (untuk periode saat ini).

Basis of Appointment
a. First appointed: Resolution of Extraordinary GMS dated January 13, 2022.
b. Effective date for first term: April 12, 2022.
c. Reappointed:
   - Resolution of Annual GMS in 2023 dated March 30, 2023 (for the current period).

Rangkap Jabatan
- Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan (2021 - saat ini).
- Anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan (2022 - saat ini).
- Sekretaris Perusahaan Perseroan (Mei 2022 - saat ini).

Concurrent Positions
- Member of Information Technology Steering Committee of the Company (2021 - present).
- Member of the Risk Management Committee of the Company (2022 - present).
- Corporate Secretary of the Company (May 2022 - present).

Profil Direksi

Board of Directors Profile

Pengalaman Kerja

- Junior Auditor (Assistant-1) PT Deloitte Advisory (*a member firm of* Deloitte Touche Tohmatsu) (2001 - 2002).
- Associate Auditor KAP Dedy Muliadi & Rekan (Moore Stephens) (2002 - 2004).
- *Consolidated Reporting Manager* PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2005 - 2010).
- *Financial Reporting Head* PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2010 - 2014).
- *Head of Financial Reporting* PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2014 - 2017).
- *Head of Finance & Accounting* PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2017 - 2021).
- *Chief Financial Officer* Perseroan (2021 - 2022).
- Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan (2021 - saat ini).
- Direktur Perseroan (2022 - saat ini).
- Anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan (2022 - saat ini).
- Sekretaris Perusahaan Perseroan (Mei 2022 - saat ini).

Work Experience

- Junior Auditor (Assistant-1) PT Deloitte Advisory (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) (2001 - 2002).
- Associate Auditor of KAP Dedy Muliadi & Rekan (Moore Stephens) (2002 - 2004).
- Consolidated Reporting Manager of PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2005 - 2010).
- Financial Reporting Head of PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2010 - 2014).
- Head of Financial Reporting PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2014 - 2017).
- Head of Finance & Accounting PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2017 - 2021).
- Chief Financial Officer of the Company (2021 - 2022).
- Member of Information Technology Steering Committee of the Company (2021 - present).
- Director of the Company (2022 - present).
- Member of the Risk Management Committee of the Company (2022 - present).
- Corporate Secretary of the Company (May 2022 - present).

Tugas dan Tanggung Jawab (*)

Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan keuangan Perseroan serta memantau dan memastikan pengelolaan keuangan Perseroan sesuai dengan peraturan internal Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan prosedur serta standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Duties and Responsibilities (*)

In charge of all financial management of the Company, also to monitoring and ensuring that the Company's financial management is in accordance with the Company's internal regulations, prevailing laws and regulations, policies and procedures and financial accounting standards in Indonesia.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Affiliated Relationship

Has no affiliations in financial relationships or family relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with the Major Shareholders and Controlling Shareholders of the Company.

*) Untuk tugas dan tanggung jawab lainnya dari masing-masing anggota Dewan Komisaris tersedia pada Bab Tata Kelola Perusahaan mengenai Dewan Komisaris.

*) Other duties and responsibilities of each Board of Commissioners member is presented in Corporate Governance Chapter on Board of Commissioners.



ANTHONY YUAREZ PANGGABEAN

Direktur
Director

Umur | Age
61 Tahun | 61 Years Old

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia | Indonesian

Domisili | Domicile
Tangerang Selatan | South Tangerang

Riwayat Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan sarjana dengan jurusan Manajemen Informatika dari Universitas Gunadarma, Jakarta (1993).

Educational Background
He completed undergraduate education majoring in Management Informatics education from University of Gunadarma, Jakarta (1993).

Dasar Hukum Pengangkatan
a. Diangkat pertama kali: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 18 Februari 2016.
b. Tanggal efektif menjabat pertama kali: 17 Mei 2016.
c. Diangkat kembali:
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017.
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020.
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 (untuk periode saat ini).

Basis of Appointment
a. First appointed: Resolution of Extraordinary GMS dated February 18, 2016.
b. Effective date for first term: May 17, 2016.
c. Reappointed:
   - Resolution of Annual GMS in 2017 dated May 31, 2017.
   - Resolution of Annual GMS in 2020 dated March 12, 2020.
   - Resolution of Annual GMS in 2023 dated March 30, 2023 (for the current period).

Rangkap Jabatan
- Anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan (2016 - saat ini).
- Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan (2021 - saat ini).

Concurrent Positions
- Member of the Risk Management Committee of the Company (2016 - present).
- Member of the Information Technology Steering Committee of the Company (2021 - present).

Pengalaman Kerja
- *Accounting Staff (Processor)* Cabang Thamrin PT Bank CIMB Niaga Tbk (d/h PT Bank Niaga Tbk) (1986 - 1988).
- Regional Office I - Jakarta Area sebagai Koordinator *Accounting staff* PT Bank CIMB Niaga Tbk (d/h PT Bank Niaga Tbk) (1988 - 1993).
- *Head of Loan Administration Section - Head Office* Jakarta PT Bank MNC Internasional Tbk (d/h PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (1994 - 1996).
- *Head of Sundries Section - Head Office* Jakarta PT Bank MNC Internasional Tbk (d/h PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (1996 - 1997).

Work Experience
- Accounting Staff (Processor) Thamrin Branch of PT Bank CIMB Niaga Tbk (formerly PT Bank Niaga Tbk) (1986 - 1988).
- Regional Office I - Jakarta Area as Coordinator of Accounting staff PT Bank CIMB Niaga Tbk (formerly PT Bank Niaga Tbk) (1988 - 1993).
- Head of Loan Administration Section - Head Office Jakarta PT Bank MNC Internasional Tbk (formerly PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (1994 - 1996).
- Head of Sundries Section - Head Office Jakarta PT Bank MNC Internasional Tbk (formerly PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (1996 - 1997).

Profil Direksi
Board of Directors Profile

- *Head of Operation Division* - Jakarta PT Bank MNC Internasional Tbk (d/h PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (1997 - 2001).
- *Head of Operation*, *Financial Special* Audit Unit PT Bank MNC Internasional Tbk (d/h PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (2001).
- *Head of Service Quality Assurance* Unit PT Bank MNC Internasional Tbk (d/h PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (2001 - 2002).
- *Head of Operation Risk Management & Policy Unit* PT Bank MNC Internasional Tbk (d/h PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (2002).
- *Group Head of Operation and* IT PT Bank MNC Internasional Tbk (d/h PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (2002 - 2008).
- *Group Head of Operation* PT Bank MNC Internasional Tbk (d/h PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (2008 - 2010).
- *Acting Service Quality Head* PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2011).
- Regional *Operation Head* Sumatera PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2010 - 2011).
- Regional *Operation Head* Ekajiwa PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2011 - 2012).
- Regional *Operation Head* Ekajiwa dan Puri Kencana PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2012).
- *Head Operation Support* Jakarta Ekajiwa dan Puri Kencana PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2012 - 2013).
- *International Assignment i*n Maybank KL *involved in Regional Banking System Project* PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2013 - 2014).
- IT *Risk Management Head* PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2015 - 2016).
- Direktur Perseroan (2016 - saat ini).
- Anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan (2016 - saat ini).
- Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan (2021 - saat ini).

- Head of Operation Division - Jakarta PT Bank MNC Internasional Tbk (formerly PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (1997 - 2001).
- Head of Operation, Financial Special Audit Unit of PT Bank MNC Internasional Tbk (formerly PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (2001).
- Head of Service Quality Assurance Unit of PT Bank MNC Internasional Tbk (formerly PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (2001 - 2002).
- Head of Operation Risk Management & Policy Unit of PT Bank MNC Internasional Tbk (formerly PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (2002).
- Group Head of Operation and IT PT Bank MNC Internasional Tbk (formerly PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (2002 - 2008).
- Group Head of Operation PT Bank MNC Internasional Tbk (formerly PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (2008 - 2010).
- Acting Service Quality Head of PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2011).
- Regional Operation Head Sumatra PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2010 - 2011).
- Regional Operation Head Ekajiwa PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2011 - 2012).
- Regional Operation Head of Ekajiwa and Puri Kencana of PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2012).
- Head Operation Support Jakarta Ekajiwa and Puri Kencana PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2012 - 2013).
- International Assignment in Maybank KL involved in Regional Banking System Project PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2013 - 2014).
- IT Risk Management Head of PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2015 - 2016).
- Director of the Company (2016 - present).
- Member of the Risk Management Committee of the Company (2016 - present).
- Member of the Information Technology Steering Committee of the Company (2021 - present).

Tugas dan Tanggung Jawab (*)
Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan kegiatan operasional yang meliputi pada penyusunan dan penetapan *policy* dan *procedure* yang berlaku pada internal Perseroan, penyelenggaraan fungsi *service, telecenter* dan *information technology* (IT) Perseroan.

Duties and Responsibilities (*)
In charge of all the operations activities management including the development and stipulation of policies and procedures applicable in the Company's internal, implementation of service, tele center, and information technology of the Company.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Affiliated Relationship
Has no affiliations in financial relationships or family relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with the Major Shareholders and Controlling Shareholders of the Company.

*) Untuk tugas dan tanggung jawab lainnya dari masing-masing anggota Dewan Komisaris tersedia pada Bab Tata Kelola Perusahaan mengenai Dewan Komisaris.

*) Other duties and responsibilities of each Board of Commissioners member is presented in Corporate Governance Chapter on Board of Commissioners.

Profil Direksi
Board of Directors Profile



NJAUW VIDO ONADI
Direktur
Director

Umur | Age
44 Tahun | 44 Years Old

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia | Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta

Riwayat Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan sarjana jurusan Akuntansi dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta (2002) dan pendidikan pascasarjana jurusan Finance dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2013).

Educational Background
He completed undergraduate education majoring in Accounting from Atma Jaya Catholic University of Indonesia, Jakarta (2002) and postgraduate education majoring in Finance from University of Gadjah Mada, Yogyakarta (2013).

Dasar Hukum Pengangkatan
a. Diangkat pertama kali: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 19 Agustus 2016.
b. Tanggal efektif menjabat pertama kali: 19 Agustus 2016.
c. Diangkat kembali:
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017.
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020.
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 (untuk periode saat ini).

Basis of Appointment
a. First appointed: Resolution of Extraordinary GMS dated August 19, 2016.
b. Effective date for first term: August 19, 2016.
c. Reappointed:
   - Resolution of Annual GMS in 2017 dated May 31, 2017.
   - Resolution of Annual GMS in 2020 dated March 12, 2020.
   - Resolution of Annual GMS in 2023 dated March 30, 2023 (for the current period).

Rangkap Jabatan
- Wakil Ketua Komite Manajemen Risiko Perseroan (2016 - saat ini).
- Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (*Alternate*) PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2016 - saat ini).
- Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan (2021 - saat ini).

Concurrent Positions
- Vice Chairman of the Risk Management Committee of the Company (2016 - present).
- Member of Integrated Risk Management Committee (Alternate) of PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2016 - present).
- Member of Information Technology Steering Committee of the Company (2021 - present).

Pengalaman Kerja

- Auditor Kantor Akuntan Publik Trisno, Agoes dan Rekan (2003).
- Internal Audit *Team Leader* PT BFI Finance Indonesia Tbk (2003 - 2006).
- *Credit Operation Manager* PT BFI Finance Indonesia Tbk (2007 - 2010).
- *Associate Dept Head Risk Management* PT BFI Finance Indonesia Tbk (2010 - 2011).
- *Credit Policy & Development* Dept Head PT OTO Multiartha (2011).
- SVP *Portfolio Management & Risk Analytic* PT BFI Finance Indonesia Tbk (2011 - 2016).
- Direktur Perseroan (2016 - saat ini).
- Wakil Ketua Komite Manajemen Risiko Perseroan (2016 - saat ini).
- Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (Alternate) PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2016 - saat ini).
- Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan (2021 - saat ini).

Work Experience

- Auditor of Public Accounting Firm Trisno, Agoes and Partner (2003).
- Internal Audit Team Leader of PT BFI Finance Indonesia Tbk (2003 - 2006).
- Credit Operation Manager of PT BFI Finance Indonesia Tbk (2007 - 2010).
- Associate Dept Head Risk Management of PT BFI Finance Indonesia Tbk (2010 - 2011).
- Credit Policy & Development Dept Head of PT OTO Multiartha (2011).
- SVP Portfolio Management & Risk Analytic of PT BFI Finance Indonesia Tbk (2011 - 2016).
- Director of the Company (2016 - present).
- Vice Chairman of the Risk Management Committee of the Company (2016 - present).
- Member of Integrated Risk Management Committee (Alternate) of PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank International Indonesia Tbk) (2016 - present).
- Member of Information Technology Steering Committee of the Company (2021 - present).

Tugas dan Tanggung Jawab (*)

Memantau dan memastikan fungsi manajemen risiko di Perseroan berjalan efektif, mengarahkan dan memantau aktivitas *initiation credit* agar berjalan efektif dalam rangka mendorong pertumbuhan bisnis Perseroan dengan kualitas portofolio yang baik.

Duties and Responsibilities (*)

In charge of monitoring and ensuring effective implementation of risk management function in the Company, directing and monitoring effective credit initiation activities for the improvement of the Company's business growth with good portfolio quality.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Affiliated Relationship

Has no affiliations in financial relationships or family relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with the Major Shareholders and Controlling Shareholders of the Company.

*) Untuk tugas dan tanggung jawab lainnya dari masing-masing anggota Dewan Komisaris tersedia pada Bab Tata Kelola Perusahaan mengenai Dewan Komisaris.

*) Other duties and responsibilities of each Board of Commissioners member is presented in Corporate Governance Chapter on Board of Commissioners.

Profil Direksi
Board of Directors Profile



WIBOWO
Direktur
Director

Umur | Age
50 Tahun | 50 Years Old

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia | Indonesian

Domisili | Domicile
Tangerang Selatan | South Tangerang

Riwayat Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan sarjana dengan jurusan Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta (1997).

Educational Background
He Completed undergraduate education majoring in Accounting from the College of Economics, Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta (1997).

Dasar Hukum Pengangkatan
a. Diangkat pertama kali: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 Oktober 2019.
b. Tanggal efektif menjabat pertama kali: 30 Juli 2020.
c. Diangkat kembali:
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020.
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 (untuk periode saat ini).

Basis of Appointment
a. First appointed: Resolution of Extraordinary GMS dated October 10, 2019.
b. Effective date for first term: July 30, 2020.
c. Reappointed:
   - Resolution of Annual GMS in 2020 dated March 12, 2020.
   - Resolution of Annual GMS in 2023 dated March 30, (for the current period).

Rangkap Jabatan
- Anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan (2019 - saat ini).
- Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan (2021 - saat ini).

Concurrent Positions
- Member of the Risk Management Committee of the Company (2019 - present).
- Member of the Information Technology Steering Committee of the Company (2021 - present).

Pengalaman Kerja
- Kepala Operasional PT BFI Finance Indonesia Tbk (1997 - 2003).
- *Branch Manager* PT BFI Finance Indonesia Tbk (2004 - 2012).
- *Branch Manager Main Branch* PT BFI Finance Indonesia Tbk (2013).
- Area *Manager* Jawa Timur 1 PT BFI Finance Indonesia Tbk (2014 - 2015).
- Regional *Office Head East* Java & Kalimantan PT Buana Finance Tbk (2015 - 2017).
- *Business Director* PT Serba Mulia Auto (2017 – 2019).
- *Chief Marketing Officer* Perseroan (2019 - 2020).

Work Experience
- Head of Operations of PT BFI Finance Indonesia Tbk (1997 - 2003).
- Branch Manager of PT BFI Finance Indonesia Tbk (2004 - 2012).
- Branch Manager Main Branch of PT BFI Finance Indonesia Tbk (2013).
- Area Manager East Java 1 of PT BFI Finance Indonesia Tbk (2014 - 2015).
- Regional Office Head of East Java & Kalimantan, PT Buana Finance Tbk (2015 - 2017).
- Business Director of PT Serba Mulia Auto (2017 - 2019).
- Chief Marketing Officer of the Company (2019 - 2020).

- Anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan (2019 - saat ini).
- Direktur Perseroan (2020 - saat ini).
- Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan (2021 - saat ini).

- Member of the Risk Management Committee of the Company (2019 - present).
- Director of the Company (2020 - present).
- Member of the Information Technology Steering Committee of the Company (2021 - present).

Tugas dan Tanggung Jawab (*)
Bertanggung jawab atas pencapaian target *marketing* secara nasional serta memantau dan memastikan seluruh kegiatan pengembangan bisnis Perseroan dan implementasi kebijakan *marketing* yang diterapkan di Perseroan berjalan sesuai yang ditetapkan Perseroan.

Duties and Responsibilities (*)
Responsible on the achievement of nation-wide marketing targets, as well as monitoring and ensuring that all the Company's business development activities and the marketing policies implemented in the Company were performed as determined by the Company.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Affiliated Relationship
Has no affiliations in financial relationships or family relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with the Major Shareholders and Controlling Shareholders of the Company.

*) Untuk tugas dan tanggung jawab lainnya dari masing-masing anggota Dewan Komisaris tersedia pada Bab Tata Kelola Perusahaan mengenai Dewan Komisaris.

*) Other duties and responsibilities of each Board of Commissioners member is presented in Corporate Governance Chapter on Board of Commissioners.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 93 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Perseroan telah mengangkat kembali susunan anggota Direksi Perseroan yang menjabat pada periode sebelumnya untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2023 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2026. Pada tanggal 11 Januari 2024 telah diselenggarakan RUPS Luar Biasa yang menyetujui adanya perubahan susunan Pengurus Perseroan sehingga susunan anggota Direksi Perseroan yang efektif menjabat per 31 Desember 2023 dan Per 31 Januari 2024 sebagaimana diungkapkan pada profil anggota Direksi.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Based on the resolution of the 2023 Annual GMS dated March 30, 2023 as stated in the Deed of Statement of Meeting Resolution of the Company No. 93 dated March 30, 2023 made before Aulia Taufani, S.H., Notary in the Administration City of South Jakarta, the Company has reappointed the composition of members of the Board of Directors of the Company who served in the previous period for a term of office starting from the closing of the Annual GMS in 2023 until the closing of the Annual GMS in 2026. On January 11, 2024, an Extraordinary GMS was held that approved changes in the composition of the Company's management, hence the composition of the Company's Board of Directors members effectively serving as of December 31, 2023, and as of January 31, 2024, is disclosed in the profile of the Board of Directors members.

Profil Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board Profile

Per 31 Desember 2023, susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat sebagai berikut:

As of December 31, 2023, the composition of the Company's Board of Sharia Supervisory is as follows:



DR. H. ABDUL JABAR MAJID, MA

Ketua
Chairman

Umur | Age
71 Tahun | 71 Years Old

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia | Indonesian

Domisili | Domicile
Bekasi

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar sarjana dengan jurusan Dakwah dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir (1979), pendidikan Pascasarjana dengan jurusan Pendidikan Islam di Institut Studi Islam Kairo, Mesir (1991) dan pendidikan Doktor dengan jurusan Pendidikan Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2008).

Educational Background

Obtained Bachelor Degree majoring in Da'wah from Al-Azhar University, Cairo, Egypt (1979), a Master's degree in Islamic Education department at the Islamic University of Cairo, Egypt (1991) and a Doctoral degree in Islamic Education from the State Islamic University of Syarif Hidayatullah, Jakarta (2008).

Dasar Hukum Pengangkatan

a. Sebagai anggota DPS
   - Diangkat pertama kali: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 26 Maret 2008.
   - Tanggal efektif menjabat pertama kali: 26 Maret 2008.

b. Sebagai Ketua DPS
   - Diangkat pertama kali : Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 19 Maret 2009.
   - Tanggal efektif menjabat pertama kali: 19 Maret 2009.

c. Diangkat kembali:
   - Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 11 Mei 2011.
   - Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 16 April 2014.
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017.
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020.
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 (untuk periode saat ini).

Basis of Appointment

a. As a member of DPS
   - First appointment: Resolution of Extraordinary GMS dated March 26, 2008.
   - Effective date for first term: March 26, 2008.

b. As a chairman of DPS
   - Appointed for the first time: Resolution of Extraordinary GMS dated March 19, 2009.
   - Effective date for first term: March 19, 2009.

c. Reappointed:
   - Resolution of Extraordinary GMS dated May 11, 2011.
   - Resolution of Extraordinary GMS dated April 16, 2014.
   - Resolution of Annual GMS in 2017 dated May 31, 2017.
   - Resolution of Annual GMS in 2020 dated March 12, 2020.
   - Resolution of Annual GMS in 2023 dated March 30, 2023 (for the current period).

Rangkap Jabatan

- Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Attaqwa, Bekasi, dalam Bidang Ilmu Pendidikan Islam, Sejarah Pendidikan Islam, Pemikiran Pendidikan Islam, Tafsir Tematik dan Kapita Selekta Pendidikan Islam (1992 - saat ini).
- Anggota DPS PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2003 - saat ini).
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia - PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2017 - saat ini).

Concurrent Positions

- Permanent Lecturer at Attaqwa Islamic High School, Bekasi, in Islamic Education, History of Islamic Education, Islamic Education Thinking, Thematic Interpretation and Capita Selecta of Islamic Education (1992 - present).
- Member of DPS PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2003 - present).
- Member of Integrated Governance Committee of Maybank Indonesia Financial Conglomerate - PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2017 - present).

Pengalaman Kerja

- Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Attaqwa (1991 - 2001).
- Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Attaqwa, Bekasi, dalam Bidang Ilmu Pendidikan Islam, Sejarah Pendidikan Islam, Pemikiran Pendidikan Islam, Tafsir Tematik dan Kapita Selekta Pendidikan Islam (1992 - saat ini).
- Dosen Tidak Tetap Ilmu Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN Syahid, Jakarta, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Indonesia (STEKPI) dan Fakultas Agama Islam UNISMA (Universitas Islam 45) Bekasi (2002 - 2004).
- Anggota DPS PT Bank Maybank Indonesia (2003 - saat ini).
- Anggota DPS Perseroan (2008 - 2009).
- Ketua DPS Perseroan (2009 - saat ini).
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia - PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2017 - saat ini).

Work Experience

- Head of Attaqwa Islamic College (1991 - 2001).
- Permanent Lecturer at Attaqwa Islamic College, Bekasi, in Islamic Education, History of Islamic Education, Islamic Education Thinker, Thematic Interpretation and Kapita Selekta of Islamic Education (1992 - present).
- Non-Permanent Lecturer of Islamic Education at the Tarbiyah Faculty of IAIN Syahid, Jakarta, the Indonesian College of Economics and Banking (STEKPI) and the Faculty of Islamic Religion UNISMA (Islamic University 45) Bekasi (2002 - 2004).
- Member of DPS PT Bank Maybank Indonesia (2003 - present).
- Member of DPS of the Company (2008 - 2009).
- Chairman of DPS of the Company (2009 - present).
- Member of Integrated Governance Committee of Maybank Indonesia Financial Conglomerate - PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2017 - present).

Tugas dan Tanggung Jawab (*)

Berfungsi sebagai penasihat dan memberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah.

Duties and Responsibilities (*)

The DPS serves as an advisor and advises the Board of Directors, Heads of Sharia Business Units and Heads of Sharia Branch Offices of the Company on matters related to sharia principles.

Hubungan Afiliasi

- Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya serta PT Wahana Makmur Sejati selaku Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
- Memiliki hubungan afiliasi berupa hubungan keuangan dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk selaku Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Affiliated Relationship

- Has no affiliations in family relationships with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, other members of Sharia Supervisory Board or with the Main Shareholders and Controlling Shareholders of the Company.
- Has no affiliations in financial relationships with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners other members of Sharia Supervisory Board and PT Wahana Makmur Sejati as the Main Shareholders and Controlling Shareholders of the Company.
- Has an affiliate relationship in financial relationship with PT Bank Maybank Indonesia Tbk as the Company's Main Shareholder and Controlling Shareholder.

*) Untuk tugas dan tanggung jawab lainnya dari masing-masing anggota DPS tersedia pada Bab Tata Kelola Perusahaan mengenai DPS.

*) Other duties and responsibilities of each DPS member is presented in Corporate Governance Chapter on DPS.

Profil Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board Profile



H. MUH. TAUFIK DARMANSYAH, S.E., C.P.A. **

Anggota
Member

Umur | Age
67 Tahun | 67 Years Old

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia | Indonesian

Domisili | Domicile
Bekasi

Riwayat Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan sarjana dengan jurusan Manajemen Perusahaan di Universitas Airlangga, Surabaya (1983).

Educational Background

He obtained a bachelor's degree majoring in Corporate Management at Airlangga University, Surabaya (1983).

Dasar Hukum Pengangkatan

a. Diangkat pertama kali: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 26 Maret 2008.
b. Tanggal efektif menjabat pertama kali: 26 Maret 2008.
c. Diangkat kembali:
   - Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 11 Mei 2011.
   - Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 16 April 2014.
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017.
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020.
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 (untuk periode saat ini).

Basis of Appointment

a. First appointment: Resolution of Extraordinary GMS dated May 11, 2011.
b. Effective date in office for the first term: March 26, 2008.
c. Reappointed:
   - Resolution of Extraordinary GMS dated May 11, 2011.
   - Resolution of Extraordinary GMS dated April 16, 2014.
   - Resolution of Annual GMS in 2017 dated May 31, 2017.
   - Resolution of Annual GMS in 2020 dated March 12, 2020.
   - Resolution of Annual GMS in 2023 dated March 30, 2023 (for the current period).

Rangkap Jabatan

- Direktur Utama PT BPR Syariah Amanah Insani (1997 - saat ini).
- Bendahara Yayasan di Yayasan Sulthon Aulia (YSA) dan Sekretaris Badan Pengelola Sekolah Sulthon Aulia Boarding School (SABS) (2011 - saat ini).

Concurrent Positions

- President Director of PT BPR Syariah Amanah Insani (1997 - present).
- Treasurer of the Foundation at Sulthon Aulia Foundation (YSA) and Secretary of the Management Board of Sulthon Aulia Boarding School (SABS) (2011 - present).

Pengalaman Kerja
- Direktur Utama PT BPR Syariah Amanah Insani (1997 - saat ini).
- Penasehat Syariah Perseroan (2006 - 2008).
- Anggota DPS Perseroan (2008 - saat ini).
- Bendahara Yayasan di Yayasan Sulthon Aulia (YSA) dan Sekretaris Badan Pengelola Sekolah Sulthon Aulia Boarding School (SABS) (2011 - saat ini).
- Distributor Independen PT Enagic Indonesia (2015 - saat ini).

Work Experience
- President Director of PT BPR Syariah Amanah Insani (1997 - present).
- Sharia Advisor to the Company (2006 - 2008).
- Member of DPS of the Company (2008 - present).
- Treasurer of the Foundation at Sulthon Aulia Foundation (YSA) and Secretary of the Management Board of Sulthon Aulia Boarding School (SABS) (2011 - present).
- Independent Distributor of PT Enagic Indonesia (2015 - present).

Tugas dan Tanggung Jawab (*)
Berfungsi sebagai penasihat dan memberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah.

Duties and Responsibilities (*)
The DPS serves as an advisor and advises the Board of Directors, Heads of Sharia Business Units and Heads of Sharia Branch Offices of the Company on matters related to sharia principles.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Affiliated Relationship
Has no affiliations in the form of financial relationships or family relationships with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, other members of the Sharia Supervisory Board or with the Major Shareholders and Controlling Shareholders of the Company.

*) Untuk tugas dan tanggung jawab lainnya dari masing-masing anggota DPS tersedia pada Bab Tata Kelola Perusahaan mengenai DPS.
**) Mengundurkan diri per 8 September 2023 dan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 11 Januari 2024.

*) Other duties and responsibilities of each DPS member is presented in Corporate Governance Chapter on DPS.
**) Resigned as of September 8, 2023 and has received approval from the Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 11, 2024.

Profil Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board Profile



DR. IR. H. M. NADRATUZZAMAN HOSEN

Anggota
Member

Umur | Age
62 Tahun | 62 Years Old

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia | Indonesian

Domisili | Domicile
Bogor

Riwayat Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan sarjana dengan jurusan Peternakan dari Institut Pertanian Bogor, Bogor (1984), pendidikan pascasarjana dengan jurusan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan dari Institut Pertanian Bogor, Bogor (1990), pendidikan pascasarjana jurusan program Ekonomi dari University of New England, Australia (1996) dan pendidikan Doktor dengan jurusan *Philosophy of Economics* dari University of New England, Australia (2001).

Educational Background

He obtained Bachelor Degree in Animal Husbandry from Bogor Agricultural Institute, Bogor (1984), a master's degree in Regional and Rural Development Planning from Bogor Agricultural Institute, Bogor (1990), a master's degree in Economics program from University of New England, Australia (1996) and a Doctoral degree in Philosophy of Economics from University of New England, Australia (2001).

Dasar Hukum Pengangkatan

a. Diangkat pertama kali: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 11 Mei 2011.
b. Tanggal efektif menjabat pertama kali: 11 Mei 2011.
c. Diangkat kembali:
   - Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 16 April 2014.
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017.
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020.
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 (untuk periode saat ini).

Basis of Appointment

a. First appointment: Resolution of Extraordinary GMS dated May 11, 2011.
b. Effective date in office for the first term: May 11, 2011.
c. Reappointed:
   - Resolution of Extraordinary GMS dated April 16, 2014.
   - Resolution of Annual GMS in 2017 dated May 31, 2017.
   - Resolution of Annual GMS in 2020 dated March 12, 2020.
   - Resolution of Annual GMS in 2023 dated March 30, 2023 (for the current period).

Rangkap Jabatan

- Dosen Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan pangkat Guru Besar (IV/a) (2002 - saat ini).
- DPS PT MNC Guna Usaha Indonesia (2016 - saat ini)
- DPS PT Danareksa Investment Management (2017 - saat ini).
- Anggota Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat (2020 - saat ini).
- DPS PT MNC Finance (2022 - saat ini).

Concurrent Positions

- Lecturer of Islamic Economics UIN Syarif Hidayatullah Jakarta as Professor (IV/a) (2002 - present).
- DPS PT MNC Guna Usaha Indonesia (2016 - present)
- DPS PT Danareksa Investment Management (2017 - present).
- Member of the Central National Amil Zakat Board (BAZNAS) (2020 - present).
- DPS PT MNC Finance (2022 - present).

Pengalaman Kerja

- Staff Bina Program, Dinas Pendidikan Bengkulu (1984).
- Kepala Seksi Perumusan dan Pengendalian Program, Dinas Peternakan Bengkulu (1987).
- Kepala Bidang Teknologi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati, Kementerian Riset dan Teknologi (eselon III/a) (2001 - 2003).
- Staff Ahli Bidang BUMN Komisi V, DPR RI (2001 - 2004).
- Dosen Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan pangkat Guru Besar (IV/a) (2002 - saat ini).
- Peneliti Senior SMERU *Research Institute* (2003).

- *Vice President* MACON *International Consultant* (2004).
- Direktur Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) (2005 - 2009).
- Dekan Fakultas Ekonomi YARSI (2009 - 2011).

- Ketua Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam di UIN Syarif Hidayatullah (2011 - 2013).
- Direktur *Executive Islamic Banking and Finance* (IBFI) Trisakti (2011 - 2013).
- Dewan Pengawas Syariah PT Maybank Indonesia Finance (d/h PT BII Finance) (2011 - 2017).
- Anggota DPS Perseroan (2011 - saat ini).
- Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (2014 - 2017).

- Anggota Forum Manajemen Indonesia (2014 - saat ini).
- Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Produk Halal, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2016 - 2017).
- DPS PT GAP Capital (2016 - 2019).
- DPS PT Treasure Fund Investama (2016 - 2020).
- DPS PT MNC Guna Usaha Indonesia (2016 - saat ini).
- DPS PT Danareksa Investment Management (2017 - saat ini).
- Anggota Senat Universitas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018 - 2022).
- Penasihat Syariah BP-TAPERA (2020 - 2023).
- Dewan Pembina Pusat Pengkajian dan Pengembangan Jaminan Produk Halal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2020 - 2022).
- Ketua UPZ BAZNAS Kota Tangerang Selatan Masjid Al-Husainy Cempaka Putih (2015 - 2020).
- Anggota Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat (2020 - saat ini).

Work Experience

- Program Development Staff, Bengkulu Education Office (1984).
- Head of Program Formulation and Control Section, Bengkulu Livestock Service (1987).
- Head of Environmental Technology and Biodiversity, Ministry of Research and Technology (echelon III/a) (2001 - 2003).
- Expert Staff for SOE Commission V, DPR RI (2001 - 2004).
- Lecturer of Islamic Economics UIN Syarif Hidayatullah Jakarta as Professor (IV/a) (2002 - present).
- Senior Researcher at the SMERU Research Institute (2003).
- Vice President MACON International Consultant (2004).
- Director of Sharia Economic Communication Center (PKES) (2005 - 2009).
- Dean of the Faculty of Economics YARSI (2009 - 2011).
- Chairman of the Center for the Study and Development of Islamic Economics at UIN Syarif Hidayatullah (2011 - 2013).
- Director Executive Islamic Banking and Finance (IBFI) Trisakti (2011 - 2013).
- Sharia Supervisory Board of PT Maybank Indonesia Finance (formerly PT BII Finance) (2011 - 2017).
- Member of DPS of the Company (2011 - present).
- Vice Chairman of the Indonesian Waqf Board (2014 - 2017).
- Member of Indonesian Management Forum (2014 - present).
- Chairman of Halal Product Research and Development Center, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2016 - 2017).
- DPS PT GAP Capital (2016 - 2019).
- DPS PT Treasure Fund Investama (2016 - 2020).
- DPS PT MNC Guna Usaha Indonesia (2016 - present).
- DPS PT Danareksa Investment Management (2017 - present).
- Member of University Senate, Faculty of Economics and Business UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018 - 2022).
- Sharia Advisor to BP-TAPERA (2020 - 2023).
- Board of Trustees of the Center for the Study and Development of Halal Product Assurance UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2020 - 2022).
- Chairman of UPZ BAZNAS South Tangerang City Masjid Al-Husainy Cempaka Putih (2015-2020).
- Leadership Member of the Central National Board of Zakat (BAZNAS) (2020 - present).

Profil Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board Profile

- Dewan Pakar Social Trust Fund (STF) - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021 - saat ini).
- Anggota Tim Penyusun Daftar Efek Syariah - OJK (2022).
- DPS PT MNC Finance (2022 - saat ini).
- Tim Asesmen dan Penilaian Calon Lembaga Pemeriksa Halal (2022 - saat ini).

- Board of Experts of Social Trust Fund (STF) - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021 - present).
- Member of Sharia Securities List Drafting Team - OJK (2022).
- DPS PT MNC Finance (2022 - present).
- Assessment Team for Prospective Halal Inspection Institutions (2022 - present) .

Tugas dan Tanggung Jawab (*)
Berfungsi sebagai penasihat dan memberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah.

Duties and Responsibilities (*)
The DPS serves as an advisor and advises the Board of Directors, Heads of Sharia Business Units and Heads of Sharia Branch Offices of the Company on matters related to sharia principles.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Affiliated Relationship
Has no affiliations in the form of financial relationships or family relationships with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, other members of the Sharia Supervisory Board or with the Major Shareholders and Controlling Shareholders of the Company.

*) Untuk tugas dan tanggung jawab lainnya dari masing-masing anggota DPS tersedia pada Bab Tata Kelola Perusahaan mengenai DPS.

*) Other duties and responsibilities of each DPS member is presented in Corporate Governance Chapter on DPS.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DPS

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 93 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Perseroan telah mengangkat kembali susunan anggota DPS yang menjabat pada periode sebelumnya untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2023 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2026. Pada tanggal 11 Januari 2024 telah diselenggarakan RUPS Luar Biasa yang menyetujui adanya perubahan susunan Pengurus Perseroan sehingga susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang efektif menjabat per 31 Januari 2024 sebagai berikut:

Ketua : Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A.
Anggota : Prof. Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF SHARIA SUPERVISORY BOARD MEMBERS

Based on the decision of the Annual GMS in 2023 dated March 30, 2023, as outlined in the Deed of Statement of Meeting Decision of the Company No. 93 dated March 30, 2023, made before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta Administrative City, the Company has reappointed the composition of members of the previous period's Sharia Supervisory Board (DPS) for a term of office starting from the close of the 2023 Annual GMS until the close of the 2026 Annual GMS. On January 11, 2024, an Extraordinary GMS was held that approved changes in the composition of the Company's management, hence the composition of the Company's Sharia Supervisory Board members effectively serving as of January 31, 2024, is as follows:

Chairman : Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A.
Member : Prof. Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen.

Pejabat Senior
Senior Management

Chief



01

Ekanto Wijonosunu
Chief Human Capital Officer

Kepala Divisi | Division Head



01

Christin
Legal Counsel & Anti Fraud Division Head



02

Cristina M.F Samosir
HC Strategic & Development Division Head



03

Heru Santosa Hadiyanto
President Office



04

Erik Tanudjaja
Financial Planning & Investor Relation Division Head



05

Ade Setiadarma Muljono
IT Development Division Head



06

Felix Priscellius
IT Operation Division Head



07

Hariyanto
Credit & Asset Management Unit Division Head



08

Saidina Daud Bantayan
Business Network & Initiative Management Division Head



09

Herwin
Risk Management Division Head



10

Ignatius Prasetya
Internal Audit Division Head



11

Irene Khoe
Finance & Accounting Division Head



12

Mulyadi Alamsyah
NDS Car Division Head

Pejabat Senior
Senior Management


13
Panji Dwisatia Munajat
Project Strategic & Initiative Division Head


14
Rina Mayangsari
Operation Division Head


15
Sastra Ebenezer Tarigan
NDS Motorcycle Division Head


16
Gilbert Samuel Siahaan
Collection & Remedial Division Head


17
Sim Simadibrata
Marketing Reguler Division Head


18
Dimas Jagad Erlangga
Kepala Unit Usaha Syariah


19
Wendell William Yansens
HC Shared Service Division Head

Kepala Unit Bisnis
Business Unit Head


01
Andreas Aditya
Business Unit Head - A


02
Armawati, SH
Business Unit Head - B


03
Audi Pramadita Putra
Business Unit Head - A


04
Bambang Purwanto
Business Unit Head - A


05
Effendi Simatupang
Business Unit Head - B


06
Hastomo Nugroho
Business Unit Head - B


07
Lambertus Langkun
Business Unit Head - B


08
Swito Sitompul
Business Unit Head - B



09

Lutfiyudi K. Nurhidayatullah
Business Unit Head - B



10

Rio Satia Kemal Mahisa
Business Unit Head - B

Sub Division Head | Sub Division Head



01

Adhityo Leonardo T.L
Marketing Development Sub Division Head



02

Charles Sugiarta
Organization Policies & Procedures Sub Division Head



03

Herfan Herlambang
Tele Center Sub Division Head



04

Jimmy Sutrisno
Finance Analyst & Development Sub Division Head



05

Yenny
Marketing Operation Sub Division Head

Demografi Karyawan

Employees Demography [GRI 2-7]

Per 31 Desember 2023, Perseroan memiliki jumlah karyawan sebanyak 2.335, menurun dibanding tahun 2022 sebanyak 2.415 karyawan. Demografi karyawan Perseroan sebagai berikut:

As of December 31, 2023, the Company managed 2,335 employees, a decrease compared to 2022 by 2,415 employees. The Company's employee demographics are as follows:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Employee Composition by Employment Status

Status	2023	2022	2021
Kontrak | Contract [GRI 2-8]	5	6	5
Tetap | Permanent	2.198	2.270	2.269
Percobaan | Probation	132	139	142
Jumlah | Total	**2.335**	**2.415**	**2.416**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Employee Composition by Gender

Jenis Kelamin | Gender	2023	2022	2021
Perempuan | Female	743	700	646
Laki-laki | Male	1.592	1.715	1.770
Jumlah | Total	**2.335**	**2.415**	**2.416**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Employee Composition by Age

Usia | Age	2023	2022	2021
s/d 24 tahun | up to 24 years old	315	261	147
25 s/d 34 tahun | 25 up to 34 years old	1.075	1.049	1.035
35 s/d 49 tahun | 35 up to 49 years old	854	1.003	1.118
>=50 tahun | >=50 years old	91	102	116
Jumlah | Total	**2.335**	**2.415**	**2.416**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan

Employee Composition by Education Level

Pendidikan | Education	2023	2022	2021
SLTP | Junior High School	2	3	3
SLTA | Senior High School	324	409	442
Akademi | Academy	210	246	289
Strata 1 (S1) | Bachelor (S1)	1.776	1.732	1.662
Strata 2 & 3 (S2 & S3) | Magister and Doctoral (S2 & S3)	23	25	20
Jumlah | Total	**2.335**	**2.415**	**2.416**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Golongan Jabatan

Employee Composition by Position Grade

Jabatan | Position	2023	2022	2021
Staf & Non Staf | Staff and Non Staff	421	544	605
Eksekutif | Executive	1.572	1.541	1.488
Manajemen | Management	295	287	279
Senior Manajemen | Senior Management	47	43	44
Jumlah | Total	**2.335**	**2.415**	**2.416**

Komposisi Pemegang Saham

Shareholders & Ownership Percentage

Pemegang Saham Yang Memiliki 5% atau Lebih Saham
Shareholders with 5% or More Shares

No.	Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Lembar Saham Total Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value	Kepemilikan Ownership (%)
1	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.349.646.729	234.964.672.900	67,49
2	PT Wahana Makmur Sejati	870.600.000	87.060.000.000	25,01
3	Masyarakat/Public	261.234.751	26.123.475.100	7,50
Jumlah | Total		**3.481.481.480**	**348.148.148.000**	**100,00**

Kepemilikan Saham Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Kepemilikan saham Perseroan baik langsung dan tidak langsung dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang efektif menjabat pada tahun 2023 sebagai berikut:

Ownership of Company Shares by the Board of Directors and Board of Commissioners

The Company's direct and indirect share ownership for members of the Board of Commissioners and Board of Directors that serve effective as of 2023, is as follows:

Kepemilikan Saham Perseroan Oleh Direksi dan Dewan Komisaris
Ownership of Company Shares Board of Commissioners and Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	1 Januari 2023 | January 1, 2023				31 Desember 2023 | December 31, 2023			
		Kepemilikan Saham Langsung Direct Share Ownership		Kepemilikan Saham Tidak Langsung Indirect Share Ownership		Kepemilikan Saham Langsung Direct Share Ownership		Kepemilikan Saham Tidak Langsung Indirect Share Ownership	
		Tidak Ada None	Ada Yes	Tidak Ada None	Ada Yes	Tidak Ada None	Ada Yes	Tidak Ada None	Ada Yes
Dewan Komisaris | Board of Commissioners									
I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris/ Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	√	-	√	-	√	-	√	-
Thilagavathy Nadason	Komisaris Commissioner	√	-	√	-	√	-	√	-
Myrnie Zachraini Tamin	Komisaris Independen Independent Commissioner	√	-	√	-	√	-	√	-
Direksi | Board of Directors									
Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur President Director	√	-	√	-	√	-	√	-
Cincin Lisa Hadi	Direktur Director	√	-	√	-	√	-	√	-
Anthony Yuarez Panggabean	Direktur Director	√	-	√	-	√	-	√	-
Njauw Vido Onadi	Direktur Director	√	-	√	-	√	-	√	-
Wibowo	Direktur Director	√	-	√	-	√	-	√	-

Komposisi Pemegang Saham
Shareholders & Ownership Percentage

Kebijakan Pengungkapan Informasi Mengenai Kepemilikan Saham Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris

Perseroan memiliki ketentuan atau pedoman internal mengenai kewajiban anggota Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan informasi kepemilikan dan perubahan atas kepemilikan saham Perseroan kepada Perseroan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan sebagaimana tertuang pada:

1. Piagam Dewan Komisaris yang mengatur mengenai pengungkapan kepemilikan saham Perseroan oleh Dewan Komisaris.
2. Piagam Direksi yang mengatur mengenai pengungkapan kepemilikan saham Perseroan oleh Direksi.

Ketentuan atau pedoman internal yang disebutkan diatas mengacu pada POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Information Disclosure Policy Regarding Share Ownership of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners

The Company has internal stipulations or guidelines regarding the obligations of members of the Board of Commissioners and Board of Directors to submit ownership information and changes in the Company's shareholding to Company within 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of the Company's shares as stated in:

1. The Board of Commissioners that regulates the disclosure of the Company's shareholding by the Board of Commissioners.
2. The Board of Directors Charter which regulates the disclosure of the Company's shareholding by the Board of Directors.

The internal stipulations or guidelines stated above refer to POJK No. 11/POJK.04/2017 concerning Reports for the Ownership or Any Changes in Shareholding of Public Companies.

Kelompok Pemegang Saham Masyarakat, yaitu Kelompok Pemegang Saham yang masing-masing Memiliki < 5% Saham
Public Shareholders Group, i.e., Shareholders Group that Each Owns < 5% Shares

No	Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Lembar Saham Total Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value	Kepemilikan Ownership (%)
1	PT. Bank Maybank Indonesia Tbk	2.349.646.729	234.964.672.900	67,49
2	PT. Wahana Makmur Sejati	870.600.000	87.060.000.000	25,01
3	UBS AG Singapore Non-Treaty Omnibus Account - 2091144090	55.000.000	5.500.000.000	1,58
4	UOB Kay Hian PTE LTD A/C Referral Client - 075K	37.000.000	3.700.000.000	1,06
5	Teh Chong Hua	18.830.000	1.883.000.000	0,54
6	Hermanto	15.348.100	1.534.810.000	0,44
7	Andy Tanujaya	13,503,500	1.350.350.000	0,39
8	Rony Attan	9.900.000	990.000.000	0,28
9	Lokman Jamil	8.584.400	858.440.000	0,25
10	Hermanto	8.551.300	855.130.000	0,25
11	Susanto	6.318.700	631.870.000	0,18

No	Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Lembar Saham Total Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value	Kepemilikan Ownership (%)
12	DBS Bank LTD S/A Aggregate Value Fund VCC	4.400.000	440.000.000	0,13
13	Gsco Llc S/A John Locke Capital Emerging Markets Master Fund, Ltd.	3.948.500	394.850.000	0,11
14	Phillip Securities PTE LTD	2.353.000	235.300.000	0,07
15	Eddy Lolo	2.281.900	228.190.000	0,07
16	David Evan Winarta	1.987.200	198.720.000	0,06
17	Lokman Jamil	1.970.500	197.050.000	0,06
18	Hariono Ibrahim, DR	1.939.900	193.990.000	0,06
19	Hermanto	1.914.800	191.480.000	0,05
20	Benyamin Wong Siong Yuit	1,757,900	175.790.000	0,05

Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Klasifikasi
Shareholders Composition Based on Classification

Status Kepemilikan Ownership Status	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	%
Pemodal Nasional | National Investors			
Kepemilikan Institusi Lokal Local Institution Ownership	6	3.221.594.920	92,54
Kepemilikan Individu Lokal Local Individual Ownership	1.901	133.346.035	3,83
Pemodal Asing | Foreign Investors			
Kepemilikan Institusi Asing Foreign Institutions Ownership	18	107.594.625	3,09
Kepemilikan Individu Asing Foreign Individual Ownership	24	18.945.900	0,54
Jumlah | Total	**1.949**	**3.481.481.480**	**100,00**

Struktur Pemegang Saham Utama & Pengendali

Major & Controlling Shareholding Structure

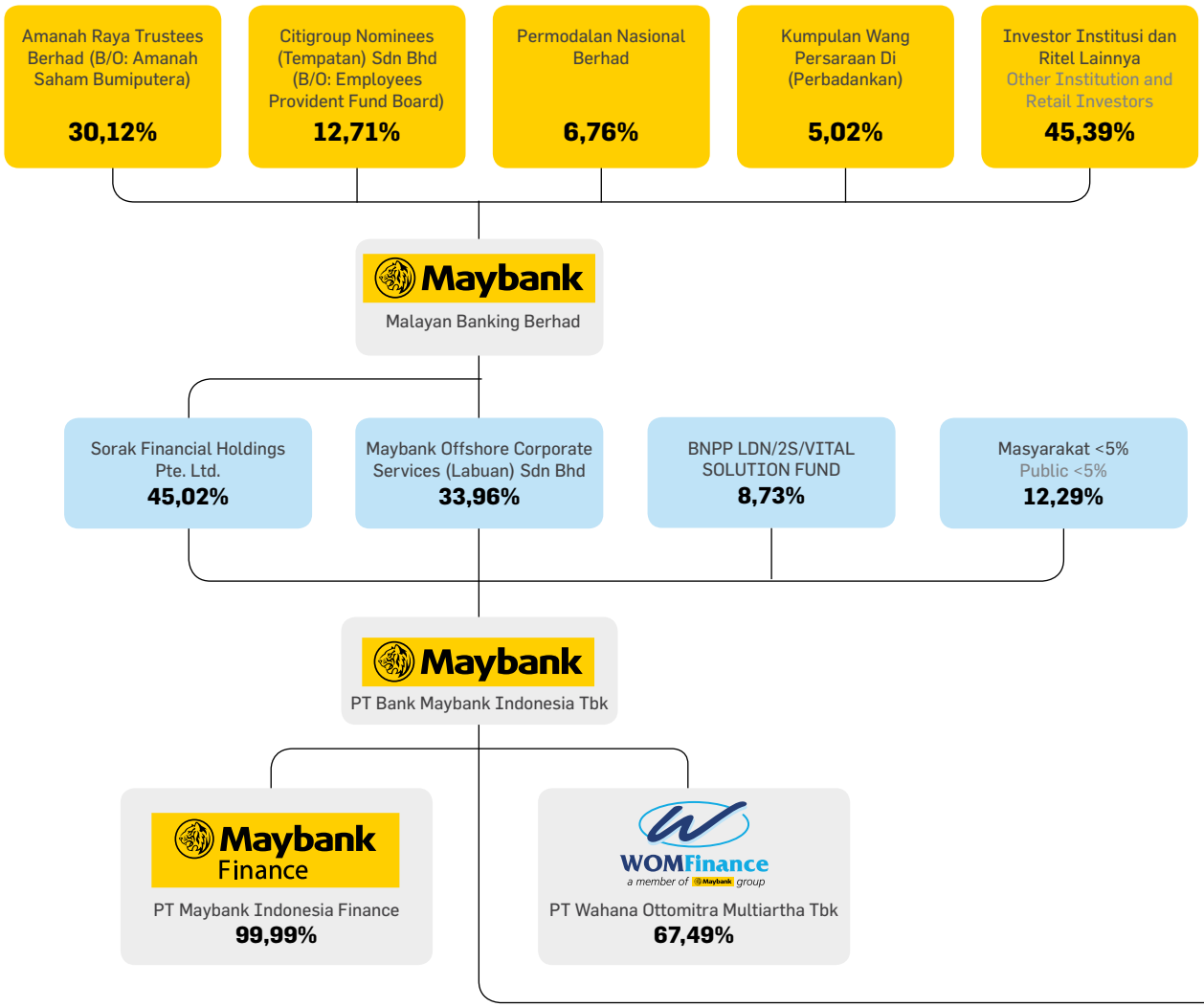

Struktur Pemegang Saham Utama & Pengendali

Major & Controlling Shareholding Structure

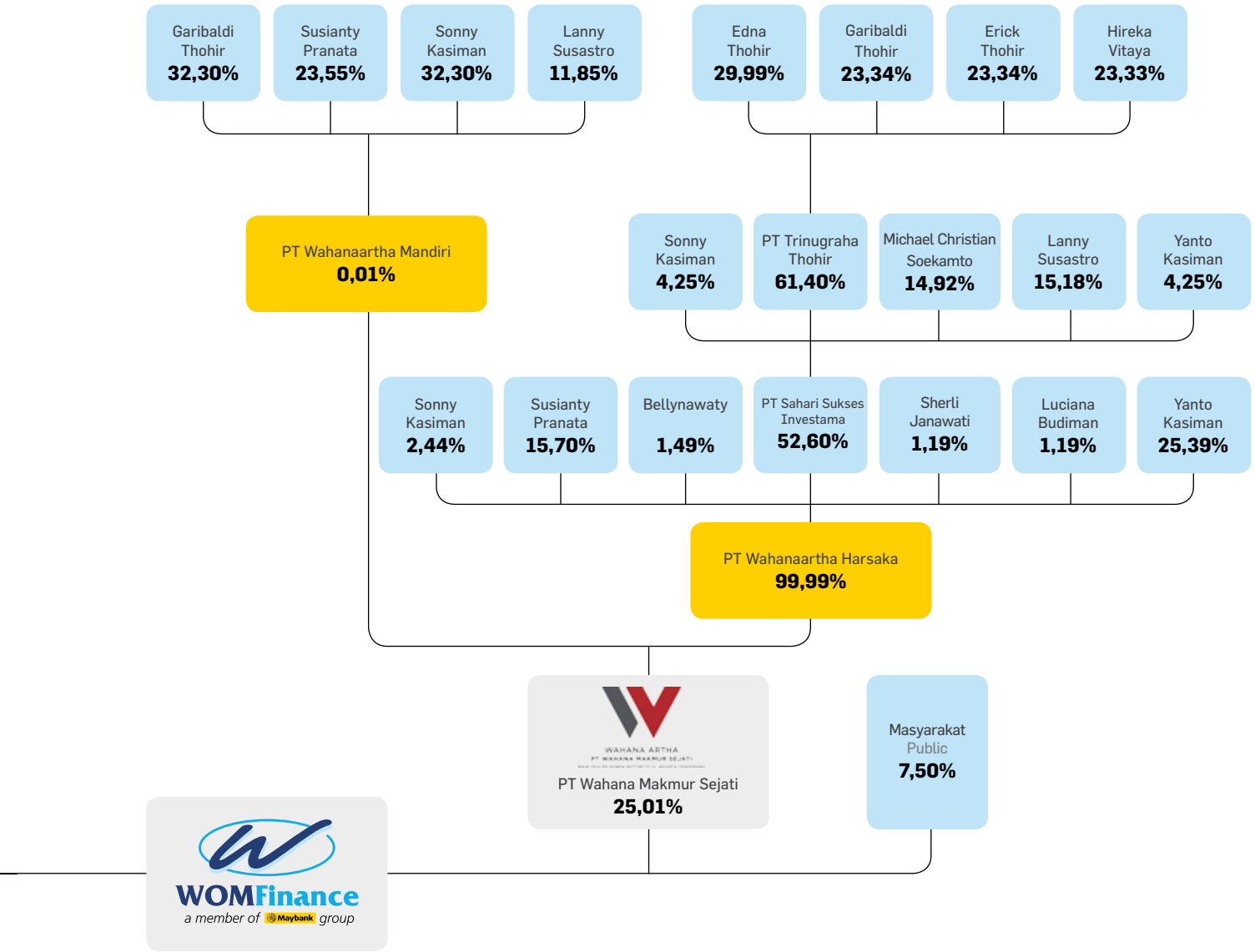

Profil Pemegang Saham

Profile of Shareholders

PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK

Alamat Perseroan | Company Address
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Sentral Senayan III
Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno
Jakarta Pusat 10270 Indonesia
: +62 21 2922 8888
: +62 21 2922 8914

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Profil PT Bank Maybank Indonesia Tbk

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia atau Bank) adalah salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari grup Malayan Banking Berhad (Maybank), sebagai salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN. Sebelumnya, Maybank Indonesia bernama PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) yang didirikan pada 15 Mei 1959, mendapatkan izin sebagai bank devisa pada 1988 dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang telah merger menjadi Bursa Efek Indonesia) pada 1989.

Maybank Indonesia menyediakan serangkaian produk dan jasa komprehensif bagi nasabah individu maupun korporasi melalui layanan *Community Financial Services* (Perbankan Ritel dan Perbankan Non-Ritel) dan Perbankan Global, serta pembiayaan otomotif melalui entitas anak yaitu WOM Finance untuk kendaraan roda dua dan Maybank Finance untuk kendaraan roda empat. Maybank Indonesia juga terus mengembangkan layanan dan kapasitas digital *banking* melalui M2U (*App and Web*), M2E untuk nasabah korporasi, dan berbagai saluran lainnya.

Pada akhir Desember 2023, Maybank Indonesia telah memiliki 336 cabang, termasuk cabang Syariah yang tersebar di Indonesia dan satu cabang luar negeri (Mumbai, India). Di samping itu, Maybank Indonesia juga memiliki sebanyak 22 KCP Mobile dan 765 ATM (termasuk 26 CRM/*Cash Recycle Machines*) yang terkoneksi dengan lebih dari 20.000 ATM tergabung

PT Bank Maybank Indonesia Tbk Profile

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia or the Bank) is one of the leading private banks in Indonesia that is also part of Malayan Banking Berhad (Maybank) Group, one of the largest financial services groups in ASEAN. Previously, Maybank Indonesia was known as PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) which was founded on May 15, 1959, obtained its license as foreign exchange bank in 1988, and had its share listed as a listed company in Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange (now merged as Indonesia Stock Exchange) in 1989.

Maybank Indonesia provides a comprehensive range of products and services for individual and corporate customers through Community Financial Services (Retail Banking and Non-Retail Banking) and Global Banking, as well as automotive financing through its subsidiaries, WOM Finance for two wheelers and Maybank Finance for four wheelers. Maybank Indonesia also continues to develop digital banking services and capacity through M2U (App and Web), M2E for corporate customers, and various other channels.

As December 2023, Maybank Indonesia has 336 branches, including Sharia branches located across Indonesia and one overseas branch (Mumbai, India). Moreover, Maybank Indonesia also has 22 Mobile Cash Cars and 765 ATMs (including 26 CRM/Cash Recycle Machines) connected to more than 20,000 ATMs available through ATM PRIMA, ATM BERSAMA, ALTO,

dalam jaringan ATM PRIMA, ATM BERSAMA, ALTO, CIRRUS dan terhubung dengan 3.500 ATM Maybank di Singapura, Malaysia dan Brunei. Hingga 31 Desember 2023, Maybank Indonesia mengelola simpanan nasabah sebesar Rp115,5 triliun dan memiliki total aset senilai Rp171,8 triliun.

CIRRUS and connected with 3,500 ATMs of Maybank in Singapore, Malaysia and Brunei. As of Desember 31, 2023, Maybank Indonesia managed customer deposits of Rp115.5 trillion and posted total assets of Rp171.8 trillion.

Visi

Menjadi penyedia layanan keuangan terkemuka di Indonesia, yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkomitmen penuh dan inovatif untuk menciptakan nilai dan melayani komunitas.

Vision

To be the leading financial services provider in Indonesia, driven by passionately committed and innovative people, creating value and serving communities.

Misi

Humanising Financial Services

Mission

Humanising Financial Services

Komposisi Manajemen Bank Maybank Indonesia Per 31 Desember 2023
Management Composition of Bank Maybank Indonesia as of December 31, 2023

Jabatan Dewan Komisaris | Board of Commissioners	**Nama** | Name
Presiden Komisaris | President Commissioner	Dato' Khairussaleh Ramli
Komisaris | Commissioner	Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid
Komisaris | Commissioner	Edwin Gerungan
Komisaris | Commissioner	Datuk Lim Hong Tat
Komisaris Independen | Independent Commissioner	Budhi Dyah Sitawati
Komisaris Independen | Independent Commissioner	Achjar Iljas
Komisaris Independen | Independent Commissioner	Hendar
Komisaris Independen | Independent Commissioner	Putut Eko Bayuseno

Jabatan Direksi | Board of Directors	**Nama** | Name
Presiden Direktur | President Director	Taswin Zakaria
Direktur Keuangan | Finance Director	Thilagavathy Nadason
Direktur *Human Capital* | Human Capital Director	Irvandi Ferizal
Direktur Manajemen Risiko | Risk Management Director	Effendi
Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan | Compliance Director	Muhamadian
Direktur *Operations* | Operations Director	Widya Permana
Direktur *Community Financial Services* Community Financial Services Director	Steffano Ridwan
Direktur Perbankan Global | Global Banking Director	Ricky Antariksa
Direktur Informasi dan Teknologi | Information Technology Director	Bambang Andri Irawan

Profil Pemegang Saham
Profile of Shareholders

PT WAHANA MAKMUR SEJATI

Alamat Perseroan | Company Address
PT Wahana Makmur Sejati
Gunung Sahari Utara, Sawah Besar,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu kota
Jakarta 10720
: +62 21 6012070
: www.wahanaartha.com

WAHANA ARTHA
PT WAHANA MAKMUR SEJATI
MAIN DEALER HONDA MOTORCYCLE JAKARTA-TANGERANG

Profil PT Wahana Makmur Sejati

PT Wahana Makmur Sejati (WMS) berawal dari 4 (empat) dealer sepeda motor Honda yang bergabung menjadi PD Union Motor di tahun 1972. PD Union Motor dipercaya oleh PT Astra Honda Motor untuk menjalankan rantai distribusi sepeda motor Honda untuk wilayah Jakarta dan Tangerang. Pada tahun 1983 PD Union Motor melakukan restrukturisasi dengan memisahkan unit usaha menjadi dua perusahaan yang berbeda yaitu, PT Pro Union Indo Jaya sebagai dealer sepeda motor dan mobil Honda dan WMS sebagai main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Jakarta dan Tangerang.

Kini WMS memiliki 3 (tiga) unit Gudang yaitu di Cimanggis Jawa Barat berkapasitas 7.000 unit motor, di Jatake Tangerang berkapasitas 2.700 unit motor serta Gudang ke-3 di Jatiasih Bekasi dengan kapasitas 7.500 unit motor. Saat ini WMS memiliki jaringan 116 dealer dan 308 bengkel resmi motor Honda di wilayah Jakarta dan Tangerang.

Visi

Wahana Artha Group ingin menjadi grup perusahaan yang terus berkembang, memanfaatkan pasar Indonesia kelas menengah yang tumbuh cepat, dengan menawarkan produk dan layanan kelas dunia, dan dipercaya oleh mitra bisnis dan pemangku kepentingan.

Profile PT Wahana Makmur Sejati

PT Wahana Makmur Sejati (WMS) started from 4 (four) Honda motorcycle dealers that joined PD Union Motor in 1972. PD Union Motor is trusted by PT Astra Honda Motor to manage the Honda motorcycle distribution chain for the Jakarta and Tangerang areas. In 1983 PD Union Motor restructured by separating its business units into two different companies, namely, PT Pro Union Indo Jaya as a Honda motorcycle and car dealer, and WMS as the main Honda motorcycle dealer for the Jakarta and Tangerang areas.

WMS currently has 3 (three) warehouse units, in Cimanggis, West Java with a capacity of 7,000 motorbikes; in Jatake, Tangerang with a capacity of 2,700 motorbikes; and the third warehouse in Jatiasih Bekasi with a capacity of 7,500 motorbikes. Presently, WMS has a network of 116 dealers and 308 authorized Honda motorcycle workshops in Jakarta and Tangerang.

Vision

Wahana Artha Group would like to be an ever-expanding corporation which seizes the growing Indonesian middle-income market by offering world class products and services, most trusted by business partners and stakeholders.

Misi

- WAG menghormati komitmen dan menepati janji kepada pelanggan.
- WAG menghargai setiap orang dengan kerendahan hati, kesantunan dan rasa hormat.
- WAG menghargai kemampuan dan keterampilan tanpa diskriminasi jenis kelamin, agama, maupun suku.
- WAG mengutamakan kepercayaan dan berharap untuk sejahtera bersama dengan mitra bisnis dan pemangku kepentingan.
- WAG rumah bagi Wahanians untuk bekerja, berkembang dan berbahagia.
- WAG berkomitmen untuk menjalankan praktisi usaha berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik.

Mission

- WAG Honors our commitments and promises to our customers.
- WAG Treats everyone with humility, manners, and respect.
- WAG Pledges meritocracy without discrimination on sex, religion, nor race.
- WAG Values trust and aims to prosper together with business partners and stakeholders.
- WAG Is a home for Wahanians to work, grow and enjoy.
- WAG Commits green sustainable practices for a better future.

Komposisi Manajemen PT Wahana Makmur Sejati Per 31 Desember 2023
Management Structure of PT Wahana Makmur Sejati as of December 31, 2023

Jabatan Dewan Komisaris | Board of Commissioners	**Nama** | Name
Komisaris Utama | President Commissioner	Garibaldi Thohir
Komisaris | Commissioner	Susianty Pranata
Komisaris | Commissioner	Sunaga Kasiman
Komisaris | Commissioner	Cornelia Patsy Budiman

Jabatan Dewan Direksi | Board of Directors	**Nama** | Name
Direktur Utama | President Director	Taufik Aulia
Direktur | Director	Edi Setiawan Surja
Direktur | Director	Michael Christian S

Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Subsidiaries & Associates

Sampai dengan penyampaian laporan tahunan 2023, Perseroan tidak memiliki entitas anak maupun entitas asosiasi.

Upon submission of this 2023 annual report, the Company does not establish any subsidiaries or associates.

Kronologi Penerbitan Saham

Shares Issuance Chronology

2004

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 2 tanggal 4 Mei 2004 yang dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-12320 HT.01.04.TH.2004 tanggal 17 Mei 2004, para pemegang saham menyetujui perubahan nilai nominal saham menjadi Rp100 dan peningkatan modal dasar menjadi sebesar Rp500.000.000.000 serta peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi sebesar Rp180.000.000.000.

In accordance with the Deed of Meeting Minutes No. 2 dated May 4, 2004 made by Mellyani Noor Shandra, S.H., a Notary in Jakarta, which has been approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. C-12320 HT.01.04. TH.2004 dated May 17, 2004, shareholders have approved the changes of shares par value to Rp100 and the increase of authorized capital to Rp500,000,000,000 as well as the increase of issued and paid-up capital to Rp180,000,000,000.

Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

As a result, the Company's capital structure and shareholding composition were as follows:

Pemegang Saham Shareholders	**Nilai Nominal Rp100 per Saham** Par Value of Rp100 per share		%
	Jumlah Saham Total Shares	**Nilai Nominal (Rp)** Nominal Value	
PT Millenia Prosperindo Optima	630.000.000	63.000.000.000	35,00
PT Wahanaartha Harsaka	990.000.000	99.000.000.000	55,00
PT Wahanaartha Mekarselaras	180.000.000	18.000.000.000	10,00
Jumlah | **Total**	**1.800.000.000**	**180.000.000.000**	**100,00**

Selanjutnya, berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor 25 tanggal 24 Mei 2004 yang dibuat oleh Endrawila Permata, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Wahana Ottomitra Multiartha No. C-13115 HT.01.04. TH.2004 tanggal 25 Mei 2004, para pemegang saham menyetujui penjualan saham sebagai berikut:

Furthermore, in accordance with the Deed of Meeting Minutes Number 25 dated May 24, 2004 made by Endrawila Permata, S.H., a Notary in Jakarta, which has been accepted by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Acceptance of Deed Report of the Amendment of Articles of Association of PT Wahana Ottomitra Multiartha No. C-13115 HT.01.04.TH.2004 dated May 25, 2004, the shareholders have approved the following sale of shares:

1. Dari PT Wahanaartha Harsaka kepada Begawan Investment (L) BHD sebanyak 396.000.000 saham sebagaimana jual belinya dilakukan melalui Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham No. 26 tanggal 24 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., sebagai pengganti dari Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta;

1. From PT Wahanaartha Harsaka to Begawan Investment (L) BHD of 396,000,000 shares in which the buying-selling process was conducted through Deed of Sale and Transfer of Rights to Shares No. 26 dated May 24, 2004 made before Endrawila Parmata, S.H., replacing Benny Kristianto, S.H., a Notary in Jakarta;

Kronologi Penerbitan Saham

Shares Issuance Chronology

2. Dari PT Wahanaartha Harsaka kepada Mochamad Thohir sebanyak 191.862.000 saham sebagaimana jual belinya dilakukan melalui Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham No. 27 tanggal 24 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., sebagai pengganti dari Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta;
3. Dari PT Wahanaartha Harsaka kepada Susianty Pranata sebanyak 139.887.000 saham sebagaimana jual belinya dilakukan melalui Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham No. 28 tanggal 24 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., sebagai pengganti dari Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta;
4. Dari PT Wahanaartha Harsaka kepada Yanto Kasiman sebanyak 191.862.000 saham sebagaimana jual belinya dilakukan melalui Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham No. 29 tanggal 24 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., sebagai pengganti dari Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta;
5. Dari PT Wahanaartha Harsaka kepada Widjaya Budiman sebanyak 70.389.000 saham sebagaimana jual belinya dilakukan melalui Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham No. 30 tanggal 24 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., sebagai pengganti dari Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta;
6. Dari PT Wahanaartha Mekarselaras kepada Begawan Investment (L) BHD sebanyak 72.000.000 saham sebagaimana jual belinya dilakukan melalui Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham No. 31 tanggal 24 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., sebagai pengganti dari Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta;
7. Dari PT Wahanaartha Mekarselaras kepada Mochamad Thohir sebanyak 34.884.000 saham sebagaimana jual belinya dilakukan melalui Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham No. 32 tanggal 24 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., sebagai pengganti dari Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta;

2. From PT Wahanaartha Harsaka to Mochamad Tohir: Of 191,862,000 shares in which the buying-selling process was conducted through Deed of Sale and Transfer of Rights to Shares No. 27 dated May 24, 2004 made before Endrawila Parmata, S.H., replacing Benny Kristianto, S.H., a Notary in Jakarta;
3. From PT Wahanaartha Harsaka to Susianty Pranata: Of 139,887,000 shares in which the buying-selling process was conducted through Deed of Sale and Transfer of Rights to Shares No. 28 dated May 24, 2004 made before Endrawila Parmata, S.H., replacing Benny Kristianto, S.H., a Notary in Jakarta;
4. From PT Wahanaartha Harsaka to Yanto Kasiman: Of 191,862,000 shares in which the buying-selling process was conducted through Deed of Sale and Transfer of Rights to Shares No. 29 dated May 24, 2004 made before Endrawila Parmata, S.H., replacing Benny Kristianto, S.H., a Notary in Jakarta;
5. From PT Wahanaartha Harsaka to Widjaya Budiman: Of 70,389,000 shares in which buying-selling was conducted through Deed of Sale and Transfer of Rights to Shares No. 30 dated May 24, 2004 made before Endrawila Parmata, S.H., replacing Benny Kristianto, S.H., a Notary in Jakarta;
6. From PT Wahanaartha Mekarselaras to Begawan Investment (L) BHD of 72,000,000 shares in which the buying-selling process was conducted through Deed of Sale and Transfer of Rights to Shares No. 31 dated May 24, 2004 made before Endrawila Parmata, S.H., replacing Benny Kristianto, S.H., a Notary in Jakarta;
7. From PT Wahanaartha Mekarselaras to Mochamad Thohir of 34,884,000 shares in which the buying-selling process was conducted through Deed of Sale and Transfer of Rights to Shares No. 32 dated May 24, 2004 made before Endrawila Parmata, S.H., replacing Benny Kristianto, S.H., a Notary in Jakarta;

8. Dari PT Wahanaartha Mekarselaras kepada Susianty Pranata sebanyak 25.434.000 saham sebagaimana jual belinya dilakukan melalui Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham No. 33 tanggal 24 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., sebagai pengganti dari Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta;
9. Dari PT Wahanaartha Mekarselaras kepada Yanto Kasiman sebanyak 34.884.000 saham sebagaimana jual belinya dilakukan melalui Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham No. 34 tanggal 24 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., sebagai pengganti dari Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta;
10. Dari PT Wahanaartha Mekarselaras kepada Widjaya Budiman sebanyak 12.798.000 saham sebagaimana jual belinya dilakukan melalui Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham No. 35 tanggal 24 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., sebagai pengganti dari Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta;
11. Dari PT Millenia Prosperindo Optima kepada Begawan Investment (L) BHD sebanyak 252.000.000 saham sebagaimana jual belinya dilakukan melalui Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham No. 36 tanggal 24 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., sebagai pengganti dari Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta;
12. Dari PT Millenia Prosperindo Optima kepada Dewi Ratnasari Gozali sebanyak 321.300.000 saham sebagaimana jual belinya dilakukan melalui Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham No. 37 tanggal 24 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., sebagai pengganti dari Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta;
13. Dari PT Millenia Prosperindo Optima kepada Benny Wennas sebanyak 56.700.000 saham sebagaimana jual belinya dilakukan melalui Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham No. 38 tanggal 24 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., sebagai pengganti dari Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta.

8. From PT Wahanaartha Mekarselaras to Susianty Pranata of 25,434,000 shares in which the buying-selling process was conducted through Deed of Sale and Transfer of Rights to Shares No. 33 dated May 24, 2004 made before Endrawila Parmata, S.H., replacing Benny Kristianto, S.H., a Notary in Jakarta;
9. From PT Wahanaartha Mekarselaras to Yanto Kasiman of 34,884,000 shares in which the buying-selling process was conducted through Deed of Sale and Transfer of Rights to Shares No. 34 dated May 24, 2004 made before Endrawila Parmata, S.H., replacing Benny Kristianto, S.H., a Notary in Jakarta;
10. From PT Wahanaartha Mekarselaras to Widjaya Budiman of 12,798,000 shares in which the buying-selling process was conducted through the Deed of Sale and Transfer of Rights to Shares No. 35 dated May 24, 2004 made before Endrawila Parmata, S.H., replacing Benny Kristianto, S.H., a Notary in Jakarta;
11. From PT Millenia Prosperindo Optima to Begawan Investment (L) BHD of 252,000,000 shares in which the buying-selling process was conducted through Deed of Sale and Transfer of Rights to Shares No. 36 dated May 24, 2004 made before Endrawila Parmata, S.H., replacing Benny Kristianto, S.H., a Notary in Jakarta;
12. From PT Millenia Prosperindo Optima to Dewi Ratnasari Gozali of 321,300,000 shares in which the buying-selling process was conducted through Deed of Sale and Transfer of Rights to Shares No. 37 dated May 24, 2004 made before Endrawila Parmata, S.H., replacing Benny Kristianto, S.H., a Notary in Jakarta;
13. From PT Millenia Prosperindo Optima to Benny Wennas of 56,700,000 shares in which the buying-selling process was conducted through Deed of Sale and Transfer of Rights to Shares No. 38 dated May 24, 2004 made before Endrawila Parmata, S.H., replacing Benny Kristianto, S.H., a Notary in Jakarta.

Kronologi Penerbitan Saham

Shares Issuance Chronology

Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah terjadinya pengalihan saham tersebut di atas, menjadi sebagai berikut:

As a result, the Company's capital structure and its shareholding composition following the previously-mentioned shares transfers were as follows:

Pemegang Saham Shareholders	**Nilai Nominal Rp100 per Saham** Par Value of Rp100 per share		%
	Jumlah Saham Total Shares	**Nilai Nominal (Rp)** Nominal Value	
Begawan Investment (L) Bhd.	720.000.000	72.000.000.000	40,00
Mochamad Thohir	226.746.000	22.674.600.000	12,60
Susianty Pranata	165.321.000	16.532.100.000	9,18
Yanto Kasiman	226.746.000	22.674.600.000	12,60
Widjaya Budiman	83.187.000	8.318.700.000	4,62
Dewi Ratnasari Gozali	321.300.000	32.130.000.000	17,85
Benny Wennas	56.700.000	5.670.000.000	3,15
Jumlah | Total	**1.800.000.000**	**180.000.000.000**	**100,00**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 35 tanggal 29 September 2004 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-24422 HT.01.04.TH.2004 tanggal 1 Oktober 2004, para pemegang saham memberikan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat sebanyak-banyaknya sejumlah 300.000.000 saham melalui pasar modal, Penawaran Umum mana pernyataan pendaftarannya telah memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM dan serta saham Perseroan telah tercatat pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut ditegaskan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk No. 41 tanggal 16 Desember 2004, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk No. C-30738 HT.01.04. TH.2004 tanggal 21 Desember 2004 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 049/RUB.09.05/I/2005 tanggal 12 Januari 2005, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik

In accordance with the Deed of Decree of Meeting Minutes No. 35 dated September 29, 2004 made before Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., a Notary in Jakarta, which has been approved by Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-24422 HT.01.04. TH.2004 dated October 1, 2004, the shareholders approved have the carrying out of an Initial Public Offering to the public via as many as 300,000,000 shares through the capital market, with the offering listing statement having obtained an effective decree from the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency and the Company's shares having been listed through the Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange. The total shares issued in the Public Offering was affirmed by Deed of the Decree of the Meeting Minutes of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk No. 41 dated December 16, 2004, made before Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., a Notary in Jakarta. The deed has been accepted by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Acceptance of Deed Report of the Amendment of Articles of Association of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk No. C-30738 HT.01.04. TH.2004 dated December 21, 2004 and has been registered in the Company Registration Office Kodya Central Jakarta under No. 049/RUB.09.05/I/2005 dated January 12, 2005. It has been announced in the State Gazette No. 8 dated January

Indonesia No. 8 tanggal 28 Januari 2005. Tambahan No. 75/2005, dimana para pemegang saham Perseroan telah setuju untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh yang semula sebesar Rp180.000.000.000 menjadi sebesar Rp200.000.000.000. Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

28, 2005. This was in lieu of No. 75/2005, in which the Company's shareholders approved to increase issued and fully paid-up capital from Rp180,000,000,000 to Rp200,000,000,000. As a result, the Company's capital structure and shareholding composition are as follows:

Pemegang Saham Shareholders	**Nilai Nominal Rp100 per Saham** Par Value of Rp100 per share		%
	Jumlah Saham Total Shares	**Nilai Nominal (Rp)** Nominal Value	
Begawan Investment (L) Bhd.	720.000.000	72.000.000.000	40,00
Mochamad Thohir	226.746.000	22.674.600.000	12,60
Susianty Pranata	165.321.000	16.532.100.000	9,18
Yanto Kasiman	226.746.000	22.674.600.000	12,60
Widjaya Budiman	83.187.000	8.318.700.000	4,62
Dewi Ratnasari Gozali	321.300.000	32.130.000.000	17,85
Benny Wennas	56.700.000	5.670.000.000	3,15
Masyarakat | Public	200.000.000	200.000.000.000	10,00
Jumlah | Total	**2.000.000.000**	**180.000.000.000**	**100,00**

Penawaran umum perdana saham Perseroan dibantu oleh lembaga dan profesi penunjang pasar modal, antara lain:

1. Biro Administrasi Efek
   PT Sinartama Gunita Jl. Lombok No. 71 Menteng, Jakarta 10350
2. Akuntan Publik
   Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja Wisma 46, Kota BNI, lantai 25-28 dan 30-31 Jl. Jend Sudirman Kav.1, Jakarta 10220
3. Konsultan Hukum
   William, Effendi & Co. Law Office, Jl. Blora No. 31 Menteng, Jakarta 10310

The Company's shares initial public offering was assisted by the following capital market supporting institutions and professions:

1. Share Registrar
   PT Sinartama Gunita Jl. Lombok No.71 Menteng, Jakarta 10350
2. Public Accountant
   Prasetio, Sarwoko & Sandjaja Wisma 46, Kota BNI, floors 25-28 dan 30-31 Jl. Jend Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220
3. Legal Firm
   William, Effendi & Co. Law Office, Jl. Blora No. 31 Menteng, Jakarta 10310

2005

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 22 Juli 2005 dibuat dihadapan Indah Fatmawati, S.H., pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., akta mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat penerimaan laporan No. C-20953 HT.01.04. TH.2005 tanggal 28 Juli 2005, sebagaimana ternyata

In accordance with the Deed of Decree of Meeting Minutes No. 18 dated July 22, 2005 made before Fatmawati, S.H., replacing Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., a Notary in Jakarta, which has been reported to the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through letter No. C-20953 HT.01.04. TH.2005 dated July 28, 2005, as stated in the General Meeting of

Kronologi Penerbitan Saham

Shares Issuance Chronology

dalam Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 18 Juli 2005 yang mana berita acara rapatnya termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat No. 12 tanggal 18 Juli 2005 yang dibuat di hadapan Notaris yang sama, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. C-UM.02.01.13027 tanggal 6 September 2005 di mana telah tercapainya seluruh proses *Conditional Sales and Purchase Agreement* (CSPA) pada tanggal 30 Mei 2005 Jo. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 21 September 2004 yang dibuat secara di bawah tangan yang agendanya menyetujui penjualan saham-saham para pemegang saham kepada PT Bank Internasional Indonesia Tbk dan/atau pihak ketiga lainnya, dilaksanakan dengan CSPA tertanggal 16 September 2004, yang kemudian diubah dengan *First Amendment Agreement* tertanggal 8 November 2004 dan kemudian diubah kembali dengan *Second Amendment Agreement* tertanggal 3 Mei 2005, di mana para pemegang saham Perseroan telah sepakat untuk mengalihkan seluruh saham milik Begawan Investment (L) Bhd. dan sebagian besar saham-saham yang dimiliki oleh Mochamad Thohir, Susianty Pranata, Widjaya Budiman, Dewi Ratnasari Gozali, Benny Wennas dan Yanto Kasiman dengan jumlah seluruhnya sebanyak 860.000.000 saham kepada PT Bank Internasional Indonesia Tbk ("BII") dengan harga per saham sebesar Rp495,00.

Bahwa penjualan saham-saham kepada pihak lainnya tersebut telah dilaksanakan dengan:

1. *Investor Sale and Purchase Agreement* tertanggal 18 Mei 2005, di mana para pemegang saham Perseroan telah sepakat untuk menjual sebagian besar saham sahamnya di Perseroan yang masing-masing dimiliki oleh Mochamad Thohir, Susianty Pranata, Widjaya Budiman, Dewi Ratnasari Gozali, Yanto Kasiman dan Benny Wennas dengan jumlah seluruhnya sebanyak 380.000.000 saham kepada International Finance Corporation ("IFC") dengan harga per saham sebesar Rp495,00.

Shareholders dated July 18, 2005 in which the meeting minutes stated in the Deed of Meeting Minutes No. 12 dated July 18, 2005 made before the same Notary, which has been received by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia as per Notification Acceptance Letter No. C-UM.02.01.13027 dated September 6, 2005 in which all Conditional Sales and Purchase Agreement (CSPA) processes have been achieved on May 30, 2005 in relation to the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated September 21, 2004 made under a deed with an agenda that has approved the sale of shares of the shareholders to PT Bank Internasional Indonesia Tbk and/or other third parties, executed with CSPA dated September 16, 2004, in lieu of First Amendment Agreement dated November 8, 2004 and amended again with Second Amendment Agreement dated May 3, 2005, whereby all Company's shareholders have agreed to transfer all shares of Begawan Investment (L) Bhd. and part of shares owned by Mochamad Thohir,Susianty Pranata, Widjaya Budiman, Dewi Ratnasari Gozali, Benny Wennas and Yanto Kasiman, all totaling 860,000,000 shares, to PT Bank Internasional Indonesia Tbk ("BII" with a price per share of Rp495.00.

The sale of shares to other parties has been carried out through:

1. Investor Sale and Purchase Agreement dated May 18, 2005. The Company's shareholders have agreed on the sale of most of its shares in the Company that are owned by Mochamad Thohir, Susianty Pranata, Widjaya Budiman, Dewi Ratnasari Gozali, Yanto Kasiman and Benny Wennas, for a total of 380,000,000 shares, to International Finance Corporation ("IFC") with a price per share of Rp495.00.

2. *Investor Sale and Purchase Agreement* tertanggal 27 Mei 2005, di mana para pemegang saham Perseroan telah sepakat untuk menjual sebagian besar saham-sahamnya di Perseroan yang masing-masing dimiliki oleh Mochamad Thohir, Susianty Pranata, Widjaya Budiman, Dewi Ratnasari Gozali, Yanto Kasiman dan Benny Wennas dengan jumlah seluruhnya sebanyak 100.000.000 saham kepada DBS Nominees Pte. Ltd. ("DBS Nominees") dengan harga per saham sebesar Rp495,00.

2. Investor Sale and Purchase Agreement dated May 27, 2005. The Company's shareholders have agreed on the sale of most of its shares in the Company owned by Mochamad Thohir, Susianty Pranata, Widjaya Budiman, Dewi Ratnasari Gozali, Yanto Kasiman and Benny Wennas, for a total of 100,000,000 shares, to DBS Nominees Pte. Ltd. ("DBS Nominees") with a price per share of Rp495.00.

Sehingga dengan adanya penjualan saham-saham sesuai dengan CSPA, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Following the sale of shares that were in accordance with Conditional Sales and Purchase Agreements (CSPA), the Company's capital structure and shareholding composition were as follows:

Pemegang Saham Shareholders	**Nilai Nominal Rp100 per Saham** Par Value of Rp100 per share		%
	Jumlah Saham Total Shares	**Nilai Nominal (Rp)** Nominal Value	
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	860.000.000	86.000.000.000	43,00
International Finance Corporation	380.000.000	38.000.000.000	19,00
DBS Nominees (Private) Limited	100.000.000	10.000.000.000	5,00
Masyarakat | Public	660.000.000	66.000.000.000	33,00
Jumlah | Total	**2.000.000.000**	**200.000.000.000**	**100,00**

2006

Pada tanggal 30 Juni 2006 terjadi pengalihan saham sebanyak 79.800.000 saham atau sebesar 3,99% dari International Finance Corporation kepada PT Bank Internasional Indonesia Tbk, dengan harga per saham sebesar Rp527,25. Sehingga dengan adanya pengalihan saham tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita per tanggal 3 Juli 2006 adalah sebagai berikut:

On June 30, 2006, there was a transfer of shares that amounted to 79,800,000 shares (or at 3.99%) from International Finance Corporation to PT Bank Internasional Indonesia Tbk, with a price per share of Rp527.25. Following this transfer of shares, the Company's capital structure and shareholding composition according to the Shareholders Registry issued by Share Registrar PT Sinartama Gunita dated July 3, 2006 were as follows:

Kronologi Penerbitan Saham

Shares Issuance Chronology

Pemegang Saham Shareholders	Nilai Nominal Rp100 per Saham Par Value of Rp100 per share		%
	Jumlah Saham Total Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value	
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	939.800.000	93.980.000.000	46,99
International Finance Corporation	300.200.000	30.020.000.000	15,01
DBS Nominees (Private) Limited	100.000.000	10.000.000.000	5,00
Masyarakat | Public	660.000.000	66.000.000.000	33,00
Jumlah | Total	**2.000.000.000**	**200.000.000.000**	**100,00**

2007

Pada tanggal 28 Juni 2007 terjadi pengalihan saham sebanyak 60.800.000 saham atau sebesar 3,04% dari International Finance Corporation kepada PT Bank Internasional Indonesia Tbk dengan harga per saham sebesar Rp550,54. Sehingga dengan adanya pengalihan saham tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita per tanggal 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut:

On June 28, 2007, there was a transfer of shares that amounted to 60,800,000 shares (or at 3.04%) from International Finance Corporation to PT Bank Internasional Indonesia Tbk, with a price per share of Rp550.54. Following this transfer of shares, the Company's capital structure and shareholding composition according to the Shareholders Registry issued by Share Registrar PT Sinartama Gunita dated December 31, 2007 were as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Nilai Nominal Rp100 per Saham Par Value of Rp100 per share		%
	Jumlah Saham Total Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value	
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	1.000.600.000	100.060.000.000	50,03
International Finance Corporation	239.400.000	23.940.000.000	11,97
DBS Nominees (Private) Limited	100.000.000	10.000.000.000	5,00
Masyarakat | Public	660.000.000	66.000.000.000	33,00
Jumlah | Total	**2.000.000.000**	**200.000.000.000**	**100,00**

2008

Selama Tahun 2008 tidak ada transaksi sehubungan dengan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh, kecuali transaksi yang normal diperjualbelikan di bursa efek. Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 sama dengan per tanggal 31 Desember 2007.

There were no transactions in relation to authorized, issued and fully paid-up capital throughout 2008, except for normal transactions conducted at the stock exchange. In accordance with the Shareholders Registry issued by Share Registrar PT Sinartama Gunita, the capital structure and composition of the Company's shareholders as of December 31, 2008 is the same as it was from December 31, 2007.

Pemegang Saham Shareholders	Nilai Nominal Rp100 per Saham Par Value of Rp100 per share		%
	Jumlah Saham Total Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value	
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	1.000.600.000	100.060.000.000	50,03
International Finance Corporation	239.400.000	23.940.000.000	11,97
DBS Nominees (Private) Limited	100.000.000	10.000.000.000	5,00
Yanto Kasiman	96.580.445	9.658.044.500	4,82
Susianty Pranata	70.415.074	7.041.507.400	3,52
Widjaya Budiman	36.924.036	3.692.403.600	1,85
Masyarakat | Public	456.080.445	66.000.000.000	22,80
Jumlah | Total	**2.000.000.000**	**180.000.000.000**	**100,00**

2009

Selama Tahun 2009 tidak ada transaksi sehubungan dengan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh, kecuali transaksi yang normal diperjualbelikan di bursa efek. Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 sama dengan per tanggal 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2008.

There were no transactions in relation to authorized, issued and fully paid-up capital throughout 2009, except for normal transactions conducted at the stock exchange. In accordance with the Shareholders Registry issued by Share Registrar PT Sinartama Gunita, the capital structure and composition of the Company's shareholders as of December 31, 2009 is the same as it was from December 31, 2007 and December 31, 2008.

Pemegang Saham Shareholders	Nilai Nominal Rp100 per Saham Par Value of Rp100 per share		%
	Jumlah Saham Total Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value	
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	1.000.600.000	100.060.000.000	50,03
International Finance Corporation	239.400.000	23.940.000.000	11,97
DBS Nominees (Private) Limited	100.000.000	10.000.000.000	5,00
Masyarakat | Public	660.000.000	66.000.000.000	33,00
Jumlah | Total	**2.000.000.000**	**200.000.000.000**	**100,00**

2010

Mengacu pada Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita terdapat penambahan pemegang saham atas nama PT Wahana Makmur Sejati dengan kepemilikan diatas 5% per tanggal 30 Juni 2010. Terjadi pengalihan saham pada tanggal 22 Juni 2010 sebanyak 228.587.055 saham dengan harga per saham sebesar Rp313,43, tanggal 23 Juni 2010 sebanyak 4.500.000 saham dengan harga per saham sebesar Rp300,00, tanggal 5 Juli

In accordance with the Shareholders Registry issued by Share Registrar PT Sinartama Gunita, a new shareholder was added, PT Wahana Makmur Sejati, with a 5% ownership as of June 30, 2010. The transfer of shares was carried out on June 22, 2010 and amounted to 228,587,055 shares with a price per share of Rp313.43, on June 23, 2010 with 4,500,000 shares and a price per share of Rp300.00, on July 5, 2010 with 100,080,445 shares and a price per share of Rp311.40, and on

Kronologi Penerbitan Saham

Shares Issuance Chronology

2010 sebanyak 100.080.445 saham dengan harga per saham sebesar Rp311,40 dan 6 Agustus 2010 sebanyak 1.635.000 saham dengan harga per saham sebesar Rp369,36. Sehingga dengan adanya pengalihan saham tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

August 6, 2010 with 1,635,000 shares and a price per share of Rp369.36. Following this transfer of shares, the Company's capital structure and shareholding composition according to the Shareholders Registry issued by Share Registrar PT Sinartama Gunita as of December 31, 2010 were as follows:

Pemegang Saham Shareholders	**Nilai Nominal Rp100 per Saham** Par Value of Rp100 per share		%
	Jumlah Saham Total Shares	**Nilai Nominal (Rp)** Nominal Value	
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	1.000.600.000	100.060.000.000	50,03
International Finance Corporation	239.400.000	23.940.000.000	11,97
PT Wahana Makmur Sejati	334.802.500	33.480.250.000	16,74
DBS Nominees (Private) Limited	100.000.000	10.000.000.000	5,00
Masyarakat | Public	325.197.500	32.519.750.000	16,26
Jumlah | Total	**2.000.000.000**	**200.000.000.000**	**100,00**

2011

Pada tahun 2011 terjadi beberapa kali transaksi yang seluruhnya telah dilaporkan Perusahaan ke Bapepam & LK serta Bursa Efek Indonesia yaitu:

1. Pada tanggal 17 Maret 2011 PT Wahana Makmur Sejati menambah kepemilikan saham di Perseroan sejumlah 4.000.000 lembar saham (0,20%);
2. Pada tanggal 20 April 2011 PT Wahana Makmur Sejati menambah kepemilikan saham di Perseroan sejumlah 3.030.500 lembar saham (0,15%);
3. Pada tanggal 4 Juli 2011 PT Bank Internasional Indonesia Tbk membeli saham Perusahaan dari International Finance Corporation sebanyak 239.400.000 lembar saham (11,97%) pada harga sebesar Rp522 per lembar saham;
4. Pada tanggal 20 September 2011 PT Wahana Makmur Sejati menambah kepemilikan saham di Perseroan sejumlah 3.058.000 lembar saham (0,15%).

Several transactions were conducted in 2011 and have been reported to the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency as well as to the Indonesia Stock Exchange, as follows:

1. On March 17, 2011, PT Wahana Makmur Sejati added to its shares ownership in the Company that amounted to 4,000,000 shares (0.20%) in the Company;
2. On April 20, 2011, PT Wahana Makmur Sejati added its shares ownership in the Company that amounted to 3,030,500 shares (0.15%) in the Company;
3. On July 4, 2011, PT Bank Internasional Indonesia Tbk bought Company shares from International Finance Corporation that amounted to 239,400,000 shares (11.97%) at Rp522 per share;
4. On September 20, 2011, PT Wahana Makmur Sejati added to its shares ownership in the Company that amounted to 3,058,000 shares (0.15%).

Dengan terjadinya transaksi tersebut di atas maka komposisi pemegang saham Perusahaan per tanggal 31 Desember 2011 yang tercatat oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita adalah sebagai berikut:

Following these transactions, the Company's shareholding composition as of December 31, 2011 as listed by Share Registrar PT Sinartama Gunita are as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Nilai Nominal Rp100 per Saham Par Value of Rp100 per share		%
	Jumlah Saham Total Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value	
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	1.240.000.000	124.000.000.000	62,00
PT Wahana Makmur Sejati	344.891.000	34.489.100.000	17,24
DBS Nominees (Private) Limited	100.000.000	10.000.000.000	5,00
Masyarakat | Public	315.109.500	31.510.900.000	15,76
Jumlah | Total	**2.000.000.000**	**200.000.000.000**	**100,00**

2012

Sepanjang tahun 2012 tidak terjadi transaksi saham Perseroan yang berhubungan dengan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor penuh, kecuali transaksi saham biasa yang diperjualbelikan di Bursa Efek. Komposisi pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2012 yang tercatat oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita adalah sebagai berikut:

There were no shares transaction in relations with authorized, issued and paid-up capital throughout 2012, except for regular shares transactions conducted at the Stock Exchange. The Company's shareholder composition as of December 31, 2012, as listed by the Share Registrar PT Sinartama Gunita, is as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Nilai Nominal Rp100 per Saham Par Value of Rp100 per share		%
	Jumlah Saham Total Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value	
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	1.240.000.000	124.000.000.000	62,00
PT Wahana Makmur Sejati	344.891.000	34.489.100.000	17,24
DBS Nominees (Private) Limited	100.000.000	10.000.000.000	5,00
Masyarakat | Public	315.109.500	31.510.900.000	15,76
Jumlah | Total	**2.000.000.000**	**200.000.000.000**	**100,00**

2013

Di tahun 2013 terjadi perubahan pemegang saham atas nama PT Wahana Makmur Sejati. Pada tanggal 20 Mei 2013 PT Wahana Makmur Sejati menjual kepemilikan saham di Perseroan sejumlah 17.517.500 lembar saham 0,88%. Sehingga dengan adanya pengalihan saham tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

There was a change of shareholders in 2013 for PT Wahana Makmur Sejati. On May 20, 2013, PT Wahana Makmur Sejati sold its shares in the Company that amounted to 17,517,500 shares 0.88%. As a result, the capital structure and the Company's shareholders composition in accordance with the Shareholders Registry issued by Share Registrar PT Sinartama Gunita as of December 31, 2013 were as follows:

Kronologi Penerbitan Saham

Shares Issuance Chronology

Pemegang Saham Shareholders	Nilai Nominal Rp100 per Saham Par Value of Rp100 per share		%
	Jumlah Saham Total Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value	
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	1.240.000.000	124.000.000.000	62,00
PT Wahana Makmur Sejati	327.373.500	32.737.350.000	16,37
DBS Nominees (Private) Limited	100.000.000	10.000.000.000	5,00
Masyarakat | Public	332.626.500	33.262.650.000	16,63
Jumlah | Total	**2.000.000.000**	**200.000.000.000**	**100,00**

2014

Di tahun 2014 terjadi perubahan pemegang saham atas nama PT Wahana Makmur Sejati. Pada tanggal 30 November 2014 PT Wahana Makmur Sejati menjual kepemilikan saham di Perseroan sejumlah 3.967.300 lembar saham 0,19%. Sehingga dengan adanya pengalihan saham tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

There was a change of shareholders in 2014 for PT Wahana Makmur Sejati. On November 30, 2014, PT Wahana Makmur Sejati sold its shares in the Company that amounted to 3,967,300 shares 0.19%. As such, the capital structure and the Company's shareholders composition in accordance with the Shareholders Registry issued by Share Registrar PT Sinartama Gunita as of December 31, 2014 were as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Nilai Nominal Rp100 per Saham Par Value of Rp100 per share		%
	Jumlah Saham Total Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value	
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	1.240.000.000	124.000.000.000	62,00
PT Wahana Makmur Sejati	351.831.026	35.183.102.600	17,59
DBS Nominees (Private) Limited	100.000.000	10.000.000.000	5,00
Masyarakat | Public	308.168.974	30.816.897.400	15,41
Jumlah | Total	**2.000.000.000**	**200.000.000.000**	**100,00**

2015

Pada tahun 2015 terjadi perubahan pemegang saham atas nama PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan PT Wahana Makmur Sejati pada bulan Maret 2015. Dengan adanya perubahan saham tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

There was a change of shareholders in PT Bank Maybank Indonesia Tbk and PT Wahana Makmur Sejati in March 2015. As a result, the Company's capital structure and the Company's shareholders composition in accordance with the Shareholders Registry issued by Share Registrar PT Sinartama Gunita as of December 31, 2015 were as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Nilai Nominal Rp100 per Saham Par Value of Rp100 per share		%
	Jumlah Saham Total Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.386.646.729	238.664.672.900	68,55
PT Wahana Makmur Sejati	615.000.000	61.500.000.000	17,67
Masyarakat | Public	479.834.751	47.983.475.100	13,78
Jumlah | Total	**3.481.481.480**	**348.148.148.000**	**100,00**

2016

Pada tahun 2016 tidak terjadi perubahan pemegang saham atas nama PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan PT Wahana Makmur Sejati. Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

In 2016, there was no change in shareholders on behalf of PT Bank Maybank Indonesia Tbk and PT Wahana Makmur Sejati. As a result, the Company's capital structure and the Company's shareholders composition in accordance with the Shareholders Registry issued by Share Registrar PT Sinartama Gunita as of December 31, 2016 were as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Nilai Nominal Rp100 per Saham Par Value of Rp100 per share		%
	Jumlah Saham Total Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.386.646.729	238.664.672.900	68,55
PT Wahana Makmur Sejati	615.000.000	61.500.000.000	17,67
Masyarakat | Public	479.834.751	47.983.475.100	13,78
Jumlah | Total	**3.481.481.480**	**348.148.148.000**	**100,00**

2017

Pada tahun 2017 terjadi perubahan pemegang saham atas PT Wahana Makmur Sejati. Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

There was a change of shareholders in PT Wahana Makmur Sejati in 2017. As a result, the Company's capital structure and the Company's shareholders composition in accordance with the Shareholders Registry issued by Share Registrar PT Sinartama Gunita as of December 31, 2017 were as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Nilai Nominal Rp100 per Saham Par Value of Rp100 per share		%
	Jumlah Saham Total Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.386.646.729	238.664.672.900	68,55
PT Wahana Makmur Sejati	738.308.900	73.830.890.000	21,21
Masyarakat | Public	356.525.851	35.652.585.100	10,24
Jumlah | Total	**3.481.481.480**	**348.148.148.000**	**100,00**

Kronologi Penerbitan Saham

Shares Issuance Chronology

2018

Pada tahun 2018 terjadi perubahan pemegang saham atas PT Wahana Makmur Sejati. Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

There was a change of shareholders in PT Wahana Makmur Sejati in 2018. As a result, the Company's capital structure and the Company's shareholders composition in accordance with the Shareholders Registry issued by Share Registrar PT Sinartama Gunita as of December 31, 2018 were as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Nilai Nominal Rp100 per Saham Par Value of Rp100 per share		%
	Jumlah Saham Total Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.386.646.729	238.664.672.900	68,55
PT Wahana Makmur Sejati	833.316.600	83.331.660.000	23,94
Masyarakat | Public	261.518.151	26.151.815.100	7,51
Jumlah | Total	**3.481.481.480**	**348.148.148.000**	**100,00**

2019

Pada tahun 2019 tidak terjadi perubahan pemegang saham atas nama PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan PT Wahana Makmur Sejati. Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

There was no change of shareholders in PT Bank Maybank Indonesia Tbk and PT Wahana Makmur Sejati in 2019. As such, the Company's capital structure and the Company's shareholders composition in accordance with the Shareholders Registry issued by Share Registrar PT Sinartama Gunita on December 31, 2019 were as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Nilai Nominal Rp100 per Saham Par Value of Rp100 per share		%
	Jumlah Saham Total Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.386.646.729	238.664.672.900	68,55
PT Wahana Makmur Sejati	833.316.600	83.331.660.000	23,94
Masyarakat | Public	261.518.151	26.151.815.100	7,51
Jumlah | Total	**3.481.481.480**	**348.148.148.000**	**100,00**

2020

Pada tanggal 17 Februari 2020 PT Wahana Makmur Sejati menambah kepemilikan saham dari 23,94% menjadi 25,01%. Jumlah transaksi pembelian saham tersebut sejumlah Rp12.303 miliar (atau sebesar 37.283.400

On February 17, 2020, PT Wahana Makmur Sejati increased its share ownership from 23.94% to 25.01%. The total share purchase transaction was Rp12.303 billion (or an equivalent of 37,283,400 shares). As

lembar saham) dan menyebabkan perubahan pada susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebagai berikut:

such, the Company's shareholding structure and share ownership composition were as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Nilai Nominal Rp100 per Saham Par Value of Rp100 per share		%
	Jumlah Saham Total Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.386.646.729	238.664.672.900	68,55
PT Wahana Makmur Sejati	870.600.000	87.060.000.000	25,01
Masyarakat | Public	224.234.751	22.423.475.100	6,44
Jumlah | Total	**3.481.481.480**	**348.148.148.000**	**100,00**

2021

Pada tanggal 24 Maret 2021, PT Bank Maybank Indonesia Tbk menjual kepemilikan saham dari 68,55% menjadi 67,49%. Jumlah transaksi pembelian saham tersebut sejumlah Rp9,40 miliar (atau sebesar 37.000.000 lembar saham) dan menyebabkan perubahan pada susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebagai berikut:

On March 24, 2021, PT Bank Maybank Indonesia Tbk sold its share ownership from 68.55% to 67.49%. The total share purchase transaction amounted to Rp9.40 billion (or 37,000,000 shares) and caused changes in the composition of shareholders and share ownership in the Company as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Nilai Nominal Rp100 per Saham Par Value of Rp100 per share		%
	Jumlah Saham Total Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.349.646.729	234.964.672.900	67,49
PT Wahana Makmur Sejati	870.600.000	87.060.000.000	25,01
Masyarakat | Public	261.234.751	26.123.475.100	7,50
Jumlah | Total	**3.481.481.480**	**348.148.148.000**	**100,00**

2022

Pada tahun 2022 tidak terjadi perubahan pemegang saham atas nama PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan PT Wahana Makmur Sejati. Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

There was no change of shareholders in PT Bank Maybank Indonesia Tbk and PT Wahana Makmur Sejati in 2022. As such, the Company's capital structure and the Company's shareholders composition in accordance with the Shareholders Registry issued by Share Registrar PT Sinartama Gunita on December 31, 2022 were as follows:

Kronologi Penerbitan Saham

Shares Issuance Chronology

Pemegang Saham Shareholders	Nilai Nominal Rp100 per Saham Par Value of Rp100 per share		%
	Jumlah Saham Total Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.349.646.729	234.964.672.900	67,49
PT Wahana Makmur Sejati	870.600.000	87.060.000.000	25,01
Masyarakat | Public	261.234.751	26.123.475.100	7,50
Jumlah | Total	**3.481.481.480**	**348.148.148.000**	**100,00**

2023

Pada tahun 2023 tidak terjadi perubahan pemegang saham atas nama PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan PT Wahana Makmur Sejati. Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

There was no change of shareholders in PT Bank Maybank Indonesia Tbk and PT Wahana Makmur Sejati in 2023. As such, the Company's capital structure and the Company's shareholders composition in accordance with the Shareholders Registry issued by Share Registrar PT Sinartama Gunita on December 31, 2023 were as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Nilai Nominal Rp100 per Saham Par Value of Rp100 per share		%
	Jumlah Saham Total Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.349.646.729	234.964.672.900	67,49
PT Wahana Makmur Sejati	870.600.000	87.060.000.000	25,01
Masyarakat | Public	261.234.751	26.123.475.100	7,50
Jumlah | Total	**3.481.481.480**	**348.148.148.000**	**100,00**

Kronologi Penerbitan Efek Lain

Other Stocks Chronology

Per 31 Desember 2023 | As of December 31, 2023

Nama Name	Seri Series	Bunga Coupon Rate	Nominal (Rp)	Peringkat Ratings	Jatuh Tempo Maturity	Total (Rp)	Keterangan Description
Obligasi I WOM Finance Tahun 2003 Bonds I WOM Finance 2003	Seri A Series A	13,50%	150.000.000.000	A-(idn)	11 November 2006 November 11, 2006	300.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as per maturity date
	Seri B Series B	13,75%	150.000.000.000		11 November 2007 November 11, 2007		
Obligasi II WOM Finance Tahun 2005 Bonds II WOM Finance 2005	Seri A Series A	12,75%	190.000.000.000	A-(idn)	07 Juni 2007 June 07, 2007	500.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as per maturity date
	Seri B Series B	13,25%	140.000.000.000		07 Juni 2008 June 07, 2008		
	Seri C Series C	13,90%	170.000.000.000		07 Juni 2009 June 07, 2009		
Obligasi III WOM Finance Tahun 2006 Bonds III WOM Finance 2006	Seri A Series A	14,85%	200.000.000.000	A-(idn)	07 Juni 2008 June 07, 2008	825.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as per maturity date
	Seri B Series B	15,15%	465.000.000.000		07 Juni 2009 June 07, 2009		
	Seri C Series C	15,35%	160.000.000.000		07 Juni 2010 June 07, 2010		
Obligasi IV WOM Finance Tahun 2007 Bonds IV WOM Finance 2007	Seri A Series A	11,25%	225.000.000.000	A-(idn)	29 Mei 2010 May 29, 2010	1.000.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as per maturity date
	Seri B Series B	11,63%	185.000.000.000		29 Mei 2011 May 29, 2011		
	Seri C Series C	12,00%	590.000.000.000		29 November 2011 November 29, 2011		
Obligasi V Tahun 2011 Bonds V WOM Finance 2011	Seri A Series A	8,75%	294.000.000.000	AA(idn)	09 Maret 2012 March 09, 2012	1.400.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as per maturity date
	Seri B Series B	9,60%	120.000.000.000		04 Maret 2013 March 04, 2013		
	Seri C Series C	10,30%	366.000.000.000		04 Maret 2014 March 04, 2014		
	Seri D Series D	11,00%	620.000.000.000		04 Maret 2015 March 04, 2015		
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Shelf Bonds I Phase I 2014	Seri A Series A	10,25%	397.000.000.000	AA-(idn)	05 Juli 2015 July 05, 2015	600.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as per maturity date
	Seri B Series B	11,00%	203.000.000.000		25 Juni 2017 June 25, 2017		
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 Shelf Bonds I Phase II 2014	Seri A Series A	10,25%	300.000.000.000	AA-(idn)	15 Desember 2015 December 15, 2015	800.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as per maturity date
	Seri B Series B	11,25%	500.000.000.000		05 Desember 2017 December 05, 2017		
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Shelf Bonds I Phase III 2015	Seri A Series A	9,25%	140.000.000.000	AA-(idn)	12 April 2016 April 12, 2016	1.000.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as per maturity date
	Seri B Series B	10,25%	860.000.000.000		02 April 2018 April 02, 2018		

Kronologi Penerbitan Efek Lain

Other Stocks Chronology

Nama Name	Seri Series	Bunga Coupon Rate	Nominal (Rp)	Peringkat Ratings	Jatuh Tempo Maturity	Total (Rp)	Keterangan Description
Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2015 Shelf Bonds I Phase IV 2015	Seri A Series A	9,35%	203.000.000.000	AA-(idn)	02 Januari 2017 January 02, 2017	600.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as per maturity date
	Seri B Series B	10,80%	397.000.000.000		22 Desember 2018 December 22, 2018		
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 Shelf Bonds II Phase I 2016	Seri A Series A	8,50%	442.000.000.000	AA-(idn)	04 Juli 2017 July 04, 2017	665.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as per maturity date
	Seri B Series B	9,50%	223.000.000.000		24 Juni 2019 June 24, 2019		
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Shelf Bonds II Phase II 2017	Seri A Series A	7,80%	400.000.000.000	AA-(idn)	01 September 2018 September 01, 2018	720.500.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as per maturity date
	Seri B Series B	8,90%	320.500.000.000		22 Agustus 2020 August 22, 2020		
Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 Shelf Bonds II Phase III 2017	Seri A Series A	7,15%	601.500.000.000	AA-(idn)	16 Desember 2018 December 16, 2018	867.500.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as per maturity date
	Seri B Series B	8,45%	266.000.000.000		06 Desember 2020 December 06, 2020		
Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2018 Shelf Bonds II Phase IV 2018	Seri A Series A	6,85%	626.000.000.000	AA-(idn)	16 April 2019 April 16, 2019	793.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as per maturity date
	Seri B Series B	7,50%	55.000.000.000		06 April 2020 April 06, 2020		
	Seri C Series C	8,15%	112.000.000.000		06 April 2021 April 06, 2021		
Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2018 Shelf Bonds II Phase V 2018	Seri A Series A	7,35%	293.000.000.000	AA-(idn)	18 Juni 2019 June 18, 2019	360.500.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as per maturity date
	Seri B Series B	8,60%	67.500.000.000		08 Juni 2021 June 08, 2021		
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2018 Shelf Bonds III Phase I 2018	Seri A Series A	9,25%	411.500.000.000	AA-(idn)	30 Desember 2019 December 30, 2019	570.500.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as per maturity date
	Seri B Series B	9,75%	40.000.000.000		20 Desember 2020 December 20, 2020		
	Seri C Series C	10,00%	119.000.000.000		20 Desember 2021 December 20, 2021		
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019 Shelf Bonds III Phase II 2019	Seri A Series A	8,50%	931.500.000.000	AA(idn)	09 Juni 2020 June 09, 2020	1.675.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as per maturity date
	Seri B Series B	9,15%	125.500.000.000		29 Mei 2021 May 29, 2021		
	Seri C Series C	9,85%	618.000.000.000		29 Mei 2022 May 29, 2022		
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020 Shelf Bonds III Phase III 2020	Seri A Series A	8,50%	227.500.000.000	AA(idn)	08 Juni 2021 June 08, 2021	260.300.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as per maturity date
	Seri B Series B	9,60%	32.800.000.000		28 Mei 2023 May 28, 2023		

Nama Name	**Seri** Series	**Bunga** Coupon Rate	**Nominal (Rp)**	**Peringkat** Ratings	**Jatuh Tempo** Maturity	**Total (Rp)**	**Keterangan** Description
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2020 Shelf Bonds III Phase II 2020	Seri A Series A	8,00%	328.000.000.000	AA(idn)	20 September 2021 September 20, 2021	500.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as per maturity date
	Seri B Series B	9,15%	172.000.000.000		10 September 2023 September 10, 2023		
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2021 Shelf Bonds IV Phase I 2021	Seri A Series A	5,50%	302.000.000.000	AA(idn)	08 Agustus 2022 August 08, 2022	500.000.000.000	Seri B Outstanding Series B are still outstanding
	Seri B Series B	7,00%	198.000.000.000		28 Juli 2024 July 28, 2024		
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2022 Shelf Bonds IV Phase II 2022	Seri A Series A	4,25%	335,000,000,000	AA(idn)	18 April 2023 April 18, 2023	800,000,000,000	Seri B Outstanding Series B are still outstanding
	Seri B Series B	6,30%	465,000,000,000		08 April 2025 April 08, 2025		
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 Shelf Bonds IV Phase III 2023	Seri A Series A	5,95%	221,000,000,000	AA(idn)	21 April 2024 April 21, 2024	1,000,000,000,000	*Outstanding*
	Seri B Series B	7,00%	779,000,000,000		11 April 2026 April 11, 2026		

Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Public Accountant and Public Accountant Firms

Nama KAP Name	Purwanto, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) Purwanto, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Nama AP Name	Yasir
Alamat Address	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Jasa Yang Diberikan Service Provided	Audit terhadap laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 Providing audits of the Company's Annual Financial Statements for the fiscal year that ended on December 31, 2023
Jasa Non-Audit Lain Other Non-Audit Service	*Limited Review* 30 Juni 2023 Limited Review June 30, 2023
Periode Penugasan Assignment Period	Per Laporan Keuangan Tahunan Per Annual Financial Statements
Biaya Fee	*Audit Fee :* Rp648.900.000,- *Limited Review :* Rp198.000.000,-

Nama dan Alamat Lembaga & Profesi Penunjang

Name and Address of Supporting & Institutions Professionals

BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE)

SHARE REGISTRAR

Nama Name	PT Sinartama Gunita
Alamat Address	Menara Tekno Lantai 7, Jl.Fachrudin No.19, RT 1, RW 7, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Jasa Yang Diberikan Service Provided	Pemeliharaan Data Saham Perseroan Company Shares Data Administration
Periode Penugasan Assignment Period	Per Tahun Per Year

Perusahaan Pemeringkat Efek

Share Rating Agency

Nama Name	PT Fitch Ratings Indonesia
Alamat Address	DBS Tower, Lantai 24 Suite 2403, Jl. Prof DR. Satrio, Kav.3-5, Jakarta 12940
Jasa Yang Diberikan Service Provided	*Review rating* Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023. Reviewing the rating of Shelf Public Offering of WOM Finance Shelf Registration Bonds IV Phase III of 2023.
Periode Penugasan Assignment Period	Per Penerbitan Obligasi sampai dengan Obligasi Lunas Per Bond Issuance up to Paid Off Bonds

Profesi Penunjang Pasar Modal

Capital Market Supporting Professionals

Nama Name	IRMA & SOLOMON Law Firm
Alamat Address	Sequis Center Lt.9, Jl. Jend. Sudirman 71, Jakarta 12190
Jasa Yang Diberikan Service Provided	Jasa Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023. Legal Services of Shelf Public Offering of Shelf Registration Bond IV WOM Finance Phase III 2023.
Periode Penugasan Assignment Period	Sejak penunjukan (07 Maret 2023) hingga diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023. Since the appointment (March 07, 2023) until the receipt of effective statement from the Financial Services Authority on the registration statement for Shelf Public Offering of Shelf Registration Bond IV WOM Finance Phase III 2023.

Nama Name	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Alamat Address	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12910
Jasa Yang Diberikan Service Provided	Jasa Pendaftaran Obligasi dan Agen Pembayaran Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023. Providing Bonds Registry Services and Payment Agent for Shelf Public Offering of Shelf Registration Bond IV WOM Finance Phase III 2023.
Periode Penugasan Assignment Period	Per Penerbitan Obligasi sampai dengan Obligasi Lunas Per Bond Issuance up to Paid Off Bonds

Nama Name	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
Alamat Address	Jl. Panglima Polim V/11, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
Jasa Yang Diberikan Service Provided	Pembuatan akta-akta Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023. Fees for the deeds of Shelf Public Offering of Shelf Registration Bond IV WOM Finance Phase III 2023.
Periode Penugasan Assignment Period	Sejak penunjukkan (07 Maret 2023), per pembuatan akta Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya. Since the appointment (March 07, 2023), Per the deeds of the Trusteeship Agreement, Debt Recognition Agreement, and Bond Underwriting Agreement, as well as the deeds of the change.

Profesi Penunjang Pasar Modal

Capital Market Supporting Professionals

Nama Name	Aulia Taufani, S.H
Alamat Address	Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav.60 Jakarta Selatan 12190
Jasa Yang Diberikan Service Provided	Pembuatan akta-akta terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa berikut dengan pemberitahuan dan/atau persetujuannya kepada Kementerian Hukum dan HAM RI serta pengumumannya dalam Berita Negara RI (apabila ada perubahan anggaran dasar) Deed of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders along with their notification and/or approval to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and announcement in the State Gazette of the Republic of Indonesia (if there is a change in the articles of association).
Periode Penugasan Assignment Period	Per Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan di Tahun 2023 Per General Meeting of Shareholders of the Company in 2023

Nama Name	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Alamat Address	BRI II Building 30th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210
Jasa Yang Diberikan Service Provided	Jasa Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023. Trustee Services for Shelf Public Offering of Shelf Registration Bond IV WOM Finance Phase III 2023.
Periode Penugasan Assignment Period	Sejak penunjukkan (07 Maret 2023, Per Penerbitan Obligasi sampai dengan Obligasi Lunas. Since the appointment (March 07, 2023, Per Bond Issuance up to Paid off Bonds

Penghargaan
Awards

26 Januari | January 2023

01



Indonesia Good Corporate Governance Award - VII - 2023

Kategori | Category :
1st The Best Indonesia GCG - 2023, Category : Multifinance , Asset (Rp1T - Rp6T) - Public Company

Penyelenggara | Organizer :
Economic Review

02



Indonesia Enterprise Risk Management Award - V - 2023

Kategori | Category :
1st The Best Indonesia Enterprise Risk Management - 2023 - Category : Multifinance (Asset Rp 1T - Rp6T) - Public Company

Penyelenggara | Organizer :
Economic Review

03



Indonesia Finance Award - V - 2023

Kategori | Category :
1st The Best Indonesia Finance - 2023 - Category : Multifinance (Asset Rp 1T - Rp6T) - Public Company

Penyelenggara | Organizer :
Economic Review

17 Februari | February 2023

04



4th Indonesia's Popular Digital Products Awards 2023

Kategori | Category :
Indonesia Top Digital Innovation Award 2023
Title : Top Configurating, Offering, Experience, Innovation 2023

Penyelenggara | Organizer :
The Iconomics

28 Februari | February 2023

05

Indonesia Best CFO Awards 2023



Kategori | Category :
Best Performance Chief Financial Officer 2023 in Achieving Solid Operational and Financial Performance, Category: Multifinance

Penyelenggara | Organizer :
Warta Ekonomi

21 Maret | March 2023

06



BAZNAS Award 2023

Kategori | Category :
Perusahaan dengan Program Kesehatan CSR/DSKL Terbaik

Penyelenggara | Organizer :
BAZNAS

Penghargaan
Awards

21 Maret | March 2023

12



Indonesia Sales & Marketing Award 2023

Kategori | Category :
Gold Award - The Best Indonesia Sales Marketing Award-VI- 2023 Category : Multifinance - Public Company

Penyelenggara | Organizer :
Economic Review

30 Maret | March 2023

07

Indonesia Digital Innovation Awards 2023



Kategori | Category :
The Most Innovative Multifinance Company for The Development of Accessible Financing Service Digitalization, Category: Multifinance

Penyelenggara | Organizer :
Warta Ekonomi

13 April 2023

08



12th Infobank Digital Brand Awards 2023

Kategori | Category :
"The Best" Perusahaan Pembiayaan Aset Rp5 Triliun s.d. <Rp10 Triliun

Penyelenggara | Organizer :
Infobank

19 Mei | May 2023

09



Indonesia Corporate Secretary and Communication Award - VIII - 2023

Kategori | Category :
The Best Corporate Secretary & Communication Award – 2023, Category: Multifinance - Public Company

Penyelenggara | Organizer :
Economic Review

26 Mei | May 2023

10



Indonesia Best Workplace For Women Award 2023

Kategori | Category :
Best Workplaces for Woman 2023 in Protecting Working Women's Right, Category: Financial Services Industry

Penyelenggara | Organizer :
Herstory

31 Mei | May 2023

11

Indonesia Financial Leader Awards 2023



Kategori | Category :
Bp Djaja Suryanto Sutandar Best Leader for Sustainability Acceleration Through Providing of Innovative Financing Solution, Category: Multifinance, Total Assets 5T - 10T.

Penyelenggara | Organizer :
Warta Ekonomi

6 Juli | July 2023

13

Indonesia CSR Awards 2023



Kategori | Category :
Indonesia Best CSR Award 2023 with Outstanding Program in Social and Environmental Development, Category: Multifinance

Penyelenggara | Organizer :
Warta Ekonomi

17 Juli | July 2023

14



19th Infobank Multifinance Awards 2023

Kategori | Category :
The Best Performance Multifinance Company 2023 (Asset IDR 5 Trillion -< IDR 10 Trillion)

Penyelenggara | Organizer :
Infobank

6 September 2023

15



TOP GRC Awards 2023

Kategori | Category :
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk TOP GRC Awards 2023 #Star 4

Penyelenggara | Organizer :
TOP Business

16



Kategori | Category :
Djaja Suryanto Sutandar Presiden Direktur The Most Committed GRC Leader 2023

Penyelenggara | Organizer :
TOP Business

Penghargaan
Awards

4 Desember | December 2023

17

TOP Digital Awards 2023



Kategori | Category :
Djaja Suryanto Sutandar Presiden Direktur
Top Leader on Digital Implementation 2023

Penyelenggara | Organizer :
It Works

18

The Next Leaders Forum 2023



Kategori | Category :
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
TOP Digital #Stars 5

Penyelenggara | Organizer :
It Works

5 Desember | December 2023

19

Infobank TOP 100 CEO 2023

Kategori | Category :
Bapak Djaja Suryanto Sutandar
TOP 100 CEO 2023

Penyelenggara | Organizer :
Infobank

20

The Next Leaders Forum 2023

Kategori | Category :
Bapak Njauw Vido Onadi
The Next Leaders

Penyelenggara | Organizer :
Infobank

21

The Next Leaders Forum 2023

Kategori | Category :
Ibu Cincin Lisa Hadi
The Next Leaders

Penyelenggara | Organizer :
Infobank



21 19 20

Informasi pada Website Perusahaan

Corporate Website Information

Menu	Deskripsi | Description		
Pelanggan Customer	Promo		
	Produk Products	Pembiayaan Multiguna Barang | Multipurpose Goods Financing Pembiayaan Investasi | Investment Financing Pembiayaan Modal Kerja | Working Capital Financing Pembiayaan Multiguna Jasa | Multipurpose Services Financing *Multipurpose Financing* (MotorKu and MobilKu) Pembelian Jual Beli (Akad Murabahah) | Sale and Buy Financing (Murabahah Contract)	
	KAWAN		
Korporat Corporate	Informasi Perusahaan Company Information	Profil Perusahaan Company Profile	Sejarah | History
			Visi | Vision
			Misi | Mission
			Nilai - Nilai Perusahaan | Corporate Values
		Manajemen Management	Dewan Komisaris | Board of Commissioners
			Direksi |Board of Director
			Dewan Pengawas Syariah | Sharia Supervisory Board
			Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary
			Kepala Unit Audit Internal | Head of Internal Audit Unit
			Kepala Regional | Regional Head
		Komitmen Manajemen SMKI | Management Committee SMKI	
		Penghargaan | Awards	
		Struktur Organisasi Perusahaan | Company Organization Structure	
		Struktur Pemegang Saham | Shareholder Structure	
		Struktur Grup Perusahaan | Company Group Structure	
		Anggaran Dasar Perusahaan | Company Articles of Association	
		Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal | Capital Market Supporting Professional Institutions	
	Hubungan Investor Investor Relations	Laporan Tahunan | Annual Report	
		Laporan Keuangan | Financial Statements	
		Laporan Keberlanjutan | Sustainability Report	
		Rapat Umum Pemegang Saham | General Meeting of Shareholders	
		Prospektus Penawaran Umum | Public Offering Prospectus	
		Informasi Obligasi/Sukuk | Bond/Sukuk Information	
		Keterbukaan Informasi Information Disclosure	Publikasi | Publication
			Laporan | Report
		Informasi Keuangan Financial Information	Ikhtisar Keuangan | Financial Highlights
		Berita dan Informasi | News and Information	
		Pemeringkat Pembiayaan | Financing Rating	

Informasi pada Website Perusahaan

Corporate Website Information

Menu	Deskripsi | Description		
Korporat **Corporate**	Tata Kelola Governance	Pedoman Kerja | Work Guidelines	
		Kode Etik Perusahaan | Company Code of Conduct	
		Komite Perusahaan Company Committee	Komite Audit | Audit Committee
			Komite Manajemen Risiko | Risk Management Committee
			Komite Remunerasi dan Nominasi | Remuneration and Nomination Committee
			Komite Teknologi Informasi | Information Technology Committee
			Komite Pemantau Risiko | Risk Oversight Committee
			Komite Produk & Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah | Sharia Business Product & Development Committee
		Pedoman Tata Kelola Perusahaan | Corporate Governance Guidelines	
		APU PPT	Penjelasan APU PPT | AML CFT Explanation
			Pelatihan APU PPT | AML CFT Training
		Pengaduan Konsumen Consumer Complaint	Sistem Penanganan Pengaduan Konsumen | Consumer Complaint Handling System
			Laporan Pengaduan Konsumen | Consumer Complaint Report
		Kebijakan Perusahaan Company Policy	Kebijakan Komunikasi Dengan Pemegang Saham Atau Investor | Communication Policy with Shareholders or Investors
			Kebijakan Manajemen Risiko | Risk Management Policy
			Kebijakan *Whistleblowing* | Whistleblowing Policy
	Tanggung Jawab Sosial Corporate Social Responsibility	Tentang CSR | About CSR	
		Program CSR | CSR Programs	
Karir **Career**	*Tips* | Tips		
	Events | Events		
	Karir | Career		

Pendidikan & Pelatihan Manajemen

Education & Training of Management

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

No	Nama Name	Sertifikasi/Pelatihan Certification/Training	Tempat Venue	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1	I Nyoman Tjager	Seminar Nasional Tantangan Pembiayaan di Tengah Tahun Politik National Seminar on Financing Challenges in the Middle of the Political Year	The Raffles Hotel, Jakarta Selatan	31 Januari 2023 January 31, 2023	APPI
2	Thilagavathy Nadason	Seminar Internasional The future of Digitalization In Multifinance Industry International Seminar on The Future of Digitalization in Multifinance Industry	Pullman Hotel, Thamrin	1 Agustus 2023 August 1, 2023	APPI
3	Myrnie Zachraini Tamin	Seminar Nasional Tantangan Pembiayaan di Tengah Tahun Politik National Seminar on Financing Challenges in the Middle of the Political Year	The Raffles Hotel, Jakarta Selatan	31 Januari 2023 January 31, 2023	APPI
		Konferensi Nasional Professional Manajemen Risiko IX *"Navigating Country Risk for Sustainable Growth: Opportunities and Challenges"* IX National Conference of Risk Management Professionals "Navigating Country Risks for Sustainable Growth: Opportunities and Challenges"	Yogyakarta	14 - 15 Desember 2023 December 14 - 15, 2023	LSPMR

Direksi

Board of Directors

No	Nama Name	Sertifikasi/Pelatihan Certification/Training	Tempat Venue	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1	Djaja Suryanto Sutandar	Seminar Nasional Tantangan Pembiayaan di Tengah Tahun Politik National Seminar on Financing Challenges in the Middle of the Political Year	The Raffles Hotel, Jakarta Selatan	31 Januari 2023 January 31, 2023	APPI
		Seminar Nasional Pembiayaan Mikro dan SDM di Era Society 5.0 National Seminar on Microfinance and Human Resources in the Era of Society 5.0	The Raffles Hotel, Jakarta Selatan	3 Maret 2023 March 3, 2023	APPI
2	Cincin Lisa Hadi	Seminar Nasional Pembiayaan Mikro dan SDM di Era Society 5.0 National Seminar on Microfinance and Human Resources in the Era of Society 5.0	The Raffles Hotel, Jakarta Selatan	3 Maret 2023 March 3, 2023	APPI
		Seminar Internasional The Future of Digitalization In Multifinance Industry International Seminar on The Future of Digitalization in Multifinance Industry	Pullman Hotel, Thamrin	1 Agustus 2023 August 1, 2023	APPI
3	Njauw Vido Onadi	Seminar Nasional Pembiayaan Mikro dan SDM di Era Society 5.0 National Seminar on Microfinance and Human Resources in the Era of Society 5.0	The Raffles Hotel, Jakarta Selatan	3 Maret 2023 March 3, 2023	APPI
		Seminar Nasional Era Baru Industri Pembiayaan National Seminar on the New Era of the Financing Industry	The Raffles Hotel, Jakarta Selatan	6 Juni 2023 June 6, 2023	APPI

Pendidikan & Pelatihan Manajemen

Education & Training of Management

No	Nama Name	Sertifikasi/Pelatihan Certification/Training	Tempat Venue	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
4	Anthony Yuarez Panggabean	Seminar Nasional Era Baru Industri Pembiayaan National Seminar on the New Era of the Financing Industry	The Raffles Hotel, Jakarta Selatan	6 Juni 2023 June 6, 2023	APPI
		Seminar Internasional The Future of Digitalization In Multifinance Industry International Seminar on The Future of Digitalization in Multifinance Industry	Pullman Hotel, Thamrin	1 Agustus 2023 August 1, 2023	APPI
5	Wibowo	Seminar Nasional Tantangan Pembiayaan di Tengah Tahun Politik National Seminar on Financing Challenges in the Middle of the Political Year	The Raffles Hotel, Jakarta Selatan	31 Januari 2023 January 31, 2023	APPI
		Seminar Nasional Era Baru Industri Pembiayaan National Seminar on the New Era of the Financing Industry	The Raffles Hotel, Jakarta Selatan	6 Juni 2023 June 6, 2023	APPI

Komite Audit
Audit Committee

No	Nama Name	Sertifikasi/Pelatihan Certification/Training	Tempat Venue	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1	I Nyoman Tjager	Seminar Nasional Tantangan Pembiayaan di Tengah Tahun Politik National Seminar on Financing Challenges in the Middle of the Political Year	Webinar	31 Januari 2023 January 31, 2023	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Indonesian Financial Services Association (APPI)
2	Emmanuel Bambang Suyitno	Implementasi AI di Industri Jasa Keuangan AI Implementation in Financial Services Industry	Online	02 Februari 2023 February 02, 2023	OJK Institute
		Deteksi Akuntansi Forensik Atas Potensi Manipulasi Laporan Keuangan Forensic Accounting Detection of Potential Financial Statement Manipulation	Online	25 Februari 2023 February 25, 2023	Ruang Seminar Seminar Room
		Detecting Financial Statement Fraud Misstatements and Red Flags	Online	04 Maret 2023 March 04, 2023	Ruang Seminar Seminar Room
		Seminar Transformasi Internal Audit dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PwC Indonesia & Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) Seminar on Internal Audit Transformation and Signing of Cooperation Agreement between PwC Indonesia & Indonesian Institute of Audit Committee (IKAI)	Jakarta	09 Mei 2023 May 09, 2023	IKAI & PWC
		Deloitte Asia Pacific Conduct Watch 2023	Jakarta	20 Juni 2023 June 20, 2023	Deloitte
		Fraud & Forensic Auditing : Identification, Detection & Prevention	Dubai	03 - 07 Juli 2023 July 03-07, 2023	Glomacs-Oxford Management Center

No	Nama Name	Sertifikasi/Pelatihan Certification/Training	Tempat Venue	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
		IIA Indonesia National Conference 2023: Staying Relevant	Online	30 - 31 Agustus 2023 August 30-31, 2023	IIA Indonesia Chapter
		Enhancing Financial Performance Through Data Analytics	Online	31 Agustus 2023 August 31, 2023	OJK Institute
		Konas IKAI 2023: Mengawal Keberlanjutan & Pertumbuhan PerseroanMelalui Pengawasan & Pengendalian Risiko Konas IKAI 2023: Overseeing the Company's Sustainability & Growth through Risk Supervision & Control	Jakarta	19 Oktober 2023 October 19, 2023	IKAI
		How to drive corporate performance through accounting practices	Online	9 November 2023 November 9, 2023	OJK Institute
3	Rijanti Witarsa	-	-	-	-

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

No	Nama Name	Sertifikasi/Pelatihan Certification/Training	Tempat Venue	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1	Cincin Lisa Hadi	Seminar Nasional Pembiayaan Mikro dan SDM di Era Society 5.0 National Seminar on Microfinance and Human Resources in the Era of Society 5.0	The Raffles Hotel, Jakarta Selatan	3 Maret 2023 March 3, 2023	APPI
		Seminar Internasional The Future of Digitalization In Multifinance Industry International Seminar on The Future of Digitalization in Multifinance Industry	Pullman Hotel, Thamrin	1 Agustus 2023 August 1, 2023	APPI

Audit Intern
Internal Audit

No	Nama Name	Sertifikasi/Pelatihan Certification/Training	Tempat Venue	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1	Ignatius Prasetya Budi Gunawan Sendy Broto Kusumo	Webinar: Urgensi Perpanjangan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Webinar: The Urgency of Extension Policy Credit Restructuring	Online	19 Januari 2023 January 19, 2023	LPPI
2	Budi Gunawan Sendy Broto Kusumo	*Webinar: Trend & Challenges Internal Audit in 2023 - 2025*	Online	20 Januari 2023 January 20, 2023	YPIA
3	Aditya Rangga Kusuma	*Webinar: Audit Forensic & Investigation*	Online	21 Januari 2023 January 21, 2023	Ruang Seminar Seminar Room
4	Budi Gunawan Muhamad Imanuddin	Penerapan GRC Terintegrasi Untuk Tata Kelola dan Meningkatkan Pengelolaan Risiko yang Lebih Baik Integrated GRC deployments for Governance and Improving Better Risk Management	Online	24 Januari 2023 January 24, 2023	IIA Indonesia

Pendidikan & Pelatihan Manajemen

Education & Training of Management

No	Nama Name	Sertifikasi/Pelatihan Certification/Training	Tempat Venue	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
5	Hendra Ditria	*Audit Reporting*	Online	24 Januari 2023 January 24, 2023	IIA Indonesia
6	Ignatius Prasetya	Implementasi Artificial Intelligence di Industri Jasa Keuangan Artificial Implementation Intelligence in the Financial Service Industry	Online	2 Februari 2023 February 2, 2023	OJK Institute
7	Aditya Rangga Kusuma	APU PPT AML CTF	Hotel Le Meridien	15-16 Februari 2023 February 15 - 16, 2023	Learning Media Indonesia
8	Budi Gunawan	Training for Trainer	Online	21 - 23 Februari 2023 February 21 - 23, 2023	HC Learning WOM Finance
9	Ignatius Prasetya Budi Gunawan Sendy Broto Kusumo	*G20/ B20 Integrity & Compliance Policy Paper Action Plan For Internal Auditor*	Online	23 Februari 2023 February 23, 2023	IIA Indonesia
10	Ignatius Prasetya Budi Gunawan	*Assurance Based Consulting*	Online	13 Maret 2023 March 13, 2023	IIA Indonesia
11	Dimas Erlangga Mantik Rika Kurnia	*Training Intermediate Negotiation Skill (With LMS)*	Online	14 Maret 2023 March 14, 2023	HC Learning WOM Finance
12	Kausarihsan Panggabean	Webinar: Analisis Laporan Keuangan Webinar: Financial Statements Analysis	Online	25 Maret 2023 March 25, 2023	Ruang Seminar Seminar Room
13	Ignatius Prasetya	Dukungan Forensik Bagi Penguatan Skema Anti Penyuapan Di Korporasi Selaras ISO 37001 Forensic Support for Reinforcement of Anti-Feeding Scheme in the Corporation in accordance with ISO 37001	Online	30 - 31 Maret 2023 March 30 - 31, 2023	LPPSP UI
14	Ignatius Prasetya Budi Gunawan Sendy Broto Kusumo Muhamad Imanuddin Bagdja Nugraha Dimas Erlangga Mantik Syahrial Karmanto Kausarihsan Panggabean	*Fundamentals Audit*	Online	30 - 31 Maret 23 March 30 - 31, 2023	Group Audit Maybank
15	Ignatius Prasetya Budi Gunawan Sendy Broto Kusumo Muhamad Imanuddin	*Webinar :* *- How to Manage Team & Boss* *- Impactful Communication Make Your Value More Impactful*	Online	06 April 2023 April 06, 2023	IIA Indonesia
16	Ignatius Prasetya	*Webinar :* *- Internal Audit Roles & Competency In Consumer Data Protection* *- Stay Relevant By Implementing The Internal Competency Framework*	Online	13 April 2023 April 13, 2023	IIA Indonesia
17	Sendy Broto Kusumo	*Webinar :* *What You Need to Know About the Proposed Changes to The Standards*	Online	12 Mei 2023 May 12, 2023	IIA Indonesia
18	Andri Lesmana Aditya Rangga Kusuma	*Training Intermediate Negotiation Skill*	Online	15 Juni 2023 June 15, 2023	HC Learning WOM Finance

No	Nama Name	Sertifikasi/Pelatihan Certification/Training	Tempat Venue	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
19	Muhamad Imanuddin	IAIB National Conference: Peran Audit Dimasa Depan IAIB National Conference: The Role of Future Audits	Hotel Episode Tangerang	12 - 13 Juli 2023 July 12 - 13, 2023	IAIB
20	Ignatius Prasetya Bagdja Nugraha	*Lead Auditor ISO 27001*	Online	10 - 14 Juli 2023 July 10 - 14, 2023	BSI
21	Bagdja Nugraha Kausarihsan Pangabean Oky Syahputra	*Cyber and Technology Security: Managing a Potential Risk-Apprentice Level*	Online	30 Agustus 2023 August 30, 2023	Group Audit Maybank
22	Ignatius Prasetya	*Enhancing Financial Peformance Through Data Analytics*	Online	21 September 2023 September 21, 2023	OJK Institute
23	Budi Gunawan Sendy Broto Kusumo	*Integrity Management For Internal Audit*	Online	21 September 2023 September 21, 2023	IIA Indonesia
24	Karmanto Arief Soedjono Steffi Rika Kurnia	*Connected Party Credit Transactions For Business Application*	Online	21 September 2023 September 21, 2023	Group Audit Maybank
25	Aditya Rangga Kusuma Ahmad Fadjarudin Andri Lesmana Syahrial	*Enterprise Risk Management (ERM): Beyond Concept*	Online	26 - 27 September 2023 September 26 - 27, 2023	Group Audit Maybank
26	Rika Kurnia	*Performing an Effective Quality Assessment*	Online	29 - 30 November 2023 November 29 – 30, 2023	IIA Indonesia
27	Bagdja Nugraha	Cyber Risk	Online	13-14 Desember 2023 December 13-14, 2023	IIA Indonesia

Alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Selain Kantor Cabang

Head Office, Branch Office and Non-Branch Office Addresses

Kantor Pusat | Head Office
ALTIRA OFFICE TOWER, Lt.32, 33, & 35
Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok
Kota Administrasi Jakarta Utara 14350



KANTOR CABANG (KC) & KANTOR SELAIN KANTOR CABANG (KSKC)

BRANCH OFFICES & NON-BRANCH OFFICES

Jumlah Kantor Cabang (KC) dan Kantor Selain Kantor Cabang (KSKC)

Number of Branch Offices and Non-Branch Offices

	Region Region	**KC**	**KC yang Juga Memiliki Izin Sebagai Kantor Cabang Unit Usaha Syariah (KC UUS) *** Branch Office (KC) that also holds permit as a Sharia Business Unit Branch Office (KC UUS) *	**KSKC**	**Jumlah Jaringan Kantor** Number of Office Networks
1	Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi [JABODEBEK]	18	10	4	22
3	Jawa Barat [JABAR]	15	6	2	17
5	Jawa Tengah Selatan [JATENG SELATAN]	14	5	9	23
6	Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara [JATIM BNT]	28	5	8	36
7	Sumatera Bagian Utara [SUMBAGUT]	18	2	4	22
8	Sumatera Bagian Selatan [SUMBAGSEL]	18	1	5	23
9	Sulawesi	13	1	2	15
13	Banten [BANTEN]	15	7	2	17
14	Jawa Tengah Utara [JATENG UTARA]	13	2	4	17
15	Kalimantan	10	2	0	10
Total		**162**	**41**	**40**	**202**

*) Jumlah KC pada region tersebut yang juga memiliki izin sebagai KC UUS dan dapat melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
*) Branch Office (KC) that also holds permit as a Sharia Business Unit Branch Office (KC UUS) and can carry out financing activities based on sharia principles.

BU I - [JABODEBEK]

Nama Kantor Office Name	**Status Kantor** Description	**Alamat Kantor** Office Address	**Kota/Kabupaten** Cities/Regencies
Daan Mogot*)	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Peta Selatan, Komplek Ruko Citi Square Business Park Blok G-2 & G-3, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Kota Administrasi Jakarta Barat West Jakarta Administrative City
Jakarta Pusat*)	Kantor Cabang Branch Office	Rukan Sentra Salemba Mas Blok W, Jalan Salemba Raya Nomor 34-36, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Kota Administrasi Jakarta Pusat Central Jakarta Administrative City
Jakarta Timur 1 Duren Sawit*)	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Raya Pahlawan Revolusi Nomor 145 A RT 002 RW 004, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Kota Administrasi Jakarta Timur East Jakarta Administrative City

Alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Selain Kantor Cabang

Head Office, Branch Officesnd Non-Branch Office Addresses

Nama Kantor Office Name	Status Kantor Description	Alamat Kantor Office Address	Kota/Kabupaten Cities/Regencies
Bogor*)	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Raya Pajajaran Nomor 28C RT 001 RW 005, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.	Kota Bogor Bogor City
Cibinong*)	Kantor Cabang Branch Office	Rukan Cibinong City Center Blok A Nomor 31 Jalan Tegar Beriman RT 005 RW 012, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.	Kabupaten Bogor Bogor Regency
Cikarang*)	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Niaga Raya Kav. AA3 Unit EF-3, Ruko CBD Jababeka 2, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.	Kabupaten Bekasi Bekasi Regency
Cileungsi*)	Kantor Cabang Branch Office	Ruko Oregon Square TCR 32, Perumahan Kota Wisata, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.	Kabupaten Bogor Bogor Regency
Bekasi 1 Bekasi Barat*)	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Jend. Sudirman Nomor 99A RT 02 RW 07 Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.	Kota Bekasi Bekasi City
Depok*)	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.	Kota Depok Depok City
Karawang*)	Kantor Cabang Branch Office	Perumahan Grand Taruma Ruko Dharmawangsa Blok C18 dan C19, Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Kabupaten Karawang Karawang Regency
Leuwiliang	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Raya Leuwiliang Kampung Cimanggu RT 01 RW 01, Kelurahan Cimanggu 1, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.	Kabupaten Bogor Bogor Regency
Jakarta Selatan 1 Pasar Minggu	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 11B, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Kota Administrasi Jakarta Selatan South Jakarta Administrative City
Bekasi 2 Tambun Selatan	Kantor Cabang Branch Office	Ruko Grand Kalimas Blok A Nomor 11, Jalan KH. Noer Alie Inspeksi Kalimalang, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.	Kabupaten Bekasi Bekasi Regency
Jakarta Utara	Kantor Cabang Branch Office	Ruko Grand Orchard Square Blok D07, Jalan Raya Kelapa Hybrida, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Kota Administrasi Jakarta Utara North Jakarta Administrative City
Jakarta Timur 2 Cipayung	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Raya Pondok Gede Nomor 29, RT 004 RW 008, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Kota Administrasi Jakarta Timur East Jakarta Administrative City
Jakarta Selatan 2 Kebayoran Lama	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 17F, RT 001 RW 002, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Kota Administrasi Jakarta Selatan South Jakarta Administrative City
Bekasi 4 Jatiasih	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Raya Pekayon Nomor 99 RT 003 RW 004, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.	Kota Bekasi Bekasi City
Bekasi 5 Harapan Indah	Kantor Cabang Branch Office	Ruko Emerald Boulevard Blok EB 1 Nomor 21, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.	Kota Bekasi Bekasi City
Jakarta Utara 2	KSKC Non-Branch Office	Jalan Bandengan Utara Nomor 80 Blok D-27, RT 007 RW 016, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Kota Administrasi Jakarta Utara North Jakarta Administrative City
Jonggol	KSKC Non-Branch Office	Ruko Citra Indah Square, Blok RCS 01/07, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.	Kabupaten Bogor Bogor Regency

Alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Selain Kantor Cabang

Head Office, Branch Office and Non-Branch Office Addresses

Nama Kantor Office Name	Status Kantor Description	Alamat Kantor Office Address	Kota/Kabupaten Cities/Regencies
Pancoran Mas	KSKC Non-Branch Office	Jalan Meruyung Raya, RT 04 RW 03, Kelurahan Rangkapanjaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.	Kota Depok Depok City
Joglo	KSKC Non-Branch Office	Jalan Raya Kembangan Nomor 86, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Kota Administrasi Jakarta Barat West Jakarta Administrative City

*) Kantor Cabang (KC) yang juga memiliki izin sebagai Kantor Cabang Unit Usaha Syariah (KC UUS) dan dapat melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
*) Branch Office (KC) that also holds permit as a Sharia Business Unit Branch Office (KC UUS) and can carry out financing activities based on sharia principles

BU III - [JABAR]

Nama Kantor Office Name	Status Kantor Description	Alamat Kantor Office Address	Kota/Kabupaten Cities/Regencies
Bandung*)	Kantor Cabang Branch Office	Jalan BKR Nomor 192, RT 004 RW 005, Kelurahan Ciatel, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.	Kota Bandung Bandung City
Cirebon*)	Kantor Cabang Branch Office	CSB Blok Ruko Berry Green Nomor 5-6, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat.	Kota Cirebon Cirebon City
Jatibarang	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Raya Kongsi Nomor 17, Kelurahan Kongsi Jaya, Kecamatan Windasari, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.	Kabupaten Indramayu Indramayu Regency
Sukabumi	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Sudirman Nomor 57C, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.	Kota Sukabumi Sukabumi City
Sumedang	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 118, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.	Kabupaten Sumedang Sumedang Regency
Tasikmalaya*)	Kantor Cabang Branch Office	Ruko Mayasari Plaza Jalan Lingkungan Nomor 26, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.	Kota Tasikmalaya Tasikmalaya City
Garut*)	Kantor Cabang Branch Office	Komplek Ruko Intan Bisnis Center Blok I Nomor 15, Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.	Kabupaten Garut Garut Regency
Kuningan	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Siliwangi Nomor 92, RT 003 RW 004, Lingkungan Dago, Kelurahan Cijoho, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.	Kabupaten Kuningan Kuningan Regency
Cimahi*)	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Sangkuriang Nomor 7, RT 04 RW 12, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat.	Kota Cimahi Cimahi City
Cianjur*)	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Abdullah Bin Nuh Nomor 104, RT 004 RW 014, Kelurahan Sawahgede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.	Kabupaten Cianjur Cianjur Regency
Purwakarta	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Veteran Blok Anggrek Nomor 9-10, RT 31 RW 04, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.	Kabupaten Purwakarta Purwakarta Regency
Majalengka	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Kyai Haji Abdul Halim, RT 05 RW 08, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat.	Kabupaten Majalengka Majalengka Regency
Bandung 2 Soreang	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Raya Soreang, RT 03 RW 04, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.	Kabupaten Bandung Bandung Regency
Bandung 3 Setiabudi	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Jurang Nomor 7, RT 06 RW 06, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.	Kota Bandung Bandung City

Alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Selain Kantor Cabang

Head Office, Branch Officesnd Non-Branch Office Addresses

Nama Kantor Office Name	Status Kantor Description	Alamat Kantor Office Address	Kota/Kabupaten Cities/Regencies
Bandung 4 Ujung Berung	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Soekarno Hatta KM. 15 Nomor 855, Tritan Point Bandung Blok B15-16, RT 03 RW 02, Kelurahan Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung Bandung City
Kandanghaur	KSKC Non-Branch Office	Jalan Raya Karanganyar Blok Anjun, RT 003 RW 009, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.	Kabupaten Indramayu Indramayu Regency
Ciamis	KSKC Non-Branch Office	Dusun Warung Kulon, RT 004 RW 001, Desa Imbanagara Raya, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.	Kabupaten Ciamis Ciamis Regency

*) Kantor Cabang (KC) yang juga memiliki izin sebagai Kantor Cabang Unit Usaha Syariah (KC UUS) dan dapat melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
*) Branch Office (KC) that also holds permit as a Sharia Business Unit Branch Office (KC UUS) and can carry out financing activities based on sharia principles.

BU V - [JATENGSEL]

Nama Kantor Office Name	Status Kantor Description	Alamat Kantor Office Address	Kota/Kabupaten Cities/Regencies
Purwokerto*)	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Jenderal Sudirman Timur, RT 002 RW 004, Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Banyumas Banyumas Regency
Purbalingga	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Letnan Kolonel Isdiman Nomor 100 RT 002 RW 003, Kelurahan Bancar, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Purbalingga Purbalingga Regency
Solo*)	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Gatot Subroto 214, Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.	Kota Surakarta Surakarta City
Yogyakarta*)	Kantor Cabang Branch Office	Malioboro Junction Ruko Blok G-H, Jalan Letjend Suprapto, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Kota Yogyakarta Yogyakarta City
Cilacap	Kantor Cabang Branch Office	Ruko Perintis KAV.5-6, Jalan Perintis Kemerdekaan, RT 01 RW 04 Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Cilacap Cilacap Regency
Klaten*)	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Mayor Kusmanto Plosorejo, RT 03 RW 05, Kelurahan Sekarsuli, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Klaten Klaten Regency
Wonosobo	Kantor Cabang Branch Office	Ruko Abragen Jalan Mayjend Bambang Sugeng A17, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Wonosobo Wonosobo Regency
Kebumen	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Pemuda No. 87, RT 001 RW 003, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Kebumen Kebumen Regency
Magelang*)	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Mayjend Bambang Soegeng Ruko Metro Square Blok F7-F8. Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Magelang Magelang Regency
Wonogiri	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Diponegoro Nomor 47. Jatirejo, RT 001 RW 008, Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Wonogiri Wonogiri Regency
Cilacap 2	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Jenderal Sudirman, RT 02 RW 04 Desa Sidareja, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Cilacap Cilacap Regency
Banyumas	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Raya Ajibarang, RT 002 RW 001, Desa Ajibarang Wetan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Banyumas Banyumas Regency
Banjarnegara	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Letnan Jenderal Soeprapto No. 25A, RT 003 RW 007, Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Banjarnegara Banjarnegara Regency

Alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Selain Kantor Cabang

Head Office, Branch Office and Non-Branch Office Addresses

Nama Kantor Office Name	Status Kantor Description	Alamat Kantor Office Address	Kota/Kabupaten Cities/Regencies
Cilacap 3 Majenang	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Diponegoro Nomor 51, RT 001 RW 002, Desa Sindangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Cilacap Cilacap Regency
Gombong	KSKC Non-Branch Office	Ruko Blok A.07, Komplek Pasar Wonokriyo, RT 03 RW 05, Jalan Yos Sudarso Kelurahan Wonokriyo, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Kebumen Kebumen Regency
Purworejo	KSKC Non-Branch Office	Jalan Tentara Pelajar, RT 003 RW 008, Kelurahan Pangenjurutengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Purworejo Purworejo Regency
Sragen	KSKC Non-Branch Office	Jalan Raya Sukowati Nomor 28-C, Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Sragen Sragen Regency
Boyolali	KSKC Non-Branch Office	Ruko Graha Mandiri Nomor 04, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Boyolali Boyolali Regency
Wonosari	KSKC Non-Branch Office	Jalan Baron Nomor 184, Tegalsari, Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Kabupaten Gunung Kidul Gunung Kidul Regency
Bantul	KSKC Non-Branch Office	Blunyahan RT 046, Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Kabupaten Bantul Bantul Regency
Sleman	KSKC Non-Branch Office	Jalan Parasamya Ruko Nomor 2, Beran Lor, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Kabupaten Sleman Sleman Regency
Sukoharjo	KSKC Non-Branch Office	Jalan Jenderal Sudirman 89, Sukoharjo RT 02 RW 03, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Sukoharjo Sukoharjo Regency
Muntilan	KSKC Non-Branch Office	Dusun Nepen, RT 001 RW 007, Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Magelang Magelang Regency

*) Kantor Cabang (KC) yang juga memiliki izin sebagai Kantor Cabang Unit Usaha Syariah (KC UUS) dan dapat melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
*) Branch Office (KC) that also holds permit as a Sharia Business Unit Branch Office (KC UUS) and can carry out financing activities based on sharia principles.

BU VI - [JATIM BNT]

Nama Kantor Office Name	Status Kantor Description	Alamat Kantor Office Address	Kota/Kabupaten Cities/Regencies
Banyuwangi	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Basuki Rachmat Nomor 55, RT 001 RW 002, Lingkungan Singowingnyo, Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.	Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi Regency
Genteng	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Jember Nomor 48, Dusun Krajan II, RT 002 RW 004, Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.	Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi Regency
Blitar	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Ahmad Yani Nomor 39, RT 003 RW 008, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur.	Kota Blitar Blitar City
Bojonegoro	Kantor Cabang Branch Office	Ruko Central District Business Jalan Veteran 6, RT.33 RW.88, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.	Kabupaten Bojonegoro Bojonegoro Regency
Gresik*)	Kantor Cabang Branch Office	Ruko Green Garden Regency A1 40-41, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.	Kabupaten Gresik Gresik Regency
Jombang	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Soekarno-Hatta Nomor 3, Komplek Ruko Cempaka Mas Blok C Nomor 6 dan 7, Kelurahan Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.	Kabupaten Jombang Jombang Regency
Kediri	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Pati Unus Nomor 9, RT 01 RW 01, Kelurahan Kemasan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur.	Kota Kediri Kediri City

Alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Selain Kantor Cabang

Head Office, Branch Officesnd Non-Branch Office Addresses

Nama Kantor Office Name	Status Kantor Description	Alamat Kantor Office Address	Kota/Kabupaten Cities/Regencies
Madiun	Kantor Cabang Branch Office	Ruko Jalan M.H. Thamrin Nomor 106, RT 005 RW 001, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.	Kota Madiun Madiun City
Magetan	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Manggis, RT 011 RW 001, Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.	Kabupaten Magetan Magetan Regency
Ngawi	Kantor Cabang Branch Office	Jalan PB Sudirman Nomor 54, Kelurahan Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.	Kabupaten Ngawi Ngawi Regency
Malang*)	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Sunandar Priyo Sudarmo 8 C - D, RT 09 RW 13, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.	Kota Malang Malang City
Mojokerto	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Mojopahit Nomor 450, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.	Kota Mojokerto Mojokerto City
Sidoarjo*)	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Raya Jenggolo Nomor 9, Ruko Central Jenggolo Blok A-6, RT 02 RW 01, Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo Regency
Surabaya Timur*)	Kantor Cabang Branch Office	Ruko Mega Galaxy Blok 14-A Nomor 8, RT 002 RW 009, Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.	Kota Surabaya Surabaya City
Tulung Agung	Kantor Cabang Branch Office	Ruko Panglima Sudirman Trade Center Blok C4, Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.	Kabupaten Tulungagung Tulungagung Regency
Nganjuk	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Gatot Subroto Nomor 89, RT 01 RW 05, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.	Kabupaten Nganjuk Nganjuk Regency
Pasuruan	Kantor Cabang Branch Office	Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 05, RT 004 RW 001 Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.	Kota Pasuruan Pasuruan City
Tuban	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Basuki Rahmad Nomor 240, RT 02 RW 06, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.	Kabupaten Tuban Tuban Regency
Denpasar*)	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 56, B, Kelurahan Penatih Dangin Timur, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali.	Kota Denpasar Denpasar City
Tabanan	Kantor Cabang Branch Office	Jalan By Pass (Ir.Soekarno) Nomor 88A, Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.	Kabupaten Tabanan Tabanan Regency
Mataram	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Sriwijaya Nomor 39 dan 40, Lingkungan Karang Tapen, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.	Kota Mataram Mataram City
Surabaya 2	Kantor Cabang Branch Office	Satelite Town Square Blok B-07, RT 03 RW 05, Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya Surabaya City
Surabaya 5	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Rungkut Industri Kidul Nomor 17, RT 001 RW 006, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.	Kota Surabaya Surabaya City
Ponorogo	Kantor Cabang Branch Office	Jalan MT. Haryono Grand Shappire Blok A 1, RT 06 RW 01, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.	Kabupaten Ponorogo Ponorogo Regency
Surabaya 3 Wiyung	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Menganti I 620-A RT 002 RW 003, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.	Kota Surabaya Surabaya City
Sidoarjo 2 Krian	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Raya Taman, RT 11 RW 02, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo Regency

Alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Selain Kantor Cabang

Head Office, Branch Office and Non-Branch Office Addresses

Nama Kantor Office Name	Status Kantor Description	Alamat Kantor Office Address	Kota/Kabupaten Cities/Regencies
Sidoarjo 3 Waru	Kantor Cabang Branch Office	Komplek Ruko Gateway Blok F17-18, Jalan Raya Sawotratap, Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo Regency
Malang 2 Kepanjen	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Panglima Sudirman, RT 005 RW 002, Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.	Kabupaten Malang Malang Regency
Lamongan	KSKC Non-Branch Office	Ruko Permata Nomor 24, Sidokumpul, Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.	Kabupaten Lamongan Lamongan Regency
Rogojampi	KSKC Non-Branch Office	Jalan Raya Rogojampi - Srono Dusun Banje, RT 03 RW 01 Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.	Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi Regency
Mojosari	KSKC Non-Branch Office	Jalan Gajah Mada Nomor 101, RT 012 RW 004, Desa Menanggal, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.	Kabupaten Mojokerto Mojokerto Regency
Kertosono	KSKC Non-Branch Office	Jalan Gatot Subroto Nomor 125, Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.	Kabupaten Nganjuk Nganjuk Regency
Srengat	KSKC Non-Branch Office	Jalan Raya Dandong Nomor 42, RT 002 RW 003, Kelurahan Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.	Kabupaten Blitar Blitar Regency
Singosari	KSKC Non-Branch Office	Jalan Raya P. Sudirman Nomor 145, RT 02 RW 09, Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.	Kabupaten Malang Malang Regency
Tambaksari	KSKC Non-Branch Office	Jalan Karang Empat Besar Nomor 20, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.	Kota Surabaya Surabaya City
Caruban	KSKC Non-Branch Office	Jalan Panglima Sudirman Nomor 01 RT 01 RW 01, Desa Purwosari, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.	Kabupaten Madiun Madiun Regency

*) Kantor Cabang (KC) yang juga memiliki izin sebagai Kantor Cabang Unit Usaha Syariah (KC UUS) dan dapat melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
*) Branch Office (KC) that also holds permit as a Sharia Business Unit Branch Office (KC UUS) and can carry out financing activities based on sharia principles.

BU VII - [SUMBAGUT]

Nama Kantor Office Name	Status Kantor Description	Alamat Kantor Office Address	Kota/Kabupaten Cities/Regencies
Batam	Kantor Cabang Branch Office	Komp. Bintang Mas Nomor 2, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.	Kota Batam Batam City
Binjai	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Sultan Hasanuddin No. 16 A LK.I, Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.	Kota Binjai Binjai City
Stabat	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Proklamasi Lingkungan IV, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.	Kabupaten Langkat Langkat Regency
Lubuk Pakam	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Ahmad Yani No. 88 NN dan 88 OO, Kelurahan Paluh Kemiri, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.	Kabupaten Deli Serdang Deli Serdang Regency
Tebing Tinggi	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Jendral Sudirman No. A5 (Komplek Grand Sudirman), Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara.	Kota Tebing Tinggi Tebing Tinggi City
Medan 2	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Ringroad, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.	Kota Medan Medan City
Medan*)	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Thamrin No. 2 AB Lingkungan II, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.	Kota Medan Medan City

Alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Selain Kantor Cabang

Head Office, Branch Officesnd Non-Branch Office Addresses

Nama Kantor Office Name	Status Kantor Description	Alamat Kantor Office Address	Kota/Kabupaten Cities/Regencies
Karo	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Veteran, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Samutera Utara.	Kabupaten Karo Karo Regency
Padang	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Dr. Sutomo No. 48A dan 48B, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.	Kota Padang Padang City
Pekanbaru*)	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Arifin Ahmad RT. 001 RW. 004 No. 16-17 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.	Kota Pekanbaru Pekanbaru City
Pekanbaru 2	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Bukit Barisan RT. 01 RW. 07, Kelurahan Pematangkapau, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.	Kota Pekanbaru Pekanbaru City
Dumai	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau.	Kota Dumai Dumai City
Bagan Batu	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Lintas Riau RT 002 RW 001, Dusun Bangun Rejo, Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.	Kabupaten Rokan Hilir Rokan Hilir Regency
Duri	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Hangtuah, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.	Kabupaten Bengkalis Bengkalis Regency
Kerinci	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Lintas Timur RT. 001 RW. 010, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.	Kabupaten Pelalawan Pelalawan Regency
Air Molek	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Jend. Sudirman RT. 001 RW. 001 Lingkungan II, Kelurahan Kembang Harum, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.	Kabupaten Indragiri Hulu Indragiri Hulu Regency
Rantau Prapat	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Sisimangaraja No. 142 A-B, Lingkungan Aek Tapa A, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.	Kabupaten Labuhan Batu Labuhan Batu Regency
Toba	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Patuan Nagari Nomor 101, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.	Kabupaten Toba Toba Regency
Tanjung Pinang	KSKC Non-Branch Office	Jalan D.I Panjaitan, Kilometer 9, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.	Kota Tanjung Pinang Tanjung Pinang City
Batu Aji	KSKC Non-Branch Office	Komplek Ruko Taman Pesona Indah Blok B No. 08, Kelurahan Tanjung Ucang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.	Kota Batam Batam City
Pangkalan Brandan	KSKC Non-Branch Office	Jalan Besitang, Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.	Kabupaten Langkat Langkat Regency
Panam	KSKC Non-Branch Office	Jalan Suka Karya, Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.	Kota Pekanbaru Pekanbaru City

*) Kantor Cabang (KC) yang juga memiliki izin sebagai Kantor Cabang Unit Usaha Syariah (KC UUS) dan dapat melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
*) Branch Office (KC) that also holds permit as a Sharia Business Unit Branch Office (KC UUS) and can carry out financing activities based on sharia principles.

BU VIII - [SUMBAGSEL]

Nama Kantor Office Name	Status Kantor Description	Alamat Kantor Office Address	Kota/Kabupaten Cities/Regencies
Bengkulu	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Hibrida Raya Kav.17-18 No. 43, RT. 07 RW. 02, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.	Kota Bengkulu Bengkulu City
Betung	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Merdeka RT. 011 RW. 004 Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.	Kabupaten Banyuasin Banyuasin Regency

Alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Selain Kantor Cabang

Head Office, Branch Office and Non-Branch Office Addresses

Nama Kantor Office Name	Status Kantor Description	Alamat Kantor Office Address	Kota/Kabupaten Cities/Regencies
Lubuk Linggau	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Yos Sudarso No. 100 RT 6 Kelurahan Batu Urip Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan.	Kota Lubuk Linggau Lubuk Linggau City
Lampung	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Husni Thamrin No. 84, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.	Kota Bandar Lampung Bandar Lampung City
Metro	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Jendral A. Yani No. 84, RT. 005 RW. 003, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung.	Kota Metro Metro City
Prabumulih	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Padat Karya RT. 05 RW. 01 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan.	Kota Prabumulih Prabumulih City
Lahat	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Lintas Sumatera, Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.	Kabupaten Lahat Lahat Regency
Baturaja	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Dr. Moh. Hatta Lintas Sumatera, Kelurahan Air Paoh Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Ogan Komering Ulu Regency
Kayu Agung	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Pahlawan LK. VIII RT.08 No. 131, Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.	Kabupaten Ogan Komering Ilir Ogan Komering Ilir Regency
Tugu Mulyo	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Lintas Timur 135, Dusun II RT. 01, Desa Tugu Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.	Kabupaten Ogan Komering Ilir Ogan Komering Ilir Regency
Jambi	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Jenderal Sudirman No. 11-13, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi.	Kota Jambi Jambi City
Tembesi	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Jambi-Muara Tembesi RT. 12 RW. 02, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.	Kabupaten Batang Hari Batang Hari Regency
Palembang*)	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Jenderal Sudirman, RT 029 RW 008, Kelurahan Dua Puluh Ilir Satu, Kecamatan Ilir Timur Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.	Kota Palembang Palembang City
Pangkal Pinang	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Soekarno Hatta, RT 007 RW 003, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimiya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Kota Pangkalpinang Pangkalpinang City
Musi Banyuasin	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Palembang-Jambi, RT 002 RW 002, Kelurahan Sungai Lilin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.	Kabupaten Musi Banyuasin Musi Banyuasin Regency
Tebo	Kantor Cabang Branch Office	Jalan 24 Poros, Desa Perintis Jaya, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.	Kabupaten Tebo Tebo Regency
Muara Enim	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Cut Nyak Dien, RT 01 RW 02, Kelurahan Tungkal, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.	Kabupaten Muara Enim Muara Enim Regency
Palembang 2 Bukit Lama	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Srijaya Negara Nomor 85 RT 72 RW 11, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.	Kota Palembang Palembang City
Jatiagung	KSKC Non-Branch Office	Dusun IV B, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung	Kabupaten Lampung Selatan South Lampung Regency

Alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Selain Kantor Cabang

Head Office, Branch Officesnd Non-Branch Office Addresses

Nama Kantor Office Name	Status Kantor Description	Alamat Kantor Office Address	Kota/Kabupaten Cities/Regencies
Kuala Tungkal	KSKC Non-Branch Office	Jalan Sultan Hasanudin RT. 005 Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat West Tanjung Jabung Regency
Tanjung Jabung Barat	KSKC Non-Branch Office	Jalan Lintas Timur RT. 01 Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat West Tanjung Jabung Regency
Lampung Tengah	KSKC Non-Branch Office	Jalan Negara LK.IV.A Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.	Kabupaten Lampung Tengah Central Lampung Regency
Jakabaring	KSKC Non-Branch Office	Jalan Sumatera Raya Blok BB 18, RT 052 RW 015, Kelurahan Lima Belas Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.	Kota Palembang Palembang City

*) Kantor Cabang (KC) yang juga memiliki izin sebagai Kantor Cabang Unit Usaha Syariah (KC UUS) dan dapat melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
*) Branch Office (KC) that also holds permit as a Sharia Business Unit Branch Office (KC UUS) and can carry out financing activities based on sharia principles.

BU IX - [SULAWESI]

Nama Kantor Office Name	Status Kantor Description	Alamat Kantor Office Address	Kota/Kabupaten Cities/Regencies
Palopo	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Jendral Sudirman No. 184 D, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.	Kota Palopo Palopo City
Gorontalo	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Prof. DR. HB. Jassin Eks Agus Salim, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.	Kota Gorontalo Gorontalo City
Makassar*)	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Pengayoman, Ko Edelweis V A5/7, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.	Kota Makassar Makassar City
Pangkep	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Andi Mappe - Bonto Gelang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan.	Kabupaten Pangkajene Kepulauan Pangkajene Kepulauan Regency
Bulukumba	Kantor Cabang Branch Office	Ruko Jalan Matahari No. 6, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.	Kabupaten Bulukumba Bulukumba Regency
Palu	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Emmy Saelan No. 53F, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.	Kota Palu Palu City
Pare-Pare	Kantor Cabang Branch Office	Jalan A. Makkasau RT. 002 RW. 001, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.	Kota Parepare Parepare City
Gowa	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Tumanurung Raya, Komp Yasmin Square RT 003 RW 004 Nomor 07, Lingkungan Pandang-Pandang, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.	Kabupaten Gowa Gowa Regency
Maros	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Jend Sudirman (Poros Makassar maros) No. 63 Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.	Kabupaten Maros Maros Regency
Kendari	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Malaka RT 020 RW 007, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.	Kota Kendari Kendari City
Manado	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Paaldua, Lingkungan X, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.	Kota Manado Mando City

Alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Selain Kantor Cabang

Head Office, Branch Office and Non-Branch Office Addresses

Nama Kantor Office Name	Status Kantor Description	Alamat Kantor Office Address	Kota/Kabupaten Cities/Regencies
Pinrang	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.	Kabupaten Pinrang Pinrang Regency
Makassar 2 Biringkanaya	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Perintis Kemerdekaan KM 15, Komplek Kima Square Blok A Nomor 15, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.	Kota Makassar Makassar City
Airmadidi	KSKC Non-Branch Office	Jalan Arnold Mononutu, RT 001 RW 018, Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.	Kabupaten Minahasa Utara North Minahasa Regency
Isimu	KSKC Non-Branch Office	Jalan Trans Sulawesi, Dusun I Sentral, Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.	Kabupaten Gorontalo Gorontalo Regency

*) Kantor Cabang (KC) yang juga memiliki izin sebagai Kantor Cabang Unit Usaha Syariah (KC UUS) dan dapat melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
*) Branch Office (KC) that also holds permit as a Sharia Business Unit Branch Office (KC UUS) and can carry out financing activities based on sharia principles.

BU XIII - [BANTEN]

Nama Kantor Office Name	Status Kantor Description	Alamat Kantor Office Address	Kota/Kabupaten Cities/Regencies
Ciputat*)	Kantor Cabang Branch Office	Gedung Wahana Artha Lt 3, Jalan Ir. Hj. Juanda No. 43 RT.01 RW. 03 Desa Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.	Kota Tangerang Selatan South Tangerang City
Tangerang Selatan 2 Pamulang	Kantor Cabang Branch Office	Ruko South City Square 1 Blok A1 No.12, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.	Kota Tangerang Selatan South Tangerang City
Cikupa*)	Kantor Cabang Branch Office	Jalan South Avenue, Ruko Grand Arcade Blok VC02 No. 98 & 100, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.	Kabupaten Tangerang Tangerang Regency
Tangerang 4 Tigaraksa	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Kimas Laeng, Kelurahan Matagara, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.	Kabupaten Tangerang Tangerang Regency
Ciledug*)	Kantor Cabang Branch Office	CBD Boulevard Ciledug, Jalan HOS Cokroaminoto Blok A2 No. 33, 35 dan 10, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten.	Kota Tangerang Tangerang City
Mauk*)	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Raya Moch. Toha Blok B No.15 A-B Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten.	Kota Tangerang Tangerang City
Tangerang 3 Rajeg	Kantor Cabang Branch Office	Komplek Mekarsari Residence A/7, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.	Kabupaten Tangerang Tangerang Regency
Serang*)	Kantor Cabang Branch Office	Link. Ranca Tales RT. 007 RW. 004, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten.	Kota Serang Serang City
Balaraja*)	Kantor Cabang Branch Office	Kampung Saga, RT. 006 RW. 004, Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.	Kabupaten Tangerang Tangerang Regency
Tangerang 1 Gading Serpong*)	Kantor Cabang Branch Office	Ruko Paramount Dot Com Blok Orange No. 11, 12 dan 15 Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.	Kabupaten Tangerang Tangerang Regency
Tangerang 2 Cisauk	Kantor Cabang Branch Office	Ruko Serpong Garden Blok 7 No. 18, Kelurahan Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.	Kabupaten Tangerang Tangerang Regency
Tangerang 6 Teluknaga	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Raya Salembaran Ruko Nomor 8B, Kampung Melayu Timur RT 002 RW 002, Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.	Kabupaten Tangerang Tangerang Regency

Alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Selain Kantor Cabang

Head Office, Branch Officesnd Non-Branch Office Addresses

Nama Kantor Office Name	Status Kantor Description	Alamat Kantor Office Address	Kota/Kabupaten Cities/Regencies
Tangerang Selatan 3 Pondok Aren	Kantor Cabang Branch Office	Ruko Tegal Rotan Raya Kav. Nomor 9A, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.	Kota Tangerang Selatan South Tangerang City
Tangerang 5 Karawaci	Kantor Cabang Branch Office	Ruko Victoria Park Blok A1 Nomor 10 RT 002 RW 006, Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten.	Kota Tangerang Tangerang City
Tangerang 7 Cipondoh	Kantor Cabang Branch Office	Green Village Rukan Ginza Blok A Nomor 1 RT 003 RW 007, Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.	Kota Tangerang Tangerang City
Ciruas	KSKC Non-Branch Office	Jalan Raya Jakarta-Serang KM.9 Pertokoan RCM Kampung Kuaron RT 01 RW 01, Kelurahan Citerep, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.	Kabupaten Serang Serang Regency
Parung	KSKC Non-Branch Office	Jalan H.Mawi Kampung Waru Nomor 2, RT 03 RW 01, Kelurahan Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.	Kabupaten Bogor Bogor Regency

*) Kantor Cabang (KC) yang juga memiliki izin sebagai Kantor Cabang Unit Usaha Syariah (KC UUS) dan dapat melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
*) Branch Office (KC) that also holds permit as a Sharia Business Unit Branch Office (KC UUS) and can carry out financing activities based on sharia principles.

BU XIV – [JATENG UTARA]

Nama Kantor Office Name	Status Kantor Description	Alamat Kantor Office Address	Kota/Kabupaten Cities/Regencies
Kudus	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Lingkar Timur, Krasak, RT 002 RW 002 (Ruko PO. Haryanto), Desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Kudus Kudus Regency
Pekalongan	Kantor Cabang Branch Office	Komplek Ruko The Luxor, Jalan A Yani Nomor 1, Kelurahan Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Pekalongan Pekalongan Regency
Brebes	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Raya Klampok RT 004 RW 007, Desa Klampok, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Brebes Brebes Regency
Semarang*)	Kantor Cabang Branch Office	Ruko Metro Plaza Blok A1, Jl. MT Haryono 970 RT 01 RW 06, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.	Kota Semarang Semarang City
Semarang 2	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Moch. Yamin Nomor 41, RT 02 RW 01, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Semarang Semarang Regency
Kendal	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Raya Utama Timur Weleri Ruko Blok A/1, Kelurahan Weleri, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Kendal Kendal Regency
Tegal	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Raya Karanganyar RT 03 RW 01, Desa Bandasari, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Tegal Tegal Regency
Pemalang	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Veteran Nomor 104, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Pemalang Pemalang Regency
Purwodadi	Kantor Cabang Branch Office	Jalan R Suprapto RT 01 RW 09, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Grobogan Grobogan Regency
Salatiga*)	Kantor Cabang Branch Office	Ruko Salatiga Regency Blok F & G, Jalan Fatmawati Nomor 188, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah.	Kota Salatiga Salatiga City
Jepara	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Dr. Sutomo Nomor 10B RT 004 RW 001, Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Jepara Jepara Regency

Alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Selain Kantor Cabang

Head Office, Branch Office and Non-Branch Office Addresses

Nama Kantor Office Name	Status Kantor Description	Alamat Kantor Office Address	Kota/Kabupaten Cities/Regencies
Brebes 2	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Diponegoro Nomor 118 RT 05 RW 02, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Brebes Brebes Regency
Tegal 2 Slawi	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Gatot Subroto RT 01 RW 03, Desa Dukuhsalam, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Tegal Tegal Regency
Kajen	KSKC Non-Branch Office	Jalan Mandurorejo Dk. Tanjunganom, RT 001 RW 003, Desa Tanjung Kulon, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Pekalongan Pekalongan Regency
Randudongkal	KSKC Non-Branch Office	Jalan Jend. Sudirman Timur, Komplek Ruko Nomor 9 Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Pemalang Pemalang Regency
Ambarawa	KSKC Non-Branch Office	Jalan Slamet Riyadi Nomor 338 Kepatihan RT 01 RW 02, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.	Kabupaten Semarang Semarang Regency
Ngaliyan	KSKC Non-Branch Office	Jalan Beringin Raya Nomor 20 RT 004 RW 002, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.	Kota Semarang Semarang City

*) Kantor Cabang (KC) yang juga memiliki izin sebagai Kantor Cabang Unit Usaha Syariah (KC UUS) dan dapat melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
*) Branch Office (KC) that also holds permit as a Sharia Business Unit Branch Office (KC UUS) and can carry out financing activities based on sharia principles.

BU XV – [KALIMANTAN]

Nama Kantor Office Name	Status Kantor Description	Alamat Kantor Office Address	Kota/Kabupaten Cities/Regencies
Banjarbaru	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.	Kota Banjarbaru Banjarbaru City
Banjarmasin*)	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Gatot Subroto Nomor 17 J, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.	Kota Banjarmasin Banjarmasin City
Samarinda	Kantor Cabang Branch Office	Jalan KH. Siradj Salman RT 52, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.	Kota Samarinda Samarinda City
Balikpapan*)	Kantor Cabang Branch Office	Jalan MT. Haryono RT 11, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.	Kota Balikpapan Balikpapan City
Berau	Kantor Cabang Branch Office	Jalan H. Isa 2 RT 16, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.	Kabupaten Berau Berau Regency
Bontang	Kantor Cabang Branch Office	Jalan R. Soeprapto Nomor 18 RT 16, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur.	Kota Bontang Bontang City
Tenggarong	Kantor Cabang Branch Office	Jalan KH. Akhmad Muksin, Rukun Tetangga 01, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.	Kabupaten Kutai Kartanegara Kutai Kartanegara Regency
Paser	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Modang RT 001 RW 003, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.	Kabupaten Paser Paser Regency

Alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Selain Kantor Cabang

Head Office, Branch Officesnd Non-Branch Office Addresses

Nama Kantor Office Name	**Status Kantor** Description	**Alamat Kantor** Office Address	**Kota/Kabupaten** Cities/Regencies
Sampit	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Jenderal Sudirman KM 1,5 RT 47 RW 08, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.	Kabupaten Kotawaringin Timur East Kotawaringin Regency
Pangkalan Bun	Kantor Cabang Branch Office	Jalan Pangeran Diponegoro RT 002, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.	Kabupaten Kotawaringin Barat West Kotawaringin Regency

*) Kantor Cabang (KC) yang juga memiliki izin sebagai Kantor Cabang Unit Usaha Syariah (KC UUS) dan dapat melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
*) Branch Office (KC) that also holds permit as a Sharia Business Unit Branch Office (KC UUS) and can carry out financing activities based on sharia principles.

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS



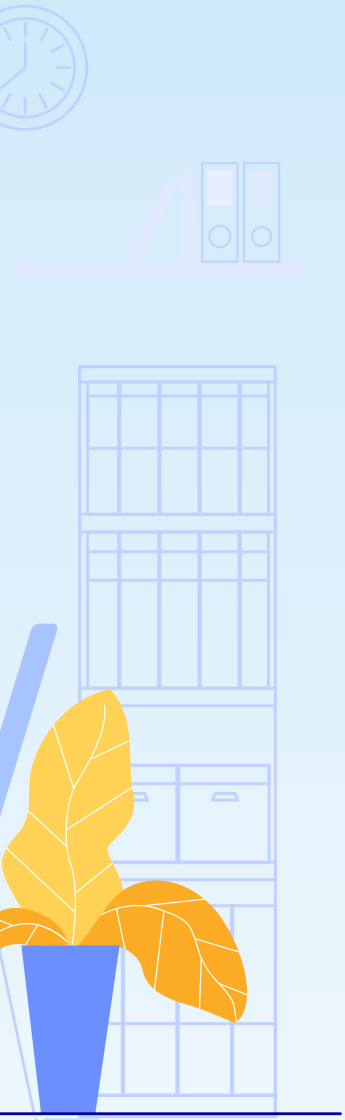

Pengembangan inovasi bisnis dengan dukungan teknologi digital yang dilakukan Perseroan berdampak pada meningkatnya pendapatan usaha dan pangsa pasar di industri pembiayaan

The development of business innovation with the support of digital technology carried out by the Company has an impact on increasing business income and market share in the financing industry

Tinjauan Perekonomian
Economic Overview

Dari sisi lapangan usaha, sektor transportasi dan pergudangan mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 13,96% dan diikuti jasa lainnya sebesar 10,52%. Pertumbuhan itu disebabkan meningkatnya mobilitas masyarakat dan tetap tingginya transaksi perdagangan digital.

In terms of business field, the transportation and warehousing sector recorded the highest growth of 13.96% and followed by other services of 10.52%. This growth is due to increased public mobility and high digital trade transactions.



Perekonomian Global

Peningkatan inflasi, tingginya suku bunga acuan dan penyaluran kredit yang terbatas merupakan fenomena ekonomi dunia sepanjang tahun 2023. Inflasi yang tinggi disebabkan naiknya harga komoditas dan energi karena eskalasi ketegangan geopolitik seperti perang Rusia dan Ukraina serta di kawasan Timur Tengah.

Untuk mengendalikan laju inflasi, bank sentral di banyak negara mempertahankan suku bunga acuan tinggi seperti yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve. Tingginya suku bunga acuan diikuti dengan kenaikan *yield* obligasi AS untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan utang pemerintah dan kenaikan premi jangka panjang.

Dampak lanjutannya adalah terjadi pembalikan arus modal dari negara-negara berkembang menuju negara maju dan aset yang lebih likuid. Akibatnya, dolar AS menguat terhadap mata uang banyak negara, termasuk rupiah. Hal ini semakin meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global.

Global Economy

Rising inflation, high benchmark interest rates and limited lending are global economic phenomena throughout 2023. High inflation is attributable to rising commodity and energy prices due to the escalation of geopolitical tensions such as the Russia and Ukraine war as well as in the Middle East region.

To control the inflation rate, central banks in many countries maintain high benchmark interest rates as done by the Central Bank of the United States (US), The Federal Reserve. The high benchmark interest rate was followed by an increase in US bond yields to meet government debt financing needs and an increase in long-term premiums.

A further impact is a reversal of capital flows from developing countries towards developed countries and more liquid assets. As a result, the US dollar strengthened against the currencies of many countries, including the rupiah. This has further increased uncertainty in global financial markets.

Kenaikan suku bunga telah melemahkan daya beli konsumen di AS, Eropa dan Asia. Akibatnya, arus perdagangan barang dunia mengalami perlambatan dan meningkatkan fragmentasi ekonomi global. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah menurunkan separuh perkiraan pertumbuhan perdagangan global pada tahun 2023 menjadi 0,8% dari sebelumnya sebesar 1,7%.

Rising interest rates have weakened the purchasing power of consumers in the U.S., Europe and Asia. As a result, world trade flows of goods have slowed down and increased the fragmentation of the global economy. The World Trade Organization (WTO) has halved its forecast for global trade growth in 2023 to 0.8% from 1.7%.

Perlambatan perdagangan terjadi pada berbagai jenis barang, khususnya besi dan baja, peralatan kantor dan telekomunikasi, tekstil dan pakaian. Namun demikian, untuk permintaan mobil tetap tinggi sebagai kompensasi atas pembatasan pengiriman selama masa pandemi. Penurunan juga terjadi pada perdagangan jasa komersial.

The trade slowdown occurred in various types of goods, especially iron and steel, office equipment and telecommunications, textiles and clothing. Nevertheless, demand for cars remains high as compensation for shipping restrictions during the pandemic. The decline also occurred in commercial trade in services.

Peningkatan risiko ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan yang disebabkan beragam faktor tersebut menjadikan ekonomi global melambat. World Bank dalam laporan berjudul *Global Economic Prospects* yang dirilis Juni 2023, memperkirakan ekonomi dunia hanya akan tumbuh 2,1%, lebih rendah dari pencapaian tahun sebelumnya sebesar 3,1%.

The increased risk of economic and financial market uncertainty caused by various factors has caused the global economy to weaken. The World Bank in its report Global Economic Prospects released in June 2023, estimates that the world economy will only grow 2.1%, lower than the previous year's achievement of 3.1%.

Perekonomian Indonesia

Dalam perekonomian yang semakin terkoneksi, situasi global berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Mengacu laporan Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05% secara tahunan di tahun 2023, dengan nominal berdasarkan harga yang berlaku sebesar Rp20.892,4 triliun.

Indonesian Economy

In an increasingly connected economy, the global situation has an impact on the Indonesian economy. Referring to the Central Statistics Agency (BPS) report, Indonesia's economy grew by 5.05% on an annual basis in 2023 with a nominal value based on current prices of Rp20,892.4 trillion.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berasal dari konsumsi swasta yang diikuti konsumsi dan investasi. Sementara secara distribusi, konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi yang tumbuh sejalan dengan penyelesaian Program Strategis Nasional.

In terms of expenditure, the highest growth derived from private consumption, followed by consumption and investment. Meanwhile, in terms of distribution, household consumption remains the largest contributor to national economic growth. Investment that grows in line with the completion of the National Strategic Program.

Namun untuk sektor perdagangan terdampak dari pelemahan global. Ekspor tumbuh tipis sebesar 1,32% dan impor terkontraksi sebesar 1,65% secara tahunan di tahun 2023. Terbatasnya permintaan barang dari negara

However, the trade sector was affected by global downturn. Exports grew modestly by 1.32% and imports contracted by 1.65% year-on-year in 2023. Export

Tinjauan Perekonomian
Economic Overview

mitra dagang utama menyebabkan pertumbuhan ekspor yang tidak setinggi tahun sebelumnya.

Dari sisi lapangan usaha, sektor transportasi dan pergudangan mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 13,96% dan diikuti jasa lainnya sebesar 10,52%. Pertumbuhan itu disebabkan meningkatnya mobilitas dan banyaknya penyelenggaraan event internasional dan persiapan pemilu 2024.

Secara spasial, struktur perekonomian Indonesia masih tetap didominasi oleh Pulau Jawa dan diikuti Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara dan Maluku serta Papua. Konsentrasi pusat bisnis dan industri yang sebagian besar berada di Pulau Jawa menjadi penyebab utama belum tergesernya Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara laju inflasi pada tahun 2023 tercatat sebesar 2,61% secara tahunan. Inflasi ini terjadi karena kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran dengan peningkatan terbesar pada kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau. Pemerintah menargetkan inflasi di kisaran 2%-4% pada tahun 2023.

Untuk memitigasi dampak ketidakpastian global terhadap inflasi inti, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis point menjadi 6% pada Oktober 2023 dan tetap bertahan hingga akhir tahun 2023. Kenaikan BI *Rate* ini juga bertujuan sebagai stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah menguatnya dolar AS terhadap mata uang dunia.

Kenaikan BI *Rate* juga bertujuan untuk mencegah keluarnya arus modal dari pasar domestik. Kenaikan suku bunga acuan ini akan berdampak pada naiknya suku bunga kredit dan deposito perbankan. Upaya stabilisasi nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi juga dilakukan dengan pendalaman pasar keuangan melalui penerbitan instrumen moneter Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

growth was lower than the previous year due to limited demand for goods from major trading partner countries.

In terms of business field, the transportation and warehousing sector recorded the highest growth of 13.96% and followed by other services of 10.52%. The growth was due to increased mobility and the large number of international events held, as well as preparations for the 2024 elections.

Spatially, Indonesia's economic structure remains dominated by Java Island, followed by Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali and Nusa Tenggara and Maluku along Papua. The concentration of business and industrial centers, most of which are on the island of Java, is the main cause of the unshifted Java as the center of national economic growth.

Meanwhile, the inflation rate in 2023 stood at 2.61% year-on-year. This inflation occurred due to price increases indicated by increases in all expenditure group indexes with the largest increase in foodstuffs, beverages, and tobacco groups. The government targets inflation in the range of 2%-4% in 2023.

To mitigate the impact of global uncertainty on core inflation, Bank Indonesia raised its benchmark interest rate by 50 basis points to 6% in October 2023 and will remain until the end of 2023. The BI Rate hike also aims to stabilize the rupiah exchange rate amid the strengthening of the US dollar against world currencies.

The BI Rate hike also aims to prevent capital outflows from the domestic market. The increase in the benchmark interest rate will have an impact on rising interest rates on bank loans and deposits. Efforts to stabilize the rupiah exchange rate and control inflation are also carried out through financial market deepening through the issuance of monetary instruments of Bank Indonesia Rupiah Certificates (SRBI).

Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah juga dilakukan pemerintah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) untuk mendorong hasil ekspor dari kegiatan ekstraktif ditempatkan di perbankan dalam negeri.

In addition, the government also strengthened the rupiah exchange rate through the issuance of Government Regulation No. 36 of 2023 on Foreign Exchange from Natural Resources Exports (DHE SDA) to promote export proceeds from extractive activities to be placed in domestic banks.

Proyeksi Perekonomian Tahun 2024

Perekonomian global masih menghadapi sejumlah tantangan pada tahun 2024. Krisis *real estate* di Tiongkok merupakan salah satu faktor yang dapat memicu perlambatan ekonomi global. Eskalasi ketegangan geopolitik dan perubahan iklim yang berlanjut berpotensi untuk meningkatkan harga energi dan komoditas.

Economic Projections for 2024

In 2024, the global economy continues to confront a multitude of challenges. The real estate crisis in China is one of the factors that could trigger a global economic slowdown. The continued escalation of geopolitical tensions and climate change has the potential to increase energy and commodity prices.

Peningkatan harga komoditas menjadikan inflasi tetap tinggi dan semakin membebani negara-negara yang memiliki banyak utang. Hal ini akan memperluas fragmentasi geoekonomi antar wilayah dan mempersulit akselerasi pertumbuhan ekonomi dunia.

Rising commodity prices keep inflation high and further burden heavily indebted countries. This will widen geoeconomics fragmentation between regions and complicate accelerating global economic growth.

Seiring dengan masih tetap tingginya inflasi, suku bunga acuan diprediksi juga akan tetap tinggi yang berakibat pada pengetatan kredit. Dampaknya, investasi dan perdagangan global akan mengalami perlambatan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi global di *level* 2,4%.

Align with high inflation, the benchmark interest rate is also predicted to remain high, resulting in tighter credit. As a result, global investment and trade will weaken. Based on these factors, the World Bank predicts global economic growth at the level of 2.4%.

Meningkatnya risiko ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global di tahun 2024 akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Sektor ekspor barang diperkirakan akan mengalami tekanan sejalan dengan moderasi harga-harga komoditas andalan seperti batu bara dan CPO serta pelemahan permintaan dari negara tujuan utama ekspor.

The increasing risk of global economic and financial market uncertainty in 2024 will have an impact on the Indonesian economy. The goods export sector is expected to experience pressure in line with moderation in prices of mainstay commodities such as coal and CPO as well as weakening demand from major export destination countries.

Konsumsi dan investasi akan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam APBN 2024, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dan inflasi sebesar 2,8% di tahun 2024. Adapun nilai tukar rupiah dalam asumsi makro ditetapkan sebesar Rp15.000 per Dolar AS.

Consumption and investment will remain the main pillars of national economic growth. In the 2024 State Budget, the government targets economic growth of 5.2% and inflation of 2.8% in 2024. The rupiah exchange rate in macro assumptions is set at Rp15,000 per US dollar.

Tinjauan Perekonomian

Economic Overview

Kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diperkirakan turut memperkuat perekonomian nasional pada tahun 2024. Meski perekonomian Indonesia akan tumbuh positif, namun perlu diwaspadai risiko inflasi pangan akibat perubahan iklim El Nino. Hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan melemahkan daya beli masyarakat.

The increase in salaries of the State Civil Apparatus (ASN), the holding of general elections and the development of the Capital City of the Archipelago (IKN) are expected to help strengthen the national economy in 2024. Although Indonesia's economy will grow positively, it is necessary to be aware of the risk of food inflation due to El Nino climate change. This has the potential to widen economic inequality and weaken people's purchasing power.

Tinjauan Industri Pembiayaan

Financing Industry Overview

Pengelolaan risiko yang semakin baik oleh industri dan ditunjang dengan kompetensi sumber daya manusia serta dukungan regulator menjadi kunci utama pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Improved risk management by the industry and supported by human resource competence and regulatory support is the main key to sustainable business growth.



Perekonomian yang tumbuh positif dan terjaganya daya beli masyarakat turut mendukung perkembangan industri pembiayaan sepanjang tahun 2023. Permintaan terhadap pembiayaan meningkat yang disertai dengan kemampuan yang semakin baik oleh perusahaan pembiayaan dalam mencapai tingkat keuntungan.

Peningkatan kinerja industri disertai dengan meningkatnya risiko pembiayaan meski masih dalam batas yang aman. Pengelolaan risiko yang semakin baik oleh industri dan ditunjang dengan kompetensi sumber daya manusia serta dukungan regulator menjadi kunci utama pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Mengacu data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, outstanding piutang pembiayaan neto (konvensional dan syariah) sebesar Rp470,86 triliun, meningkat sebesar 13,23% secara tahunan dari tahun 2022 sebesar Rp415,86 triliun. Pangsa piutang pembiayaan konvensional sebesar 94,71%, tetap lebih dominan dibandingkan dengan pembiayaan berbasis syariah sebesar 5,29%.

A positive economic growth and maintained public purchasing power will also support the development of the financing industry throughout 2023. The demand for financing is increasing accompanied by the better ability of financing companies to achieve profit levels.

The improvement in industrial performance is accompanied by increased financing risks although still within safe limits. Better risk management by the industry and supported by human resource competence and regulatory support is the main key to sustainable business growth.

Referring to data from the Financial Services Authority (OJK) as of October 2023, net outstanding financing receivables (conventional and sharia) was Rp470.86 trillion, an increase of 13.23% annually from Rp415.86 trillion in 2022. The share of conventional financing receivables was 94.71%, remained dominant more than sharia-based financing of 5.29%.

Tinjauan Industri Pembiayaan
Financing Industry Overview

Pada piutang pembiayaan konvensional, pangsa piutang pembiayaan multiguna adalah yang terbesar dan diikuti dengan pembiayaan investasi, modal kerja, dan pembiayaan lainnya. Pembiayaan multiguna tercatat sebesar Rp245,22 triliun atau 54,99% dari total outstanding pembiayaan konvensional. Piutang pembiayaan investasi sebesar Rp154,35 triliiun, pembiayaan modal kerja Rp45,56 triliun, dan pembiayaan lainnya sebesar Rp823 miliar.

In conventional financing receivables, the share of multipurpose financing receivables is the largest and is followed by investment financing, working capital, and other financing. Multipurpose financing was recorded at Rp245.22 trillion, or 54.99% of the total outstanding conventional financing. Investment financing receivables was Rp154,35 trillion, working capital financing Rp45.56 trillion, and other financing amounted to Rp823 billion.

Sementara piutang pembiayaan syariah tercatat sebesar Rp24,91 triliun di tahun 2023, tumbuh sebesar 32,88% secara tahunan dari tahun 2022 sebesar Rp18,74 triliun. Piutang pembiayaan jual beli syariah mendominasi dengan nominal sebesar Rp19,11 triliun, atau pangsa sebesar 76,72% dari total piutang pembiayaan syariah. Piutang pembiayaan jasa syariah sebesar Rp3,94 triliun dan pembiayaan investasi syariah sebesar Rp1,86 triliun.

Meanwhile, sharia financing receivables stood at Rp24,91 trillion as of October 2023, grew by 32.88% annually from Rp18.74 trillion in 2022. Sharia sale and purchase financing receivables dominate with a nominal value of Rp19.11 trillion, or a share of 76.72% of the total sharia financing receivables. Sharia services financing receivables amounted to Rp3.94 trillion and sharia investment financing was Rp1.86 trillion.

Selain piutang pembiayaan yang meningkat, industri juga mencatatkan kenaikan aktivitas penyertaan modal dari Rp1,60 triliun di tahun 2022 menjadi Rp2,15 triliun di tahun 2023. Sementara investasi dalam Efek mengalami penurunan tajam menjadi Rp659 miliar di tahun 2023 dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,23 triliun.

In addition to the increased financing receivables, the industry also recorded an increase in capital participation activities from Rp1.60 trillion in 2022 to Rp2.15 trillion in 2023. Meanwhile, investment in securities has decreased sharply to Rp659 billion in 2023 from the previous year of Rp1.23 trillion.

Berdasarkan objek pembiayaan, piutang pembiayaan mobil baru merupakan kontributor terbesar dari barang konsumsi dengan nominal sebesar Rp146,77 triliun, naik 15,33% dibanding tahun sebelumnya Rp127,26 triliun. Piutang pembiayaan sepeda motor baru juga naik sebesar 13,33% menjadi Rp78,47 triliun.

By the financing object, new car financing receivables are the largest contributor to consumer goods with a nominal value of Rp146.77 trillion, up 15.33% compared to the previous year of Rp127.26 trillion. New motorcycle financing receivables also increased by 13.33% to Rp78.47 trillion.

Piutang pembiayaan mobil bekas sebesar Rp78,13 triliun, naik sebesar 29,66%. Namun untuk sepeda motor bekas mengalami penurunan sebesar 5,46% secara tahunan menjadi Rp21,23 triliun di tahun 2023, dari tahun 2022 sebesar Rp22,46 triliun.

Used car financing receivables amounted to Rp78,13 trillion, an increase of 29.66%. However, used motorcycles decreased by 5.46% annually to Rp21.03 trillion in 2023 from Rp22.46 trillion in 2022.

Peningkatan mobilitas dan berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang infrastruktur turut berkontribusi dalam peningkatan piutang pembiayaan mobil pengangkutan dan alat-alat berat.

Increased mobility and the continued completion of National Strategic Projects (PSN) in the infrastructure sector also contributed to the increase in financing receivables from cars, transportation and heavy

Tercatat, pembiayaan untuk mobil pengangkutan sebesar Rp59,09 triliun, meningkat sebesar 12,00% dari tahun sebelumnya Rp52,76 triliun. Piutang pembiayaan untuk alat berat naik sebesar 14,57% dari Rp36,80 triliun di tahun 2022 menjadi Rp42,16 triliun di tahun 2023.

Sementara berdasarkan sektor ekonomi, piutang pembiayaan sebagian besar ditujukan pada bidang usaha perdagangan besar, eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dengan nilai sebesar Rp114,56 triliun, meningkat sebesar 11,28%. Kemudian diikuti industri pengolahan sebesar Rp45,57 triliun, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya sebesar Rp44,43 triliun; pertambangan dan penggalian sebesar Rp42,48 triliun; dan pengangkutan dan pergudangan sebesar Rp32,31 triliun.

Dari sisi spasial, piutang pembiayaan terbesar masih dari Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta berkontribusi paling tinggi dengan nominal piutang pembiayaan sebesar Rp90,99 triliun dan diikuti Jawa Barat sebesar Rp74,68 triliun, Jawa Timur Rp42,76 triliun, Jawa Tengah Rp30,31 triliun, Banten Rp31,16 triliun dan DI Yogyakarta Rp3,96 triliun.

Di Pulau Sumatera, piutang pembiayaan terbesar disumbangkan dari Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp22,29 triliun, dan dikuti Riau sebesar Rp21,82 triliun serta Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp17,02 triliun.

Di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur masih menjadi daerah dengan piutang pembiayaan terbesar senilai Rp25,03 triliun, diikuti Kalimantan Selatan sebesar Rp11,82 triliun dan Kalimantan Barat sebesar Rp9,49 triliun.

Di Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Selatan mencatatkan piutang pembiayaan terbesar mencapai Rp17,72 triliun, diikuti Sulawesi Utara sebesar Rp7,28 triliun dan Sulawesi Tenggara sebesar Rp6,46 triliun.

equipment. Financing for transportation cars stood at Rp59.09 trillion, an increase of 12.00% from the previous year of Rp52.76 trillion. Financing receivables for heavy equipment increased by 14.57% from Rp36.80 trillion in 2022 to Rp42.16 trillion in 2023.

Meanwhile, by the economic sector, financing receivables were mostly aimed at the large trade, retail, repair and maintenance business sectors of cars and motorcycles with a value of Rp114.56 trillion, an increase of 11.28%. Then followed by the processing industry of Rp45.57 trillion, leasing and leasing activities without option rights, employment, travel agents, and other business supports of Rp44.43 trillion; mining and quarrying amounting to Rp42.48 trillion; and transportation and warehousing amounting to Rp32.31 trillion.

From a spatial perspective, the largest financing receivables are still from Java. DKI Jakarta Province contributed the highest with nominal financing receivables of Rp90.99 trillion and followed by West Java of Rp74.68 trillion, East Java of Rp42.76 trillion, Central Java of Rp30.31 trillion, Banten of Rp31.16 trillion and DI Yogyakarta of Rp3.96 trillion.

On Sumatra Island, the largest financing receivables were contributed from North Sumatra Province of Rp22.29 trillion, followed by Riau of Rp21.82 trillion and South Sumatra Province of Rp17.02 trillion.

On Kalimantan Island, East Kalimantan Province remains the region with the largest financing receivables of Rp25.03 trillion, followed by South Kalimantan at Rp11.82 trillion, and West Kalimantan at Rp9.49 trillion.

On Sulawesi Island, South Sulawesi Province recorded the largest financing receivables reaching Rp17.72 trillion, followed by North Sulawesi at Rp7.28 trillion, and Southeast Sulawesi at Rp6.46 trillion.

Tinjauan Industri Pembiayaan
Financing Industry Overview

Sementara piutang pembiayaan di Provinsi Bali mencapai Rp10,74 triliun, Provinsi Papua sebesar Rp1,86 triliun dan Papua Barat sebesar Rp1,22 triliun, serta Provinsi Maluku sebesar Rp1,25 triliun dan Maluku Utara sebesar Rp1,96 triliun.

Meanwhile, financing receivables in Bali Province reached Rp10.74 trillion, Papua Province amounted to Rp1.86 trillion and West Papua amounted to Rp1.22 trillion, as well as Maluku Province at Rp1.25 trillion and North Maluku amounted to Rp1.96 trillion.

Peningkatan piutang pembiayaan di industri juga dikuti dengan kemampuan menghasilkan keuntungan (rentabilitas) yang terlihat dari stabilnya imbal hasil terhadap aset (Return on Asset/ROA) dan imbal hasil terhadap ekuitas (Return on Equity/ROE) yang masing-masing tercatat sebesar sebesar 5,58% dan 14,96% ditahun 2023.

The increase in financing receivables in the industry is also followed by the ability to generate profits (profitability) as seen from the increase in Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE), which were recorded at 5.58% and 14.96% respectively in 2023.

Tingkat produktivitas industri tetap terjaga yang tercermin dari rasio piutang pembiayaan terhadap aset dari 85,23% di tahun 2022 menjadi 85,16% di tahun 2023. Sementara gearing ratio tercatat sebesar 2,26 kali. Pembiayaan bermasalah (*non performing financing*/ NPF) mengalami sedikit peningkatan menjadi 2,44%, namun masih dalam kategori aman.

The level of industrial productivity has also increased, as reflected by the increase in the ratio of financing receivables to assets from 85.23% in 2022 to 85.16%. Meanwhile, the gearing ratio was recorded at 2.26 times. Non-performing financing (NPF) slightly increased to 2.44%, but was remained in the safe category.

Kinerja Keuangan Perusahaan Pembiayaan Tahun 2021-2023
Financial Performance of Financing Companies in 2021-2023

Uraian	2023	2022	2021
Rasio Piutang Pembiayaan Terhadap Aset	85,16%	85,23%	84,10%
Rasio Pinjaman Terhadap Modal Sendiri	2,26	2,07	1,98
Rasio Modal Sendiri-Modal Disetor	315,04%	302,22%	272,10%
Rasio Pembiayaan Bermasalah	2,44%	2,32%	3,53%
Rasio Laba Atas Aset	5,58%	5,67%	4,51%
Rasio Laba Atas Ekuitas	14,96%	14,38%	11,39%
Rasio Penyertaan Modal	1,34%	1,08%	1,06%
Rasio Biaya Operasional Atas Pendapatan Operasional	76,89%	75,64%	80,63%

TINJAUAN INDUSTRI PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR
Tingkat daya beli masyarakat yang tetap terjaga turut menopang penjualan sepeda motor di Indonesia sepanjang tahun 2023. Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat, sampai dengan Desember 2023, penjualan sepeda motor di pasar dalam negeri sebanyak 6,24 juta unit, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5,22 juta unit.

MOTORCYCLE FINANCE INDUSTRY OVERVIEW
The maintained level of people's purchasing power also supports motorcycle sales in Indonesia throughout 2023. Data from the Indonesian Motorcycle Industry Association (AISI) noted, until December 2023, motorcycle sales in the domestic market were 6.24 million units, an increase from the previous year of 5.22 million units.

Penjualan untuk pasar ekspor tercatat sebesar 570.004 unit, dimana pada tahun 2022 sebanyak 743.551 unit. Berdasarkan kategori penjualan sepeda motor skuter mendominasi pasar domestik dan pasar ekspor. Pada tahun 2023, AISI menargetkan penjualan sepeda motor sebanyak 6,2 juta unit, lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya.

Sales for the export market were recorded at 570.004 thousand units, of which in 2022 were 743,551 units. By category, motorcycle scooters dominate the domestic market and export market. In 2023, AISI targets motorcycle sales of 6.2 million units, higher than the previous year's realization.

Berdasarkan data OJK tahun 2023, nilai piutang pembiayaan sepeda motor baru naik sebesar 13,33% menjadi Rp78,47 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp69,24 triliun. Piutang pembiayaan sepeda motor bekas mengalami penurunan sebesar 5,46% menjadi Rp21,23 triliun dari tahun 2022 sebesar Rp22,46 triliun.

Based on OJK data as of October 2023, the value of new motorcycle financing receivables increased by 13.33% to Rp78.47 trillion from the previous year of 69.24 trillion. Used motorcycle financing receivables decreased by 5.46% to Rp21.23 trillion from Rp22.46 trillion in 2022.

Tinjauan Operasional Segmen Usaha

Operational Review of Business Segments



Perseroan menunjukkan kinerja pembiayaan yang semakin solid sepanjang tahun 2023. Peningkatan kinerja didukung dengan transformasi digital yang terus berlanjut, kualitas sumber daya manusia dan manajemen profesional

Throughout 2023, the Company's financing performance improves. Continuous digital transformation, human resource quality, and professional management all contribute to performance improvements

Pembahasan tinjauan operasional segmen usaha membahas tentang strategi bisnis dan strategi pemasaran, kegiatan pembiayaan dan pencapaian kinerja pembiayaan, serta prospek usaha Perseroan tahun 2024.

Discussion of operational review of business segments elaborates business strategy and marketing strategy, financing activities and achievement of financing performance, and the Company's business prospects in 2024.

STRATEGI BISNIS

Perseroan melanjutkan strategi sentralisasi dan transformasi digital yang telah dilakukan sehingga proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, risiko pembiayaan bermasalah dapat ditekan karena sistem dapat melakukan *profiling* konsumen secara lebih mendetail dan akurat.

Salah satu transformasi digital yang dilakukan adalah meluncurkan aplikasi KAWAN yang memiliki beragam fitur beragam seperti kemudahan mengakses profil kontrak konsumen, melakukan simulasi dan pengajuan pembiayaan dan melacaknya, serta mengakses ke kantor cabang Perseroan dan mendapatkan promo-promo terbaru.

BUSINESS STRATEGY

The Company maintains its centralization and digital transformation strategy, which has resulted in more effective and efficient business processes. Moreover, the risk of improper financing can be decreased as the system can undertake more detailed and accurate consumer profiling.

One of the digital transformations is the launch of the KAWAN application, which has a variety of features such as easy access to consumer contract profiles, simulations, and financing applications, as well as access to the Company's branch offices and the latest promotions.

Selain dapat diakses oleh konsumen, aplikasi KAWAN juga dapat digunakan oleh para agen dan *dealer* untuk mendukung kelancaran proses bisnis. Kehadiran aplikasi KAWAN sesuai dengan tren digitalisasi yang semakin berkembang.

Besides being accessible to consumers, the KAWAN application can also be used by agents and dealers to support efficient business processes. The KAWAN application is developed in line with the growing digitalization trend.

Perseroan terus mengembangkan layanan operasional berkualitas yang didukung dengan teknologi tepat guna dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi. Implementasi strategi bisnis yang tepat semakin meningkatkan *positioning* Perseroan sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia.

The Company continues to develop quality operational services supported by appropriate technology and highly competent human resources. The implementation of the right business strategy further enhances the Company's positioning as one of the leading financing companies in Indonesia.

STRATEGI PEMASARAN

MARKETING STRATEGY

Tren digitalisasi yang semakin berkembang telah diantisipasi oleh Perseroan dengan mengembangkan infrastruktur dan sistem pendukung bisnis berbasis teknologi digital. Termasuk dalam aspek pemasaran, Perseroan melakukan strategi dengan mengoptimalkan ekosistem digital yang terus bertumbuh.

The growing digitalization trend has been anticipated by the Company by developing digital technology-based infrastructure and business support systems. Including in the marketing aspect, the Company carries out strategies by optimizing the growing digital ecosystem.

Perseroan melakukan upaya perluasan pangsa pasar melalui kanal digital dengan memperkuat kemitraan strategis bersama mitra-mitra digital seperti *aggregator*, *financial technology, e-commerce* dan *marketplace*. Sinergi dengan mitra digital ini semakin memperluas jangkauan target pemasaran produk dan layanan Perseroan.

The Company puts efforts to expand market share through digital channels by strengthening strategic partnerships with digital partners such as aggregators, financial technology, e-commerce and marketplaces. This synergy with digital partners further expands the range of marketing targets for the Company's products and services.

Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen dalam membayar angsuran, Perseroan menjalin kolaborasi di antaranya dengan perbankan, ritel modern, Pos Indonesia dan dompet digital. Kanal distribusi pembayaran yang bervariasi ini memberikan alternatif pilihan yang semakin banyak bagi konsumen dalam melaksanakan kewajibannya.

To improve consumer convenience in paying installments, the Company collaborates with banking, modern retail, Pos Indonesia and digital wallets. These varied payment distribution channels provide an increasing number of alternative choices for consumers in carrying out their obligations.

Selain itu, distribusi pemasaran di kantor cabang Perseroan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia masih tetap dipertahankan. Layanan operasional di kantor-kantor cabang semakin efisien dan cepat karena didukung teknologi digital yang tepat

In addition, marketing distribution in the Company's branch offices spread across several regions in Indonesia is still maintained. Operational services in branch offices are increasingly efficient and faster as they are supported by appropriate digital technology.

Tinjauan Operasional Segmen Usaha
Operational Review of Business Segments

guna. Di sisi lain, sumber daya manusia yang berkualitas memberikan pelayanan prima kepada konsumen.

On the other hand, quality human resources provide excellent service to consumers.

Perseroan senantiasa adaptif dan responsif mencermati perkembangan di industri pembiayaan di tanah air. Salah satu isu utama yang sedang mendapatkan perhatian adalah penggunaan kendaraan listrik baik roda empat maupun roda dua. Hal ini tidak lepas dari dukungan besar yang diberikan oleh pemerintah melalui pemberian skema subsidi.

The Company is continually adaptive and responsive to monitor the financing industry developments in Indonesia. One of the most-talked-about topics is the use of electric vehicles, both four-wheeled and two-wheeled. This is inextricably linked to the government's substantial assistance in the form of subsidy schemes.

Penggunaan kendaraan listrik bertujuan untuk mengurangi emisi karbon sebagai bagian dari komitmen *net zero emission* 2060. Transisi energi dari berbahan bakar fosil menjadi energi baru dan terbarukan seperti energi listrik dilakukan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini Perseroan mendukung upaya pemerintah dengan memenuhi kebutuhan pembiayaan konsumen terhadap kendaraan listrik.

The use of electric vehicles aims to reduce carbon emissions as part of the 2060 net zero emission commitment. Energy transition from fossil fuels to new and renewable energy such as electrical energy is carried out to support sustainable development goals. In this case, the Company supports the government's efforts by meeting consumer financing needs for electric vehicles.

Nominasi piutang pembiayaan kendaraan listrik saat ini masih dalam jumlah terbatas. Namun pada masa mendatang Perseroan akan meningkatkan nilai pembiayaannya menyesuaikan dengan tingkat permintaan konsumen.

The nomination of electric vehicle financing receivables is currently still in limited quantities. However, in the future the Company will increase the value of its financing in accordance with the level of consumer demand.

Pangsa Pasar
Sampai dengan Desember 2023, aset Perseroan sebesar Rp6,64 triliun, atau pangsa pasarnya sebesar 1.20% terhadap total aset industri Rp 552,89 triliun. Piutang pembiayaan sebesar Rp5,94 triliun, atau memiliki pangsa pasar sebesar 1,26% atas total piutang pembiayaan industri sebesar Rp 470.86 triliun.

Market Shares
As of December 2023, the Company's assets amounted to Rp6.64 trillion, or its market share of 1.20% of the total industry assets of Rp552.89 trillion. Financing receivables amounted to Rp5.94 trillion, or had a market share of 1.26% of the total industry financing receivables of Rp470.86 trillion.

KEGIATAN PEMBIAYAAN

Dalam mengembangkan usaha Perseroan memiliki jenis produk dan layanan yang meliputi:

1. Pembiayaan Multiguna Barang
   - Pembiayaan Motor Baru
   - Pembiayaan Motor Bekas
2. Pembiayaan Multiguna Jasa:
   - Pembiayaan Multiguna MotorKu

FINANCING ACTIVITIES

In developing its business, the Company has types of products and services which include:

1. Multipurpose Goods Financing
   - New Motorcycle Financing
   - Used Motorcycle Financing
2. Multipurpose Services Financing:
   - MotorKu Multipurpose Financing

- Pembiayaan Multiguna MobilKu
- Fasilitas Dana MotorKu
- Fasilitas Dana MobilKu

3. Pembiayaan Investasi
   - *Sale and Leaseback* MobilKu
4. Pembiayaan Modal Kerja :
   - Fasilitas Modal Usaha MobilKu
   - Sale *and Leaseback* MobilKu
5. Pembiayaan Jual Beli (Akad *Murabahah*)
   - Pembiayaan Syariah Motor Baru
   - Pembiayaan Syariah Logam Mulia "MasKu"

- MobilKu Multipurpose Financing
- Dana MotorKu Facility
- Dana MobilKu Facility

3. Investment Financing
   - MobilKu Sale and Leaseback
4. Working Capital Financing:
   - MobilKu Business Capital Facility
   - MobilKu Sale and Leaseback
5. Sale and Purchase Financing (Murabahah Contract)
   - New Motor Sharia Financing
   - "MasKu" Precious Metal Sharia Financing

Kinerja Pembiayaan

Perseroan menunjukkan kinerja pembiayaan yang semakin solid sepanjang tahun 2023. Peningkatan kinerja didukung dengan transformasi digital yang terus berlanjut, kualitas sumber daya manusia dan manajemen profesional. Berikut rincian secara detail kinerja pembiayaan Perseroan:

Financing Performance

Throughout 2023, the Company's financing performance improves. Continuous digital transformation, human resource quality, and professional management all contribute to performance improvements. The following are the specifics of the Company's financing performance.

Jenis Pembiayaan	2023		2022		Pertumbuhan (%) Growth (%)	Type of Financing
	Unit	%	Unit	%		
Konvensional	204.968	96,57	192.341	95,55	6,56	Conventional
Syariah	7.291	3,43	8.960	4,45	(18,63)	Sharia
Total	**212.259**	**100**	**201.301**	**100**	**5,44**	**Total**

Kegiatan Pembiayaan Financing Activities	Nama Produk Product Name	2023	2022	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Pembiayaan Multiguna Barang Multipurpose Goods Financing	Pembiayaan Motor Baru New Motorcycle Financing	1.330.806	1.129.397	17,83
	Pembiayaan Motor Bekas Used Motorcycle Financing	0	0	0
Pembiayaan Multiguna Jasa Multipurpose Services Financing	Pembiayaan Multiguna MotorKu MotorKu Multipurpose Financing	518.093	956.248	(45,82)
	Fasilitas Dana MotorKu Dana MotorKu Facility	709.776	185.787	282,04
	Pembiayaan Multiguna MobilKu Mobilku Multipurpose Financing	0	540	(100)
	Fasilitas Dana MobilKu Dana MobilKu Facility	791.722	661.835	19,63
Pembiayaan Investasi Investment Financing	*Sales and Leaseback*	1.767.002	908.671	94,46
Pembiayaan Modal Kerja Working Capital Financing	Fasilitas Modal Usaha MobilKu Mobilku Business Capital Facility	0	142.181	(100)
	Sales and Leaseback	587.105	420.474	39,63
Pembiayaan Jual Beli (Akad Murabahah) Sale and Purchase Financing (Murabahah Contract)	Pembiayaan Syariah Motor Baru New Motor Sharia Financing	131.917	161.458	(18,30)
	Pembiayaan Syariah Logam Mulia "MasKu" "MasKu" Precious Metal Sharia Financing	8.574	8.829	(2,89)
Total		**5.844.995**	**4.575.422**	**27,75**

Tinjauan Operasional Segmen Usaha
Operational Review of Business Segments

Pembiayaan Sepeda Motor Baru

New Motorcycle Financing

Pada tahun 2023, pembiayaan sepeda motor baru tercatat sebesar 67.431 unit, naik sebesar 9,63% secara tahunan dari tahun 2022 sebesar 61.509 unit. Peningkatan ini dipengaruhi oleh daya beli konsumen.

In 2023, new motorcycle financing was recorded at 67,431 units, an increase of 9.63% from 61,509 units in 2022. This increase was influenced by consumer purchasing power.

Sepeda Motor Baru	2023	2022	Pertumbuhan (%) Growth (%)	New Motorcycles
Unit	67.431	61.509	9,63	Unit
Nilai Pembiayaan (Rp juta)	1.462.722,85	1.290.855,60	13,31	Financing Value (Rp million)
Rata-Rata Nilai Pembiayaan Per unit (Rp juta)	21,69	20,99	3,36	Average Financing Value Per unit (Rp million)

Kinerja Pembiayaan Sepeda Motor Baru

Pembiayaan sepeda motor baru sebesar 67.431 unit di tahun 2023, meningkat sebesar 9,63% dari tahun sebelumnya sebesar 61.509 unit. Nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp1,46 triliun, meningkat sebesar 13,31% dari tahun 2022 sebesar Rp1,29 triliun. Adapun rata-rata nilai pembiayaan perunit sebesar Rp21,69 juta, naik dari tahun 2022 sebesar Rp20,99 juta.

New Motorcycle Financing Performance

New motorcycle financing reached 67,431 units in 2023, a increase of 9.63% from the previous year of 61,509 units. The financing value was recorded at Rp1.46 trillion, increased by 13.31% from Rp1.29 trillion in 2022. The average unit financing value was Rp21.69 million, up from Rp20.99 million in 2022.

Kualitas Pembiayaan

Sentralisasi kredit yang terus berlanjut dengan dukungan digitalisasi dalam proses bisnis seperti *mobile survey* dan *mobile collection* untuk *profiling* konsumen

Quality of Financing

Continued centralization of credit with the support of digitalization in business processes, such as mobile surveys and mobile collection for consumer profiling has

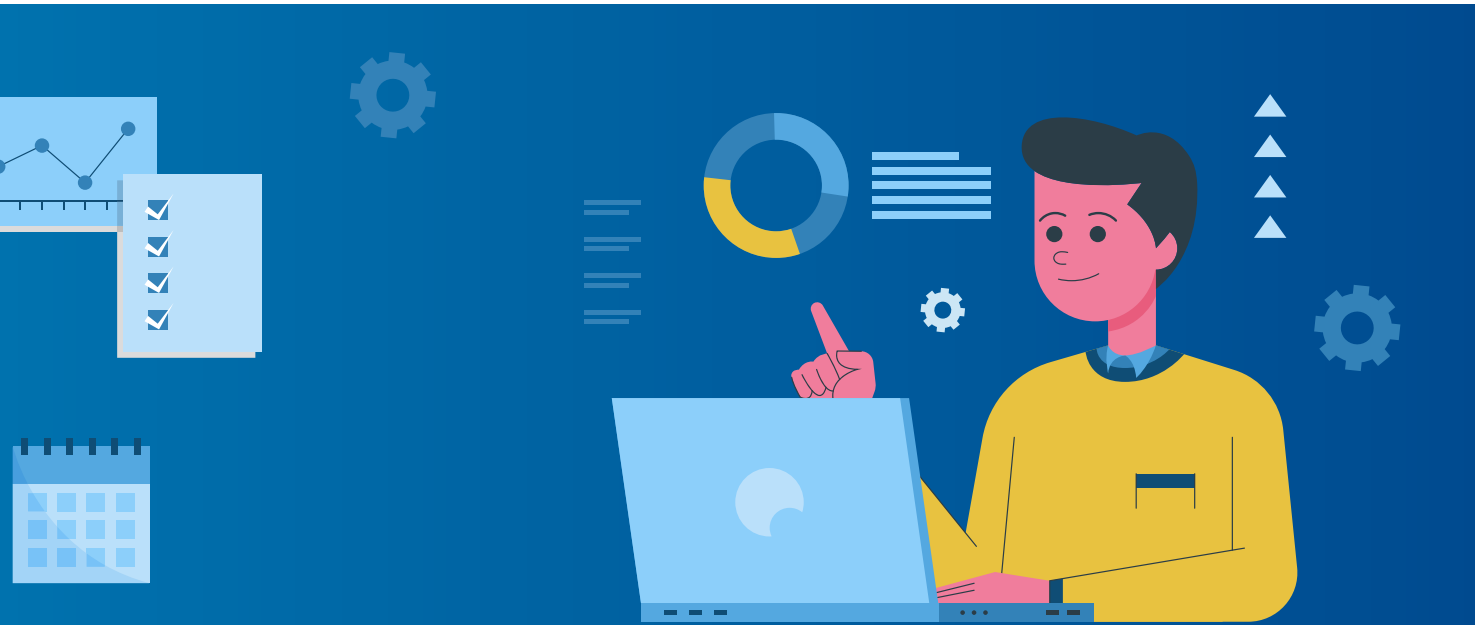

berdampak pada kualitas pembiayaan yang semakin baik terlihat dari penurunan pembiayaan bermasalah. Perseroan juga melakukan *review* berkala dalam setiap proses bisnis yang dijalankan.

Profitabilitas

Perseroan melakukan penyesuaian segmentasi TAC (*Total Acquisition Cost)* berdasarkan tipe sepeda motor dan *dealer* untuk menjaga tingkat profitabilitas. Selain itu, Perseroan melakukan *assessment* kepada *dealer* berdasarkan kontribusi portofolio dan risiko kredit untuk memacu produktivitas dan meningkatkan pangsa pasar.

Perseroan juga memberlakukan sistem *reward* berbasis kinerja untuk *dealer*. Bagi *dealer* yang memberikan kontribusi portofolio dengan risiko kredit yang baik serta potensi pasar yang lebih tinggi akan mendapatkan insentif lebih tinggi dibandingkan dengan *dealer* lainnya. Implementasi sistem ini meningkatkan daya saing dan berdampak pada profitabilitas Perseroan yang semakin baik.

an impact on better financing quality as seen from the decrease in non-performing financing. The Company also conducts periodic reviews in every business process.

Profitability

The Company made adjustments to the TAC (Total Acquisition Cost) segmentation based on motorcycle type and dealer to maintain profitability. In addition, the Company assesses dealers based on portfolio contribution and credit risk to spur productivity and increase market share.

The Company also implemented a performance-based reward system for dealers. For dealers who contribute portfolios with good credit risk and higher market potential will get higher incentives compared to other dealers. The implementation of this system increases competitiveness and has an impact on the Company's better protection.

Tinjauan Operasional Segmen Usaha
Operational Review of Business Segments

Pembiayaan Sepeda Motor Bekas

Used Motorcycle Financing

Pada tahun 2023, kinerja pembiayaan sepeda motor bekas Perseroan sebagai berikut :

In 2023, used motorcycle financing performance former Company as follows:

Sepeda Motor Bekas	2023	2022	Pertumbuhan (%) Growth (%)	Used Motorcycle
Unit	-	-	-	Unit
Nilai Pembiayaan (Rp juta)	-	-	-	Financing Value (Rp million)
Rata-Rata Nilai Pembiayaan Per unit (Rp juta)	-	-	-	Average Financing Value Per unit (Rp million)

Kinerja Pembiayaan Sepeda Motor Bekas

Pada tahun 2023, Perseroan tidak menyalurkan pembiayaan sepeda motor bekas. Sementara per 31 Desember 2023, terdapat saldo *Outstanding Principal* senilai Rp9,51 juta.

Used Motorcycle Financing Performance

In 2023, the Company did not disburse used motorcycle financing. Meanwhile, per Deccember 31, 2023 terdapat saldo Outstanding Principal senilai Rp9.51 million.



Kualitas Pembiayaan

Perseroan fokus memberikan pembiayaan pada unit barang yang memiliki risiko rendah sehingga kualitas pembiayaan di segmen sepeda motor bekas semakin baik.

Profitabilitas

Pembiayaan sepeda motor bekas tetap terjaga dan memberikan profit untuk Perseroan.

Financing Quality

The Company focuses on providing financing to units of goods that have low risk, hence improving the quality of financing in the used motorcycle segment.

Profitability

Used motorcycle financing is maintained and delivered profits for the Company.

Tinjauan Operasional Segmen Usaha
Operational Review of Business Segments

Pembiayaan Syariah

Sharia Financing



Pembiayaan Logam Mulia baik unit maupun nominal mengalami penurunan di tahun 2023. Namun, Respons pasar terhadap produk syariah pembiayaan Logam Mulia dinilai masih tetap positif karena sebagai instrumen investasi yang memiliki lindung nilai dan hasil yang menarik.

Gold Financing, both unit and nominal, has decreased in 2023. However, the market response to the sharia product of Gold financing is still considered positive because it is an investment instrument that has hedging and attractive returns.

Kinerja Pembiayaan Syariah | **Sharia Financing Performance**

Pembiayaan Logam Mulia	2023	2022	Pertumbuhan (%) Growth (%)	Gold Financing
Volume (unit)	1.044	1.324	(21,15)	Volume (unit)
Nilai Pembiayaan (Rp juta)	8.574	8.829	(2,89)	Financing Value (Rp million)

Volume pembiayaan Logam Mulia Perseroan pada tahun 2023 tercatat sebesar 1.044 unit, turun 21,15% dari tahun sebelumnya sebesar 1.324 unit dengan nilai pembiayaan sebesar Rp8,83 miliar.

The Company's Gold Financing volume in 2023 was recorded at 1,044 units, decreased by 21,15% from the previous year of 1,324 units with a financing value of Rp8.83 billion.



Kualitas Pembiayaan

Perseroan mengimplementasikan *profiling* calon konsumen dengan tepat sehingga kualitas pembiayaan syariah dapat terjaga dengan baik yang terlihat dari minimnya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Logam Mulia.

Quality of Financing

The Company implements proper profiling of prospective customers, enabling the quality of sharia financing to be well maintained as seen from the lack of non-performing financing for Gold Financing products.

Profitabilitas

Meski produk pembiayaan Logam Mulia termasuk produk baru namun telah memberikan tingkat profitabilitas yang cukup besar bagi Perseroan. Untuk itu, Perseroan akan semakin meningkatkan penjualan produk ini.

Profitability

Although Gold Financing are new product, it has provided a considerable level of profitability for the Company. As such, the Company will further increase sales of this product.

Tinjauan Operasional Segmen Usaha
Operational Review of Business Segments

Pembiayaan Multiguna Jasa

Multipurpose Services Financing

Pembiayaan Multiguna memiliki keunggulan tersendiri dibanding produk pembiayaan lainnya yaitu fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Bagi Perseroan produk ini memberikan margin keuntungan yang lebih tinggi daripada produk lainnya. Untuk itu, Perseroan terus berupaya dalam meningkatkan transaksi pembiayaan Multiguna.

Multipurpose financing has its distinct advantages over other types of financing, notably the flexibility to suit diverse consumer needs. This product provides a higher profit margin for the Company than other products. As such, the Company continues to strive to boost Multipurpose financing transactions.

Kinerja Pembiayaan Multiguna Jasa | Multipurpose Service Financing Performance

Kegiatan Pembiayaan Financing Activities	Nama Produk Product Name	2023	2022	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Dalam Unit | In Unit				
Pembiayaan Multiguna Jasa Multipurpose Services Financing	Pembiayaan Multiguna MotorKu MotorKu Multipurpose Financing	47.669	96.158	(50,43)
	Fasilitas Dana MotorKu Dana MotorKu Facilities	65.536	19.173	241,81
	Pembiayaan Multiguna MobilKu MobilKu Multipurpose Financing	0	6	(100)
	Fasilitas Dana MobilKu Dana MobilKu Facility	10.179	9.220	10,40
Jumlah | Total		**123.384**	**124.557**	**(0,94)**
Kegiatan Pembiayaan Financing Activities	**Nama Produk** Product Name	**2023**	**2022**	**Pertumbuhan (%)** Growth (%)
Dalam Rp juta | In Rp million				
Pembiayaan Multiguna Jasa Multipurpose Services Financing	Pembiayaan Multiguna Motorku Motorku Multipurpose Financing	518.093	956.248	(45,82)
	Fasilitas Dana Motorku Dana Motorku Facilities	709.776	185.787	282,04
	Pembiayaan Multiguna Mobilku Mobilku Multipurpose Financing	0	540	(100,00)
	Fasilitas Dana Mobilku Dana Mobilku Facility	791.722	661.835	19,63
Jumlah | Total		**2.019.591**	**1.804.410**	**11,93**



Pada tahun 2023, pembiayaan Multiguna tercatat sebesar 123.384 unit, turun sebesar 0,94% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 124.557 unit dengan nilai nominal pembiayaan sebesar Rp1,80 triliun.

Kualitas Pembiayaan

Sampai akhir tahun 2023, risiko pembiayaan Multiguna terkendali dengan baik yang ditunjukkan dengan rendahnya pembiayaan bermasalah. Hal ini disebabkan implementasi sentralisasi kredit dan digitalisasi proses akuisisi yang semakin baik.

Profitabilitas

Fleksibilitas yang melekat pada produk pembiayaan Multiguna memberikan profitabilitas yang cukup tinggi untuk Perseroan.

In 2023, Multipurpose financing was recorded at 123,384 units, a decrease of 0.94% compared to the previous year of 124,557 units with a nominal financing value of Rp1.80 trillion.

Quality of Financing

Until the end of 2023, the risk of Multipurpose financing is properly controlled, as indicated by low non-performing financing. This was due to the improved implementation of credit centralization and digitalization of the acquisition process.

Profitability

The inherent flexibility of Multipurpose financing products provides high profitability for the Company.

Tinjauan Operasional Segmen Usaha
Operational Review of Business Segments

Pembiayaan Investasi

Investment Financing



Perseroan terus melakukan diversifikasi produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menambah sumber pendapatan baru. Salah satunya adalah meluncurkan produk pembiayaan Investasi yang mendapatkan respons pasar cukup positif.

The Company continues to diversify its products to meet consumer needs and add new sources of income. One of them is launching an investment financing product that has received a fairly positive market response.

Kinerja Pembiayaan Investasi | Investment Financing Performance

Kegiatan Pembiayaan Financing Activities	Nama Produk Product Name	2023	2022	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Dalam Unit | In Unit				
Pembiayaan Investasi Investment Financing	*Sale and Leaseback*	14.254	7.557	88,62
Dalam Rp juta | In Rp million				
Pembiayaan Investasi Investment Financing	*Sale and Leaseback*	1.767.002	908.671	94,46



Pada tahun 2023, Pembiayaan Investasi mencapai 14.254 unit, meningkat sebesar 88,62% dari tahun sebelumnya 7.557 unit, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp908,7 Miliar.

Kualitas Pembiayaan

Risiko pembiayaan Investasi terkendali dengan baik karena didukung dengan pengelolaan manajemen risiko dan digitalisasi proses bisnis yang terus berlanjut.

Profitabilitas

Perseroan terus berupaya meningkatkan pembiayaan Investasi untuk memperbesar pendapatan Perseroan.

In 2023, investment financing reached 14,254 units, an increase of 88.62% from the previous year's 7,557 units, with a financing value of Rp908.7 billion.

Quality of Financing

Investment financing risk is properly controlled as it is supported by risk management and continuous digitalization of business processes.

Profitability

The Company continues to increase investment financing to increase the Company's revenue.

Tinjauan Operasional Segmen Usaha
Operational Review of Business Segments

Pembiayaan Modal Kerja
Working Capital Financing

Kebutuhan dunia usaha terhadap modal kerja masih sangat besar. Perseroan memfasilitasinya melalui produk Pembiayaan Modal Kerja untuk membantu konsumen yang memiliki usaha produktif dalam mengembangkan bisnis.

Working capital remains in high demand in the business sector. The Company facilitates it through Working Capital Financing products to assist consumers with profitable businesses in expanding their operations.

Kegiatan Pembiayaan Financing Activities	**Nama Produk** Product Name	**2023**	**2022**	**Pertumbuhan (%)** Growth (%)
Dalam unit | In Unit				
Pembiayaan Modal Kerja Working Capital Financing	Fasilitas Modal Usaha MobilKu MobilKu Business Capital Facility	0	1.641	(100)
	Sale and Leaseback Mobilku Mobilku Sale and Leaseback	6.146	4.713	30,41
Jumlah | Total		**6.146**	**6.354**	**(3,27)**
Dalam Rp juta | In Rp million				
Pembiayaan Modal Kerja Working Capital Financing	Fasilitas Modal Usaha MobilKu MobilKu Business Capital Facility	0	142.181	(100)
	Sale and Leaseback Mobilku Mobilku Sale and Leaseback	587.105	420.474	39,63
Jumlah | Total		**587.105**	**562.655**	**4,35**



Kinerja Pembiayaan Modal Kerja

Sepanjang tahun 2023, Pembiayaan Modal Kerja tercatat sebesar 6.146 unit, turun dari tahun sebelumnya 6.354 unit. Nilai pembiayaan Modal Kerja sebesar Rp587,11 meningkat sebesar 4,35% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp562,65 miliar. Pembiayaan Modal Kerja terdiri dari Fasilitas Modal Usaha MobilKu dan *Sale and Leaseback* MobilKu.

Profitabilitas

Pembiayaan Modal Kerja memberikan sumber pendapatan baru bagi Perseroan. Dengan *margin* yang cukup besar, Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan pangsa pembiayaan Modal Kerja.

Working Capital Financing Performance

Throughout 2023, Working Capital Financing was recorded at 6,146 units, a decrease from the previous year of 6,354 units. The value of Working Capital financing amounted to Rp587.11, increased by 4.35% compared to the previous year of Rp562.65 billion. Working Capital Financing consists of MobilKu Business Capital Facility and Mobilku Sale and Leaseback.

Profitability

Working Capital Financing provides a new source of income for the Company. With a large margin, the Company continues to strive to increase the share of Working Capital financing.

Prospek Usaha 2024

Business Prospects 2024

Perekonomian negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok diperkirakan akan melambat pada tahun 2024. Inflasi yang tetap tinggi di AS mendorong pengetatan moneter yang berlanjut meski sedikit berkurang dibanding tahun sebelumnya. Sementara pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan melambat sebagai dampak dari krisis properti dan sektor manufaktur yang melemah.

The economies of advanced economies such as the United States, Europe, and China are expected to slow down in 2024. Persistently high inflation in the US prompted monetary tightening that continued although slightly eased compared to a year earlier. Meanwhile, China's economic growth will slow as a result of the property crisis and a weakening manufacturing sector.

Berbeda dengan negara-negara maju, perekonomian Indonesia diprediksi akan tumbuh lebih tinggi pada tahun depan yang ditopang dari meningkatnya sektor manufaktur, infrastruktur, dan teknologi. World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi India akan menjadi yang tertinggi diantara negara-negara anggota G20.

Unlike developed countries, Indonesia economy is predicted to grow higher next year on the back of increasing manufacturing, infrastructure and technology sectors. The World Bank expects India's economic growth to be the highest among G20 member countries.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi global akan dipengaruhi oleh eskalasi ketegangan geopolitik di beberapa wilayah. Penurunan tensi konflik akan memberikan pengaruh positif bagi ekonomi dan begitu pula sebaliknya, terutama dampaknya terhadap harga komoditas energi dan *supply chain* global.

In addition, global economic growth will be affected by the escalation of geopolitical tensions in several regions. Reducing conflict tensions will have a positive influence on the economy and vice versa, particularly the impact on energy commodity prices and global supply chains.

Di pasar keuangan, Bank Indonesia memproyeksikan tren suku bunga acuan *Fed Fund Rate* (FFR) diprediksi akan melandai terutama memasuki paruh kedua tahun 2024. Penurunan itu akan bergantung pada tingkat inflasi dan perkembangan angkatan kerja yang diharapkan sesuai ekspektasi.

In financial markets, Bank Indonesia projects that the trend of the Fed Fund Rate (FFR) benchmark interest rate is predicted to flatten, especially entering the second half of 2024. The decline will depend on the inflation rate and labor force developments expected to meet expectations.

Dengan faktor-faktor di atas tersebut, perekonomian dunia pada tahun 2024 diprediksi melambat dengan risiko ketidakpastian yang tetap tinggi. Di tengah situasi tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2% yang didukung terjaganya konsumsi masyarakat dan swasta serta investasi yang tetap tumbuh.

With the aforementioned variables, the global economy is expected to decline in 2024, with the risk of unpredictability staying high. In the midst of this, the government aims for 5.2% economic growth in Indonesia, which will be supported by continued public and private consumption and investment.

Kondisi makro yang tetap kondusif akan berdampak terhadap penjualan sepeda motor. Diprediksi penjualan sepeda motor pada tahun 2024 setidaknya akan menyamai pencapaian pada tahun sebelumnya di kisaran

Macro conditions that remain favorable will have an impact on motorcycle sales. It is predicted that motorcycle sales in 2024 will at least match the achievement in the previous year in the range of 6.2

6,2 juta unit kendaraan. Hal ini akan memengaruhi industri pembiayaan terutama yang fokus pada pembiayaan sepeda motor.

Bisnis Perseroan tetap fokus pada pembiayaan sepeda motor yang tetap prospektif. Selain itu, pembiayaan multiguna yang memberikan margin tinggi akan terus ditingkatkan. Begitu pula dengan pembiayaan Logam Mulia yang semakin diminati oleh konsumen. Dilihat dari data historis, harga Logam Mulia cenderung meningkat dalam kondisi ketidakpastian. Hal ini mendorong konsumen untuk berinvestasi pada instrumen logam mulia.

Perseroan juga akan terus meningkatkan pembiayaan Investasi dan Modal Kerja untuk menambah sumber-sumber pendapatan. Implementasi sentralisasi kredit dengan dukungan digitalisasi akan terus dilanjutkan karena sudah terbukti meningkatkan kualitas pembiayaan dan efisiensi proses bisnis.

Untuk memperluas pangsa pasar, Perseroan akan terus mengembangkan kolaborasi dengan mitra-mitra digital yang memiliki platform digital andal. Selain itu, kanal-kanal distribusi pembayaran juga akan terus dioptimalkan agar konsumen semakin mudah dan nyaman dalam membayar angsuran.

Dengan strategi bisnis yang tepat, adaptif, dan responsif serta didukung dengan teknologi dan SDM berkompeten, Perseroan meyakini bisnisnya tetap prospektif dan tumbuh berkelanjutan pada masa mendatang.

million units of vehicles. This will affect the financing industry, particularly those that focus on motorcycle financing.

The Company's business remains focused on prospective motorcycle financing. In addition, multipurpose financing that provides high margins will continue to be increased. Similarly, Precious Metal financing is increasingly in demand by consumers. Judging from historical data, the price of Precious Metals tends to increase in conditions of uncertainty. This encourages consumers to invest in precious metal instruments.

The Company will also continue to increase Investment and Working Capital financing to elevate sources of income. The implementation of credit centralization with the support of digitalization will continue as it has been proven to improve the quality of financing and the efficiency of business processes.

To expand market share, the Company will continue to develop collaborations with digital partners who have reliable digital platforms. In addition, payment distribution channels will also continue to be optimized, allowing consumers to pay installments more easily and comfortably.

With the right, adaptive, and responsive business strategy supported by technology and competent human resources, the Company believes that its business will remain prospective and grow sustainably in the years to come.

Tinjauan Keuangan
Financial Review



Perseroan membukukan Laba Tahun Berjalan pada tahun 2023 sebesar Rp236,41 miliar, meningkat sebesar 19,64% dari tahun 2022 sebesar Rp197,60 miliar seiring dengan peningkatan pendapatan.

The Company posted Income for the Year of Rp236.41 billion in 2023, an increase of 19.64% from Rp197.60 billion in 2022, in line with the increase in revenue.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET

Aset Perseroan sebesar Rp6,64 triliun di tahun 2023, meningkat sebesar 17,52% dari tahun 2022 sebesar Rp5,65 triliun. Peningkatan aset terutama ditopang dari naiknya piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan. Perkembangan aset Perseroan dalam periode 2021-2023 adalah sebagai berikut:

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

ASSETS

The Company's assets stood at Rp6.64 trillion in 2023, an increase of 17.52% from Rp5.65 trillion in 2022. The increase in assets was mainly supported by the increase in consumer financing and finance lease receivables. The development of the Company's assets in the 2021-2023 period is as follows:

Dalam Rp Juta | In Rp Million

Aset	2023	2022	2021	Assets
Kas dan Setara Kas - Neto	342.970	483.969	448.752	Cash and Cash Equivalents - Net
Piutang Pembiayaan Konsumen - Neto	3.593.623	3.540.952	4.051.367	Consumer Financing Receivables - Net
Piutang Pembiayaan Modal Usaha - Neto	51.886	185.888	240.153	Capital Financing Receivables - Net
Piutang Sewa Pembiayaan - Neto	2.290.355	1.137.965	124.119	Finance Lease Receivables - Net
Piutang Lain-Lain - Neto	51.098	21.779	24.206	Other Receivables - Net
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka	26.010	12.606	12.048	Prepaid Expenses and Advances
Aset Tetap - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan	81.769	65.034	73.654	Property and Equipment - Net of Accumulated Depreciation
Aset Hak-Guna - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan	92.273	81.426	83.388	Right-of-Use Assets - Net of Accumulated Depreciation
Aset Tidak Berwujud - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan	49.463	42.834	32.352	Intangible Assets - Net of Accumulated Depreciation
Aset Pajak Tangguhan - Neto	14.495	14.983	16.220	Deferred Tax Assets - Net
Aset Lain-Lain	41.773	58.790	41.513	Other Assets
Total Aset	**6.635.715**	**5.646.226**	**5.147.772**	**Total Assets**

LIABILITAS

Liabilitas Perseroan sebesar Rp4,94 triliun di tahun 2023, meningkat sebesar 19,57% dari tahun 2022 sebesar Rp4,13 triliun. Peningkatan liabilitas terutama karena naiknya utang bank dan utang obligasi untuk mendukung rencana bisnis Perseroan. Perkembangan liabilitas Perseroan dalam periode 2021-2023 adalah sebagai berikut:

LIABILITIES

The Company's liabilities stood at Rp4.94 trillion in 2023, an increase of 19.57% from Rp4.13 trillion in 2022. The increase in liabilities was mainly due to the increase in bank loans and bonds payable to support the Company's business plan. The development of the Company's liabilities in the 2021-2023 period is as follows:

Dalam Rp Juta | In Rp Million

Liabilitas	2023	2022	2021	Liabilities
Utang Bank	2.626.237	2.350.136	1.967.885	Bank Loans
Biaya yang Masih Harus Dibayar	86.702	65.452	49.684	Accrued Expenses
Utang Pajak	50.699	41.097	23.689	Taxes Payable
Utang Lain-lain	181.869	136.719	105.029	Other Payables
Liabilitas Sewa	41.142	46.396	50.978	Lease Liabilities
Utang Obligasi - Neto	1.660.253	1.200.615	1.319.928	Bonds Payable - Net
Liabilitas Imbalan Kerja	92.891	90.779	85.190	Liability for Employee Benefits
Utang Subordinasi	200.000	200.000	200.000	Subordinated Loan
Total Liabilitas	**4.939.793**	**4.131.194**	**3.802.383**	**Total Liabilities**

EKUITAS

Perseroan memiliki ekuitas sebesar Rp1,70 triliun, meningkat sebesar 11,94% dari tahun 2022 sebesar Rp1,52 triliun di tahun 2022. Laporan Perubahan Ekuitas Perseroan dalam periode 2021-2023 adalah sebagai berikut:

EQUITY

The Company's equity reached Rp1.70 trillion, an increase of 11.94% from Rp1.52 trillion in 2022. The Company's Statement of Changes in Equity in the 2021-2023 period is as follows:

Dalam Rp Juta | In Rp Million

Laporan Perubahan Ekuitas	2023	2022	2021	Statement of Changes in Equity
Saldo Awal	1.515.032	1.345.389	1.223.989	Beginning Balance
Keuntungan Aktuarial - Neto Setelah Pajak	3.668	5.115	11.337	Actuarial Gain - Net of Tax
Dividen	(59.185)	(33.075)	-	Dividend
Total Laba Tahun Berjalan	236.407	197.603	110.063	Total Income for the Year
Saldo Akhir	**1.695.922**	**1.515.032**	**1.345.389**	**Ending Balance**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Pendapatan

Pada tahun 2023, Pendapatan Perseroan sebesar Rp2,0 triliun, meningkat sebesar 17,76% dari tahun 2022 sebesar Rp1,69 triliun. Kenaikan ini terutama

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Revenues

In 2023, the Company's revenue was Rp2.0 trillion, increased by 17.76% from Rp1.69 trillion in 2022. This increase was mainly due to higher realization

Tinjauan Keuangan
Financial Review

disebabkan oleh realisasi yang lebih tinggi dari pendapatan pembiayaan konsumen, modal usaha, dan sewa pembiayaan konsumen, modal usaha dan sewa pembiayaan menjadi sebesar Rp1,70 triliun di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,41 triliun. Rincian komponen Pendapatan Perseroan dalam periode 2021-2023 sebagai berikut:

of consumer financing, capital financing and capital financing, and finance lease income to Rp1.70 trillion in 2023 compared to Rp1.41 trillion in 2022. Details of the Company's Revenue components in the 2021-2023 period are as follows:

Dalam Rp Juta | In Rp Million

Pendapatan	2023	2022	2021	Revenues
Pembiayaan Konsumen, Modal Usaha, dan Sewa Pembiayaan - Neto	1.700.753	1.414.831	1.241.703	Consumer Financing, Capital Financing, and Finance Lease - Net
Bunga	12.774	11.094	8.310	Interest
Administrasi	41.284	45.516	83.750	Administration
Lain-lain	240.599	223.064	237.220	Others
Total Pendapatan	**1.995.410**	**1.694.505**	**1.570.983**	**Total Revenues**

Beban

Perseroan mencatatkan beban sebesar Rp1,67 triliun di tahun 2023, naik sebesar 18,45% dari tahun 2022 sebesar Rp1,41 triliun. Kenaikan beban ini terutama disebabkan karena peningkatan atas pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. Selain itu, transformasi digital yang terus dilaksanakan membuat bisnis menjadi lebih efisien.

Expenses

The Company recorded expenses of Rp1.67 trillion in 2023, an increase of 18.45% from Rp1.41 trillion in 2022. This increase in expenses was mainly due to an increase in the provision for impairment losses. Furthermore, the ongoing implementation of digital transformation enables business to be more efficient.

Dalam Rp Juta | In Rp Million

Beban	2023	2022	2021	Expenses
Umum dan Administrasi	593.561	563.850	510.697	General and Administrative
Gaji dan Tunjangan	378.391	356.283	308.655	Salaries and Benefits
Beban Pendanaan dan Keuangan	309.881	261.994	295.982	Financing Costs and Financing Charges
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	292.171	150.035	208.967	Provision for Impairment Losses
Penyusutan	78.434	63.071	70.708	Depreciation
Lain-lain	20.363	17.023	21.432	Others
Total Beban	**1.672.801**	**1.412.256**	**1.416.441**	**Total Expenses**

Laba Tahun Berjalan, Laba Komprehensif, dan Laba Per Saham Dasar

Perseroan membukukan Laba Tahun Berjalan pada tahun 2023 sebesar Rp236,41 miliar, meningkat sebesar 19,64% dari tahun 2022 sebesar Rp197,60 miliar seiring dengan peningkatan pendapatan. Laba komprehensif sebesar Rp240,08 miliar, meningkat sebesar 18,43% dari tahun 2022 sebesar Rp202,72 miliar. Peningkatan laba tahun berjalan berdampak terhadap meningkatnya laba per saham dasar Perseroan menjadi sebesar Rp67,90 di tahun 2023, dari sebelumnya sebesar Rp56,76 di tahun 2022.

Income for the Year, Comprehensive Income, and Basic Earnings per Share

The Company posted Income for the Year of Rp236.41 billion in 2023, an increase of 19.64% from Rp197.60 billion in 2022, in line with the increase in revenue. Comprehensive income was Rp240.08 billion, an increased by 18.43% from Rp202.72 billion in 2022. This increase in the income for the Year has an impact on increasing in the Company's basic earnings per share to Rp67.90 in 2023, from the previous Rp56.76 in 2022.

Dalam Rp Juta | In Rp Million

Laba	2023	2022	2021	Income
Laba Tahun Berjalan	236.407	197.603	110.063	Income for the Year
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	240.075	202.718	121.400	Comprehensive Income for the Year
Laba per Saham Dasar (Dinyatakan dalam Nilai Rupiah Penuh)	67,90	56,76	31,61	Basic Earnings per Share (Expressed in Full Rupiah Amount)

LAPORAN ARUS KAS

STATEMENT OF CASH FLOWS

Dalam Rp Juta | In Rp Million

Arus Kas	2023	2022	2021	Cash Flows
Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi	(685.596)	(113.197)	131.660	Net Cash Flows from Operating Activities
Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi	(115.069)	(65.605)	(46.206)	Net Cash Flows from Investing Activities
Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan	659.784	213.454	(271.496)	Net Cash Flows from Financing Activities
Arus Kas Neto	(140.881)	34.652	(186.042)	Net Cash Flows

Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi

Perseroan menggunakan arus kas neto dari aktivitas operasi sebesar Rp685,60 miliar di tahun 2023. Peningkatan arus kas bersih dari aktivitas operasi Perseroan disebabkan meningkatnya pengeluaran kas yang lebih besar dari penerimaan kas, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran atas transaksi sehubungan dengan pembiayaan.

Net Cash Flows from Operating Activities

The Company uses net cash flow from operating activities of Rp685.60 billion in 2023. The increase in net cash flow from the Company's operating activities was due to increased cash disbursement that were higher than cash receipts, which was mainly due to increased payments on transactions related to financing.

Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan tercatat sebesar RpRp115,07 miliar di tahun 2023, meningkat sebesar 75,40% dibanding tahun 2022 sebesar Rp65,61 miliar. Hal ini disebabkan meningkatnya pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap dan aset tidak berwujud serta aset hak-guna Perseroan.

Net Cash Flows from Investing Activities

Net cash flow used for the Company's investing activities was RpRp115.07 billion in 2023, an increase of 75.40% compared to Rp65.61 billion in 2022. This was due to the increase in cash expenditure for acquisition of property and equipment and intangible assets and right-of-use assets.

Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas neto dari aktivitas pendanaan sebesar Rp659,78 miliar di tahun 2023. Arus kas ini diperoleh dari penerimaan pendanaan seperti dari utang bank dan penerbitan obligasi yang lebih besar dibandingkan pengeluaran pendanaan.

Net Cash Flows from Financing Activities

Net cash flow from financing activities amounted to Rp659.78 billion in 2023. This cash flow was obtained from funding receipts such as from bank loans and bond issuance which was higher than funding disbursement.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Perseroan memiliki kemampuan yang sangat memadai dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Kemampuan ini terlihat dari rasio solvabilitas yang dicapai. Perseroan juga terus meningkatkan kapasitas permodalan dan pencapaian laba untuk pertumbuhan usaha berkelanjutan. Selain itu, kemampuan Perseroan dalam membukukan laba juga terus meningkat yang terlihat dari rasio rentabilitas.

Rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas yang dicapai oleh Perseroan selama tiga tahun terakhir diuraikan sebagai berikut:

Rasio Solvabilitas

Perseroan memiliki rasio solvabilitas yang direpresentasikan dengan perbandingan liabilitas terhadap total aset dan liabilitas terhadap ekuitas yang terus menurun.

SOLVENCY AND RECEIVABLES COLLECTIBILITY LEVEL

SOLVENCY

The Company has a highly adequate ability to meet both short-term and long-term debt obligations. The solvency ratio demonstrates this ability. The Company also continues to improve capital capacity and profit attainment to achieve sustainable business growth. Furthermore, the Company's capacity to record profits continues to improve, as seen by the profitability ratio.

The solvency ratio and profitability ratio achieved by the Company over the last three years are described as follows:

Solvency Ratio

The Company has a solvency ratio represented by a debt to total assets ratio and debt to equity ratio that continues to decline.

Rasio	2023	2022	2021	Ratio
Liabilitas Terhadap Total Aset	74,44%	73,17%	73,86%	Debt to Total Assets
Rasio				**Ratio**
Liabilitas Terhadap Ekuitas	291,27%	272,68%	282,62%	Debt to Total Equity

Dari tabel di atas, pada tahun 2023 rasio liabilitas terhadap aset sebesar 74,44%, meningkat dari tahun 2022 sebesar 73,17%. Sedangkan rasio liabilitas terhadap ekuitas sebesar 291,27%, meningkat dari tahun 2022 sebesar 272,68%. Dari rasio solvabilitas tersebut terlihat bahwa Perseroan memiliki kemampuan yang memadai dalam menunaikan kewajibannya.

From the above table, the debt to assets ratio was 74.44% in 2023, an increase from 73.17% in 2022. Meanwhile, debt to equity ratio was 291.27%, an increase from 272.68% in 2022. From the solvency ratio, the Company has adequate capabilities in fulfilling its obligations.

Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas diukur dari imbal hasil rata-rata aset dan imbal hasil rata-rata ekuitas. Rincian rasio rentabilitas Perseroan dalam periode tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

Earnings Ratio

The earnings ratio is measured by the average return on assets and the average return on equity. Details of the Company's profitability ratio in the 2021-2023 period are as follows:

Rasio	2023	2022	2021	Ratio
Imbal Hasil Rata-rata Aset	5,04%	5,26%	3,17%	Return on Assets (ROA)
Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas	14,97%	14,09%	8,69%	Return on Equity (ROE)

Dari tabel di atas, imbal hasil rata-rata aset di tahun 2023 sebesar 5,04%, menurun dari tahun 2022 sebesar 5,26%. Sedangkan imbal hasil rata-rata ekuitas sebesar 14,97%, meningkat dari tahun 2022 sebesar 14,09%. Rasio rentabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam mencatatkan laba yang tetap positif dan dapat memberikan nilai lebih bagi para pemegang saham Perseroan.

From the table above, the average return on assets in 2023 was 5.04%, decreased from 5.26% in 2022. Meanwhile, the average return on equity was 14.97%, increased from 14.09% in 2022. The earnings ratio indicates the Company's ability to record positive profits and can provide more value for the Company's shareholders.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Kolektibilitas piutang merupakan kemampuan Perseroan untuk menagih piutangnya kepada pihak lain. Tingkat kolektibilitas piutang Perseroan pada periode tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

RECEIVABLES COLLECTABILITY LEVEL

Collectability of receivables is the Company's ability to collect its receivables to other parties. The level of collectability of the Company's receivables in the 2021-2023 period is as follows:

Uraian	2023	2022	2021	Description
Tunggakan 1-90 hari	12,75%	9,64%	10,99%	Overdue 1-90 days
Tunggakan lebih dari 91 hari	2,08%	1,56%	1,43%	Overdue more than 91 days

Kolektibilitas piutang untuk tunggakan 1-90 hari sebesar 12,75% di tahun 2023, naik dibanding tahun 2022 sebesar 9,64%. Untuk tunggakan lebih dari 91 hari menjadi sebesar 2,08% di tahun 2023, naik dari 1,56% di tahun 2022. Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan dalam menagih piutangnya agar tidak menjadi pembiayaan bermasalah.

The collectability of receivables for 1-90 days overdue was 12.75% in 2023, an increase compared to 9.64% in 2022. Overdue of more than 91 days was 2.08% in 2023, up from 1.56% in 2022. The Company continues to strive to improve its ability to collect its receivables hence to prevent them to become non-performing financing.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Struktur Modal

Struktur modal Perseroan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan rincian pemegang saham Perseroan dengan saham dari nilai nominal Rp100 per saham adalah sebagai berikut:

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICIES ON CAPITAL STRUCTURE

Capital Structure

The Company's capital structure as of December 31, 2023, with details of the Company's shareholders with shares of Rp100 per share is as follows:

Uraian Description	Jumlah Total	(%)
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.349.646.729	67,49
PT Wahana Makmur Sejati	870.600.000	25,01
Masyarakat umum (masing-masing dibawah 5%) Public (below 5%)	261.234.751	7,50
Total	**3.481.481.480**	**100,00**

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Untuk *gearing ratio* pada periode 31 Desember 2021-31 Desember 2023 yang dihitung berdasarkan POJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

The gearing ratio for the period of 31 December 2021-31 December 2023 calculated based on POJK No. 35/POJK.05/2018 dated December 27, 2018 concerning the Operation of Finance Company Business, is as follows:

Dalam Rp Juta | In Rp Million

Uraian	31 Desember 2023 December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	Description
Pinjaman	4.486.490	3.750.751	3.487.813	Borrowing
Ekuitas	1.695.922	1.515.032	1.345.389	Equity
Utang subordinasi	174.074	174.074	174.074	Subordinated Loan
Gearing ratio (x)	2,40 kali lipat | times	2,22 kali lipat | times	2,30 kali lipat | times	Gearing Ratio

Gearing ratio Perseroan pada tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 2,40 kali lipat dan 2,22 kali lipat telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 35/POJK.05/2018 yang memperbolehkan *gearing ratio* maksimal sebesar 10 kali lipat dan serendah-rendahnya 0 kali lipat.

The Company's gearing ratio in 2023 and 2022 were 2.40 times and 2.22 times, respectively, in accordance with the provisions of POJK No. 35/POJK.05/2018 which allows a maximum gearing ratio of 10 times and as low as 0 times.

Kebijakan Atas Struktur Modal

Perseroan mengelola struktur modal dengan tujuan untuk memastikan rasio permodalan yang sehat dalam mendukung pertumbuhan usaha berkelanjutan dan memberikan imbal hasil yang optimal bagi para pemegang saham. Kebijakan permodalan dilakukan dengan memerhatikan perkembangan makro ekonomi, industri pembiayaan dan mengacu pada rencana bisnis.

Capital Structure Policy

The Company manages its capital structure with the aim of ensuring a robust capital ratio in supporting sustainable business growth and providing optimal returns for shareholders. Capital policy is carried out by paying attention to macroeconomic developments, financing industry and referring to business plans.

Selain itu, kebijakan struktur permodalan Perseroan mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan untuk menyisihkan dan mempertahankan suatu dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan sampai dana cadangan tersebut mencapai 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh.

In addition, the Company's capital structure policy refers to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which requires to set aside and maintain a reserve fund that may not be distributed until the reserve fund reaches 20% of the issued share capital and is paid in full.

Perseroan terus berupaya menambah cadangan ini sampai mencapai jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan

The Company continues to increase these reserves until it reaches the amount that has been determined in accordance with applicable regulations. In maintaining and adjusting the capital structure, the Company may adjust dividend payments to shareholders, issue new shares or seek funding through bank loan schemes or

pendanaan melalui skema pinjaman perbankan maupun penerbitan obligasi. Dalam hal ini, Perseroan memastikan tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama tahun berjalan.

Kebijakan permodalan Perseroan dilakukan dengan mempertahankan struktur yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar. Dalam mengelola permodalan, Perseroan melakukan analisis secara bulanan untuk memastikan sesuai dengan POJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

1. Ekuitas Perusahaan minimum sebesar Rp100 miliar;
2. Rasio ekuitas Perusahaan terhadap modal disetor paling rendah sebesar 50%;
3. Rasio permodalan Perusahaan minimum sebesar 10%; dan
4. Jumlah pinjaman yang dimiliki Perusahaan dibandingkan modal sendiri dan utang subordinasi dikurangi penyertaan *(gearing ratio)* ditetapkan serendah-rendahnya 0 (nol) dan setinggi-tingginya 10 kali, baik untuk pinjaman luar negeri maupun dalam negeri.

IKATAN MATERIAL UNTUK PEROLEHAN BARANG MODAL

Perseroan tidak melakukan ikatan material untuk perolehan barang modal di tahun buku 2023.

INVESTASI BARANG MODAL YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN BUKU 2023

Perseroan melakukan investasi barang modal untuk mendukung kelancaran aktivitas operasional dan bisnis. Sumber dana yang digunakan untuk melakukan investasi barang modal berasal dari modal milik perusahaan dan transaksinya berdenominasi Rupiah. Investasi barang modal yang dilakukan Perseroan pada tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

bond issuance. In this case, the Company ensures that there are no changes to objectives, policies or processes during the current year.

The Company's capital policy is carried out by maintaining a sound structure to secure access to funding at a reasonable cost. In managing capital, the Company conducts monthly analysis to ensure compliance with POJK No. 35/POJK.05/2018 dated December 27, 2018 concerning the Operation of Financing Company Business which regulates the following provisions:

1. Minimum equity of Rp100 billion;
2. Equity to paid-up capital ratio at the lowest of 50%;
3. Capital ratio at a minimum of 10%; and
4. Total loans of the Company compared to its capital and gearing ratio is set as low as 0 (zero) and as high as 10 times, both for foreign and domestic loans.

MATERIAL COMMITMENTS FOR THE CAPITAL GOODS ACQUISITION

The Company did not execute a material commitment for the acquisition of capital goods in the 2023 fiscal year.

CAPITAL GOODS INVESTMENT REALIZED IN FISCAL YEAR 2023

The Company invests in capital goods to support the efficient performance of operational and business activities. The source of funds used to invest capital goods derives from the company's capital and transactions are denominated in Rupiah. The capital goods investments made by the Company in the 2023 fiscal year are as follows:

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Dalam Rp Juta | In Rp Million

Uraian	2023	2022	2021	Description
Renovasi kantor	13.210	10.010	8.797	Leaseholds improvement
Kendaraan	8.171	11.566	4.162	Vehicles
Peralatan kantor	26.867	6.720	16.228	Office equipment
Perabot kantor	1.701	717	430	Office furniture and fixtures
Jumlah	**49.949**	**29.013**	**29.617**	**Total**

Investasi barang modal di tahun 2023 sebesar Rp49,95 miliar, meningkat sebesar 72,16% dari tahun 2022 sebesar Rp29,01 miliar. Kenaikan ini terutama karena bertambahnya investasi untuk pembelian peralatan kantor.

Capital goods investment was Rp49.95 billion in 2023, an increased by 72.16% from Rp29.01 billion in 2022. This increase was mainly due to increased investment for the purchase of office equipment.

TARGET DAN REALISASI TAHUN 2023

Perseroan menargetkan pencapaian kinerja di tahun 2023 lebih tinggi dari tahun sebelumnya sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disusun. Target dan realisasi sepanjang tahun 2023 sebagai berikut:

TARGET AND REALIZATION IN 2023

In accordance with the Company's Work Plan and Budget (RKAP), performance achievement in 2023 is projected to be higher than in the previous year. The following are the targets and realizations for 2023:

Dalam Rp Juta | In Rp Million

Uraian	Target Target	Realisasi Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Description
Aset	6.082.162	6.635.715	109,10%	Assets
Ekuitas	1.635.760	1.695.922	103,68%	Equity
Pendapatan	1.960.412	1.995.410	101,79%	Revenues
Laba Tahun Berjalan	230.755	236.407	102,45%	Income for the Year

Dari tabel di atas, Perseroan secara umum berhasil mencapai kinerja sesuai target. Kesolidan internal dan berlanjutnya transformasi digital merupakan kunci utama dalam pencapaian kinerja Perseroan pada tahun buku 2023.

From the table above, the Company generally managed to achieve performance on target. Internal solidity and continued digital transformation are the main keys in achieving the Company's performance in the 2023 fiscal year.

TARGET KINERJA TAHUN 2024

Dalam menyusun target kinerja pada tahun 2024, Perseroan telah melakukan analisis keunggulan, kelemahan, tantangan, dan peluang. Makro ekonomi diprediksi akan tetap tumbuh positif dan didukung dengan daya beli konsumen dan investasi yang terjaga. Permintaan pasar terhadap sepeda motor akan stabil bahkan cenderung meningkat.

2024 PERFORMANCE TARGETS

The Company undertook an analysis of advantages, weaknesses, challenges, and opportunities in preparing performance targets for 2024. Macroeconomic growth is expected to remain solid, driven by continued consumer spending power and investment. Motorcycle market demand will be consistent, if not increasing.

Perseroan akan mengoptimalisasi peluang pertumbuhan usaha dengan tetap melanjutkan sentralisasi kredit dan transformasi digital untuk mendukung proses bisnis yang efisien dan menghadirkan layanan prima kepada konsumen. Berikut target Perseroan pada tahun 2024:

The Company will optimize business growth opportunities while continuing credit centralization and digital transformation to support efficient business processes and provide excellent service to consumers. Here are the Company's targets in 2024:

Dalam Rp Juta | In Rp Million

Uraian	Realisasi 2023 Realization in 2023	Target 2024 Target 2024	Description
Aset	6.635.715	7.418.050	Assets
Ekuitas	1.695.922	1.856.941	Equity
Pendapatan	1.995.410	2.242.857	Revenues
Laba Tahun Berjalan	236.407	245.693	Income for the Year

DIVIDEN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN

Pembagian dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai suatu liabilitas dalam laporan keuangan pada periode ketika dividen tersebut diumumkan dan disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan.

Kebijakan Dividen

Kebijakan pembagian dividen Perseroan didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia dan disetujui oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham, atas rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Direksi.

Rapat Umum Pemegang Saham sebagai mekanisme pengambilan keputusan tertinggi di Perseroan memiliki hak untuk memutuskan hasil dari penggunaan laba bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan, yang hanya akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan memiliki saldo laba positif.

Namun jika diperlukan Perseroan dapat memutuskan untuk tidak mendistribusikan dividen. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 30 Maret 2023, Perseroan menetapkan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2022 sebesar Rp59.280.751.663 atau 30% dari Laba Bersih Perseroan kepada para pemegang saham. Dividen Perseroan dalam lima tahun buku terakhir (2018-2022) adalah sebagai berikut:

DIVIDENDS AND DIVIDEND POLICY

The distribution of dividends to the Company's shareholders is recognized as a liability in the financial statements in the period when the dividend is announced and approved by the Company's shareholders.

Dividend Policy

The Company's dividend distribution policy is based on the prevailing regulations in Indonesia and approved by the shareholders through the General Meeting of Shareholders, on the recommendation of the Board of Commissioners and Board of Directors.

General Shareholders as the highest decision-making mechanism in the Company have the right to decide the result of the use of net profit after deducting the allowance for reserve funds, which will only be distributed to shareholders in the form of dividends if the Company has a positive profit balance.

However, if necessary, the Company may decide not to distribute dividends. In the Annual General Meeting of Shareholders held on March 30, 2023, the Company determined the distribution of cash dividends for the 2022 financial year of Rp59,280,751,663 or 30% of the Company's Net Profit to shareholders. The Company's dividends in the last five fiscal years (2018-2022) are as follows:

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Tahun Buku Financial Year	Dividen Tunai Cash Dividend	Laba Bersih (Rp) Net Profit (Rp)	Rasio Pembayaran Dividen Dividend Payout Ratio	Dividen per lembar saham (Rp) Dividend per share (Rp)	Tanggal Pembayaran Payment Date
2018	Membagikan dividen Distribute dividends	215.182.342.933	30%	18,5	12 April 2019 April 12, 2019
2019	Membagikan dividen Distribute dividends	259.671.309.984	30%	22,4	12 Maret 2020 March 12, 2020
2020	Tidak membagikan dividen No dividends	57.378.437.576	-	-	-
2021	Membagikan dividen Distribute dividends	110.062.021.746	30%	9,5	27 April 2022 April 27, 2022
2022	Membagikan dividen Distribute dividends	197.602.505.544	30%	17,0	3 Mei 2023 May 3, 2023

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 Seri A dan Seri B dengan nilai sebesar Rp1 triliun untuk memperkuat struktur permodalan. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang jatuh tempo di tahun 2023 dan jatuh tempo setelah tahun 2023 (*outstanding*) sebagai berikut:

REALIZATION OF THE USE OF PROCEEDS FROM THE PUBLIC OFFERING

To strengthen its capital structure, the Company issued Shelf-Registration Bonds IV Phase III Year 2023 Series A and Series B with a value of Rp1 trillion. The realization of the use of proceeds from the public offering maturing in 2023 and maturing after 2023 (outstanding) is as follows:

Jenis Penawaran Umum Types of Public Offerings	Tanggal Efektif Effective Date	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Realisasi Hasil Penawaran Realization of Offer Results		Realisasi Penggunaan Dana Realization of the Use of Funds			Sisa Dana Balance of Funds
			Jumlah penawaran umum Total public offerings	Hasil bersih Net yield	Modal kerja Working capital	Deposito Deposits	Total	
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I WOM Finance Tahun 2021 WOM Finance Shelf-Registration Bond IV Phase I of Year 2021	16 Juli 2021 July 16, 2021	28 Juli 2024 July 28, 2024	500.000.000.000	496.518.680.640	496.518.680.640	-	-	-
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II WOM Finance Tahun 2022 WOM Finance Shelf-Registration Bond IV Phase II Year 2022	16 Juli 2021 July 16, 2021	08 April 2025 April 8, 2025	800.000.000.000	797.586.600.638	797.586.600.638	-	-	-
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III WOM Finance Tahun 2023 WOM Finance Shelf-Registration Bond IV Phase III of Year 2023	16 Juli 2021 July 16, 2021	11 April 2026 April 11, 2026	1.000.000.000.000	997.202.428.321	997.202.428.321	-	-	-

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/ PELEBURAN USAHA, AKUISISI ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/ MODAL

Sepanjang tahun 2023, Perseroan tidak melakukan tambahan kegiatan investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi atau restrukturisasi utang yang material.

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTITURE, MERGER/ CONSOLIDATION, ACQUISITION OR RESTRUCTURING DEBT/CAPITAL

Throughout 2023, the Company did not carry out any additional investment, expansion, divestment, acquisition or debt restructuring activities.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Sepanjang tahun 2023, Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan manajemen.

EMPLOYEE AND MANAGEMENT SHAREHOLDING PROGRAM (ESOP/MSOP)

Throughout 2023, the Company did not have a share ownership program for employees and management.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN, DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Per tanggal 31 Desember 2023 tidak ada transaksi material yang mengandung benturan kepentingan yang dilakukan oleh Perseroan. Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Rincian transaksi dengan pihak-pihak berelasi dan sifat hubungan adalah sebagai berikut:

MATERIAL TRANSACTION INFORMATION CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND RELATED PARTIES

As of December 31, 2023. there were no material transactions containing conflict of interest transaction conducted by the Company. In the normal course of business, the Company conducts transactions with related parties.

The details of the related parties transactions and the nature of the relationship are as follow:

No	Transaksi Transaction	Nama Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Kewajaran Transaksi Transactions Fairness	Alasan Dilakukan Transaksi Reasons	Kebijakan Perusahaan Terkait Mekanisme Transaksi Company Policy on Transaction Mechanism	Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait Fulfilment of Related Rules and Regulations
1	Rekening giro, utang obligasi, perjanjian kerjasama pembiayaan, utang subordinasi, pendapatan bunga dan beban pendanaan Current accounts, bonds payable, joint financing, subordinated loan, interest income and financing cost	PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BMI)	Pemegang Saham Pengendali The majority shareholder of the Company	Secara praktik bisnis, transaksi ini bersifat wajar. In business practice, these transactions are reasonable.	Menunjang kegiatan usaha Perseroan Supporting the Company's business activities	Perseroan memiliki kebijakan internal mengenai transaksi afiliasi yaitu pada SK Pedoman Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan, dan Transaksi Material No. 227/SK/OPP/11-12 Versi 02 tanggal 08 Desember 2022. The Company has an internal policy regarding affiliate transactions, namely SK Guidelines for Affiliate Transactions, Conflict of Interest Transactions and Transaction Materials No. 227/SK/OPP/11-12 Version 02 dated December 08, 2022.	Perseroan telah mencantumkan transaksi afiliasi dengan BMI pada prospektus aksi korporasi Perseroan dan Laporan Keuangan triwulanan dan tahunan Perseroan. The Company has listed affiliated transactions with BMI in the prospectus of the Company's corporate action and its quarterly and annual Financial Statements.
2	Fasilitas pembiayaan atas pembelian kendaraan bermotor Financing facilities-vehicles	PT Maybank Indonesia Finance Tbk (MIF)	Hubungan afiliasi dengan Perseroan Under affiliation with the Company	Secara praktik bisnis, transaksi ini bersifat wajar. In business practice, these transactions are reasonable.	Menunjang kegiatan usaha Perseroan Supporting the Company's business activities	Perseroan memiliki kebijakan internal mengenai transaksi afiliasi yaitu pada SK Pedoman Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan, dan Transaksi Material No. 227/SK/OPP/11-12 Versi 02 tanggal 08 Desember 2022. The Company has an internal policy regarding affiliate transactions, namely SK Guidelines for Affiliate Transactions, Conflict of Interest Transactions and Transaction Materials No. 227/SK/OPP/11-12 Version 02 dated December 08, 2022.	Perseroan telah mencantumkan transaksi afiliasi dengan MIF pada prospektus aksi korporasi Perseroan dan Laporan Keuangan triwulanan dan tahunan Perseroan. The Company has listed affiliated transactions with MIF in the prospectus of the Company's corporate action and its quarterly and annual Financial Statements.
3	Utang dealer, sewa gedung, dan beban pendanaan Dealers' payables, building leases, and Financing cost	PT Wahanaartha Ritelindo (WARI)	Salah satu anggota Dewan Komisaris WARI merupakan salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan One member of the WARI Board of Commissioners is a member of the Company's Board of Commissioners	Secara praktik bisnis, transaksi ini bersifat wajar. In business practice, these transactions are reasonable.	Menunjang kegiatan usaha Perseroan Supporting the Company's business activities	Perseroan memiliki kebijakan internal mengenai transaksi afiliasi yaitu pada SK Pedoman Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan, dan Transaksi Material No. 227/SK/OPP/11-12 Versi 02 tanggal 08 Desember 2022. The Company has an internal policy regarding affiliate transactions, namely SK Guidelines for Affiliate Transactions, Conflict of Interest Transactions and Transaction Materials No. 227/SK/OPP/11-12 Version 02 dated December 08, 2022.	Perseroan telah mencantumkan WARI sebagai pihak berelasi dalam Laporan Keuangan triwulanan dan tahunan Perseroan. The Company has listed WARI as a related party in the Company's quarterly and annual Financial Statements.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

No	Transaksi Transaction	Nama Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Kewajaran Transaksi Transactions Fairness	Alasan Dilakukan Transaksi Reasons	Kebijakan Perusahaan Terkait Mekanisme Transaksi Company Policy on Transaction Mechanism	Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait Fulfilment of Related Rules and Regulations
4	Premi atas penutupan asuransi kecelakaan diri Debitur *(personal accident)* Premium for closing the Debtor's personal accident insurance (personal accident)	PT Asuransi Etiqa International Indonesia (Etiqa)	Hubungan afiliasi dengan Perseroan Under affiliation with the Company	Secara praktik bisnis, transaksi ini bersifat wajar. In business practice, these transactions are reasonable.	Menunjang kegiatan usaha Perseroan Supporting the Company's business activities	Perseroan memiliki kebijakan internal mengenai transaksi afiliasi yaitu pada SK Pedoman Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan, dan Transaksi Material No. 227/SK/OPP/11-12 Versi 02 tanggal 08 Desember 2022. The Company has an internal policy regarding affiliate transactions, namely SK Guidelines for Affiliate Transactions, Conflict of Interest Transactions and Transaction Materials No. 227/SK/OPP/11-12 Version 02 dated December 08, 2022.	Perseroan telah mencantumkan transaksi afiliasi dengan Etiga pada prospektus aksi korporasi Perseroan dan Laporan Keuangan triwulanan dan tahunan Perseroan. The Company has listed affiliated transactions with Etiga in the prospectus of the Company's corporate action and its quarterly and annual Financial Statements.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TAHUN 2023

Selama tahun 2023, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan dan/atau peraturan baru diterbitkan oleh regulator yang berpengaruh terhadap Perseroan, yaitu:

CHANGES IN REGULATIONS IN 2023

During 2023, there were a number of laws and regulations that have undergone changes and/or new regulations issued by regulators that affect the Company, as follows:

A. Undang-Undang | Laws

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU No. 4 Tahun 2023")	12 Januari 2023	A. Ruang Lingkup UU No. 4 Tahun 2023 ini mengatur ekosistem keuangan meliputi: 1. Kelembagaan; 2. Perbankan; 3. Pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing; 4. Perasuransian dan penjaminan; 5. Asuransi usaha bersama; 6. Program penjaminan polis; 7. Usaha jasa pembiayaan; 8. Kegiatan usaha bulion *(bullion);* 9. Dana pensiun, program jaminan hari tua, dan program pensiun; 10. Kegiatan operasi di sektor jasa keuangan; 11. Lembaga keuangan mikro; 12. Konglomerasi keuangan; 13. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK); 14. Penerapan keuangan berkelanjutan; 15. Literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen; 16. Akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah; 17. Sumber daya manusia; 18. Stabilitas sistem keuangan; 19. Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; dan 20. Penegakan hukum di sektor keuangan.	Perseroan tunduk dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berdampak pada Perseroan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2023 ini dengan cara diantaranya memperhatikan ketentuan undang-undang ini dalam rangka penerbitan dan/atau penyusunan kebijakan internal Perseroan.

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		B. Pasar Modal Dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan melalui penataan di sektor Pasar Modal, UU No. 4 Tahun 2023 ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, antara lain: 1. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. 2. Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, pernyataan efektifnya pernyataan pendaftaran, dan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib menjalankan kegiatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menerapkan tata kelola yang baik, standar profesi, dan/atau kode etik. 3. Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, pernyataan efektifnya pernyataan pendaftaran, dan surat tanda terdaftar dari OJK bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, pemegang saham pengendali, karyawan, dan Pihak lain yang bekerja untuk Pihak tersebut. 4. OJK dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham secara proporsional, yang dilakukan apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menerbitkan saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham Emiten atau Perusahaan Publik. 5. OJK dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila Emiten atau Perusahaan Publik melakukan transaksi dimana kepentingan ekonomis Emiten atau Perusahaan Publik berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik. 6. OJK dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperoleh persetujuan pemegang saham dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tersebut melakukan transaksi material, perubahan kegiatan usaha, transaksi Afiliasi, penggabungan, pemisahan, peleburan, pengurangan modal, atau pembelian kembali saham. 7. Direktur, komisaris Emiten, atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada OJK tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja terhitung sejak terjadinya kepemilikan hak suara atas saham Emiten atau Perusahaan Publik atau perubahan kepemilikan hak suara atas saham Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud. 8. OJK dapat menentukan persyaratan jangka waktu penyampaian laporan sebagaimana angka 6 di atas lebih cepat dari 5 (lima) hari kerja terhitung sejak terjadinya: a) kepemilikan hak suara atas saham Emiten atau Perusahaan Publik; atau b) perubahan kepemilikan hak suara atas saham Emiten atau Perusahaan Publik. 9. Dalam kegiatan perdagangan Efek atau pengelolaan investasi, setiap Pihak dilarang dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung:	

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company

a) Mengelabui dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan/atau cara apapun sehingga Pihak lain terpengaruh untuk:
(1) membeli Efek;
(2) menjual Efek;
(3) menahan Efek; dan/atau
(4) menggunakan jasanya untuk mengelola investasi dengan menyerahkan dana dan/atau Efek untuk dikelola,
dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau Pihak lain; dan/atau

b) Membuat pernyataan tidak benar mengenai Informasi atau Fakta Material atau tidak mengungkapkan fakta yang material dengan maksud:
(1) menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain;
(2) memengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek; dan/atau
(3) memengaruhi Pihak lain untuk menggunakan jasanya guna mengelola investasi, dengan menyerahkan dana dan/atau Efek untuk dikelola.

10. Setiap Pihak dilarang, dengan cara apapun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:
a) Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut tidak benar atau menyesatkan; dan/atau
b) Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran dari pernyataan atau keterangan tersebut.

C. Usaha Jasa Pembiayaan
1. Ruang lingkup Usaha Jasa Pembiayaan meliputi:
a) Kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan;
b) Kegiatan pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pada pasangan usaha atau debitur yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura;
c) Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan infrastruktur;
d) Kegiatan menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet, yang dilakukan oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
e) Kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak yang dilakukan oleh perusahaan pegadaian; dan
f) Skema kegiatan pembiayaan lain yang diatur oleh OJK.
2. Ruang lingkup usaha sebagaimana dimaksud angka 1 huruf ini dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		3. Bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan adalah Perseroan Terbuka dan Koperasi yang hanya dapat dimiliki oleh: a) Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) Pemerintah Daerah; c) Warga negara Indonesia; d) Badan hukum Indonesia; e) Badan hukum asing, yang hanya dapat dilakukan dalam bentuk kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Warga Negara Indonesia, dan/atau badan hukum Indonesia. f) Warga negara asing, yang kepemilikannya hanya dapat dilakukan melalui transaksi di Pasar Modal. 4. Anggota direksi, anggota dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali (PSP), anggota pengurus, anggota pengawas, atau pengelola dari penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh OJK. 5. Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat anggota atas rekomendasi lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 6. Anggota direksi, anggota dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, anggota pengurus, anggota pengawas, atau pengelola dari penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh OJK. 7. Sumber dana penyertaan bagi penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan ditetapkan berdasarkan ruang lingkup Usaha Jasa Pembiayaan. Sumber dana penyertaan dilarang: a) berasal dari pinjaman; dan b) berasal dari dan untuk tujuan kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain. 8. Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana angka 1 huruf ini, wajib memperoleh izin usaha sebagai penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dari OJK, kecuali apabila diatur dengan undang-undang tersendiri. 9. Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dapat melakukan pembukaan kantor cabang yang wajib dilaporkan kepada OJK. 10. Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional dapat melakukan konversi menjadi penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. 11. Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dapat mendirikan unit usaha syariah. 12. Konversi dan pendirian unit usaha syariah sebagaimana angka 10 dan 11 huruf ini wajib memperoleh izin dari OJK. 13. Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan yang memiliki unit usaha syariah wajib melakukan pemisahan unit usaha syariah apabila memenuhi kriteria tertentu.	

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Peraturan Rules	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary Rules	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
		14. Perjanjian Usaha Jasa Pembiayaan wajib: a) Dituangkan dalam perjanjian tertulis; b) Memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dilarang: a) Menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan, deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan penghimpunan dana masyarakat; b) Memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain; dan c) Menerbitkan surat sanggup bayar *(promissory note)* kecuali sebagai jaminan atas utang kepada krediturnya. 16. Anggota dewan komisaris, anggota pengawas, anggota direksi, anggota pengurus, pengelola, pegawai, dan/atau pihak terafiliasi penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dilarang: a) membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan/atau tanpa didukung dengan dokumen yang sah; b) menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan; dan c) mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, dan/atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, dan dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha. 17. Anggota dewan komisaris, anggota pengawas, anggota direksi, anggota pengurus, pengelola, pegawai, dan/atau pihak terafiliasi penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dilarang: a) meminta atau menerima suatu imbalan di luar biaya resmi, berupa uang atau barang untuk keuntungan pribadi atau keluarganya; b) menjadikan orang lain mendapatkan uang muka atau fasilitas Pembiayaan dari Usaha Jasa Pembiayaan; c) memberikan atau menyebabkan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas Pembiayaan pada Usaha Jasa Pembiayaan; d) tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Usaha Jasa Pembiayaan terhadap ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2023 ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Usaha Jasa Pembiayaan; dan e) memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada OJK secara tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan. 18. Pemegang saham dan/atau pihak terafiliasi Usaha Jasa Pembiayaan dilarang menyuruh anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota pengawas, anggota pengurus, pengelola, pegawai Usaha Jasa Pembiayaan, dan/atau pihak terafiliasi lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Usaha Jasa Pembiayaan tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Usaha Jasa Pembiayaan terhadap ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2023 ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya bagi Usaha Jasa Pembiayaan.	

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		19. Sertifikat jaminan fidusia yang diterima oleh penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan sebagai jaminan dalam rangka pemenuhan kewajiban konsumen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial. 20. Setiap pihak yang menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan atau barang titipan kepada penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dianggap sebagai pemilik. 21. Dalam hal di kemudian hari diduga atau terbukti bahwa kepemilikan atau penguasaan barang jaminan berasal dari kejahatan atau perbuatan melanggar hukum lainnya, penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan tidak dapat dituntut atas tindak pidana yang berhubungan dengan penerimaan barang jaminan atau barang titipan sebagaimana dimaksud pada angka 20 huruf ini. 22. Pembebasan dari tuntutan sebagaimana dimaksud pada angka 21 huruf ini hanya dapat diberikan dalam hal penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan telah melakukan penerapan prinsip mengenal pengguna jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 23. Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan wajib melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 24. Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dengan menerbitkan pedoman penerapan manajemen risiko yang mencakup: a) Pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, pengurus, pengawas, dan pengelola; b) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko; c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan d) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh. 25. Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan wajib memenuhi persyaratan tingkat kesehatan. 26. Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dapat melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan usaha berdasarkan persetujuan OJK. 27. Setiap penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan wajib menjadi anggota salah satu asosiasi yang sesuai dengan usahanya, dan asosiasi penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan tersebut wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari OJK. 28. Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan wajib menggunakan jasa dari profesi penunjang yang telah terdaftar di OJK, yang terdiri atas akuntan publik, penilai publik, dan profesi lain yang ditetapkan oleh OJK. 29. Dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan, penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan wajib menyampaikan laporan bulanan, laporan keuangan tahunan dan/atau laporan lain secara benar kepada OJK.	

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Peraturan Rules	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary Rules	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
		D. Penerapan Keuangan Berkelanjutan 1. Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK), Emiten, dan Perusahaan Publik menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usahanya dengan melakukan: a) Praktik bisnis dan strategi investasi yang mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola; dan b) Pengembangan produk, transaksi, dan jasa pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi. 2. PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik harus membangun kapasitas dalam rangka menerapkan Keuangan Berkelanjutan. 3. PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik menyusun laporan keberlanjutan sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan. E. Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Pelindungan Konsumen 1. PUSK wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan pada Konsumen dan Masyarakat. 2. Dalam rangka peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan, pemerintah membentuk komite nasional yang mengkoordinasikan peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. 3. PUSK dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip Pelindungan Konsumen. 4. Pelindungan Konsumen di sektor keuangan menerapkan prinsip: a) Edukasi yang memadai; b) Keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan; c) Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab; d) Pelindungan aset, privasi, dan data Konsumen; e) Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien; f) Penegakan kepatuhan; dan g) Persaingan yang sehat. 5. Pelindungan Konsumen di sektor keuangan diselenggarakan dengan tujuan: a) Menciptakan ekosistem Pelindungan Konsumen yang mewujudkan kepastian hukum serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien; b) Menumbuhkan kesadaran PUSK mengenai perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlakuan yang adil; memberikan pelindungan aset, privasi, dan data Konsumen; serta meningkatkan kualitas produk dan/atau layanan PUSK; dan c) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian Konsumen mengenai produk dan/atau layanan PUSK serta meningkatkan pemberdayaan Konsumen. 6. PUSK merupakan pihak yang menyelenggarakan Pelindungan Konsumen di sektor keuangan yang menyelenggarakan usaha baik di luar jaringan maupun dalam jaringan.	

Peraturan Rules	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary Rules	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
		7. Objek dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen di sektor keuangan meliputi perilaku PUSK dalam: a) Melakukan perancangan, menyusun dan menyampaikan informasi, dan melakukan penawaran atas produk dan/atau layanan di sektor keuangan; b) Membuat perjanjian dan memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan/atau layanan di sektor keuangan; dan c) Melakukan penanganan pengaduan. 8. Dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen di sektor keuangan, konsumen memiliki hak dan kewajiban. 9. Dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen di sektor keuangan, PUSK memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi. 10. Dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen di sektor jasa keuangan, PUSK dilarang: a) Memberikan produk dan/atau layanan yang tidak sesuai dengan informasi yang dinyatakan dalam keterangan, iklan, dan/atau promosi penjualan produk dan/atau layanan tersebut; b) Memberikan produk dan/atau layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; c) Menyediakan informasi, dokumen, dan/atau perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d) Melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku di masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau psikis terhadap konsumen dalam melaksanakan kegiatan usaha; e) Menjual atau menawarkan produk dan/atau layanan yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) Melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen; dan g) Mengenakan biaya kepada Konsumen atas layanan pengaduan. 11. PUSK memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen yang berbentuk perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis dapat berbentuk perjanjian baku yang memuat klausul baku, kecuali yang dilarang berdasarkan UU No. 4 Tahun 2023 ini. 12. PUSK wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip dasar pemrosesan pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi. 13. Dalam hal PUSK bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelola data dan/atau informasi konsumen, PUSK wajib memastikan pihak lain tersebut menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen. 14. Dalam penggunaan data dan/atau informasi konsumen, PUSK dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi konsumen dengan pihak lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi dan peraturan perundang-undangan lain yang ditetapkan oleh otoritas sektor keuangan.	

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Peraturan Rules	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary Rules	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
		15. Pertukaran data dan/atau informasi konsumen di sektor keuangan dapat dilakukan dalam hal: a) Konsumen memberikan persetujuan secara tertulis; dan/atau b) Terdapat kewajiban bagi PUSK untuk memberikan data dan/atau informasi konsumen di sektor keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, PUSK wajib memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keamanan sistem informasi dan ketahanan siber, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang ditetapkan oleh otoritas sektor keuangan. 17. PUSK wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen. 18. Dalam hal terdapat gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan merupakan tanggung jawab PUSK.	
1. Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector ("Law No. 4 of 2023")	January 12, 2023	A. The scope of Law No. 4 of 2023 regulates the financial ecosystem including: 1. Institutional; 2. Banking; 3. Capital market, money market, and foreign exchange market; 4. Insurance and assurance; 5. Joint venture insurance; 6. Policy guarantees program; 7. Financing service business; 8. Bullion business activities; 9. Pension funds, old-age security programs, and pension plans; 10. Operating activities in the financial services sector; 11. Microfinance institutions; 12. Financial conglomerates; 13. Financial Sector Technology Innovation (ITSK); 14. Application of sustainable finance; 15. Access to financing for micro, small and medium enterprises; 16. Micro, small, and secondary venture financing access; 17. Human resources; 18. Financial system stability; 19. Indonesian export financing institutions; and 20. Law enforcement in the financial sector. B. Capital Market In order to develop and strengthen the financial sector through structuring in the Capital Market sector, Law No. 4 of 2023 amends, deletes, and/or stipulates new regulations for several provisions regulated in Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market, including: 1. Parties are individuals, legal entities, companies, joint ventures, associations, or organized groups. 2. Parties who obtain permits, approvals, effective statements of registration, and registered certificates from the Financial Services Authority (OJK) must carry out their activities based on laws and regulations and apply good governance, professional standards, and/or codes of ethics.	The Company complies with and pays attention to the provisions that have an impact on the Company as stipulated in Law No. 4 of 2023 by, among others, paying attention to the provisions of this law in the context of issuing and/or formulating the Company's internal policies.

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		3. The Party that obtains permission, approval, effective statement of registration, and registered certificate from OJK is responsible for all activities carried out by members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholders, controlling shareholders, employees, and other parties working for that Party. 4. OJK may require Issuers or Public Companies to provide preemptive rights to each shareholder proportionally, which is done if the Issuer or Public Company issues shares or securities that can be exchanged for shares of Issuers or Public Company. 5. OJK may require the Issuer or Public Company to obtain the approval of the majority of independent shareholders if the Issuer or Public Company conducts transactions where the economic interests of the Issuer or Public Company conflict with the personal economic interests of the directors, commissioners, or major shareholders of the Issuer or Public Company. 6. OJK may require the Issuer or Public Company to obtain shareholder approval in the event that the Issuer or Public Company conducts material transactions, changes in business activities, Affiliate transactions, mergers, spin off, consolidation, reduction of capital, or share buyback. 7. Directors, commissioners of the Issuer, or Public Company must report to OJK no later than 5 (five) working days from the occurrence of ownership of voting rights on the shares of the Issuer or Public Company or change in ownership of voting rights over the shares of the Issuer or Public Company. 8. OJK can determine the requirements for the period of submission of reports as number 6 above faster than 5 (five) working days from the occurrence of: a) ownership of voting rights over shares of the Issuer or Public Company; or b) change of ownership of voting rights over shares of the Issuer or Public Company. 9. In the course of Securities trading or investment management, any Party is prohibited from knowingly directly or indirectly: a) Deceive by using false names, false dignity, deception, series of lies, and/or any means so that the other Party is influenced to: (1) buying Securities; (2) selling Securities; (3) withhold Securities; and/or (4) use its services to manage investments by handing over funds and/or Securities to be managed, with the intention of benefiting oneself or others; and/or b) Make false statements regarding Material Information or Facts or fail to disclose material facts with the intent of: (1) benefit or avoid harm to yourself or others; (2) influence the other Party to buy, sell or hold Securities; and/or (3) influence other parties to use their services to manage investments, by handing over funds and/or securities to manage.	

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company

10. Each Party shall not, in any way, make a statements or provide information that is not true or misleading thereby affecting the price of Securities if at the time the statement is made or information is given:
    a) The party concerned knew or should have known that such statements or statements were false or misleading; and/or
    b) The party concerned is not careful enough in determining the truth of the statement or information.

C. Financing Services Business
1. The scope of the Financing Services Business includes:
    a) Financing activities for goods and/or services to the community carried out by finance companies;
    b) Financing activities through capital participation and/or financing for a certain period of time in the context of business development in business partners or debtors carried out by venture capital companies;
    c) Financing activities in the form of providing funds for infrastructure projects carried out by infrastructure finance companies;
    d) Activities to provide, manage, and operate the implementation of financial services to bring together funders and recipients of funds in conducting funding both conventionally and based on sharia principles directly through electronic systems using the internet, carried out by Information Technology-Based Joint Funding Service Providers;
    e) Business activities of providing loans with movable property guarantees carried out by pawnshop companies; and
    f) Other financing activity schemes regulated by OJK.
2. The scope of business as referred to in number 1 of this letter can be carried out based on sharia principles.
3. The form of legal entity providing the Financing Services Business is a Public Company and Cooperative which can only be owned by:
    a) Unitary State of the Republic of Indonesia;
    b) Local Government;
    c) Indonesian citizen;
    d) Indonesian legal entity;
    e) Foreign legal entity, which can only be done in partnership with the Government, Local Government, Indonesian Citizen, and/or Indonesian legal entity.
    f) Foreign citizen, whose ownership can only be done through transactions in the Capital Market.
4. Members of the board of directors, members of the board of commissioners, Sharia Supervisory Board, Controlling Shareholder (PSP), management members, supervisory members, or managers of Financing Service Business providers must meet the requirements set by OJK.
5. Financing Service Business Providers who carry out Financing Service Business activities based on sharia principles must have a Sharia Supervisory Board appointed at the General Meeting of Shareholders (GMS) or member meeting on the recommendation of institutions that have the authority to determine fatwas in the field of sharia.

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		6. Members of the board of directors, members of the board of commissioners, Sharia Supervisory Board, PSP, members of the management, supervisory members, or managers of the Financing Service Business operators must first meet the capability and appropriateness assessment requirements set by the OJK. 7. The source of participation funds for Financing Service Business providers is determined based on the scope of the Financing Service Business. Sources of participation funds are prohibited: a) derived from loans; and b) originating from and for the purpose of money laundering, terrorism financing, and other financial crimes. 8. Every person who carries out business activities as per as is number 1 of this letter, must obtain a business license as a Financing Service Business operator from OJK, unless regulated by a separate law. 9. Financing Service Business Providers can open branch offices which must be reported to OJK. 10. Financing Service Business Providers who carry out business activities conventionally can convert into Financing Service Business providers that carry out business activities in accordance with sharia principles. 11. Financing Service Business Providers can establish sharia business units. 12. The conversion and establishment of sharia business units as is number 10 and 11 of this letter must obtain permission from OJK. 13. Financing Service Business Providers that have sharia business units are required to separate sharia business units if they meet certain criteria. 14. The Financing Service Business Agreement shall: a) Stated in a written agreement; b) Fulfill the provisions of the preparation of agreements in accordance with the provisions of laws and regulations. 15. Financing Service Business Providers are prohibited: a) Collect funds directly from the public in the form of current accounts, savings, time deposits, and/or other forms that are equated with collecting public funds; b) Provide guarantees in all forms for the fulfillment of the obligations of others; and c) Issue promissory notes except as collateral for debts owed to creditors. 16. Members of the board of commissioners, supervisory members, members of the board of directors, members of the management, managers, employees, and/or affiliated parties of the Financing Service Business are prohibited: a) make false records in books or financial statements and/or without being supported by valid documents; b) omit or do not include correct information in business activity reports and financial statements; and c) change, obscure, hide, delete, and/or eliminate a record in the books or in the financial statements, and in the general documents or reports of business activities.	

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Peraturan Rules	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary Rules	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
		17. Members of the board of commissioners, supervisory members, members of the board of directors, members of the management, managers, employees, and/or affiliated parties of the Financing Service Business are prohibited: a) ask for or accept a reward beyond the official fee, in the form of money or goods for personal or family benefit; b) make other people get down payments or financing facilities from financing service businesses; c) provide or cause approval for other persons to withdraw funds that exceed the Financing limit in the Financing Service Business; d) not carry out the necessary steps to ensure compliance by Financing Services Businesses with the provisions in UU No. 4 of 2023 and other laws and regulations applicable to Financing Service Businesses; and e) provide reports, information, data, and/or documents to OJK in an untrue, false, and/or misleading manner. 18. Shareholders and/or affiliated parties of the Financing Service Business are prohibited from ordering members of the board of directors, members of the board of commissioners, supervisory members, members of the management, managers, employees of the Financing Service Business, and/or other affiliated parties to take or not take actions that result in the Financing Service Business not carrying out the necessary steps to ensure compliance with the provisions in UU No. 4 of 2023 this and other statutory provisions for Financing Service Businesses. 19. The fiduciary guarantee certificate received by the Financing Service Business provider as collateral in the context of fulfilling consumer obligations as referred to in the law regarding fiduciary guarantees has executory power. 20. Any party who submits movable goods as collateral or entrusted goods to the Financing Service Business operator is considered the owner. 21. In the event that in the future it is suspected or proven that the possession or control of collateral originates from crime or other unlawful acts, the operator of the Financing Service Business cannot be prosecuted for criminal acts related to the receipt of collateral or entrusted goods as referred to in number 20 of this letter. 22. Exemption from claims as referred to in number 21 of this letter can only be granted in the event that the Financing Service Business operator has applied the principle of knowing service users based on the provisions of laws and regulations. 23. Financing Service Business Providers are required to implement the principles of good corporate governance. 24. Financing Service Providers are required to implement risk management effectively by issuing risk management implementation guidelines which include: a) Active supervision of the board of directors, board of commissioners, sharia supervisory board, management, supervisors, and managers; b) Adequacy of policies, procedures, and determination of risk limits; c) Adequacy of risk identification, measurement, monitoring, and control processes as well as risk management information systems; and d) Comprehensive internal control system.	

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		25. Financing Service Business Providers are required to meet health level requirements. 26. Financing Service Business Providers can carry out mergers, consolidations, takeovers and spin off base on OJK approval. 27. Every Financing Service Business operator must be a member of one of the associations in accordance with its business, and the Financing Service Business provider association must obtain written approval from OJK. 28. Financing Service Business Providers are required to use the services of supporting professions that have been registered with the OJK, consisting of public accountants, public appraisers, and other professions determined by the OJK. 29. In the framework of supervision carried out by OJK on Financing Service Business operators, Financing Service Business providers are required to submit monthly reports, annual financial statements and/or other reports correctly to OJK. D. Application of Sustainable Finance 1. Financial Sector Enterprises (PUSK), Issuers, and Public Companies implement Sustainable Finance in their business activities by doing: a) Business practices and investment strategies that integrate environmental, social, and governance aspects; and b) Development of products, transactions, and services to finance sustainable activities and transition financing. 2. PUSK, Issuers, and Public Companies must build capacity in order to implement Sustainable Finance. 3. PUSK, Issuers, and Public Companies prepare sustainability reports as part of accountability for the performance of Sustainable Finance implementation. E. Financial Literacy, Financial Inclusion, and Consumer Protection 1. PUSK is obliged to carry out activities in order to improve Financial Literacy and Financial Inclusion among Consumers and the Community. 2. In order to improve Financial Literacy and Financial Inclusion, the government established a national committee that coordinates the improvement of Financial Literacy and Financial Inclusion. 3. PUSK in carrying out its business activities must apply the principles of Consumer Protection. 4. Consumer Protection in the financial sector applies the principles of: a) Adequate education; b) Openness and transparency of product and/or service information; c) Fair treatment and responsible business conduct; d) Protection of Consumer assets, privacy, and data; e) Effective and efficient handling of complaints and dispute resolution; f) Compliance enforcement; and g) Healthy competition.	

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Peraturan Rules	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary Rules	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
		5. Consumer Protection in the financial sector is organized with the aim of: a) Creating a Consumer Protection ecosystem that realizes legal certainty as well as effective and efficient complaint handling and dispute resolution; b) Fostering PUSK awareness regarding responsible business conduct, fair treatment; provide asset protection, privacy, and Consumer data; and improve the quality of PUSK products and/or services; and c) Increase consumer awareness, ability, and independence regarding PUSK products and/or services and increase consumer empowerment. 6. PUSK is a party that organizes Consumer Protection in the financial sector that conducts business both outside the network and within the network. 7. The objects in the implementation of Consumer Protection in the financial sector include PUSK behavior in: a) Designing, compiling and delivering information, and offering products and/or services in the financial sector; b) Make agreements and provide services for the use of products and/or services in the financial sector; and c) Handling complaints. 8. In the implementation of Consumer Protection in the financial sector, consumers have rights and obligations. 9. In the implementation of Consumer Protection in the financial sector, PUSK has rights, obligations, and prohibitions that must be complied with. 10. In the implementation of Consumer Protection in the financial services sector, PUSK is prohibited: a) Provide products and/or services that are not in accordance with the information stated in the description, advertising, and/or sales promotion of these products and/or services; b) Provide products and/or services that are not in accordance with the agreement; c) Provide information, documents, and/or agreements that do not use Indonesian in accordance with the provisions of laws and regulations; d) Commit actions that violate the provisions of laws and regulations or norms applicable in the community that can cause physical and/or psychological disturbances to consumers in carrying out business activities; e) Sell or offer products and/or services that do not have permission in accordance with the provisions of laws and regulations; f) Offer products and/or services to Consumers or the public through personal communication without Consumer consent; and g) Charging fees from consumers for complaint services. 11. PUSK fulfills balance, fairness, and fairness in making agreements with consumers in the form of written agreements. Written agreements can take the form of standard agreements containing standard clauses, except those prohibited under UU No. 4 of 2023. 12. PUSK is obliged to maintain the confidentiality and security of consumer data and/or information carried out by applying the basic principles of processing personal data protection as stipulated in the provisions of laws and regulations regarding personal data protection.	

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		13. In the event that PUSK cooperates with other parties to manage consumer data and/or information, PUSK must ensure that the other party maintains the confidentiality and security of consumer data and/or information. 14. In the use of consumer data and/or information, PUSK may exchange consumer data and/or information with other parties by taking into account the provisions of laws and regulations regarding personal data protection and other laws and regulations stipulated by financial sector authorities. 15. The exchange of consumer data and/or information in the financial sector can be carried out in the following cases: a) The consumer gives consent in writing; and/or b) There is an obligation for PUSK to provide consumer data and/or information in the financial sector based on the provisions of laws and regulations. 16. In carrying out its business activities, PUSK must ensure information system security and cyber resilience in accordance with the provisions of laws and regulations regarding information system security and cyber resilience, and other laws and regulations stipulated by financial sector authorities. 17. PUSK must have and implement a mechanism for handling complaints submitted by consumers. 18. In the event that there is a claim for compensation based on an unlawful act, proving whether or not there is an element of guilt is the responsibility of PUSK.	
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UU No. 6 Tahun 2023")	30 Desember 2022	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ditetapkan menjadi undang-undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UU No. 6 Tahun 2023 ini.	Perseroan tunduk dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berdampak pada Perseroan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023 ini dengan cara diantaranya memperhatikan ketentuan undang-undang ini dalam rangka penerbitan dan/atau penyusunan kebijakan internal Perseroan.
2. Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law ("Law No. 6 of 2023")	December 30, 2022	Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation is enacted into law and attaches it as an integral part of Law No. 6 of 2023.	The Company complies with and pays attention to the provisions that affect the Company as regulated in Law No. 6 of 2023 among other things, by paying attention to the provisions of this law in the context of issuing and/or formulating the Company's internal policies.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

B. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) | Financial Services Authority Regulations (POJK)

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
1. POJK No. 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat	28 Februari 2023	1. POJK ini berlaku untuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang terdiri atas: a) Bank Umum; b) Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat; c) Perantara Pedagang Efek; d) Manajer Investasi; e) Dana Pensiun; f) Perusahaan Asuransi; g) Perusahaan Reasuransi; **h) Perusahaan Pembiayaan;** i) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; j) Perusahaan Modal Ventura; k) Perusahaan Pergadaian Pemerintah; l) Perusahaan Pergadaian Swasta; m) Perusahaan Penjaminan; n) Lembaga Keuangan Mikro; o) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan/atau p) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh OJK, berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. 2. PUJK wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat sebagai program tahunan yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan wajib mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan tersebut. 3. PUJK wajib memiliki pedoman tertulis mengenai kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. 4. Kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan mencakup perencanaan dan pelaksanaan atas: a) Edukasi keuangan; dan/atau b) Pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung literasi keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat. 5. Kegiatan untuk meningkatkan inklusi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat mencakup perencanaan dan pelaksanaan atas: a) Perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada target konsumen; b) Penyediaan produk dan/atau layanan; dan/atau c) Keberlangsungan: - akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan; dan/atau - produk dan/atau layanan, yang telah dimiliki atau disediakan oleh PUJK untuk tetap dapat dimanfaatkan oleh konsumen dan/atau masyarakat. 6. PUJK dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan. 7. Dalam hal kerjasama yang dimaksud dilakukan dengan PUJK lain, PUJK dapat bekerja sama paling banyak 3 (tiga) PUJK lain. Pembatasan kerja sama ini dikecualikan untuk kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah atau otoritas.	Perseroan akan tunduk dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan OJK dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan antara lain: 1. Penyesuaian kebijakan internal Perseroan mengenai literasi dan inklusi keuangan agar sesuai dengan POJK ini. 2. Penyampaian laporan literasi keuangan dan laporan inklusi keuangan kepada OJK mengacu pada ketentuan POJK ini.

Peraturan Rules	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary Rules	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
		8. Dalam hal PUJK melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan bekerja sama dengan lebih dari 3 (tiga) PUJK lain yang tidak diinisiasi oleh pemerintah atau otoritas, kegiatan tersebut tidak diperhitungkan sebagai kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan. 9. Pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan sebagaimana angka 4 di atas dilakukan dengan menghindari: a) Penggunaan merek produk dan/atau layanan tertentu; dan/atau b) Penjualan produk dan/atau layanan tertentu. 10. Kewajiban PUJK melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali untuk kegiatan edukasi keuangan. 11. Dalam hal PUJK tidak melaksanakan kegiatan edukasi keuangan sebagaimana angka 10 di atas, PUJK dianggap tidak memenuhi kewajiban pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan. 12. PUJK harus melakukan penyusunan rencana kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan dan rencana kegiatan untuk meningkatkan inklusi keuangan. 13. PUJK dilarang mengenakan biaya kepada konsumen dan/atau masyarakat dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan. 14. PUJK wajib memiliki fungsi atau unit literasi dan inklusi keuangan yang dapat dirangkap oleh fungsi atau unit lain mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai perangkapan fungsi atau unit pada masing-masing PUJK. Dalam hal tidak terdapat ketentuan mengenai perangkapan fungsi atau unit, PUJK dapat melakukan perangkapan fungsi atau unit sesuai kebutuhan dan dilakukan dengan menghindari benturan kepentingan pada pegawai PUJK. 15. Direksi wajib bertanggung jawab atas kepatuhan pelaksanaan ketentuan POJK ini. 16. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap pelaksanaan ketentuan POJK ini. 17. PUJK wajib memiliki mekanisme pelaporan kepada Direksi untuk pemenuhan kepatuhan ketentuan POJK ini. 18. PUJK wajib menyusun dan menyampaikan laporan literasi keuangan dan laporan inklusi keuangan kepada OJK. Laporan yang dimaksud menjadi bagian dari rencana bisnis dan laporan realisasi rencana bisnis. 19. Waktu dan mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud angka 18 di atas mengacu pada ketentuan POJK ini. 20. POJK ini dikecualikan untuk Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Dana Pensiun Pemberi Kerja, dan Lembaga Keuangan Mikro.	

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Peraturan Rules	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary Rules	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
1. POJK No. 3 of 2023 concerning Increasing Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and the Community	February 28, 2023	1. This POJK applies to Financial Service Business (PUJK) consisting of: a) Commercial Banks; b) People's Crediting/Financing Bank; c) Securities Trader Intermediary; d) Investment Manager; e) Pension Fund; f) Insurance Company; g) Reinsurance Company; h) Financing Company; i) Infrastructure Financing Company; j) Venture Capital Firms; k) Government Pawn Company; l) Private Pawn Company; m) Guarantee Company; n) Microfinance Institutions; o) Indonesian Export Financing Institute; and/or p) Other Financial Service Business and/or parties that carry out fund raising business activities, fund distribution, fund management in the financial services sector and those declared supervised by OJK, based on laws and regulations, both those that carry out their business activities conventionally and sharia. 2. PUJK must carry out activities to improve financial literacy and inclusion to consumers and / or the community as an annual program that is carried out at least 1 (one) time in 1 (one) semester and must document the implementation of these activities. 3. PUJK's are required to have written guidelines on activities to improve financial literacy and inclusion. 4. Activities to improve financial literacy include planning and implementing on: a) Financial education; and/or b) Development of facilities and infrastructure that support financial literacy for consumers and/or the community. 5. Activities to increase financial inclusion to consumers and/or the public include planning and implementing on: a) Expanding access to institutions, products, and/or services to target consumers; b) Provision of products and/or services; and/or c) Sustainability: - access to institutions, products and/or services; and/or - products and/or services, which are owned or provided by PUJK so that they can still be utilized by consumers and/or the public 6. PUJK can cooperate with other parties in carrying out activities to improve financial literacy. 7. In the event that the cooperation in question is carried out with other PUJKs, PUJKs can cooperate with at most 3 (three) other PUJKs. These restrictions on cooperation are exempted for activities initiated by governments or authorities. 8. In the event that PUJKs carry out activities to improve financial literacy in collaboration with more than 3 (three) other PUJKs that are not initiated by the government or authority, these activities are not counted as activities to improve financial literacy. 9. The implementation of activities to improve financial literacy as number 4 above is carried out by avoiding: a) Use of certain product and/or service marks; and/or b) Sales of certain products and/or services.	The Company will comply with and pay attention to the provisions set by OJK in an effort to improve financial literacy and inclusion, including: 1. Adjustment of the Company's internal policy regarding financial literacy and inclusion to be in accordance with this POJK. 2. The submission of financial literacy reports and financial inclusion reports to OJK refers to the provisions of this POJK

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		10. The obligation of PUJK to carry out activities to improve financial literacy is carried out at least 1 (one) time for financial education activities. 11. In the event that the PUJK does not carry out financial education activities as number 10 above, the PUJK is considered not to fulfill the obligation to carry out activities to improve financial literacy. 12. PUJKs must prepare activity plans to improve financial literacy and activity plans to increase financial inclusion. 13. PUJKs are prohibited from charging fees to consumers and/or the public in carrying out activities to improve financial literacy. 14. PUJKs must have functions or units of financial literacy and inclusion that can be concurrently carried out by other functions or units following the provisions governing the arrangement of functions or units in each PUJK. In the event that there is no provision regarding the arrangement of functions or units, the PUJK can carry out the seizure of functions or units as needed and carried out by avoiding conflicts of interest to PUJK employees. 15. The Board of Directors must be responsible for compliance with the implementation of the provisions of this POJK. 16. The Board of Commissioners must supervise the implementation of the Board of Directors' responsibilities towards the implementation of the provisions of this POJK. 17. PUJK must have a reporting mechanism to the Board of Directors to fulfill compliance with the provisions of this POJK. 18. PUJK is required to prepare and submit financial literacy reports and financial inclusion reports to OJK. The report in question becomes part of the business plan and the business plan realization report. 19. The time and mechanism of submission of reports as referred to in number 18 above refer to the provisions of this POJK. 20. This POJK is exempt for Reinsurance Companies, Infrastructure Finance Companies, Employer Pension Funds, and Microfinance Institutions.	
2. POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan	14 Juni 2023	1. Kewajiban Penyedia Jasa Keuangan (PJK) adalah menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Pemusnah Massal (PPPSPM) secara efektif dengan memperhatikan risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal ("PPSPM") serta kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, dan/atau karakteristik usaha PJK yang mencakup: a) Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris; b) Kebijakan dan prosedur; c) Pengendalian intern; d) Sistem informasi manajemen; dan e) Sumber daya manusia dan pelatihan. 2. PJK wajib menyampaikan laporan kepada OJK mengenai: a) Dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah disusun secara individual, untuk pertama kalinya paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya POJK ini; b) Pengkinian atas dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah disusun secara individual yang disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Juni; c) Kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM paling lama 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya POJK ini;	Perseroan menyesuaikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang ada di Perseroan dengan memperhatikan ketentuan POJK ini.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		d) Laporan rencana pengkinian data sebagaimana dimaksud POJK ini yang disampaikan setiap tahun paling lama akhir bulan Desember sebelum periode pengkinian data; e) Laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud POJK ini yang disampaikan setiap tahun paling lama akhir bulan Januari setelah periode pengkinian data terakhir; f) Tembusan laporan pemblokiran secara serta merta dengan melampirkan berita acara pemblokiran secara serta merta paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak PJK menerima Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM); dan g) Tembusan laporan nihil paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak PJK menerima DTTOT dan DPPSPM. 3. Penyampaian laporan yang dimaksud wajib disampaikan kepada kepala satuan kerja pengawasan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan OJK. Dalam hal sistem elektronik tersebut belum tersedia atau mengalami gangguan, PJK wajib menyampaikan dokumen secara fisik atau melalui surat elektronik ke OJK yang ditujukan kepada kepala satuan kerja pengawasan. 4. Dalam hal terdapat perubahan atas kebijakan dan prosedur, dan/atau laporan rencana pengkinian data, yang telah disampaikan kepada OJK, PJK wajib menyampaikan perubahan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan. 5. Pada saat POJK ini mulai berlaku, PJK menyesuaikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan POJK ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak POJK ini diundangkan.	
2. POJK No. 8 of 2023 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering Programs, Prevention of Terrorism Financing, and Prevention of Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector	June 14, 2023	1. The obligation of Financial Service Providers (PJK) is to implement Anti-Money Laundering (APU), Prevention of Terrorism Financing (PPT), and Prevention of Mass Destruction Proliferation Financing (PPPSPM) programs effectively by taking into account the risks of Money Laundering (TPPU), Terrorism Financing Crimes (TPPT), and/or Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction ("PPSPM") as well as activities, business scale, business complexity, and/or characteristics of PJK businesses which include: a) Active supervision of the board of directors and board of commissioners; b) Policies and procedures; c) Intern handling; d) Management information systems; and e) Human resources and training. 2. PJK is obliged to submit a report to the OJK on: a) TPPU, TPPT, and/or PPSPM risk assessment documents that have been prepared individually, for the first time no later than 12 (twelve) months from the enactment of this POJK; b) Update on TPPU, TPPT, and/or PPSPM risk assessment documents that have been prepared individually submitted annually no later than the end of June; c) Policies and procedures for implementing APU, PPT, and PPPSPM programs no later than 6 (six) months from the enactment of this POJK; d) The report on the data update plan as referred to in this POJK is submitted every year no later than the end of December before the data update period;	The Company adjusts the implementation of APU, PPT, and PPPSPM programs in the Company by taking into account the provisions of this POJK.

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		e) The report on the realization of data updates as referred to in this POJK is submitted every year no later than the end of January after the last data update period; f) Copy of the blocking report immediately by attaching the minutes of blocking immediately no later than 3 (three) working days after the PJK receives the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) and the List of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (DPPSPM); and g) Copies of nil reports no later than 3 (three) working days since PJK receives DTTOT and DPPSPM. 3. The submission of the report in question must be submitted to the head of the supervisory work unit through an electronic system organized by OJK. In the event that the electronic system is not yet available or experiencing interference, PJK must submit documents physically or via electronic mail to OJK addressed to the head of the supervisory work unit. 4. In the event that there are changes to policies and procedures, and/or data update plan reports, which have been submitted to OJK, PJK must submit such changes no later than 7 (seven) working days from the date the changes are made. 5. At the time of this POJK comes into effect, the PJK adjusts the implementation of the APU, PPT and PPPSPM programs with this POJK no later than 6 (six) months from the promulgation of this POJK.	
3. POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan	11 Juli 2023	1. Pihak adalah pihak yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dan/atau industri keuangan non-bank yang diatur dan diawasi oleh OJK, termasuk lembaga jasa keuangan dan/atau orang perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan. 2. Pihak wajib menggunakan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar dan tercatat dalam daftar AP dan KAP yang aktif pada OJK serta memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Pihak. 3. Kewajiban penggunaan AP dan KAP sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dilaksanakan terhadap laporan yang wajib audit, diperiksa, atau penugasan lain oleh AP berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan atau instruksi tertulis dari OJK. 4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pihak wajib memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris. 5. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, RUPS melimpahkan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada dewan komisaris, dewan pengawas atau pihak yang melakukan fungsi sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris, disertai penjelasan mengenai: a) alasan pelimpahan kewenangan; dan b) kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk 6. Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam angka 4 di atas wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.	Perseroan akan tunduk dan memperhatikan ketentuan POJK ini dalam hal: 1. Proses penunjukan, penggunaan AP dan KAP dalam rangka pelaksanaan audit atas informasi keuangan historis tahunan Perseroan. 2. Penyampaian laporan penunjukan dan realisasi penggunaan jasa AP dan KAP kepada OJK.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		7. Dalam menyusun rekomendasi sebagaimana angka 6 di atas, komite audit wajib mempertimbangkan: a) Independensi AP, KAP dan orang dalam KAP; b) Ruang lingkup audit; c) Imbalan jasa audit; d) Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan tim audit dari KAP; e) Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP; f) Manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan tim audit dari KAP; g) Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan h) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, jika ada. 8. OJK berwenang memberikan instruksi tertulis kepada Pihak untuk melakukan penggantian AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk oleh Pihak sebagaimana dimaksud angka 4 di atas. 9. Komite audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP, yang dilakukan paling sedikit melalui: a) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku; b) Kecukupan waktu pekerjaan lapangan; c) Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan d) Rekomendasi perbaikan yang diberikan AP dan/atau KAP. 10. Pembatasan penggunaan jasa audit (rotasi) AP yaitu bagi: a) Bank umum, emiten, dan **perusahaan publik** dibatasi maksimal **7 (tujuh) tahun kumulatif** dengan perhitungan kumulatif dimaksud diakumulasi sejak tahun buku 2017 dan untuk periode jeda sesuai jenis peran AP dalam perikatan yaitu: - 5 (lima) tahun buku pelaporan secara berturut-turut untuk AP yang bertindak sebagai rekan perikatan; - 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut untuk AP yang bertindak sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan; dan - 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut untuk AP yang bertindak sebagai rekan perikatan audit lainnya. b) Entitas lainnya dibatasi maksimal 5 (lima) tahun buku pelaporan berturut-turut dengan periode jeda 2 (dua) tahun buku pelaporan berturut-turut. 11. Pelaksanaan audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP didasarkan pada perjanjian kerja antara Pihak dan KAP. Bagi Pihak berupa Bank, manajer investasi, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, perjanjian kerja yang dimaksud wajib mencakup ruang lingkup audit spesifik. 12. Pihak wajib menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada OJK mengenai: a) Penunjukan AP dan KAP untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan melampirkan dokumen: 1) Penunjukan AP dan KAP disertai rekomendasi komite audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam POJK ini; dan	

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		2) Hasil penilaian sendiri yang diterima KAP sebagaimana dimaksud dalam POJK ini, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian kerja antara Pihak dan KAP ditandatangani; dan b) Realisasi penggunaan jasa AP dan KAP, paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, secara daring melalui sistem pelaporan OJK. Dalam hal sistem pelaporan OJK belum dapat digunakan untuk penyampaian laporan dan koreksi laporan secara daring, Pihak menyampaikan laporan dimaksud secara luring kepada OJK.	
3. POJK No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities	July 11, 2023	1. Parties are parties carrying out activities in the banking sector, capital market, and/or non-bank financial industry regulated and supervised by OJK, including financial service institutions and/or individuals or legal entities carrying out activities in the financial services sector. 2. The Party must use Public Accountants (AP) and Public Accounting Firms (KAP) that are registered and recorded in the list of AP and KAP that are active at OJK and have competencies in accordance with the complexity of the Party's business. 3. The obligation to use AP and KAP as referred to in number 2 above is carried out on reports that must be audited, examined, or other assignments by AP based on laws and regulations in the field of financial services or written instructions from OJK. 4. General Meeting of Shareholders (GMS) Parties must decide on the appointment of AP and/or KAP who will provide audit services on annual historical financial information by considering the proposal of the board of commissioners, supervisory board, or parties who perform supervisory functions as carried out by the board of commissioners. 5. In the event that the GMS is unable to decide on the appointment of AP and/or KAP who will provide audit services on annual historical financial information as referred to in number 4 above, the GMS delegates the authority to appoint AP and/or KAP to the board of commissioners, supervisory board or parties performing functions as performed by the board of commissioners, accompanied by an explanation regarding: a) reasons for delegation of authority; and b) criteria or limitations of AP and/or KAP that can be designated. 6. Proposals for the appointment of AP and/or KAP submitted by the board of commissioners, supervisory board, or parties performing supervisory functions as carried out by the board of commissioners as referred to in number 4 above must pay attention to the recommendations of the audit committee. 7. In preparing recommendations as number 6 above, the audit committee must consider: a) Independence of AP, KAP and KAP insiders; b) The scope of the audit; c) Audit service fees; d) Expertise and experience of AP, KAP, and audit team from KAP; e) The methodology, techniques, and audit tools used by KAP; f) The benefits of a new perspective will be obtained through the replacement of AP, KAP, and audit teams from KAP; g) Potential risks for the use of audit services by the same KAP consecutively for a long period of time; and h) The results of the evaluation of the implementation of audit services on annual historical financial information by AP and KAP in the previous period, if any.	The Company will comply with and pay attention to the provisions of this POJK in the event of: 1. The appointment process, the use of AP and KAP in the context of conducting audits on the Company's annual historical financial information. 2. Submission of reports on the appointment and realization of the use of AP and KAP services to OJK.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		8. OJK is authorized to provide written instructions to the Party to replace the AP and/or KAP that has been appointed by the Party as referred to in number 4 above. 9. The audit committee evaluates the implementation of audit services on annual historical financial information by AP and/or KAP, which is carried out at least through: a) Conformity of audit implementation by AP and/or KAP with applicable audit standards; b) Adequacy of field work time; c) Review of the scope of services provided and the adequacy of sampling tests; and d) Improvement recommendations provided by AP and/or KAP. 10. Restrictions on the use of AP audit services (rotation) are for: a) Commercial banks, issuers, and public companies are limited to a maximum of 7 (seven) cumulative years with the cumulative calculation accumulated since the 2017 financial year and for a gap period according to the type of AP's role in the engagement, namely: - 5 (five) consecutive reporting years for AP who acts as an engagement partner; - 3 (three) consecutive reporting years for AP who acts as the person in charge of reviewing the quality control of the engagement; and - 2 (two) consecutive reporting years for AP who act as other audit engagement partners. b) Other entities are limited to a maximum of 5 (five) consecutive reporting years with a gap period of 2 (two) consecutive reporting financial years. 11. The audit of annual historical financial information by AP and/or KAP is based on an employment agreement between the Party and KAP. For Parties in the form of banks, investment managers, insurance companies and reinsurance companies, pension funds, and financing institutions, the employment agreement in question must include a specific audit scope. 12. The party is obliged to submit periodic reports annually to the OJK on: a) Appointment of AP and KAP for audit of annual historical financial information by attaching documents: 1) The appointment of AP and KAP is accompanied by the recommendations of the audit committee and the considerations used in providing recommendations as referred to in this POJK; and 2) The results of the self-assessment received by KAP as referred to in this POJK No later than 10 (ten) working days after the employment agreement between the Party and KAP is signed; and b) Realization of the use of AP and KAP services, no later than 6 (six) months after the financial year ends, online through OJK reporting system. In the event that the OJK reporting system cannot be used for online report submission and report correction, the Party submits the report offline to OJK.	

Peraturan Rules	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary Rules	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
4. POJK No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan	20 Juli 2023	1. Kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan terjadi dalam keadaan: a) Turunnya sebagian besar atau keseluruhan harga efek yang tercatat di Bursa Efek atau Penyelenggara Pasar di luar Bursa Efek yang sedemikian besar material sifatnya terjadi secara mendadak (*crash*); b) Kondisi Pasar Modal mengalami tekanan yang signifikan; c) Kondisi perekonomian regional dan global yang mengalami tekanan dan perlambatan sehingga berdampak atau berpotensi berdampak secara signifikan terhadap stabilitas Pasar Modal; d) Terjadinya bencana alam maupun nonalam yang berdampak terhadap tekanan stabilitas Pasar Modal; e) Penjualan kembali *(redemption)* saham atau unit penyertaan produk investasi sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (*crash*), dihentikannya perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek produk investasi di Bursa Efek, atau ditutupnya Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek produk investasi diperdagangkan; f) Kegagalan sistem perdagangan atau penyelesaian transaksi yang menyebabkan pasar berfluktuasi secara signifikan; dan/atau g) Kondisi lain yang ditetapkan oleh OJK. 2. OJK berwenang menetapkan peraturan dan/atau kebijakan terkait penanganan atas kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan di bidang Pasar Modal, yang bertujuan untuk menjaga kinerja dan stabilitas Pasar Modal melalui: a) Kebijakan dalam transaksi efek; b) Kebijakan relaksasi pengelolaan investasi dan/atau produk pengelolaan investasi; c) Pemberian stimulus; dan/atau d) Relaksasi bagi pelaku industri jasa keuangan di bidang Pasar Modal. 3. Dalam hal terjadi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, perusahaan terbuka dapat membeli kembali sahamnya tanpa melanggar ketentuan: a) Pasar 91 dan Pasal 92 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; dan b) Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sepanjang memenuhi POJK ini.	Perseroan akan tunduk dan memperhatikan ketentuan POJK ini dalam hal Perseroan akan membeli kembali saham yang dikeluarkannya dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
4. POJK No. 13 of 2023 concerning Policies in Maintaining Capital Market Performance and Stability in Significantly Fluctuating Market Conditions	July 20, 2023	1. Significantly fluctuating market conditions occur under the circumstances of: a) The decline in most or all of the prices of securities listed on the Stock Exchange or Market Operators outside the Stock Exchange which is such a large amount of material that it occurs suddenly (crash); b) Capital Market Conditions are under significant pressure; c) Regional and global economic conditions that are experiencing pressure and slowdown that have an impact or have the potential to have a significant impact on Capital Market stability; d) The occurrence of natural and non-natural disasters that have an impact on the pressure of Capital Market stability; e) The redemption of shares or investment product participation units of such a large and material nature that occurs suddenly (crash), the cessation of Securities trading for the majority of the investment product Securities portfolio on the Stock Exchange, or the closure of the Stock Exchange where the majority of the product Securities portfolio traded investments; f) Failure of the trading system or settlement of transactions that cause the market to fluctuate significantly; and/or g) Other conditions set by OJK. 2. OJK is authorized to establish regulations and/or policies related to handling significantly fluctuating market conditions in the Capital Market, which aims to maintain Capital Market performance and stability through: a) Policy in securities transactions; b) Investment management relaxation policy and/or investment management products; c) Providing stimulus and/or d) Relaxation for financial services industry players in the Capital Market. 3. In the event that market conditions fluctuate significantly, a public company may buy back its shares without violating the conditions: a) Market 91 and Article 92 of Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market as amended in Article 22 of Law No. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector; and b) Article 95 and Article 96 of Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market, as long as it complies with this POJK.	The Company will comply with and pay attention to the provisions of this POJK in the event that the Company will buy back the shares it issued in significantly fluctuating market conditions.
5. POJK No. 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan	7 Agustus 2023	1. Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan adalah setiap tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan. 2. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan oleh penyidik OJK untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. 3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik OJK untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dan guna menemukan tersangkanya.	Perseroan akan tunduk dan memperhatikan ketentuan POJK ini dalam hal adanya penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan di Perseroan.

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		4. Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi tindak pidana: a) Perbankan; b) Pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon; c) Perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun; d) Lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya; e) Inovasi teknologi sektor keuangan serta aset keuangan digital dan aset kripto; f) Perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi, dan pelindungan konsumen; dan g) Lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan. 5. Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas mencakup kegiatan konvensional dan syariah. 6. OJK berwenang melakukan Penyelidikan dan/atau Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik OJK. 7. Penyidik OJK sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas terdiri atas: a) Pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan c) Pegawai tertentu, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan Penyidikan. 8. Penyidik OJK berwenang untuk menentukan dilakukan atau tidak dilakukannya Penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. 9. Setiap pihak dapat menyampaikan laporan, pemberitahuan, atau pengaduan mengenai dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, yang disampaikan secara tertulis dan/atau datang secara langsung kepada OJK. 10. Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud angka 9 di atas minimal mencantumkan: a) Nama pelapor; b) Identitas pelapor; c) Pihak yang dilaporkan; d) Uraian kejadian dan/atau tindakan yang diduga merupakan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan; dan e) Dokumen pendukung. 11. Untuk kepentingan Penyidikan, penyidik OJK dapat meminta keterangan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) mengenai keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 12. LJK sebagaimana dimaksud pada angka 11 di atas wajib memenuhi permintaan penyidik OJK dan yang tidak memenuhi permintaan penyidik OJK akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 13. Setiap tindakan penyidik OJK dituangkan dalam administrasi Penyidikan yang ditetapkan oleh OJK. 14. Penyidik OJK, sesuai kewenangannya, menyampaikan hasil Penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
5. POJK No. 16 of 2023 concerning Investigation of Criminal Acts in the Financial Services Sector	August 7, 2023	1. Criminal act in the Financial Services Sector is any criminal act as stipulated in the law regarding the financial services sector. 2. Investigation is a series of actions by OJK investigators to find and find an event that is suspected to be a Criminal Act in the Financial Services Sector to determine whether or not an investigation can be carried out. 3. Investigation is a series of actions by OJK investigators to find and collect evidence that with that evidence makes light of Criminal Acts in the Financial Services Sector and to find suspects. 4. Criminal Acts in the Financial Services Sector as referred to in number 1 include criminal acts: a) Banking; b) Capital markets, derivatives finance, and carbon exchanges; c) Insurance, guarantees, and pension funds; d) Financing institutions, venture capital firms, microfinance institutions, and other Financial Service Institutions; e) Financial sector technology innovation as well as digital financial assets and crypto assets; f) The behavior of financial service business actors as well as the implementation of education, and consumer protection; and g) Others as stipulated in the law regarding the financial services sector. 5. Criminal Acts in the Financial Services Sector as referred to in number 4 above include conventional and sharia activities. 6. OJK is authorized to conduct Investigations and/or Investigations conducted by OJK investigators. 7. OJK investigators as referred to in number 6 above consist of: a) Investigating Officer for the Republic of Indonesia National Police; b) Certain civil servant officials And c) Certain employees, who are given special authority as investigators as referred to in the Code of Criminal Procedure to conduct investigations. 8. OJK investigators are authorized to determine whether or not to conduct an investigation into suspected criminal acts in the Financial Services Sector. 9. Each party can submit reports, notifications, or complaints regarding alleged Criminal Acts in the Financial Services Sector, which are submitted in writing and/or come directly to OJK. 10. The written report as referred to in number 9 above at least includes: a) Name of the complainant; b) Identity of the whistleblower; c) Reported parties; d) Description of events and/or actions suspected to be Criminal Acts in the Financial Services Sector; and e) Supporting documents. 11. For the purposes of the investigation, OJK investigators can request information from Financial Service Institutions (FSIs) regarding the financial condition of parties suspected of committing or involved in violations of the provisions of laws and regulations in the financial services sector. 12. Financial Service Institutions as referred to in number 11 above must fulfill the request of OJK investigators and those who do not fulfill the request of OJK investigators will be subject to sanctions in accordance with statutory provisions.	The Company will comply with and pay attention to the provisions of this POJK in the event of criminal investigations in the financial services sector in the Company.

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		13. Every action of OJK investigators is set forth in the administration of the Investigation determined by OJK. 14. The OJK investigator, in accordance with his authority, delivers the results of the Investigator to the Attorney for prosecution in accordance with the provisions of the legal regulations.	
6. POJK No. 18/ POJK.18/2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan	10 Oktober 2023	1. POJK ini berlaku bagi penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk berlandaskan keberlanjutan yang dilakukan melalui: a) Penawaran Umum; atau b) Penerbitan tanpa penawaran umum atas efek yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun. 2. Emiten wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai: a) Pernyataan Pendaftaran; b) Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk; dan c) Peraturan terkait lainnya, kecuali diatur khusus dalam POJK ini. 3. Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan dapat berupa: a) EBUS lingkungan (Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*green bond*) dan/atau Sukuk Berwawasan Lingkungan (*green sukuk*)), efek yang bersifat utang dan/atau sukuk yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang kegiatan usaha berwawasan lingkungan. b) EBUS sosial (Efek Bersifat Utang Berwawasan Sosial (*social bond*) dan/atau Sukuk Berwawasan Sosial (*social sukuk*)), efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang kegiatan usaha berwawasan sosial. c) EBUS keberlanjutan (Efek Bersifat Utang Keberlanjutan (*sustainability bond*) dan/atau Sukuk Keberlanjutan (*sustainability sukuk*)), efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang kegiatan usaha berwawasan lingkungan dan kegiatan usaha berwawasan sosial. d) Sukuk wakaf, sukuk yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang kegiatan/proyek untuk mengoptimalkan manfaat aset wakaf. e) EBUS terkait keberlanjutan (Efek Bersifat Utang Terkait Keberlanjutan (*sustainability-linked bond*) dan/atau Sukuk Terkait Keberlanjutan (*sustainability-linked sukuk*)), efek bersifat utang dan/atau sukuk yang penerbitannya dikaitkan dengan pencapaian indikator kinerja utama keberlanjutan tertentu; dan f) Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan lainnya yang ditetapkan oleh OJK. 4. OJK dapat memberikan insentif bagi Emiten dan Penerbit yang menerbitkan efek bersifat utang dan/atau sukuk berlandaskan keberlanjutan. 5. Pemberian insentif oleh OJK sebagaimana dimaksud angka 4 di atas tidak berlaku dalam hal: a) Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dibiayai EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan/atau Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS);	Perseroan akan tunduk dan memperhatikan ketentuan POJK ini dalam hal Perseroan akan menerbitkan efek bersifat utang dan sukuk berdasarkan keberlanjutan sebagaimana dimaksud POJK ini.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		b) Kegiatan/proyek yang dibiayai Sukuk Wakaf tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kegiatan/proyek untuk mengoptimalkan manfaat aset Wakaf sebagaimana yang dimaksud pada POJK ini; c) Indikator Kinerja Utama Keberlanjutan (IKU Keberlanjutan) yang telah ditetapkan oleh Emiten atau Penerbit EBUS Terkait Keberlanjutan tidak lagi dilaksanakan.	
6. POJK No. 18/ POJK.18/2023 concerning Issuance and Requirements of Debt Securities and Sukuk Based on Sustainability	October 10, 2023	1. This POJK applies to the issuance of debt securities and/or sukuk based on sustainability carried out through: a) Public Offering; or b) Issuance without public offering of securities that have a maturity of more than 1 (one) year. 2. Issuer is obliged to follow the provisions of the legal regulations in the capital market sector regarding: a) Registration Statement; b) Public Offering of debt and/or Sukuk securities; and c) Other related regulations, unless specifically stipulated in this POJK. 3. Debt securities and/or Sukuk based on sustainability can be: a) Environmental EBUS (Green Bond and/or Green Sukuk), debt securities and/or sukuk whose proceeds from issuance are used to finance or refinance environmentally sound business activities. b) Social EBUS (Social Bond and/or Social Sukuk Sukuk), debt and/or sukuk whose proceeds from issuance are used to finance or refinance social business activities. c) Sustainability EBUS (sustainability bonds and/or sustainability sukuk), debt securities and/or sukuk whose issuance proceeds are used to finance or refinance environmentally sound business activities and socially sound business activities. d) Waqf sukuk, sukuk whose funds from issuance are used for financing or refinancing activities/projects to optimize the benefits of waqf assets. e) EBUS related to sustainability (sustainability-linked bonds and/or sustainability-linked sukuk) debt securities and/or sukuk whose issuance is associated with the achievement of certain key sustainability performance indicators; and f) Debt securities and/or Sukuk based on other sustainability determined by OJK. 4. OJK can provide incentives for issuers and issuers that issue debt securities and/or sukuk based on sustainability. 5. The provision of incentives by OJK as referred to in number 4 above does not apply in the following cases: a) Business activities and/or other activities financed by Environmental EBUS, Social EBUS, and/or Sustainability EBUS no longer meet the requirements as Environmental Business Activities (KUBL) and/or Social Business Activities (KUBS); b) Activities/projects financed by Sukuk Waqf no longer meet the requirements as activities/projects to optimize the benefits of Waqf assets as referred to in this POJK; c) Sustainability Key Performance Indicators (Sustainability IKU) that have been determined by the Issuer or EBUS issuer regarding Sustainability are no longer implemented.	The Company will comply with and pay attention to the provisions of this POJK in the event that the Company will issue debt securities and sukuk based on sustainability as referred to in this POJK.

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
7. POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan	22 Desember 2023	Ketentuan dalam POJK dan ketentuan pelaksana yang mengatur mengenai perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam: 1. Desain produk dan/atau layanan; 2. Penyediaan informasi produk dan/atau layanan; 3. Penyampaian informasi produk dan/atau layanan; 4. Pemasaran produk dan/atau layanan; 5. Penyusunan perjanjian terkait produk dan/atau layanan; 6. Pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan; dan 7. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan, tunduk pada ketentuan pelindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam POJK ini.	Perseroan akan tunduk dan memperhatikan ketentuan POJK ini dalam melakukan kegiatan usaha dan/atau memberikan produk dan/atau layanan kepada calon konsumen dan/atau konsumen.
7. POJK No. 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector	December 22, 2023	Provisions in POJK and provisions governing the conduct of Financial Service Institutions (PUJK) in: 1. Product and/or service design; 2. Provision of product and/or service information; 3. Delivery of product and/or service information; 4. Marketing of products and/or services; 5. Drafting agreements related to products and/or services; 6. Provision of services for the use of products and/or services; and 7. Handling complaints and resolving disputes over products and/or services, are subject to consumer and public protection provisions as referred to in this POJK.	The Company will comply with and pay attention to the provisions of this POJK in conducting business activities and/or providing products and/or services to prospective consumers and/or consumers.
8. POJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka	29 Desember 2023	1. Perusahaan Terbuka dapat membeli kembali sahamnya sesuai dengan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Perusahaan Terbuka dapat membeli kembali sahamnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 sepanjang memenuhi POJK ini.	Perseroan akan tunduk dan memperhatikan ketentuan POJK ini dalam hal Perseroan akan melakukan pembelian kembali saham.
8. POJK No. 29 of 2023 concerning Buyback Shares Issued by Public Companies	December 29, 2023	1. Public Companies can buy back their shares in accordance with the provisions of Article 37 and Article 39 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. 2. Public Companies can buy back their shares as referred to in number 1 as long as they comply with this POJK.	The Company will comply with and pay attention to the provisions of this POJK in the event that the Company in conducting buyback share.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Peraturan Rules	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary Rules	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
9. POJK No. 30 Tahun 2023 tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yang Diaudit di Pasar Modal	29 Desember 2023	1. Entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal terdiri atas: a) Entitas yang melakukan Penawaran Umum atas: • saham; • obligasi; • sukuk; dan/atau • waran terstruktur, yang efeknya tercatat dan/atau diperdagangkan di bursa efek. b) Entitas yang menjadi wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio investasi dan efeknya tercatat dan diperdagangkan di bursa efek, terdiri atas: • Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang unit penyertaannya; • KIK efek beragun aset; • Efek beragun aset berbentuk surat partisipasi; • Dana investasi infrastruktur berbentuk KIK; atau • Dana investasi real estat berbentuk KIK; c) Entitas yang menjadi wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio investasi dan efeknya tidak tercatat di bursa efek, terdiri atas: • Reksa dana berbentuk KIK; • Reksa dana berbentuk KIK penyertaan terbatas; • KIK efek beragun aset; • Dana investasi multi aset berbentuk KIK; • Dana investasi infrastruktur berbentuk KIK; • Dana investasi real estat berbentuk KIK; • KIK pemupukan dana tabungan perumahan rakyat; • Efek beragun aset berbentuk surat partisipasi; • Reksa dana berbentuk perseroan; atau • Produk investasi kolektif bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK; d) Perusahaan Publik; e) Entitas yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, mencakup: • bursa efek; • lembaga kliring dan penjaminan; • lembaga penyimpanan dan penyelesaian; • perusahaan efek yang memiliki izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan/atau penjamin emisi efek, atau manajer investasi; • pemeringkat; • lembaga penilaian harga efek; • penyelenggara perdagangan karbon; • penyelenggara dana perlindungan pemodal; atau • lembaga pendanaan efek; f) Entitas lain di Pasar Modal yang ditetapkan oleh OJK. 2. Entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal sebagaimana dimaksud angka 1 di atas wajib menyampaikan laporan Akuntan Publik atas laporan keuangan yang diaudit dengan mengungkapkan Hal Audit Utama kepada OJK. Hal Audit Utama adalah hal yang menurut pertimbangan profesional auditor merupakan hal yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini.	Perseroan akan tunduk dan memperhatikan ketentuan POJK ini dalam hal Perseroan menyampaikan laporan Akuntan Publik atas laporan keuangan yang diaudit dengan mengungkapkan Hal Audit Utama kepada OJK.

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		3. Pengungkapan Hal Audit Utama dalam laporan Akuntan Publik wajib diterapkan untuk: a) Opini tanpa modifikasian; dan b) Opini modifikasian berupa: • opini wajar dengan pengecualian; dan • opini tidak wajar, sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik, kecuali ditetapkan lain oleh OJK. 4. Penerapan pertama kali pengomunikasian Hal Audit Utama dalam laporan Akuntan Publik yang disampaikan oleh entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal wajib dilakukan dengan ketentuan, bagi: a) Entitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b di atas, berlaku untuk audit atas laporan keuangan tahunan 2023. b) Entitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, d dan e diatas, berlaku untuk audit atas laporan keuangan tahunan 2024. c) Entitas lain di Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, berlaku untuk audit atas laporan keuangan tahunan yang pertama kali disampaikan ke OJK.	
9. POJK No. 30 of 2023 concerning Communicating Main Audit Matters in Public Accountant Reports on Audited Financial Statements in the Capital Market	December 29, 2023	1. Entities with public accountability in the Capital Market consist of: a) Entities conducting Public Offerings of: • stock; • bond; • sukuk; and/or • Structured warrants, which securities are listed and/or traded on a stock exchange. b) Entities that become a forum used to collect funds from the public to be subsequently invested in investment portfolios and their securities are listed and traded on the stock exchange, consisting of: • Mutual funds in the form of Collective Investment Contracts (KIK) with participation units; • KIK asset-backed securities; • Asset-backed securities in the form of participation letters; • Infrastructure investment fund in the form of KIK; or • Real estate investment fund in the form of KIK; c) Entities that are a forum used to collect funds from the public to be subsequently invested in investment portfolios and securities not listed on the stock exchange, consist of: • Mutual funds in the form of KIK; • Mutual funds in the form of limited participation KIK; • KIK asset-backed securities; • Multi-asset investment fund in the form of KIK; • Infrastructure investment fund in the form of KIK; • Real estate investment fund in the form of KIK; • KIK nurturing the people's housing savings fund; • Asset-backed securities in the form of participation letters; • Mutual funds in the form of companies; or • Other forms of collective investment products determined by OJK; d) Public Company;	The Company will comply with and pay attention to the provisions of this POJK in the event that the Company submits a Public Accountant report on the audited financial statements by disclosing the Main Audit Matters to OJK.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		e) Entities that carry out activities in the Capital Market, including: • stock exchange; • clearing and guarantee institutions; • depository and settlement institutions; • securities companies that have business licenses as broker-dealers and/or underwriters, or investment managers; • Rating; • securities price assessment institutions; • carbon trading organizers; • organizers of the financier protection fund; or • securities funding institutions; f) Other entities in the Capital Market determined by OJK. 2. Entities with public accountability in the Capital Market as referred to in number 1 above are required to submit a Public Accountant's report on the audited financial statements by disclosing the Main Audit Matters to OJK. Main Audit Matters is what the auditor's professional judgment is the most significant matter in the audit of the current financial statements. 3. Disclosure of Main Audit Matters in the Public Accountant's report must be applied to: a) Unmodified opinions; and b) Modified opinions include: • fair opinion with exceptions; and • unfair opinion, in accordance with the professional standards of Public Accountants, unless otherwise stipulated by OJK. 4. The first application of communicating the Main Audit in the Public Accountant's report submitted by an entity with public accountability in the Capital Market must be carried out with the following conditions: a) The entity referred to in number 1 letter a and b above, applies to the audit of the 2023 annual financial statements. b) The entity referred to in number 1 letters c, d and e above, applies to the audit of the 2024 annual financial statements. c) Other entities in the Capital Market as referred to in number 1 letter f, apply for audits of annual financial statements that are first submitted to OJK.	

C. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) | Financial Services Authority Circular (SEOJK)

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
1. SEOJK No. 8/ SEOJK.04/2023 tentang Penyampaian Informasi oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Rangka Penyusunan Daftar Efek Syariah	2 Maret 2023	1. Daftar Efek Syariah (DES) adalah kumpulan efek syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau diterbitkan oleh pihak penerbit DES. 2. Emiten atau Perusahaan Publik, sebagai pihak yang memiliki kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala kepada OJK, merupakan pihak yang melakukan penyampaian informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan DES. 3. Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan informasi dalam rangka penyusunan DES kepada OJK melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE), informasi yang dimaksud: a) Mengacu pada panduan pengisian formulir informasi laporan keuangan dalam rangka penyusunan DES yang dapat diunduh melalui SPE; dan b) Disusun berdasarkan pada laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada OJK.	Perseroan akan tunduk dan memperhatikan ketentuan kebijakan ini dalam penyampaian informasi oleh Perseroan dalam rangka penyusunan DSE.

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		4. Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas segera setelah penyampaian laporan keuangan berkala, yang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian laporan keuangan berkala. 5. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan keuangan berkala setelah tanggal 20 April, penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas untuk penetapan DES pertama dilakukan paling lambat pada tanggal 20 Mei. 6. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan keuangan berkala setelah tanggal 21 Oktober, penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas untuk penetapan DES kedua dilakukan paling lambat pada tanggal 20 November. 7. Penetapan Daftar Efek Syariah pertama dan kedua sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dan angka 6 di atas mengikuti ketentuan dalam POJK mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah. 8. Emiten atau Perusahaan Publik dianggap telah menyampaikan informasi dalam rangka penyusunan DSE sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas apabila telah menerima tanda bukti penerimaan secara elektronik yang diterbitkan oleh SPE melalui surat elektronik *(e-mail)* pemberitahuan mengenai penerimaan laporan oleh OJK.	
1. SEOJK No. 8/ SEOJK.04/2023 concerning Information Submission by Issuers or Public Companies in the Framework of Preparing Sharia Securities List	March 2, 2023	1. Sharia Securities List (DES) is a collection of sharia securities, determined by OJK or issued by the issuer of DES. 2. Issuers or Public Companies, as parties who have the obligation to submit periodic financial statements to OJK, are parties who submit information needed in the context of preparing DES. 3. Issuers or Public Company submit information in the context of preparing DES to OJK through the Electronic Reporting System (SPE), the information in question: a) Refer to the guidelines for filling out financial statement information forms in the context of preparing DES which can be downloaded through SPE; and b) Prepared based on periodic financial statements submitted to OJK. 4. Issuers or Public Company submit information as referred to in number 3 above immediately after the submission of periodic financial statements, which is carried out no later than 30 (thirty) days after the submission of periodic financial statements. 5. In the event that an Issuer or Public Company submits periodic financial statements after April 20, the submission of information as referred to in number 3 above for the determination of the first DES shall be carried out no later than May 20. 6. In the event that an Issuer or Public Company submits periodic financial statements after October 21, the submission of information as referred to in number 3 above for the determination of the second DES shall be carried out no later than November 20. 7. The determination of the first and second Sharia Securities List as referred to in number 5 and number 6 above follows the provisions in POJK regarding the criteria and issuance of the Sharia Securities List.	The Company will comply with and pay attention to the provisions of this policy in the submission of information by the Company in the context of preparing the DES.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		8. Issuers or Public Company are deemed to have submitted information in the context of preparing DSE as referred to in number 3 above if they have received electronic receipts issued by SPE via electronic mail (e-mail) notification regarding receipt of reports by OJK.	
2. SEOJK No. 13/ SEOJK.04/2023 tentang Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka Sebagai Akibat Dibatalkannya Pencatatan Efek oleh Bursa Efek karena Kondisi atau Peristiwa yang Signifikan Berpengaruh Negatif terhadap Kelangsungan Usaha	6 September 2023	1. Pelaksanaan pembelian kembali saham Perusahaan Terbuka sebagai akibat dibatalkannya pencatatan efek oleh Bursa Efek karena kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif dilakukan dengan ketentuan diantaranya Perusahaan Terbuka yang dibatalkan pencatatan efeknya oleh Bursa Efek berdasarkan surat keputusan pembatalan pencatatan atau pengendali dari Perusahaan Terbuka yang memenuhi kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEOJK ini diwajibkan memulai pembelian kembali saham atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik setelah dilakukannya keterbukaan informasi kepada masyarakat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman Bursa Efek kepada masyarakat mengenai keputusan pembatalan pencatatan. 2. Pelaksanaan perubahan status dari Perusahaan Terbuka menjadi perseroan yang tertutup sebagai akibat dibatalkannya pencatatan efek oleh Bursa Efek karena kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha: a) Bursa Efek diwajibkan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b POJK No. 3/ POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, sebelum efektifnya keputusan pembatalan pencatatan efek atas Perusahaan Terbuka. b) Perusahaan Terbuka yang pencatatan Efeknya telah dibatalkan oleh Bursa Efek sebagaimana Pasal 69 ayat (2) POJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal diwajibkan mulai mengubah status dari Perusahaan Terbuka menjadi Perseroan yang tertutup paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal efektifnya keputusan pembatalan pencatatan efek sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. c) Perubahan status dari Perusahaan Terbuka menjadi perseroan yang tertutup sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas dihitung dimulai pada saat dilakukannya pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham perubahan status dari Perusahaan Terbuka menjadi perseroan yang tertutup. d) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas wajib mengikuti prosedur perubahan status dari Perusahaan Terbuka menjadi perseroan yang tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) POJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.	Perseroan akan tunduk dan memperhatikan ketentuan dalam SEOJK ini dalam hal Perseroan memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 POJK No. 3/POJK.04/2021.

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
2. SEOJK No. 13/ SEOJK.04/2023 concerning Buyback of Public Company Shares as a Result of the Cancellation of Stock Listing by the Stock Exchange due to Significant Conditions or Events Negatively Affecting Business Continuity	September 6, 2023	1. The implementation of the buyback of shares of a Public Company as a result of the cancellation of the listing by the Stock Exchange due to conditions or events that significantly negatively affect is carried out provided that the Public Company that is canceled by the Stock Exchange based on the cancellation decree or the controller of the Public Company that meets certain conditions as referred to in this SEOJK is required to start buying back shares on all shares owned by public shareholders after the disclosure of information to the public, no later than 30 (thirty) days after the announcement of the Stock Exchange to the public regarding the decision to cancel the listing. 2. The implementation of the change in status from a Public Company to a closed company as a result of the cancellation of the listing by the Stock Exchange due to conditions or events that significantly negatively affect business continuity: a) The Stock Exchange is required to submit a notification to OJK no later than 2 (two) working days as referred to in Article 69 paragraph (1) letter b POJK No. 3/POJK.04/2021 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector, before the effective decision to cancel the listing of securities on Public Company. b) Public Company whose Securities listing has been canceled by the Stock Exchange in accordance with Article 69 paragraph (2) POJK No. 3/POJK.04/2021 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector are required to start changing their status from a Public Company to a closed Company no later than 30 (thirty) days after the effective date of the decision to cancel the listing of securities as referred to in letter a above. c) The change of status from a Public Company to a closed company as referred to in letter b above is calculated starting at the time of notification of the agenda of the general meeting of shareholders of the change of status from a Public Company to a closed company. d) Changes in status as referred to in point b above must follow the procedure for changing status from a Public Company to a closed company as referred to in Article 69 paragraph (3) POJK No. 3 / POJK.04 / 2021 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector.	The Company will comply with and pay attention to the provisions in this SEOJK in the event that the Company meets the conditions as referred to in Article 69 POJK No. 3/POJK.04/2021.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
3. SEOJK No. 18/ SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan	6 November 2023	Ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan dalam SEOJK ini diantaranya: 1. Dalam SEOJK ini, yang dimaksud dengan Pihak adalah pihak yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan/atau Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diatur dan diawasi oleh oleh OJK, termasuk lembaga jasa keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan. 2. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan diputuskan oleh rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan oleh Pihak dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris. 3. Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit harus mempertimbangkan: a) independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP; b) ruang lingkup audit; c) imbalan jasa audit; d) keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan tim audit dari KAP; e) metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP; f) manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan tim audit dari KAP; g) potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan h) hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, jika ada. 4. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP, yang paling sedikit mencakup: a) kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku; b) kecukupan waktu pekerjaan lapangan; c) pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan d) rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP. 5. KAP dapat dikategorikan sebagai KAP yang sama dalam hal: a) nama KAP tidak berubah dan tidak terjadi perubahan komposisi AP lebih dari 50% (lima puluh persen); atau b) terdapat pendirian atau perubahan nama KAP, namun komposisi AP 50% (lima puluh persen) atau lebih berasal dari KAP yang sebelumnya.	Perseroan akan tunduk dan memperhatikan ketentuan SEOJK ini dalam hal: 1. Proses penunjukan, penggunaan AP dan KAP dalam rangka pelaksanaan audit atas informasi keuangan historis tahunan Perseroan. 2. Penyampaian laporan penunjukan dan realisasi penggunaan jasa AP dan KAP kepada OJK.

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		6. Pembatasan penggunaan jasa audit bagi Pihak berupa Bank Umum, Emiten, dan Perusahaan Publik: a) Pihak berupa bank umum, emiten, dan perusahaan publik membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama untuk 7 (tujuh) tahun kumulatif. b) Perhitungan kumulatif pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a angka ini diakumulasi sejak tahun buku 2017. c) Pihak berupa bank umum, emiten, dan perusahaan publik hanya dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama, setelah melewati masa jeda (*cooling-off period*) sesuai dengan jenis peran AP dalam perikatan yaitu: 1) AP bertindak sebagai Rekan perikatan, masa jeda selama 5 (lima) tahun buku pelaporan secara berturut-turut; 2) AP bertindak sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan, masa jeda selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut; dan 3) AP bertindak sebagai Rekan perikatan audit lainnya, masa jeda selama 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut. d) Selain memperhatikan angka 1, 2, dan 3 huruf ini, Pihak berupa bank umum, emiten, dan perusahaan publik memastikan AP telah memenuhi pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda yang diatur dalam kode etik Asosiasi Profesi Akuntan Publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai praktik akuntan publik. 7. Dalam memastikan pemenuhan pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, Pihak meminta KAP melakukan dan menyediakan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap pemenuhan pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dan masa jeda. 8. AP dan/atau KAP melaksanakan audit atas informasi keuangan historis tahunan berdasarkan perjanjian kerja antara Pihak dan KAP. 9. Ruang lingkup audit spesifik untuk lembaga pembiayaan termasuk lembaga pembiayaan dengan prinsip syariah paling sedikit meliputi: a) Penentuan ukuran sampel melalui penerapan suatu formula berbasis statistik atau melalui pertimbangan profesional dengan mempertimbangkan risiko, jenis produk, dan segmen debitur dari perusahaan pembiayaan perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur; b) Penelaahan atas asersi manajemen mengenai: 1) Penilaian dan penetapan: (a) Kualitas piutang pembiayaan atau kualitas aset produktif; dan (b) Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan atau cadangan penyisihan penghapusan aset produktif, sesuai dengan POJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dan POJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan.	

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company

2) Jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan POJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dan POJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan.
3) Perhitungan rasio bagi:
   (a) Lembaga pembiayaan yang menyelenggarakan usaha perusahaan pembiayaan sesuai dengan POJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan antara lain rasio kualitas piutang pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) neto dan rasio permodalan; dan
   (b) Lembaga pembiayaan yang menyelenggarakan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah sesuai dengan POJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan antara lain rasio aset produktif bermasalah neto dan rasio permodalan;

c) Penelaahan atas pengungkapan manajemen mengenai kewajaran transaksi dengan pihak-pihak berelasi maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus;
d) Hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi OJK dengan AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 POJK AP dan KAP; dan
e) Hal-hal lain yang diatur dalam SAK dan peraturan terkait akuntansi yang diterbitkan oleh OJK.

10. Pihak menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada OJK mengenai:
    a) Penunjukan AP dan KAP untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan yang disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian kerja antara Pihak dan KAP ditandatangani; dan
    b) Realisasi penggunaan jasa AP dan KAP yang disampaikan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir,

    secara daring melalui sistem pelaporan OJK.
11. Laporan penunjukan AP dan KAP disusun dengan mengacu pada Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK ini.
12. Laporan realisasi penggunaan jasa AP dan KAP disusun dengan mengacu pada Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK ini.

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
3. SEOJK No. 18/ SEOJK.03/2023 concerning Procedures for Using Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities	November 6, 2023	Implementation provisions regarding procedures for using public accountant services and public accounting firms in financial services activities in SEOJK include: 1. In this SEOJK, what is meant by a Party is a party that carries out activities in the Banking, Capital Market, and/or Non-Bank Financial Industry (IKNB) sectors regulated and supervised by OJK, including financial service institutions and/or individuals or legal entities that carry out activities in the financial services sector. 2. The appointment of a Public Accountant (AP) and/or Public Accounting Firm (KAP) who will provide audit services on annual historical financial information is decided by the general meeting of shareholders convened by the Party taking into account the proposal of the board of commissioners, supervisory board, or parties who perform supervisory functions as carried out by the board of commissioners. 3. Proposals for the appointment of AP and/or KAP submitted by the board of commissioners, supervisory board, or parties performing supervisory functions as carried out by the board of commissioners pay attention to the recommendations of the Audit Committee. In preparing recommendations, the Audit Committee shall consider: a) independence of AP, KAP, and KAP insiders; b) scope of audit; c) audit service fees; d) expertise and experience of AP, KAP, and audit team from KAP; e) methodologies, techniques, and audit tools used by KAP; f) the benefits of a new perspective that will be obtained through the replacement of AP, KAP, and audit teams from KAP; g) potential risks for the use of audit services by the same public accountant consecutively for a long period of time; and h) the results of an evaluation of the implementation of audit services on annual historical financial information by AP and KAP in the previous period, if any. 4. The Audit Committee evaluates the implementation of audit services on annual historical financial information by AP and/ or KAP, which at least includes: a) conformity of audit implementation by AP and/or KAP with applicable audit standards; b) adequacy of time for field work; c) review of the scope of services rendered and the adequacy of the test quotes; And d) improvement recommendations provided by AP and/or KAP. 5. KAP can be categorized as the same KAP in terms of: a) the name of the KAP has not changed and there has been no change in the composition of AP by more than 50% (fifty percent); or b) There is a establishment or change in the name of KAP, but the composition of AP 50% (fifty percent) or more comes from the previous KAP.	The Company will comply with and pay attention to the provisions of this SEOJK in terms of: 1. The appointment process, the use of AP and KAP in the context of conducting audits on the Company's annual historical financial information. 2. Submission of reports on the appointment and realization and realization of the use of AP and KAP services to OJK.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		6. Restrictions on the use of audit services for Parties in the form of Commercial Banks, Issuers, and Public Companies: a) Parties in the form of commercial banks, issuers, and public companies limit the use of audit services on annual historical financial information from the same AP for 7 (seven) cumulative years. b) The cumulative calculation of restrictions on the use of audit services on annual historical financial information from the same AP as referred to in letter a of this number is accumulated since the 2017 financial year. c) Parties in the form of commercial banks, issuers, and public companies can only reuse audit services on annual historical financial information from the same AP, after passing the cooling-off period in accordance with the type of AP's role in the engagement, namely: 1) AP acts as an engagement partner, a gap period of 5 (five) consecutive reporting years; 2) AP acts as the person in charge of reviewing the quality control of the engagement, a gap period of 3 (three) consecutive reporting years; and 3) AP acts as another audit engagement partner, a gap period of 2 (two) consecutive reporting years. d) In addition to paying attention to numbers 1, 2, and 3 of this letter, Parties in the form of commercial banks, issuers, and public companies ensure that AP has fulfilled the restrictions on the use of audit services and the gap period stipulated in the code of ethics of the Public Accountant Professional Association and the provisions of laws and regulations regarding the practice of public accountants. 7. In ensuring the fulfillment of restrictions on the use of audit services and the cooling-off period as referred to in number 6 above, the Party requests KAP to conduct and provide the results of self-assessment on the fulfillment of restrictions on the use of audit services on annual historical financial information and the gap period. 8. AP and/or KAP conduct an audit of annual historical financial information based on an employment agreement between the Party and KAP. 9. The specific audit scope for financing institutions including financing institutions with sharia principles at least includes: a) Determination of sample size through the application of a statistically based formula or through professional judgment by considering the risks, product types, and debtor segments of finance companies, venture capital companies, and infrastructure finance companies; b) Review of management assertions regarding: 1) Evaluation and fixation: a) Quality of financing receivables or quality of productive assets; and b) Calculation of reserve allowance for write-off of financing receivables or reserve allowance for write-off of productive assets, in accordance with POJK regarding the operation of the business of finance companies and POJK regarding the operation of sharia finance companies and sharia business units of financing companies. 2) The amount and quality of funding to related parties is in accordance with POJK regarding the operation of finance companies and POJK regarding the operation of sharia finance companies and sharia business units of financing companies.	

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		3) Calculation of the ratio for: (a) Financing institutions that conduct finance company business in accordance with POJK regarding the operation of finance company business, including the quality ratio of net non-performing financing receivables and capital ratio; and (b) Financing institutions that carry out the business of sharia finance companies and sharia business units in accordance with POJK concerning the operation of sharia finance companies and sharia business units of finance companies, including the ratio of net non-performing productive assets and capital ratios; c) Review of management's disclosures regarding the fairness of transactions with related parties as well as transactions carried out with special treatment; d) Other matters determined based on the results of OJK's communication with AP and/or KAP as referred to in Article 34 POJK AP and KAP; and e) Other matters regulated in SAK and accounting-related regulations issued by OJK. 10. Parties deliver periodic reports annually to the OJK on: a) Appointment of AP and KAP for audit of annual historical financial information submitted no later than 10 (ten) working days after the employment agreement between the Party and KAP is signed; and b) Realization of the use of AP and KAP services submitted no later than 6 (six) months after the financial year ends, online through the OJK reporting system. 11. The AP and KAP appointment report is prepared by referring to Form 1 as stated in Appendix II which is an integral part of this SEOJK. 12. The report on the realization of the use of AP and KAP services is prepared by referring to Form 2 as stated in Appendix II which is an integral part of this SEOJK.	
4. SEOJK No. 20/ SEOJK.06/2023 tentang Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah	9 November 2023	1. Permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, yang disampaikan kepada OJK dikelompokkan sebagai berikut: a) Permohonan perizinan; b) Permohonan persetujuan; dan c) Pelaporan. 2. Perusahaan wajib menyampaikan permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan kepada OJK sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam OJK No. 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah serta dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan. 3. Penyampaian permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dilengkapi dengan formulir hasil penilaian sendiri (*self assessment*) yang ditandatangani oleh direksi perusahaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK ini. 4. Permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan angka 3 di atas disampaikan kepada OJK secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.	Perseroan akan tunduk dan memperhatikan ketentuan dalam SEOJK ini dalam hal Perseroan akan menyampaikan permohonan perizinan, persetujuan dan pelaporan sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 47/POJK.05/2020.

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		5. Dengan penyampaian permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan kepada OJK secara daring, Perusahaan tidak perlu menyampaikan dokumen cetak. 6. Dokumen permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan yang disampaikan secara daring adalah hasil pindai (*scan*) berwarna atas dokumen asli. 7. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK belum tersedia, mengalami gangguan teknis, atau keadaan kahar, maka pengajuan permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan disampaikan secara daring dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik yang ditetapkan oleh OJK. 8. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar, OJK mengumumkan dalam situs web OJK atau melalui surat elektronik kepada perusahaan. 9. Perusahaan harus menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan secara daring atau melalui surat elektronik adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya. 10. Penyampaian permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas disampaikan melalui alamat mailingroomwismul@ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan oleh OJK. 11. Perusahaan wajib menyimpan dokumen cetak atas dokumen perizinan, dan persetujuan yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data OJK atau melalui surat elektronik kepada OJK selama perizinan dan persetujuan tersebut masih berlaku. 12. Perusahaan wajib menyimpan dokumen cetak atas dokumen pelaporan yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data OJK atau melalui surat elektronik kepada OJK dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak tanggal pelaporan.	
4. SEOJK No. 20/ SEOJK.06/2023 concerning Application for Licensing, Approval, and Electronic Reporting for Sharia Finance Companies and Finance Companies	November 9, 2023	1. Applications for licensing, approval, and reporting as required in POJK No. 47/POJK.05/2020 concerning Business Licensing and Institutions of Finance Companies and Sharia Finance Companies, submitted to OJK are grouped as follows: a) Permission application; b) Application for approval; and c) Reporting. 2. Companies are required to submit applications for licensing, approval, and reporting to OJK in accordance with the provisions required in OJK No. 47/POJK.05/2020 concerning Business and Institutional Licensing of Finance Companies and Sharia Finance Companies and are equipped with the required supporting documents. 3. The submission of applications for licensing, approval, and reporting as referred to in number 2 above is completed with a self-assessment result form signed by the company's directors as stated in the annex which is an integral part of this SEOJK. 4. Application for permission, consent, and reporting number 3 above is communicated to OJK on a daring basis through the OJK data communication network system. 5. With the presentation of permission applications, consent, and reporting to OJK on a competitive basis, the Enterprise does not need to deliver print documents. 6. Licensing, approval and reporting application documents submitted online are color scans of original documents.	The Company will comply with and pay attention to the provisions in this SEOJK in the event that the Company will submit a request for licensing, approval and reporting as required in POJK No. 47/POJK.05/2020.

Peraturan Rules	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary Rules	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		7. In the event that the OJK data communication network system is not yet available, experiencing technical problems, or force majeure, then the submission of application for licensing, approval, and reporting is submitted online in the form of electronic documents via electronic mail determined by OJK. 8. In the event of technical problems or force majeure, OJK announces on the OJK website or via electronic mail to the company. 9. The Company must certify that the documents submitted online or by electronic mail are true and the same as the original documents. 10. The presentation of the application for permission, consent, and reporting in the form of electronic documents by electronic mail as stated in number 7 above is delivered through the mailingroomwismul@ojk.go.id address or other address designated by OJK. 11. Companies are required to keep printed documents on licensing documents, and approvals that have been submitted through the OJK data communication network system or via electronic mail to OJK as long as the licenses and approvals are still valid. 12. The Company is required to keep printed documents on reporting documents that have been submitted through the OJK data communication network system or via electronic mail to OJK for a period of no less than 5 (five) years from the reporting date.	

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENGUNGKAPAN

Perseroan telah menerapkan PSAK yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 yang dianggap relevan terhadap laporan keuangan sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi.
- Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi.
- Amandemen PSAK 16: "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan.
- Amandemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal.

Perusahaan telah menganalisa penerapan standar akuntansi di atas dan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun sebelumnya.

CHANGE IN ACCOUNTING POLICIES AND DISCLOSURES

The Company adopted SFAS which effective on January 1, 2023, which is considered relevant to the financial statements as follows:

- Amendment of SFAS 1: Presentation of Financial Statement - Disclosure of Accounting Policies.
- Amendment of SFAS 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates.
- Amendment of SFAS 16: "Fixed Assets" regarding proceeds before intended use.
- Amendment of SFAS 46: "Income Tax" on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction.

The Company has assessed the adoption of the above mentioned accounting standards and does not have significant impact to the financial statements.

Teknologi Informasi

Information Technology



Perseroan melanjutkan transformasi digital untuk menghasilkan proses bisnis yang lebih efisien, andal, dan berdaya saing. Dalam hal ini, Perseroan terus mengembangkan infrastruktur dan sistem Teknologi Informasi (TI) secara berkelanjutan untuk memberikan layanan yang semakin optimal kepada konsumen dan mitra strategis.

The Company's digital transformation continues to deliver more efficient, reliable, and competitive business processes. In this regard, the Company is constantly developing Information Technology (IT) infrastructure and systems in order to provide increasingly optimal services to customers and strategic partners

Pada tahun 2023, Perseroan terus melakukan pengembangan aplikasi inti dalam perusahaan (*Core System*) dan mengembangkan digitalisasi di berbagai aspek dengan selalu memperhatikan aspek keamanan data dan kesesuaian dengan seluruh regulasi yang berlaku di negara Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Perseroan.

In 2023, the Company continued to enhance its Core System and digitalization in several aspects, while keeping data security and compliance with all applicable Indonesian regulations in mind. This is done to boost public trust in the Company.

Perseroan telah melaksanakan pengembangan aplikasi *e-Procurement* dan peremajaan perangkat komputasi. Selain itu, Perseroan juga melakukan pengkinian perangkat keamanan TI untuk mencegah dan menangkal serangan *cyber crime* yang berpotensi mengganggu sistem teknologi dan operasional Perseroan.

The Company has conducted the development of e-Procurement apps as well as the revitalization of computing devices. Moreover, the Company updates IT security tools to prevent and deter cyber-crime attacks that have the potential to impair the Company's technological and operational systems.

Selain itu, Divisi IT Perseroan bekerjasama dengan beberapa perusahaan pengembang aplikasi untuk membangun sistem yang diperlukan oleh perusahaan. Divisi IT juga menyiapkan perangkat komputasi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi bisnis perusahaan dan melakukan peremajaan perangkat komputasi yang digunakan oleh karyawan Perseroan.

Furthermore, the Company's IT Division collaborates with several application development firms to build the systems required by the Company. The IT Division also prepares computing devices needed to execute the Company's business applications and revitalizes computing devices used by employees.

Dalam melakukan transformasi digital yang didukung dengan pengembangan infrastruktur TI, Perseroan menghadapi tantangan yakni potensi kejahatan *cyber* dan kemampuan karyawan dalam penggunaan TI yang kurang merata.

The Company faces challenges in carrying out digital transformation and the expansion of IT infrastructure, particularly the possibility for cyber-crime and employees' ability to utilize IT unevenly.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Perseroan memberikan *share knowledge* terkait *IT Security Awareness* kepada seluruh lini karyawan di perusahaan. Sementara untuk mengatasi kekurangmerataan kompetensi karyawan di bidang TI, Perseroan memberikan sosialisasi kepada seluruh karyawan terkait dengan aplikasi baru yang telah dikembangkan Perseroan.

To overcome these challenges, the Company provides IT Security Awareness knowledge sharing to all lines of employees. Meanwhile, to address the issue of unequal employee competence in the IT area, the Company conducts dissemination to all employees regarding new applications developed by the Company.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Dalam aspek tata kelola TI Perseroan telah memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi yang terdiri dari jajaran manajemen dan beberapa perwakilan dari kepala divisi pengguna TI dan kepala divisi penyelenggara TI.

Information Technology Governance

In regard to IT governance, the Company has the Information Technology Steering Committee in place comprised of management and various representatives from the heads of the IT user and IT operator divisions.

Teknologi Informasi
Information Technology

Komite ini mengadakan pertemuan setidaknya sebanyak 4 kali dalam setahun yang membahas perkembangan tata kelola TI maupun tantangan yang dihadapi.

This committee meets at least four times a year to discuss IT governance development and challenges.

Dari sisi proses tata kelola TI, Perusahaan telah membentuk satu peraturan perusahaan yang mengadopsi standar yang berlaku secara internasional seperti ISO, COBIT, dan standar lainnya. Perseroan juga menerapkan sistem akses dual kontrol pada setiap sistem aplikasi perusahaan untuk menjaga keamanan dari sistem layanan inti yang diterapkan.

In terms of IT governance processes, the Company has established a corporate regulation that adopts internationally applicable standards such as ISO, COBIT, and other standards. The Company also implements a dual control access system on each of the Company's application systems to maintain the security of the core service system implemented.

Untuk memastikan tata kelola TI berjalan secara optimal, Perseroan melakukan tinjauan secara berkala melalui internal audit maupun eksternal audit dan juga memberikan laporan secara rutin kepada jajaran manajemen maupun kepada Komite Pengarah Teknologi Informasi. Laporan ini menjadi salah satu materi bahasan dalam Rapat Direksi Perseroan.

To ensure optimal IT governance, the Company conducts periodic reviews through internal and external audits and also provides regular reports to management and to the Information Technology Steering Committee. This report became one of the subjects discussed at the Company's Board of Directors Meeting.

Penghargaan dan Sertifikasi TI | IT Awards and Certifications



Pada tahun 2023, Perseroan menerima penghargaan dan sertifikasi di bidang TI yakni sebagai berikut | In 2023, the Company received awards and certifications for IT as follows:

1. Sertifikasi ISO 27001:2013 | 1. ISO 27001:2013 Certification
2. TOP LEADER on Digital Implementation 2023 yang diselenggarakan oleh It Works. | TOP LEADER on Digital Implementation 2023 organized by It Works.
3. TOP DIGITAL # Stars 5 yang diselenggarakan oleh It Works. | TOP DIGITAL #5 Stars hosted by It Works.
4. *The Most Innovative Multifinance Company for The Development of Accessible Financing Service Digitalization untuk Category Multifinance yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi.*

Rencana Pengembangan TI Tahun 2024

Pencapaian yang sudah diraih Perseroan di bidang TI akan terus semakin ditingkatkan pada tahun mendatang. Pada tahun 2024, Perseroan berencana meningkatkan fitur *Credit Scoring system* dan layanan berbasis digital guna memberikan kemudahan serta pengalaman baru bagi para pelanggan untuk menunjang perkembangan bisnis.

IT Development Plan for 2024

The Company's achievements in the area of IT will be improved further in the following year. In 2024, the Company intends to improve the Credit Scoring system feature and digital-based services to provide convenience and new experiences for customers to support business development.

Pengembangan dan peningkatan utilisasi aplikasi yang sudah dirilis pada tahun sebelumnya masih akan menjadi fokus pengembangan TI Perseroan. Pengembangan akan dilakukan dengan penambahan modul, peningkatan koneksi serta perbaikan *service* kepada konsumen yang dapat diharapkan menjadi faktor pendorong peningkatan bisnis Perusahaan. Selain itu, Perseroan juga akan meningkatkan sisi keamanan Sistem Teknologi untuk bisa memberikan rasa aman kepada setiap pengguna perangkat teknologi.

Beberapa rencana penting yang akan dijalankan oleh Perusahaan pada tahun 2024 adalah:

1. Pengembangan *system* untuk penjualan barang tarikan dengan menggunakan aplikasi digital.
2. Pengembangan aplikasi *e-Procurement.*
3. Pengembangan fitur pada aplikasi "KAWAN".
4. Pengembangan *credit scoring system.*
5. Penyesuaian sistem terkait kebijakan Perlindungan Data Konsumen.
6. Peningkatan keamanan pengembangan aplikasi.
7. Pengkinian perangkat infrastruktur dan jaringan.
8. Pengembangan infrastruktur pada *core system* Perusahaan.
9. Peningkatan fitur keamanan perusahaan berbasis *API.*
10. Pengkinian Standard Sertifikasi ISO 27001:2013 ke ISO 27001:2022.

The development and improvement of application utilization that has been released in the previous year will remain the focus of the Company's IT development. Development will be carried out by adding modules, increasing connections and improving service to customers which can be expected to be a driving factor for the improvement of the Company's business. In addition, the Company will also improve the security side of the Technology System to be able to provide a sense of security to every user of technology devices.

The following are several important plans to be implemented by the Company in 2024:

1. Development of a system for the sale of traction using digital applications.
2. Development of e-Procurement applications.
3. Feature development on the "KAWAN" application.
4. Development of credit scoring system.
5. System adjustments related to Consumer Data Protection policies.
6. Improved application development security.
7. Updating infrastructure and network devices.
8. Infrastructure development in the Company's core system.
9. Improved API-based enterprise security features.
10. Updating ISO 27001:2013 Certification Standard to ISO 27001:2022.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE



Kami terus berkomitmen menerapkan prinsip GCG guna menjaga pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan, pelayanan yang berintegritas, profesional dan selalu berupaya mengintegrasikan digitalisasi dalam setiap kegiatan usaha serta tetap menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

We continue to be committed to implementing GCG principles to maintain the Company's sustainable growth, services with integrity, professionalism and always striving to integrate digitalization in every business activity, while maintaining compliance with prevailing laws and regulations

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance



Perseroan terus berkomitmen menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam rangka menjaga pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan. Hal ini diwujudkan melalui pelayanan yang berintegritas, profesional dan selalu berupaya mengintegrasikan kemajuan teknologi informasi (digitalisasi) dalam setiap kegiatan usaha serta tetap menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Perseroan mampu mencapai kinerja yang optimal di tengah persaingan industri saat ini dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

The Company continues to be committed to implementing Good Corporate Governance (GCG) principles in order to maintain the Company's sustainable growth. This is realized through services with integrity, professionalism and always striving to integrate advances in information technology (digitalization) in every business activity and maintaining compliance with prevailing laws and regulations, so that the Company is able to achieve optimal performance in the midst of current industry competition and provide added value to stakeholders.

Perseroan terus berkomitmen menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam rangka menjaga pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan.

Hal ini diwujudkan melalui pelayanan yang berintegritas, profesional dan selalu berupaya mengintegrasikan kemajuan teknologi informasi (digitalisasi) dalam setiap kegiatan usaha serta tetap menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Perseroan mampu mencapai kinerja yang optimal di tengah persaingan industri saat ini dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

The Company continues to be committed to implementing Good Corporate Governance (GCG) principles in order to maintain the Company's sustainable growth.

This is realized through services that have integrity, professional and always strive to integrate advances in information technology (digitalization) in every business activity and maintaining compliance with prevailing laws and regulations, so that the Company is able to achieve optimal performance in the midst of current industry competition and provide added value to stakeholders.

KOMITMEN PENERAPAN GCG

Perseroan berkomitmen secara penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para investor, pemegang saham, masyarakat secara luas dan para pemangku kepentingan lainnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Prinsip GCG menjadi budaya yang harus dijaga oleh seluruh personil Perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga mampu menciptakan kinerja yang optimal dalam mewujudkan pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan.

Penerapan GCG secara berkelanjutan juga diharapkan dapat mendorong tercapainya visi dan misi Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan yang mampu menjangkau seluruh pelanggan di Indonesia dengan produk berkualitas dan memiliki daya saing, namun tetap mengedepankan kualitas layanan terbaik dan didukung dengan kemajuan teknologi informasi (digitalisasi).

Perseroan juga berkomitmen untuk tetap menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap kelestarian lingkungan di sekitar kegiatan usaha Perseroan.

COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION

The Company is fully committed to implementing GCG principles as a basis for creating sustainable added value for the interests of investors, shareholders, society at large and other stakeholders both in the short and long term. GCG principles become a culture that must be maintained by all Company personnel in carrying out their duties and functions, so as to create optimal performance in realizing sustainable growth of the Company.

It is also hoped that the sustainable implementation of GCG can encourage the achievement of the Company's vision and mission as a financing company that is able to reach all customers in Indonesia with quality and competitive products, but still prioritizes the best quality of service and is supported by advances in information technology (digitalization).

The Company is also committed to maintaining compliance with prevailing laws and regulations, as well as awareness of the Company's social responsibility towards environmental sustainability around the Company's business activities.

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Penerapan GCG menopang kinerja Perseroan selama tahun 2023
GCG implementation supports the Company's performance during 2023

Total Aset per posisi 31 Desember 2023 :
Total Assets as of December 31, 2023:

Rp6,64
(dalam Rp triliun | in Rp trillion)

Ekuitas per posisi 31 Desember 2023 :
Equity as of December 31, 2023:

Rp1,70
(dalam Rp triliun | in Rp trillion)

Total Laba Tahun Berjalan per posisi 31 Desember 2023 :
Total Income for the Year as of December 31, 2023:

Rp236,41
(dalam Rp miliar | in Rp billion)

DASAR-DASAR PELAKSANAAN GCG [GRI 2-27]

Dalam mengimplementasikan GCG, Perseroan berpedoman pada peraturan perundang-undangan termasuk peraturan otoritas pasar modal dan *best practice* yang berlaku di industri pembiayaan, serta pada peraturan internal Perseroan, yang beberapa di antaranya meliputi antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) antara lain:
   a. POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan perubahannya sebagaimana tercantum pada POJK No. 29/POJK.05/2020.
   b. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

REFERENCES OF GCG IMPLEMENTATION
[GRI 2-27]

In implementing GCG, the Company guided by prevailing laws and regulations including capital market authority regulations and best practices in financing industry, as well as the Company's internal regulations, among other as follows:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.
3. Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market.
4. Law No. 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening.
5. Financial Services Authority Regulations (POJK) and OJK Circular Letters (SEOJK), among others:
   a. POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Company and its amendments as contained in POJK No. 29/POJK.05/2020.
   b. POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Company.

c. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
d. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
e. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
f. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
g. POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
h. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
i. POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
j. POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan perubahannya sebagaimana tercantum pada POJK No. 7/POJK.05/2022.
k. POJK No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.
l. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
m. POJK No. 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
n. POJK No. 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
o. POJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

c. POJK No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Company.
d. POJK No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Company.
e. POJK No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Public Company Governance Guidelines.
f. POJK No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of Audit Committee Work.
g. POJK No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Preparing an Internal Audit Unit Charter.
h. POJK No. 27/POJK.03/2016 concerning the Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services Institutions.
i. POJK No. 11/POJK.04/2017 concerning Ownership Reports or Any Changes in Share Ownership of Public Company.
j. POJK No. 35/POJK.05/2018 concerning the Implementation of the Financing Company Business and its amendments as contained in POJK No. 7/POJK.05/2022.
k. POJK No. 10/POJK.05/2019 concerning the Business Implementation of Sharia Financing Company and Sharia Business Units of Financing Company.
l. POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company.
m. POJK No. 28/POJK.05/2020 concerning Health Level Assessment of Nonbank Financial Services Institutions.
n. POJK No. 47/POJK.05/2020 concerning Business Licensing and Institutional of Financing Company and Sharia Financing Company.
o. POJK No. 44/POJK.05/2020 concerning the Implementation of Risk Management for Nonbank Financial Services Institutions.

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

p. POJK No. 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
q. POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
r. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
s. SEOJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
t. SEOJK No. 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
u. SEOJK No. 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
v. SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

6. Anggaran Dasar Perseroan.
7. Peraturan Internal Perseroan (mencakup didalamnya kebijakan-kebijakan Perseroan mengenai GCG).

Guna menjaga peraturan internal Perseroan tetap relevan sesuai dengan kondisi organisasi, strategi Perseroan dan peraturan yang berlaku mengenai GCG, Perseroan secara berkala melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap kelengkapan dan pengkinian peraturan internal Perseroan.

PENERAPAN PRINSIP GCG

Perseroan berkomitmen secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip GCG yang meliputi: prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran.

p. POJK No. 4/POJK.05/2021 concerning the Application of Risk Management in the Use of Information Technology by Nonbank Financial Services Institutions.
q. POJK No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firm in Financial Services Activities.
r. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines.
s. SEOJK No. 11/SEOJK.05/2020 concerning Health Level Assessment of Financing Company and Sharia Financing Company.
t. SEOJK No. 7/SEOJK.05/2021 concerning the Implementation of Risk Management for Financing Company and Sharia Financing Company.
u. SEOJK No. 22/SEOJK.05/2021 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Nonbank Financial Services Institutions.
v. SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 concerning Procedures for the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

6. Articles of Association of the Company.
7. Internal Company Regulations (including the Company's policies on GCG).

To keep the relevancy of the Company's internal regulations in line with organizational condition, Company's strategy and applicable regulations on GCG, the Company periodically reviews and evaluates the completeness and updating of the Company's internal regulations.

IMPLEMENTATION OF GCG PRINCIPLES

The Company is committed to consistently implementing GCG principles which include: the principles of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.



Penjelasan prinsip-prinsip GCG di atas dan penerapannya secara umum di lingkup Perseroan adalah sebagai berikut:

An explanation of the GCG principles above and their general implementation within the Company is as follows:

Prinsip Dasar Basic Principles	**Penjelasan** Explanation	**Penerapan di Lingkup Perseroan** Implementation in Company Scope
Keterbukaan (Transparency)	Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. Transparency in the decision-making process and transparency in the disclosure and provision of relevant information about the company, which is easily accessible to stakeholders in accordance with laws and regulations in the area of financing as well as standards, principles, and practices of conducting a sound financing business.	• Perseroan mengungkapkan informasi material yang relevan dan tepat waktu, serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan melalui *website* Perseroan, antara lain Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan keterbukaan informasi lainnya terkait kegiatan usaha Perseroan. • Penerapan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan pada rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan rapat komite-komite dibawah Dewan Komisaris ataupun Direksi. • The Company discloses material information that is relevant and timely, and easily accessible to stakeholders through the Company's website, including the Annual Report, Financial Statements, General Meeting of Shareholders (GMS) Resolutions and other information disclosures related to the Company's business activities. • Implementation of transparency in the decision-making process at meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Commissioners, and meetings of committees under the Board of Commissioners or Board of Directors.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Prinsip Dasar Basic Principles	**Penjelasan** Explanation	**Penerapan di Lingkup Perseroan** Implementation in Company Scope
Akuntabilitas (Accountability)	Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien. Clarity of functions and implementation of responsibilities of company organs so that company performance can be carried out transparently, fairly, effectively and efficiently.	• Perseroan menetapkan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban masing-masing organ dalam Perseroan yang selaras dengan visi, misi, sasaran strategi dan usaha Perseroan yang dapat dilihat pada struktur organisasi Perseroan. • Direksi dan Dewan Komisaris wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan. • Perseroan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku, kebijakan mengenai sistem penghargaan dan hukuman, serta kebijakan mengenai sistem pendeteksian dini di Perseroan. • Perseroan membentuk komite untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Direksi ataupun Dewan Komisaris. • The Company determines the clarity of functions, structures, systems and responsibilities of each organ is in line with the Company's vision, mission, strategic objectives, and business which can be seen in the Company's organizational structure. • The Board of Directors and Board of Commissioners must account for their performance to shareholders through the Annual GMS. • The Company establishes a Code of Ethics and Code of Conduct, policies regarding reward and punishment systems, and policies regarding early detection systems in the Company. • The Company establishes a committee to assist the implementation of the functions and duties of the Board of Directors or Board of Commissioners.
Pertanggungjawaban (Responsibility)	Kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. Conformity of company management with laws and regulations in financing and ethical values, as well as standards, principles, and practices for implementing healthy financing businesses.	• Perseroan menetapkan Policy Manajemen Risiko, membentuk fungsi manajemen risiko, Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko sebagai bentuk tanggung jawab Direksi terhadap penerapan manajemen risiko. • Perseroan melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk kontribusi berkelanjutan Perseroan kepada konsumen atau masyarakat sekitar yang dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. • The Company establishes a Risk Management Policy, risk management function, Risk Management Committee and Risk Monitoring Committee as a form of the Board of Directors' responsibility for the implementation of risk management. • The Company implements Corporate Social Responsibility programs as a form of the Company's sustainable contribution to consumers or the surrounding community that can have a positive impact on the environment.

Prinsip Dasar Basic Principles	Penjelasan Explanation	Penerapan di Lingkup Perseroan Implementation in Company Scope
Kemandirian (Independency)	Keadaan perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. The state of the company that is managed independently and professionally and free from conflicts of interest and influence or pressure from any party that is not in accordance with laws and regulations in the area of financing and ethical values as well as standards, principles, and practices for implementing healthy financing businesses.	• Perseroan dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari segala tekanan dan intervensi dari pihak lain. • Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh personil Perseroan senantiasa berupaya menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan. • The Company is managed independently and professionally and free from all pressure and intervention from other parties. • The Board of Commissioners, Board of Directors, and all personnel of the Company strive to avoid all forms of conflicts of interest in decision making as stipulated in the Company's Code of Ethics and Code of Conduct.
Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)	Kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. Equality, balance, and fairness in fulfilling the rights of stakeholders arising from agreements, legal regulations, and ethical values, as well as standards, principles, and practices for implementing healthy financing businesses.	• Perseroan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. • Perseroan memberikan kesempatan kepada Pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Perseroan menghadirkan kondisi kerja yang baik bagi seluruh personil Perseroan sesuai dengan kemampuan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta adanya penilaian kinerja secara periodik serta kesempatan promosi yang sama bagi seluruh karyawan. • The Company pays attention to the interests of all stakeholders based on the principles of equality and fairness. • The Company provides an opportunity for Shareholders to attend and vote in the GMS in accordance with prevailing regulations. • The Company provides good working conditions for all Company personnel in accordance with the Company's capabilities and prevailing laws and regulations, as well as periodic performance assessments and equal promotion opportunities for all employees.

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

IMPLEMENTASI PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Berdasarkan POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, terdapat 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip GCG. Implementasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka di Perseroan dijelaskan sebagai berikut:

IMPLEMENTATION OF PUBLIC COMPANY GOVERNANCE GUIDELINES

Pursuant to POJK No. 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies and SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Corporate Governance Guidelines of Public Companies, there are 5 (five) aspects, 8 (eight) principles and 25 (twenty-five) recommendations for the implementation of aspects and principles of GCG. Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies is presented as follows:

No	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
A.	**ASPEK HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM** | ASPECTS OF PUBLIC COMPANY RELATIONS WITH SHAREHOLDERS IN ENSURING SHAREHOLDERS RIGHTS	
	Prinsip 1 | Principle 1 **Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** | Enhancing the Values of General Meeting of Shareholders (GMS) Implementation	
1.1	Perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara *(voting)* baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. A public company has a technical method or procedure for voting, both openly and privately, that prioritizes the independence and interests of shareholders.	Implementasi | Implementation: Sesuai | Comply Teknis pengumpulan suara dalam RUPS Perseroan diatur dalam Tata Tertib RUPS (disampaikan kepada pemegang saham yang hadir sebelum penyelenggaraan RUPS) dan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Sebagai bentuk transparansi kepada pemegang saham, tata tertib RUPS Perseroan dapat diunduh pada *website* Perseroan: www.wom.co.id. Dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2023, teknis pengumpulan suara terkait setiap usul yang diajukan dalam setiap mata acara RUPS dilakukan secara terbuka sesuai tata cara yang disampaikan oleh pimpinan rapat, yaitu: a. Tata cara pemungutan suara secara fisik: i. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan. ii. Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau suara blanko, dipersilahkan untuk mengisi Formulir Pemungutan Suara yang telah dibagikan. Petugas Perseroan akan mengumpulkan Formulir Pemungutan Suara yang telah diisi oleh pemegang saham atau Kuasanya dengan mencantumkan mata acara rapat, nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan jumlah suara tidak setuju atau blanko. Selanjutnya petugas Perseroan akan menyerahkannya kepada Notaris untuk dihitung.

No	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation

b. Tata cara pemungutan suara secara elektronik:
   i. Proses pemungutan suara secara elektronik akan berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*, selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Perseroan memberikan waktu maksimum selama 5 (lima) menit kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk pemungutan suara secara elektronik untuk setiap mata acara rapat.
   ii. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no. 1 has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara rapat tertentu hingga status pelaksanaan rapat yang terlihat pada kolom *'General Meeting Flow Text'* berubah menjadi "*Voting for agenda item no. 1 has ended*", maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara rapat yang bersangkutan.
   iii. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat memberikan suara sejak pemanggilan rapat sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara dalam rapat. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan rapat memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara rapat. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan rapat tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan rapat menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara rapat.

Berdasarkan pasal 20 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

The technique for collecting votes at the Company's GMS is regulated in the GMS Rules of Conduct (submitted to shareholders who are present before the GMS) and in the Company's Articles of Association to prioritize the independence and interests of shareholders. As a form of transparency to shareholders, the rules of the Company's GMS can be downloaded on the Company's website: www.wom.co.id.

In the Annual GMS and Extraordinary GMS held on March 30, 2023, the technical collection of votes related to each proposal submitted in each agenda of the GMS is carried out openly according to the procedures submitted by the meeting leadership, namely:

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

No	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
		a. Procedures for physical voting: i. The vote will be conducted orally. ii. Shareholders who are physically present who disagree or vote blankly, are welcome to fill out the Voting Form that has been distributed. The Company's officers will collect the Voting Form that has been filled out by the shareholders or their Proxies by stating the agenda of the meeting, the names of shareholders, the number of shares owned or represented and the number of dissenting or blank votes. Furthermore, the Company's officers will submit it to the Notary for calculation. b. Procedure for electronic voting: i. The electronic voting process will take place on the eASY.KSEI application on the E-meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu, during the voting period through the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application opened by the Company. The Company provides a maximum of 5 (five) minutes to shareholders or shareholders' proxies for electronic voting for each agenda of the meeting. ii. During the electronic voting process, you will see the status "Voting for agenda item no. 1 has started" in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or shareholders' proxies do not vote for a particular meeting agenda until the meeting status seen in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no. 1 has ended", it will be considered to have voted abstained for the said agenda of the meeting. iii. Shareholders or its proxies who are present electronically may vote from the call of the meeting until the opening of each agenda at the meeting. Shareholders or its proxies who have voted electronically may change or revoke their voting choices no later than before the chairman of the meeting begins voting for decision-making on each agenda of the meeting. If the votes cast prior to the meeting are not changed or revoked, the votes are binding when the meeting chairman closes the vote for decision-making on each agenda of the meeting. Based on article 20 paragraph (17) of the Company's Articles of Association, shareholders of shares with valid voting rights who are present at the GMS but abstention are considered to have voted the same as the majority vote of the shareholders who voted in the Meeting.
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of a Public Company attended the Annual GMS.	Implementasi | Implementation: Jelaskan | Explain Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat untuk periode yang berakhir pada ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2023:

RUPS	RUPS Tahunan 30 Maret 2023	RUPS Luar Biasa 30 Maret 2023
Dewan Komisaris	60%	60%
Direksi	100%	100%

No	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation

Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat efektif sejak ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2023:

RUPS	RUPS Tahunan 30 Maret 2023	RUPS Luar Biasa 30 Maret 2023
Dewan Komisaris	100%	100%
Direksi	100%	100%

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dapat mewakili Perseroan untuk memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas setiap mata acara RUPS sehingga RUPS dapat dilaksanakan dengan baik.

Informasi mengenai kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris selengkapnya dapat dilihat pada Bab ini mengenai Direksi dan Dewan Komisaris.

Attendance of members of the Board of Directors and Board of Commissioners who serve for the period ending at the closing of the 2023 Annual GMS:

GMS	Annual GMS March 30, 2023	Extraordinary GMS March 30, 2023
Board of Commissioners	60%	60%
Board of Directors	100%	100%

The presence of members of the Board of Directors and Board of Commissioners who serve effective since the closing of the 2023 Annual GMS:

GMS	Annual GMS March 30, 2023	Extraordinary GMS March 30, 2023
Board of Commissioners	100%	100%
Board of Directors	100%	100%

The attended members of the Board of Directors and Board of Commissioners can represent the Company to provide explanations to shareholders on each agenda of the GMS for the GMS to be carried out properly.

Complete information about the attendance of members of the Board of Directors and Board of Commissioners is presented in this Chapter regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners.

1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. The summary of the minutes of the GMS is available on the Public Company's Website for at least one year.	Implementasi | Implementation: Sesuai | Comply Perseroan telah mempublikasikan ringkasan risalah RUPS pada halaman *website* Perseroan dan tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun. Ringkasan risalah RUPS dapat diunduh pada *website* Perseroan: www.wom.co.id. The Company has published the summary of the minutes of the GMS on the Company's website. It is available for more than one year. The summary of the minutes of the GMS can be downloaded on the Company's website: www.wom.co.id.

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

No	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
Prinsip 2 | Principle 2 **Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor** Enhancing the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors		
2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. The Public Company has a communication policy with shareholders or investors.	Implementasi | Implementation: Sesuai | Comply Ketentuan internal Perseroan mengenai komunikasi dengan publik termasuk kepada pemegang saham maupun investor diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan serta Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor yang berlaku di Perseroan. The Company's internal stipulations regarding communication with the public, including to shareholders and investors, are regulated in the Company's Code of Ethics and Code of Conduct as well as the Communication Policy with Shareholders or Investors in applicable In the Company.
2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs *Web*. The Public Company discloses the Public Company's communication policies with shareholders or investors on the Website.	Implementasi | Implementation: Sesuai | Comply Perseroan telah mengungkapkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan serta Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor yang berlaku di Perseroan pada *website* Perseroan: www.wom.co.id. The Company has disclosed the Company's Code of Ethics and Code of Conduct and its Communication Policy with Shareholders or Investor in applicable at the Company on the Company's website: www.wom.co.id.
B. ASPEK FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS | ASPECTS OF THE FUNCTIONS AND ROLES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS		
Prinsip 3 | *Principle 3* **Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris** | Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners		
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. The determination of total members of the Board of Commissioners takes into account the conditions of the Public Company.	Implementasi | Implementation: Sesuai | Comply Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mempertimbangkan kebutuhan, kondisi dan kemampuan Perseroan. Per 31 Desember 2023, Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat berjumlah 3 (tiga) orang, dimana 67% (enam puluh tujuh persen) merupakan Komisaris Independen. The total members of the Company's Board of Commissioners are in accordance with the provisions of the applicable laws and it has taken into account the needs, conditions and capabilities of the Company. As of December 31, 2023, there are 3 (three) members of the Company's Board of Commissioners with 67% (sixty seven percent) of the members are Independent Commissioners.

No	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. The determination of the composition of the Board of Commissioners members takes into account the diversity of expertise, knowledge and experience required.	Implementasi | Implementation: Sesuai | Comply Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya selaku anggota Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris Perseroan telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia yang dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan mengenai profil masing-masing anggota Dewan Komisaris. The determination of the composition of the Board of Commissioners members is carried out by taking into account the diversity of expertise, knowledge and experience required to support the implementation of their duties as the Board of Commissioners members. The composition of the Company's Board of Commissioners has reflected the diversity of its members, both in terms of education, work experience and age, which presented in Company Profile Chapter on the profile of each member of the Company's Board of Commissioners.
Prinsip 4 | Principle 4 **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris** | Improving the Quality of implementation the Board of Commissioners Duties and Responsibilities		
4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the Board of Commissioners' performance.	Implementasi | Implementation: Sesuai | Comply Kebijakan penilaian Dewan Komisaris diatur dalam Piagam Dewan Komisaris yang dapat diakses melalui *website* Perseroan: www.wom.co.id. Dalam Piagam Dewan Komisaris tersebut mengatur mengenai penilaian dan pengukuran kinerja Dewan Komisaris baik secara individu maupun secara kolegial yang wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dengan metode *self-assessment* atau dengan metode lainnya. The Board of Commissioners' assessment policy is regulated in the Board of Commissioners Charter which can be accessed via Company's website: www.wom.co.id. The Board of Commissioners Charter regulates the assessment and measurement of the performance of the Board of Commissioners both individually and collegially which shall be carried out at least once a year using the self-assessment method or by other methods.
4.2	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed through the Public Company's Annual Report.	Implementasi | Implementation: Sesuai | Comply Kebijakan penilaian Dewan Komisaris telah diatur dalam Piagam Dewan Komisaris dan mekanisme penilaian Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. The Board of Commissioners' assessment policy has been regulated in the Board of Commissioners Charter and the Board of Commissioners' assessment mechanism is disclosed in the Company's Annual Report.

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

No	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of the Board of Commissioners members if they are involved in financial crime.	Implementasi | Implementation: Sesuai | Comply Dalam Piagam Dewan Komisaris Perseroan terdapat ketentuan bahwa jabatan anggota Dewan Komisaris dapat berakhir jika anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya. Persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimaksud dalam Piagam Dewan Komisaris tersebut mencakup juga persyaratan yang diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik yang menyebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris selama menjabat harus memenuhi persyaratan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. The Company's Board of Commissioners Charter stated a provision that the position of a member of the Board of Commissioners may end if the member of the Board of Commissioners concerned no longer meets the requirements of OJK and other applicable laws and regulations. The requirements of the applicable laws and regulations referred to in the Board of Commissioners Charter include the requirements stipulated in POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. It is stated the position Board of Commissioners members during their term of office must meet the requirements that they have not been convicted of a criminal act that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector.
4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function shall formulate a succession policy in the nomination process of the Board of Directors members.	Implementasi | Implementation: Sesuai | Comply Perseroan telah memiliki Kebijakan Suksesi Dalam Proses Nominasi Anggota Direksi Versi 01 Tahun 2021 yang disusun oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. The Company has a Succession Policy in the Nomination Process for the Board of Directors members Version 01 of 2021, prepared by the Nomination and Remuneration Committee and approved by the Board of Commissioners.

No	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
C. ASPEK FUNGSI DAN PERAN DIREKSI | ASPECTS OF BOARD OF DIRECTORS FUNCTIONS AND ROLES		
Prinsip 5 | Principle 5 **Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi** | Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors		
5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. The determination of the total members of the Board of Directors takes into account the conditions of the Public Company and the effectiveness in decision making.	Implementasi | Implementation: Sesuai | Comply Jumlah anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mempertimbangkan kebutuhan, kondisi dan kemampuan Perseroan. Per 31 Desember 2023, Direksi Perseroan berjumlah 5 (lima) anggota. The total members of the Company's Board of Directors are in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations and has taken into account the needs, conditions and capabilities of the Company. As of December 31, 2023, the Company's Board of Directors consisted of 5 (five) members.
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. The determination of the composition of the Board of Directors members takes into account the diversity of expertise, knowledge and experience required.	Implementasi | Implementation: Sesuai | Comply Penentuan komposisi anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya selaku anggota Direksi. Komposisi anggota Direksi Perseroan telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja dan usia yang dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan mengenai profil masing-masing anggota Direksi. The determination of the composition of the Board of Directors members is carried out by taking into account the diversity of expertise, knowledge and experience required to support the implementation of their duties as the Board of Directors members. The composition of the Company's Board of Directors members has reflected the diversity of its members, both in terms of education, work experience and age which can be seen in the Company Profile Chapter on the profile of each member of the Board of Directors.

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

No	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/ atau pengetahuan di bidang akuntansi. The Board of Directors members in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in accounting.	Implementasi | Implementation: Sesuai | Comply Pelaksanaan tugas dan wewenang Direktur yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan untuk tahun 2023 dilakukan oleh Cincin Lisa Hadi. Informasi lebih lanjut mengenai Cincin Lisa Hadi, mohon melihat profil Cincin Lisa Hadi selaku Direktur dan Sekretaris Perusahaan. The implementation of the duties and authorities of the Director in charge of accounting and finance for 2023 was managed by Cincin Lisa Hadi. For more information about Cincin Lisa Hadi, please see her profile as Director and Corporate Secretary.
Prinsip 6| Principle 6 **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi** | Improving Quality of Implementation the Board of Directors Duties and Responsibilities		
6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the Board of Directors' performance.	Implementasi | Implementation: Sesuai | Comply Kebijakan penilaian Direksi diatur dalam Piagam Direksi yang dapat diakses melalui *website* Perseroan: www.wom.co.id. Dalam Piagam Direksi tersebut mengatur mengenai penilaian kinerja Direksi baik secara individu maupun kolegial wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Penilaian dan pengukuran terhadap kinerja anggota Direksi didasarkan pada hasil pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan target pencapaian kinerja Perseroan atau individu anggota Direksi maupun pencapaian-pencapaian komponen lain yang tercantum dalam *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi. The Board of Directors assessment policy is regulated in the Board of Directors Charter which can be accessed through the Company's website: www.wom.co.id. The Board of Directors Charter stipulates that performance assessment of the Board of Directors, both individually and collegially, shall be carried out at least once a year. The performance assessment and measurement of members of the Board of Directors is based on the results of the implementation of duties of the person concerned in accordance with the performance achievement targets of the Company or individual members of the Board of Directors, as well as the achievements of other components listed in the Key Performance Indicators (KPIs) of the Board of Directors.

No	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
6.2	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed in the Public Company's annual report.	Implementasi | Implementation: Sesuai | Comply Kebijakan penilaian Direksi telah diatur dalam Piagam Direksi dan penilaian kinerja Direksi diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. The Board of Directors assessment policy has been regulated in the Board of Directors Charter and the Board of Director's performance assessment is disclosed in the Company's Annual Report.
6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of the Board of Directors members if they are involved in financial crimes.	Implementasi | Implementation: Sesuai | Comply Dalam Piagam Direksi terdapat ketentuan bahwa jabatan anggota Direksi dapat berakhir jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya. Persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimaksud dalam Piagam Direksi tersebut mencakup juga persyaratan yang diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik yang menyebutkan bahwa anggota Direksi selama menjabat harus memenuhi persyaratan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. The Board of Directors Charter states a provision that the Board of Directors members may end their position if they no longer meet the requirements of OJK and other applicable laws and regulations. The requirements of the applicable laws and regulations referred to in the Board of Directors Charter also include the requirements stipulated in POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Company which stated that the Board of Directors members during their term of office must meet the requirements that they have not been convicted of a criminal act that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector.
D. PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN | STAKEHOLDERS PARTICIPATION		
Prinsip 7 | *Principle 7* **Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan** | Improving Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation		
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. The Public Company has a policy to prevent insider trading.	Implementasi | Implementation: Sesuai | Comply Perseroan telah mengatur ketentuan tentang pencegahan terjadinya perdagangan orang dalam (*insider trading*) dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan yang dapat diunduh pada *website* Perseroan www.wom.co.id.

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

No	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
		Dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku menetapkan bahwa personil Perseroan tidak diperkenankan melakukan transaksi dengan menggunakan informasi orang dalam *(insider information)* yaitu informasi material atau penting yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum. Apabila personil Perseroan memiliki informasi orang dalam, maka personil Perseroan tersebut wajib untuk tidak melakukan transaksi baik untuk diri sendiri maupun mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi, serta tidak meneruskan atau memberikan informasi tersebut kepada pihak lain. The Company has regulated provisions regarding the prevention of insider trading in the Company's Code of Ethics and Code of Conduct that can be downloaded on the Company's website www.wom.co.id. The Code of Ethics and Code of Conduct stipulates that the Company's employees are not allowed to conduct transactions using insider information, namely material or important information held by insiders that is not yet available to the public. If they have inside information, the Company employees are obliged not to make transactions either for themselves or to influence other parties to conduct transactions and not to pass on or provide such information to other parties.
7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan *anti fraud.* The Public Company has an anti-corruption and anti fraud policy.	Implementasi | Implementation: Sesuai | Comply Perseroan memiliki kebijakan mengenai anti korupsi seperti Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku, Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan untuk kebijakan mengenai *anti fraud* seperti Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud.* The Company has policies regarding anti-corruption, such as the Code of Ethics and Conduct Guidelines, Anti-Bribery Management System Policy, and for policies on anti fraud, such as the Anti Fraud Strategy Guidelines.
7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. The Public Company has a policy regarding the selection and capacity building of suppliers or vendors.	Implementasi | Implementation: Sesuai | Comply Perseroan telah memiliki kebijakan terkait kerjasama dengan dealer yang tertuang pada: a. Kebijakan Grading Dealer No. 018/SKB/RISK/01-18 versi 02 yang berlaku pada tanggal 1 Februari 2018. b. Prosedur Pengajuan Kerjasama Dealer dan Registrasi Referantor No. 010/PCD/OPP&SQ/10-19 versi 01 yang berlaku pada tanggal 20 Maret 2020. c. Kebijakan Kerjasama Dealer No. 077/SK/OPP/06-21 versi 2 yang berlaku pada tanggal 5 Juli 2021. Selain itu Perseroan memiliki Ketentuan Vendor Management dan Pengadaan Barang & Jasa yang tertuang pada: a. Ketentuan Vendor Management dan Pengadaan Barang & Jasa No. 115/SK/OPP/04-23 versi 3 yang berlaku pada tanggal 6 November 2023. b. Prosedur Vendor Management dan Pengadaan Barang & Jasa No. 022/PCD/OPP/10-21 versi 01 yang berlaku pada tanggal 5 November 2021.

No	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
		The Company has a policy related to dealer cooperation as stated in: a. Dealer Grading Policy No. 018/SKB/RISK/01-18 version 02 which takes effect on February 1, 2018. b. Procedure for Submitting Dealer Cooperation and Referent Registration No. 010/PCD/OPP&SQ/10-19 version 01 which takes effect on March 20, 2020. c. Dealer Cooperation Policy No. 077/SK/OPP/06-21 version 2 which takes effect on July 5, 2021. In addition, the Company has Vendor Management and Procurement of Goods & Services Rules which contained in: a. Rules for Vendor Management and Procurement of Goods & Services No. 115/SK/OPP/04-23 version 3 which takes effect on November 6, 2023. b. Procedure of Vendor Management and Procurement of Goods & Services No. 022/PCD/OPP/10-21 version 01 which takes effect on November 5, 2021.
7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. The Public Company has a policy regarding the fulfillment of creditors' rights.	Implementasi | Implementation: Sesuai | Comply Kebijakan terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak kreditur tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Policies related to the protection of creditor rights are contained in the Guidelines for Good Corporate Governance.
7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*. Public Companies have a whistleblowing system policy.	Implementasi | Implementation: Sesuai | Comply Perseroan telah memiliki kebijakan sistem pelaporan pelanggaran sebagaimana tertuang pada Policy Manajemen Risiko, Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan. The Company has a violation reporting system policy as stated in the Company's Risk Management Policy, Code of Ethics and Code of Conduct.
7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. The Public Company has a policy of providing long-term incentives to the Board of Directors and employees.	Implementasi | Implementation: Sesuai | Comply Perseroan telah memiliki: a. Kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi sebagaimana tertuang pada Kebijakan Nomor 054/SK/HCSD/03-22 versi 01 yang berlaku pada tanggal 1 April 2022 tentang Kebijakan Remunerasi yang berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, serta Kebijakan Pemberian Insentif Jangka Panjang kepada Direksi. b. Kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada karyawan sebagaimana tertuang pada Kebijakan Nomor 055/SK/HCSD/03-22 versi 01 Tahun 2022 yang berlaku pada tanggal 7 Maret 2022 tentang Kebijakan Remunerasi yang berlaku bagi Karyawan serta kebijakan Pemberian Insentif Jangka Panjang kepada Karyawan.

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

No	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
		The Company already has in place: a. The policy of providing long-term incentives to the Board of Directors as stated in Policy No. 054/SK/HCSD/03-22 version 01 effective on April 1, 2022 concerning Remuneration Policy applicable to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Policy for Granting Long-Term Incentives to the Board of Directors. b. The policy of providing long-term incentives to employees as stated in Policy Number 055/SK/HCSD/03-22 version 01 which takes effect on March 7, 2022 about the Remuneration Policy applicable to Employees and the policy of Providing Long-Term Incentives to Employees.
E. KETERBUKAAN INFORMASI | INFORMATION DISCLOSURE		
Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi | Improving the Implementation of Information Disclosure **Prinsip 8** | Principle 8		
8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. The Public Companies utilizes the wider use of information technology in addition to the website as a medium for information disclosure.	Implementasi | Implementation: Sesuai | Comply Perseroan telah memanfaatkan teknologi informasi, baik *website* Perseroan, media internal dan/atau media komunikasi massa, untuk melaksanakan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). The Company has utilized information technology through the Company's website, internal media and/or mass communication media, to carry out information disclosure to stakeholders.
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Annual Report of Public Company discloses the ultimate beneficial owner in the Public Company's share ownership of at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the final beneficial owner in the Public Company's share ownership through the major and controlling shareholders.	Implementasi | Implementation: Sesuai | Comply Laporan Tahunan Perseroan mengungkapkan: • Daftar pemegang saham Perseroan yang memiliki saham Perseroan 5% (lima persen) atau lebih; • Pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan; dan/atau • Pemegang saham utama/pemegang saham pengendali Perseroan. The Company's Annual Report discloses: • List of the Company's shareholders who own 5% (five percent) or more of the Company's shares; • The ultimate beneficial owner of the Company's share ownership; and/or; • Major/controlling shareholders of the Company.

PELAKSANAAN GCG 2023

Sepanjang tahun 2023, Perseroan telah melakukan berbagai kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas dan memperkuat penerapan GCG antara lain sebagai berikut:

2023 GCG IMPLEMENTATION

Throughout 2023, the Company has carried out various activities in an effort to improve the quality and strengthen the implementation of GCG, including the following:

Bagan Pelaksanaan GCG 2023
Implementation Chart GCG 2023

Penyesuaian Anggaran Dasar
Penyesuaian anggaran dasar Perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan mempertimbangkan adanya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

Adjustment of the Company's Article of Association
Adjustment of the Company's Articles of Association related to the aims and objectives as well as the Company's business activities by considering the existence of the Standard Classification of Indonesian Business Field (KBLI) 2020.

Pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris dan DPS Perseroan
Pengangkatan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan untuk periode selanjutnya.

Appointment of the Company's Board of Directors, Board of Commissioners and DPS
Appointment of members of the Company's Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board for the next period.

Pengangkatan Komite-Komite Perusahaan
Penunjukan dan pengangkatan untuk periode selanjutnya terhadap anggota:
a. Komite Audit.
b. Komite Pemantau Risiko.
c. Komite Nominasi dan Remunerasi.
d. Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah.

Appointment of Company Committees
Appointment for the next period of members:
a. Audit Committee.
b. Risk Oversight Committee.
c. Nomination and Remuneration Committee.
d. Sharia Product and Business Activity Development Committee.

Penyempurnaan Kebijakan Internal
Penyempurnaan terhadap kebijakan internal Perseroan terkait GCG, seperti:
a. Pedoman Dewan Pengawas Syariah.
b. Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Perusahaan.
c. Kebijakan Program Orientasi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris Baru.

Improvement of Internal Policy
Improvement of the Company's internal policies related to GCG, such as:
a. Sharia Supervisory Board Guidelines.
b. Company Anti-Bribery Management System Policy.
c. Orientation Program Policy for Members of the Board of Directors and/or New Members of the Board of Commissioners.

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Sosialisasi
Melaksanakan sosialisasi GCG pada Perseroan mengenai:
a. Peraturan baru yang diterbitkan oleh regulator dalam rangka penerapan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Nilai-nilai perusahaan.
c. Budaya anti korupsi dan anti gratifikasi.

Socialization
Conducted GCG socialization to the Company regarding:
a. New regulations issued by regulators in order to implement the Company's compliance with applicable laws and regulations.
b. Company values.
c. Anti-corruption and anti-gratification culture.

PENILAIAN PENERAPAN GCG

Sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG, Perseroan melakukan penilaian kualitas penerapan GCG secara berkala dan hasil penilaian tersebut dijadikan sebagai rekomendasi atau rujukan dalam menetapkan rencana tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan implementasi GCG yang dinilai masih perlu disempurnakan. Penilaian kualitas penerapan GCG dilakukan Perseroan secara internal dan/atau oleh pihak eksternal, yaitu sebagai berikut:

1. Penilaian Internal
Perseroan melakukan penilaian internal penerapan GCG untuk setiap tahun buku dengan menggunakan metode kertas kerja penilaian sendiri (*self assessment*). Pelaksanaan penilaian sendiri (*self assessment*) tersebut dilakukan berdasarkan:
- POJK No. 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
- POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan perubahannya sebagaimana tercantum pada POJK No. 29/POJK.05/2020.
- SEOJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Penilaian GCG yang dilaksanakan merupakan mekanisme *check and balance* bagi manajemen untuk mengukur kekuatan dan kelemahan implementasi

GCG IMPLEMENTATION ASSESSMENTS

The Company conducts periodic GCG implementation quality assessments as part of its commitment to enhance the quality of GCG implementation and the results of this assessment become a reference or recommendation in determining follow-up plans to improve and increase the implementation of GCG which is considered to still need to be perfected. The assessment of the quality of GCG implementation is carried out internally and/or by external parties, as follows:

1. Internal Assessment
The Company conducts an internal assessment of GCG implementation for each financial year using the self-assessment working paper method. The implementation of self-assessment is carried out based on:
- POJK No. 28/POJK.05/2020 concerning Assessment of the Soundness Level of Nonbank Financial Services Institutions.
- POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies and its amendments as contained in POJK No. 29/POJK.05/2020.
- SEOJK No. 11/SEOJK.05/2020 concerning Assessment of the Soundness Level of Financing Companies and Sharia Financing Companies.

The GCG assessment serves as a check and balance mechanism for management to measure the strengths and weaknesses of the ongoing

GCG yang sedang berjalan di Perseroan. Hal ini diperlukan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas implementasi GCG pada berbagai aspek yang diukur.

Prosedur

Berdasarkan ketentuan OJK, Perseroan harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap 3 (tiga) aspek tata kelola (*Governance)*, yaitu:

a. Struktur Tata Kelola
   Penilaian struktur tata kelola bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur GCG agar proses penerapan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan perusahaan.

b. Proses Tata Kelola
   Penilaian proses tata kelola bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur GCG sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders)*.

c. Hasil Penerapan Tata Kelola
   Penilaian hasil penerapan tata kelola bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan perusahaan sebagai hasil proses penerapan prinsip GCG dengan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur GCG.

Kriteria Penilaian

Kriteria yang digunakan dalam penilaian adalah sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah. Dalam rangka penerapan 5 (lima) prinsip GCG, Perseroan harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) yang paling sedikit meliputi 12 (dua belas) faktor penilaian penerapan GCG yaitu:

GCG implementation in the Company. This is needed to improve and enhance the quality of GCG implementation in various measured aspects.

Procedures

Based on OJK regulations, the Company shall conduct a self-assessment of 3 (three) aspects of governance, which are:

a. Governance Structure
   The governance structure assessment aims to assess the adequacy of GCG structure and infrastructure to ensure that the process of implementing GCG principles produces outcomes are in accordance with the expectations of company stakeholders.
b. Governance Process
   The governance process assessment aims to assess the effectiveness of the GCG principle implementation process supported by the adequacy of GCG structure and infrastructure so as to produce outcomes that are in accordance with the expectations of stakeholders.
c. Governance Outcomes
   The assessment of the results of governance implementation aims to assess the quality of outcomes that meet the expectations of the company's stakeholders as a result of the process of implementing GCG principles supported by the adequacy of GCG structure and infrastructure.

Assessment Criteria

The criteria used in the assessment are as set out in SEOJK No. 11/SEOJK.05/2020 regarding the Soundness Rating Assessment of Financing Companies and Sharia Financing Companies. In implementing 5 (five) GCG principles, the Company shall conduct a self-assessment which includes at least 12 (twelve) factors of GCG assessment implementation, as follows:

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS).
d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemegang saham atau yang setara.
e. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.

f. Penanganan benturan kepentingan.
g. Penerapan fungsi kepatuhan perusahaan.
h. Penerapan fungsi audit internal.
i. Penerapan fungsi audit eksternal.
j. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal.
k. Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaporan internal.
l. Rencana strategis perusahaan.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Perseroan melakukan penilaian sendiri *(self assessment)* atas penerapan GCG dengan melibatkan antara lain Direksi, Internal Audit Division, serta fungsi atau unit kerja lainnya yang terkait di Perseroan untuk menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur atas efektivitas penerapan tata kelola Perseroan.

Hasil Penilaian

Perseroan menggunakan 3 (tiga) aspek tata kelola (*governance)* tersebut sebagai dasar penilaian penerapan GCG. Perseroan telah melakukan penilaian sendiri penerapan GCG pada 2023, adapun hasil penilaian sendiri penerapan GCG sebagai berikut:

a. Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors.
b. Implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
c. Implementation of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board (DPS).
d. Implementation of duties and responsibilities of shareholders or the equivalent.
e. Completeness and implementation of committee duties.
f. Handling conflicts of interest.
g. Implementation of compliance function.
h. Implementation of internal audit function.
i. Implementation of external audit function.
j. Implementation of risk management including internal control system.
k. Transparency of the Company's financial and nonfinancial conditions, GCG implementation reports, and internal reporting.
l. The Company's strategic plan.

Assessors

The Company conducts a self-assessment of GCG implementation by involving, among others, the Board of Directors, Internal Audit Division, and other functions or work units related to the Company to produce a comprehensive and structured assessment of the effectiveness of the Company's governance implementation.

Assessment Results

The Company applies 3 (three) aspects of governance as the basis for GCG implementation assessment. The Company has conducted self-assessment of GCG implementation in 2023, with the following results:

Indikator Indicator	Peringkat Rating	Definisi Peringkat Devinition of Rating
Individual	2	Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perseroan. Reflecting the Company's management has implemented good corporate governance which is generally good. This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of good corporate governance. In the event that there are weaknesses in the implementation of good corporate governance principles, in general these weaknesses are less significant and can be resolved with normal actions by the Company's management.

2. Penilaian Eksternal

Pada Tahun 2023, selain melakukan penilaian sendiri, penerapan GCG Perseroan juga dinilai oleh pihak eksternal dengan mengikuti kegiatan apresiasi/ award sebagai berikut:

a. Indonesia GCG Award VII Tahun 2023

- Pihak Penyelenggara:
  Economic Review
- Pihak yang melakukan penilaian:
  Dewan Juri Indonesia GCG Award VII Tahun 2023
- Kriteria Penilaian:
  Prinsip-prinsip GCG
- Hasil Penilaian:
  Perseroan berhasil meraih 1st The Best Indonesia GCG - 2023 dengan rincian sebagai berikut:

  Kategori : Multifinance , Asset (Rp1T - Rp6T) - Public Company
  Sektor : Multifinance
  Nilai : 80.20 (dari 100)
  Tingkat : Excellent
  Penilaian : Penilaian dengan tingkat *excellent* tersebut diatas, dilakukan dengan melakukan penilaian atas indikator-indikator penilaian terkait dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola sebagai berikut:

2. External Assessment

In 2023, apart from conducting self-assessment, the Company's GCG implementation is also assessed by external parties by participating in appreciation/ award activities as follows:

a. Indonesia GCG Award VII Year 2023

- Organizers:
  Economic Review
- Assessors:
  Indonesian GCG Award VII Jury 2023
- Assessment Criteria:
  Principles of GCG
- Assessment Results:
  The Company received the 1st The Best Indonesia GCG - 2023 with the following details:

  Category : Multifinance, Asset (Rp1T - Rp6T) - Public Company
  Sector : Multifinance
  Score : 80.20 (out of 100)
  Rating : Excellent
  Assessment : The excellent level assessment above is carried out by assessing the assessment indicators related to the implementation of governance principles as follows:

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

1) Keterbukaan informasi yang cukup akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*);
2) Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaan terlaksana dengan efektif. Prinsip akuntabilitas memberi kejelasan hak dan kewajiban antara pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris;
3) Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan dan prinsip korporasi yang sehat;
4) Pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang serta prinsip korporasi yang sehat; dan
5) Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan *(stakeholder)* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan undang-undang,

sehingga ditinjau dari penilaian tersebut untuk penerapan prinsip-prinsip tata kelola telah dijalankan di Perseroan dengan baik.

b. TOP GRC Awards 2023 (*Governance, Risk, dan Compliance*)

- Pihak Penyelenggara:
  Top Business

1) Disclosure of accurate and timely information to stakeholders;
2) Clarity of the function, implementation and accountability of the company to ensure effective management implementation. The principle of accountability provides clarity of rights and obligations between shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners;
3) Conformity of company management to sound corporate regulations and principles;
4) Professional management of the company without conflict of interest and influence from any party that is not in line with the law and sound corporate principles; and
5) Fairness and equality in fulfilling the rights of stakeholders arising from agreements and regulations,

thereby from such assessment, the Company has properly carried out governance principles implementation.

b. TOP GRC Awards 2023 (Governance, Risk, dan Compliance)

- Organizers:
  Top Business

- Pihak yang melakukan penilaian:
  Dewan Juri TOP GRC Awards 2023
- Kriteria Penilaian:
  Aspek penilaian meliputi antara lain sistem, infrastruktur, implementasi GCG, manajemen risiko dan manajemen kepatuhan serta pemanfaatan teknologi digital di Perseroan.

- Hasil Penilaian:
  Perseroan berhasil meraih penghargaan TOP GRC 2023 #4 Stars dengan rincian sebagai berikut:
  Kategori : All Company
  Sektor : Multifinance
  Nilai : 8.60 (dari total nilai 10)
  Tingkat : *Very Good*
  Penilaian : Sistem, infrastruktur, dan implementasi yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), Manajemen Risiko, dan Manajemen Kepatuhan, serta pemanfaatan teknologi digital di perusahaannya, berada di tingkat yang SANGAT BAIK, sehingga dapat mendukung keberhasilan implementasi GRC-nya dan peningkatan kinerja bisnis perusahaan yang berkelanjutan.

- Assessor:
  Board Panel of TOP GRC Awards 2023
- Assessment Criteria:
  The assessment aspects include, among others, systems, infrastructure, GCG implementation, risk management and compliance management as well as the use of digital technology in the Company.
- Assessment Results:
  The Company received the TOP GRC 2023 #4 Stars award with the following details:

  Category : All Company
  Sector : Multifinance
  Score : 8.60 (out of total 10 scores)
  Rating : Very Good
  Assessment : The systems, infrastructure, and implementation related to Good Corporate Governance (GCG), Risk Management, and Compliance Management, as well as the utilization of digital technology in the company, are at a VERY GOOD rating, so as to support the success of its GRC implementation and continuous improvement of the company's business performance.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA

Perseroan memiliki Organ Perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.

Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan *(two tier system)*, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

GOVERNANCE STRUCTURE AND MECHANISMS

The Company has in place the Corporate Organs consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and Board of Directors.

The management system embraces a two-tier system, where the Board of Commissioners and the Board of Directors have clear authority and responsibility according to their respective functions as mandated in the articles of association and laws and regulations.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Masing-masing organ diatas menjalankan tugas dan fungsinya secara independen untuk kepentingan Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi dapat membentuk organ pendukung untuk memberi masukan dan membantu kelancaran operasional.

Peran pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Sedangkan Direksi didukung oleh Komite Manajemen Risiko, Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah, Komite Pengarah Teknologi Informasi, serta memiliki unit kerja pendukung yaitu Sekretaris Perusahaan, Divisi Internal Audit, Divisi Legal Counsel & Anti Fraud dan Divisi Risk Management.

Each of the above organs performs its duties and functions independently for the benefit of the Company. In performing duties and responsibilities, the Board of Commissioners and Board of Directors may establish supporting organs to provide necessary input and to support the smooth operation.

The oversight duty of the Board of Commissioners is supported by the Audit Committee, Risk Oversight Committee and Nomination and Remuneration Committee. While the Board of Directors is supported by the Risk Management Committee, Sharia Product and Business Activity Development Committee and Information Technology Steering Committee, as well as supporting units, namely Corporate Secretary, Internal Audit Division, Legal Counsel & Anti Fraud Division and Risk Management Division.

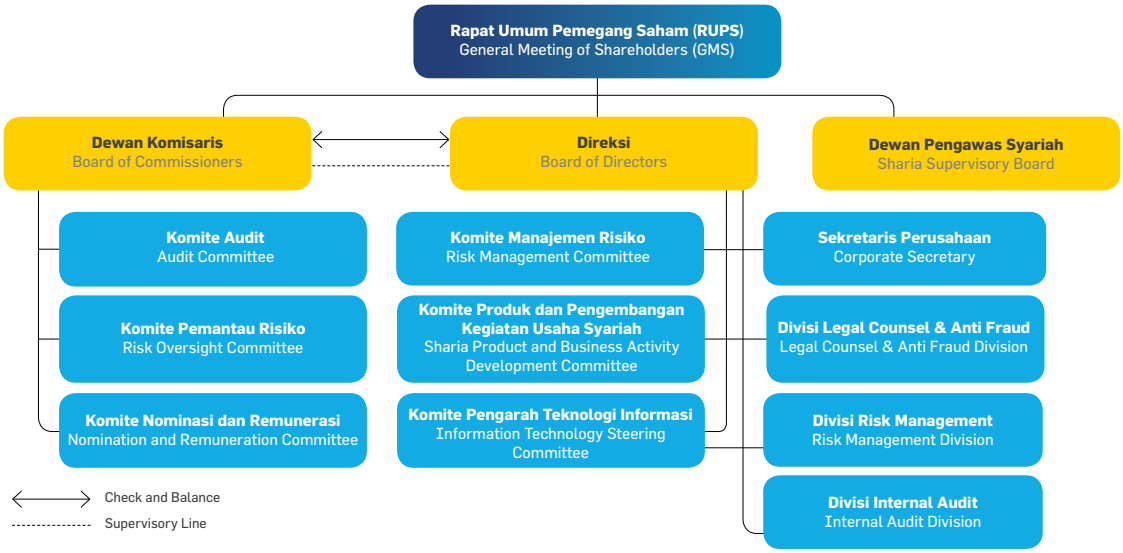

Struktur tata kelola di Perseroan terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS).
2. Dewan Komisaris.
3. Direksi.
4. Dewan Pengawas Syariah.
5. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Komite-komite di bawah Direksi yaitu: Komite Manajemen Risiko, Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah, serta Komite Pengarah Teknologi Informasi.
7. Sekretaris Perusahaan.
8. Legal Counsel & Anti Fraud Division, Risk Management Division, dan Internal Audit Division.

The Company's governance structure consists of:

1. General Meeting of Shareholders (GMS).
2. Board of Commissioners.
3. Board of Directors.
4. Sharia Supervisory Board.
5. Committees under the Board of Commissioners: Audit Committee, Risk Oversight Committee. Nomination and Remuneration Committee.
6. Committees under the Board of Directors: Risk Management Committee, Sharia Product and Business Activity Development Committee
7. Corporate Secretary.
8. Legal Counsel & Anti Fraud Division, Risk Management Division, and Internal Audit Division.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Emiten atau perusahaan publik sebagai badan hukum memiliki 3 (tiga) organ yang berfungsi untuk menjalankan emiten atau perusahaan publik, yakni RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

As legal entities, issuers or public companies are governed by 3 (three) organs: the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors, and the Board of Commissioners. This is specifically stated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law.

RUPS adalah organ Perseroan yang memiliki wewenang tertinggi yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. RUPS memiliki wewenang untuk menunjuk Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang akan mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dalam mengelola Perseroan.

GMS is the Company's organ that has the highest authority not granted to the Board of Commissioners or Board of Directors within the limits specified in the Limited Liability Company Law and/or the Company's Articles of Association. The GMS has the authority to appoint the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board (DPS) who will oversee the implementation of the Board of Directors' duties in managing the Company.

Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan RUPS Perseroan yang dilaksanakan pada tahun 2023 mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Perusahaan Terbuka.
4. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Secara Elektronik.
5. Anggaran Dasar Perseroan.

Legal References

The legal references for the implementation of the Company's GMS held in 2023 refers to several regulations as follows:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Law No. 6 of 2023 concerning the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law.
3. POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.
4. POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.
5. Articles of Association of the Company.

Hak dan Wewenang Pemegang Saham dalam RUPS

Pemegang saham memiliki hak atas saham yang dimilikinya sehingga hak pemegang saham terlindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Rights and Authorities of Shareholders in the GMS

Shareholders have the rights to the shares they own; hence its' rights are protected and can be exercised in accordance with laws and regulations and the Company's Articles of Association.

Dalam RUPS, pemegang saham berhak menghadiri, mengemukakan pendapat dan mengeluarkan hak suara dalam proses pengambilan keputusan serta memperoleh keterangan yang berkaitan dengan mata acara Rapat. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Wewenang yang dimiliki pemegang saham melalui RUPS diantaranya meliputi:
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah;
3. Penunjukan kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan;
4. Hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Hak pemegang saham dalam RUPS antara lain:
1. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS;
2. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan;
3. Menerima bagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk deviden dan pembagian keuntungan lainnya sesuai ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.

Mekanisme Penyelenggaraan RUPS

Mekanisme penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan pada tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

In the GMS, shareholders have the right to attend, express opinions and take voting rights in the decision-making process and obtain information related to the agenda of the Meeting. In the GMS forum, shareholders are entitled to obtain information related to the Company from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, as long as it is related to the agenda of the meeting and does not conflict with the interests of the Company.

The shareholders are entitled to hold the following authority through the GMS:
1. Approve the changes to the Company's Articles of Association;
2. Appoint and dismiss members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and members of the Sharia Supervisory Board;
3. Appointment of a public accountant firm that will provide audit services on annual historical financial information;
4. Other matters that properly submitted in the GMS in accordance with the provisions of the Articles of Association.

The rights of shareholders in the GMS include:
1. The right to attend and vote at the GMS;
2. During the GMS, shareholders are entitled to obtain information on the agenda of the meeting and materials related to the agenda of the meeting as long as it does not conflict with the interests of the Company;
3. Receive a portion of the Company's profits intended for shareholders in the form of dividends and other profit distributions in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.

Mechanisms of GMS

The mechanism for organizing the Annual GMS and Extraordinary GMS of the Company in 2023 has been implemented in accordance with the Articles of Association and POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Perusahaan Terbuka, dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

of Shareholders of Public Companies, and POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan pada tahun 2023 juga diselenggarakan secara elektronik, sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

The Company's Annual GMS and Extraordinary GMS in 2023 were also held electronically, in accordance with the provisions in the POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Penunjukan Pihak Independen Dalam Perhitungan Suara RUPS

Sesuai dengan SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan melakukan penunjukan pihak independen yakni Biro Administrasi Efek, PT Sinartama Gunita dalam melakukan penghitungan/validasi suara pada RUPS.

Appointment of Independent Parties in the Calculation of GMS Votes

Pursuant to SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Format and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies, the Company appoints an independent party, namely the Share Registrar, PT Sinartama Gunita in counting/validating votes at the GMS.

Penerbitan Informasi RUPS

Perseroan mempublikasikan pemberitahuan, panggilan, ringkasan risalah RUPS pada situs *web* PT Bursa Efek Indonesia, situs *web* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs *web* Perseroan.

Issuance of GMS Information

The Company publishes notices, calls, summaries of GMS minutes in newspapers, website of PT Bursa Efek Indonesia, website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and website of the Company.

RUPS di 2023

Pada tahun 2023, Perseroan telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 30 Maret 2023 dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2023 di *Function Room,* Sentral Senayan III Lantai 28 Jl. Asia Afrika Nomor 8 Gelora Bung Karno – Senayan, Jakarta Pusat. Perseroan juga menyediakan fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) sebagai media perantara antara Pemegang Saham dan Perseroan.

GMS in 2023

In 2023, the Company has held 1 (one) Annual GMS on March 30, 2023 and 1 (one) Extraordinary GMS held on March 30, 2023 at the Function Room, Sentral Senayan III, 28th Floor, Jl. Asia Afrika Number 8, Gelora Karno – Senayan, Central Jakarta. The Company also provides Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facilities as an intermediary medium between Shareholders and the Company.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 30 MARET 2023

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS MARCH 30, 2023

1. Tahapan Pelaksanaan

1. Implementation Stages

Tahapan Stages		Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Conditions
Pemberitahuan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kepada Regulator Notice of the Annual GMS and Extraordinary GMS to the Regulator		Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 031/II/CS/2023 tertanggal 15 Februari 2023. Notification of the planned Meeting to the respective Financial Services Authority via Letter No. 031/II/CS/2023 dated February 15, 2023.	Pemberitahuan mengenai rencana RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada publik. Notification regarding the GMS plan is submitted to the OJK no later than 5 (five) working days before the date of the GMS announcement to the public.
Pengumuman Announcement	Publikasi Publication	Pengumuman dan Pemanggilan Rapat yang diumumkan dalam *web* resmi PT Bursa Efek Indonesia, *web* resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan *web* resmi Perseroan masing-masing pada tanggal 21 Februari 2023 dan 8 Maret 2023. Announcement and Invitation to the Meeting announced on the official website of the Indonesia Stock Exchange, the official website of the Indonesian Central Securities Depository, and the Company's official website on February 21, 2023 and March 8, 2023.	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan telah mengikuti ketentuan kewajiban melakukan Pengumuman RUPS pada situs *web* penyedia e-RUPS, situs *web* bursa efek dan situs web Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Pengumuman RUPS. In accordance with the Articles of Association, the Company has complied with the obligation to provide GMS Announcements on the website of the e-GMS provider, the stock exchange website and the Public Company's website in Indonesian and foreign languages, no later than 14 (fourteen) days before the date of the GMS Announcement.
Laporan ke Regulator Report to the Regulator		Bukti Pengumuman RUPS Luar Biasa telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara *e-Reporting* pada tanggal 21 Februari 2021. Proof of Extraordinary GMS announcement has been submitted to OJK and IDX by e-Reporting on February 21, 2023.	

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Tahapan Stages		Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Conditions
Panggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa beserta penjelasan mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Annual GMS and Extraordinary GMS invitation and agenda explanation	Publikasi Publication	Pengumuman dan Pemanggilan Rapat yang diumumkan dalam *web* resmi PT Bursa Efek Indonesia, *web* resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan *web* resmi Perseroan masing-masing pada tanggal 21 Februari 2023 dan 8 Maret 2023. Announcement and Invitation to the Meeting announced on the official website of the Indonesia Stock Exchange, the official website of the Indonesian Central Securities Depository, and the Company's official website on February 21, 2023 and March 8, 2023.	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan telah mengikuti ketentuan Pemanggilan RUPS pada situs *web* penyedia e-RUPS, situs *web* bursa efek dan situs *web* Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS. In accordance with the Articles of Association, the Company has complied with the provisions of the GMS Invitation on the website of the e-GMS provider, the stock exchange website and the website of the Public Company in Indonesian and foreign languages, no later than 21 (twenty-one) days prior to the GMS.
Laporan ke Regulator Report to the Regulator		Bukti Pemanggilan RUPS Tahunan telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara *e-Reporting* pada tanggal 8 Maret 2023. Proof of the Annual GMS Invitations has been submitted to the OJK and IDX by e-Reporting on March 8, 2023.	
Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Annual GMS and Extraordinary GMS Convention		Kamis, 30 Maret 2023 Thursday, March 30, 2023	

Tahapan Stages		Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Conditions
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Summary of Minutes (Results) of the Annual GMS and Extraordinary GMS	Publikasi Publication	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan diumumkan pada situs *web* Bursa Efek Indonesia, situs *web* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.wom.co.id pada tanggal 3 April 2023. The summary of the minutes of the Annual GMS was announced on the website of the Indonesia Stock Exchange, the website of the Indonesian Central Securities Depository and the website of the Company www.wom.co.id on April 3, 2023.	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan telah mengikuti ketentuan kewajiban melakukan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS pada situs *web* penyedia e-RUPS, situs *web* bursa efek dan situs *web* Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. In accordance with the Articles of Association, the Company has complied with the obligation to announce the summary of the minutes of the GMS on the website of the e-GMS provider, the stock exchange website and the website of the Public Company in Indonesian and foreign languages, no later than 2 (two) working days after the GMS is held.
Laporan ke Regulator Report to Regulator		Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK (Pasar Modal dan Pengawas) dan BEI *(e-Reporting)* tanggal 3 April 2023. Proof of announcement submitted to OJK (Capital Market and Supervisors) and IDX (e-Reporting) dated April 3, 2023.	
Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Minutes of Annual GMS and Extraordinary GMS		Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa disampaikan ke OJK pada tanggal 28 April 2023 Minutes of Annual GMS and Extraordinary GMS submitted to OJK on April 28, 2023.	Risalah RUPS Tahunan wajib disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS Tahunan diselenggarakan. Minutes of Annual GMS must be submitted to OJK no later than 30 (thirty) days after the Annual GMS is held.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

2. Proses Penyelenggaraan

2. Implementation Process

Tahapan Stages	Pelaksanaan Implementation	
Tanggal dan Waktu Date and Time	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kamis, 30 Maret 2023, Pukul 10:33 – 11:36 WIB	Annual General Meeting of Shareholders Thursday, March 30, 2023 10:33 am - 11:36 am
	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kamis, 30 Maret 2023, Pukul 11:42 – 12:07 WIB	Extraordinary General Meeting of Shareholders Thursday, March 30, 2023 11:42 am – 12:07 pm
Tempat Venue	Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Gelora Bung Karno - Senayan Jakarta Pusat 10270	Function Room, Sentral Senayan III 28th Floor, Jalan Asia Afrika Number 8 Gelora Bung Karno - Senayan Jakarta Pusat 10270
Kuorum Quorum	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 3.220.400.300 saham (92,501%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 3.481.481.480 saham.	Annual General Meeting of Shareholders 3,220,400,300 shares (92.501%) of all issued and fully paid-up shares up to the time of the Meeting amounted to 3,481,481,480 shares.
	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 3.220.384.800 saham (92,500%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 3.481.481.480 saham.	Extaordinary General Meeting of Shareholders 3,220,384,800 shares (92.500%) of all issued and fully paid-up shares up to the time of the Meeting amounted to 3,481,481,480 shares.
Pimpinan RUPS Chairman of GMS	Bapak I Nyoman Tjager selaku Presiden Komisaris/Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tertanggal 18 Februari 2023.	Mr. I Nyoman Tjager as President Commissioner/ Independent Commissioner of the Company, based on the Circular Decree of the Board of Commissioners dated February 18, 2023.
Kehadiran anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris Attendance of members of the Board of Commissioners including the President Commissioner	RUPS Tahunan • I Nyoman Tjager: Presiden Komisaris/Komisaris Independen • Thilagavathy Nadason: Komisaris • Myrnie Zachraini Tamin: Komisaris Independen	Annual GMS • I Nyoman Tjager: President Commissioner/ Independent Commissioner • Thilagavathy Nadason: Commissioner • Myrnie Zachraini Tamin: Independent Commissioner

Tahapan Stages	Pelaksanaan Implementation	
	RUPS Luar Biasa	Extraordinary GMS
	• I Nyoman Tjager: Presiden Komisaris/Komisaris Independen • Thilagavathy Nadason: Komisaris • Myrnie Zachraini Tamin: Komisaris Independen	• I Nyoman Tjager: President Commissioner/ Independent Commissioner • Thilagavathy Nadason: Commissioner • Myrnie Zachraini Tamin: Independent Commissioner
Kehadiran anggota Direksi termasuk Presiden Direktur Attendance of members of the Board of Directors including the President Director	• Djaja Suryanto Sutandar: Presiden Direktur • Anthony Yuarez Panggabean: Direktur • Njauw Vido Onadi: Direktur • Wibowo: Direktur • Cincin Lisa Hadi: Direktur	• Djaja Suryanto Sutandar: President Director • Anthony Yuarez Panggabean: Director • Njauw Vido Onadi: Director • Wibowo: Director • Cincin Lisa Hadi: Director
Kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah Attendance of members of the Sharia Supervisory Board	• H. M. Taufik Darmansyah, S.E., CPA: Ketua • Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen: Anggota*) *) hadir secara online	• H. M. Taufik Darmansyah, S.E., CPA: Chairman • Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen: Member*) *) online attendance
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Independent Parties to conduct quorum counting and voting at the Annual GMS and Extraordinary GMS	Notaris Aulia Taufani, S.H.	Notary Aulia Taufani, S.H.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat Number of shareholders who asked questions and/or gave opinions	Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.	On the occasion of the question-and-answer session, there were no shareholders or their proxies who were present at the meeting who asked questions and/or opinions.
Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Annual GMS and Extraordinary GMS decision-making mechanism	Pengambilan keputusan melalui mekanisme pemungutan suara. Perhitungan suara dan validasi suara di dalam Rapat dilakukan oleh Notaris.	Decision making through voting mechanism. The calculation of votes and validation of votes in the Meeting is carried out by a Notary.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

3. Proses Perhitungan Suara

Perhitungan suara dan prosedur pemungutan suara pada RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat RUPS yang dibagikan kepada pemegang saham dan dibacakan oleh Pengarah Acara sebelum RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dimulai. Pengungkapan perhitungan dan prosedur pemungutan suara secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diumumkan/diunggah dalam situs *web* Perseroan bersamaan dengan Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

3. Vote Counting Process

The vote count and voting procedures at the Annual GMS and Extraordinary GMS of the Company are described in the GMS Meeting Rules distributed to shareholders and read out by the Event Director before the Annual GMS and Extraordinary GMS begin. The complete disclosure of voting calculations and procedures is set out in the GMS and Extraordinary GMS Rules of Procedure which are announced/uploaded on the Company's website together with the Invitation to the Annual GMS and Extraordinary GMS.

4. Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS Tahunan 30 Maret 2023
Decision and Realization of Annual GMS on March 30, 2023

MATA ACARA 1 | AGENDA 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Annual Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31, 2022.

Keputusan
Decision

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited)* sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 16 Februari 2023 dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2022. Sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasannya dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang tahun buku 2022, selama tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.

1. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Annual Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31, 2022.

	2. Ratified the Company's Annual Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2022 which had been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as evident from the Independent Auditor's Report dated February 16, 2023 with the opinion that "The Financial Statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk as of December 31, 2022, as well as its financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. 3. Provide full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to members of the Board of Directors, Board of Commissioners and members of the Company's Sharia Supervisory Board for the management and supervisory actions they have carried out during the 2022 financial year. As long as the management and supervisory actions referred to are reflected in the books and the Company's records throughout the 2022 financial year, as long as they are not included in the category of criminal act.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of shareholders who asked questions and/or gave opinions	• Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat • Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Rapat Pertama, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 3.220.400.300 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Pertama tersebut • During the question-and-answer opportunity, there were no shareholders or their proxies present at the Meeting asking questions and/or opinions. • There were no shareholders and/or their proxies who expressed disapproval / and/or blank votes on the proposed First Meeting Agenda, so decisions were taken based on deliberation to reach a consensus of all shareholders and/or their proxies present or a total of 3,220,400,300 shares and decided to approve the proposed First Meeting Agenda.
Realisasi / Tindak Lanjut Voting Result Realization	Telah direalisasikan pada tahun 2023. Has been realized in 2003.

MATA ACARA 2 | AGENDA 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Determination of the Use of the Company's Net Profit for the Fiscal Year ending December 31, 2022.

Keputusan Decision	1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku 2022 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dari Laba Bersih Perseroan untuk digunakan sebagai dana cadangan umum guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) UUPT dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan; b. Sebesar Rp59.280.751.663,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai *(cash deviden)* untuk tahun buku 2022 yang akan dibagikan kepada 3.481.481.480 (tiga miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh) lembar saham, sehingga setiap saham memperoleh dividen atau sekitar sebesar Rp17,0 (tujuh belas koma nol Rupiah) per saham; c. Sisa dari Laba Bersih sebesar Rp135.821.753.881,00 (seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu Rupiah) akan dicatat sebagai Laba Ditahan.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

2. Menyetujui pembagian dividen tunai *(cash deviden)* tahun buku 2022 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai *(cash deviden)* tahun buku 2022 adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 April 2023.
   b. Dividen tunai *(cash deviden)* akan dibayarkan pada tanggal 3 Mei 2023 dengan cara membayar dividen tunai *(cash deviden)* sekitar sebesar Rp17,0 (tujuh belas koma nol Rupiah) setiap saham. Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib dipotong Perseroan,
   c. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

1. Determine the use of Net Profit for the 2022 financial year with the following conditions:
   a. IDR 2,500,000,000.00 (two billion five hundred million Rupiah) of the Company's Net Profit to be used as a general reserve fund to fulfill the provisions in Article 70 paragraph (1) UUPT and Article 21 of the Company's Articles of Association;
   b. A total of IDR 59,280,751,663.00 (fifty nine billion two hundred eighty million seven hundred fifty one thousand six hundred sixty three Rupiah) or 30% (thirty percent) of the Company's Net Profit is distributed as cash dividends) for the 2022 fiscal year which will be distributed to 3,481,481,480 (three billion four hundred eighty one million four hundred eighty one thousand four hundred and eighty) shares, so that each share will receive dividends or approximately IDR 17.0 (seventeen point zero Rupiah) per share;
   c. The remaining Net Profit of IDR 135,821,753,881.00 (one hundred thirty-five billion eight hundred twenty-one million seven hundred fifty-three thousand eight hundred eighty-one Rupiah) will be recorded as Retained Earnings.
2. Approved the distribution of cash dividends for the 2022 financial year under the following conditions:
   a. Shareholders who are entitled to receive cash dividends for the 2022 fiscal year are the Company's shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholder Register on April 12, 2023.
   b. Cash dividends will be paid on May 3, 2023 by paying a cash dividend of approximately IDR 17.0 (seventeen-point zero Rupiah) per share. For distribution of dividends subject to tax in accordance with applicable regulations that must be deducted by the Company.
   c. To grant power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the Company to carry out everything related to the dividend distribution and to announce it with due observance of applicable regulations

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of shareholders who asked questions and/or gave opinions	• Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat • Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Rapat Pertama, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 3.220.400.300 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat kedua tersebut • During the question-and-answer opportunity, there were no shareholders or their proxies present at the Meeting asking questions and/or opinions. • There were no shareholders and/or their proxies who expressed disapproval / and/or blank votes on the proposed First Meeting Agenda, so decisions were taken based on deliberation to reach a consensus of all shareholders and/or their proxies present or a total of 3,220,400,300 shares and decided to approve the proposed Second Meeting Agenda.

Realisasi / Tindak Lanjut Voting Result Realization	Telah direalisasikan pada tahun 2023. Has been realized in 2023.

MATA ACARA 3 | AGENDA 3

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Appointment of a Public Accountant and a Public Accountant Firm to auditthe Company's Financial Statements ending December 31, 2023.

Keputusan
Decision

1. Menyetujui penunjukan Bapak Yasir dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited)* masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan serta memenuhi syarat-syarat yang dianggap baik.
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik Bapak Yasir dan/atau Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited)* karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk untuk menetapkan syarat-syarat lainnya tentang penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melaksanakan hal-hal dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan).

1. Approved the appointment of Mr. Yasir and Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as Public Accountants and Public Accounting Firms respectively to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31, 2023.
2. Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of honorarium by taking into account the recommendations of the Company's Audit Committee and fulfilling the conditions that are considered good.
3. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accountant Firm in the event that the Public Accountant Mr. Yasir and/or Public Accountant Office Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) are unable to complete the audit for any reason The Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2023, including to stipulate other requirements regarding the appointment of a Public Accountant and/or a replacement Public Accountant Office with due observance of the recommendations of the Company's Audit Committee and applicable laws and regulations.
4. Approved the granting of power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors to carry out matters deemed necessary in connection with the appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year ending December 31, 2023, including notifying and announcing to the public (if necessary).

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of shareholders who asked questions and/or gave opinions	• Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat • Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Rapat Pertama, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 3.220.400.300 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat ketiga tersebut • During the question-and-answer opportunity, there were no shareholders or their proxies present at the Meeting asking questions and/or opinions. • There were no shareholders and/or their proxies who expressed disapproval and/or blank votes on the proposed First Meeting Agenda, so decisions were taken based on deliberation to reach a consensus of all shareholders and/or their proxies present or a total of 3,220,400,300 shares and decided to approve the proposed Third Meeting Agenda.
Realisasi / Tindak Lanjut Voting Result Realization	Telah direalisasikan pada tahun 2023. Has been realized in 2023.

MATA ACARA 4 | AGENDA 4

Perubahan susunan pengurus Perseroan
Changes in the composition of the Company's management

Keputusan Decision	1. Menetapkan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan apresiasi dan terima kasih atas kinerja serta jasa-jasanya kepada Perseroan selama menjabat. 2. Mengangkat kembali: Bapak Djaja Suryanto Sutandar sebagai Presiden Direktur Perseroan, Bapak Wibowo, Bapak Anthony Yuarez Panggabean, Bapak Njauw Vido Onadi dan Ibu Cincin Lisa Hadi masing-masing sebagai Direktur Perseroan; untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026. 3. Mengangkat kembali: Bapak I Nyoman Tjager sebagai Presiden Komisaris sekaligus Komisaris Independen Perseroan, Ibu Thilagavathy Nadason sebagai Komisaris Perseroan, dan Ibu Myrnie Zachraini Tamin sebagai Komisaris Independen Perseroan; untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024. Bahwa terkait dengan usulan pengangkatan kembali Bapak I Nyoman Tjager dan Ibu Myrnie Zachraini Tamin maka guna memenuhi Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pada kesempatan ini Bapak I Nyoman Tjager dan Ibu Myrnie Zachraini Tamin menyatakan tetap independen dalam melaksanakan jabatan selaku Komisaris Independen dan pernyataan independensi tersebut jugadituangkan dalam Surat Pernyataan Independensi. 4. Mengangkat kembali: Bapak Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A. sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, Bapak H. Muh. Taufik Darmansyah, S.E., CPA. dan Bapak Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen masing-masing sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026.

5. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Taufik Aulia sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026.
6. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:
Presiden Komisaris/
Komisaris Independen : Bapak I Nyoman Tjager[1)]
Komisaris : Ibu Thilagavathy Nadason[1)]
Komisaris : Bapak Taufik Aulia[2)]
Komisaris Independen : Ibu Myrnie Zachraini Tamin[1)]

DIREKSI:
Presiden Direktur : Bapak Djaja Suryanto Sutandar[3)]
Direktur : Bapak Anthony Yuarez Panggabean[3)]
Direktur : Bapak Njauw Vido Onadi[3)]
Direktur : Bapak Wibowo[3)]
Direktur : Ibu Cincin Lisa Hadi[3)]

DEWAN PENGAWAS SYARIAH:
Ketua : Bapak Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A.[4)]
Anggota : Bapak H. Muh. Taufik Darmansyah, S.E., CPA.[4)]
Anggota : Bapak Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen[4)]

Dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Bahwa masa jabatan Bapak I Nyoman Tjager sebagai Presiden Komisaris sekaligus Komisaris Independen Perseroan, Ibu Thilagavathy Nadason sebagai Komisaris Perseroan dan Ibu Myrnie Zachraini Tamin sebagai Komisaris Independen Perseroan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024.
2) Bahwa pengangkatan Bapak Taufik Aulia akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026.
3) Bahwa masa jabatan Bapak Djaja Suryanto Sutandar sebagai Presiden Direktur Perseroan, Bapak Wibowo, Bapak Anthony Yuarez Panggabean, Bapak Njauw Vido Onadi dan Ibu Cincin Lisa Hadi masing-masing sebagai Direktur Perseroan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026.
4) Bahwa masa jabatan Bapak Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A. sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, Bapak H. Muh. Taufik Darmansyah, S.E., CPA. dan Bapak Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen masing-masing sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026.

7. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, termasuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dan untuk memberitahukan danmengumumkan ke publik (jika diperlukan) serta untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

1. Determined the end of the term of office of all members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Company as of the closing of the Meeting accompanied by expressions of appreciation and gratitude for their performance and services to the Company while in office.
2. Reappointed:
   Mr. Djaja Suryanto Standar as President Director of the Company, Mr. Wibowo, Mr. Anthony Yuarez Panggabean, Mr. Njauw Vido Onadi and Mrs. Cincin Lisa Hadi each as Directors of the Company; for the term of office commencing from the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026.
3. Reappointed:
   Mr. I Nyoman Tjager as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company, Mrs. Thilagavathy Nadason as Commissioner of the Company, and Mrs. Myrnie Zachraini Tamin as Independent Commissioner of the Company; for the term of office commencing from the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2024. Whereas in relation to the proposed reappointment of Mr. I Nyoman Tjager and Mrs. Myrnie Zachraini Tamin, in order to comply with the provisions of Article 25 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 regarding the Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, on this occasion Mr. I Nyoman Tjager and Mrs. Myrnie Zachraini Tamin stated that they remained independent in carrying out their positions as Independent Commissioners and the statement of independence was also stated in the Declaration of Independence.
4. Reappointed:
   Mr. Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A. as Chairman of the Company's Sharia Supervisory Board, Mr. H. Muh. Taufik Darmansyah, S.E., CPA. and Mr Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen respectively as members of the Company's Sharia Supervisory Board; for the term of office commencing from the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026.
5. Approved to appoint Mr. Taufik Aulia as Commissioner of the Company with a term of office starting from the closing of the Meeting and after obtaining approval from the Financial Services Authority until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026.
6. Determined that since the closing of the Meeting, the composition of the members of the Company's Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board are as follows:

   BOARD OF COMMISSIONERS:
   President Commissioner/
   Independent Commissioner : Mr. I Nyoman Tjager[1)]
   Commissioner : Ms. Thilagavathy Nadason[1)]
   Commissioner : Mr. Taufik Aulia[2)]
   Independent Commissioner : Ms. Myrnie Zachraini Tamin[1)]

   BOARD OF DIRECTORS:
   President Director : Mr. Djaja Suryanto Sutandar[3)]
   Director : Mr. Anthony Yuarez Panggabean[3)]
   Director : Mr. Njauw Vido Onadi[3)]
   Director : Mr. Wibowo[3)]
   Director : Mrs. Cincin Lisa Hadi[3)]

   SHARIA SUPERVISORY BOARD:
   Chairman : Mr. Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A.[4)]
   Member : Mr. H. Muh. Taufik Darmansyah, S.E., CPA.[4)]
   Member : Mr. Dr. Ir. H.M. Nadratuzzaman Hosen[4)]

With the following conditions:

1) That the term of office of Mr. I Nyoman Tjager as President Commissioner concurrently Independent Commissioner of the Company, Ms. Thilagavathy Nadason as Commissioner of the Company and Ms. Myrnie Zachraini Tamin as Independent Commissioner of the Company will end at the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2024.
2) That the appointment of Mr. Taufik Aulia will become effective after obtaining approval from the Financial Services Authority and ending at the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026.
3) That the term of office of Mr. Djaja Suryanto Sutandar as President Director of the Company, Mr. Wibowo, Mr. Anthony Yuarez Panggabean, Mr. Njauw Vido Onadi and Mrs. Cincin Lisa Hadi respectively as Directors of the Company will end at the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026.
4) That the term office of Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A. as Chairman of the Company's Sharia Supervisory Board, Mr. H. Muh. Taufik Darmansyah, S.E., CPA. and Mr Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen each as a member of the Company's Sharia Supervisory Board will expire at the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

7. Granted authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the appointment of members of the Board of Directors, Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board of the Company, including restating and/or reaffirming in a Notary deed in connection with the appointment of members of the Board of Directors, Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board of the Company, and to notify and announce to the public (if necessary) as well as to submit registration, receive notification or apply for approval from the competent authority.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of shareholders who asked questions and/or gave opinions	• Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat • Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Rapat Pertama, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 3.220.400.300 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat keempat tersebut. • During the question-and-answer opportunity, there were no shareholders or their proxies present at the Meeting asking questions and/or opinions. • There were no shareholders and/or their proxies who expressed disapproval / and/or blank votes on the proposed First Meeting Agenda, so decisions were taken based on deliberation to reach a consensus of all shareholders and/or their proxies present or a total of 3,220,400,300 shares and decided to approve the proposed Fourth Meeting Agenda.
Realisasi / Tindak Lanjut Voting Result Realization	Telah direalisasikan pada tahun 2023 Has been realized in 2023

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

MATA ACARA 5 | AGENDA 5

Penetapan pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
Determination of the division of duties and authorities of the members of the Board of Directors of the Company for the 2023 Fiscal Year.

Keputusan Decision	Pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 diusulkan untuk diserahkan kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (6) UUPT, dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan. The division of duties and authorities of the members of the Company's Board of Directors for the 2023 financial year is proposed to be submitted to the Company's Directors by taking into account the provisions in Article 92 paragraph (6) UUPT, by obtaining prior approval from the Company's Board of Commissioners.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of shareholders who asked questions and/or gave opinions	• Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat • Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Rapat Pertama, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 3.220.400.300 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat kelima tersebut • During the question-and-answer opportunity, there were no shareholders or their proxies present at the Meeting asking questions and/or opinions. • There were no shareholders and/or their proxies who expressed disapproval / and/or blank votes on the proposed First Meeting Agenda, so decisions were taken based on deliberation to reach a consensus of all shareholders and/or their proxies present or a total of 3,220,400,300 shares and decided to approve the proposed Fifth Meeting Agenda.
Realisasi / Tindak Lanjut Voting Result Realization	Telah direalisasikan pada tahun 2023 Has been realized in 2023

MATA ACARA 6 | AGENDA 6

Penetapan besarnya uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Determination of the amount of fees and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners and members of the Company's Sharia Supervisory Board, as well as delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary/honorarium and/or other benefits for members of the Company's Board of Directors for the 2023 Financial Year.

Keputusan Decision	1. Penentuan uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan diusulkan untuk melimpahkan wewenangnya kepada Presiden Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya uang jasa/honorarium dan/atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023.

	2. Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya gaji dan/atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi para anggota Direksi Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023. 1. Determination of service fees and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners and members of the Company's Sharia Supervisory Board is proposed to delegate their authority to the Company's President Commissioner by taking into account the proposals and recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee and the amount of fees/honorarium and/or allowances in the form of whatever else has been determined for the intended members of the Board of Commissioners and members of the Sharia Supervisory Board will be included in the Annual Report for the 2023 financial year 2. Delegating authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and/or other allowances for members of the Company's Board of Directors for the 2023 financial year by taking into account suggestions and recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee and the amount of salary and/or allowances in any other form that has been stipulated for the intended members of the Company's Board of Directors to be included in the Annual Report for the 2023 financial year.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of shareholders who asked questions and/or gave opinions	• Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. • Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: a. tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain dalam Rapat. b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah 33.000 saham atau merupakan 0,001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. c. pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 3.220.367.300 saham atau merupakan 99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. • Dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.220.367.300 ataumerupakan 99,999% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalamRapat memutuskan berdasarkan suara terbanyak menyetujui usulankeputusan Mata Acara Rapat Keenam. • During the question-and-answer opportunity, there were no shareholders or their proxies present at the Meeting asking questions and/or opinions. • That the results of the voting are as follows: a. none of the shareholders declared an abstention at the meeting. b. shareholders who expressed disapproval of 33,000 shares or constituting 0.001% of the total valid shares present at the Meeting. c. shareholders who agreed to a total of 3,220,367,300 shares or constituting 99.999% of the total valid shares present at the Meeting. • Thus, the total agreeing votes amounted to 3,220,367,300 or constituting 99.999% of the total valid votes present at the Meeting deciding based on the majority of votes approving the proposed resolution of the Sixth Agenda of the Meeting
Realisasi / Tindak Lanjut Voting Result Realization	Telah direalisasikan pada tahun 2023. Has been realized in 2023.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

MATA ACARA 7 | AGENDA 7

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama 2022:
a. Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II Tahun 2022.

Realization Report on the Use of Proceeds from the Company's Public Offering for 2022:
a. WOM Finance Phase II Sustainable Bonds IV Year 2022.

Laporan Report	Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana dari seluruh dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II Tahun 2022 sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta yang uraian singkatnya telah disampaikan dalam Rapat. Accepting accountability for the realization of the use of funds from all proceeds from the Public Offering of Registrations Bonds IV WOM Finance Phase II Year 2022 as we have submitted to the Financial Services Authority and a brief description of which has been submitted at the Meeting
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of shareholders who asked questions and/or gave opinions	Oleh karena Mata Acara Rapat Ketujuh hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya jawab maupun pengambilan keputusan. Because the Agenda of the Seventh Meeting was only a report, there was no question-and-answer session or decision-making.
Realisasi / Tindak Lanjut Voting Result Realization	Telah direalisasikan pada tahun 2023 Has been realized in 2023

5. Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS Luar Biasa 30 Maret 2023
Decision and Realization of Extraordinary GMS on March 30, 2023

MATA ACARA 1 | AGENDA 1

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengalihkan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka:
a. Perolehan pinjaman dan/atau pendanaan syariah dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri.
b. Perolehan pinjaman dan/atau pendanaan dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan pada Tahun Buku 2023

Approval of the Company's plan to transfer rights or guarantee most or all of the Company's receivables in the context of:
a. Obtain sharia loans and/or funding from bank financial institutions (including PT Bank Maybank Indonesia Tbk) and non-banks, both domestic and overseas.
b. Obtaining loans and/or funding from bank financial institutions (including PT Bank Maybank Indonesia Tbk) and non-banks, both domestic and overseas, included in the Public Offering of Shelf Registration Bonds for the 2023 Fiscal Year

Keputusan Decision	1. Menyetujui tindakan Direksi menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan berupa piutang Perseroan yang timbul dari pembiayaan yang disalurkan Perseroan sehubungan dengan perolehan pinjaman dan/atau pendanaan dari PT Bank KEB Hana Indonesia. 2. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengalihkan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan syariah dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri pada tahun buku 2023. 3. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengalihkan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri pada tahun buku 2023 termasuk pemberian jaminan dalam rangka penerbitan lanjutan PUB IV sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah). 4. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pengalihan hak atau pemberian jaminan hutang sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, 3 yang dijabarkan sebelumnya dengan pelaksanaannya pada tahun buku 2023. 1. Approved the actions of the Board of Directors to guarantee most or all of the Company's assets in the form of Company receivables arising from financing distributed by the Company in connection with obtaining loans and/or funding from PT Bank KEB Hana Indonesia. 2. Approved the Company's plan to transfer rights or guarantee most or all of the Company's receivables in order to obtain sharia loans and/or funding from bank financial institutions (including PT Bank Maybank Indonesia Tbk) and non-banks both domestically and abroad in the 2023 financial year. 3. Approved the Company's plan to transfer rights or guarantee most or all of the Company's receivables in order to obtain loans and/or funding from bank financial institutions (including PT Bank Maybank Indonesia Tbk) and non-banks both domestically and abroad in the 2023 financial year including granting collateral for the issuance of PUB IV continuation up to a maximum amount of IDR 2,000,000,000,000.00 (two trillion Rupiah). 4. To grant power and authority with the right of substitution to the Board of Directors to take all necessary actions in the context of transferring rights or providing debt guarantees for most or all of the Company's receivables as referred to in points 1, 2, 3 which were previously described with implementation in the 2023 financial year.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of shareholders who asked questions and/or gave opinions	• Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. • Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: a. pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 33.000 saham atau merupakan 0,001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. b. tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dalam Rapat. c. pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 3.220.351.800 saham atau merupakan 99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. • Dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.220.384.800 atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan berdasarkan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

- During the question-and-answer opportunity, there were no shareholders or their proxies present at the meeting asking questions and/or opinions.
- That the results of the voting are as follows:
  a. shareholders who abstained in the amount of 33,000 shares or constituting 0.001% of the total valid shares present at the Meeting.
  b. none of the shareholders expressed disapproval at the Meeting.
  c. shareholders who agreed to a total of 3,220,351,800 shares or constituting 99.999% of the total valid shares present at the Meeting.
- Thus, the total agreeing votes amounted to 3,220,384,800 or constituting 100% of the total valid votes present at the Meeting deciding based on the majority of votes approving the proposed resolution of the First Meeting Agenda

Realisasi / Tindak Lanjut Voting Result Realization	Sebagian besar telah direalisasikan pada tahun 2023 Most of it has been realized in 2023

MATA ACARA 2 | AGENDA 2

Persetujuan untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan, yang antara lain mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.

Approval to rearrange the Company's Articles of Association, which among other things regarding changes to Article 3 of the Company's Articles of Association to conform with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing and Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) in 2020.

Keputusan Decision	1. Menyetujui penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan, yang antara lain mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020. 2. Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan melakukan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan termasuk untuk menyatakan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk perubahan dan/atau penambahan) serta menyelaraskan beberapa ketentuan sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk menyampaikan pemberitahuan dan/atau permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang dan karenanya pula mengajukan permohonan surat-surat dokumen-dokumen lainnya; singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	1. Approved the rearrangement of the Company's Articles of Association, which among others regarding changes to Article 3 of the Company's Articles of Association to conform with the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing and Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) in 2020. 2. Delegating authority and power to the Board of Directors of the Company to rearrange the Company's Articles of Association including to restate in a Notary deed (including amendments and/or additions) and align several provisions in connection with the amendment and rearrangement of the provisions in the Company's Articles of Association, as well as provide authority and power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to a Notary to submit notifications and/or requests for approval to the competent authority and therefore also submit requests for other documents; in short take all other necessary actions in accordance with the provisions of the Articles of Association and the applicable laws and regulations.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of shareholders who asked questions and/or gave opinions	• Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat • Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: a. pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 33.000 saham atau merupakan 0,001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. b. tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dalam Rapat. c. pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 3.220.351.800 saham atau merupakan 99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. • Dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.220.384.800 atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan berdasarkan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua. • During the question-and-answer opportunity, there were no shareholders or their proxies present at the meeting asking questions and/or opinions. • That the results of the voting are as follows: a. shareholders who abstained in the amount of 33,000 shares or constituting 0.001% of the total valid shares present at the Meeting. b. none of the shareholders expressed disapproval at the Meeting. c. shareholders who agreed to a total of 3,220,351,800 shares or constituting 99.999% of the total valid shares present at the Meeting. • Thus, the total agreeing votes amounted to 3,220,384,800 or constituted 100% of the total valid votes present at the Meeting decided based on the majority vote to approve the proposed resolution of the Second Agenda of the Meeting.
Realisasi / Tindak Lanjut Voting Result Realization	Telah direalisasikan pada tahun 2023 Has been realized in 2023

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

6. Perhitungan Suara RUPS Tahunan
Vote Count of Annual GMS

Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain
Mata Acara Rapat Pertama | **Agenda of the First Meeting**		
3.220.400.300 saham (100%) 3,220,400,300 shares (100%)	-	-
Mata Acara Rapat Kedua | **Agenda of the Second Meeting**		
3.220.400.300 saham (100%) 3,220,400,300 shares (100%)	-	-
Mata Acara Rapat Ketiga | **Agenda of the Third Meeting**		
3.220.400.300 saham (100%) 3,220,400,300 shares (100%)	-	-
Mata Acara Rapat Keempat | **Agenda of the Fourth Meeting**		
3.220.400.300 saham (100%) 3,220,400,300 shares (100%)	-	-
Mata Acara Rapat Kelima | **Agenda of the Fifth Meeting**		
3.220.400.300 saham (100%) 3,220,400,300 shares (100%)	-	-
Mata Acara Rapat Keenam | **Agenda of the Sixth Meeting**		
3.220.367.300 saham (99,999%) 3,220,367,300 shares (99.999%)	33.000 saham (0,001%) 33,000 shares (0.001%)	-
Mata Acara Rapat Ketujuh | **Agenda of the Seventh Meeting**		

*) Mata Acara Rapat Ketujuh hanya bersifat Laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya jawab maupun pengambilan keputusan.
The Agenda of the Seventh Meeting is only a report, hence there is no question and answer session or decision making.

7. Perhitungan Suara RUPS Luar Biasa
Vote Count of Ekstraordinary GMS

Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain
Mata Acara Rapat Pertama | **Agenda of the First Meeting**		
3.220.351.800 saham (99,99%) 3,220,351,800 shares (99.99%)	-	33.000 saham (0,001%) 33,000 shares (0,001%)
Mata Acara Rapat Kedua | **Agenda of the Second Meeting**		
3.220.351.800 saham (99,99%) 3,220,351,800 shares (99.99%)	-	33.000 saham (0,001%) 33,000 shares (0.001%)

RUPS di 2022

Pada tahun 2022, Perseroan telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 24 Maret 2022 dan 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 13 Januari 2022 dan 24 Maret 2022 di Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28 Jl. Asia Afrika Nomor 8 Gelora Bung Karno – Senayan Jakarta Pusat. Perseroan juga menyediakan fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) sebagai media perantara antara Pemegang Saham dan Perseroan.

GMS in 2022

In 2022, the Company has held 1 (one) Annual GMS on March 24, 2022 and 2 (two) Extraordinary GMS held on January 13, 2022 and March 24, 2022 at the Function Room, Sentral Senayan III, 28th Floor, Jl. Asia Afrika Number 8, Gelora Karno – Senayan, Central Jakarta. The Company also provides Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facilities as an intermediary medium between Shareholders and the Company.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 13 JANUARI 2022
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS JANUARY 13, 2022

1. Tahapan Pelaksanaan
Implementation Stages

Tahapan Stages	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Conditions
Pemberitahuan RUPS Luar Biasa kepada Regulator Notice of the Extraordinary GMS to the Regulator	Surat Pemberitahuan Rencana RUPS Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara *e-Reporting* pada tanggal 30 November 2021. Notification Letter of Extraordinary GMS Plan to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX) by e-Reporting on November 30, 2021.	Pemberitahuan mengenai rencana RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada publik. Notification regarding the GMS plan is submitted to the OJK no later than 5 (five) working days before the date of the GMS announcement to the public.
Pengumuman RUPS Luar Biasa Announcement of Extraordinary GMS	Diumumkan melalui situs *web* Bursa Efek Indonesia, situs *web* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs *web* Perseroan www.wom.co.id pada tanggal 7 Desember 2021. Announced through the Indonesia Stock Exchange website, the website of Indonesian Central Securities Depository and the Company's website www.wom.co.id on December 7, 2021.	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan telah mengikuti ketentuan kewajiban melakukan Pengumuman RUPS pada situs *web* penyedia e-RUPS, situs *web* bursa efek dan situs *web* Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Pengumuman RUPS. In accordance with the Articles of Association, the Company has complied with the obligation to provide GMS Announcements on the website of the e-GMS provider, the stock exchange website and the Public Company's website in Indonesian and foreign languages, no later than 14 (fourteen) days before the date of the GMS Announcement.
Laporan ke Regulator Report to the Regulator	Bukti Pengumuman RUPS Luar Biasa telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara *e-Reporting* pada tanggal 7 Desember 2021. Proof of Extraordinary GMS announcement has been submitted to OJK and IDX by e-Reporting on December 7, 2021.	

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Tahapan Stages	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Conditions
Panggilan RUPS Luar Biasa beserta penjelasan mata acara RUPS Luar Biasa Extraordinary GMS invitation and agenda explanation	Diumumkan pada situs *web* Bursa Efek Indonesia, situs *web* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs *web* Perseroan www.wom.co.id pada tanggal 22 Desember 2021. Announced on the Indonesia Stock Exchange website, the website of the Indonesian Central Securities Depository and the Company's website www.wom.co.id on December 22, 2021.	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan telah mengikuti ketentuan Pemanggilan RUPS pada situs *web* penyedia e-RUPS, situs *web* bursa efek dan situs *web* Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS. In accordance with the Articles of Association, the Company has complied with the provisions of the GMS Invitation on the website of the e-GMS provider, the stock exchange website and the website of the Public Company in Indonesian and foreign languages, no later than 21 (twenty-one) days prior to the GMS.
Laporan ke Regulator Report to the Regulator	Bukti Pemanggilan RUPS Luar Biasa telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara *e-Reporting* pada tanggal 22 Desember 2021. Proof of the Extraordinary GMS Invitations has been submitted to the OJK and IDX by e-Reporting on December 22, 2021.	
Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa **Extraordinary GMS Convention**		
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPS Luar Biasa Summary of Minutes (Results) of the Extraordinary GMS	Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa diumumkan pada situs *web* Bursa Efek Indonesia, situs *web* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs *web* Perseroan www.wom.co.id pada tanggal 17 Januari 2022. The summary of the minutes of the Extraordinary GMS was announced on the website of the Indonesia Stock Exchange, the website of the Indonesian Central Securities Depository and the website of the Company www.wom.co.id on January 17, 2022.	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan telah mengikuti ketentuan kewajiban melakukan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS pada situs *web* penyedia e-RUPS, situs *web* bursa efek dan situs *web* Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. In accordance with the Articles of Association, the Company has complied with the obligation to announce the summary of the minutes of the GMS on the website of the e-GMS provider, the stock exchange website and the website of the Public Company in Indonesian and foreign languages, no later than 2 (two) working days after the GMS is held.
Laporan ke Regulator Report to Regulator	Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK (Pasar Modal dan Pengawas) dan BEI *(e-Reporting)* tanggal 17 Januari 2022. Proof of announcement submitted to OJK (Capital Market and Supervisors) and IDX (e-Reporting) dated January 17, 2022.	
Risalah RUPS Luar Biasa Minutes of Extraordinary GMS	Risalah RUPS Luar Biasa disampaikan ke OJK pada tanggal 9 Februari 2022. Minutes of Extraordinary GMS submitted to OJK on February 9, 2022.	Risalah RUPS Luar Biasa wajib disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS Luar Biasa diselenggarakan. Minutes of Extraordinary GMS must be submitted to OJK no later than 30 (thirty) days after the Extraordinary GMS is held.

2. Proses Penyelenggaraan
Implementation Process

Tanggal dan Waktu Date and Time	**13 Januari 2022** January 13, 2022
Tempat Venue	Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Gelora Bung Karno - Senayan Jakarta Pusat 10270. Dalam rangka mendukung upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan juga menyelenggarakan RUPS Luar Biasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik. Function Room, Sentral Senayan III 28th Floor, Jalan Asia Afrika Number 8 Gelora Bung Karno - Senayan Jakarta Pusat 10270. To support efforts to prevent the spread of Covid-19, the Company also held the Extraordinary GMS electronically in accordance with the provisions of POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.
Kuorum Quorum	3.220.493.229 saham (92,5%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 3.481.481.480 saham. 3,220,493,229 shares (92.5%) of all issued and fully paid-up shares up to the time of the Meeting amounted to 3,481,481,480 shares.
Pimpinan RUPS Luar Biasa Chairman of Extraordinary GMS	Bapak I Nyoman Tjager selaku Presiden Komisaris/Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tertanggal 12 November 2021. Mr. I Nyoman Tjager as President Commissioner/Independent Commissioner of the Company, based on the Circular Decree of the Board of Commissioners dated November 12, 2021.
Kehadiran anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris Attendance of members of the Board of Commissioners including the President Commissioner	• I Nyoman Tjager: Presiden Komisaris/Komisaris Independen | President Commissioner/Independent Commissioner • Robbyanto Budiman: Wakil Presiden Komisaris | Vice President Commissioner • Thilagavathy Nadason: Komisaris/ Commissioner • Myrnie Zachraini Tamin: Komisaris Independen | Independent Commissioner
Kehadiran anggota Direksi termasuk Presiden Direktur Attendance of members of the Board of Directors including the President Director	• Djaja Suryanto Sutandar: Presiden Direktur | President Director • Anthony Yuarez Panggabean: Direktur | Director • Njauw Vido Onadi: Direktur | Director • Wibowo: Direktur | Director
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan RUPS Luar Biasa Independent Parties to conduct quorum counting and voting at the Extraordinary GMS	Notaris Aulia Taufani, S.H. Notary Aulia Taufani, S.H.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Tanggal dan Waktu Date and Time	13 Januari 2022 January 13, 2022
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of shareholders who asked questions and/or gave opinions	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. No shareholders or their proxies who were present at the meeting asking questions and/or opinions.
Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Luar Biasa Extraordinary GMS decision-making mechanism	Pengambilan keputusan melalui mekanisme pemungutan suara. Perhitungan suara dan validasi suara di dalam Rapat dilakukan oleh Notaris. Decision making through voting mechanism. The calculation of votes and validation of votes in the Meeting is carried out by a Notary.

3. Proses Perhitungan Suara
Vote Counting Process

Perhitungan suara dan prosedur pemungutan suara pada RUPS Luar Biasa Perseroan dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat RUPS yang dibagikan kepada pemegang saham dan dibacakan oleh Pengarah Acara sebelum RUPS Luar Biasa dimulai. Pengungkapan perhitungan dan prosedur pemungutan suara secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib RUPS Luar Biasa yang diumumkan/diunggah dalam situs *web* Perseroan bersamaan dengan Pemanggilan RUPS Luar Biasa.

The calculation of votes and voting procedures at the Company's Extraordinary GMS are explained in the GMS Meeting Rules distributed to shareholders and read by the Event Director prior to the Extraordinary GMS begins. The full disclosure of the calculation and voting procedures is detailed in the Extraordinary GMS Meeting Rules, which are announced/uploaded on the Company's website with the Extraordinary GMS Invitation.

4. Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS Luar Biasa 13 Januari 2022
Decision and Realization of Extraordinary GMS on January 13, 2022

MATA ACARA 1 I AGENDA 1	
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Changes in the Composition of the Company's Management	
Keputusan Decision	1. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Zacharia Susantadiredja terhitung efektif sejak tanggal 15 November 2021 dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas jasa dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab *(acquit et de charge)* kepada Bapak Zacharia Susantadiredja atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan untuk masa jabatan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya, akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022. 2. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Cincin Lisa Hadi sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023.

3. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
   Presiden Direktur : Bapak Djaja Suryanto Sutandar
   Direktur : Ibu Cincin Lisa Hadi*)
   Direktur : Bapak Anthony Yuarez Panggabean
   Direktur : Bapak Njauw Vido Onadi
   Direktur : Bapak Wibowo
   *) Dengan ketentuan pengangkatan Ibu Cincin Lisa Hadi akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan) serta untuk mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang.

1. Accepted and ratified the resignation of Mr. Zacharia Susantadiredja effective as of November 15, 2021, accompanied by thanks and profuse appreciation for his services and dedication while serving as Director of the Company. As for the granting of settlement and responsibility (acquit et de charge) to Mr. Zacharia Susantadiredja for the management actions that have been carried out for the term of office from the last accountability until the effective date of his resignation, approval will be requested at the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the 2021 Financial Year which will be held in 2022.
2. Approved to appoint Mrs. Cincin Lisa Hadi as Director of the Company with a term of office since the closing of the Meeting and after obtaining approval from the Financial Services Authority until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2023.
3. Determined that since the closing of the Meeting, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:
   President Director : Mr. Djaja Suryanto Sutandar
   Director : Mrs. Cincin Lisa Hadi*)
   Director : Mr. Anthony Yuarez Panggabean
   Director : Mr. Njauw Video Onadi
   Director : Mr. Wibowo
   *) Provided that the appointment of Mrs. Cincin Lisa Hadi will be effective after obtaining approval from the Financial Services Authority.
4. The delegation of authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the change in the composition of the members of the Board of Directors of the Company, including restating and/or reaffirming in a notarial deed in connection with the change in the composition of the members of the Board of Directors of the Company, and to notify and announce to the public (if necessary) and to apply for approval from the competent authority.

Realisasi /Tindak Lanjut Voting Result Realization	Telah direalisasikan pada tahun 2022. Has been realized in 2022.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

5. Penghitungan Suara
Vote Counts

Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain
3.220.492.629 saham (99,99%) 3,220,492,629 shares (99.99%)	-	600 saham (0,01%) 600 shares (0.01%)

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 24 MARET 2022
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS MARCH 24, 2022

1. Tahapan Pelaksanaan
Implementation Stages

Tahapan Stages		Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Conditions
Pemberitahuan RUPS Tahunan kepada Regulator Notice of the Annual GMS to the Regulator		Surat Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara *e-Reporting* pada tanggal 8 Februari 2022. Notification Letter of Annual GMS Plan to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX) by e-Reporting on February 8, 2022.	Pemberitahuan mengenai rencana RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada publik. Notification regarding the GMS plan is submitted to the OJK no later than 5 (five) working days before the date of the GMS announcement to the public.
Pengumuman RUPS Tahunan Announcement of Annual GMS	Publikasi Publication	Diumumkan melalui situs *web* Bursa Efek Indonesia, situs *web* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs *web* Perseroan www.wom.co.id pada tanggal 15 Februari 2022. Announced through the Indonesia Stock Exchange website, the website of Indonesian Central Securities Depository and the Company's website www.wom. co.id on February 15, 2022.	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan telah mengikuti ketentuan kewajiban melakukan Pengumuman RUPS pada situs *web* penyedia e-RUPS, situs *web* bursa efek dan situs *web* Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Pengumuman RUPS. In accordance with the Articles of Association, the Company has complied with the obligation to provide GMS Announcements on the website of the e-GMS provider, the stock exchange website and the Public Company's website in Indonesian and foreign languages, no later than 14 (fourteen) days before the date of the GMS Announcement.
	Laporan ke Regulator Report to the Regulator	Bukti Pengumuman RUPS Tahunan telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara *e-Reporting* pada tanggal 15 Februari 2022. Proof of Annual GMS Announcement has been submitted to OJK and IDX by e-Reporting on February 15, 2022.	

Tahapan Stages		Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Conditions
Panggilan RUPS Tahunan beserta penjelasan mata acara RUPS Tahunan Annual GMS invitation and agenda explanation	Publikasi Publication	Diumumkan pada situs *web* Bursa Efek Indonesia, situs *web* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs *web* Perseroan www.wom.co.id pada tanggal 2 Maret 2022. Announced on the Indonesia Stock Exchange website, the website of the Indonesian Central Securities Depository and the Company's website www.wom.co.id on March 2, 2022.	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan telah mengikuti ketentuan Pemanggilan RUPS pada situs *web* penyedia e-RUPS, situs *web* bursa efek dan situs *web* Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS. In accordance with the Articles of Association, the Company has complied with the provisions of the GMS Invitation on the website of the e-GMS provider, the stock exchange website and the website of the Public Company in Indonesian and foreign languages, no later than 21 (twenty-one) days prior to the GMS
Penyelenggaraan RUPS Tahunan Annual GMS Convention		24 Maret 2022 March 24, 2022	
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPS Tahunan Summary of Minutes (Results) of the Annual GMS	Publikasi Publication	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan diumumkan pada situs *web* Bursa Efek Indonesia, situs *web* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs *web* Perseroan www.wom.co.id pada tanggal 28 Maret 2022. The summary of the minutes of the Annual GMS was announced on the website of the Indonesia Stock Exchange, the website of the Indonesian Central Securities Depository and www.wom.co.id the website of the Company www.wom.co.id on March 28, 2022.	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan telah mengikuti ketentuan kewajiban melakukan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS pada situs *web* penyedia e-RUPS, situs *web* bursa efek dan situs *web* Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. In accordance with the Articles of Association, the Company has complied with the obligation to announce the summary of the minutes of the GMS on the website of the e-GMS provider, the stock exchange website and the website of the Public Company in Indonesian and foreign languages, no later than 2 (two) working days after the GMS is held.
Risalah RUPS Tahunan Minutes of Annual GMS		Risalah RUPS Tahunan disampaikan ke OJK pada tanggal 22 April 2022. Minutes of Annual GMS submitted to OJK on April 22, 2022.	Risalah RUPS wajib disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Minutes of GMS must be submitted to OJK no later than 30 (thirty) days after the GMS is held.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

2. Proses Penyelenggaraan
Implementation Process

Tanggal dan Waktu Date and Time	**24 Maret 2022** March 24, 2022
Tempat Venue	Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28, Jl. Asia Afrika Nomor 8 Gelora Bung Karno - Senayan Jakarta Pusat 10270. Dalam rangka mendukung upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan juga menyelenggarakan RUPS Tahunan secara elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/ POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik. Function Room, Sentral Senayan III 28th Floor, Jl. Asia Afrika Number 8 Gelora Bung Karno - Senayan Jakarta Pusat 10270. To support efforts to prevent the spread of Covid-19, the Company also held the Annual GMS electronically in accordance with the provisions of POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.
Kuorum Quorum	3.221.785.626 saham (92,54%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 3.481.481.480 saham. 3,221,785,626 shares (92.54%) of all issued and fully paid-up shares up to the time of the Meeting amounted to 3,481,481,480 shares.
Pimpinan RUPS Tahunan Chairman of Annual GMS	Bapak I Nyoman Tjager selaku Presiden Komisaris/Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tertanggal 18 Februari 2022. Mr. I Nyoman Tjager as President Commissioner/Independent Commissioner of the Company, based on the Circular Decree of the Board of Commissioners dated February 18, 2022.
Kehadiran anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris Attendance of members of the Board of Commissioners including the President Commissioner	1. I Nyoman Tjager : Presiden Komisaris/Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner 2. Garibaldi Thohir : Komisaris | Commissioner 3. Thilagavathy Nadason : Komisaris | Commissioner 4. Myrnie Zachraini Tamin : Komisaris Independen Independent Commissioner
Kehadiran anggota Direksi termasuk Presiden Direktur Attendance of members of the Board of Directors including the President Director	1. Djaja Suryanto Sutandar : Presiden Direktur | President Director 2. Anthony Yuarez Panggabean : Direktur | Director 3. Njauw Vido Onadi : Direktur | Director 4. Wibowo : Direktur | Director
Kehadiran Dewan Pengawas Syariah Attendance of Sharia Supervisory Board	1. Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA : Ketua | Chairman 2. H. Muh. Taufik Darmansyah, SE, CPA : Anggota | Member

Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan RUPS Tahunan Independent Parties to conduct quorum counting and voting at the Annual GMS	Notaris Aulia Taufani, S.H. Notary Aulia Taufani, S.H
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of shareholders who asked questions and/or gave opinions	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. No shareholders or their proxies who were present at the meeting asking questions and/or opinions.
Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Tahunan Annual GMS decision-making mechanism	Pengambilan keputusan melalui mekanisme pemungutan suara. Perhitungan suara dan validasi suara di dalam Rapat dilakukan oleh Notaris. Decision making through voting mechanism. The calculation of votes and validation of votes in the Meeting is carried out by a Notary.

3. Proses Perhitungan Suara
Vote Counting Process

Perhitungan suara dan prosedur pemungutan suara pada RUPS Tahunan Perseroan dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat RUPS yang dibagikan kepada pemegang saham dan dibacakan oleh Pengarah Acara sebelum RUPS Tahunan dimulai. Pengungkapan perhitungan dan prosedur pemungutan suara secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib RUPS Tahunan yang diumumkan/diunggah dalam situs web Perseroan bersamaan dengan Pemanggilan RUPS Tahunan.

The calculation of votes and voting procedures at the Company's Annual GMS were explained in the GMS Meeting Rules which were distributed to shareholders and read by the Event Organizer before the Annual GMS began. The complete disclosure of the calculation and voting procedure was stated in the Extraordinary GMS Code of Conduct announced/uploaded on the Company's website with the Annual GMS Invitations.

4. Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS Tahunan 24 Maret 2022
Decision and Realization of Annual GMS on March 24, 2022

MATA ACARA 1 I AGENDA 1	
Laporan Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2021 The Company's Annual Activity Report for the Year 2021	
Keputusan Decision	Menyetujui dan menerima Laporan Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2021. Approved and received the Company's Activity Report for the 2021 Fiscal Year.
Realisasi /Tindak Lanjut Realization/Follow Up	Telah direalisasikan pada tahun 2022 Has been realized in 2022

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

MATA ACARA 2 | AGENDA 2

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
Ratification of the Company's Annual Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2021

Keputusan Decision	- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) sebagaimana ternyata dari laporan Auditor Independen tertanggal - 17 Februari 2022 dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia". - Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan (termasuk anggota Direksi yang telah mengundurkan diri sebagaimana keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 13 Januari 2022) atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2021. Sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasannya dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang tahun buku 2021, selama tidak termasuk dalam kategori tindak pidana. - Approved and ratified the Company's Annual Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2021 which has been audited by the Purwantono Public Accountant Firm, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as evident from the Independent Auditor's report dated February 17, 2022 with the opinion that "The Financial Statements fairly present, in all material respects, the financial position of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk as of December 31, 2021, and financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards". - Granted full release and discharge of responsibilities (volledig acquit et de charge) to members of the Board of Directors, Board of Commissioners and members of the Sharia Supervisory Board of the Company (including members of the Board of Directors who have resigned according to the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated January 13, 2022) for their actions management and supervision that they have carried out during the 2021 financial year. As long as the management and supervision actions referred to are reflected in the books and records of the Company throughout the 2021 fiscal year, as long as they are not included in the category of criminal acts.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow Up	Telah direalisasikan pada tahun 2022 Has been realized in 2022

MATA ACARA 3 | AGENDA 3

Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
Stipulation of the Company's Profit Allocation for Fiscal Year Ended December 31, 2021

Keputusan
Decision

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dari Laba Bersih Perseroan untuk digunakan sebagai dana cadangan umum guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan;
   b. Sebesar Rp33.182.994.412,2 (tiga puluh tiga miliar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua belas koma dua Rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai *(cash dividend)* untuk tahun buku 2021 yang akan dibagikan kepada 3.481.481.480 (tiga miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh) lembar saham, sehingga setiap saham memperoleh dividen atau sekitar sebesar Rp9,5 (sembilan koma lima Rupiah) per saham;
   c. Sisa dari laba bersih sebesar Rp74.926.986.961,8 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu koma delapan rupiah) akan dicatat sebagai Laba Ditahan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai *(cash dividend)* tahun buku 2021 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai *(cash dividend)* tahun buku 2021 adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 April 2022.
   b. Dividen tunai *(cash dividend)* akan dibayarkan pada tanggal 27 April 2022 dengan cara membayar dividen tunai (*cash dividend*) sekitar sebesar Rp9,5 (sembilan koma lima Rupiah) setiap saham. Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib dipotong Perseroan.
   c. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

1. Determined the use of Net Profit for the 2021 financial year with the following conditions:
   a. In the amount of Rp2,500,000,000.00 (two billion five hundred million Rupiah) of the Company's Net Profit to be used as a general reserve fund to fulfill the provisions in Article 70 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Article 21 of the Company's Article of Association;
   b. In the amount of Rp33,182,994,412.2 (thirty-three billion one hundred eighty-two million nine hundred ninety-four thousand four hundred- and twelve-point two Rupiah) or 30% (thirty percent) of the Company's Net Profit distributed as cash dividends) for the 2021 financial year which will be distributed to 3,481,481,480 (three billion four hundred eighty-one million four hundred eighty-one thousand four hundred and eighty) shares, so that each share receives a dividend or approximately Rp.9.5 (nine-point five Rupiah) per share;
   c. The remaining net profit of Rp74,926,986,961.8 (seventy-four billion nine hundred twenty-six million nine hundred eighty-six thousand nine hundred sixty-one point eight rupiahs) will be recorded as Retained Earnings.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

	2. Approved the distribution of cash dividends for the 2021 financial year to be carried out with the following conditions: a. Shareholders who are entitled to receive cash dividends for the 2021 financial year are the shareholders of the Company whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on April 5, 2022. b. Cash dividends will be paid on April 27, 2022 by paying cash dividends of approximately Rp. 9.5 (nine- point five Rupiah) per share. Dividend distribution is subject to tax in accordance with applicable regulations which the Company must deduct. c. Granted power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the Company to carry out everything related to the distribution of the dividend and to announce it with due observance of the applicable regulations.
Realisasi /Tindak Lanjut Realization/Follow Up	Telah direalisasikan pada tahun 2022 Has been realized in 2022

MATA ACARA 4 I AGENDA 4

Penetapan pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022
Determination of duties and authorities among the members of the Board of Directors for the Financial Year 2022

Keputusan Decision	Pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 diusulkan untuk diserahkan kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (6) Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan. The division of duties and authorities of the members of the Board of Directors of the Company for the fiscal year 2022 is proposed to be submitted to the Board of Directors of the Company with due observance of the provisions in Article 92 paragraph (6) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, with prior approval from the Company's Board of Commissioners.
Realisasi /Tindak Lanjut Realization/Follow Up	Telah direalisasikan pada tahun 2022 Has been realized in 2022

MATA ACARA 5 I AGENDA 5

Penetapan besarnya uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022

Determination of the amount of service fees and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners and members of the Company's Sharia Supervisory Board, as well as delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary/honorarium and/or other benefits for members of the Company's Board of Directors for the Financial Year 2022

Keputusan Decision	1. Penentuan uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan diusulkan untuk melimpahkan wewenangnya kepada Presiden Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya uang jasa/honorarium dan atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022.

2. Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya gaji dan/atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi para anggota Direksi Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022.

1. The determination of fees and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners and members of the Company's Sharia Supervisory Board is proposed to delegate their authority to the President Commissioner of the Company by taking into account the proposals and recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company and the amount of fees/honorarium and/ or allowances in any form others that have been determined for members of the Board of Commissioners and members of the Sharia Supervisory Board will be included in the Annual Report for the 2022 financial year will be included in the Annual Report for the fiscal year 2022.
2. Delegated the authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and/or other allowances for members of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2022 by taking into account the proposals and recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee and the amount of salary and/or other allowances in any other form that has been determined for the members of the Board of Directors of the Company in question will be included in the Annual Report for the fiscal year 2022.

Realisasi /Tindak Lanjut Realization/Follow Up	Telah direalisasikan pada tahun 2022 Has been realized in 2022

MATA ACARA 6 | AGENDA 6

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
Appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements ending on December 31, 2022

Keputusan
Decision

1. Menyetujui penunjukan Tuan Muhammad Kurniawan dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan biaya jasa audit setinggi-tingginya Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta Rupiah) (tidak termasuk pajak dan OPE) dengan syarat-syarat yang dianggap baik.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan hal-hal dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik Tuan Muhammad Kurniawan dan/ atau Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk penetapan syarat-syarat lainnya tentang penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
3. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal- hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik Tuan Muhammad Kurniawan dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan).

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

1. Approved the appointment of Mr. Muhammad Kurniawan and the Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as Public Accountants and Public Accounting Firms respectively to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year ending December 31, 2022 for a fee audit service at a maximum of Rp630,000,000.00 (six hundred and thirty million Rupiah) (excluding taxes and OPE) with conditions that are considered good.
2. Granted authority and power to the Board of Commissioners to carry out matters deemed necessary in connection with the appointment of a substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the case of Public Accountant Mr. Muhammad Kurniawan and/or Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst & Young Global Limited) for any reason unable to complete the audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2022 including the determination of other requirements regarding the appointment of a Public Accountant and/ or a replacement Public Accounting Firm with due observance of the recommendations of the Company's Audit Committee and the laws and regulations valid invitation.
3. Granted authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the Company to carry out matters deemed necessary in connection with the appointment of Public Accountant Mr. Muhammad Kurniawan and Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst & Young Global Limited) respectively as Public Accountants and a Public Accounting Firm that audits the Company's Financial Statements for the Financial Year ending December 31, 2022, including to notify and announce to the public (if needed).

Realisasi /Tindak Lanjut Realization/Follow Up	Telah direalisasikan pada tahun 2022 Has been realized in 2022

MATA ACARA 7 | AGENDA 7

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama 2021:
a. Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 *)

Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Company's Public Offering for 2021:
a. Shelf Registration Bond IV WOM Finance Phase I 2021 *)

Keputusan Decision	Oleh karena Mata Acara Rapat Ketujuh hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-jawab maupun pengambilan keputusan. Laporan yang disampaikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham adalah sebagai berikut: Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana dari seluruh dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 sebagaimana yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta yang uraian singkatnya telah disampaikan dalam Rapat. Because the agenda of the Seventh Meeting was only a report, there was no question-and-answer session or decision- making. The reports submitted to the shareholders or the proxies of the shareholders are as follows: Accepting accountability for the realization of the use of funds from all proceeds from the Shelf-Registered Public Offering of WOM Finance Phase I Year 2021 Shelf-Registered Bonds as submitted to the Financial Services Authority and a brief description of which has been submitted in Meeting.
Realisasi /Tindak Lanjut Realization/Follow Up	Telah direalisasikan pada tahun 2022 Has been realized in 2022

5. Penghitungan Suara
Vote Counts

Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain
Mata Acara Rapat Pertama | **First Agenda**		
3.221.785.626 saham (100%) 3,221,785,626 shares (100%)	-	-
Mata Acara Rapat Kedua | **Second Agenda**		
3.221.785.626 saham (100%) 3,221,785,626 shares (100%)	-	-
Mata Acara Rapat Ketiga | **Third Agenda**		
3.221.785.626 saham (100%) 3,221,785,626 shares (100%)	-	-
Mata Acara Rapat Keempat | **Fourth Agenda**		
3.221.785.626 saham (100%) 3,221,785,626 shares (100%)	-	-
Mata Acara Rapat Kelima | **Fifth Agenda**		
3.220.257.426 saham (99,95%) 3,220,257,426 shares (99.95%)	1.528.200 saham (0,05%) 1,528,200 shares (0.05%)	-
Mata Acara Rapat Keenam | **Sixth Agenda**		
3.221.785.626 saham (100%) 3,221,785,626 shares (100%)		
Mata Acara Rapat Ketujuh | **Seventh Agenda**		

*) Mata Mata Acara Rapat Ketujuh hanya bersifat Laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya jawab maupun pengambilan keputusan.
*) The Seventh Meeting was only a report, there was no question-and-answer session or decision-making.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 24 MARET 2022
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS MARCH 24, 2022

1. Tahapan Pelaksanaan
Implementation Stages

Tahapan Stages	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Conditions
Pemberitahuan RUPS Luar Biasa kepada Regulator Notice of the Extraordinary GMS to the Regulator	Surat Pemberitahuan Rencana RUPS Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara *e-Reporting* pada tanggal 8 Februari 2022. Notification Letter of Extraordinary GMS Plan to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX) by e-Reporting on February 8, 2022.	Pemberitahuan mengenai rencana RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada publik. Notification regarding the GMS plan is submitted to the OJK no later than 5 (five) working days before the date of the GMS announcement to the public.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Tahapan Stages		Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Conditions
Pengumuman RUPS Luar Biasa Announcement of Extraordinary GMS	Publikasi Publication	Diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs *web* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs *web* Perseroan www.wom.co.id pada tanggal 15 Februari 2022. Announced through the Indonesia Stock Exchange website, the website of Indonesian Central Securities Depository and the Company's website www.wom.co.id on February 15, 2022.	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan telah mengikuti ketentuan kewajiban melakukan Pengumuman RUPS pada situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Pengumuman RUPS. In accordance with the Articles of Association, the Company has complied with the obligation to provide GMS Announcements on the website of the e-GMS provider, the stock exchange website and the Public Company's website in Indonesian and foreign languages, no later than 14 (fourteen) days before the date of the GMS Announcement.
	Laporan ke Regulator Report to the Regulator	Bukti Pengumuman RUPS Luar Biasa telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara *e-Reporting* pada tanggal 15 Februari 2022. Proof of Extraordinary GMS Announcement has been submitted to OJK and IDX by e-Reporting on February 15, 2022.	
Panggilan RUPS Luar Biasa beserta penjelasan mata acara RUPS Luar Biasa Extraordinary GMS invitation and agenda explanation	Publikasi Publication	Diumumkan pada situs *web* Bursa Efek Indonesia, situs *web* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs *web* Perseroan www.wom.co.id pada tanggal 2 Maret 2022. Announced on the Indonesia Stock Exchange website, the website of the Indonesian Central Securities Depository and the Company's website www.wom.co.id on March 2, 2022.	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan telah mengikuti ketentuan Pemanggilan RUPS pada situs *web* penyedia e-RUPS, situs *web* bursa efek dan situs *web* Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS. In accordance with the Articles of Association, the Company has complied with the provisions of the GMS Invitation on the website of the e-GMS provider, the stock exchange website and the website of the Public Company in Indonesian and foreign languages, no later than 21 (twenty-one) days prior to the GMS.
Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Extraordinary GMS Convention		24 Maret 2022 March 24, 2022	

Tahapan Stages		Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Conditions
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPS Luar Biasa Summary of Minutes (Results) of the Extraordinary GMS	Publikasi Publication	Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa diumumkan pada situs *web* Bursa Efek Indonesia, situs *web* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs *web* Perseroan www.wom.co.id pada tanggal 28 Maret 2022. The summary of the minutes of the Extraordinary GMS was announced on the website of the Indonesia Stock Exchange, the website of the Indonesian Central Securities Depository and www.wom.co.id the website of the Company www.wom.co.id on March 28, 2022.	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan telah mengikuti ketentuan kewajiban melakukan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS pada situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. In accordance with the Articles of Association, the Company has complied with the obligation to announce the summary of the minutes of the GMS on the website of the e-GMS provider, the stock exchange website and the website of the Public Company in Indonesian and foreign languages, no later than 2 (two) working days after the GMS is held.
Laporan ke Regulator Report to Regulator	Laporan ke Regulator Report to Regulator	Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK (Pasar Modal dan Pengawas) dan BEI *(e-Reporting)* tanggal 28 Maret 2022. Proof of announcement submitted to OJK (Capital Market and Supervisors) and IDX (e-Reporting) dated March 28, 2022.	

2. Proses Penyelenggaraan
Implementation Process

Tanggal dan Waktu Date and Time	24 Maret 2022 March 24, 2022
Tempat Venue	Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28, Jl. Asia Afrika Nomor 8 Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270. Dalam rangka mendukung upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan juga menyelenggarakan RUPS Tahunan secara elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/ POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik. Function Room, Sentral Senayan III 28th Floor, Jl. Asia Afrika Number 8 Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270. To support efforts to prevent the spread of Covid-19, the Company also held the Annual GMS electronically in accordance with the provisions of POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.
Kuorum Quorum	3.220.322.426 saham (92,50%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 3.481.481.480 saham. 3,220,322,426 shares (92.50%) of all issued and fully paid-up shares up to the time of the Meeting amounted to 3,481,481,480 shares.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Tanggal dan Waktu Date and Time	**24 Maret 2022** March 24, 2022
Pimpinan RUPS Luar Biasa Chairman of Extraordinary GMS	Bapak I Nyoman Tjager selaku Presiden Komisaris/Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tertanggal 18 Februari 2022. Mr. I Nyoman Tjager as President Commissioner/Independent Commissioner of the Company, based on the Circular Decree of the Board of Commissioners dated February 18, 2022.
Kehadiran anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris Attendance of members of the Board of Commissioners including the President Commissioner	1. I Nyoman Tjager: Presiden Komisaris/Komisaris Independen | President Commissioner/Independent Commissioner 2. Garibaldi Thohir: Komisaris | Commissioner 3. Thilagavathy Nadason: Komisaris | Commissioner 4. Myrnie Zachraini Tamin: Komisaris Independen | Independent Commissioner
Kehadiran anggota Direksi termasuk Presiden Direktur Attendance of members of the Board of Directors including the President Director	1. Djaja Suryanto Sutandar: Presiden Direktur | President Director 2. Anthony Yuarez Panggabean: Direktur | Director 3. Njauw Vido Onadi: Direktur | Director 4. Wibowo: Direktur | Director
Kehadiran Dewan Pengawas Syariah Attendance of Sharia Supervisory Board	1. Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA: Ketua | Chairman 2. H. Muh. Taufik Darmansyah, SE, CPA: Anggota | Member
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan RUPS Luar Biasa Independent Parties to conduct quorum counting and voting at the Extraordinary GMS	Notaris Aulia Taufani, S.H. Notary Aulia Taufani, S.H.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of shareholders who asked questions and/or gave opinions	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. No shareholders or their proxies who were present at the meeting asking questions and/or opinions.
Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Luar Biasa Extraordinary GMS decision-making mechanism	Pengambilan keputusan melalui mekanisme pemungutan suara. Perhitungan suara dan validasi suara di dalam Rapat dilakukan oleh Notaris. Decision making through voting mechanism. The calculation of votes and validation of votes in the Meeting is carried out by a Notary.

3. Proses Perhitungan Suara
Vote Counting Process

Perhitungan suara dan prosedur pemungutan suara pada RUPS Luar Biasa Perseroan dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat RUPS yang dibagikan kepada pemegang saham dan dibacakan oleh Pengarah Acara sebelum RUPS Luar Biasa dimulai. Pengungkapan perhitungan dan prosedur pemungutan suara secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib RUPS Luar Biasa yang diumumkan/diunggah dalam situs web Perseroan bersamaan dengan Pemanggilan RUPS Luar Biasa.

The calculation of votes and voting procedures at the Company's Extraordinary GMS were explained in the GMS Meeting Rules which were distributed to shareholders and read by the Event Organizer before the Extraordinary GMS began. The complete disclosure of the calculation and voting procedure was stated in the Extraordinary GMS Code of Conduct announced/uploaded on the Company's website with the Extraordinary GMS Invitations.

4. Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS Luar Biasa 24 Maret 2022
Decision and Realization of Extraordinary GMS on March 24, 2022

MATA ACARA RAPAT | AGENDA	
Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengalihkan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka: 1. Perolehan pinjaman dan/atau pendanaan syariah dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri. 2. Perolehan pinjaman dan/atau pendanaan dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan pada Tahun Buku 2022. Approved the Company's plan to transfer, release rights or pledge parts or all of the Company's receivables: 1. In order to get loans and/or financing including Sharia financing from financial institutions (including of PT Bank Maybank Indonesia Tbk) and non-bank domestic and abroad. 2. In order to get loans and /or financing from financial institutions (including of PT Bank Maybank Indonesia Tbk) and non-bank both domestic and abroad with the Initial Shelf Public Offering for the Financial Year 2022.	
Keputusan Decision	1. Menyetujui tindakan Direksi untuk mengalihkan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan syariah dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri pada tahun buku 2022. 2. Menyetujui tindakan Direksi untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan berupa piutang Perseroan yang timbul dari pembiayaan yang disalurkan Perseroan sehubungan dengan perolehan pinjaman dan/atau pendanaan dari PT Bank DBS Indonesia dan PT Bank KEB Hana Indonesia. 3. Menyetujui tindakan Direksi atas rencana Perseroan untuk mengalihkan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri pada tahun buku 2022 termasuk pemberian jaminan dalam rangka penerbitan lanjutan PUB IV sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) dalam beberapa tahap pada tahun buku 2022. 4. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan pengalihan hak atau pemberian jaminan hutang sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, 3 yang dijabarkan sebelumnya dengan pelaksanaannya pada tahun buku 2022.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

	1. Approved the actions of the Board of Directors to transfer rights or pledge most or all of the Company's receivables in the context of obtaining sharia loans and/or funding from bank financial institutions (including PT Bank Maybank Indonesia Tbk) and non-banks both domestically and abroad in the fiscal year 2022. 2. Approved the actions of the Board of Directors to pledge most or all of the Company's assets in the form of the Company's receivables arising from the financing disbursed by the Company in connection with obtaining loans and/or funding from PT Bank DBS Indonesia and PT Bank KEB Hana Indonesia. 3. Approved the actions of the Board of Directors on the Company's plan to transfer rights or pledge most or all of the Company's receivables in order to obtain loans and/or funding from bank financial institutions (including PT Bank Maybank Indonesia Tbk) and non-banks both domestically and abroad in the financial year 2022, including the provision of guarantees for the further issuance of PUB IV up to a maximum amount of IDR2,000,000,000,000.00 (two trillion Rupiah) in several stages in the 2022 financial year. 4. Granted power and authority with substitution rights to the Board of Directors to take all necessary actions in relation to the transfer of rights or the provision of debt guarantees for most or all of the Company's receivables as referred to in points 1, 2, 3 previously described with implementation in the fiscal year 2022.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow Up	Telah direalisasikan pada tahun 2022 Has been realized in 2022

5. Perhitungan Suara
Vote Counts

Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain
Mata Acara Rapat | Agenda		
3.220.320.626 saham (99,99%) 3,220,320,626 shares (99.99%)	1.800 saham (0,01%) 1,800 shares (0.01%)	-

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan dan penunjukan Dewan Komisaris Perseroan mengacu pada beberapa ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan perubahannya sebagaimana tercantum pada POJK No. 29/POJK.05/2020.
4. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
6. POJK No. 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
7. Anggaran Dasar Perseroan.
8. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 93 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris

Susunan dan komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu:

The Board of Commissioners is an organ of the Company in charge of conducting supervision in general and/or specifically in line with the Articles of Association, as well as to provide advice to the Board of Directors.

Legal References

The legal basis for the formation and appointment of the Company's Board of Commissioners refers to several provisions, among others:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.
3. POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies and its amendments as contained in POJK No. 29/POJK.05/2020.
4. POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Company.
5. POJK No. 27/POJK.03/2016 concerning the Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services Institutions.
6. POJK No. 47/POJK.05/2020 concerning Business Licensing and Institutional of Financing Companies and Sharia Financing Companies.
7. Articles of Association of the Company.
8. Deed of Resolution of the Company's Meeting No. 93 dated March 30, 2023 made before Aulia Taufani, S.H., Notary in the Administrative City of South Jakarta.

Board of Commissioners Structure and Composition

The composition as well as structure of the Company's Board of Commissioners has complied the prevailing provisions as follows:

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

No	POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan perubahannya sebagaimana tercantum pada POJK No. 29/POJK.05/2020 POJK No. 30/POJK/05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies and its amendments as contained in POJK No. 29/POJK.05/2020	Implementasi di Perseroan Implementation in the Company
1	Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Company with assets of more than Rp200,000,000,000.00 (two hundred billion rupiah) is required to have at least 2 (two) members of the Board of Commissioners.	Perseroan memiliki 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris. The Company has 3 (tiga) Board of Commissioners members.
2	Perusahaan wajib mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. Company must have at least 1 (one) member of the Board of Commissioners who is domiciled in the territory of the Republic of Indonesia.	Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. All Board of Commissioners members are domiciled in the Republic of Indonesia.
3	Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan tidak pernah menjadi anggota Direksi pada Perusahaan yang sama dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir. Members of the Board of Commissioners must meet the requirements of never being a member of the Board of Directors in the same company within the last 6 (six) months.	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak pernah menjadi anggota Direksi pada Perseroan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir. All members of the Board of Commissioners have never been assigned as members of the Board of Directors in the company in the last 6 (six) months.
4	Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen. Company with assets more than Rp200,000,000,000.00 (two hundred billion rupiahs) is required to have at least 1 (one) Independent Commissioner.	2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang atau 67% (enam puluh tujuh persen) dari anggota Dewan Komisaris Perseroan merupakan Komisaris Independen. 2 (two) of the 3 (three) members or 67% (sixty seven percent) of total members of the Company's Board of Commissioners are Independent Commissioners.

No	POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Company	Implementasi di Perseroan Implementation in the Company
1	Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. In the event where there are more than 2 (two) members of the Board of Commissioners, the number of Independent Commissioners must be at least 30% (thirty percent) of the total members of the Board of Commissioners.	2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang atau 67% (enam puluh tujuh persen) dari anggota Dewan Komisaris Perseroan merupakan Komisaris Independen. 2 (two) of 3 (three) members or equal to 67% (sixty seven percent) of the Company's Board of Commissioners members are Independent Commissioners.
2	1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris. 1 (one) member of the Board of Commissioners is appointed as the main commissioner or president commissioner.	Perseroan memiliki 1 (satu) Presiden Komisaris. The Company has 1 (one) President Commissioner.

No	POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Company	Implementasi di Perseroan Implementation in the Company
3	Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. Proposed appointments, terminations and/or replacements of member of the Board of Commissioners to the GMS must consider the recommendations of the Board of Commissioners or the committee that carries out the nomination function.	Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta memperoleh persetujuan dari RUPS. The appointment of Board of Commissioners members of the Company has considered the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee of the Company's and obtained approval from the GMS.

No	POJK No. 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah POJK No. 47/POJK.05/2020 concerning Business Licensing and Institutional of Finance Companies and Sharia Financing Companies.	Implementasi di Perseroan Implementation in the Company
1	Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai Dewan Komisaris wajib memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris yang merupakan Warga Negara Indonesia. Companies that use foreign workers as the Board of Commissioners must have at least 50% (fifty percent) of the members of the Board of Commissioners who are Indonesian citizens.	Terdapat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) orang atau 33% (tiga puluh tiga persen) dari anggota Dewan Komisaris yang merupakan tenaga kerja asing. Dengan demikian anggota Dewan Komisaris yang merupakan Warga Negara Indonesia sebanyak 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang atau 67% (enam puluh tujuh persen) dari anggota Dewan Komisaris. 1 (one) member out of 3 (three) members or 33% (thirty three percent) of total members of the Board of Commissioners is an foreign workers. As such, members of the Board of Commissioners with Indonesian citizenship are 2 (two) out of 3 (three) members or 67% (sixty seven percent) of total members of the Board of Commissioners.

Merujuk pada ketentuan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan maka calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang efektif menjabat saat ini telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsi sesuai jabatannya.

Pursuant to POJK No. 27/POJK.03/2016 concerning the Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services Institutions, the candidate of Board of Commissioners members must obtain approval from the OJK prior to conduct their actions, duties and functions. Members of the Board of Commissioners of the Company who are currently effective have obtained approval from OJK by passing the fit and proper test prior to carrying out actions, duties and functions according to their positions.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang Efektif Menjabat Per 31 Desember 2023 [GRI 2-11]

Composition of Members of the Company's Board of Commissioners Effective as of December 31, 2023 [GRI 2-11]

Jabatan Position	Nama Name	Periode Jabatan Term of Office
Presiden Komisaris/Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner	I Nyoman Tjager	RUPS Tahunan Tahun 2023 – RUPS Tahunan Tahun 2024 2023 Annual GMS – 2024 Annual GMS
Komisaris | Commissioner	Thilagavathy Nadason	RUPS Tahunan Tahun 2023 – RUPS Tahunan Tahun 2024 2023 Annual GMS – 2024 Annual GMS
Komisaris Independen | Independent Commissioner	Myrnie Zachraini Tamin	RUPS Tahunan Tahun 2023 – RUPS Tahunan Tahun 2024 2023 Annual GMS – 2024 Annual GMS

Masa Jabatan Dewan Komisaris
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang efektif menjabat saat ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2024, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Board of Commissioners Term of Office
The term of office of the current members of the Board of Commissioners will expire at the closing of the Annual GMS in 2024, without reduction to the authority of the GMS to dismiss one or more members of the Board of Commissioners at any time before their term of office ends. The Company's Articles of Association state that members of the Board of Commissioners whose term of office has expired may be reappointed.

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
Informasi mengenai rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris di instansi/perusahaan/lembaga/organisasi lain sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan mengenai profil masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Concurrent Positions of the Board of Commissioners
Information regarding the concurrent positions of members of the Board of Commissioners in other agencies/companies/institutions/organizations in 2023 is presented in Company Profile Chapter on the profile of each member of the Board of Commissioners.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
Perseroan telah memiliki Piagam Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 30 November 2022 yang disusun untuk menjadi pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien, transparan, independen dan bertanggung jawab.

Untuk memastikan Piagam Dewan Komisaris tetap relevan bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan, Piagam Dewan Komisaris diperbaharui dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik.

Board of Commissioners Charter
The Company has in place the Board of Commissioners Charter set by the Board of Commissioners on November 30, 2022 as the binding guidelines and procedures for each member of the Company's Board of Commissioners so that they can carry out their duties effectively, efficiently, transparently, independently and responsibly.

To ensure that the Board of Commissioners' Charter remains relevant for each member of the Company's Board of Commissioners, it is updated from regularly to conform with the developments in laws and regulations and best practices.

Piagam Dewan Komisaris terakhir diperbaharui pada tanggal 30 November 2022 dan dapat diakses oleh publik melalui *website* Perseroan (www.wom.co.id). Secara umum, Piagam Dewan Komisaris mengatur tentang:

1. Landasan Hukum Piagam.
2. Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris.
3. Batasan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris.
4. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris.
5. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris.
6. Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris.
7. Jabatan Anggota Dewan Komisaris Berakhir.
8. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
9. Kewenangan Anggota Dewan Komisaris.
10. Waktu Kerja.
11. Keanggotaan dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi.
12. Nilai-nilai Dasar *(CORE VALUES)* dan Etika Kerja.
13. Transparansi Anggota Dewan Komisaris.
14. Rapat Dewan Komisaris.
15. Remunerasi dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris.
16. Sertifikasi dan Syarat Berkelanjutan.
17. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

The Board of Commissioners Charter was last updated on November 30, 2022 and can be accessed by the public through the Company's website (www.wom.co.id). In general, the Board of Commissioners Charter regulates:

1. Legal Basis of the Charter.
2. Board of Commissioners Structure and Composition.
3. Limitation of Multiple Positions for Board of Commissioners Members.
4. Appointment of Board of Commissioners Members.
5. Term of Office of Board of Commissioners Members.
6. Resignation of Board of Commissioners Members.
7. End of Tenure of Board of Commissioners Members.
8. Board of Commissioners Duties and Responsibilities.
9. Board of Commissioners Authority.
10. Working Time.
11. Membership in the Integrated Governance Committee.
12. Core Values and Work Ethics.
13. Transparency of Members of the Board of Commissioners.
14. Board of Commissioners Meetings.
15. Remuneration and Board of Commissioners Performance Assessment.
16. Certification and Sustainability Requirements.
17. Reporting and Accountability.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris [GRI 2-12]

1. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
2. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris:
   a. Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
   b. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
   c. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Board of Commissioners Duties and Responsibilities [GRI 2-12]

1. Each member of the Board of Commissioners cannot act individually, but based on the decision of the Board of Commissioners.
2. Duties and responsibilities of the Board of Commissioners:
   a. The Board of Commissioners is responsible for supervising the policies of the Board of Directors in managing the Company and providing advice to the Board of Directors.
   b. The Board of Commissioners shall direct, monitor, and evaluate the implementation of the Company's strategic policies.
   c. The Board of Commissioners supervises the implementation of the Board of Directors' responsibilities for the implementation of anti-money laundering and counter-terrorism financing programs.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

d. Dewan Komisaris memastikan adanya pembahasan terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris.

e. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha di semua tingkatan organisasi.

f. Dewan Komisaris memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari internal audit Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

g. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk komite-komite paling kurang komite-komite sebagaimana di bawah ini dan atas setiap komite yang dimaksud tersebut dipandu oleh pedoman dan tata tertib kerja yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh Dewan Komisaris:
   - Komite Audit;
   - Komite Nominasi dan Remunerasi;
   - Komite Pemantau Risiko.

h. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi kinerja komite terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing komite yang dimaksud pada huruf (g) angka ini sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.

i. Dewan Komisaris memberikan persetujuan dalam hal Dewan Pengawas Syariah Perseroan memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris.

j. Dewan Komisaris mengkaji visi dan misi Perseroan.

k. Dewan Komisaris mengkaji dan menyetujui laporan tahunan Perseroan.

l. Dewan Komisaris menyusun dan memiliki piagam Dewan Komisaris untuk digunakan sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi jalannya Perseroan.

d. The Board of Commissioners ensures that there are discussions related to anti-money laundering and prevention of terrorism financing in the Board of Directors meetings and the Board of Commissioners meetings.

e. The Board of Commissioners supervises the implementation of GCG in every business activity at all levels of the organization.

f. The Board of Commissioners ensures that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Company's internal audit, external auditors, OJK supervisory results and/or other authority supervision results.

g. To support the effectiveness of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners shall establish committees of at least as below committees and each committee shall be guided by the charter established and/or approved by the Board of Commissioners:
   - Audit Committee;
   - Nomination and Remuneration Committee;
   - Risk Oversight Committee.

h. The Board of Commissioners shall evaluate the performance of committees related to the implementation of duties and responsibilities as referred to in letter (g) of this number at least at the end of each financial year.

i. The Board of Commissioners provides approval in the event that the Company's Sharia Supervisory Board requires the assistance of committee members whose organizational structure is under the Board of Commissioners.

j. The Board of Commissioners reviews the Company's vision and mission.

k. The Board of Commissioners reviews and approves the Company's annual report.

l. The Board of Commissioners shall prepare and have a BOC charter as a guideline in carrying out its functions, duties and responsibilities in overseeing the Company's management.

m. Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran, dan tata cara pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Piagam Dewan Komisaris yang berlaku di Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan.
n. Dewan Komisaris menerima pengaduan/pelaporan secara tertulis dari karyawan Perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga terkait temuan dugaan pelanggaran sehubungan dengan pelaporan keuangan Perseroan.
o. Dewan Komisaris melakukan tindak lanjut penyelesaian pengaduan/pelaporan dugaan pelanggaran terkait laporan keuangan Perseroan dengan mempertimbangkan hasil telaahan yang telah dilakukan Komite Audit Perseroan terkait pengaduan/pelaporan tersebut.
p. Dewan Komisaris menyampaikan laporan setiap kejadian *fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Perseroan kepada OJK sesuai dengan ketentuan OJK terkait penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan.
q. Khusus Komisaris Independen, Komisaris Independen wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak ditemukannya:

    i. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; dan/atau
    ii. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.

r. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko telah efektif sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Perseroan.

s. Dewan Komisaris untuk sementara diwajibkan untuk mengurus Perseroan dalam keadaan apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi dan dalam hal demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk

m. The Board of Commissioners shall hold a BOC meeting which shall at least include the frequency, attendance, and decision-making procedures as stipulated in the Board of Commissioners Charter and the Company's Articles of Association.

n. The Board of Commissioners receives complaints/reports in writing from employees of the Company, shareholders or third parties regarding the findings of alleged violations in connection with the Company's financial reporting.
o. The Board of Commissioners follows up on the resolution of complaints/reporting of alleged violations related to the Company's financial statements by considering the results of review by the Company's Audit Committee on the complaint/ reporting.
p. The Board of Commissioners submits a report on every fraud incident that is estimated to have a significant negative impact on the Company to the OJK in accordance with OJK provisions related to the operation of financing companies and sharia business units of financing companies.
q. Specifically for Independent Commissioners, Independent Commissioners must report to the OJK no later than 10 (ten) days from the discovery of:
    i. Violation of laws and regulations in the field of financing; and/or
    ii. Circumstances or estimated circumstances that may endanger the Company's business continuity.
r. The Board of Commissioners is responsible for ensuring that the implementation of risk management has been effective in accordance with the characteristics, complexity and risk profile of the Company.
s. The Board of Commissioners is temporarily obliged to take care of the Company in circumstances if all members of the Board of Directors are temporarily dismissed and the Company does not have any member of the Board of Directors, and in such case the meeting of the

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain hal dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan terkait penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut.

t. Dewan Komisaris memastikan Direksi memiliki dan melaksanakan prosedur tertulis layanan pengaduan yang berlaku di Perseroan.

u. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan atas ketentuan peraturan OJK terkait literasi keuangan, inklusi keuangan, perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

v. Dewan Komisaris melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Perseroan, peraturan internal Perseroan dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku bagi Dewan Komisaris.

Board of Commissioners has the right to grant temporary powers to one or more of them for their joint dependents, one way or another while still paying attention to the Company's Articles of Association related to the GMS implementation to revoke or strengthen decision on the temporary dismissal of members of the Board of Directors.

t. The Board of Commissioners ensures that the Board of Directors has and implements the written procedures of the complaint service applicable in the Company.

u. The Board of Commissioners shall supervise the implementation of the Board of Directors' responsibilities for compliance with the implementation of OJK regulations related to financial literacy, financial inclusion, consumer and public protection in the financial services sector.

v. The Board of Commissioners performs other duties and responsibilities of the Board of Commissioners as stipulated by the Company's Articles of Association, the Company's internal regulations and the laws and regulations applicable to the Board of Commissioners.

Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris

Tugas-tugas pokok Presiden Komisaris:

1. Dapat memberikan usulan untuk mengadakan rapat Dewan Komisaris termasuk agenda rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Melakukan pemanggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris melakukan pengambilan keputusan secara efektif berdasarkan informasi yang benar dan lengkap, termasuk memastikan bahwa:
   a. Semua isu-isu strategis dan penting menjadi bahan pertimbangan oleh Dewan Komisaris;
   b. Permasalahan yang ada dibahas dengan seksama dan teliti;

Duties and Responsibilities of the President Commissioner

Main duties of the President Commissioner:

1. Provides proposals to hold meetings of the Board of Commissioners including the agenda of the meeting while still paying attention to the provisions of the Company's Articles of Association.
2. Inviting and presiding over meetings of the Board of Commissioners while still paying attention to the provisions of the Company's Articles of Association.
3. Ensuring that meetings of the Board of Commissioners make decisions effectively based on correct and complete information, including ensuring that:
   a. All strategic and important issues are considered by the Board of Commissioners;
   b. The issues are discussed carefully and thoroughly;

c. Semua anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk berkontribusi secara efektif;
d. Setiap anggota Dewan Komisaris menerima informasi yang relevan secara tepat waktu, termasuk diberi penjelasan singkat mengenai isu-isu yang akan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.

4. Melakukan tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris, dari waktu ke waktu.

Kewenangan Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya, dengan ketentuan:
   a. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
   b. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian

c. All members of the Board of Commissioners are given the opportunity to contribute effectively;
d. Each member of the Board of Commissioners receives relevant information in a timely manner, including being given a brief explanation of the issues to be discussed at the Board of Commissioners meeting.

4. Performing other responsibilities assigned by the Board of Commissioners, from time to time.

Board of Commissioners Authority

1. Members of the Board of Commissioners either jointly or individually at any time within office hours of the Company have the right to enter buildings and courtyards or other places used or controlled by the Company and have the right to check all books, letters and other evidence, check and match the state of cash and others and have the right to know all actions that have been carried out by the Board of Directors.
2. In carrying out its duties, the Board of Commissioners has the right to obtain an explanation from the Board of Directors or each member of the Board of Directors about all matters required by the Board of Commissioners.
3. The Board of Commissioners at any time has the right to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors, if the member of the Board of Directors acts contrary to the Company's Articles of Association and/or prevailing laws and regulations or harms the purposes and objectives of the Company or neglects its obligations, provided that:
   a. The temporary suspension must be notified in writing to the person concerned with the reasons.
   b. Within a period of no later than 90 (ninety) days after the date of suspension, the Board of Commissioners shall convene the GMS to revoke or strengthen the suspension decision. In the GMS as referred to, members of the

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

c. RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (b) angka ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila Presiden Komisaris tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk tujuan tersebut diantara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS.

d. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada huruf (b) angka ini atau RUPS sebagaimana yang dimaksud pada huruf (b) angka ini diselenggarakan dan tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada angka ini menjadi batal.

4. Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
5. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
6. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas.

Board of Directors concerned are given the opportunity to be present to defend themselves.

c. The GMS as referred to in letter (b) of this number is chaired by the President Commissioner and if the President Commissioner is not present, it does not need to be proven to other parties, then the GMS is chaired by one of other members of the Board of Commissioners who are present and appointed for this purpose among members of the Board of Commissioners present at the GMS.

d. With the past period of holding the GMS as referred to in letter (b) of this number or the GMS as referred to in letter (b) of this number is held and cannot make a decision, the temporary suspension as referred to in this number becomes void.

4. The Board of Commissioners is authorized to provide approval to the Board of Directors in carrying out certain legal actions as specified in the Company's Articles of Association.
5. The Board of Commissioners may also take valid decisions without convening a meeting of the Board of Commissioners, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing and all members of the Board of Commissioners provide approval to the proposal submitted in writing by signing the approval. Decisions taken in such a manner have the same force as decisions taken validly at meetings of the Board of Commissioners.
6. If deemed necessary, the Board of Commissioners has the right to request the assistance of experts in carrying out their duties for a limited period of time.

Independensi Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bertindak independen antara lain dengan cara-cara sebagaimana tertuang dalam Piagam Dewan Komisaris sebagai berikut:
   a. Memiliki komitmen untuk mengawasi tindakan Perseroan dengan mengedepankan profesionalismenya.
   b. Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris harus objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun juga, khususnya dari pemegang saham pengendali.
   c. Menghindari terjadinya campur tangan atau dominasi yang tidak wajar dari pihak manapun juga serta tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan bebas dari benturan kepentingan.
   d. Tidak melakukan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
2. Dewan Komisaris senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi dan mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan sendiri, tercermin dari pernyataan masing-masing anggota Dewan Komisaris mengenai hal-hal di bawah ini:
   a. Tidak pernah memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
   b. Tidak pernah mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

Keberagaman Anggota Dewan Komisaris [GRI 2-17]

Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya selaku anggota Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris Perseroan telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia yang dapat dilihat pada Bab Profil

Independence of the Board of Commissioners

1. In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners acts independently, among others, in the ways as stated in the Board of Commissioners Charter as follows:
   a. Have a commitment to supervise the Company's actions by prioritizing its professionalism.
   b. Decision-making in the Board of Commissioners meeting must be objective and free from pressure from any party, particularly from the controlling shareholders.
   c. Avoid the occurrence of unreasonable interference or domination from any party and not be affected by unilateral interests and free from conflicts of interest.
   d. Not to carry out other things that may affect the ability to act independently as stipulated in the prevailing regulations.
2. The Board of Commissioners always upholds the principle of independence and prioritizes the interests of the Company above its own, as reflected in the statements of each member of the Board of Commissioners regarding the following matters:
   a. Never use the Company for personal, family, and/ or other party interests that can harm or reduce the Company's profits.
   b. Never take and/or receive personal benefits from the Company other than remuneration and other facilities determined based on the GMS.

Diversity of Members of the Board of Commissioners [GRI 2-17]

The determination of the composition of members of the Board of Commissioners is carried out by taking into account the diversity of expertise, knowledge and experience required to support the implementation of their duties as members of the Board of Commissioners. The composition of the Company's Board of Commissioners has reflected the diversity of its members, both in terms of education (field of study), professional background,

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Perusahaan. mengenai profil masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris [GRI 2-10]

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan:

1. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, yang mensyaratkan anggota Dewan Komisaris harus:
   a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
   b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
   c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
      i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
      ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
      iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
      iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
         1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
         2) Pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
         3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

age which is presented in Company Profile Chapter on the profile of each member of the Board of Commissioners.

Board of Commissioners Members Criteria [GRI 2-10]

Those who can be appointed as the Board of Commissioners members are individuals who meet the criteria and requirements in accordance with:

1. POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers and or Public Company which required the Board of Commissioners to:
   a. Have good moral, ethics and integrity.
   b. Capable to conduct legal actions.
   c. Within 5 (five) years prior to appointment and during the tenure:
      i. Never been declare bankrupt;
      ii. Is not member of a Board of Directors and/or Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to go bankrupt;
      iii. Never been convicted of committing a crime that caused losses to state finances and/or related to the financial sector; and
      iv. Has never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who during his tenure:
         1) Fail to held an Annual GMS;
         2) His accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners is not accepted by the GMS or fail to give his accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners to the GMS; and
         3) Have caused a company that obtained a license, approval, or registration from OJK to fail to fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial report to OJK.

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

2. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang mensyaratkan untuk anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan dari OJK dengan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK maka harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan:
   a. Persyaratan integritas meliputi:
      i. Cakap melakukan perbuatan hukum.
      ii. Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan.
      iii. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK.
      iv. Memiliki komitmen terhadap pengembangan lembaga jasa keuangan yang sehat.
      v. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama.
   b. Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
      i. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
      ii. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali perusahaan perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
   c. Persyaratan kelayakan keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
      i. Memiliki reputasi keuangan sebagaimana telah dijabarkan pada persyaratan reputasi keuangan di atas.

d. Committed to comply with prevailing regulations;
e. Has sufficient knowledge and/or skill in areas as required by the Company.

2. POJK No. 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services Institutions which requires the Board of Commissioners members to obtain approval from OJK by passing the fit and proper test from OJK must meet the fit and proper test requirements:
   a. Integrity requirement consist of:
      i. Capable to conduct legal actions.
      ii. Have good character and moral, at least as shown by compliance of prevailing provisions, including never having been convicted of having committed a criminal act within a certain period of time before being nominated.
      iii. Have a commitment to comply with laws and regulations and support OJK policies.
      iv. Have a commitment to the development of a sound financial service institution.
      v. Not included as a party prohibited from becoming the lowe case.
   b. Financial reputation requirements at minimum proven with:
      i. Do not have bad credit and/or financing.
      ii. Has never been declared bankrupt and/or has never been a shareholder, Controller of an Insurance Company who is not a shareholder, member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to go bankrupt within the last 5 (five) years prior to nomination.
   c. Financial eligibility requirements, at least proven by:
      i. Having a financial reputation as described in the financial reputation requirements above.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

ii. Memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis lembaga jasa keuangan.
iii. Memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila lembaga jasa keuangan menghadapi kesulitan keuangan.

d. Persyaratan kompetensi, paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan lembaga jasa keuangan dimana dicalonkan.

3. Memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.

ii. Have financial capabilities that can support the business development of Financial Services Institution.
iii. Have a commitment to make the necessary efforts if the Financial Services Institution faced financial difficulties.

d. Competency requirements, at least include knowledge and/or experience that support the management of the Financial Services Institution where he/she is being nominated.

3. Fulfills the requirements as a member of the Board of Commissioners based on the Company's Articles of Association.

KOMISARIS INDEPENDEN

Jumlah Komisaris Independen

Pada tahun 2023, Perseroan memiliki 2 (dua) orang anggota Komisaris Independen dari total 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris Perseroan atau setara dengan 67% (enam puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan sehingga keanggotaan Komisaris Independen pada susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik serta POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan perubahannya sebagaimana tercantum pada POJK No. 29/POJK.05/2020. Seluruh Komisaris Independen Perseroan telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK serta telah diangkat berdasarkan persetujuan RUPS.

Kriteria Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen Perseroan meliputi:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6

INDEPENDENT COMMISSIONER

Number of Independent Commissioners

In 2023, the Company has 2 (two) Independent Commissioner members from a total of 3 (three) members of the Company's Board of Commissioners or equivalent to 67% (sixty seven percent) of the total members of the Company's Board of Commissioners so that the independent commissioner's membership in the composition of the Company's Board of Commissioners members has complied with POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies and its amendments as contained in POJK No. 29/POJK.05/2020. All Independent Commissioners of the Company have obtained approval from the OJK by passing the fit and proper test from the OJK and have been appointed based on the approval of the GMS.

Criteria of Independent Commissioner

The criteria for the Company's Independent Commissioners include:

1. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, except for reappointment as Independent

(enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya dengan tetap memperhatikan bahwa pengangkatan kembali Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode wajib menyatakan kepada RUPS bahwa dirinya tetap independen dan pernyataan independensinya tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.

2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
6. Berdomisili di Indonesia.
7. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perseroan.
8. Memenuhi persyaratan lain dari Komisaris Independen sesuai peraturan yang berlaku.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen Perseroan yang telah menjabat selama 2 (dua) periode berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Perseroan memiliki Komisaris Independen yang telah diangkat lebih dari 2 (dua) periode, yakni I Nyoman Tjager dan Myrnie Zachraini Tamin. Keduanya ketika diangkat kembali pada RUPS Tahunan tahun 2023 menyatakan tetap independen dalam melaksanakan jabatannya selaku Komisaris Independen dan pernyataan independensi tersebut juga telah dituangkan dalam masing-masing surat pernyataan independensi Komisaris Independen.

Commissioner of the Company for the next period by taking into account that any reappointment for Independent Commissioner who has served for more than 2 (two) periods shall declare his/her independency to the GMS and such declaration should be also disclosed in the Annual Report.

2. Do not own shares, either directly or indirectly, in the Company.
3. Has no affiliation with the Company, fellow members of Board of Commissioners, Board of Directors or major shareholders of the Company.
4. Do not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.
5. Understand laws and regulations in financing and other relevant laws and regulations.
6. Domiciled in Indonesia.
7. Have a good knowledge of the Company's financial condition.
8. Fulfill other requirements of the Independent Commissioner in accordance with applicable regulations.

Independence Statement of Independent Commissioner

The Company's Independent Commissioner with 2 (two) consecutive term of office may be reappointed in the next period as an Independent Commissioner if he/she declares the independency at the GMS.

The Company has Independent Commissioners who have been appointed for more than 2 (two) periods, namely I Nyoman Tjager and Myrnie Zachraini Tamin. When both of them reappointed at the 2023 Annual GMS, they stated their independency in carrying out their duties as Independent Commissioners and the independency statement has also written in each statement of independency of Independent Commissioner.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Surat pernyataan independensi Komisaris Independen dimaksud di atas memuat pernyataan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

The Statement of Independency of Independent Commissioner consisted as follows:

No	Pernyataan Statement
1.	Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya, anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Perusahaan Pembiayaan dan dalam ketentuan pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Do not have a relationship in financial and management, share ownership and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Sharia Supervisory Board and/or Major Shareholders of the Company, or relationship with the Company, which may affect their ability to act independently as regulated in provisions on the GCG implementation for Financing Companies and in the provisions for Good Corporate Governance for Issuers or Public Companies.
2.	Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Do not have direct or indirect shares in the Company.
3.	Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan, anggota Direksi Perseroan, anggota DPS Perseroan, atau pemegang saham utama Perseroan. Has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Sharia Supervisory Board, or major shareholders of the Company.
4.	Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Do not have a business, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa Komisaris Independen Perseroan yang bersangkutan memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai dengan 4 di atas, maka Komisaris Independen yang bersangkutan bersedia melepaskan jabatan sebagai Komisaris Independen Perseroan dan bersedia untuk diganti.
If it is discovered in the future that the Company's Independent Commissioner has a relationship as described in points 1 to 4 above, then the relevant Independent Commissioner is willing to relinquish his position as the Company's Independent Commissioner and is willing to be replaced.

Hubungan Afiliasi antara Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Direksi, Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali

Dewan Komisaris Perseroan senantiasa menjaga independensi dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

Affiliation Relationship between Members of the Board of Commissioners and Other Members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Major Shareholders and Controlling Shareholders

The Company's Board of Commissioners always maintains independence and avoids conflicts of interest that may interfere its ability to carry out its duties professionally and objectively.

Pengungkapan hubungan afiliasi per 31 Desember 2023

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan;

Affiliate relationship disclosure as of December 31, 2023

1. All members of the Board of Commissioners of the Company do not have an affiliation in the form of family relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or with the Main Shareholders and Controlling Shareholders of the Company;

2. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi;
3. Sebanyak 1 (satu) orang atau 33% (tiga puluh tiga persen) dari seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan memiliki hubungan afiliasi berupa hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Utama Perseroan dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan; sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

2. All members of the Board of Commissioners do not have an affiliation in the form of financial relations with other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors;
3. 1 (one) member or 33% (thirty-three percent) of all members of the Company's Board of Commissioners have an affiliate relationship in the form of financial relations with the Company's Major Shareholder and/or the Company's Controlling Shareholder; As illustrated in the following table:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Hubungan Keuangan Dengan:** Financial Relations with:						**Hubungan Keluarga Dengan:** Family Relationship with:					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors		**Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali*** Major Shareholders and Controlling Shareholders*		**Dewan Komisaris** Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors		**Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali*** Major Shareholders and Controlling Shareholders*	
		Ya Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No
I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris/ Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner		√		√		√		√		√		√
Myrnie Zachraini Tamin	Komisaris Independen Independent Commissioner		√		√		√		√		√		√
Thilagavathy Nadason	Komisaris Commissioner		√		√	√			√		√		√

*) Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan yakni PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan PT Wahana Makmur Sejati.
*) *The Company's Major Shareholders and Controlling Shareholders are PT Bank Maybank Indonesia Tbk and PT Wahana Makmur Sejati.*

Informasi mengenai hubungan afiliasi Dewan Komisaris selengkapnya dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan mengenai profil masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Complete information about the affiliation relationship of the Board of Commissioners is presented in Company Profile Chapter on the profile of each member of the Board of Commissioners.

Kehadiran Dewan Komisaris Dalam RUPS Selama Tahun 2023

RUPS Tahunan Tahun 2023 dan RUPS Luar Biasa Tertanggal 30 Maret 2023

a. Kehadiran anggota Dewan Komisaris yang menjabat untuk periode yang berakhir pada ditutupnya RUPS

Presence of the Board of Commissioners in the GMS During 2023

Annual GMS 2023 and Extraordinary GMS dated March 30, 2023

a. Attendance of members of the Board of Commissioners who served for the period ending

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Tahunan tahun 2023 pada RUPS Tahunan Tahun 2023 dan RUPS Luar Biasa tertanggal 30 Maret 2023 sebagaimana detail kehadiran sebagai berikut:

at the closing of the 2023 Annual GMS at the 2023 Annual GMS and Extraordinary GMS dated March 30, 2023 as detailed in the attendance as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Jabatan** Position	**Kehadiran** | Attendance	
		Ya | Yes	**Tidak** | No
I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris/Komisaris Independen | President Commissioner/Independent Commissioner	√	
Robbyanto Budiman	Wakil Presiden Komisaris | Vice President Commissioner		√
Garibaldi Thohir	Komisaris | Commissioner		√
Myrnie Zachraini Tamin	Komisaris Independen | Independent Commissioner	√	
Thilagavathy Nadason	Komisaris | Commissioner	√	

b. Kehadiran anggota Dewan Komisaris yang menjabat efektif sejak ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2023 pada RUPS Tahunan Tahun 2023 dan RUPS Luar Biasa tertanggal 30 Maret 2023 sebagaimana detail kehadiran sebagai berikut:

b. Attendance of members of the Board of Commissioners who served effectively since the closing of the Annual GMS in 2023 at the Annual GMS in 2023 and the Extraordinary GMS dated March 30, 2023 as detailed attendance as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Jabatan** Position	**Kehadiran** | Attendance	
		Ya | Yes	**Tidak** | No
I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris/Komisaris Independen | President Commissioner/Independent Commissioner	√	
Myrnie Zachraini Tamin	Komisaris Independen | Independent Commissioner	√	
Thilagavathy Nadason	Komisaris | Commissioner	√	

Program Orientasi Anggota Dewan Komisaris Baru

Program Pengenalan Bagi Dewan Komisaris Baru Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib memenuhi program orientasi yang bertujuan untuk memberikan masukan agar memperoleh pemahaman tentang Perseroan sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

Selain itu, Dewan Komisaris wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang pembiayaan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Program Pelatihan Dewan Komisaris Untuk menunjang kompetensi dan pemahaman terkait

Orientation Program for New Board of Commissioners

Introduction Program for New Board of Commissioners Newly appointed members of the Board of Commissioners must fulfill an orientation program that aims to provide input in order to gain an understanding of the Company so that they can carry out their duties effectively and efficiently.

In addition, the Board of Commissioners is required to have a certificate of expertise in financing from a Professional Certification Institute in the field of financing registered with the Financial Services Authority. Board of Commissioners Training Program To

tugas melakukan pengawasan pengurusan perusahaan, Perseroan senantiasa mengikutsertakan Dewan Komisaris dalam program pelatihan dan peningkatan kompetensi. Informasi mengenai pelatihan Dewan Komisaris tersedia dalam Bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

support competence and understanding related to the task of supervising company management, the Company always involves the Board of Commissioners in training and competency improvement programs. Information regarding the training of the Board of Commissioners is available in Company Profile Chapter in this Annual Report.

Keputusan dan Persetujuan Dewan Komisaris Tahun 2023

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris mengeluarkan keputusan Dewan Komisaris sebanyak 16 (enam belas) kali.

Decisions and Approval of The Board of Commissioners In 2023

During 2023, the Board of Commissioners issued 16 (sixteen) decrees.

LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2023

- Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan laporan pengawasan rencana bisnis Perusahaan Semester I-2023 dan Semester II-2023;
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG secara independen, sebagaimana telah diatur dengan aturan hukum, kebijakan dan perundang-undangan yang terkait;
- Sesuai fungsi, tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, dengan memberikan masukan serta rekomendasi mengenai pelaksanaan rencana bisnis dan pencapaian target Perusahaan;
- Selain itu, pengawasan aktif Dewan Komisaris terlihat dalam pelaksanaan rapat koordinasi bersama Direksi, maupun komite-komite. Untuk membantu tugas dalam rangka pengawasan terhadap jalannya Perusahaan, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko.

BOARD OF COMMISSIONERS SUPERVISORY REPORT IN 2023

- Throughout 2023, the Board of Commissioners carried out supervisory report on the Company's business plans for Semester I-2023 and Semester II-2023;
- The Board of Commissioners carried out its duties and responsibilities in accordance with the GCG principles independently, as regulated by the relevant laws, policies and legislation;
- In accordance with its functions, duties and responsibilities, the Board of Commissioners carried out its supervisory function and provided advice, by giving input and recommendations regarding of the Company's business plan and the Company's target achievement;
- In addition, the active supervision of the Board of Commissioners is reflected in the implementation of coordination meetings with the Board of Directors and committees. To assist in supervising the Company's activities, the Board of Commissioners established the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and also Risk Oversight Committee.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Prosedur dan Kriteria Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang dilakukan setiap tahun dengan menggunakan metode *self- assessment.*

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. **Penilaian kinerja komite oleh seluruh anggota Dewan Komisaris**
   Kriteria penilaian kinerja komite oleh seluruh anggota Dewan Komisaris mencakup efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite dalam membantu Dewan Komisaris.

2. **Penilaian kinerja komite oleh anggota Dewan Komisaris yang menjadi anggota komite**

   Kriteria penilaian kinerja oleh anggota Dewan Komisaris yang menjadi anggota komite mencakup penilaian pada area-area di bawah ini:

   a. Efektivitas komite dalam menggunakan wewenang, sumber daya dan akses yang dimilikinya atas informasi.
   b. Efektivitas pertemuan komite dalam membahas isu-isu.
   c. Efektivitas komite dalam menangani masalah serta melaksanakan tanggung jawab komite berdasarkan Pedoman atau Piagam Komite.
   d. Efektivitas komite dilihat dari komposisi komite dalam menjalankan tugasnya.
   e. Efektivitas Komite dilihat dari kemampuan komite untuk memberikan pemahaman dan dokumen yang tepat waktu dan memadai kepada Dewan Komisaris.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Procedures and Criteria for Performance Assessment of Committees under Board of Commissioners

The Board of Commissioners conducts an annual assessment of the performance of the committees under the Board of Commissioners by using the self-assessment method.

The criteria being used in the performance assessment of the committees under the Board of Commissioners as follows:

1. **Assessment of committee performance by all Board of Commissioners members**
   The criteria for committee performance assessment by all Board of Commissioners including the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities of the committees in assisting the Board of Commissioners.

2. **Assessment of committee performance by Board of Commissioners members who are also members of the committee**
   The performance assessment criteria by the Board of Commissioners members who are also members of the committee include assessments in the following areas:
   a. The committee's effectiveness on its authorities, resources and access to information.
   b. The effectiveness of committee meetings in discussing issues.
   c. The effectiveness of the committee in handling issues and carrying out committee responsibilities based on the committee charter.
   d. The effectiveness of the committee as seen from its composition in carrying out its duties.
   e. The effectiveness of the Committee as seen from the committee's ability to provide timely and adequate understanding and documents to the Board of Commissioners.

f. Efektivitas kepemimpinan ketua komite di dalam komite.

3. Hasil penilaian

Hasil penilaian secara keseluruhan terhadap pelaksanaan tugas Komite Dewan Komisaris untuk tahun 2023 dinilai sudah berjalan sesuai dengan arahan dan nasihat. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dan pelaksanaan fungsi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sudah berjalan efektif.

f. Effectiveness of leadership of the committee chairman.

3. Assessment Results

The results of the overall assessment of the implementation of duties of the Board of Commissioners Committee for 2023 are considered to have been performed in line with directions and advice. This demonstrates that the support and implementation of the functions provided to the Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities have been effective.

Frekuensi dan Peserta Rapat Dewan Komisaris Tahun 2023
Frequency and Participants of the Board of Commissioners Meetings in 2023

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Jumlah Rapat Total Meeting	Kehadiran % Attendance %
I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris/ Komisaris Independen Commissioner/Independent Commissioner	11	11	100
Robbyanto Budiman*	Wakil Presiden Komisaris | Vice President Commissioner	1	1	100
Garibaldi Thohir**	Komisaris | Commissioner	1	2	50
Thilagavathy Nadason	Komisaris | Commissioner	11	11	100
Myrnie Zachraini Tamin	Komisaris Independen | Independent Commissioner	11	11	100

*) Meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2023 dan berakhir masa jabatannya juga pada RUPS Tahunan Tahun 2023 tertanggal 30 Maret 2023 | Passed away on February 10, 2023 and his term of office also ended at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on March 30, 2023.
**) Berakhir masa jabatannya pada RUPS Tahunan Tahun 2023 tertanggal 30 Maret 2023 | His term of office ended at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on March 30, 2023.

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2023
Agenda of the Board of Commissioners Meetings in 2023

No	Tanggal Date	Peserta Rapat Participants	Agenda
1.	18 Januari 2023 January 18, 2023	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja WOM Finance Desember 2022 WOM Finance December 2022 Performance
2.	15 Februari 2023 February 15, 2023	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja WOM Finance Januari 2023 WOM Finance January 2023 Performance
3.	30 Maret 2023 March 30, 2023	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja WOM Finance Februari 2023 WOM Finance February 2023 Performance
4.	17 April 2023 April 17, 2023	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja WOM Finance Maret 2023 WOM Finance March 2023 Performance

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

No	Tanggal Date	Peserta Rapat Participants	Agenda
5.	31 Mei 2023 May 31, 2023	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja WOM Finance April 2023 WOM Finance Aprill 2023 Performance
6.	15 Juni 2023 June 15, 2023	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja WOM Finance Mei 2023 WOM Finance May 2023 Performance
7.	21 Juli 2023 July 21, 2023	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja WOM Finance Juni 2023 WOM Finance June 2023 Performance
8.	16 Agustus 2023 August 16, 2023	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja WOM Finance Juli 2023 WOM Finance July 2023 Performance
9.	21 September 2023 September 21, 2023	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja WOM Finance Agustus 2023 WOM Finance August 2023 Performance
10.	1 November 2023 November 1, 2023	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja WOM Finance September 2023 WOM Finance September 2023 Performance
11.	14 November 2023 November 14, 2023	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja WOM Finance Oktober 2023 WOM Finance October 2023 Performance

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat gabungan bersama Direksi secara berkala sedikitnya sekali dalam 4 (empat) bulan.

Selama tahun 2023 rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali dengan rincian kehadiran dan agenda sebagai berikut:

JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Based on POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer or Public Company, the Board of Commissioners is required to hold joint meetings with the board of directors periodically at least once in 4 (four) months.

In 2023 the Board of Commissioners and the Board of Directors held 11 (eleven) Joint Meetings with the following details:

Frekuensi dan Peserta Rapat Gabungan Tahun 2023
Frequency and Participants of the Joint Meetings in 2023

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Jumlah Rapat Total Meeting	Kehadiran % Attendance %
I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris / Komisaris Independen President Commissioner / Independent Commissioner	11	11	100%
Robbyanto Budiman*	Wakil Presiden Komisaris Vice President Commissioner	1	1	100%
Garibaldi Thohir**	Komisaris Commissioner	1	2	50%
Thilagavathy Nadason	Komisaris Commissioner	11	11	100%

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Jumlah Rapat Total Meeting	Kehadiran % Attendance %
Myrnie Zachraini Tamin	Komisaris Independen Independent Commissioner	11	11	100%
Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur President Director	11	11	100%
Anthony Yuarez Panggabean	Direktur Director	11	11	100%
Njauw Vido Onadi	Direktur Director	11	11	100%
Wibowo	Direktur Director	11	11	100%
Cincin Lisa Hadi	Direktur Director	11	11	100%

*) Meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2023 dan berakhir masa jabatannya juga pada RUPS Tahunan Tahun 2023 tertanggal 30 Maret 2023 | Passed away on February 10, 2023 and his term of office also ended at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on March 30, 2023.
**) Berakhir masa jabatannya pada RUPS Tahunan Tahun 2023 tertanggal 30 Maret 2023 | His term of office ended at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on March 30, 2023.

Agenda Rapat Gabungan Tahun 2023
Agenda of the Joint Meetings in 2023

No	Tanggal Date	Peserta Rapat Participants	Agenda
1.	18 Januari 2023 January 18, 2023	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Kinerja WOM Finance Desember 2022 WOM Finance December 2022 Performance
2.	15 Februari 2023 February 15, 2023	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Kinerja WOM Finance Januari 2023 WOM Finance January 2023 Performance
3.	30 Maret 2023 March 30, 2023	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Kinerja WOM Finance Februari 2023 WOM Finance February 2023 Performance
4.	17 April 2023 April 17, 2023	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Kinerja WOM Finance Maret 2023 WOM Finance March 2023 Performance
5.	31 Mei 2023 May 31, 2023	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Kinerja WOM Finance April 2023 WOM Finance Aprill 2023 Performance
6.	15 Juni 2023 June 15, 2023	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Kinerja WOM Finance Mei 2023 WOM Finance May 2023 Performance
7.	21 Juli 2023 July 21, 2023	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Kinerja WOM Finance Juni 2023 WOM Finance June 2023 Performance
8.	16 Agustus 2023 August 16, 2023	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Kinerja WOM Finance Juli 2023 WOM Finance July 2023 Performance
9.	21 September 2023 September 21, 2023	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Kinerja WOM Finance Agustus 2023 WOM Finance August 2023 Performance
10.	1 November 2023 November 1, 2023	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Kinerja WOM Finance September 2023 WOM Finance September 2023 Performance
11.	14 November 2023 November 14, 2023	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Kinerja WOM Finance Oktober 2023 WOM Finance October 2023 Performance

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS [GRI 2-18]

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara rutin setiap tahun. Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *Board of Commissioner* (BOC) and BOC *Committees Effectiveness Evaluation exercise* ("BEE") yaitu penilaian yang dilakukan secara individual *(self-assessment)* dan penilaian oleh rekan sejawat (*self* dan *peers assessment*). Selain dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, penilaian terhadap kinerja Komite Dewan Komisaris juga dilakukan oleh Direksi menggunakan kerangka 360° *Management (Board of Directors) Evaluation* BEE.

Evaluasi diadministrasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan hasil akhirnya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Proses penilaian mencakup evaluasi dari segi kompetensi dan keahlian/pengalaman, kinerja komite-komite Dewan Komisaris, efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris dan penilaian sendiri maupun penilaian rekan sejawat terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan menggunakan Formulir BEE. Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

A. Evaluasi Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris

1. Efektivitas Dewan Komisaris dalam memimpin M25+.
2. Kepemimpinan dan Budaya Dewan Komisaris:
   a. Efektivitas Dewan Komisaris secara keseluruhan;
   b. Dinamika Dewan Komisaris;
   c. Kepemimpinan Presiden Komisaris; dan
   d. Interaksi dengan Direksi.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS [GRI 2-18]

Performance assessment of the Board of Commissioners is regularly carried out every year. The assessment is carried out through the Board of Commissioners (BOC) and BOC Committees Effectiveness Evaluation exercise ("BEE"), which is an individual assessment (self-assessment) and peer assessment (self and peers-assessment). In addition to being carried out by members of the Board of Commissioners, the performance assessment of the Board of Commissioners Committee is also carried out by the Board of Directors using the framework of 360° Management (Board of Directors) Evaluation BEE.

The evaluation is administrated by the Nomination and Remuneration Committee and the final results are submitted to the Board of Commissioners. The assessment process includes evaluation of competence and expertise/experience, performance of the Board of Commissioners committees, effectiveness of the Board of Commissioners responsibilities implementation, as well as self and peer assessments of supervisory functions by each member of the Board of Commissioners.

Board of Commissioners Performance Assessment Criteria

The assessment is conducted by the Board of Commissioners using the BEE Format. The criteria used in evaluating the performance of the Board of Commissioners are as follows:

A. The Board of Commissioners and Board of Commissioners Committees Effectiveness Evaluation

1. The effectiveness of the Board of Commissioners in leading M25+.
2. Leadership and Culture of the Board of Commissioners:
   a. The effectiveness of the Board of Commissioners as a whole;
   b. Dynamics of the Board of Commissioners;
   c. Leadership of the President Commissioner; and
   d. Interaction with the Board of Directors.

3. Komposisi Dewan Komisaris.
4. Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
5. Komite-komite Dewan Komisaris.
6. Administrasi dan Operasional Dewan Komisaris.

B. Penilaian Dewan Komisaris Sendiri dan Rekan Sejawat

1. Independensi Dewan Komisaris.
2. Kontribusi dan Komitmen Dewan Komisaris.
3. Kompetensi, Keterampilan dan Keahlian Dewan Komisaris.
4. Penilaian secara Umum Dewan Komisaris.

C. 360° Evaluasi BEE oleh Manajemen (Direksi)

1. Efektivitas Dewan Komisaris dalam memimpin M25+.
2. Kepemimpinan dan Budaya Dewan Komisaris:
   a. Efektivitas Dewan Komisaris secara keseluruhan;
   b. Dinamika Dewan Komisaris;
   c. Kepemimpinan Presiden Komisaris; dan
   d. Interaksi dengan Direksi.
3. Komposisi Dewan Komisaris.
4. Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
5. Komite-komite Dewan Komisaris.
6. Administrasi dan Operasional Dewan Komisaris.

1. Bagian A: Evaluasi Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris
   Untuk mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan.

2. Bagian B: Penilaian Dewan Komisaris Sendiri dan Sejawat
   Untuk mengevaluasi kontribusi individu anggota

3. Composition of the Board of Commissioners.
4. Responsibilities of the Board of Commissioners.
5. Committees of the Board of Commissioners.
6. Administration and Operations of the Board of Commissioners.

B. Individual Board of Commissioner Self And Peer Evaluation

1. Independence of the Board of Commissioners.
2. Contribution and Commitment of the Board of Commissioners.
3. Competence, Skills and Expertise of the Board of Commissioners.
4. General Assessment of the Board of Commissioners.

C. 360° BEE Evaluation by Management (Board of Directors)

1. The effectiveness of the Board of Commissioners in leading M25+.
2. Leadership and Culture of the Board of Commissioners:
   a. The effectiveness of the Board of Commissioners as a whole;
   b. Dynamics of the Board of Commissioners;
   c. Leadership of the President Commissioner; and
   d. Interaction with the Board of Directors.
3. Composition of the Board of Commissioners.
4. Responsibilities of the Board of Commissioners.
5. Committees of the Board of Commissioners.
6. Administration and Operations of the Board of Commissioners.

1. Part A: The Board of Commissioners and Board of Commissioners Committees Effectiveness Evaluation
   To evaluate the overall performance of the Board of Commissioners.

2. Part B: Individual Board of Commissioner Self And Peer Evaluation
   To evaluate the individual contributions of members

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris serta aspek kualitas dan atribut pribadi.

3. Bagian C: 360° Evaluasi BEE oleh Manajemen (Direksi)
   Dalam rangka mendapatkan pandangan penilaian kinerja Dewan Komisaris yang lebih luas, maka untuk penilaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2023 juga dilakukan oleh Direksi.

Proses dan Pihak yang Melakukan Penilaian

Proses dan Pihak yang melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Penilaian dilakukan secara individual *(self-assessment)* dan penilaian oleh rekan sejawat *(self* dan *peers assessment).*
2. Penilaian terhadap Dewan Komisaris juga dilakukan juga oleh Direksi.
3. Masing-masing Komisaris dan anggota Direksi mengisi kuesioner penilaian melalui formulir BEE.

Evaluasi akhir atas penilaian kinerja Dewan Komisaris disampaikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris. Jika diperlukan, Presiden Komisaris dapat menyampaikan masukan dan perbaikan atas hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial dan individu.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI [GRI 2-18]

Prosedur dan Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan setiap tahun berdasarkan *Key Performance Indicators* (KPI) yang berlaku di Perseroan.

Kriteria untuk menilai kinerja Direksi adalah sebagai berikut:

1. Nilai Tambah pemegang saham yang Semakin Meningkat.

of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners, as well as aspects of personal qualities and attributes.

3. Part C: 360° Evaluation of BEE by Management (Board of Directors)
   To obtain a broader view of the Board of Commissioners' performance assessment, the Board of Commissioners' performance assessment in 2023 is also carried out by the Board of Directors.

Process and Assessors

The process and parties that assess the performance of the Board of Commissioners are described as follows:

1. Assessment is carried out individually (self-assessment) and peer assessment (self and peers-assessment).
2. The assessment of the Board of Commissioners is also carried out by the Board of Directors.
3. Each Commissioner and member of the Board of Directors fills out an assessment questionnaire through the BEE form.

The final evaluation of the performance assessment of the Board of Commissioners shall be submitted by the Nomination and Remuneration Committee to the Board of Commissioners. If necessary, the President Commissioner may submit input and improvements to the results of the performance assessment of the Board of Commissioners collegially and individually.

BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT [GRI 2-18]

Procedures and Criteria of the Board Directors Performance Assessment

The performance assessment of the Board of Directors is conducted annually based on the Key Performance Indicators (KPI) applicable in the Company.

The criteria for the Board of Directors performance assessment include:

1. Maximized shareholder value.

2. Jaringan yang Optimal.
3. Peningkatan Pertumbuhan Usaha.
4. Kualitas Portofolio yang Optimal.
5. OPEX yang Optimal.
6. Peningkatan Kualitas Acara/Program Perusahaan.
7. Kepuasan Pelanggan.
8. Optimalisasi teknologi sebagai *business enabler.*
9. Peningkatan Kualitas Manajemen Kepatuhan.
10. Peningkatan kepuasan & keterlibatan karyawan.

2. Optimized Network.
3. Increased Business Growth.
4. Optimized Portfolio Quality.
5. Optimized OPEX.
6. Improve Corporate Event/Program.
7. Customer Satisfaction.
8. Optimize technology as a business enabler.
9. Improve Compliance Management.
10. Increase employee satisfaction & engagement.

Pihak Yang Melakukan Penilaian Kinerja Direksi

Direksi akan melakukan evaluasi kinerja Direksi secara mandiri untuk kemudian disampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Komite Nominasi dan Remunerasi akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Assessors for the Board of Directors

The Board of Directors will evaluate its performance independently to be further submitted to the Nomination and Remuneration Committee for assessment purpose. The assessment results by the Nomination and Remuneration Committee will be submitted to the Board of Commissioners.

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI DAN KOMISARIS TAHUN 2023

Pada tahun 2023, telah dilakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Secara keseluruhan Dewan Komisaris dan Direksi dinilai telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan. Merujuk pada Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 maret 2023, penentuan besaran remunerasi untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dilimpahkan wewenangnya kepada Presiden Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Untuk besaran remunerasi para anggota Direksi Perseroan dilimpahkan wewenangnya kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

RESULTS OF PERFORMANCE ASSESSMENT OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS IN 2023

In 2023, the performance assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors has been conducted. Overall, the Board of Commissioners and Board of Directors were considered to have properly performed their duties and responsibilities.

The determination of the remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors refers to the Company's Articles of Association. According to the Annual GMS resolution dated March 30, 2023, the President Commissioner was authorized to determine the remuneration of all members of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board by considering the proposals and recommendations of the Nomination and Remuneration Committee. Meanwhile, the Board of Commissioners was authorized to determine the remuneration of members of the Board of Directors by considering the proposals and recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

KRITERIA PENENTUAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI [GRI 2-19, 2-20]

Indikator untuk menentukan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Kinerja, kemampuan dan kondisi Perseroan;
2. Hasil *benchmarking* remunerasi yang berlaku di industri;
3. Pencapaian kinerja masing-masing anggota Direksi dengan indikator utama seperti keuntungan Perseroan, pertumbuhan penjualan, portofolio risiko serta produktivitas;
4. Kewajaran dengan memperhatikan *peer group*;
5. Faktor lain terkait namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Komponen Remunerasi

Adapun rincian komponen Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

CRITERIA TO DETERMINE REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS [GRI 2-19, 2-20]

The indicators to determine the total remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows:

1. Performance, capability and condition of the Company;
2. The results of applicable remuneration benchmarking in the industry;
3. Performance achievement of each member of the Board of Directors with key indicators such as the Company's profits, sales growth, risk portfolio and productivity;
4. Fairness with regard to peer groups;
5. Other related factors that do not conflict with the laws and regulations.

Remuneration Component

The details of the remuneration components for the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows:

No	Jenis Remunerasi Type of Remuneration	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
1	Gaji Pokok | Basic Salary	√	√
2	Tunjangan Kesehatan | Health Allowance	-	√
3	Tunjangan kesehatan keluarga | Family Health Allowance	-	-
4	Tunjangan Komunikasi | Communication Allowance	-	√
5	Tunjangan Perjalanan Dinas | Business Travel Allowance	-	-
6	Tunjangan Hari Raya | Holiday Allowance	√	√
7	*Bonus*	√	√
8	Asuransi Jabatan (Imbalan Pasca Kerja) Occupational Insurance (Post Employment Benefits)	-	-
9	Tunjangan Keanggotaan Klub | Club Membership Allowance	-	-
10	Tunjangan Cuti | Leave Allowance	-	√
11	Bantuan dana Pendidikan | Education Fund Assistance	-	-
12	Tunjangan Entertainment/Makan | Entertainment/Meal Allowance	-	-
13	Tunjangan Kendaraan | Vehicle Allowance	-	√

Berdasarkan Tingkat Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi: [GRI 2-21]

Board of Commissioners and Board of Directors Income Level: [GRI 2-21]

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun Total Remuneration per Person in 1 year	Jumlah (orang) Total (person)
Di atas Rp2,5 miliar | Above Rp2.5 billion	–
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2,5 miliar | Above Rp1 billion to Rp2.5 billion	–
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar | Above Rp500 million to Rp1 billion	2
Di atas Rp500 juta | Above Rp500 million	–

Direksi
Board of Directors

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun Total Remuneration per Person in 1 year	Jumlah (orang) Total (person)
Di atas Rp2,5 miliar | Above Rp2.5 billion	5
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2,5 miliar | Above Rp1 billion to Rp2.5 billion	-
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar | Above Rp500 million to Rp1 billion	-
Di atas Rp500 juta | Above Rp500 million	–

Dengan demikian, jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp16,13 miliar.

As such, the total remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2023 was Rp16.13 billion.

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023
Total Remuneration and Other Facilities for Board of Commissioners and Board of Directors in 2023

dalam juta Rp | in Rp million

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Remuneration and Other Facilities	Jumlah yang Diterima dalam Satu Tahun Total Received in a Year			
		Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
		Orang Person	Nominal	Orang Person	Nominal
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin dan tantiem dan fasilitas lainnya) Remuneration (salary, bonus, routine allowance, tantiem and other facilities)	2	2,648,666	5	13,483,375

Komite-Komite Dewan Komisaris

Committees of The Board Of Commissioners

Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite pendukung untuk membantu menjalankan tugas dan fungsinya. Komite-komite ini akan membantu perumusan strategi, mengawasi dan memantau pelaksanaan strategi yang telah direncanakan, serta menilai kinerja Perseroan. Komite-komite tersebut meliputi:

1. Komite Audit
2. Komite Nominasi dan Remunerasi
3. Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota komite yang berasal dari pihak independen telah memenuhi kriteria independensi, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen. Seluruh komite-komite tersebut bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners has established supporting committees to help carry out its duties and functions. These committees will assist in the formulation of strategies, oversee and monitor the execution of planned strategies, and assess the performance of the Company. The committees are as follows:

1. Audit Committee;
2. Nomination and Remuneration Committee;
3. Risk Oversight Committee.

All committee members from independent parties have met the independence criteria, which were: which include to have no financial, management, share ownership and family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, Controlling Shareholder or relationship with the Company, which may affect ability to act independently. All committees are directly responsible to the Board of Commissioners.

Komite Audit
Audit Committee

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, yang bertanggung jawab kepada mereka untuk masalah-masalah yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Komite Audit memberikan pendapat yang tidak memihak atas hal-hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

The Board of Commissioners established the Audit Committee, which responsible to the Board for issues requiring the Board of Commissioners' attention. The Audit Committee provides an unbiased opinion on these matters in compliance with current laws and regulations as well as the principles of good corporate governance.

Tanggung jawab utama Komite Audit adalah mengawasi dan menilai perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil audit untuk menentukan kecukupan pengendalian internal, termasuk proses pelaporan keuangan. Dewan Komisaris memiliki wewenang langsung atas Komite Audit. Dewan Komisaris mengangkat dan memberhentikan setiap anggota Komite Audit.

The primary responsibility of the Audit Committee is to oversee and assess the planning, execution, and follow-up of audit results to determine the sufficiency of internal controls, including the financial reporting process. The Board of Commissioners has direct authority over the Audit Committee. The Board of Commissioners appoints and dismisses each member of the Audit Committee.

Komite Audit juga memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit informasi keuangan tahunan tahun 2023 kepada Dewan Komisaris.

The Audit Committee also provides recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of a Public Accountant and a Public Accountant Firm to audit the 2023 annual financial information.

Dasar Hukum Penunjukan

- POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 014/III/BOC-WOM/2023 tentang pembentukan Komite Audit tanggal 31 Maret 2023.

Legal References

- POJK No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee.
- Board of Commissioners Decree No. 014/III/BOC-WOM/2023 concerning the establishment of the Audit Committee dated March 31, 2023.

Piagam Komite Audit

Komite Audit Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit, yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit. Piagam ini berfungsi sebagai pedoman bagi Komite Audit untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, obyektif, efektif dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Audit Committee Charter

The Company's Audit Committee has in place the Audit Committee Charter, which is developed and determined by the Board of Commissioners based on the Audit Committee's proposal, as a guideline for the Audit Committee to implement independent, objective, effective and transparent duties and responsibilities and can be accounted for and accepted by all interested parties.

Piagam Komite Audit tersebut mengatur hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan etika anggota Komite Audit.

The Audit Committee Charter regulates matters related to the implementation of duties, responsibilities and ethics of the Audit Committee members.

Komite Audit
Audit Committee

Pemutakhiran Piagam Komite Audit dilakukan pada tanggal 23 Desember 2021.

The Audit Committee Charter was updated on December 23, 2021.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

1 Pengawasan atas Informasi Keuangan
   a. Menelaah proses penyusunan laporan keuangan apakah telah dilakukan sesuai peraturan, kebijakan serta sistem, dan prosedur yang berlaku;
   b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
   c. Memastikan laporan keuangan dan informasi lainnya yang terkait telah disajikan berdasarkan data dan informasi keuangan atau akuntansi manajemen secara benar dan akurat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2 Pengawasan atas Audit Internal
   a. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal Perusahaan;
   b. Mengevaluasi kinerja Divisi Audit;
   c. Memastikan Divisi Audit melakukan komunikasi dengan Direksi dan Dewan Komisaris, auditor eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan;
   d. Memastikan Divisi Audit bekerja secara independen;
   e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran Divisi Audit;
   f. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Divisi Audit.
   g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan Divisi Audit secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan

Audit Committee Duties and Responsibilities

1 Financial Information Supervision
   a. Reviewing the financial statements preparation process implementation that shall be in accordance with applicable regulations, policies, systems, and procedures
   b. Reviewing the financial information to be published by the Company, such as financial statements, projections, and other financial information;
   c. Ensuring that financial statements and other related information are presented based on correct and accurate financial or management accounting data and information and are in accordance with generally accepted accounting principles.

2 Internal Audit Supervision
   a. Monitoring and reviewing the Company's internal audit effectiveness;
   b. Evaluating the Audit Division performance;
   c. Ensuring that the Audit Division communicates with the Board of Directors and Board of Commissioners, external auditors and the Financial Services Authority;
   d. Ensuring that the Audit Division works independently;
   e. Providing recommendations to the Board of Commissioners on the audit plan preparation, and the Audit Division scope and budget;
   f. Reviewing the audit reports and ensuring that the Board of Directors takes the necessary corrective actions timely to address control weaknesses, fraud, compliance issues with policies, laws and regulations or other issues identified and reported by the Audit Division.
   g. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the annual remuneration of the Audit Division as a whole, as well as performance appreciations; and

h. Memastikan Divisi Audit menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.

3 Pengawasan atas Pengendalian Internal
   a. Memonitor kecukupan usaha manajemen untuk membangun dan mengoperasikan pengendalian internal yang efektif, khususnya pengendalian internal atas pelaporan keuangan;
   b. Dengan segera melakukan pembahasan jika terhadap temuan dan hal-hal yang mengandung indikasi kelemahan dan/atau hambatan dalam pengendalian internal, inefisiensi dalam kegiatan Perseroan, kekeliruan penerapan standar akuntansi dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. Pengawasan terhadap Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan OJK, Auditor Intern dan/atau Auditor Ekstern guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

4 Pengawasan atas Audit Eksternal
   a. Membantu Dewan Komisaris melakukan proses penunjukan calon auditor independen yang akan melaksanakan audit;
   b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit;
   c. Melakukan *oversight* atas proses audit;
   d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor independen;
   e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit & memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

5 Pengawasan Terhadap Kepatuhan Peraturan dan Perundangan Serta Pengaduan Terkait Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
   a. Melakukan penelaahan atas ketaatan

h. Ensuring that the Audit Division regards integrity highly in its duties.

3 Internal Control Supervision
   a. Monitoring the sufficiency of management efforts to establish and operate effective internal controls, particularly over financial reporting;
   b. Immediately holds discussions on findings and matters containing indications of weaknesses and/ or obstacles in internal control, inefficiencies in the Company's activities, errors in applying accounting standards and violations of applicable laws and regulations;
   c. Supervision on the follow-up by the Board of Directors on the results of audit findings and/or recommendations from the supervision results of OJK, Internal Auditors and/or External Auditors, for recommendations to the Board of Commissioners.

4 External Audit Supervision
   a. Assisting the Board of Commissioners in the process of appointing independent auditor candidate to conduct the audit;
   b. Providing recommendations to the Company's Board of Commissioners on the appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to provide audit services;
   c. Supervision of the audit process;
   d. Providing an independent opinion in the event of dissenting opinion between management and the independent auditors;
   e. Conducting evaluation on the audit services & providing recommendations on the appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm to the Board of Commissioners.

5 Supervision on the Compliance with Regulations and Legislation as well as Complaints Related to the Accounting and Financial Reporting Process
   a. Reviewing compliance with laws and regulations

Komite Audit
Audit Committee

terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan termasuk dan tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, perpajakan, dan/atau peraturan terkait tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)*, serta dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan risiko-risiko pelaporan keuangan *(financial reporting risk)*;

b. Mendiskusikan penyelenggaraan *Whistleblower* dengan divisi Internal Audit;
c. Memastikan manajemen Perseroan menciptakan budaya kerja yang mendorong setiap karyawan mematuhi kode etik Perseroan.

6 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

related to the Company's business activities including but not limited to laws and regulations in the Capital Market sector, taxation, and/or regulations related to good corporate governance, as well as other laws relating to financial reporting risks;

b. Discussing Whistleblower implementation with Internal Audit division;
c. Ensuring that the Company's management creates a work culture that encourages every employee to comply with the Company's code of ethics.

6 Carrying out other tasks from the Board of Commissioners.

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 014/III/BOC-WOM/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Pembentukan Komite Audit, susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Structure and Membership

Based on the Board of Commissioners Decree No. 014/III/BOC-WOM/2023 dated March 31, 2023 on the Establishment of the Audit Committee, the structure of Audit Committee membership is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan di Perusahaan Position in Company	Periode Jabatan Terms of Office
I Nyoman Tjager	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	31 Maret 2023 – 2024 March 31, 2023 - 2024
Emmanuel Bambang Suyitno	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	31 Maret 2023 – 2024 March 31, 2023 - 2024
Rijanti Witarsa	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	31 Maret 2023 – 2024 March 31, 2023 - 2024

Periode jabatan dari tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan pemberhentian dan/atau penggantian sebelum masa tugas berakhir.

The term of office is March 31, 2023 until the closing of the Company's Annual GMS in 2024, without prejudice to the rights and authorities of the Company's Board of Commissioners to discharge and replace the Audit Committee members prior to the end of tenure.

Profil Komite Audit
Audit Committee Profile

I Nyoman Tjager **Ketua** | Chairman	
Profil Ketua Komite Audit dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.	The profile of Audit Committee Chairman is presented in the section of the Board of Commissioners' Profile in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

Emmanuel Bambang Suyitno

Anggota/Pihak Independen | Member/Independent Party
53 Tahun | Years Old
Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen

Riwayat Pendidikan Educational Background	MBA dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) International Business School pada tahun 2007; Sarjana Akuntansi (S1) dari Universitas Indonesia pada tahun 1995. MBA from Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) International Business School, 2007; Bachelor's Degree in Accountant, University Indonesia, 1995.
Pengalaman Kerja Professional Experience	1. Senior Auditor Ernst and Young (1994 - 1997) 2. Assistant Manager – Structured Finance PT ABS Finance Indonesia – JV with IFC (1997 - 1998) 3. Manager – Corporate Finance PT Puridana Sekurindo (1998 - 2001) 4. Corporate Secretary PT Kopitime Dot Com Tbk (2001 - 2002) 5. Senior Manager – Risk Management and Internal Audit PT Surya Citra Media Tbk (2002 - 2008) 6. Anggota Komite Audit PT Surya Citra Media Tbk (2008 - 2019) 7. Assistant Vice President PT Indika Energy Tbk (2008 - 2012) 8. Head of Investor Relations PT Petrosea Tbk (2009 - 2012) 9. Head of Investor Relations PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (2011 - 2012) 10. Vice President – Head of Investor Relations and Corporate Finance ChemOne Holdings Pte Ltd (2012 - 2016) 11. Komite Audit PT Danareksa (Persero) (2014 - 2016) 12. Senior Vice President – Head of Investor Relations, Corporate Finance, MIS & Audit Lucky Group of Indonesia (2016 - 2017) 13. Independent Consultant for Corporate Secretary, Investor Relations, Corporate Finance, Good Corporate Governance & Risk Management PT PP Presisi Tbk (2017 - 2022) 14. Anggota Komite Audit PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (2019 - saat ini) 15. Anggota Komite Audit Perseroan (2020 - saat ini) 16. Anggota Komite Audit PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (2021 - saat ini) 17. Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan (2021 - saat ini) 1. Senior Auditor Ernst and Young (1994 - 1997) 2. Assistant Manager – Structured Finance PT ABS Finance Indonesia – JV with IFC (1997 - 1998) 3. Manager – Corporate Finance PT Puridana Sekurindo (1998 - 2001) 4. Corporate Secretary PT Kopitime Dot Com Tbk (2001 - 2002) 5. Senior Manager – Risk Management and Internal Audit PT Surya Citra Media Tbk (2002 - 2008) 6. Audit Committee Members of PT Surya Citra Media Tbk (2008 - 2019)

Komite Audit
Audit Committee

7. Assistant Vice President PT Indika Energy Tbk (2008 - 2012)
8. Head of Investor Relations PT Petrosea Tbk (2009 - 2012)
9. Head of Investor Relations PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (2011 - 2012)
10. Vice President – Head of Investor Relations and Corporate Finance ChemOne Holdings Pte Ltd (2012 - 2016)
11. Audit Committee of PT Danareksa (Persero) (2014-2016)
12. Senior Vice President – Head of Investor Relations, Corporate Finance, MIS & Audit Lucky Group of Indonesia (2016 - 2017)
13. Independent Consultant for Corporate Secretary, Investor Relations, Corporate Finance, Good Corporate Governance & Risk Management PT PP Presisi Tbk (2017 - 2022)
14. Audit Committee Member of PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (2019 - present)
15. Audit Committee Member of the Company (2020 - present)
16. Audit Committee Member of PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (2021 - present)
17. Members of the Company's Risk Oversight Committee (2021 - present)

Rijanti Witarsa

Anggota | Member
59 Tahun | Years Old,
Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen

Riwayat Pendidikan Educational Background	• MBA dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) International Business School pada tahun 2002; • Sarjana Akuntansi (S1) dari Universitas Trisakti pada tahun 1990. • MBA from the Indonesian Institute of Management Development (IPMI), International Business School in 2002; • Bachelor of Accounting (S1) from Trisakti University in 1990.
Pengalaman Kerja Professional Experience	1. Internal Audit Director di PT. Indopoly Swakarsa Industry Tbk (2008-2011). 2. Anggota Komite Audit PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk dan PT Kokoh Inti Arebama Tbk (2011). 3. CFO Parent Company - PT Caturkarsa Megatunggal (Group Lautan Luas Tbk) (2011- 2021). 4. Anggota Komite Audit Perseroan (Maret 2023 - sekarang). 5. Chief Financial Officer PT Taman Safari Indonesia (November 2023 - sekarang). 1. Internal Audit Director of PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk (2008-2011). 2. Member of Audit Committee of PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk and PT Kokoh Inti Arebama Tbk (2011). 3. CFO Parent Company - PT Caturkarsa Megatunggal (Lautan Luas Group Tbk) (2011-2021). 4. Member of Audit Committee of the Company (March 2023 - present). 5. Chief Financial Officer of PT Taman Safari Indonesia (November 2023 - present).

Independensi Anggota Komite Audit

- Persyaratan anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan

Independency of Audit Committee Members

- The Audit Committee members are required to have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with their field of work and be able to communicate well as required in POJK No. 55/ POJK.04/2015 on the Establishment and Implementation Guidelines for the Audit Committee.

Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit telah diatur dalam Piagam Komite Audit.

- Dengan diangkatnya Komite Audit melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tentang Pembentukan Komite Audit Perseroan No. 014/III/BOC-WOM/2023 tertanggal 31 Maret 2023, maka anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

Komite Audit menulis surat pernyataan yang berisi:

1. Saya mempunyai akhlak, moral, integritas yang baik, dan cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Saya tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan/atau yang berkaitan di sektor keuangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan saya selaku Anggota Komite Audit Perseroan.
3. Saya memiliki komitmen untuk tunduk dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan/prosedur yang berlaku di Perseroan.
4. Saya memiliki kemampuan, pengalaman, pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan, dan mampu berkomunikasi dengan baik.
5. Saya memiliki keahlian di bidang audit, keuangan, akutansi, dan manajemen risiko.
6. Saya bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
7. Saya tidak pernah memanfaatkan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
8. Saya tidak pernah menerima dan/atau memberi dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi kewajiban yang berkaitan dengan jabatan ataupun pekerjaan saya.
9. Saya senantiasa menjaga dan melindungi seluruh informasi rahasia yang berkaitan dengan Perseroan dan tidak memberikan keterangan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan Dewan Komisaris atau kepada pihak otoritas yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

as has been stipulated in the Audit Committee Charter.

- With the appointment of the Audit Committee through the Board of Commissioners Decree regarding the Establishment of the Audit Committee No. 014/III/BOC-WOM/2023 dated March 31, 2023, the Audit Committee members have met the requirements of having good integrity, character and morals.

The Audit Committee writes a statement containing:

1. I have a good character, moral, integrity and am capable of performing legal actions.
2. I have never been sentenced for committing a crime which resulted in losses to state finances and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to my appointment as a Member of the Company's Audit Committee.
3. I have a commitment to obey and comply with the applicable laws and regulations and the provisions/procedures that apply in the Company.
4. I have the ability, experience, knowledge and/or expertise in the field required by the Company, and am able to communicate well.
5. I have expertise in auditing, finance, accounting, and risk management
6. I am willing to improve competence continuously through education and training.
7. I have never taken advantage of the Company either directly or indirectly for personal, family and/or other parties' interests which may harm or reduce the Company's profits.
8. I have never received and/or given in any form, either directly or indirectly, which may affect obligations related to my position or work.
9. I always maintain and protect all confidential information relating to the Company and do not provide information to other parties except with the approval of the Board of Commissioners or to the competent authorities based on the applicable laws and regulations.

Komite Audit
Audit Committee

10. Saya memahami Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan, serta kewajiban-kewajiban saya untuk patuh terhadap prinsip-prinsip dasar, kebijakan-kebijakan dan ketentuan-ketentuan hukum yang digariskan pada Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan dan seluruh kebijakan internal Perseroan yang berlaku bagi saya.

10. I understand the Company's Code of Ethics and Code of Conduct, as well as my obligations to comply with the basic principles, policies and legal provisions outlined in the Company's Code of Ethics and Code of Conduct and all applicable internal Company policies for me.

Pelatihan Anggota Komite Audit
Audit Committee Member Trainings

Nama Name	Nama Sertifikat / Pelatihan Certificate / Training Name	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
I Nyoman Tjager	Seminar Nasional Tantangan Pembiayaan di Tengah Tahun Politik. National Seminar on Financing Challenges in the Middle of the Political Year.	Webinar	31 Januari 2023 January 31, 2023	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Indonesian Financial Services Association (APPI)
Emmanuel Bambang Suyitno	Implementasi AI di Industri Jasa Keuangan AI Implementation in Financial Services Industry	Online	02 Februari 2023 February 2, 2023	OJK Institute
	Deteksi Akuntansi Forensik Atas Potensi Manipulasi Laporan Keuangan Forensic Accounting Detection of Potential Financial Statement Manipulation	Online	25 Februari 2023 February 25, 2023	Ruang Seminar Seminar Room
	Detecting Financial Statement Fraud Misstatements and Red Flags	Online	04 Mareti 2023 March 4, 2023	Ruang Seminar Seminar Room
	"Seminar Transformasi Internal Audit dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PwC Indonesia & Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)" "Internal Audit Transformation Seminar and Signing of Cooperation Agreement between PwC Indonesia & Indonesian Institute of Audit Committee (IKAI)"	Jakarta	09 Mei 2023 May 9, 2023	IKAI & PWC
	Deloitte Asia Pacific Conduct Watch 2023	Jakarta	20 Juni 2023 June 20, 2023	Deloitte
	Fraud & Forensic Auditing: Identification, Detection & Prevention	Dubai	03 - 07 Juli 2023 July 3 - 7, 2023	Glomacs-Oxford Management Center
	IIA Indonesia National Conference 2023: "Staying Relevent"	Online	30 - 31 Agustus 2023 August 30 - 31, 2023	IIA Indonesia Chapter
	Enhancing Financial Performance Through Data Analytics	Online	31 Agustus 2023 August 31, 2023	OJK Institute
	Konas IKAI 2023: "Mengawal Keberlanjutan & Pertumbuhan PerseroanMelalui Pengawasan & Pengendalian Risiko" Konas IKAI 2023: "Overseeing the Company's Sustainability & Growth through Risk Supervision & Control"	Jakarta	19 Oktober 2023 October 19, 2023	IKAI
	How to drive corporate performance through accounting practices	Online	9 November 2023 November 9, 2023	OJK Institute
Rijanti Witarsa	-	-	-	-

Rapat Komite Audit

Selama tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan 8 (delapan) kali rapat dengan rincian kehadiran dan agenda sebagai berikut:

Report on Audit Committee Activities

During 2023, the Audit Committee held 8 (eight) meetings with details of attendance and agenda as follows:

Frekuensi Rapat Komite Audit 2023

Audit Committee Meeting Frequencies in 2023

Nama Name	Kehadiran Attendance	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran% Attendance
I Nyoman Tjager	8	8	100%
Patricia Marina Sugondo*	3	3	100%
Emmanuel Bambang Suyitno	7	8	88%
Rijanti Witarsa**	5	5	100%

* Berakhir masa jabatan pada tanggal 30 Maret 2023 | Term of office ended on March 30, 2023
** Bergabung pada tanggal 31 Maret 2023 | Joined on March 31, 2023

Agenda Rapat Komite Audit Tahun 2023

Audit Committee Meeting Agenda in 2023

No	Tanggal Date	Agenda Meeting Meeting Agenda	Tempat Location	Kehadiran Attendance			
				I Nyoman Tjager	Patricia Marina Sugondo	Emmanuel Bambang Suyitno	Rijanti Witarsa
1	10 Januari 2023 January 10, 2023	Realisasi Audit Plan Tahun 2022 dan Hasil Audit SKAI MBI & OJK Syariah 2022 Realization of Audit Plan 2022 and Audit Results of SKAI MBI & OJK Syariah 2022	*Online*	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present	Belum menjabat Have not served
2	10 Januari 2023 January 10, 2023	*EY Year End Audit Findings & Adjustments 31 Dec 2022*	*Online*	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present	Belum menjabat Have not served
3	14 Februari 2023 February 14, 2023	Audit Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 Financial Statement Audit as of December 31, 2022	*Online*	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present	Belum menjabat Have not served
4	11 April 2023 April 11, 2023	Progress Audit Kuartal II Tahun 2023 Audit Progress for the Second Quarter of 2023	*Online*	Hadir Present	Sudah tidak menjabat Resigned	Hadir Present	Hadir Present
5	3 Juli 2023 July 3, 2023	Premilinary Update dengan Audit Committee Premilinary Update with Audit Committee	*Online*	Hadir Present	Sudah tidak menjabat Resigned	Tidak Hadir Not Present	Hadir Present

Komite Audit
Audit Committee

No	Tanggal Date	Agenda Meeting Meeting Agenda	Tempat Location	Kehadiran Attendance			
				I Nyoman Tjager	Patricia Marina Sugondo	Emmanuel Bambang Suyitno	Rijanti Witarsa
6	21 Juli 2023 July 21, 2023	Progress Audit Kuartal II Tahun 2023 Audit Progress for the Second Quarter of 2023 *Eksternal Quality Assurance Review*	*Online*	Hadir Present	Sudah tidak menjabat Resigned	Hadir Present	Hadir Present
7	20 Oktober 2023 October 20, 2023	Progress Audit Kuartal III Tahun 2023 Audit Progress for the Third Quarter of 2023 *Annual Audit Plan 2024*	*Online*	Hadir Present	Sudah tidak menjabat Resigned	Hadir Present	Hadir Present
8	2 November 2023 November 2, 2023	Kick off Meeting EY periode 31 Desember 2023 EY Kick off Meeting for December 31, 2023	*Online*	Hadir Present	Sudah tidak menjabat Resigned	Hadir Present	Hadir Present

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

- Komite Audit Perseroan wajib menyampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan, laporan-laporan sebagai berikut:
  1. Laporan untuk setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
  2. Laporan triwulan pelaksanaan tugas Komite Audit Perseroan.
  3. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit Perseroan untuk diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
- Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai informasi pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit Perseroan wajib dimuat dalam situs *Web* Perseroan.

Report on Audit Committee Activities

- The Company's Audit Committee is required to submit to the Company's Board of Commissioners the following reports:
  1. Reports for each assignment from the Company's Board of Commissioners.
  2. Quarterly report on the implementation of the duties of the Committee.
  3. Annual report on the implementation of the Committee activities to be disclosed in the Company's annual report.
- The Company is required to submit information to the Financial Services Authority regarding the appointment and dismissal of members of the Company's Audit Committee no later than 2 (two) working days after the appointment or dismissal
- Information regarding the appointment and dismissal of members of the Company's Audit Committee must be posted on the Company's website.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perusahaan. Fungsinya membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan pemberian rekomendasi atas nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

The Nomination and Remuneration Committee is constituted and responsible to the Company's Board of Commissioners. Its function is to assist in the execution of duties and responsibilities of the Board of Commissioners related to providing recommendations for the nomination and remuneration of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Dasar Hukum

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan dalam RUPS. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dengan mengacu pada:

1. POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; dan
2. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 015/III/BOC-WOM/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Legal References

Members of the Nomination and Remuneration Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported at the GMS. The Nomination and Remuneration Committee is established with reference to:

1. POJK No. 34/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies; and
2. Decree of the Company's Board of Commissioners No. 015/III/BOC-WOM/2023 dated March 31, 2023 on the Determination of the Composition of the Nomination and Remuneration Committee.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah memiliki pedoman Komite nominasi dan remunerasi yang dituangkan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan pada 16 November 2017 oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Nomination and Remuneration Committee Charter

The Company has established nomination and remuneration Committee guidelines as outlined in the Nomination and Remuneration Committee Charter stipulated on November 16, 2017 by the Company's Board of Commissioners.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi:
   - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
   - Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
   - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenal kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Terkait dengan kebijakan nominasi:
   - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi;

Duties and Responsibilities

1. Related to the remuneration policy:
   - Evaluate the remuneration policy;
   - Evaluate the suitability of the remuneration policy and the implementation of the policy;
   - Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors.
2. Related to the nomination policy:
   - Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the system and procedures for selecting and/or replacing members of the Board of Commissioners and Board of Directors;

Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi, wajib memperhatikan:
1. Kinerja Keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
2. Prestasi kerja individual;
3. Kewajaran dengan peer group di dalam dan di luar Perusahaan;
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.

Susunan Keanggotaan Komite
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Non-Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan saat ini dijabat oleh Chief Human Capital Officer.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Perseroan memastikan Komite Nominasi dan Remunerasi bersikap independen. Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi pada Perseroan tercermin pada hal-hal, antara lain sebagai berikut:
1. Pengangkatan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari Komisaris Independen Perusahaan;
2. Tidak ada Anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pelatihan Komite Nominasi dan Remunerasi
Pendidikan dan pelatihan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat di Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding candidates for members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

In carrying out duties and responsibilities related to the remuneration policy, the Nomination and Remuneration Committee shall take into account the following:
1. Financial Performance and reserve fulfillment as stipulated in relevant laws and regulations;
2. Performance of individual work;
3. Fairness with peer groups of the Company's internal and external;
4. Consideration of the Company's long-term targets and strategies.

Composition of Committee Membership
The Company's Nomination and Remuneration Committee consists of 3 (three) members, consisting of 1 (one) Chairman who is an Independent Commissioner, 1 (one) Non-Independent Commissioner and 1 (one) Executive Officer under Human Resources (HR) and currently held by the Chief Human Capital Officer.

Nomination and Remuneration Committee Independence
In conducting its functions and duties, the Company ensures that the Nomination and Remuneration Committee acts independently. The independence of the Nomination and Remuneration Committee in is reflected in the following aspects:
1. Appointment of the Nomination and Remuneration Committee Chairman from the Company's Independent Commissioner;
2. No Member of the Board of Directors is a member of the Nomination and Remuneration Committee.

Nomination and Remuneration Training
Education and training of members of the Nomination and Remuneration Committee are presented in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan 6 (enam) kali rapat dengan rincian kehadiran dan agenda sebagai berikut:

Nomination and Remuneration Committee Meeting

During 2023, the Nomination and Remuneration Committee has held 6 (six) meetings with the following attendance and agenda:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran (%) Attendance
Myrnie Zachraini Tamin	Ketua | Chairwoman	6	6	100%
Robbyanto Budiman*	Wakil Ketua | Vice Chairman	1	0	-
Thilagavathy Nadason**	Anggota | Member	4	4	100%
Ekanto Wijonosunu	Anggota dan Sekretaris | Member and Secretary	6	6	100%

*) Meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2023 | Passed away on February 10, 2023
**) Bergabung per tanggal 13 Februari 2023 | Joined as of February 13, 2023

Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2023
Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda in 2023

No	Tanggal Date	Peserta Rapat Meeting Participants	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	13 Februari 2023 February 13, 2023	1. Myrnie Zachraini Tamin 2. Ekanto Wijonosunu	Usulan Penggantian Anggota NRC PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) Proposal for Replacement of NRC Members of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance)
2	13 Februari 2023 February 13, 2023	1. Myrnie Zachraini Tamin 2. Ekanto Wijonosunu	Pengangkatan Komite Audit a/n Rijanti Witarsa Appointment of Audit Committee, Rijanti Witarsa
3	20 Maret 2023 March 20, 2023	1. Ibu Myrnie Zachraini Tamin 2. Thilagavathy Nadason 3. Ekanto Wijonosunu	Usulan Anggota Direksi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) periode 2023-2026 Proposed Members for the 2023-2026 period of the Board of Directors of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance)
4	27 Maret 2023 March 27, 2023	1. Ibu Myrnie Zachraini Tamin 2. Thilagavathy Nadason 3. Ekanto Wijonosunu	Usulan Pembaharuan BOC PT Wahana PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) periode 2023-2026 Proposed Renewal of BOC of PT Wahana PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) for the period of 2023-2026
5	3 April 2023 April 3, 2023	1. Ibu Myrnie Zachraini Tamin 2. Thilagavathy Nadason 3. Ekanto Wijonosunu	Usulan Retention Program untuk Njauw Vido Onadi (Risk Director) Proposal for Retention Program for Njauw Vido Onadi (Risk Director)

Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

No	Tanggal Date	Peserta Rapat Meeting Participants	Agenda Rapat Meeting Agenda
6	14 November 2023 November 14, 2023	1. Ibu Myrnie Zachraini Tamin 2. Thilagavathy Nadason 3. Ekanto Wijonosunu	Rekomendasi Susunan Dewan Komisaris Recommendations for the Composition of the Board of Commissioners

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Di tahun 2023 Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Usulan Penggantian Anggota NRC Perseroan.
2. Pengangkatan Komite Audit a/n Rijanti Witarsa.
3. Usulan Anggota Direksi Perseroan.
4. Usulan pembaharuan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Usulan Retention Program untuk Njauw Vido Onadi (Risk Director).

Kebijakan Mengenai Suksesi Jabatan Strategis

Selain pelaksanaan kegiatan di atas, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada tahun 2023 juga mempersiapkan langkah regenerasi jabatan-jabatan di internal perusahaan terutama jabatan-jabatan strategis dan kritikal termasuk Direksi. Dalam hal ini Perseroan telah melakukan pengelolaan suksesi disetiap level organisasi untuk mempersiapkan sumber daya internal yang siap mengisi kebutuhan organisasi dalam jangka panjang. Kegiatan pengaturan suksesi ini bertujuan untuk memastikan ketepatan penempatan kader yang minimal setara atau lebih baik dari karyawan yang digantikan. Dengan demikian dapat mencegah penurunan kapabilitas organisasi atau bahkan krisis sumber daya akibat kehilangan *key person* tanpa kesiapan pengganti. Juga untuk memastikan penguasaan pengetahuan eksklusif individu menjadi pengetahuan organisasi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan kapabilitas Perseroan. Kriteria yang digunakan dalam menetapkan calon suksesi Direksi dilakukan berdasarkan hasil penilaian kinerja dan rekomendasi hasil *review/assessment* kompetensi yang didalamnya mencakup mengenai kepemimpinan.

Nomination and Remuneration Committee Activities Report

In 2023, the Nomination and Remuneration Committee has carried out the following activities:

1. Proposal for the Replacement of NRC Members of the Company.
2. Appointment of the Audit Committee, Rijanti Witarsa.
3. Proposal for Board of Directors Members of the Company.
4. Proposal for the Renewal of Board of Commissioners of the Company.
5. Proposal for a Retention Program for Njauw Vido Onadi (Risk Director).

Policy on Strategic Position Succession

Apart from the above activities, the Company's Nomination and Remuneration Committee in 2023 also prepared steps for the regeneration of positions within the Company, particularly strategic and critical positions including the Board of Directors. In this regard, the Company has managed succession at every organizational level to prepare internal resources ready to meet the organization's long-term needs. The purpose of these succession planning activities is to ensure the accurate placement of cadres who are at least equivalent to or better than the employees being replaced. This can prevent a decrease in organizational capabilities or even a resource crisis due to the loss of key persons without a prepared replacement. It also ensures the transformation of exclusive individual knowledge into organizational knowledge, thereby enhancing the capability and capacity of the Company. The criteria used in determining succession candidates for the Board of Directors are based on performance assessment results and recommendations from competency review/assessment, which includes leadership.

Komite Pemantau Risiko

Risk Oversight Committee

Komite Pemantau Risiko dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan. Komite ini berperan untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan pengawasan manajemen risiko secara efisien, pengembangan budaya manajemen risiko, dan identifikasi risiko-risiko penting yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko memonitor proses perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan, prosedur dan praktik pada semua tingkatan dalam Perseroan, guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan Perseroan dan pengendalian risiko yang baik. Dengan demikian, pembentukan Komite Pemantau Risiko akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Perseroan.

Dasar Hukum

Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan perubahannya sebagaimana tercantum pada POJK No. 29/POJK.05/2020.
3. POJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
4. POJK No. 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-bank dan.
5. SEOJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Perseroan telah memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko, yang disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala oleh Komite Pemantau Risiko. Piagam ini berfungsi sebagai pedoman agar Komite Pemantau Risiko dapat

The Risk Oversight Committee is established and is responsible to the Board of Commissioners of the Company. The Committee's role is to assist in the efficient performance of duties and obligations of risk management oversight, the development of a risk management culture, and the identification of important risks that require the Board of Commissioners' attention.

The Risk Oversight Committee monitors the continuous process of improvement on policies, procedures and practices at all levels within the Company, in order to ensure that the Company's management and risk control have been carried out properly. As such, the establishment of a Risk Oversight Committee will be very beneficial to increase public confidence in the management of the Company.

Legal References

The Risk Oversight Committee establishment refers to:

1. The Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company.
2. POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies and its amendments as stated in POJK No. 29/POJK.05/2020.
3. POJK No. 44/POJK.05/2020 concerning Risk Management Practices for Non-bank Financial Services Institutions.
4. POJK No. 28/POJK.05/2020 concerning Rating Assessment of Non-bank Financial Services Institutions and
5. SEOJK No. 11/SEOJK.05/2020 concerning Rating Assessment of Financing Companies and Sharia Financing Companies.

Risk Oversight Committee Charter

The Company's Risk Oversight Committee has in place the Risk Oversight Committee Charter, which is prepared based on the prevailing laws and regulations and is regularly reviewed by the Risk Oversight Committee. The Charter is functioned as a guideline for the Committee to carry out independent, objective, effective and

Komite Pemantau Risiko
Risk Oversight Committee

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, obyektif, efektif dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

transparent duties and responsibilities and can be accounted for and accepted by all interested parties.

Piagam Komite Pemantau Risiko telah ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2021.

The Risk Oversight Committee Charter has been stipulated on March 3, 2021.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas memberikan pendapat profesional terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris. Juga mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, antara lain:

1. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perseroan;
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
3. Membuat program kerja atau rencana tahunan Komite Pemantau Risiko dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;
4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan dan penerapan manajemen risiko oleh Direksi;
5. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Perusahaan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
6. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Direksi sekurang-kurangnya secara triwulan;
7. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perusahaan yang dimiliki.
8. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap hal-hal dalam ruang lingkup tugas terkait.

Duties and Responsibilities of Risk Oversight Committee

The Risk Oversight Committee has duties to provide professional opinions on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners. It also identifies matters that require the attention of the Board of Commissioners, including:

1. Evaluate the suitability of the risk management policy with the implementation of the Company's policies;
2. Monitor and evaluate the implementation of the Risk Management Committee and the Risk Management Work Unit duties in order to provide recommendations to the Board of Commissioners;
3. Make a work program or annual plan for the Risk Oversight Committee and send it to the Board of Commissioners for approval;
4. Report to the Board of Commissioners about the Company's various risks and the implementation of risk management by the Board of Directors;
5. Evaluate the Company's risk management policies at least once a year;
6. Evaluate the accountability of the Board of Directors' Risk Management policy implementation at least on a quarterly basis;
7. Maintain the confidentiality of all Company documents, data and information held.
8. Organizing and giving authority to investigate matters within the scope of related duties.

Struktur Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien dalam rangka pengawasan manajemen risiko, budaya

Membership Structure of Risk Oversight Committee

To carry out effective and efficient duties in risk management supervision, risk management culture

manajemen risiko dan identifikasi risiko-risiko signifikan bagi Perseroan, seluruh Dewan Komisaris termasuk dua orang Komisaris Independen terlibat dalam keanggotaan Komite Pemantau Risiko.

and identification of significant risks for the Company, all of the Board of Commissioners members including two Independent Commissioners are involved in the membership of the Risk Oversight Committee.

Berikut susunan anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan:

The following is the composition of the members of the Company's Risk Oversight Committee:

Nama Name	Jabatan di Komite Position in the Committee	Jabatan di Perseroan Position in the Company
I Nyoman Tjager	Ketua | Chairman	Presiden Komisaris/ Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner
Thilagavathy Nadason	Anggota | Member	Komisaris | Commissioner
Myrnie Zachraini Tamin	Anggota | Member	Komisaris Independen | Independent Commissioner
Emmanuel Bambang Suyitno	Anggota | Member	Pihak Independen | Independent Party

Profil Komite Pemantau Risiko

Informasi mengenai profil Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Dewan Komisaris Perseroan tersedia pada Sub Bab Profil Dewan Komisaris, dan anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen tersedia pada sub bagian Profil Komite Audit di Laporan Tahunan ini.

Risk Oversight Committee Profile

Information on the profile of the Chairman and Member of the Risk Oversight Committee from the Board of Commissioners, and from Independent Party is presented on the Profile Chapter of the Board of Commissioners and sub chapter of the Audit Committee Profile in this Annual Report.

Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

- Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan sehingga masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan yang diangkat diantara masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dengan ketentuan tidak mengurangi hak dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan pemberhentian dan/ atau penggantian Komite Pemantau Risiko Perseroan sebelum masa tugasnya berakhir.

- Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan yang telah berakhir masa tugasnya dapat dipilih dan diangkat kembali.

Risk Oversight Committee Term of Office

- The tenure of the Company's Risk Oversight Committee members may not be longer than the tenure of the Company's Board of Commissioners as stipulated in the Company's Articles of Association, hence the tenure of members of the Company's Risk Oversight Committee who are appointed between the terms of office of the Company's Board of Commissioners will end simultaneously with the end of tenure of the Company's Board of Commissioners with the provisions to not reduce the rights and authority of the Company's Board of Commissioners to terminate and/or replace the Company's Risk Monitoring Committee before their term of office ends.
- Members of the Company's Risk Oversight Committee whose tenure has ended can be re-elected and reappointed.

Komite Pemantau Risiko
Risk Oversight Committee

Independensi Komite Pemantau Risiko
Komite Pemantau Risiko dalam pelaksanaan tugasnya telah bersikap independen. Independensi ini didukung dengan keanggotaan 2 (dua) orang Komisaris Independen Perseroan dan satu orang pihak independen di luar perusahaan dalam keanggotaan Komite Pemantau Risiko Perseroan.

Sesuai dengan Piagam Komite Pemantau Risiko, dinyatakan bahwa Pihak Independen adalah pihak di luar Perusahaan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk independen. Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko, Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.

Keputusan Komite Pemantau Risiko
Hasil keputusan Komite Pemantau Risiko yang sah merupakan risalah rapat yang diedarkan kepada seluruh anggota untuk mendapatkan tambahan masukan yang kemudian dikaji terlebih dahulu pada agenda rapat berikutnya, sebelum kemudian ditandatangani oleh Ketua/ Wakil Ketua. Selanjutnya, hasil keputusan dalam risalah rapat tersebut diedarkan kepada Direksi dan unit kerja terkait.

Rapat Komite Pemantau Risiko
Pada tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

Risk Oversight Committee Independency
In carrying out its duties, the Risk Oversight Committee works independently. This independence is supported by the membership of 2 (two) Independent Commissioners of the Company and one independent party outside the company in the membership of the Company's Risk Oversight Committee.

In accordance with the Risk Oversight Committee Charter an Independent Party is a party outside the Company who has no financial, management, share ownership and/or family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholder or other relationship that may affect its ability to works independently. Based on the Risk Oversight Committee Charter, the Risk Oversight Committee is chaired by the Independent Commissioner.

Decisions of Risk Oversight Committee
The valid decisions of the Risk Oversight Committee are in the form of the minutes of meeting circulated to all members to obtain additional input. Those will be reviewed first on the agenda of the next meeting, before the Chairman/Vice Chairman signs it. Furthermore, the decisions in the minutes of the meeting are circulated to the Board of Directors and related work units.

Risk Oversight Committee Meeting
In 2023, the Risk Oversight Committee held 4 (four) meetings.

Agenda dan Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2023
Risk Oversight Committee Meetings Agenda and Frequencies in 2023

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda	Kehadiran Attendance	Jumlah Rapat Meetings	Kehadiran (%) Attendance (%)
I Nyoman Tjager	Ketua Chairman	15 Februari 2023 February 15, 2023	*Update ROC*	1	1	100
		31 Mei 2023 May 31, 2023	*Update ROC*	1	1	100
		16 Agustus 2023 August 16, 2023	*Update ROC*	1	1	100
		14 November 2023 November 14, 2023	*Update ROC*	1	1	100
TOTAL				**4**	**4**	**100**

Komite Pemantau Risiko
Risk Oversight Committee

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda	Kehadiran Attendance	Jumlah Rapat Meetings	Kehadiran (%) Attendance (%)
Thilagavaty Nadason	Anggota Member	15 Februari 2023 February 15, 2023	*Update ROC*	1	1	100
		31 Mei 2023 May 31, 2023	*Update ROC*	1	1	100
		16 Agustus 2023 August 16, 2023	*Update ROC*	1	1	100
		14 November 2023 November 14, 2023	*Update ROC*	1	1	100
TOTAL				**4**	**4**	**100**
Myrnie Zachrani Tamin	Aggota Member	15 Februari 2023 February 15, 2023	*Update ROC*	1	1	100
		31 Mei 2023 May 31, 2023	*Update ROC*	1	1	100
		16 Agustus 2023 August 16, 2023	*Update ROC*	1	1	100
		14 November 2023 November 14, 2023	*Update ROC*	1	1	100
TOTAL				**4**	**4**	**100**
Emmanuel Bambang Suyitno	Anggota Member	15 Februari 2023 February 15, 2023	*Update ROC*	1	1	100
		31 Mei 2023 May 31, 2023	*Update ROC*	1	1	100
		16 Agustus 2023 August 16, 2023	*Update ROC*	1	1	100
		14 November 2023 November 14, 2023	*Update ROC*	1	1	100
TOTAL				**4**	**4**	**100**

Komite Pemantau Risiko
Risk Oversight Committee

Kegiatan Komite Pemantau Risiko pada Tahun 2023

1. Melakukan pembaruan pada Kebijakan Manajemen Risiko.
2. Melakukan evaluasi, dan monitoring dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang efektivitas dalam penerapan Kebijakan Manajemen Risiko yang tercermin pada tingkat kesehatan Perseroan serta profil risiko Perseroan.

Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko pada Tahun 2023

Informasi lengkap mengenai pelatihan anggota Komite Pemantau Risiko Bapak I Nyoman Tjager, Ibu Thilagavathy Nadason dan Ibu Myrnie Zachraini Tamin tersedia pada Bab Profil Perusahaan bagian Pelatihan Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.

Untuk pelatihan anggota Komite Pemantau Risiko Bapak Emmanuel Bambang Suyitno terdapat pada Bab Profil Perusahaan bagian Pelatihan Komite Audit di Laporan Tahunan ini.

Risk Monitoring Committee Activities in 2023

1. The Risk Management Policy update.

2. Conducting evaluation, and monitoring in offering recommendations to the Board of Commissioners in the implementation effectiveness of the Risk Management Policy as reflected in the Company's soundness level and risk profile.

Risk Oversight Committee Member Training in 2023

Complete information on the training of Risk Oversight Committee members, Mr. I Nyoman Tjager, Ms. Thilagavathy Nadason and Ms. Myrnie Zachraini Tamin is presented in the Company Profile Chapter of the Board of Commissioners Training section of this Annual Report.

The training for member of the Risk Oversight Committee Mr. Emmanuel Bambang Suyitno is presented in the Company Profile Chapter of the Audit Committee Training section of this Annual Report.

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perseroan merujuk pada POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, yang telah diubah dengan POJK No. 29/POJK.05/2020. Ketentuan tentang DPS wajib diadopsi karena Perseroan memiliki Unit Usaha Syariah.

The establishment of Sharia Supervisory Board (DPS) in the Company refers to POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies, which has been amended by POJK No. 29/POJK.05/2020. Provisions regarding DPS must be adopted because the Company has a Sharia Business Unit.

Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan dan penunjukan DPS Perseroan selain ketentuan disebutkan diatas mengacu pada beberapa ketentuan antara lain:

1. Anggaran Dasar Perseroan.
2. POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan perubahannya sebagaimana tercantum pada POJK No. 29/POJK.05/2020.
3. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 93 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Legal References

The legal basis for the formation and appointment of the Company's DPS in addition to the aforementioned provisions refers to several provisions, including:

1. Articles of Association of the Company.
2. POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies and its amendments as contained in of POJK No. 29/POJK.05/2020.
3. POJK No. 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for the Main Parties of Financial Services Institutions.
4. Deed of Statement of Meeting Resolution of the Company No. 93 dated March 30, 2023 made before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta Administration City.

Susunan dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Susunan dan komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu:

Structure and Composition of Sharia Supervisory Board

The structure and composition of members of the Company's Sharia Supervisory Board have complied with the applicable regulations, as follows:

No	POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan perubahannya sebagaimana tercantum pada POJK No. 29/POJK.05/2020 POJK No. 30/POJK.05/2014 on Good Corporate Governance for Financing Companies and its amendments as contained in POJK No. 29/POJK.05/2020	Implementasi di Perseroan Implementation in the Company
1	Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib memiliki DPS. Sharia Financing Companies and Sharia Business Units are required to have DPS.	Perseroan telah memiliki DPS Perseroan. The Company already has the Company's DPS.

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

No	POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan perubahannya sebagaimana tercantum pada POJK No. 29/POJK.05/2020 POJK No. 30/POJK.05/2014 on Good Corporate Governance for Financing Companies and its amendments as contained in POJK No. 29/POJK.05/2020	Implementasi di Perseroan Implementation in the Company
2	DPS terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. DPS consists of 1 (one) or more sharia experts appointed by the GMS on the recommendation of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council.	DPS Perseroan yang menjabat saat ini beranggotakan 3 (tiga) orang anggota yang diangkat melalui RUPS Tahunan tahun 2023 atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia tanggal 10 Januari 2023 melalui surat No. U-0024/DSN-MUI/I/2023. The Company's current DPS consists of 3 (three) members appointed through the 2023 Annual GMS on the recommendation of the National Sharia Board – Indonesian Ulema Council dated January 10, 2023 through letter No. U-0024/DSN-MUI/I/2023.
3	DPS diangkat dalam RUPS dan dituangkan dalam akta notaris. DPS is appointed in the GMS and stated in a notarial deed.	DPS Perseroan yang menjabat saat ini diangkat dalam RUPS dan pengangkatan tersebut tertuang dalam akta notaris. The Company's current DPS is appointed in the GMS and the appointment is stated in the notarial deed.

Merujuk pada ketentuan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan maka calon anggota DPS wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya. Seluruh anggota DPS Perseroan telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsi sesuai jabatannya.

Referring to POJK No. 27/POJK.03/2016 concerning the Fit and Proper Test for the Main Parties of Financial Services Institutions, prospective DPS members shall obtain approval from the OJK prior to carrying out their actions, duties, and functions. All members of the Company's DPS have obtained approval from the OJK by passing the fit and proper test from the OJK before carrying out actions, duties and functions according to their positions.

Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang Menjabat Per 31 Desember 2023
Composition of the Company's Sharia Supervisory Board Members Serving as of December 31, 2023

No	Jabatan Position	Nama Name	Periode Jabatan Term of Office
1	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of Sharia Supervisory Board	Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA	RUPS Tahunan Tahun 2023 - RUPS Tahunan Tahun 2026 2023 Annual GMS – 2026 Annual GMS
2	Anggota Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board Member	H. Muh. Taufik Darmansyah, SE, CPA*	RUPS Tahunan Tahun 2023 - RUPS Tahunan Tahun 2026 2023 Annual GMS – 2026 Annual GMS
3	Anggota Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board Member	Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen	RUPS Tahunan Tahun 2023 - RUPS Tahunan Tahun 2026 2023 Annual GMS – 2026 Annual GMS

*) Mengundurkan diri per 8 September 2023 dan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 11 Januari 2024.
*) Resigned as of September 8, 2023 and has received approval from the Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 11, 2024.

Masa Jabatan DPS Perseroan

Masa jabatan anggota DPS yang efektif menjabat saat ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2026, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota DPS pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa anggota DPS yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Rangkap Jabatan DPS

1. Sepanjang tahun 2023, Perseroan telah memastikan anggota DPS memperhatikan dan tunduk pada ketentuan terkait rangkap jabatan DPS sesuai dengan POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan perubahannya sebagaimana tercantum pada POJK No. 29/POJK.05/2020.
2. Seluruh DPS yang efektif menjabat saat ini tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Perseroan.
3. Seluruh DPS yang efektif menjabat saat ini tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya. Informasi mengenai rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah di instansi/ perusahaan/lembaga/organisasi lain sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan mengenai profil masing-masing anggota DPS.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS

Perseroan telah memiliki Pedoman DPS yang ditetapkan oleh DPS yang disusun untuk menjadi pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat bagi setiap anggota DPS Perseroan agar DPS dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien, transparan, independen dan bertanggung jawab.

Pedoman DPS terakhir diperbaharui pada 17 Februari 2023. Secara umum, Pedoman DPS Perseroan mengatur tentang:

1. Landasan Hukum Pedoman.
2. Struktur dan Komposisi DPS.

Tenure of the Company's DPS

The term of office of the current DPS members will expire at the closing of the Annual GMS in 2026, without prejudice to the authority of the GMS to dismiss one or more DPS members at any time before their term ends. The Company's Articles of Association state that DPS members whose term of office has expired may be reappointed.

DPS Concurrent Positions

1. Throughout 2023, the Company has ensured that DPS members pay attention to and comply with the provisions related to the concurrent position of DPS in accordance with POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies and its amendments as contained in POJK No. 29/POJK.05/2020.
2. All DPS who are currently effective do not hold concurrent positions as members of the Board of Directors or Board of Commissioners in the Company.
3. All serving DPS do not hold concurrent positions as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or members of DPS in more than 4 (four) other Sharia financial institutions. Information regarding the concurrent positions of members of the Sharia Supervisory Board in other agencies/ companies/ institutions/ organizations in 2023 is presented in Company Profile Chapter on the profile of each member of the DPS.

DPS Charter

The Company already has DPS Guidelines set by DPS which are prepared to be binding guidelines and work rules for each member of the Company's DPS so that DPS can carry out its duties effectively, efficiently, transparently, independently and responsibly.

The DPS guidelines were last updated on February 17, 2023. In general, the Company's DPS Guidelines regulate about:

1. Legal Basis of the Guidelines.
2. DPS Structure and Composition.

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

3. Persyaratan Anggota DPS.
4. Pengangkatan Anggota DPS.
5. Batasan Rangkap Jabatan Anggota DPS.
6. Masa Jabatan Anggota DPS.
7. Pengunduran Diri Anggota DPS.
8. Tugas dan Wewenang DPS.
9. Mekanisme Permintaan Opini DPS.
10. Waktu Kerja.
11. Nilai-Nilai Dasar *(Core Values)* dan Etika Kerja.
12. Rapat DPS.
13. Syarat Keberlanjutan.
14. Remunerasi dan Pertanggungjawaban.

Tugas dan Tanggung Jawab DPS

Kedudukan DPS setara dengan Dewan Komisaris dan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, DPS memiliki tugas dan wewenang utama yaitu:

1. Berfungsi sebagai pengawas aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.
2. Berfungsi sebagai penasihat dan memberi saran kepada Direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah (UUS) dan pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah.
3. Berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Independensi DPS

1. Seluruh anggota DPS Perseroan yang efektif menjabat tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota DPS lainnya serta Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
2. DPS juga senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi dan mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan sendiri, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi tercermin dari pernyataan masing-masing anggota DPS mengenai hal-hal di bawah ini:

3. DPS Member Requirements.
4. Appointment of DPS Members.
5. Concurrent Position Limits of DPS Members.
6. Term of Office of DPS Members.
7. Resignation of DPS Members.
8. Duties and Authorities of DPS.
9. DPS Opinion Request Mechanism.
10. Working time.
11. Core Values and Work Ethics.
12. DPS Meetings.
13. Sustainability Requirements.
14. Remuneration and Accountability.

Duties and Responsibilities of DPS

The position of DPS is equivalent to that of the Board of Commissioners and based on the Company's Articles of Association, DPS has the following main duties and authorities:

1. As a supervisor of sharia aspects of the operational activities of the Company's Sharia Business Unit (UUS) in accordance with sharia principles.
2. As an advisor and advises the Board of Directors, head of Sharia Business Units (UUS) and head of the Company's Sharia Branch Offices on matters related to sharia principles.
3. As a mediator between the Company and the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council in communicating proposals and suggestions for the development of the Company's products and services that require studies and fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council.

DPS Independence

1. All members of the Company's DPS who effectively served have no family relationship with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and other DPS members as well as the Main Shareholders or Controlling Shareholders of the Company.
2. DPS also always upholds the principle of independence and prioritizes the interests of the Company above its own, as well as working and behaving with high integrity as reflected in the statements of each DPS member regarding the following matters:

a. Selalu mendahulukan kepentingan Perseroan, Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan dan/atau pemangku kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi.
b. Tidak pernah memanfaatkan jabatan pada DPS dan Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan.
c. Tidak pernah mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan dan Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

a. Always prioritize the interests of the Company, the Company's Sharia Business Unit (UUS) and/or other stakeholders over personal interests.

b. Never take advantage of positions in the Company's DPS and Sharia Business Units (UUS) for personal, family and/or other parties that can harm or reduce the profits of the Company and the Company's Sharia Business Unit (UUS).

c. Never take and/or receive personal benefits from the Company and the Company's Sharia Business Unit (UUS), other than remuneration and other facilities determined based on the GMS.

Kriteria Anggota DPS

Yang dapat diangkat sebagai anggota DPS adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria dan orang perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan:

1. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang mensyaratkan untuk anggota DPS memperoleh persetujuan dari OJK dengan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK maka harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan:
   a. Persyaratan integritas meliputi:
      i. Cakap melakukan perbuatan hukum.
      ii. Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan.
      iii. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK.
      iv. Memiliki komitmen terhadap pengembangan lembaga jasa keuangan yang sehat.
      v. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama.

DPS Member Criteria

Those who can be appointed as DPS members are persons who meet the criteria and who meet the criteria and requirements of:

1. POJK No. 27/POJK.03/2016 concerning the Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services Institutions which requires member of Board of Directors to obtain approval from the OJK by passing the fit and proper test from the OJK must meet the fit and proper test requirements:
   a. Integrity requirements include:
      i. Competent in legal actions.
      ii. Having good character and morals, at least shown by the attitude of complying with applicable regulations, including never having been convicted of a crime in a certain period before being nominated.
      iii. Have a commitment to comply with laws and regulations and support the OJK policy.
      iv. Have a commitment to the development of health Financial Services Institutions.
      v. Not included as a party that is prohibited from being a Main Party.

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

b. Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
   i. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
   ii. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali perusahaan perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
c. Persyaratan kompetensi, paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan lembaga jasa keuangan dimana dicalonkan.
d. Persyaratan kompetensi, paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan lembaga jasa keuangan dimana dicalonkan.

2. Memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.

b. Financial reputation requirements, at least evidenced by:
   i. Does not have bad credit and/or financing.
   ii. Have never been declared bankrupt and/or never been a shareholder, controlling insurance company that is not a shareholder, member of the Board of Directors, or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt within the last 5 (five) years before being nominated.
c. Competency requirements, at least including knowledge and/or experience that supports the management of the financial services institution where nominated .
d. Competency requirements, at least include knowledge and/or experience that supports the management of the financial services institution where nominated.

2. Fulfill the requirements as a member of the Board of Directors based on the Company's Articles of Association.

Kehadiran DPS Dalam RUPS Selama Tahun 2023

- RUPS Tahunan Tahun 2023 dan RUPS Luar Biasa Tertanggal 30 Maret 2023
  Sebanyak 67% (enam puluh tujuh persen) dari seluruh anggota DPS Perseroan hadir dalam RUPS Tahunan Tahun 2023 dan RUPS Luar Biasa tertanggal 30 Maret 2023 sebagaimana detail kehadiran sebagai berikut:

DPS Attendance at GMS During 2023

- Annual GMS 2023 and Extraordinary GMS Dated March 30, 2023
  A total of 67% (sixty-seven percent) of all members of the Company's DPS were present at the 2023 Annual GMS and Extraordinary GMS dated March 30, 2023 as detailed attendance as follows:

Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	**Jabatan** Position	**Kehadiran** I Attendance	
		Ya I Yes	**Tidak** I No
Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of Sharia Supervisory Board		√
H. Muh. Taufik Darmansyah, SE, CPA*	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of Sharia Supervisory Board	√	
Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of Sharia Supervisory Board	√	

*) Mengundurkan diri per 8 September 2023 dan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 11 Januari 2024
*) Resigned as of September 8, 2023 and has received approval from the Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 11, 2024.

Pelaksanaan Kegiatan DPS Tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan DPS sepanjang tahun 2023 selengkapnya disajikan dalam Bab Laporan Manajemen pada bagian Laporan DPS. Pelaksanaan rapat DPS termasuk tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota DPS selengkapnya disajikan dalam Bab ini pada bagian Rapat DPS dan Risalah Rapat.

DPS Activities Implementation in 2023

The full implementation of DPS activities throughout 2023 is presented in Management Reports Chapter in the DPS Report section. The conduct of DPS meetings including the level of meeting attendance of each DPS member is fully presented in this Chapter in the DPS Meeting and Meeting Minutes section.

Rapat DPS dan Risalah Rapat

Sepanjang 2023, DPS telah melaksanakan 6 (enam) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

DPS Meetings and Minutes of Meeting

In 2023, the DPS held 6 (six) meetings with the following attendance and agenda:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Kehadiran % Attendance %
Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of Sharia Supervisory Board	6	6	100%
H. Muh. Taufik Darmansyah, SE, CPA*	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of Sharia Supervisory Board	4	4	100%
Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of Sharia Supervisory Board	6	6	100%

*) Mengundurkan diri per 8 September 2023 dan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 11 Januari 2024
*) Resigned as of September 8, 2023 and has received approval from the Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 11, 2024.

Jadwal dan agenda rapat DPS yang diselenggarakan sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The schedule and agenda of DPS meetings held throughout 2023 are as follows:

No	Tanggal Date	Peserta Rapat Meeting Participants	Agenda
1	09 Februari 2023 February 09, 2023	DPS, Kepala Unit Usaha Syariah & *function* terkait. DPS, Head of Sharia Business Unit & related functions.	Koordinasi Kelengkapan Pemeriksaan OJK Unit Usaha Syariah. Coordination of OJK Examination Completeness of Sharia Business Unit.
2	22 Mei 2023 May 22, 2023	DPS, Kepala Unit Usaha Syariah & *function* terkait. DPS, Head of Sharia Business Unit & related functions.	• Persetujuan 092/SK/OPP/03-23 - Pembiayaan Syariah Logam Mulia MASKu Versi 02. • Persetujuan 062/SK/OPP/03-23 - Authority Pelunasan Dipercepat & Diskon Pelunasan Konsumen Versi 03. • Usulan Perubahan Perhitungan Diskon Pelunasan untuk Produk Syariah. • Usulan In Advance MASKu. • Approval for 092/SK/OPP/03-23 - MASKu gold financing Version 02. • Approval for 062/SK/OPP/03-23 – Authority for Expedited Repayment & Consumer Repayment Discount Version 03. • Proposed Changes to the Calculation of Repayment Discounts for Sharia Products. • In Advance MASKu proposal.

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

No	Tanggal Date	Peserta Rapat Meeting Participants	Agenda
3	06 Juli 2023 July 06, 2023	DPS, Kepala Unit Usaha Syariah & *function* terkait. DPS, Head of Sharia Business Unit & related functions.	Pengembangan Produk Syariah UmrohKu dan HajiKu. Sharia Product Development of UmrohKu and HajiKu.
4	25 Juli 2023 July 25, 2023	DPS, Kepala Unit Usaha Syariah & *function* terkait. DPS, Head of Sharia Business Unit & related functions.	• Pemaparan 175/SK/OPP/06-23 Addendum SK Pembiayaan Syariah Logam Mulia MASKu (Versi 01). • Pola Pemasaran melalui Agent Mitra Fronting. • Presentation of 175/SK/OPP/06-23 Addendum of Shariah Financing Decree for gold financing MASKu (Version 01). • Marketing Patterns through Fronting Partner Agents.
5	21 September 2023 September 21, 2023	DPS, Kepala Unit Usaha Syariah & *function* terkait. DPS, Head of Sharia Business Unit & related functions.	• Permohonan Pembahasan beberapa Approval Surat Kebijakan. • Laporan Finalisasi Uji Petik DPS. • Usulan Pembayaran Biaya Administrasi Nasabah di komponen angsuran. • Request for Discussion of several Policy Letter Approvals. • DPS Examination Finalization Report. • Proposed Payment of Customer Administration Fee in the installment component.
6	28 November 2023 November 28, 2023	DPS, Kepala Unit Usaha Syariah & *function* terkait. DPS, Head of Sharia Business Unit & related functions.	• Pengembangan Produk Logam Mulia MASKu. • Perhitungan Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo. • MASKu gold financing Development. • Calculation of Murabahah Financing Debt Repayment Before Maturity.

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Anggota DPS
Training and Competency Improvement of DPS Members

a. Pelatihan/workshop/Seminar yang Diikuti
Participated in training/workshops/seminars

No	Nama Name	Pelatihan/Workshop/Seminar Training/Workshops/Seminars	Tempat Location	Tanggal* Date*	Penyelenggara Organizer
1	Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA	*Workshop* Pra-Ijtima' Sanawi *(Annual Meeting)* Dewan Pengawas Syariah VIII Tahun 2023 Workshop of Pre-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) of Sharia Supervisory Board VIII Year 2023	Jakarta	07 September 2023 September 07, 2023	Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia National Sharia Council - Indonesian Ulema Council
		Ijtima' Sanawi *(Annual Meeting)* Dewan Pengawas Syariah XIX Tahun 2023 Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) of the Sharia Supervisory Board XIX Year 2023	Jakarta	13-14 Oktober 2023 October 13-14, 2023	Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia National Sharia Council - Indonesian Ulema Council
		Webinar Eksekutif Nasional "Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah" National Executive Webinar "Accounting for Zakat, Infaq, and Sadaqah"	Jakarta	05 Desember 2023 December 05, 2023	Iqtishad Consulting Indonesia
2	Dr. Ir. H.M. Nadratuzzaman Hosen	Peserta International Conference on Religion, Peace, and Civilization (ICRPC) Participants for International Conference on Religion, Peace, and Civilization (ICRPC)	Jakarta	21-23 Mei 2023 Mei 21-23, 2023	Majelis Ulama Indonesia dan Moeslim World League
		Seminar Nasional Era Baru Industri Pembiayaan National Seminar on New Era of Financing Industry	Jakarta	06 Juni 2023 June 06, 2023	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Indonesian Finance Company Association
		Workshop Pra-Ijtima' Sanawi *(Annual Meeting)* Dewan Pengawas Syariah VIII Tahun 2023 Workshop of Pre-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) of Sharia Supervisory Board VIII Year 2023	Jakarta	07 September 2023 September 07, 2023	Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia National Sharia Council – Indonesian Ulema Council
		Ijtima' Sanawi *(Annual Meeting)* Dewan Pengawas Syariah XIX Tahun 2023 Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) of the Sharia Supervisory Board XIX Year 2023	Jakarta	13-14 Oktober 2023 October 13-14, 2023	Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia National Sharia Council - Indonesian Ulema Council

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

No	Nama Name	Pelatihan/Workshop/Seminar Training/Workshops/Seminars	Tempat Location	Tanggal* Date*	Penyelenggara Organizer
3	H. Muh. Taufik Darmansyah, SE, CPA	Seminar Transformasi dan Pemanfaatan Teknologi Digital bagi BPRS di Indonesia Seminar on Transformation and Utilization of Digital Technology for BPRS in Indonesia	Jakarta	29 Mei 2023 May 29, 2023	Hijrah Bank
		Seminar Pemberdayaan Credit Scoring dan AI Technology untuk Perluasan Produk dan layanan perbankan guna mewujudkan pembiayaan berkelanjutan BPR dan BPRS Seminar on Empowerment of Credit Scoring and AI Technology for Expansion of Banking Products and Services to Realize Sustainable Financing of BPR and BPRS	Jakarta	24 Mei 2023 May 24, 2023	PT. Credit Biro Indonesia Jaya (CBI)
		Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah VIII Tahun 2023 Workshop of Pre-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) of Sharia Supervisory Board VIII Year 2023	Jakarta	07 September 2023 September 07, 2023	Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia National Sharia Council - Indonesian Ulema Council

*) Mengacu pada tanggal sertifikat atau tanggal penyelenggaraan pelatihan/workshop/seminar
*) Refers to the date of the certificate or the date of the training/workshop/seminar

b. Sertifikasi
Certification

Nama Name	Sertifikasi Certification	Tempat Location	Tanggal Diterbitkan Date published	Masa Berlaku Validity Period	Penyelenggara Organizer
Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen.	Sertifikat Kompetensi – Instruktur Penyelia Certificate of Competency – Supervisory Instructor	Jakarta	7 Agustus 2023 August 7, 2023	3 (tiga) Tahun 3 (three) Years	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator, Instruktur dan Tenaga Kepelatihan National Professional Certification Agency (BNSP) Professional Certification Facilitators, Instructors and Coaching Personnel

Direksi
Board Of Directors

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

The Board of Directors is an organ of the Company that is authorized and fully responsible for the management of the Company for the benefit of the Company, in accordance with the aims and objectives of the Company and represents the Company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya dengan tujuan mencapai efektivitas pelaksanaan pekerjaannya.

Each member of the Board of Directors carries out duties in accordance with the distribution of duties and authorities with the aim of achieving the effectiveness of the implementation of their work.

Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan dan penunjukan Direksi Perseroan mengacu pada beberapa ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan perubahannya sebagaimana tercantum pada POJK No. 29/POJK.05/2020.
4. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
5. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
6. Anggaran Dasar Perseroan.
7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 93 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Legal References

The legal references for the formation and appointment of the Company's Board of Directors refer to several provisions, including:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.
3. POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies and its amendments as contained in POJK No. 29/POJK.05/2020.
4. POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Company.
5. POJK No. 27/POJK.03/2016 concerning the Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services Institutions.
6. Articles of Association of the Company.
7. Deed of Resolution of the Company's Meeting No. 93 dated March 30, 2023 made before Aulia Taufani, S.H., Notary in the Administrative City of South Jakarta.

Susunan dan Komposisi Direksi

Susunan dan komposisi anggota Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu:

Structure and Composition of the Board of Directors

The composition as well as structure of the Company's Board of Directors has fulfilled the prevailing provisions as follows:

Direksi
Board Of Directors

No.	POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan perubahannya sebagaimana tercantum pada POJK No. 29/POJK.05/2020 POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies and its amendments as contained in POJK No. 29/POJK.05/2020	Implementasi di Perseroan Implementation in the Company
1	Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi. Companies with assets more than Rp200,000,000,000 (two hundred billion rupiahs) are required to have at least 3 (three) members of the Board of Directors.	Perseroan memiliki 5 (lima) anggota Direksi. The Company has 5 (five) members of the Board of Directors.
2	Perusahaan yang di dalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung wajib memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia. Companies with direct or indirect foreign ownership must have at least 50% (fifty percent) of the Board of Directors members with Indonesian citizens.	Dalam kepemilikan saham Perseroan terdapat kepemilikan asing secara tidak langsung, sehingga Perseroan telah memenuhi ketentuan yaitu memiliki anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia lebih dari 50% (lima puluh persen). In the Company's shares ownership has indirect foreign ownership. Thus, the Company has complied with the provisions of having more than 50% (fifty percent) members of the Board of Directors with Indonesian citizenship.
3	Anggota Direksi wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. The Board of Directors members must be domiciled in the territory of the Republic of Indonesia.	Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. All members of the Board of Directors are domiciled in the territory of the Republic of Indonesia.
4	Seluruh anggota Direksi Perusahaan harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya. All members of the Company's Board of Directors must have relevant knowledge to their position.	Seluruh anggota Direksi Perseroan memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya, yang dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan mengenai profil masing-masing anggota Direksi. All members of the Company's Board of Directors have knowledge relevant to their positions, as presented in the Company Profile Chapter on the profile of each member of the Board of Directors.

No	POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Company	Implementasi di Perseroan Implementation in the Company
1	Direksi paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. The Board of Directors consists of at least 2 (two) members of the Board of Directors.	Perseroan memiliki 5 (lima) orang anggota Direksi. The Company has 5 (five) members of the Board of Directors.
2	1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur. 1 (one) member of the Board of Directors is appointed as the president director	Perseroan memiliki 1 (satu) Presiden Direktur. The Company has 1 (one) President Director.

3	Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. Proposals for the appointment, dismissal and/or replacement of members of the Board of Directors to the GMS must take into account the recommendations of the Board of Commissioners or the committee that carries out the nomination function.	Pengangkatan anggota Direksi Perseroan telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta memperoleh persetujuan dari RUPS. The appointment of the Company's Board of Directors members has taken into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company and obtained approval from the GMS.

Merujuk pada ketentuan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan maka calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya. Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsi sesuai jabatannya.

Pursuant to POJK No. 27/POJK.03/2016 concerning the Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services Institutions, the candidate of Board of Directors members must obtain approval from the OJK prior to conduct their actions, duties and functions. All members of the Company's Board of Directors have obtained approval from the OJK by passed the fit and proper test from the OJK prior to carrying out their duties and functions.

Susunan Anggota Direksi Perseroan yang Efektif Menjabat Per 31 Desember 2023 [GRI 2-11]
Composition of Members of the Company's Board of Directors Effective as of December 31, 2023 [GRI 2-11]

Jabatan Position	Nama Name	Periode Jabatan Term of Office
Presiden Direktur President Director	Djaja Suryanto Sutandar	RUPS Tahunan Tahun 2023 – RUPS Tahunan Tahun 2026 Annual GMS 2023 – Annual GMS 2026
Direktur Director	Cincin Lisa Hadi	RUPS Tahunan Tahun 2023 – RUPS Tahunan Tahun 2026 Annual GMS 2023 – Annual GMS 2026
Direktur Director	Anthony Yuarez Panggabean	RUPS Tahunan Tahun 2023 – RUPS Tahunan Tahun 2026 Annual GMS 2023 – Annual GMS 2026
Direktur Director	Njauw Vido Onadi	RUPS Tahunan Tahun 2023 – RUPS Tahunan Tahun 2026 Annual GMS 2023 – Annual GMS 2026
Direktur Director	Wibowo	RUPS Tahunan Tahun 2023 – RUPS Tahunan Tahun 2026 Annual GMS 2023 – Annual GMS 2026

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan seluruh anggota Direksi yang efektif menjabat saat ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2026, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Term of Office of the Board of Directors

The term of office of all members of the Board of Directors who are currently effective will end at the closing of the Annual GMS in 2026, without prejudice to the authority of the GMS to dismiss one or more members of the Board of Directors at any time before their term of office ends. The Company's Articles of Association state that members of the Board of Directors whose term of office has expired may be reappointed.

Direksi
Board Of Directors

Rangkap Jabatan Direksi

1. Sepanjang tahun 2023, Perseroan telah memastikan anggota Direksi memperhatikan dan tunduk pada ketentuan terkait rangkap jabatan Direksi sesuai dengan POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan perubahannya sebagaimana tercantum pada POJK No. 29/POJK.05/2020, dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
2. Seluruh anggota Direksi Perseroan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris pada perusahaan dan/atau lembaga lain.
3. Seluruh anggota Direksi Perseroan tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota komite pada lebih dari 5 (lima) komite di lembaga/perusahaan dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. Informasi mengenai rangkap jabatan anggota Direksi sebagai anggota komite sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan mengenai profil masing-masing anggota Direksi.

Concurrent Positions of the Board of Directors

1. In 2023, the Company has ensured that members of the Board of Directors pay attention to and comply with the provisions related to the concurrent positions of the Board of Directors in accordance with POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies and its amendments as contained in POJK No. 29/POJK.05/2020, and POJK No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Company.
2. All members of the Board of Directors of the Company do not concurrently serve as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners in other company and/or institutions.
3. All members of the Board of Directors do not hold concurrent positions as committee members on more than 5 (five) committees in the institution/company where the person concerned also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners. Information regarding the concurrent positions of members of the Board of Directors as committee members in 2023 is presented in Company Profile Chapter on the profile of each member of the Board of Directors.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Perseroan telah memiliki Piagam Direksi yang ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 24 Oktober 2022 yang disusun untuk menjadi pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat bagi setiap anggota Direksi Perseroan agar anggota Direksi dapat menjalankan tugasnya secara transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

Untuk memastikan Piagam Direksi tetap relevan bagi setiap anggota Direksi Perseroan, Piagam Direksi akan diperbaharui dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik.

Board of Directors Charter

The Company has a Board of Directors Charter stipulated by the Board of Directors on October 24, 2022 which is structured to become a binding work guideline and code of conduct for each member of the Company's Board of Directors so that members of the Board of Directors can carry out their duties in a transparent, effective, efficient and responsible manner.

To ensure the relevancy of the Board of Directors Charter for each member of the Company's Board of Directors, the Board of Directors Charter will be updated from time to time following the development of laws and regulations and best practices.

Piagam Direksi terakhir diperbaharui pada tanggal 24 Oktober 2022 dan dapat diakses oleh publik melalui *website* Perseroan: www.wom.co.id. Secara umum, Piagam Direksi mengatur tentang:

1. Landasan Hukum Piagam.
2. Struktur dan Komposisi Direksi.
3. Batasan Rangkap Jabatan Anggota Direksi.
4. Pengangkatan Anggota Direksi.
5. Masa Jabatan Anggota Direksi.
6. Pengunduran Diri Anggota Direksi dan Pemberhentian Sementara Anggota Direksi.
7. Jabatan Anggota Direksi Berakhir.
8. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
9. Kewenangan Anggota Direksi.
10. Waktu Kerja.
11. Keanggotaan dalam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
12. Nilai - Nilai Dasar *(CORE VALUES)* dan Etika Kerja.
13. Transparansi Anggota Direksi.
14. Rapat Direksi.
15. Remunerasi dan Penilaian Kinerja Direksi.
16. Sertifikasi dan Syarat Berkelanjutan.
17. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung jawab Masing-Masing Anggota Direksi [GRI 2-12]

Sesuai dengan Keputusan Direksi Perseroan No. 007/V/BOD-WOM/2023 tentang Penetapan Pembagian Tugas dan Wewenang Para Anggota Direksi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk untuk Tahun Buku 2023 tertanggal 31 Mei 2023, maka ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

The Board of Directors Charter was last updated on October 24, 2022. It is accessible for the public through the Company's website: www.wom.co.id. In general, the Bord of Directors Charter regulates:

1. Legal Basis of the Charter.
2. Bord of Directors Structure and Composition.
3. Limitation of Multiple Positions for Bord of Directors Members.
4. Appointment of Bord of Directors Members.
5. Term of Office of Bord of Directors Members.
6. Resignation of Bord of Directors Members and Temporary Suspension of BOD Members.
7. End of Tenure of Bord of Directors Members.
8. Bord of Directors Duties and Responsibilities.
9. Bord of Directors Authority.
10. Working Time.
11. Membership in the Risk Management Committee.
12. Core Values and Work Ethics.
13. Transparency of Bord of Directors Members.
14. Bord of Directors Meetings.
15. Remuneration and Bord of Directors Performance Assessment.
16. Certification and Sustainability Requirements.
17. Reporting and Accountability.

Scope of Work and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors [GRI 2-12]

Pursuant to the Decree of the Company's Board of Directors No. 007/V/BOD-WOM/2023 on the Determination of the Division of Duties and Authorities of Members of the Board of Directors of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk for the 2023 Financial Year dated May 31, 2023 the scope of work and responsibilities of each member of the Board of Directors is in accordance with the following duties and responsibilities:

Direksi
Board Of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas dan Tanggungjawab Duties and Responsibilities
Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur President Director	1. Memimpin dan mengelola Perseroan termasuk memberikan arahan strategis dalam hal kebijakan dan strategi di lingkup pengembangan bisnis, manajemen risiko, operasional, keuangan dan sumber daya manusia, agar sesuai dengan tujuan Perseroan. 2. Memantau dan memastikan seluruh kegiatan pengembangan bisnis Perseroan berjalan sesuai target yang ditetapkan secara volume dan *market share* sehingga menunjang keuntungan Perseroan. 3. Memantau dan memastikan seluruh kegiatan manajemen risiko Perseroan berjalan dengan baik sehingga tercapai kualitas portofolio yang sehat. 4. Memantau dan memastikan kegiatan operasional berjalan secara efektif, efisien dengan mengedepankan kualitas, *service excellence* serta berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance*. 5. Memantau dan memastikan seluruh kegiatan pengelolaan sumber daya manusia berjalan efektif dan efisien dan fokus pada pemberdayaan, kualitas, produktivitas dan pengembangan karyawan yang dapat menunjang pencapaian tujuan Perseroan. 6. Memantau dan memastikan seluruh kegiatan pengelolaan fungsi bisnis di regional dan cabang sesuai dalam upaya menunjang pencapaian tujuan dan target Perseroan berupa ENR dan profit, pemantauan strategi perbaikan kinerja dari setiap kantor jaringan Perseroan dengan tetap berpedoman pada segala peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perusahaan Perseroan serta sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*. 7. Menetapkan dan memantau penerapan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai sasaran, strategi bisnis, Anggaran Dasar, aturan internal Perseroan lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Memantau dan memastikan kegiatan *Anti-Fraud* untuk memastikan ketaatan terhadap aktivitas kritikal yang dijalankan oleh masing-masing unit kerja di dalam Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Memantau dan memastikan kegiatan fungsi Legal *counsel* yang dijalankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka meminimalisasi risiko kepatuhan, risiko reputasi maupun risiko hukum yang mungkin timbul. 10. Mengawasi secara aktif penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Perseroan. 11. Mengevaluasi terhadap kinerja seluruh fungsi yang ada di Perseroan. 12. Mengawasi dan membawahi anggota Direksi Perseroan lainnya. 13. Mengawasi dan membawahi Non-Directorate yang ada di Perseroan. 14. Melakukan tugas dan wewenang Direksi lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan internal Perseroan yang berlaku bagi Direksi Perseroan. 1. To lead and manage the Company including providing strategic directives in terms of policies and strategies in business development, risk management, operations, finance and human resources, in order to be in line with the Company's objectives. 2. To monitor and ensure all of the Company's business development activities are performing as the set target in terms of volume and market share thereby supporting the Company's profitability. 3. To monitor and ensure all of the Company's risk management activities are performing well thereby accomplishing health portfolio quality. 4. To monitor and ensure effective and efficient operations activities, by emphasizing on quality, service excellence and guided by Good Corporate Governance principles

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas dan Tanggungjawab Duties and Responsibilities
		5. To monitor and ensure effective and efficient performance of human resources management activities and focusing on employees' empowerment, quality, productivity and development that can support the achievement of the Company's objectives. 6. To monitor and ensure all business function management activities in regional and branches are appropriate in an effort to support the achievement of company goals and targets in the form of ENR and profit, monitoring the performance improvement strategies of each company network office while still guided by all laws and regulations, the company's articles of association and regulations Company and in accordance with the principles of Good Corporate Governance. 7. Establish and monitor the implementation of effective and efficient internal controls to provide adequate assurance that business activities are carried out in accordance with the objectives, business strategy, Articles of Association, other internal rules of the Company, and prevailing laws and regulations. 8. Monitor and ensure anti-fraud activities to ensure compliance with critical activities carried out by each work unit within the Company were in accordance with applicable laws and regulations. 9. Monitor and ensure that the activities of the legal counsel are carried out by prioritizing prudential principles and in accordance with applicable laws and regulations in order to minimize compliance risk, reputation risk or legal risk that may arise. 10. Actively supervise the implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding programs in the Company. 11. Evaluating the performance of all functions in the Company. 12. Oversee and supervise other members of the Company's Directors. 13. Oversee and supervise the Non-Directorate in the Company. 14. Performing other duties and authorities of the Directors determined by the Company's Articles of Association and internal regulations that apply to the Directors of the Company.
Wibowo	Direktur Director	1. Mengawasi dan membawahi Marketing Directorate yang ada di Perseroan. 2. Merencanakan dan menyusun *Marketing Strategic Plan* termasuk di dalamnya merencanakan *budget* operasional direktorat di bawahnya, serta mengkomunikasikannya kepada seluruh jajaran *executive management*. 3. Bertanggung jawab atas pencapaian target *marketing* secara nasional. 4. Memantau dan memastikan seluruh kegiatan pengembangan bisnis Perseroan dan implementasi kebijakan *marketing* yang diterapkan di Perseroan berjalan sesuai yang ditetapkan Perseroan. 5. Membuka dan menjalin relasi kerja sama dengan *brand* utama di bisnis sepeda motor dalam rangka memperoleh *market share* dan portofolio yang baik. 6. Mengembangkan strategi bisnis *Non Dealer Sales* dan memastikan implementasi strategi tersebut berjalan sesuai target yang ditetapkan Perseroan. 7. Memantau dan memastikan strategi dan pengembangan fungsi Unit Usaha Syariah dalam memperluas jaringan baru, relasi dengan *dealer*, dan pencapaian target *sales* dan *profit* Perseroan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. 8. Mengevaluasi implementasi kebijakan, strategi *marketing* berikut kinerja seluruh fungsi yang berada di Marketing Directorate secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan target penjualan dan kualitas pembiayaan yang baik serta memperkuat *image* Perseroan di mata *stakeholders*, *dealer* dan konsumen Perseroan. 9. Melakukan tugas dan wewenang Direksi lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan internal Perseroan yang berlaku bagi Direksi Perseroan.

Direksi
Board Of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas dan Tanggungjawab Duties and Responsibilities
		10. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden Direktur Perseroan. 1. To oversight and supervise the Marketing Directorate in the Company. 2. To plan and compile a Marketing Strategic Plan, including planning for operational budget for respective Directorate and communicating it to all levels of executive management. 3. To be responsible for achieving national marketing targets. 4. To monitor and ensure that all of the Company's business development activities and the implementation of marketing policies implemented in the Company are running as determined by the Company. 5. To open and establish cooperative relationships with major brands in the motorcycle business to obtain a good market share and portfolio. 6. To develop a Non-Dealer Sales business strategy and ensuring that the strategy is implemented according to the targets set by the Company. 7. Monitor and ensure the strategy and development of the Sharia Business Unit function in expanding new networks, relationships with dealers, and achieving the Company's sales and profit targets by guided to the laws and regulations and the Company's Articles of Association. 8. To evaluate the implementation of policies, marketing strategies and the performance of all functions within the Marketing Directorate on an ongoing basis in order to increase sales targets and good quality of financing as well as strengthen the Company's image in the eyes of the Company's stakeholders, dealers and consumers. 9. To perform other duties and powers of the Board of Directors as stipulated by the Articles of Association and the Company's internal regulations that apply to the Board of Directors of the Company. 10. In carrying out his duties, he is responsible to the President Director of the Company.
Cincin Lisa Hadi	Direktur Director	1. Mengawasi dan membawahi Finance Directorate yang ada di Perseroan. 2. Merencanakan dan menyusun *Corporate Financial Strategic Plan* termasuk di dalamnya merencanakan biaya operasional Direktorat dibawahnya, serta mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran *executive management*. 3. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan keuangan Perseroan serta memantau dan memastikan pengelolaan keuangan Perseroan sesuai dengan peraturan internal Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan prosedur serta standar akuntansi keuangan di Indonesia. 4. Membuka dan menjalin hubungan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka mendapatkan investor yang tepat bagi Perseroan. 5. Bertanggung jawab atas pengelolaan analisa laporan portfolio *finance* dan *project* pengembangan *finance* guna penyelarasan strategi kerja Finance Directorate. 6. Memantau aktivitas pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak dan laporan penutupan asuransi agar sesuai dengan peraturan internal Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Memantau pelaksanaan fungsi Corporate Service & Communication di Perseroan dalam rangka menjaga dan memperkuat *image* Perseroan di mata publik. 8. Mengevaluasi implementasi kebijakan, strategi pengelolaan keuangan berikut kinerja seluruh fungsi yang berada di Finance Directorate secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kapabilitas keuangan Perseroan. 9. Melakukan tugas dan wewenang Direksi lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan internal Perseroan yang berlaku bagi Direksi Perseroan. 10. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden Direktur Perseroan.

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas dan Tanggungjawab Duties and Responsibilities
		1. To supervise and in charge of the Company's Finance Directorate. 2. To plan and develop the Corporate Financial Strategic Plan including its operations budget planning for the Directorates under its delegation, as well as communicating it to all executive managements. 3. Responsible on all the Company's financial management as well as to monitor and ensure that the Company's financial management is in accordance with the Company's internal rules and prevailing regulatories, policies and procedures as well as standard of financial accounting in Indonesia. 4. To open and maintain cooperation relations with other parties to obtain appropriate investors for the Company. 5. Responsible for managing the analysis of the Finance portfolio report and Finance development projects to align with Finance Directorate strategy. 6. To monitor the reporting activities and taxes mandatory payments including insurance closing reports to be aligned with the Company's internal rules and prevailing regulatories. 7. To monitor the corporate service & communication function implementation in the Company to maintain and strengthen the Company's image to the public. 8. To evaluate the sustainable implementation of policies, financial management strategies including the performance of all functions under the Finance Directorate in order to improve the Company financial capabilities. 9. To perform other duties and authorities of the Board of Directors as set out in the Articles of Association and internal rules of the Company that is applicable for the Company's Board of Directors. 10. To be responsible to the Company's President Director in implementing its duties.
Anthony Yuarez Panggabean	Direktur Director	1. Mengawasi dan membawahi Operations Directorate yang ada di Perseroan. 2. Merencanakan dan menyusun *Operation Strategic Plan* termasuk di dalamnya merencanakan *budget* operasional Operations Directorate, serta mengkomunikasikannya kepada seluruh jajaran *executive management*. 3. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan kegiatan operasional yang meliputi pada penyusunan dan penetapan *policy* dan *procedure* yang berlaku pada internal Perseroan, penyelenggaraan fungsi Service, Telecenter dan Information Technology (IT) Perseroan. 4. Mengarahkan dan memantau pengelolaan layanan kepada konsumen serta *telecenter* secara nasional dalam rangka menjaga *brand image* Perseroan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan loyalitas konsumen terhadap Perseroan. 5. Memastikan tersedianya dukungan sistem/prosedur kerja berbasis IT di setiap proses kerja yang ada di Perseroan termasuk mengarahkan dan memastikan keamanan perangkat IT untuk mencapai stabilitas dan keamanan sistem IT yang optimum. 6. Mengevaluasi implementasi kebijakan internal terkait operasional, strategi operasional dan IT berikut kinerja seluruh fungsi yang berada di Operations Directorate secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan proses operasional yang cepat, efektif dan efisien. 7. Melakukan tugas dan wewenang Direksi lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan internal Perseroan yang berlaku bagi Direksi Perseroan. 8. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden Direktur Perseroan. 1. To supervise and in charge of the Company's Operation Directorate. 2. To plan and develop the Operations Strategic Plan including its operations budget planning of the Operations Directorate, as well as communicating it to all executive managements.

Direksi
Board Of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas dan Tanggungjawab Duties and Responsibilities
		3. To be responsible on all the operations activities management including the development and stipulation of policies and procedures applicable in the Company's internal, implementation of service, telecenter and Information Technology (IT) of the Company. 4. To direct and monitor service management to consumers as well as contact centers nationally in an effort to maintain the Company's brand image that aim to improve sales and customers' loyalty to the Company. 5. To ensure the availability of system support or work procedures of IT-based in every work process in the Company, including to direct and ensure the safety of IT tools for the achievement of optimum IT system stability and safety. 6. To evaluate the sustainable implementation of internal policies on operations, operations and IT strategy including the performance of all functions under the Operations Directorate for the improvement of fast, effective and efficient operations process. 7. To perform other duties and authorities of the Board of Directors as set out in the Articles of Association and internal rules of the Company that is applicable for the Company's Board of Directors. 8. To be responsible to the Company's President Director in implementing its duties.
Njauw Vido Onadi	Direktur Director	1. Mengawasi dan membawahi Risk Management Directorate yang ada di Perseroan. 2. Merencanakan dan menyusun *Risk Management Strategic Plan* termasuk di dalamnya merencanakan *budget* operasional Risk Management Directorate, serta mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran *executive management*. 3. Memantau dan memastikan fungsi manajemen risiko di Perseroan berjalan efektif. 4. Mengarahkan dan memantau aktivitas *initiation credit* agar berjalan efektif dalam rangka mendorong pertumbuhan bisnis Perseroan dengan kualitas portofolio yang baik. 5. Mengarahkan dan memantau aktivitas penagihan dan pengelolaan aset unit kendaraan tarikan termasuk pengembangan sistemnya agar berjalan efektif dan dapat meminimalkan tingkat *Non-Performing Loan*. 6. Mengarahkan dan memantau aktivitas *project management* Perseroan agar seluruh proyek yang ditetapkan berjalan efektif dan mencapai sasaran dan waktu yang ditetapkan. 7. Melakukan evaluasi implementasi kebijakan, strategi manajemen risiko berikut kinerja seluruh fungsi yang berada di Risk Management Directorate secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas portofolio yang sehat. 8. Melakukan tugas dan wewenang Direksi lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan internal Perseroan yang berlaku bagi Direksi Perseroan. 9. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden Direktur Perseroan. 1. To supervise and in charge of the Company's Risk Management Directorate. 2. To plan and develop the Risk Management Strategic Plan including the planning of operations budget of Risk Management Directorate, as well as to inform to all executive management. 3. To monitor and ensure effective implementation of risk management function in the Company. 4. To direct and monitor effective credit initiation activities for the improvement of the Company's business growth with good portfolio quality. 5. To direct and monitor effective billing activities and asset management of impounded vehicles unit including its system development in order to minimize the Non-Performing Loan levels.

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas dan Tanggungjawab Duties and Responsibilities
		6. To direct and monitor the Company project management activities for effective project performance and to achieve the targets as well as the set timing. 7. To evaluate the implementation of policies, risk management strategies, including the performance of all functions under the Risk Management Directorate sustainably to improve the quality of healthy portfolio. 8. To perform other duties and authorities of the Board of Directors as set out in the Articles of Association and internal rules of the Company that is applicable for the Company's Board of Directors. 9. To be responsible to the Company's President Director in implementing its duties.

Independensi Direksi

1. Seluruh anggota Direksi Perseroan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik hubungan horizontal maupun vertikal (termasuk mertua, menantu dan ipar) dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan/atau pemegang saham utama Perseroan atau grup usaha Perseroan. Dengan demikian seluruh anggota Direksi adalah independen.

2. Direksi juga senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi dan mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan sendiri, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi tercermin dari pernyataan masing-masing anggota Direksi mengenai hal-hal di bawah ini:
   a. Tidak pernah memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
   b. Tidak pernah mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.
   c. Tidak pernah menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak kerja yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan dan biaya, serta konsultan merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

Board of Directors Independence

1. All members of the Company's Board of Directors do not have financial relationships, family relationships up to the second degree, both horizontal and vertical relationships (including in-laws, sons-in-law and in-laws) with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board (DPS) and/or major shareholder of the Company or the Company's business group. Thus, all members of the Board of Directors are independent.
2. The Board of Directors also always upholds independency and prioritizes the interests of the Company above their own interests and the Board of Directors works and conducts with high integrity as reflected in the statements of each member of the Board of Directors regarding the following matters:
   a. Never uses the Company for personal, family and/or other party interests that may harm or reduce the Company's profits.
   b. Never takes and/or receives personal benefits from the Company other than remuneration and other facilities determined by the GMS.
   c. Never uses individual advisors and/or professional services as consultants except for projects of a specific nature, based on a clear work contract covering the scope of work, responsibilities, period of work and costs and the consultant is an independent party with qualifications to work on special projects.

Direksi
Board Of Directors

Keberagaman Anggota Direksi [GRI 2-17]
Penentuan komposisi anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya selaku anggota Direksi. Komposisi anggota Direksi Perseroan telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia yang dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan mengenai profil masing-masing anggota Direksi.

Kriteria Anggota Direksi [GRI 2-10]
Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan:
1. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, yang mensyaratkan anggota Direksi harus:
   a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
   b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
   c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
      - Tidak pernah dinyatakan pailit;
      - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
      - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
      - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
        i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
        ii. Pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan

Board of Directors Diversity [GRI 2-17]
The determination of the composition of the Board of Directors members is carried out by taking into account the diversity of expertise, knowledge and experience required to support the implementation of their duties as the Board of Directors members. The composition of the Company's Board of Directors members has reflected the diversity of its members, both in terms of education, work experience and age. It is presented in Company Profile Chapter regarding profile of each member of the Board of Directors.

Board of Directors Members Criteria [GRI 2-10]
Those who can be appointed as the Board of Directors members are individuals who meet the criteria and requirements in accordance with:
1. POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, which requires that members of the Board of Directors must:
   a. Have good character, morals and integrity.
   b. Have capability to do legal actions.
   c. In the 5 (five) years prior to appointment and during his tenure:
      - Never declared bankrupt;
      - Have never been a member of a Board of Directors and/or a Board of Commissioners who found guilty of causing a company to go bankrupt;
      - Have never been convicted of a criminal offense that is detrimental to the country's finances and/or related to the financial sector; and
      - Never been a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners who during his tenure:
        i. Fail to convene an Annual GMS;
        ii. Accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or fail to provide

pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

2. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang mensyaratkan untuk anggota Direksi memperoleh persetujuan dari OJK dengan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK maka harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan:
   a. Persyaratan integritas meliputi:
      i. Cakap melakukan perbuatan hukum.
      ii. Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan.
      iii. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK.
      iv. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Lembaga Jasa Keuangan yang sehat.
      v. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

   b. Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
      i. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
      ii. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham,

accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS; and

iii. Has caused companies that obtained permits, approvals, or registrations from OJK to not fulfil the obligation to submit annual reports and/or financial reports to OJK.

d. Have a commitment to comply with the laws and regulations.
e. Having knowledge and/or expertise in the fields required by the Company.

2. POJK No. 27/POJK.03/2016 concerning the Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services Institutions which requires member of Board of Directors to obtain approval from the OJK by passing the fit and proper test from the OJK must meet the fit and proper test requirements:
   a. Integrity requirements include:
      i. Competent in legal actions.
      ii. Having good character and morals, at least shown by the attitude of complying with applicable regulations, including never having been convicted of a crime in a certain period before being nominated
      iii. Have a commitment to comply with laws and regulations and support the Financial Services Authority policy.
      iv. Have a commitment to the development of health Financial Services Institutions
      v. Not included as a party that is prohibited from being a Main Party.

   b. Financial reputation requirements, at least evidenced by:
      i. Does not have bad credit and/or financing.
      ii. Have never been declared bankrupt and/or never been a shareholder, controlling

Direksi
Board Of Directors

pengendali perusahaan perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

c. Persyaratan kelayakan keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
   i. Memiliki reputasi keuangan sebagaimana telah dijabarkan pada persyaratan reputasi keuangan di atas.
   ii. Memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Lembaga Jasa keuangan.
   iii. Memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Lembaga Jasa Keuangan menghadapi kesulitan keuangan.
d. Persyaratan kompetensi, paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan Lembaga Jasa Keuangan dimana dicalonkan.

3. Memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.

Hubungan Afiliasi antara Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali

Direksi Perseroan senantiasa menjaga independensi dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

Pengungkapan hubungan afiliasi per 31 Desember 2023

1. Seluruh anggota Direksi Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan

insurance company that is not a shareholder, member of the Board of Directors, or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt within the last 5 (five) years before being nominated.

c. Financial eligibility requirements, at least evidenced by:
   i. Having a financial reputation as described in the above financial reputation requirements.
   ii. Having financial capability that can support the business development of financial service institutions.
   iii. Having the financial capacity to make the necessary efforts if the Financial Services Institution faces financial difficulties.
d. Competency requirements, including at least knowledge and/or experience that support the management of the Financial Services Institution where it is nominated.

3. Meet the requirements as a member of the Board of Directors based on the Company's Articles of Association.

Affiliation Relations between Members of the Board of Directors and Other Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Major Shareholders and Controlling Shareholders

The Company's Board of Directors always maintains independence and avoids conflicts of interest that may interfere with its ability to carry out duties professionally and objectively.

Disclosure of affiliate relationships as of December 31, 2023

1. All members of the Board of Directors do not have an affiliation in the form of financial relations either with other members of the Board of Directors, members

Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan;

2. Seluruh anggota Direksi Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan;
Sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

of the Board of Commissioners, or with the Major Shareholders and Controlling Shareholders of the Company;

2. All members of the Board of Directors do not have an affiliation in the form of family relationships either with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with the Main Shareholders and Controlling Shareholders of the Company;
As illustrated in the following table:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Hubungan Keuangan Dengan:** Financial Relationship With:						**Hubungan Keluarga Dengan:** Family Relationships With:					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors		**Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali*** Major Shareholders and Controlling Shareholders*		**Dewan Komisaris** Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors		**Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali*** Major Shareholders and Controlling Shareholders*	
		Ya | Yes	**Tidak** | No	**Ya** | Yes	**Tidak** | No	**Ya** | Yes	**Tidak** | No	**Ya** | Yes	**Tidak** | No	**Ya** | Yes	**Tidak** | No	**Ya** | Yes	**Tidak** | No
Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur President Director		√		√		√		√		√		√
Cincin Lisa Hadi	Direktur Director		√		√		√		√		√		√
Anthony Yuarez Panggabean	Direktur Director		√		√		√		√		√		√
Njauw Vido Onadi	Direktur Director		√		√		√		√		√		√
Wibowo	Direktur Director		√		√		√		√		√		√

*) Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan yakni PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan PT Wahana Makmur Sejati.
*) The Company's Major Shareholders and Controlling Shareholders are PT Bank Maybank Indonesia Tbk and PT Wahana Makmur Sejati.

Informasi mengenai hubungan afiliasi Direksi selengkapnya dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan mengenai profil masing-masing anggota Direksi.

Complete information about the affiliation relationship of the Board of Directors is presented in Company Profile Chapter on the profile of each member of the Board of Directors.

Kehadiran Direksi Dalam RUPS Selama Tahun 2023

- RUPS Tahunan Tahun 2023 dan RUPS Luar Biasa Tertanggal 30 Maret 2023
  Seluruh anggota Direksi Perseroan hadir dalam RUPS Tahunan Tahun 2023 dan RUPS Luar Biasa tertanggal 30 Maret 2023 sebagaimana detail kehadiran sebagai berikut:

Board of Directors Attendance in the GMS 2023

- Annual GMS 2023 and Extraordinary GMS dated March 30, 2023
  All members of the Company's Board of Directors attended the 2023 Annual GMS and Extraordinary GMS dated March 30, 2023 as detailed below:

Direksi
Board Of Directors

Direksi Board of Directors	Jabatan Position	Kehadiran | Attendance	
		Ya | Yes	Tidak | No
Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur | President Director	√	
Anthony Yuarez Panggabean	Direktur | Director	√	
Njauw Vido Onadi	Direktur | Director	√	
Wibowo	Direktur | Director	√	
Cincin Lisa Hadi	Direktur | Director	√	

Program Orientasi Anggota Direksi Baru

Perseroan memiliki Program Orientasi untuk anggota direksi baru. Program orientasi direksi baru Perseroan diselenggarakan oleh Sekretaris Perusahaan yang tujuannya memberikan pemahaman mengenai Perseroan meliputi:

1. Strategi Perseroan
2. Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
3. Kebijakan terkait Tata Kelola Perusahaan
4. Fasilitas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Direksi

New Board of Directors Orientation Program

The Company has an Orientation Program for new members of the Board of Directors. The orientation program for the Company's new members of the Board of Directors is organized by the Corporate Secretary to provide an understanding of the Company, including:

1. Company Strategy
2. The duties, responsibilities and authorities of the Board of Directors are based on the Articles of Association and the prevailing laws and regulations in Indonesia
3. Policies related to Corporate Governance
4. Facilities to support the implementation of the duties of the Board of Directors

Pelatihan dan Pengembangan Direksi

Pelatihan dan pengembangan anggota Direksi dapat dilihat di Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Board of Directors Training and Development

Training and development of members of the Board of Directors are presented in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS COMMITTEES' PERFORMANCE ASSESSMENT

Tata Cara Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Prosedur penilaian yang dilakukan untuk melakukan penilaian kinerja Satuan Kerja atau Komite di bawah Direksi sepanjang tahun 2023 adalah dengan melihat pencapaian fungsi dan tugas masing-masing, serta efektivitas dan efisiensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi Perseroan.

Procedures for Performance Appraisal of Committees Under the Board of Directors

The performance assessment procedures for Work Units or Committees under the Board of Directors in 2023 were carried out by considering the achievement of respective functions and duties and the effectiveness and efficiency that supports the implementation of duties and responsibilities of the Company's Board of Directors.

Dalam hal ini, Komite Manajemen Risiko berperan aktif memberikan sejumlah rekomendasi dan masukan terkait sistem dan pelaksanaan manajemen risiko untuk tata kelola perusahaan. Demikian juga Sekretaris Perusahaan telah membantu memfasilitasi komunikasi baik internal maupun eksternal Perseroan. Juga Audit Internal yang dinilai telah melakukan dengan baik evaluasi atas efektivitas tata kelola di internal Perseroan.

In this regard, the Risk Management Committee plays an active role in providing some recommendations and inputs related to the system and implementation of risk management for corporate governance. Moreover, the Corporate Secretary helps facilitating internal and external communication to the Company. Further, Internal Audit is considered to carry out a good evaluation of the effectiveness of internal governance in the Company

Prosedur dan Penilaian Kinerja Komite Manajemen Risiko

1. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja
    a. Masing-masing kriteria memiliki skor dari 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
    b. Pilih skor untuk masing-masing kriteria sesuai dengan kondisi Perseroan.

Procedures and Performance Assessment of Risk Management Committee

1. Procedure for implementing performance assessment
    a. Each criteria has a score from 1 (one) to 5 (five).
    b. Choose a score for each criterion according to the Company's conditions.

Kriteria yang Digunakan dalam Penilaian Kinerja

1. Pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko.
2. Tingkat kehadiran anggota komite manajemen risiko.
3. Pelaksanaan penyampaian laporan kerja komite manajemen risiko.
4. Pelaksanaan *Matters Arising.*
5. Dokumentasi laporan kerja komite manajemen risiko.

Performance Assessment Criteria

1. Implementation of the Risk Management Committee meeting.
2. Attendance rate of risk management committee members.
3. Implementation of the submission of the work report of the risk management committee.
4. Implementation of Matters Arising.
5. Documentation of the work report of the risk management committee.

Nilai Score	**Indikator Penilaian** Assessment Indicator
1	Sangat Buruk | Very Poor
2	Buruk | Poor
3	Cukup Baik | Sufficient
4	Baik | Good
5	Sangat Baik | Very Good

Berikut ini indikator penilaian akhir Komite Manajemen Risiko

The following are indicators for the Risk Management Committee's final assessment:

Direksi
Board Of Directors

Kriteria Criteria	Score Score					Penilaian Assessment
	1	2	3	4	5	
Pelaksanaan Rapat Komite Implementation of Committee Meetings	1 x dalam setahun 1 x in a year	2 x dalam setahun 2 x in a year	4 x dalam setahun 4 x in a year	6 x dalam setahun 6 x in a year	8 x dalam setahun 8 x in a year	5
Tingkat Kehadiran Anggota Komite Attendance Level of Committee Members	Rapat tidak dihadiri Ketua dan Wakil Ketua komite The Meetings is not attended by Chairman and Vice Chairman of Committee	Ketua dan Wakil Ketua hadir 2 x dalam setahun The Chairman and Vice Chairman attended 2 x in a year	Ketua dan Wakil Ketua hadir 4 x dalam setahun The Chairman and Vice Chairman attended 4 times in a year	Ketua dan Wakil Ketua hadir 6 x dalam setahun The Chairman and Vice Chairman attended 6 times in a year	Ketua dan Wakil Ketua hadir 8 x dalam setahun The Chairman and Vice Chairman attended 8 times in a year	5
Pelaksanaan Penyampaian Submission	Laporan kerja disampaikan tidak tepat waktu Work report is not delivered on time				Laporan kerja disampaikan tepat waktu Work report is submitted on time	5
Matters Arising	*Matters Arising* tidak dijalankan Matters Arising is not running		*Matters Arising* dijalankan sebagian Some Matters Arising are implemented		Seluruh *Matters Arising* dijalankan All Matters Arising are Implemented	5
Dokumentasi Laporan Kerja Work Report Documentation	Laporan kerja tidak terdokumentasi dengan baik Work report are not well documented				Laporan kerja terdokumentasi dengan baik Work report are well documented	5
Rata-rata skor (%) Average Score						5,0

Prosedur Penilaian Kinerja Komite Pengarah IT

Prosedur terkait Penilaian Kinerja Komite Pengarah IT adalah

a. Masing-masing kriteria memiliki skor dari 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).dengan indikator skor sebagai berikut:
   i. Nilai 1 = sangat buruk
   ii. Nilai 2 = buru
   iii. Nilai 3 = cukup baik
   iv. Nilai 4 = baik
   v. Nilai 5 = sangat baik

Performance Assessment Procedure of IT Steering Committee Committee

The procedures related to the Performance Appraisal of the IT Steering Committee are:

a. Each criterion has a score from 1 (one) to 5 (five). with the following score indicators:

   i. Value 1 = very poor
   ii. Value 2 = poor
   iii. Value 3 = sufficient
   iv. Value 4 = good
   v. Value 5 = very good

b. Pilih skor untuk masing-masing kriteria sesuai dengan kondisi Perseroan.
c. Skor akhir merupakan rata-rata dari kriteria yang dilakukan penilaian.

b. Select a score for each criterion according to the Company's conditions.
c. The final score is the average of the criteria carried out by the assessment.

Kriteria terkait Penilaian Kinerja Komite Pengarah IT adalah berdasarkan 5 point berikut

1. Pelaksanaan Rapat Komite
2. Tingkat Kehadiran Anggota Komite
3. Pelaksanaan Penyampaian
4. Matters Arising
5. Dokumentasi Laporan Kerja

The criteria related to the Performance Appraisal of the IT Steering Committee are based on the following 5 points:

1. Implementation of Committee Meetings,
2. Attendance Rate of Committee Members,
3. Implementation of Submission
4. Matters Arising
5. Documentation of Work Reports

Pihak yang melakukan penilaian adalah Direksi Perseroan.

The party conducting the assessment is the Board of Directors of the Company.

Di bawah ini adalah hasil penilaian kinerja Komite Pengarah IT untuk tahun 2023.

Below are the results of the performance appraisal of the IT Steering Committee for 2023.

Kriteria Criteria	Skor Score					Penilaian Assessment
	1	2	3	4	5	
Pelaksanaan Rapat Komite Implementation of Committee Meeting	Tidak dilaksanakan Not being implemented	1 x dalam setahun 1x in a year	2 x dalam setahun 2x in a year	3 x dalam setahun 3 x in a year	>= 4 x dalam setahun >= 4 x in a year	**5**
Tingkat Kehadiran Anggota Komite Attendance Level of Committee Members	Rapat tidak dihadiri Ketua The meeting is not attended by Chairman of Committee	Ketua hadir 1 x dalam setahun The Chairman attends 1 time a year	Ketua hadir 2 x dalam setahun The Chairman attends 2 times a year	Ketua hadir 3 x dalam setahun The Chairman attends 3 times a year	Ketua hadir >= 4 x dalam setahun The Chairman attends >= 4 times a year	**5**
Pelaksanaan Penyampaian Submission	Laporan kerja disampaikan tidak tepat waktu Work report is not delivered on time				Laporan kerja disampaikan tepat waktu Work report is submitted on time	**5**
Matters Arising	Matters Arising tidak dijalankan Matters Arising is not running		Matters Arising dialankan sebagian Some Matters Arising are implemented		Seluruh Matters Arising dijalankan All Matters Arising are implemented	**5**

Direksi
Board Of Directors

Kriteria Criteria	Skor Score					Penilaian Assessment
	1	2	3	4	5	
Dokumentasi Laporan Kerja Work Report Documentation	Laporan kerja tidak terdokumentasi dengan baik Work reports are not well documented				Laporan kerja terdokumentasi dengan baik Work reports are well documented	5
Rata-rata Skor Average Score						**5.0**

Penilaian Kinerja Sekretaris Perusahaan

Prosedur dan Penilaian kinerja yang dilakukan untuk Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Direksi berdasarkan pencapaian kinerja Sekretaris Perusahaan sepanjang 2023. Direksi berpandangan Sekretaris Perusahaan telah dengan baik membantu memfasilitasi komunikasi baik internal maupun eksternal Perseroan.

Corporate Secretary Performance Assessment

Procedures and performance assessment for the Corporate Secretary are carried out by the Board of Directors based on the performance achievements of the Corporate Secretary throughout 2023. The Board of Directors views that the Corporate Secretary has helped facilitating internal and external communication to the Company.

Prosedur dan Penilaian Kinerja Audit Internal

Prosedur dan penilaian kinerja audit internal pada tahun 2023 dilakukan melalui *skoring*. Audit Internal telah melaksanakan kegiatan *assurance* terhadap unit bisnis Perseroan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) kali pemeriksaan sebagai berikut:

Internal Audit Performance Assessment

Internal audit performance assessment and procedures for 2023 are carried out through scoring. Internal Audit has carried out assurance activities for the Company's business units through 129 (one hundred twenty nine) examinations consisting of:

No	Kategori Category	Jumlah Pemeriksaan Number of Inspections
1	Pemeriksaan Cabang | Branch Inspection	79 kali | times
2	Pemeriksaan Gudang | Warehouse Inspection	24 kali | times
3	Pemeriksaan Khazanah | Treasury Inspection	7 kali | times
4	Pemeriksaan Kantor Pusat | Head Office Inspection	11 kali | times
5	Pemeriksaan Teknologi Informasi | Information Technology Inspection	6 kali | times
6	Pemeriksaan Audit Khusus | Special Audit Inspection	2 kali | times

Berdasarkan hasil pencapaian pada tahun 2023, Direksi berpandangan bahwa Audit Internal sudah melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.

Based on the achievements in 2023, the Board of Directors considered that the Internal Audit has carried out its functions and duties properly.

RAPAT DIREKSI

Pada tahun 2023, Direksi telah melaksanakan 24 (dua puluh empat) kali rapat, yang meliputi rapat internal Direksi, serta rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris. Berikut frekuensi kehadiran dan agenda rapat Direksi:

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

In 2023, the Board of Directors held 24 (twenty four) meetings, which include internal meetings of the Board of Directors and joint meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners. The following is the frequency and attendance of the Board of Directors at the meeting:

Frekuensi Rapat Direksi Tahun 2023
Board of Directors Meeting Frequencies in 2023

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran % Attendance %
Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur | President Director	23	24	96%
Anthony Yuarez Panggabean	Direktur | Director	23	24	96%
Njauw Vido Onadi	Direktur | Director	24	24	100%
Wibowo	Direktur | Director	24	24	100%
Cincin Lisa Hadi	Direktur | Director	24	24	100%

Agenda Rapat Direksi Tahun 2023
Board of Directors Meeting Agenda in 2023

No	Tanggal Date	Peserta Rapat Meeting Participants	Agenda
1	9 Januari 2023 January 9, 2023	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions	Financial Closing Update Progress CAE Update Rakernas 2023 Financial Closing CAE Progress Update 2023 Rakernas Update
2	16 Januari 2023 January 16, 2023	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions	Marketing Closing Marketing Closing
3	7 Febuari 2023 Febuary 7, 2023	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions	Financial Closing Proposal Tour Reward Managerial 2023 IT Plan 2023 Update CAE Financial Closing Managerial Reward Tour 2023 Proposal 2023 IT Plan CAE Progress Update
4	13 Febuari 2023 Febuary 13, 2023	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions	Marketing Closing Training implementasi project CAE Marketing Closing CAE project implementation training
5	6 Maret 2023 March 6, 2023	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions	Financial Closing Sharing Talent Management Highlight 2022 Financial Closing Talent Management Highlight 2022 Sharing

Direksi
Board Of Directors

No	Tanggal Date	Peserta Rapat Meeting Participants	Agenda
6	27 Maret 2023 March 27, 2023	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions	*Google Email to MS Exchange* Google Email to MS Exchange
7	3 April 2023 April 3, 2023	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions	Financial Closing Financial Closing
8	10 April 2023 April 10, 2023	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions	Libur Hari Raya Idul Fitri 1441/Tahun 2023 Update Performance Commercial Litigasi Pembahasan New Scheme Waralaba Eid al-Fitr Holiday 1441/in 2023 Commercial Litigation Performance Update New Franchise Scheme Discussion
9	3 Mei 2023 May 3, 2023	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions	Update Implementasi esign - New Vendor Operation Control Presentasi Project Obsolete PC Replacement 2023 IT Structure Update PPN atas Agunan diambil Alih Update Plan Successor BUH Update Piloting CAE e-sign Implementation Update - New Vendor Operation Control Obsolete PC Replacement 2023 Project Presentation IT Structure Update on VAT on Repossessed Collateral Successor BUH Update Plan CAE Piloting Update
10	29 Mei 2023 May 29, 2023	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions	New Template FS by Brand YTD Apr 2023 Pembahasan Pengadaan Asisstant Branch Head (ABH) & Pengembangan Network 2024 Update Implementasi CAE Update Performance Telesales & Review Prospect UU Perlindungan Data Pribadi dan Gap IT security Ransomeware New FS Template by Brand YTD Apr 2023 Discussion of Asisstant Branch Head (ABH) Procurement 2024 Network Development CAE Implementation Update Telesales Performance Update & Prospect Review Personal Data Protection Law and Gap Ransomware IT security
11	5 Juni 2023 June 5, 2023	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions	Perubahan Struktur Organisasi Credit Changes in Credit Organization Structure
12	26 Juni 2023 June 26, 2023	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions	Limited Review Findings EY & BOD WOM Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Audit OJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Warehouse Analysis Limited Review Findings EY & BOD WOM Confirmation of OJK Audit Audit Results Consumer and Community Protection Warehouse Analysis
13	17 Juli 2023 July 17, 2023	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions	*Marketing Closing* *Strategic Project Management & Timeline* Marketing Closing Strategic Project Management & Timeline

No	Tanggal Date	Peserta Rapat Meeting Participants	Agenda
14	31 Juli 2023 July 31, 2023	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions	Laporan Hasil Pemeriksaan Fraud Detection System dan Compliance Detection System. Audit Report on Fraud Detection System and Compliance Detection System.
15	7 Agustus 2023 August 7, 2023	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions	Financial Closing BPJS Update Camunda CAPEX 2024 Financial Closing BPJS Camunda Update CAPEX 2024
16	28 Agustus 2023 August 28, 2023	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions	Update LGD WOM 2023 2023 WOM LGD Update
17	4 September 2023 September 4, 2023	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions	Analisa competitor market Emas Update Analisa Network Tidak Upgrade Tahun 2024 Gold market competitor analysis Network Analysis Update Not Upgraded in 2024
18	11 September 2023 September 11, 2023	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions	Financial Closing, Reporting Anti Fraud Financial Closing Anti Fraud Reporting
19	2 Oktober 2023 October 2, 2023	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions	Update Anti Fraud Anti Fraud Update
20	30 Oktober 2023 October 30, 2023	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions	Propose Tour Managerial 2024 dan Awarding Rakernas DRC Live Test Propose 2024 Managerial Tour and Rakernas Awarding DRC live test
21	6 November 2023 November 6, 2023	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions	Financial Closing Update Fraud & Compliance Detection System September 2023 Update Progress Pengembangan Network 2023 & Kios SiDana Financial Closing September 2023 Fraud & Compliance Detection System Update Update on Network Development Progress 2023 & SiDana Kiosk
22	27 November 2023 November 27, 2023	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions	Update Rakernas HC Shared Service Update Hasil DRC Live Test Rakernas Update HC Shared Service Update on DRC Live Test Results
23	4 Desember 2023 December 4, 2023	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions	Financial Closing Laporan Hasil Pemeriksaan Fraud Detection System dan Compliance Detection System Oktober 2023 Financial Closing Report of Audit Results on Fraud Detection System and Compliance Detection System October 2023
24	18 Desember 2023 December 18, 2023	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions	Update Rakernas 2024 AR Management 2024 Update SP Initiative Maybank Group Marketing Closing Rakernas 2024 Update AR Management 2024 SP Initiative Maybank Group Update Marketing Closing

Komite di Bawah Direksi

Committee Under The Board Of Directors

Untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugasnya, Direksi dibantu Komite maupun Satuan kerja yang secara struktural berada di bawahnya yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Sekretaris Perusahaan, Legal Counsel & Anti Fraud Division dan Audit Internal.

To support the efficiency and effectiveness of its duties' implementation, the Board of Directors is assisted by committees and work units that are structurally under its supervision, namely the Risk Management Committee, Sharia Product and Business Development Committee, Information Technology Steering Committee, Corporate Secretary, Legal Counsel & Anti Fraud Division and Internal Audit.

Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee

Tujuan pembentukan Komite Manajemen Risiko adalah untuk mengendalikan risiko di dalam organisasi dan mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi terhadap pencapaian tujuan, misi, dan visi Perseroan. Dengan demikian, Perseroan dapat menerapkan langkah-langkah proaktif untuk mengurangi dampak potensial dari risiko-risiko tersebut dan dapat memanfaatkan peluang yang ada, sehingga dapat melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap semua potensi risiko yang berkaitan dengan pengelolaan Perseroan.

The establishment of the Risk Management Committee aims to control risk within the Company and anticipate possible risks to the achievement of its objectives, mission, and vision. Consequently, the Company can adopt proactive strategies to mitigate the potential consequences of these risks and capitalize on advantageous circumstances, enabling the identification and evaluation of every potential risk associated with the Company's management.

Untuk memitigasi potensi risiko yang mungkin timbul tersebut, Direksi telah membentuk Komite Manajemen Risiko yang berfungsi memfasilitasi aktivitas pemantauan serta mengevaluasi sistem manajemen risiko Perseroan secara berkelanjutan.

To mitigate the potential risks, the Board of Directors has established a Risk Management Committee with the function to facilitate monitoring and evaluate the Company's risk management system on an ongoing basis.

Dasar Hukum Pembentukan

Pembentukan Komite Manajemen Risiko dan penyusunan Piagam Komite Manajemen Risiko didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. POJK No. 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
4. POJK No.44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
5. SEOJK No.11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
6. SEOJK No.7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
7. Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahannya.

Legal Basis of Establishment

The establishment of the Risk Management Committee and the preparation of the Risk Management Committee Charter are based on the applicable provisions, including:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Law No. 6 of 2023 concerning the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.
3. POJK No. 28/POJK.05/2020 concerning the Health Level Assessment of Nonbank Financial Services Institutions.
4. POJK No. 44/POJK.05/2020 concerning Risk Management Practices for Non-Bank Financial Services Institutions.
5. SEOJK No. 11/SEOJK.05/2020 concerning Health Level Assessment of Financing Companies and Sharia Financing Companies.
6. SEOJK No. 7/SEOJK.05/2021 concerning Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Nonbank Financial Services Institutions.
7. The Articles of Association of the Company and its amendments.

Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee

Piagam Komite
Perseroan telah memiliki Piagam Komite Manajemen Risiko yang telah disahkan dan ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2021.

Komposisi Komite Manajemen Risiko
Komposisi keanggotaan Komite Manajemen Risiko Perseroan adalah sesuai dengan Piagam Komite Manajemen Risiko tanggal 20 Desember 2021, sebagai berikut:

1. Komite Manajemen Risiko bersifat non struktural, dimana anggotanya merupakan bagian dari struktur yang terdapat dalam Perseroan.
2. Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direksi Perseroan.
3. Komposisi anggota Komite Manajemen Risiko terdiri dari:
   a. Anggota Tetap:
      i. Seluruh anggota Direksi Perseroan.
      ii. *Risk Management Division Head*.
   b. Anggota tidak tetap
      Pejabat satu tingkat di bawah Direksi lainnya selain pejabat yang disebutkan pada poin 3.a.ii di atas yang keanggotaannya bersifat tidak tetap didasarkan atas undangan Komite Manajemen Risiko sesuai dengan topik yang dibahas dan/atau direkomendasikan dalam komite tersebut.
4. Anggota Komite Manajemen Risiko yang merupakan Presiden Direktur Perseroan bertindak sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko dan anggota Direksi yang membawahi fungsi Manajemen Risiko bertindak sebagai Wakil Ketua Komite Manajemen Risiko.
5. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, maka Komite Manajemen Risiko berhak menunjuk dan menetapkan salah satu anggota tetap Komite Manajemen Risiko sebagai Sekretaris Komite Manajemen Risiko berdasarkan keputusan komite yang ditandatangani oleh anggota tetap Komite Manajemen Risiko Perseroan yang memiliki hak suara.

Committee Charter
The Company has the Risk Management Committee Charter in place that has been ratified and signed on Desember 20, 2021

Risk Management Committee Composition
The composition of the Company's Risk Management Committee membership is in accordance with the Risk Management Committee Charter dated December 20, 2021, as follows:

1. The Risk Management Committee is non-structural, with members as part of the structure in the Company.
2. The Risk Management Committee is responsible to the Company's Board of Directors.
3. The composition of the Risk Management Committee members consists of:
   a. Permanent Members:
      i. All members of the Company's Board of Directors.
      ii. Risk Management Division Head.
   b. Non-permanent members
      Officers one level below the Board of Directors other than the officers mentioned in point 3. A.ii above whose membership is non-permanent based on the invitation of the Risk Management Committee in accordance with the topics discussed and/or recommended in the committee.
4. Members of the Risk Management Committee who are the President Directors of the Company act as Chairman of the Risk Management Committee and members of the Board of Directors in charge of the Risk Management function act as Vice Chairman of the Risk Management Committee.
5. To facilitate the Risk Management Committee duties implementation, the Committee has the right to appoint and assign one of the permanent members of the Risk Management Committee as Secretary of the Committee based on a decision signed by a permanent member of the Company's Risk Management Committee who has voting rights.

6. Persyaratan keanggotaan:
   a. Dewan Komisaris Perseroan dilarang menjadi anggota Komite Manajemen Risiko.

   b. Setiap anggota Komite Manajemen Risiko wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bersifat non struktural, dimana anggotanya merupakan bagian dari struktur yang terdapat dalam Perseroan.

1. Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direksi Perseroan.
2. Komposisi anggota Komite Manajemen Risiko terdiri dari:
   a. Anggota Tetap:
      i. Seluruh anggota Direksi Perseroan.

      ii. Risk Management Division Head.
   b. Anggota tidak tetap
      Pejabat satu tingkat dibawah Direksi lainnya selain pejabat yang disebutkan pada angka 3 huruf a.ii di atas yang keanggotaannya bersifat tidak tetap didasarkan atas undangan Komite Manajemen Risiko sesuai dengan topik yang dibahas dan/atau direkomendasikan dalam komite tersebut.
3. Anggota Komite Manajemen Risiko yang merupakan Presiden Direktur Perseroan bertindak sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko dan anggota Direksi yang membawahi fungsi Manajemen Risiko bertindak sebagai Wakil Ketua Komite Manajemen Risiko.
4. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, maka Komite Manajemen Risiko berhak menunjuk dan menetapkan salah satu anggota tetap Komite Manajemen Risiko sebagai Sekretaris Komite Manajemen Risiko berdasarkan keputusan komite yang ditandatangani oleh anggota tetap Komite Manajemen Risiko Perseroan yang memiliki hak suara.

6. Membership requirements:
   a. The Company's Board of Commissioners is prohibited from being a member of the Risk Management Committee.
   b. Every member of the Risk Management Committee must have integrity, good characters and good morals.

Structure and Membership of Risk Management Committee

The Risk Management Committee is a non-structural organ, that its members are part of the structure of the Company.

1. The Risk Management Committee is responsible to the Company's Board of Directors.
2. The composition of the members of the Risk Management Committee consists of:
   a. Permanent member:
      i. All members of the Company's Board of Directors.
      ii. Head of Risk Management Division.
   b. Non-permanent member
      Officials who are one level below the Board of Directors except the officials mentioned in 3 a.ii above whose membership is not permanent based on the invitation of the Risk Management Committee in accordance with the topics discussed and/or recommended in the committee.
3. The member of the Risk Management Committee who is the President Director of the Company acts as the Chairman of the Risk Management Committee and the members of the Board of Directors in charge of the Risk Management function act as the Vice Chairman of the Risk Management Committee.
4. To facilitate the implementation of the Risk Management Committee's duties, the Risk Management Committee has the right to appoint and assign one of the permanent members of the Risk Management Committee as the Secretary of the Risk Management Committee based on the committee's decision signed by the permanent members of the Company's Risk Management Committee who have voting rights.

Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee

5. Persyaratan keanggotaan:
   a. Dewan Komisaris Perseroan dilarang menjadi anggota Komite Manajemen Risiko.

   b. Setiap anggota Komite Manajemen Risiko wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

5. Membership requirements:
   a. The Company's Board of Commissioners is prohibited from being a member of the Risk Management Committee.
   b. Each member of the Risk Management Committee is required to have good integrity, character and morals.

Keputusan Komite Manajemen Risiko

Keputusan Komite Manajemen Risiko diambil melalui Rapat berdasarkan mekanisme musyawarah mufakat. Risalah rapat Komite Manajemen Risiko merupakan hasil keputusan yang sah untuk kemudian diedarkan kepada Direksi dan unit kerja terkait. Keputusan dalam Risalah Rapat tersebut bersifat sah dan mengikat semua anggota baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Apabila diperlukan maka keputusan Komite Manajemen Risiko dapat ditindaklanjuti dengan Surat Kebijakan dan/atau memorandum oleh unit kerja yang bertanggung jawab.

Risk Management Committee Decisions

The decisions of the Risk Management Committee are taken through a meeting based on a consensus mechanism. Minutes of the Risk Management Committee meeting are the result of a valid decision to be circulated to the Board of Directors and related work units. The decisions in the Minutes of Meeting are valid and binding on all members, both present and absent. If necessary, the decision of the Risk Management Committee can be followed up with a Policy Letter and/ or memorandum by the responsible work unit.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur terkait Manajemen Risiko, yang paling sedikit meliputi:
   a. Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko, termasuk tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
   b. Melakukan perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko, antara lain menyempurnakan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Perseroan yang memengaruhi kecukupan pendanaan, profil risiko Perseroan, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi; dan

Risk Management Committee Duties and Responsibilities

The authority and responsibilities of the Risk Management Committee are as follows:

1. Provide recommendations to the President Director regarding Risk Management, which at least includes:

   a. Develop policies, strategies, and guidelines for the implementation of Risk Management, including risk appetite and risk tolerance, Risk Management framework and contingency plans to anticipate the occurrence of abnormal conditions;

   b. Make improvements or adjustments to the implementation of Risk Management based on the evaluation results of Risk Management implementation, including improving the Risk Management process periodically or incidentally as a result of changes in the Company's external and internal conditions that affect the adequacy of funding, the Company's risk profile, and the ineffectiveness of the implementation of Risk Management based on the results of the evaluation; and

c. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti penyaluran pembiayaan yang dilakukan, pengambilan posisi risiko, atau pengambilan eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

2. Melakukan tugas-tugas lainnya sebagai Komite Manajemen Risiko yang tertuang dalam kebijakan internal Perseroan ataupun ditugaskan oleh Direksi Perseroan dalam rangka terwujudnya pelaksanaan sistem Manajemen Risiko yang efektif dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko melakukan rapat rutin minimal 4 (empat) kali dalam setahun dan non-rutin/ luar biasa bila diperlukan. Rapat ini dipimpin oleh Ketua. Dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua.

Pada tahun 2023, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali. Seluruh Rapat yang dilaksanakan telah dinyatakan sah dan seluruh hasil rapat RMC juga telah dinyatakan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

c. Establish matters related to business decisions that deviate from normal procedures, such as disbursement of financing, adopting risk positions, or undertaking risk exposures that exceed predetermined limits.

2. Perform other duties as the Risk Management Committee as stated in the Company's internal policies or assigned by the Board of Directors of the Company in order to realize the implementation of an effective Risk Management system while remain taking into account the prevailing laws and regulations.

Risk Management Committee Meeting

The Risk Management Committee conducts regular meetings at least 4 (four) times a year and non-routine / extraordinary if needed. This meeting is chaired by the Chairman. In the event that the Chairman is unable to attend, the meeting is chaired by the Vice Chairman.

In 2023, the Risk Management Committee has met 11 (eleven) times. All meetings held have been declared valid and all results of RMC meetings have also been stated in the minutes of meetings and are well documented.

Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah

Sharia Product and Business Development Committee

Dasar Hukum Pembentukan

Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah merupakan komite pendukung Direksi yang bertugas mengembangkan produk dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pedoman berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab Komite dijabarkan di dalam Piagam Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah Perseroan. Pembentukan Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah Perseroan didasarkan pada POJK No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.

Legal Basis of Establishment

The Sharia Product and Business Activity Development Committee is a supporting committee of the Board of Directors tasked with developing products and business activities based on sharia principles. The guidelines regarding the duties and responsibilities of the Committee are set out in the Charter of the Sharia Business Activity Product and Development Committee of the Company. The establishment of the Product and Development Committee of the Company's Sharia Business Activities is based on the POJK No. 10/POJK.05/2019 regarding the Business Operations of Sharia Financing Companies and Sharia Business Units of Financing Companies.

Piagam Komite

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Pengembangan Produk dan Usaha Syariah yang telah disahkan dan ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2022.

Committee Charter

The Company has the Sharia Product and Business Development Committee Charter in place that has been ratified and signed on December 12, 2022.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah

Komite bertanggung jawab dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu kinerja Direksi. Tugas dan tanggung jawab tersebut telah disesuaikan dengan Piagam dan dijabarkan sebagai berikut:

1. Melakukan kajian dan analisis pengembangan produk atau kegiatan usaha syariah baru yang akan dilakukan atau dipasarkan.
2. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan atas setiap produk atau kegiatan usaha syariah perseroan.
3. Memberikan rekomendasi, saran, dan masukan serta evaluasi aspek pemasaran, pemenuhan prinsip syariah dan mitigasi risiko.
4. Merumuskan dan mengusulkan capaian kinerja bulanan dan tahunan untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite ini memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi perusahaan Perseroan terkait produk yang diperlukan dalam

Sharia Product and Business Development Committee Duties and Responsibilities

The Committee is responsible for carrying out its duties and responsibilities in assisting the performance of the Board of Directors. These duties and responsibilities have been adapted to the Charter and are detailed as follows:

1. Conduct studies and analysis of the development of new sharia products or business activities that will be launched or marketed;
2. Evaluate and improve the Company's sharia products and business activities;
3. Provide recommendations, suggestions, and inputs as well as evaluation of marketing aspects, fulfillment of sharia principles and risk mitigation;
4. Formulate and propose monthly and annual performance achievements for business activities based on sharia principles;

In carrying out its duties and functions, the Committee has the following authority:

1. Access the Company's documents, data, and information related to products required in carrying

pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud di dalam Piagam dengan tetap menjaga kerahasiaannya.
2. Komite dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite untuk pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) dengan persetujuan Direksi Perseroan.
3. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Direksi dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

out their duties as referred to in the Charter while maintaining confidentiality.
2. The Committee may engage independent parties outside its members for the performance of duties (if required) with the approval of the Board of Directors of the Company.
3. Perform other authorities granted by the Board of Directors while still paying attention to and complying with the prevailing laws and regulations.

Struktur dan Keanggotaan Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah

Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, 1 (satu) orang sebagai ketua dengan menjabat sebagai pimpinan Unit Usaha Syariah Perseroan dan 2 (dua) orang atau lebih dapat berasal dari luar Perseroan atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah anggota Direksi yang membidangi Manajemen Risiko dan/atau *Marketing.*

Masa jabatan anggota Komite dianggap efektif setelah resmi ditetapkan oleh Direksi Perseroan tanpa mengurangi hak dan wewenang Direksi Perseroan dalam mengganti dan memberhentikan anggota Komite sebelum masa jabatan berakhir.

Komposisi anggota Komite berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 5 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Sharia Product and Business Development Committee Structure and Memberships

The Sharia Product and Business Development Committee is composed of at least 3 (three) members: 1 (one) of whom acts as chairman serving as the head of the Company's Sharia Business. The Company and 2 (two) or more personnel may be assigned from external of the Company or parties occupying managerial positions under members of the Board of Directors in charge of Risk Management and/or Marketing.

The committee member's tenure is effective after the official be appointed by the Company's Board of Directors, without prejudice to the Board's rights and authorities in terminating and replacing members of the Committee prior to the end of tenure.

Based on the Decree of the Board of Directors dated June 5, 2023 the composition of the Committee members is as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position
Dimas Jagad Erlangga	Ketua | Chairman
Herwin	Anggota | Member
Sastra Ebenezer Tarigan	Anggota | Member

Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah

Sharia Product and Business Development Committee

Profil Komite Produk & Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah

Sharia Product and Business Development Committee

Dimas Jagad Erlangga

Ketua Komite | Committee Chairman

37 Tahun | Years Old
Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen

Jabatan Position	Kepala Unit Usaha Syariah Head of Sharia Business Unit
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Jakarta, Indonesia (2009) Bachelor in Accountng fromSekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Jakarta, Indonesia (2009
Riwayat Jabatan Professional Background	• Kepala Unit Usaha Syariah dari PT Wahana Ottomitra Multiartha (2023-saat ini). • Automotive Product dan Program Implementation Team Leader dari PT Bank Syariah Indonesia (2021-2023). • Business Alliance dan Product Manager Automotive dari PT Bank Syariah Mandiri (2013-2021). • Risk Management Officer dari PT Bank Syariah Bukopin (2011-2013). • Management Trainee khusus untuk Divisi Audit Internal (SKAI) di PT Panin Bank (2010 - 2011). • Head of Sharia Business Unit of PT Wahana Ottomitra Multiartha (2023-present). • Automotive Product and Program Implementation Team Leader from PT Bank Syariah Indonesia (2021-2023). • Business Alliance and Automotive Product Manager from PT Bank Syariah Mandiri (2013-2021). • Risk Management Officer of PT Bank Syariah Bukopin (2011-2013). • Management Trainee specifically for Internal Audit Division (SKAI) at PT Panin Bank (2010 - 2011).

Herwin

Anggota Komite | Committee Member

45 Tahun | Years Old
Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen

Jabatan Position	Kepala Divisi Risk Management Risk Management Division Head
Riwayat Pendidikan Educational Background	S1 Bachelor Degree
Riwayat Jabatan Professional Background	Bergabung di WOM sejak 1 November 2016 Joined WOM since November 1, 2016

Sastra Ebenezer Tarigan
Anggota Komite | Committee Member

32 Tahun | Years Old
Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen

Jabatan Position	Kepala Divisi NDS MotorKu NDS MotorKu Division Head
Riwayat Pendidikan Educational Background	S1 Akuntansi – Institut Manajemen Telkom Bachelor Degree in Accounting – Institut Manajemen Telkom
Riwayat Jabatan Professional Background	• NDS Motorcycle Division Head di PT WOM Finance (2023 - Saat ini) • Deputy BU Head di PT WOM Finance Regional Sumbagut (2021 -2022) • Branch Head di PT WOM Finance Cabang Ciputat (2018 - 2021) • Branch Head di PT WOM Finance Cabang Karawang (2016 - 2018) • NDS Motorcycle Division Head at PT WOM Finance (2023 - Present) • Deputy BU Head at PT WOM Finance Regional Sumbagut (2021 -2022) • Branch Head at PT WOM Finance Ciputat Branch (2018 - 2021) • Branch Head at PT WOM Finance Karawang Branch (2016 - 2018)

Independensi Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah

Seluruh anggota Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berkomitmen melaksanakan ketentuan POJK No. 10/POJK.05/2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan. Anggota Komite juga berkomitmen tidak mengambil keuntungan pribadi, langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan di luar penghasilan yang sah. Perseroan akan menyatakan komitmen independensi anggota Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah secara tertulis pada masa mendatang.

Sharia Product and Business Development Committee Independence

In carrying out their duties and responsibilities, all members of the Company's Sharia Product and Business Development Committee are committed to implementing POJK No. 10/POJK.05/2019 dated February 26, 2019 concerning the Implementation of Sharia Financing Company and Sharia Business Unit of Financing Company. Members of the Committee are also committed not to take personal, direct or indirect advantage of the Company's activities beyond legitimate income. Going forward, the Company will declare the Committee members independence commitment in writing.

Rapat Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah

Berdasarkan Piagam Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah, rapat Komite dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Rapat Komite bisa berjalan dengan syarat memenuhi kuota kehadiran setengah dari jumlah anggota Komite. Dalam kondisi dan situasi yang luar biasa seperti pandemi, rapat dapat diselenggarakan secara virtual dengan tetap memenuhi ketentuan terkait jumlah kehadiran dan jumlah rapat berdasarkan Piagam Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah.

Sharia Product and Business Development Committee Meetings

With reference to its Charter, the Sharia Product and Business Development Committee shall conduct at least 1 (one) meeting within 6 (six) months. The Committee meetings may proceed on the condition that they meet the attendance quota of half the total number of Committee members. In exceptional conditions and situations such as the pandemic, meetings can be held virtually while still complying with the provisions related to the number of attendance and number of meetings based on the Sharia Product and Business Development Committee Charter.

Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah

Sharia Product and Business Development Committee

Keputusan rapat Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

The decision of the meeting of the Sharia Product and Business Development Committee is taken based on deliberations for consensus and the results of the Committee meeting must be set forth in the minutes of the meeting and properly documented.

Berikut tingkat kehadiran dan agenda rapat Komite selama tahun 2023:

The following are the Committee meetings frequencies and agenda in 2023:

Frekuensi Rapat Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah Tahun 2023
Sharia Product and Business Development Committee Meeting Frequencies in 2023

No	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Jumlah Rapat Meetings	Kehadiran % Attendance %
1	Dimas Jagad Erlangga	Ketua Chairman	2	2	100%
2	Herwin	Anggota Member	2	2	100%
3	Sastra Ebenezer Tarigan	Anggota Member	2	2	100%

Agenda Rapat Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah Tahun 2023
Sharia Product and Business Development Committee Meeting Agenda in 2023

No	Tanggal Date	Peserta Rapat Meeting Participants	Agenda Agenda
1	15 Juni 2023 June 15, 2023	Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah Sharia Product and Business Development Committee	Pembahasan mengenai Pengembangan Produk UmrohKu dan Produk HajiKu Discussion of UmrohKu and Hajiku Products Development
2	12 Oktober 2023 October 12, 2023	Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah Sharia Product and Business Development Committee	• Strategi Peningkatan Penjualan Pembiayaan Syariah • Strategi Peningkatan Penjualan MASKu tahun 2024 • Penjualan Logam Mulia MASKu pada Segmentasi Calon Jamaah Haji • Strategy to Increase Sales of Islamic Financing • MASKu Sales Increase Strategy in 2024 • MASKu Precious Metal Sales to Prospective Hajj Pilgrims Segmentation

Pelaksanaan Tugas Komite

Selama tahun 2023, Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah telah memenuhi seluruh tugas dan fungsinya dalam membantu Direksi mengembangkan produk dan kegiatan usaha berbasis syariah. Setiap fungsi dan tanggung jawab yang Komite lakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi aturan-aturan yang berada di dalam Piagam Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah.

Committee Duties Implementation

During 2023, the Sharia Product and Business Development Committee has fulfilled all its duties and functions in assisting the Board of Directors to develop sharia-based products and business activities. Every function and responsibility that the Committee performs is in accordance with applicable regulations and complies with the rules contained in the Sharia Product and Business Development Committee Charter.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Information Technology Steering Committee

Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai rencana pengembangan teknologi informasi yang searah dengan rencana kegiatan usaha Perseroan, dengan memperhatikan faktor efisiensi, dan efektivitas operasional Perseroan.

Dasar Hukum Pembentukan

1. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2016.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. POJK No. 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa keuangan Non Bank.
5. Anggaran Dasar Perseroan.

Piagam Komite

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi yang telah disahkan dan ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2021.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang mencakup:

1. Rencana pengembangan teknologi informasi yang searah dengan rencana kegiatan usaha Perseroan, Dalam memberikan rekomendasi Komite Pengarah Teknologi Informasi, memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:
   a. Rencana pelaksanaan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan teknologi informasi yang mendukung strategi bisnis Perseroan. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-

The Information Technology Steering Committee was established to provide recommendations to the Board of Directors on the Information technology development plan in corresponding with business activity plan, by taking into account efficiency and effectiveness related to the Company's operations.

Legal Basis of Establishment

1. Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law No. 19 of 2016.
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
3. Law No. 6 of 2023 concerning the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.
4. POJK No. 4/POJK.05/2021 concerning Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions.
5. The Company's Articles of Association.

Committee Charter

The Company has the Information Technology Steering Committee Charter in place that has been ratified and signed on August 24, 2021.

Duties and Responsibilities

The Information Technology Steering Committee has the duty and responsibility to providing recommendations to the Board of Directors which include:

1. Creating the Information technology development plan in corresponding with the Company's business activity plan. The Committee provides recommendations by taking into account efficiency and effectiveness related factors, as well as the following matters:
   a. Roadmap to find the needs of information technology that can support the Company's business strategy. This road map consists of the

Komite Pengarah Teknologi Informasi
Information Technology Steering Committee

langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*.
   b. Sumber daya yang dibutuhkan.
   c. Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
   d. Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan rencana pengembangan teknologi informasi.
2. Perumusan kebijakan dan prosedur teknologi informasi.
3. Kesesuaian proyek-proyek teknologi informasi yang disetujui dengan rencana pengembangan teknologi informasi. Komite Pengarah Teknologi informasi juga menerapkan status prioritas proyek teknologi informasi yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Perseroan) misalnya pergantian *core system* dan topologi jaringan.
4. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek teknologi informasi dengan proyek teknologi informasi yang disetujui.
5. Kesesuaian teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Perseroan.
6. Efektivitas mitigasi risiko atas investasi Perseroan pada sektor teknologi informasi yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Perseroan.
7. Pemantauan atas kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatan kinerja teknologi informasi.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara teknologi informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya teknologi informasi yang dimiliki Perseroan.

Struktur dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi

a. Komite Pengarah Teknologi Informasi beranggotakan paling sedikit:
   - Ketua: Seorang Presiden Direktur Perseroan.
   - Anggota:

current and future states and steps to be taken to reach the future state.
   b. Required resources.
   c. Benefits that will be obtained upon the execution of the plan.
   d. Constraints that may arise in the execution of the development plan.
2. Formulating information technology policies and procedures.
3. Conforming the approved information technology projects with the development plan. The Committee furthermore set the priority status of critical projects or those having a significant impact on the Company's operational activities. Examples include, among others, changing the core system and network topology.
4. Ensuring the information technology projects were implemented as conformed to the approved ones.
5. Ensuring the suitability of information technology with the needs of management information systems and the Company's business activities.
6. Ensuring the effectiveness of risk mitigation on the Company's investment in information technology for the better achievement of the Company's business objectives.
7. Monitoring information technology performance and efforts for improvements.
8. Resolving various information technology-related problems that cannot be resolved, effectively, efficiently and promptly, by work units of information technology and users.
9. Adequacy and allocation of the Company's information technology resources.

Information Technology Steering Committee Structure and Membership

a. The Information Technology Steering Committee consists of at least:
   - Chairman: President Director of the Company.
   - Members:

- Seorang Direktur yang membawahkan satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi.
- Seorang Direktur dan/atau pejabat yang membawahkan fungsi manajemen risiko Perseroan.
- Seorang pejabat tertinggi yang membawahkan satuan kerja penyelenggara teknologi informasi Perseroan.
- Seorang pejabat tertinggi yang membawahkan satuan kerja pengguna Teknologi Informasi Perseroan.

b. Salah satu pejabat tertinggi Perseroan yang diangkat sebagai anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi akan ditetapkan sebagai sekretaris Komite Pengarah Teknologi Informasi.

- Director in charge of the Information Technology unit
- Director and/or executive in charge of the risk management function of the Company.
- Highest executive in charge of the Company information technology management unit.
- The highest official in charge of the Perseroan Information Technology user work unit

b. One of the highest Company's executives appointed as member of the Information Technology Steering Committee will be appointed as the secretary of the Information Technology Steering Committee.

Profil Komite Pengarah Teknologi Informasi
Information Technology Steering Committee

Nama Name	Jabatan di Komite Position in the Committee	Kewarganegaraan Nationality	Jabatan di Perseroan Position in the Company
Djaja Suryanto Sutandar	Ketua | Chairman	Warga negara Indonesia Indonesian	Presiden Direktur President Director
Anthony Yuarez Panggabean	Anggota | Member	Warga negara Indonesia Indonesian	Direktur Operasional Operational Director
Njauw Vido Onadi	Anggota | Member	Warga negara Indonesia Indonesian	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director
Wibowo	Anggota | Member	Warga negara Indonesia Indonesian	Direktur Pemasaran Marketing Director
Cincin Lisa Hadi	Anggota | Member	Warga negara Indonesia Indonesian	Direktur Keuangan Financial Director
Felix Priscellius	Anggota merangkap Sekretaris Member and Secretary	Warga negara Indonesia Indonesian	Kepala Divisi Operasional IT IT Operational Division Head
Panji Dwisatia Munajat	Anggota | Member	Warga negara Indonesia Indonesian	Kepala Divisi Strategis dan Inisiatif Proyek Project Strategic and Initiative Division Head
Rina Mayangsari	Anggota | Member	Warga negara Indonesia Indonesian	Kepala Divisi Operasi Operation Division Head
Adhityo Leonardo T. L.	Anggota | Member	Warga negara Indonesia Indonesian	Kepala Sub Divisi Departemen Pemasaran Marketing Department Sub Division Head
Jimmy Sutrisno	Anggota | Member	Warga negara Indonesia Indonesian	Kepala Sub Divisi Analis dan Pengembangan Keuangan Finance Analyst and Development Sub Division Head

Komite Pengarah Teknologi Informasi
Information Technology Steering Committee

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Berdasarkan Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi, rapat Komite dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Jika terdapat peristiwa penting yang memiliki dampak signifikan terhadap Perseroan, Ketua Komite dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu. Rapat Komite bisa berjalan dengan syarat memenuhi kuota kehadiran lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komite. Setelah musyawarah untuk mufakat memutuskan hasil rapat, hasil tersebut wajib dituangkan dalam bentuk risalah dan didokumentasikan secara baik. Pada tahun 2023, Komite Pengarah Teknologi Informasi sudah mengadakan rapat 4 (empat) kali.

Berikut tingkat kehadiran dan agenda rapat Komite selama tahun 2023:

Information Technology Steering Committee Meetings

Pursuant to the Information Technology Steering Committee Charter, the Committee holds minimum 4 (four) meetings in a year. The Chairman of the Committee may call for a meeting at any time in the event of a crucial circumstance that has the potential impact on the Company. The Committee's meeting is deemed to be official if the attendance quota of more than 50% (fifty percent) of the members is met. By a consensus decision, the results of the meeting must be properly documented and submitted in the form of meeting minutes. In 2023 the Information Technology Steering Committee has held 4 (four) meetings.

The following are the Committee meetings frequencies and attendance in 2023:

Frekuensi Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi Tahun 2023
Information Technology Steering Committee Meeting Frequencies in 2023

No	Tanggal Date	Nama Name	Jabatan Position	Agenda	Kehadiran Attendance	Jumlah Rapat Meeting Total	Kehadiran % Attendance %
1	16 Juni 2023 June 16, 2023	Felix Priscellius	*IT Div Head*	1. ISO 27001 2. IT Budget 2023 3. IT Project 4. IT Operation 5. IT Security & Compliance 6. KAWAN Update	15 peserta | participants	1	100%
2	19 September 2023 September 19, 2023	Felix Priscellius	*IT Operation Div Head*	1. Compliance 2. System Availability & Server Utilization 3. Data Center Review 4. Helpdesk Ticket Summary 5. Payment Summary 6. Network Review 7. Project Update 8. IT Budget 9. Cyber Security Monitoring 10. Continuous Activity Agustus Dashboard 2023 11. IT Development 12. Project Plan Q4 2023 13. KAWAN Update	17 peserta | participants	1	100%

No	Tanggal Date	Nama Name	Jabatan Position	Agenda	Kehadiran Attendance	Jumlah Rapat Meeting Total	Kehadiran % Attendance %
3	16 November 2023 November 16, 2023	Felix Priscellius	*IT Operation* Div Head	1. Compliance 2. System Availability & Server Utilization 3. Traffic & Response Time Major System 4. Helpdesk Ticket Summary 5. Payment Summary 6. Network Review 7. Project Update 8. IT Budget 9. Cyber Security Monitoring 10. Continuous Activity Agustus Dashboard 2023 11. IT Development 12. – 13. KAWAN Update	15 peserta | participants	1	100%
4	19 Desember 2023 December 19, 2023	Felix Priscellius	IT Operation Div Head	1. Compliance 2. System Availability & Server Utilization 3. Traffic & Response Time Major System 4. Helpdesk Ticket Summary 5. Payment Summary 6. Network Review 7. Project Update 8. IT Budget 9. Cyber Security Monitoring 10. Continuous Activity Agustus Dashboard 2023 11. IT Development 12. KAWAN	19 peserta | participants	1	100%

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Teknologi Informasi

Pada Tahun 2023, Komite Pengarah Teknologi Informasi sudah mengadakan rapat 4 (empat) kali, yaitu

1. ITSC pertama pada tanggal 16 Juni 2023
2. ITSC kedua pada tanggal 19 September 2023
3. ITSC ketiga pada tanggal 16 November 2023
4. ITSC keempat pada tanggal 19 Desember 2023

Information Technology Committee Activity Implementation Report

In 2023, the Information Technology Steering Committee held 4 (four) meetings:

1. The first ITSC on June 16, 2023
2. Second ITSC on September 19, 2023
3. The third ITSC on November 16, 2023
4. Fourth ITSC on December 19, 2023

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi serta diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab memfasilitasi komunikasi antara Direksi, Dewan komisaris, para pemegang saham, otoritas pasar modal dan para pemangku kepentingan lainnya agar terjalin dengan lancar, efektif, transparan dan komprehensif dengan tetap memperhatikan prinsip standar etika, prinsip GCG dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Perseroan.

Dasar Hukum Pembentukan Sekretaris Perusahaan

Cincin Lisa Hadi ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi No. 004/V/BOD-WOM/2022 tanggal 9 Mei 2022. Penunjukan dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah dilaporkan kepada OJK dan BEI melalui surat No. 0583/V/DIR-WOM/2022 tanggal 10 Mei 2022, serta dimuat dalam situs *web* Perseroan www.wom.co.id serta situs *web* Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Mei 2022.

Profil Sekretaris Perusahaan

Per 31 Desember 2023, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Cincin Lisa Hadi. Sekretaris Perusahaan pada Perseroan berperan sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, masyarakat dan institusi-institusi terkait lainnya. Beliau juga berperan untuk memonitor kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan Pasar Modal dan memastikan pengurus Perseroan memahami perubahan dan implementasinya

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sesuai POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan saat ini telah memiliki Sekretaris Perusahaan. Keberadaan Sekretaris Perusahaan pada Perseroan dimaksudkan untuk memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan Publik dengan pemangku

The Corporate Secretary is directly responsible to the Board of Directors and is appointed and dismissed based on the Decree of the Board of Directors. The Corporate Secretary is responsible in facilitating communication between the Board of Directors, the Board of Commissioners, shareholders, capital market authorities and other stakeholders so as to be efficient, effective, transparent and comprehensive by taking into account the ethical standard, GCG principles and values held by the Company.

Legal References for Corporate Secretary Formation

Cincin Lisa Hadi was appointed as Corporate Secretary through the Decree of the Board of Directors No. 004/V/BOD-WOM/2022 dated May 9, 2022. The assignment and appointment of the Corporate Secretary has been reported to the OJK and IDX through letter No. 0583/V/DIR-WOM/2022 dated May 10, 2022, and published on the Company's website www.wom.co.id and the Indonesia Stock Exchange website on May 10, 2022.

Corporate Secretary Profile

As of December 31, 2023, Cincin Lisa Hadi serves as the Corporate Secretary. The Corporate Secretary of the Company acts as a liaison between the Company and the Financial Services Authority, the Indonesia Stock Exchange, the public and other related institutions. She also in charge in monitoring the Company's compliance with Capital Market rules and regulations and ensuring the changes and their implementation are comprehended by the Company's Management.

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Pursuant to POJK No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Company, the Company currently has a Corporate Secretary. The formation of a Corporate Secretary in the Company is intended to ensure efficient communication between Public Companies and Stakeholders, as well as ensure

Kepentingan, serta memastikan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik senantiasa patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan:

a. Memberikan saran kepada Direksi tentang isu-isu yang berkaitan dengan kepatuhan Perseroan terhadap undang-undang, ketentuan dan prosedur serta peraturan yang berdampak pada Direksi dan praktik-praktik terbaik tata kelola perusahaan.
b. Bertanggung jawab memberikan saran kepada Direksi mengenai tugas dan kewajiban dalam mengungkapkan kepentingan terkait dampak benturan kepentingan dalam transaksi yang melibatkan Perseroan, larangan dalam transaksi efek dan larangan pengungkapan informasi yang dapat mempengaruhi harga.
c. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
d. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi:
    - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs *Website*.
    - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
    - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS.
    - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
    - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
e. Berperan sebagai penghubung antara Perseroan dengan Pemegang Saham, OJK dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Informasi mengenai pendidikan dan pelatihan Sekretaris Perusahaan dalam pelatihan untuk pengembangan kompetensi, dapat dilihat pada Profil Direksi atas nama Cincin Lisa Hadi pada Laporan Tahunan ini.

that Issuers or Public Companies are always compliant with the prevailing laws and regulations.

The following are duties and responsibilities of the Corporate Secretary:

a. Providing advice to the Board of Directors on issues related to the Company's compliance with laws, regulations and procedures and regulations that impact the Board of Directors and best practices of corporate governance.
b. Responsible for providing advice to the Board of Directors regarding duties and obligations in disclosing interests related to the impact of conflicts of interest in transactions involving the Company, prohibitions in securities transactions and prohibitions on disclosure of information that may affect prices.
c. Updating the development of the Capital Market, particularly the prevailing laws and regulations in the Capital Market.
d. Assisting the Board of Directors and the Board of Commissioners in the implementation of Corporate Governance which includes:
    - Disclosure of information to the public, including the availability of information on the Website.
    - Submission of reports to the Financial Services Authority.
    - Implementation and documentation of GMS.
    - Implementation and documentation of meetings of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
    - Implementation of orientation program for the Company's Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
e. Acting as a liaison between the Company and Shareholders, OJK and other Stakeholders.

Corporate Secretary Training

Information on the education and training of the Corporate Secretary for competency development, is presented in the Board of Directors Profile on behalf of Cincin Lisa Hadi in this Annual Report.

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Laporan Pelaksanaan Kerja Sekretaris Perusahaan

Selain berperan sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, regulator serta pemangku kepentingan lainnya, di tahun 2023, Sekretaris Perusahaan juga telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi yang dijalankan, antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal atas kedudukan Perseroan sebagai emiten, antara lain memastikan kepatuhan atas peraturan baru yang dikeluarkan oleh OJK, BEI dan regulator lain yang terkait dengan pasar modal dan menyampaikan informasi tersebut serta memberi masukan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

2. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan RUPS, baik RUPS Tahunan ataupun RUPS Luar Biasa. Di tahun 2023, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 30 Maret 2023.
3. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 11 (sebelas) kali, rapat Direksi sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebanyak 11 (sebelas) kali serta mengadministrasikan risalah rapatnya. Sekretaris Perusahaan memastikan bahwa pelaksanaan rapat telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.
4. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil kepada regulator sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait pasar modal. Di tahun 2023, beberapa laporan berkala yang telah disampaikan antara lain sebagai berikut:
   a. Laporan Rencana Bisnis Tahun 2023, termasuk Laporan Realisasi dan Pengawasan Rencana Bisnis secara Semesteran untuk semester I tahun 2023 dan semester II tahun 2023, sebagaimana ketentuan POJK No. 24/SEOJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah;

   b. Laporan Rencana Aksi Keuangan berkelanjutan tahun 2023, sebagai pemenuhan POJK

Corporate Secretary Activities Report

In addition to acting as a liaison between the Company and shareholders, regulators and other stakeholders, in 2023, the Corporate Secretary has also carried out duties and responsibilities in accordance with its functions, among others, as follows:

1. Updated the development of the capital market, particularly the prevailing laws and regulations in the capital market on the Company's position as a bond issuer, among others, ensuring compliance with new regulations issued by the OJK, IDX and other regulators related to the capital market and submitting such information and providing input to the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
2. Organized and documented the GMS, both Annual GMS and Extraordinary GMS. In 2023, the Company has held the Annual GMS and the Extraordinary GMS March 30, 2023.

3. Organized 11 (eleven) meetings of the Board of Commissioners, 24 (twenty-four) meetings of the Board of Directors and 11 (eleven) joint meetings of the Board of Commissioners and Directors, as well as administered the meeting minutes. The Corporate Secretary ensures that the meeting is conducted in accordance with the provisions in the prevailing regulations.
4. Submitted periodic reports and incidental reports to regulators with due observance to the capital market regulations. In 2023, the following were several periodic reports that have been submitted:

   a. The 2023 Business Plan Report, including the Business Plan Realization and Supervision Report on a Semester basis for the first semester of 2023 and the second semester of 2023, as stipulated in POJK No. 24/SEOJK.05/2019 concerning the Business Plan of Sharia Financing Companies and Financing Companies;
   b. Report on the Sustainable Finance Action Plan for 2023, as a fulfillment of POJK

No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik;

c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum periode Juni dan Desember 2023, sebagai pemenuhan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

5. Melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik melalui situs *web* Perseroan, ataupun melalui situs *web* BEI.
6. Mengadministrasikan, distribusi serta tidak lanjut atas surat masuk baik dari OJK Pasar Modal, OJK Industri Keuangan Non Bank (IKNB), BEI dan institusi lainnya yang ditujukan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
7. Memelihara dan menjalin komunikasi dengan media dan investor, baik terkait permintaan tanggapan ataupun menyampaikan *update* kinerja Perseroan.
8. Bekerja sama dengan divisi *Corporate Finance* dalam melanjutkan Penerbitan Umum Berkelanjutan yaitu Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023 dengan memastikan pemenuhan ketentuan terkait penerbitan obligasi tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berbagai kegiatan lainnya terkait dengan fungsi sekretaris perusahaan.

Laporan Berkala & Korespondensi

a. Laporan Keuangan

Perseroan telah mempublikasikan laporan keuangan tengah tahunan melalui situs *web* Perseroan dan laporan keuangan tahunan pada surat kabar berperedaran nasional. Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2023 telah dipublikasikan pada 23 Februari 2024 di harian Investor Daily, Perseroan juga telah mempublikasikan Laporan Keuangan Perseroan di situs *web* Perseroan dan situs *web* BEI. Laporan Keuangan Perseroan disusun antara lain sesuai dengan Peraturan VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Nomor X.K.2

No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies;

c. Report on the Use of Public Offering Proceeds Realization for the period of June and December 2023, in compliance with POJK No. 30/POJK.04/2015 on the Report of the Use of Public Offering Proceeds Realization.

5. Information disclosure in accordance with prevailing regulations, either through the Company's website, or through the IDX website.
6. Administered, distributed and followed-up on incoming letters from the Capital Market OJK, OJK Non-Bank Financial Industry (IKNB), IDX and other institutions addressed to the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
7. Maintained and established communication with the media and investors, both regarding requests for responses or submitting updates on the Company's performance.
8. Cooperated with the Corporate Finance division in continuing the Shelf Registration Issuance, namely WOM Finance Shelf Registration Bond IV Phase III Year 2023 by ensuring that the fulfillment of the provisions related to the bond issuance is in accordance with prevailing regulations and various other activities related to the functions of the corporate secretary.

Periodical Reports & Correspondences

a. Financial Statements

The Company has published its semi-annual financial statements through the Company's website and annual financial statements in national newspapers. The Audited Financial Statements as of December 31, 2023 has been published on February 23, 2024 in the Investor Daily, the Company has also published the Financial Statements on the Company's website and IDX website. The Company's Financial Statements were prepared, among others, in accordance with Regulation VIII.G.7 on the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies, Regulation No. X.K.2

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK No. 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan serta peraturan dan/atau ketentuan terkait lainnya.

b. Laporan Tahunan
Laporan tahunan Perseroan disusun sesuai dengan POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan SEOJK No.16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau pada tanggal pemanggilan RUPS Tahunan, yaitu tanggal 8 Maret 2023 melalui surat Perseroan No. 054/III/CS/2023 perihal Penyampaian Laporan Tahunan dan Berkelanjutan.

c. Korespondensi dengan OJK dan BEI
Selain laporan tersebut di atas, adapun keterbukaan informasi di tahun 2023 yang telah disampaikan melalui sistem pelaporan terintegrasi, antara lain sebagai berikut:

on the Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies and POJK No. 75/POJK.04/2017 concerning the Responsibility of the Board of Directors for Financial Statements and other related rules and/or regulations.

b. Annual Report
The Company's annual report was prepared in accordance with POJK No. 29/POJK.04/2016 concerning the Annual Report of Issuers or Public Companies and SEOJK No.16/SEOJK.04/2021 concerning the Formats and Contents of the Annual Report of the Issuers or Public Company. The Company's Annual Report for fiscal year 2022 has been submitted to the OJK in accordance with prevailing regulations or on the date of the Annual GMS invitation on March 8, 2023 through the Company's letter No. 054/III/CS/2023 regarding the Submission of the Annual and Sustainability Reports.

c. Correspondences with OJK and IDX
In addition to the aforementioned reports, the following were disclosures of information in 2023 that has been submitted through integrated reporting, among other as follows:

Regulator	Tanggal Surat Letter Date	Nomor Surat Letter Number	Perihal Subject
Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia **Financial Services Authority and Indonesia Stock Exchange**			
OJK BEI	4 Januari 2023 January 4, 2023	004/I/CS/2023	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap III dan IV Tahun 2020 Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Shelf Registration Bonds III WOM Finance Phase III and IV Year 2020
OJK BEI	4 Januari 2023 January 4, 2023	005/I/CS/2023	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I dan II Tahun 2021 dan 2022 Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Shelf Registration Bond III WOM Finance Phase I and II Year 2021 and 2022
OJK BEI	9 Januari 2023 January 9, 2023	010/I/CS/2023	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Desember 2022 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Report on Securities Holder Registration as of December 2022 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI	10 Februari 2023 February 10, 2023	025/II/CS/2023	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Januari 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Report on Securities Holder Registration as of January 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI	13 Februari 2023 February 13, 2023	026/II/CS/2023	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material atas Meninggalnya Wakil Presiden Komisaris PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") Report on Disclosure of Information or Material Facts on the Passing of Vice President Commissioner of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Company")

Regulator	Tanggal Surat Letter Date	Nomor Surat Letter Number	Perihal Subject
OJK BEI	14 Februari 2023 February 14, 2023	028/II/CS/2023	Perubahan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“Perseroan”) Changes in the Composition of the Nomination and Remuneration Committee of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Company")
OJK BEI	17 Februari 2023 February 17, 2023	040/II/CS/2023	Penyampaian Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2022 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Audited) Submission of Annual Financial Statements December 31, 2022 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Audited)
OJK BEI	20 Februari 2023 February 20, 2023	041/II/CS/2023	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2022 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk *(Audited)* Submission of Proof of Advertisement of Financial Statements dated December 31, 2022 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Audited)
OJK BEI	21 Februari 2023 February 21, 2023	042/II/CS/2023	Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“Perseroan”) Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Company")
OJK BEI	21 Februari 2023 February 21, 2023	044/II/CS/2023	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“Perseroan”) Submission of Proof of Advertisement for the Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“the Company”)
OJK BEI	8 Maret 2023 March 8, 2023	054/III/CS/2023	Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun 2022 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Annual Report and Sustainability Report Year 2022 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI	8 Maret 2023 March 8, 2023	055/III/CS/2023	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“Perseroan”) Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“the Company”)
OJK BEI	21 Maret 2023 March 21, 2023	091/III/CS/2023	Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Pemberitahuan atas Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Berkelanjutan IV Tahap III WOM Finance Tahun 2023 Disclosure of Information or Material Facts Notice of Abridged Prospectus in the Context of Shelf Registration Offering IV Phase III WOM Finance Year 2023
OJK BEI	22 Maret 2023 March 22, 2023	092/III/CS/2023	Koreksi Laporan Tahunan Tahun 2022 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Correction of Annual Report Year 2022 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI	3 April 2023 April 3, 2023	096/IV/CS/2023	Keterbukaan Informasi atau Fakta Material - Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Berkelanjutan IV Tahap III WOM Finance Tahun 2023 Disclosure of Information or Material Facts - Additional Information and/or Improvements to the Abridged Prospectus in the Context of Shelf Registration Bond IV Phase III WOM Finance Year 2023
OJK BEI	3 April 2023 April 3, 2023	097/IV/CS/2023	Penyampaian Informasi Perubahan Susunan Komite Audit PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“Perseroan”) Submission of Information on Changes in the Composition of the Audit Committee of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“the Company”)
OJK BEI	3 April 2023 April 3, 2023	098/IV/CS/2023	Penyampaian Informasi Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“Perseroan”) Submission of Information on the Composition of the Nomination and Remuneration Committee of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company")
OJK BEI	3 April 2023 April 3, 2023	099/IV/CS/2023	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material - Perubahan Pengurus Perseroan Report on Disclosure of Information or Material Facts - Changes in the Company's Management

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Regulator	Tanggal Surat Letter Date	Nomor Surat Letter Number	Perihal Subject
OJK BEI	3 April 2023 April 3, 2023	100/IV/CS/2023	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material atas Pembagian Dividen Tunai PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") Report on Disclosure of Information or Material Facts on the Distribution of Cash Dividends of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company")
OJK BEI	3 April 2023 April 3, 2023	101/IV/CS/2023	Pemberitahuan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Notification of Schedule and Procedures for Cash Dividend Distribution of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI	3 April 2023 April 3, 2023	102/IV/CS/2023	Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Report on the Implementation of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI	3 April 2023 April 3, 2023	103/IV/CS/2023	Laporan Bukti Iklan Pelaksanaan dan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") Report of Proof of Advertisement of the Implementation and Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company")
OJK BEI	4 April 2023 April 4, 2023	104/IV/CS/2023	Penyampaian Bukti Iklan Pembagian Dividen Tunai PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") Submission of Proof of Advertisement for Cash Dividend Distribution of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company")
OJK BEI	10 April 2023 April 10, 2023	105/IV/CS/2023	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Maret 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Report on Securities Holder Registration as of March 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI	17 April 2023 April 17, 2023	108/IV/CS/2023	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material atas Perubahan Anggaran Dasar PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") Report on Disclosure of Information or Material Facts on Amendments to the Articles of Association of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company")
OJK BEI	28 April 2023 April 28, 2023	109/IV/CS/2023	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Tanggal 31 Maret 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Tidak Diaudit) Submission of Interim Financial Statements dated March 31, 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Unaudited)
OJK BEI	08 Mei 2023 May 08, 2023	114/V/CS/2023	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per April 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Report on Securities Holder Registration as of April 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI	29 Mei 2023 May 29, 2023	120/V/CS/2023	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material - Pelunasan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap III Seri B Tahun 2020 Report on Disclosure of Material Information or Facts - Repayment of Sustainable Public Offering of Shelf Registration Bonds III WOM Finance Phase III Series B Year 2020
OJK BEI	08 Juni 2023 June 08, 2023	128/VI/CS/2023	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Mei 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Report on Securities Holder Registration as of May 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI	07 Juli 2023 July 07, 2023	136/VII/CS/2023	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Juni 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Report on Securities Holder Registration as of June 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI	07 Juli 2023 July 07, 2023	137/VII/CS/2023	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap IV Tahun 2020 Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Sustainable Public Offering of Shelf Registration Bonds III WOM Finance Phase IV Year 2020

Regulator	Tanggal Surat Letter Date	Nomor Surat Letter Number	Perihal Subject
OJK BEI	07 Juli 2023 July 07, 2023	138/VII/CS/2023	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I, II, dan III Tahun 2023 Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Sustainable Public Offering of WOM Finance IV Shelf Registration Bonds Phase I, II, and III Year 2023
OJK BEI	07 Juli 2023 July 07, 2023	139/VII/CS/2023	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023 Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Sustainable Public Offering of Shelf Registration Bond IV WOM Finance Phase III Year 2023
OJK BEI	07 Juli 2023 July 07, 2023	141/VII/CS/2023	Penjelasan Volatilitas Efek Explanation of Securities Volatility
OJK BEI	17 Juli 2023 July 17, 2023	144/VII/CS/2023	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material atas Jumlah Dana Yang Dihimpun Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan IV PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Disclosure Report of Information or Material Facts on the Amount of Funds Raised in Sustainable Public Offering IV PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI	31 Juli 2023 July 31, 2023	160/VII/CS/2023	Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan per 30 Juni 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Tidak Diaudit) Submission of Mid-Year Financial Report as of June 30, 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Unaudited)
OJK BEI	31 Juli 2023 July 31, 2023	161/VII/CS/2023	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Tengah Tahunan per 30 Juni 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Tidak Diaudit) Submission of Proof of Advertisement of Mid-Year Financial Report as of June 30, 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Unaudited)
OJK BEI	8 Agustus 2023 August 8, 2023	166/VIII/CS/2023	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Juli 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Report on Securities Holder Registration as of July 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI	21 Agustus 2023 August 21, 2023	168/VIII/CS/2023	Keterbukaan Informasi Kesiapan Dana Pelunasan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap IV Seri B Tahun 2020 Disclosure of Information on the Readiness of Funds for the Repayment of Sustainable Public Offering of Sustainable Bonds III WOM Finance Phase IV Series B Year 2020
OJK BEI	11 September 2023 September 11, 2023	174/IX/CS/2023	Pelunasan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap IV Seri B Tahun 2020 Repayment of Sustainable Public Offering of Shelf Registration Bonds III WOM Finance Phase IV Series B Year 2020
OJK BEI	10 Oktober 2023 October 10, 2023	188/X/CS/2023	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per September 2023 Submission of Monthly Report on Securities Holder Registration as of September 2023
OJK BEI	30 Oktober 2023 October 30, 2023	235/X/CS/2023	Penyampaian Laporan Keuangan Interim per 30 September 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Tidak Diaudit) Submission of Interim Financial Statements as of September 30, 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Unaudited)
OJK BEI	6 November 2023 November 6, 2023	241/XI/CS/2023	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material – Transaksi Afiliasi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") Disclosure Report of Material Information or Facts - Affiliated Transactions PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company")
OJK BEI	7 November 2023 November 7, 2023	244/XI/CS/2023	Transaksi Afiliasi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") Affiliated Transactions of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company")
OJK BEI	8 November 2023 November 8, 2023	247/XI/CS/2023	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Oktober 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Report on Securities Holder Registration as of October 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI	28 November 2023 November 28, 2023	259/XI/CS/2023	Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Notice of Plan to Hold Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Regulator	Tanggal Surat Letter Date	Nomor Surat Letter Number	Perihal Subject
Otoritas Jasa Keuangan | Financial Services Authority			
OJK	17 Januari 2023 January 17, 2023	0063/I/DIR-WOM/2023	Laporan Pindah Alamat Kantor Cabang PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk di Kabupaten Gowa Report of Changing Address of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Branc Office in Gowa Regency
OJK	25 Januari 2023 January 25, 2023	0093/I/DIR-WOM/2023	Penyampaian Laporan Penyaluran Pembiayaan Kepada Debitur yang Terkena Dampak Penyebaran Covid-19 dan Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran Serta Penyampaian Laporan Restrukturisasi Pembiayaan Kepada Debitur yang Terkena Dampak Penyebaran Covid-19 Submission of Financing Distribution Reports to Debtors Affected by The Spread of Covid-19 and Assessed Based on The Accuracy of Payments and Submission of Financing Restructuring Reports to Debtors Affected by The Spread of Covid-19
OJK	20 Februari 2023 February 20, 2023	0184/II/DIR-WOM/2023	Penyampaian Laporan Restrukturisasi Pembiayaan Kepada Debitur yang Terkena Dampak Penyebaran Covid-19 Submission of Financing Restructuring Reports to Debtors Affected by The Spread of Covid-19
OJK	24 Februari 2023 February 24, 2023	0203/II/DIR-WOM/2023	Penyampaian Pemenuhan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Permintaan Data/Dokumen Pengawasan Offsite Perusahaan Pembiayaan Submission of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk's ("Company") Fulfillment of Request for Data/Documents of Offsite Supervision of Financing Companies
OJK	1 Maret 2023 March 1, 2023	0244/III/DIR-WOM/2023	Laporan penutupan KCUUS Brebes Brebes KCUUS closure reporting
OJK	1 Maret 2023 March 1, 2023	0245/III/DIR-WOM/2023	Laporan penutupan KCUUS Pekalongan Pekalongan KCUUS closure reporting
OJK	1 Maret 2023 March 1, 2023	0246/III/DIR-WOM/2023	Laporan penutupan KCUUS Pemalang Pemalang KCUUS closure reporting
OJK	1 Maret 2023 March 1, 2023	0247/III/DIR-WOM/2023	Laporan penutupan KCUUS Jepara Jepara KCUUS closure reporting
OJK	1 Maret 2023 March 1, 2023	0248/III/DIR-WOM/2023	Laporan penutupan KCUUS Kudus Kudus KCUUS closure reporting
OJK	1 Maret 2023 March 1, 2023	0249/III/DIR-WOM/2023	Laporan penutupan KCUUS Purwodadi - Kabupaten Grobogan Purwodadi - Grobogan Regency KCUUS closure reporting
OJK	1 Maret 2023 March 1, 2023	0250/III/DIR-WOM/2023	Laporan penutupan KCUUS Cilacap Cilacap KCUUS closure reporting
OJK	1 Maret 2023 March 1, 2023	0251/III/DIR-WOM/2023	Laporan penutupan KCUUS Wonosobo Wonosobo KCUUS closure reporting
OJK	1 Maret 2023 March 1, 2023	0252/III/DIR-WOM/2023	Laporan penutupan KCUUS Kebumen Kebumen KCUUS closure reporting
OJK	1 Maret 2023 March 1, 2023	0253/III/DIR-WOM/2023	Laporan penutupan KCUUS Purbalingga Purbalingga KCUUS closure reporting
OJK	1 Maret 2023 March 1, 2023	0254/III/DIR-WOM/2023	Laporan penutupan KCUUS Wonogiri Wonogiri KCUUS closure reporting
OJK	1 Maret 2023 March 1, 2023	0255/III/DIR-WOM/2023	Laporan penutupan KCUUS Samarinda Samarinda KCUUS closure reporting
OJK	1 Maret 2023 March 1, 2023	0256/III/DIR-WOM/2023	Laporan penutupan KCUUS Tenggarong Tenggarong KCUUS closure reporting
OJK	14 Maret 2023 March 14, 2023	0330/III/DIR-WOM/2023	Laporan Pindah Alamat Kantor Cabang PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk di Semarang Report of Changing Address of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Branch Office in Semarang

Regulator	Tanggal Surat Letter Date	Nomor Surat Letter Number	Perihal Subject
OJK	14 Maret 2023 March 14, 2023	0331/III/DIR-WOM/2023	Laporan Pindah Alamat Kantor Cabang Unit Usaha Syariah PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk di Semarang Report on the Change of Address of Sharia Business Unit Branch Office of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk in semarang
OJK	24 Maret 2023 March 24, 2023	0356/III/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Penutupan Kantor Cabang UUS Stabat Stabat UUS Branch Office Closure Report Letter
OJK	24 Maret 2023 March 24, 2023	0357/III/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Penutupan Kantor Cabang UUS Binjai Binjai UUS Branch Office Closure Report Letter
OJK	24 Maret 2023 March 24, 2023	0358/III/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Penutupan Kantor Cabang UUS Lubuk Pakam Lubuk Pakam UUS Branch Office Closure Report Letter
OJK	24 Maret 2023 March 24, 2023	0359/III/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Penutupan Kantor Cabang UUS Air Molek - Kabupaten Indragiri Hulu Air Molek - Indragiri Hulu Regency UUS Branch Office Closure Report Letter
OJK	24 Maret 2023 March 24, 2023	0360/III/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Penutupan Kantor Cabang UUS Batam Batam UUS Branch Office Closure Report Letter
OJK	24 Maret 2023 March 24, 2023	0361/III/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Penutupan Kantor Cabang UUS Dumai Dumai UUS Branch Office Closure Report Letter
OJK	24 Maret 2023 March 24, 2023	0362/III/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Penutupan Kantor Cabang UUS Kerinci - Kabupaten Pelalawan Kerinci - Pelalawan Regency UUS Branch Office Closure Report Letter
OJK	24 Maret 2023 March 24, 2023	0363/III/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Penutupan Kantor Cabang UUS Padang Padang UUS Branch Office Closure Report Letter
OJK	24 Maret 2023 March 24, 2023	0364/III/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Penutupan Kantor Cabang UUS Rantau Prapat - Labuhanbatu Rantau Prapat - Labuhanbatu UUS Branch Office Closure Report Letter
OJK	24 Maret 2023 March 24, 2023	0365/III/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Penutupan Kantor Cabang UUS Tanjung Pinang Tanjung Pinang UUS Branch Office Closure Report Letter
OJK	24 Maret 2023 March 24, 2023	0366/III/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Penutupan Kantor Cabang UUS Tebing Tinggi Tebing Tinggi UUS Branch Office Closure Report Letter
OJK	24 Maret 2023 March 24, 2023	0367/III/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Penutupan Kantor Cabang UUS Gorontalo Gorontalo UUS Branch Office Closure Report Letter
OJK	24 Maret 2023 March 24, 2023	0368/III/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Penutupan Kantor Cabang UUS Palu Palu UUS Branch Office Closure Report Letter
OJK	27 Maret 2023 March 27, 2023	0374/III/DIR-WOM/2023	Penyampaian laporan restrukturisasi pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 Submission of financing restructuring reports to debtors affected by the spread of covid-19
OJK	3 April 2023 April 3, 2023	0407/IV/DIR-WOM/2023	Laporan Pindah Alamat Kantor Cabang PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk di Rokan Hilir Report of Changing Address of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Branc Office in Rokan Hilir
OJK	10 April 2023 April 10, 2023	0433/IV/DIR-WOM/2023	Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Audit Committee Evaluation Report of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk on the Implementation of Provision of Audit Services on Annual Historical Financial Information
OJK	11 April 2023 April 11, 2023	0436/IV/DIR-WOM/2023	Permohonan Pembukaan Kantor Cabang Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi Application for Opening Tebo Regency Branch Office, Jambi Province
OJK	12 April 2023 April 12, 2023	0442/IV/DIR-WOM/2023	Laporan Pindah Alamat Kantor Cabang PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk di Bogor IV Report of Changing Address of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Branc Office in Bogor IV

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Regulator	Tanggal Surat Letter Date	Nomor Surat Letter Number	Perihal Subject
OJK	12 April 2023 April 12, 2023	0443/IV/DIR-WOM/2023	Laporan Pindah Alamat Kantor Cabang Unit Usaha Syariah PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk di Bogor IV Report on the Change of Address of Sharia Business Unit Branch Office of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk in Dumai in Bogor IV
OJK	17 April 2023 April 17, 2023	0453/IV/DIR-WOM/2023	Laporan Pengkinian Data dan Informasi Domisili dari Pihak Utama PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk dan/atau Pihak yang Dapat Dihubungi Domicile Data and Information Update Report from The Main Party of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk and/or The Party That Can Be Contacted
OJK	17 April 2023 April 17, 2023	0455/IV/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Report on Changes in the Company's Board of Directors and Board of Commissioners PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK	17 April 2023 April 17, 2023	0456/IV/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Perubahan Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Letter of Report on Changes in Members of the Company's Sharia Supervisory Board PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK	17 April 2023 April 17, 2023	0457/IV/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Perubahan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan (OJK) Letter of Report on Changes in Members of the Company's Sharia Supervisory Board (OJK)
OJK	26 April 2023 April 26, 2023	0459/IV/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Penutupan KCUUS Lampung Lampung KCUUS Closure report letter
OJK	26 April 2023 April 26, 2023	0460/IV/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Penutupan KCUUS Prabumulih Prabumulih KCUUS Closure report letter
OJK	26 April 2023 April 26, 2023	0461/IV/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Penutupan KCUUS Baturaja Baturaja KCUUS Closure report letter
OJK	26 April 2023 April 26, 2023	0462/IV/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Penutupan KCUUS Bengkulu Bengkulu KCUUS Closure report letter
OJK	26 April 2023 April 26, 2023	0463/IV/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Penutupan KCUUS Betung Betung KCUUS Closure report letter
OJK	26 April 2023 April 26, 2023	0464/IV/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Penutupan KCUUS Kayuagung Kayuagung KCUUS Closure report letter
OJK	26 April 2023 April 26, 2023	0465/IV/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Penutupan KCUUS Lahat Lahat KCUUS Closure report letter
OJK	26 April 2023 April 26, 2023	0466/IV/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Penutupan KCUUS Lubuklinggau Lubuklinggau KCUUS Closure report letter
OJK	26 April 2023 April 26, 2023	0467/IV/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Penutupan KCUUS Metro Metro KCUUS Closure report letter
OJK	26 April 2023 April 26, 2023	0468/IV/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Penutupan KCUUS Tugu Mulyo Tugu Mulyo KCUUS Closure report letter
OJK	26 April 2023 April 26, 2023	0469/IV/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Penutupan KCUUS Tembesi Tembesi KCUUS Closure report letter
OJK	26 April 2023 April 26, 2023	0470/IV/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Penutupan KCUUS Palopo Palopo KCUUS Closure report letter
OJK	26 April 2023 April 26, 2023	0471/IV/DIR-WOM/2023	Laporan Perubahan Anggaran Dasar – Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Report on Changes to the Articles of Association - Purposes and Objectives, as well as Business Activities of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK	26 April 2023 April 26, 2023	0472/IV/DIR-WOM/2023	Surat Laporan Penutupan KCUUS Parepare Parepare KCUUS Closure report letter

Regulator	Tanggal Surat Letter Date	Nomor Surat Letter Number	Perihal Subject
OJK	27 April 2023 April 27, 2023	0476/IV/DIR-WOM/2023	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material – Pelunasan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II Seri A Tahun 2022 Report on Disclosure of Material Information or Facts - Repayment of Sustainable Public Offering of Shelf Registration Bond IV WOM Finance Phase II Series A Year 2022
OJK	27 April 2023 April 27, 2023	0482/IV/DIR-WOM/2023	Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Periode Tahun 2022 Report on The Implementation of Good Corporate Governance for Finance Companies for The Period of 2022
OJK	27 April 2023 April 27, 2023	0483/IV/DIR-WOM/2023	Penyampaian Laporan Stimulus Pembiayaan yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran, Laporan Stimulus Pembiayaan Restrukturisasi, dan Penyampaian Laporan Rekapitulasi Stimulus Pembiayaan Restrukturisasi Submission of Financing Stimulus Reports Assessed Based on Payment Accuracy, Restructuring Financing Stimulus Reports, and Submission of Restructuring Financing Stimulus Recapitulation Reports.
OJK	2 Mei 2023 May 2, 2023	0488/V/DIR-WOM/2023	Tanggapan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") Terhadap Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-84/PM.22/2023 tertanggal 6 Januari 2023 Perihal Kewajiban Pelaporan dan Pengkinian Data Beneficial Owner Kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Dalam Rangka Pemenuhan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Himbauan Upaya Penguatan Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan The response of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") to the Financial Services Authority Letter No. S-84/PM.22/2023 dated January 6, 2023, on the Obligation of Reporting and Updating Data of Beneficial Owner to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Fulfilling the National Strategy for Corruption Prevention and the Mandate to Strengthening the AML and CFT Programs in the Financial Services Sector.
OJK	23 Mei 2023 May 23, 2023	0552/V/DIR-WOM/2023	Laporan Pindah Alamat Kantor Cabang PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk di Sukabumi Report of Changing Address of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Branc Office in Sukabumi
OJK	23 Mei 2023 May 23, 2023	0553/V/DIR-WOM/2023	Laporan Pindah Alamat Kantor Cabang Unit Usaha Syariah PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk di Sukabumi Report on the Change of Address of Sharia Business Unit Branch Office of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk in Dumai in Sukabumi
OJK	25 Mei 2023 May 25, 2023	0555/V/DIR-WOM/2023	Penyampaian Laporan Rekapitulasi Stimulus Pembiayaan Restrukturisasi Submission of Restructuring Financing Stimulus Recapitulation Report
OJK	5 Juni 2023 June 5, 2023	0595/VI/DIR-WOM/2023	Laporan Perubahan Pimpinan UUS PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Report on Changes in UUS Leadership PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK	26 Juni 2023 June 26, 2023	0644/VI/DIR-WOM/2023	Penyampaian Laporan Rekapitulasi Stimulus Pembiayaan Restrukturisasi Submission of Restructuring Financing Stimulus Recapitulation Report
OJK	25 Juli 2023 July 25, 2023	0762/VII/DIR-WOM/2023	Penyampaian Laporan Stimulus Pembiayaan yang dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran, Laporan Stimulus Pembiayaan Restrukturisasi, Serta penyampaian Laporan Rekapitulasi Stimulus Pembiayaan Restrukturisasi Submission of Financing Stimulus Report assessed based on payment accuracy, Restructuring Financing Stimulus Report, and submission of Restructuring Financing Stimulus Recapitulation Report.
OJK	28 Juli 2023 July 28, 2023	150/VII/CS/2023	Penyampaian Laporan Realisasi Rencana Bisnis Tahunan per Juni 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Business Plan Realization Report as of June 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK	28 Juli 2023 July 28, 2023	151/VII/CS/2023	Penyampaian Laporan Realisasi Rencana Bisnis per Juni 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Unit Usaha Syariah) Submission of Business Plan Realization Report as of June 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Sharia Business Unit)

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Regulator	Tanggal Surat Letter Date	Nomor Surat Letter Number	Perihal Subject
OJK	28 Juli 2023 July 28, 2023	152/VII/CS/2023	Penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Tahunan per Juni 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Annual Business Plan Supervision Report as of June 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK	28 Juli 2023 July 28, 2023	153/VII/CS/2023	Penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis per Juni 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Unit Usaha Syariah) Submission of Business Plan Supervision Report as of June 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Sharia Business Unit)
OJK	31 Juli 2023 July 31, 2023	0767/VII/DIR-WOM/2023	Permohonan Peningkatan KSKC menjadi KC Muara Enim Application for upgrading KSKC to KC Muara Enim
OJK	1 Agustus 2023 August 1, 2023	0778/VIII/DIR-WOM/2023	Laporan Pindah Alamat KC Jakarta Pusat Address change report KC Central Jakarta
OJK	1 Agustus 2023 August 01, 2023	0779/VIII/DIR-WOM/2023	Laporan Pindah Alamat KCUUS Jakarta Pusat Address change report KCUUS Central Jakarta
OJK	3 Agustus 2023 August 3, 2023	0781/VIII/DIR-WOM/2023	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") terhadap Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1575/NB.211/2023 perihal Surat Konfirmasi dan Permintaan Penyampaian Action Plan Perseroan tertanggal 06 Juli 2023 ("Surat OJK") PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (the "Company") to the Letter of the Financial Services Authority Number S-1575/NB.211/2023 regarding Confirmation Letter and Request for Submission of the Company's Action Plan dated July 06, 2023 (the "OJK Letter").
OJK	15 Agustus 2023 August 15, 2023	0821/VIII/DIR-WOM/2023	Laporan pindah alamat KC Surabaya II Address change report KC Surabaya II
OJK	15 Agustus 2023 August 15, 2023	0822/VIII/DIR-WOM/2023	Surat Permohonan User Administrator *Responsible Officer* dalam penggunaan aplikasi *online* OJK Responsible Officer User Administrator Application Letter in the use of OJK online application
OJK	23 Agustus 2023 August 23, 2023	0840/VIII/DIR-WOM/2023	Penyampian Laporan Rekapitulasi Stimulus Pembiayaan Restrukturisasi Submission of Restructuring Financing Stimulus Recapitulation Report
OJK	31 Agustus 2023 August 31, 2023	0859/VIII/DIR-WOM/2023	Tanggapan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") Terhadap Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-84/PM.22/2023 tertanggal 6 Januari 2023 Perihal Kewajiban Pelaporan dan Pengkinian Data Beneficial Owner Kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Dalam Rangka Pemenuhan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Himbauan Upaya Penguatan Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan The response of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") to the Financial Services Authority Letter No. S-84/PM.22/2023 dated January 6, 2023, on the Obligation of Reporting and Updating Data of Beneficial Owner to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Fulfilling the National Strategy for Corruption Prevention and the Mandate to Strengthening the AML and CFT Programs in the Financial Services Sector
OJK	20 September 2023 September 20, 2023	0935/IX/DIR-WOM/2023	Penyampaian Laporan Rekapitulasi Stimulus Pembiayaan Restrukturisasi Submission of Restructuring Financing Stimulus Recapitulation Report
OJK	2 Oktober 2023 October 2, 2023	0978/X/DIR-WOM/2023	Laporan Pindah Alamat Kantor Cabang PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk di Kabupaten Brebes II Report on the Change of Address of Branch Office of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk in Brebes II Regency
OJK	4 Oktober 2023 October 4, 2023	0993/X/DIR-WOM/2023	Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Pihak Utama Komisaris PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Application to Obtain Approval To Become The Main Party Commissioner of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK	10 Oktober 2023 October 10, 2023	1008/X/DIR-WOM/2023	Peningkatakan Kantor Selain Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Krian - Sidoarjo 2 Upgrading Office from Branch Office to Krian Branch Office - Sidoarjo 2

Regulator	Tanggal Surat Letter Date	Nomor Surat Letter Number	Perihal Subject
OJK	23 November 2023 November 23, 2023	1038/X/DIR-WOM//2023	Penyampaian Laporan Stimulus Pembiayaan yang Dinilai Berdasarkan Ketetapan Pembayaran, Laporan Stimulus Pembiayaan Restrukturisasi, Serta Penyampaian Laporan Rekapitulasi Stimulus Pembiayaan Restrukturisasi Submission of Financing Stimulus Reports Assessed Based on Payment Provisions, Restructuring Financing Stimulus Reports, and Submission of Restructuring Financing Stimulus Recapitulation Reports
OJK	24 November 2023 November 24, 2023	1139/XI/DIR-WOM/2023	Penyampaian Laporan Rekapitulasi Stimulus Pembiayaan Restrukturisasi Submission of Restructuring Financing Stimulus Recapitulation Report
OJK	27 November 2023 November 27, 2023	1144/XI/DIR-WOM/2023	Permohonan Peningkatan Kantor Selain Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Cilacap 3 Request to Upgrade Office Other than Branch Office to Cilacap 3 Branch Office

Akses Informasi & Data Perusahaan

Information Access & Corporate Data

Akses Informasi Perusahaan

Dengan memberikan akses informasi yang memadai, Perusahaan berdedikasi untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi bagi para pemangku kepentingan, termasuk para pemegang saham. Pada tahun 2023, Perseroan akan menyediakan informasi penting dan data perusahaan kepada publik melalui situs *web* Perseroan (tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) untuk para pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan. Publik dapat memperoleh data dan informasi Perusahaan secara eksternal melalui situs *web* resmi Perusahaan, media cetak, papan diskusi internal dan media elektronik lainnya.

Company Information Access

By granting access to sufficient information, the Company is dedicated to upholding the principle of transparency for its stakeholders, including shareholders. In 2023, the company will make vital information and corporate data available to the public via its website (available in both Indonesian and English) for shareholders and other interested parties. The public may obtain the Company's data and information externally via the Company's official website, print media, internal discussion boards, and other electronic media.

Media Elektronik

Perusahaan membangun dan memelihara komunikasi dengan pemangku kepentingan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai yaitu:

Web: www.wom.co.id
Email: corporate_secretary@wom.co.id
Contact Center: 150999

Electronic Media

The Company builds and maintains communication with stakeholders through appropriate information and communication technology, namely:

Web: www.wom.co.id
Email: corporate_secretary@wom.co.id
Contact Center: 150999

Situs Website

Perusahaan telah memiliki media untuk penyediaan informasi Publik berupa situs *web* yang dapat diakses melalui alamat: www.wom.co.id. Situs ini merupakan media daring yang ditujukan untuk publik. Memuat berbagai informasi dan data mengenai Perusahaan, seperti produk, layanan, berita, rilis media dan informasi penting lainnya yang ditujukan untuk seluruh pemangku kepentingan. Situs *web* Perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting Perusahaan.

Website

The Company already has a facility for the disclosure of Public Information through a website: www.wom.co.id. This site is an online media intended for the public, contained various information and data about the Company, such as products, services, news, media releases and other important information for all stakeholders. The Company's website publishes the Company's policies and important information.

Kegiatan Media Relation

Sepanjang 2023, Perusahaan telah melakukan kegiatan Media Relations sebanyak 88 (delapan puluh delapan) kali meliputi:

Media Relations Activities

Throughout 2023, the Company has carried out Media Relations activities 88 (eighty eight) times, as follows:

Tanggal Release Date	Judul Release Titles
2 Februari 2023 February 2, 2023	Ekspansi di Pulau Sulawesi, WOM Finance Resmikan Kantor Cabang Kendari Expansion in Sulawesi Island, WOM Finance Inaugurates Kendari Branch Office
9 Februari 2023 February 9, 2023	Terus Lakukan Ekspansi, WOM Finance Rambah Musi Banyuasin untuk Cabang Baru Continue to Expand, WOM Finance Establishes New Branches in Musi Banyuasin
10 Februari 2023 February 10, 2023	Perluas Bisnis di Sulawesi Utara, WOM Finance Resmikan Kantor Cabang Manado Expanding Business in North Sulawesi, WOM Finance Inaugurates Manado Branch Office

Tanggal Release Date	Judul Release Titles
20 Februari 2023 February 20, 2023	Berhadiah Utama Mobil, WOMBASTIS 2022 Periode Kedua akan Segera diundi With the Main Prize of the Car, WOMBASTIS 2022 Second Period will soon be drawn
28 Februari 2023 February 28, 2023	Pengumuman Pemenang Pengundian WOMBASTIS 2022 Periode 2 Announcement of WOMBASTIS 2022 Period 2 Draw Winners
1 Maret 2023 March 1, 2023	Buka Cabang Baru, WOM Finance Kantor Cabang Tangerang Selatan 3 Optimis Kinerja Makin Positif Opening New Branch, WOM Finance South Tangerang Branch Office 3 Optimistic Performance Will Be More Positive
3 Maret 2023 March 3, 2023	Dongkrak Penjualan, WOM Finance Buka Kantor Cabang Tangerang 6 Boosting Sales, WOM Finance Opens Tangerang Branch Office 6
3 Maret 2023 March 3, 2023	Tingkatkan Pelayanan dan Inovasi, WOM Finance Semarang Relokasi Kantor Baru Improving Service and Innovation, WOM Finance Semarang Relocates New Office
8 Maret 2023 March 8, 2023	WOM Finance Bagi-bagi Hadiah dengan Grand Prize 1 Unit Mobil Hybrid WOM Finance Distributes Prizes with Grand Prize of 1 Unit of Hybrid Car
16 Maret 2023 March 16, 2023	WOM Finance Bagikan Ratusan Kacamata Gratis untuk Masyarakat Prasejahtera WOM Finance Distributes Hundreds of Free Glasses to Underprivileged Community
20 Maret 2023 March 20, 2023	HUT ke-41, WOM Finance Hibur Anak-Anak dengan Mendongeng Bersama di Ciledug 41st Anniversary, WOM Finance Entertains Children with Shared Storytelling in Ciledug
20 Maret 2023 March 20, 2023	HUT ke-41, WOM Finance Hibur Anak-Anak dengan Mendongeng Bersama di Cibinong 41st Anniversary, WOM Finance Entertains Children with Shared Storytelling in Cibinong
20 Maret 2023 March 20, 2023	HUT ke-41, WOM Finance Hibur Anak-Anak dengan Mendongeng Bersama di Semarang 41st Anniversary, WOM Finance Entertains Children with Shared Storytelling in Semarang
21 Maret 2023 March 21, 2023	HUT ke-41, WOM Finance Hibur Anak-Anak dengan Mendongeng Bersama di Lahat 41st Anniversary, WOM Finance Entertains Children with Shared Storytelling in Lahat
21 Maret 2023 March 21, 2023	HUT ke-41, WOM Finance Hibur Anak-Anak dengan Mendongeng Bersama di Malang 41st Anniversary, WOM Finance Entertains Children with Shared Storytelling in Malang
21 Maret 2023 March 21, 2023	HUT ke-41, WOM Finance Hibur Anak-Anak dengan Mendongeng Bersama di Kuningan 41st Anniversary, WOM Finance Entertains Children with Shared Storytelling in Kuningan
21 Maret 2023 March 21, 2023	HUT ke-41, WOM Finance Hibur Anak-Anak dengan Mendongeng Bersama di Pekanbaru 41st Anniversary, WOM Finance Entertains Children with Shared Storytelling in Pekanbaru
21 Maret 2023 March 21, 2023	HUT ke-41, WOM Finance Hibur Anak-Anak dengan Mendongeng Bersama di Solo 41st Anniversary, WOM Finance Entertains Children with Shared Storytelling in Solo
21 Maret 2023 March 21, 2023	HUT ke-41, WOM Finance Hibur Anak-Anak dengan Mendongeng Bersama di Gorontalo 41st Anniversary, WOM Finance Entertains Children with Shared Storytelling in Gorontalo
30 Maret 2023 March 30, 2023	WOM Finance Selenggarakan RUPST & RUPSLB WOM Finance Holds AGMS & EGMS
3 April 2023 April 3, 2023	HUT ke-41, WOM Finance Hibur Anak-Anak dengan Mendongeng Bersama di Makassar 41st Anniversary, WOM Finance Entertains Children with Shared Storytelling in Makassar
10 April 2023 April 10, 2023	Perluas Bisnis, WOM Finance Salurkan Pembiayaan Motor Listrik Expanding Business, WOM Finance Distributes Electric Motor Financing
12 April 2023 April 12, 2023	Relokasi Cabang, WOM Finance Kantor Cabang Cibinong Optimis Kinerja Makin Positif Branch Relocation, WOM Finance Cibinong Branch Office Optimistic that Performance Will Be More Positive
12 April 2023 April 12, 2023	WOM Finance Serahkan Hadiah Utama Undian Berhadiah WOMBASTIS 2022 Kepada Konsumen WOM Finance Hands Over the Grand Prize of WOMBASTIS 2022 Lucky Draw to Consumers
4 Mei 2023 May 4, 2023	Rayakan Idul Fitri, WOM Finance Bantu Ribuan Santri Pondok Pesantren Wonosobo Celebrating Eid al-Fitr, WOM Finance Helps Thousands of Wonosobo Islamic Boarding School Students
4 Mei 2023 May 4, 2023	Rayakan Idul Fitri, WOM Finance Bantu Ribuan Santri Pondok Pesantren Banyuasin Celebrating Eid al-Fitr, WOM Finance Helps Thousands of Banyuasin Islamic Boarding School Students
4 Mei 2023 May 4, 2023	Rayakan Idul Fitri, WOM Finance Bantu Ribuan Santri Pondok Pesantren Tangsel 3 Celebrating Eid al-Fitr, WOM Finance Helps Thousands of Tangsel 3 Islamic Boarding School Students
4 Mei 2023 May 4, 2023	Rayakan Idul Fitri, WOM Finance Bantu Ribuan Santri Pondok Pesantren Purwakarta Celebrating Eid al-Fitr, WOM Finance Helps Thousands of Purwakarta Islamic Boarding School Students

Akses Informasi & Data Perusahaan

Information Access & Corporate Data

Tanggal Release Date	Judul Release Titles
4 Mei 2023 May 4, 2023	Rayakan Idul Fitri, WOM Finance Bantu Ribuan Santri Pondok Pesantren Bogor Celebrating Eid al-Fitr, WOM Finance Helps Thousands of Bogor Islamic Boarding School Students
4 Mei 2023 May 4, 2023	Rayakan Idul Fitri, WOM Finance Bantu Ribuan Santri Pondok Pesantren Cikarang Celebrating Eid al-Fitr, WOM Finance Helps Thousands of Cikarang Islamic Boarding School Students
23 Mei 2023 May 23, 2023	Perluas Akses Layanan Pembiayaan, WOM Finance Buka Kantor Cabang Jakarta Utara Expanding Access to Financing Services, WOM Finance Opens North Jakarta Branch Office
27 Mei 2023 May 27, 2023	WOM Finance Resmikan Kantor Cabang Toba, Optimis Bisnis Makin Berkembang Positif WOM Finance Inaugurates Toba Branch Office, Optimistic Business Will Grow Positively
30 Mei 2023 May 30, 2023	Penuhi Hak Anak, WOM Finance Resmikan Ruang Ramah Anak di Jakarta Utara Fulfilling Children's Rights, WOM Finance Inaugurates Child Friendly Space in North Jakarta
12 Juni 2023 June 12, 2023	Sambut Hari Raya Waisak, WOM Finance Berikan Bantuan ke Vihara Samarinda Welcoming Vesak Day, WOM Finance Provides Assistance to Vihara Samarinda
12 Juni 2023 June 12, 2023	Sambut Hari Raya Waisak, WOM Finance Berikan Bantuan ke Vihara Jakarta Utara Welcoming Vesak Day, WOM Finance Provides Assistance to Vihara Jakarta Utara
12 Juni 2023 June 12, 2023	Sambut Hari Raya Waisak, WOM Finance Berikan Bantuan ke Vihara Parepare Welcoming Vesak Day, WOM Finance Provides Assistance to Vihara Parepare
12 Juni 2023 June 12, 2023	Sambut Hari Raya Waisak, WOM Finance Berikan Bantuan ke Vihara Mauk Welcoming Vesak Day, WOM Finance Provides Assistance to Vihara Mauk
12 Juni 2023 June 12, 2023	Sambut Hari Raya Waisak, WOM Finance Berikan Bantuan ke Vihara Mojokerto Welcoming Vesak Day, WOM Finance Provides Assistance to Vihara Mojokerto
14 Juni 2023 June 14, 2023	Sambut Hari Raya Waisak, WOM Finance Berikan Bantuan ke Vihara Medan Welcoming Vesak Day, WOM Finance Provides Assistance to Vihara Medan
14 Juni 2023 June 14, 2023	Sambut Hari Raya Waisak, WOM Finance Berikan Bantuan ke Vihara Magelang Welcoming Vesak Day, WOM Finance Provides Assistance to Vihara Samarinda
15 Juni 2023 June 15, 2023	Sambut Hari Raya Waisak, WOM Finance Berikan Bantuan ke Vihara Bandung Welcoming Vesak Day, WOM Finance Provides Assistance to Vihara Bandung
16 Juni 2023 June 16, 2023	Sambut Hari Raya Waisak, WOM Finance Berikan Bantuan ke Vihara Kuala Tungkal Welcoming Vesak Day, WOM Finance Provides Assistance to Vihara Kuala Tungkal
23 Juni 2023 June 23, 2023	WOM Finance Ajak UMKM untuk Memanfaatkan Teknologi dalam Pemasaran Produk WOM Finance Invites MSMEs to Utilize Technology in Product Marketing
29 Juni 2023 June 29, 2023	Idul Adha 1444 H, WOM Finance Salurkan Daging Kurban di Sekitar Kantor Cabang Balaraja Eid al-Adha 1444 H, WOM Finance Distributes Sacrificial Meat Around Balaraja Branch Office
1 Juli 2023 July 1, 2023	Idul Adha 1444 H, WOM Finance Salurkan Daging Kurban di Sekitar Kantor Cabang Gorontalo Eid al-Adha 1444 H, WOM Finance Distributes Sacrificial Meat Around Gorontalo Branch Office
1 Juli 2023 July 1, 2023	Idul Adha 1444 H, WOM Finance Salurkan Daging Kurban di Sekitar Kantor Cabang Karawang Eid al-Adha 1444 H, WOM Finance Distributes Sacrificial Meat Around Karawang Branch Office
1 Juli 2023 July 1, 2023	Idul Adha 1444 H, WOM Finance Salurkan Daging Kurban di Sekitar Kantor Cabang Madiun Eid al-Adha 1444 H, WOM Finance Distributes Sacrificial Meat Around Madiun Branch Office
1 Juli 2023 July 1, 2023	Idul Adha 1444 H, WOM Finance Salurkan Daging Kurban di Sekitar Kantor Cabang Cilacap Eid al-Adha 1444 H, WOM Finance Distributes Sacrificial Meat Around Cilacap Branch Office
1 Juli 2023 July 1, 2023	Idul Adha 1444 H, WOM Finance Salurkan Daging Kurban di Sekitar Kantor Cabang Stabat Eid al-Adha 1444 H, WOM Finance Distributes Sacrificial Meat Around Stabat Branch Office
1 Juli 2023 July 1, 2023	Idul Adha 1444 H, WOM Finance Salurkan Daging Kurban di Sekitar Kantor Cabang Bengkulu Eid al-Adha 1444 H, WOM Finance Distributes Sacrificial Meat Around Bengkulu Branch Office
1 Juli 2023 July 1, 2023	Idul Adha 1444 H, WOM Finance Salurkan Daging Kurban di Sekitar Kantor Cabang Sumedang Eid al-Adha 1444 H, WOM Finance Distributes Sacrificial Meat Around Sumedang Branch Office
3 Juli 2023 July 3, 2023	Idul Adha 1444 H, WOM Finance Salurkan Daging Kurban di Sekitar Kantor Cabang Berau Eid al-Adha 1444 H, WOM Finance Distributes Sacrificial Meat Around Berau Branch Office
18 Juli 2023 July 18, 2023	WOM Finance Ajak Masyarakat Hidup Sehat untuk Hindari Stroke WOM Finance Invites People to Live Healthy to Prevent Stroke
25 Juli 2023 July 25, 2023	WOM Finance Resmikan Kantor Cabang Tebo, Optimis Kinerja Makin Positif WOM Finance Inaugurates Tebo Branch Office, Optimistic that Performance Will Be More Positive

Tanggal Release Date	Judul Release Titles
31 Juli 2023 July 31, 2023	Semester 1 tahun 2023, Laba Bersih WOM Finance Tumbuh 10% In Semester 1 of 2023, WOM Finance's Net Profit Grows 10%
16 Agustus 2023 August 16, 2023	Semarak Kemerdekaan RI, WOM Finance Donasikan Tempat Sampah di Semarang Celebrating Indonesia's Independence, WOM Finance Donates Trash Bins in Semarang
16 Agustus 2023 August 16, 2023	Semarak Kemerdekaan RI, WOM Finance Donasikan Tempat Sampah di Purwokerto Celebrating Indonesia's Independence, WOM Finance Donates Trash Bins in Purwokerto
16 Agustus 2023 August 16, 2023	Semarak Kemerdekaan RI, WOM Finance Donasikan Tempat Sampah di Lubuk Pakam Celebrating Indonesia's Independence, WOM Finance Donates Trash Bins in Lubuk Pakam
18 Agustus 2023 August 18, 2023	Semarak Kemerdekaan RI, WOM Finance Donasikan Tempat Sampah di Palu Celebrating Indonesia's Independence, WOM Finance Donates Trash Bins in Palu
19 Agustus 2023 August 19, 2023	Semarak Kemerdekaan RI, WOM Finance Donasikan Tempat Sampah di Bogor Celebrating Indonesia's Independence, WOM Finance Donates Trash Bins in Bogor
19 Agustus 2023 August 19, 2023	Semarak Kemerdekaan RI, WOM Finance Donasikan Tempat Sampah di Bandung Celebrating Indonesia's Independence, WOM Finance Donates Trash Bins in Bandung
22 Agustus 2023 August 22, 2023	Semarak Kemerdekaan RI, WOM Finance Donasikan Tempat Sampah di Ngawi Celebrating Indonesia's Independence, WOM Finance Donates Trash Bins in Ngawi
28 Agustus 2023 August 28, 2023	Semarak Kemerdekaan RI, WOM Finance Donasikan Tempat Sampah di Tebo Celebrating Indonesia's Independence, WOM Finance Donates Trash Bins in Tebo
28 Agustus 2023 August 28, 2023	Semarak Kemerdekaan RI, WOM Finance Donasikan Tempat Sampah di Ciputat Celebrating Indonesia's Independence, WOM Finance Donates Trash Bins in Ciputat
6 September 2023 September 6, 2023	WOM Finance Bagikan Ratusan Kacamata Gratis untuk Masyarakat Prasejahtera WOM Finance Distributes Hundreds of Free Glasses to Underprivileged Communit
9 September 2023 September 9, 2023	WOM Finance Resmikan Kantor Cabang Surabaya 5, Optimis Kinerja Makin Positif WOM Finance Inaugurates Surabaya 5 Branch Office, Optimistic Business Will Grow Positively
20 September 2023 September 20, 2023	WOM Finance Dukung Peningkatanm Literasi Keuangan di Bandung WOM Finance Support Increasing Financial Literacy in Bandung
9 Oktober 2023 October 9, 2023	Upgrade Cabang, WOM Finance Kantor Cabang Ponorogo Optimis Kinerja Makin Positif Branch Upgrade, WOM Finance Ponorogo Branch Office Optimistic that Performance Will Be More Positive
17 Oktober 2023 October 17, 2023	Perkuat Layanan, WOM Finance Resmikan Kantor Cabang Tangerang 5 Strengthening Services, WOM Finance Inaugurates Tangerang 5 Branch Office
19 Oktober 2023 October 19, 2023	WOM Finance Edukasi Masyarakat Melalui Inklusi Keuangan WOM Finance Educates the Community Through Financial Inclusion
31 Oktober 2023 October 31, 2023	WOM Finance Terus Catatkan Kinerja Positif WOM Finance Continues to Record Positive Performance
6 November 2023 November 6, 2023	WOM Finance Kenalkan Budaya Batik kepada Pelajar Sekolah di Pekalongan WOM Finance Introduces Batik Culture to School Students in Pekalongan
15 November 2023 November 15, 2023	Perkuat Perekonomian Palembang, WOM Finance Resmikan Kantor Cabang Palembang 2 Strengthening Palembang's Economy, WOM Finance Inaugurates Palembang Branch Office 2
22 November 2023 November 22, 2023	Dekatkan Diri ke Masyarakat, WOM Finance Resmikan Kantor Cabang Jakarta Selatan 2 Getting Closer to the Community, WOM Finance Inaugurates South Jakarta Branch Office 2
8 Desember 2023 December 8, 2023	WOM Finance Bagikan Ratusan Kacamata Gratis untuk Masyarakat Prasejahtera WOM Finance Distributes Hundreds of Free Glasses to Underprivileged Community
9 Desember 2023 December 9, 2023	Perkuat Layanan Bisnis, WOM Finance Resmikan Kantor Cabang Surabaya 3 Strengthening Business Services, WOM Finance Inaugurates Surabaya Branch Office 3
9 Desember 2023 December 9, 2023	WOM Finance Berbagi Kasih Natal bersama Anak-Anak Panti Asuhan di Makassar WOM Finance Shares Christmas Love with Children of Orphanages in Makassar
13 Desember 2023 December 13, 2023	WOM Finance Berbagi Kasih Natal bersama Anak-Anak Panti Asuhan di Solo WOM Finance Shares Christmas Love with Children of Orphanages in Solo
16 Desember 2023 December 16, 2023	WOM Finance Berbagi Kasih Natal bersama Anak-Anak Panti Asuhan di Salatiga WOM Finance Shares Christmas Love with Children of Orphanages in Salatiga

Akses Informasi & Data Perusahaan

Information Access & Corporate Data

Tanggal Release Date	Judul Release Titles
16 Desember 2023 December 16, 2023	WOM Finance Berbagi Kasih Natal bersama Anak-Anak Panti Asuhan di Surabaya Timur WOM Finance Shares Christmas Love with Children of Orphanages in East Surabaya
17 Desember 2023 December 17, 2023	WOM Finance Berbagi Kasih Natal bersama Anak-Anak Panti Asuhan di Bandung WOM Finance Shares Christmas Love with Children of Orphanages in Bandung
17 Desember 2023 December 17, 2023	WOM Finance Berbagi Kasih Natal bersama Anak-Anak Panti Asuhan di Palembang WOM Finance Shares Christmas Love with Children of Orphanages in Palembang
18 Desember 2023 December 18, 2023	WOM Finance Berbagi Kasih Natal bersama Anak-Anak Panti Asuhan di Jakarta Selatan WOM Finance Shares Christmas Love with Children of Orphanages in South Jakarta
20 Desember 2023 December 20, 2023	WOM Finance Berbagi Kasih Natal bersama Anak-Anak Panti Asuhan di Semarang WOM Finance Shares Christmas Love with Children of Orphanages in Semarang
20 Desember 2023 December 20, 2023	WOM Finance Luncurkan Program Logam Mulia MasKu untuk Haji WOM Finance Launches MasKu Precious Metal Program for Hajj
20 Desember 2023 December 20, 2023	WOM Finance Berbagi Kasih Natal bersama Anak-Anak Panti Asuhan di Samarinda WOM Finance Shares Christmas Love with Children of Orphanages in Semarang
22 Desember 2023 December 22, 2023	WOM Finance Berbagi Kasih Natal bersama Anak-Anak Panti Asuhan di Medan WOM Finance Shares Christmas Love with Children of Orphanages in Medan
23 Desember 2023 December 23, 2023	WOM Finance Berbagi Kasih Natal bersama Anak-Anak Panti Asuhan di Cikupa WOM Finance Shares Christmas Love with Children of Orphanages in Cikupa

Sepanjang 2023, Perusahaan telah melakukan kegiatan Media Visit sebanyak 13 (tiga belas) kali meliputi:

Throughout 2023, the Company has carried out activities Media Visit 13 (thirteen) times including:

Tanggal | Date	Media
24 Februari 2023 February 24, 2023	Media Visit Pikiran Rakyat Media Visit by Pikiran Rakyat
15 Maret 2023 March 15, 2023	Media Visit Harian Fajar Media Visit by Harian Fajar
30 Maret 2023 March 30, 2023	*Press Conference* RUPST dan RUPSLB 2023 Press Conference of AGMS and EGMS 2023
23 Juni 2023 June 23, 2023	Media Visit Radar Bogor Media Visit by Radar Bogor
26 Juni 2023 June 26, 2023	Media Visit Harian Jogja Media Visit by Harian Jogja
30 Juli 2023 July 30, 2023	*Company Visit* Harian Jogja ke WOM Finance Company Visit Harian Jogja to WOM Finance
1 Agustus 2023 August 1, 2023	Media Visit Tribun Jateng Media Visit by Tribun Jateng
11 Oktober 2023 October 11, 2023	Media Visit Dewan Pers Media Visit by Dewan Pers
12 Oktober 2023 October 12, 2023	Media Visit Liputan6.com Media Visit by Liputan6.com
13 Oktober 2023 October 13, 2023	Media Visit Tangerang Ekspress Media Visit by Tangerang Ekspress
24 November 2023 November 24, 2023	Media Visit Bisnis Indonesia Jawa Barat Media Visit by Bisnis Indonesia Jawa Barat
14 Desember 2023 December 14, 2023	Media Visit Bisnis Indonesia Jawa Tengah Media Visit by Bisnis Indonesia Jawa Tengah
18 Desember 2023 December 14, 2023	Media Visit Tribun Jogja Media Visit by Tribun Jogja

Hubungan Investor
Investor Relations

Dalam rangka memenuhi prinsip Perseroan yang mudah dan transparan, dengan menjaga hubungan baik antara Perseroan dengan investor, regulator dan para pemangku kepentingan lainnya, Perseroan telah membentuk divisi yang secara khusus mengelola hal-hal terkait hubungan investor, yaitu Divisi Financial Planning and Investor Relation. Secara berkala Perseroan menyampaikan informasi laporan keuangan melalui situs resmi www.wom.co.id. Melalui *website*, Perseroan menyediakan materi terkait kinerja bisnis perseroan yang dapat dilihat dan diunduh oleh calon investor.

To fulfill the Company's principles of ease and transparency, by maintaining good relations between the Company and investors, regulators and other stakeholders, the Company has established a division that specifically manages matters related to investor relations, namely the Financial Planning and Investor Relations Division. Periodically, the Company submits financial statement information through www.wom.co.id's official website. Through the website, the Company provides material related to the company's business performance that can be viewed and downloaded by potential investors.

Selain itu, Perseroan juga memfasilitasi berbagai layanan informasi terkait investor. Di antaranya melalui pertemuan secara langsung, konferensi telepon, korespondensi melalui surat elektronik, serta kunjungan langsung. Korespondensi melalui surat elektronik dapat dilakukan melalui alamat corporate_secretary@wom.co.id.

In addition, the Company facilitates various information services related to investors. These include face-to-face meetings, telephone conferences, correspondence via electronic mail and direct visits. Correspondence via electronic mail can be sent to the address corporate_secretary@wom.co.id.

Sebagai bagian dari kewajiban Perseroan sebagai perusahaan Publik, Perseroan telah melaksanakan Paparan Publik (*Public Expose*) pada tanggal 31 Oktober 2023. *Public Expose* ini dihadiri oleh pemegang saham, analis saham dan perwakilan Bank - Bank yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Perseroan.

As part of the Company's obligations as a Public Company, the Company held a Public Expose on October 31, 2023. Shareholders, stock analysts and representatives of banks that have cooperation agreements with the Company attended this Public Expose.

Fungsi Kepatuhan
Compliance Function

Dasar Hukum

Berdasarkan ketentuan POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan perubahannya sebagaimana tercantum pada POJK No. 29/POJK.05/2020, perusahaan wajib memiliki anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dan satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan Perseroan

Perseroan telah menunjuk Presiden Direktur sebagai anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Presiden Direktur dalam menjalankan fungsi kepatuhan, dibantu oleh Legal Counsel & Anti Fraud Division yang berperan sebagai satuan kerja fungsi kepatuhan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Legal Counsel & Anti Fraud Division dipimpin oleh seorang Division Head dan untuk menjalankan fungsi kepatuhan, Legal Counsel & Anti Fraud Division memiliki 1 (satu) Department yakni Compliance Department.

Legal Basis

Pursuant to the provisions of POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies and its amendments as contained in POJK No. 29/POJK.05/2020, companies are required to have members of the Board of Directors in charge of compliance functions and work units or employees who carry out compliance functions.

Organizational Structure of The Company's Compliance Function

The Company has appointed the President Director as a member of the Board of Directors in charge of the compliance function who is responsible for ensuring compliance with laws and regulations in financing business and other laws and regulations.

In carrying out the compliance function, the President Director assisted by the Legal Counsel & Anti-Fraud Division which acts as a compliance function unit that reports directly to the President Director. Legal Counsel & Anti-Fraud Division is led by a Division Head. To carry out compliance functions, Legal Counsel & Anti-Fraud Division has 1 (one) Department, namely Compliance Department.

Fungsi Kepatuhan
Compliance Function

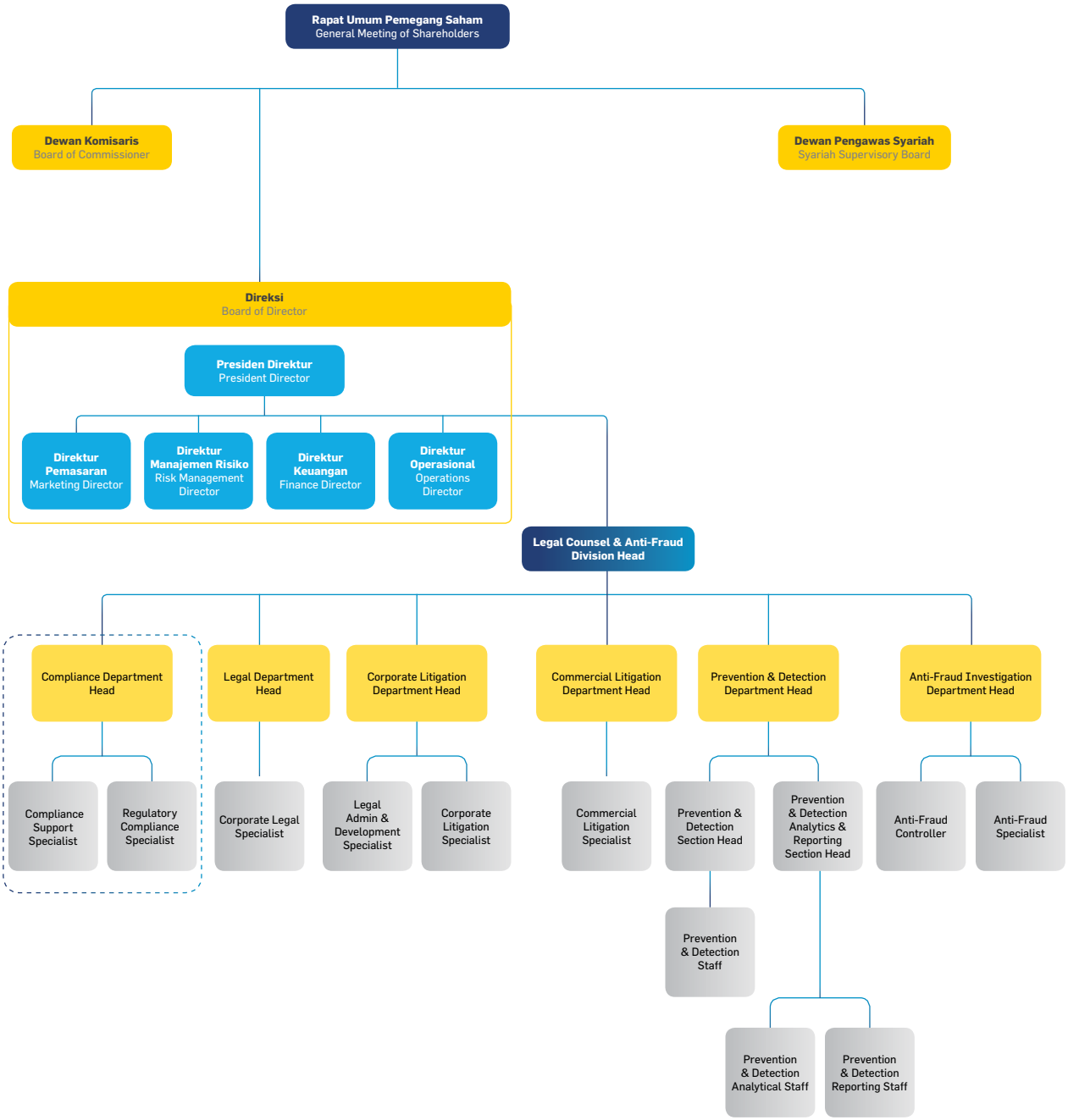

Fungsi Kepatuhan
Compliance Function

Dengan berada di bawah Presiden Direktur, Legal Counsel & Anti Fraud Division merupakan unit kerja yang independen dan bebas pengaruh dari satuan kerja lainnya, serta terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Legal Counsel & Anti Fraud Division Head telah memperhatikan dan memenuhi kebijakan internal Perseroan.

By being under the President Director, Legal Counsel & Anti-Fraud Division is an independent unit and free of influence from other work units and related to the appointment of dismissal of the Legal Counsel & Anti Fraud Division Head has considered and complied with the Company's internal policies.

Profil Kepala Satuan Kerja Fungsi Kepatuhan

Profile of Head of Compliance Function Unit



CHRISTIN
Legal Counsel & Anti Fraud Division Head

Umur | Age
41 Tahun | 41 Years Old

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia | Indonesian

Domisili Domicile	Jakarta Utara	North Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Hukum - Universitas Trisakti Bachelor of Law – University of Trisakti
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Legal Counsel & Anti Fraud Division Head Perseroan (Juni 2023 – Sekarang) • Legal Counsel Division Head Perseroan (Maret 2019 – Mei 2023) • Legal Department Head Perseroan (Maret 2014 – Maret 2019) • Senior Legal Manager Firstindo Finance (Mei 2010 - Maret 2014) • Senior Legal Officer Perseroan (September 2004 - Mei 2010) • Legal Counsel & Anti-Fraud Division Head of the Company (June 2023 – Present) • Legal Counsel Division Head of the Company (March 2019 – Mei 2023) • Legal Department Head of the Company (March 2014 – March 2019) • Senior Legal Manager Firstindo Finance (Mei 2010 - March 2014) • Senior Legal Officer Perseroan (September 2004 - May 2010)

Dalam rangka meningkatkan kompetensi tingkat manajerial, seluruh pimpinan yang berada dibawah Legal Counsel & Anti Fraud Division telah mengikuti sertifikasi dasar manajerial sebagaimana diuraikan dibawah ini:

To improve managerial level competence, all leaders under the Legal Counsel & Anti-Fraud Division have participated the basic managerial certification as outlined below:

No	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certifications	Masa Berlaku Validity
1	Christin	Legal Counsel & Anti Fraud Division Head	Sertifikasi Dasar Managerial Basic Managerial Certification	22 Juni 2025 June 22, 2025
2	Fitri Juliani	Compliance Department Head	Sertifikasi Dasar Managerial Basic Managerial Certification	22 Juni 2025 June 22, 2025
3	Adhitya Satrya Supraviendra	Legal Department Head	Sertifikasi Dasar Managerial Basic Managerial Certification	23 Februari 2026 February 23, 2026
4	Aditiya Eko Purnomo	Prevention & Detection Department Head	Sertifikasi Dasar Managerial Basic Managerial Certification	22 November 2025 February 22, 2026
5	Satria Prawira	Anti Fraud Investigation Department Head	Sertifikasi Dasar Managerial Basic Managerial Certification	16 Juni 2024 June 16, 2024
6	I Gede Sudarsana	Corporate Litigation Department Head	Sertifikasi Dasar Managerial Basic Managerial Certification	9 Agustus 2024 August 9, 2024
7	Ruth Christina S	Commercial Litigation Department Head	Sertifikasi Dasar Managerial Basic Managerial Certification	27 Maret 2026 March 27, 2026

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Compliance Department dalam menjalankan fungsi kepatuhan adalah:

a. Membangun, menerapkan langkah-langkah dalam rangka mendorong terciptanya budaya kepatuhan di seluruh kegiatan usaha Perseroan di setiap jenjang organisasi.
b. Mengelola risiko kepatuhan dan melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante (preventif)* untuk memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Memantau dan memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada regulator.
d. Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mendukung kinerja satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi Entitas Utama (SKKT EU) dalam Konglomerasi Keuangan dimana Perseroan bagian dari anggota Konglomerasi Keuangan tersebut.
e. Menyampaikan laporan fungsi kepatuhan kepada Presiden Direktur secara berkala setiap bulan.

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Compliance Department in carrying out compliance functions are as follows:

a. Develop and implement measures to encourage the creation of a compliance culture in all of the Company's business activities at every level of the organization.
b. Manage compliance risk and carry out a series of actions or measures that are ex-ante (preventive) to ensure that the policies, provisions, systems and procedures as well as the Company's business activities are in accordance with the provisions of relevant laws and regulations.
c. Monitor and ensure the Company's compliance with the commitments made by the Company to regulators.
d. Take the necessary actions to support the performance of the Main Entity Integrated Compliance Unit (SKKT EU) in the Financial Conglomerate where the Company is part of the member of the Financial Conglomerate.
e. Submit compliance function reports to the President Director periodically every month.

Fungsi Kepatuhan
Compliance Function

Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2023

Selama tahun 2023, Compliance Department telah menjalankan fungsinya dalam melaksanakan fungsi kepatuhan sebagai berikut:

Implementation of Compliance Function Activities During 2023

During 2023, the Compliance Department has carried out compliance functions as follows:

No	Perihal Subject	Pelaksanaan Implementation
1	Mendorong terciptanya budaya kepatuhan. Encourage the creation of a culture of compliance.	• Memantau secara rutin dan berkesinambungan terhadap peraturan baru yang diterbitkan oleh OJK melalui pemantauan peraturan OJK di situs web resmi OJK. • Melakukan sosialisasi ketentuan-ketentuan peraturan baru dari OJK yang berlaku bagi Perseroan. • Mengikutsertakan sumber daya manusia di Compliance Department dalam berbagai pelatihan, seminar sosialisasi peraturan dari regulator. • Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan OJK bagi Perseroan melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari fungsi atau unit kerja atau kantor cabang Perseroan. • Routine and continuous monitoring of new regulations published by OJK through monitoring of OJK regulations on OJK's official website. • Disseminate the provisions of new regulations from OJK that apply to the Company. • Engaging human resources in the Compliance Department in various trainings, regulatory socialization seminars from regulators. • Carry out consultative functions related to the implementation of OJK regulations for the Company by providing suggestions/responses to questions from functions or work units or branch offices of the Company.
2	Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan. Ensure that policies, regulations, systems and procedures as well as business activities carried out by the Company are in accordance with the regulations.	• Melakukan *gap analysis,* menganalisis dampak ketentuan baru terhadap operasional Perseroan dan mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan, dan prosedur internal. • Melakukan koordinasi dengan Organization Policies & Procedures Sub Division dalam rangka pemutakhiran database ketentuan regulator yang berlaku pada KIPER yang merupakan sistem dokumentasi ketentuan di Perseroan yang dapat diakses oleh karyawan Perseroan. • Melakukan *review* dan memberikan pendapat untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan regulator yang berlaku atas: - Rencana produk dan aktivitas baru. - Rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan terkait adanya ketentuan baru dari OJK. - Dokumen dalam rangka kesiapan pengajuan permohonan pembukaan, pelaporan pemindahan alamat, dan pelaporan penutupan jaringan kantor. • Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan regulator dengan cara memantau beberapa rasio keuangan seperti rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan *Gearing Ratio.* • Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi termasuk pengenaan sanksi denda (jika ada) dari regulator. • Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun laporan profil risiko kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan. • Menyusun laporan fungsi kepatuhan yang disampaikan kepada Presiden Direktur. • Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penilaian tingkat kesehatan perusahaan.

No	Perihal Subject	Pelaksanaan Implementation
		• Conduct gap analysis, analyze the impact of new provisions on the Company's operations and propose adjustments to manuals, policies, and internal procedures. • Coordinating with Organization Policies & Procedures Sub Division in order to update the database of regulatory provisions applicable to KIPER which is a documentation system of provisions in the Company that can be accessed by the Company's employees. • Review and provide opinions to ensure compliance with prevailing regulatory on: - New products plan and activities. - Draft of internal provisions to be issued related to new provisions from OJK. - Documents in order to prepare for submission of opening applications, reporting on address transfers, and reporting on closing office networks. • Monitoring the level of compliance with regulatory regulations by monitoring several financial ratios such as the Non-Performing Financing (NPF) ratio and Gearing Ratio. • Monitoring the imposition of sanctions including the imposition of fines (if any) from regulators. • Conduct compliance risk assessments and compile compliance risk profile reports on a quarterly basis, in order to manage compliance risks. • Prepare a compliance function report submitted to the President Director. • Coordinating with related work units in the context of assessing the Company's soundness level.
3	Mendukung kinerja Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi Konglomerasi PT Bank Maybank Indonesia Tbk dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia dimana Perseroan bagian dari anggota Konglomerasi Keuangan tersebut. Supporting the performance of the Integrated Compliance Unit of the PT Bank Maybank Indonesia Tbk Conglomeration in the Maybank Indonesia Financial Conglomeration where the Company is part of the members of the Financial Conglomerate.	• Menyampaikan laporan fungsi kepatuhan Perseroan secara triwulanan kepada satuan kerja kepatuhan terintegrasi Konglomerasi Maybank Indonesia. • Melakukan komunikasi dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk selaku entitas utama dalam ruang lingkup pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi. • Submit quarterly reports on the Company's compliance function to the integrated compliance unit of Maybank Indonesia Conglomeration. • Communicate with PT Bank Maybank Indonesia Tbk as the main entity within the scope of implementing the integrated compliance function.
4	Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator. Ensure the Company's compliance with commitments made to regulators.	• Memantau komitmen Perseroan kepada OJK dan regulator lainnya. • Memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK dalam rangka pengawasan Perseroan. • Monitor the Company's commitments to OJK and other regulators. • Monitor and follow up requests for information/data by OJK in supervision of the Company.

Audit Internal
Internal Audit

Dasar Hukum Pembentukan
Divisi Audit Internal dibentuk berdasarkan POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, sekaligus untuk memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia No, 1A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Piagam Audit Internal
Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal mengacu pada Piagam Audit Internal yang telah disusun dan disahkan oleh Perusahaan. Piagam Audit Internal disetujui dan ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Mei 2021.

Struktur dan Kedudukan Audit Internal
Divisi Audit Internal dipimpin oleh Internal Audit *Division Head* yang bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dan secara fungsional berhubungan dengan Komite Audit. Di dalam organisasi Perusahaan, kedudukan Divisi Audit berada satu tingkat di bawah Presiden Direktur. Laporan hasil audit internal disampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.

Untuk laporan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan signifikan disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Melalui Komite Audit dan Direktur yang membawahi Fungsi yang terkait. Direksi Perseroan bertanggung jawab merancang sistem Audit Internal untuk proses pelaporan internal, mencakup seluruh prosedur operasi standar Perseroan dan jalur pelaporan.

Struktur organisasi Divisi Audit Internal dan kedudukannya dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Legal Basis of Formation
The Internal Audit Division was established based on POJK No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Preparing the Internal Audit Unit Charter, as well as to comply with the Indonesia Stock Exchange Regulation No. 1A concerning the Registration of Shares and Equity-Type Securities Other Than Shares Issued by Listed Companies.

Internal Audit Charter
In carrying out its duties, the Internal Audit Unit refers to the Internal Audit Charter that has been prepared and ratified by the Company. The Internal Audit Charter was approved and determined by the Board of Directors and the Board of Commissioners on May 31, 2021.

Structure and Position of Internal Audit
The Internal Audit Division is led by the Internal Audit Division Head who is responsible to the President Director and is functionally associated with the Audit Committee. Within the Company's organization, the position of the Audit Division is one level below the President Director. The report on the results of the internal audit is submitted to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee and the Director in charge of the Compliance Function.

The reports on the results of follow-up monitoring of improvements to significant findings are submitted to the Board of Directors and the Board of Commissioners through the Audit Committee and the Director in charge of the Related Function. The Company's Board of Directors is responsible for designing the Internal Audit system for the internal reporting process, covering all of the Company's standard operating procedures and reporting channels.

The organizational structure of the Audit Division and its position in the Company are as follows:

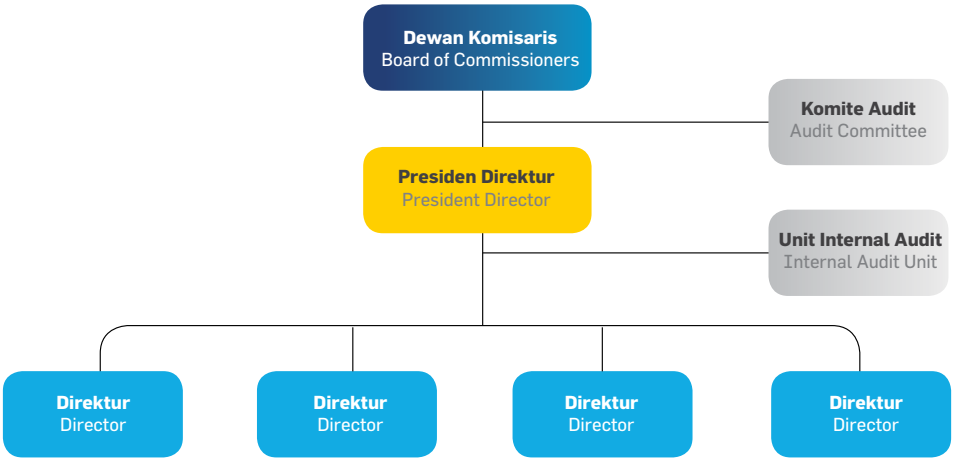

Rincian Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal adalah:

1. Menyusun strategi dan rencana kerja Audit Internal dengan pendekatan risiko (*risk based approach*) yang memadai. Rencana ini harus konsisten dengan Piagam Audit Internal dan tujuan bisnis perusahaan serta disetujui Presiden Direktur dan Komite Audit serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
2. Mengimplementasikan rencana kerja yang telah mendapat persetujuan tersebut di atas, termasuk penugasan audit khusus atas permintaan Presiden Direktur maupun Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
3. Membuat analisa, melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung (*on-site audit)* dan pengawasan secara tidak langsung dan berkelanjutan (*continous* audit) dalam mencapai misi, tujuan dan strategi yang telah ditetapkan.
4. Melakukan dan memberikan kontribusi untuk peningkatan pengendalian yang efektif dengan melakukan *review* dan evaluasi terhadap pengendalian internal pada semua unit kegiatan di lingkungan perusahaan.

Duties and Responsibilities

Internal Audit Duties and Responsibilities are:

1. Developing the Internal Audit strategies and work plans with adequate risk-based approach. The plan has to be consistent with the Internal Audit Charter and the Company's business objectives, approved by the President Director and the Audit Committee and reported to the Board of Commissioners.
2. Implementing the approved work plan, including the assignment of specific audit based on the request of the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
3. Developing analysis, audit and assessment on the efficiency and effectiveness of finance, operations, human resources, marketing, information technology and other activities. Those are performed through on-site audit, off-site audit and continuous audit to achieve the set missions, goals and strategies.
4. Performing and contributing to the improvement of an effective control by reviewing and evaluating the internal control in all activity units within the Company.

Audit Internal
Internal Audit

5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen dalam rangka penyempurnaan sistem, prosedur, anggaran dan kebijakan.
6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
8. Menyusun rencana sumber daya manusia Audit Internal (*man power planning*) dan memelihara profesionalisme Audit Internal dengan pengetahuan, ketrampilan, pengalaman serta program sertifikasi yang memadai melalui pendidikan yang berkesinambungan dan keterlibatan dalam kegiatan organisasi profesi.
9. Membantu tata kelola perusahaan secara baik (*good corporate governance*), efektivitas manajemen risiko dan implementasi kode etik.
10. Menyusun dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja Audit Internal secara berkala.
11. Melakukan evaluasi secara berkesinambungan atas mutu kegiatan audit (*quality assurance*) yang dilakukan melalui supervisi terhadap pekerjaan Audit Internal dan mewajibkan Audit Internal untuk *mereview* kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta memperhatikan penilaian mutu kegiatan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

5. Providing improvement-related suggestions and objective information on audited activities in all levels of management to refine the system, procedure, budget and policy.
6. Developing report on audit results and submitting to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
7. Monitoring, analysing and reporting the follow up implementation of the recommended improvements.
8. Developing the Internal Audit's manpower planning and maintaining its professionalism by employing knowledge, skills, experiences and adequate certification program through continuous education and involvement in the activities of professional organizations.
9. Assisting the monitoring of the GCG implementation, risk management effectiveness and code of conduct.
10. Regularly developing and updating the Internal Audit's working guidelines, systems and procedures.
11. Carrying out continuous evaluation on the quality assurance performed by supervising the works of the Internal Auditor and requiring the Auditors to review the quality of their works and duly observe the assessment on the audit quality assurance performed by external parties.

Sertifikasi Profesi Audit Internal
Internal Audit Profession Certifications

Sertifikasi Certification	**Lembaga** Institution	**Nama** Name
Information Security Management System (ISO 27001)	BSI Training Academy	Ignatius Prasetya Bagdja Nugraha
Sertifikasi Dasar Pembiayaan – Managerial Funding Basic Certification - Managerial	Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Indonesian Financing Company Certification	Ignatius Prasetya M Imanuddin Budi Gunawan Sendy Broto Kusumo Bagdja Nugraha Indra Yudha

Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Kepala Audit Internal dijabat oleh Ignatius Prasetya. Beliau menyelesaikan pendidikan Akuntansi dari STIE Perbanas tahun 2002.

Pengalaman Kerja :

1. Internal Audit Officer di PT BFI Finance Indonesia Tbk (2006 - 2009)
2. Internal Audit Division Head di PT Bima Multi Finance (2014 - 2017)
3. Internal Audit Division Head PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (2017 - saat ini)

Profile of Internal Audit Unit Head

The Head of Internal Audit position is held by Ignatius Prasetya. He completed his Accounting education from STIE Perbanas in 2002.

Work experience:

1. Internal Audit Officer at PT BFI Finance Indonesia Tbk (2006 - 2009)
2. Internal Audit Division Head at PT Bima Multi Finance (2014 - 2017)
3. Internal Audit Division Head PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (2017 - present)

Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Satuan Kerja Audit Internal

SDM Unit Audit Internal diberikan kesempatan untuk mengikuti program pelatihan dan peningkatan kompetensi serta memperoleh sertifikasi profesional.

Berikut pendidikan dan pelatihan SDM Audit Internal Perseroan tahun 2023:

Education and/or Training of Members of the Internal Audit Unit

Staffs of the Internal Audit Unit are given the opportunity to take part in training and competency improvement programs and obtain professional certifications.

The following is the education and training of the Company's Internal Audit Staffs in 2023:

No	Pelatihan / Seminar Training / Seminar	Tempat Location	Penyelenggara Organizer	Peserta Participants	Tanggal Date
1	Webinar: Urgensi Perpanjangan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Webinar: The Urgency of Extending Credit Restructuring Policy	Online	LPPI	Ignatius Prasetya Budi Gunawan Sendy Broto Kusumo	19 Januari 2023 January 19, 2023
2	Webinar: *Trend & Challenges Internal Audit in* 2023 - 2025	Online	YPIA	Budi Gunawan Sendy Broto Kusumo	20 Januari 2023 January 20, 2023
3	Webinar: *Audit Forensic & Investigation*	Online	Ruang Seminar	Aditya Rangga Kusuma	21 Januari 2023 January 21, 2023
4	Penerapan GRC Terintegrasi Untuk Tata Kelola dan Meningkatkan Pengelolaan Risiko yang Lebih Baik Integrated GRC Implementation for Better Governance and Enhanced Risk Management	Online	IIA Indonesia	Budi Gunawan Muhamad Imanuddin	24 Januari 2023 January 24, 2023
5	*Audit Reporting*	Online	IIA Indonesia	Hendra Ditria	24 Januari 2023 January 24, 2023
6	Implementasi Artificial Intelligence di Industri Jasa Keuangan Implementation of Artificial Intelligence in the Financial Services Industry	Online	OJK Institute	Ignatius Prasetya	2 Februari 2023 February 2, 2023

Audit Internal
Internal Audit

No	Pelatihan / Seminar Training / Seminar	Tempat Location	Penyelenggara Organizer	Peserta Participants	Tanggal Date
7	APU PPT	Hotel Le Meridien	Learning Media Indonesia	Aditya Rangga Kusuma	15-16 Februari 2023 February 15-16, 2023
8	*Training for Trainer*	Online	HC Learning WOM Financ	Budi Gunawan	21-23 Februari 2023 February 21-23, 2023
9	*G20/ B20 Integrity & Compliance Policy Paper Action Plan For Internal Auditor*	Online	IIA Indonesia	Ignatius Prasetya Budi Gunawan Sendy Broto Kusumo	23 Februari 2023 February 23, 2023
10	*Assurance Based Consulting*	Online	IIA Indonesia	Ignatius Prasetya Budi Gunawan	13 Maret 2023 March 13, 2023
11	*Training Intermediate Negotiation Skill (With LMS)*	Online	HC Learning WOM Finance	Dimas Erlangga Mantik Rika Kurnia	14 Maret 2023 March 14, 2023
12	Webinar: Analisis Laporan Keuanga Webinar: Financial Statement Analysis	Online	Ruang Seminar	Kausarihsan Panggabean	25 Maret 2023 March 25, 2023
13	Dukungan Forensik Bagi Penguatan Skema Anti Penyuapan Di Korporasi Selaras ISO 37001 Forensic Support for Strengthening Anti-bribery Schemes in Corporations in line with ISO 37001	Online	LPPSP UI	Ignatius Prasetya	30 - 31 Maret 2023 March 30 – 31, 2023
14	*Fundamentals Audit*	Online	Group Audit Maybank	Ignatius Prasetya Budi Gunawan Sendy Broto Kusumo Muhamad Imanuddin Bagdja Nugraha Dimas Erlangga Mantik Syahrial Karmanto Kausarihsan Panggabean	30 - 31 Maret 2023 March 30 – 31, 2023
15	Webinar: • *How to Manage Team & Boss* • *Impactful Communication Make Your Value More Impactful*	Online	IIA Indonesia	Ignatius Prasetya Budi Gunawan Sendy Broto Kusumo Muhamad Imanuddin	06 April 2023 April 06, 2023
16	Webinar: • *Internal Audit Roles & Competency In Consumer Data Protection* • *Stay Relevant By Implementating The Internal Competency Framework*	Online	IIA Indonesia	Ignatius Prasetya	13 April 2023 April 13, 2023
17	*Webinar: What You Need to Know About the Proposed Changes to The Standars*	Online	IIA Indonesia	Sendy Broto Kusumo	12 Mei 2023 May 12, 2023
18	*Training Intermediate Negotiation Skill*	Online	HC Learning WOM Finance	Andri Lesmana Aditya Rangga Kusuma	15 Juni 2023 June 15, 2023
19	IAIB National Conference: Peran Audit Dimasa Depan	Hotel Episode Tangerang	IAIB	M. Imanudin Budi Gunawan	12 - 13 Juli 2023 July 12 - 13, 2023

No	Pelatihan / Seminar Training / Seminar	Tempat Location	Penyelenggara Organizer	Peserta Participants	Tanggal Date
20	*Lead Auditor ISO 27001*	Online	BSI	Ignatius Prasetya Bagdja Nugraha	10 - 14 Juli 2023 July 10 - 14, 2023
21	*Cyber and Technology Security: Managing a Potential Risk-Apprentice Level*	Online	Group Audit Maybank	Bagdja Nugraha Kausarihsan Pangabean Oky Syahputra	30 Agustus 2023 August 30, 2023
22	*Enhancing Financial Peformance Through Data Analytics*	Online	OJK Institute	Ignatius Prasetya	21 September 2023 September 21, 2023
23	*Integrity Management For Internal Audit*	Online	IIA Indonesia	Budi Gunawan Sendy Broto Kusumo	21 September 2023 September 21, 2023
24	*Connected Party Credit Transactions For Business Application*	Online	Group Audit Maybank	Karmanto Arief Soedjono Steffi Rika Kurnia	21 September 2023 September 21, 2023
25	*Enterprise Risk Management (ERM): Beyond Concept*	Online	Group Audit Maybank	Aditya Rangga Kusuma Ahmad Fadjarudin Andri Lesmana Syahrial	26 - 27 September 2023 September 26 - 27, 2023
26	*Performing an Effective Quality Assessment*	Online	IIA Indonesia	Rika Kurnia	29 - 30 November 2023 November 29 - 30, 2023
27	*Cyber Risk*	Online	IIA Indonesia	Bagdja Nugraha	13-14 Desember 2023 December 13-14, 2023

Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Audit Internal

Pada tahun 2023 Audit Internal telah melaksanakan kegiatan *assurance* terhadap unit bisnis Perseroan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) kali, pemeriksaan terdiri dari:

Internal Audit Unit Activities

In 2023 the Internal Audit has carried out a total of 129 (one haundred and twenty nine) assurance activities for the Company's business units, the audit consisted of:

No	Kategori Category	Jumlah Pemeriksaan Inspections
1	Pemeriksaan Cabang Branch Inspection	79 kali | times
2	Pemeriksaan Gudang Warehouse Inspection	24 kali | times
3	Pemeriksaan Khazanah Treasiry Inspection	7 kali | times
4	Pemeriksaan Kantor Pusat Head Quarter Inspection	11 kali | times
5	Pemeriksaan Teknologi Informasi Information Technology Inspection	6 kali | times
6	Khusus Special	2 kali | times

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Pengendalian Keuangan dan Operasional, serta Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Manajemen Perseroan menetapkan secara berkesinambungan suatu mekanisme proses pengawasan melalui Sistem Pengendalian Internal dengan kualitas desain dan pelaksanaan yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh pejabat dan pegawai Perseroan.

Perseroan merancang suatu Sistem Pengendalian Internal agar mampu memberikan keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan Perseroan dalam menjaga dan mengamankan harta kekayaan Perseroan. Juga untuk menjamin tersedianya laporan yang akurat dan andal, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan *fraud* dan pelanggaran aspek kehati hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Dengan demikian, pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada Perseroan, bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, kelayakan atas laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik peraturan yang mengatur Perseroan Terbatas, peraturan OJK maupun kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan operasional Perseroan, Sistem Pengendalian Internal yang handal dan efektif merupakan tanggung jawab dari semua pihak dalam organisasi.

Sistem Pengendalian Internal dengan COSO

COSO *(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)* merupakan sebuah Komisi Internasional yang dibentuk untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. COSO menekankan Pengendalian Internal sebagai suatu proses yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis entitas yang berkelanjutan *(ongoing business activities).*

Financial and Operational Control, as well as Compliance with Other Laws and Regulations

The Company's management establishes a mechanism for the supervisory process through the Internal Control System with quality design and implementation influenced by the Board of Commissioners, Board of Directors and all officers and employees of the Company.

The Company designed an Internal Control System to be able to provide adequate confidence to achieve the Company's objectives in safeguarding and securing the Company's assets. Also, to ensure the availability of accurate and reliable reports, improve compliance with applicable regulations, reduce the impact of financial losses, irregularities including fraud and prudential aspect violations, as well as improve organizational effectiveness and increase cost efficiency.

Thus, the implementation of the Internal Control System (SPI) in the Company, aims to improve operational effectiveness and efficiency, the feasibility of financial reports and compliance with applicable laws and regulations in Indonesia, both regulations governing Limited Liability Companies, OJK regulations and company policies. In carrying out the Company's operations, a reliable and effective Internal Control System becomes the responsibility of all parties in the organization.

Internal Control System with COSO

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) is an International Commission established to identify factors that cause embezzlement and make recommendations to reduce its occurrence. COSO emphasizes Internal Control as a process that is an integral part of an entity's ongoing business activities.

Untuk tujuan pelaporan manajemen kepada publik, COSO *framework* telah menjadi acuan perusahaan public sebagai model *best practices* pengendalian internal. COSO *framework* memungkinkan perusahaan mengembangkan sistem pengendalian internal secara efektif dan efisien.

COSO dapat memberikan:

1. Cara untuk menerapkan pengendalian internal dalam setiap entitas, tanpa memperhatikan industri atau struktur legal pada setiap tingkatan dari entitas, unit operasi atau fungsi.
2. Pendekatan prinsip memberikan kemudahan dan memperkenankan untuk membuat, mengimplementasikan dan melaksanakan pengendalian internal – prinsip dapat diterapkan pada tingkatan entitas, operasi dan fungsi.
3. Syarat untuk sistem pengendalian internal yang efektif dengan mempertimbangkan bagaimana komponen dan prinsip tersebut ada dan berfungsi dan bagaimana komponen beroperasi secara bersamaan.
4. Cara untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko dan untuk mengembangkan serta mengelola reaksi risiko secara tepat sampai dengan tingkatan yang diterima dan dengan fokus terbaik dalam pengukuran *anti-fraud.*
5. Kesempatan untuk mengembangkan penerapan pengendalian internal laporan keuangan dan laporan lainnya untuk mencapai tujuan laporan, operasional dan kepatuhan.
6. Kesempatan mengurangi ketidakefektifan, pengulangan ataupun ketidakefisienan dalam pengendalian risiko. Dengan demikian akan memberikan nilai minimal untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan perseroan.

COSO *framework* merupakan acuan bagi Unit Audit Internal Perseroan untuk melakukan pelaksanaan evaluasi pengendalian internal perusahaan. Ada tiga dimensi atau kategori tujuan dalam model COSO framework yang memungkinkan perusahaan dapat fokus terhadap aspek pengendalian internal, yaitu:

For the purpose of reporting management to the public, the COSO framework has become a reference for public companies as a model of best practices for internal control. The COSO framework enables companies to develop internal control systems effectively and efficiently.

COSO may provide:

1. A way to implement internal controls within any entity, without regard to industry or legal structure at any level of the entity, operating unit or function.
2. The principles approach facilitates and allows for the establishment, implementation and implementation of internal controls – principles can be applied at the level of entities, operations and functions.
3. The requirements for an effective internal control system take into account how those components and principles exist and function and how they operate simultaneously.
4. A way to identify and analyze risks and to develop and manage risk reactions appropriately up to acceptable levels and with the best focus on anti-fraud measurement.
5. Opportunity to develop the application of internal control of financial statements and other reports to achieve reporting, operational and compliance objectives.
6. Opportunity to reduce ineffectiveness, repeatability or inefficiency in risk control. Thus it will provide minimal value to reduce risks in achieving company goals.

COSO framework is a reference for the Company's Internal Audit Unit to conduct an evaluation of the company's internal control. There are three dimensions or categories of objectives in the COSO framework model that allow companies to focus on aspects of internal control, namely:

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

1. Dimensi Operasi – Efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, termasuk pencapaian kinerja operasional dan keuangan serta keamanan asset dibandingkan dengan kerugian.
2. Dimensi Laporan Keuangan – Laporan Keuangan dan Non Keuangan internal dan eksternal. Di dalamnya meliputi keandalan, ketepatan waktu, transparansi atau syarat lainnya yang ditetapkan oleh regulator, standar yang diakui, maupun kebijakan perusahaan.
3. Dimensi Kepatuhan – Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Ketiga dimensi atau kriteria tujuan tersebut memiliki 5 (lima) komponen untuk mengevaluasi pengendalian internal perusahaan yang meliputi:

1. Pengendalian Lingkungan
   - Integritas dan nilai-nilai etika;
   - Kompetensi dari orang-orang yang ada di perusahaan;
   - Filosofi perusahaan;
   - Pelaksanaan tanggung jawab atas tugas yang dibebankan;
   - Perhatian dan bimbingan yang diberikan oleh komisi perusahaan.
2. Menilai Risiko
   - Prediksi ataupun proyeksi risiko atas tujuan yang telah ditetapkan, hubungan-hubungan risiko tersebut kepada bagian-bagian yang ada dalam perusahaan;
   - Identifikasi serta analisis atas risiko yang relevan terhadap tujuan yang telah ditetapkan;
   - Bentuk dasar terhadap penentuan bagaimana seharusnya penanganan risiko yang ada;
   - Mekanisme yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi risiko khusus yang tidak terlepas dari perubahan yang ada.
3. Aktivitas Pengendalian
   - kebijakan dan prosedur dalam setiap aktivitas perusahaan. Tujuannya agar dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang akan dihadapi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1. Operations Dimension – The effectiveness and efficiency of the company's operations, including the achievement of operational and financial performance and asset security compared to losses.
2. Financial Statement Dimensions – Internal and external Financial and Non-Financial Statements. This includes reliability, timeliness, transparency or other requirements set by regulators, recognized standards, and company policies.
3. Compliance Dimension - Compliance with laws and regulations.

The three dimensions or objective criteria have 5 (five) components to evaluate the company's internal control which include:

1. Environmental Control
   - Integrity and ethical values;
   - Competence of the people who are in the company;
   - Corporate philosophy;
   - Implementation of responsibility for the duties charged;
   - Attention and guidance provided by the company's commission
2. Risk Assessment
   - Risk prediction or risk projection of predetermined objectives, the relationship of risk to parts of the company;
   - Identification and analysis of risks relevant to the objectives set;
   - The basic form of determining how existing risks should be handled;
   - Mechanisms needed to identify specific risks that are inseparable from existing changes.
3. Control activities
   - policies and procedures in every company activity. The goal is to be able to identify the risks that will be faced in achieving the goals that have been set

4. Informasi dan komunikasi
   - Identifikasi informasi yang berhubungan, rekam dan komunikasikan dalam bentuk yang memungkinkan setiap orang dalam perusahaan untuk menjalankan tanggung jawabnya;
   - Masukkan informasi yang berasal dari dalam dan dari luar perusahaan mengenai suatu kejadian, kondisi yang mungkin dibutuhkan dalam pembuatan keputusan bisnis atau bahkan laporan kepada pihak luar;
   - Aliran informasi yang mendukung kesuksesan pengendalian dari instruksi pada tanggung jawab manajemen sampai pada perangkuman temuan yang perlu ditindaklanjuti oleh manajemen perusahaan.
5. Pengawasan
   - Penaksiran kinerja sistem pengendalian yang ada defisiensi atas pengendalian internal, harus dilaporkan kepada top manajemen;
   - Kombinasi antara evaluasi terus-menerus dan evaluasi terpisah akan menjamin efektivitas sistem pengendalian internal yang dirancang.

Tinjauan/Evaluasi atas Efektivitas Pengendalian Internal

Divisi Audit Internal berperan melakukan penilaian atas efektivitas sistem pengendalian internal menggunakan COSO *framework*. Hal tersebut dijalankan guna memastikan tingkat efektivitas pengendalian internal Perseroan, melalui evaluasi mengenai kecukupan dan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan sistem. Berbagai evaluasi tingkat efektivitas mencakup:

1. Jendela: analisis kasus dan kerugian operasional oleh ORM (*Operational Risk Management*) yang disajikan dalam RMC (*Risk Manajemen Committee*) bersama BOD per bulan;
2. RCSA (*Risk Control and Self Assessment*): tinjauan dari *Division Head* yang disetujui oleh Direksi per kuartal 3 (tiga) bulan terkait risiko yang ada pada fungsi masing-masing;

4. Information and communication
   - Identify, record and communicate information in a form that enables everyone in the company to carry out his or her responsibilities;
   - Include information coming from inside and outside the company about an event, conditions that may be needed in making business decisions or even reports to outside parties;
   - The flow of information that supports successful control from instructions on management responsibilities to summarizing findings that need to be followed up by company management.
5. Supervision
   - Assessment of the performance of existing control systems deficiency in internal control, must be reported to top management;
   - The combination of continuous evaluation and separate evaluation will ensure the effectiveness of the designed internal control system.

Review/Evaluation of the Effectiveness of Internal Control

The Internal Audit Division plays a role in assessing the effectiveness of the internal control system using the COSO framework. The system is implemented to ensure the effectiveness level of the Company's internal control by utilizing independent evaluation of the policies, procedures and system adequacy and compliance. The effectiveness level evaluations include:

1. Jendela: case and operational loss analyses by ORM presented in the RMC with Board of Directors monthly;
2. RCSA: review by the Division Heads approved by BOD quarterly 3 (three) months concerning the existing risks in each function;

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

3. KRI (*Key Risk Indicator*): tinjauan oleh ORM dan *function* terkait atas *root cause* dan *action plan* cabang terhadap data anomali yang berpotensi menimbulkan kerugian perusahaan yang disajikan dalam RMC bersama Direksi per bulan.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Terkait dengan efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris beserta Komite Audit menyatakan bahwa mekanisme COSO *framework* menjadi acuan Divisi Audit Internal Perseroan sudah cukup memadai untuk melakukan evaluasi Sistem Pengendalian Internal yang dilaksanakan Perseroan.

3. KRI: review by ORM and related functions on the root cause and the branch's plan of action against data anomaly which may cause damages to the company, presented by BOD in RMC each month.

Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the Audit Committee on the Adequacy of the Internal Control System

On the effectiveness of the Internal Control System implementation in the Company, the Board of Directors and the Board of Commissioners with the Audit Committee stated that the COSO framework mechanism as a reference for the Company's Internal Audit Division is sufficient to evaluate the Internal Control System implemented by the Company.

Akuntan Publik
Public Accountant

Akuntan Publik merupakan pihak ketiga independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memeriksa Laporan keuangan dan menilai kewajaran terkait keuangan Perseroan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Prosedur penunjukan kantor Akuntan Publik mengacu pada POJK No. 13/ POJK.03/2017.

Public Accountant is an independent third party appointed by the Company to review the Financial Statements and assess the fairness of the Company's financials in accordance with the principles and accounting standards applicable in Indonesia. The appointment procedure for Public Accountant Firm refers to POJK No. 13/ POJK.03/2017.

Pelaksanaan Audit Eksternal Perseroan mengacu pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan telah memenuhi semua ketentuan OJK mengenai bentuk dan susunan Laporan Keuangan. Auditor bertanggung jawab dalam menyampaikan pernyataan mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas.

The implementation of the Company's External Audit refers to the audit standards set by the Indonesian Institute of Accountants (IAI) and has complied with all OJK regulations regarding the form and structure of the Financial Statements. The auditor is responsible for providing a statement regarding whether the financial statements are fairly presented, in all material respects, financial position, results of operations and cash flows.

Dalam rangka memastikan bahwa proses audit berjalan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, dilakukan pembahasan atas permasalahan yang signifikan secara rutin.

In order to ensure that the audit process runs in accordance with the Professional Standards of Accountants, the work agreement and the audit scope and its completion within the set deadlines, discussions on significant issues are carried out on a regular basis.

Terkait hal tersebut di atas, RUPS Tahunan 2023 menyetujui penunjukan Tuan Yasir dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Related to the above, the 2023 Annual GMS approved the appointment of Mr. Yasir and Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) respectively as Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2023.

Sebagai wujud transparansi Perseroan, berikut disampaikan daftar Kantor Akuntan Publik, Akuntan, jasa yang diberikan dan jasa lainnya, serta biaya yang dikeluarkan atas laporan keuangan Perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir.

As a form of the Company's transparency, the following table is a list of Public Accounting Firms, Accountants, services provided and other services, as well as costs incurred on the Company's financial statements for the last 5 (five) years.

Akuntan Publik
Public Accountant

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Publik Name of Public Accountant	Biaya Audit Audit Fee
2023	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited)* KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst & Young Global Limited)	Yasir	Rp648.900.000
2022	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited)* KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst & Young Global Limited)	Muhammad Kurniawan	Rp630.000.000
2021	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited)* KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst & Young Global Limited)	Christophorus Alvin Kossim	Rp618.000.000
2020	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited)* KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst & Young Global Limited)	Muhammad Kurniawan	Rp600.000.000
2019	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited)* KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst & Young Global Limited)	Muhammad Kurniawan	Rp579.400.000
Jasa Lain Selain Audit Keuangan **Other Services Besides Financial Audit**			
2023	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited)* KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst & Young Global Limited)	Yasir	Rp198.000.000
2022	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited)* KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst & Young Global Limited)	Muhammad Kurniawan	Rp198.000.000
2021	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited)* KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst & Young Global Limited)	Christophorus Alvin Kossim	Rp864.670.000
2020	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited)* KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst & Young Global Limited)	Muhammad Kurniawan	Rp489.000.000
2019	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited)* KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst & Young Global Limited)	Muhammad Kurniawan	Rp189.000.000

Manajemen Risiko
Risk Management

Perseroan menitikberatkan kegiatan Manajemen Risiko pada risiko atas proses bisnis, operasional, serta upaya pengendalian terhadap semua potensi risiko yang dapat terjadi. Perseroan telah melakukan identifikasi potensi risiko yang terdapat pada lingkungan bisnis Perseroan, serta kemungkinan munculnya dampak terhadap pencapaian tujuan Perseroaan.

The Company concentrates its risk management efforts on operational and process risks as well as attempts to control all possible risks. The business has identified possible hazards in its operational environment and their potential to affect its ability to meet its goals.

Mengingat pentingnya pengelolaan risiko terkait dengan kegiatan bisnis Perseroan, maka Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan secara bersama-sama membentuk struktur organisasi dengan tanggung jawab, batas kewenangan dan prinsip akuntabilitas terkait proses manajemen risiko Perseroan yang memadai.

Given the importance of risk management related to the Company's business activities, the Company's Board of Commissioners and Board of Directors jointly establish an organizational structure with responsibilities, limits of authority and accountability principles related to the Company's adequate risk management process.

Untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan evaluasi pelaksanaan proses manajemen risiko secara efektif dan menyeluruh, Perseroan memiliki Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*/ROC). Selain itu, Perseroan juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko (*Risk Manajemen Committee*/ RMC) untuk membantu Direksi dalam rangka penerapan manajemen risiko Perseroan sehari-hari.

To assist the Board of Commissioners in supervising and evaluating the implementation of effective and comprehensive risk management process, the Company has the Risk Oversight Committee (ROC). Moreover, the Company has also established the Risk Management Committee (RMC) to assist the Board of Directors in implementing the Company's daily risk management.

KONSEP *THREE LINES OF DEFENSE*

Untuk melaksanakan pengendalian risiko secara menyeluruh dan handal, Perseroan telah menerapkan prinsip tiga lapis pertahanan (*three lines of defence*) manajemen risiko. Melalui model *three lines of defense*, Perseroan membagi fungsi-fungsi di dalam organisasi yang terlibat di dalam manajemen risiko Perseroan.

Ketiga lapis tersebut adalah pemilik risiko (*risk owner*) yaitu Unit Kerja Bisnis sebagai lapis pertama. Di lapis kedua adalah Unit Kerja Manajemen Risiko sebagai Pengawas risiko (*risk overseer*) yang memastikan kecukupan adanya sistem dan prosedur serta metodologi risiko yang digunakan. dan pada lapis ketiga adalah ada Unit Kerja Audit Internal sebagai lini ketiga yang berperan secara independen (*independent assurance*) memastikan jalannya segala aktivitas manajemen risiko Perseroan dengan baik.

THREE LINES OF DEFENSE CONCEPT

To carry out comprehensive and reliable risk control, the Company has applied the principle of three lines of defense risk management. Through the three lines of defense model, the Company divides the functions within the organization involved in the Company's risk management.

The three layers are risk owners, namely Business Unit as the first layer. The second layer is Risk Management Unit as a risk overseer that ensures the adequacy of systems and procedures and risk methodologies used. and the third layer, Internal Audit Unit as a third line that plays an independent assurance role in ensuring the proper implementation of all the Company's risk management activities.

Manajemen Risiko
Risk Management



Untuk melaksanakan manajemen risiko secara keseluruhan, Perseroan didukung SDM dengan kompetensi dan infrastruktur yang cukup memadai. Secara berkelanjutan, Perseroan terus mengembangkan metodologi pengelolaan risiko, kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Dengan demikian, Perseroan akan mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan lingkungan bisnis pembiayaan.

To carry out overall risk management, the Company is supported by human resources with sufficient competence and infrastructure. The Company continuously develops risk management methodologies, risk management policies and procedures. As such, the Company will be able to anticipate developments and changes in the financing business environment.

Sebagai perusahaan yang sangat rentan dengan risiko, Perseroan menyadari pentingnya peningkatan kesadaran budaya risiko. Dengan demikian, Perseroan secara berkelanjutan melakukan peningkatan pemahaman dan kemampuan karyawan melalui pelatihan-pelatihan dan kampanye budaya berbasis risiko.

As a company that is highly vulnerable to risk, the Company realizes the importance of increasing awareness of risk culture. As such, the Company continuously improves the understanding and ability of employees through trainings and risk-based culture campaigns.

Pengelolaan Risiko Utama Perusahaan Pembiayaan

Tren perusahaan pembiayaan dan pertumbuhan bisnis yang terus berkembang membuat Perseroan menyusun pedoman manajemen risiko untuk memastikan pengelolaan seluruh aktivitas bisnis agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Berikut adalah pilar kerangka kerja *principle* Budaya Sadar Risiko di Perseroan.

Key Risk Management of Financing Companies

The trend of financing companies and the advancing business growth have made the Company develop risk management guidelines to ensure the management of all business activities, hence being able to perform in accordance with the principle of prudence. The following are the pillars of Risk Awareness Culture principle framework in the Company.

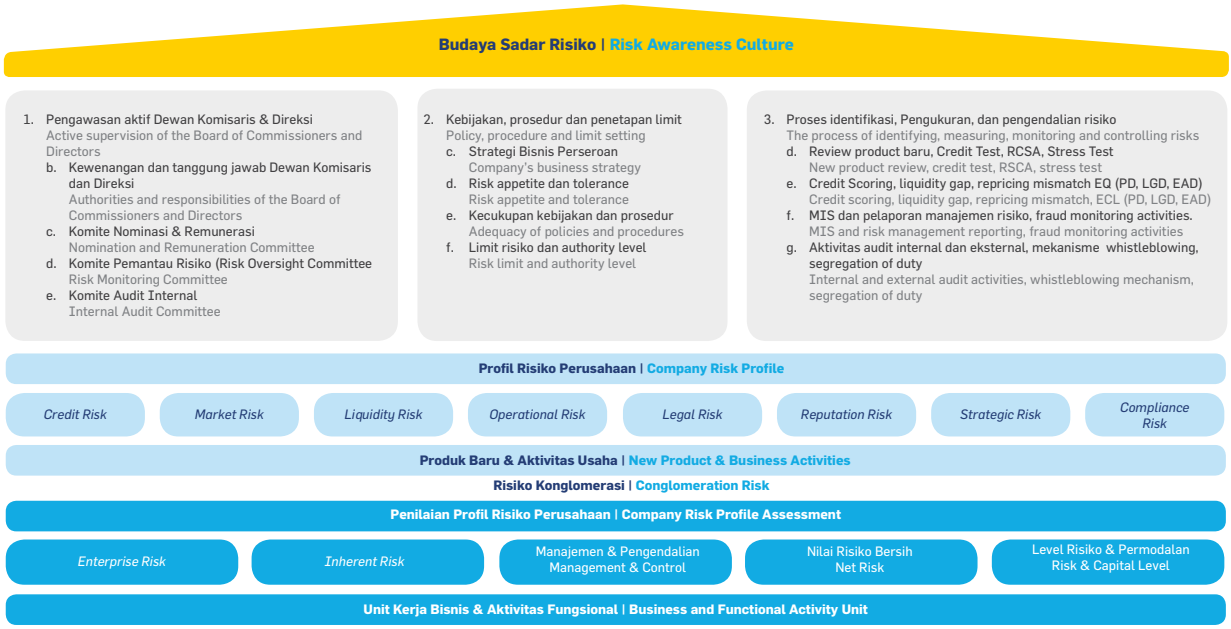

Dalam rangka mengantisipasi tingkat kompetisi dan perubahan lingkungan bisnis pembiayaan, Perseroan mengambil langkah-langkah proaktif dalam pengelolaan profil risiko. Kebijakan strategis mitigasi risiko diimplementasikan melalui manajemen risiko secara prudent dan terukur. Potensi risiko diupayakan seminimal mungkin agar posisi keuangan Perseroan relatif stabil.

Untuk itu, Perseroan telah merumuskan *risk appetite*, kebijakan & prosedur dan penetapan batasan risiko maksimal yang dapat diambil. Dengan demikian, Perseroan memastikan semua risiko yang terjadi dapat teridentifikasi, terukur, terpantau dan dapat dikendalikan sedini mungkin secara tepat dan baik.

Pencapaian keberhasilan fungsi dan tugas satuan kerja manajemen risiko pada Perseroan, didukung dengan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di bidang manajemen risiko yang profesional. SDM yang unggul dan infrastruktur yang baik menjadi sangat penting untuk mencapai keberhasilan proses penerapan manajemen risiko pada Perseroan.

8 (delapan) Profil Risiko Perusahaan sesuai ketentuan Regulator sebagai berikut

To anticipate the level of competition and changes in the financing business environment, the Company takes proactive measures in managing the risk profile. Strategic risk mitigation policy is implemented through prudent and measurable risk management. Potential risks are sought to a minimum; hence the Company's financial position is relatively stable.

To that end, the Company has formulated risk appetite, policies & procedures and set maximum risk limits that can be taken. As such, the Company ensures that all risks that occur can be appropriately and properly identified, measured, monitored and can be controlled as early as possible.

The achievements of functions and duties of risk management unit in the Company are supported by the availability of infrastructure and human resources in professional risk management. Excellent human resources and good infrastructure are pivotal to achieve the success of implementing risk management process in the Company.

8 (eight) Risk Profiles of the Company in accordance with the following Regulatory:

Manajemen Risiko
Risk Management

RISIKO KREDIT

Perseroan menyadari adanya Risiko Pembiayaan sebagai jenis risiko yang dapat muncul dan memberikan dampak kerugian finansial perusahaan pembiayaan. Hal tersebut dapat terjadi akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan. Kegagalan dalam mengelola risiko ini dapat mengakibatkan kerugian, serta kemungkinan risiko tersebut akan menjadi semakin besar, yang kemudian berdampak negatif bagi posisi keuangan perusahaan pembiayaan. Risiko ini terjadi apabila struktur kredit, kelayakan konsumen, serta piutang tidak dikelola secara hati-hati.

Dalam rangka penilaian risiko pembiayaan, Perseroan senantiasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komposisi portofolio pembiayaan dan tingkat konsentrasi
   Diversifikasi produk pembiayaan & distribusi sebaran wilayah pembiayaan memainkan peran penting dalam mengurangi potensi risiko pembiayaan yang akan timbul, terutama pada tingkat komposisi dan konsentrasi portofolio pembiayaan yang diberikan. Produk pembiayaan Perseroan diantaranya pembiayaan motor baru, pembiayaan motor bekas dan pembiayaan multiguna dengan agunan mobil atau motor. Sebaran wilayah pembiayaan yang diberikan Perseroan telah mencapai hampir seluruh pulau Jawa, Nusa Tenggara & Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Target debitur Perseroan masih didominasi oleh segmen *middle-low* dengan minimal pendapatan sesuai UMR wilayah setempat.

2. Strategi penyaluran pembiayaan
   Perseroan senantiasa menjaga pertumbuhan aset pembiayaan dan melakukan optimalisasi portofolio produk pembiayaan pada beberapa produk unggulan yang mendatangkan tingkat keuntungan signifikan. Saat ini Perseroan dihadapkan pada tingkat persaingan yang sangat ketat di pasar, sehingga perlu

CREDIT RISK

The Company realizes that financing risk is a type of risk that can arise and have an impact on the financial loss of the financing company. This can occur due to the failure of debtor in fulfilling its obligations to the financing company. Failure to manage this risk can result in losses, as well as the possibility that these risks will become even greater, which then negatively affects the financial position of the financing company. This risk occurs if the credit structure, consumer feasibility, and receivables are not managed carefully.

To assess financing risk, the Company always pays attention to the following matters:

1. Composition of the financing portfolio and level of concentration
   Diversification of financing products & distribution of financing areas play an important role in reducing the potential financing risks that will arise, particularly the composition and concentration of provided financing portfolio. The Company's financing products include new motorcycle financing, used motorcycle financing and multipurpose financing with car or motorcycle as collateral. The disbursement of financing areas by the company has reached almost all the islands of Java, Nusa Tenggara & Bali, Sumatra, Kalimantan and Sulawesi. The Company's debtor target is still dominated by the middle-low segment with a minimum income according to the local UMR.

2. Financing distribution strategy
   The Company continues to maintain the growth of financing assets and optimizes its financing products portfolio on several excellent products that bring significant levels of profit. Currently, the Company is faced with a very tight level of competition in the market, thereby it is necessary to make a

dilakukan terobosan proses penyaluran pembiayaan tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian.

3. Kualitas piutang pembiayaan dan tingkat kecukupan pencadangan
   Rasio *Non-Performing Financing gross* per Desember 2023 sebesar 2,08% dengan tingkat kecukupan pencadangan 1,6x. Secara kualitas aset pembiayaan, Perseroan masih pada taraf cukup baik dan terkendali.

4. Faktor eksternal
   Kondisi ekonomi terutama tingkat inflasi, sangat mempengaruhi kualitas pembiayaan Perseroan. Hal ini karena mayoritas debitur merupakan segmen middle-low yang sangat sensitif terhadap perubahan atau kenaikan harga barang. Penurunan kualitas aset pembiayaan terjadi dikarenakan mayoritas segmen debitur mengalami penurunan kapasitas untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada Perseroan.

Strategi Mitigasi Risiko Kredit

Perseroan memiliki strategi mitigasi Risiko Pembiayaan sebagai risiko utama Perseroan. Strategi mitigasi risiko pembiayaan dilakukan oleh Perseroan baik melalui pengelolaan risiko secara individual maupun pada tingkat portofolio pembiayaan. Praktik pengelolaan risiko pembiayaan sehari-hari dilakukan oleh unit kerja bisnis secara terpisah dari unit kerja manajemen risiko, baik secara fungsional maupun pengorganisasiannya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan adanya kecukupan prinsip *dual control* dan *segregation of duties*.

Perseroan memastikan adanya kecukupan kebijakan penetapan limit risiko pembiayaan yang baik, proses evaluasi risiko pembiayaan secara menyeluruh, dukungan SDM yang profesional, serta keandalan sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki oleh Perseroan.

Proses evaluasi dan peninjauan risiko pembiayaan dilakukan secara berkala. Evaluasi dan peninjauan risiko pembiayaan dilakukan unit kerja bisnis bersama dengan

breakthrough in the financing distribution process without overriding the principle of prudence.

3. Quality of financing receivables and level of adequacy of reserves
   The gross NPF ratio as of December 2023 was 2.08% with a reserve adequacy rate of 1.6x. In terms of financing asset quality, the Company is still at a fairly good and controlled level.

4. External factors
   Economic conditions, particularly the inflation rate, greatly affect the quality of the Company's financing. This is because the majority of debtors are middle-low segments that are very sensitive to changes or increases in the price of goods. The decline in financing asset quality occurred due to the majority of the debtor segment experiencing a decrease in capacity to make payment of obligations to the Company.

Credit Risk Mitigation Strategies

The Company has a financing risk mitigation strategy as the Company's main risk. The financing risk mitigation strategy is carried out by the Company both through individual risk management and at the financing portfolio level. The practice of managing risk financing on a daily basis is carried out by business units separately from risk management units, both functionally and organizationally. This measure is carried out to ensure the adequacy of dual control principle and segregation of duties.

The Company ensures the adequacy of a good financing risk limit determination policy, a comprehensive financing risk evaluation process, professional human resource support, and reliability of risk management information system owned by the Company.

Financing risks evaluation and review is carried out periodically, which are carried out by business units with risk management units, and are actively monitored by the

Manajemen Risiko
Risk Management

unit kerja manajemen risiko, serta dipantau secara aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tataran Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko Perseroan.

Board of Directors and the Board of Commissioners at the level of the Company's Risk Management Committee and Risk Monitoring Committee.

Unit kerja manajemen risiko bekerja sama dengan unit kerja bisnis, selalu menyempurnakan kebijakan penetapan *risk appetite* yang tertuang dalam kebijakan pembiayaan. Dengan demikian, pengelolaan risiko pembiayaan menjadi lebih baik. Selain itu juga dilakukan evaluasi batasan wewenang persetujuan pembiayaan secara berkala, sehingga Perseroan memiliki tingkat pelayanan dan kompetitif yang lebih baik. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

The risk management unit in collaboration with business unit, always improves the risk appetite determination policy contained in the financing policy. This enables better financing risk management. Moreover, periodic evaluations on the limits of financing approval authority are also carried out, hence the Company has a better level of service and competitiveness. This measure is implemented to support sound business growth and generate sustainable profits while still paying attention to the principle of prudence.

Perseroan melakukan proses persetujuan pembiayaan secara efektif. Efektivitas ini memungkinkan proses pengambilan keputusan pembiayaan dilakukan secara optimal dengan mendelegasikan wewenang persetujuan pembiayaan dari level kantor pusat sampai dengan kantor cabang operasional.

The Company conducts financing approval process effectively. This effectiveness allows the financing decision-making process to be carried out optimally by delegating the authority of financing approval from the head office level to the operational branch office.

Diagram berikut menggambarkan proses siklus pembiayaan:

The following diagram illustrates the process of the financing cycle:

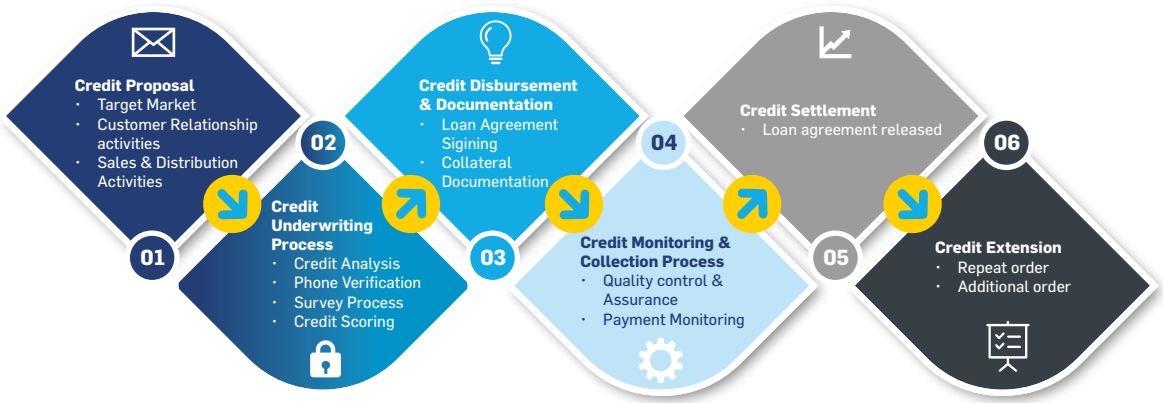

Diagram berikut menggambarkan proses persetujuan pembiayaan (*loan origination*):

The following diagram illustrates the loan origination process:

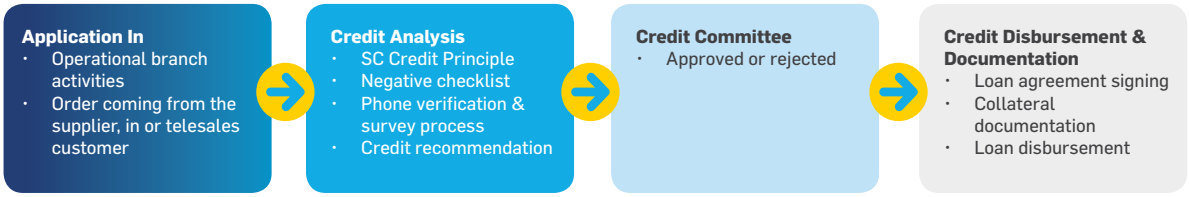

Dalam prosesnya, proposal pembiayaan yang diajukan oleh kantor cabang dengan jumlah tertentu baik perorangan, maupun korporasi, dievaluasi secara independen oleh unit kerja kredit analis. Tujuannya, untuk memastikan semua risiko telah teridentifikasi dan termitigasi dengan jelas, sehingga risiko pembiayaan dapat terukur dengan baik. Pengajuan pembiayaan pada jumlah tertentu dapat menjadi kewenangan kantor cabang, sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang diterima dari kantor pusat. Wewenang persetujuan kredit yang dimiliki oleh kantor cabang ditinjau dan dievaluasi secara berkala.

In its process, financing proposals submitted by branch offices with a certain amount of both individuals, and corporations, are evaluated independently by the analyst's credit unit. It is aimed to ensure that all risks have been clearly identified and mitigated, thereby financing risks can be properly measured. The application for financing at a certain amount can placed as the authority of the branch office, in accordance with the delegation of authority received from the head office. Credit approval authority by branch offices is reviewed and evaluated periodically.

Diagram berikut menggambarkan proses pemantauan & *collection* pembiayaan:

The following diagram illustrates the financing monitoring & collection process:

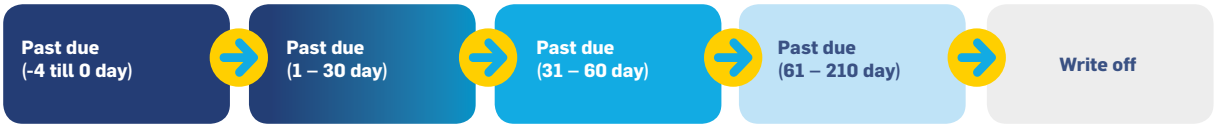

Upaya mitigasi risiko pembiayaan dilakukan dalam proses penagihan (*collection*), eksekusi agunan sampai *write off* berdasarkan pada lamanya hari tertunggak debitur melakukan pembayaran kewajiban angsuran. Prosedurnya dilakukan melalui peringatan tanggal jatuh tempo kewajiban, sampai dengan eksekusi agunan dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Efforts to mitigate financing risks are carried out in the collection process, collateral execution until write off based on the length of days the debtor is in arrears in making installment obligations. The procedure is carried out through the warning of the due date of obligations, until the execution of collateral is carried out in accordance with the applicable policy.

Secara berkala, Unit Manajemen Risiko melakukan aktivitas pemantauan kualitas pembiayaan pada seluruh portofolio pembiayaan Perseroan. Pemantauan tersebut merupakan deteksi dini terkait kemungkinan terjadinya penurunan kualitas pembiayaan akibat perubahan

Periodically, the Risk Management Unit conducts financing quality monitoring activities throughout the Company's entire financing portfolio. The monitoring is an early detection of the possibility of a decline in financing quality due to changes in market conditions,

Manajemen Risiko
Risk Management

kondisi pasar, makro ekonomi dan regulasi. Telaah risiko pembiayaan akan diberikan selaras dengan rekomendasi dalam bentuk tindakan preventif maupun perbaikan kebijakan untuk memitigasi kualitas pembiayaan yang memburuk.

Dari sisi kebijakan, Perseroan memiliki 3 (tiga) tingkatan hierarki yang terdiri dari kerangka kerja, kebijakan dan prosedur. Hierarki tersebut dirancang untuk memberikan panduan yang lebih jelas, terstruktur dan menyeluruh untuk menciptakan konsistensi di seluruh organisasi.

Perseroan secara berkala juga melakukan peninjauan dan perbaruan kebijakan dan prosedur melalui komite yang relevan untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, regulasi dan lingkungan bisnis. Keberhasilan pengelolaan risiko pembiayaan dapat dicapai dengan menerapkan siklus pembiayaan yang prudent. Mulai dari menawarkan produk yang sesuai, mengidentifikasi target pasar yang tepat; menetapkan kriteria penerimaan risiko yang cermat; menerapkan pengendalian yang kuat dalam inisiasi kredit dan proses persetujuan kredit; mempertahankan portofolio kredit yang sehat; serta menerapkan sistem penagihan dan praktik pemulihan yang memadai.

RISIKO PASAR

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Kondisi pasar dalam hal ini perseroan terdampak hanya dari pergerakan suku bunga dikarenakan perseroan tidak memiliki hutang ataupun aset piutang dalam bentuk valuta asing.

Strategi Mitigasi Risiko Pasar

Perseroan secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap risiko pasar, risiko perubahan/ pergerakan suku bunga yang berdampak ke dalam margin dan profitability perusahaan. Mitigasi yang dilakukan oleh perseroan antara lain:

macroeconomics and regulations. A review of financing risks will be provided in line with recommendations through preventive measures and policy improvements to mitigate deteriorating financing quality.

In terms of policy, the Company has 3 (three) levels of hierarchy consisting of frameworks, policies and procedures. The hierarchy is designed to provide clearer, structured and thorough guidance to create consistency across the organization.

The Company also periodically reviews and updates policies and procedures through relevant committees to reflect changes in market conditions, regulations and business environment. Successful financing risk management can be achieved by implementing a prudent financing cycle. Starting from offering the appropriate products, identifying the right target market; establishing prudent risk acceptance criteria; implementing strong controls in credit initiation and credit approval processes; maintaining a healthy credit portfolio; and implementing adequate billing systems and recovery practices.

MARKET RISK

Market Risk is Risk to the position of assets, liabilities, equity, and/or administrative accounts including derivative transactions due to changes in overall market conditions. Market conditions in this case the company is affected only from the movement of interest rates because the company does not have debts or receivable assets in the form of foreign exchange.

Market Risk Mitigation Strategies

The Company actively monitors market risks, risks of changes/movements in interest rates that have an impact on the company's margins and profitability. Mitigations carried out by the company include:

- Memonitoring *repricing gap* antara hutang dan piutang dan mengkaji dampaknya terhadap posisi keuangan ataupun profitabilitas perusahaan.
- Perseroan melakukan strategi funding yang memadai baik secara diversifikasi instrumen utang maupun jangka waktunya untuk meng-cover potensi pergerakan suku bunga di pasar yang tidak sesuai dengan harapan perusahaan.

RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan.

Strategi Mitigasi Risiko Likuiditas

Mitigasi yang dilakukan oleh perseroan antara lain:

- Perseroan secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap posisi *current ratio* dan *cash ratio* serta melakukan monitoring arus kas (*cash flow*) dari aktivitas operasional.
- *Maintain liquidity gap* sd. 6-12 bulan ke depan pada posisi positif gap.
- Perseroan memiliki *emergency credit line* di beberapa bank jika sewaktu-waktu diperlukan pada saat kondisi likuiditas mengetat.

RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional adalah risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Pada Perseroan, risiko operasional melekat pada aktivitas fungsional seperti perkreditan (penyediaan dana), teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Dalam hal ini, Perseroan melakukan pengelolaan risiko operasional dengan mengidentifikasi secara sistematis

- Monitor the repricing gap between payables and receivables and assess their impact on the company's financial position or profitability.
- The Company conducts an adequate funding strategy both by diversifying debt instruments and its term to cover potential interest rate movements in the market that are not in line with the company's expectations.

LIQUIDITY RISK

Liquidity Risk is a risk resulting from the Company's inability to meet its maturing obligations from sources of cash flow funding and/or from liquid assets that can be easily converted into cash, without disrupting the Company's activities and financial condition.

Liquidity Risk Mitigation Strategies

Mitigations carried out by the company include:

- The Company actively supervises the current ratio and cash ratio positions and monitors cash flow from operating activities.
- Maintain liquidity gap up to the Next 6-12 months on a positive gap.
- The Company has emergency credit lines in several banks if required at any time when liquidity conditions tighten.

OPERATIONAL RISK

Operational Risk is a risk arising from insufficiency and/or malfunction of internal processes, human error, system failure, and/or external events that affect the Company's operations. In the Company, operational risks are inherent in functional activities such as funding, information system technology and management information systems, as well as human resource management.

To this end, the Company manages operational risks by systematically identifying the causes of failures in daily

Manajemen Risiko
Risk Management

penyebab kegagalan dalam kegiatan operasional sehari-hari secara fungsional organisasi, menilai risiko kerugian dan mengambil tindakan yang tepat untuk meminimalisir dampak kerugian tersebut.

operational activities functionally, assessing the risk of loss and taking appropriate actions to minimize the impact of these losses.

Strategi Mitigasi Risiko Operasional

Perseroan berupaya melakukan peningkatan kualitas manajemen risiko operasional secara efektif dan efisien untuk mengantisipasi beberapa hal berikut ini:

a. Kerugian operasional signifikan yang dialami oleh industri Perusahaan Pembiayaan;
b. Regulasi yang baru dan praktik terbaik dalam Perusahaan Pembiayaan di Indonesia;
c. Perubahan yang relatif cepat dalam dunia bisnis;
d. Tumbuhnya kebutuhan akan pengukuran kinerja;
e. Perlindungan dan pengembangan terhadap nilai pemegang saham.

Operational Risk Mitigation Strategies

The Company strives to improve the quality of operational risk management effectively and efficiently to anticipate the following:

a. Significant operational losses suffered by the Financing Company industry;
b. New regulations and best practices in Financing Companies in Indonesia;
c. Relatively rapid changes in business world;
d. Growing need for performance measurement;
e. Protection and development of shareholder's value.

Terkait hal tersebut, Perseroan berupaya meningkatkan kesadaran risiko operasional, serta membentuk kerangka kerja manajemen risiko operasional, kebijakan dan prosedur yang memadai serta secara konsisten diterapkan di Perseroan.

In this regard, the Company seeks to increase operational risk awareness, as well as establish an operational risk management framework, policies and procedures that are adequate and consistently applied in the Company.

Strategi manajemen risiko operasional dalam Perseroan telah diformulasikan dengan baik dan dipahami secara merata. Langkah ini dilakukan untuk membangun kesadaran manajemen risiko operasional pada Perseroan.

The operational risk management strategy in the Company has been well formulated and understood equally. This measure is carried out to build awareness of operational risk management in the Company.

Langkah strategi mitigasi risiko operasional pada Perseroan dilakukan dengan membentuk perangkat utama risiko operasional. Perangkat tersebut merupakan bagian dari pengembangan manajemen risiko operasional yang efektif.

The Company's operational risk mitigation strategy is carried out by establishing the main tool of operational risk. Such devices are part of the development of effective operational risk management.

Perseroan menerapkan strategi serta kebijakan anti *fraud* sebagai pencegahan terjadinya kejadian penyimpangan operasional baik internal maupun eksternal Perseroan.

The Company implements anti-fraud strategies and policies as a prevention of operational irregularities both internally and externally by the Company.

Sebagai bagian dari mitigasi risiko operasional, *Businesss Continuity Management* merupakan

As part of mitigating operational risks, Business Continuity Management is an approach that includes

pendekatan yang mencakup kerangka kerja, kebijakan standar dan prosedur dalam membangun ketahanan dan kemampuan, demi memastikan bahwa operasional Perseroan dapat dipulihkan dengan cepat apabila terjadi gangguan pada fungsi-fungsi kritikal, sesuai dengan batas toleransi maksimum yang telah ditentukan. Secara berkala, Perseroan melakukan latihan simulasi krisis dan pemulihan guna menguji rencana serta kesiapan terhadap krisis yang mungkin terjadi.

frameworks, standard policies and procedures in building resilience and capability, in order to ensure that the Company's operations can be recovered quickly in the event of disruption to critical functions, in accordance with the maximum tolerance limit that has been determined. Periodically, the Company conducts crisis and recovery simulation exercises to test plans and readiness for possible crises.

RISIKO HUKUM

Risiko Hukum adalah risiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum, seperti ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian.

Penerapan Manajemen Risiko bagi Risiko Hukum adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan perundang-undangan maupun proses litigasi.

Strategi Mitigasi Risiko Hukum

Perseroan Menyadari akan terjadinya Risiko Hukum yang muncul dan dapat memberikan dampak kerugian secara finansial maupun reputasi. Dalam hal ini perseroan melakukan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

a. Perseroan memiliki Legal Counsel & Anti Fraud Division yakni fungsi yang berperan dalam memastikan kepastian hukum dan kepentingan hukum perseroan dalam melakukan perbuatan hukumnya dengan pihak lain. Legal Counsel & Anti Fraud Division memberikan peran konsultatif dalam memitigasi risiko hukum yang ada dalam kegiatan perseroan.
b. Legal Counsel & Anti Fraud Division meninjau legalitas untuk setiap produk maupun lini bisnis baru.
c. Legal Department sebagai bagian dari Legal Counsel & Anti Fraud Division menyusun, merancang, membuat dan mengontrol setiap pembuatan perjanjian dengan pihak ketiga dengan memastikan

LEGAL RISK

Legal Risk is arising from lawsuits and/or weaknesses in legal aspects, such as the absence of supporting laws and regulations or weaknesses in the agreement such as non-fulfillment of the conditions for the validity of the agreement.

The application of Risk Management for Legal Risk is to minimize the possible negative impact of juridical weakness, absence and/or changes in regulations or litigation processes.

Legal Risk Mitigation Strategies

The Company is aware of the occurrence of Legal Risks that arise and can have an impact on financial and reputational losses. In this case, the company implements various measures, as follows:

a. The Company has a Legal Counsel & Anti Fraud Division, which is a function that takes a role in ensuring legal certainty and the company's legal interests in carrying out its legal actions with other parties. The Legal Counsel & Anti Fraud Division provides a consultative role in mitigating legal risks that exist in the company's activities.
b. The Legal Counsel & Anti Fraud Division reviews the legality for each new product or line of business.
c. The Legal Department as part of the Legal Counsel & Anti Fraud Division compiles, designs, prepares and controls every agreement with third parties by ensuring the functions and objectives of the company

Manajemen Risiko
Risk Management

fungsi dan tujuan Perseroan dalam setiap rencana perbuatan hukum setelah mendapatkan pengajuan dari fungsi-fungsi terkait.

d. Legal Department sebagai bagian dari Legal Counsel & Anti Fraud Division berfungsi menginventaris perjanjian Perseroan, sehingga memastikan ketersediaan dokumen perjanjian dalam hal terdapat permasalahan hukum.
e. Legal Counsel & Anti Fraud Division menyelaraskan peraturan hukum terbaru dengan penerapannya di dalam kegiatan yang dijalankan perseroan.
f. Legal Counsel & Anti Fraud Division juga bertanggung jawab dalam penanganan proses litigasi Perseroan, sehingga potensi risiko dapat terpantau dan semaksimal mungkin dapat diminimalisir.

in each legal action plan after obtaining submissions from related functions.

d. The Legal Department as part of the Legal Counsel & Anti Fraud Division functions to inventory the Company's agreements, thereby ensuring the availability of agreement documents in the event of legal issues.
e. The Legal Counsel & Anti Fraud Division aligns the latest legal regulations with its applications in the Company's activities.
f. The Legal Counsel & Anti Fraud Division is also responsible for handling the Company's litigation process, hence potential risks can be monitored and minimized optimally.

RISIKO REPUTASI

Risiko Reputasi adalah risiko yang muncul akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang muncul adanya reputasi negatif terhadap Perseroan seperti pemberitaan media dan/atau rumor yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi yang kurang efektif.

Strategi Mitigasi Risiko Reputasi

Perseroan melakukan pengelolaan Risiko Reputasi bertujuan untuk meminimalisir dampak kerugian akibat menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan. Adapun risiko reputasi dikelola melalui:

1. Sumber Daya
   Perseroan melalui *Corporate Services and Communication Department* menjalankan fungsi kehumasan yang senantiasa mengkomunikasikan segala informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

   Corporate Services and Communication Department juga menjalankan fungsi pelayanan seperti:
   a. Melakukan monitoring berita negatif di media massa, media elektronik, maupun media *online;*

REPUTATIONAL RISK

Reputation Risk arises due to a decrease in the level of stakeholder trust from a negative reputation for the Company such as media reports and/or rumours that are negative in nature, as well as the existence of ineffective communication strategies.

Reputation Risk Mitigation Strategies

The Company manages Reputational Risk aimed at minimizing the impact of losses due to declining stakeholder trust. Reputational risk is managed through:

1. Resources
   The Company through the Corporate Services and Communication Department carries out a public relations function that always communicates all the information needed by stakeholders.

   The Corporate Services and Communication Department also performs service functions such as:
   a. Monitoring negative news in mass media, electronic media, and online media,

b. Membuat layanan informasi konsumen dengan berbasis digital;
c. Mengevaluasi serta menindaklanjuti setiap berita negatif yang diterima Perusahaan melalui berbagai kanal.

2. Kebijakan
Perseroan memiliki pedoman penanganan keluhan konsumen dan pemberian informasi kepada pemangku kepentingan, antara lain:
- Hotline Service 150999
- Email pelanggan corporate_secretary@wom.co.id
- Pengiriman pesan melalui Media Sosial Instagram/Facebook @womfinance_id
- Menghubungi nomor kantor 021-2188 2400
- *Walk in Customer* (*Konsumen* datang langsung ke kantor jaringan Perseroan)
- *Barcode* "Lapor Aja" dengan melakukan *scan*

b. Creating consumer information services with digital based,
c. Evaluate and follow up on any negative news received by the Company through various channels.

2. Policies
The Company has guidelines for consumer complaints handling and providing information to stakeholders, as follows:
- Hotline Service 150999
- Email for customers corporate_secretary@wom.co.id
- Messaging via social media Instagram/Facebook @womfinance_id
- Call the office number 021-2188 2400
- Walk in Customer (Consumers visit to the Company's network office)
- "Report Aja" barcode by scanning

RISIKO STRATEGIS

Perseroan menyadari munculnya Risiko Strategis yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal yang mengakibatkan tidak tercapainya target yang sudah ditetapkan oleh Perseroan. Risiko strategis ini dapat memengaruhi permodalan, pendapatan bahkan reputasi Perseroan. Hal tersebut dapat terjadi akibat pelaksanaan keputusan yang tidak tepat atau akibat kurang responsifnya Perseroan mengantisipasi perubahan industri, ekonomi, teknologi dan regulasi.

Strategi Mitigasi Risiko Strategis

Terkait Risiko Strategis ini, Perseroan telah merumuskan strategi mitigasi risiko untuk menyeimbangkan risiko dan pendapatan dengan mempertimbangkan perubahan kondisi pasar, regulasi dan lingkungan bisnis. Strategi mitigasi risiko strategis yang diterapkan Perseroan menggunakan beberapa parameter. Parameter pertama

STRATEGIC RISK

The Company is aware of the emergence of Strategic Risks which, among others, are caused by the improper determination and implementation of the Company's strategy, improper business decision making, or the company's lack of responsiveness to external changes that resulted in failure to achieve the targets set by the Company. The strategic risk can affect the Company's capital, revenue and even reputation. This can occur due to improper implementation of decisions or due to the Company's lack of responsiveness to anticipate the changes in industry, economy, technology and regulations.

Strategic Risk Mitigation Strategies

On Strategic Risk, the Company has formulated a risk mitigation strategy to balance risk and income by considering changes in market conditions, regulations and business environment. The strategic risk mitigation strategy implemented by the Company uses several parameters. The first parameter is the suitability of the

Manajemen Risiko
Risk Management

adalah kesesuaian strategi bisnis Perseroan dengan kondisi lingkungan bisnis. Parameter kedua adalah strategi bisnis Perseroan dalam konglomerasi keuangan. Parameter ketiga adalah posisi bisnis Perseroan dalam konglomerasi keuangan. Sedangkan parameter keempat merupakan pencapaian rencana bisnis Perseroan dalam konglomerasi keuangan. Pengelolaan risiko dilakukan melalui pengawasan aktif dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, dimana Direksi bertanggung jawab dalam mempersiapkan rencana bisnis yang kemudian dikaji serta disetujui oleh Dewan Komisaris.

Company's business strategy with business environment conditions. The second parameter is the Company's business strategy in financial conglomerates. The third parameter is the Company's business position in the financial conglomerate. Meanwhile, the fourth parameter is the achievement of the Company's business plan in a financial conglomerate. Risk management is carried out through active supervision from the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors, where the Board of Directors is responsible for preparing a business plan which is then reviewed and approved by the Board of Commissioners.

RISIKO KEPATUHAN

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan. Risiko kepatuhan merupakan salah satu jenis risiko yang wajib dikelola oleh Perseroan mengingat kegagalan dalam mengelola risiko kepatuhan tersebut dapat mengakibatkan sanksi dari regulator kepada Perseroan baik berupa denda dan/atau sanksi lainnya yang berdampak kepada kelangsungan usaha Perseroan, sehingga dapat mempengaruhi tata kelola Perseroan. Risiko Kepatuhan dapat bersumber dari perilaku hukum yaitu:

1. Perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Perseroan yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan; dan
2. Perilaku organisasi yaitu perilaku atau aktivitas Perseroan yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.

Berdasarkan POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diubah dengan POJK No. 29/POJK.05/2020, Perseroan telah menunjuk Presiden Direktur Perseroan sebagai anggota Direksi Perseroan yang membawahi fungsi kepatuhan, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan

COMPLIANCE RISK

Compliance Risk occurs as a result of the Company incompliance with and/or failure in implementing the laws and regulations and stipulations applicable to the Company. Compliance risk is one type of risk that shall be managed by the Company considering that failure to manage compliance risk can result in sanctions from regulators to the Company in the form of fines and/or other sanctions that have an impact on the Company's business continuity, thereby affecting the Company's governance. Compliance Risk can stem from legal conduct, as follows:

1. Legal behaviour, namely the Company's behaviour or activities that deviate or violate the provisions and/or laws and regulations; and
2. Organizational behaviour, namely the behaviour or activity of the Company that deviates or contradicts the generally accepted standards.

Pursuant to POJK No. 30/POJK.05/2014 on Good Corporate Governance for Financing Companies as amended by POJK No. 29/POJK.05/2020, the Company has appointed the President Director of the Company as a member of the Company's Board of Directors in charge of the compliance function, who is responsible to ensuring compliance and minimizing compliance

risiko kepatuhan dengan merumuskan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan serta memantau pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Presiden Direktur dibantu oleh Legal Counsel & Anti Fraud Division yang merupakan unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan Perseroan dan bersifat independen terhadap satuan kerja operasional.

Strategi Mitigasi Risiko Kepatuhan

Perseroan mempunyai komitmen kuat untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan dalam prosesnya apabila terjadi. Hal ini sejalan dengan strategi manajemen risiko kepatuhan Perseroan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku dengan cara proaktif melakukan pencegahan dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan korektif dalam rangka perbaikan. Dalam rangka mengendalikan dan meminimalkan risiko kepatuhan, Perseroan telah melakukan langkah-langkah antara lain:

a. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perseroan di setiap jenjang organisasi, antara lain melalui pelaksanaan sosialisasi atas ketentuan dan aturan yang berlaku, serta melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan Otoritas Jasa Keuangan bagi Perseroan melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari fungsi, unit kerja, maupun kantor cabang Perseroan.
b. Melakukan identifikasi sumber-sumber risiko kepatuhan.
c. Melakukan *gap analysis*, menganalisis dampak ketentuan baru terhadap operasional Perseroan, dan mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan, dan prosedur internal.
d. Mengelola risiko kepatuhan, selain dilakukan melalui uji kepatuhan, juga dilakukan melalui pemantauan terhadap pemenuhan komitmen Perseroan kepada regulator, baik berdasarkan hasil pemeriksaan regulator maupun melalui korespondensi antara Perseroan dengan regulator.

risks by formulating management policies and procedures of compliance risks as well as monitoring its implementations. In carrying out his duties, the President Director is assisted by the Legal Counsel & Anti Fraud Division which is a unit that carries out the Company's compliance function and is independent of operating units.

Compliance Risk Mitigation Strategies

The Company has a strong commitment to comply with prevailing laws and regulations and take measures to correct weaknesses in the process. This is in line with the Company's compliance risk management strategy to comply with applicable regulations by proactively preventing violations to minimize the occurrence of violations and take corrective actions for improvement. To control and minimize compliance risks, the Company has taken measures, as follows:

a. Realizing the implementation of a compliance culture in all business activities of the Company at every level of the organization, including through the implementation of socialization of applicable stipulations and rules, as well as carrying out consultative functions on the implementation of the OJK regulations by providing suggestions/responses to questions from the Company's functions, units, and branch offices.
b. Identify sources of compliance risk.
c. Conducting gap analysis, analysing the impact of new provisions on the Company's operations, and to propose adjustments to internal manuals, policies, and procedures.
d. Managing compliance risks, apart from compliance tests, is also carried out by monitoring the fulfillment of the Company's commitments to regulators, both based on the results of regulatory examinations and through correspondence between the Company and regulators.

Manajemen Risiko
Risk Management

e. Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Perseroan yang meliputi yaitu:
   - Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
   - Kebijakan dan prosedur.
   - Pengendalian internal.
   - Sistem informasi manajemen.
   - Sumber daya manusia dan pelatihan.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan Manajemen Risiko yang dilakukan Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan Kecukupan Sistem Manajemen Risiko Perseroan dalam mengelola risiko yang mungkin terjadi.

e. Implementation of anti-money laundering and counter-terrorism financing programs in the Company which include:
   - Active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners.
   - Policies and procedures.
   - Internal control.
   - Management information systems.
   - Human resources and training.

Statements of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the Audit Committee on the Adequacy of Risk Management System

The Board of Directors and Board of Commissioners stated that the Company's Risk Management System is adequate for managing potential risks in relation to the implementation of risk management activities carried out by the Company.

Perkara Hukum
Litigation

Sepanjang 2023, Perseroan terlibat dalam 21 (dua puluh satu) Perkara yang masih dalam proses baik dalam kedudukannya sebagai Penggugat, Tergugat, Pemohon, Termohon, Pelapor dalam Perkara Hubungan Industrial (Perburuhan), Perkara Perdata, Perkara Pidana maupun Perpajakan, yang terdiri dari: 3 (tiga) Perkara Hubungan Industrial, 16 (tujuh belas) Perkara Perdata, 2 (dua) Perkara Pidana, dan 0 (nol) Perkara Pajak.

Throughout 2023, the Company is involved in 21 (twenty-one) cases that are still in process both in their position as Plaintiffs, Defendants, Applicants, Respondents, Reporters in Industrial Relations (Labor) Cases, Civil Cases, Criminal and Tax Cases, consisting of: 3 (three) Industrial Relations Cases, 16 (seventeen) Civil Cases, 2 (two) Criminal Cases, and 0 (zero) Tax Cases.

Adapun perincian perkara hukum yang dihadapi Perseroan sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The details of the legal cases faced by the Company throughout 2023 are as follows:

No	Pokok Perkara/Gugatan Lawsuit	Status Perkara/ Gugatan Lawsuit Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company
1	Perkara antara Prihantara Putra (Non Konsumen/Pihak Ketiga) selaku Penggugat melawan: Tergugat-1 = Perseroan Tergugat-2 = Ade Komilah (Konsumen) Tergugat-3 = Achmad Rozak Dengan perkara nomor: 8/Pdt.G/2021/PN Bdg di Pengadilan Negeri Bandung. The case between Prihantara Putra (Non-Consumer/Third Party) as Plaintiff against: Defendant-1 = Company Defendant-2 = Ade Komilah (Consumer) Defendant-3 = Achmad Rozak With case number: 8/Pdt.G/2021/PN Bdg in Bandung District Court.	Proses Kasasi Cassation Process	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Does not have a material impact on the Company's financial condition
2	Perkara antara Ni Nyoman Candra Ary Dewi (“Konsumen”) selaku Penggugat melawan: Tergugat = Perseroan Dengan Nomor Perkara: 29/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 11 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Denpasar The case between Ni Nyoman Candra Ary Dewi ("Consumer") as Plaintiff against: Defendant = Company With Case Number: 29/Pdt.G/2023/PN Dps dated January 11, 2023 at the Denpasar District Court	Proses Banding Appeals Process	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Does not have a material impact on the Company's financial condition
3	Perkara antara Asdar Zubair (Non Konsumen/Pihak Ketiga) selaku Penggugat melawan: Tergugat-1 = dr. Sapta Prasetya (Konsumen) Tergugat-2 = Perseroan Dengan Nomor Perkara: 10/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 9 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Makassar The case between Asdar Zubair (Non-Consumer/Third Party) as Plaintiff against: Defendant-1 = dr. Sapta Prasetya (Consumer) Defendant-2 = Company With Case Number: 10/Pdt.G/2023/PN Mks dated January 9, 2023 at the Makassar District Court	Proses Banding Appeals Process	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Does not have a material impact on the Company's financial condition

Perkara Hukum
Litigation

No	Pokok Perkara/Gugatan Lawsuit	Status Perkara/ Gugatan Lawsuit Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company
4	Perkara antara Muhammad Wahid Maulana dan Cleopatra Hendria ("Konsumen") selaku Penggugat melawan: Tergugat-1 = Perseroan Tergugat-2 = Kantor Notaris Prima Hedy, SH,MH Dengan Nomor Perkara: 23/Pdt.G/2023/PN.Kds tanggal 20 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Kudus The case between Muhammad Wahid Maulana and Cleopatra Hendria ("Consumer") as Plaintiff against: Defendant-1 = Company Defendant-2 = Notary Office of Prima Hedy, SH, MH With Case Number: 23/Pdt.G/2023/PN.Kds dated March 20, 2023 in the Holy District Court	Proses Kasasi Cassation Process	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Does not have a material impact on the Company's financial condition
5	Perkara antara Nasir,SE,H ("Konsumen") selaku Penggugat melawan: Tergugat = Perseroan Dengan Nomor Perkara: 71/Pdt.G/2023/PN Bjm tertanggal 21 Agustus 2023 di Pengadilan Negeri Banjarmasin The case between Nasir, SE, H ("Consumer") as the Plaintiff against Defendant = Company with Case Number: 71/Pdt.G/2023/PN Bjm dated August 21, 2023 at the Banjarmasin District Court	Proses Pengadilan Negeri Banjarmasin Banjarmasin District Court Process	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Does not have a material impact on the Company's financial condition
6	Perkara antara Rahma & Sitti Arafah ("Non Konsumen/Pihak Ketiga") selaku Penggugat melawan: Tergugat = Perseroan Dengan Nomor Perkara: 26/Pdt.G/2023/PN Mrs tertanggal 3 Oktober 2023 di Pengadilan Negeri Maros The case between Rahma & Sitti Arafah ("Non-Consumer/Third Party") as Plaintiffs against: Defendant = Company With Case Number: 26/Pdt.G/2023/PN Mrs. dated October 3, 2023 in Maros District Court	Proses Pengadilan Negeri Maros Maros District Court Process	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Does not have a material impact on the Company's financial condition
7	Perkara antara Moch Ridwan Riyadi ("Non Konsumen/Pihak Ketiga") selaku Penggugat melawan: Tergugat-1 = Saanan SE (Konsumen) Tergugat-2 = Perseroan Dengan Nomor Perkara: 552/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim tertanggal 3 Oktober 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur The case between Moch Ridwan Riyadi ("Non Consumer/Third Party") as Plaintiff against: Defendant-1 = Saanan SE (Consumer) Defendant-2 = Company with Case Number: 552/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim dated October 3, 2023 at the East Jakarta District Court	Proses Pengadilan Negeri Jakarta Timur East Jakarta District Court Process	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Does not have a material impact on the Company's financial condition
8	Perkara antara Ahmad Yani ("Konsumen") selaku Penggugat melawan: Tergugat = Perseroan Dengan Nomor Perkara: 920/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tertanggal 17 Oktober 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat The case between Ahmad Yani ("Consumer") as the Plaintiff against: Defendant = Company with Case Number: 920/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt dated October 17, 2023 at the West Jakarta District Court	Proses Pengadilan Negeri Jakarta Barat West Jakarta District Court Process	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Does not have a material impact on the Company's financial condition

No	Pokok Perkara/Gugatan Lawsuit	Status Perkara/ Gugatan Lawsuit Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company
9	Perkara Perdata Gugatan Sederhana dimana Perseroan, selaku Penggugat melawan: Tergugat-1 = Asadul Usud (Konsumen) Dengan Nomor Perkara: 96/Pdt.G.S/2023/PN.Tng tertanggal 15 November 2023 di Pengadilan Negeri Tangerang Civil Case Simple Lawsuit in which the Company, as the Plaintiff against: Defendant-1 = Asadul Usud (Consumer) With Case Number: 96/Pdt.G.S/2023/PN.Tng dated November 15, 2023 in the Tangerang District Court	Proses Pengadilan Negeri Tangerang Tangerang District Court Process	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Does not have a material impact on the Company's financial condition
10	Perkara Perdata Gugatan Sederhana dimana Perseroan, selaku Penggugat melawan: Tergugat= Nadiah Susanti Dengan Nomor Perkara: 17/Pdt.G.S/2023/PN Psr tertanggal 29 November 2023 di Pengadilan Negeri Pasuruan Civil Case Simple Lawsuit in which the Company, as the Plaintiff against: Defendant = Nadiah Susanti With Case Number: 17/Pdt.G.S/2023/PN Psr dated November 29, 2023 in Pasuruan District Court	Proses Pengadilan Negeri Pasuruan Pasuruan District Court Process	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Does not have a material impact on the Company's financial condition
11	Perkara Perdata Gugatan Sederhana dimana Perseroan, selaku Penggugat melawan: Tergugat-1 = Deswan Talo (Konsumen) Tergugat-2 = Anggraini Dengan Nomor Perkara: 18/Pdt.G.S/2023/PN.Bgl tertanggal 30 November 2023 di Pengadilan Negeri Bengkulu Civil Case Simple Lawsuit in which the Company, as the Plaintiff against: Defendant-1 = Deswan Talo (Consumer) Defendant-2 = Anggraini With Case Number: 18/Pdt.G.S/2023/PN.Bgl dated November 30, 2023 at the Bengkulu District Court	Proses Pengadilan Negeri Bengkulu Bengkulu District Court Process	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Does not have a material impact on the Company's financial condition
12	Perkara Perdata Gugatan Sederhana dimana Perseroan, selaku Penggugat melawan: Tergugat-1 = Amir Syaripudin (Konsumen) Tergugat-2 = Kusmiwati Dengan Nomor Perkara: 19/Pdt.G.S/2023/PN.Bgl tertanggal 30 November 2023 di Pengadilan Negeri Bengkulu Civil Case Simple Lawsuit in which the Company, as the Plaintiff against: Defendant-1 = Amir Syaripudin (Consumer) Defendant-2 = Kusmiwati With Case Number: 19/Pdt.G.S/2023/PN.Bgl dated November 30, 2023 at the Bengkulu District Court	Proses Pengadilan Negeri Bengkulu Bengkulu District Court Process	Tid Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Does not have a material impact on the Company's financial condition
13	Perkara Perdata Gugatan Sederhana dimana Perseroan, selaku Penggugat melawan: Tergugat-1 = Susilawati (Konsumen) Tergugat-2 = Fendri Dengan Nomor Perkara: 66/Pdt.G.S/2023/PN.Bta tertanggal 20 Desember 2023 di Pengadilan Negeri Baturaja. Civil Case Simple Lawsuit in which the Company, as the Plaintiff against: Defendant-1 = Susilawati (Consumer) Defendant-2 = Fendrt With Case Number: 66/Pdt.G.S/2023/PN.Btal dated Decenber 20, 2023 at the Baturaja District Court	Proses Pengadilan Negeri Baturaja Baturaja District Court Process	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Does not have a material impact on the Company's financial condition

Perkara Hukum
Litigation

No	Pokok Perkara/Gugatan Lawsuit	Status Perkara/ Gugatan Lawsuit Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company
14	Perkara Perdata Gugatan Sederhana dimana Perseroan, selaku Penggugat melawan: Tergugat-1 = Rohmana (Konsumen) Tergugat-2 = Nurjanah Dengan Nomor Perkara: 45/Pdt.G.S/2023/PN.Grt tertanggal 18 Desember 2023 di Pengadilan Negeri Garut. Civil Case Simple Lawsuit in which the Company, as the Plaintiff against: Defendant-1 = Rohmana (Consumer) Defendant-2 = Nurjanah With Case Number: 45/Pdt.G.S/2023/PN.Grt dated December 18, 2023 at the Garut District Court	Proses Pengadilan Negeri Garut Garut District Court Process	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Does not have a material impact on the Company's financial condition
15	Perkara Perdata Gugatan Sederhana dimana Perseroan, selaku Penggugat melawan: Tergugat-1 = Baron Hermanto (Konsumen) Tergugat-2 = Robiatul Adawiyah Dengan Nomor Perkara: 69/Pdt.G.S/2023/PN.Kag tertanggal 20 Desember 2023 di Pengadilan Negeri Kayuagung. Civil Case Simple Lawsuit in which the Company, as Plaintiff against: Defendant-1 = Baron Hermanto (Consumer) Defendant-2 = Robiatul Adawiyah with Case Number: 69/Pdt.G.S/2023/PN. Kag dated December 20, 2023 in the Kayuagung District Court.	Proses Pengadilan Negeri Kayu Agung Kayu Agung District Court Process	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Does not have a material impact on the Company's financial condition
16	Perkara Perdata Gugatan Sederhana dimana Perseroan, selaku Penggugat melawan: Tergugat-1 = Najamudin (Konsumen) Tergugat-2 = Marlinda Dengan Nomor Perkara: 62/Pdt.G.S/2023/PN.Lht tertanggal 11 Desember 2023 di Pengadilan Negeri Lahat. Civil Case Simple Lawsuit in which the Company, as Plaintiff against Defendant-1 = Najamudin (Consumer) Defendant-2 = Marlinda With Case Number: 62/Pdt.G.S/2023/PN.Lht dated December 11, 2023 in Lahat District Court.	Proses Pengadilan Negeri Lahat Lahat District Court Process	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan *Does not have a material impact on the Company's financial condition*
17	Perkara antara Endang Aprilianda, selaku Penggugat melawan: Tergugat = Perseroan Dengan Nomor Perkara: 124/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg tertanggal 04 Agustus 2023 di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung The case between Endang Aprilianda, as the Plaintiff against: Defendant = Company with Case Number: 124/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg dated August 4, 2023 in the Industrial Relations Court at the Bandung District Court	Proses Kasasi Cassation Process	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Does not have a material impact on the Company's financial condition
18	Perkara antara Sanudin, selaku Penggugat melawan: Tergugat = Perseroan Dengan Nomor Perkara: 125/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg tertanggal 04 Agustus 2023 di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung The case between Sanudin, as the Plaintiff against: Defendant = Compan with Case Number: 125/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg dated August 4, 2023 at the Industrial Relations Court at the Bandung District Court	Proses Kasasi Cassation Process	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Does not have a material impact on the Company's financial condition

No	Pokok Perkara/Gugatan Lawsuit	Status Perkara/ Gugatan Lawsuit Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company
19	Perkara antara Suhandoko, selaku Penggugat melawan: Tergugat = Perseroan Dengan Nomor Perkara: 110/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby tertanggal 24 Oktober 2023 di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya The case between Suhandoko, as the Plaintiff against: Defendant = Company with Case Number: 110/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby dated October 24, 2023 at the Industrial Relations Court at the Surabaya District Court	Proses Persidangan Pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya. The trial process at the Industrial Relations Court at the Surabaya District Court.	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan *D*oes not have a material impact on the Company's financial condition
20	Perkara Nomor: 1136/Pid.Sus/2023/PN. Mks tertanggal 31 Oktober 2023 di Pengadilan Negeri Makassar dengan Terdakwa sdr. Ahmad Ramadhani alias Dani. Case Number: 1136/Pid.Sus/2023/PN. Mks dated October 31, 2023 in Makassar District Court with Defendant sdr. Ahmad Ramadhani aka Dani	Proses Pengadilan Negeri Makassar Makassar District Court Process	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Does not have a material impact on the Company's financial condition
21	Perkara Nomor: 1136/Pid.Sus/2023/PN. Plg tertanggal 17 Oktober 2023 di Pengadilan Negeri Palembang dengan Terdakwa: 1. sdr. Aminulah alias Amin. 2. sdr. Adam Malik alias Adam (Konsumen) Case Number: 1136/Pid.Sus/2023/PN. Plg dated October 17, 2023 at the Palembang District Court with the Defendant: 1. Mr. Aminulah aka Amin. 2. Mr, Adam Malik aka Adam (Consumer)	Proses Pengadilan Negeri Palembang Palembang District Court Process	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Does not have a material impact on the Company's financial condition

Selama tahun 2023, tidak terdapat perkara yang berkategori penting/material dan/atau yang dapat mempengaruhi kinerja yang dihadapi oleh Perseroan.

During 2023, there were no cases that were categorized as important/material and/or that could affect the performance of the Company.

Sanksi Administrasi

Administrative Sanctions

Selama tahun 2023, tidak terdapat sanksi administratif yang material dari otoritas terkait yang mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan maupun sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan dari otoritas terkait.

During 2023, there were no material administrative sanctions from the relevant authorities that affected the continuity of the Company's business, nor administrative sanctions imposed on members of the Board of Directors and/or members of the Company's Board of Commissioners by the relevant authorities.

Kode Etik [GRI 2-26]

Code of Conduct

Pokok-Pokok Isi Kode Etik

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan mengatur tentang tanggung jawab kepada perusahaan, tanggung jawab di tempat kerja, etika dalam mewakili perusahaan dan berinteraksi dengan pihak luar, kerahasiaan, investasi dan kegiatan luar, dan kepatuhan.

Main Contents of the Code of Ethics

The Company's Code of Ethics and Code of Conduct regulates responsibility to the company, responsibilities in the workplace, ethics in representing the company and interacting with outsiders, confidentiality, investment and outside activities, and compliance.

Sosialisasi dan Upaya Penegakannya

Sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku dilakukan dengan membagikan buku Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku kepada karyawan baru dan juga dengan melakukan *upload* di sistem yang bisa diakses dengan mudah kapan pun oleh seluruh karyawan.

Dissemination and Enforcement Efforts

The Code of Ethics and Code of Conduct disseminations is carried out by distributing the Code of Ethics and Code of Conduct books to new employees and also by uploading them to a system that can be accessed easily at any time.

Cakupan Penerapan

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku berlaku bagi segenap karyawan perusahaan (karyawan tetap, karyawan tidak tetap, karyawan dalam masa pendidikan, maupun karyawan yang bekerja di Perusahaan dengan ikatan kerja melalui pihak ketiga).

Scope of Application

The Code of Ethics and Code of Conduct apply to all company employees (permanent employees, non-permanent employees, the trainees, as well as employees who work in the Company with work ties through third parties).

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Apabila jelas terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku, maka perusahaan akan mengeluarkan sanksi sesuai dengan tingkatan sanksi dalam peraturan perusahaan dan atau ketentuan internal perusahaan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Types of Sanctions for Violation of the Code of Ethics

If it is clearly proven that there has been a violation of the Code of Ethics and Code of Conduct, the company will issue sanctions in accordance with the level of sanctions in company regulations and or internal company provisions and or applicable laws and regulations.

Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Beserta Sanksi yang Diberikan

Selama tahun 2023, Perseroan telah menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku.

Violations of Code of Conduct and Sanctions

During 2023, the Company has settled the violations cases on Code of Ethics and Code of Conduct.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja kepada Manajemen dan/atau Karyawan

Perseroan telah menyertakan para karyawan dalam program pensiun BPJS untuk kompensasi pesangon dimana perseroan membayar sebagian premi yang menjadi kewajiban, dihitung berdasarkan jumlah tertentu dari penghasilan tetap yang diterima karyawan yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan perseroan.

Policy on Provision of Performance-Based Long-Term Compensation to Management and/or Employees

The Company has included its employees in the BPJS pension program for severance compensation, where the Company pays a portion of the premiums that are due, calculated based on a certain amount of the fixed income received by employees who meet the criteria set by the Company.

Sistem Pelaporan Pelanggaran [GRI 2-26]

Whistleblowing System [GRI 2-26]

Perusahaan memiliki dan menjalankan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system)* guna membangun bisnis yang terpercaya dan profesional. *Whistleblowing system* merupakan sarana komunikasi yang disediakan oleh Perusahaan untuk laporan pengaduan indikasi *fraud* atau pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan dan ketentuan yang berlaku dari seluruh karyawan Perusahaan baik di cabang, Kantor Regional maupun kantor pusat.

The Company has and performs a whistleblowing system to build a trusted and professional business. Whistleblowing system is a means of communication provided by the Company for reporting complaints that indicate fraud or violations of the Company's Regulations and applicable provisions from all employees of the Company both in branches, Business Units and head office.

Whistleblowing System sebagai salah satu program Strategi *Anti-Fraud* yang bertujuan untuk:

1. Mendeteksi kejahatan *fraud* atau indikasi *fraud* melalui laporan pengaduan yang dapat disampaikan dengan mencantumkan secara jelas identitasnya, untuk selanjutnya dapat dilakukan proses investigasi ataupun tindakan tindak lanjut.
2. Mendorong *awareness* atau kepedulian seluruh karyawan untuk turut serta menjaga unit kerjanya dari kerugian akibat *fraud* sehingga kualitas pengawasan lebih baik dan rasa ikut memiliki *(sense of belonging)* karyawan menjadi lebih tinggi.
3. Meningkatkan reputasi Perusahaan khususnya dalam konteks *Good Corporate Governance* (GCG) yang akan meningkatkan citra Perusahaan karena memiliki kelengkapan perangkat *Anti-Fraud* yang memadai.

Whistleblowing System as one of the Anti-Fraud Strategy programs that aims to:

1. Detecting fraud crimes or indications of fraud through complaint reports that can be submitted by clearly stating identity, for further investigation processes or follow-up actions.
2. Promote awareness or concern of all employees to participate in safeguarding their work units from losses due to fraud to ensure improved quality of supervision and higher sense of belonging of employees.
3. Improve the Company's reputation specifically in the context of Good Corporate Governance (GCG) which will enhance the Company's image as it has adequate Anti-Fraud tools.

Penyampaian pelaporan pelanggaran

Perusahaan menyediakan fasilitas penyampaian laporan pelanggaran baik yang masih berupa dugaan maupun telah terbukti terjadi melalui email Jendela (jendela@ wom.co.id). Laporan yang diterima akan diproses sesuai dengan kebijakan dan Peraturan Perusahaan yang berlaku.

Whistleblowing Reporting Submission

The Company provides facilities for submitting reports of violations both in the form of allegations and proven to occur via Jendela email (jendela@ wom.co.id). Reports received will be processed in accordance with applicable Company policies and Regulations.

Perlindungan bagi pelapor

Setiap pelapor akan diberikan jaminan perlindungan dari Perusahaan sebagai berikut:

1. Email Jendela hanya bisa diakses oleh Anggota Direksi dan beberapa fungsi tertentu dengan jabatan yang ditunjuk oleh Anggota Direksi. Keterbatasan

Protection for whistleblowers

Each whistleblower will be guaranteed protection from the Company as follows:

1. The Jendela Email can only be accessed by Members of the Board of Directors and certain functions with positions appointed by Members of the Board of

akses terhadap email ini berfungsi untuk menjaga kerahasiaan informasi/laporan berikut pelapornya.

2. Laporan - laporan yang diterima akan ditangani secara rahasia dan identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya untuk memastikan bahwa tidak terjadi balas dendam atau tindakan balasan terhadap pelapor.

Directors. Limited access to this email serves to maintain the confidentiality of information/reports and the whistleblower.

2. Reports received will be handled confidentially and the identity of the whistleblower will be kept confidential to ensure that there is no retaliation or revenge against the whistleblower.

Penanganan pengaduan dan pihak yang menangani pengaduan

1. Pengaduan yang berasal dari *whistleblower* yang masuk ke email Jendela (jendela@wom.co.id) akan dilakukan analisa oleh fungsi *Operational Risk & Enterprise Risk Management* untuk menentukan pihak yang akan menangani pengaduan tersebut.
2. Laporan pengaduan yang perlu ditindaklanjuti akan ditransfer kasusnya secara resmi atau *Officially Transferred Case* (OTC) melalui email ke Internal Audit atau Legal Counsel & Anti Fraud Division sesuai dengan kategori kasusnya.
3. Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh tim Internal Audit atau Legal Counsel & Anti Fraud Division, meliputi proses investigasi *root cause*, penyusunan kronologis insiden, *action plan*, hingga pemberian sanksi terhadap pelaku sesuai dengan peraturan Perusahaan.

Complaints handling and parties handling the complaints

1. Complaints originating from whistleblowers from Jendela email (jendela@wom.co.id) will be analyzed by the Operational Risk & Enterprise Risk Management function to determine the party who will handle the complaint.
2. Complaints that need to be followed up will be done as Officially Transferred Cases (OTC) via email to Internal Audit or Legal Counsel & Anti-Fraud according to the case category.
3. Complaints will be followed up by the Internal Audit team or Legal Counsel & Anti-Fraud, including the root cause investigation process, chronological preparation of incidents, action plans, to sanction the perpetrators in accordance with Company regulations.

Hasil penanganan pengaduan

Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku 2023 serta tindak lanjut pengaduan sebagai berikut :

Results of complaint handling

The number of complaints submitted and processed in the 2023 financial year and follow-up complaints were as follows:

Status Laporan Whistleblowing Whistleblowing Report Status	**Jumlah pada tahun 2023** Amount in 2023
Laporan diterima	54
Indikasi *Fraud*	42
Tidak terindikasi *Fraud*	12

Kebijakan Anti Korupsi

Anti-Corruption Policy

Perseroan menerapkan praktik dan budaya anti korupsi dan anti penyuapan di lingkungan usaha dan operasional, melalui pengembangan nilai-nilai dasar dan menetapkan berbagai peraturan dan/atau kebijakan yang terkait dengan pencegahan korupsi, seperti Peraturan Perusahaan, Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud,* Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perusahaan.

Pada Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan terdapat ketentuan terkait pencegahan korupsi dan gratifikasi antara lain meliputi:

1. Ketentuan mengenai anti gratifikasi yang termuat pada Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan. Ketentuan anti gratifikasi ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya bagi seluruh jajaran Perseroan dalam melakukan hubungan dengan para nasabah, rekanan dan sesama pekerja. Ketentuan anti gratifikasi tersebut antara lain meliputi:
   a. Larangan seluruh individu Perseroan memberikan hadiah termasuk berupa hiburan yang patut diduga oleh pihak lain sebagai indikasi penyuapan atau gratifikasi.
   b. Larangan seluruh individu Perseroan menerima suatu pemberian atau hadiah yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terkait kegiatan Perseroan, wewenang jabatan yang diembannya atau dalam suatu keadaan dimana kemudian tampak pada pihak lain bahwa pertimbangan bisnis yang dibuat telah dikompromikan.
   c. Tidak memperkenankan seluruh personil Perseroan menawarkan untuk memberikan bingkisan, hiburan, hadiah atau bentuk pemberian lainnya baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain untuk:
      – Mempengaruhi pengambilan keputusan terkait kegiatan usaha Perseroan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
      – Mempengaruhi atau menimbulkan potensi benturan kepentingan.

Anti-bribery and anti-corruption practices and a corporate culture are adopted in the Company's business and operational environment through the establishment of basic values and various anti-corruption policies and regulations, including the Corporate Code of Ethics, Code of Conduct, Anti-Fraud Strategy Implementation Guidelines, and Company Regulations.

The Company's Code of Ethics and Code of Conduct stated the provisions related to corruption and gratification prevention, as follows:

1. Provisions regarding anti-gratification stipulated in the Company's Code of Ethics and Code of Conduct. This anti-gratification provision is intended to provide reasonable, appropriate and trustworthy behavior guidelines for all levels of the Company in dealing with customers, partners and fellow employees. The anti-gratification provisions include among others:
   a. Prohibiting all Company personnel from giving gifts, including in the form of entertainment, which is reasonably suspected by other parties as an indication of bribery or gratification.
   b. Prohibiting all Company personnel from accepting a gift that is known or reasonably suspected that the gift may influence decision- making regarding the Company's activities, the authority of the position they hold or in a situation where it appears to other parties that the business considerations made have been compromised.
   c. Prohibiting all Company personnel to offer gifts, entertainment, or other forms of gifts, either directly or indirectly to other parties to:
      – Influence decision making related to the Company's business activities by violating the provisions of the applicable laws and regulations;
      – Influence or create a potential conflict of interest.

2. Ketentuan mengenai anti korupsi yang termuat pada Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan. Ketentuan anti korupsi tersebut antara lain meliputi:
   a. Larangan seluruh individu Perseroan memanfaatkan jabatannya di Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
   b. Kewajiban seluruh individu Perseroan harus tunduk dan patuh pada aturan hukum, moral dan etika serta seluruh kebijakan dan prosedur Perseroan yang berlaku.
   c. Larangan seluruh individu Perseroan menyalahgunakan nama Perseroan, fasilitas dan hubungan bisnis Perseroan untuk kepentingan pribadi atau untuk hal-hal lain di luar pekerjaan.

Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta seluruh personil Perseroan untuk turut serta dalam mencegah, menghindari praktik korupsi dan gratifikasi dengan:

a. Menegakkan komitmen dari seluruh personil Perseroan untuk patuh pada Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan, ketentuan hukum yang berlaku, serta seluruh kebijakan internal Perseroan dengan menandatangani surat pernyataan komitmen pribadi atas Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku pada saat baru bergabung di Perseroan dan pada setiap tahunnya komitmen pribadi atas Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku tersebut dinyatakan kembali oleh karyawan Perseroan melalui sistem internal Perseroan.
b. Menyelenggarakan *training* anti *fraud, training* penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), serta *training* mengenai nilai-nilai dasar (*core values*) Perusahaan.
c. Menyediakan saluran *whistleblowing system* Perseroan sebagai fasilitas penyampaian laporan pelanggaran, ketidakpatuhan atau penyimpangan di perusahaan.

2. Provisions regarding anti-corruption contained in the Code of Ethics and the Company's Code of Conduct. The anti-corruption provisions include:
   a. Prohibiting all Company personnel from using their positions in the Company for personal, family and/or other parties' interests that may harm or reduce the Company's profits.
   b. The obligations of all Company personnel must be subject to and comply with the rules of law, morals and ethics as well as all applicable Company policies and procedures.
   c. Prohibiting all Company personnel from abusing the Company's name, facilities and business relations of the Company for personal interests or for other matters outside of work.

The Company always strives to increase awareness and participation of all Company personnel to participate in preventing and avoiding corruption and gratification practices by:

a. Upholding the commitment of all Company personnel to comply with the Company's Code of Ethics and Code of Conduct, applicable legal provisions, as well as all of the Company's internal policies by signing a personal commitment letter to the Code of Ethics and Code of Conduct right after joining the Company and in every year, the personal commitment to the Code of Ethics and Code of Conduct is restated by the Company's employees through the Company's internal system.
b. Organizing anti-fraud training, training on the implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing (AML CFT) program, as well as training on the Company's core values.
c. Providing the Company's whistleblowing system channel as a facility for submitting reports of violations, non-compliance or irregularities in the company.

Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy

Pelatihan Inddividual Perseroan selama tahun 2023 terkait dengan nilai-nilai perusahaan, APU PPT dan anti-*fraud* ditinjau dari level jabatan adalah sebagai berikut:

The following is the Company's personnel training in 2023 related to corporate values, AML CFT and anti-fraud in terms of position level:

Uraian Description	**Manajerial** Managerial	**Supervisor** Head	**Staf** Staff
*Management Trainee**	0	161	0
WOM *Managerial Program**	38	53	0
WOM *on Boarding***)	8	409	4.424
Jumlah | **Total**	**46**	**623**	**4.424**

*) Pada pelatihan ini memuat materi pelatihan mengenai nilai-nilai perseroan, APU PPT dan Anti Fraud (3 Parameter harus terpenuhi). | This training contains training materials on corporate values, AML CFT and anti-fraud.(3 Parameters must be comply).

**) Pelatihan yang diberikan khusus pada karyawan baru Perseroan yang mencakup materi pelatihan mengenai nilai-nilai perusahaan, APU PPT dan anti-*fraud* (Pelatihan Khusus Karyawan Baru). | Special training given to new employees of the Company which includes training materials on corporate values, AML CFT and anti-fraud (Special Training for New Employees).

Ketentuan & Kebijakan Vendor Management dan Pengadaan Barang & Jasa

Goods and/or Services Procurement Policy in The Company

Perseroan telah memiliki ketentuan dan kebijakan terkait pengelolaan pemasok serta pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 115/SK/OPP/04-23 perihal Ketentuan Vendor *Management* dan Pengadaan Barang & Jasa.

LATAR BELAKANG

1. Melakukan proses seleksi terhadap calon pemasok rekanan secara adil, transparan, kompetitif, dan bermutu di dalam penyediaan barang/jasa serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menjamin terciptanya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara Perusahaan dengan rekanan guna meningkatkan kemampuan dalam menciptakan nilai tambah.
3. Perlunya standarisasi dalam pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk menunjang kegiatan di Kantor Cabang, Kantor Regional, dan Kantor Pusat.
4. Menetapkan ketentuan, tata kelola, dan kontrol pengajuan pengadaan barang dan jasa dari Kantor Cabang, Kantor Regional dan Kantor Pusat sesuai dengan spesifikasi barang jasa yang dibutuhkan

TUJUAN

1. Melakukan seleksi rekanan yang kompetitif sehingga tercipta persaingan yang sehat diantara para rekanan dan memenuhi syarat serta kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
2. Memperoleh rekanan penyedia barang jasa yang handal dan bermutu untuk kegiatan Perusahaan secara efektif dan efisien.
3. Mempercepat proses dan pengambilan keputusan dalam pengadaan barang jasa
4. Sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas pembelian barang atau pengadaan jasa

The Company has provisions and policies related to vendor management and procurement of goods and services as stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 115/SK/OPP/04-23 regarding the Vendor Management Policy and Procurement of Goods & Services.

BACKGROUND

1. Conducting a selection process for prospective partner vendors in a fair, transparent, competitive, and quality manner in the provision of goods/services and can be accounted for in accordance with applicable regulations.
2. Ensuring the creation of a mutually beneficial cooperative relationship between the Company and partners in order to improve the ability to create added value.
3. Standardization is needed in the procurement of goods and services used to support branch offices, business units (BU), and head office activities.
4. Establish the provisions, governance, and control of procurement submissions for goods and services from Branch Offices, Business Units (BU), and Head Offices in accordance with the required specifications of goods

PURPOSES

1. Conducting competitive partner selection so as to create healthy competition among partners and meet certain requirements as well as criteria based on clear and transparent provisions and procedures by taking into account the principles of Good Corporate Governance.
2. Obtaining partners that provide reliable and quality service goods for the Company's activities effectively and efficiently.
3. Speeding up the process and decision-making in the procurement.
4. As a guideline in carrying out activities to purchase goods or procurement of services

Ketentuan & Kebijakan Vendor Management dan Pengadaan Barang & Jasa

Goods And/Or Services Procurement Policy in The Company

KEBIJAKAN & PROSEDUR

1. Pengelolaan Pemasok
   a. Ketentuan Pengelolaan Pemasok
      - Proses Pengelolaan Pemasok mencakup seluruh proses pengadaan barang/jasa yang berlaku di seluruh jaringan Perseroan.
      - Pemasok sebagai unsur terpenting dalam proses pengadaan barang dan jasa wajib dipastikan merupakan Pemasok yang terpercaya baik dari segi kualitas barang/pelayanan, harga, pelayanan purna jual, atau waktu pengiriman. Untuk memastikan hal tersebut wajib dilakukan proses seleksi dan *monitoring* atas Pemasok yang akan dan/atau telah bekerjasama dengan Perseroan.
      - Pemasok rekanan Perseroan yang ditunjuk, diupayakan merupakan *authorized* distributor/distributor resmi sehingga terjamin atas harga dan garansinya.
      - Penanggung jawab atas proses Pengelolaan Pemasok adalah Procurement Department. Seluruh fungsi kerja bertanggung jawab untuk mendukung proses Pengelolaan Pemasok dengan cara memberikan informasi calon-calon pemasok dan penilaian atas kinerja pemasok yang ada.
      - Aktivitas yang dilakukan dalam Pengelolaan Pemasok adalah sebagai berikut:

POLICIES & PROCEDURES

1. Vendor Management
   a. Vendor Management Terms
      - The vendor management process covers the entire procurement process of goods/services that apply throughout the Company network.
      - Vendors as the most important element in the procurement process of goods and services must be ensured to be trusted vendors both in terms of quality of goods/services, prices, after-sales service, or delivery time. To ensure this, a selection and monitoring process must be carried out for vendors who will and/or have collaborated with the Company.
      - The Company's appointed partner vendors are sought to be authorized distributors hence the prices and warranties are guaranteed.
      - The person in charge of the vendor management process is the Procurement Department. All work functions are responsible for supporting the vendor management process by providing information on prospective vendors and an assessment of the performance of existing vendors.
      - The activities carried out in vendor management are as follows:

Vendor Relation	*Vendor Selection*
a. Pencarian Pemasok (*vendor sourcing*) b. Proses kerja sama dengan pemasok, pembuatan katalog pemasok, administrasi PKS pemasok c. Kualifikasi dan evaluasi kinerja pemasok d. Membina kerja sama dengan pemasok rekanan e. Pemutusan kontrak kerja sama, pendataan *blacklisted* pemasok (*phasing out vendor*)	*a.* *Aanwijzing* dan analisa pemenang tender b. Proses tender (penerimaan penawaran harga, penentuan jadwal tender, undangan tender, dsb) c. Seleksi pemasok: negosiasi harga, ketentuan pengiriman, pengaturan jangka waktu pembayaran, dsb d. Pengajuan persetujuan perenang tender dalam rangka mendapatkan pemasok rekanan *e.* *Quality Assurance* atas kinerja pemasok: *visit* vendor, PO *monitoring, quality checker* barang, ketepatan pengiriman, *service delivery pemasok*, dsb.
a. Vendor sourcing b. Cooperation process with vendors, creation of vendor catalogues, administration of vendor work agreement c. Vendor qualification & evaluation d. Fostering cooperation with partner vendors (maintain listed vendors) e. Termination of cooperation contract, blacklisted vendor data collection (phasing out vendor)	a. Aanwijzing and analysis of tender winners b. Tender process (receipt of price quotes, determination of tender schedules, tender invitations, etc.) c. Vendor selection: price negotiations, delivery terms, payment term settings, etc. d. Application for approval of tender swimmers in order to obtain partner vendors e. Quality Assurance on vendor performance: vendor visits, PO monitoring, quality checker goods, delivery accuracy, service delivery vendor, etc.

- Penilaian setiap calon pemasok rekanan wajib dinilai berdasarkan kriteria (Kriteria pemasok).
- Calon pemasok rekanan yang lulus seleksi adalah calon pemasok rekanan yang memenuhi seluruh kriteria pemasok yang telah ditentukan.
- Apabila dalam pelaksanaannya terdapat calon pemasok rekanan yang tidak dapat memenuhi seluruh kriteria pemasok wajib, tetapi dianggap layak dimasukkan dalam daftar rekanan maka dikategorikan sebagai penyimpangan. Penyimpangan tersebut harus mendapat analisa dan persetujuan dari Finance & Accounting Division Head.
- Daftar pemasok rekanan dituangkan dalam bentuk Katalog pemasok tahunan dan wajib diinformasikan kepada seluruh *user function* pengaju.

- The assessment of each prospective partner vendor must be assessed based on criteria (Vendor Criteria).
- Prospective partner vendors who pass the selection are prospective partner vendors who meet all predetermined vendor criteria.
- If in its implementation there are prospective partner vendors who cannot meet all the mandatory vendor criteria, however are considered worthy of inclusion in the list of partners, they are categorized as deviations. Such irregularities must be analysed and approved by Finance & Accounting Division Head.
- The list of partner vendors is set forth in the form of an annual Vendor Catalogue and must be informed to all proposed user functions.

b. Kriteria pemasok
Secara umum, pemasok yang dapat bekerja sama dengan Perseroan memenuhi persyaratan dengan kriteria sebagai berikut:

b. Vendor Criteria
In general, vendors who can cooperate with the Company meet the requirements with the following criteria:

Kriteria Criteria	**Ketentuan**	Conditions
Bentuk Usaha Form of Business	Pemasok yang dapat bekerja sama dengan Perseroan dapat berupa: a. Badan Hukum: • Perseroan Terbatas (PT) • Koperasi b. Badan Usaha: • Perusahaan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV) • Persekutuan Perdata *(Maatschap)* • Firma c. Perorangan: • Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD) • Perorangan	Vendors that can work with the Company can be: a. Legal Entities: • Limited Liability Company (PT) • Cooperation b. Enterprises: • Communitarian Company or Commanditaire Vennootschap (CV) • Civil Partnership (Maatschap) • Firm c. Individual: • Trading Business (UD) or Trading Company (PD) • Individua

Ketentuan & Kebijakan Vendor Management dan Pengadaan Barang & Jasa

Goods And/Or Services Procurement Policy in The Company

Kriteria Criteria	**Ketentuan**	Conditions
Sumber pemasok Vendor Sourcing	Sumber pemasok yang akan bekerja sama dengan Perseroan dapat berasal dari: a. Pemasok yang pernah bekerja sama dengan Perseroan. b. Hasil pencarian dari Procurement Department. c. Referensi dari karyawan Perseroan atau manajemen.	Sources of vendors who will work with the Company can come from: a. Vendors who have collaborated with the Company. b. Search results from the Procurement Department. c. References from the Company employees or management.
Garansi Warranty	Pemasok bertanggung jawab memberikan layanan garansi atas setiap pengadaan barang/jasa yang dilakukan.	Vendors are responsible for providing warranty services for every procurement of goods/ services.
Pengalaman Experience	a. Pemasok memiliki pengalaman dalam bidang usaha tersebut minimum 3 (tiga) tahun atau; b. Untuk perusahaan yang belum memiliki pengalaman selama 3 (tiga) tahun tetapi telah menangani perusahaan besar minimum 3 (tiga) perusahaan. Contoh: Perusahaan pembiayaan lain dan perbankan c. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan/*project,* minimal sama besarnya dengan yang akan dikerjakan untuk Perseroan.	a. Vendor has experience in the business field at least 3 (three) years or; b. For companies that have not had experience for 3 (three) years but have handled a large company (finance company) at least 3 (three) companies. Examples: Other finance companies and banks c. Have experience in doing work/projects, at least the same as what will be done for the Company.
Sumber Daya Manusia Human Resources	a. Memiliki tenaga ahli yang memadai dan mendukung pelaksanaan penyediaan barang dan/atau jasa tersebut dengan pengalaman dalam bidang tersebut minimum 3 (tiga) tahun. b. Jika dibutuhkan untuk *projec*t tertentu, dan/atau dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, pemasok wajib memiliki *certified engineer* (tenaga ahli bersertifikasi) yang dapat diandalkan.	a. Have adequate experts and support the implementation of the provision of goods and/or services with experience in the field for a minimum of 3 (three) years. b. If needed for a particular project, and/ or required by law, vendors must have a reliable certified engineer.
After Sales Service	Pemasok dapat memberikan *after sales service* dalam menindaklanjuti komplain/ keluhan pada hari yang sama atau maksimal 3 (tiga) hari setelahnya.	Vendors can provide after sales service in following up complaints/claims on the same day or a maximum of 3 (three) days after.
Lokasi atau Jaringan Kerja Location or Network	Lokasi usaha pemasok berada di tempat yang strategis dan/atau memiliki akses yang baik dan/atau mempunyai jaringan/cabang untuk barang-barang yang dipergunakan di jaringan-jaringan Perseroan di seluruh Indonesia.	The vendor's business location is in a strategic place and/or has good access and/ or has a network/branch for goods used in the Company networks throughout Indonesia.

Ketentuan & Kebijakan Vendor Management dan Pengadaan Barang & Jasa

Goods And/Or Services Procurement Policy in The Company

Kriteria Criteria	**Ketentuan**	Conditions
Term of Payment	a. Pemasok memberikan jangka waktu pembayaran pengadaan barang/jasa minimal 14 (empat belas) hari kerja setelah Perseroan menerima dokumen permintaan pembayaran dengan benar dan lengkap. b. Untuk pengadaan barang dan/atau jasa tertentu dapat dilakukan pembayaran dengan metode pembayaran bertahap (termin) sesuai *best practice* yang berlaku.	a. Suppliers provide a payment term for the procurement of goods/services of at least 14 (fourteen) working days after the Company receives the payment request document correctly and completely. b. For the procurement of certain goods and/or services, payments can be made using the payment method in stages (terms) as per the applicable best practice.
Saran Usaha & Pendukung Business & Support Advice	Memiliki sarana usaha dan pendukung yang lengkap & produktif yang dibutuhkan oleh Perusahaan dengan ketentuan sarana dan prasarana yang digunakan pemasok tersebut merupakan milik pemasok sendiri atau hanya sebagian yang disewa.	Have complete & productive business and supporting facilities needed by the Company provided that the facilities and infrastructure used by the vendor are the vendor's own property or only part of it is rented.
Risiko Kasus Litigasi Case Litigation Risk	Pemasok tidak memiliki potensi kasus litigasi (tidak memiliki riwayat terkena kasus hukum yang terekspos ke media massa/media sosial maupun yang diketahui dari pihak-pihak lain).	Vendors do not have the potential for litigation cases (have no history of being exposed to legal cases that are exposed to mass media/social media or known from other parties).

a. Evaluasi dan Pembinaan Rekanan
   - Semua pemasok rekanan yang sudah masuk ke dalam daftar rekanan Perseroan wajib dievaluasi 1 (satu) kali setahun berdasarkan tanggal seleksi rekanan sebelumnya yang bertujuan untuk mengetahui kondisi terkini, kesiapan rekanan, dan menilai kinerja dari rekanan.
   - Proses evaluasi dilakukan kepada daftar rekanan berdasarkan pada:
     a. Historikal hubungan dengan rekanan (diundang tidak datang, wanprestasi, dll),
     b. Hasil akhir dari tender (sering kalah tender),
     c. Aktif memberikan informasi dalam proses pengadaan barang/jasa,
     d. Ketepatan penyerahan barang/jasa dari segi mutu, waktu, dan harga, serta
     e. Jumlah komplain dari unit kerja.

a. Evaluation and Coaching of Partners
   - All partner vendors that have been included in the Company partner list must be evaluated 1 (one) time a year based on the previous partner selection date which aims to find out the latest conditions, partner readiness, and performance assessment of partners.
   - The evaluation process is carried out to the list of partners based on:
     a. Historical relationship with partners (invited but absent, non-performing, etc),
     b. The final result of the tender (often loses the tender),
     c. Actively provide information in the procurement process of goods/services,
     d. Accuracy of delivery of goods/services in terms of quality, time, and price, as well as
     e. The number of complaints from the work unit.

Ketentuan & Kebijakan Vendor Management dan Pengadaan Barang & Jasa

Goods And/Or Services Procurement Policy in The Company

- Untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa telah menggunakan rekanan yang telah terdaftar, maka unit kerja terkait sesuai fungsi dan wewenangnya, bertugas membantu agar ketentuan ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

2. Pembelian Barang atau Pengadaan Jasa
   a. Ketentuan Pembelian Barang atau Pengadaan Jasa
      - Dalam rangka melakukan kerja sama dengan pemasok, Procurement Department berkoordinasi dengan Premises & GA Department bersama *function* terkait perihal daftar kebutuhan dan standardisasi/ spesifikasi kebutuhan barang/jasa yang ada di Perseroan.
      - Premises & GA Department dibantu dengan unit kerja terkait bertanggung jawab dalam hal penentuan standar/spesifikasi barang jasa dan daftar kebutuhannya untuk seluruh Jaringan kantor Perseroan.
      - Seluruh penyediaan atau pengadaan suatu barang dan jasa wajib telah melalui persetujuan pejabat berwenang sesuai dengan limit wewenang pengeluaran biaya yang berlaku dan merupakan tanggung jawab dari Premises & GA Department.

   b. *Purchase Order* (PO) atau Surat Perintah Kerja (SPK)
      - Pada setiap pembelian barang/pengadaan jasa wajib terdapat surat perintah atas pembelian barang/pengadaan jasa, surat perintah tersebut berupa :
        - Barang, menggunakan *Purchase Order*.
        - Jasa, menggunakan Perjanjian Kerja sama atau Surat Perintah Kerja.
      - Surat pemesanan barang/jasa (PO/SPK) yang sah mewakili Perseroan apabila dikeluarkan oleh fungsi Premises & GA Department sesuai dengan jenis kebutuhannya dan standar *form* yang berlaku untuk setiap pengadaan barang/ jasa yang dilakukan untuk Kantor Pusat.

- To ensure that the procurement of goods and services has used registered partners, the relevant work unit according to its functions and authorities, is tasked with assisting, hence this provision can be properly implemented.

2. Purchase of Goods or Procurement of Services
   a. Terms of Purchase of Goods or Procurement of Services
      - In order to collaborate with Vendors, the Procurement Department coordinates with the Premises & GA Department with related functions regarding the list of needs and standardization/specifications of the needs of goods/services in the Company.

      - Premises & GA Department assisted by the relevant work units is responsible for determining the standards/ specifications of goods and the list of needs for the entire the Company office network.
      - All provision or procurement of goods and services must have been approved by an authorized official in accordance with the applicable fee expenditure authority limit and is the responsibility of the Premises & GA Department.

   b. Purchase Order (PO) or Work Order (SPK)

      - In every purchase of goods/ procurement of services there must be a warrant for the purchase of goods/ procurement of services, the warrant is in the form of:
        - Goods, using a Purchase Order.
        - Services, using a Cooperation Agreement or Work Order.
      - A valid goods/services order letter (PO/ SPK) representing the Company if issued by the Premises & GA Department function in accordance with the type of needs and the standard form that applies to every procurement of goods/services made to the Head Office.

- Pengeluaran PO/SPK hanya merupakan kewenangan dari Premises & GA Department. Pengeluaran PO/SPK dilakukan oleh Premises & GA Department jika Internal Memo pengajuan dari *function* telah disetujui sesuai dengan pejabat limit dan telah dilakukannya negosiasi harga oleh Procurement Department yang dibuktikan dengan berita acara negosiasi.
- Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pemasok rekanan yang dilakukan oleh Procurement Department, maka atas aktivitas pengeluaran PO/SPK atau adanya realisasi tagihan yang dilakukan oleh pemasok, Premises & GA Department harus menginformasikan aktivitas tersebut kepada Procurement Department.
- Standarisasi *Purchase Order* (PO) atau Surat Perintah Kerja (SPK)

c. Pembayaran atas Pembelian Barang atau Pengadaan Jasa
   - Untuk kebutuhan pembayaran, pemasok tersebut wajib didaftarkan di sistem WISe. Pengajuan pendaftaran pemasok di sistem WISe melalui *Change Request* (CR) ditunjuk kepada IT Product Maintenance Department diatur ketentuan sebagai berikut:

     a. Procurement Department untuk pemasok-pemasok yang *diregister* (disahkan) oleh *Procurement Department* dan pembayarannya dilakukan oleh Finance Kantor Pusat.
     b. User Function terkait untuk pemasok-pemasok yang diluar poin (a) diatas dan pemasok yang belum terdaftar di sistem.

- PO/SPK issuances are only the authority of the Premises & GA Department. PO/SPK issuance is carried out by Premises & GA Department if the Internal Memo submission and function has been approved in accordance with the limit officials and price negotiations have been carried out by the Procurement Department as evidenced by the negotiation.
- In order to evaluate the partner vendors carried out by the Procurement Department, on PO/SPK issuance or the realization of receivables made by vendors, the Premises & GA Department must inform the Procurement Department of these activities.
- Standardization of Purchase Order (PO) or Work Order (SPK)

c. Payment for Purchase of Goods or Procurement of Services
   - For payment needs, the vendor must be registered in the WISe system. The application for vendor registration in the WISe system through a Change Request (CR) is designated to the IT Product Maintenance Department and is governed by the following stipulations:
     a. Procurement Department for vendors registered (authorized) by the Procurement Department and payment made by Finance Head Office.
     b. The related User Function for vendors that are beyond point (a) above and vendors that have not been registered in the system.

Ketentuan & Kebijakan Vendor Management dan Pengadaan Barang & Jasa

Goods And/Or Services Procurement Policy in The Company

c. Fungsi terkait dapat mengajukan *change request* (CR) untuk pendaftaran vendor ke IT Product Maintenance Department. Pengajuan *Change Request* (CR) wajib disetujui oleh Department Head Fungsi. Apabila pengajuan dari user/fungsi di Cabang/BU maka pengajuan CR diajukan melalui fungsi terkait di Kantor Pusat.

- Pencatatan Pembelian Barang atau Pengadaan Jasa
  Pencatatan wajib dilakukan untuk setiap pembelian barang atau pengadaan jasa (baik renovasi atau non renovasi) yang memberikan peningkatan nilai aset. Khusus untuk aset tetap (aktiva tetap), pencatatan dilakukan oleh Accounting dan Premises & GA Department sebagai bentuk *dual control* atas *monitoring* aset tetap. Ketentuan mengenal aset selanjutnya mengacu pada Kebijakan perihal Pengelolaan Aset yang berlaku.

c. Related functions can submit a change request (CR) for vendor registration to the IT Product Maintenance Department. The submission of a Change Request (CR) must be approved by the Function Department Head. If the submission is from a user/function at a Branch/Business Unit, then the CR must be submitted through the related function at the Head Office.

- Recording of Purchase of Goods or Procurement of Services
  Recording must be done for every purchase of goods or procurement of services (renovation or non-renovation) that provides an increase in the value of assets. Particularly for fixed assets, recording is carried out by the Accounting and Premises & GA Department as a form of dual control over the monitoring of fixed assets. The provisions for recognizing assets further refer to the applicable Policy regarding Asset Management.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

LAPORAN KEBERLANJUTAN

SUSTAINABILITY REPORT





Keberlanjutan merupakan strategi kami untuk melestarikan bumi, manusia dan ekonomi.

Sustainability is our strategy to preserve the planet, people, and the economy.

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan

Sustainability Performance Highlights



KINERJA EKONOMI [B.1]

ECONOMIC PERFORMANCE [B.1]

Portofolio Pembiayaan
Financing Portfolio
(Rp Juta | Rp Million)

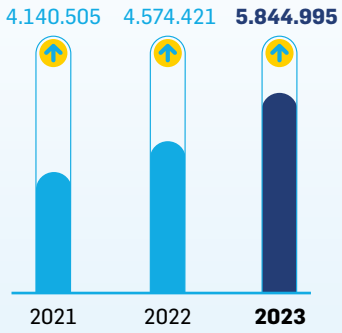

Total Pendapatan
Total Revenues
(Rp Juta | Rp Million)

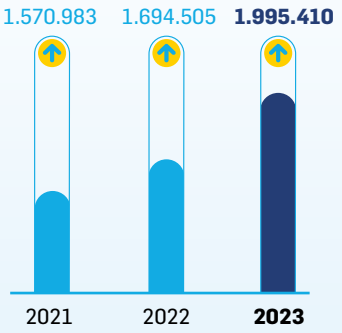

Laba Tahun Berjalan
Income for The Year
(Rp Juta | Rp Million)

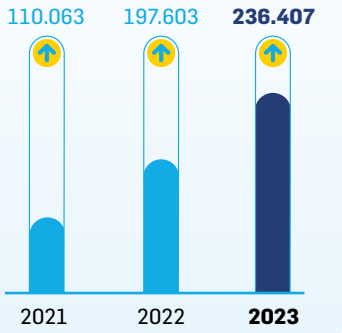

Total Perolehan Nilai Ekonomi | Total Economic Value Acquisition
(Rp Juta | Rp Million)

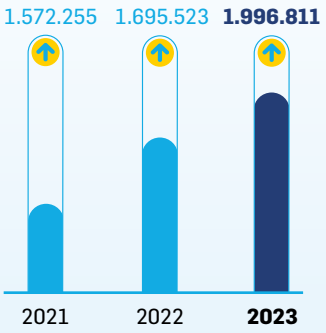

Total Nilai Ekonomi Didistribusikan | Total Economic Value Distributed
(Rp Juta | Rp Million)

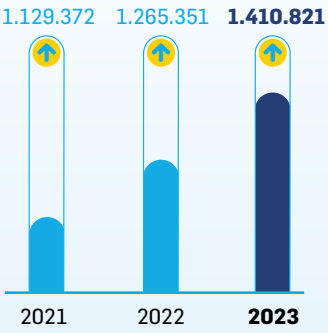

Pajak kepada Negara
Taxes to the State
(Rp Juta | Rp Million)

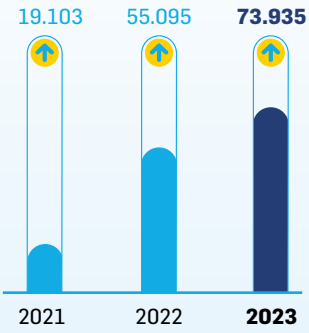

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan
Sustainability Performance Highlights

KINERJA LINGKUNGAN [B. 2]

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE [B. 2]

Konsumsi Bahan Bakar
Fuel Consumption
(Gigajoules)

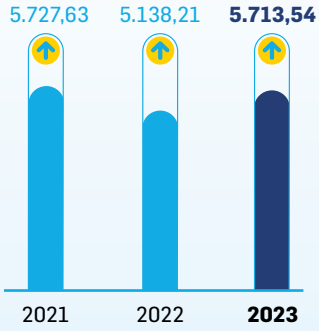

Pemakaian Listrik
Electricity Usage
(Gigajoules)

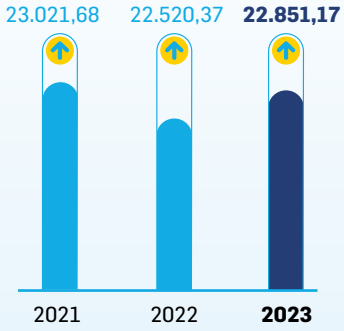

Cakupan 1 – Emisi
Scope 1 - Emission
(Ton CO2 eq)

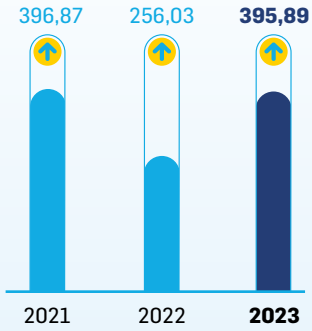

Cakupan 2 – Emisi
Scope 2 - Emission
(Ton CO2 eq)

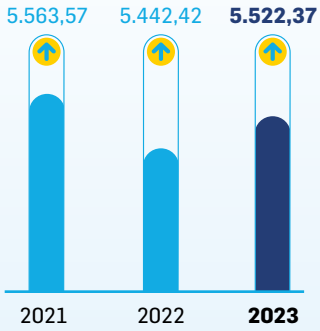

Cakupan 3 – Emisi
Scope 3 - Emission
(Ton CO2 eq)

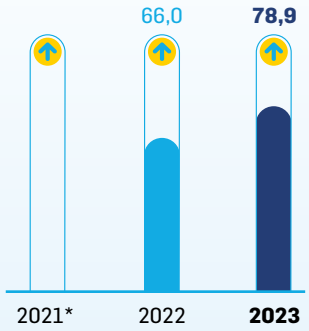

*) Belum dilakukan perhitungan untuk data tahun 2021.
Calculations have not yet been carried out for 2021 data.

Pemakaian Air (PDAM)
Water Consumption (PDAM)
(M^3)

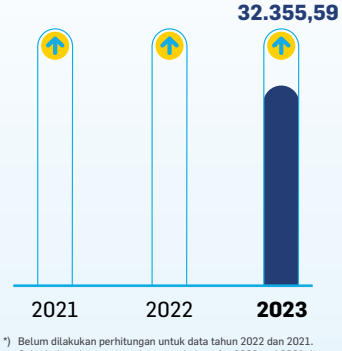

*) Belum dilakukan perhitungan untuk data tahun 2022 dan 2021.
Calculations have not yet been carried out for 2022 and 2021 data.

Penggunaan kertas
Paper Consumption
(Rim | Ream)

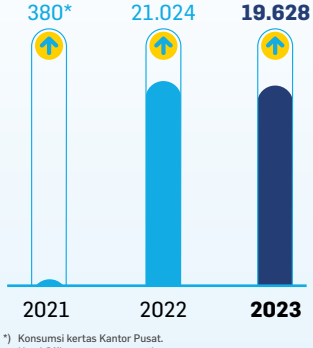

*) Konsumsi kertas Kantor Pusat.
Head Office paper consumption.

KINERJA SOSIAL [OJK B.3]

SOCIAL PERFORMANCE [OJK B.3]

Komposisi Karyawan menurut Jenis Kelamin | Employee Composition by Gender

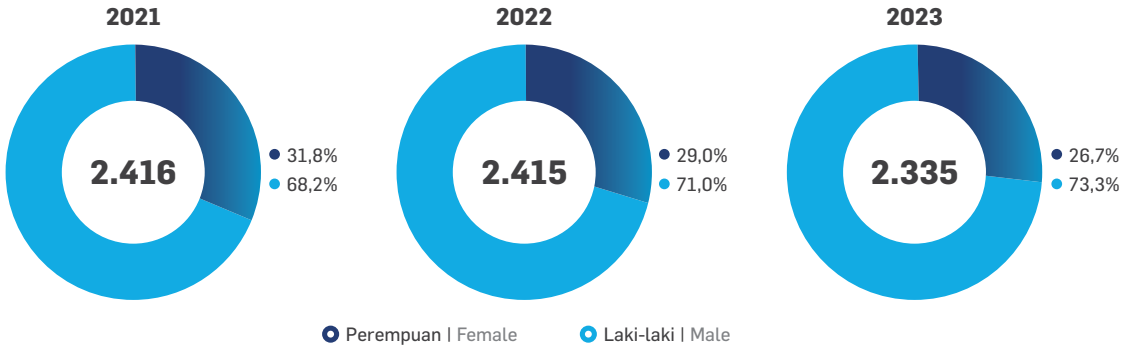

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi menurut Jenis Kelamin
Composition of the Board of Commissioners and Directors by Gender

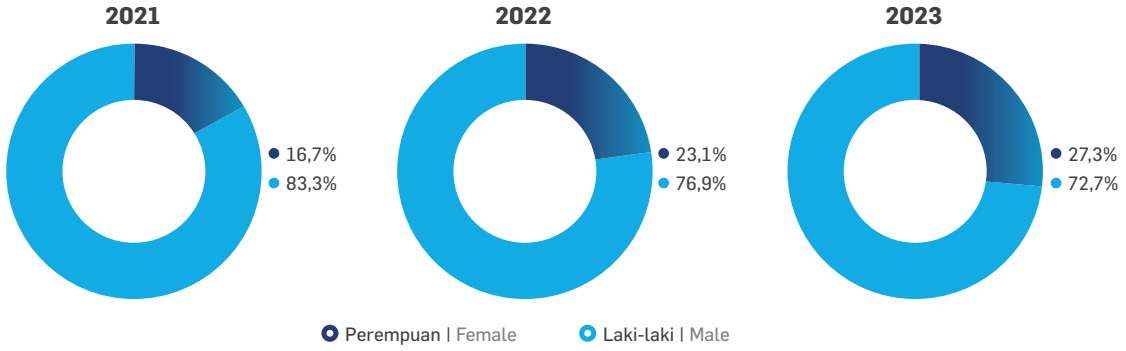

Realisasi Dana TJSL
TJSL Budget Realization

Rp Juta | Rp Million

Uraian | Description	2023	2022	2021
Kesehatan | Health	87,3	1.373,0	546,3
Sosial & Lingkungan | Social & Environmental	1.844,4	1.430,3	2.436,9
Pendidikan | Education	245,69	32,6	137,2
Pemberdayaan Masyarakat | Community Empowerment	0,0	74,3	43,6

Pelatihan Karyawan
Employee Training

Uraian | Description	Satuan | Unit	2023	2022	2021
Total Peserta Pelatihan | Number of Training Participants	Peserta | Participant	75.549	22.671	32.845
Rata - Rata Jam Pelatihan Per Karyawan Average Training Hours Per Employee	Jam/Karyawan | Hours/ Employee	7,90	5,16	3,21

Strategi & Dukungan Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Strategy & Support for Sustainable Development Goals



Perseroan merealisasikan berbagai rencana strategis keberlanjutan yang tertuang dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sesuai kompetensi dan bidang usaha yang dijalankan bekerjasama erat dengan pihak eksternal guna memastikan tercapainya berbagai tujuan keberlanjutan.

The Company realized various sustainability strategic plans outlined in the Sustainable Finance Action Plan in line with its competencies and business areas, working closely with external parties to ensure the achievement of various sustainability goals.

PENDEKATAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SKALA GLOBAL

Pada sidang *Cooperation of Parties* (COP) 21 di Paris, hampir seluruh negara di dunia menyepakati rumusan tujuan keberlanjutan, *Sustainable Development Goals* (SDGs) menggantikan rumusan Milenial *Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. Rumusan pembangunan keberlanjutan SDGs dimaksud disebut juga *Global Goals*, meliputi lima aspek dasar dalam prinsip keberlanjutan, 5-P, *People, Planet, Partnership, Peace* dan *Prosperity*, yang kemudian dijabarkan ke dalam 17 SDGs.

PBB kemudian menugaskan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), badan dunia yang dibentuk pada 1992 untuk mengkoordinasikan penanganan kerangka kerja sama antar negara dalam mengendalikan dan mengurangi dampak perubahan iklim skala global, termasuk SDGs tersebut. UNFCC kemudian menyelenggarakan rapat tahunan memantau kemajuan pelaksanaan program-program SDGs, atau Paris *Agreement* tersebut. Tahun 2023 sidang COP ke-28 kembali diselenggarakan di Dubai, UEA, dengan menghasilkan kesepakatan percepatan pengembangan sumber energi terbarukan dan menetapkan tahun 2050 sebagai target pencapaian Global *Net Zero Emission*.

GLOBAL SCALE SUSTAINABLE DEVELOPMENT APPROACH

At the Cooperation of Parties (COP) 21 session in Paris, almost all countries in the world agreed on the formulation of sustainability goals, Sustainable Development Goals (SDGs) replacing the formulation of Millennial Development Goals (MDGs) which ended in 2015. The formulation of SDGs sustainability development is also called Global Goals, covering five basic aspects in the principles of sustainability, 5-P, People, Planet, Partnership, Peace and Prosperity, which are then translated into 17 SDGs.

The UN then commissioned the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), a world body established in 1992 to coordinate the handling of cooperation frameworks between countries in controlling and reducing the impact of climate change on a global scale, including the SDGs. The UNFCC then holds an annual meeting to monitor the progress of the implementation of the SDGs programs, or the Paris Agreement. In 2023, the 28th COP session will be held again in Dubai, UAE, by producing an agreement to accelerate the development of renewable energy sources and set 2050 as the target of achieving Global Net Zero Emissions.



Strategi & Dukungan Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Strategy & Support for Sustainable Development Goals

STRATEGI DAN NILAI KEBERLANJUTAN [OJK A.1, C.1] [GRI 2-22, 2-23]

Strategi Keberlanjutan Perseroan tertuang di dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang menjadi pedoman implementasi Keuangan Berkelanjutan dan Kinerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST). Adapun terdapat 4 (empat) prioritas RAKB yang menjadi fokus Perseroan yaitu pengembangan produk/jasa berkelanjutan, pengembangan kapasitas internal, penyesuaian organisasi, manajemen risiko tata kelola dan SOP, serta kegiatan lainnya yang mendukung implementasi Keuangan Berkelanjutan (KB).

SUSTAINABILITY STRATEGY AND VALUES [OJK A.1, C.1] [GRI 2-22, 2-23]

The Company's Sustainability Strategy are stated in the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) which guides the implementation of Sustainable Finance and Environmental, Social and Governance (ESG). There are 4 (four) RAKB priorities that are the focus of the Company, namely sustainable product/service development, internal capacity building, organizational adjustment, risk management, governance and SOP, as well as other activities that support sustainable finance implementation.

Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Pada tahun pelaporan, Perseroan berhasil merealisasikan 4 (empat) program utama, yakni:

- Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan
- Pengembangan Kapasitas Internal
- Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola dan/atau Standar Prosedur Operasional
- Kegiatan lainnya yang mendukung keuangan berkelanjutan

Achievement of Sustainable Finance Action Plan

In the reporting year, the Company succeeded in realizing 4 (four) main programs, as follows:

- Development of Sustainable Financial Products and/or Services
- Internal Capacity Building
- Organizational Adjustment, Risk Management, Governance and/or Standard Operating Procedures
- Other activities that support sustainable finance

Pencapaian RAKB Tahun 2023
RAKB Achievements in 2023



Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan
Development of Sustainable Financial Products and/or Services

Pembiayaan motor listrik sebesar **Rp225.823.120** atau **0,0039%** dari total pembiayaan (Desember 2023).
Electric motorcycle financing amounted Rp225,823,120 or 0.0039% of the total financing (December 2023).

Pengembangan Kapasitas Internal
Internal Capacity Building

Pelatihan **"Edukasi Keberlanjutan"** dihadiri oleh peserta manajerial hingga staff di Kantor Pusat.
The "Sustainability Education" training was attended by managerial participants to staff at the Head Office.

Kegiatan lainnya yang mendukung keuangan berkelanjutan
Other activities that support sustainable finance

Kegiatan literasi dan inklusi keuangan serta **kampanye *sustainable lifestyle*** bagi karyawan.
Financial literacy and inclusion activities as well as **sustainable lifestyle campaigns** for employees.

Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan/atau Standar Prosedur Operasional
Organizational Adjustment, Risk Management, Governance, and/or Standard Operating Procedures

Penyesuaian organisasi dengan pembentukkan ***Departemen Corporate Social & ESG.***
Adjustment of the organization with the formation of **Corporate Social & ESG Department.**

Dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Guna memastikan tercapainya berbagai tujuan keberlanjutan, Perseroan menjalankan beberapa inisiatif strategis yang dijalankan secara simultan, sebagai berikut:

Support for the Sustainable Development Goals

To ensure the achievement of various sustainability goals, the Company carries out several strategic initiatives simultaneously, as follows:

TPB SDGs	Capaian 2023 2023 Achievements	Strategi Strategies
	Jumlah jam pelatihan karyawan mencapai 591.979 jam dengan rata-rata 7,9 jam per karyawan. Total of employee training hours reached 591,979 hours with an average of 7.9 hours per employee.	• Pengembangan kapasitas karyawan melalui kegiatan pelatihan, sertifikasi dan lokakarya. • Pengembangan sistem pelatihan berbasis digital melalui *platform Learning Management System* (LMS). • Developing employee capacity through activities training, certification and workshops. • Development of a digital based training system through Learning Management System (LMS) platform.
	Pendapatan mencapai Rp2,00 triliun dengan laba Rp236,41 miliar. Revenue reached Rp2.00 trillion with a profit of Rp236.41 billion.	Peningkatan kualitas layanan pembiayaan dan standar operasional Improving the quality of financing services and operational standards.
	Penjajakan produk pembiayaan motor listrik. Exploration of electric motorcycle financing products.	Peningkatan pembiayaan motor listrik. Increased financing for electric motorcycle.
	Terlaksananya pelatihan kepatuhan dan *anti fraud* bagi karyawan. Implementation of compliance training and anti-fraud for employees.	Penerapan tata kelola yang baik di seluruh lini bisnis. Implementation of good governance in all business lines.

MEMBANGUN BUDAYA KEBERLANJUTAN [GRI 2-24]

Dalam rangka membangun budaya keberlanjutan, pada tahun 2023 Perseroan menjalankan berbagai program pelatihan dan peningkatan kompetensi jajaran SDM pada aspek keberlanjutan sebagai berikut : [OJK F.1, E.2]

BUILDING A CULTURE OF SUSTAINABILITY [GRI 2-24]

During the year, in building a sustainability culture, the Company undertook various training programs and competency improvement of HR personnel on sustainability aspects as follows: [OJK F.1, E.2]

Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan
Sustainable Finance Competency Development

No	Pelatihan Training	Jumlah Peserta Participants	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
1	*IFC and IDX ESG Collaboration Launch Event and ESG Leadership Training*	2	IDX	16 Maret 2023 March 16, 2023
2	*Webinar "Green, Social and Sustainability Bonds Launch"*	2	IDX	24-25 Mei 2023 May 24-25, 2023
3	*Webinar "Accelerating Sustainable Development : Experiences from the Frontlines in Promoting Sustainable Bond/Sukuk Issuances and Investment"*	2	IDX	22 Juni 2023 June 22, 2023
4	*Webinar "Carbon Trading Opportunities in Decarbonization Efforts"*	2	OJK	27 Juli 2023 July 27, 2023

Strategi & Dukungan Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Strategy & Support for Sustainable Development Goals

No	Pelatihan Training	Jumlah Peserta Participants	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
5	*Sustainability & Inclusivity Conference 2023*	1	Warta Ekonomi	29 Agustus 2023 August 29, 2023
6	*The Future Directions of ESG and Sustainability Reporting in Indonesia*	1	PwC	5 September 2023 September 5, 2023
7	Pelatihan "Edukasi Keberlanjutan" Batch 1 "Sustainability Education" Batch 1	25	Kantor Pusat Head Office	14-15 September 2023 September 14-15, 2023
8	*Workshop " Finance Emission Data and Calculation"*	4	Bank Maybank Indonesia	4 Oktober 2023 October 4, 2023
9	*Sosialisasi Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon)* Socialization of Carbon Trading through the Indonesian Carbon Exchange (IDXCarbon)	2	*OJK*	5 Oktober 2023 October 5, 2023
10	*Managing Environmental, Social and Governance Risk and Opportunities*	2	OJK	19 Oktober 2022 October 19, 2022
11	*FGD APPI "Laporan Keuangan Berkelanjutan & Permasalahannya di Perusahaan Pembiayaan"* FGD APPI "Sustainable Financial Statements & Issues in Finance Companies"	2	APPI	24 November 2023 November 24, 2023
12	*Focus Group Discussion* (FGD) OJK "Konsultasi Publik Taksonomi Berkelanjutan Indonesia"	2	APPI	28 November 2023 November 28, 2023
13	Webinar OJK Institute "Enhancing ESG Through Best Practices in Accouting"	2	OJK	7 Desember 2023 December 7, 2023

Tentang Laporan Keberlanjutan

About Sustainability Report



Laporan Keberlanjutan Perseroan menguraikan kinerja dan upaya Perseroan dalam rangka mendukung masa depan yang berkelanjutan serta memenuhi harapan para pemangku kepentingan.

The Company's Sustainability Report outlines the Company's performance and efforts in order to support a sustainable future and meet the expectations of stakeholders.

Laporan Keberlanjutan Perseroan ini diterbitkan sebagai bagian dari Laporan Tahunan Perseroan. Laporan tahun 2023 ini merupakan pelaporan Kinerja Lingkungan Sosial, dan Tata Kelola (LST) Perseroan untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember 2023 setelah terakhir kali diterbitkan pada tanggal 4 Maret tahun 2023. Laporan Keberlanjutan Tahun 2023 disusun berdasarkan pedoman: [GRI 2-3]

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 16/POJK.04/2021 bagian Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan Bagi Emiten Dan Perusahaan Publik; dan

The Sustainability Report of the Company is published as part of the Company's Annual Report. This 2023 report is a report on the Company's Environmental, Social and Governance (ESG) Performance for the period of January 1 to December 31, 2023 after it was last published on March 4, 2023. The 2023 Sustainability Report is prepared based on the guidelines of: [GRI 2-3]

- Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 concerning the Application of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies;
- Financial Services Authority (SEOJK) Circular No. 16/POJK.04/2021 section of Technical Guidelines for Preparing Sustainability Reports for Issuers and Public Companies; and

Tentang Laporan Keberlanjutan

About Sustainability Report

- Standar Global Reporting Initiative (GRI) 2021, dengan ketentuan *with reference to*.

Hingga akhir periode pelaporan, Perseroan tidak memiliki entitas anak usaha. Adapun cakupan laporan ini adalah informasi dan kinerja LST Perseroan yang berasal dari manajemen di kantor pusat dan cabang di seluruh area operasional Perseroan. Adapun Informasi keuangan bersumber dari Laporan Keuangan *Audited* yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. [GRI 2-2]

Perseroan memberi tanda "disajikan kembali" pada seluruh bagian data yang mengalami penyesuaian berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkini yang diberlakukan. Sekalipun masih belum menerapkan penjaminan dari pihak ketiga yang independen (*external assurance*), Perseroan menjamin bahwa seluruh data dan informasi yang diungkapkan dalam Laporan ini telah melalui proses verifikasi internal, sehingga dapat diandalkan untuk proses evaluasi dan pengambilan keputusan. [GRI 2-4, 2-5]

Para pemangku kepentingan yang berminat membaca Laporan dan memberikan masukannya, dapat mengakses dan mengunduhnya melalui situs resmi Perseroan www.wom.co.id.

DAFTAR TOPIK MATERIAL DAN BATASAN LAPORAN [GRI 3-1, 3-2]

Selama periode pelaporan, terdapat penyesuaian pada topik material Perseroan. Penentuan topik material dilakukan dengan mengacu pada hasil analisis dan reviu internal terkait dengan topik material bagi lembaga jasa keuangan khususnya pembiayaan. Selain itu, Perseroan juga merujuk kepada SASB *Materiality Finder* bagian *Consumer Finance*. Sesuai hasil analisis tersebut, terdapat 8 (delapan) Topik Material yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan, sebagai berikut:

- With reference to Global Reporting Initiative (GRI) 2021 Standard.

As of the end of the reporting period, the Company did not have any subsidiaries. The scope of this report is the Company's information and performance of ESG which comes from management at the head office and branches in all operational areas of the Company. Financial information is sourced from Audited Financial Statements audited by Public Accounting Firms. [GRI 2-2]

The Company marks "restated" on all parts of the data that have been adjusted based on the latest Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) applied. Even though it has not implemented assurances from independent third parties (external assurance), the Company ensures that all data and information disclosed in this Report have gone through an internal verification process, hence it can be relied upon for the evaluation and decision-making process. [GRI 2-4, 2-5]

Stakeholders who are interested in reading the Report and providing input can access and download it through the Company's official website of www.wom.co.id.

LIST OF MATERIAL TOPICS AND REPORT BOUNDARIES [GRI 3-1, 3-2]

During the reporting period, there were adjustments to the Company's material topics. The determination of material topics is carried out by referring to the results of internal analysis and review of material topics for financial service institutions, particularly leasing. In addition, the Company also refers to SASB Materiality Finder in the Consumer Finance section. According to the analysis results, there are 8 (eight) Material Topics relevant to the Company's business activities, as follows:

Topik Ekonomi & Tata Kelola | Economic & Governance Topics:
- Kinerja Ekonomi | Economic Performance
- Antikorupsi & *Anti Fraud* | Anti-Corruption & Anti-Fraud



Topik Lingkungan | Environmental Topics:
- Portofolio & Produk Pembiayaan Berkelanjutan | Sustainable Finance Portfolio & Products

Topik Sosial | Social Topics:
- Ketenagakerjaan | Employment
- Pelatihan dan Pendidikan | Training and Education
- Kesehatan & Kesejahteraan Karyawan | Employee Health & Wellbeing
- Keamanan Data | Data Security
- Pemberdayaan Masyarakat | Community Empowerment

Daftar Topik Material, Batasan dan Indeks Pengungkapan Spesifik [GRI 3-2]
Material Aspects, Boundary and Specific Disclosure Indices

No	Topik Material Material Topics	Alasan Materialitas Reasons for Materiality [GRI 103-1]	Batasan Pemangku Kepentingan Stakeholders Boundaries		Indeks GRI Spesifik yang Dilaporkan Reported GRI Specific Index	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals
			Di dalam Perseroan Internal	Di luar Perseroan External		
	TOPIK EKONOMI & TATA KELOLA | ECONOMIC & GOVERNANCE TOPICS					
1	Kinerja Ekonomi Economic Performance	Menggambarkan pencapaian dan kinerja ekonomi Perseroan. Describe the Company's achievements and economic performance.	✓	✓	201-1, 201-2, 201-3	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
2	Antikorupsi & Anti *Fraud* Anti-Corruption & Anti-Fraud	Menggambarkan komitmen Perseroan untuk menerapkan bisnis berbasis tata kelola yang baik. Describe the Company's commitment to implement good governance-based business.	✓		205-2, 205-3	16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
	TOPIK LINGKUNGAN | ENVIRONMENTAL TOPICS					
3	Portofolio & Produk Pembiayaan Berkelanjutan Sustainable Financing Portfolio & Products	Menggambarkan komitmen dan upaya Perseroan dalam mengelola portofolio dan produk pembiayaan yang ramah lingkungan Describe the Company's commitment and efforts in managing its green financing portfolio and products	✓	✓	-	13 CLIMATE ACTION
	TOPIK SOSIAL | SOCIAL TOPICS					
4	Ketenagakerjaan Employment	Menggambarkan upaya Perseroan dalam menyediakan lapangan kerja, penilaian kerja dan pemberian remunerasi yang adil dan berimbang. Describe the Company's efforts in providing employment, job appraisal and providing fair and balanced remuneration.	✓		401-1, 401-2, 401-3	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

Tentang Laporan Keberlanjutan
About Sustainability Report

No	Topik Material Material Topics	Alasan Materialitas Reasons for Materiality [GRI 103-1]	Batasan Pemangku Kepentingan Stakeholders Boundaries		Indeks GRI Spesifik yang Dilaporkan Reported GRI Specific Index	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals
			Di dalam Perseroan Internal	Di luar Perseroan External		
5	Kesehatan & Kesejahteraan Karyawan Employee Health & Wellbeing	Menggambarkan upaya Perseroan dalam menyediakan tempat kerja yang aman dan nyaman. Describe the Company's efforts in providing a safe and comfortable workplace.	✓		403-1, 403-6	
6	Pelatihan dan Pendidikan Training and Education	Menggambarkan komitmen Perseroan dalam upaya meningkatkan kompetensi pekerja. Describe the Company's commitment in an effort to improve the competence of workers.	✓		404-1, 404-2, 404-3	
7	Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment	Menggambarkan komitmen Perseroan terhadap program pengembangan masyarakat dan komunitas lokal. Describe the Company's commitment to community development programs and local communities.	✓		413-1	
8	Keamanan Data Data Security	Menggambarkan komitmen Perseroan dalam menjaga kerahasiaan dan privasi data pelanggan. Describe the Company's commitment in maintaining the confidentiality and privacy of customer data.	✓	✓	418-1	

PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN [OJK E.4] [GRI 2-29]

Perseroan senantiasa berupaya mencatatkan pencapaian kinerja yang berimbang pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan sekaligus memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Pemangku Kepentingan adalah individu atau kelompok yang berkepentingan terhadap keberhasilan Perseroan dalam memberikan hasil yang diinginkan dan mempertahankan kelangsungan bisnis, sekaligus kelompok yang terpengaruh oleh kehadiran bisnis Perseroan.

Untuk itu Perseroan membangun kerjasama dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan. Perseroan juga berupaya untuk menyelenggarakan komunikasi yang intensif bersama kelompok-kelompok pemangku kepentingan dan mengupayakan pelibatan kelompok-kelompok tersebut sesuai dengan harapan masing-masing pemangku kepentingan.

STAKEHOLDER ENGAGEMENT [OJK E.4] [GRI 2-29]

The Company strives to record balanced performance achievements in economic, social and environmental aspects while meeting the expectations of stakeholders. Stakeholders are individuals or groups with an interest in the Company's success in delivering the desired results and maintaining business continuity, as well as groups affected by the Company's business presence.

As such, the Company builds cooperation and synergizes with stakeholders. The Company also strives to conduct intensive communication with stakeholder groups and puts effort for the engagement of these groups in accordance with the expectations of each stakeholder.

Perseroan telah menetapkan 6 (enam) Pemangku Kepentingan yang memiliki pengaruh langsung terhadap keberlanjutan Perseroan, antara lain: Pemegang Saham dan Investor, Konsumen, Karyawan, Komunitas, Mitra Kerja/Pemasok dan Pemerintah/Regulator. Adapun pelibatan pemangku kepentingan dijabarkan lebih detail sebagai berikut:

The Company has established 6 (six) Stakeholders who have a direct influence on the Company's sustainability, including: Shareholders and Investors, Consumers, Employees, Communities, Partners/Suppliers, and Government/Regulators. The stakeholder engagement is described in more detail as follows:

Pelibatan Pemangku Kepentingan [GRI 2-29]
Stakeholder Engagement

No	**Pemangku Kepentingan** Stakeholders	**Topik/Masalah yang Dibahas** Topics/Issues Discussed	**Metode Pelibatan** Engagement Methods	**Frekuensi** Frequency	**Fungsi Manajemen Tata Kelola Tertinggi** Highest Governance Management Functions
1	Pemegang Saham dan Investor Shareholders and Investors	• Tata Kelola Organisasi • Pencapaian Kinerja Ekonomi • Organizational Governance • Achievement of Economic Performance	• Menyediakan informasi pencapaian Perseroan melalui RUPS, Laporan Kuartal dan Penerbitan Laporan Tahunan. • Komunikasi langsung maupun melalui analisis guna memastikan penyampaian informasi material. • Provide information on the Company's achievements through GMS, Quarterly Report and Annual Report Issuance. • Direct communication or through analysis to ensure the delivery of material information.	Sesuai kebutuhan As required	• Corporate Secretary
2	Konsumen Consumers	• Pelindungan Konsumen • Hubungan Berkelanjutan • Customer Protection • Continuous Relationships	• Penyediaan produk dan jasa sesuai peraturan yang berlaku. • Pemberian informasi produk dan jasa dengan tepat waktu, memadai, jelas dan akurat. • Pengembangan layanan berkualitas prima demi kepuasan konsumen. • Iklan dan Media promosi • Provision of products and services in accordance with applicable regulations. • Provision of product and service information in a timely, adequate, clear and accurate manner. • Development of excellent quality services for customer satisfaction. • Advertising and Promotional Media	Sesuai kebutuhan As required	• Line of Business • Corporate Secretary

Tentang Laporan Keberlanjutan

About Sustainability Report

No	Pemangku Kepentingan Stakeholders	Topik/Masalah yang Dibahas Topics/Issues Discussed	Metode Pelibatan Engagement Methods	Frekuensi Frequency	Fungsi Manajemen Tata Kelola Tertinggi Highest Governance Management Functions
3	Karyawan Employee	• Hubungan Ketenagakerjaan • Perlindungan dan Kondisi Kerja • Pengembangan Kompetisi • Pengembangan Karir dan Aktualisasi Diri • Employment Relations • Protection and Working Conditions • Competition Development • Career Development and Self-Actualization	• Pengelolaan insan Perseroan secara objektif, transparan, adil dan setara. • Membangun dan mengembangkan lingkungan kerja kondusif demi optimalisasi produktivitas • Pengembangan karir, *talent management system* dan *assessment center*. • Management of the Company's personnel objectively, transparently, fairly and equally. • Build and develop a conducive work environment for productivity optimization • Career development, talent management system and assessment center.	Pertemuan berkala sesuai kebutuhan Periodic meetings as required	• Human Capital
4	Komunitas Community	• Pendidikan dan Budaya • Teknologi dan Akses Infrastruktur • Kesejahteraan dan Pendapatan • Education and Culture • Technology and Infrastructure Access • Wellbeing and Income	• Intensifikasi keterlibatan dalam kegiatan komunitas dengan program yang mencakup bidang pendidikan, pemberdayaan, budaya dan agama, kemanusiaan serta lingkungan. • Intensification of engagement in community activities with programs covering the fields of education, empowerment, culture and religion, humanity and the environment.	Pertemuan berkala sesuai kebutuhan Periodic meetings as required	• Corporate Secretary • Human Capital
5	Mitra Kerja/ Pemasok Partners/ Supplier	• Hubungan Berkelanjutan • Ekonomi • Keadilan • Continuous Relationships • Economy • Justice	• Syarat kerja sama yang jelas. • Penilaian kinerja yang transparan • Penilaian rutin. • Clear terms of cooperation. • Transparent performance appraisal • Regular assessments.	Pertemuan berkala sesuai kebutuhan Periodic meetings as required	Procurement
6	Pemerintah dan Regulator Government and Regulators	• Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan • Komitmen Terhadap Regulasi Pembiayaan • Komunikasi dan Pelaporan yang Jelas, Akurat, Komprehensif dan Tepat Waktu • Compliance with the rules of law • Commitment to Financing Regulations • Clear, Accurate, Comprehensive and Timely Communication and Reporting	• Penyempurnaan terhadap kebijakan internal Perseroan terkait GCG sesuai dengan kondisi terkini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Implementasi prinsip GCG di seluruh unit kerja. • Refinement of the Company's internal policies related to GCG in accordance with the latest conditions and prevailing laws and regulations. • Implementation of GCG principles in all work units.	Pertemuan sesuai kebutuhan Meetings as required	Compliance

KONTAK TERKAIT PELAPORAN [GRI 2-3]

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut atau pertanyaan-pertanyaan tentang Laporan ini, silahkan menghubungi:

REPORTING-RELATED CONTACT [GRI 2-3]

Further information or questions about this Report, please contact:

CORPORATE SECRETARY

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
Alamat Kantor Pusat | **Head Office Address**
Altira Office Tower floor 32, 33, 35
Jl. Yos Sudarso Kav. 85
Sunter Jaya, Tanjung Priok
Jakarta Utara 14350
Telp. : +62 21 2188 2400
Fax. : +62 21 2188 2420
E-mail : corporate_secretary@wom.co.id
Website : www.wom.co.id



TANGGAPAN UMPAN BALIK ATAS LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2022

Selama periode pelaporan, Perseroan tidak menerima tanggapan lembar umpan balik atas laporan keberlanjutan yang diterbitkan tahun sebelumnya. Perseroan terus melakukan evaluasi dan peningkatan penyajian dalam melaporkan kinerja LST melalui Laporan Keberlanjutan. [OJK G.3]

FEEDBACK RESPONSE FOR THE 2022 SUSTAINABILITY REPORT

During the reporting period, the Company did not receive any feedback on the sustainability report issued in the previous year. The Company continues to evaluate and improve presentation in reporting ESG performance through the Sustainability Report. [OJK G.3]

Tata Kelola Keberlanjutan

Sustainability Governance

Perseroan senantiasa meningkatkan penerapan tata kelola keberlanjutan yang merupakan prasyarat bagi keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini selaras dengan usaha Perseroan dalam memperluas pelayanannya kepada Pemangku Kepentingan, sehingga dapat terciptanya kinerja yang optimal dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan serta menjaga keseimbangan kinerja pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.



The Company continues to improve the sustainability governance practices, which is a prerequisite for the success and sustainability of the company in the long term. This is in line with the Company's efforts in expanding its services to Stakeholders, so as to create optimal performance in realizing sustainable growth and maintaining a balance of performance in economic, social and environmental aspects.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Sebagai salah satu korporasi lembaga pembiayaan, Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sesuai regulasi dan perkembangan terkait implementasi GCG secara global. Perseroan meyakini penerapan seluruh prinsip-prinsip tata kelola perusahaan akan semakin mendekatkan pencapaian visi dan misi penyediaan kebutuhan pembiayaan masyarakat yang mampu menjangkau seluruh pelanggan di Indonesia dengan produk berkualitas, berdaya saing, namun tetap mengedepankan aspek sosial dan lingkungan yang juga tanggap terhadap aspek-aspek sosial kemasyarakatan.

STRUKTUR, MEKANISME, KEBIJAKAN & PEDOMAN TATA KELOLA [GRI 2-9]

Perseroan memiliki organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan di Perseroan menganut sistem dua badan *(two tier system)* yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki wewenang

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

As one of the financing institution corporations, the Company adheres to the principles of corporate governance in accordance with regulations and developments on GCG implementation globally. The Company believes that implementing all corporate governance principles will result in the achievement of the vision and mission of providing community financing needs that are capable of reaching all customers in Indonesia with quality, Competitive products while also prioritizing social and environmental aspects that are responsive to social community aspects.

GOVERNANCE STRUCTURE, MECHANISMS, POLICIES & GUIDELINES [GRI 2-9]

The Company has corporate organs consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners and Board of Directors. The management system adheres to a two-tier system, namely the Board of Commissioners and Board of Directors which have clear

dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagan Struktur, Mekanisme Tata Kelola Perusahaan, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang seluruh Organ Perseroan dan kegiatan pelaksanaan tugasnya, serta uraian Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian Laporan Tahunan.

PENCEGAHAN KONFLIK KEPENTINGAN [GRI 2-15]

Perseroan senantiasa menjunjung tinggi etika dan menerapkan asas independensi dan responsibilitas dalam pengambilan keputusan strategis maupun operasional dalam menjalankan kegiatan bisnis. Apabila terdapat potensi konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan strategis, baik dalam rangka investasi maupun pengambilan keputusan operasional, pihak yang memiliki potensi benturan kepentingan dilarang mengikuti proses pengambilan keputusan. Selain itu, pihak yang memiliki potensi kepentingan tersebut wajib memberitahukan kondisi yang dihadapi, sesuai ketentuan internal yang mengatur tentang Pencegahan Konflik Kepentingan.

MENGKOMUNIKASIKAN HAL-HAL KRITIS [GRI 2-16]

Kegiatan pemberian pembiayaan yang dijalankan Perseroan sangat rentan terhadap perubahan kondisi eksternal yang berada diluar kendali Perseroan. Untuk mengatasi hal tersebut, Perseroan menerapkan manajemen risiko yang komprehensif dengan senantiasa memitigasi potensi risiko yang bisa berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha.

Untuk mencegah terjadinya dampak risiko kondisi eksternal yang dimaksud, Direksi mengadakan rapat rutin membahas mitigasi berbagai risiko tersebut selain mendiskusikan berbagai hal-hal kritis yang harus diatasi bersama. Perseroan juga menyiapkan *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai wujud antisipasi kondisi darurat agar kegiatan bisnis tetap dapat berjalan dengan baik, termasuk pemberian layanan kepada para pelanggan.

authority and responsibility in line with their respective functions as mandated in the Articles of Association and in accordance to laws and regulations.

Structure, Corporate Governance Mechanism, job description, responsibilities and authorities of all Company organs and the implementation of duties, as well as the description of Governance Policies and Guidelines are presented in Chapter of Corporate Governance in the Annual Report section.

CONFLICT OF INTEREST PREVENTION [GRI 2-15]

When carrying out business activities, the Company consistently supports ethics and employs the concepts of independence and responsibility in making strategic and operational decisions. Parties who have a potential conflict of interest in the strategic decision-making process, both in the context of investment and operational decision-making, are prohibited from participation in the decision-making process. Moreover, parties with probable interests must disclose the identified conditions in accordance with internal regulations governing Conflicts of Interest Prevention.

COMMUNICATING CRITICAL MATTERS [GRI 2-16]

The Company's financing activities are highly vulnerable to external changing conditions that are beyond its control. To overcome this, the Company employs comprehensive risk management by constantly mitigating potential risks that can have a direct impact on business continuity.

To prevent the impact of the risks of external conditions, the Board of Directors holds regular meetings to discuss the mitigation of these risks in addition to discussing various critical matters that must be collectively addressed. The Company also develops Business Continuity Plan (BCP) in anticipation of emergency conditions to ensure business activities can continue to perform well, including providing services to customers.

Tata Kelola Keberlanjutan
Sustainability Governance

PRAKTIK ANTIKORUPSI & ANTI *FRAUD* [GRI 205-2]

Perseroan menumbuh kembangkan budaya anti korupsi dan anti penyuapan dengan menanamkan Nilai-Nilai Dasar *(core values)* Perusahaan diiringi penerapan berbagai kebijakan internal terkait, seperti Peraturan Perusahaan, Pedoman Penerapan Strategi *Anti-Fraud,* Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan. Adapun implementasi kebijakan Anti-Korupsi dan *Anti-Fraud* tersebut menjadi tanggung jawab Divisi Legal Counsel & Anti Fraud. [GRI 3-3]

Perseroan telah menerapkan Panduan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku, berisi berbagai aturan pencegahan korupsi dan gratifikasi, meliputi:

1. Ketentuan mengenai anti gratifikasi yang termuat pada Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan. Ketentuan anti gratifikasi tersebut meliputi:
   a. Larangan seluruh personil Perseroan memberikan hadiah termasuk berupa hiburan yang patut diduga oleh pihak lain sebagai indikasi penyuapan atau gratifikasi.
   b. Larangan seluruh personil Perseroan menerima suatu pemberian atau hadiah yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terkait kegiatan Perseroan, wewenang jabatan yang diembannya atau dalam suatu keadaan dimana kemudian tampak pada pihak lain bahwa pertimbangan bisnis yang dibuat telah dikompromikan.
   c. Tidak memperkenankan seluruh personil Perseroan menawarkan untuk memberikan bingkisan, hiburan, hadiah atau bentuk pemberian lainnya baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain untuk:
      - Mempengaruhi pengambilan keputusan terkait kegiatan usaha Perseroan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
      - Mempengaruhi atau menimbulkan potensi benturan kepentingan.

ANTI-CORRUPTION & ANTI-FRAUD PRACTICES [GRI 205-2]

The Company fosters an anti-corruption and anti-bribery culture by instilling the Company's core values accompanied by the implementation of various related internal policies, such as Company Regulations, Anti-Fraud Strategy Implementation Guidelines, the Company's Code of Ethics and Code of Conduct. The implementation of the Anti-Corruption and Anti-Fraud policy is the responsibility of the Legal Counsel & Anti-Fraud Division. [GRI 3-3]

The Company has implemented the Code of Ethics and Code of Conduct, outlining various rules for corruption prevention and gratification, including:

1. Provisions outlined in the Company's Code of Ethics and Code of Conduct pertaining to anti-gratification, which consists of:
   a. All Company employees are prohibited from giving gifts, including entertainment, that could be perceived by other parties as an indication of bribery or gratification.
   b. All Company employees are prohibited from accepting a gift or gift where it is known or reasonably suspected that the gift may influence decision making regarding the Company's activities, the authority of the position held, or in a situation where it appears to the other party that the business considerations made have been compromised.
   c. All Company employees are prohibited to offer to give gifts, entertainment, gifts or other forms of gifts either directly or indirectly to other parties to:
      - Influencing decision making related to the Company's business activities by violating prevailing laws and regulations;
      - Influencing or giving rise to potential conflicts of interest.

2. Ketentuan mengenai anti korupsi yang termuat pada Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan. Ketentuan anti korupsi tersebut antara lain meliputi:
   a. Larangan seluruh personil Perseroan memanfaatkan jabatannya di Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
   b. Kewajiban seluruh personil Perseroan harus tunduk dan patuh pada aturan hukum, moral dan etika serta seluruh kebijakan dan prosedur Perseroan yang berlaku.
   c. Larangan seluruh personil Perseroan menyalahgunakan nama Perseroan, fasilitas dan hubungan bisnis Perseroan untuk kepentingan pribadi atau untuk hal-hal lain di luar pekerjaan.

Perseroan meningkatkan kesadaran dan peran serta seluruh jajaran agar turut aktif mencegah serta menghindari praktik korupsi dan gratifikasi, dengan:

1. Menegakkan komitmen dari seluruh personil Perseroan untuk patuh pada Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan, ketentuan hukum yang berlaku, serta seluruh kebijakan internal Perseroan dengan menandatangani surat pernyataan komitmen pribadi atas Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku pada saat baru bergabung di Perseroan dan pada setiap tahunnya komitmen pribadi atas Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku tersebut dinyatakan kembali oleh karyawan Perseroan melalui sistem internal Perseroan.
2. Menyelenggarakan pelatihan *Anti-Fraud*, pelatihan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), serta pelatihan mengenai nilai-nilai dasar (*core values*) Perseroan.
3. Menyediakan saluran *whistleblowing system* Perseroan sebagai fasilitas penyampaian laporan pelanggaran, ketidakpatuhan atau penyimpangan di Perseroan.

2. Provisions outlined in the Company's Code of Ethics and Code of Conduct regarding anti-corruption, which consists of:
   a. All Company employees are prohibited from using their position in the Company for personal, family and/or other parties that may harm or reduce the Company's profits.
   b. All Company employees have the obligation to comply and adhere to the rules of law, morals and ethics as well as all applicable policies and procedures of the Company.
   c. All Company employees are prohibited from misusing the Company's name, facilities and business relationships for personal gain or for other matters outside work.

The Company increases awareness and participation of all levels to actively prevent and avoid corrupt practices and gratification, by:

1. Upholding all Company personnel's commitment to comply with the Company's Code of Ethics and Code of Conduct, applicable legal provisions, and all internal policies of the Company by signing a statement of personal commitment to the Code of Ethics and Code of Conduct when newly joining the Company, and each year by the Company's employees through the Company's internal system.
2. Organizing Anti-Fraud training, training on the implementation of Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML-CFT) program, as well as training on the Company's core values.
3. Provide the Company's whistleblowing system channel as a facility for submitting reports of violations, non-compliance or irregularities in the Company.

Tata Kelola Keberlanjutan
Sustainability Governance

Pelatihan personel Perseroan selama tahun 2023 terkait dengan nilai-nilai perusahaan, APU-PPT dan *Anti Fraud* ditinjau dari level jabatan adalah sebagai berikut:

The Company's personnel training during 2023 related to corporate values, AML-CFT and Anti-Fraud in terms of position level is as follows:

Pelatihan Nilai-nilai Perusahaan, APU-PPT dan Anti *Fraud* menurut Level Jabatan
Training on Corporate Values, AML-PPT and Anti-Fraud by Position Level

Uraian Description	2023		
	Manajerial/Senior Manajer	Supervisor/Head	Staf/Non Staff
*Management Trainee**	0	161	0
*WOM Managerial Program**	38	53	0
*WOM On Boarding***	8	409	4.424
Jumlah	46	623	4.424

*) Pada pelatihan ini memuat materi pelatihan mengenai Nilai-nilai Perseroan, APU PPT dan *Anti Fraud* (3 Parameter harus terpenuhi).
**) Pelatihan yang diberikan khusus pada karyawan baru Perseroan yang mencakup materi pelatihan mengenai nilai-nilai perusahaan, APU PPT dan *Anti Fraud* (Pelatihan Khusus Karyawan Baru).
*) This training includes training materials on the Company's Values, AML CFT (Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism), and Anti-Fraud (3 Parameters must be met).
**) The training provided specifically to the Company's new employees covers training materials on the Company's values, AML CFT, and Anti-Fraud (Special Training for New Employees).

PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN [GRI 2-26]

Perseroan telah menetapkan sistem pelaporan pelanggaran *(Whistleblowing System*/WBS) yang sistematis, sederhana dan mudah dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi sebagai media pendeteksi pelanggaran/*fraud*. Sistem ini diberlakukan untuk seluruh jajaran, baik karyawan, Direksi maupun Komisaris dan disosialisasikan secara terus-menerus melalui berbagai media internal.

Adapun mekanisme penyampaian pengaduan dan pengelolaan *whistleblowing channel* Perseroan adalah sebagai berikut:

WHISTLEBLOWING MANAGEMENT [GRI 2-26]

The Company has established a systematic, simple and easy whistleblowing system (WBS) with a high level of confidentiality as a medium for detecting violations/fraud. This system is applied to all elements, both employees, Directors and Commissioners and is continuously socialized through various internal media.

The mechanism for submitting complaints and managing the Company's whistleblowing channel are as follows:

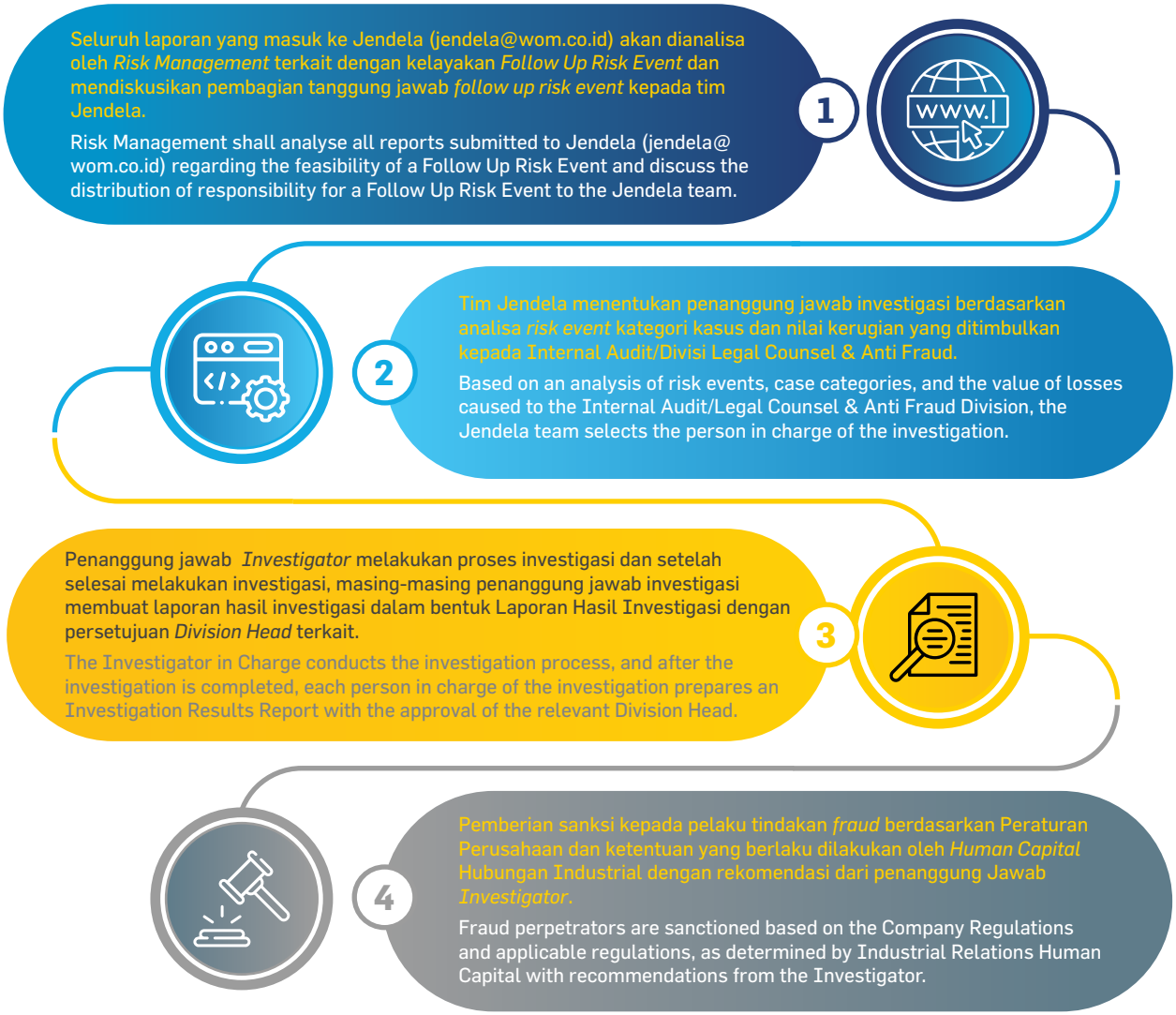

Perseroan memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas para pelapor (*whistleblower)* guna mendorong keberanian untuk menyampaikan laporan melalui kanal WBS sekaligus memastikan efektivitas sistem pelaporan. Selama periode 1 Januari sampai Desember 2023, terdapat 54 pengaduan, termasuk dugaan tindak *fraud* ataupun korupsi yang masuk yang diterima melalui saluran *whistleblowing* dan telah ditindaklanjuti oleh Divisi Legal Counsel & Anti Fraud.

The Company protects and ensures the security of whistleblowers' identities in order to encourage them to make complaints through the WBS channel while also assuring the effectiveness of the reporting system. 54 complaints were recorded during the period from January 1 to December 2023, including allegations of fraud or corruption that received through whistleblowing channels and have been followed up by the Legal Counsel & Anti Fraud Division.

Tata Kelola Keberlanjutan
Sustainability Governance

Berdasarkan investigasi yang dilakukan unit kerja tersebut, Divisi Legal Counsel & Anti Fraud telah memberikan keputusan dan sanksi terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaduan selengkapnya yang masuk melalui WBS dan diproses pada tahun buku 2023 adalah sebagai berikut: [GRI 205-3]

Based on the work unit's investigation, the Legal Counsel & Anti Fraud Division issued decisions and sanctions against the culprits in accordance with applicable legislation. The following are the total complaints submitted through WBS and processed in the fiscal year 2023: [GRI 205-3]

Rekapitulasi Pengaduan melalui WBS Tahun 2023
Recapitulation of Complaints through WBS in 2023

No.	Status Laporan Report Status	Jumlah Kasus Total Cases
1	Indikasi *Fraud* | Indication of Fraud	42
2	Tidak terindikasi *Fraud* | No indication of Fraud	12
	Jumlah | Total	**54**

PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN & LST [OJK E.1] [GRI 2-13]

Sejalan dengan kebutuhan teknis dalam penerapan KB, per Juni 2023, Perseroan telah membentuk Departemen Corporate Social & ESG yang secara khusus bertanggung jawab menjadi *unit in charge* penerapan RAKB dan LST yang berada di bawah Divisi Financial Planning & Investor Relation. Adapun tugas dan tanggung jawab Departemen Corporate Social & ESG adalah sebagai berikut:

1. Membuat program beserta rancangan biaya Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
2. Mengimplementasikan program Aksi Keuangan Berkelanjutan.
3. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan program Aksi Keuangan Berkelanjutan.

SUSTAINABLE FINANCE & ESG DEPARTMENT [OJK E.1] [GRI 2-13]

In line with the technical needs in implementing KB, as of June 2023, the Company has established a Corporate Social & ESG Department which is specifically responsible for being the unit in charge of implementing RAKB and ESG under the Financial Planning & Investor Relations Division. The duties and responsibilities of the Corporate Social & ESG Department are as follows:

1. Create a program with the draft costs of the Sustainable Finance Action Plan.
2. Implement the Sustainable Finance Action program.
3. Supervise and evaluate the activities of the Sustainable Finance Action program.

Struktur Divisi dan Departemen | Divisional and Department Structure

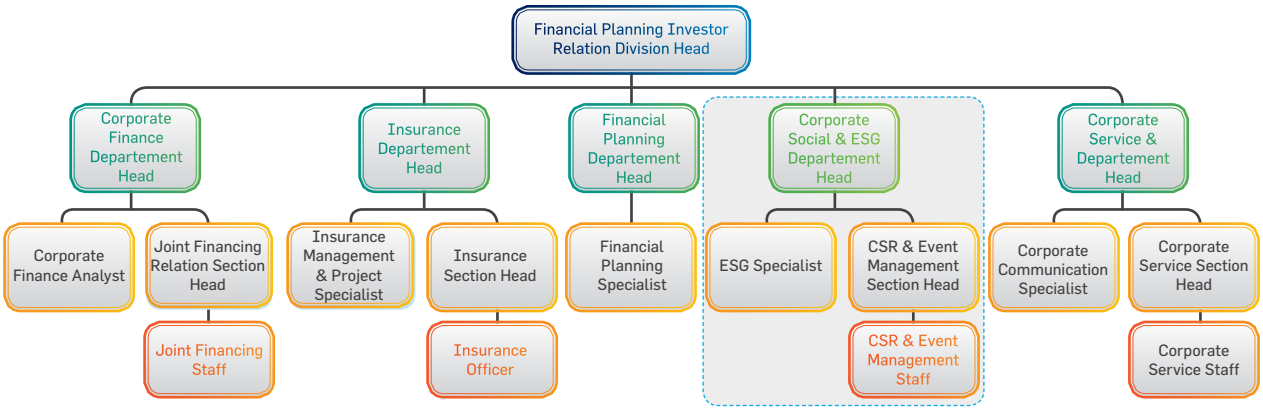

SISTEM MANAJEMEN RISIKO [OJK E.3]

Pengelolaan dan mitigasi risiko sangat penting dalam menjaga kelangsungan bisnis. Oleh karenanya, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan secara bersama-sama membentuk sistim dan struktur organisasi manajemen risiko dengan tanggung jawab serta kewenangan yang jelas dalam, mengenali, mengelola dan memitigasi seluruh potensi risiko, termasuk risiko penerapan keuangan berkelanjutan.

RISK MANAGEMENT SYSTEM [OJK E.3]

Risk management and mitigation are essential in maintaining business continuity. As such, the Board of Commissioners and Board of Directors collectively establish a risk management system and organizational structure with clear responsibilities and authorities in, identifying, managing and mitigating all potential risks, including the risk of implementing sustainable finance.

KONSEP *THREE LINES OF DEFENSE*

Perseroan telah menerapkan prinsip tiga lapis pertahanan *(three lines of defence)* manajemen risiko. Melalui model ini, Perseroan membagi fungsi-fungsi organisasi yang terlibat di dalam manajemen risiko menjadi tiga lapis.

Sebagai lapis pertama adalah pemilik risiko *(risk owner)* yaitu Unit Kerja Bisnis yang bertugas mengelola dan memitigasi risiko di unitnya sehari-hari. Lapis kedua adalah Unit Kerja Manajemen Risiko sebagai Pengawas risiko *(risk overseer),* dengan tugas memastikan kecukupan sistem dan prosedur serta metodologi pengelolaan risiko yang digunakan. Sebagai lapis ketiga adalah Unit Kerja Audit Internal yang berperan sebagai penilai independen atau *independent assurance* atas kecukupan sistem pengelolaan risiko.

THREE LINES OF DEFENSE CONCEPT

The Company has implemented the principle of three lines of defense of risk management. Through this model, the Company divides the organizational functions involved in risk management into three layers.

The first layer is the risk owner, namely the Business Unit in charge of managing and mitigating risks in their units on a daily basis. The second layer is the Risk Management Unit as a risk overseer, with the task of ensuring the adequacy of the systems and procedures and risk management methodologies. The third layer is the Internal Audit Unit which acts as an independent assessor or independent assurance of the adequacy of the risk management system.

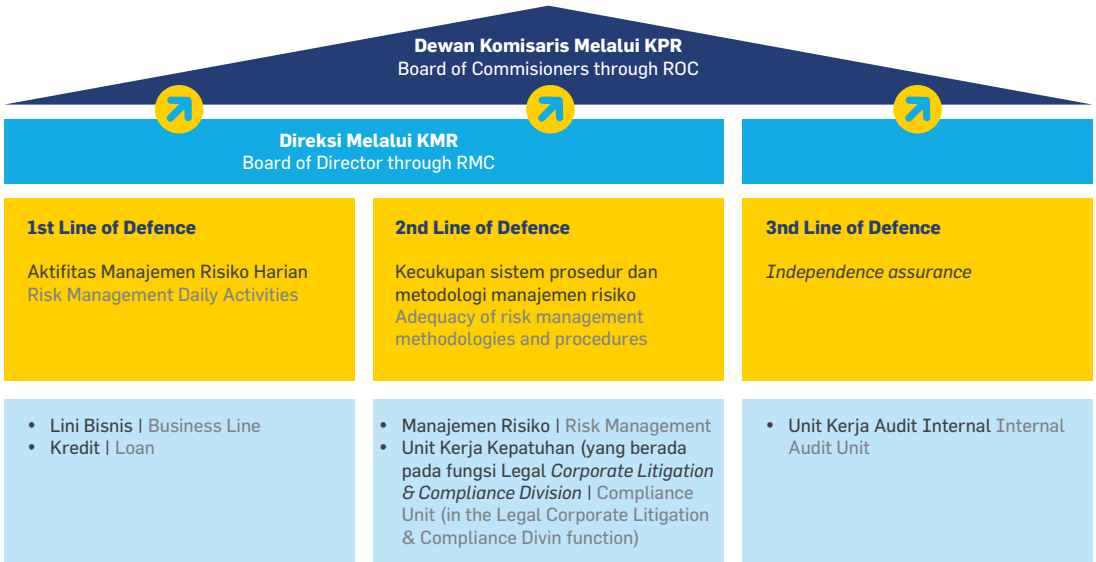

Tata Kelola Keberlanjutan
Sustainability Governance

Dalam menerapkan manajemen risiko secara keseluruhan, Perseroan didukung SDM dengan kompetensi dan infrastruktur yang cukup memadai. Perseroan secara berkelanjutan terus mengembangkan metodologi pengelolaan risiko, menyempurnakan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Dengan demikian, Perseroan akan mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan lingkungan bisnis pembiayaan.

In implementing overall risk management, the Company is supported by human resources with adequate competence and infrastructure. The Company continuously develops risk management methodologies, improves risk management policies and procedures. As such, the Company will be able to anticipate developments and changes in the financing business environment.

Sebagai perusahaan yang sangat rentan dengan risiko, Perseroan menyadari pentingnya peningkatan kesadaran budaya risiko. Dengan demikian, Perseroan secara berkelanjutan melakukan peningkatan pemahaman dan kemampuan karyawan melalui pelatihan-pelatihan dan kampanye budaya berbasis risiko.

As an entity that is extremely exposed to risk, the company recognizes the importance of raising risk culture awareness. As a result, the Company is constantly improving employee comprehension and competence through trainings and risk-based cultural programs.

Uraian lengkap mengenai mekanisme manajemen risiko tersebut beserta peran Dewan Komisaris, Direksi beserta fungsi-fungsi Unit Kerja terkait beserta jenis-jenis risiko yang dihadapi dan dimitigasi, dijelaskan pada bagian Laporan Tahunan sub-bab “Manajemen Risiko”.

A complete description of the risk management mechanism with the roles of the Board of Commissioners, Board of Directors and related Work Unit functions with the types of risks faced and mitigated, are described in the Annual Report section of the sub-chapter “Risk Management”.

PERMASALAHAN TERHADAP PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [OJK E.5]

Dalam melaksanakan agenda Keuangan Berkelanjutan, Perseroan dihadapkan oleh beberapa tantangan baik eksternal dan internal. Tantangan eksternal adalah seperti kondisi pasar dan permintaan motor listrik dalam negeri yang belum tinggi dan regulasi terkait LST dan KB yang terus berkembang. Sebagai upaya antisipatif, Perseroan akan terus mengelola kinerja finansial pembiayaan motor listrik dan menyesuaikan kebijakan-kebijakan sesuai dengan regulasi LST yang terus berkembang. Di sisi lain, tantangan internal yang dihadapi Perseroan adalah masih belum meratanya pemahaman karyawan internal dalam aspek KB dan LST sehingga peningkatan kapasitas dan edukasi karyawan akan menjadi fokus penting bagi Perseroan.

ISSUES IN IMPLEMENTING SUSTAINABLE FINANCE [OJK E.5]

The Company has a number of external and internal challenges in implementing the Sustainable Finance agenda. External constraints include market conditions and demand for domestic electric motorcycles that are currently low, as well as ESG and KB requirements that continue to grow. As a precautionary measure, the Company will continue to manage the financial performance of electric motorcycle financing and adjust policies to meet evolving ESG regulations. On the other hand, the Company’s internal issues remain uneven understanding of internal employees in the aspects of KB and ESG, hence capacity building and employee education will be a priority for the Company.

Mendistribusikan Kinerja Ekonomi yang Optimal

Disbursing Optimal Economic Performance



Perseroan merealisasikan berbagai perbaikan cara kerja, meningkatkan standar operasional, meluncurkan produk pembiayaan baru sesuai kebutuhan pelanggan, meningkatkan kualitas layanan, hingga menyelesaikan seluruh keluhan para pelanggan dan menyelenggarakan survei kepuasan pelanggan demi meraih kinerja yang optimal. Perseroan kemudian mendistribusikan perolehan ekonominya kepada seluruh pemangku kepentingan sebagai wujud dukungan pencapaian tujuan keberlanjutan.

To achieve optimal performance, the Company delivers various improvements in its working methods, such as improving operational standards, launching new financing products based on customer needs, improving service quality, resolving all customer complaints, and conducting customer satisfaction surveys. The Company then disburses its economic gains to all stakeholders as a form of assistance for accomplishing sustainable goals.

Mendistribusikan Kinerja Ekonomi yang Optimal

Disbursing Optimal Economic Performance

Perseroan berupaya meraih kinerja terbaik di setiap kondisi usaha melalui: peningkatan standar operasional, peluncuran produk pembiayaan sesuai harapan konsumen, peningkatan kualitas layanan, peningkatan kualitas SDM, penyelesaian pengaduan pelanggan, penyelenggaraan survei kepuasan pelanggan, dan sebagainya. Perseroan menjadikan kemudahan transaksi pembayaran angsuran sebagai salah satu upaya meningkatkan kepuasan para pelanggan.

Guna mempermudah pembayaran angsuran, mengiringi berkembangnya transaksi digital, sejak beberapa tahun terakhir Perseroan telah menjalin kerja sama dengan sejumlah *marketplace* seperti DANA, Bukalapak, Shopee, Gobills, Link Aja dan Tokopedia, selain bekerja sama dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MBI) dalam layanan pembayaran melalui QRIS (*Quick Respons Code Indonesia Standard*). Perseroan juga menggandeng minimarket, dompet digital, POS Indonesia dan kerjasama dengan bank yang berkompeten dan bereputasi tinggi.

Upaya mendekatkan diri kepada para pelanggan melalui sentralisasi dan digitalisasi terus dilakukan dengan menambah mitra digital. Selain menjalin kerja sama dengan kanal *e-commerce*, Perseroan juga menggandeng mitra *marketplace* otomotif seperti www.oto.com dan Moladin, *fintech aggregator* seperti cekaja.com.

Selain itu, sistem proses kredit Perseroan sejak beberapa tahun terakhiir telah dihubungkan dengan data Dukcapil. Koneksi dengan Dukcapil tersebut memberi berbagai manfaat, mencakup: memudahkan Perseroan mengetahui profil para pelanggan; dan mendukung penerapan e-KYC (*Electronic Know Your Customer*), yang membuat proses verifikasi data calon konsumen menjadi lebih cepat dan akurat. Hal ini membuat risiko kesalahan yang biasanya ditemukan dalam proses manual seperti penulisan karakter pada nama, nomor induk kependudukan dan sebagainya semakin berkurang.

Selama periode pelaporan, Perseroan belum melakukan analisis yang berkaitan dengan implikasi finansial dari

The Company strives to achieve the best performance in every business condition by improving operational standards, launching financing products based on consumer expectations, improving service quality, improving the quality of human resources, resolving customer complaints, conducting customer satisfaction surveys, and so forth. As part of its efforts to improve customer satisfaction, the Company makes installment payment transactions more convenient.

To facilitate installment payments, in line with the development of digital transactions, the Company since the last few years has collaborated with a number of marketplaces such as DANA, Bukalapak, Shopee, Gobills, Link Aja and Tokopedia, in addition to collaborating with PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MBI) in payment services through QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard). The Company also cooperates with minimarkets, digital wallets, POS Indonesia and cooperation with competent and highly reputable banks.

Efforts to get closer to customers through centralization and digitalization continue implemented by adding digital partners. Apart from collaborating with e-commerce channels, the Company also collaborates with automotive marketplace partners such as www.oto.com and Moladin fintech aggregators, cekaja.com.

Moreover, the Company's credit processing system has been linked to Dukcapil data for the past few years. The connection with Dukcapil provides various benefits, including making it easier for the Company to know customer profiles; and support the implementation of e-KYC (Electronic Know Your Customer), which makes the process of verifying prospective customer data faster and more accurate. This decreases the risk of errors that are usually found in manual processes such as writing characters in names, residence numbers and so forth.

During the reporting period, the Company has not done so analysis relating to the financial implications of climate

perubahan iklim. Kedepannya, Perseroan akan meninjau baik risiko maupun peluang yang hadir dari isu perubahan iklim dan dampaknya kepada kinerja finansial. [201-2].

change. In the future, the Company will review both the risks and opportunities that arise from the issue of climate change and its impact on financial performance. [201-2]

KEBIJAKAN UMUM KINERJA DAN KONTRIBUSI EKONOMI PERUSAHAAN [GRI 3-3]

Dasar kebijakan dalam memaksimalkan kinerja dan mengoptimalkan kontribusi Perseroan diantaranya adalah:

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
- Anggaran Dasar Perusahaan,
- Dokumen Prospektus *Go Public* Perusahaan,
- Dokumen Keputusan RUPS Tahunan,
- Dokumen Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Atas kebijakan umum tersebut, Perseroan merancang dan merealisasikan berbagai target capaian sekaligus menunjukkan kinerja pada aspek ekonomi serta berkontribusi bagi pembangunan negeri.

GENERAL POLICY ON CORPORATE PERFORMANCE AND ECONOMIC CONTRIBUTION [GRI 3-3]

The basic policies in maximizing performance and optimizing the Company's contribution are as follows:

- Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies,
- Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2007 concerning Capital Investment,
- Company's Articles of Association,
- Company Go Public Prospectus Document,
- Annual GMS Decision Document,
- Sustainable Finance Action Plan Document.

Based on this general policy, the Company designs and realizes various achievement targets while delivering performance in economic aspects and contributing to the nation development.

KINERJA PEMBIAYAAN DAN PERKEMBANGAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN [OJK F.2, F.3]

Kondusifnya perekonomian nasional di tengah kondisi perekonomian global yang penuh tantangan, membuat industri otomotif maupun industri sepeda motor nasional terus mencatatkan kinerja positif yang pada gilirannya memberi dampak positif terhadap industri pembiayaan. Data Gaikindo menunjukkan penjualan *wholesale* mobil nasional sampai bulan Desember 2023 mencapai 1.005.802 unit, turun 4% dari periode sama di tahun 2022 yang sebesar 1.048.040 unit. Disisi lain data AISI menunjukkan penjualan sepeda motor mencapai angka 6.236.992 unit, naik sebesar 19,4% dari periode sama tahun 2022.

Kondisi tersebut, bersama dengan perubahan rata-rata harga jual kendaraan bermotor, membuat nilai pembiayaan baru sampai dengan Desember 2023 terus meningkat. Data OJK yakni Statistik lembaga

FINANCING PERFORMANCE AND FINANCING PORTFOLIO DEVELOPMENT [OJK F.2, F.3]

Favorable to the national economy in the midst of challenging global economic conditions, the national automotive and motorcycle industries continue to record positive performance which in turn has a positive impact on the financing industry. Gaikindo data indicates that national wholesale car sales until December 2023 reached 1,005,802 units, a decrease of 4% from the same period in 2022, which was 1,048,040 units. On the other hand, AISI data indicated that motorcycle sales reached 6,236,992 units, slightly reduced by 19.4% from the same period in 2022.

This situation, with changes in the average selling price of motor vehicles, has led to a continuous increase in new financing value until December 2023. OJK data, namely the Financing Institutions Statistics, indicates that the

Mendistribusikan Kinerja Ekonomi yang Optimal

Disbursing Optimal Economic Performance

pembiayaan menunjukkan total saldo pembiayaan nasional per Desember 2023 adalah sebesar Rp6,15 triliun, naik 22,59% dari nilai sebesar Rp5,01 triliun di Desember 2022.

total national financing balance as of December 2023 was Rp6.15 trillion, up 22.59% from a value of Rp5.01 trillion in December 2022.

Uraian perkembangan kondisi ekonomi, industri kendaraan bermotor dan industri pembiayaan secara lebih lengkap, disampaikan pada bagian "Tinjauan Perekonomian", "Tinjauan Industri Kendaraan Bermotor dan Industri Pembiayaan Nasional", Bab Analisa dan Pembahasan Manajemen, dari Laporan ini.

A comprehensive description of the development of economic conditions, motor vehicle industry and financing industry is presented in the "Economic Review", "Overview of the Motor Vehicle Industry and National Financing Industry", Chapter of Management Analysis and Discussion, of this Report.

Kegiatan dan Kinerja Pembiayaan [OJK F.2]

Jenis produk dan layanan Perseroan terdiri atas 5 kelompok Pembiayaan, yakni:

1. Pembiayaan Multiguna Barang
2. Pembiayaan Investasi - *Sale and Leaseback Mobilku*
3. Pembiayaan Modal Kerja
4. Pembiayaan Multiguna Jasa
5. Pembiayaan Jual Beli (Akad Murabahah)

Financing Activities and Performance [OJK F.2]

The Company's products and services consist of 5 financing groups, as follows:

1. Multipurpose Goods Financing
2. Investment Financing - Sale and Leaseback Mobilku
3. Working Capital Financing
4. Multipurpose Services Financing
5. Sale and Purchase Financing (Akad Murabahah)

Rincian jenis dari masing-masing Pembiayaan dapat dilihat di uraian "Tinjauan Operasional Segmen Usaha" - Analisa dan Pembahasan Management bagian Laporan Tahunan, dari Laporan ini.

Details of the types of each Financing are presented in the "Business Segment Operational Review" - Management Analysis and Discussion section of the Annual Report, of this Report.

Selama tahun 2023, Perseroan berhasil mencatatkan kenaikan kinerja total Pembiayaan sebesar 28% menjadi sebesar Rp5,84 triliun atau bertambah senilai Rp1,27 triliun dari Rp4,57 triliun di tahun 2022 sebagai berikut.

During 2023, the Company successfully recorded an increase in total financing performance by 28% to Rp5.84 trillion or an increase of Rp1.27 trillion from Rp4.57 trillion in 2022, detailed as follows.

Perkembangan Portofolio Pembiayaan

Financing Portfolio Development

Jenis Pembiayaan Financing Type	2023		2022		2021		Perubahan | Change - %	
	Rp Juta Rp Million	%	Rp Juta Rp Million	%	Rp Juta Rp Million	%	2023	2022
Konvensional Conventional	5.704.504	97,60	4.405.134	96,28	4.139.132	99,97	29,50	6,43
Syariah Sharia	140.491	2,40	170.287	3,72	1.372	0,03	-17,5	12.307,54
Jumlah | Total	**5.844.995**	**100,00**	**4.575.421**	**100,00**	**4.140.505**	**100,00%**	**27,75**	**10,50**

Portofolio Pembiayaan [OJK F.3]

Dari sisi jenis pembiayaan, 49,98% portofolio pembiayaan

Financing Portfolio [OJK F.3]

In terms of financing type, 49.98% of the Company's

Perseroan di tahun 2023 berasal dari jenis Pembiayaan Multiguna Jasa, angka tersebut berubah dari sebesar 39,44% di tahun 2022. Pembiayaan Multiguna Barang berkontribusi sebesar 31,90% di tahun 2023, dari sebelumnya sebesar 24,68% di tahun 2022.

financing portfolio in 2023 derived from the type of Multipurpose Services Financing, this figure changed from 39.44% in 2022. Multipurpose Goods Financing contributes 31.90% in 2023, from 24.68% in 2022.

Dari sisi jenis kendaraan yang dibiayai, sebesar 46,03% adalah pembiayaan sepeda motor, menurun dari posisi 53,17% di tahun sebelumnya. Sisanya, sebesar 53,82% adalah pembiayaan mobil, turun/naik dari 46,63% pembiayaan mobil di tahun 2022. Adapun pembiayaan syariah baru berkontribusi sebesar 0,15%, dari 0,19% di tahun sebelumnya. Berikut perkembangan portofolio pembiayaan Perseroan, 2021 – 2023.

In terms of the type of vehicle financed, 46.03% was motorcycle financing, decreased from 53.17% in the previous year. The remaining 53.82% was car financing, decreased from 46.63% of car financing in 2022. Meanwhile, sharia financing only contributed 0.15%, from 0.19% in the previous year. The following is the development of the Company's financing portfolio, 2021 – 2023.

Portofolio Menurut Jenis Pembiayaan
Portfolio by Financing Type

Jenis Pembiayaan Financing Type	2023		2022		2021		Perubahan | Change - %	
	Rp Juta Rp Million	%	Rp Juta Rp Million	%	Rp Juta Rp Million	%	2023	2022
Pembiayaan Multiguna Barang Multipurpose Goods Financing	1.330.806	22,77%	1.129.397	24,68%	1.407.820	34,00%	17,83%	-19,78%
Pembiayaan Multiguna Jasa Multipurpose Services Financing	2.019.591	34,55%	1.804.410	39,44%	2.348.243	56,71%	11,93%	-23,16%
Pembiayaan Investasi Investment Financing	1.767.002	30,23%	908.671	19,86%	76.562	1,85%	94,46%	1.086,84%
Pembiayaan Modal Kerja Working Capital Financing	587.105	10,04%	562.655	12,30%	306.508	7,40%	4,35%	83,57%
Pembiayaan Jual Beli (Akad Murabahah) Sale and Purchase Financing (Murabahah Contract)	140.491	2,40%	170.287	3,72%	1.372	0,03%	-17,50%	-
Jumlah | Total	**5.844.995**	**100,00%**	**4.575.421**	**100,00%**	**4.140.505**	**100,00%**	**27,75%**	**10,50%**

Portofolio Menurut Jenis Pembiayaan Kendaraan
Portfolio by Vehicle Financing Type

Jenis Pembiayaan Financing Type	2023		2022		2021		Perubahan | Change - %	
	Rp Juta Rp Million	%	Rp Juta Rp Million	%	Rp Juta Rp Million	%	2023	2022
Pembiayaan Motor Motorcycle Financing	2.690.592	46,03%	2.432.891	53,17%	2.502.423	60,44%	10,59%	-2,78%
Pembiayaan Mobil Car Financing	3.145.830	53,82%	2.133.701	46,63%	1.636.710	39,53%	47,44%	30,37%
Pembiayaan Lainnya Other Financing	8.574	0,15%	8.829	0,19%	1.372	0,03%	2,89%	543,51%
Jumlah | Total	**5.844.995**	**100,00%**	**4.575.421**	**100,00%**	**4.140.505**	**100,00%**	**100,00%**	**10,50%**

Selaras dengan perkembangan kebutuhan pelanggan dan sesuai dengan program penurunan emisi dari kegiatan transportasi yang dijalankan Pemerintah Indonesia,

In line with the development of customer needs and in accordance with the emission reduction program from transportation activities run by the

Mendistribusikan Kinerja Ekonomi yang Optimal

Disbursing Optimal Economic Performance

Perseroan turut meluncurkan program pembiayaan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Program pembiayaan kendaraan ramah lingkungan ini mulai bergulir sejak kuartal ke 2 tahun 2023. Pada tahun pelaporan, portofolio pembiayaan kendaraan ramah lingkungan ini adalah sebesar Rp226 juta atau 0,0039% dari total portofolio di tahun 2023.

Uraian lebih lengkap mengenai perkembangan masing-masing jenis Pembiayaan dapat dilihat pada pembahasan "Tinjauan Operasional Segmen Usaha" - Analisa dan Pembahasan Manajemen bagian Laporan Tahunan, dari Laporan ini.

Government of Indonesia, the Company also launched a financing program for electric vehicles that are more environmentally friendly. This een vehicle (Electric motorcycle) financing program will start rolling out from the 2nd quarter of 2023. In the reporting year, this green vehicle financing portfolio is Rp226 million or 0.0039% of the total portfolio in 2023.

A comprehensive description of the development of each type of Financing is presented in the discussion "Business Segment Operational Review" - Management Analysis and Discussion section of the Annual Report, of this Report.

Ringkasan Kinerja Keuangan [OJK F.2]

Keberhasilan meraih peluang terbaik dari pulihnya perekonomian nasional, membuat Perseroan mencatatkan perbaikan kinerja keuangan, sebagaimana tercermin dari meningkatnya aset, pendapatan, dan laba tahun berjalan seperti tampak pada tabel berikut.

Financial Performance Summary [OJK F.2]

The success in seizing the best opportunity from the recovery of the national economy has enabled the Company to improve financial performance, as reflected in the increase in assets, revenue, and income for the year as described in the following table.

Ringkasan Kinerja Keuangan Perseroan (Rp Juta)

Summary of the Company's Financial Performance (Rp Million)

Uraian Description	2023		2022		2021	
	Target	Realisasi Realization	Target	Realisasi Realization	Target	Realisasi Realization
Pendapatan Revenues	1.960.412	1.995.410	1.695.359	1.694.505	1.615.210	1.570.983
Beban Expenses	1.660.769	1.672.801	1.534.400	1.412.256	1.493.542	1.416.441
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	230.755	236.407	124.213	197.603	89.297	110.063
Aset Assets	6.082.162	6.635.715	5.660.052	5.646.226	5.183.984	5.147.772
Pembiayaan Financing	5.217.356	5.844.995	5.030.083	4.575.422	4.392.000	4.140.505
Liabilitas Liabilities	4.446.402	4.939.793	4.237.331	4.131.194	3.930.378	3.802.383
Ekuitas Equity	1.635.760	1.695.922	1.422.721	1.515.032	1.253.606	1.345.389

Pada tahun 2023, Perseroan berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp2,00 triliun, naik 17,76% dari nilai sebesar Rp1,69 triliun di tahun 2022. Implementasi kebijakan efisiensi bersama dengan penerapan digital *processing* dalam menjaga kualitas pembiayaan maupun aspek operasional lainnya, membuat Perseroan

In 2023, the Company was able to record revenue of Rp2.00 trillion, an increase of 17.76% from Rp1.69 trillion in 2022. The implementation of efficiency policies with the application of digital processing in maintaining the quality of financing and other operational aspects, has enabled the Company to increase income for the year

mencatatkan kenaikan laba tahun berjalan sebesar 19,64% atau bertambah Rp38,81 miliar menjadi sebesar Rp236,41 miliar dari Rp197,60 miliar di tahun sebelumnya.

by 19.64% or an increase of Rp38.81 billion to Rp236.41 billion from Rp197.60 billion in the previous year.

Perolehan laba bersih tersebut juga melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2023. Sehingga Perseroan berhasil melampaui target capaian nilai laba bersih selama tiga tahun berturut-turut.

The net profit also exceeded the target set for 2023. Hence the Company managed to exceed the target of achieving net profit value for three consecutive years.

Kenaikan pendapatan tersebut didorong oleh kenaikan jumlah pembiayaan yang tumbuh 27,75% menjadi sebesar Rp 5,84 triliun dari Rp4,57 triliun di tahun sebelumnya. Pertambahan nilai pembiayaan, bersama dengan naiknya laba tahun berjalan, membuat aset Perseroan tumbuh 17,52% menjadi sebesar Rp6,64 triliun dari Rp5,65 triliun di tahun sebelumnya. Kenaikan aset tersebut diiringi oleh bertambahnya liabilitas dan ekuitas sebagai hasil dari meningkatnya laba tahun berjalan Perusahaan.

The increase in revenue was driven by an increase in total financing which grew 27.75% to Rp5.84 trillion from Rp4.57 trillion in the previous year. The additional value of financing, with the increase in income for the year increased the Company's assets by 17.52% to Rp6.64 trillion from Rp5.65 trillion in the previous year. The assets growth was accompanied by an increase in liabilities and equity as a result of the increase in the Company's income for the year.

Uraian lebih lengkap mengenai perkembangan kinerja keuangan dapat dilihat pada pembahasan "Tinjauan Keuangan" - Analisa dan Pembahasan Manajemen bagian Laporan Tahunan, dari Laporan ini.

A complete description of the development of financial performance is presented in the discussion of "Financial Review" - Management Analysis and Discussion section of the Annual Report, of this Report.

Distribusi Perolehan Nilai Ekonomi [GRI 201-1]

Peningkatan kinerja ekonomi, tersebut membuat Perseroan juga mencatatkan kenaikan perolehan nilai ekonomi, selain juga mencatatkan kenaikan jumlah distribusi perolehan nilai ekonomi, seperti disampaikan pada tabel berikut.

Distribution of Economic Value Gains [GRI 201-1]

The increase in economic performance has enabled the Company to increase economic value gains, and an increase in total distribution of economic value gains, as stated in the following table.

Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan dan Didistribusikan (Rp Juta) [GRI 201-1]
Direct Economic Value Generated and Distributed (Rp Million) [GRI 201-1]

Uraian Description	2023	2022	2021	Perubahan I Change - % 2023	 2022
Nilai Ekonomi Langsung Dihasilkan **Direct Economic Value Generated**					
Pendapatan Pembiayaan Konsumen, Modal Usaha, dan Sewa Pembiayaan - Neto Consumer Financing, Capital Financing, and Finance Lease Income	1.700.753	1.414.831	1.241.703	20,21%	13,94%
Pendapatan Bunga Bank Bank Interest Income	12.774	11.094	8.310	15,14%	33,50%

Mendistribusikan Kinerja Ekonomi yang Optimal

Disbursing Optimal Economic Performance

Uraian Description	2023	2022	2021	Perubahan | Change - %	
				2023	2022
Pendapatan Administrasi Administrative Income	41.284	45.516	83.750	-9,30%	-45,65%
Pendapatan Lain-Lain Other Income	240.599	223.064	237.220	7,86%	-5,97%
Hasil Penjualan Aset Tetap Proceeds from the Sale of Property and Equipment	1.401	1.018	1.272	37,60%	-19,95%
Jumlah Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan **Total Direct Economic Value Generated**	**1.996.811**	**1.695.523**	**1.572.255**	**17,77%**	**7,84%**
Nilai Ekonomi Langsung Didistribusikan **Direct Economic Value Distributed**					
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expense	593.561	563.850	510.697	5,27%	10,41%
Gaji dan Tunjangan Salaries and Benefits	378.391	356.283	308.655	6,21%	15,43%
Pembayaran Kepada Penyandang Dana: **Payments to the Financiers:**					
Pemegang Saham (Dividen) Shareholders (Dividend)	58.819	32.870	0	78,94%	100,00%
Bank (Bunga Pinjaman) Bank (Loan Interest)	303.815	254.617	287.778	19,32%	-11,52%
Jumlah Pembayaran Kepada Penyandang Dana: **Total Payment to Financiers:**	**362.634**	**287.487**	**287.778**	**26,14%**	**-0,10%**
Pembayaran kepada Pemerintah (PPh dan PPN) Payment to the Government (PPh and VAT)	73.935	55.095	19.103	34,20%	188,41%
Penyaluran Dana CSR Bagi Masyarakat Disbursement of CSR Funds to the Community	2.300*	2.636	3.139	-12,75%	-16,02%
Jumlah Nilai Ekonomi Langsung Didistribusikan **Total Direct Economic Value Distributed**	**1.410.821**	**1.265.351**	**1.129.372**	**11,50%**	**12,04%**
Nilai Perolehan Ekonomi yang Ditahan Sebelum Pembagian Dividen **Value of Economic Gains Withheld Before Dividend Payout**	**585.990**	**430.172**	**442.883**	**36,22%**	**-2,87%**
Nilai Ekonomi Langsung yang Ditahan **Direct Economic Value Retained**	**644.809**	**463.042**	**442.883**	**39,25%**	**4,55%**

Catatan: Biaya penyaluran dana CSR bagi masyarakat Tahun 2020 - 2023 merupakan realisasi biaya baik yang terlaksana maupun tidak terlaksana
Note: The cost of CSR funds disbursement to the community in 2020 - 2023 is the realization of costs both executed and not executed

Porsi terbesar dari jumlah nilai perolehan ekonomi yang didistribusikan adalah komponen beban umum dan administrasi, dengan porsi sebesar 42,07% sebesar Rp593,56 miliar dari total nilai distribusi tahun 2023 yang mencapai Rp1,41 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini dikontribusikan oleh naiknya beban promosi penjualan demi memastikan tercapainya target penyaluran pembiayaan.

The largest portion of the total distributed economic gains value is the general and administrative expense component, with a portion of 42.07% of Rp593.56 billion of total distribution value in 2023 reaching Rp1.41 trillion, an increase from the previous year. This was contributed by the increase in sales promotion expenses to ensure the achievement of financing distribution targets.

Porsi kedua terbesar dari nilai perolehan yang didistribusikan adalah komponen beban gaji dan tunjangan karyawan, dengan porsi sebesar 26,82% sebesar Rp378,39 miliar dari total nilai distribusi

The second largest portion of the distributed gains value is the component of employee salaries and benefits expenses, with a portion of 26.82% of Rp378.39 billion of total distribution value in 2023 reaching Rp1.41

tahun 2023 yang mencapai Rp1,41 triliun, naik dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen Perseroan dalam menjamin kesejahteraan para karyawan. Sementara porsi ketiga terbesar adalah komponen beban bunga. Pada tahun 2023, Perseroan kembali membagikan dividen kepada para pemegang saham, dengan jumlah total sebesar Rp58,82 miliar atau sebesar Rp17 per lembar saham.

trillion, up from the previous year. This illustrates the Company's high commitment in ensuring the wellbeing of employees. While the third largest portion is the interest expense component. In 2023, the Company will again distribute dividends to shareholders, with a total amount of Rp58.82 billion or Rp17 per share.

Setelah pendistribusian nilai perolehan ekonomi tahun 2023 total sebesar Rp1,41 triliun tersebut, Perseroan masih menahan nilai perolehan ekonomi tahun 2023 sebesar Rp644,81 miliar, yang akan digunakan untuk mengembangkan skala usaha. Jumlah tersebut berarti meningkat dari nilai perolehan ekonomi yang ditahan di tahun 2022, yakni sebesar Rp463,04 miliar.

After the distribution of the total economic gains value in 2023 of Rp1.41 trillion, the Company still holds the economic gains value in 2023 of Rp644.81 billion, which will be used to develop business scale, an increase from the value of economic gains held in 2022, which amounted to Rp463.04 billion.

Kontribusi Kepada Negara [GRI 207-1]

Perseroan senantiasa menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi terhadap pembangunan negara, baik dalam bentuk non-finansial maupun finansial. Kontribusi dalam bentuk non-finansial dilakukan diantaranya melalui partisipasi dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, yakni penyelenggaraan kegiatan literasi keuangan. Perseroan juga merealisasikan program CSR dengan membangun infrastruktur dasar sesuai dengan kebutuhan warga setempat di beberapa daerah operasionalnya.

Contribution to the State [GRI 207-1]

The Company strives to deliver its commitment to contribute to the nation development, both in non-financial and financial forms. Non-financial contributions are made, among others, through participation in increasing community financial inclusion, namely the implementation of financial literacy activities. The Company also realizes CSR programs by building basic infrastructure in accordance with the needs of local residents in several of its operational areas.

Sementara kontribusi secara finansial dilakukan melalui ketaatan dalam pembayaran pajak. Bagi Perseroan, ketaatan pembayaran pajak merupakan wujud nyata dukungan pencapaian tujuan keberlanjutan. Oleh karenanya, Perseroan senantiasa memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, Perseroan tidak menerima peringatan apapun atau sanksi signifikan terkait dengan perpajakan sampai dengan 31 Desember 2023 dari regulator.

While financial contributions are made through obedience in tax payments. For the Company, compliance with tax payments is a tangible form of support for achieving sustainability goals. As such, the Company strives to fulfill its tax payment obligations in accordance with prevailing laws and regulations. Hence, the Company did not receive any warning or significant sanctions from the regulator related to taxation until December 31, 2023.

Kontribusi keuangan Perseroan kepada Negara, yang menunjukkan total jumlah pajak disetorkan kepada negara senantiasa menunjukkan perbaikan, selaras dengan kinerja Perusahaan.

The Company's financial contribution to the State, which shows the total amount of tax deposited to the state, always shows improvement, in line with the Company's performance.

Berdaya Bersama Masyarakat

Empowered with the Community



Perseroan merealisasikan berbagai program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) sebagai bentuk kontribusi aktif terhadap masyarakat dan lingkungan. Melalui Program TJSL yang dijalankan, Perseroan terus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia maupun global.

As an active contribution to society and the environment, the Company realizes Social Environmental Responsibility (TJSL) programs. The Company continues to promote the achievement of the Indonesian and global Sustainable Development Goals (SDGs) through its CSR Program.

Masyarakat di sekitar wilayah operasional merupakan salah satu kelompok pemangku kepentingan utama yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha. Oleh karena posisinya yang begitu strategis, Perseroan senantiasa membangun hubungan yang positif dengan masyarakat dan berupaya semaksimal mungkin agar keberadaannya membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat. [GRI 3-3]

One of the key stakeholder groups that may affect business sustainability is the community surrounding the operational area. Considering its strategic position, the Company constantly nurtures strong relationships with the community and seeks to make its presence as beneficial to the community as feasible. [GRI 3-3]

Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai implementasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dilakukan oleh Perseroan melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* - CSR). Selain itu, Perseroan membuka saluran pengaduan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat apabila terdapat dampak negatif dari kegiatan operasional yang dijalankan. Setiap pengaduan akan dicari sumber masalahnya, sekaligus dicarikan alternatif penyelesaiannya.

The Company implements community empowerment programs as part of its Social Environmental Responsibility (TJSL) through its Corporate Social Responsibility (CSR) Program. Furthermore, the Company establishes a complaint channel that the public can use if the operational actions have an adverse impact. Each complaint will be investigated to determine the root of the problem and an alternative solution.

KEBIJAKAN UMUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN [GRI 3-3]

Dasar kebijakan Perseroan dalam merancang dan melaksanakan Program CSR diantaranya adalah:

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas, beserta peraturan-peraturan turunannya,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 (POJK 51) tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.03/2023 (POJK 3) tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan,

GENERAL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY [GRI 3-3]

The following are basis of the Company's policies in designing and implementing CSR Programs:

- Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies,
- Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2007 concerning Capital Investment,
- Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility (TJSL) of Limited Liability Companies, with its derivative regulations,
- Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 (POJK 51) concerning the Application of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies,
- Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.03/2023 (POJK 3) concerning Enhancing Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and the Public,
- Financial Services Authority Regulation No. 10/POJK.05/2019 regarding the Implementation of Sharia Financing Company Business and Sharia Business Units of Financing Companies,

Berdaya Bersama Masyarakat

Empowered with the Community

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah.

Perseroan juga telah memiliki kebijakan internal, yaitu Surat Kebijakan 087/SKB/CORSEC/07-19 tentang Bantuan Sosial Perusahaan. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan berbagai program TJSL yang berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, sosial dan lingkungan. Perseroan menjalankan berbagai program TJSL tersebut sebagai wujud dukungan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) baik secara nasional maupun global. [GRI 2-25]

Berlandaskan pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Kebijakan Internal tersebut, Perseroan menyusun rencana dan merealisasikan beragam program untuk memastikan tercapainya berbagai target kinerja pada aspek Tanggung Jawab Sosial Kemasyarakatan, sebagaimana disampaikan pada uraian berikut.

ORGANISASI PELAKSANA CSR

Fungsi pelaksana kegiatan CSR Perseroan adalah Departemen Corporate Social & ESG yang bertanggung jawab kepada Divisi Financial Planning & Investor Relation.

Program-program yang diselenggarakan Perseroan merupakan keputusan dan kebijakan yang diambil berdasarkan hasil diskusi internal departemen yang disusun di akhir tahun. Perseroan meyakini bahwa partisipasi karyawan dan masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan kegiatan sehingga program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat.

- Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council No. 123/DSN-MUI/XI/2018 concerning the Use of Funds That Cannot Be Recognized as Income for Sharia Financial Institutions, Sharia Business Institutions, and Sharia Economic Institutions.

The Company also has an internal policy on Corporate Social Assistance, Policy Letter 087/SKB/CORSEC/07-19. The policy manifests in the form of various TJSL programs focusing on education, health, community empowerment, social and environmental aspects. The Company implements various TJSL programs to help accomplish the Sustainable Development Goals (SDGs) on a national and global scale. [GRI 2-25]

Based on these laws, Government Regulations and Internal Policies, the Company plans and realizes various programs to ensure the achievement of various performance targets in the aspects of Social Community Responsibility, as stated in the following description.

CSR ORGANIZATIONS

The function of the Company's CSR activities is the Corporate Social & ESG Department, which is responsible to the Financial Planning & Investor Relation Division.

The programs organized by the Company are decisions and policies taken based on the results of internal departmental discussions prepared at the end of the year. The Company believes that employee and community participation is a benchmark for the success of activities, enabling the planned programs to properly run and provide maximum benefits to the local community.

Perseroan menyusun dan merealisasikan program CSR ke dalam 4 (empat) pilar kegiatan, yakni:
1. Pilar Kesehatan
2. Pilar Sosial & Lingkungan
3. Pilar Pendidikan
4. Pilar Pemberdayaan Masyarakat.

The Company compiles and realizes CSR programs into 4 (four) pillars of activities, namely:
1. Health
2. Social & Environmental
3. Education
4. Community Empowerment.

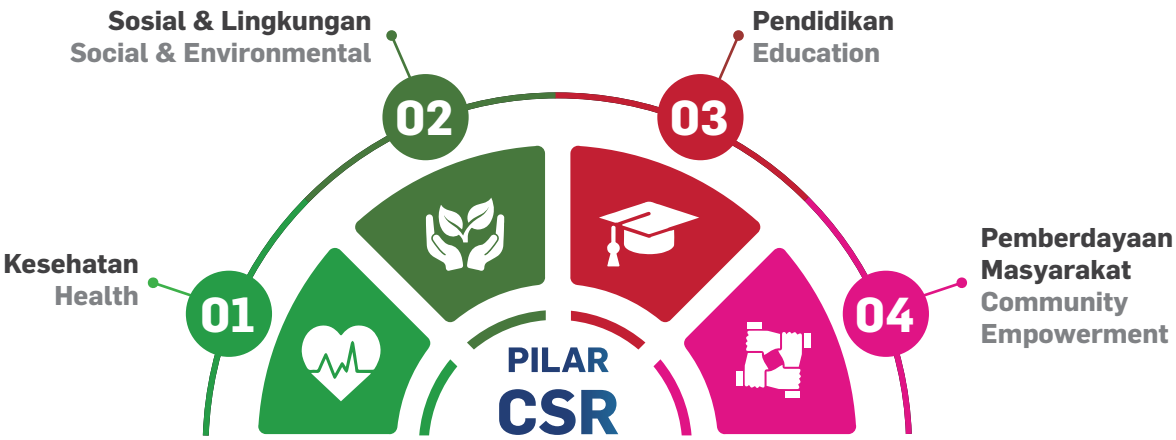

Pada tahun pelaporan, salah satu fokus kegiatan CSR Perseroan adalah bidang pendidikan serta sosial dan lingkungan. Hal itu mengacu pada kondisi umum pulihnya mobilitas masyarakat yang membuat kegiatan perekonomian diyakini akan terus menguat, sehingga masyarakat memerlukan program-program penguatan kompetensinya agar mereka dapat memaksimalkan momentum pertumbuhan perekonomian tersebut. Di luar kedua bidang tersebut, Perseroan juga tetap menyelenggarakan program-program CSR lain di bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

One of the focuses of the Company's CSR initiatives throughout the reporting year was education, as well as social and environmental aspects. This refers to the general condition of regaining public mobility, which leads to the belief that economic activities will continue to develop, therefore people seek programs to strengthen their competence in order to maximize the momentum of economic growth. Aside from these two areas, the Company continues to organize CSR programs in the areas of health and community empowerment.

REALISASI CSR DAN DUKUNGAN PENCAPAIAN TPB [OJK F.3]

Selama tahun 2023, Perseroan merealisasikan anggaran biaya program CSR sebesar Rp2,30 miliar, sementara pada tahun 2022 adalah sebesar Rp2,63 miliar.

Dalam menjalankan program CSR, Perseroan juga telah melakukan penyelarasan program dengan rumusan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia melalui pelaksanaan analisis risiko dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan CSR tersebut.

CSR REALIZATION AND SUPPORT FOR SDG ACHIEVEMENT [OJK F.3]

During 2023, the Company realizes a CSR program budget of Rp2.30 billion, while in 2022 was Rp2.63 billion.

In carrying out CSR programs, the Company has also aligned the program with the formulation of 17 Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia through the implementation of risk analysis and impacts arising from these CSR activities. In this analysis, CSR

Berdaya Bersama Masyarakat
Empowered with the Community

Analisis tersebut, kegiatan CSR tahun 2023 telah selaras dengan 14 dari 17 rumusan tujuan dalam TPB. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi berbagai program CSR terbukti membawa manfaat positif bagi masyarakat sekitar, meliputi pengembangan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan wawasan masyarakat. [OJK F.23]

activities in 2023 have been aligned with 14 of the 17 formulations of goals in the SDGs. This shows that the implementation of various CSR programs has proven to bring positive benefits to the surrounding community, including infrastructure development, meeting community needs and increasing community insight. [OJK F.23]

Rincian kegiatan, pembiayaan keselarasan program CSR dengan TPB selengkapnya disampaikan dalam tabel berikut: [OJK F.25] [203-2] [GRI 413-1]

Details of activities, financing for the alignment of CSR programs with SDGs are conveyed in the following table: [OJK F.25] [203-2] [GRI 413-1]

Realisasi Kegiatan CSR Tahun 2023
Realization of CSR Activities in 2023

No.	Program & Kegiatan Programs & Activities	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals	Alokasi Dana Budget Allocation (Rp juta/ Rp million)	Tanggal Kegiatan Activity Date	Pencapaian / Realisasi Achievement / Realization
	KESEHATAN I HEALTH				
1.	**Donor Darah** Blood Donor	3 GOOD HEALTH AND WELL BEING	43,08	9-21 Maret 2023 March 9-21, 2023 13 September 2023 September 13, 2023 4 Desember 2023 December 4, 2023	Kegiatan donor darah rutin yang ditujukan kepada karyawan, konsumen dan masyarakat sekitar Perseroan baik Kantor Pusat, Regional, Cabang maupun Pos yang bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) setempat. Total diperoleh **343** kantong darah. Routine blood donation activities for employees, consumers and communities around the Company both Head Office, Regional Offices, Branch Offices and Post, in collaboration with the local Indonesian Red Cross (PMI). A total of **343** bags of blood were obtained.
2.	**Pemeriksaan Kesehatan Pada Remaja** Medical Check-Up for Adolescents	3 GOOD HEALTH AND WELL BEING	14,77	20 Juni 2023 June 20, 2023	Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Palembang dalam rangka meningkatkan kepedulian remaja terhadap kesehatannya untuk mencegah risiko Penyakit Tidak Menular (PTM). This activity was carried out in the Palembang area in order to increase adolescent awareness of their health to prevent the risk of Non-Communicable Diseases (NCDs).

No.	Program & Kegiatan Programs & Activities	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals	Alokasi Dana Budget Allocation (Rp juta/ Rp million)	Tanggal Kegiatan Activity Date	Pencapaian / Realisasi Achievement / Realization
3.	***Medical Check Up***		5,95	29 Oktober 2023 October 29, 2023	Dalam rangka memperingati Bulan Inklusi Keuangan di Bulan Oktober, Perseroan memberikan kesempatan untuk masyarakat di wilayah Yogyakarta melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis. In commemoration of Financial Inclusion Month in October, the Company provides an opportunity for people in the Yogyakarta area to conduct free medical check-ups.
4.	**Pemeriksaan Gigi dan Mulut** **Dental and Oral Examination**		23,54	28 dan 30 November 2023 November 28 and 30, 2023	Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan dengan sasaran anak-anak yang berusia 3-6 tahun yang dimana peserta diberikan sosialisasi mengenai perawatan gigi, praktik mencuci gigi dengan benar serta melakukan pengecekan gigi dan mulut anak. This activity was carried out in West Jakarta and South Jakarta areas with the target of children aged 3-6 years where participants were given socialization about dental care, the practice of washing teeth properly and checking children's teeth and mouth.
SOSIAL DAN LINGKUNGAN | SOCIAL AND ENVIRONMENTAL					
1.	**CSR Hari Raya Imlek** **CSR on Chinese New Year**		9,36	1 Februari 2023 February 1, 2023	Kegiatan ini dilakukan di Panti Jompo Yayasan Guna Budi Bakti dan Panti Asuhan Bersama Kita Anugerah Indonesia, Medan untuk menyambut Hari Raya Imlek dengan memberikan donasi bantuan operasional. This activity was carried out at the Guna Budi Bakti Foundation Nursing Home and the Bersama Kita Anugerah Indonesia Orphanage, Medan to welcome Chinese New Year by donating operational assistance.

Berdaya Bersama Masyarakat
Empowered with the Community

No.	Program & Kegiatan Programs & Activities	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals	Alokasi Dana Budget Allocation (Rp juta/ Rp million)	Tanggal Kegiatan Activity Date	Pencapaian / Realisasi Achievement / Realization
2.	**Bantuan Kacamata Prasejahtera** **Glasses Assistance for Underprivileged**		566,05	Maret 2023 March 2023 Agustus 2023 August 2023 September 2023 September 2023 November 2023 November 2023 Desember 2023 December 2023	Kegiatan ini dilaksanakan selama Tahun 2023 di wilayah Makassar, Yogyakarta dan Bali. Perseroan memberikan bantuan sebanyak 1,500 kacamata kepada masyarakat prasejahtera di ketiga wilayah tersebut. The activities are carried out during 2023 in Makassar, Yogyakarta and Bali. The Company provided assistance with total of 1.500 glasses to underprivileged communities in these three regions.
3.	**Mendongeng Bersama Anak** **Storytelling for Children**		170,62	11 Maret - 3 April 2023 March 11 - April 3, 2023	Dalam rangka menyambut HUT WOM Finance ke 41 tahun, Perseroan mengadakan kegiatan Mendongeng Bersama Anak dengan tujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat sekitar Kantor Cabang khususnya anak-anak serta meningkatkan minat baca anak. To welcome WOM Finance's 41st anniversary, the Company held a Storytelling for Children activity with the aim of providing happiness to the community around the Branch Office, especially children and increasing children's interest in reading.
4.	**Ramadan 1444 H**		265,65	6-18 April 2023 April 6-18, 2023	Kegiatan ini merupakan acara rutin keagamaan tahunan yang dilaksanakan oleh Perseroan untuk memberikan bantuan perlengkapan sekolah kepada anak-anak kurang mampu di sekitar wilayah bisnis Perseroan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 18 Kantor Cabang dan Kantor Pusat. This activity is an annual religious routine event held by the Company to provide school supplies assistance to underprivileged children around the Company's business area. This activity is carried out by 18 Branch Offices and Head Office.

No.	Program & Kegiatan Programs & Activities	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals	Alokasi Dana Budget Allocation (Rp juta/ Rp million)	Tanggal Kegiatan Activity Date	Pencapaian / Realisasi Achievement / Realization
5.	**Hari Raya Waisak** **Vesak Day**		101,10	8-13 Juni 2023 June 8-13, 2023	Kegiatan keagamaan ini rutin dilakukan sebanyak satu kali dalam satu tahun. Tahun ini, Perseroan memberikan bantuan operasional untuk yayasan dan bantuan berupa sembako kepada masyarakat prasejahtera di sekitar 10 Kantor Cabang. This religious activity is routinely carried out once a year. This year, the Company provided operational assistance for foundations and assistance in the form of basic necessities to underprivileged communities in around 10 Branch Offices.
6.	**Idul Adha 1444 H**		249,40	29 Juni - 1 Juli 2023 June 29 - July 1, 2023	Perseroan rutin untuk membagikan masing-masing 150 kantong daging di sekitar 10 Kantor Cabang WOM Finance dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 H. The Company routinely distributes 150 bags of meat each in around 10 WOM Finance Branch Offices in commemoration of Eid al-Adha 1444 H.
7.	**HUT RI ke 78** **Indonesia's 78th Anniversary**		174,69	12-20 Agustus 2023 August 12-20, 2023	Dalam rangka memperingati HUT RI ke 78, Perseroan membagikan tempat sampah di sekitar 10 Kantor Cabang dengan tujuan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar serta membiasakan masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Selain itu, Perseroan juga melaksanakan lomba bersama masyarakat sebagai ciri khas perayaan HUT RI. In commemoration of the 78th Anniversary of the Republic of Indonesia, the Company distributed trash cans in around 10 Branch Offices with the aim of increasing public awareness of the cleanliness of the surrounding environment and familiarizing the public to sort waste according to its type. In addition, the Company also held a competition with the community as a hallmark of the Indonesian Independence Day.

Berdaya Bersama Masyarakat
Empowered with the Community

No.	Program & Kegiatan Programs & Activities	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals	Alokasi Dana Budget Allocation (Rp juta/ Rp million)	Tanggal Kegiatan Activity Date	Pencapaian / Realisasi Achievement / Realization
8.	**Hari Raya Natal** **Christmas**	10 REDUCED INEQUALITIES	307,57	9-23 Desember 2023 Desember 9-23, 2023	Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan sukacita dalam menyambut Hari Raya Natal. Perseroan mengajak anak-anak dari panti asuhan atau yayasan untuk melaksanakan *team building* dan berwisata di sekitar 11 Kantor Cabang WOM Finance. This activity was carried out to provide joy in welcoming Christmas Day. The Company invites children from orphanages or foundations to carry out team building and travel around 11 WOM Finance Branch Offices.
PENDIDIKAN | EDUCATION					
1.	***Talk Show*** **Kanker Payudara** **Breast Cancer Talk Show**	4 QUALITY EDUCATION 10 REDUCED INEQUALITIES	8,70	27 Februari 2023 February 27, 2023	Bekerjasama dengan Rumah Singgah Yayasan Kanker Payudara Indonesia, Perseroan melakukan sosialisasi dan praktik SADARI kepada masyarakat khususnya para perempuan di wilayah Kelurahan Kalibaru untuk meningkatkan pengetahuan mengenai Kanker Payudara, mendeteksi secara dini dan mencegah serta mengobati Kanker Payudara ini. In collaboration with the Indonesian Breast Cancer Foundation, the Company conducts socialization and practice of SADARI to the community, especially women in the Kalibaru Village area to increase knowledge about Breast Cancer, detect early and prevent and treat Breast Cancer.
2.	**Bantuan SPP Mahasantri Bekasi** **Assistance for SPP Mahasantri Bekasi**	4 QUALITY EDUCATION 10 REDUCED INEQUALITIES	48,91	14 Maret 2023 March 14, 2023	Perseroan memberikan bantuan SPP kepada 20 Mahasantri di Ma'Had Aly Attaqwa KH. Noer Alie Bekasi untuk meringankan beban mahasantri yang mengalami kendala dalam hal pembiayaan kuliah. The Company provided SPP assistance to 20 students in Ma'Had Aly Attaqwa KH. Noer Alie Bekasi to ease the burden on students who experience obstacles in terms of college financing.

No.	Program & Kegiatan Programs & Activities	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals	Alokasi Dana Budget Allocation (Rp juta/ Rp million)	Tanggal Kegiatan Activity Date	Pencapaian / Realisasi Achievement / Realization
3.	**Peresmian Ruang Ramah Anak** **Inauguration of Child Friendly Area**		34,21	30 Mei 2023 May 30, 2023	Perseroan bekerjasama dengan PMI Jakarta Utara membuat Ruang Ramah Anak pertama di Indonesia yang terdapat di kantor pelayanan kesehatan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada anak-anak agar mempunyai ruang untuk mengembangkan diri secara positif dan nyaman. The Company collaborates with PMI North Jakarta to create the first Child Friendly Area in Indonesia located in a health service office with the aim of providing opportunities for children to have space to develop themselves positively and comfortably.
4.	***Talk Show Public Speaking*** **Public Speaking Talk Show**		7,67	13 Juni 2023 June 13, 2023	Kegiatan ini dilaksanakan di SMA Negeri 82 Jakarta yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri murid-murid untuk berbicara di depan umum. Dalam kegiatan ini dimulai dengan pemaparan materi tentang *Public Speaking*, tes kepribadian diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan saat *Public Speaking* serta praktik langsung bersama dengan ahli. This activity was carried out at SMA Negeri 82 Jakarta which aimed to increase students' confidence to speak in public. This activity began with the presentation of material about Public Speaking, self-personality tests, to attest the advantages and disadvantages of Public Speaking and direct practice together with experts.
5.	**Talk Show Penanganan dan Pencegahan Dini Stroke** **Talk Show on Early Stroke Handling and Prevention**		8,69	18 Juli 2023 July 18, 2023	Talkshow kesehatan ini dilakukan di Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara dengan sasaran anak muda dan para orang tua. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai stroke mulai dari gejala hingga pencegahannya serta menginformasikan mengenai penerapan gaya hidup sehat. This health talk show was held in Cilincing, North Jakarta targeting young people and the elderly. This activity aims to increase knowledge about stroke from symptoms to prevention and inform about the application of a healthy lifestyle.

Berdaya Bersama Masyarakat
Empowered with the Community

No.	**Program & Kegiatan** Programs & Activities	**Tujuan Pembangunan Berkelanjutan** Sustainable Development Goals	**Alokasi Dana** Budget Allocation **(Rp juta/** Rp million)	**Tanggal Kegiatan** Activity Date	**Pencapaian / Realisasi** Achievement / Realization
6.	**Pelatihan Mendongeng untuk Masyarakat** **Storytelling Training for the Community**		7,48	25 Juli 2023 July 25, 2023	Kegiatan ini dilaksanakan di Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Barat dengan sasaran guru, penggiat literasi serta masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan para orang tua dan masyarakat dalam hal mendongeng sebagai sarana pembelajaran. This activity was carried out at the West Jakarta Library and Archives with the target of teachers, literacy activists and the community around the location of the activity which aimed to improve the skills of parents and the community in terms of storytelling as a learning tool.
7.	**Kunjungan ke Museum Batik Nasional** **Visit to National Batik Museum**		15,86	6 November 2023 November 6, 2023	Untuk memperingati Hari Batik Nasional, Perseroan mengajak murid-murid SMP Islam Al Bayan Wiradesa untuk berkunjung ke Museum Batik Pekalongan dengan tujuan meningkatkan kembali kecintaan pada budaya Indonesia yaitu Batik. To commemorate National Batik Day, the Company invites students of Al Bayan Wiradesa Islamic Junior High School to visit the Pekalongan Batik Museum with the aim of re-elevating love for Indonesian culture, namely Batik.
8	**Donasi Buku** **Book Donation**		42,66	25 Januari 2024 January 25, 2024	Dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat khususnya anak-anak, Perseroan memberikan donasi 1.000 buku ke perpustakan di RPTRA Ciganjur Berseri dan Rawa Badak Utara. To increase the public's interest in reading, especially children, the Company donated 1,000 books to libraries at RPTRA Ciganjur Berseri and Rawa Badak Utara.

PROGRAM CSR UNGGULAN TAHUN 2023 [GRI 203-2]

Perseroan juga merealisasikan berbagai program CSR yang menjadi unggulan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan. Berbagai program unggulan Perseroan dimaksud, diantaranya adalah:

1. Bidang Sosial dan Lingkungan
   - Mendistribusikan 1.500 kantong daging kurban kepada masyarakat disekitar wilayah 10 Kantor Cabang Perseroan dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1444 H/2023 M.
   - Dalam memperingati Hari Raya Waisak, Perseroan mendistribusikan bantuan operasional untuk vihara di sekitar 10 wilayah Kantor Cabang serta memberikan paket sembako untuk jemaat vihara yang membutuhkan.
   - Dalam rangka perayaan sukacita Natal Tahun 2023, Perseroan mengajak anak-anak Panti Asuhan di 10 Kantor Cabang untuk berwisata *outdoor* di tempat wisata lokal setempat.

2. Bidang Pendidikan
   - Memberikan 1.000 perlengkapan sekolah kepada siswa-siswi berupa tas, peralatan tulis, tumbler/botol minum dan *lunch box* di 19 pondok pesantren/yayasan Islam di Bulan Ramadan 1444 H/2023 M.
   - Melaksanakan kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan masing-masing sebanyak dua kali dalam satu tahun di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, Bandung dan Malang.

3. Bidang Kesehatan
   - Donor Darah bekerjasama dengan PMI setempat
   - Perseroan memberikan bantuan 1.500 kacamata untuk masyarakat prasejahtera di wilayah Makassar, Yogyakarta dan Denpasar.

FLAGSHIP CSR PROGRAMS IN 2023 [GRI 203-2]

The Company also realizes various excellent CSR programs in order to support the achievement of sustainability goals. The following are the Company's various flagship programs:

1. Social and Environmental Sector
   - Distributing 1,500 bags of sacrificial meat to communities around the area of 10 Branch Offices in commemoration of Eid al-Adha 1444 H/2023 M.
   - In commemorating Vesak Day, the Company distributed operational assistance for temples in around 10 Branch Office areas and provided food packages for temple congregations in need.
   - In celebration of the joy of Christmas in 2023, the Company invites Orphanage children in 10 Branch Offices to take outdoor tours in local entertainment venues.

2. Education Sector
   - Providing 1,000 school supplies to students in the form of bags, stationery, tumblers/drinking bottles and lunch boxes in 19 Islamic boarding schools/foundations in the month of Ramadan 1444 H/2023 M.
   - Carrying out Financial Literacy and Inclusion activities twice a year each in North Jakarta, East Jakarta, Bandung and Malang.

3. Health Sector
   - Blood Donation in collaboration with local PMI.
   - The Company provided 1,500 glasses assistance for underprivileged communities in Makassar, Yogyakarta and Denpasar.

Berdaya Bersama Masyarakat

Empowered with the Community

Bidang Sosial dan Lingkungan
Social and Environmental Sector



Bidang Pendidikan
Education Sector





Bidang Kesehatan
Health Sector





PENGADUAN MASYARAKAT [OJK F.24]

Perseroan senantiasa berupaya memitigasi dan mengatasi dampak kegiatan operasional terhadap masyarakat sekitar. Dampak negatif yang mungkin timbul antara lain: menurunnya kepercayaan pelanggan terhadap Perseroan, meningkatnya risiko kredit macet, terjadinya insiden penyitaan kendaraan akibat tunggakan cicilan, dan meningkatnya sikap spekulasi dalam mendapatkan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor.

Guna mengantisipasi terjadinya dampak negatif tersebut, Perseroan menyediakan saluran pengaduan melalui telepon, email, website/situs, surat, media sosial, *WhatsApp* atau menyampaikan secara langsung ke kantor operasional. Pengaduan yang dapat disampaikan tidak terbatas pada dampak operasional, namun termasuk pelanggaran etika, integritas, norma-norma dan dugaan pelanggaran peraturan atau tindakan yang mengganggu lingkungan hidup. Untuk tahun 2023, rekapitulasi pengaduan yang terdaftar adalah sebagai berikut:

PUBLIC COMPLAINT [OJK F.24]

The Company strives to mitigate and overcome the impact of operational activities on the surrounding community. Negative impacts that may arise include: decreased customer confidence in the Company, increased risk of bad debts, incidents of vehicle confiscation due to installment arrears, and increased speculation in obtaining motor vehicle ownership financing.

To anticipate negative impacts, the Company provides a complaint channel via telephone, email, website/site, letter, social media, WhatsApp or directly to the operational office. Complaints that can be submitted are not limited to operational impacts, but include violations of ethics, integrity, norms and alleged violations of regulations or actions that disturb the environment. For 2023, the recapitulation of registered complaints is as follows:

Jumlah Pengaduan Masyarakat dan Status Penyelesaian [OJK F.24]
Total Community Complaints and Settlement Status

Jenis Pengaduan Types of Complaints	2023			2022	2021
	Jumlah Pengaduan Total Complaints	Status Penyelesaian | Completion Status		Jumlah Pengaduan Total Complaints	Jumlah Pengaduan Total Complaints
		Selesai Resolved	Dalam Proses Penyelesaian Ongoing		
Kuartal 1 | Quarter 1	6	6	0	11	5
Kuartal 2 | Quarter 2	6	6	0	3	4
Kuartal 3 | Quarter 3	5	5	0	7	1
Kuartal 4 | Quarter 4	6	6	0	7	2
Jumlah Pengaduan | Total Complaints	**23**	**23**	**0**	**28**	**12**

PROGRAM LITERASI & INKLUSI KEUANGAN

Perseroan meyakini pentingnya literasi keuangan bagi bertumbuhnya industri pembiayaan secara kuat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dukungan Perseroan dalam upaya peningkatan literasi dan akses keuangan diwujudkan dengan pelaksanaan berbagai program literasi dan inklusi keuangan. Program terkait literasi dan inklusi keuangan diharapkan dapat mendukung pertumbuhan kekayaan finansial dan kesejahteraan masyarakat di berbagai pelosok Indonesia.

FINANCIAL LITERACY & INCLUSION PROGRAM

The Company believes in the importance of financial literacy for the growth of the financing industry in a strong and sustainable manner in the long term. The Company's support in efforts to increase financial literacy and access is realized by implementing various financial literacy and inclusion programs. Programs related to financial literacy and inclusion are expected to support the growth of financial wealth and welfare of people in various corners of Indonesia.

Realisasi Program Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2023
Realization of Financial Literacy and Inclusion Program in 2023

Inklusi Keuangan | Financial Inclusion

1. Perluasan akses pelanggan melalui pembukaan Kantor Cabang WOM Finance wilayah Jakarta Utara pada tanggal 23 Mei 2023 sebagai perluasan akses layanan keuangan Perseroan.

   Expanding customer access through the opening of the WOM Finance Branch Office in the North Jakarta area on May 23, 2023 as an expansion of access to the Company's financial services.



Berdaya Bersama Masyarakat

Empowered with the Community

2. Kegiatan Workshop dan Seminar UMKM dilaksanakan oleh Perseroan yang berlokasi di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Batu, Malang dengan sasaran para penggiat UMKM pada tanggal 19 Oktober 2023. Dalam kegiatan ini juga, perwakilan Perseroan menjelaskan mengenai produk yang dimiliki serta menginformasikan cara melakukan pengajuan produk Perseroan.



MSME Workshops and Seminars are carried out by the Company located at the Integrated Business Service Center for Micro, Small and Medium Enterprises Cooperatives in Batu, Malang with the target of MSME activists on October 19, 2023. In this activity, representatives of the Company explained about their products and informed how to submit the Company's products.

Literasi Keuangan | Financial Literacy

1. Literasi keuangan yang dilaksanakan oleh Perseroan bekerjasama dengan Pelangi Eka Nusa Foundation di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur tanggal 23 Juni 2023 mengambil tema "Pemanfaatan Teknologi dalam Pemasaran Produk". Kegiatan ini dihadiri oleh 61 peserta secara langsung.



Financial literacy carried out by the Company in collaboration with Pelangi Eka Nusa Foundation in Duren Sawit District, East Jakarta on June 23, 2023 took the theme "Utilization of Technology in Product Marketing". This activity was directly attended by 61 participants.

2. Literasi keuangan yang dilaksanakan Perseroan pada tanggal 20 September 2023 di Bandung dengan melibatkan penggiat UMKM dan mahasiswa di Politeknik Negeri Bandung. Acara ini mengangkat tema "Lebih Dekat Mengenal Perusahaan Pembiayaan" dimana terdapat 49 peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan ini.



Financial literacy carried out by the Company on September 20, 2023 in Bandung involving MSME activists and students at the Bandung State Polytechnic. This event raised the theme "Getting Closer to Know Financing Companies" which were participated by 49 participants.

Berpartisipasi dalam Pelestarian Lingkungan

Participate in Environmental Conservation



Melalui program *Sustainable Lifestyle* Perseroan senantiasa menerapkan kegiatan erasional ramah lingkungan elalui pengelolaan SDA yang efisien dan optimal.

Through the Sustainable Lifestyle program the Company continues to implement green operational activities through efficient and optimal management of natural resources.

Perseroan senantiasa berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan daya dukung lingkungan. Untuk mewujudkan partisipasi pelestarian lingkungan tersebut Perseroan menerapkan kegiatan operasional kantor yang ramah lingkungan melalui pengelolaan penggunaan kertas, pengelolaan energi listrik, bahan bakar minyak maupun air secara optimal. Hal tersebut selaras dengan slogan program S.E.E.N (*Save Earth, Environment and Nature*) yang ditujukan untuk mendukung tercapainya kelestarian dan perbaikan kualitas lingkungan.

The Company strives participate in environmental preservation and strengthening the resilience of the environment. To demonstrate its participation in environmental conservation, the Company implements ecologically friendly office operations such as optimal paper management, electrical energy, fuel oil and water management. This is consistent with the S.E.E.N (Save Earth, Environment, and Nature) program's slogan, which aims to support the achievement of sustainability and the enhancement of environmental quality.

Berpartisipasi dalam Pelestarian Lingkungan

Participate in Environmental Conservation

Dimulai pada tahun 2020, Perseroan menginisiasi program *Green Lifestyle* dengan melakukan kampanye ramah lingkungan kepada seluruh karyawan, baik Kantor Pusat maupun Cabang melalui *digital poster*. Perseroan juga menerapkan operasional kantor yang berpedoman pada prinsip 5R *(Refuse, Reduce, Reuse, Recycle & Rot)* dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Perseroan tidak memiliki dan mendirikan kantor cabang maupun menjalankan kegiatan operasional di daerah konservasi yang memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi. Adapun selama tahun 2023, Perseroan belum melaksanakan kegiatan usaha konservasi atau lainnya yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati. Kedepannya, Perseroan akan terus melakukan eksplorasi atas kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung keanekaragaman hayati. [GRI 3-3] [OJK F.9, F.10]

Since 2020, the Company initiated the Green Lifestyle program by conducting an environmentally friendly campaign for all employees, both Head Office and Branches through digital posters. The Company also implements the operations guided by the 5R (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle & Rot) in carrying out daily operational activities. The Company did not establish branch offices or carrying out operational activities in conservation areas that have a high level of diversity. Meanwhile, during 2023, the Company did not carry out conservation activities or other activities related to biodiversity. In the future, the Company will continue to explore activities that can support biodiversity. [GRI 3-3] [OJK F.9, F.10]

DASAR KEBIJAKAN PARTISIPASI PELESTARIAN LINGKUNGAN [GRI 3-3]

Dasar kebijakan penerapan program partisipasi pelestarian lingkungan Perseroan diantaranya adalah:

- Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Nomor 32/2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, beserta aturan-aturan turunannya.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Merujuk pada berbagai undang-undang dan peraturan tersebut, Perseroan menyusun kebijakan operasional dan program internal untuk memastikan tercapainya berbagai target kinerja pada aspek lingkungan. Adapun selama periode pelaporan, tidak ada pengaduan lingkungan hidup yang di terima oleh Perseroan melalui saluran pengaduan. [OJK F.16]

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN KERTAS

Perseroan memerlukan kertas sebagai salah satu sarana administrasi perkantoran, seperti korespondensi,

BASIS OF ENVIRONMENTAL CONSERVATION PARTICIPATION POLICY [GRI 3-3]

The following are basic policies for implementing the Company's environmental conservation program:

- Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (Law No. 32/2009).
- Law of the Republic of Indonesia No. 3 of 2014 concerning Industry, with its derivative regulations.
- Financial Services Authority Regulation (POJK) No.51/POJK.03/2017 concerning the Application of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies.

Referring to these various laws and regulations, the Company formulates operational policies and internal programs to ensure the achievement of various performance targets on environmental aspects. During the reporting period, the Company received no environmental complaints through the complaint channel. [OJK F.16]

PAPER MANAGEMENT AND CONSUMPTION

The Company needs paper as one of the means of office administration, such as correspondence, printing

pencetakan dokumen kegiatan usaha dan sebagainya. Dalam rangka mendukung implementasi program operasional kantor ramah lingkungan, Perseroan berupaya meningkatkan penggunaan material kertas yang bisa didaur ulang.

documents for business activities and others. To support the implementation of green office operational programs, the Company strives to increase the use of paper materials that can be recycled.

Penggunaan G-Suite Untuk Mengurangi Penggunaan Kertas [OJK F.5]

Perseroan menunjukkan partisipasi pelestarian lingkungan melalui pengurangan pemakaian kertas melalui penerapan digitalisasi proses bisnis dan mengadopsi konsep *paperless office* sebagaimana ditetapkan melalui Surat Kebijakan Nomor 047/SK/OPP/04-21 Tentang *Google Suite* versi 03.

Use of G-Suite to Reduce Paper Consumption [OJK F.5]

The Company's participation in environmental conservation is demonstrated by reducing paper consumption through the digitization of business processes and adoption of paperless office concept as stipulated in Policy Letter No. 047/SK/OPP/04-21 concerning Google Suite version 03.

Selain penggunaan aplikasi sistem kerja secara digital, Perseroan juga menerapkan *spirit* penghematan kertas dengan mewajibkan dilakukannya pengecekan dokumen dengan cermat, sehingga pencetakan dokumen hanya dilakukan sekali saja. Perseroan juga menerapkan pencetakan dokumen dilakukan secara bolak-balik, jika dimungkinkan. Spirit penghematan kertas ini terus disosialisasikan kepada segenap jajaran Perseroan.

Besides using digital work system applications, the Company also practices paper conservation by mandating meticulous document review, ensuring that document printing is done only once. The Company additionally implements back-and-forth document printing, as required. This paper-saving mindset is being instilled at all levels of the Company.

Mulai tahun 2022, Perseroan memberlakukan pencatatan konsumsi kertas dari seluruh cabang operasional dan bisnis unit. Pencatatan konsumsi kertas tersebut juga diiringi kampanye dan himbauan penghematan penggunaan kertas.

Since 2022, the Company has been recording paper consumption from all operational branches and business units. The recording of paper consumption was also accompanied by campaigns and mandates for paper consumption conservations.

Selama periode pelaporan, jumlah penggunaan kertas Perseroan adalah sebesar 19.628 rim, turun dari 21.024 rim di tahun 2022.

During the reporting period, the Company's total paper consumption was 19,628 reams, decreased from 21,024 reams in 2022.

Jumlah Penggunaan Kertas
Total Paper Consumption

Tahun | Year	**Jumlah (Rim)** | Quantity (Ream)
2023	19.628
2022	21.024
2021*	380

*) Konsumsi kertas Kantor Pusat. | Head Office paper consumption.

Berpartisipasi dalam Pelestarian Lingkungan

Participate in Environmental Conservation

PENGELOLAAN PENGGUNAAN AIR [OJK F.8]

Perseroan menggunakan air untuk berbagai keperluan domestik karyawan dan manajemen, seperti kebutuhan air minum, kebersihan, sanitasi, Berwudhu dan sebagainya. Air juga digunakan untuk konsumsi minum sehari-hari bagi karyawan.

Perseroan menyadari keterbatasan ketersediaan air bersih di area perkotaan karena semakin terbatasnya lahan resapan yang membuat sumber air tanah semakin berkurang, dan semakin berkurangnya sumber air baku yang dapat diolah oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) karena terkena pencemaran. Atas kondisi tersebut, Perseroan senantiasa melakukan kampanye hemat air dan menjaga konsisi alat-alat perkantoran yang menggunakan air agar tetap optimal dan efisien.

Selama tahun 2023, jumlah penggunaan air Perseroan yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah 32.355,59 meter kubik (Pengambilan air = Pembuangan air).

Perseroan tidak melakukan pengolahan air buangan dari pemenuhan kebutuhan MCK tersebut. Seluruh air yang digunakan, langsung disalurkan ke saluran pembuangan umum.

WATER CONSUMPTION MANAGEMENT [OJK F.8]

Water is used by the Company for various domestic purposes, including drinking water, cleanliness, sanitation, ablution, and others. Water is also used for employees' daily drinking needs.

The Company realizes the limited availability of clean water in urban areas due to the increasingly limited infiltration land which decreases groundwater sources, and the decreasing sources of raw water that can be treated by Regional Water Supply Companies (PDAMs) due to pollution. For these conditions, the Company strives to conduct water-saving campaigns and maintains the condition of office equipment that uses water to remain optimal and efficient.

During 2023, the Company's total water usage from Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) was 32,355.59 cubic meters (Water withdrawal = Water discharge).

The Company does not treat wastewater from meeting the needs of the MCK. All water used, directly channeled into the public sewer.

PENGELOLAAN ENERGI [OJK F.7]

Perseroan memanfaatkan dua sumber energi utama guna mendukung operasional bisnis, yaitu energi listrik dari PLN dan bahan bakar minyak (BBM). Untuk meningkatkan efisiensi dan mengelola biaya energi dari pembelian sumber energi tersebut Perseroan menjalankan berbagai inisiatif efisiensi energi, antara lain: pengaturan waktu *on/off* pendingin ruangan, pengaturan penggunaan lampu pada pagi dan siang hari, mematikan lampu dan piranti elektronik yang tidak digunakan, penggunaan lampu hemat energi/LED, hingga penggunaan panel kaca untuk memanfaatkan sinar matahari secara optimal guna meningkatkan partisipasi karyawan baik di kantor pusat dan cabang. Dalam efisiensi energi, Perseroan juga melakukan kampanye efisiensi energi melalui *email blast*.

ENERGY MANAGEMENT [OJK F.7]

The Company utilizes two main energy sources to support business operations, namely electrical energy from PLN and fuel oil (BBM). To improve efficiency and manage energy costs from purchasing these energy sources, the Company carries out various energy efficiency initiatives, including: setting the time of on/off air conditioning, setting the use of lights in the morning and afternoon, turning off lights and electronic devices that are not used, the use of energy-saving lamps/LEDs, to the use of glass panels to optimally utilize sunlight to enhance employee participation in both Head office and branches. In energy efficiency, the Company also conducts energy efficiency campaigns through email blasts.

Selama tahun 2023, total konsumsi energi listrik Perseroan adalah sebesar 22.851,17 Gigajoule, meningkat dari 22.520,37 Gigajoule di tahun 2022. Dasar penghitungan penggunaan energi listrik adalah pencatatan biaya listrik PLN sebagai penyedia atau pemasok energi listrik yang dikompilasikan dari pencatatan di Kantor Pusat dan di seluruh cabang.

During 2023, the Company's total electrical energy consumption was 22,851.17 Gigajoule, a increase from 22,520.37 Gigajoule in 2022. The basis for calculating the use of electrical energy is the recording of PLN electricity cost as a provider or supplier of electrical energy compiled from records at the Head Office and in all branches in Indonesia.

Sumber energi lain yang dipakai Perseroan adalah bahan bakar minyak (BBM), terutama untuk kendaraan operasional sebagai sarana transportasi dan untuk mengisi genset sebagai sumber energi listrik cadangan. Jenis bahan bakar yang dipakai adalah bensin (Pertamax/ Pertalite) dan solar. Perseroan juga menerapkan berbagai inisiatif kebijakan untuk mendukung efisiensi penggunaan BBM melalui efisiensi perjalanan dinas dan melakukan pemeliharaan kendaraan operasional secara berkala guna mengoptimalkan kinerja mesin. Perseroan juga mengefisienkan penyelenggaraan rapat tatap muka dengan memanfaatkan aplikasi teknologi informasi guna menekan konsumsi energi listrik maupun BBM.

Other energy sources used by the Company are fuel oil (BBM), specifically for operational vehicles as a means of transportation and to fill generators as a source of backup electrical energy. The types of fuel used are gasoline (Pertamax/Pertalite) and diesel. The Company also implements various policy initiatives to support the efficient use of fuel, including efficiency in business trips and carrying out periodic maintenance of operational vehicles to optimize engine performance. The Company also streamlines face-to-face meetings by utilizing information technology applications to reduce electricity and fuel consumption.

Adapun total konsumsi BBM pada seluruh area kegiatan operasional Perseroan adalah sebesar 5.727,63 Gigajoule, naik dari sebesar 5.138,21 kiloliter di tahun 2022. Dasar perhitungan penggunaan BBM adalah pencatatan yang dikeluarkan oleh para pengguna kendaraan operasional Perseroan.

The total fuel consumption in all areas of the Company's operational activities was 5,727.63 Gigajoule, up from 5,138.21 kiloliters in 2022. The basis for calculating fuel consumption is the recording issued by users of the Company's operational vehicles.

Jumlah konsumsi Energi di dalam Perusahaan [OJK F.6]
Total Energy Consumption within Organization
(dalam Gigajoule | in Gigajoule)

Jenis Energi Energy Type	Satuan Unit	2023	2022	2021
Penggunaan BBM Kendaraan Operasional Operational Vehicle Fuel Consumption	Gigajoule (GJ)	5.727,63	5.138,21	4.104,43
Penggunaan Listrik Electricity Consumption		22.851,17	22.520,37	23.021,68
Jumlah Konsumsi Energi **Total Energy Consumption**		**28.578,80**	**27.658,58**	**27.126,11**
Intensitas energi per karyawan **Energy intensity per employee**	**GJ/karyawan** **GJ/employee**	**12,2**	**11,5**	**11,2**

Catatan: Data tahun 2022 dan 2021 disajikan kembali karena adanya perubahan metode perhitungan.
Note: The 2022 and 2021 data are restated due to changes in the calculation method.

Berpartisipasi dalam Pelestarian Lingkungan
Participate in Environmental Conservation

PENGELOLAAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) [OJK F.11]

Sumber emisi GRK dari kegiatan operasional Perseroan ada empat, yakni: emisi langsung Pembakaran Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Mobil/Motor) untuk keperluan mobilisasi (Diesel/bensin/Avtur) untuk kendaraan dalam kontrol operasional perusahaan, emisi tidak langsung dari penggunaan listrik PLN dan emisi tidak langsung dari perjalanan bisnis.

Selama periode pelaporan, jumlah emisi GRK Perseroan adalah sebesar 5.995,89 ton CO_2eq, naik dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 5.864,45 ton CO_2eq.

GREENHOUSE GAS (GHG) EMISSIONS MANAGEMENT [OJK F.11]

The Company's operational activities generate four sources of GHG emissions, namely: direct emissions from the combustion of Motor Vehicle Fuel (Car/Motorcycle) for mobilization purposes (Diesel/gasoline/Avtur) for vehicles under the company's operational control, indirect emissions from PLN's electricity use and indirect emissions from business trips.

During the reporting period, the Company's total GHG emissions amounted to 5,995.89 ton CO_2 eq, an increase compared to 5,864.45 tons of CO_2eq in 2022.

Jumlah Emisi GRK Berdasarkan Jenis dan Sumber [OJK F.11]
Total GHG Emissions by Type and Source

(dalam Ton CO_2eq | in Ton CO_2eq)

No	Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021
Cakupan 1 Scope 1					
	Emisi GRK dari BBM Kendaraan Operasional GHG Emissions from Operational Vehicle Fuel	Ton CO_2eq	396,87	356,03	284,4
	Jumlah Emisi Cakupan 1 **Total Scope 1 Emission**		**396,87**	**356,03**	**284,4**
Cakupan 2 Scope 2					
	Emisi GRK dari Penggunaan Listrik GHG Emissions from Electricity Consumption	Ton CO_2eq	5.522,37	5.442,42	5.563,57
	Jumlah Emisi Cakupan 2 **Total Scope 2 Emission**		**5.522,37**	**5.442,42**	**5.563,57**
Cakupan 3 Scope 3					
	Emisi GRK dari Perjalanan Dinas Udara GHG Emissions from Airline Business Travel	Ton CO_2eq	76,65	66,00	-*
	Jumlah Emisi Cakupan 3 **Total Scope 3 Emission**				
	Jumlah Emisi GRK (Cakupan 1,2 & 3) **Total GHG Emission (Scope 1,2 & 3)**		**5.995,89**	**5.864,45**	**5.847,97**
	Intensitas emisi per karyawan **Emission intensity per employee**	Ton CO_2eq/karyawan Ton CO_2eq/employee	**2,5**	**2,4**	**2,4**

Catatan: Data tahun 2022 dan 2021 disajikan kembali karena adanya perubahan metode perhitungan.
*) Belum dilakukan perhitungan untuk data tahun 2021.

Note: The 2022 and 2021 data are restated due to changes in the calculation method.
*) No calculations have been made for 2021 data.

PENGELOLAAN EMISI ZAT ODS (*Ozone Depleting Substances*) [OJK F.12]

Menyadari bahwa refrigeran berdampak negatif terhadap lapisan ozon di atmosfer, selain menerapkan kebijakan penggunaan refrigerant ramah lingkungan pada seluruh fasilitas pendingin di seluruh area operasional dari jenis R32 dan R410 sesuai ketentuan yang berlaku, Perseroan memberlakukan pembatasan pengaturan suhu ruangan, di sekitar 25 – 28° C untuk mengurangi intensitas penambahan refrigerant. Selama periode pelaporan, jumlah pengisian ulang dan penambahan refrigeran AC adalah sebanyak 713 kilogram.

Emisi ODS dari Perawatan Alat Pemadam Kebakaran (APK)

Perseroan memberi perhatian besar pada upaya pencegahan risiko kebakaran, dengan menyediakan perlengkapan APK yang memadai. Dalam rangka memastikan keandalan APK yang tersedia, Perseroan melakukan inspeksi rutin terhadap kondisi APK, dan mengisi ulang material pemadam kebakaran dalam APK. Mayoritas APK yang dimiliki Perseroan menggunakan bahan pemadam Karbon Dioksida (Carbon Dioxide/CO_2) sebagai bahan pemadamnya, mengingat risiko utama yang harus diatasi adalah risiko kebakaran dari instalasi listrik.

Apabila pada saat inspeksi ternyata tekanan APK tidak memenuhi standar, maka dilakukan pengisian sampai batas yang ditetapkan dalam peraturan. Pengisian ulang juga akan dilakukan, manakala APK dimaksud sempat digunakan untuk memadamkan potensi kebakaran, maupun insiden kebakaran di area sekitar kegiatan operasional.

OZONE DEPLETING SUBSTANCES EMISSION MANAGEMENT [OJK F.12]

Realizing that refrigerants negatively affect the ozone layer in the atmosphere, in addition to implementing a policy of using green refrigerants in all refrigeration facilities in all operational areas of R32 and R410 types in line with applicable regulations, the Company imposes restrictions on room temperature regulation, around 25 – 28° C to reduce the intensity of refrigerant addition. During the reporting period, the amount of refilling and adding refrigerant to air conditioning was 713 kilograms.

ODS Emissions from Fire Extinguisher Maintenance (APK)

The Company pays great attention to fire risk prevention efforts, by providing adequate APK equipment. To ensure the reliability of the available APKs, the Company conducts regular inspections of the condition of APKs, and refills fire extinguishing materials in APKs. The majority of APKs owned by the Company utilize Carbon Dioxide (CO2) extinguishing agents, as the main risk that must be avoided is fire from electrical equipment.

If at the time of inspection, it turns out that the APK pressure does not meet the standards, then filling is carried out to the limit stipulated in the regulations. Recharging will also be carried out, when the APK was used to extinguish potential fires, as well as fire incidents in the area around operational activities.

Berpartisipasi dalam Pelestarian Lingkungan

Participate in Environmental Conservation

PENGURANGAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH [OJK F.14, F.15]

Untuk mengurangi limbah plastik kemasan minuman sekali pakai, Perseroan menyediakan dispenser dan/ air minum isi ulang di lingkungan kantor guna mendorong penggunaan botol minum atau *tumbler* oleh karyawan. Untuk itu, Perseroan senantiasa melakukan himbauan terkait dengan pembelian minuman dalam kemasan untuk karyawan guna meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai.

BIAYA LINGKUNGAN HIDUP

Guna mendukung upaya menjaga dan meningkatkan kualitas kelestarian lingkungan, di tahun 2023 Perseroan membelanjakan dana biaya lingkungan hingga sebesar Rp2 juta. Dana tersebut digunakan untuk mendukung implementasi program-program kampanye lingkungan Perseroan. [OJK F.4]

WASTE REDUCTION AND UTILIZATION [OJK F.14, F.15]

To reduce plastic waste of single-use beverage packaging, the Company provides dispensers and/ or refillable drinking water in the office environment to promote the use of drinking bottles or tumblers by employees. As such, The Company strives to appeal related to the purchase of packaged beverages for employees to minimize the use of single-use plastics.

ENVIRONMENTAL COSTS

To support efforts to maintain and improve the quality of environmental sustainability, the Company spent environmental costs of Rp2 million in 2023. The funds are used to support the implementation of the Company's environmental campaign programs. [OJK F.4]

Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Human Resource Management and Development



Meyakini sumber daya manusia merupakan aset paling berharga yang akan menjamin keberhasilan pencapaian tujuan dan keberlanjutan usaha, Perseroan merealisasikan program-program pengelolaan dan pengembangan kompetensi, memberlakukan sistem penilaian yang adil dan memberi paket remunerasi yang bersaing.

Considering that human resources are the most valuable assets for achieving goals and ensuring business sustainability, the Company implements management and competency development programs, a fair assessment system, and competitive remuneration packages.

Bagi Perseroan, sumber daya manusia merupakan penggerak roda kegiatan operasional sekaligus menjadi penentu tercapainya berbagai target kinerja, kemajuan bisnis maupun keberlangsungan usaha. Oleh karenanya, Perseroan senantiasa mengelola dan mengembangkan kompetensi seluruh jajaran SDM, dengan menerapkan proses perekrutan calon karyawan yang berkualitas, merealisasikan program pengembangan yang terarah, menerapkan sistem asesmen kinerja yang adil dan memberi paket remunerasi yang selaras dengan kinerja.

Human resources are the driving force behind the Company's operational activities, as well as the factors that determine the achievement of various performance targets, business progress, and business continuity. As such, the Company manages and develops the competence of all levels of human resources by implementing a process of recruiting qualified prospective employees, enacting a directed development program, implementing a fair performance assessment system, and providing performance-based remuneration packages.

Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Human Resource Management and Development

Seluruh upaya tersebut dijalankan agar kegiatan operasional Perseroan didukung oleh ketersediaan SDM yang berdedikasi tinggi serta memiliki kapasitas dan kompetensi yang mumpuni. Perseroan juga menargetkan diperolehnya SDM yang memiliki loyalitas dan visi untuk maju bersama Perseroan. Untuk itu, Perseroan terus berupaya menerapkan strategi pengelolaan dan pengembangan terbaik disamping terus berupaya membina hubungan kerja sama dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN SDM [GRI 3-3]

Kebijakan umum maupun kebijakan spesifik dalam pengelolaan SDM disusun dengan merujuk pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang disempurnakan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang tentang Cipta Kerja, peraturan-peraturan turunannya maupun praktik-praktik ketenagakerjaan yang umum dilakukan di Indonesia. Kebijakan Perseroan terkait SDM tertuang dalam *Policy Human Capital* yang meliputi perencanaan, seleksi, perekrutan, manajemen karir, remunerasi hingga jaminan sosial dan pensiun. Adapun tanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia berada di Direktorat *Human Capital.*

Kesetaraan Kesempatan Bekerja [OJK F.18]

Perseroan meyakini keberagaman adalah keniscayaan dan menjadikan kehidupan sosial menjadi lebih berwarna. Oleh karenanya Perseroan selalu menerapkan kesetaraan dalam setiap proses pengelolaan SDM baik dalam kesempatan bekerja, mendapatkan penilaian kinerja, kenaikan jenjang karir, pengembangan kompetensi, hingga remunerasi. Perseroan memberikan kesempatan yang sama untuk bekerja dan mengisi posisi atau jabatan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi para karyawan.

Penerapan kesetaraan tersebut merupakan bentuk ketaatan terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2022 Tentang

These efforts are undertaken to ensure that the Company's operating activities are supported by highly dedicated human resources with qualified capacity and competence. The company also aims to acquire human resources with loyalty and vision to help it grow. As such, the Company continues to strive to execute the best management and development strategies, as well as foster cooperative relationships and create a favorable work environment.

GENERAL POLICY ON HR MANAGEMENT [GRI 3-3]

General policies and specific policies in HR management are prepared by referring to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, which is refined through Law Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. concerning Job Creation, its derivative regulations and labor practices commonly carried out in Indonesia. The Company's policy related to HR is contained in the Human Capital Policy which includes planning, selection, recruitment, career management, remuneration to social security and pension. The responsibility for human resource management lies with the Directorate of Human Capital.

Working Opportunity Equality [OJK F.18]

The Company believes that diversity is a necessity for a vibrant social life. As such, the Company continually applies equality in every HR management process, both in employment opportunities, obtaining performance appraisals, career advancements, competency development, to remuneration. The Company provides equal opportunity to work and fill jobs or positions based on employees' ability and competency.

The application of equality is a form of compliance with Law No. 13 of 2003 on Manpower, Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law, Law No. 21 of 1999 on the Ratification of ILO Convention

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang- Undang No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention Number 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan), serta Panduan Kesetaraan dan Non Diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI).

Number 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (ILO Convention on Discrimination in Employment and Occupation), and Guidelines for Equality and Non-Discrimination in the Workplace in Indonesia (Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia).

Pengaturan Jam Kerja [OJK F.19]

Sebagai bagian dari Kebijakan Pengelolaan SDM, Perseroan juga memiliki kebijakan yang jelas tentang usia minimal karyawan maupun jam kerja karyawan. Kebijakan ini merupakan bentuk konkret dukungan Perseroan terhadap penghapusan pekerja anak dan kerja paksa. Perseroan tidak mempekerjakan pekerja anak maupun pekerja paksa sesuai dengan Peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Working Hours Regulation [OJK F.19]

As part of the HR Management Policy, the Company also has a clear policy regarding the minimum age of employees and employee working hours. This policy is a concrete form of the Company's support for the elimination of child labor and forced labor. The Company does not employ child or forced labor in accordance with prevailing laws and regulations.

STRATEGI *HUMAN CAPITAL*

Seiring dengan perkembangan bisnis, kemajuan teknologi dan era digitalisasi maka Human Capital juga harus mampu menangkap tantangan perkembangan teknologi dan bisnis yang penuh dengan persaingan. Tidak hanya kemampuan dan pengetahuan, kompetensi pun perlu dikembangkan agar karyawan siap menempati posisinya sesuai jabatannya. Sehingga Human Capital perlu melahirkan rencana strategis dan inovasi untuk menghadapi perubahan tersebut. Berikut ini adalah Key Initiatives dan rencana strategis Human Capital WOM Finance di tahun 2023:

HUMAN CAPITAL STRATEGY

Along with business development, technological advances and the era of digitalization, Human Capital must also be able to grasp the challenges of technological and business developments which are full of competition. Not only abilities and knowledge, competencies also need to be developed so that employees are ready to occupy their positions according to their position. Therefore, Human Capital needs to create strategic plans and innovations to face these changes. The following are the Key Initiatives and strategic plans for Human Capital WOM Finance in 2023:

Inisiatif Utama Key Initiatives	**Strategi** Strategy
Menciptakan budaya kerja yang positif **Creating a positive work culture** 	a. Menciptakan program yang bertujuan membangun komunikasi dan relasi yang baik antar pemimpin untuk meminimalisasi SILO. b. Optimalisasi HC Care Program sebagai konsultan dari karyawan. c. Promosi praktik- praktik kesehatan baik fisik maupun mental. d. Pembentukan komunitas/klub yang bermanfaat bagi karyawan. e. Menciptakan program-program yang bertujuan untuk membentuk budaya. a. Creating programs aimed at building good communication and relationships between leaders to minimize SILO. b. Optimization of HC Care Program as a consultant from employees. c. Promotion of health practices both physical and mental. d. Formation of communities/clubs that benefit employees. e. Creating programs aimed at shaping the culture.

Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Human Resource Management and Development

Inisiatif Utama Key Initiatives	**Strategi** Strategy
Pengembangan dalam penyediaan layanan Human Capital **Development in the provision of Human Capital services** 	a. Human Capital Integration System sebagai HC Super apps yang dapat melayani kebutuhan terkait SDM dalam satu aplikasi. b. Otomatisasi dan efisiensi proses di Human Capital. c. *Dashboard/report* Human Capital yang mudah untuk diakses, transparan, informatif dan *real time.* a. Human Capital Integration System as HC Super apps that can serve HR-related needs in one application. b. Process automation and efficiency in Human Capital. c. Human Capital dashboard/report that is easy to access, transparent, informative and real time.
Mendapatkan, mengembangkan dan mempertahankan karyawan yang tepat untuk menjadi pemimpin masa depan WOM **Acquire, develop and retain the right employees to become WOM's future leaders.** 	a. Membuat program-program *branding* untuk menarik minat karyawan yang berkualitas dapat bergabung di WOM Finance dan meningkatkan SLA dari proses *recruitment*. b. Menyiapkan program-program untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan atau kemampuan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. c. Merancang program *Employee Rewards, Appreciation & Recognition*. d. Merancang *journey* untuk program pengembangan karyawan. a. Create branding programs to attract qualified employees to join WOM Finance and improve SLAs of the recruitment process. b. Prepare programs to improve and increase the employees' knowledge or ability in accordance with company needs. c. Designing Employee Rewards, Appreciation & Recognition programs. d. Designing journeys for employee development programs.
Bersinergi dan berpartner dengan bisnis untuk membawa perubahan dan mendukung pertumbuhan bisnis **Synergize and partner with businesses to bring change and support business growth** 	a. Meningkatkan kapabilitas pemimpin di level manajerial untuk beradaptasi dengan digitalisasi dan mengembangkan kompetensi *"business acumen".* b. Human Capital turut berperan dalam mereview insentif karyawan untuk turut mendukung pertumbuhan bisnis. c. *Monitoring* produktivitas karyawan dan secara rutin mencari akar masalah dan merumuskan rencana kerja yang efektif untuk memecahkan permasalahan yang ada. a. Improve the capability of leaders at the managerial level to adapt to digitalization and develop "business acumen" competencies. b. Human Capital plays a role in reviewing employee incentive to support business growth. c. Monitoring employee productivity and routinely looking for the root of the problem and formulating an effective work plan to solve existing issues.

Sesuai dengan strategi tersebut, pada tahun 2023, Perseroan mengembangkan sumber daya manusia dengan berfokus pada upaya meningkatkan produktivitas agar mencapai proses kerja yang efektif dengan menerapkan strategi kerja yang melibatkan para pemimpin yang dapat diandalkan dan memanfaatkan teknologi dalam proses kerja Human Capital Perseroan, sebagai berikut:

In conformity with the strategy, the Company human resources development in 2023 is focusing on efforts to elevate productivity to achieve effective work processes by implementing work strategies that engage reliable leaders and utilize technology in WOM's Human Capital work processes, as follows:

1. Menerapkan strategi pengembangan para calon pemimpin (suksesor) dalam mempersiapkan *leader* di masa depan. Perencanaan suksesi atau yang lebih dikenal dengan istilah *succession planning* adalah strategi yang dibuat oleh perusahaan untuk mengembangkan segala potensi, talenta dan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan untuk mendapatkan calon-calon pemimpin perusahaan yang terbaik. Proses ini dimulai dari tahap rekrutmen sampai dengan mengembangkan talenta yang sudah ada.
2. Menstandarisasi program untuk meningkatkan budaya kerja, kemampuan, keahlian dan pengetahuan karyawan. Strategi pengembangan SDM juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja bahkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan.
3. Menerapkan strategi untuk meningkatkan proses kerja di Human Capital yang lebih efisien, cepat dan responsif. Digitalisasi dalam setiap proses human capital adalah salah satu fasilitas yang dipergunakan untuk mencapai strategi ini.

1. Implementing strategies for developing future leaders (successors) in preparing future leaders. Succession planning is a strategy to develop all the potentials, talents and abilities of employees to attain the best company leaders. This process starts from the recruitment stage to developing existing talents.
2. Standardize programs to improve employee culture, abilities, skills and knowledge. HR development strategies are also intended to improve employee performance and even loyalty to the company.
3. Implement strategies to improve work processes in Human Capital that are more efficient, fast and responsive. Digitalization in every human capital process is one of the facilities applied to achieve this strategy.

Program Utama SDM WOM Finance Tahun 2023
WOM Finance HR Main Program in 2023

Recruitment Branding Activity

Recruitment dan Psikotes Online

Learning Program

Talent Management Program

- *Talent Development Program: Management Trainee, Talent Pool Development Program, Key Position Development Program, WOM Managerial Program, WOM Senior Managerial Program.*
- *Talent Retention Program: Talent Talk, Talent Story, MT Convention, WOM Finance Master's Scholarship, Talent Achieved Program.*



Performance & Reward Program

- *Performance Appraisal Online* (Penilaian kinerja karyawan dilakukan secara online melalui Web MyW2U). | Online Performance Appraisal (Employee performance appraisal is done online via MyW2U Web).
- *Retirement Appreciation Program* (Penghargaan yang diberikan kepada karyawan pensiun berupa plakat dan logam mulia). | Retirement Appreciation Program (Awards given to retired employees in the form of plaques and precious metals).
- *WOM Counseling Program* (WOM Finance bekerjasama dengan Psikolog Professional untuk membantu karyawan yang memiliki issue terhadap kesehatan mental). | WOM Counseling Program (WOM Finance collaborates with Professional Psychologists to help employees who have mental health issues).
- Sarjana & Magister Scholarship (Program pemberian beasiswa S1/S2 kepada karyawan yang berhak.) | Bachelor & Master Scholarship (S1/S2 scholarship program for eligible employees).

Culture & Engagement Program

Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Human Resource Management and Development

MEMBINA HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS [OJK F.21]

Perseroan senantiasa berupaya menjalin hubungan industrial yang harmonis dengan karyawan, diantaranya dengan menggiatkan konsep kemitraan dan dialog rutin. Selain melaksanakan sesi pertemuan interaktif dengan seluruh jajaran secara rutin, Perseroan juga menyebarluaskan informasi tentang peraturan dan ketentuan ketenagakerjaan kepada seluruh karyawan agar mereka memahami hak dan tanggung jawabnya.

Sesi pertemuan interaktif tersebut merupakan sarana untuk menciptakan saluran komunikasi yang terbuka antara jajaran senior manajemen dan karyawan Perseroan. Komunikasi dua arah tersebut membantu terciptanya lingkungan kerja yang positif yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas karyawan sekaligus sebagai wujud pemenuhan hak-hak karyawan.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan belum memiliki Serikat Pekerja dan perjanjian kolektif berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Namun demikian, Perseroan memberlakukan Peraturan Perusahaan (PP) untuk mengatur hubungan kerjasama harmonis dengan seluruh karyawan. Peraturan Perusahaan mengatur tentang hak dan kewajiban karyawan serta hubungannya dengan manajemen, termasuk di dalamnya ketentuan apabila terjadi perselisihan perburuhan atau perkara hubungan industrial dengan karyawan. [GRI 2-30]

Sebagaimana tampak pada data demografi karyawan, jumlah karyawan pria dengan tugas utama di lapangan lebih mendominasi dibandingkan jumlah karyawan wanita dengan tugas utama di bagian administrasi. Dalam rangka menciptakan dan mengembangkan hubungan harmonis antar sesama karyawan pria dan wanita, Perseroan memberlakukan kebijakan perlindungan terhadap risiko tindakan asusila (*sexual harassment*), baik secara verbal maupun secara non verbal. Untuk mencegah terjadinya tindakan pelecehan tersebut, selain menjalankan sosialisasi kebijakan, Perseroan menyediakan saluran Pelaporan Tindakan Asusila yang mudah diakses oleh para karyawan,

BUILDING HARMONIOUS WORKING RELATIONSHIPS [OJK F.21]

The Company strives to establish harmonious industrial relations with employees, including by intensifying the concept of partnership and regular dialogue. In addition to regularly conducting interactive meeting sessions with all levels, the Company also disseminates information about labor rules and regulations to all employees to ensure they understand their rights and responsibilities.

The interactive meeting session is a means to create an open channel of communication between the senior ranks of management and employees of the Company. This two-way communication helps create a positive work environment that contributes to increasing employee productivity as well as a form of fulfilling employee rights.

As of December 31, 2023, the Company does not yet establish a Trade Union and collective agreement in the form of a Collective Labor Agreement (CLA). However, the Company enforces Company Regulations (PP) to regulate harmonious cooperative relations with all employees. Company Regulations stipulate the rights and obligations of employees and their relationship with management, including provisions in the event of labor disputes or industrial relations cases with employees. [GRI 2-30]

As can be seen in the employee demographic data, the number of male employees with main duties in the field dominates more than the number of female employees with main duties in the administration. To create and develop harmonious relationships between male and female employees, the Company enforces a policy of protection against the risk of sexual harassment, both verbally and non-verbally. To prevent such acts of harassment, apart from carrying out policy socialization, the Company provides Immoral Acts Reporting channels that are easily accessible to employees, particularly female employees who have a high risk of being victims of such acts. Every report that comes in will be

terutama karyawati yang memiliki risiko tinggi sebagai korban tindakan dimaksud. Setiap laporan yang masuk akan segera ditindak lanjuti dan diselesaikan, dimana jika dapat dibuktikan dan diperkuat oleh adanya saksi, pelaku tindakan asusila akan dikenai sanksi tegas, baik berupa pemberhentian hubungan kerja, bahkan proses hukum.

immediately followed up and resolved, where if it can be proven and strengthened by witnesses, perpetrators of immoral acts will be subject to strict sanctions, both in the form of termination of employment, and even legal proceedings.

Dibandingkan 8 kasus pada tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2023 terdapat 9 kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan dengan baik dengan tidak mengesampingkan hak dan kewajiban karyawan melalui jalur Bipartit maupun tripartit dengan melibatkan mediasi dari dinas ketenagakerjaan.

Compared to 8 cases in the previous year, during 2023, 9 cases were reported on industrial relations disputes that have been properly resolved, by not eliminating the rights and obligations of employees, through bipartite and tripartite channels with mediation from the manpower office.

REKRUTMEN DAN *TURNOVER* [GRI 401-1]

Proses Rekrutmen dilakukan dengan memberikan kesempatan setara kepada semua warga negara untuk bergabung dan berkarya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Melalui proses seleksi yang transparan, Perseroan akan memilih kandidat sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki agar selaras dengan kebutuhan Perseroan dan tidak mentolerir praktik-praktik jalan belakang atau kandidat titipan.

RECRUITMENT AND TURNOVER [GRI 401-1]

The recruitment process is carried out by providing equal opportunities to all citizens to join and work in line with the required qualifications. Through a transparent selection process, the Company will select candidates according to their capacity and competence to be in line with the Company's needs and not tolerate back-of-the-back practices or confiding candidates.

Sebagai bagian dari pemenuhan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Perseroan berupaya untuk merekrut tenaga kerja lokal, yakni penduduk yang berada di sekitar kegiatan operasional Perseroan, baik berada dalam satu provinsi maupun satu kabupaten. Dari data kependudukan para karyawan di lapangan didapatkan kesimpulan bahwa 100% karyawan berasal dan tinggal di sekitar lokasi mereka bertugas. Dengan demikian, masyarakat sekitar tetap dapat merasakan manfaat keberadaan Perseroan.

As part of its Social and Environmental Responsibility (TJSL), the Company seeks to hire local workers, i.e., residents near the Company's activities in one province and one district. Based on employee demographic data, it was determined that 100% of employees originated from and lived near the location they served. As such, the local community continues to reap the benefits of the Company's presence.

Selama tahun 2023, Perseroan merekrut 524 orang karyawan baru. Jumlah tersebut naik dibanding rekrutmen tahun 2022, yang mencapai 492 orang. Komposisi karyawan baru hasil rekrutmen tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin, rentang usia dan wilayah kerja disampaikan dalam tabel-tabel berikut:

During 2023, the Company recruited 524 new employees. This number is up compared to the recruitment in 2022, which reached 492 employees. The composition of new employees recruited in 2023 by gender, age range and work area are presented in the following tables.

Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Human Resource Management and Development

Komposisi Karyawan Baru [GRI 401-1]
New Employee Composition

Keterangan | Description	Tahun | Year		
	2023	2022	2021
Jenis Kelamin | Gender			
Pria | Male	355	319	460
Wanita | Female	169	173	161
Jumlah | Total	**524**	**492**	**621**
Lokasi Kerja | Work Location			
Kantor Pusat | Head Office	280	315	380
Kantor Cabang | Branch Office	168	141	209
Kantor Selain Kantor Cabang | Sub Branch Office	76	36	32
Kantor Layanan | Service Office	0	0	0
Jumlah | Total	**524**	**492**	**621**
Usia | Age			
s/d 24 tahun | up to 24 years old	227	182	176
25 s/d 34 tahun | 25 to 34 years old	260	268	339
35 s/d 49 tahun | 35 to 49 years old	34	39	103
≥50 tahun | ≥50 years	3	3	3
Jumlah | Total	**524**	**492**	**621**

Selain melakukan rekrutmen, Perseroan memproses berhentinya hubungan kerja dengan sejumlah karyawan dengan berbagai alasan yang dibenarkan undang-undang. Komposisi karyawan berhenti atau meninggalkan Perseroan berdasarkan jenis kelamin, rentang usia dan wilayah kerja selama tahun 2023 disampaikan dalam tabel-tabel berikut:

Aside from recruitment, the Company processes the termination of employment with a number of employees for various reasons justified by law. The composition of employees quitting or leaving the Company based on gender, age range and working area during 2023 is presented in the following tables:

Komposisi Karyawan Keluar / Meninggalkan Perseroan [GRI 401-1]
Composition of Employees Leaving the Company

Keterangan | Description	Tahun | Year		
	2023	2022	2021
Jenis Kelamin | Gender			
Pria | Male	478	385	596
Wanita | Female	126	132	208
Jumlah | Total	**604**	**517**	**804**
Lokasi Kerja | Work Location			
Kantor Pusat | Head Office	119	218	305
Kantor Cabang | Branch Office	392	270	453
Kantor Selain Kantor Cabang | Sub Branch Office	93	29	46
Kantor Layanan | Service Office	0	0	0
Jumlah | Total	**604**	**517**	**804**
Usia | Age			
s/d 24 tahun | up to 24 years old	47	52	44
25 s/d 34 tahun | 25 to 34 years old	280	267	371
35 s/d 49 tahun | 35 to 49 years old	239	174	339
>=50 tahun | >=50 years	38	24	50
Jumlah | Total	**604**	**517**	**804**

Berdasarkan jumlah karyawan yang masuk dan keluar/meninggalkan berikut disampaikan perhitungan tingkat perputaran karyawan atau *turnover* selama tahun 2023. Selama tahun 2023, tingkat perputaran karyawan (*turnover*) Perseroan adalah sebesar 25,87%, naik dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 24,60%.

Based on the number of employees joining and leaving, the following is the calculation of employee turnover rates during 2023. The Company's turnover rate was 25.87% in 2023, an increase compared to 24.60% in 2022.

Jumlah dan Penyebab Karyawan Berhenti/Meninggalkan Perseroan [GRI 401-1]
Number and Causes of Employees Quitting/Leaving

Penyebab | Cause	**Tahun** | Year		
	2023	**2022**	**2021**
Pensiun | Pension	7	20	19
Meninggal Dunia | Passed-away	7	21	11
Mengundurkan Diri Atas Permintaan Sendiri | Resign at one's own request	447	429	551
Diberhentikan | Terminated	143	124	223
Sub Total Karyawan Berhenti | Sub Total Quitting Employees	604	594	804
Jumlah Karyawan Masuk | Total New Hiring Employees	524	593	621
Jumlah Karyawan di Awal Tahun | Total Employees at the Beginning of the Year	2.415	2.416	2.599
Jumlah Karyawan di Akhir Tahun | Total Employees at the End of the Year	2.335	2.415	2.416
Tingkat *Turnover* | Turnover Rate	**25,87%**	**24,60%**	**33,28%**

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA [OJK F.22] [GRI 404-1, 404-2]

Perseroan meyakini bahwa pengembangan kompetensi seluruh karyawan merupakan salah satu modal bagi tumbuh dan berkembangnya skala usaha, melalui peningkatan daya saing. Oleh karenanya, Perseroan secara berkala menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pengembangan bagi karyawan agar tujuan standardisasi dan upaya meningkatkan kemampuan serta kompetensi karyawan dapat tercapai. Melalui program ini, Perseroan mendorong seluruh jajaran karyawan untuk mengembangkan kompetensi yang akan sangat bermanfaat bagi pengembangan karir mereka.

Perseroan memiliki *Learning Framework* yang terdiri dari *"WOM on Boarding Program"* yang merupakan salah satu pelatihan wajib bagi para rekrutan baru. Tujuan program ini adalah sebagai sarana meningkatkan *engagement* dan internalisasi nilai-nilai Perseroan pada karyawan yang baru bergabung serta memberikan pemahaman awal terkait tanggung jawab yang akan dijalankan sesuai dengan fungsinya. Sebagai kelanjutan dari *WOM On Boarding Program* dan untuk meningkatkan

TRAINING AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT [OJK F.22] [GRI 404-1, 404-2]

The Company considers that employees competency development is one of the capitals for growth and expansion of the business scale by boosting competitiveness. As such, the Company regularly organizes various training and development programs for employees to achieve the goal of standardization and efforts to improve employee ability and competence. The Company urges all levels of employees to gain competencies that will be highly valuable to their career growth through this program.

The Company has a Learning Framework consisting of the "WOM on Boarding Program" which is one of the mandatory trainings for new recruits. The purpose of this program is as a means of enhancing engagement and internalization of the Company's values in newly joined employees and providing an initial understanding of the responsibilities that will be carried out in line with their functions. As a continuation of the WOM On Boarding Program and to improve employee competence,

Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Human Resource Management and Development

kompetensi karyawan program pengembangan juga diberikan untuk meningkatkan *Functional Skills* maupun *Behavioral Skill.*

a development program is also provided to improve Functional Skills and Behavioral Skills.

Perseroan memberikan program pengembangan karir yang dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kompetensi *next level* dalam beberapa Program *Development* seperti *Talent Pool Development Program, Key Position Development Program, Management Trainee*, WOM *Managerial Program* dan WOM *Senior Managerial Program.*

The Company provides career development programs that are implemented to support the improvement of next level competencies in several Development programs, such as the Talent Pool Development program, Key Position Development program, Management Trainee, WOM Managerial Program and WOM Senior Managerial Program..

Learning Management System (LMS) dikembangkan untuk mengoptimalkan proses pengembangan kompetensi dan pengetahuan seluruh karyawan. Dengan adanya LMS mampu mendukung proses pelatihan yang lebih efektif dan proses pencatatan *database* karyawan yang lebih komprehensif.

Learning Management System (LMS) was developed to optimize the process of developing competencies and knowledge of all employees. With the LMS, it is able to support a more effective training process and a more comprehensive employee database recording process.

Selama periode 2023, Perseroan tetap menerapkan berbagai metode pembelajaran, seperti *Self Learning, Lecturing, Video Micro Learning, Focus Group Discussion, On Job Training, Team Building* serta *Coaching and Mentoring.* Disamping metode pembelajaran tersebut, guna mendukung proses pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, maka Perseroan juga menyajikan beberapa *gamification training* yang dapat diimplementasikan di setiap program pelatihan.

During the 2023, the Company continued to apply various learning methods, such as Self Learning, Lecturing, Video Micro Learning, Focus Group Discussion, On Job Training, Team Building and Coaching and Mentoring. In addition to these learning methods, to support a more interesting and interactive learning process, the Company also presents several gamification trainings that can be implemented in each training program.

Selama tahun 2023, Perseroan menyelenggarakan 573 *batch* pelatihan dan menjangkau hingga 75.549 peserta, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang terlaksana 291 *batch* diikuti oleh 22.671 peserta. Uraian kegiatan pengembangan kompetensi termasuk rata-rata jam pelatihan karyawan sesuai dengan jenis kelamin dan level jabatan adalah sebagai berikut: [GRI 404-1, 404-2]

During 2023, the Company held 573 batches of training and reached up to 75.549 participants, an increase compared to 2022 which was carried out in 291 batches attended by 22,671 participants. The description of competency development activities including the average employee training hours according to gender and position level is as follows: [GRI 404-1, 404-2]



Perkembangan Rata-Rata Jam Pelatihan [GRI 404-1]
Average Training Hours
(Jam per Karyawan | Hour per Employee)

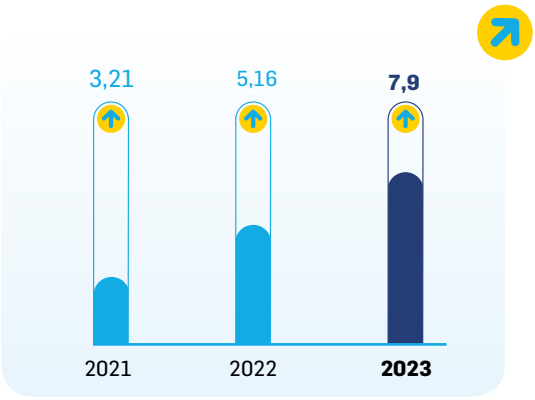

Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Human Resource Management and Development

Rata-rata Jam Pelatihan Berdasarkan Jenis Kelamin [GRI 404-1]
Average Training Hours by Gender
(Jam per Karyawan | Hour per Employee)

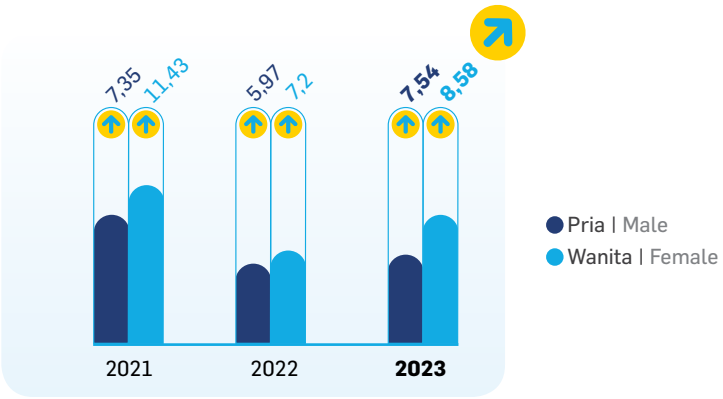

Rata-rata Jam Pelatihan Berdasarkan Jabatan [GRI 404-1]
Average Training Hours by Job Title
(Jam per Karyawan | Hour per Employee)

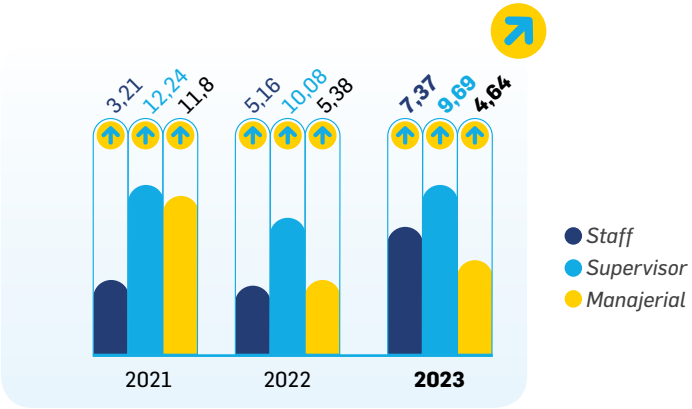

Selama periode pelaporan, Perseroan mengucurkan dana sebesar Rp3,84 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yang senilai Rp3,44 miliar, sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut:

During the reporting period, the Company disbursed funds amounting to Rp3.84 billion, an increase from the previous year of Rp3.44 billion, as shown in the following graph:



PENILAIAN KINERJA DAN JENJANG KARIR [GRI 404-3]

Perseroan melakukan penilaian atau review atas kinerja karyawan secara berkala sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja karyawan. Melalui penilaian karyawan, Perseroan berupaya memotivasi mereka agar mengeluarkan seluruh kompetensinya secara optimal agar dapat meraih jenjang karir yang lebih tinggi. Perseroan juga menyelenggarakan program manajemen talenta dan suksesi yang merupakan proses menyiapkan dan mengembangkan karyawan bertalenta sehingga siap meraih sukses untuk kemudian menempati posisi-posisi penting di Perseroan.

Perseroan melakukan penilaian kinerja terhadap seluruh karyawan di setiap jenjang jabatan secara berkala dengan mengedepankan komunikasi *one on one* antara karyawan dengan atasan. Dalam rangka mempertahankan kinerja, Direktorat Human Capital bekerjasama dengan unit kerja terkait memastikan keselarasan antara strategi dan target Perseroan dengan *Key Performance Indicator* (KPI) yang menjadi target unit kerja dan karyawan, yang kemudian dituangkan ke dalam *Individual Performance Planning* (IPP). Kinerja setiap karyawan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dilaporkan secara bulanan melalui sistem laporan berkala dan sistem *rank grading* untuk

PERFORMANCE APPRAISAL AND CAREER PATH [GRI 404-3]

The Company conducts periodic appraisals or reviews of employee performance as a form of appreciation for employee performance. Through employee assessment, the Company strives to motivate them to bring out all their competencies optimally in order to achieve a higher career path. The Company also organizes talent management and succession programs which are the process of preparing and developing talented employees to ensure that they are ready to achieve success and then occupy important positions in the Company.

The Company conducts performance appraisals of all employees at each level of position periodically by prioritizing one-on-one communication between employees and superiors. To maintain performance, the Directorate of Human Capital collaborates with related work units to ensure alignment between the Company's strategies and targets with Key Performance Indicators (KPIs) that are targeted by work units and employees, which are then cascaded into Individual Performance Planning (IPP). The performance of each employee related to the Company's business activities is reported monthly through a periodic report system and rank grading system to ensure an evaluation process

Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Human Resource Management and Development

memastikan adanya proses evaluasi atas pencapaian kinerja dan tindakan koreksi untuk mengatasi kendala-kendala yang harus diatasi.

of performance achievements and corrective actions to overcome obstacles that must be resolved.

Perseroan menyelenggarakan penilaian kinerja tengah tahun dan akhir tahun, diawali dengan *self appraisal,* kemudian dilanjutkan dengan mekanisme penilaian kinerja secara berjenjang. Dalam beberapa tahun ini, meski sebagian karyawan menjalankan pekerjaan dari rumah (*Work from Home*/WFH), program penilaian kinerja tetap berjalan, karena Perseroan memanfaatkan fitur *G-Suite* (*G-Sheet* dan *G-Drive*) untuk memastikan seluruh kinerja karyawan dinilai, dan kemudian didokumentasikan secara digital.

The Company conducts mid-year and year-end performance appraisals, starting with self-appraisal, then continued with a tiered performance appraisal mechanism. In recent years, even though some employees have been working from home (WFH), the performance appraisal program has been organized, as the Company utilizes G-Suite features (G-Sheet and G-Drive) to ensure that all employee performance is evaluated, and then digitally documented.

Hasil penilaian kinerja menjadi faktor penting dalam penentuan pengembangan diri karyawan, jenjang karir dan penetapan remunerasi karyawan serta menjadi pertimbangan dalam pemberian sanksi, apabila diperlukan. Perseroan juga menyediakan program khusus, yakni pra-jabatan bagi para karyawan yang mendapatkan promosi untuk menduduki jenjang manajemen puncak, yakni Kepala Divisi maupun menjadi Direksi.

The results of performance appraisals are an important factor in determining employee self-development, career path and determining employee remuneration, as well as being considered in providing sanctions, if necessary. The Company also provides a special program, namely pre-service for employees who get promotions to occupy the top management level, namely Division Head or become Directors.

Hasil penilaian atau *review* karyawan selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

The full results of employee appraisals or reviews are presented in the following table:

Tinjauan Kinerja Karyawan dan Jenjang Karir [GRI 404-3]
Review of Employee Performance and Career Path

Tahun Year	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Peninjauan Review Total Employees Reviewed	Hasil Penilaian dan Relevansi Pengembangan Karir Assessment Results and Relevance of Career Development					
		Promosi (Orang) Promotion (Person)	%	Rotasi/ Mutasi (Orang) Rotation / Mutation (Person)	%	Demosi (Orang) Demotion (Person)	%
2023	1.175 Karyawan (50,32% dari total karyawan) 1,175 employees (50.32% of total employees)	384	16,44%	746	31,95%	45	1,93%
2022	912 Karyawan (37,97% dari total karyawan) 912 Employees (37.97% of total employees)	325	13,53%	526	21,90%	61	2,54%

Tahun Year	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Peninjauan Review Total Employees Reviewed	Hasil Penilaian dan Relevansi Pengembangan Karir Assessment Results and Relevance of Career Development					
		Promosi (Orang) Promotion (Person)	%	Rotasi/ Mutasi (Orang) Rotation / Mutation (Person)	%	Demosi (Orang) Demotion (Person)	%
2021	1.094 Karyawan (45,30% dari total karyawan) 1,094 employees (45.30% of total employees)	433	17,93%	614	25,42%	47	1,95%

KEBIJAKAN REMUNERASI [OJK F.20] [GRI 2-19, 202-1]

Perseroan menetapkan paket remunerasi atau imbalan kerja dengan merujuk pada regulasi yang berlaku, diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Elemen remunerasi terdiri atas: gaji pokok, tunjangan, dukungan program pensiun karyawan dan benefit lainnya, yang penetapannya mengacu kepada standar Upah Minimum Regional (UMR). Penetapan remunerasi juga berpatokan pada prinsip 3P, yaitu *Pay for Position, Pay for Person* dan *Pay for Performance*. Perseroan juga menekankan pada kebijakan remunerasi berbasiskan kinerja untuk karyawan yang berhubungan dengan kegiatan usaha, dimana kompensasi tidak tetap yang diterima karyawan akan dipengaruhi oleh kontribusi dan kinerjanya dengan memperhatikan kinerja dan kemampuan Perusahaan. [GRI 3-3]

Guna meningkatkan retensi dan *engagement* karyawan, Perseroan berupaya untuk memberikan benefit selain gaji pokok melalui fasilitas asuransi kesehatan, kemudahan kredit motor karyawan, tempat tinggal bagi karyawan di luar *home based*, pinjaman dana yang bersifat darurat, bantuan pendidikan bagi karyawan dan anak karyawan, beasiswa karyawan, perlindungan BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan serta fasilitas *benefit* telekomunikasi.

Perseroan memberikan upah minimum dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi karyawan tetap golongan terendah yang baru masuk *(entry level)*. Besaran upah minimum diberikan dengan menyesuaikan harga kebutuhan pokok, tingkat inflasi,

REMUNERATION POLICY [OJK F.20] [GRI 2-19, 202-1]

The Company determines the remuneration package or employee benefits by referring to prevailing regulations, including Law No. 13 of 2003 on Manpower, which was refined through Law No. 11 of 2020 on Job Creation. The remuneration element consists of: basic salary, benefits, employee pension plan support and other benefits, the determination of which refers to the Regional Minimum Wage (UMR) standard. The determination of remuneration is also based on the 3P principle, namely Pay for Position, Pay for Person and Pay for Performance. The Company also emphasizes on the performance-based remuneration policy for employees related to business activities, where the irregular compensation received by employees will be influenced by their contributions and performance by taking into account the Company's performance and capabilities. [GRI 3-3]

To enhance employee retention and engagement, the Company strives to provide benefits other than basic salary through health insurance facilities, employee motorcycle loan facilities, housing for employees outside home-based, emergency fund loans, educational assistance for employees and employees' children, employee scholarships, BPJS Health and employment protection and telecommunication benefit facilities.

The Company provides a minimum wage while still paying attention to the fulfillment of decent living needs for the lowest class permanent employees who are on entry level. The minimum wage is given by adjusting the price of basic necessities, inflation rate, standard of living and

Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Human Resource Management and Development

standar kelayakan hidup dan variabel lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan patokan tersebut, maka Perseroan memastikan bahwa gaji karyawan tetap level terendah minimal sama atau lebih besar dari ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP), sebelumnya dikenal dengan istilah Upah Minimum Regional tingkat 1 (UMR Tingkat 1). Pemberian upah karyawan tetap di atas UMP telah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum. [OJK F.20] [GRI 202-1]

other variables, according to prevailing regulations. With this benchmark, the Company ensures that the lowest level of permanent employee salaries is at least equal to or greater than the provisions of the Provincial Minimum Wage (UMP), previously known as Regional Minimum Wage level 1 (UMR Level 1). The provision of wages for permanent employees above UMP is in line with the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. 226 of 2000 on Amendments to Article 1, Article 3, Article 4, Article 8, Article 11, Article 20 and Article 21 of the Regulation of the Minister of Manpower No. PER-01/MEN/1999 on Minimum Wage. [OJK F.20] [GRI 202-1]

Perbandingan Upah Karyawan Baru Level Terendah Dibanding Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 | Comparison of New Employee Wages-Lowest Level Compared to Provincial Minimum Wage in 2023

No.	Wilayah Operasional Operational Area	Gaji Pegawai Entry Level Entry Level Employee Wages (Rp)	Upah Minimum Provinsi Provincial Minimum Wage (Rp)	Rasio Gaji Pegawai Entry Level Dibandingkan Upah Minimum Salary Ratio of Entry Level Employees to Minimum Wage (x)
1	Kantor Pusat	5.520.365	4.901.798	1,13
2	Cabang Kemayoran | Regional Jakarta - Bogor - Depok - Bekasi	5.151.798	4.901.798	1,05
3	Cabang Bandung | Regional Jawa Barat	4.405.907	4.048.463	1,09
4	Cabang Yogyakarta | Regional Jawa Tengah Bagian Selatan	3.100.000	2.324.776	1,33
5	Cabang Denpasar | Regional Jawa Timur , Bali , Nusa Tenggara	3.245.412	2.994.647	1,08
6	Cabang Medan | Regional Sumatera Bagian Utara	3.936.191	3.624.117	1,09
7	Cabang Palembang | Regional Sumatera Bagian Selatan	4.273.258	3.565.409	1,20
8	Cabang Pare-Pare | Regional Kalimantan Sulawesi	4.558.770	3.385.145	1,35
9	Cabang Tangerang | Regional Banten	4.821.180	4.527.688	1,06
10	Cabang Semarang | Regional Jawa Tengah Bagian Utara	3.850.000	3.060.349	1,26

CUTI MELAHIRKAN [GRI 401-3]

Perseroan memberikan hak cuti melahirkan dengan tetap mendapatkan upah dasar bagi pekerja wanita dan pria. Izin cuti melahirkan bagi karyawan wanita diberikan selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum Pekerja tersebut melahirkan sesuai perhitungan dokter/bidan dan 2,5 (dua setengah) bulan sesudah melahirkan. Sedangkan untuk karyawan pria yang mendampingi istri melahirkan diberikan cuti selama 3 (tiga) hari. Selama

MATERNITY LEAVE [GRI 401-3]

The Company provides maternity leave rights while still earning basic wages for female and male employees. Maternity leave permission for female employees is given for 1.5 (one and a half) months before the employee gives birth according to the doctor/midwife's calculation and 2.5 (two and a half) months after giving birth. As for male employees who take paternity leave, they are given leave for 3 (three) days. During the reporting period,

periode pelaporan, tercatat 32 pekerja wanita telah menggunakan hak cuti dimaksud, dimana 28 orang diantaranya telah kembali bekerja.

32 female employees used their leave entitlements, of which 28 returned to work.

PROGRAM PENSIUN [GRI 201-3]

Perseroan menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengelola dana pensiun dimaksud. Dana pensiun tersebut akan dicairkan pada saat karyawan berakhir hubungan kerjanya dengan WOM Finance. Skema pencairan dan jumlah perhitungan dana karyawan yang diterima menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Selain BPJS Ketenagakerjaan, Perseroan memiliki program apresiasi khusus untuk karyawan di akhir masa pensiun berupa *Retirement Appreciation Program.*

PENSION PLAN [GRI 201-3]

The Company cooperates with BPJS Employment to manage the pension fund. The pension fund will be disbursed when the employee ends his employment relationship with WOM Finance. The disbursement scheme and the amount of employee funds received are the authority of BPJS Employment and are carried out in accordance with prevailing labor regulations. In addition to BPJS Employment, the Company has a special appreciation program for employees at the end of retirement in the form of a Retirement Appreciation Program.

RENCANA PENGEMBANGAN SDM 2024

Meyakini upaya mewujudkan sumber daya manusia dengan kualitas terbaik memerlukan usaha yang simultan dan kontinu, Perseroan menetapkan rencana pengembangan tahun 2024, setelah me-*review* dan mengevaluasi hasil-hasil yang dicapai dari pelaksanaan program Pengembangan SDM di tahun pelaporan. Adapun rencana pengembangan sumber daya manusia tahun 2024 ditetapkan dengan Tema *"Drive Business Performances Through Competencies & Productive Employees"* dengan *Goals, Key Initiatives* & Strategi sebagai berikut:

HR DEVELOPMENT PLAN 2024

Believing that efforts to realize the highest quality human resources require simultaneous and continuous efforts, the Company established a development plan for 2024, after reviewing and evaluating the results achieved from the implementation of the HR Development program in the reporting year. The 2024 human resource development plan is set with the theme "Drive Business Performances Through Competencies & Productive Employees" with the following Goals, Key Initiatives & Strategies:

1. Bersinergi dan berpartner dengan mitra bisnis untuk membawa perubahan dan mendukung pertumbuhan bisnis dengan rencana strategis:
   a. *Monitoring* produktivitas karyawan dan secara rutin mencari akar masalah dan merumuskan rencana kerja yang efektif untuk memecahkan permasalahan yang ada.
   b. Human Capital turut berperan dalam me-*review* insentif karyawan untuk turut mendukung pertumbuhan bisnis.
   c. Perencanaan maupun pengembangan organisasi juga manpower didasarkan pada data aktual & analisa.
   d. *Organizations Evaluation.*

Synergize and partner with business partners to bring change and support business growth with strategic plans:
a. Monitoring employee productivity and routinely looking for the root of the problem and formulating an effective work plan to solve existing problems.
b. Human Capital also has a role in reviewing employee incentives to support business growth.
c. Organizational planning and development are also manpower based on actual data & analysis.
d. Organizations Evaluation.

Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Human Resource Management and Development

2. *Customer Focus* a. *Human Capital Integration System* sebagai HC Super apps yang dapat melayani kebutuhan terkait SDM dalam satu aplikasi. b. Otomatisasi dan efisiensi proses di Human Capital. c. *Dashboard/report* Human Capital yang mudah untuk diakses, transparan, informatif dan *real time*. d. *Simplify process* Human Capital. e. *Create employee experience journey from hiring, orientation until off boarding*.	Customer Focus a. Human Capital Integration System as HC Super apps that can serve HR-related needs in one application. b. Process automation and efficiency in Human Capital. c. Human Capital dashboard/report that is easy to access, transparent, informative and real time. d. Simplify process Human Capital. e. Create employee experience journey from hiring, orientation until off boarding.
3. *Inclusive culture & growth mindset* a. Memastikan setiap karyawan memahami pekerjaannya, mencapai *performance* dan memberikan kontribusinya kepada Perusahaan. b. Merancang *journey* untuk karyawan terutama yang masuk ke dalam *talent pool*. c. *Leaders* mengetahui aspirasi karyawan, mengakomodir kebutuhan karyawan dalam meng-*engage* dan menciptakan budaya kerja yang positif untuk menciptakan *next leader*.	Inclusive culture & growth mindset a. Ensure that each employee understands hisher work, achieves performance and contributes to the Company. b. Designing journeys for employees, especially those who enter the talent pool. c. Leaders know employee aspirations, accommodate employee needs in engaging and create a positive work culture to create the next leader.
4. *Leader as key of sustainability* a. Meningkatkan kapabilitas pemimpin di level manajerial untuk menjadi inklusif *leader* dan mengembangkan kompetensi "*business acumen*". b. *Employee Individual Development Program*. c. Menginisiasi & bekerjasama dengan *leaders* untuk merancang program-program yang fokus pada perbaikan kualitas *recruitment*, pengembangan karyawan ke level berikutnya dan menekan *turn over*.	Leader as key of sustainability a. Improve the capability of leaders at the managerial level to become inclusive leaders and develop "business acumen" competencies. b. Employee Individual Development Program. c. Initiating & working with leaders to design programs that focus on improving the quality of recruitment, developing employees to the next level and reducing turnover.

Lingkungan Kerja yang Layak dan Aman

Decent and Safe Work Environment



Perseroan berupaya mencatatkan kinerja terbaik pada aspek K3 melalui pemenuhan seluruh kebutuhan bagi tercapainya aspek keselamatan dan keamanan kerja sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, demi menjamin terselenggaranya kegiatan operasional yang aman dan menyenangkan yang akan membuat karyawan lebih optimal dalam bekerja.

The Company strives to achieve the best OHS performance by meeting all needs to achieve occupational safety and security aspects in accordance with applicable regulations, in order to ensure the implementation of safe and enjoyable operational activities that will make employees more productive at work.

Lingkungan Kerja yang Layak dan Aman

Decent and Safe Work Environment

Perseroan meyakini, kondisi lingkungan kerja yang aman dengan suasana kerja yang menyenangkan akan mendorong karyawan lebih optimal dan produktif dalam bekerja sehingga mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis di tahun pelaporan. Perseroan menjalankan dan mengoptimalkan kinerja aspek-aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan dukungan keterlibatan aktif dari segenap karyawan, dengan tujuan akhir tercapainya nihil angka kecelakaan kerja (*zero accident*) dan tidak ada penyakit akibat kerja.

The Company believes that providing a safe working environment with a pleasant working environment will inspire employees to be more optimal and productive at work in order to meet the targets stated in the Business Plan for the reporting year. The Company manages and optimizes the performance of Occupational Health & Safety (OHS) aspects with the support of all employees' active participation, with the ultimate goal of achieving zero work accidents and no occupational diseases.

LANDASAN KEBIJAKAN & MANAJEMEN PENGELOLAAN ASPEK K3 [OJK F.21][GRI 3-3, 403-1]

Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang layak dan aman, Perseroan menerapkan standar kerja mengacu pada sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang pemenuhan aspek K3 beserta turunannya, selain mengacu pada kebijakan internal Perseroan mencakup:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
3. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
6. Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Akibat Hubungan Kerja.
7. Kebijakan Manajemen Operasional Bab F Standarisasi dan Pengelolaan Gedung/ Bangunan No. 005/PLC/OPP/05-21.
8. Surat Kebijakan Asuransi Kesehatan No. 120/SK/HCSS/10-20 .
9. Peraturan Perusahaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Periode 2021-2023.

FOUNDATION OF POLICY & MANAGEMENT OF OHS ASPECTS [OJK F.21] [GRI 3-3, 403-1]

To create a decent and safe work environment, the Company applies work standards referring to a number of regulations and laws governing the fulfillment of OHS aspects and its derivatives, in addition to referring to the Company's internal policies, such as:

1. Law No. 1 of 1970 on Work Safety
2. Law No. 23 of 1992 concerning Health
3. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower
4. Law No. 11 of 2020 on Job Creation
5. Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Health and Safety Management System (SMK3).
6. Presidential Decree No. 22 of 1993 concerning Diseases Arising from Employment Relations.
7. Operational Management Policy Chapter F Standardization and Management of Buildings No. 005/PLC/OPP/05-21.
8. Health Insurance Policy Letter No. 120/SK/HCSS/10-20.
9. Company Regulation of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk for the 2021-2023 period.

Selama periode pelaporan, Perseroan belum memiliki Komite Keselamatan dan Keamanan Kerja, namun demikian Perseroan tetap berupaya maksimal dalam memenuhi ketentuan peraturan perundangan terkait aspek K3. Perseroan mengelola dan menerapkan kebijakan aspek K3 di bawah koordinasi *Operation Director* dengan melibatkan peran *Operation Division Head* dan *Chief Human Capital Officer*. Di bawah koordinasi *Operation Director*, Perseroan melengkapi Pedoman Penerapan Aspek K3, melengkapi infrastruktur aspek K3, serta merealisasikan program-program pelatihan dasar aspek K3 dan sebagainya.

During the reporting period, the Company did not yet establish a Work Safety and Security Committee, however, the Company strives to put maximum efforts in fulfilling the laws and regulations related to OHS aspects. The Company manages and applies OHS aspect policies under the coordination of Operation Director by involving the roles of Operation Division Head and Chief Human Capital Officer. Under the coordination of the Operation Director, the Company completes the OHS Aspect Practice Guidelines, the OHS aspect infrastructure, and realizes basic training programs for OHS aspects, and so forth.

Pedoman dan Infrastruktur Aspek K3

Perseroan telah memiliki Pedoman Keselamatan dan Keamanan Kerja dengan uraian, mencakup: Prosedur Keselamatan Darurat Bencana, Prosedur Pengamanan Aset Perseroan dan lain-lain. Dalam rangka menjaga dan menciptakan kualitas lingkungan kerja yang sehat, Perseroan kemudian melengkapi gedung kantor Pusat maupun Kantor-kantor Cabang dengan peralatan dasar keselamatan kerja, selain menjalankan perawatan peralatan pendukung secara berkala, mencakup diantaranya:

1. **Alat Pemadam Kebakaran *Portable* dan P3K**
   Perseroan menyediakan Alat Pemadam Kebakaran Portable baik di kantor pusat, *Contact Center, Learning Center,* dan Regional/Cabang/Kapos. Selain itu, tersedia Kotak P3K di berbagai kantor cabang maupun area operasional sebagai salah satu perlengkapan wajib yang harus disediakan dan ditempatkan pada area yang mudah terlihat dan mudah dijangkau.

2. ***Maintenance* AC**
   Perawatan ini dilakukan dengan tujuan menjaga kinerja AC sebagai pendingin tetap optimal dan bisa meminimalisir tingkat kerusakan pada komponen AC. Perawatan preventif ini dilakukan baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Regional/Cabang/Kapos dan dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam 1 tahun.

OHS Guidelines and Infrastructure

The Company already has in place an Occupational Safety and Security Guideline with description, including: Disaster Emergency Safety Procedures, Company Asset Security Procedures and others. To maintain and create a healthy quality work environment, the Company then equips the Head Office Building and Branch Offices with basic work safety equipment, in addition to carrying out periodic maintenance of supporting equipment, such as:

1. **Portable Fire Extinguishers and P3K**
   The Company provides Portable Fire Extinguishers both at the head office, Contact Center, Learning Center, and Regional/Branches/Post-Offices. Furthermore, P3K Boxes are available in various branch offices and operational regions as one of the essential equipment that must be delivered and positioned in a prominent and easy-to-reach location.

2. **AC Maintenance**
   The maintenance aimed at keeping the performance of the air conditioner as a coolant remains optimal and can minimize the level of damage to AC components. This preventive maintenance is carried out both at the Head Office and at Regional Offices/Branches/Post-Offices and is carried out 4 times in 1 year.

Lingkungan Kerja yang Layak dan Aman
Decent and Safe Work Environment

3. Pelaksanaan *Pest Control Rutin*

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari gangguan hama dan juga penyakit. Adapun data pelaksanaan *pest control* sebagai berikut:

3. Implementation of Routine Pest Control

This activity is aimed at avoiding pest disturbances and also diseases. The data on the implementation of pest control are as follows:

Lokasi Kerja Work Location	2023	2022	2021
Kantor Pusat Head Office	3	3	-
Telecenter	3	3	2
Learning Center	3	3	1

4. Pencucian Karpet

Dilakukan secara berkala dalam rangka menjaga kebersihan, kesehatan dan kenyamanan karyawan dalam bekerja.

4. Carpet Washing

Carried out periodically in order to maintain cleanliness, health and comfort of employees at work.

Program Pelatihan Aspek K3

Selama Tahun 2023, Perseroan telah mengikuti 3 (tiga) kali program *emergency drill* dari Building Management Altira Business Park pada tanggal 15 Juni 2023, 6 Desember 2023, dan 12 Desember 2023.

OHS Training Program

During 2023, the Company has participated in 3 (three) emergency drill programs from Building Management Altira Business Park on June 15, 2023, December 6, 2023, and December 12, 2023.

PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN [GRI 403-6]

Perseroan menetapkan beberapa inisiatif strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan pekerja, yakni:

- Pengurangan insiden sakit karena bekerja.
- Pengurangan kuantitas absen akibat kurang sehatnya para karyawan.
- Perlindungan karyawan dari risiko cedera, serta penyakit-penyakit akibat pekerjaan dan bahaya yang ada dalam menjalankan proses pekerjaan.
- Pengembangan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman, melalui penggunaan peralatan dan perlengkapan kerja yang aman dan ramah lingkungan

Sebagai bagian dari inisiatif strategis tersebut, Perseroan menjalankan beragam program peningkatan kualitas kesehatan para pekerja, sebagai berikut:

IMPROVING THE QUALITY OF HEALTH [GRI 403-6]

The Company established several strategic initiatives to improve the quality of employees' health, as follows:

- Reduction of the incidence of illness due to work.
- Reduction in the quantity of absences due to unhealthy employees.
- Protection of employees from the risk of injury, as well as occupational diseases and hazards that exist in carrying out the work process.
- Development of a healthy and comfortable working environment, through the use of safe and green work equipment and equipment

As part of this strategic initiative, the Company carries out various programs to improve the quality of health of employees, as follows:

Asuransi Kesehatan Kerja

Para karyawan diikut sertakan ke dalam program asuransi kesehatan kerja guna meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Untuk itu, Perseroan menjalin kerja sama dengan perusahaan asuransi dalam memberikan perlindungan asuransi spesifik, selain mengikutsertakan mereka pada program asuransi kesehatan wajib yakni BPJS Kesehatan. Berikut rincian jaminan asuransi yang diberikan kepada karyawan, beserta premi pertanggungan yang dibayarkan oleh Perseroan:

A. SINARMAS
   - Asuransi Kesehatan Simas Sehat Corporate ditanggung 100% oleh Perseroan dan memiliki 4 jenis jaminan, yaitu:
     1. Jaminan rawat inap
     2. Jaminan rawat jalan
     3. Jaminan kacamata
     4. Jaminan melahirkan

B. BPJS Kesehatan
   Perseroan juga mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program asuransi nasional pemerintah Indonesia yaitu BPJS Kesehatan. Skema pembayaran Premi BPJS Kesehatan dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu 1% dari penghasilan dibayarkan oleh Karyawan dan 4% sisanya ditanggung oleh Perseroan.

Program Pemeriksaan Berkala

Perseroan merealisasikan program pemeriksaan kesehatan (*Medical Check Up*/MCU) secara berkala dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan para karyawan. Pada Tahun 2023, Perseroan kembali melaksanakan kegiatan MCU dengan jumlah peserta 30 karyawan dan NutregenMe Test dengan jumlah peserta 10 karyawan di Kantor Pusat.

Kecelakaan dan Sakit Akibat Kerja

Selama tahun pelaporan 2023, tidak terdapat adanya insiden kecelakaan kerja, maupun sakit yang diderita karyawan akibat kerja.

Occupational Health Insurance

Employees are included in the occupational health insurance program to improve the quality of their health. As such, the Company collaborates with insurance company in providing specific insurance protection, in addition to including them in compulsory health insurance programs through BPJS Kesehatan. The following are details of insurance coverage provided to employees, with the coverage premium paid by the Company:

A. SINARMAS
   - Simas Sehat Corporate Health Insurance is 100% covered by the Company and has 4 types of insurances, namely:
     1. In-patient Insurance
     2. Out-patient Insurance
     3. Glasses Insurance
     4. Maternity Insurance

B. BPJS Healthcare
   The Company also enrolls all employees in the Indonesian government's national insurance program, BPJS Kesehatan. The BPJS Kesehatan Premium payment scheme is carried out in accordance with applicable regulations, namely 1% of income paid by employees and the remaining 4% borne by the Company.

Periodic Medical-Check Up Program

To maintain and improve the health of its employees, the Company organizes a regular medical check-up (MCU) program. In 2023, the Company again carried out MCU activities with 30 employees and NutregenMe Test with 10 employees at the Head Office.

Occupational Accidents and Illnesses

There were no cases of workplace accidents or illnesses sustained by employees during the 2023 reporting year.

Produk dan Layanan Terbaik yang Setara

Products and Services Equality Excellence

Perseroan senantiasa menghadirkan layanan terbaik melalui inovasi produk, kegiatan pemasaran yang bertanggung jawab, serta penyelesaian keluhan para pelanggan yang efektif. Tujuannya adalah memberi pengalaman terbaik demi terpenuhinya harapan para pelanggan serta pencapaian kinerja Perseroan.

The Company provides excellent services through product innovation, responsible marketing, and effective customer complaint resolution. The purpose is to provide the best experience possible in order to meet customer expectations and Company Performance Achievements.



Keberadaan pelanggan, sebagai salah satu pemangku kepentingan utama bermakna strategis bagi kelanjutan eksistensi dan keberlangsungan usaha Perseroan. Keputusan pelanggan untuk menggunakan jasa pembiayaan yang disediakan Perseroan sangat menentukan perkembangan dan keberlangsungan usaha. Semakin banyak pelanggan yang berhasil dijaga kepercayaannya, maka keberlangsungan usaha Perseroan akan lebih terjamin.

Customers' existence, as one of the primary stakeholders, is strategically important for the Company's existence and business continuity. The customer's decision to use the Company's financing services has a significant impact on the development and sustainability of its business. The more customers that have been maintained their trust, the more secure the Company's business continuity will be.

Mengingat pentingnya makna strategis dari posisi dan kedudukan pelanggan bagi perkembangan skala usaha, Perseroan senantiasa berupaya memberikan produk dan layanan terbaik kepada mereka. Perseroan menyediakan produk dan layanan terbaik dan setara kepada seluruh kelompok pelanggan.

Given the strategic significance of such an important customer position and standing, the Company aims to provide excellent products and services to all customer segments. The Company makes every effort to provide the best and most equitable products and services to all customers.

Pemberian pelayanan juga bermakna melakukan inovasi pemasaran, distribusi, peningkatan kualitas layanan serta membuka saluran pengaduan bagi para pelanggan dan memberikan solusi terbaik terhadap setiap pengaduan. Tujuan akhir dari pemberian kualitas layanan terbaik adalah kepuasan pelanggan, yang pada

Service delivery also means innovating marketing, distribution, improving service quality and opening complaint channels for customers and providing the best solution for every claim. The ultimate goal of providing the best service quality is customer satisfaction, which in turn will ensure an increase in business scale,

gilirannya akan menjamin peningkatan skala usaha, perbaikan kinerja dan pencapaian target Perseroan. [OJK F.17, F.26] [GRI 3-3]

KEBIJAKAN UMUM TANGGUNG JAWAB PRODUK DAN LAYANAN [GRI 3-3]

Dasar kebijakan Perseroan dalam menerapkan Tanggung Jawab Produk dan Layanan diantaranya adalah:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
4. Kebijakan Perseroan Nomor 159/SK/OPP/08-22 perihal Layanan Pengaduan Konsumen.

Mengacu pada Undang-Undang dan peraturan tersebut, Perseroan menyusun kebijakan dan program internal untuk memastikan tercapainya berbagai target kinerja pada aspek Tanggung Jawab Produk dan Layanan, sebagaimana disampaikan pada uraian berikut.

INOVASI DAN PENGEMBANGAN PRODUK/JASA KEUANGAN BERKELANJUTAN [OJK F.26]

Mayoritas pelanggan pembiayaan kepemilikan kendaraan, adalah masyarakat menengah ke bawah atau pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan dukungan mobilitas melalui kepemilikan kendaraan bermotor. Oleh karenanya, Perseroan mengembangkan produk pembiayaan yang sederhana, mudah dimengerti dan mudah diakses dengan tetap mengedepankan mitigasi risikonya untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Perseroan terus berupaya menambah jaringan layanan agar mampu menjangkau berbagai kota besar utama di Indonesia agar selain memperluas jangkauan, juga mempermudah masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan pembiayaan yang disediakan. Untuk

performance improvement and achievement of the Company's targets. [OJK F.17, F.26] [GRI 3-3]

GENERAL POLICY ON PRODUCT AND SERVICE RESPONSIBILITY [GRI 3-3]

The basis of the Company's policies in implementing Product and Service Responsibility is as follows:

1. Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 No. 22, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 3821).
2. Law No.4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector.
3. Financial Services Authority Regulation No. 22 of 2023 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector.
4. Company Policy No. 159/SK/OPP/08-22 on Consumer Complaint Services.

Referring to these laws and regulations, the Company develops internal policies and programs to ensure the achievement of various performance targets in the aspects of Product and Service Responsibility, as stated in the following description.

INNOVATION AND DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE FINANCIAL PRODUCTS/SERVICES [OJK F.26]

The majority of vehicle ownership financing customers are middle to lower class people or Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) who need mobility support through motor vehicle ownership. As such, the Company develops financing products that are simple, easy to understand and easily accessible while still prioritizing risk mitigation to meet their needs.

The Company strives to increase its service network in order to be able to reach various major cities in Indonesia to ensure that apart from expanding coverage, it also makes it easier for people to get access to financing services provided. To accelerate the

Produk dan Layanan Terbaik yang Setara

Products and Services Equality Excellence

mempercepat eksekusi produk pembiayaan, Perseroan mengembangkan portal layanan berbasis teknologi digital yang dapat diakses melalui gawai maupun perangkat elektronik lainnya. Layanan tersebut membuat proses identifikasi dan persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan bisa berlangsung lebih cepat dan akurat. Inisiatif yang telah dikembangkan diantaranya adalah *new mobile survey, new mobile collection, WhatsApp* KEYLA dan Aplikasi KAWAN.

execution of financing products, the Company developed a digital technology-based service portal that can be accessed through devices and other electronic devices. This service speeds-up the process of identification and approval of financing facilities and more accurately. Initiatives that have been developed include new mobile surveys, new mobile collection, WhatsApp KEYLA and the KAWAN App.

Peningkatan kualitas layanan juga dilakukan melalui kemudahan akses pembayaran angsuran pembiayaan berkat kerja sama dengan sejumlah *marketplace* seperti DANA, Bukalapak, Shopee, Gobills, Link Aja, OVO dan Tokopedia. Perseroan bahkan telah menyediakan layanan pembayaran melalui QRIS (*Quick Respons Code Indonesia Standard*), bekerja sama dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MBI).

Improving service quality is also carried out through easy access to financing installment payments due to collaboration with a number of marketplaces such as DANA, Bukalapak, Shopee, Gobills, Link Aja, OVO and Tokopedia. The Company has even provided payment services through QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard), in collaboration with PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MBI).

Sejak tahun 2022 Perseroan meluncurkan layanan berbasis digital, yakni Aplikasi KAWAN. Layanan berbasis digital ini telah terhubung dengan layanan *marketplace* seperti OVO, DANA, Shopeepay, dan Link Aja. Seluruh aplikasi tersebut membuat para pelanggan dapat melakukan pembayaran secara *online*, tanpa harus datang ke kantor-kantor cabang, maupun ke tempat-tempat pembayaran yang telah terdaftar, seperti Alfamart, Indomaret dan sebagainya. Aplikasi tersebut juga memungkinkan pelanggan mengetahui nilai cicilan tagihan jatuh tempo termasuk saldo pembiayaan mereka. Perseroan bahkan menyediakan hadiah *voucher* bagi pelanggan yang aktif menggunakan aplikasi ini, untuk meningkatkan *collection* dan menjaga kualitas aset pembiayaan.

Since 2022, the Company has launched a digital-based service, the KAWAN Application. Services based on digital have been connected to marketplaces such as OVO, DANA, Shopeepay, and Link Aja. All applications allow customers to make online payments, without having to visit the branch offices, or to register payment places, such as Alfamart, Indomaret and others. The application also allows customers to understand the value of overdue bill installments including their financing balance. To increase collection and maintain the quality of financing assets, The Company also provides gift vouchers for customers who actively use this application.

Aplikasi KAWAN terus diperkuat dengan fungsi "*Credit Engine*", sehingga proses *approval* permohonan pembiayaan baru dapat dilakukan secara digital sampai penanda-tanganan perjanjian pembiayaan, setelah dilakukan survei langsung. Berkat aplikasi tersebut kontak langsung dengan calon konsumen dapat dikurangi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko kesalahan analisis proses persetujuan pembiayaan baru. Perseroan berencana menghubungkan aplikasi ini

The KAWAN application continues to be strengthened with the "Credit Engine" function, to enable approval process for new financing applications digitally until the signing of the financing agreement, after a direct survey is conducted. This application allows for less direct communication with potential customers, minimizing the possibility of misanalysis of the new financing approval

dengan digital *marketplace* bereputasi baik dan dikenal masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas penanganan pengaduan pelanggan, Perseroan kemudian menerapkan kebijakan *service excellence* yang berlaku di tiap kantor cabang melalui Surat Kebijakan No.159/SK/OPP/08-22 tentang Layanan dan Pengaduan Konsumen. Perseroan juga melakukan pelatihan dan pengembangan *service excellence* secara berkala bagi karyawan *frontliner* di berbagai Kantor Cabang untuk memastikan terjadinya peningkatan kualitas layanan.

Produk yang Sudah Dievaluasi Keamanannya [OJK F.27]

Selain telah memperhatikan mitigasi risiko sosial, seluruh produk-produk pembiayaan yang kini disediakan Perseroan sudah melewati pengujian keamanan produk sesuai peraturan OJK, Perseroan bahkan telah memasukkan kegiatan literasi keuangan dasar pada program CSR yang dijalankan dan dilaksanakan di berbagai Kantor Cabang sebagai bagian dari mitigasi risiko.

Dampak Produk atau Jasa [OJK F.28]

Pada dasarnya, kegiatan jasa pembiayaan kepemilikan kendaraan yang disediakan Perseroan tidak memberi dampak fisik secara langsung terhadap masyarakat. Dampak umum nyata dari kegiatan pembiayaan yang dijalankan adalah perubahan pola konsumsi/belanja barang-barang tahan lama, seperti peralatan elektronik, gawai maupun kendaraan bermotor.

Kemudahan syarat pembiayaan, seperti pengurangan nilai *down payment* akan mempengaruhi keputusan masyarakat, khususnya masyarakat dengan tingkat penghasilan menengah ke bawah untuk membeli berbagai barang-barang tersebut dengan mengesampingkan kemampuan membayar angsuran bulanan. Kondisi ini menghadirkan risiko menurunnya kualitas pembayaran bagi perusahaan pembiayaan. Perseroan telah melakukan mitigasi terhadap risiko tersebut dengan merealisasikan program-program literasi keuangan secara berkala.

process. The Company plans to connect this application with a reputable and well-known digital marketplace.

To improve the quality of handling customer complaints, the Company then implemented a service excellence policy that applies to each branch office through Policy Letter No.159/SK/OPP/08-22 on Consumer Services and Complaints. The Company also conducts regular service excellence training and development for frontliners in various Branch Offices to ensure service quality improvement.

Products that have been Evaluated for Safety [OJK F.27]

Apart from paying attention to social risk mitigation, all financing products currently provided by the Company have passed product safety testing in compliance with OJK regulations, the Company has included basic financial literacy activities in its CSR programs and implemented in various Branch Offices as part of risk mitigation.

Impact of Products or Services [OJK F.28]

Basically, the vehicle ownership financing services provided by the Company do not have a direct physical impact on the community. The real general impact of its financing activities is changes in consumption/ purchasing patterns of durable goods, such as electronic equipment, gadgets and motor vehicles.

Convenient financing terms, such as reducing the value of down payments will affect the decision of the community, particularly people with middle to lower income levels to buy these various goods by ignoring the ability to pay monthly installments. This condition presents a risk of declining payment quality for financing companies. The Company has mitigated these risks by implementing regular financial literacy programs

Produk dan Layanan Terbaik yang Setara

Products and Services Equality Excellence

Produk atau Jasa yang Ditarik Kembali [OJK F.29]

Selama tahun pelaporan 2023, tidak ada produk atau jasa Perseroan yang ditarik dengan alasan dan pertimbangan apapun.

PRIVASI PELANGGAN [GRI 418-1]

Perseroan telah memiliki standar terkait keamanan data dan memiliki Customer & Data Protection Department yang bertanggung jawab atas keamanan data pribadi pelanggan yang dibantu oleh IT Security & Compliance. Perseroan sudah menerima sertifikasi ISO 27001:2013 - Sistem Manajemen Keamanan Informasi efektif per tanggal 24 November 2022 sampai dengan 31 Oktober 2025. Berdasarkan sertifikasi ini, Perseroan kemudian menyempurnakan kebijakan internal dan SOP terkait keamanan informasi, melengkapi operasional perangkat keamanan yang telah dikembangkan guna mendukung penerapan Keamanan data pribadi pelanggan.

Untuk memitigasi terjadinya risiko serangan *cyber* dan inisiden kebocoran keamanan data, Perseroan telah menjalankan berbagai upaya, meliputi:

1. Sosialisasi *Security Awareness*
2. *Wallpaper Security*
3. *Email blast* ke semua karyawan
4. Peningkatan jaringan keamanan
5. Peningkatan penjagaan pada Endpoint

Selama periode pelaporan, tidak ada insiden kebocoran data yang membahayakan keamanan data pribadi para pelanggan. [GRI 418-1]

PENGADUAN KONSUMEN [OJK F.24]

Menyadari tingginya ekspektasi para pelanggan terhadap kualitas produk pembiayaan maupun kualitas layanan yang diberikan, Perseroan berupaya merebut hati mereka dengan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses. Perseroan menyediakan saluran pengaduan yang dapat diakses melalui telepon, surat elektronik, situs, surat, media sosial, *WhatsApp* atau penyampaian secara langsung ke kantor operasional Perseroan. Semua pengaduan konsumen yang masuk dikelola oleh Departemen Service Quality.

Recalled Products or Services [OJK F.29]

During the reporting year 2023, none of the Company's products or services were recalled for any reason and consideration.

CUSTOMER PRIVACY [GRI 418-1]

The Company has established standards related to data security and has a Customer & Data Protection Department responsible for the security of customers' personal data, assisted by the IT Security & Compliance team. The Company has already obtained ISO 27001:2013 certification - Information Security Management System effective from November 24, 2022, until October 31, 2025. Based on this certification, the Company has further refined internal policies and Standard Operating Procedures (SOPs) related to information security, enhancing the operational security measures that have been developed to support the implementation of customer personal data security.

To mitigate the risk of cyber-attacks and data security breaches, the Company has undertaken various efforts, including:

1. Security Awareness
2. Wallpaper Security
3. Email Blast to all employees
4. Enhanced Network Security
5. Endpoint Protection Enhancement

During the reporting period, there were no data breach incidents that jeopardized the security of customers' personal data. [GRI 418-1]

CONSUMER COMPLAINTS [OJK F.24]

The Company recognizes that customers have high expectations for the quality of its financing products and services, and the Company strives to meet these expectations and win their hearts to become loyal consumers by providing a complaint channel for consumers via telephone, email, website, mail, social media, WhatsApp, or conveying directly to the Company's operational offices. All incoming customer complaints are managed by the Service Quality Department.

Media Saluran Penyampaian Pengaduan Konsumen
Media Channels for Consumer Complaints Submission



A. Sistem Penanganan Pengaduan Konsumen Perseroan menyediakan sarana penyampaian penanganan pengaduan konsumen untuk mendapatkan penjelasan atau solusi atas pengaduan yang telah disampaikan.

Pengaduan Lisan
Hotline :
150 999
Whatsapp Keyla *(Key of love and care)*
0811 1951 1888
Telepon :
Kantor Pusat, Cabang &
Kantor *Point of Service*

Pengaduan Tertulis

Surat	: Kantor Pusat, Cabang & Kantor Point of Service
Email	: wcare@wom.co.id
Social Media	: Instagram : @womfinance_id
Facebook	: Wom Finance
Twitter	: @womfinance_id
Website	: www.wom.co.id
Lapor Aja!	: Tersedia di Kantor Pusat, Cabang & Kantor Point of Service
Datang ke	: Kantor Pusat, Cabang & Kantor *Point of Service*
APPK OJK	: kontak157.ojk.go.id

A. Consumer Complaint Handling System The Company provides a means of conveying the consumer complaints handling to obtain an explanation or solution to the complaints that have been submitted.

Oral Complaints
Hotline :
150 999
Whatsapp Keyla (Key of love and care)
0811 1951 1888
Phone :
Kantor Pusat, Cabang &
Kantor Point of Service

Written Complaint

Mail	: Head Office, Branch & Point of Service Office
Email	: wcare@wom.co.id
Social Media	: Instagram : @womfinance_id
Facebook	: Wom Finance
Twitter	: @womfinance_id
Website	: wom.co.id
Lapor Aja!	: Available at Head Office, Branch & Point of Service Office
Visit to	: Head Office, Branch & Point of Service Office
APPK OJK	: kontak157.ojk.go.id

Produk dan Layanan Terbaik yang Setara

Products and Services Equality Excellence



B. Proses Penanganan Pengaduan Konsumen

Langkah 1 : Konsumen menyampaikan pengaduan melalui *platform* yang tersedia di WOM Finance

Langkah 2 : Verifikasi data konsumen

Langkah 3 : Pencatatan Pengaduan Petugas WOM Finance menerima informasi dan dokumen persyaratan pengaduan serta mencatat pengaduan ke sistem

Langkah 4 : Konfirmasi dan Klarifikasi Petugas WOM Finance memastikan atas informasi pengaduan tersebut dan memberikan nomor tiket pengaduan kepada konsumen

Langkah 5 : Menindaklanjuti pengaduan

Langkah 6 : Penyelesaian Pengaduan Konsumen mendapatkan penjelasan atau solusi pengaduan.

Keterangan

SLA pengaduan Perseroan mengikuti ketentuan internal Perseroan.

B. Consumer Handling Complaints Process

Step 1 : Consumers submit complaints through the platforms available on WOM Finance

Step 2 : Verify consumer data

Step 3 : Recording Complaints WOM Finance Officers receive information and documents on complaint requirements and record complaints to the system

Step 4 : Confirmation and Clarification the WOM Finance officer ascertains the complaint information and provides the complaint ticket number to the consumer

Step 5 : Follow up on the complaint

Step 6 : Complaint Resolution Consumers get an explanation or complaint solution

Information

The company's complaint SLA follows the Company's internal provisions.



- Dokumen Persyaratan Pengaduan Tertulis yang wajib dilampirkan:
  - Identitas Pelapor asli (paling sedikit memuat nama lengkap Pelapor alamat Pelapor sesuai identitas dan tempat tinggal lain (jika ada))
  - Surat Kuasa Pelapor (apabila pengajuan Pengaduan Tertulis dikuasakan)
  - Bukti transaksi keuangan (jika diperlukan)
  - Dokumen pendukung lainnya yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diajukan.

- Written Complaint Requirements Documents that must be attached:
  - The identity of the Whistleblower (at least containing full name, address according to the identity and other place of residence (if any))
  - Power of Attorney of the Whistleblower (if the filing of a Written Complaint is with proxy)
  - Proof of financial transaction (if required)
  - Other supporting documents directly related to the issue raised.

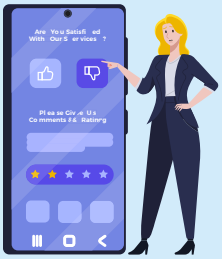

Penolakan Pengaduan

Perseroan berhak menolak informasi pengaduan yang disampaikan apabila :

- Pelapor tidak dapat menyerahkan dokumen yang ditetapkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan
- Pengaduan sebelumnya sudah diselesaikan oleh salah satu fungsi Perseroan
- Pengaduan tidak berhubungan dengan layanan Perseroan, transaksi keuangan dan/ataupun transaksi apapun dengan Perusahaan

Refusal of Complaint

The Company reserves the right to refuse information on complaints submitted if:

- The whistleblower cannot submit the specified documents within a predetermined period of time
- Previous complaints have been resolved by one of the Company's functions
- The complaint is not related to the Company's services, financial transactions and/or any transactions with the Compan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Perseroan menerapkan prinsip penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana dan cepat. Perseroan akan segera menindak lanjuti sesuai ketentuan intenal.

As stipulated in the Law on Consumer Protection and POJK on Consumer Protection in the Financial Services Sector, the Company applies the principles of handling complaints and resolving consumer disputes simply and quickly. The Company will immediately conduct a follow-up according to the internal provisions.

Produk dan Layanan Terbaik yang Setara
Products and Services Equality Excellence

Di tahun 2023, Perseroan menerima total 23 kasus pengaduan konsumen dimana seluruhnya telah diselesaikan. Jumlah penyelesaian pengaduan konsumen berdasarkan status disajikan sebagai berikut:

In 2023, the Company recieved a total of 23 cases consumer complaints where all have been resolved. The number of consumer complaint resolutions based on status is presented as follows:

Status Penyelesaian Pengaduan Konsumen
Consumer Complaint Resolution Status

No	Jenis Pengaduan Types of Complaints	Jumlah Pengaduan Total Complaints	Status Pengaduan | Complaint Status		
			Selesai Resolved	Dalam Penyelesaian Ongoing	Tidak Selesai Not Resolved
2023					
1	Pelayanan Collection Collection Services	10	10	0	0
2	Pelayanan Marketing Marketing Services	7	7	0	0
3	Pelayanan Remedial Officer Remedial Officer Services	2	2	0	0
4	Kebijakan Perusahaan Company Policy	4	4	0	0
	Sub Total	**23**	**23**	**0**	**0**
2022					
1	Pelaporan SLIK OJK/BI Checking SLIK OJK/BI Checking Reporting	7	7	0	0
2	Pelayanan Collection Collection Services	8	8	0	0
3	Pelayanan Marketing Marketing Services	2	2	0	0
4	Tarik Unit Unit Recalled	4	4	0	0
	Sub Total	**21**	**21**	**0**	**0**
2021					
1	Pelaporan SLIK OJK/BI Checking SLIK OJK/BI Checking Reporting	5	5	0	0
2	Pelayanan Collection Collection Services	4	4	0	0
3	Kebijakan Produk (Publikasi Negatif) Product Policy (Negative Publications)	1	1	0	0
4	Pelayanan Marketing Marketing Services	2	2	0	0
	Sub Total	**12**	**12**	**0**	**0**

SURVEI KEPUASAN KONSUMEN [OJK F.30]

Dalam rangka mendapatkan umpan balik mengenai tingkat kepuasan konsumen, Perseroan secara berkala melakukan survei kepuasan konsumen untuk kemudian merancang program perbaikan guna menaikkan tingkat kepuasan tersebut. Survei kepuasan konsumen menjadi

CONSUMER SATISFACTION SURVEY [OJK F.30]

To obtain feedback on the level of customer satisfaction, the Company periodically conducts customer satisfaction surveys to then design improvement programs to increase the level of satisfaction. Consumer satisfaction surveys become one of the means of communication as

salah satu sarana komunikasi sekaligus mendapatkan umpan balik dari para pemangku kepentingan. Melalui survei, Perseroan juga bisa mendapatkan masukan dari para konsumen sebagai salah satu pemangku kepentingan utama untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan agar semakin sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi mereka.

well as of getting feedback from stakeholders. Through surveys, the Company can also get input from consumers as one of the main stakeholders to improve the quality of products or services offered to better suit their needs and expectations.

Pada tahun operasional 2023, Perseroan kembali melakukan survei kepuasan konsumen guna mengukur:

1. *Tangible* (Tampilan)
2. *Reliability* (Kehandalan)
3. *Responsiveness* (Tanggapan)
4. *Assurance* (Jaminan)
5. *Empathy* (Empati)
6. Loyalitas Konsumen (NPS)

In the 2023 operating year, the Company again conducted a customer satisfaction survey to measure:

1. Tangible
2. Reliability
3. Responsiveness
4. Assurance
5. Empathy
6. Consumer Loyalty (NPS)

Secara umum hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan konsumen mengalami penurunan dibanding tahun 2022, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

In general, the survey results indicate that the level of consumer satisfaction has decreased compared to 2022, as presented in the following table:

Hasil Survei Kepuasan Konsumen
Consumer Satisfaction Survey Results

Parameter Penilaian | Assessment Parameters	**2023**	**2022**	**2021**
Hasil Survei Berdasarkan Indeks Kepuasan Konsumen | **Survey Results Based on Consumer Satisfaction Index**			
Tampilan | Tangible	3,94	3,94	3,98
Kehandalan | Reliability	3,94	3,93	3,97
Tanggapan | Responsiveness	3,92	3,92	3,97
Jaminan | Assurance	3,52	4,00	4,00
Empati | Empathy	3,98	3,97	4,03
Indeks Kepuasan Konsumen Perseroan **The Company's Customer Satisfaction Index**	**3,86**	**3,95**	**3,99**
Hasil Survei Berdasarkan Indeks Loyalitas Konsumen | **Survey Results Based on Consumer Loyalty Index**			
Loyalitas Konsumen (NPS) Net Promoter Score (NPS)	48,17	39,74	48,77

Catatan:
Secara keseluruhan indexs kepuasan konsumen Perseroan adalah Cukup Puas dimana untuk penilaian meliputi parameter penilaian terhadap:

Note:
Overall, the Company's customer satisfaction index is Moderately Satisfied where the assessment includes the following parameters:

Produk dan Layanan Terbaik yang Setara

Products and Services Equality Excellence

1. Tampilan
   Indeks kepuasan konsumen terhadap penilaian *tangible* Perseroan tahun 2023 masih sama dibandingkan tahun sebelumnya. Hal yang dinilai adalah terhadap kerapihan dan kebersihan kantor serta karyawan Perseroan.
2. Kehandalan
   Indeks kepuasan konsumen terhadap penilaian *reliability* Perseroan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,01 dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun masih lebih kecil dibanding tahun 2021. Kenaikan kepuasan konsumen terjadi terhadap penilaian ketepatan janji dan pemberian solusi yang tepat.
3. Tanggapan
   Indeks kepuasan konsumen terhadap penilaian *responsiveness* Perseroan tahun 2023 masih sama dibandingkan tahun sebelumnya. Hal yang dinilai adalah terhadap kecepatan respon dan kemudahan menghubungi Perseroan.
4. Jaminan
   Indeks kepuasan konsumen terhadap penilaian *assurance* Perseroan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,48. Penurunan terjadi terhadap penilaian kejelasan informasi di awal pembiayaan yang masih belum terinformasikan secara keseluruhan semua kepada konsumen.
5. Empati
   Indeks kepuasan konsumen terhadap penilaian empati Perseroan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,01 dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan kepuasan konsumen terjadi terhadap penilaian perhatian, keramahan dan kesungguhan dalam membantu.

1. Tangible
   The consumer satisfaction index for the tangible assessment of the Company in 2023 remained unchanged from the previous year. The aspect evaluated include the orderliness and sanitation of the Company's workspace and personnel.
2. Reliability
   The consumer satisfaction index for the Company's reliability assessment in 2023 increased by 0.01 compared to the previous year, although it remained smaller than in 2021. The increase in consumer satisfaction occurred in the assessment of the accuracy of promises and the provision of appropriate solutions.
3. Responsiveness
   The consumer satisfaction index for the Company's responsiveness assessment in 2023 remained unchanged compared to the previous year. The aspect evaluated include the speed of response and ease of contacting the Company.
4. Assurance
   The consumer satisfaction index for the Company's assurance assessment in 2023 decreased by 0.48. The decrease occurred in the assessment of information clarity during the initiation phase of financing, when consumers were not fully informed.
5. Empathy
   The consumer satisfaction index for the Company's empathy assessment in 2023 increased by 0.01 compared to the previous year. The increase in consumer satisfaction occurred in the assessment of attention, friendliness and sincerity in assistance.

6. Loyalitas Konsumen (NPS)
   Indeks loyalitas konsumen Perseroan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 8,43 dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan indeks loyalitas konsumen ini menunjukkan bertambahnya keinginan konsumen untuk merekomendasikan Perseroan kepada keluarga, teman dan kerabat.

Keterangan:
- Survey kepuasan konsumen dilakukan oleh tim Tele Survey Perseroan secara sampling melalui telepon kepada minimal 30 konsumen per cabang (dengan sasaran kepada konsumen yang baru melakukan pembiayaan di Perseroan dimana di tahun 2023 Perseroan mengambil sampling dengan umur pembiayaan 1 bulan sedangkan di tahun sebelumnya masih mengambil sampling dengan kriteria umur pembiayaan 1-3 bulan).
- Indeks kepuasan konsumen diukur menggunakan skala kepuasan 1-5 dimana:
  - 1 diartikan Sangat Tidak Puas,
  - 2 diartikan Tidak Puas,
  - 3 diartikan Cukup Puas,
  - 4 diartikan Puas dan
  - 5 diartikan Sangat Puas

6. Consumer Loyalty (NPS)
   The Company's consumer loyalty index in 2023 increased by 8.43 compared to the previous year. The increase in the consumer loyalty index signifies an intensifying tendency among consumers to recommend the Company to family, friends and relatives.

Information:
- The Company's customer satisfaction survey was conducted via telephone sampling to a minimum of 30 consumers per branch by the Company's Tele Survey team (targeting consumers who have recently financed with the Company; whereby in 2023, the sampling age was 1 month, whereas in the previous year, the sampling age was between 1-3 months).
- Consumer satisfaction index is measured using a satisfaction scale of 1-5 where:
  - 1 is defined as Very Dissatisfied,
  - 2 is defined as Dissatisfied,
  - 3 is defined as Moderately Satisfied,
  - 4 is defined as Satisfied and
  - 5 is defined as Very Satisfied

Indeks POJK 51/POJK.03/2017

[OJK G.5] POJK 51/POJK.03/2017 Index

No Indeks Index No.	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
	STRATEGI KEBERLANJUTAN | SUSTAINABILITY STRATEGY	
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan | Explanation Sustainability Strategy	516
	IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN | SUSTAINABILITY PERFORMANCE HIGHLIGHTS	
B.1	Ikhtisar Kinerja Ekonomi | Economic Performance Highlights	511
B.2	Ikhtisar Kinerja Lingkungan Hidup | Environmental Performance Highlihts	512
B.3	Ikhtisar Kinerja Sosial | Social Performance Highlights	513
	PROFIL PERUSAHAAN | COMPANY PROFILE	
C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan | Vision, Mission, and Value of Sustainability	516
C.2	Alamat Perusahaan | Company's Address	58
C.3	Skala Perusahaan | Scale Enterprises	58, 59, 60, 61, 71
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan | Products, services and business activities	56, 68, 69
C.5	Keanggotaan Pada Asosiasi | Member of Association	58, 74
C.6	Perubahan Organisasi Bersifat Signifikan | Change of Significant Organization	n.a
	PENJELASAN DIREKSI | DIRECTORS STATEMENT	
D.1	Penjelasan Direksi | Directors Statement	44
	TATA KELOLA KEBERLANJUTAN | SUSTAINABILITY GOVERNANCE	
E.1	Penanggungjawab Penerapan Keuangan berkelanjutan | Management of Sustainable Finance Implementation	532
E.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan berkelanjutan | Competency Development related Sustainable Finance	517
E.3	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan berkelanjutan | Risk Assessment for Sustainable Finance Implementation	533
E.4	Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan | Stakeholder Engagement	522
E.5	Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan berkelanjutan | Challenges of Sustainable Financial Implementation	534
	KINERJA KEBERLANJUTAN | SUSTAINABILITY PERFORMANCE	
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan | Building A Culture of Sustainability	517
	KINERJA EKONOMI | ECONOMIC PERFORMANCE	
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi | Comparison of performance targets and production, portfolios, financial targets, or investment, revenue and profit and loss	537, 538, 540
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi Pada Instrumen Keuangan atau Proyek Yang Sejalan | Comparison of performance targets and production, portfolios, financial targets, or investment on Financial Instruments or projects in line with Sustainable Finance Implementation.	537, 538, 547

No Indeks Index No.	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
	KINERJA LINGKUNGAN | ENVIRONMENTAL PERFORMANCE	
	Umum | General	
F.4	Biaya Lingkungan Hidup | Environmental Costs	566
	Aspek Material | Material Aspects	
F.5	Penggunaan Material Yang Ramah Lingkungan | The Use of Environmentally Friendly Materials	561
	Aspek Energi | Energy Aspects	
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi Yang Digunakan | The number and the intensity of energy use	563
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan | The efforts and achievements made energy efficiency including the use of renewable energy sources	562
	Aspek Air | Water Aspects	
F.8	Penggunaan Air | Water Consumption	562
	Aspek Keanekaragaman Hayati | Biodiversity Aspects	
F.9	Dampak Dari Wilayah Operasional Yang Dekat atau Berada Di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati | The impact of operational areas near or in the area of conservation or biodiversity	560
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati | Biodiversity conservation efforts	560
	Aspek Emisi | Emission Aspects	
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi Yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya | The number and intensity of emissions produced by type	564
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi Yang Dilakukan | The efforts and achievement of emission reductions undertaken	565
	Aspek Limbah Dan Efluen | Aspect of Waste and Effluents	
F.13	Jumlah Limbah dan Efluen Yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis | The amount of waste and effluent generated by type	n.a
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen | Waste and Effluent Management Mechanism	566
F.15	Tumpahan Yang Terjadi (Jika Ada) | Spill that occurred (if any)	566
	Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup | Aspect of environmental complaints	
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup Yang Diterima Dan Diselesaikan | The number and material environmental complaints received and resolved.	560

Indeks POJK 51/POJK.03/2017

POJK 51/POJK.03/2017 Index

No Indeks Index No.	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
	KINERJA SOSIAL | SOCIAL PERFORMANCE	
F.17	Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik Untuk Memberikan Layanan Atas Produk dan/atau Jasa Yang Setara Kepada Konsumen | The Company's commitment to deliver products and/or services equivalent to the consumer	591
	Aspek Ketenagakerjaan | Employment Aspects	
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja | Equality of employment opportunities	568
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa | Child Labor and Forced Labor	569
F.20	Upah Minimum Regional | The Minimum Wage	581
F.21	Lingkungan Bekerja Yang Layak dan Aman | Environmental work decent and safe	586
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai | Training and Competency Development for Employees	575
	Aspek Masyarakat | Community Aspects	
F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar | Operational Impacts to Local Communities	548
F.24	Pengaduan Masyarakat | Public complaints	556
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) | Environmental Social Responsibility Activity	548
	Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan | Responsibility on the development of Sustainable Finance products and/or services:	
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan berkelanjutan | Innovation and development of Sustainable Finance products and/or services	591
F.27	Produk/Jasa Yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan | Customer Safety	593
F.28	Dampak Produk/Jasa | Impact of Products/Services	593
F.29	Jumlah Produk Yang Ditarik Kembali | The number of products recalled	594
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan | Survey of customer satisfaction	598
	LAIN-LAIN | OTHERS	
G.1	Verifikasi Tertulis Dari Pihak Independen, Jika Ada | Written verification from independent parties (if any)	n.a
G.2	Lembar Umpan Balik | Feedback Form	608
G.3	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya | Response to Previous Year's Report Feedback	525
G.5	Daftar Pengungkapan Sesuai POJK 51/2017 | POJK 51/2017 Index	605

Indeks Isi Standar GRI

GRI Standard Content Index

Statement of use	**PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk telah melaporkan informasi yang dikutip dalam indeks konten GRI ini untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dengan mengacu *(with reference)* pada Standar GRI.** PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk has reported the information cited in this GRI content index for the period January 1 to December 31, 2023 with reference to the GRI Standards.
GRI 1 used	GRI 1: Fondation 2021

GRI Standard	**No Indeks** Index No	**Pengungkapan** | Disclosure	**Lokasi** Location
	PENGUNGKAPAN UMUM | GENERAL DISCLOSURE		
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021 | General Disclosures 2021	2-1	Informasi mengenai organisasi | Organizational details	58
	2-2	Entitas organisasi yang termasuk dalam laporan keberlanjutan | Entities included in the organization's sustainability reporting	58, 520
	2-3	Periode pelaporan, frekuensi, dan titik kontak | Reporting period, frequency and contact point	58, 519, 525
	2-4	Penyajian kembali informasi | Restatements of information	58, 520
	2-5	Assurance oleh Pihak Eksternal | External assurance	58, 520
	2-6	Aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya | Activities, value chain and other business relationships	58
	2-7	Karyawan | Employees	58, 59, 60
	2-8	Pekerja yang bukan merupakan karyawan | Workers who are not employees	106
	2-9	Struktur dan komposisi tata kelola | Governance structure and composition	526
	2-10	Nominasi dan seleksi badan tata kelola tertinggi | Nomination and selection of the highest governance body	344, 404
	2-11	Ketua badan tata kelola tertinggi | Chair of the highest governance body	336, 395
	2-12	Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi pengelolaan dampak | Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts	337, 397
	2-13	Pendelegasian wewenang untuk tanggung jawab mengelola dampak | Delegation of responsibility for managing impacts	58, 337, 397
	2-14	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan | Role of the highest governance body in sustainability reporting	54, 55
	2-15	Konflik kepentingan | Conflicts of interest	527
	2-16	Mengomunikasikan hal-hal kritis | Communication of critical concerns	527
	2-17	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi | Collective knowledge of the highest governance body	343, 404
	2-18	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi | Evaluation of the performance of the highest governance body	356, 358

Indeks Isi Standar GRI

GRI Standard Content Index

GRI Standard	No Indeks Index No	Pengungkapan | Disclosure	Lokasi Location
	2-19	Kebijakan remunerasi | Remuneration policies	360
	2-20	Proses untuk menentukan remunerasi | Process to determine remuneration	360
	2-21	Rasio kompensasi total tahunan | Annual total compensation ratio	361
	2-22	Pernyataan mengenai strategi pembangunan berkelanjutan | Statement on sustainable development strategy	516
	2-23	Komitmen kebijakan | Policy commitments	516
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021 | General Disclosures 2021	2-24	Menanamkan komitmen kebijakan dalam organisasi | Embedding policy commitments	517
	2-25	Proses remediasi dampak negatif | Processes to remediate negative impacts	546
	2-26	Mekanisme untuk saran dan masalah etika | Mechanisms for seeking advice and raising concerns	494
	2-27	Kepatuhan hukum dan peraturan | Compliance with laws and regulations	262
	2-28	Keanggotaan Asosiasi | Membership associations	74
	2-29	Pendekatan Pelibatan Pemangku Kepentingan | Approach to stakeholder engagement	522, 523
	2-30	Kesepakatan perundingan kolektif | Collective bargaining agreements	572
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topics 2021	3-1	Proses Penentuan Topik Material | Process to determine material topics	520
	3-2	Daftar Topik Material | List of material topics	520
GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016 | Economic Performance 2016	3-3	Manajemen Topik Material | Management of material topics	537
	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan | Direct economic value generated and distributed	541
	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim | Financial implications and other risks and opportunities due to climate change	537
	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya | Defined benefit plan obligatons and other retirement plans	583
GRI 205: Anti-Korupsi - 2016	3-3	Manajemen Topik Material | Management of material topics	528
	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi | Communication and training about anti-corruption policies and procedures	528
	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil | Confirmed incidents of corruption and actions taken	532

GRI Standard	No Indeks Index No	Pengungkapan | Disclosure	Lokasi Location
GRI 401: Kepegawaian | Employment 2016	3-3	Manajemen Topik Material | Management of material topics	568
	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan | New employee hires and employee turnover	573, 574, 575
	401-3	Cuti Melahirkan | Parental leave	582
GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018 | Occupational Health and Safety 2018	3-3	Manajemen Topik Material | Management of material topics	586
	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja | Occupational health and safety management system	586
	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja | Promotion of worker health	588
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016 | Training and Education 2016	3-3	Manajemen Topik Material | Management of material topics	568
	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan | Average hours of training per year per employee	575
	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan | Programs for upgrading employee skills and transition assistance	575
	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier | Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews	579
GRI 413: Masyarakat Lokal | Local Communities 2016	3-3	Manajemen Topik Material | Management of material topics	545
	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan | Operations with local community engagement, impact assessments and development programs	548
GRI 418: Privasi Pelanggan 2016 | Customer Privacy 2016	3-3	Manajemen Topik Material | Management of material topics	591
	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan | Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data	594

Lembar Umpan Balik [OJK G.2]

Feedback Form

Terima kasih telah membaca Laporan Keberlanjutan Tahun 2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. Segala masukan dan saran dari Bapak/Ibu/Saudara sangat penting bagi kemajuan penyampaian laporan Perseroan kedepannya.

Thank you for reading the 2023 Sustainability Report of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. All input and suggestion from you are very important for the progress of the Company's reports in the future.

Profil Anda | Your Profile

Nama (bila berkenan) : .....
Name (Optional)

Institusi/Perusahaan : .....
Institution/Company

Email : .....
Email

Telp/Hp (bila berkenan): .....
Telephone/Mobile (Optional)

Golongan Pemangku Kepentingan | Stakeholder Group

( ) Pemegang Saham dan Investor | Shareholders and Investors
( ) Konsumen | Consumers
( ) Karyawan | Employee
( ) Komunitas | Community
( ) Mitra Kerja/Pemasok | Partners/Supplier
( ) Pemerintah dan Regulator | Government and Regulators
( ) Lain-lain | Others.....

	Setuju Agree	Netral Neutral	Tidak Setuju Disagree
1. Laporan ini mudah dimengerti This report is easy to understand	( )	( )	( )
2. Laporan tersebut telah menggambarkan informasi positif dan negatif dari Perusahaan The report has described positive and negative information of the Company	( )	( )	( )
3. Informasi terkait Lingkungan, Sosial, dan Tata kelola (LST) sudah memadai Informations related to Environmental, Social and Governance (ESG) are sufficient	( )	( )	( )
4. Mohon berikan saran/usul/komentar Anda atas laporan ini: Kindly provide your feedbacks/suggestions/comments about this report:			

Lembar Umpan Balik [OJK G.2]

Feedback Form

Terima kasih atas partisipasi Anda. Formulir lembar umpan balik dapat disampaikan melalui:

Thank you for your participation. The feedback form can be submitted via:

Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Kantor Pusat | Head Office
Altira Office Tower floor 32, 33, 35
Jl. Yos Sudarso Kav. 85
Sunter Jaya, Tanjung Priok
Jakarta Utara 14350

: +62 21 2188 2400
: +62 21 2188 2420
: corporate_secretary@wom.co.id
: www.wom.co.id

LAPORAN KEUANGAN 2023

2023 FINANCIAL STATEMENTS





PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Financial statements
as of December 31, 2023 and
for the year then ended
with independent auditor's report

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Daftar Isi / ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Surat Pernyataan Direksi		*Directors' Statement*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan	1-4	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	5-6	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	7	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	8-9	*Statement of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan	10-164	*Notes to the Financial Statements*

****

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Altira Office Tower, Lantai 32,33 dan 35
Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Kelurahan Sunter Jaya
Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi
Jakarta Utara - 14350
Ph. +62 21-2188 2400 (Hunting) Fx +62 21-2188 2420

WOMFinance
a member of Maybank group

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk

DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini: / *We, the undersigned below:*

1.	Nama	Djaja Suryanto Sutandar	*Name*
	Alamat kantor	Altira Office Tower, Lantai 32, 33, 35 Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara - 14350	*Office address*
	Alamat domisili atau sesuai KTP	Jl. Katamaran Indah 6 No. 2J RT 009/RW 007 Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara	*Domicile address or address according to ID*
	Nomor telepon	+62 21 - 2188 2400	*Telephone number*
	Jabatan	Presiden Direktur/*President Director*	*Title*
2.	Nama	Cincin Lisa Hadi	*Name*
	Alamat kantor	Altira Office Tower, Lantai 32, 33, 35 Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara - 14350	*Office address*
	Alamat domisili atau sesuai KTP	Grand Poris Blok A. 10/2 RT 012/RW 009 Cipondoh Indah, Cipondoh, Tangerang	*Domicile address or address according to ID*
	Nomor telepon	+62 21 - 2188 2400	*Telephone number*
	Jabatan	Direktur Keuangan/*Finance Director*	*Title*

menyatakan bahwa: / *declare that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk;
2. Laporan keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
   b. Laporan keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk;*
2. *The financial statements of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the financial statements of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk have been fully disclosed in a complete and truthful manner; and*
   b. *The financial statements of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit any information or material fact;*
4. *We are responsible for the internal control system of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *This statement is made truthfully.*

Jakarta, 22 Februari 2024/*February 22, 2024*



Djaja Suryanto Sutandar	**Cincin Lisa Hadi**
Presiden Direktur/*President Director*	Direktur Keuangan/*Finance Director*

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00065/2.1032/AU.1/09/0703-3/1/II/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 00065/2.1032/AU.1/09/0703-3/1/II/2024

The Shareholders, the Board of Commissioners, and Directors
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (the "Company"), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2023, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of 31 December 2023 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00065/2.1032/AU.1/09/0703-3/1/II/2024 (lanjutan)

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00065/2.1032/AU.1/09/0703-3/1/II/2024 (continued)

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying financial statements.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00065/2.1032/AU.1/09/0703-3/1/II/2024 (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan modal usaha dan piutang sewa pembiayaan (piutang pembiayaan)

Penjelasan atas hal audit utama:

Seperti dijelaskan dalam Catatan 5, 6, dan 7 atas laporan keuangan, pada tanggal 31 Desember 2023, nilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan modal usaha dan piutang sewa pembiayaan adalah masing-masing sebesar Rp151,7 miliar, Rp2,1 miliar, dan Rp58,9 miliar. Informasi kebijakan akuntansi material atas cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan diungkapkan dalam Catatan 2 dalam laporan keuangan terlampir. Nilai tercatat atas piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan modal usaha dan piutang sewa pembiayaan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkaitnya adalah signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan terlampir.

Penentuan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan tersebut di atas, memerlukan pertimbangan dan memiliki ketidakpastian estimasi mencakup penentuan model untuk menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, identifikasi eksposur kredit yang mengalami penurunan kualitas kredit yang signifikan, dan penentuan asumsi yang digunakan dalam model perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai, termasuk faktor ekonomi makro berorientasi masa depan.

Karena penentuan cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan modal usaha dan piutang sewa pembiayaan melibatkan pertimbangan dan estimasi signifikan dari manajemen dan nilai tercatat yang signifikan, maka hal ini adalah hal audit utama bagi kami.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00065/2.1032/AU.1/09/0703-3/1/II/2024 (continued)

Allowance for impairment losses on consumer financing receivables, capital financing receivables and finance lease receivables (financing receivables)

Description of the key audit matter:

As described in Notes 5, 6, and 7 to the accompanying financial statements, as of December 31, 2023, the amounts of allowance for impairment losses for consumer financing receivables, capital financing receivables, and finance lease receivables are Rp151.7 billion, Rp2,1 billion, and Rp58,9 billion, respectively. The material accounting policy information of allowance for impairment losses of financial assets are disclosed in Note 2 to the accompanying financial statements. The carrying value of consumer financing receivables, capital financing receivables and finance lease receivables and the related allowances are significant to the Company's accompanying financial statements.

Determination of allowance for impairment losses of the above-mentioned financial assets requires judgement and is subject to estimation uncertainty which includes determining the model to calculate allowance for impairment losses, identification of credit exposures with significant deterioration in credit quality, and determining assumptions used in the allowance for impairment losses calculation models, including forward-looking macroeconomic factors.

Because the determination of allowance for impairment losses on consumer financing receivables, capital financing receivables, and finance lease receivables involves significant judgements and estimates from the management and the carrying amounts are significant, it is a key audit matter for us.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00065/2.1032/AU.1/09/0703-3/1/II/2024 (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan modal usaha dan piutang sewa pembiayaan (piutang pembiayaan) (lanjutan)

Respons audit:

Kami menguji kontrol utama atas pemberian, pencatatan dan pengawasan piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan modal usaha, dan piutang sewa pembiayaan. yang diberikan. Kami memperoleh pemahaman dan menilai metodologi pengukuran penurunan nilai, validasi model cadangan kerugian penurunan nilai, data masukan, dasar, dan asumsi yang digunakan oleh Perusahaan dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai. Kami menguji tiga tahapan kualitas kredit portofolio sesuai dengan kriteria tingkatan (*staging*) yang disusun oleh Perusahaan untuk piutang pembiayaan kosnsumen, piutang modal usaha, dan piutang sewa pembiayaan. Kami menguji apakah pengalaman historis mewakili keadaan saat ini dan kerugian terkini yang terjadi dalam portofolio, serta menilai kewajaran atas penyesuaian masa depan, analisis faktor ekonomi makro, dan beberapa skenario probabilitas tertimbang untuk piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan modal usaha, dan piutang sewa pembiayaan. Kami memeriksa ketepatan perhitungan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai dengan melakukan perhitungan ulang atas keseluruhan portofolio yang penurunan nilainya dinilai secara kolektif.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00065/2.1032/AU.1/09/0703-3/1/II/2024 (continued)

Allowance for impairment losses on consumer financing receivables, capital financing receivable and finance lease receivables (financing receivables) (continued)

Audit response:

We tested the key controls over the origination, recording and monitoring of the consumer finance receivables, capital financing receivables, and finance lease receivables. We obtained understanding and assessed impairment measurement methodologies, validated allowance for impairment losses models, inputs, bases, and assumptions used by the Company in calculating the allowance for impairment losses. We tested the classification into three-stage credit quality of loan portfolios in accordance with staging criteria developed by the Company for consumer finance receivables, capital financing receivables, and finance lease receivables. We tested whether historical experience is representative of current circumstances and of the recent losses incurred in the portfolios, and assessed reasonableness of forward-looking adjustments, macroeconomic factor analysis, and probability-weighted multiple scenarios for consumer finance receivables, capital financing receivables, and finance lease receivables. We checked the accuracy of the calculation of the allowance for impairment losses amount by recalculating the collective impairment assessment for the entire portfolio.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00065/2.1032/AU.1/09/0703-3/1/II/2024 (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan modal usaha dan piutang sewa pembiayaan (piutang pembiayaan) (lanjutan)

Kami menilai apakah pengungkapan di laporan keuangan cukup dan secara memadai mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit. Kami melibatkan pakar auditor internal kami untuk membantu kami dalam melakukan prosedur-prosedur di atas ketika keahlian spesifik mereka diperlukan.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2023 ("Laporan Tahunan"). Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini kami atas laporan keuangan terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00065/2.1032/AU.1/09/0703-3/1/II/2024 (continued)

Allowance for impairment losses on consumer financing receivables, capital financing receivable and finance lease receivables (financing receivables) (continued)

We assessed whether the financial statements disclosures are adequately and appropriately reflecting the Company's exposures to credit risk. We involved our auditor's internal expert to assist us in the performance of the above procedures where their specific skills are needed.

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the Annual Report 2023 (the "Annual Report"). The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Our opinion on the accompanying financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00065/2.1032/AU.1/09/0703-3/1/II/2024 (lanjutan)

Informasi lain (lanjutan)

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasinya atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00065/2.1032/AU.1/09/0703-3/1/II/2024 (continued)

Other information (continued)

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Company or to cease its operations or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00065/2.1032/AU.1/09/0703-3/1/II/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi daripada yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan suatu opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00065/2.1032/AU.1/09/0703-3/1/II/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of such financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00065/2.1032/AU.1/09/0703-3/1/II/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00065/2.1032/AU.1/09/0703-3/1/II/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00065/2.1032/AU.1/09/0703-3/1/II/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, serta mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap indepedensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00065/2.1032/AU.1/09/0703-3/1/II/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Yasir

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0703/*Public Accountant Registration No. AP.0703*

22 Februari 2024/*February 22, 2024*

00065

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	Catatan/ *Notes*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
ASET				***ASSETS***
KAS DAN SETARA KAS		2b,2c,2d,2e, 3,4,32,34,35		***CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Kas	5.012		7.674	*Cash on hand*
Bank				*Cash in banks*
Pihak ketiga	104.586		307.877	*Third parties*
Pihak berelasi	234.169		169.097	*Related party*
Total Kas dan Setara Kas	343.767		484.648	*Total Cash and Cash Equivalents*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(797)		(679)	*Allowance for impairment losses*
Neto	342.970		483.969	*Net*
PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN		2d,2e,2h,3,5, 14,18,20,31, 32,34,35,37,41		***CONSUMER FINANCING RECEIVABLES***
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi bagian yang dibiayai bank	4.858.515		4.718.662	*Consumer financing receivables - net of amounts financed by bank*
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(1.113.201)		(1.052.073)	*Unearned consumer financing income*
Piutang pembiayaan konsumen	3.745.314		3.666.589	*Consumer financing receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(151.691)		(125.637)	*Allowance for impairment losses*
Neto	3.593.623		3.540.952	*Net*
PIUTANG PEMBIAYAAN MODAL USAHA		2d,2e,2h,3, 6,34,35,41		***CAPITAL FINANCING RECEIVABLES***
Piutang pembiayaan modal usaha	62.319		240.048	*Capital financing receivables*
Pendapatan pembiayaan modal usaha yang belum diakui	(8.311)		(48.545)	*Unearned capital financing income*
Piutang pembiayaan modal usaha	54.008		191.503	*Capital financing receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.122)		(5.615)	*Allowance for impairment losses*
Neto	51.886		185.888	*Net*
PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN		2d,2e,2h,3, 7,34,35,41		***FINANCE LEASE RECEIVABLES***
Piutang sewa pembiayaan	3.197.790		1.572.401	*Finance lease receivables*
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(848.560)		(415.094)	*Unearned finance lease income*
Piutang sewa pembiayaan	2.349.230		1.157.307	*Finance lease receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(58.875)		(19.342)	*Allowance for impairment losses*
Neto	2.290.355		1.137.965	*Net*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2023/ *December 31*, 2023	**Catatan/ *Notes***	**31 Desember 2022/ *December 31*, 2022**	
ASET (lanjutan)				***ASSETS (continued)***
PIUTANG LAIN-LAIN		2c,2d,2e,2i		***OTHER RECEIVABLES***
Pihak ketiga	51.951	3,8,32,34	22.571	*Third parties*
Pihak-pihak berelasi	1.011	35,41	1.210	*Related parties*
Total Piutang Lain-lain	52.962		23.781	*Total Other Receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.864)		(2.002)	*Allowance for impairment losses*
Neto	51.098		21.779	*Net*
BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA	26.010	2j,9	12.606	***PREPAID EXPENSES AND ADVANCES***
ASET TETAP Setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp185.802 dan Rp190.482 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	81.769	2k,3,10, 18,26	65.034	***PROPERTY AND EQUIPMENT*** - *Net of accumulated depreciation of Rp185,802 and Rp190,482 as of December 31, 2023 and 2022, respectively*
ASET HAK-GUNA - Setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp89.688 dan Rp62.317 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	92.273	2l,11	81.426	***RIGHT-OF-USE ASSETS*** - *Net of accumulated depreciation of Rp89,688 and Rp62,317 as of December 31, 2023 and 2022, respectively*
ASET TIDAK BERWUJUD - Setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp40.105 dan Rp32.258 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	49.463	2m,3,12	42.834	***INTANGIBLE ASSETS*** - *Net of accumulated depreciation of Rp40,105 and Rp32,258 as of December 31, 2023 and 2022, respectively*
ASET PAJAK TANGGUHAN - Neto	14.495	2s,3,17	14.983	***DEFERRED TAX ASSETS - Net***
ASET LAIN-LAIN	41.773	13,17	58.790	***OTHER ASSETS***
TOTAL ASET	**6.635.715**		**5.646.226**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2023/ *December 31*, 2023	**Catatan/ *Notes***	**31 Desember 2022/ *December 31*, 2022**	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
UTANG BANK		2f,5,14,29 29,34,35		***BANK LOANS***
Pihak ketiga	2.626.237	38,41	2.350.136	*Third parties*
Total Utang Bank	2.626.237		2.350.136	*Total Bank Loans*
BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR		2c,2f,14, 15,16,20,		***ACCRUED EXPENSES***
Pihak ketiga	83.222	32,34,35	63.159	*Third parties*
Pihak-pihak berelasi	3.480		2.293	*Related parties*
Total Biaya yang Masih Harus Dibayar	86.702		65.452	*Total Accrued Expenses*
UTANG PAJAK	50.699	2s,3,17	41.097	***TAXES PAYABLE***
UTANG LAIN-LAIN		2c,2f,2p, 5,10,18,31		***OTHER PAYABLES***
Pihak ketiga	164.714	32,34,35	122.191	*Third parties*
Pihak-pihak berelasi	17.155		14.528	*Related parties*
Total Utang Lain-lain	181.869		136.719	*Total Other Payables*
LIABILITAS SEWA		2c,2f,2l,19,		***LEASE LIABILITIES***
Pihak ketiga	40.714	32,34,35,38	45.561	*Third parties*
Pihak berelasi	428		835	*Related party*
Total Liabilitas Sewa	41.142		46.396	*Total Lease Liabilities*
UTANG OBLIGASI		2c,2f,2o, 5,20,29		***BONDS PAYABLE***
Pihak ketiga	1.536.496	32,34,35,38	1.150.726	*Third parties*
Pihak berelasi	123.757		49.889	*Related party*
Total Utang Obligasi - Neto	1.660.253		1.200.615	*Total Bonds Payable - Net*
LIABILITAS IMBALAN KERJA	92.891	2w,3,33	90.779	***LIABILITY FOR EMPLOYEE BENEFITS***
UTANG SUBORDINASI	200.000	2c,2f,15 21,29,32 34,35,38	200.000	***SUBORDINATED LOAN***
TOTAL LIABILITAS	**4.939.793**		**4.131.194**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2023/ *December 31*, 2023	**Catatan/ *Notes***	**31 Desember 2022/ *December 31*, 2022**	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)				***LIABILITIES AND EQUITY (continued)***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp100 (dalam nilai penuh) per saham Modal dasar - 5.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.481.481.480 saham	348.148	2u,21	348.148	*Capital stock - Rp100 (in full amount) par value per share Authorized - 5,000,000,000 shares Issued and fully paid - 3,481,481,480 shares*
Modal disetor lainnya	160.190	2o,22	160.190	*Additional paid-in capital*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja - neto setelah pajak	45.600	2w,33	41.932	*Remeasurement of liability for employee benefits - net of tax*
Saldo laba				*Retained earnings*
Cadangan umum	22.500	2v,21,23	20.000	*Appropriated for general reserve*
Belum ditentukan penggunaannya	1.119.484		944.762	*Unappropriated*
TOTAL EKUITAS	**1.695.922**		**1.515.032**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**6.635.715**		**5.646.226**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the year then ended
December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2023	**Catatan/ *Notes***	**2022**	
PENDAPATAN				***REVENUES***
Pembiayaan konsumen, modal usaha, dan sewa pembiayaan - neto	1.700.753	2h,2q,5,6,7 24,31	1.414.831	*Consumer financing, capital financing, and finance lease - net*
Bunga	12.774	2c,4,32	11.094	*Interest*
Administrasi	41.284	2h,2q,25	45.516	*Administration*
Lain-lain	240.599	2h,2q,2r,4, 10,26	223.064	*Others*
Total Pendapatan	**1.995.410**		**1.694.505**	***Total Revenues***
BEBAN				***EXPENSES***
Umum dan administrasi	593.561	2c,2q,27,32,42	563.850	*General and administrative*
Gaji dan tunjangan	378.391	2c,2q,2w,28, 32,33,41	356.283	*Salaries and benefits*
Beban pendanaan dan keuangan	309.881	2c,2l,2o, 14,15,19,20, 29,32	261.994	*Financing costs and financing charges*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	292.171	2e,2h, 3,4,5,6,7,8	150.035	*Provision for impairment losses*
Penyusutan	78.434	2k,2l,2m, 3,10,11,12	63.071	*Depreciation*
Lain-lain	20.363	2c,2q, 30,32	17.023	*Others*
Total Beban	**1.672.801**		**1.412.256**	***Total Expenses***
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**322.609**		**282.249**	***INCOME BEFORE FINAL TAX EXPENSE AND INCOME TAX EXPENSE***
Beban pajak final	2.555	2s,17	2.219	*Final tax expense*
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**320.054**		**280.030**	***INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**83.647**	2s,17	**82.427**	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA TAHUN BERJALAN	**236.407**		**197.603**	***INCOME FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the year then ended December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2023	**Catatan/ *Notes***	**2022**	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will not be reclassified to profit or loss***
Keuntungan aktuarial	4.702	2w,33	6.558	*Actuarial gain*
Pajak penghasilan	(1.034)	2s,17	(1.443)	*Income tax*
Laba komprehensif lainnya - neto setelah pajak	**3.668**		**5.115**	***Other comprehensive income - net of tax***
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**240.075**		**202.718**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA PER SAHAM DASAR (dinyatakan dalam nilai Rupiah penuh)	**67,90**	2u, 21	**56,76**	***BASIC EARNINGS PER SHARE (expressed in full Rupiah amount)***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the year then ended
December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital Stock*	Modal Disetor Lainnya/ *Additional Paid-in Capital*	Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja - Neto Setelah Pajak/ *Remeasurement of Liability for Employee Benefits - Net of Tax*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*		Total Ekuitas/ *Total Equity*	
					Cadangan Umum/ *Appropriated For General Reserve*	Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo 31 Desember 2021		**348.148**	**160.190**	**36.817**	**17.500**	**782.734**	**1.345.389**	***Balance December 31, 2021***
Pencadangan laba untuk cadangan umum	23	-	-	-	2.500	(2.500)	-	*Appropriated earnings for general reserve*
Keuntungan aktuarial - neto setelah pajak	2w	-	-	5.115	-	-	5.115	*Actuarial gain - net of tax*
Dividen	2v,23	-	-	-	-	(33.075)	(33.075)	*Dividend*
Total laba tahun berjalan		-	-	-	-	197.603	197.603	*Total income for the year*
Saldo 31 Desember 2022		**348.148**	**160.190**	**41.932**	**20.000**	**944.762**	**1.515.032**	***Balance December 31, 2022***
Pencadangan laba untuk cadangan umum	23	-	-	-	2.500	(2.500)	-	*Appropriated earnings for general reserve*
Keuntungan aktuarial - neto setelah pajak	2w	-	-	3.668	-	-	3.668	*Actuarial gain - net of tax*
Dividen	2v,23	-	-	-	-	(59.185)	(59.185)	*Dividend*
Total laba tahun berjalan		-	-	-	-	236.407	236.407	*Total income for the year*
Saldo 31 Desember 2023		**348.148**	**160.190**	**45.600**	**22.500**	**1.119.484**	**1.695.922**	***Balance December 31, 2023***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the year ended December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2023	**Catatan/ *Notes***	**2022**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari:				*Cash receipts from:*
Konsumen	5.877.516		5.196.482	*Consumers*
Pendapatan administrasi	41.284		45.516	*Administration income*
Bunga giro dan deposito	10.219		8.875	*Interest income from current account and time deposits*
Lain-lain	461.540		435.244	*Others*
Total penerimaan kas	6.390.559		5.686.117	*Total cash receipts*
Pembayaran kas untuk/kepada:				*Cash disbursements for/to:*
Transaksi sehubungan dengan pembiayaan	(5.529.943)		(4.385.478)	*Financing related transaction*
Bank-bank sehubungan dengan transaksi kerjasama pembiayaan bersama	(19)		(634)	*Banks in connection with the transaction of joint financing cooperation*
Beban umum dan administrasi, beban gaji dan tunjangan serta beban lain-lain	(1.037.363)		(971.789)	*General and administrative expenses, salaries and benefits expenses and other expenses*
Bank-bank sehubungan dengan hak bank-bank atas pendapatan pembiayaan konsumen	-		(36)	*Banks in connection with the banks' rights on consumer financing income*
Beban pendanaan dan keuangan	(286.501)		(245.439)	*Financing costs and financing charges*
Beban pajak	(73.935)		(55.095)	*Tax expense*
Lain-lain	(148.394)		(140.843)	*Others*
Total pengeluaran kas	(7.076.155)		(5.799.314)	*Total cash disbursements*
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi	**(685.596)**		**(113.197)**	***Net Cash Used in Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Hasil penjualan aset tetap	1.401	10	1.018	*Proceeds from sales of property and equipment*
Perolehan aset tetap dan aset tidak berwujud	(64.298)	10,12	(38.445)	*Acquisition of property and equipment and intangible assets*
Penambahan nilai aset hak-guna	(49.937)	11	(26.261)	*Addition of right-of-use assets*
Uang muka perangkat lunak dan lisensi	(2.235)		(1.917)	*Advance for software and licenses*
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(115.069)**		**(65.605)**	***Net Cash Used in Investing Activities***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the year ended
December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2023	**Catatan/ *Notes***	**2022**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penambahan utang bank	2.270.000	14	2.240.000	*Proceeds from bank loans*
Penerimaan dari penerbitan utang obligasi - neto	1.000.000	20	800.000	*Proceeds from issuance of bonds - net*
Pembayaran utang bank	(1.994.610)	14	(1.857.066)	*Repayment of bank loans*
Pembayaran utang obligasi	(539.800)	20	(920.000)	*Repayment of bonds payable*
Pembayaran liabilitas sewa	(14.189)	19	(14.306)	*Payment of lease liabilities*
Pembayaran biaya emisi obligasi	(2.798)	20	(2.304)	*Bonds emission payment*
Pembayaran dividen	(58.819)	23	(32.870)	*Dividend payment*
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**659.784**		**213.454**	***Net Cash Provided by Financing Activities***
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**(140.881)**		**34.652**	***NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**484.648**		**449.996**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**343.767**	4	**484.648**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:				***CASH AND CASH EQUIVALENTS CONSIST OF:***
Kas dan bank	343.767		484.648	*Cash on hand and in banks*
Kas dan setara kas	**343.767**		**484.648**	***Cash and cash equivalents***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perusahaan") didirikan di Republik Indonesia dengan nama PT Jakarta-Tokyo Leasing berdasarkan Akta No. 179 tanggal 23 Maret 1982 dan kemudian diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 96 tanggal 15 Desember 1982, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-3167-HT01.01.TH82 tanggal 23 Desember 1982 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26, Tambahan No. 1248, tanggal 1 April 1997. Nama Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 5 tanggal 15 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Anna Wong, S.H., Notaris di Tangerang, dimana nama Perusahaan diubah dari PT Wahana Ometraco Multi Artha menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha. Perubahan nama ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-7437.HT.01.04.Th.2000 tanggal 27 Maret 2000. Anggaran Dasar Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan Anggaran Dasar yang memuat seluruh ketentuan Anggaran Dasar termuat dalam Akta No. 15 tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 April 2021 No. AHU-AH.01.03-0240108 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 Mei 2021 No. 37, Tambahan No. 17039.

1. GENERAL

a. The Company's Establishment

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") was established in the Republic of Indonesia as PT Jakarta-Tokyo Leasing based on the Notarial Deed No. 179 dated March 23, 1982 of Kartini Muljadi, S.H., Notary in Jakarta, which was subsequently amended by the Notarial Deed No. 96 dated December 15, 1982 of the same notary. The deed of establishment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-3167-HT01.01.TH82 dated December 23,1982 and was published in the State Gazette No. 26, Supplement No. 1248 dated April 1, 1997. The Company's name has been changed several times, the latest of which was covered by the Notarial Deed No. 5 dated March 15, 2000 of Anna Wong, S.H., Notary in Tangerang, in which the Company's name was changed from PT Wahana Ometraco Multi Artha to PT Wahana Ottomitra Multiartha. This changes of name was approved by the Ministry of Laws and Regulations of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C-7437.HT.01.04.Th.2000 dated March 27, 2000. The Company's Articles of Association has been amended several times, and the amendment of Articles of Association contained all provision of Articles of Association which was covered by the Notarial Deed No. 15 dated March 30, 2021 of Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, whose notification of amendment to the Articles of Association has been accepted and recorded in Legal Entity Administration System of Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated April 16, 2021 No. AHU-AH.01.03-0240108 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia dated May 7, 2021 No. 37, Supplement No. 17039.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Anggaran dasar tersebut kemudian diubah kembali sebagaimana ternyata dalam perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat akta No. 95 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 13 April 2023 No. AHU-0022123.AH.01.02.Tahun 2023 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 13 April 2023 No. AHU-AH.01.03-0053718 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 Mei 2023 No. 38, Tambahan No. 13746.

Kegiatan usaha utama Perusahaan sebagaimana termuat pada Akta No. 95 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan investasi yang dilakukan dengan cara:

- Sewa pembiayaan;
- Jual dan sewa balik;
- Anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang;
- Anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang;
- Pembelian dengan pembayaran secara angsuran;
- Pembiayaan proyek;
- Pembiayaan infrastruktur; dan/atau
- Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

b. Pembiayaan modal kerja yang dilakukan dengan cara:
- Jual dan sewa balik;
- Anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang;
- Anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang;
- Fasilitas modal usaha; dan/atau
- Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

1. GENERAL (continued)

a. The Company's Establishment (continued)

The Articles of Association re-amended as stated in the last amendment of the Articles of Association as contained in Deed No. 95 dated March 30, 2023 of Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, which has obtained approval from Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia based on Decree Letter dated April 13, 2023 No. AHU-0022123.AH.01.02.Tahun 2023 and admission of articles of association changes notification has been accepted and recorded in Legal Entity Administration System of Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia dated April 13, 2023 No. AHU-AH.01.03-0053718 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia dated May 12, 2023 No. 38, Supplement No. 13746.

The Company's main business activities as stated in Notarial Deed No. 95 dated March 30, 2023 of Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta as follows:

a. Financing investment is carried out in form:

- *Finance lease;*
- *Sale and leaseback;*
- *Factoring with recourse;*
- *Factoring without recourse;*
- *Installment purchases;*
- *Project financing;*
- *Infrastructure financing; and/or*
- *Other financing activities approved by OJK.*

b. Working capital financing is carried out in form:
- *Sale and leaseback;*
- *Factoring with recourse;*
- *Factoring without recourse;*
- *Working capital facilities; and/or*
- *Other financing activities approved by OJK.*

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Kegiatan usaha utama Perusahaan sebagaimana termuat pada Akta No.95 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

c. Pembiayaan multiguna yang dilakukan dengan cara:
   - Sewa pembiayaan;
   - Pembelian dengan pembayaran secara angsuran;
   - Fasilitas dana; dan/atau
   - Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

e. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, pemerintah dan/atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berlaku sebagai berikut:
   a) Pembiayaan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan akad:
      - *Murabahah;*
      - *Salam;* dan/atau
      - *Istishna'.*
   b) Pembiayaan investasi yang dilakukan dengan menggunakan akad:
      - *Mudharabah;*
      - *Musyarakah;*
      - *Mudharabah Musytarakah;* dan/atau
      - *Musyarakah Mutanaqishoh.*
   c) Pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad:
      - *Ijarah;*
      - *Ijarah Muntahiyah Bittamlik;*
      - *Hawalah atau Hawalah bil Ujrah;*
      - *Wakalah atau Wakalah bil Ujrah;*
      - *Kafalah atau Kafalah bil Ujrah;*
      - *Ju'alah;* dan/atau
      - *Qardh.*

1. GENERAL (continued)

a. The Company's Establishment (continued)

The Company's main business activities as stated in Notarial Deed No. 95 dated March 30, 2023 of Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta as follows: (continued)

c. Multi-purpose financing is carried out in form:
   - *Finance lease;*
   - *Installment purchases;*
   - *Fund facilities; and/or*
   - *Other financing activities approved by Financial Services Authority ("OJK").*

d. Other financing business activities approved by OJK.

e. Provide financing and/or conduct business activities based on sharia principles in accordance with the regulation stipulated by OJK, government and/or National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama that applies as follows:
   a) Buy and sell financing is carried out by using a contract:
      - *Murabahah;*
      - *Salam; and/or*
      - *Istishna'.*
   b) Investment financing is carried out by using a contract:
      - *Mudharabah;*
      - *Musyarakah;*
      - *Mudharabah Musytarakah; and/or*
      - *Musyarakah Mutanaqishoh.*
   c) Service financing is carried out by using a contract:
      - *Ijarah;*
      - *Ijarah Muntahiyah Bittamlik;*
      - *Hawalah or Hawalah bil Ujrah;*
      - *Wakalah or Wakalah bil Ujrah;*
      - *Kafalah or Kafalah bil Ujrah;*
      - *Ju'alah; and/or*
      - *Qardh.*

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 135/KMK.06/2001 tanggal 20 Maret 2001 yang merupakan kelanjutan dari izin usaha seperti yang dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-028/KM.11/1982 tanggal 30 Juni 1982 tentang Pemberian Izin Usaha Dalam Bidang Leasing kepada PT Jakarta-Tokyo Leasing. Izin usaha ini telah beberapa kali diperpanjang, terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-105/KM.13/1988 tanggal 7 Juli 1988 dan diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 327/KMK.017/1997 tanggal 21 Juli 1997. Pada saat ini, izin usaha Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 135/KMK.06/2001 tanggal 20 Maret 2001.

Kantor pusat Perusahaan beralamat di Altira Office Tower (lantai 32, 33, dan 35) Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350. Perusahaan memiliki kantor cabang dan kantor selain kantor cabang dengan total 202 (dua ratus dua) lokasi yang antara lain di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, dan Nusa Tenggara (tidak diaudit).

Perusahaan merupakan entitas anak dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk (''BMI'') dengan persentase kepemilikan sebesar 67,49%. Pemegang saham akhir BMI adalah Malayan Banking Berhad (''Maybank''), yang merupakan bank yang berkedudukan di Malaysia.

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Pada tanggal 30 November 2004, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (“BAPEPAM”) dengan Surat No. S-3551/PM/2004 untuk melakukan penawaran 200.000.000 lembar saham dengan total nilai nominal Rp20.000 atau Rp100 (dalam nilai penuh) per lembar saham dan harga penawaran sebesar Rp700 (dalam nilai penuh) per lembar saham. Saham Perusahaan telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 13 Desember 2004.

1. GENERAL (continued)

a. The Company’s Establishment (continued)

The Company obtained a license to operate as a financing company from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No.135/KMK.06/2001 dated March 20, 2001 which was an extension of a previous license granted as mentioned in the Decision Letter of the Ministry of Finance No. KEP-028/KM.11/1982 dated June 30, 1982 regarding the Granting of the Operating License as a Leasing Company to PT Jakarta-Tokyo Leasing. This license was subsequently extended several times, the latest of which by the Decision Letter of the Ministry of Finance No. KEP-105/KM.13/1988 dated July 7, 1988 and changed by the Decision Letter of the Ministry of Finance No. 327/KMK.017/1997 dated July 21, 1997. Currently, the Company’s license is based on Decision Letter of the Ministry of Finance No. 135/KMK.06/2001 dated March 20, 2001.

The Company’s head office is located at Altira Office Tower (32, 33, and 35 floor) Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350. The Company has totally 202 (two hundred and two) branches located in, among others, DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, and Nusa Tenggara (unaudited).

The Company is a subsidiary of PT Bank Maybank Indonesia Tbk (''BMI'') with ownership percentage of 67.49%. The ultimate shareholder of BMI is Malayan Banking Berhad (''Maybank''), which is a bank based in Malaysia.

b. The Company’s Public Offerings

On November 30, 2004, the Company obtained the Effective Letter of the Registration Statement for the Initial Public Offering of Shares from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (“BAPEPAM”) in its Letter No. S-3551/PM/2004 for 200,000,000 shares with a total nominal value of Rp20,000 or Rp100 (in full amount) per share and initial offering price of Rp700 (in full amount) per share. The Company’s shares were listed in the Jakarta and Surabaya Stock Exchange (now Indonesia Stock Exchange) on December 13, 2004.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 5 Februari 2015, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") kepada para pemegang saham Perusahaan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dari surat No. S-39/D.04/2015, sejumlah 1.481.481.480 lembar saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp148.148 atau Rp100 (dalam nilai penuh) per lembar saham dan harga penawaran sebesar Rp135 (dalam nilai penuh) per lembar saham. Saham Perusahaan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Februari 2015.

c. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan

Pada bulan November 2003, Perusahaan menawarkan kepada masyarakat "Obligasi I WOM Finance Tahun 2003 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp300.000, yang dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") pada tanggal 31 Oktober 2003 berdasarkan Surat Keputusan No. S-2645/PM/2003. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 12 November 2003.

Pada bulan Juni 2005, Perusahaan menawarkan kepada masyarakat "Obligasi II WOM Finance Tahun 2005 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp500.000, yang dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK pada tanggal 26 Mei 2005 berdasarkan Surat Keputusan No. S-1346/PM/2005. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 8 Juni 2005.

Pada bulan Juni 2006, Perusahaan menawarkan kepada masyarakat "Obligasi III WOM Finance Tahun 2006 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp825.000 yang dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK pada tanggal 24 Mei 2006 berdasarkan Surat Keputusan No. S-138/BL/2006. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 8 Juni 2006.

1. GENERAL (continued)

b. The Company's Public Offerings (continued)

On February 5, 2015, the Company obtained the Effective Letter of the Registration Statement for the Right Issue I ("PUT I") of Shares to the shareholders of the Company in order to issue Rights of Letter No. S-39/D.04/2015 for 1,481,481,480 shareholders' new common shares with a nominal value of Rp148,148 or Rp100 (in full amount) per share and initial offering price of Rp135 (in full amount) per share. The Company's shares were listed in Indonesia Stock Exchange on February 23, 2015.

c. The Company's Bonds Offerings

In November 2003, the Company offered to the public "Bonds I WOM Finance Year 2003 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp300,000, which became effective on October 31, 2003 based on the Decision Letter No. S-2645/PM/2003 of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK"). On November 12, 2003, the Company listed the bonds in the Surabaya Stock Exchange (now Indonesia Stock Exchange).

In June 2005, the Company offered to the public "Bonds II WOM Finance Year 2005 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp500,000, which became effective on May 26, 2005 based on the Decision Letter No. S-1346/PM/2005 of BAPEPAM-LK. On June 8, 2005, the Company listed the bonds in the Surabaya Stock Exchange (now Indonesia Stock Exchange).

In June 2006, the Company offered to the public "Bonds III WOM Finance Year 2006 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp825,000 which became effective on May 24, 2006 based on the Decision Letter No. S-138/BL/2006 of BAPEPAM-LK. On June 8, 2006, the Company listed the bonds in the Surabaya Stock Exchange (now Indonesia Stock Exchange).

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan (lanjutan)

Pada bulan Mei 2007, Perusahaan menawarkan kepada masyarakat "Obligasi IV WOM Finance Tahun 2007 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.000.000, yang dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK pada tanggal 14 Mei 2007 berdasarkan Surat Keputusan No. S-2265/BL/2007. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 30 Mei 2007.

Pada bulan Februari 2011, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp1.400.000, yang dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK pada tanggal 23 Februari 2011 berdasarkan Surat Keputusan No. S-1766/BL/2011. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Maret 2011.

Pada bulan Juni 2014, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp600.000, yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") (dahulu BAPEPAM-LK) pada tanggal 17 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan No. S-272/D.04/2014. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Juni 2014.

Pada bulan Desember 2014, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp800.000, yang dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 17 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan No. S-272/D.04/2014. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Desember 2014.

Pada bulan Maret 2015, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp1.000.000, yang dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 17 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan No. S-272/D.04/2014. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 April 2015.

1. GENERAL (continued)

c. The Company's Bonds Offerings (continued)

In May 2007, the Company offered to the public "Bonds IV WOM Finance Year 2007 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp1,000,000, which became effective on May 14, 2007 based on the Decision Letter No. S-2265/BL/2007 of BAPEPAM-LK. On May 30, 2007, the Company listed the bonds in the Surabaya Stock Exchange (now Indonesia Stock Exchange).

In February 2011, the Company offered to the public "Bonds V WOM Finance Year 2011 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp1,400,000, which became effective on February 23, 2011 based on the Decision Letter No. S-1766/BL/2011 of BAPEPAM-LK. On March 7, 2011, the Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange.

In June 2014, the Company offered to the public "Continuing Bonds I Phase I WOM Finance Year 2014 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp600,000, which became effective on June 17, 2014 based on the Decision Letter No. S-272/D.04/2014 of Financial Services Authority ("OJK") (formerly BAPEPAM-LK). The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on June 26, 2014.

In December 2014, the Company offered to the public "Continuing Bonds I Phase II WOM Finance Year 2014 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp800,000, which became effective on June 17, 2014 based on the Decision Letter No. S-272/D.04/2014 of OJK. The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on December 8, 2014.

In March 2015, the Company offered to the public "Continuing Bonds I Phase III WOM Finance Year 2015 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp1,000,000, which became effective on June 17, 2014 based on the Decision Letter No. S-272/D.04/2014 of OJK. The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on April 6, 2015.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan (lanjutan)

Pada bulan Desember 2015, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp600.000, yang dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 17 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan No. S-272/D.04/2014. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Desember 2015.

Pada bulan Juni 2016, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2016 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp665.000, yang dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan No. S-295/D.04/2016. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Juni 2016.

Pada bulan Agustus 2017, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap II Tahun 2017 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp720.500, yang dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan No. S-295/D.04/2016. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Agustus 2017.

Pada bulan Desember 2017, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap III Tahun 2017 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp867.500, yang dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan No. S-295/D.04/2016. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Desember 2017.

Pada bulan April 2018, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap IV Tahun 2018 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp793.000 (Catatan 20), yang dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan No. S-295/D.04/2016. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 April 2018.

1. GENERAL (continued)

c. The Company's Bonds Offerings (continued)

In December 2015, the Company offered to the public "Continuing Bonds I Phase IV WOM Finance Year 2015 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp600,000, which became effective on June 17, 2014 based on the Decision Letter No. S-272/D.04/2014 of OJK. The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on December 23, 2015.

In June 2016, the Company offered to the public "Continuing Bonds II Phase I WOM Finance Year 2016 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp665,000, which became effective on June 16, 2016 based on the Decision Letter No. S-295/D.04/2016 of OJK. The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on June 27, 2016.

In August 2017, the Company offered to the public "Continuing Bonds II Phase II WOM Finance Year 2017 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp720,500, which became effective on June 16, 2016 based on the Decision Letter No. S-295/D.04/2016 of OJK. The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on August 23, 2017.

In December 2017, the Company offered to the public "Continuing Bonds II Phase III WOM Finance Year 2017 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp867,500, which became effective on June 16, 2016 based on the Decision Letter No. S-295/D.04/2016 of OJK. The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on December 7, 2017.

In April 2018, the Company offered to the public "Continuing Bonds II Phase IV WOM Finance Year 2018 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp793,000 (Note 20), which became effective on June 16, 2016 based on the Decision Letter No. S-295/D.04/2016 of OJK. The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on April 9, 2018.

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan (lanjutan)

Pada bulan Juni 2018, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap V Tahun 2018 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp360.500, yang dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan No. S-295/D.04/2016. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Juni 2018.

Pada bulan Desember 2018, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap I Tahun 2018 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp570.500 yang dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 14 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan No. S-184/D.04/2018. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Desember 2018.

Pada bulan Mei 2019, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap II Tahun 2019 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp1.675.000 (Catatan 20) yang dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 14 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan No. S-184/D.04/2018. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Mei 2019.

Pada bulan Mei 2020, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap III Tahun 2020 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp260.300 (Catatan 20) yang dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 14 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan No. S-184/D.04/2018. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2020.

Pada bulan September 2020, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap IV Tahun 2020 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp500.000 (Catatan 20) yang dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 14 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan No. S-184/D.04/2018. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 September 2020.

1. GENERAL (continued)

c. The Company's Bonds Offerings (continued)

In June 2018, the Company offered to the public "Continuing Bonds II Phase V WOM Finance Year 2018 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp360,500, which became effective on June 16, 2016 based on the Decision Letter No. S-295/D.04/2016 of OJK. The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on June 20, 2018.

In December 2018, the Company offered to the public "Continuing Bonds III Phase I WOM Finance Year 2018 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp570,500, which became effective on December 14, 2018 based on the Decision Letter No. S-184/D.04/2018 of OJK. The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on December 21, 2018.

In May 2019, the Company offered to the public "Continuing Bonds III Phase II WOM Finance Year 2019 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp1,675,000 (Note 20), which became effective on December 14, 2018 based on the Decision Letter No. S-184/D.04/2018 of OJK. The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on May 31, 2019.

In May 2020, the Company offered to the public "Continuing Bonds III Phase III WOM Finance Year 2020 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp260,300 (Note 20), which became effective on December 14, 2018 based on the Decision Letter No. S-184/D.04/2018 of OJK. The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on May 29, 2020.

In September 2020, the Company offered to the public "Continuing Bonds III Phase IV WOM Finance Year 2020 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp500,000 (Note 20), which became effective on December 14, 2018 based on the Decision Letter No. S-184/D.04/2018 of OJK. The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on September 11, 2020.

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan (lanjutan)

Pada bulan Juli 2021, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp500.000 (Catatan 20) yang dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 16 Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan No. S-113/D.04/2021. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Juli 2021.

Pada bulan April 2022, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II Tahun 2022 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp800.000 (Catatan 20) yang dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 16 Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan No. S-113/D.04/2021. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 April 2022.

Pada bulan April 2023, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah pokok Rp1.000.000 (Catatan 20) yang dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 16 Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan No. S-113/D.04/2021. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 April 2023.

1. GENERAL (continued)

c. The Company's Bonds Offerings (continued)

In July 2021, the Company offered to the public "Continuing Bonds IV Phase I WOM Finance Year 2021 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp500,000 (Note 20), which became effective on July 16, 2021 based on the Decision Letter No. S-113/D.04/2021 of OJK. The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on July 29, 2021.

In April 2022, the Company offered to the public "Continuing Bonds IV Phase II WOM Finance Year 2022 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp800,000 (Note 20), which became effective on July 16, 2021 based on the Decision Letter No. S-113/D.04/2021 of OJK. The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on April 11, 2022.

In April 2023, the Company offered to the public "Continuing Bonds IV Phase III WOM Finance Year 2023 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp1,000,000 (Note 20), which became effective on July 16, 2021 based on the Decision Letter No. S-113/D.04/2021 of OJK. The Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange on April 12, 2023.

1. UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris dan Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan No. 93 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 6 April 2023 No. AHU-AH.01.09-0108443 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Penetapan Susunan Komite Audit No. 014/III/BOC-WOM/2023 tanggal 31 Maret 2023, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Audit Perusahaan yang efektif menjabat pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. The Boards of Commissioners and Directors and Employees

Based on Notarial Deed No. 93 dated March 30, 2023 of Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, which the notification of data changes has been accepted and recorded in Legal Entity Administration System of Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia dated April 6, 2023 No. AHU-AH.01.09-0108443 and Resolution Letter of Commissioners concerning Determination Audit Committee Composition No. 014/III/BOC-WOM/2023 dated March 31, 2023, the composition of the Company's Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, and Audit Committee which effectively holding positions as of December 31, 2023 is as follows:

Dewan Komisaris				***Board of Commissioners***
Presiden Komisaris (Komisaris Independen)	:	I Nyoman Tjager	:	*President Commissioner (Independent Commissioner)*
Komisaris	:	Thilagavathy Nadason	:	*Commissioner*
Komisaris Independen	:	Myrnie Zachraini Tamin	:	*Independent Commissioner*
Direksi				***Board of Directors***
Presiden Direktur	:	Djaja Suryanto Sutandar	:	*President Director*
Direktur Keuangan	:	Cincin Lisa Hadi	:	*Finance Director*
Direktur Pemasaran	:	Wibowo	:	*Marketing Director*
Direktur Operasional	:	Anthony Yuarez Panggabean	:	*Operations Director*
Direktur Manajemen Risiko	:	Njauw Vido Onadi	:	*Risk Management Director*
Dewan Pengawas Syariah				***Sharia Supervisory Board***
Ketua	:	Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A.	:	*Chairman*
Anggota	:	H. Muhammad Taufik Darmansyah, S.E., C.P.A.*	:	*Member*
Anggota	:	Dr. Ir. H. Muhamad Nadratuzzaman Hosen	:	*Member*
Komite Audit				***Audit Committee***
Ketua	:	I Nyoman Tjager	:	*Chairman*
Anggota	:	Emmanuel Bambang Suyitno	:	*Member*
Anggota	:	Rijanti Witarsa	:	*Member*

*Mengundurkan diri per 8 September 2023 dan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 11 Januari 2024.

**Resigned as of September 8, 2023 and has received approval from the Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 11, 2024.*

1. UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris dan Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan No. 98 tanggal 25 April 2022 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0009374 tanggal 27 April 2022 serta Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pembentukan Komite Audit No. 010/III/BOC-WOM/2020 tanggal 13 Maret 2020, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Audit Perusahaan yang efektif menjabat pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. The Boards of Commissioners and Directors and Employees (continued)

Based on Notarial Deed No. 98 dated April 25, 2022 of Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, whose notification of the data changes has been accepted and recorded in Legal Entity Administration System Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09-0009374 dated April 27, 2022 and also Resolution Letter of Commissioners No. 010/III/BOC-WOM/2020 dated March, 13, 2020, the composition of the Company's Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, and Audit Committee which effectively holding positions as of December 31, 2022 is as follows:

Dewan Komisaris				***Board of Commissioners***
Presiden Komisaris (Komisaris Independen)	:	I Nyoman Tjager	:	*President Commissioner (Independent Commissioner)*
Wakil Presiden Komisaris	:	Robbyanto Budiman	:	*Vice President Commissioner*
Komisaris	:	Garibaldi Thohir	:	*Commissioner*
Komisaris	:	Thilagavathy Nadason	:	*Commissioner*
Komisaris Independen	:	Myrnie Zachraini Tamin	:	*Independent Commissioner*
Direksi				***Board of Directors***
Presiden Direktur	:	Djaja Suryanto Sutandar*	:	*President Director*
Direktur Keuangan	:	Cincin Lisa Hadi**	:	*Finance Director*
Direktur Pemasaran	:	Wibowo	:	*Marketing Director*
Direktur Operasional	:	Anthony Yuarez Panggabean	:	*Operations Director*
Direktur Manajemen Risiko	:	Njauw Vido Onadi	:	*Risk Management Director*
Dewan Pengawas Syariah				***Sharia Supervisory Board***
Ketua	:	Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A.	:	*Chairman*
Anggota	:	H. Muhammad Taufik Darmansyah, S.E., C.P.A.	:	*Member*
Anggota	:	Dr. Ir. H. Muhamad Nadratuzzaman Hosen	:	*Member*
Komite Audit				***Audit Committee***
Ketua	:	I Nyoman Tjager	:	*Chairman*
Anggota	:	Patricia Marina Sugondo	:	*Member*
Anggota	:	Emmanuel Bambang Suyitno	:	*Member*

*Bahwa tugas dan wewenang Direktur Keuangan pada tahun buku 2022 yang sebelumnya dilaksanakan oleh Presiden Direktur sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan pada tanggal 24 Maret 2022, selanjutnya dilaksanakan oleh Cincin Lisa Hadi selaku Direktur Keuangan efektif pada tanggal 12 April 2022.

**Efektif menjabat per tanggal 12 April 2022 setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan tertanggal 4 April 2022 sebagaimana tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan No. 98 tanggal 25 April 2022 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

**Finance Director's responsibilities and authorities in book year 2022 previously handled by President Director since Company's Annual General Meeting of Shareholders closed dated March 24, 2022, will be carried out by Cincin Lisa Hadi as Finance Director effective dated April 12, 2022.*

***Effectively as of April 12, 2022 after obtaining approval from the Financial Services Authority through the stipulation of Fit and Proper Test Result dated April 4, 2022 as stated in Notarial Deed No. 98 dated April 25, 2022 of Aulia Taufani S.H., Notary in South Jakarta.*

Pembentukan Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.

The establishment of the Company's Corporate Secretary is in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 dated December 8, 2014.

1. UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris dan Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Perubahan Sekretaris Perusahaan No. 004/V/BOD-WOM/2022 tanggal 9 Mei 2022, Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Cincin Lisa Hadi.

Pembentukan Divisi Audit Internal Perusahaan sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan tanggal 31 Agustus 2018, Kepala Unit Audit Internal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Ignatius Prasetya.

Perusahaan memiliki masing-masing 2.330 dan 2.409 karyawan tetap pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (tidak diaudit).

e. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 22 Februari 2024.

1. GENERAL (continued)

d. The Boards of Commissioners and Directors and Employees (continued)

Based on Decision Letter Concerning Change of Corporate Secretary No. 004/V/BOD-WOM/2022 dated May 9, 2022, the Corporate Secretary as of December 31, 2023 and 2022 is Cincin Lisa Hadi.

The establishment of the Company's Internal Audit Division is in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 dated December 23, 2015.

Based on Directors' Decision Letter of the Company dated August 31, 2018, the Internal Audit Division Head as of December 31, 2023 and 2022 is Ignatius Prasetya.

The Company has a total of 2,330 and 2,409, permanent employees as of December 31, 2023 and 2022, respectively (unaudited).

e. Completion of the Financial Statements

The management of the Company is responsible for the preparation of the accompanying financial statements which were completed and authorized for issue by the Company's Board of Directors on February 22, 2024.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") dan Standar Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Statement of compliance and basis of preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards ("FAS") and Sharia Financial Accounting Standards in Indonesia, which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards and Board of Sharia Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Financial Services Authority ("OJK"), Regulation No. VIII.G.7 regarding "Issuer's or Public Company's Financial Statements Presentation and Disclosure" as included in the Appendix of the Decree of the Chairman of BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual kecuali untuk laporan arus kas, dan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

b. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas utang serta tidak dibatasi penggunaannya. Deposito yang digunakan sebagai jaminan, jika ada, diklasifikasikan sebagai "Deposito Berjangka".

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perusahaan menerapkan PSAK 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi, dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

a. Statement of compliance and basis of preparation of the financial statements (continued)

The financial statements have been prepared on the accrual basis except for the statement of cash flows, and using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant notes to the financial statements.

The statement of cash flows presents information on receipts and payments of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities using the direct method.

The presentation currency used in the financial statements is Indonesian Rupiah, which is the functional currency.

All figures in the financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

b. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and unrestricted time deposits with maturity periods of 3 (three) months or less at the time of placement and not used as collateral for loans nor restricted. Deposits which are used as collateral, if any, are classified as "Time Deposits".

c. Transactions with related parties

The Company applied SFAS 7 (Revised 2010), "Related Parties Disclosures". The revised SFAS requires disclosure of related parties relationships, transactions, and outstanding balances, including commitments, in the financial statements.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, where by such terms may not be the same as those transactions with unrelated parties.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Yang termasuk pihak berelasi sebagai berikut:

1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

2) Entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika entitas memenuhi salah satu hal berikut:
   a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   b) Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   d) Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1);

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Transactions with related parties (continued)

A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements (reporting entity). Related parties are:

1) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
   a) Has control or joint control of the reporting entity;
   b) Has significant influence over the reporting entity; or
   c) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

2) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
   a) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
   b) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
   c) Both entities are joint ventures of the same third party;
   d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
   e) The entity is a employee benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is it self such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
   f) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in 1);

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Yang termasuk pihak berelasi sebagai berikut: (lanjutan)

2) Entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika entitas tersebut: (lanjutan)

g) Orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau

h) Entitas, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

d. Aset keuangan

Klasifikasi

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Transactions with related parties (continued)

A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements (reporting entity). Related parties are: (continued)

2) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies: (continued)

g) A person identified in 1) a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or

h) The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements.

d. Financial assets

Classification

Financial assets have classified as financial assets measured at amortized cost, financial assets measured at fair value through other comprehensive income, and financial assets measured at fair value through profit or loss.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis

Perusahaan melakukan penilaian terhadap tujuan model bisnis dari kepemilikan suatu aset pada tingkatan portofolio, karena hal ini yang paling mencerminkan cara bisnis dikelola dan informasi diberikan kepada manajemen. Informasi yang dipertimbangkan meliputi:

- Kebijakan dan tujuan yang dinyatakan untuk portofolio dan pengoperasian kebijakan tersebut dalam praktiknya. Secara khusus, apakah strategi manajemen berfokus pada menghasilkan pendapatan bunga kontraktual, mencocokkan durasi aset keuangan dengan durasi kewajiban yang mendanai aset tersebut;

- Bagaimana kinerja portofolio dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen Perusahaan;

- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis itu) dan strateginya untuk bagaimana risiko tersebut dikelola.

Untuk tujuan penilaian ini, "pokok" didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. "Bunga" didefinisikan sebagai:

- Imbalan untuk nilai waktu atas uang;
- Risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu;
- Risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi); dan
- Marjin keuntungan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial assets (continued)

Business model assessment

The Company makes an assessment of the objective of a business model in which an asset is held at a portfolio level because this best reflects the way the business is managed and information is provided to management. The information considered includes:

- *The stated policies and objectives for the portfolio and the operation of those policies in practice. In particular, whether management's strategy focuses on earning contractual interest revenue, matching the duration of the financial assets to the duration of the liabilities that are funding those assets or realizing cash flows through the sale of the assets;*
- *How the performance of the portfolio is evaluated and reported to the Company's management;*
- *The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and its strategy how those risks are managed.*

For the purposes of this assessment, "principal" is defined as the fair value of the financial assets on initial recognition. "Interest" is defined as consideration for:

- *The time value of money;*
- *Credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time;*
- *Other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs); and*
- *Profit margin.*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI")

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Perusahaan mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan:
- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Ketentuan percepatan pelunasan dan perpanjangan.

Tabel berikut menyajikan klasifikasi instrumen keuangan Perusahaan berdasarkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial assets (continued)

Assessment of whether contractual cash flows are solely payment of principal and interest ("SPPI")

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Company considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial assets contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Company considers:
- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Prepayment and extension terms.*

The following table presents classification of financial instruments of the Company based on characteristic of those financial instruments:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ ***Category as defined by SFAS 71***		**Golongan (ditentukan oleh Perusahaan)/** ***Class (as determined by the Company)***	**Subgolongan/** ***Subclasses***
Aset keuangan/ *Financial assets*	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/*Financial assets at amortized cost*	Kas dan setara kas/*Cash and cash equivalents* - Bank/*Cash in banks* - Deposito berjangka/*Time deposits*	
		Piutang pembiayaan konsumen/*Consumer financing receivables* Piutang pembiayaan modal usaha/*Capital financing receivables* Piutang sewa pembiayaan/*Finance lease receivables*	
		Piutang lain-lain/*Other receivables*	
Liabilitas keuangan/ *Financial liabilities*	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*	Utang bank/*Bank loans*	
		Utang lain-lain/*Other payables*	
		Biaya yang masih harus dibayar/*Accrued expenses*	
		Utang obligasi/*Bonds payable*	
		Utang subordinasi/*Subordinated loans*	
		Liabilitas sewa/*Lease liabilities*	

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran

Klasifikasi aset keuangan menggunakan pendekatan model bisnis dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan tersebut. Setelah pengakuan awal, aset keuangan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan nilai wajar melalui laba rugi berdasarkan pada model bisnis yang diadopsi.

Semua instrumen keuangan pada saat pengakuan awal diukur sebesar nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Aset Keuangan Yang Direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial assets (continued)

Recognition and Measurement

The classification of financial assets uses the business model approach and contractual cash flow characteristic of the financial assets. After initial recognition, financial assets are measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income and fair value through profit or loss based on the business model adopted.

All financial instruments are measured initially at their fair value. In the case that financial assets or financial liabilities are not designated at fair value through profit or loss, the fair value should be added with attributable transaction costs directly from acquisition or issuance of financial assets or financial liabilities.

Financial asset classified as amortized cost and other financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Restructured Financial Assets

If the terms of the financial assets are renegotiated or modified or the existing financial assets are replaced with new ones due to the borrower's financial difficulties, an assessment is made whether recognition of existing financial assets must be derecognized and expected credit losses measured as follows:

- *If the restructuring does not result in the termination of recognition of existing assets, then the estimated cash flows arising from the modified financial assets are included in the calculation of cash shortages of existing assets.*
- *If the restructuring will result in a derecognition of the existing assets, the fair value of the new asset is treated as the final cash flow of the existing financial assets at the time of derecognition. This amount is included in the calculation of cash shortages from existing financial assets which are discounted from the date of derecognition to the reporting date using the initial effective interest rate of the existing financial assets.*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Perusahaan mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*); dan (a) Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai kolektif, berdasarkan pada karakteristik risiko kredit yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi pembiayaan berdasarkan permodelan kerugian masa depan.

Perusahaan mengukur penyisihan kerugian aset keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian ("ECL"), jika risiko kredit atas aset keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka Perusahaan akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL 12 bulan.

ECL 12 Bulan dan ECL *Lifetime*

ECL 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan ECL yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan (atau periode yang lebih pendek jika umur aset keuangan yang diharapkan kurang dari 12 bulan). ECL 12 bulan dibobot oleh probabilitas terjadinya *default* dimaksud.

ECL *lifetime* adalah kerugian yang diakibatkan dari semua kejadian *default* yang mungkin terjadi selama perkiraan waktu aset keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial assets (continued)

Derecognition

The Company derecognizes a financial asset if, and only if, the contractual rights to receive cash flows from the asset have expired; or the Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a pass through arrangement; and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

e. Allowance for Impairment losses on financial assets

Calculation of allowance for impairment losses on financial assets assessed collectively is grouped based on similar credit risk characteristic and taking into account the financing segmentation based on future loss model.

The Company should measure the loss allowance of financial assets as much as lifetime expected credit losses ("ECL"), if credit risk of the financial assets has increased significantly since the initial recognition. If at the reporting date, the credit risk of the financial assets has not increased significantly since the initial recognition, the Company measures the loss allowance for the financial assets as much as 12-month ECL.

12-Month and Lifetime ECL

12-month ECL is the portion of the lifetime ECL that represents the ECL that results from default events on a financial assets that is possible within 12 months after the reporting date (or a shorter period if the expected life of the financial assets is less than 12 months). 12-month ECL is weighted by the probability of such a default occurring.

Lifetime ECL is the loss that results from all possible default events over the expected life of the financial assets.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Staging Criteria

Aset keuangan harus dialokasikan ke salah satu dari tiga tahap penurunan nilai (*stage* 1, *stage* 2, *stage* 3) dengan menentukan apakah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan atas instrumen keuangan sejak pengakuan awal atau apakah fasilitas tersebut gagal bayar pada setiap tanggal pelaporan.

Stage 1: mencakup instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan signifikan atas risiko kredit sejak pengakuan awal atau memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk aset ini, ECL 12 bulan akan dihitung.

Aset keuangan yang dikategorikan sebagai s*tage* 1 adalah aset keuangan dengan hari tunggakan kurang atau sama dengan 30 (tiga puluh) hari.

Stage 2: mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan signifikan atas risiko kredit sejak pengakuan awal (kecuali jika memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan), namun tidak memiliki bukti penurunan nilai yang obyektif. Untuk aset ini, ECL *lifetime* dihitung. ECL *lifetime* adalah kerugian kredit yang diharapkan yang dihasilkan dari semua kejadian *default* yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari instrumen keuangan.

Aset keuangan yang dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan dan dikategorikan sebagai *stage* 2 adalah aset keuangan dengan hari tunggakan dari 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.

Stage 3: mencakup instrumen keuangan yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai pada tanggal pelaporan. Tahap ini berisi debitur yang telah *impaired* (gagal bayar). Faktor utama dalam menentukan apakah instrumen keuangan memerlukan ECL 12 bulan (*stage* 1) atau ECL *lifetime* (*stage* 2) disebut dengan kriteria Peningkatan Signifikan dalam Risiko Kredit ("SICR"). Penentuan kriteria peningkatan risiko kredit yang signifikan ("SICR") memerlukan pengkajian apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan pada setiap tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Allowance for Impairment losses on financial assets (continued)

Staging Criteria

Financial assets have to be allocated to one of the three impairment stages (stage 1, stage 2, stage 3) by determining whether a significant increase in credit risk has occurred on financial instruments since initial recognition or whether the facility is defaulted on the reporting date.

Stage 1: includes financial instruments that have not had a significant increase in credit risk since initial recognition or that have low credit risk at the reporting date. For these assets, 12-month ECL is recognized.

Financial assets categorized as stage 1 is financial assets with days overdue less or equal than 30 (thirty) days.

Stage 2: includes financial instruments that have had a significant increase in credit risk since initial recognition (unless they have low credit risk at the reporting date) but do not have objective evidence of impairment. For these assets, lifetime ECL is recognized. Lifetime ECL is the expected credit losses that result from all possible default events over the expected life of the financial instruments.

Financial assets considered to experience significant increase in credit risk and categorized as stage 2 is financial assets with days overdue 31 (thirty one) to 90 (ninety) days.

Stage 3: includes financial instruments that have objective evidence of impairment at the reporting date. This stage has obligors that already are impaired (defaulted). The key factor in determining whether a financial instrument attracts 12-month ECL (stage 1) or lifetime ECL (stage 2) is called by the criteria of Significant Increase in Credit Risk ("SICR"). Determining significant increase in credit risk ("SICR") criteria involves assessment of whether there has been a significant increase in credit risk at each reporting date.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Staging Criteria (lanjutan)

Aset keuangan yang dikategorikan sebagai *stage* 3 adalah aset keuangan dengan hari tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, aset pembiayaan yang ditarik, dan aset dengan status klaim asuransi.

Perusahaan menetapkan definisi peningkatan risiko kredit instrumen keuangan secara signifikan sejak pengakuan awal sesuai dengan praduga (*rebuttable presumption*) PSAK 71, yaitu ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

PSAK 71 mensyaratkan penyertaan informasi tentang kejadian masa lalu, kondisi saat ini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Perkiraan perubahan dalam kerugian kredit yang diharapkan harus mencerminkan, dan secara langsung konsisten dengan, perubahan dalam data terkait yang diobservasi dari periode ke periode. Perhitungan ECL ini membutuhkan estimasi *forward-looking* dari *Probability of Default* ("PD"), *Loss Given Default* ("LGD"), dan *Exposure At Default* ("EAD").

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *murabahah*

Berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 102, "Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*", PSAK No. 71 tidak diterapkan untuk penurunan nilai dari aset-aset yang berasal dari transaksi berbasis syariah.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang *murabahah* telah mengalami penurunan nilai. Piutang *murabahah* mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang yang dapat diestimasi secara handal.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Allowance for Impairment losses on financial assets (continued)

Staging Criteria (continued)

Financial assets categorized as stage 3 is financial assets with days overdue more than 90 (ninety) days, repossessed asset, and with status claim insurances.

The Company has determined the definition of a significant increase in credit risk of financial instruments since initial recognition in accordance with presumption (rebuttable presumption) SFAS 71, ie when contractual payments are overdue for more than 30 (thirty) days.

SFAS 71 requires inclusion of information about past events, current conditions, and forecasts of future economic conditions. The estimates of changes in expected credit losses should reflect, and be directionally consistent with, changes in related observable data from period to period. The calculation of ECL requires estimation of forward-looking Probability of Default ("PD"), Loss Given Default ("LGD"), and Exposure At Default ("EAD").

Allowance for impairment losses on murabahah receivables

In accordance with Interpretation of Financial Accounting Standard 102, "Impairment of Murabahah Receivables", SFAS 71 is not applied to impairment of assets from sharia based transactions.

At each date of the statement of financial position, the Company assesses whether there is objective evidence that murabahah receivables are impaired. Murabahah receivables are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition and the loss event has an impact on the future cash flows that can be estimated reliably.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *murabahah* (lanjutan)

Perusahaan mengevaluasi penurunan nilai piutang murabahah secara kolektif. Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *murabahah* yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan pengalaman kerugian historis. Pengalaman kerugian historis disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Perusahaan. Piutang *murabahah* dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan tunggakan debitur. Perhitungan penurunan nilai ini membutuhkan estimasi *Probability of Default*, *Loss Given Default*, dan *Exposure At Default*.

f. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Perusahaan menentukan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Pada saat pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada nilai wajarnya.

Dalam hal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pada awalnya diakui pada nilai wajar dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Beban bunga diakui dalam "Beban Pendanaan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian diakui sebagai laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak ditunaikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Allowance for Impairment losses on financial assets (continued)

Allowance for impairment losses on murabahah receivables (continued)

The Company assessed the impairment of murabahah receivables on collective basis. Calculation of allowance for impairment losses of murabahah receivables are collectively evaluated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Company. Murabahah receivables are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering, among others, past due status of the debtors. The calculation of impairment losses requires estimation of Probability of Default, Loss Given Default, and Exposure At Default.

f. Financial liabilities

Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at amortized cost and financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

The Company determines the classification of its financial liabilities in initial recognition.

Financial liabilities are recognized initially at fair value.

In the case of financial liabilities measured at amortized cost, these are initially recorded at fair value less directly attributable transaction costs and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method unless the effect of discounting would be immaterial, in which case they are stated at cost. The related interest expense is recognized within "Financing Costs" in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Gains or losses are recognized in the profit or loss when the financial liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus atas jumlah yang diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan.

h. Piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan modal usaha, dan piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan *murabahah* dan cadangan kerugian penurunan nilai

Piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan modal usaha, dan piutang sewa pembiayaan merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan bagian yang dibiayai bank-bank sehubungan dengan transaksi kerjasama pembiayaan bersama, pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Berdasarkan perjanjian kerjasama pembiayaan bersama konsumen tanpa jaminan *(without recourse)* dan penerusan pinjaman, Perusahaan hanya menyajikan porsi jumlah angsuran piutang yang dibiayai Perusahaan (pendekatan neto). Pendapatan pembiayaan konsumen disajikan setelah dikurangi dengan bagian yang merupakan hak bank-bank dalam rangka transaksi tersebut.

Pendapatan pembiayaan konsumen, pembiayaan modal usaha dan sewa pembiayaan yang belum diakui, yang merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dengan jumlah pokok pembiayaan konsumen, diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu kontrak pembiayaan konsumen berdasarkan tingkat suku bunga efektif piutang pembiayaan konsumen.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

g. Offsetting financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount are reported in the statements of financial position if, and only if, there is currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

The legally enforceable right must not be, contingent on future events and must been forceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the Financial Accounting Standards.

h. Consumer financing receivables, capital financing receivables, and finance lease receivables, murabahah financing receivables and allowance for impairment losses

Consumer financing receivables, capital financing receivables, and finance lease receivables are presented net of amounts financed by banks relating to the cooperation transactions in the form of joint financing, unearned consumer financing income and allowance for impairment losses.

Based on the consumer joint financing agreements without recourse and channeling, the Company only presents the portion of the total installments receivable financing by the Company (net approach). The consumer financing income is presented net of amounts of the banks' rights on such income relating to the transactions.

Unearned income on consumer financing, capital financing and finance lease which are the excess of the aggregate installment payments to be received from the consumers over the principal amount financed, is recognized as income over the term of the respective agreement using the effective interest rate method.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan modal usaha, dan piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan *murabahah* dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Selisih neto antara pendapatan administrasi yang diperoleh dari konsumen pada saat pertama kali perjanjian pembiayaan konsumen ditandatangani dan biaya-biaya yang timbul pertama kali yang terkait langsung dengan kredit pembiayaan konsumen ditangguhkan dan disajikan sebagai bagian dari "Piutang Pembiayaan Konsumen, Piutang Pembiayaan Modal Usaha, dan Piutang Sewa Pembiayaan" pada laporan posisi keuangan dan diakui sebagai penyesuaian atas imbal hasil selama periode pembiayaan konsumen berdasarkan tingkat suku bunga efektif dan disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan Pembiayaan Konsumen, Pembiayaan Modal Usaha, dan Sewa Pembiayaan - Neto" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai seperti dijelaskan pada Catatan 2e.

Piutang yang tak tertagih dihapuskan berdasarkan evaluasi manajemen Perusahaan dan pada umumnya setelah menunggak lebih dari 210 (dua ratus sepuluh) hari. Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain pada saat terjadinya.

Bunga yang dikenakan kepada pelanggan dicatat sebagai bagian dari pendapatan pembiayaan konsumen, modal usaha, dan sewa pembiayaan - neto, sedangkan bunga yang dikenakan penyedia dana dicatat sebagai beban pendanaan.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Perusahaan harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada konsumen.

Pada saat akad *murabahah*, piutang pembiayaan *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan (*margin*).

Keuntungan murabahah diakui selama periode akad berdasarkan pengakuan *margin* dari piutang pembiayaan *murabahah*.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Consumer financing receivables, capital financing receivables, and finance lease receivables, murabahah financing receivables and allowance for impairment losses (continued)

The net difference between the administration income earned from the consumer at the first time the financing agreement is signed and initial direct costs related to consumer financing facility is deferred and presented as part of "Consumer Financing Receivables, Capital Financing Receivables, and Finance Lease Receivables" in the statement of financial position and recognized as an adjustment to the yield received throughout the consumer financing period using effective interest rate method and presented as a part of "Consumer Financing, Capital Financing, and Finance Lease Income - Net" in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

The Company assesses whether there is any objective evidence that a financial asset is impaired as explained in Note 2e.

Receivables are written-off when they are deemed to be uncollectible based on Company's management evaluation and generally when they are overdue for more than 210 (two hundred and ten) days. Collection of receivables previously written-off is recognized as other income at the time of occurrence.

Total interest earned from customers is recorded as part of consumer financing, capital financing, and finance lease income - net, while interest charged by the creditors is recorded as financing costs.

Murabahah is goods sell-buy contract with a sold price amounting to acquisition cost plus agreed margin and the Company must disclose the acquisition cost to customer.

When the murabahah contract is signed, murabahah financing receivables are recognized as at acquisition cost plus agreed margin.

Murabahah margin are recognized over the period of the contract based on margin of the murabahah financing receivables.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan modal usaha, dan piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan *murabahah* dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Akad *murabahah* secara substansi merupakan suatu pembiayaan, sehingga pengakuan *margin* dilakukan berdasarkan standar yang mengatur pembiayaan, seperti yang disebutkan di kebijakan pembiayaan konsumen.

Pada setiap akhir periode laporan keuangan, piutang pembiayaan *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi *margin* yang ditangguhkan dan penyisihan kerugian penurunan nilai.

i. Piutang lain-lain

Salah satu bagian dari piutang lain-lain merupakan piutang yang berasal dari jaminan piutang milik konsumen untuk pelunasan piutang pembiayaan konsumen, modal usaha, dan sewa pembiayaan, yang dinyatakan sebesar nilai terendah antara nilai tercatat piutang atau nilai realisasi neto dari jaminan milik konsumen tersebut.

Selisih antara nilai tercatat dan nilai realisasi neto piutang dicatat sebagai penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain dan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif tahun berjalan.

Konsumen memberi kuasa kepada Perusahaan untuk menjual jaminan ataupun melakukan tindakan lainnya dalam upaya penyelesaian piutang pembiayaan konsumen, modal usaha, dan sewa pembiayaan bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan.

Konsumen berhak atas selisih lebih antara nilai penjualan dengan saldo piutang pembiayaan konsumen, modal usaha, dan sewa pembiayaan. Jika terjadi selisih kurang, kerugian yang terjadi dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif tahun berjalan.

j. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi dan dibebankan sesuai masa manfaat masing-masing biaya yang bersangkutan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Consumer financing receivables, capital financing receivables, and finance lease receivables, murabahah financing receivables and allowance for impairment losses (continued)

Substantially, murabahah contract is a financing, so that margin recognition is based on standards which regulate financing, as mentioned in consumer financing policy.

At the end of each period of financial statements, murabahah financing receivables are stated at net realizable value, consist of outstanding murabahah receivables less unearned margin and allowance for impairment losses.

i. Other Receivables

A part of other receivables represents receivables derived from collaterals owned by the customer for settlement of their consumer financing, capital financing, and finance lease receivables, which is presented at the lower of the carrying value of the related receivables or the net realizable value of the collaterals.

The difference between the carrying value and the net realizable value of receivables is recorded as allowance for impairment losses of other assets and is charged to the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

The customers give the right to the Company to sell the collaterals or take any other actions to settle the outstanding consumer financing, capital financing, and finance lease receivables in the events of default.

Customers are entitled to the positive difference between the proceeds from sale of the collaterals and the outstanding consumer financing, capital financing, and finance lease receivables. If the difference is negative, the resulting loss is charged to the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

j. Prepaid expenses

Prepaid expenses, are amortized and charged to operations over the periods benefited.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap

Aset tetap pada awalnya dinyatakan sebesar harga perolehan. Setelah pengukuran awal, aset tetap diukur dengan model biaya. Aset tetap, kecuali tanah, dicatat pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan.

Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui sebagai laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Property and equipment

Property and equipment are initially stated at acquisition cost. After initial measurement, property and equipment are measured using the cost model. Property and equipment, except land, are carried at its cost less accumulated depreciation and impairment losses. Such acquisition cost includes the cost of replacing part of the property and equipment when that cost is incurred, if the recognition criterias are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the property and equipment as a replacement if the recognition criterias are satisfied.

All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criterias are recognized in the profit or loss as incurred.

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the asset as follows:

	Tahun/ *Year*	**Persentase/ *Percentage***	
Bangunan	10	10,00%	*Buildings*
Renovasi kantor	4 - 10	10,00% - 25,00%	*Leasehold improvement*
Kendaraan	3 - 4	20,00% - 25,00%	*Vehicles*
Peralatan kantor	4	25,00%	*Office equipment*
Perabot kantor	4	25,00%	*Office furniture and fixtures*
Perangkat keras	4	25,00%	*Hardware*

Peralatan dalam proses instalasi dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Equipment under installation is stated at cost and presented as part of the property and equipment. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate property and equipment account when the installation is substantially completed and the asset is ready for its intended use.

Apabila aset tetap dihentikan pengakuannya (tidak dipergunakan lagi atau dijual), biaya perolehan beserta akumulasi penyusutan yang terkait dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui sebagai laba atau rugi tahun berjalan.

When assets are derecognized (retired or otherwise disposed of), their costs and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gains or losses are recognized as profit or loss for the current year.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Pada setiap akhir periode pelaporan estimasi umur manfaat ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu dikaji ulang.

l. Aset hak-guna

PSAK 73 memperkenalkan model akuntansi penyewa tunggal dan mensyaratkan penyewa untuk mengakui aset dan liabilitas untuk semua sewa dengan pengecualian sewa jangka pendek dan aset dengan nilai rendah. Penyewa diharuskan untuk mengakui aset hak-guna yang mewakili haknya untuk menggunakan aset sewaan dan liabilitas sewa yang mewakili kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa. PSAK 73 secara substansial masih menggunakan persyaratan akuntansi atas pesewa (*lessor*) sesuai PSAK 30 Sewa. Oleh karena itu, pesewa masih akan menggunakan klasifikasi sewa dalam sewa operasi atau pembiayaan, dan perlakuan atas kedua tipe sewa tersebut.

Perusahaan mengakui liabilitas sewa, sebagai pembayaran sewa yang tersisa termasuk atas opsi perpanjangan dimana perpanjangan hampir dapat dipastikan, didiskontokan menggunakan tingkat bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Aset hak-guna yang diakui adalah jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, yang disesuaikan dengan jumlah pembayaran sewa dibayar dimuka atau terutang terkait sewa tersebut.

Beban keuangan dicatat dalam laporan laba rugi. Aset sewa disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewa dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perusahaan akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

m. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud terdiri atas perangkat lunak.

Aset tidak berwujud diakui jika, dan hanya jika, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar entitas anak akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Property and equipment (continued)

At the reporting date the estimated useful lives, depreciation method, and residual values are reviewed.

l. Right-of-use assets

SFAS 73 introduces a single lessee accounting model and requires a lessee to recognize assets and liabilities for all leases with the exemptions of short-term leases and the underlying asset is of low value. A lessee is required to recognize a right-of-use asset representing its right to use the underlying leased asset and a lease liability representing its obligation to make lease payments. SFAS 73 substantially carries forward the lessor accounting requirements in SFAS 30 Leases. Accordingly, a lessor continues to classify its leases as operating leases or finance leases, and to account for those two types of leases differently.

The Company recognized a lease liability, being the remaining lease payments including extensions options where renewal is reasonably certain, discounted using the incremental borrowing rate at the date of initial application. The corresponding right-of-use asset recognized was an amount equal to the lease liability, adjusted by the amount of prepaid or accrued lease payments relating to those leases.

Finance expense is recorded in the statement of profit or loss. Leased assets are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the assets and the lease term, if there is no reasonable certainty that the Company will obtain ownership by the end of the lease term.

m. Intangible assets

Intangible assets consist of software.

Intangible assets are recognized if, and only if when its cost can be measured reliably and it is probable that expected future benefits that are attributable to it will flow to the entity.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Aset tidak berwujud (lanjutan)

Perangkat lunak

Perangkat lunak yang bukan merupakan bagian integral dari perangkat keras yang terkait dicatat sebagai aset tidak berwujud dan dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Biaya perolehan perangkat lunak terdiri dari seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam persiapan perangkat lunak tersebut dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Pengeluaran setelah perolehan perangkat lunak dapat ditambahkan pada biaya perolehan perangkat lunak atau dikapitalisasi sebagai perangkat lunak hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak yang bersangkutan sehingga menjadi lebih besar dari standar kinerja yang diperkirakan semula. Pengeluaran yang tidak menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Perangkat lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi umur manfaatnya, yaitu 4 (empat) dan 10 (sepuluh) tahun.

Amortisasi perangkat lunak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sejak tanggal perangkat lunak tersebut tersedia untuk dipakai sampai berakhirnya masa manfaat dari perangkat lunak tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Intangible assets (continued)

Software

Software which is not an integral part of a related hardware is recorded as intangible assets and stated at carrying amount, which is cost less accumulated amortization.

Cost of software consists of all expenses directly attributable to the preparation of such software cost and ready to be used for their intended purpose.

Subsequent expenditure on software is capitalized as software only if those expenditure increases the future economic benefits of the software, so that it becomes larger than originally expected performance standards. Expenditure with no addition of future economic benefits from the software is directly recognized as expenses when incurred.

Software is amortized by using straight-line method over the estimated useful life of software, which is 4 (four) and 10 (ten) years.

Amortization is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income from the date those software is available for use until the economic benefits of software is ended.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Aset tidak berwujud (lanjutan)

Perangkat lunak (lanjutan)

Aset tidak berwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian pengakuan aset tidak berwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan, jika ada, dan jumlah tercatat aset. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

n. Penurunan nilai aset non-keuangan

Suatu aset mengalami penurunan nilai jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai yang dapat dipulihkan. Nilai tercatat dari aset non-keuangan, kecuali aset pajak tangguhan, biaya dibayar dimuka, dan uang muka ditelaah setiap periode, untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Perusahaan akan melakukan estimasi jumlah nilai yang dapat dipulihkan.

o. Biaya penerbitan emisi efek ekuitas dan emisi obligasi

Biaya penerbitan efek ekuitas disajikan sebagai pengurang modal disetor lainnya dalam bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan.

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan obligasi dicatat sebagai pengurang terhadap hasil penerbitan dan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif selama jangka waktu obligasi (Catatan 2f).

p. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Intangible assets (continued)

Software (continued)

Intangible assets are derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. The gain or loss arising from the derecognition of intangible assets are determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the asset. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized.

n. Impairment of non-financial assets

Assets are considered as impaired when the carrying value of assets exceed the recoverable amount. The carrying amount of non financial assets, except for deferred tax assets, prepaid expenses, and advances are reviewed each period to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the Company will estimate the assets recoverability.

o. Stock and bonds issuance costs

Stock issuance costs are presented as deduction from additional paid-in capital in the equity section in the statement of financial position.

Costs incurred relating to the bonds issuance are presented as deduction from the issuance proceeds and amortized using the effective interest rate over the term of the bonds (Note 2f).

p. Provision

Provision are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Provisi (lanjutan)

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dipulihkan.

q. Pengakuan pendapatan dan beban

Perusahaan mengakui pendapatan atas pembiayaan konsumen seperti yang dijelaskan pada Catatan 2h di atas.

Pendapatan pembiayaan konsumen, pembiayaan modal usaha dan sewa pembiayaan dinyatakan sebesar pendapatan neto setelah dikurangi dengan bagian pendapatan milik bank-bank sehubungan dengan transaksi-transaksi kerjasama pembiayaan bersama.

Pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan konsumen diakui pada saat realisasi.

Pelunasan sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir dianggap sebagai suatu pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan laba atau rugi yang timbul, diakui sebagai laba rugi tahun berjalan.

Perusahaan berhak menentukan suku bunga yang lebih tinggi ke konsumen daripada suku bunga yang ditetapkan oleh bank-bank sehubungan dengan transaksi kerjasama pembiayaan bersama. Selisihnya merupakan pendapatan dari transaksi-transaksi tersebut bagi Perusahaan dan disajikan sebagai "Pendapatan Pembiayaan Konsumen - Neto" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Pendapatan bunga merupakan pendapatan yang diperoleh Perusahaan atas penempatan giro dan deposito di bank yang diakui pada saat diperoleh atau saat terjadinya.

Pendapatan dan beban administrasi, kecuali biaya-biaya/pendapatan yang timbul pertama kali yang terkait langsung dengan kredit pembiayaan konsumen seperti dijelaskan pada Catatan 2h, diakui pada saat diperoleh atau terjadinya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

p. Provision (continued)

Provision are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

q. Revenue and expense recognition

The Company recognizes revenue on consumer financing as explained in Note 2h above.

The consumer financing income, capital financing income and finance lease income are presented net of amounts of the banks' portion on such income relating to the cooperation transactions of joint financing.

Penalty income arising from late payments of consumer financing installments is recognized when realized.

Early termination is treated as cancellation of an existing agreement and the resulting gain or loss is recognized as profit or loss for the current year.

The Company has the right to set higher interest rates to customers than that stated by the banks for the cooperation transactions of joint financing. The difference is recognized as revenue from such transactions and presented as "Consumer Financing Income - Net" in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

Interest represents income obtained by the Company from its placement of current account and time deposits in banks which is recognized when earned or incurred.

Administration income and expenses, except for the initial direct costs/income relating to the consumer financing as explained in Note 2h, are recognized when earned or incurred.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah berdasarkan rata-rata kurs jual dan kurs beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan sebagai laba rugi tahun berjalan.

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, rata-rata kurs jual dan kurs beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang digunakan masing-masing sebesar Rp15.416 (dalam nilai penuh) dan Rp15.731 (dalam nilai penuh) untuk ASD1 (dalam nilai penuh).

s. Perpajakan

Perusahaan menerapkan PSAK 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan", yang mengharuskan Perusahaan untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam tahun berjalan.

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada revisi PSAK 46 yang disebutkan di atas, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46. Oleh karena itu, Perusahaan memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan deposito dan giro sebagai pos tersendiri.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Foreign currency transactions and balances

Transactions involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to Indonesian Rupiah to reflect the average of selling and buying exchange rate at such date as published by Bank Indonesia. Any resulting gains or losses are credited or charged to the profit or loss for current year.

As of December 31, 2023 and 2022, the average of selling and buying exchange rates at such date as published by Bank Indonesia used were Rp15,416 (in full amount) and Rp15,731 (in full amount) to USD1 (in full amount), respectively.

s. Taxation

The Company applied SFAS 46 (Revised 2014), "Accounting for Income Tax", which requires the Company to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the statement of financial position and transactions and other events of the current year.

Final Tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Referring to revised SFAS 46 as mentioned above, final tax is no longer governed by SFAS 46. Therefore, the Company has decided to present all of the final tax arising from time deposits and current account as separate line item.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Kini

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak periode berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti nilai terbawa atas saldo rugi fiskal yang belum digunakan, jika ada, juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada periode operasi berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

t. Segmen operasi

Segmen adalah bagian khusus dari Perusahaan yang terlibat baik menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional (Direktur) untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Taxation (continued)

Current Tax

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the period. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between commercial and tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Future tax benefit, such as the carry-forward of unused tax losses, if any, is also recognized to the extent that realization of such tax benefit is probable.

Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the assets are realized or the liabilities are settled, based on the applicable tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the statement of financial position date.

Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates is charged to current period operations, except to the extent that it relates to items previously charged or credited to equity.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Company, when the result of the appeal is determined.

t. Operating segment

A segment is a distinguishable component of the Company that is engaged either in providing certain products and services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and reward that are different from those of other segments.

The amount of each segment item reported is the measure reported to the chief operation decision maker (Directors) for the purposes of making decisions about allocating resources to the segment and assessing its performance.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Segmen operasi (lanjutan)

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk *item-item* yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

Informasi keuangan dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja setiap segmen dan menentukan pengalokasian sumber daya. Sehubungan dengan ini, segmen operasi dalam laporan keuangan disajikan berdasarkan pengklasifikasian umum atas daerah pemasaran sebagai segmen geografis. Rincian segmen operasi tersebut diungkapkan dalam Catatan 39.

u. Laba per saham dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode yang bersangkutan yaitu sejumlah 3.481.481.480 (dalam nilai penuh) saham untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (tidak diaudit).

v. Dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai suatu liabilitas dalam laporan keuangan pada periode ketika dividen tersebut diumumkan dan disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan.

w. Liabilitas imbalan kerja

Perusahaan menerapkan PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas imbalan kerja, untuk jangka pendek dan jangka panjang.

Perusahaan mengakui seluruh imbalan kerja yang diberikan melalui program atau perjanjian formal dan informal, peraturan perundang-undangan atau peraturan industri, yang mencakup imbalan kerja dan pesangon pemutusan hubungan kerja.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Operating segment (continued)

Segment revenue, expenses, result, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

Financial information is reported based on the information used by management in evaluating the performance of each segment and determining the allocation of resources. In this respect, the business operating segment in the financial statements are presented based on general classification of marketing areas as geographical segments. The details of operating segment are disclosed in Note 39.

u. Basic earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing income for the period with the weighted average number of shares outstanding during the period, which is 3,481,481,480 (in full amount) shares or each of the years then ended December 31, 2023 and 2022, respectively (unaudited).

v. Dividends

Dividend distribution to the Company's shareholders is recognized as a liability in the financial statements in the period in which the dividends are declared and approved by the Company's shareholders.

w. Liability for employee benefits

The Company adopted SFAS 24 (Revised 2013), "Employee Benefits", which regulates accounting treatment and disclosure employee benefits, for both short-term and long-term employee benefits.

The Company recognizes employee benefits under formal and informal programs or agreements, under legislative requirements or through industry arrangements, including employee benefits and termination benefits.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Perusahaan mencatat penyisihan manfaat pasti untuk memenuhi imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan Undang-undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 tanggal 2 November 2020 ("Undang-undang Cipta Kerja"). Penyisihan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode "*Projected Unit Credit*".

Perkiraan liabilitas pada tanggal laporan posisi keuangan merupakan nilai kini imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset program.

Biaya imbalan kerja yang diakui selama periode berjalan terdiri dari biaya jasa dalam laba rugi, bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto dalam laba rugi dan pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto dalam penghasilan komprehensif lain.

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja terdiri atas:
1. Keuntungan dan kerugian aktuarial.
2. Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto.
3. Setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada tahun berikutnya.

Perusahaan telah memiliki program pensiun untuk kompensasi pesangon yang mana Perusahaan membayar iuran ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") yang dihitung berdasarkan jumlah tertentu dari penghasilan tetap yang diterima karyawan yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan Perusahaan. Akumulasi saldo DPLK yang berasal dari kontribusi Perusahaan digunakan untuk membiayai imbalan pensiun normal sesuai dengan program imbalan pasti.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

w. Liability for employee benefits (continued)

The Company made provision for defined benefit in order to meet the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Company's regulation and Job Creation No. 11 year 2020 dated November 2, 2020 ("The Job Creation Law"). The said provision are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

The estimated liabilities as of the statement of financial position date represents the present value of the defined benefit obligation as of the statement of financial position date less the fair value of plan assets.

The employee benefits expense recognized during the current period consists of service cost in profit and loss, net interest on the net defined benefit liability in profit and loss and remeasurement of the net defined benefit liabilities in other comprehensive income.

Remeasurements of the net defined benefit liability consists of:
1. *Actuarial gains and losses.*
2. *Return on plan assets, excluding amount included in net interest on the net defined benefit liability.*
3. *Any change in effect of the asset ceiling, excluding amount including in net interest on the net defined benefit liability.*

Remeasurement of net defined benefit liabilities (assets), which is recognized as other comprehensive income are not reclassified to profit or loss in subsequent years.

The Company has a pension program for severance compensation where the Company pays contributions to a financial institution pension plan ("DPLK") which is calculated at a certain amount of fixed income of employees who meet the Company's criteria. The accumulated DPLK balance contributed by the Company is used to off set normal retirement benefit under fit defined benefit plan.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa penghargaan masa kerja yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Perusahaan. Perkiraan beban imbalan ini dihitung dan diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode yang diterapkan dalam menghitung liabilitas imbalan kerja. Liabilitas ini dihitung minimum satu tahun sekali oleh aktuaris independen. Imbalan kerja jangka panjang lainnya yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi.

x. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

Perusahaan telah menerapkan PSAK yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 yang dianggap relevan terhadap laporan keuangan sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi.
- Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi.
- Amandemen PSAK 16: "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan.
- Amandemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal.

Perusahaan telah menganalisa penerapan standar akuntansi di atas dan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun sebelumnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

w. Liability for employee benefits (continued)

The Company provides other long-term employee benefits in the form of long service award which is determined in compliance with the Company's Regulation. The expected costs of these benefits are calculated and recognized over the year of employment, using a method which is applied in calculating liability for employee benefits. These liabilities are calculated minimum once a year by an independent actuary. Other long-term employment benefits that are vested, are recognized as expense immediately in the statement of profit or loss.

x. Change in accounting policies and disclosures

The Company adopted SFAS which effective on January 1, 2023 which is considered relevant to the financial statements as follows:

- *Amendment of SFAS 1: Presentation of Financial Statement - Disclosure of Accounting Policies.*
- *Amendment of SFAS 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates.*
- *Amendment of SFAS 16: "Fixed Assets" regarding proceeds before intended use.*
- *Amendment of SFAS 46: "Income Tax" on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction.*

The Company has assessed that the adoption of the above mentioned accounting standards and does not have significant impact to the financial statements.

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN

Pertimbangan

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya.

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY

Judgements

The preparation of financial statements, in conformity with Financial Accounting Standards in Indonesia requires management to make estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Uncertainty about these assumptions and estimation could result material adjustments to the carrying amount of assets and liabilities within the next financial reporting year.

The following judgements are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Going concern

The Company's management has made an assessment of the Company's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Company has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Company's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

Classification of financial assets and financial liabilities

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 2.

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, nilainya ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan *(input)* untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia, bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan manajemen tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir tahun pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun pelaporan keuangan berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Judgements (continued)

Fair value of financial instruments

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded on the statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but when observable market data are not available, management judgement is required to establish fair values. The management judgements include considerations of liquidity and model inputs such as volatility for long-term derivatives and discount rates, early payment rates, and default rate assumptions.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial reporting year are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters which are available when the financial statements were prepared.

Existing assumptions and circumstances about future development, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Evaluasi atas cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dijelaskan pada Catatan 2e dan 2h.

Evaluasi cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif mencakup kerugian kredit yang melekat pada portofolio piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan modal usaha, dan piutang sewa pembiayaan dengan karakteristik risiko kredit yang sejenis ketika terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai piutang dalam portofolio tersebut. Dalam menentukan perlunya untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit, besarnya portofolio, konsentrasi kredit dan faktor-faktor ekonomi.

Dalam mengestimasi cadangan yang dibutuhkan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan keadaan ekonomi saat ini. Ketepatan dari cadangan ini bergantung pada asumsi model dan parameter yang digunakan dalam penentuan cadangan kolektif.

Metodologi dan asumsi yang digunakan dalam mengestimasi cadangan penurunan nilai dikaji ulang secara berkala untuk mengurangi selisih antara estimasi kerugian dengan kerugian aktual yang dialami.

Liabilitas imbalan kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun, dan tingkat kematian.

Walaupun Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Allowance for impairment losses on financial assets

Allowance for impairment losses on financial assets carried at amortized cost are evaluated as explained in Notes 2e and 2h.

Allowance for impairment losses collectively assessed includes inherent credit losses in consumer financing receivables, capital financing receivables, and finance lease receivables portfolios with similar credit risk characteristics when objective evidence of impairment exist for those portfolios. In assessing the need for collective allowances for impairment losses, management considers factors such as credit quality, portfolio size, credit concentrations and economic factors.

In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modeled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

The methodology and assumptions used for estimating the allowance for impairment losses are reviewed regularly to reduces any differences between loss estimate and actual loss experience.

Liability for employee benefits

The determination of the Company's liability for employee benefits is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such accounts. Those assumptions include among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age, and mortality rate.

While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual results or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its estimated liability for employee benefits and net employee benefits expense.

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penyusutan aset tetap dan aset tidak berwujud

Biaya perolehan aset tetap dan aset tidak berwujud disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset tidak berwujud antara 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Perpajakan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak Perusahaan. Perusahaan menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak.

Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak pada laba rugi. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak badan.

Pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan.

Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Depreciation of property and equipment and intangible assets

The costs of property and equipment and intangible assets are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these property and equipment and intangible assets ranging from 4 (four) to 10 (ten) years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

Taxation

Significant judgement is involved in determining the provision for tax. The Company provides tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due.

Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit and loss. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of corporate taxable income.

Deferred tax

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference.

Management judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future strategic tax planning.

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	31 Desember/*December 31*, 2023	2022	
Kas	5.012	7.674	*Cash on Hand*
Bank			*Cash in Banks*
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Central Asia Tbk	53.645	49.013	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18.580	221.472	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	18.304	24.306	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	6.957	7.194	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.534	5.453	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500)	566	439	*Others (each below Rp500)*
Subtotal	104.586	307.877	*Subtotal*
Pihak berelasi (Catatan 32)			*Related party (Note 32)*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	234.169	169.097	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
Subtotal	234.169	169.097	*Subtotal*
Total Bank	338.755	476.974	*Total Cash in Banks*
Cadangan kerugian penurunan nilai			*Allowance for impairment losses*
Pihak ketiga	(275)	(491)	*Third parties*
Pihak berelasi	(522)	(188)	*Related party*
Total cadangan kerugian penurunan nilai	(797)	(679)	*Total allowance for impairment losses*
Total Bank - neto	337.958	476.295	*Total Cash in Banks - net*
Total	**342.970**	**483.969**	***Total***

Total kas dan setara kas - bank berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

Total cash and cash equivalents - cash in banks based on collectibility are as follows:

Klasifikasi	31 Desember/*December 31*, 2023	2022	*Classification*
Lancar	338.755	476.974	*Current*
Total Kas dan Setara Kas - Bank	**338.755**	**476.974**	***Total Cash and Cash Equivalents - Cash in Banks***

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan cadangan atas kerugian kredit ekspektasian terkait bank dan setara kas adalah sebagai berikut:

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

An analysis of change in the gross carrying amount and the corresponding expected credit loss allowances of cash in banks and cash equivalents are as follows:

	31 Desember/ *December 31*, 2023				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Total/ *Total***	
Nilai tercatat bruto awal	476.974	-	-	476.974	*Beginning gross carrying amount*
Perubahan neto	(138.708)	-	-	(138.708)	*Net change*
Aset baru	687	-	-	687	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(198)	-	-	(198)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Nilai tercatat bruto akhir	**338.755**	**-**	**-**	**338.755**	***Ending gross carrying Amount***

	31 Desember/ *December 31*, 2023				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Total/ *Total***	
Saldo awal	679	-	-	679	*Beginning balance*
Perubahan neto	116	-	-	116	*Net change*
Aset baru	2	-	-	2	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	-	-	-	-	*Assets derecognized (other than write-off)*
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**797**	**-**	**-**	**797**	***Ending expected credit loss allowances***

	31 Desember/ *December 31*, 2022				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Total/ *Total***	
Nilai tercatat bruto awal	440.006	-	-	440.006	*Beginning gross carrying amount*
Perubahan neto	32.629	-	-	32.629	*Net change*
Aset baru	4.540	-	-	4.540	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(201)	-	-	(201)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Nilai tercatat bruto akhir	**476.974**	**-**	**-**	**476.974**	***Ending gross carrying amount***

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan cadangan atas kerugian kredit ekspektasian terkait bank dan setara kas adalah sebagai berikut: (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

An analysis of change in the gross carrying amount and the corresponding expected credit loss allowances of cash in banks and cash equivalents are as follows: (continued)

	31 Desember/ *December 31*, 2022				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Total/ *Total***	
Saldo awal	1.244	-	-	1.244	*Beginning balance*
Perubahan neto	(569)	-	-	(569)	*Net change*
Aset baru	4	-	-	4	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	-	-	-	-	*Assets derecognized (other than write-off)*
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**679**	**-**	**-**	**679**	***Ending expected credit loss allowances***

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai atas bank telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on cash in banks is adequate.

Tingkat suku bunga setahun untuk kas di bank berkisar 0,25% - 4,00% dan 0,25% - 2,65% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Interest rates per annum for cash in banks ranged from 0.25% - 4.00% and 0.25% - 2.65% for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

Lihat Catatan 32 untuk rincian transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 32 for details of transactions and balances with related parties.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar kas dan setara kas diungkapkan pada Catatan 35.

Information with respect to the classification and fair value of cash and cash equivalents is disclosed in Note 35.

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	**2022**	
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah			*Rupiah*
Piutang pembiayaan konsumen - bruto	4.858.515	4.718.685	*Consumer financing receivables - gross*
Dikurangi bagian yang dibiayai bank sehubungan dengan transaksi kerjasama pembiayaan bersama (Catatan 31 dan 32)	-	(23)	*Less amounts financed by banks relating to the joint financing cooperation transactions (Notes 31 and 32)*
Subtotal	4.858.515	4.718.662	*Subtotal*
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(1.113.201)	(1.052.073)	*Unearned consumer financing income*
Piutang pembiayaan konsumen	3.745.314	3.666.589	*Consumer financing receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(151.691)	(125.637)	*Allowance for impairment losses*
Piutang Pembiayaan Konsumen - neto	**3.593.623**	**3.540.952**	***Consumer Financing Receivables - net***

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan) / *5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES (continued)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Tingkat suku bunga efektif rata-rata tahunan - Rupiah	36,71%	36,65%	*Average effective annual interest rates - Rupiah*

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan cadangan atas kerugian kredit ekspektasian terkait piutang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

An analysis of change in the gross carrying amount and the corresponding expected credit loss allowances of consumer financing receivables are as follows:

	31 Desember/ *December 31*, 2023					
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Syariah/ *Sharia***	**Total/ *Total***	
Nilai tercatat bruto awal	3.331.313	112.824	76.401	146.051	3.666.589	*Beginning gross carrying amount*
Transfer ke *stage* 1	11.215	(10.651)	(564)	-	-	*Transfer to stage 1*
Transfer ke *stage* 2	(110.457)	110.817	(360)	-	-	*Transfer to stage 2*
Transfer ke *stage* 3	(75.743)	(7.628)	83.371	-	-	*Transfer to stage 3*
Perubahan neto	(790.323)	(51.960)	153.877	(46.077)	(734.483)	*Net change*
Aset baru	2.453.930	37.880	38.894	118.006	2.648.710	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(1.451.842)	(85.155)	(74.978)	- (33.601)	(1.645.576)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Penghapusbukuan	-	-	(182.146)	(7.780)	(189.926)	*Write-off*
Nilai tercatat bruto akhir	**3.368.093**	**106.127**	**94.495**	**176.599**	**3.745.314**	***Ending gross carrying amount***

	31 Desember/ *December 31*, 2023					
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Syariah/ *Sharia***	**Total/ *Total***	
Saldo awal	57.752	19.297	41.991	6.597	125.637	*Beginning balance*
Transfer ke *stage* 1	1.922	(1.635)	(287)	-	-	*Transfer to stage 1*
Transfer ke *stage* 2	(3.488)	3.640	(152)	-	-	*Transfer to stage 2*
Transfer ke *stage* 3	(2.272)	(1.322)	3.594	-	-	*Transfer to stage 3*
Perubahan neto	(13.288)	6.298	202.688	56.333	252.031	*Net change*
Aset baru	43.771	8.798	24.509	5.578	82.656	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(21.478)	(14.697)	(31.988)	(50.544)	(118.707)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Penghapusbukuan	-	-	(182.146)	(7.780)	(189.926)	*Write-off*
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**62.919**	**20.379**	**58.209**	**10.184**	**151.691**	***Ending expected credit loss allowances***

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan cadangan atas kerugian kredit ekspektasian terkait piutang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut: (lanjutan)

5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES (continued)

An analysis of change in the gross carrying amount and the corresponding expected credit loss allowances of consumer financing receivables are as follows: (continued)

	31 Desember/ *December 31*, 2022					
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Syariah/ *Sharia***	**Total/ *Total***	
Nilai tercatat bruto awal	4.010.960	111.037	66.415	14.319	4.202.731	*Beginning gross carrying amount*
Transfer ke *stage* 1	3.697	(3.279)	(418)	-	-	*Transfer to stage 1*
Transfer ke *stage* 2	(139.012)	139.361	(349)	-	-	*Transfer to stage 2*
Transfer ke *stage* 3	(74.054)	(8.759)	82.813	-	-	*Transfer to stage 3*
Perubahan neto	(899.671)	(67.433)	128.040	319	(838.745)	*Net change*
Aset baru	2.177.042	26.892	21.646	145.753	2.371.333	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(1.747.649)	(84.995)	(65.260)	(13.201)	(1.911.105)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Penghapusbukuan	-	-	(156.486)	(1.139)	(157.625)	*Write-off*
Nilai tercatat bruto akhir	**3.331.313**	**112.824**	**76.401**	**146.051**	**3.666.589**	***Ending gross carrying amount***

	31 Desember/ *December 31*, 2022					
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Syariah/ *Sharia***	**Total/ *Total***	
Saldo awal	110.950	2.175	38.870	889	152.884	*Beginning balance*
Transfer ke *stage* 1	304	(64)	(240)	-	-	*Transfer to stage 1*
Transfer ke *stage* 2	(4.136)	4.293	(157)	-	-	*Transfer to stage 2*
Transfer ke *stage* 3	(2.356)	(132)	2.488	-	-	*Transfer to stage 3*
Perubahan neto	(48.564)	9.038	211.381	1.164	173.019	*Net change*
Aset baru	35.039	5.730	12.510	6.540	59.819	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(33.485)	(1.743)	(66.375)	(857)	(102.460)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Penghapusbukuan	-	-	(156.486)	(1.139)	(157.625)	*Write-off*
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**57.752**	**19.297**	**41.991**	**6.597**	**125.637**	***Ending expected credit loss allowances***

Piutang pembiayaan konsumen yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 0,09% dan 1,45% dari saldo piutang pembiayaan konsumen sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

The percentage of restructured consumer financing receivables as of December 31, 2023 and 2022 are 0.09% and 1.45% respectively of the consumer financing receivables balance before net of allowance for impairment losses.

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

Perusahaan telah melakukan restrukturisasi pembiayaan untuk debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19 yaitu penundaan pokok, perpanjangan tenor dan *change due date* sesuai dengan POJK No. 14/POJK.05/2020 "Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank" tanggal 17 April 2020. Per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo piutang pembiayaan konsumen - bruto restrukturisasi Covid-19 masing-masing sebesar Rp3.398 dan Rp53.127. Sesuai dengan kebijakan tersebut, kualitas aset pembiayaan direstrukturisasi ditetapkan lancar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan masing-masing sebesar Rp215.980 dan Rp130.378.

Akun ini merupakan piutang yang dikenakan bunga yang timbul dari kegiatan pembiayaan dalam bentuk pinjaman multiguna dan penyediaan kendaraan bermotor roda dua atau roda empat kepada konsumen dengan pembayaran angsuran secara berkala.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah pendapatan transaksi yang terkait langsung dengan pemberian pembiayaan konsumen masing-masing sebesar Rp7.565 dan Rp8.764.

Angsuran piutang yang akan diterima dari konsumen sesuai tanggal jatuh tempo kontraktualnya adalah sebagai berikut:

5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES (continued)

The Company has restructured it's financing for debtors affected by the Covid-19 pandemic by tenure extension, grace period, and change of due date in accordance with POJK No. 14/POJK.05/2020 "Countercyclical Policy Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 for Non-Bank Financial Services Institutions" dated April 17, 2020. As of December 31, 2023 and 2022, the balance of restructured Covid-19 consumer financing receivables - gross amounted to Rp3,398 and Rp53,127, respectively. Based on the aforementioned regulation, the restructured financing asset quality is current.

For the years ended December 31, 2023 and 2022, provision on impairment losses during the current year amounted to Rp215,980 and Rp130,378, respectively.

This account represents interest-bearing receivables arising from financing activities in the form of multi purpose financing and providing two-wheeled or four-wheeled motor vehicles to consumers with periodic installment payment schedule.

As of December 31, 2023 and 2022, the directly attributable transaction fee to the origination of consumer financing accounts amounted to Rp7,565 and Rp8,764, respectively.

Installment receivables which will be collected from consumers in accordance with the contractual due dates are as follows:

	31 Desember/*December 31*,		
Jatuh tempo dalam waktu	**2023**	**2022**	***Due in***
Telah jatuh tempo	99.428	91.595	*Due*
< 1 tahun	2.956.899	2.939.337	*< 1 year*
1 - 2 tahun	1.342.602	1.300.962	*1 - 2 years*
> 2 tahun	459.586	386.791	*> 2 years*
Total Piutang Pembiayaan Konsumen - bruto	**4.858.515**	**4.718.685**	***Total Consumer Financing Receivables - gross***

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

Pengelompokan piutang pembiayaan konsumen - bruto menurut hari tunggakan adalah sebagai berikut:

5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES (continued)

Classification of consumer financing receivables - gross based on overdue days are as follows:

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	**2022**	
Tidak ada tunggakan	4.164.539	4.060.856	*Current*
1-90 hari	567.392	559.469	*1-90 days*
91-120 hari	28.734	25.373	*91-120 days*
121-180 hari	45.946	32.550	*121-180 days*
> 180 hari	51.904	40.437	*> 180 days*
Total Piutang Pembiayaan Konsumen - bruto	**4.858.515**	**4.718.685**	***Total Consumer Financing Receivables - gross***

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh piutang pembiayaan konsumen dinilai secara kolektif penurunan nilainya.

As of December 31, 2023 and 2022, all consumer financing receivables were collectively assessed for impairment.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang pembiayaan konsumen.

The Company's management believes that the above allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that may arise from uncollectible consumer financing receivables.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, piutang pembiayaan konsumen masing-masing sebesar Rp2.278.276 dan Rp2.330.580 digunakan sebagai jaminan atas utang bank dan masing-masing sebesar Rp371.066 dan Rp472.712 sebagai jaminan atas utang obligasi (Catatan 14 dan 20).

As of December 31, 2023 and 2022, the consumer financing receivables amounted to Rp2,278,276 and Rp2,330,580, respectively, are pledged as collateral to the bank loans and amounted to Rp371,066 and Rp472,712 to the bonds payable, respectively (Notes 14 and 20).

Sebagai jaminan atas pembiayaan konsumen yang diberikan, Perusahaan menerima jaminan dari konsumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") dari kendaraan bermotor roda dua atau roda empat.

As collateral to the consumer financing receivables, the Company receives the ownership certificates ("BPKB") of the two-wheeled or four-wheeled motor vehicles.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar piutang pembiayaan konsumen - neto diungkapkan pada Catatan 35.

Information with respect to the classification and fair value of consumer financing receivables - net is disclosed in Note 35.

6. PIUTANG PEMBIAYAAN MODAL USAHA / *6. CAPITAL FINANCING RECEIVABLES*

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	**2022**	
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah			*Rupiah*
Piutang pembiayaan modal usaha - bruto	62.319	240.048	*Capital financing receivables - gross*
Pendapatan pembiayaan modal usaha yang belum diakui	(8.311)	(48.545)	*Unearned capital financing income*
Piutang pembiayaan modal usaha	54.008	191.503	*Capital financing receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.122)	(5.615)	*Allowance for impairment losses*
Piutang Pembiayaan Modal Usaha - neto	**51.886**	**185.888**	***Capital Financing Receivables - net***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Tingkat suku bunga efektif rata-rata tahunan - Rupiah	25,04%	24,85%	*Average effective annual interest rates - Rupiah*

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan cadangan atas kerugian kredit ekspektasian terkait piutang pembiayaan modal usaha adalah sebagai berikut:

An analysis of change in the gross carrying amount and the corresponding expected credit loss allowances of capital financing receivables are as follows:

	31 Desember/ *December 31*, 2023				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Total/ *Total***	
Nilai tercatat bruto awal	180.367	6.121	5.015	191.503	*Beginning gross carrying amount*
Transfer ke *stage* 1	780	(681)	(99)	-	*Transfer to stage 1*
Transfer ke *stage* 2	(7.163)	7.163	-	-	*Transfer to stage 2*
Transfer ke *stage* 3	(2.018)	(505)	2.523	-	*Transfer to stage 3*
Perubahan neto	(36.696)	(2.661)	9.115	(30.242)	*Net change*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(88.115)	(4.341)	(4.917)	(97.373)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Penghapusbukuan	-	-	(9.880)	(9.880)	*Write-off*
Nilai tercatat bruto akhir	**47.155**	**5.096**	**1.757**	**54.008**	***Ending gross carrying amount***

6. PIUTANG PEMBIAYAAN MODAL USAHA (lanjutan)

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan cadangan atas kerugian kredit ekspektasian terkait piutang pembiayaan modal usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

6. CAPITAL FINANCING RECEIVABLES (continued)

An analysis of change in the gross carrying amount and the corresponding expected credit loss allowances of capital financing receivables are as follows: (continued)

	31 Desember/ *December 31*, 2023				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Total/ *Total***	
Saldo awal	2.767	913	1.935	5.615	*Beginning balance*
Transfer ke *stage* 1	135	(98)	(37)	-	*Transfer to stage 1*
Transfer ke *stage* 2	(190)	190	-	-	*Transfer to stage 2*
Transfer ke *stage* 3	(54)	(66)	120	-	*Transfer to stage 3*
Perubahan neto	(472)	311	13.739	13.578	*Net change*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(1.378)	(654)	(5.161)	(7.193)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Penghapusbukuan	-	-	(9.878)	(9.878)	*Write-off*
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**808**	**596**	**718**	**2.122**	***Ending expected credit loss allowances***

	31 Desember/ *December 31*, 2022				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Total/ *Total***	
Nilai tercatat bruto awal	244.096	1.176	221	245.493	*Beginning gross carrying amount*
Transfer ke *stage* 1	116	(116)	-	-	*Transfer to stage 1*
Transfer ke *stage* 2	(5.267)	5.267	-	-	*Transfer to stage 2*
Transfer ke *stage* 3	(3.546)	(22)	3.568	-	*Transfer to stage 3*
Perubahan neto	(46.692)	(1.185)	2.957	(44.920)	*Net change*
Aset baru	74.879	2.039	1.998	78.916	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(83.219)	(1.038)	(221)	(84.478)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Penghapusbukuan	-	-	(3.508)	(3.508)	*Write-off*
Nilai tercatat bruto akhir	**180.367**	**6.121**	**5.015**	**191.503**	***Ending gross carrying amount***

	31 Desember/ *December 31*, 2022				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Total/ *Total***	
Saldo awal	5.225	34	81	5.340	*Beginning balance*
Transfer ke *stage* 1	3	(3)	-	-	*Transfer to stage 1*
Transfer ke *stage* 2	(116)	116	-	-	*Transfer to stage 2*
Transfer ke *stage* 3	(79)	(1)	80	-	*Transfer to stage 3*
Perubahan neto	(1.693)	481	4.729	3.517	*Net change*
Aset baru	1.104	316	772	2.192	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(1.677)	(30)	(221)	(1.928)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Penghapusbukuan	-	-	(3.506)	(3.506)	*Write-off*
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**2.767**	**913**	**1.935**	**5.615**	***Ending expected credit loss allowances***

6. PIUTANG PEMBIAYAAN MODAL USAHA (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan masing-masing sebesar Rp6.385 dan Rp3.781.

Akun ini merupakan piutang yang dikenakan bunga yang timbul dari kegiatan pembiayaan modal kerja dalam bentuk pinjaman modal usaha kepada konsumen dengan pembayaran angsuran secara berkala dan jaminan berupa kendaraan roda empat.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah biaya transaksi yang terkait langsung dengan pemberian pembiayaan modal usaha masing-masing sebesar Rp169 dan Rp740.

Angsuran piutang yang akan diterima dari konsumen sesuai tanggal jatuh tempo kontraktualnya adalah sebagai berikut:

6. CAPITAL FINANCING RECEIVABLES (continued)

For the years ended December 31, 2023 and 2022, provision on impairment losses during the current year amounted to Rp6,385 and Rp3,781, respectively.

This account represents interest-bearing receivables arising from working capital financing activities in the form of capital financing to consumers with periodic installment payment schedule and as collateral is four-wheeled motor vehicles.

As of December 31, 2023 and 2022, the directly attributable transaction cost to the origination of capital financing accounts amounted to Rp169 and Rp740, respectively.

Installment receivables which will be collected from consumers in accordance with the contractual due dates are as follows:

	31 Desember/*December 31*,		
Jatuh tempo dalam waktu	**2023**	**2022**	***Due in***
Telah jatuh tempo	2.388	3.357	*Due*
< 1 tahun	48.170	128.585	*< 1 year*
1 - 2 tahun	11.153	87.672	*1 - 2 years*
> 2 tahun	608	20.434	*> 2 years*
Total Piutang Pembiayaan Modal Usaha - bruto	**62.319**	**240.048**	***Total Capital Financing Receivables - gross***

Pengelompokan piutang pembiayaan modal usaha - bruto menurut hari tunggakan adalah sebagai berikut:

Classification of capital financing receivables - gross based on overdue days are as follows:

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	**2022**	
Tidak ada tunggakan	42.245	195.898	*Current*
1-90 hari	18.068	38.424	*1-90 days*
91-120 hari	687	1.922	*91-120 days*
121-180 hari	311	1.038	*121-180 days*
> 180 hari	1.008	2.766	*> 180 days*
Total Piutang Pembiayaan Modal Usaha - bruto	**62.319**	**240.048**	***Total Capital Financing Receivables - gross***

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh piutang pembiayaan modal usaha dinilai secara kolektif penurunan nilainya.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang pembiayaan modal usaha.

As of December 31, 2023 and 2022, all capital financing receivables were collectively assessed for impairment.

The Company's management believes that the above allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that may arise from uncollectible capital financing receivables.

6. PIUTANG PEMBIAYAAN MODAL USAHA (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, piutang pembiayaan modal usaha masing-masing sebesar Rp1.127 dan Rp967 digunakan sebagai jaminan atas utang bank dan masing-masing sebesar Rp29.334 dan Rp79.282 sebagai jaminan atas utang obligasi (Catatan 14 dan 20).

Sebagai jaminan atas pembiayaan modal usaha yang diberikan, Perusahaan menerima jaminan dari konsumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") dari kendaraan bermotor roda empat.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar piutang pembiayaan modal usaha - neto diungkapkan pada Catatan 35.

6. CAPITAL FINANCING RECEIVABLES (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, the capital financing receivables amounted to Rp1,127 and Rp967, respectively, are pledged as collateral to the bank loans and amounted to Rp29,334 and Rp79,282 to the bonds payable, respectively (Notes 14 and 20).

As collateral to the capital financing receivables, the Company receives the ownership certificates ("BPKB") of the four-wheeled motor vehicles.

Information with respect to the classification and fair value of capital financing receivables - net is disclosed in Note 35.

7. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN / *7. FINANCE LEASE RECEIVABLES*

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	**2022**	
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah			*Rupiah*
Piutang sewa pembiayaan - bruto	3.197.790	1.572.401	*Finance lease receivables - gross*
Nilai sisa terjamin	1.274.419	576.149	*Guaranteed residual value*
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(848.560)	(415.094)	*Unearned finance lease income*
Simpanan jaminan	(1.274.419)	(576.149)	*Security deposit*
Piutang sewa pembiayaan	2.349.230	1.157.307	*Finance lease receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(58.875)	(19.342)	*Allowance for impairment losses*
Piutang Sewa Pembiayaan - neto	**2.290.355**	**1.137.965**	***Finance Lease Receivables - net***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Tingkat suku bunga efektif rata-rata tahunan - Rupiah	24,93%	24,44%	*Average effective annual interest rates - Rupiah*

7. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan cadangan atas kerugian kredit ekspektasian terkait piutang sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

7. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)

An analysis of change in the gross carrying amount and the corresponding expected credit loss allowances of finance lease receivables are as follows:

	31 Desember/ *December 31*, 2023				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Total/ *Total***	
Nilai tercatat bruto awal	1.137.783	10.726	8.798	1.157.307	*Beginning gross carrying amount*
Transfer ke *stage* 1	1.734	(1.576)	(158)	-	*Transfer to stage 1*
Transfer ke *stage* 2	(42.532)	42.532	-	-	*Transfer to stage 2*
Transfer ke *stage* 3	(19.321)	(832)	20.153	-	*Transfer to stage 3*
Perubahan neto	(204.142)	(11.192)	25.907	(189.427)	*Net change*
Aset baru	1.820.848	33.089	16.184	1.870.121	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(442.807)	(8.058)	(7.613)	(458.478)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Penghapusbukuan	-	-	(30.293)	(30.293)	*Write-off*
Nilai tercatat bruto akhir	**2.251.563**	**64.689**	**32.978**	**2.349.230**	***Ending gross carrying amount***

	31 Desember/ *December 31*, 2023				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Total/ *Total***	
Saldo awal	14.409	1.633	3.300	19.342	*Beginning balance*
Transfer ke *stage* 1	270	(211)	(59)	-	*Transfer to stage 1*
Transfer ke *stage* 2	(780)	780	-	-	*Transfer to stage 2*
Transfer ke *stage* 3	(361)	(175)	536	-	*Transfer to stage 3*
Perubahan neto	(42)	4.028	42.074	46.060	*Net change*
Aset baru	26.523	6.014	6.650	39.187	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(5.530)	(1.215)	(8.676)	(15.421)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Penghapusbukuan	-	-	(30.293)	(30.293)	*Write-off*
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**34.489**	**10.854**	**13.532**	**58.875**	***Ending expected credit loss allowances***

	31 Desember/ *December 31*, 2022				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Total/ *Total***	
Nilai tercatat bruto awal	125.898	514	128	126.540	*Beginning gross carrying amount*
Transfer ke *stage* 1	390	(390)	-	-	*Transfer to stage 1*
Transfer ke *stage* 2	(5.592)	5.592	-	-	*Transfer to stage 2*
Transfer ke *stage* 3	(1.047)	-	1.047	-	*Transfer to stage 3*
Perubahan neto	(25.377)	(1.741)	859	(26.259)	*Net change*
Aset baru	1.090.070	6.874	7.888	1.104.832	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(46.559)	(123)	(128)	(46.810)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Penghapusbukuan	-	-	(996)	(996)	*Write-off*
Nilai tercatat bruto akhir	**1.137.783**	**10.726**	**8.798**	**1.157.307**	***Ending gross carrying Amount***

7. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan cadangan atas kerugian kredit ekspektasian terkait piutang sewa pembiayaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

7. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)

An analysis of change in the gross carrying amount and the corresponding expected credit loss allowances of finance lease receivables are as follows: (continued)

	31 Desember/ *December 31*, 2022				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Total/ *Total***	
Saldo awal	2.688	13	48	2.749	*Beginning balance*
Transfer ke *stage* 1	11	(11)	-	-	*Transfer to stage 1*
Transfer ke *stage* 2	(129)	129	-	-	*Transfer to stage 2*
Transfer ke *stage* 3	(25)	-	25	-	*Transfer to stage 3*
Perubahan neto	(925)	341	1.730	1.146	*Net change*
Aset baru	13.719	1.162	2.949	17.830	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(930)	(1)	(456)	(1.387)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Penghapusbukuan	-	-	(996)	(996)	*Write-off*
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**14.409**	**1.633**	**3.300**	**19.342**	***Ending expected credit loss allowances***

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan masing-masing sebesar Rp69.826 dan Rp17.589.

For the years ended December 31, 2023 and 2022, provision on impairment losses during the current year amounted to Rp69,826 and Rp17,589, respectively.

Akun ini merupakan piutang yang dikenakan bunga yang timbul dari kegiatan pembiayaan dalam bentuk sewa pembiayaan roda empat kepada konsumen dengan pembayaran angsuran secara berkala.

This account represents interest-bearing receivables arising from financing activities in the form of finance lease of four-wheeled motor vehicles to consumers with periodic installment payment schedule.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah pendapatan transaksi yang terkait langsung dengan pemberian sewa pembiayaan masing-masing sebesar Rp50.719 dan Rp22.583.

As of December 31, 2023 and 2022, the directly attributable transaction fee to the origination of finance lease accounts amounted to Rp50,719 and Rp22,583, respectively.

Angsuran piutang yang akan diterima dari konsumen sesuai tanggal jatuh tempo kontraktualnya adalah sebagai berikut:

Installment receivables which will be collected from consumers in accordance with the contractual due dates are as follows:

Jatuh tempo dalam waktu	**31 Desember/*December 31*, 2023**	**2022**	***Due in***
Telah jatuh tempo	28.073	4.126	*Due*
< 1 tahun	1.389.324	679.290	*< 1 year*
1 - 2 tahun	1.067.649	524.909	*1 - 2 years*
> 2 tahun	712.744	364.076	*> 2 years*
Total Piutang Sewa Pembiayaan - bruto	**3.197.790**	**1.572.401**	***Total Finance Lease Receivables - gross***

7. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Pengelompokan piutang sewa pembiayaan - bruto menurut hari tunggakan adalah sebagai berikut:

7. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)

Classification of finance lease receivables - gross based on overdue days are as follows:

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	**2022**	
Tidak ada tunggakan	2.762.316	1.466.211	*Current*
1-90 hari	392.626	102.312	*1-90 days*
91-120 hari	11.601	2.814	*91-120 days*
121-180 hari	14.136	688	*121-180 days*
> 180 hari	17.111	376	*> 180 days*
Total Piutang Sewa Pembiayaan - bruto	**3.197.790**	**1.572.401**	***Total Finance Lease Receivables - gross***

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh piutang sewa pembiayaan dinilai secara kolektif penurunan nilainya.

As of December 31, 2023 and 2022, all finance lease receivables were collectively assessed for impairment.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang sewa pembiayaan.

The Company's management believes that the above allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that may arise from uncollectible finance lease receivables.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, piutang sewa pembiayaan masing-masing sebesar Rp307.478 dan Rp1.764 digunakan sebagai jaminan atas utang bank dan masing-masing sebesar Rp597.400 dan Rp169.688 sebagai jaminan atas utang obligasi (Catatan 14 dan 20).

As of December 31, 2023 and 2022, the finance lease receivables amounted to Rp307,478 and Rp1,764, respectively, are pledged as collateral to the bank loans and amounted to Rp597,400 and Rp169,688 to the bonds payable, respectively (Notes 14 and 20).

Sebagai jaminan atas sewa pembiayaan yang diberikan, Perusahaan menerima jaminan dari konsumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") dari kendaraan bermotor roda empat.

As collateral to the finance lease receivables, the Company receives the ownership certificates ("BPKB") of the four-wheeled motor vehicles.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar piutang sewa pembiayaan - neto diungkapkan pada Catatan 35.

Information with respect to the classification and fair value of finance lease receivables - net is disclosed in Note 35.

8. PIUTANG LAIN-LAIN / *8. OTHER RECEIVABLES*

	31 Desember/*December 31*, 2023	31 Desember/*December 31*, 2022	
Piutang penerimaan angsuran konsumen	24.344	15.748	*Consumer installment receipt receivables*
Piutang aset tarikan	23.098	4.095	*Receivables from foreclosed collateral*
Piutang pengembalian premi asuransi	1.583	845	*Insurance premium receivable*
Pinjaman karyawan	649	43	*Loans to employees*
Piutang tagihan asuransi konsumen	431	816	*Insurance receivables from consumer*
Lain-lain	1.846	1.024	*Others*
Subtotal	51.951	22.571	*Subtotal*
Cadangan kerugian penurunan nilai - pengembalian premi asuransi dan pinjaman karyawan	(18)	(54)	*Allowance for impairment losses - insurance premium receivable and loans to employees*
Cadangan kerugian penurunan nilai - piutang aset tarikan	(1.821)	(1.920)	*Allowance for impairment losses - receivables from foreclosed collateral*
Pihak ketiga - neto	50.112	20.597	*Third parties - net*
Pihak-pihak berelasi			*Related parties*
Pinjaman karyawan (Catatan 32)	1.011	1.210	*Loans to employees (Note 32)*
Cadangan kerugian penurunan nilai - pinjaman karyawan	(25)	(28)	*Allowance for impairment losses - loans to employees*
Pihak berelasi - neto	986	1.182	*Related parties - net*
Total	**51.098**	**21.779**	***Total***

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan cadangan atas kerugian kredit ekspektasian terkait piutang aset tarikan, piutang pengembalian premi asuransi, dan pinjaman karyawan adalah sebagai berikut:

An analysis of change in the gross carrying amount and the corresponding allowances for expected credit loss of receivables from foreclosed collateral, Insurance premium receivable, and loan to employees are as follows:

	31 Desember/ *December 31*, 2023				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Total/ *Total***	
Nilai tercatat bruto awal	2.098	-	4.095	6.193	*Beginning gross carrying amount*
Perubahan neto	1.145	-	-	1.145	*Net change*
Aset baru	-	-	23.098	23.098	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	-	-	(4.095)	(4.095)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Nilai tercatat bruto akhir	**3.243**	**-**	**23.098**	**26.341**	***Ending gross carrying amount***

	31 Desember/ *December 31*, 2023				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Total/ *Total***	
Saldo awal	82	-	1.920	2.002	*Beginning balance*
Perubahan neto	(39)	-	-	(39)	*Net change*
Aset baru	-	-	1.821	1.821	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	-	-	(1.920)	(1.920)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**43**	**-**	**1.821**	**1.864**	***Ending expected credit loss allowances***

8. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan cadangan atas kerugian kredit ekspektasian terkait piutang aset tarikan, piutang pengembalian premi asuransi, dan pinjaman karyawan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

8. OTHER RECEIVABLES (continued)

An analysis of change in the gross carrying amount and the corresponding allowances for expected credit loss of receivables from foreclosed collateral, Insurance premium receivable, and loan to employees are as follows: (continued)

	31 Desember/ *December 31*, 2022				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Total/ *Total***	
Nilai tercatat bruto awal	5.157	-	4.278	9.435	*Beginning gross carrying amount*
Perubahan neto	(3.059)	-	4.095	1.036	*Net change*
Aset baru	-	-	-	-	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	-	-	(4.278)	(4.278)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Nilai tercatat bruto akhir	**2.098**	**-**	**4.095**	**6.193**	***Ending gross carrying amount***

	31 Desember/ *December 31*, 2022				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Total/ *Total***	
Saldo awal	724	-	2.430	3.154	*Beginning balance*
Perubahan neto	(642)	-	1.920	1.278	*Net change*
Aset baru	-	-	-	-	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	-	-	(2.430)	(2.430)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**82**	**-**	**1.920**	**2.002**	***Ending expected credit loss allowances***

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan masing-masing sebesar Rp138 dan Rp1.152.

For the years ended December 31, 2023 and 2022, reversal on impairment losses during the current year amounted to Rp138 and Rp1,152, respectively.

Piutang penerimaan angsuran konsumen merupakan pembayaran angsuran konsumen melalui *collecting agents* seperti PT Pos Indonesia, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, PT Midi Utama Indonesia Tbk, PT Rintis Sejahtera, PT Sarana Yukti Bandhana, PT Indomarco Prismatama, dan PT Sinar Digital Terdepan yang akan dibayarkan ke Perusahaan melalui transfer ke rekening bank dengan jangka waktu 1 (satu) hari sampai dengan 5 (lima) hari kerja terhitung dari tanggal penerimaan angsuran konsumen.

Consumer installment receipt receivables are consumer installment payments through collecting agents which are PT Pos Indonesia, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, PT Midi Utama Indonesia Tbk, PT Rintis Sejahtera, PT Sarana Yukti Bandhana, PT Indomarco Prismatama, and PT Sinar Digital Terdepan which will be paid to the Company by transfer to bank account within 1 (one) day up to 5 (five) working days from the date of receipt of the consumer installment.

8. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Pinjaman karyawan terdiri dari pinjaman karyawan dan pinjaman kepada direktur. Pinjaman karyawan merupakan pinjaman tanpa bunga yang diangsur melalui pemotongan gaji setiap bulan dengan jangka waktu pinjaman berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun. Pinjaman kepada direktur dikenakan bunga sebesar 5,00% per tahun, yang diangsur melalui pemotongan gaji setiap bulan dengan jangka waktu pinjaman 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

Nilai wajar dari pinjaman karyawan dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar.

Pinjaman karyawan untuk pemilikan kendaraan dijamin dengan BPKB kendaraan yang dibiayai.

Piutang pengembalian premi asuransi merupakan tagihan klaim yang diajukan kepada perusahaan asuransi atas kelebihan pembayaran premi asuransi.

Piutang lain-lain tanggal 31 Desember 2022 termasuk saldo reklasifikasi atas piutang aset tarikan dari piutang pembiayaan konsumen, modal usaha dan sewa pembiayaan yang telah diambilalih (Catatan 41).

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa semua piutang pengembalian premi asuransi dapat tertagih.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar piutang lain-lain diungkapkan pada Catatan 35.

8. OTHER RECEIVABLES (continued)

Loans to employees consist of loans to employees and loans to directors. Loans to employees represent non-interest bearing loans, which are repaid through monthly salary deductions over the loan periods ranging from 1 (one) year to 3 (three) years. Loans to directors which bear annual interest rate at 5.00% per annum, are repaid through monthly salary deductions over the loan period of 10 (ten) years to 15 (fifteen) years.

The fair value of employee loans is determined by discounting cash flows using the market interest rate.

Loans to employees for vehicle ownership are secured by the vehicles' BPKB of the financed vehicles.

Insurance premium refund represents refund receivables from insurance companies related to excess payment of insurance premium.

Other receivables as of December 31, 2022 include reclassification balances of receivables from consumer financing receivables, capital financing receivables, and finance lease receivables that have been repossessed (Note 41).

The Company's management believes that all insurance premium refund can be collected.

The Company's management believes that the above allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that may arise from uncollectible other receivables.

Information with respect to the classification and fair value of other receivables is disclosed in Note 35.

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA / *9. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES*

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	**2022**	
Sewa dan uang muka renovasi kantor	7.628	4.114	*Office rentals and advance for renovations*
Uang muka *dealer*	5.594	710	*Dealer advances*
Biaya dibayar dimuka pemeliharaan sistem	3.881	2.656	*Prepaid expense system maintenance*
Uang muka perangkat lunak dan lisensi	2.235	1.944	*Advance for software and licenses*
Biaya dibayar dimuka asuransi	811	707	*Prepaid expense insurance*
Lain-lain	5.861	2.475	*Others*
Total	**26.010**	**12.606**	***Total***

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar uang muka *dealer* diungkapkan pada Catatan 35.

Information with respect to the classification and fair value of dealer advances is disclosed in Note 35.

10. ASET TETAP / *10. PROPERTY AND EQUIPMENT*

	31 Desember/*December 31*, 2023					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklas/ *Reclass***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya Perolehan						*Cost*
Kepemilikan langsung:						*Direct ownership:*
Tanah	798	-	-	-	798	*Land*
Bangunan	5.115	-	-	-	5.115	*Buildings*
Renovasi kantor	68.680	13.210	385	-	81.505	*Leasehold improvement*
Kendaraan	59.456	8.171	33.316	-	34.311	*Vehicles*
Peralatan kantor	99.778	26.867	3.795	-	122.850	*Office equipment*
Perabot kantor	21.689	1.701	271	(127)	22.992	*Office furniture and fixtures*
Total Biaya Perolehan	255.516	49.949	37.767	(127)	267.571	*Total Cost*
Akumulasi Penyusutan						*Accumulated Depreciation*
Kepemilikan langsung:						*Direct ownership:*
Bangunan	5.115	-	-	-	5.115	*Buildings*
Renovasi kantor	40.361	11.802	385	-	51.778	*Leasehold improvement*
Kendaraan	45.922	5.450	32.225	-	19.147	*Vehicles*
Peralatan kantor	78.629	13.569	3.303	-	88.895	*Office equipment*
Perabot kantor	20.455	783	270	(101)	20.867	*Office furniture and fixtures*
Total Akumulasi Penyusutan	190.482	31.604	36.183	(101)	185.802	*Total Accumulated Depreciation*
Jumlah Tercatat	**65.034**				**81.769**	***Carrying Amount***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan) / *10. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)*

31 Desember/*December 31*, 2022

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklas/ *Reclass*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya Perolehan						*Cost*
Kepemilikan langsung:						*Direct ownership:*
Tanah	798	-	-	-	798	*Land*
Bangunan	5.200	-	85	-	5.115	*Buildings*
Renovasi kantor	129.858	10.010	71.188	-	68.680	*Leasehold improvement*
Kendaraan	64.074	11.566	16.184	-	59.456	*Vehicles*
Peralatan kantor	279.862	6.720	158.954	(27.850)	99.778	*Office equipment*
Perabot kantor	29.046	717	8.074	-	21.689	*Office furniture and fixtures*
Total Biaya Perolehan	508.838	29.013	254.485	(27.850)	255.516	*Total Cost*
Akumulasi Penyusutan						*Accumulated Depreciation*
Kepemilikan langsung:						*Direct ownership:*
Bangunan	5.200	-	85	-	5.115	*Buildings*
Renovasi kantor	99.220	11.835	70.694	-	40.361	*Leasehold improvement*
Kendaraan	56.062	5.736	15.876	-	45.922	*Vehicles*
Peralatan kantor	247.783	10.351	159.190	(20.315)	78.629	*Office equipment*
Perabot kantor	26.919	1.853	8.317	-	20.455	*Office furniture and fixtures*
Total Akumulasi Penyusutan	435.184	29.775	254.162	(20.315)	190.482	*Total Accumulated Depreciation*
Jumlah Tercatat	**73.654**				**65.034**	***Carrying Amount***

10. ASET TETAP (lanjutan)

Perabot kantor - neto sebesar Rp26 direklasifikasi ke akun aset tidak berwujud (Catatan 12). Beban penyusutan adalah masing-masing sebesar Rp31.604 dan Rp29.775 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Pengurangan aset tetap di atas termasuk penjualan aset dengan rincian sebagai berikut:

10. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)

Office furniture and fixtures - net amounting to Rp26 is reclassified to intangible asset (Note 12). Depreciation charged to operations amounting to Rp31,604 and Rp29,775 for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

The above deductions in fixed assets include sale of assets with details as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Hasil penjualan aset tetap	1.401	1.018	*Proceeds from sale of property and equipment*
Nilai buku aset tetap	(1.215)	(323)	*Net book value of property and equipment*
Laba penjualan aset tetap	**186**	**695**	***Gain on sale of property and equipment***

Laba penjualan aset tetap disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan Lain-lain - Lain-lain" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Gain on sale of property and equipment is recorded as part of "Other Revenues - Others" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Perusahaan mencatat penghapusbukuan aset tetap dengan nilai buku sebesar Rp369. Beban penghapusbukuan aset tetap tersebut disajikan sebagai bagian dari "Beban Lain-lain – Lain-lain" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

The Company recorded a write-off of property and equipment with net book value amounted to Rp369. The expense for the write-off of property and equipment is recorded as part of "Other Expenses - Others" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Hak Guna Bangunan ("HGB") atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Sunter, Jakarta seluas 74 meter persegi, Tangerang (Banten) seluas 150 meter persegi, Sidoarjo (Jawa Timur) seluas 150 meter persegi, Samarinda (Kalimantan Timur) seluas 74 meter persegi, dan Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 1.221 meter persegi akan berakhir masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2027, 15 Juli 2027, 4 Januari 2027, 7 Agustus 2026, dan 23 September 2040. Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa HGB-HGB di atas dapat diperpanjang pada saat masa berlakunya berakhir.

Rights to Use the Building ("Hak Guna Bangunan - HGB") covering the land and buildings located at Sunter, Jakarta with area of 74 square metres, Tangerang (Banten) with area of 150 square metres, Sidoarjo (East Java) with area of 150 square metres, Samarinda (East Kalimantan) with area of 74 square metres, and Yogyakarta Province with area of 1,221 square metres will expire on August 2, 2027, July 15, 2027, January 4, 2027, August 7, 2026, and September 23, 2040, respectively. The Company's management believes that the above HGBs can be renewed at the expiry dates.

Berdasarkan penelaahan penurunan nilai atas aset tetap, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat terpulihkan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Based on the assessment for impairment of the property and equipment, the Company's management believes that there are no events or changes in circumstances, which may indicate that the carrying amounts of these assets are not recoverable as of December 31, 2023 and 2022.

10. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan keseluruhan sebesar Rp179.725 dan ASD3.385.039 (dalam nilai penuh) pada tanggal 31 Desember 2023 dan Rp162.345 dan ASD3.398.939 (dalam nilai penuh) pada tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset tetap tersebut diasuransikan melalui PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Adira Dinamika *(Adira Insurance),* dan PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.

Seluruh perusahaan asuransi tersebut di atas adalah pihak ketiga.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset tetap dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp140.902 dan Rp129.085 telah disusutkan penuh dan masih digunakan oleh Perusahaan (tidak diaudit).

Selama belum lunas, aset tetap berupa kendaraan yang diperoleh melalui fasilitas pembiayaan digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan kendaraan yang diperoleh dari PT Maybank Indonesia Finance, pihak berelasi (Catatan 32).

Estimasi nilai wajar tanah dan bangunan Perusahaan berdasarkan nilai jual objek pajak pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp22.424.

10. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)

Property and equipment are covered by insurance against losses from fire and other risks for a total coverage of Rp179,725 and USD3,385,039 (in full amount) as of December 31, 2023 and Rp162,345 and USD3,398,939 (in full amount) as of December 31, 2022. As of December 31, 2023 and 2022, property and equipment are insured through PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Adira Dinamika (Adira Insurance), and PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.

All the above insurance companies are third parties.

The Company's management believes that the sum insured is adequate to cover the possible losses from these insured risks.

As of December 31, 2023 and 2022, property and equipment with acquisition cost amounting to Rp140,902 and Rp129,085, respectively, have been fully depreciated and are still being used by the Company (unaudited).

Until fully paid, property and equipment in the form of vehicles which are acquired through financing facilities are used as collateral to the vehicles financing facilities obtained from PT Maybank Indonesia Finance, a related party (Note 32).

The estimated fair value of the Company's land and building based on tax object sale value as of December 31, 2023 and 2022 is Rp22,424.

11. ASET HAK-GUNA / *11. RIGHT-OF-USE ASSETS*

Rekonsiliasi kelompok-kelompok utama aset hak-guna adalah sebagai berikut:

The reconciliation of right-of-use assets by major classifications is as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Aset hak-guna:					*Right-of-use assets:*
Bangunan					*Premises*
Nilai bruto	143.743	49.937	(11.719)	181.961	*Gross balance*
Akumulasi penyusutan	(62.317)	(39.084)	11.713	(89.688)	*Accumulated depreciation*
Neto	**81.426**	**10.853**	**(6)**	**92.273**	***Net***

	31 Desember/*December 31,* 2022				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Aset hak-guna:					*Right-of-use assets:*
Bangunan					*Premises*
Nilai bruto	139.015	26.261	(21.533)	143.743	*Gross balance*
Akumulasi penyusutan	(55.627)	(28.223)	21.533	(62.317)	*Accumulated depreciation*
Neto	**83.388**	**(1.962)**	**-**	**81.426**	***Net***

Laporan laba rugi menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

Statement of profit or loss shows the following amounts related to leases:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Beban penyusutan aset hak-guna	39.084	28.223	*Depreciation expense of right-of-use assets*
Beban bunga (Catatan 29)	3.247	3.861	*Interest expense (Note 29)*
Total	**42.331**	**32.084**	***Total***

12. ASET TIDAK BERWUJUD / *12. INTANGIBLE ASSETS*

Aset tidak berwujud terdiri dari perangkat lunak. / *Intangible assets consist of software.*

	31 Desember/*December 31*, 2023					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklas/ *Reclass***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Perangkat lunak:						*Software:*
Biaya perolehan	75.092	14.349	-	127	89.568	*At cost*
Akumulasi penyusutan	(32.258)	(7.746)	-	(101)	(40.105)	*Accumulated depreciation*
Jumlah Tercatat	**42.834**	**6.603**	**-**	**26**	**49.463**	***Carrying Amount***

	31 Desember/*December 31*, 2022					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklas/ *Reclass***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Perangkat lunak:						*Software:*
Biaya perolehan	41.278	9.432	(3.468)	27.850	75.092	*At cost*
Akumulasi penyusutan	(8.926)	(5.073)	2.056	(20.315)	(32.258)	*Accumulated depreciation*
Jumlah Tercatat	**32.352**	**4.359**	**(1.412)**	**7.535**	**42.834**	***Carrying Amount***

13. ASET LAIN-LAIN / *13. OTHER ASSETS*

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	**2022**	
Taksiran tagihan pajak (Catatan 17)			*Claim for tax refund (Note 17)*
Tahun pajak 2018	691	9.878	*Fiscal year 2018*
Tahun pajak 2017	36.346	39.903	*Fiscal year 2017*
Tahun pajak 2016	622	5.224	*Fiscal year 2016*
Uang jaminan	4.114	3.762	*Security deposit*
Lain-lain	-	23	*Others*
Total	**41.773**	**58.790**	***Total***

14. UTANG BANK / *14. BANK LOANS*

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	2022	
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank Pan Indonesia Tbk (Pokok pinjaman sebesar Rp647.270 dan Rp989.308, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp862 dan Rp2.257 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)	646.408	987.051	*PT Bank Pan Indonesia Tbk (Outstanding loans of Rp647,270 and Rp989,308, net of unamortized bank provision of Rp862 and Rp2,257 as of December 31, 2023 and 2022, respectively)*
PT Bank Digital BCA (Pokok pinjaman sebesar Rp416.667, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp867 pada tanggal 31 Desember 2023)	415.800	-	*PT Bank Digital BCA (Outstanding loans of Rp416,667, net of unamortized bank provision of Rp867 as of December 31, 2023)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pokok pinjaman sebesar Rp396.436 dan Rp801.513, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp420 dan Rp1.337 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)	396.016	800.176	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Outstanding loans of Rp396,436 and Rp801,513, net of unamortized bank provision of Rp420 and Rp1,337 as of December 31, 2023 and 2022, respectively)*
PT Bank Maspion (Pokok pinjaman sebesar Rp267.639, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp608 pada tanggal 31 Desember 2023)	267.031	-	*PT Bank Maspion (Outstanding loans of Rp267,639, net of unamortized bank provision of Rp608 as of December 31, 2023)*
PT Bank KEB Hana Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rp217.211 dan Rp191.643, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp299 dan Rp351 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)	216.912	191.292	*PT Bank KEB Hana Indonesia (Outstanding loans of Rp217,211 and Rp191,643, net of unamortized bank provision of Rp299 and Rp351 as of December 31, 2023 and 2022, respectively)*
PT Bank HSBC Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rp200.000, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar RpNihil pada tanggal 31 Desember 2023)	200.000	-	*PT Bank HSBC Indonesia (Outstanding loans of Rp200,000, net of unamortized bank provision of RpNil as of December 31, 2023)*
PT Bank DKI (Pokok pinjaman sebesar Rp183.333 dan Rp91.667, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp335 dan Rp202 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)	182.998	91.465	*PT Bank DKI (Outstanding loans of Rp183,333 and Rp91,667, net of unamortized bank provision of Rp335 and Rp202 as of December 31, 2023 and 2022, respectively)*
PT Bank IBK Indonesia Tbk (Pokok pinjaman sebesar Rp146.243, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp342 pada tanggal 31 Desember 2023)	145.901	-	*PT Bank IBK Indonesia Tbk (Outstanding loans of Rp146,243, net of unamortized bank provision of Rp342 as of December 31, 2023)*

14. UTANG BANK (lanjutan) / *14. BANK LOANS (continued)*

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	**2022**	
Pihak ketiga (lanjutan)			*Third parties (continued)*
PT Bank Shinhan Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rp79.167 dan Rp129.167, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp106 dan Rp275 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)	79.061	128.892	*PT Bank Shinhan Indonesia (Outstanding loans of Rp79,167 and Rp129,167, net of unamortized bank provision of Rp106 and Rp275 as of December 31, 2023 and 2022, respectively)*
PT Bank Permata Tbk (Pokok pinjaman sebesar Rp52.778 dan Rp102.778, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp47 dan Rp175 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)	52.731	102.603	*PT Bank Permata Tbk (Outstanding loans of Rp52,778 and Rp102,778, net of unamortized bank provision of Rp47 and Rp175 as of December 31, 2023 and 2022, respectively)*
PT Bank DKI Syariah (Pokok pinjaman sebesar Rp23.379 dan Rp36.160, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar RpNihil dan RpNihil pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)	23.379	36.160	*PT Bank DKI Syariah (Outstanding loans of Rp23,379 and Rp36,160, net of unamortized bank provision of RpNil and RpNil as of December 31, 2023 and 2022, respectively)*
PT Bank CTBC Indonesia (Pokok pinjaman sebesar RpNihil dan Rp12.500, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar RpNihil dan Rp3 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)	-	12.497	*PT Bank CTBC Indonesia (Outstanding loans of RpNil and Rp12,500, net of unamortized bank provision of RpNil and Rp3 as of December 31, 2023 and 2022, respectively)*
Total	**2.626.237**	**2.350.136**	***Total***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Kisaran suku bunga kontraktual tahunan			*Range of contractual annual interest rates*
Mata uang Rupiah	6,00%-7,50%	6,00%-8,55%	*Rupiah currency*

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 11 Juni 2013, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap III dan Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dengan jumlah maksimum dana yang disediakan masing-masing sebesar Rp500.000 dan Rp50.000, yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen dan cadangan modal kerja. Tanggal jatuh tempo dari masing-masing pinjaman adalah 39 (tiga puluh sembilan) bulan dan 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit dan telah berakhir pada tanggal 11 September 2016 untuk Fasilitas Pinjaman Tetap III dan berakhir pada tanggal 11 Juni 2014 untuk Fasilitas Pinjaman Rekening Koran.

Perjanjian Kredit untuk Fasilitas Pinjaman Rekening Koran ini telah mengalami beberapa kali perpanjangan, terakhir perpanjangan fasilitas berdasarkan perubahan terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 002/IBD-PRK/LEG/19/Per.IV tanggal 20 Mei 2021 yang telah jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2022.

Berdasarkan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 002/IBD-PRK/LEG/19/Per.V tanggal 24 Mei 2022, Bank Panin setuju untuk memperpanjang sementara jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022.

Berdasarkan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 002/IBD-PRK/LEG/19/Per.VI tanggal 19 Agustus 2022, Bank Panin setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan tanggal 28 Mei 2023.

Berdasarkan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 002/IBD-PRK/LEG/19/Per.VII tanggal 24 Mei 2023, Bank Panin setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan tanggal 28 Mei 2024.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,50% per tahun.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total plafon pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp50.000 (Catatan 5, 6, dan 7), tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga, objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta mempertahankan rasio *Non Performing Loan* ("NPL") neto di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 3,00%.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")

Based on the Credit Agreement No. 37 dated June 11, 2013, Bank Panin agreed to provide a Fixed Loan Facility III and Overdraft Loan Facility with maximum available fund amounting to Rp500,000 and Rp50,000, respectively, which was used for working capital for consumer financing and working capital provision. The maturity date of each loan is 39 (thirty nine) months and 1 (one) year from the signing date of credit agreement and has expired on September 11, 2016 for Fixed Loan Facility III and on June 11, 2014 for Overdraft Loan Facility.

The Agreement for the Overdraft Loan Facilty has been extended several times, the latest extention of the facility based on the Credit Agreement and Security Agreement No. 002/IBD PRK/LEG/19/Per.IV dated May 20, 2021 which matured on May 28, 2022.

Based on the Amendment to the Credit Agreement and Guarantee Agreement No. 002/IBD-PRK/LEG/19/Per.V dated May 24, 2022, Bank Panin agreed to temporarily extend the term of the credit facility until August 28, 2022.

Based on the Amendment to the Credit Agreement and Guarantee Agreement No. 002/IBD-PRK/LEG/19/Per.VI dated August 19, 2022, Bank Panin agreed to extend the term of the credit facility until May 28, 2023.

Based on the Amendment to the Credit Agreement and Guarantee Agreement No. 002/IBD-PRK/LEG/19/Per.VII dated May 24, 2023, Bank Panin agreed to extend the term of the credit facility until May 28, 2024.

The loan bears interest rate at 10.50% per annum.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net consumer financing receivables at 100.00% of the total amount of the loan with category day past due not over than 90 (ninety) days amounting to Rp50,000 (Notes 5, 6, and 7), not pledged to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 10 times, and maintain maximum Non Performing Loan ("NPL") net ratio above 90 (ninety) days of 3.00%.

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin") (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 75 tanggal 28 Mei 2014, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Pasar Uang dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp200.000 yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Pasar Uang adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Perjanjian Kredit untuk Fasilitas Pinjaman Pasar Uang ini telah mengalami beberapa kali perpanjangan, terakhir perpanjangan fasilitas berdasarkan perubahan terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 002/IBD-MM/LEG/19/Per.IV tanggal 20 Mei 2021 yang telah jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2022.

Berdasarkan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 002/IBD-MM/LEG/19/Per.V tanggal 24 Mei 2022, Bank Panin setuju untuk memperpanjang sementara jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022.

Berdasarkan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 002/IBD-MM/LEG/19/Per.VI tanggal 19 Agustus 2022, Bank Panin setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan tanggal 28 Mei 2023.

Berdasarkan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 002/IBD-MM/LEG/19/Per.VII tanggal 24 Mei 2023, Bank Panin setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan tanggal 28 Mei 2024.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga yang akan ditetapkan pada saat penarikan.

Perjanjian ini dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 60,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali serta mempertahankan rasio NPL neto diatas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 3,00%.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin") (continued)

Based on the Credit Agreement No. 75 dated May 28, 2014, Bank Panin agreed to provide a Money Market Loan Facility with maximum available fund amounting to Rp200,000, which was used as consumer finance working capital. The loan's maturity date is 1 (one) year from the signing date of credit agreement.

The Agreement for the Money Market Loan Facility has been extended several times, the latest extentions of the facility based on the Credit Agreement and Security Agreement No. 002/IBD-MM/LEG/19/Per.IV dated May 20, 2021 which matured on May 28, 2022.

Based on the Amendment to the Credit Agreement and Guarantee Agreement No. 002/IBD-MM/LEG/19/Per.V dated May 24, 2022, Bank Panin agreed to temporarily extend the term of the credit facility until August 28, 2022.

Based on the Amendment to the Credit Agreement and Guarantee Agreement No. 002/IBD-MM/LEG/19/Per.VI dated August 19, 2022, Bank Panin agreed to extend the term of the credit facility until May 28, 2023.

Based on the Amendment to the Credit Agreement and Guarantee Agreement No. 002/IBD-MM/LEG/19/Per.VII dated May 24, 2023, Bank Panin agreed to extend the term of the credit facility until May 28, 2024.

The loan bears interest rate which will be determined upon withdrawal.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net consumer financing receivables at 60.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than 90 (ninety) days, not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance and maintain maximum debt to equity ratio of 10 times and maintain maximum NPL net ratio above 90 (ninety) days of 3.00%.

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin") (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 21 tanggal 22 Oktober 2020, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap XVII dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp600.000 yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Tetap XVII adalah 30 (tiga puluh) bulan sejak tanggal penandatangan perjanjian kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 8,75% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap XVII.

Berdasarkan Surat No. 381/IBD/EXT/20 tanggal 1 Desember 2020, Bank Panin setuju untuk menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman Tetap XVII, tingkat suku bunga sebesar 8,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap XVII.

Berdasarkan Surat No. 145/IBD/EXT/21 tanggal 4 Mei 2021, Bank Panin setuju untuk kembali menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman Tetap XVII, tingkat suku bunga sebesar 7,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap XVII.

Berdasarkan Surat No. 160/IBD/EXT/21 tanggal 19 Mei 2021, Bank Panin setuju untuk kembali menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman Tetap XVII, tingkat suku bunga sebesar 6,75% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap XVII.

Berdasarkan Surat No. 277/IBD/EXT/21 tanggal 31 Agustus 2021, Bank Panin setuju untuk kembali menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman Tetap XVII, tingkat suku bunga sebesar 6,125% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 19 (sembilan belas) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap XVII.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin") (continued)

Based on the Credit Agreement and Security Agreement No. 21 dated October 22, 2020, Bank Panin agreed to provide a Fixed Loan Facility XVII with maximum available fund amounting to Rp600,000, which is used as consumer finance working capital. The loan's maturity date is 30 (thirty) months from the signing date of credit agreement.

The loan bears interest rate at 8.75% per annum during the loan period for 24 (twenty four) months, which remains valid for the period of Fixed Loan XVII.

Based on Letter No. 381/IBD/EXT/20 dated December 1, 2020, Bank Panin agreed to adjust the condition of Fixed Loan Facility XVII interest rate, the interest rate at 8.00% per annum during the loan period for 24 (twenty four) months, which remains valid for the period of Fixed Loan XVII.

Based on Letter No. 145/IBD/EXT/21 dated May 4, 2021, Bank Panin agreed to readjust the condition of Fixed Loan Facility XVII interest rate, the interest rate at 7.00% per annum during the loan period for 24 (twenty four) months, which remains valid for the period of Fixed Loan XVII.

Based on Letter No. 160/IBD/EXT/21 dated May 19, 2021, Bank Panin agreed to readjust the condition of Fixed Loan Facility XVII interest rate, the interest rate at 6.75% per annum during the loan period for 24 (twenty four) months, which remains valid for the period of Fixed Loan XVII.

Based on Letter No. 277/IBD/EXT/21 dated August 31, 2021, Bank Panin agreed to readjust the condition of Fixed Loan Facility XVII interest rate, the interest rate at 6.125% per annum during the loan period for 19 (nineteen) months, which remains valid for the period of Fixed Loan XVII.

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin") (lanjutan)

Fasilitas pinjaman ini telah jatuh tempo dan lunas pada tanggal 21 April 2023.

Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 05 tanggal 26 Oktober 2021, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap XVIII dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp800.000 yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Tetap XVIII adalah 30 (tiga puluh) bulan sejak tanggal penandatangan perjanjian kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 6,25% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap XVIII.

Berdasarkan Surat No. 339/IBD/EXT/21 tanggal 29 Oktober 2021, Bank Panin setuju untuk menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman Tetap XVIII, tingkat suku bunga sebesar 6,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap XVIII.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 90,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp72.103 (Catatan 5, 6, dan 7), tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta rasio NPL neto di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 3,00%.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin") (continued)

This loan facility has been due and fully paid on April 21, 2023.

Based on the Credit Agreement and Security Agreement No. 05 dated October 26, 2021, Bank Panin agreed to provide a Fixed Loan Facility XVIII with maximum available fund amounting to Rp800,000, which is used as consumer finance working capital. The loan's maturity date is 30 (thirty) months from the signing date of credit agreement.

The loan bears interest rate at 6.25% per annum during the loan period for 24 (twenty four) months, which remains valid for the period of Fixed Loan XVIII.

Based on Letter No. 339/IBD/EXT/21 dated October 29, 2021, Bank Panin agreed to readjust the condition of Fixed Loan Facility XVIII interest rate, the interest rate at 6.00% per annum during the loan period for 24 (twenty four) months, which remains valid for the period of Fixed Loan XVIII.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net consumer financing receivables at 90.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than 90 (ninety) days amounting to Rp72,103 (Notes 5, 6, and 7), not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 10 times, and maintain maximum NPL net ratio above 90 (ninety) days of 3.00%.

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin") (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 18 tanggal 19 September 2022, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap XIX dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp800.000 yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Tetap XIX adalah 42 (empat puluh dua) bulan sejak tanggal penandatangan perjanjian kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 6,25% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan dan 6,50% per tahun untuk jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap XIX.

Berdasarkan Surat No. 304/IBD/EXT/22 tanggal 28 September 2022, Bank Panin menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman Tetap XIX, tingkat suku bunga sebesar 6,50% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan dan sebesar 6,75% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap XIX.

Berdasarkan Surat No. 364/IBD/EXT/22 tanggal 5 Desember 2022, Bank Panin menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman Tetap XIX, tingkat suku bunga sebesar 7,25% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan dan sebesar 7,40% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap XIX.

Berdasarkan Surat No. 031/IBD/EXT/23 tanggal 14 Februari 2023, Bank Panin menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman Tetap XIX, tingkat suku bunga sebesar 7,25% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan dan sebesar 7,25% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap XIX.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin") (continued)

Based on the Credit Agreement and Security Agreement No. 18 dated September 19, 2022, Bank Panin agreed to provide a Fixed Loan Facility XIX with maximum available fund amounting to Rp800,000, which is used as consumer finance working capital. The loan's maturity date is 42 (forty two) months from the signing date of credit agreement.

The loan bears interest rate at 6.25% per annum during the loan period for 24 (twenty four) months and 6.50% per annum during the loan period for 36 (thirty six) months, which remains valid for the period of Fixed Loan XIX.

Based on Letter No. 304/IBD/EXT/22 dated September 28, 2022, Bank Panin readjusted the condition of Fixed Loan Facility XIX interest rate, the interest rate at 6.50% per annum during the loan period for 24 (twenty four) months and 6.75% per annum during the loan period for 36 (thirty six) months, which remains valid for the period of Fixed Loan XIX.

Based on Letter No. 364/IBD/EXT/22 dated December 5, 2022, Bank Panin readjusted the condition of Fixed Loan Facility XIX interest rate, the interest rate at 7.25% per annum during the loan period for 24 (twenty four) months and 7.40% per annum during the loan period for 36 (thirty six) months, which remains valid for the period of Fixed Loan XIX.

Based on Letter No. 031/IBD/EXT/23 dated February 14, 2023, Bank Panin readjust the condition of Fixed Loan Facility XIX interest rate, the interest rate at 7.25% per annum during the loan period for 24 (twenty four) months and 7.25% per annum during the loan period for 36 (thirty six) months, which remain valid for the period of Fixed Loan XIX.

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin") (lanjutan)

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 90,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp510.441 (Catatan 5, 6, dan 7), tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan, mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta rasio NPL neto di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 3,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan masih memiliki fasilitas pinjaman yang belum digunakan dari Bank Panin sebesar Rp250.000 untuk Fasilitas Rekening Koran dan *Money Market*.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank Panin masing-masing sebesar Rp942.037 dan Rp864.578.

PT Bank Digital BCA ("Bank Digital BCA")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 8 Juni 2023, Bank Digital BCA setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman *Installment Loan* dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp500.000 untuk keperluan modal kerja pembiayaan konsumen. Jangka waktu fasilitas ini adalah 36 (tiga puluh enam) dengan *availability period* 3 (tiga) bulan sejak akad kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 7,25% per tahun yang berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas Kredit *Installment Loan.*

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari pinjaman yang belum dilunasi dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp416.667 (Catatan 5, 6, dan 7), tidak dalam keadaan dijaminkan pada pihak ketiga mana pun dan harus objek pembiayaan diasuransikan, mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta mempertahankan rasio *Non Performing Loan* ("NPL") *gross* di atas 90 (sembilan puluh) hari dibawah 5,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari Bank Digital BCA untuk Fasilitas Kredit *Installment Loan*.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin") (continued)

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net consumer financing receivables at 90.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than 90 (ninety) days amounting to Rp510,441 (Notes 5, 6, and 7), not pledged to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 10 times, and maintain maximum NPL net ratio above 90 (ninety) days of 3.00%.

As of December 31, 2023, the Company still has the unused loan facility from Bank Panin amounting to Rp250,000 for Overdraft and Money Market Facility.

For the years ended December 31, 2023 and 2022, the Company paid installment of bank loan to Bank Panin amounting to Rp942,037 and Rp864,578, respectively.

PT Bank Digital BCA ("Bank Digital BCA")

Based on Credit Agreement No. 20 dated June 8, 2023, Bank Digital BCA agreed to provide Installment Loan Facility with maximum available fund amounting to Rp500,000, which will be used for consumer finance working capital. Loan's maturity date is 36 (thirty six) months with availability period 3 (three) months from the signing date of credit agreement.

The loan bears interest rate at 7.25% per annum, which remain valid for a period of Installment Loan Facility.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net consumer financing receivables at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than 30 (thirty) days amounting to Rp416,667 (Notes 5, 6, and 7), not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 10 times, and maintain maximum Non Performing Loan ("NPL") gross ratio above 90 (ninety) days under 5.00%.

As of December 31, 2023, the Company has fully utilized the loan facility from Bank Digital BCA for Installment Loan Facility.

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Digital BCA ("Bank Digital BCA") (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank Digital BCA sebesar Rp83.333.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")

Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 43 tanggal 20 September 2019, Bank Mandiri setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp500.000 yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatangan.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 9,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan 8,55% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Kredit Modal Kerja.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (81embali81 puluh) hari, tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta rasio *Non Performing Loan* ("NPL") di atas 90 (81embali81 puluh) hari maksimal 5,00%.

Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 56 tanggal 25 November 2020, Bank Mandiri setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp250.000 yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja adalah 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 8,50% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) sampai 48 (empat puluh delapan) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Kredit Modal Kerja.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Digital BCA ("Bank Digital BCA") (continued)

For the year ended December 31, 2023, the Company paid installment of bank loan to Bank Digital BCA amounting to Rp83,333.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")

Based on the Credit Agreement and Security Agreement No. 43 dated September 20, 2019, Bank Mandiri agreed to provide a Working Capital Loan Facility with maximum available fund amounting Rp500,000 which was used for working capital for consumer financing. The maturity date of Working Capital Loan Facility is 12 (twelve) months from the signing date.

The loan bears an interest rates 9.00% per annum, during the loan period for 36 (thirty six) months and 8.55% per annum, during the loan period for 48 (forty eight) months which remains valid for a period of Working Capital Loan Facility.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net consumer financing receivables at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than 90 (ninety) days, not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 10 times, and maintain maximum Non Performing Loan ("NPL") ratio above 90 (ninety) days of 5.00%.

Based on the Credit Agreement and Security Agreement No. 56 dated November 25, 2020, Bank Mandiri agreed to provide a Working Capital Loan Facility which maximum available fund amounting to Rp250,000 which was used for working capital for consumer financing. The maturity date of Working Capital Loan Facility is 60 (sixty) months from the signing date of Credit Agreement.

The loan bears an interest rates 8.50% per annum, during the loan period for 12 (twelve) months until 48 (forty eight) months which remain valid for a period of Working Capital Loan Facility.

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") (lanjutan)

Berdasarkan Surat No. CMB.CM5/MTA.0210/2021 tanggal 22 Maret 2021, Bank Mandiri setuju untuk menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Kredit Modal Kerja, tingkat suku bunga sebesar 7,50% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) sampai 48 (empat puluh delapan) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Kredit Modal Kerja.

Berdasarkan surat No. CMB.CM5/MTA.564/2021 tanggal 12 Agustus 2021, Bank mandiri setuju untuk 82embali menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Kredit Modal Kerja, tingkat suku bunga sebesar 7,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) sampai 48 (empat puluh delapan) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Kredit Modal Kerja.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang memiliki tunggakan kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp40.924 (Catatan 5, 6, dan 7), tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan, mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta rasio NPL di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5,00%.

Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 34 tanggal 24 September 2021, Bank Mandiri setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp250.000 yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja adalah 50 (lima puluh) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 7,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) sampai 48 (empat puluh delapan) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Kredit Modal Kerja.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") (continued)

Based on Letter No. CMB.CM5/MTA.0210/2021 dated March 22, 2021, Bank Mandiri agreed to adjust the condition of Working Capital Loan Facility interest rate, the interest rate at 7.50% per annum, during the loan period for 12 (twelve) months until 48 (forty eight) months which remain valid for a period of Working Capital Loan Facility.

Based on Letter No. CMB.CM5/MTA.564/2021 dated August 12, 2021, Bank Mandiri agreed to adjust the condition of Working Capital Loan Facility interest rate, the interest rate at 7.00% per annum, during the loan period for 12 (twelve) months until 48 (forty eight) months which remain valid for a period of Working Capital Loan Facility.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net consumer financing receivables at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due less than 90 (ninety) days amounting to Rp40,924 (Notes 5, 6, and 7), not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 10 times, and maintain maximum NPL ratio above 90 (ninety) days of 5.00%.

Based on the Credit Agreement and Security Agreement No. 34 dated September 24, 2021, Bank Mandiri agreed to provide a Working Capital Loan Facility which maximum available fund amounting Rp250,000 which was used for working capital for consumer financing. The maturity date of Working Capital Loan Facility is 50 (fifty) months from the signing date of Credit Agreement.

The loan bears an interest rates 7.00% per annum, during the loan period for 12 (twelve) months until 48 (forty eight) months which remain valid for a period of Working Capital Loan Facility.

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") (lanjutan)

Berdasarkan Surat No. CMB.CM5/MTA.0708/2021 tanggal 27 September 2021, Bank Mandiri setuju untuk menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Kredit Modal Kerja, tingkat suku bunga sebesar 6,50% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) sampai 36 (tiga puluh enam) bulan dan 7,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Kredit Modal Kerja.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang memiliki tunggakan kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp71.486 (Catatan 5, 6, dan 7), tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan, mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta rasio NPL di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5,00%.

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 34 tanggal 16 Juni 2022, Bank Mandiri setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp500.000 yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja adalah 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 6,50% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) sampai 36 (tiga puluh enam) bulan dan sebesar 7,00% untuk jangka waktu pinjaman lebih dari 36 (tiga puluh enam) sampai 48 (empat puluh delapan) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Kredit Modal Kerja.

Berdasarkan Surat No. CMB.CM5/MTA.674/2022 tanggal 27 Juli 2022, Bank Mandiri menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Kredit Modal Kerja, tingkat suku bunga sebesar 6,50% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) sampai 24 (dua puluh empat) bulan dan 7,50% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) sampai 48 (empat puluh delapan) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Kredit Modal Kerja.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") (continued)

Based on Letter No. CMB.CM5/MTA.0708/2021 dated September 27, 2021, Bank Mandiri agreed to adjust the condition of Working Capital Loan Facility interest rate, the interest rate at 6.50% per annum, during the loan period for 12 (twelve) months until 36 (thirty six) months and 7.00% per annum, during the loan period for 48 (forty eight) months which remain valid for a period of Working Capital Loan Facility.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net consumer financing receivables at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category less than 90 (ninety) days amounting to Rp71,486 (Notes 5, 6, and 7), not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 10 times, and maintain maximum NPL ratio above 90 (ninety) days of 5.00%.

Based on the Working Capital Credit Agreement No. 34 dated June 16, 2022, Bank Mandiri agreed to provide a Working Capital Loan Facility which maximum available fund amounting Rp500,000 which was used for working capital for consumer financing. The maturity date of Working Capital Loan Facility is 60 (sixty) months from the signing date of Credit Agreement.

The loan bears an interest rate of 6.50% per annum for a loan period of 12 (twelve) to 36 (thirty six) months and 7.00% for a loan period of more than 36 (thirty six) to 48 (forty eight) months which remain valid for a period of Working Capital Credit Loan.

Based on Letter No. CMB.CM5/MTA.674/2022 dated July 27, 2022, Bank Mandiri adjust the condition of Working Capital Loan Facility interest rate, the interest rate at 6.50% per annum, during the loan period for 12 (twelve) months until 24 (twenty four) months and 7.50% per annum, during the loan period for 36 (thirty six) until 48 (forty eight) months which remain valid for a period of Working Capital Loan Facility.

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") (lanjutan)

Berdasarkan Surat No. CMB.CM5/MTA.697/2022 tanggal 8 Agustus 2022, Bank Mandiri menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Kredit Modal Kerja, tingkat suku bunga sebesar 6,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) sampai 24 dua puluh empat) bulan dan 7,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) sampai 48 (empat puluh delapan) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Kredit Modal Kerja.

Berdasarkan Surat No. CMB.CM5/MFD.0056/2022 tanggal 5 Desember 2022, Bank Mandiri menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Kredit Modal Kerja, tingkat suku bunga sebesar 7,50% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) sampai 24 (dua puluh empat) bulan dan 7,75% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) sampai 48 (empat puluh delapan) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Kredit Modal Kerja.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang memiliki tunggakan kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp284.029 (Catatan 5, 6, dan 7), tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan, mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta rasio NPL neto di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5,00%.

Berdasarkan Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. 35 tanggal 16 Juni 2022, Bank Mandiri setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Kredit Jangka Pendek dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp100.000 yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Kredit Jangka Pendek adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga yang akan ditetapkan pada saat penarikan Pinjaman Jangka Pendek.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") (continued)

Based on Letter No. CMB.CM5/MTA.697/2022 dated August 8, 2022, Bank Mandiri adjust the condition of Working Capital Loan Facility interest rate, the interest rate at 6.00% per annum, during the loan period for 12 (twelve) months until 24 (twenty four) months and 7.00% per annum, during the loan period for 36 (thirty six) until 48 (forty eight) months which remain valid for a period of Working Capital Loan Facility.

Based on Letter No. CMB.CM5/MFD.0056/2022 dated December 5, 2022, Bank Mandiri adjust the condition of Working Capital Loan Facility interest rate, the interest rate at 7.50% per annum, during the loan period for 12 (twelve) months until 24 (twenty four) months and 7.75% per annum, during the loan period for 36 (thirty six) until 48 (forty eight) months which remain valid for a period of Working Capital Loan Facility.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net consumer financing receivables at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category less than 90 (ninety) days amounting to Rp284,029 (Notes 5, 6, and 7), not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 10 times, and maintain maximum NPL net ratio above 90 (ninety) days of 5.00%.

Based on the Short Term Credit Agreement No. 35 dated June 16, 2022, Bank Mandiri agreed to provide a Short Term Loan Facility which maximum available fund amounting Rp100,000 which was used for working capital for consumer financing. The maturity date of Short Term Loan Facility is 12 (twelve) months from the signing date of Credit Agreement.

The loan bears an interest rate that will be determined at the time of withdrawal of the Short Term Loan.

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") (lanjutan)

Berdasarkan Adendum I (Kesatu) No. WCO.KP/302/KJP/2022 tanggal 16 Juni 2023, Bank Mandiri setuju untuk untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan tanggal 15 Juni 2024.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang memiliki tunggakan kurang dari 90 (sembilan puluh) hari, tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan, mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta rasio NPL neto di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5,00%.

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 167 tanggal 26 Juli 2023, Bank Mandiri setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp500.000 yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja adalah 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 7,10% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan, sebesar 7,25% untuk jangka waktu pinjaman lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, sebesar 7,35% untuk jangka waktu pinjaman lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) dan sebesar 7,60% untuk jangka waktu pinjaman lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan sampai dengan 48 (empat puluh delapan) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Kredit Modal Kerja.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang memiliki tunggakan kurang dari 90 (sembilan puluh) hari, tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan, mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta rasio NPL neto di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan masih memiliki fasilitas pinjaman yang belum digunakan dari Bank Mandiri sebesar Rp500.000 untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja dan Rp100.000 untuk Fasilitas Kredit Jangka Pendek.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") (continued)

Based on the I (First) Amendment No. WCO.KP/302/KJP/2022 dated June 16, 2023, Bank Mandiri agreed to extend the term of the credit facility until June 15, 2024.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net consumer financing receivables at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category less than 90 (ninety) days, not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 10 times, and maintain maximum NPL net ratio above 90 (ninety) days of 5.00%.

Based on the Working Capital Credit Agreement No. 167 dated July 26, 2023, Bank Mandiri agreed to provide a Working Capital Loan Facility which maximum available fund amounting Rp500,000 which was used for working capital for consumer financing. The maturity date of Working Capital Loan Facility is 60 (sixty) months from the signing date of Credit Agreement.

This loan bears an interest rate of 7.10% per year for a loan term of 12 (twelve) months, 7.25% for a loan term of more than 12 (twelve) months up to 24 (twenty four) months, amounting to 7.35% for loan terms of more than 24 (twenty four) months up to 36 (thirty six), and 7.60% for loan terms of more than 36 (thirty six) months up to 48 (forty eight) months which remains valid for the term of the Working Capital Credit Loan.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's consumer financing receivables at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category less than 90 (ninety) days, not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 10 times, and maintain maximum NPL net ratio above 90 (ninety) days of 5.00%.

As of December 31, 2023, the Company still has the unused loan facility from Bank Mandiri amounting to Rp500,000 for Working Capital Loan Facility and Rp100,000 for Short Term Loan Facilities.

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp630.077 dan Rp362.236.

PT Bank Maspion Indonesia ("Bank Maspion")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 18 tanggal 8 Juni 2023, Bank Maspion setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit *Fixed Loan Sliding* (FLS) dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp295.000 untuk keperluan modal kerja pembiayaan konsumen. Jangka waktu fasilitas ini adalah 12 (dua belas) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan dengan *availability period* 12 (dua belas) bulan sejak akad kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 7,25% per tahun yang berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas Kredit *Fixed Loan Sliding* (FLS).

Berdasarkan Surat No. 322/Memo/Corp.JKT/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023, Bank Maspion setuju untuk menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas *Fixed Loan Sliding* (FLS), tingkat suku bunga sebesar 7,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas *Fixed Loan Sliding* (FLS).

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 80,00% dari pinjaman yang belum dilunasi dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp214.112 (Catatan 5, 6, dan 7), tidak dalam keadaan dijaminkan pada pihak ketiga mana pun dan harus objek pembiayaan diasuransikan, mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 8 kali, serta mempertahankan rasio *Non Performing Loan* ("NPL") *gross* di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan sudah tidak memiliki Fasilitas Pinjaman yang belum digunakan dari Bank Maspion.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank Maspion sebesar Rp27.361.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") (continued)

For the years ended December 31, 2023 and 2022, the Company paid installment of bank loan to Bank Mandiri amounting to Rp630,077 and Rp362,236, respectively.

PT Bank Maspion Indonesia ("Bank Maspion")

Based on Credit Agreement No. 18 dated June 8, 2023, Bank Maspion agreed to provide Fixed Loan Sliding (FLS) Credit Facility with maximum available fund amounting to Rp295,000, which will be used for consumer finance working capital. Loan's maturity date is 12 (twelve) until 36 (thirty six) months with availability period 12 (twelve) months from the signing date of credit agreement.

The loan bears interest rate at 7.25% per annum, which remain valid for a period of Fixed Loan Sliding (FLS) Credit Facility.

Based on Letter No. 322/Memo/Corp.JKT/VIII/2023 dated August 4, 2023, Bank Maspion agreed to adjust the condition of Fixed Loan Sliding (FLS) interest rate, the interest rate at 7.00% per annum during the loan period for 36 (thirty six) months, which remains valid for the period of Fixed Loan Sliding (FLS) Facility.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net consumer financing receivables at 80.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than 30 (thirty) days amounting to Rp214,112 (Notes 5, 6, and 7), not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 8 times, and maintain maximum Non Performing Loan ("NPL") gross ratio above 90 (ninety) days of 5.00%.

As of December 31, 2023, the Company does not have unused loan facilities from Bank Maspion.

For the year ended December 31, 2023, the Company paid installment of bank loan to Bank Maspion amounting to Rp27,361.

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank KEB Hana Indonesia ("KEB Hana")

Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang No. 53 tanggal 10 Mei 2019, KEB Hana setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit *Money Market Line* (*Uncommitted*) dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp100.000. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 355/PK/2021 tanggal 19 Mei 2021, KEB Hana setuju untuk memperpanjang Fasilitas Kredit *Money Market Line* (*Uncommitted*) dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp100.000 yang telah jatuh tempo pada tanggal 23 Mei 2022.

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 47 tanggal 10 Maret 2022, KEB Hana setuju untuk memperpanjang Fasilitas Kredit *Money Market Line* (*Uncommitted*) dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp100.000 yang telah jatuh tempo pada tanggal 23 Mei 2023.

Berdasarkan Surat No. 35/005/CBM tanggal 2 Februari 2023, Perusahaan sudah tidak memiliki kewajiban untuk Fasilitas Kredit *Money Market Line* (*Uncomitted*) yang sudah dilunaskan atau diselesaikan dengan baik pada tanggal 19 Januari 2023.

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 47 tanggal 10 Maret 2022, KEB Hana setuju memberikan Fasilitas Kredit *Working Capital Installment* ("WCI") VII dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp250.000. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencairan kredit ditambah dengan *availability period* selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 6,00% per tahun, efektif mengambang (*floating*), dengan jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen sebesar 100,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp109.646 (Catatan 5, 6, dan 7), mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 8 kali, dan mempertahankan rasio *Non Performing Loan* ("NPL") neto diatas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 3,00%.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank KEB Hana Indonesia ("KEB Hana")

Based on the Credit Agreement and Acknowledgment of Debt No. 53 dated May 10, 2019, KEB Hana agreed to provide the Money Market Line (Uncommitted) Credit Facility with maximum amount of Rp100,000. The maturity of facility is 1 (one) year from signing date of credit agreement.

Based on Credit Agreement No. 355/PK/2021 dated May 19, 2021, KEB Hana agreed to extend the Money Market Line (Uncommitted) Credit Facility with maximum amount of Rp100,000 which matured on May 23, 2022.

Based on the Amendment of the Credit Agreement No. 47 dated March 10, 2022, KEB Hana agreed to extend the Money Market Line (Uncommitted) Credit Facility with maximum amount of Rp100,000 which matured on May 23, 2023.

Based on Letter No. 35/005/CBM dated February 2, 2023, The Company has no obligations for the Money Market Line (Uncommitted) Credit Facility which has been paid or settled properly on January 19, 2023.

Based on the Amendment of the Credit Agreement No. 47 dated March 10, 2022, KEB Hana agreed to provide the Working Capital Installment ("WCI") VII Credit Facility with maximum amount of Rp250,000. The maturity of facility is 3 (three) years from the credit withdrawal date and availability period of 3 (three) months from signing date of credit agreement.

The loan bears an interest rates 6.00% per annum, floating, and is secured with consumer financing receivables of 100.00% of the amount of credit facility with category day past due not over than 90 (ninety) days amounting Rp109,646 (Notes 5, 6, and 7), maintain maximum the Gearing Ratio of 8 times, and maintain maximum Non Performing Loan ("NPL") net ratio above 90 (ninety) days of 3.00%.

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank KEB Hana Indonesia ("KEB Hana") (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 117 tanggal 19 Januari 2023, KEB Hana setuju memberikan Fasilitas Kredit *Working Capital Installment* ("WCI") II dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp150.000. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencairan kredit ditambah dengan *availability period* selama 5 (lima) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 7,25% per tahun, efektif mengambang (*floating*), dengan jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen sebesar 100,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp107.567 (Catatan 5, 6, dan 7), mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 8 kali, dan mempertahankan rasio NPL neto diatas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 3,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan sudah menggunakan semua fasilitas pinjaman dari KEB Hana.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada KEB Hana masing-masing sebesar Rp124.431 dan Rp158.357.

PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. JAK/100450/U/00149781 tanggal 6 Oktober 2010, HSBC setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Modal Kerja (*Corporate Facility Agreement* ("CFA")) dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp200.000 untuk keperluan pembiayaan kendaraan roda dua. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,25% per tahun dan akan berfluktuasi sesuai ketetapan Bank.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai modal kerja jangka pendek Perusahaan dan bersifat berulang.

Jangka waktu dari setiap pinjaman adalah maksimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dan setiap *tranche* harus berjumlah minimal sebesar Rp5.000 dan pinjaman pokok dibayar secara bulanan.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank KEB Hana Indonesia ("KEB Hana") (continued)

Based on the Amendment of the Credit Agreement No. 117 dated January 19, 2023, KEB Hana agreed to provide the Working Capital Installment ("WCI") II Credit Facility with maximum amount of Rp150,000. The maturity of facility is 3 (three) years from the credit withdrawal date and availability period of 5 (five) months from signing date of credit agreement.

The loan bears an interest rates 7.25% per annum, floating, and is secured with consumer financing receivables of 100.00% of the amount of credit facility with category day past due not over than 90 (ninety) days amounting to Ro107,567 (Notes 5, 6, and 7), maintain maximum the Gearing Ratio of 8 times, and maintain maximum NPL net ratio above 90 (ninety) days of 3.00%.

As of December 31, 2023, the Company has fully utilized the loan facility from KEB Hana.

For the years ended December 31, 2023 and 2022, the Company paid installment of bank loan to KEB Hana amounting to Rp124,431 and Rp158,357, respectively.

PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")

Based on the Credit Agreement No. JAK/100450/U/00149781 dated October 6, 2010, HSBC agreed to provide Working Capital Loan Facility (Corporate Facility Agreement ("CFA")) with maximum available fund amounting to Rp200,000, which was used for motor vehicle financing. The loan bears interest rate at 10.25% per annum and will be fluctuated based on Bank's assessment.

The purpose of this loan is to fund the Company's short term working capital and revolving basis.

Tenure of each loan is maximum 1 (one) year from disbursement date and each tranche should be in a minimum of Rp5,000 and principal loan will be paid monthly.

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC") (lanjutan)

Berdasarkan Surat Fasilitas Perbankan - Tanggal Peninjauan Kembali Fasilitas No. JAK/190257/U/180823 tanggal 16 Mei 2019, fasilitas ini dapat ditinjau kembali setiap saat dan dalam kondisi apapun dan fasilitas ini dapat ditarik paling lambat tanggal 15 Juli 2019. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, fasilitas tersebut masih berlaku sesuai dengan Surat No. CDT/2020/03/0420 tanggal 9 Maret 2020.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total plafon pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp200.001 (Catatan 5, 6, dan 7), tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga, objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta mempertahankan rasio *Non Performing Loan* ("NPL") neto di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 3,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan tidak memiliki fasilitas pinjaman yang belum digunakan dari HSBC.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada HSBC masing-masing sebesar RpNihil dan Rp150.000.

PT Bank DKI ("Bank DKI")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 64 tanggal 31 Agustus 2022, Bank DKI setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp100.000 untuk keperluan modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 42 (empat puluh dua) bulan dari tanggal penandatanganan perjanjian Kredit.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC") (continued)

Based on Letter of Banking Facility - Reconsideration Facility Date No. JAK/190257/U/180823 dated May 16, 2019 this facility can be reconsidered at any time and in any condition and this facility can be withdrawn not later than July 15, 2019. Up to the completion of the financial statements, the facility is still valid according to Letter No. CDT/2020/03/0420 dated March 9, 2020.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net consumer financing receivables at 100.00% of the total amount of the loan with category day past due not over than 90 (ninety) days amounting to Rp200,001 (Notes 5, 6, and 7), not pledged to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 10 times, and maintain maximum Non Performing Loan ("NPL") net ratio above 90 (ninety) days of 3.00%.

As of December 31, 2023, the Company has no unused loan facility from HSBC.

For the years ended December 31, 2023 and 2022, the Company paid installment of bank loan to HSBC amounting to RpNil and Rp150,000, respectively.

PT Bank DKI ("Bank DKI")

Based on Credit Agreement No. 64 dated August 31, 2022, Bank DKI agreed to provide Working Capital Loan Facility with maximum available fund amounting to Rp100,000, which will be used for consumer finance working capital. Loan's maturity date is 42 (forty two) months from the signing date of credit agreement.

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank DKI ("Bank DKI") (lanjutan)

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 6,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari pinjaman yang belum dilunasi dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp58.334 (Catatan 5, 6, dan 7), tidak dalam keadaan dijaminkan pada pihak ketiga mana pun dan harus objek pembiayaan diasuransikan, mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta mempertahankan rasio *Non Performing Loan* ("NPL") neto di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 3,00%.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 28 tanggal 22 Mei 2023, Bank DKI setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp150.000 untuk keperluan modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 42 (empat puluh dua) bulan dari tanggal penandatanganan perjanjian Kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 7,25% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari pinjaman yang belum dilunasi dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp125.001 (Catatan 5, 6, dan 7), tidak dalam keadaan dijaminkan pada pihak ketiga mana pun dan harus objek pembiayaan diasuransikan, mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta mempertahankan rasio NPL neto di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 3,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari Bank DKI untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank DKI masing-masing sebesar Rp58.333 dan Rp8.333.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank DKI ("Bank DKI") (continued)

The loan bears interest rate at 6.00% per annum during the loan period for 36 (thirty six) months, which remain valid for a period of Working Capital Loan Facility.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net consumer financing receivables at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than 90 (ninety) days amounting to Rp58,334 (Notes 5, 6, and 7), not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 10 times, and maintain maximum Non Performing Loan ("NPL") net ratio above 90 (ninety) days of 3.00%.

Based on Credit Agreement No. 28 dated May 22, 2023, Bank DKI agreed to provide Working Capital Loan Facility with maximum available fund amounting to Rp150,000, which will be used for consumer finance working capital. Loan's maturity date is 42 (forty two) months from the signing date of credit agreement.

The loan bears interest rate at 7.25% per annum during the loan period for 36 (thirty six) months, which remain valid for a period of Working Capital Loan Facility.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net consumer financing receivables at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than 90 (ninety) days amounting to Rp125,001 (Notes 5, 6, and 7), not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 10 times, and maintain maximum NPL net ratio above 90 (ninety) days of 3.00%.

As of December 31, 2023, the Company has fully utilized the loan facility from Bank DKI for Working Capital Loan Facility.

For the years ended December 31, 2023 and 2022, the Company paid installment of bank loan to Bank DKI amounting to Rp58,333 and Rp8,333, respectively.

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank IBK Indonesia Tbk ("Bank IBK")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 64 tanggal 8 September 2023, Bank IBK setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman *Working Capital Executing* dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp150.000 untuk keperluan modal kerja pembiayaan konsumen. Jangka waktu fasilitas ini adalah 36 (tiga puluh enam) bulan dengan *availability period* 6 (enam) bulan sejak akad kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 7,25% per tahun yang berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas Kredit *Working Capital Executing.*

Berdasarkan Surat No. 130/RM-BM/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023, Bank IBK setuju untuk menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas *Working Capital Executing*, tingkat suku bunga sebesar 7,00% per tahun selama jangka waktu pinjaman.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari pinjaman yang belum dilunasi dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp146.244 (Catatan 5, 6, dan 7), tidak dalam keadaan dijaminkan pada pihak ketiga mana pun, mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta mempertahankan rasio *Non Performing Loan* ("NPL") neto di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 4,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan sudah tidak memiliki Fasilitas Pinjaman yang belum digunakan dari Bank IBK .

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank IBK sebesar Rp3.757.

PT Bank Shinhan Indonesia ("Bank Shinhan")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 163 tanggal 24 Juni 2022, Bank Shinhan setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Korporasi dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp150.000 untuk keperluan modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 39 (tiga puluh sembilan) bulan dari tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 6,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas Pinjaman Korporasi.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank IBK Indonesia Tbk ("Bank IBK")

Based on Credit Agreement No. 64 dated September 8, 2023, Bank IBK agreed to provide Working Capital Executing Facility with maximum available fund amounting to Rp150,000, which will be used for consumer finance working capital. Loan's maturity date is 36 (thirty six) months with availability period 6 (six) months from the signing date of credit agreement.

The loan bears interest rate at 7.25% per annum, which remain valid for a period of Working Capital Executing Facility.

Based on Letter No. 130/RM-BM/X/2023 dated October 25, 2023, Bank IBK aggred to readjusted the condition of Working Capital Executing Facility interest rate, the interest rate at 7.00% per annum during the loan period.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net consumer receivables at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than 90 (ninety) days amounting to Rp146,244 (Notes 5, 6, and 7), not secured to any third party, maintain maximum debt to equity ratio of 10 times, and maintain maximum Non Performing Loan ("NPL") net ratio above 90 (ninety) days of 4.00%.

As of December 31, 2023, the Company has no unused loan facilities from Bank IBK.

For the year ended December 31, 2023, the Company paid installment of bank loan to Bank IBK amounting to Rp3,757.

PT Bank Shinhan Indonesia ("Bank Shinhan")

Based on Credit Agreement No. 163 dated June 24, 2022, Bank Shinhan agreed to provide Corporate Loan Facility with maximum available fund amounting to Rp150,000, which will be used for consumer finance working capital. Loan's maturity date is 39 (thirty nine) months from the signing date of credit agreement.

The loan bears interest rate at 6.00% per annum during the loan period for 36 (thirty six) months, which remain valid for a period of Corporate Loan Facility.

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Shinhan Indonesia ("Bank Shinhan") (lanjutan)

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari pinjaman yang belum dilunasi dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp79.167 (Catatan 5, 6, dan 7), tidak dalam keadaan dijaminkan pada pihak ketiga mana pun dan harus objek pembiayaan diasuransikan, mempertahankan G*earing Ratio* utang terhadap ekuitas tidak melebihi 8 kali, serta mempertahankan rasio *Non Performing Loan* ("NPL") di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 4,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari Bank Shinhan untuk Fasilitas Pinjaman Korporasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank Shinhan masing-masing sebesar Rp50.000 dan Rp20.833.

PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata")

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit (Fasilitas *Money Market*) No. 07 tanggal 8 Juni 2021, Bank Permata setuju memberikan Fasilitas *Money Market Line* (MML) dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp200.000. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga tetap per penarikan sesuai ketetapan Bank.

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Fasilitas *Money Market* No. 05 tanggal 2 November 2021, Bank Permata setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas terhitung sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai tanggal 31 Januari 2023.

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Fasilitas *Money Market* No. 05 tanggal 2 November 2021, Jangka waktu fasilitas dianggap diperpanjang secara otomatis selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023.

Berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit Fasilitas *Money Market* No. 1385/MM/ADD/VIII/2023/CG6 tanggal 21 Agustus 2023, Bank Permata setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas terhitung sejak 31 Januari 2023 sampai tanggal 31 Januari 2024.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Shinhan Indonesia ("Bank Shinhan") (continued)

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net consumer financing receivables at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than 90 (ninety) days amounting to Rp79,167 (Notes 5, 6, and 7), not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum Gearing Ratio of 8 times, and maintain maximum Non Performing Loan ("NPL") ratio above 90 (ninety) days of 4.00%.

As of December 31, 2023, the Company has fully utilized the loan facility from Bank Shinhan for Corporate Loan Facility.

For the years ended December 31, 2023 and 2022, the Company paid installment of bank loan to Bank Shinhan amounting to Rp50,000 and Rp20,833, respectively.

PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata")

Based on the Deed of Credit Facility Agreement (Money Market Loan) No. 07 dated June 8, 2021, Bank Permata agreed to provide Money Market Line (MML) Facility with maximum available fund amounting to Rp200,000. The maturity of facility is 12 (twelve) months from the signing date of credit agreement. The loan bears fixed interest rate per withdrawal according to the Bank assessment.

Based on the Amendment of Money Market Credit Facility Agreement No. 05 dated November 2, 2021, Bank Permata agreed to extend the term of the facility starting from June 8, 2022 until January 31, 2023.

Based on the Amendment of Money Market Credit Facility Agreement No. 05 dated November 2, 2021, The term of the facility is considered to be automatically extended for 3 (three) months from January 31, 2023 to April 30, 2023.

Based on the Amendment of Money Market Credit Facility Agreement No. 1385/MM/ADD/VIII/2023/CG6 dated August 21, 2023, Bank Permata agreed to extend the Facility period from January 31, 2023 to January 31, 2024.

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata") (lanjutan)

Berdasarkan Surat No. 002/SK/CG6/WB/02/2023 tanggal 1 Februari 2024, Bank Permata setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas terhitung sejak 31 Januari 2024 sampai tanggal 30 April 2024.

Pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit dengan kategori piutang memiliki tunggakan kurang dari 90 (sembilan puluh) hari, tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun, mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 8 kali, dan mempertahankan rasio *Non Performing Loan* ("NPL") di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 4,00%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 06 tanggal 2 November 2021, Bank Permata setuju memberikan Fasilitas *Term Loan* 3 ("TL 3") dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp300.000. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 42 (empat puluh dua) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga tetap per penarikan sesuai ketetapan Bank. Tingkat suku bunga yang dikenakan atas fasilitas yang ditarik adalah 6,50%.

Pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit dengan kategori piutang memiliki tunggakan kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp52.778 (Catatan 5, 6, dan 7), tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun, mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 8 kali, dan mempertahankan rasio NPL di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 4,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan masih memiliki Fasilitas Pinjaman yang belum digunakan dari Bank Permata sebesar Rp200.000 untuk fasilitas pinjaman *Money Market.*

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank Permata masing-masing sebesar Rp50.000 dan Rp47.222.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata") (continued)

Based on the Letter No. 002/SK/CG6/WB/02/2023 dated February 1, 2024, Bank Permata agreed to extend the Facility period from January 31, 2024 to April 30, 2024.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's consumer financing receivables with a minimum of 100.00% of the amount of credit facility with category less than 90 (ninety) days, not secured to any third party, maintain maximum debt to equity ratio of 8 times, and maintain maximum Non Performing Loan ("NPL") ratio above 90 (ninety) days of 4.00%.

Based on the Deed of Banking Credit Facility Agreement No. 06 dated November 2, 2021, Bank Permata agreed to provide Term Loan 3 ("TL 3") Facility with maximum available fund amounting to Rp300,000. The maturity of facility is 42 (forty two) months from the signing date of credit agreement. The loan bears fixed interest rate per withdrawal according to the Bank assessment. The interest rate for withdrawed facility is 6.50%.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's consumer financing receivables with a minimum of 100.00% of the amount of credit facility with category less than 90 (ninety) days amounting to Rp52,778 (Notes 5, 6, and 7), not secured to any third party, maintain maximum debt to equity ratio of 8 times, and maintain maximum NPL ratio above 90 (ninety) days of 4.00%.

As of December 31, 2023, the Company have unused loan facilities from Bank Permata amounting to Rp200,000 for Money Market Facility.

For the years ended December 31, 2023 and 2022, the Company paid installment of bank loan to Bank Permata amounting to Rp50,000 and Rp47,222, respectively.

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank DKI Syariah ("Bank DKI Syariah")

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Pembiayaan berdasarkan Prinsip *Mudharabah* No. 01 tanggal 1 Agustus 2022, Bank DKI Syariah setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Pembiayaan Modal Kerja dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp85.000 untuk keperluan modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 42 (empat puluh dua) bulan dari tanggal penandatanganan perjanjian Pembiayaan.

Pinjaman ini dikenakan indikasi nilai keuntungan sebesar 6,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas Pinjaman Pembiayaan Modal Kerja.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari pinjaman yang belum dilunasi dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp23.380 (Catatan 5, 6, dan 7), tidak dalam keadaan dijaminkan pada pihak ketiga mana pun dan harus objek pembiayaan diasuransikan, mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali, serta mempertahankan rasio *Non Performing Loan* ("NPL") neto di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 3,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan sudah tidak memiliki Fasilitas Pinjaman yang belum digunakan dari Bank DKI Syariah.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank DKI Syariah masing-masing sebesar Rp12.781 dan Rp3.840.

PT Bank CTBC Indonesia ("Bank CTBC")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 95 tanggal 18 Desember 2019, Bank CTBC setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Jangka Menengah dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp300.000 untuk keperluan modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 36 (tiga puluh enam) bulan dari tanggal penarikan terakhir.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 8,75% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas Pinjaman Jangka Menengah.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank DKI Syariah ("Bank DKI Syariah")

Based on Cooperation Agreement for the Distribution of Financing based on Mudharabah Principle No. 01 dated August 1, 2022, Bank DKI Syariah agreed to provide Working Capital Loan Facility with maximum available fund amounting to Rp85,000, which will be used for consumer finance working capital. Loan's maturity date is 42 (forty two) months from the signing date of credit agreement.

The loan bears margin value indication at 6.00% per annum during the loan period for 36 (thirty six) months, which remain valid for a period of Working Capital Loan Facility.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net consumer financing receivables at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than 90 (ninety) days amounting to Rp23,380 (Notes 5, 6, and 7), not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 10 times, and maintain maximum Non Performing Loan ("NPL") net ratio above 90 (ninety) days of 3.00%.

As of December 31, 2023, the Company does not have unused loan facilities from Bank DKI Syariah.

For the years ended December 31, 2023 and 2022, the Company paid installment of bank loan to Bank DKI Syariah amounting to Rp12,781 and Rp3,840, respectively.

PT Bank CTBC Indonesia ("Bank CTBC")

Based on the Credit Agreement No. 95 dated December 18, 2019, Bank CTBC agreed to provide a Medium Term Loan Facility with maximum available fund amounting to Rp300,000, which was used for consumer finance working capital. The loan's maturity date is 36 (thirty six) months from the last withdrawal date.

The loan bears interest rate at 8.75% per annum during the loan period for 36 (thirty six) months, which remain valid for a period of Medium Term Loan Facility.

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank CTBC Indonesia ("Bank CTBC") (lanjutan)

Berdasarkan Surat tanggal 17 Januari 2020, Bank CTBC setuju untuk menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman Jangka Menengah menjadi sebesar 8,55% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas Pinjaman Jangka Menengah.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga yang akan ditentukan sebelum dilakukan pencairan pinjaman.

Berdasarkan Surat tanggal 26 Februari 2020, Bank CTBC kembali menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman Jangka Menengah menjadi sebesar 8,40% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas Pinjaman Jangka Menengah.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 17 Maret 2023.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari pinjaman yang belum dilunasi dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari, tidak dalam keadaan dijaminkan pada pihak ketiga manapun dan harus objek pembiayaan diasuransikan, mengharuskan perusahaan untuk mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 8 kali, serta mempertahankan rasio *Non Performing Loan* ("NPL") di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5,00%.

Berdasarkan Akta Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 111 tanggal 29 Desember 2021, Bank CTBC setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (*Short Term Loan*) dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp200.000 untuk keperluan modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit ditandatangani.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank CTBC Indonesia ("Bank CTBC") (continued)

Based on the Letter dated January 17, 2020, Bank CTBC agreed to adjust the interest rate condition for the Medium Term Loan Facility amounting to 8.55% per annum during the loan period for 36 (thirty six) months, which remain valid for the period of Medium Term Loan Facility.

The loan bears interest rate will determined before disbursing the loan.

Based on the Letter dated February 26, 2020, Bank CTBC readjusted the interest rate for the Medium Term Loan Facility amounting to 8.40% per annum during the loan period for 36 (thirty six) months, which remain valid for the period of Medium Term Loan Facility.

The loan has matured and was fully paid on March 17, 2023.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net consumer financing receivables at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than 30 (thirty) days, not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 8 times, and maintain maximum Non Performing Loan ("NPL") ratio above 90 (ninety) days of 5.00%.

Based on Amendment of the Credit Agreement No. 111 dated December 29, 2021, Bank CTBC agreed to provide a Short Term Loan Facility with maximum available fund amounting to Rp200,000, which was used for consumer finance working capital. The loan's maturity date is 12 (twelve) months from the signing date of Credit Agreement.

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank CTBC Indonesia ("Bank CTBC") (lanjutan)

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari pinjaman yang belum dilunasi dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari, tidak dalam keadaan dijaminkan pada pihak ketiga manapun dan harus objek pembiayaan diasuransikan, mengharuskan perusahaan untuk mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 8 kali, serta mempertahankan rasio NPL neto di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 3,00%.

Berdasarkan Surat No. IRM/CORP/2023/0003, tanggal 7 Februari 2023, Bank CTBC memberitahukan bahwa per tanggal 29 Desember 2022, Perusahaan sudah tidak memiliki kewajiban hutang kepada Bank CTBC atas Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (*Short Term Loan*).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank CTBC masing-masing sebesar Rp12.500 dan Rp50.000.

PT Bank DBS Indonesia ("DBS")

Berdasarkan Perubahan Kedua atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 184/PFPA-DBSI/XI/1-2/2020 tanggal 30 November 2020, DBS setuju untuk memberikan Fasilitas Perbankan dalam bentuk *Uncommitted Revolving Credit Facility* dengan jumlah dana yang disediakan adalah sebesar Rp150.000 untuk keperluan modal kerja pembiayaan konsumen. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 atau tanggal lain dimana Fasilitas Perbankan diakhiri lebih awal.

Berdasarkan Surat dari Bank No. 6678/XI/DBSI/IBG-JKT/2021 tanggal 9 November 2021, DBS telah memperpanjang tanggal jatuh tempo perjanjian untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 1 November 2021 sampai tanggal 31 Januari 2022.

Berdasarkan Perubahan Ketiga atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 013/PFPA-DBSI/I/1-2/2022 tanggal 17 Januari 2022, DBS telah memperpanjang tanggal jatuh tempo perjanjian yang mulai berlaku pada tanggal 1 November 2021 sampai tanggal 31 Oktober 2022.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank CTBC Indonesia ("Bank CTBC") (continued)

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net consumer financing receivables at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than 30 (thirty) days, not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance, maintain maximum debt to equity ratio of 8 times, and maintain maximum NPL net ratio above 90 (ninety) days of 3.00%.

Based on Letter No. IRM/CORP/2023/0003 dated February 7, 2023, Bank CTBC notified that as of December 29, 2022, the Company has no debt obligations to Bank CTBC for the Short Term Loan Facility.

For the years ended December 31, 2023 and 2022, the Company paid installment of bank loan to Bank CTBC amounting to Rp12,500 and Rp50,000, respectively.

PT Bank DBS Indonesia ("DBS")

Based on the Second Amendment of Banking Facility Agreement No. 184/PFPA-DBSI/XI/1-2/2020 dated November 30, 2020, DBS agreed to provide Banking Facility on Uncommitted Revolving Credit Facility with available fund amounting to Rp150,000 which was used for working capital for consumer financing. This facility will be ended on October 31, 2021 or other dates where Banking Facility terminates early.

Based on Letter of Bank No. 6678/XI/DBSI/IBG-JKT/2021 dated November 9, 2021, DBS agreed to adjust the maturity date of agreement for a periods of 3 (three) months from November 1, 2021 until January 31, 2022.

Based on the Third Amendment of Banking Facility Agreement No. 013/PFPA-DBSI/I/1-2/2022 dated January 17, 2022, DBS agreed to adjust the maturity date of agreement from November 1, 2021 until October 31, 2022.

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank DBS Indonesia ("DBS") (lanjutan)

Berdasarkan Perubahan Keempat atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 360/PFPA-DBSI/XI/1-2/2022 tanggal 30 November 2022, DBS telah memperpanjang tanggal jatuh tempo perjanjian yang mulai berlaku pada tanggal 1 November 2022 dan akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga yang akan ditentukan pada saat penarikan fasilitas pinjaman.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari pinjaman yang belum dilunasi dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari, tidak dalam keadaan dijaminkan pada pihak ketiga manapun, dan mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 7 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan sudah tidak memiliki fasilitas pinjaman yang belum digunakan dari DBS dikarenakan sudah jatuh tempo sudah habis masa ketersediaan dananya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada DBS masing-masing sebesar RpNihil dan Rp150.000.

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 194 tanggal 20 Oktober 2010, BCA setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit dalam bentuk Kredit Lokal (Rekening Koran) dan *Installment Loan* ("Fasilitas *Installment Loan* 1") dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp25.000 dan Rp200.000 untuk keperluan modal kerja pembiayaan piutang kendaraan roda dua.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen sekurang kurangnya sebesar 100,00% dari plafon fasilitas Kredit Lokal dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 60 (enam puluh) hari sebesar Rp25.001 (Catatan 5, 6, dan 7), mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 10 kali, serta mempertahankan rasio *Non Performing Loan* ("NPL") di atas 60 (enam puluh) hari maksimal 5,00%.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank DBS Indonesia ("DBS") (continued)

Based on the Fourth Amendment of Banking Facility Agreement No. 360/PFPA-DBSI/XI/1-2/2022 dated November 30, 2022, DBS agreed to adjust the maturity date of agreement from November 1, 2022 until October 31, 2023.

The loan bears an interest rate that will be determined at the time of drawdown of the loan facility.

The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net consumer financing receivables at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than 30 (thirty) days, not secured to any third party, and maintain maximum debt to equity ratio of 7 times.

As of December 31, 2023, The Company no longer has unused loan facilities from DBS because the funds available have expired.

For the years ended December 31, 2023 and 2022, the Company paid installment of bank loan to DBS amounting to RpNil and Rp150,000, respectively.

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Based on the Credit Agreement No. 194 dated October 20, 2010, BCA agreed to provide Credit Facilities in the form of Local Credit (Current Account) and Installment Loan Facility ("Installment Loan Facility 1") with maximum available fund amounting to Rp25,000 and Rp200,000, which were used for consumer finance working capital as motor vehicle financing.

The agreement was secured by fiduciary transfer of the Company"s consumer financing receivables at least 100.00% of the plafond Local Credit Facility with category day past due not over than 60 (sixty) days amounting to Rp25,001 (Notes 5, 6, and 7) and requires the Company to maintain maximum Gearing Ratio of 10 times, and maintain maximum Non Performing Loan ("NPL") ratio above 60 (sixty) days of 5.00%.

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (lanjutan)

Pada tanggal 13 Maret 2019, Perusahaan telah mendapatkan penambahan fasilitas berdasarkan Perubahan ke Sembilan Perjanjian Kredit No. 37 dimana BCA setuju untuk penambahan fasilitas kredit berupa Fasilitas *Installment Loan* ("Fasilitas *Installment Loan* 7") dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp500.000 yang akan jatuh tempo maksimum 3 (tiga) tahun sejak tanggal setiap penarikan yang terkait. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga yang akan ditentukan pada saat penarikan.

Perjanjian atas Fasilitas *Installment Loan* ("Fasilitas *Installment Loan* 7") tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari, mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 8 kali, serta mempertahankan rasio NPL di atas 60 (enam puluh) hari maksimal 5,00%.

Berdasarkan Surat No. 40847/GBK/2020 tanggal 1 Oktober 2020, BCA setuju untuk menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas *Installment Loan* 7, dimana tingkat suku bunga sebesar 9,00% per tahun untuk jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas *Installment Loan* 7.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 14 Maret 2022.

Berdasarkan Surat No. 40873/GBK/2020 tanggal 16 Oktober 2020, BCA setuju untuk memperpanjang Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2020 hingga tanggal 20 Januari 2021.

Berdasarkan Perubahan ke Sebelas atas Perjanjian Kredit No. 035/Add-KCK/2021 tanggal 18 Januari 2021, BCA setuju untuk memperpanjang Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2020 hingga tanggal 20 Oktober 2021.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (continued)

On March 13, 2019, the Company has secured additional facilities under the Ninth Amendment of Credit Agreement No. 37 where BCA agreed to increased the credit facility in the form of Installment Loan Facility ("Installment Loan Facility 7") with maximum available fund amounting to Rp500,000 with a maximum maturity of 3 (three) years from the date of any related withdrawal. The credit facility bears interest rate which will be determined upon withdrawal.

The agreement for Installment Loan Facility ("Installment Loan Facility 7") was secured by fiduciary transfer of the Company's consumer financing receivables at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than 30 (thirty), requires the Company to maintain maximum Gearing Ratio of 8 times, and maintain maximum NPL ratio above 60 (sixty) days of 5.00%.

Based on Letter No. 40847/GBK/2020 dated October 1, 2020, BCA agreed to adjust the conditions for the Installment Loan Facility 7 interest rate, the interest rate 9.00% per annum during the loan period for 36 (thirty six) months, which remain valid for the period of the Installment Loan Facility 7.

The loan has matured and was fully paid on March 14, 2022.

Based on Letter No. 40873/GBK/2020 dated October 16, 2020, BCA agreed to extend the Local Credit (Current Account) Facility which has matured on October 20, 2020 until January 20, 2021.

Based on Eleventh Amendment Credit Agreement No. 035/Add-KCK/2021 dated January 18, 2021, BCA agreed to extend the Local Credit (Current Account) Facility which has matured on October 20, 2020 until October 20, 2021.

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (lanjutan)

Berdasarkan Surat No. 40931/GBK/2021 tanggal 18 Oktober 2021, BCA setuju untuk memperpanjang Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2021 hingga tanggal 20 Januari 2022.

Berdasarkan Perubahan Kedua belas atas Perjanjian Kredit No. 606/Add-KCK/2021 tanggal 6 Desember 2021, BCA setuju untuk memperpanjang Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2021 hingga tanggal 20 Oktober 2022.

Berdasarkan Perubahan Ketiga belas atas Perjanjian Kredit No. 400/Add-KCK/2022 tanggal 7 November 2022, BCA setuju untuk memperpanjang Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2022 hingga tanggal 20 Oktober 2023.

Berdasarkan Surat No. 41133/GBK/2023 tanggal 17 Oktober 2023, BCA setuju untuk memperpanjang Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2023 hingga tanggal 20 Januari 2024.

Berdasarkan Surat No. 40033/GBK/2024 tanggal 18 Januari 2024, BCA setuju untuk memperpanjang Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang akan tempo pada tanggal 20 Januari 2024 hingga tanggal 20 April 2024.

Berdasarkan Perubahan Keempat belas atas Perjanjian Kredit No. 038/Add-KCK/2024 tanggal 29 Januari 2024, BCA setuju untuk memperpanjang Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang akan tempo pada tanggal 20 April 2024 hingga tanggal 20 Januari 2025.

Perjanjian Kredit untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) ini telah mengalami beberapa kali penyesuaian kondisi tingkat suku bunga, terakhir penyesuaian fasilitas berdasarkan Surat No. 40203/GBK/2020 tanggal 20 Maret 2020, BCA kembali menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman Kredit Lokal (Rekening Koran) menjadi sebesar 10,00%. Kondisi tingkat suku bunga tersebut akan berlaku efektif sejak tanggal 8 April 2020.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (continued)

Based on Letter No. 40931/GBK/2021 dated October 18, 2021, BCA agreed to extend the Local Credit (Current Account) Facility which has matured on October 20, 2021 until January 20, 2022.

Based on Twelfth Amendment Credit Agreement No. 606/Add-KCK/2021 dated December 6, 2021, BCA agreed to extend the Local Credit (Current Account) Facility which has matured on October 20, 2021 until October 20, 2022.

Based on Thirteenth Amendment Credit Agreement No. 400/Add-KCK/2022 dated November 7, 2022, BCA agreed to extend the Local Credit (Current Account) Facility which has matured on October 20, 2022 until October 20, 2023.

Based on Letter No. 41133/GBK/2023 dated October 17, 2023, BCA agreed to extend the Local Credit (Current Account) Facility which has matured on October 20, 2023 until January 20, 2024.

Based on Letter No. 40033/GBK/2024 dated January 18, 2024, BCA agreed to extend the Local Credit (Current Account) Facility which matured on January 20, 2024 until April 20, 2024.

Based on Fourtheenth Amendment Credit Agreement No. 038/Add-KCK/2024 dated January 29, 2024, BCA agreed to extend the Local Credit (Current Account) Facility which matured on April 20, 2024 until January 20, 2025.

The Credit Agreement for the Local Credit (Current Account) Facility interest rate has been adjusted for several times, the latest adjustment of the facility based on the Letter No. 40203/GBK/2020 dated March 20, 2020, BCA readjusted the interest rate conditions Local Credit (Current Account) Facility amounting to 10.00%. Interest rate conditions is effective from April 8, 2020.

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (lanjutan)

Berdasarkan Perubahan Kedua belas atas Perjanjian Kredit No. 606/Add-KCK/2021 tanggal 6 Desember 2021, tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman Kredit Lokal (Rekening Koran) sebesar 9,25% per tahun yang dihitung dari utang yang timbul dari Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran).

Berdasarkan Perubahan Ketiga belas atas Perjanjian Kredit No. 400/Add-KCK/2022 tanggal 7 November 2022, tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman Kredit Lokal (Rekening Koran) sebesar 8,75% per tahun yang dihitung dari utang yang timbul dari Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran).

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan masih memiliki fasilitas pinjaman yang belum digunakan dari BCA sebesar Rp25.000 untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada BCA masing-masing sebesar RpNihil dan Rp41.667.

Perjanjian-perjanjian dengan Bank Panin, Bank Digital BCA, Bank Mandiri, Bank Maspion, KEB Hana, HSBC, Bank DKI, Bank IBK, Bank Shinhan, Bank Permata, Bank DKI Syariah, Bank CTBC, DBS, dan BCA, mensyaratkan Perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal berikut ini, sebelum memperoleh persetujuan dari bank-bank tersebut, yang antara lain, melakukan konsolidasi, merger, akuisisi atau penyertaan saham; penjualan aset Perusahaan; melakukan investasi baru; perubahan Anggaran Dasar berupa penurunan modal; pembiayaan kepada perusahaan berelasi maupun perusahaan lainnya di luar transaksi usaha sehari-hari; mengikatkan diri sebagai penanggung kepada pihak lain atau menjaminkan aset Perusahaan kepada pihak lain; pelunasan pinjaman kepada seluruh pemegang saham; penawaran umum atas saham Perusahaan atau pembelian kembali saham Perusahaan; perubahan bentuk usaha Perusahaan; menjaminkan kembali BPKB kepada pihak lain dan memperoleh pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan lain kecuali untuk kegiatan usaha yang normal.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah mematuhi seluruh persyaratan penting termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sehubungan dengan perjanjian dengan bank-bank tersebut di atas.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (continued)

Based on Twelfth Changed Credit Agreement No. 606/Add-KCK/2021 dated December 6, 2021, interest rate Local Credit (Current Account) Facility is 9.25% per annum which is calculated from debt arising from Local Credit (Current Account) Facility.

Based on Thirteenth Changed Credit Agreement No. 400/Add-KCK/2022 dated November 7, 2022, interest rate Local Credit (Current Account) Facility is 8.75% per annum which is calculated from debt arising from Local Credit (Current Account) Facility.

As of December 31, 2023, the Company still has the unused loan facility from BCA amounting to Rp25,000 for Local Credit (Current Account) Facility.

For the years ended December 31, 2023 and 2022, the Company paid installment of bank loan to BCA amounting to RpNil and Rp41,667, respectively.

Under the above agreements with Bank Panin, Bank Digital BCA, Bank Mandiri, Bank Maspion, KEB Hana, HSBC, Bank DKI, Bank IBK, Bank Shinhan, Bank Permata, Bank DKI Syariah, Bank CTBC, DBS, and BCA, without prior approval from those banks, is not allowed to, among others, enter into consolidation, merger, acquisitions or investments in shares of stock; sell the Company's assets; enter into new investments; change the Articles of Association relating to capital reduction; provide financing to other related parties and unrelated parties other than in the normal course of business; act as a guarantor of or collateralize the Company's assets to obligation of other parties; repay the loans obtained from all stockholders; float the Company's shares to the public or buy back the Company's shares; alter the Company's nature of business; pledge the same BPKB as collateral to other parties and obtain loans or credits from other financial institutions except in the normal course of business.

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has complied with all significant loan covenants include maintaining financial ratios as required in the agreement with the aforementioned banks.

15. UTANG SUBORDINASI / *15. SUBORDINATED LOAN*

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	**2022**	
Pihak berelasi (Catatan 32)			*Related party (Note 32)*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	200.000	200.000	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Tingkat suku bunga efektif tahunan			*Effective annual interest rates*
Mata uang Rupiah	8,50%	8,50%	*Rupiah currency*

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 27 November 2019, BMI setuju untuk memberikan fasilitas Pinjaman Berjangka dengan jumlah maksimum sebesar Rp200.000, yang digunakan untuk memperkuat struktur permodalan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga tetap sebesar 12,00% per tahun dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perubahan atau perkembangan pasar uang dan suku bunga yang berlaku di bank. Bunga akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan akan berakhir pada tanggal 28 November 2024.

Based on Credit Agreement Deed No. 14 dated November 27, 2019, BMI agreed to provide a Term Loan facility at the maximum amount of Rp200,000, which was used for strengthening the Company's capital structure. This facility has fixed interest rate at 12.00% per annum and subject to change at any time following changes in money market and interest rates applied in bank. Interest will be paid every 3 (three) month and will due on November 28, 2024.

Berdasarkan surat No. S.2021.092/DIR Global - FIG tanggal 27 Desember 2021, BMI setuju menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Kredit Pinjaman Berjangka, tingkat suku bunga sebesar 8,50% per tahun berlaku efektif pada tanggal 28 Februari 2022 sampai akhir jatuh tempo yang telah ditentukan.

Based on letter No. S.2021.092/DIR Global - FIG dated December 27, 2021, BMI agreed to adjust the interest rate conditions of the Term Loan Credit Facility, an interest rate of 8.50% per annum effective on February 28, 2022 until the end of the specified maturity.

Berdasarkan Akta Perjanjian Hutang Subordinasi No. 15 tanggal 27 November 2019, Pemegang Saham (BMI) diwajibkan untuk mensubordinasikan seluruh tagihan Pemegang Saham (berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 27 November 2019) terhadap tagihan dari kreditur Perusahaan yang lain.

Based on Subordination Loan Agreement Deed No. 15 dated November 27, 2019, Shareholders (BMI) are required to subordinate the entire bill of Shareholders (pursuant to the Deed of Credit Agreement No. 14 dated November 27, 2019) of the bills of other creditors.

Biaya bunga yang dikenakan untuk pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp17.236 dan Rp18.383 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 29 dan 32).

Interest incurred for this facility is amounting to Rp17,236 and Rp18,383 for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively (Notes 29 and 32).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan mencatat bunga masih harus dilunasi masing-masing sebesar Rp1.558 dan Rp1.558 (Catatan 16 dan 32).

As of December 31, 2023 and 2022, the Company recorded accrued interest amounting to Rp1,558 and Rp1,558, respectively (Notes 16 and 32).

15. UTANG SUBORDINASI (lanjutan) / *15. SUBORDINATED LOAN (continued)*

Selama masa berlakunya perjanjian ini, Perusahaan harus mengelola posisi keuangan sebagai berikut:

During the period of the agreement is still outstanding, the Company is obliged to maintain its financial position as follows:

Pembatasan keuangan				*Financial Covenants*
Gearing ratio	:	≤ 8 : 1	:	*Gearing ratio*
Non-performing loan	:	≤ 6,00%	:	*Non-performing loan*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah mematuhi seluruh persyaratan penting sehubungan dengan persyaratan yang diberikan oleh BMI tersebut di atas.

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has complied with all significant loan covenants required by BMI.

16. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *16. ACCRUED EXPENSES*

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	**2022**	
Pihak ketiga			*Third parties*
Komisi dan bonus karyawan	50.000	40.000	*Employees' commissions and bonus*
Bunga	30.657	20.593	*Interests*
Lain-lain	2.565	2.566	*Others*
Subtotal	83.222	63.159	*Subtotal*
Pihak-pihak berelasi (Catatan 14, 15, 20, dan 32)			*Related parties (Notes 14, 15, 20, and 32)*
Bunga	3.480	2.293	*Interests*
Total	**86.702**	**65.452**	***Total***

17. PERPAJAKAN / *17. TAXATION*

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	**2022**	
Utang pajak:			*Taxes payable:*
PPN	493	456	*VAT*
Pajak penghasilan			*Income tax*
Pasal 29	47.656	38.930	*Article 29*
Pasal 21	1.669	944	*Article 21*
Pasal 23	515	355	*Article 23*
Pasal 4 (2)	366	412	*Article 4 (2)*
Total	**50.699**	**41.097**	***Total***

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

17. TAXATION (continued)

A reconciliation between income before tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Laba sebelum beban pajak penghasilan sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	320.054	280.030	*Income before income tax expense as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income*
Ditambah (dikurangi):			*Add (deduct):*
Beda temporer			*Temporary differences*
Penyisihan piutang pengembalian asuransi	(53)	(649)	*Provision for insurance refunds*
Penyisihan imbalan kerja	6.814	12.147	*Provision for employee benefits*
Sewa gedung kantor	325	382	*Office building rental*
Penyusutan perangkat lunak	(3.512)	(5.797)	*Software depreciation*
Beda tetap			*Permanent differences*
Penyusutan *Car Ownership Program-Non Deductible Expense* 50,00%	1.473	287	*Depreciation Car Ownership Program-Non Deductible Expense 50.00%*
Beban dan denda pajak	452	4.919	*Tax expense and penalties*
Sumbangan	185	153	*Donations*
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	60.215	46.703	*Non deductible expenses*
Pendapatan bunga giro dan deposito	(12.774)	(11.094)	*Interest income from current accounts and time deposits*
Pajak penghasilan final atas pendapatan bunga giro dan deposito	2.555	2.219	*Final income tax on interest income from current accounts and time deposits*
Laba kena pajak	**375.734**	**329.300**	***Taxable income***

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	**2022**	
Beban pajak penghasilan	82.661	72.446	*Income tax expense*
Dikurangi:			*Less:*
Pajak dibayar di muka	(35.005)	(33.516)	*Prepaid taxes*
Utang pajak penghasilan akhir tahun	**47.656**	**38.930**	***Income tax payable at end of year***

17. PERPAJAKAN (lanjutan) / *17. TAXATION (continued)*

Rekonsiliasi antara beban pajak dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atas laba sebelum beban pajak dengan beban pajak, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Reconciliation between the tax expense calculated by applying the applicable tax rates to the income before tax expense and the tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Laba sebelum beban pajak penghasilan sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	320.054	280.030	*Income before income tax expense as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income*
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku	70.412	61.607	*Tax expense at the applicable tax rates*
Pengaruh pajak atas beda tetap pada tarif pajak yang berlaku	11.463	9.501	*Tax effects on permanent differences at the applicable tax rate*
Surat ketetapan pajak	1.532	10.187	*Tax assessment letter*
Penyesuaian Pajak Tangguhan	240	1.132	*Deferred tax assessment*
Beban pajak penghasilan	**83.647**	**82.427**	***Income tax expense***
Tarif pajak efektif	**26,14%**	**29,44%**	***Effective tax rate***
Beban pajak penghasilan :			***Income tax expense :***
Kini	82.661	72.446	*Current*
Tangguhan	(546)	(206)	*Deffered*
Surat ketetapan pajak	1.532	10.187	*Tax assessment letter*
Total	**83.647**	**82.427**	***Total***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Pengaruh pajak atas beda temporer pada tarif pajak maksimum yang berlaku:			*Tax effects on temporary differences at the applicable maximum tax rate:*
Penyisihan piutang pengembalian asuransi	12	143	*Provision for insurance refunds*
Penyisihan imbalan kerja	(1.499)	(2.672)	*Provision for employee benefits*
Sewa gedung kantor	(72)	(84)	*Office building rental*
Penyusutan perangkat lunak	773	1.275	*Software depreciation*
Penyesuaian pajak tangguhan	240	1.132	*Deferred tax assessment*
Total manfaat pajak tangguhan	**(546)**	**(206)**	***Total deferred tax benefit***

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

Rincian aset pajak tangguhan - neto Perusahaan sebagai berikut:

17. TAXATION (continued)

The details of the Company's deferred tax assets - net are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**(Dibebankan)/ dikreditkan ke laporan laba rugi tahun berjalan/ *(Charged)/ credited to income statements for the year***	**Dikreditkan ke ekuitas dari pendapatan komprehensif lain/ *Charged to equity from other comprehensive income***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Aset pajak tangguhan:					***Deferred tax assets:***
Penyisihan piutang pengembalian asuransi	12	(12)	-	-	*Provision for insurance refunds*
Penyisihan imbalan kerja	19.972	1.499	(1.034)	20.437	*Provision for employee benefit*
Sewa gedung kantor	352	(168)	-	184	*Office building rental*
Penyusutan perangkat lunak	(5.353)	(773)	-	(6.126)	*Software depreciation*
Aset pajak tangguhan - neto	**14.983**	**546**	**(1.034)**	**14.495**	***Deferred tax assets - net***

	31 Desember/*December 31,* 2022				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**(Dibebankan)/ dikreditkan ke laporan laba rugi tahun berjalan/ *(Charged)/ credited to income statements for the year***	**Dikreditkan ke ekuitas dari pendapatan komprehensif lain/ *Charged to equity from other comprehensive income***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Aset pajak tangguhan:					***Deferred tax assets:***
Penyisihan piutang pengembalian asuransi	155	(143)	-	12	*Provision for insurance refunds*
Penyisihan imbalan kerja	18.743	2.672	(1.443)	19.972	*Provision for employee benefit*
Sewa gedung kantor	268	84	-	352	*Office building rental*
Penyusutan perangkat lunak	(2.946)	(2.407)	-	(5.353)	*Software depreciation*
Aset pajak tangguhan - neto	**16.220**	**206**	**(1.443)**	**14.983**	***Deferred tax assets - net***

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

Tahun pajak 2016

Pada tanggal 12 April 2018, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan No. Pemb-00083/WPJ.19/KP.0105/RIK.SIS/2018 tentang pemeriksaan lapangan untuk semua jenis pajak tahun pajak 2016. Pada tanggal 23 November 2018, Perusahaan menerima Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan No. PRIN-P-00028/WPJ.19/KP.0105/RIK.SIS/2018. Pada tanggal 18 Desember 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak ("SKP") untuk tahun fiskal 2016. Berdasarkan SKP tersebut, Kantor Pajak menetapkan kurang bayar atas Pajak Penghasilan Pasal 21 ("PPh Pasal 21"), Pajak Penghasilan Pasal 23/26 ("PPh Pasal 23/26"), Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), dan Pajak Penghasilan Badan dengan jumlah keseluruhan Rp26.671. Hasil pemeriksaan tersebut telah disetujui Manajemen Perusahaan serta telah dibayarkan seluruhnya, kecuali atas ketetapan kurang bayar PPN sebesar Rp5.224 dan dicatat sebagai taksiran tagihan pajak pada aset lain-lain (Catatan 13).

Pada tanggal 13 Maret 2020, Perusahaan mengajukan keberatan pajak atas ketetapan kurang bayar PPN sebesar Rp5.224.

Pada tanggal 1 Maret 2021, Perusahaan menerima Surat Keputusan Keberatan No. KEP-00117/KEB/WPJ.19/2021 atas ketetapan kurang bayar PPN tahun 2016 yang isinya menolak keberatan Perusahaan.

Pada tanggal 30 April 2021, Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan yang ditolak sebesar Rp5.224.

Pada tanggal 11 Oktober 2023, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengadilan Pajak No. PUT-004788.16/2021/PP/M.XVIIIB Tahun 2023 atas Surat Ketetapan Kurang Bayar PPN masa Desember 2016 yang isinya mengabulkan seluruhnya banding Perusahaan. Pada tanggal 10 November 2023 Perusahaan telah menerima pengembalian sebesar Rp4.602 sedangkan atas surat tagihan pajak ("STP") sebesar Rp622 masih dalam proses pengajuan pengembalian di kantor pajak.

17. TAXATION (continued)

Tax fiscal year 2016

On April 12, 2018, the Company received Field Examination Notification Letter No. Pemb-00083/WPJ.19/KP.0105/RIK.SIS/2018 regarding field examination for all taxes for fiscal year 2016. On November 23, 2018, the Company received Change Examination Instruction Letter No. PRIN-P-00028/WPJ.19/KP.0105/RIK.SIS/2018. On December 18, 2019, the Company received Tax Assessment Letters for fiscal year 2016. Based on the Assessment Letters, the Tax Office confirmed the underpayment of Article 21 Income Tax, Withholding Tax Articles 23/26, Value Added Tax ("VAT"), and Corporate Income Tax with aggregating amount to Rp26,671. The result of the examination was agreed by the Company's Management and has been fully paid, except for the VAT underpayment assessment of Rp5,224 and recorded as claim for tax refund in other assets (Note 13).

On March 13, 2020, the Company has submitted tax objection for VAT underpayment assesment of Rp5,224.

On March 1, 2021, the Company received Objection Decision Letter No. KEP-00117/KEB/WPJ.19/2021 on VAT underpayment assesment year 2016 which rejected the Company's objection.

On April 30, 2021, the Company filed an appeal to the Tax Court on rejected decision of Rp5,224.

On October 11, 2023, the Company received Tax Court Decision Letter No. PUT-004788.16/2021/PP/M.XVIIIB Year 2023 on VAT Underpayment Assesment Letter period December 2016 which fully granting the Company's appeal. On November 10, 2023 the Company has received refund amounted Rp4,602 meanwhile on the tax collection letter ("STP") amounting to Rp622 is still in the process of filing a refund at the tax office.

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

Tahun pajak 2016 (lanjutan)

Pada tanggal 9 Desember 2023, Perusahaan mengajukan surat permohonan pengembalian STP atas Surat Ketetapan Kurang Bayar PPN masa Desember 2016 sebesar Rp622.

Pada tanggal 9 Januari 2024, Perusahaan menerima Surat Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak No. MPK-122/PAN/2024 atas putusan pengadilan pajak No. PUT-004788.16/2021/PP/M.XVIIIB Tahun 2023 atas Surat Ketetapan Kurang Bayar PPN masa Desember 2016.

Pada tanggal 2 Februari 2024, Perusahaan telah menyampaikan Jawaban/Kontra Memori Peninjauan Kembali atas Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan, Perusahaan belum menerima putusan dari Mahkamah Agung.

Tahun pajak 2017

Pada tanggal 15 September 2020, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan No. Pemb-00023/WPJ.19/RIK.SIS/2020 tentang pemeriksaan lapangan untuk semua jenis pajak tahun pajak 2017.

Pada tanggal 18 Oktober 2021, Perusahaan menerima Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan No. PRIN-P-7/WPJ.19/2021. Pada tanggal 11 Januari 2022, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak ("SKP") terkait hasil pemeriksaan pajak tahun fiskal 2017. Berdasarkan SKP tersebut, Kantor Pajak menetapkan kurang bayar atas Pajak Penghasilan Pasal 21 ("PPh Pasal 21"), Pajak Penghasilan Pasal 23/26 ("PPh Pasal 23/26"), Pajak Penghasilan Pasal 4.2 ("PPh Pasal 4.2"), Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), dan Pajak Penghasilan Badan dengan jumlah keseluruhan Rp45.914. Pada tanggal 9 Februari 2022, Perusahaan sudah membayar seluruh kurang bayar pajak tersebut.

Pada tanggal 8 April 2022, Perusahaan mengajukan keberatan pajak atas ketetapan kurang bayar Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp39.326, PPN sebesar Rp384, dan PPh Pasal 23 Rp193. Keberatan pajak tersebut telah dicatat sebagai taksiran tagihan pajak pada aset lain-lain (Catatan 13).

17. TAXATION (continued)

Tax fiscal year 2016 (continued)

On December 9, 2023, the Company has filed refund letter of STP on VAT Underpayment Assessment Letter period December 2016 amounted to Rp622.

On January 9, 2024, the Company received Judicial Review Letter which filed by Director General of Taxes Letter No. MPK-122/PAN/2024 on Tax Court Decision Letter No. PUT-004788.16/2021/PP/M.XVIIIB Year 2023 on VAT Underpayment Assesment Letter period December 2016.

On February 2, 2024, the Company has filed Response/Contra Memorandum for Judicial Review on Judicial Review which filed by Director General of Taxes.

Up to the issuance date of the financial statements, the Company has not received decision from the Supreme Court.

Tax fiscal year 2017

On September 15, 2020, the Company received Field Examination Notification Letter No. Pemb-00023/WPJ.19/RIK.SIS/2020 regarding field examination for all taxes for fiscal year 2017.

On October 18, 2021, the Company received Change Examination Instruction Letter No. PRIN-P-7/WPJ.19/2021. On January 11, 2022, the Company received Tax Assessment Letters for fiscal year 2017. Based on the Assessment Letters, the Tax Office confirmed the underpayment of Article 21 Income Tax, Withholding Tax Articles 23/26, Withholding Tax Articles 4.2, Value Added Tax ("VAT") and Corporate Income Tax with aggregating amount to Rp45,914. On February 9, 2022, the Company has fully paid those tax underpayments.

On April 8, 2022, the Company has submitted tax objection for Corporate Income Tax underpayment assesment of Rp39,326, VAT of Rp384, and Income Tax Article 23 of Rp193. Those tax objections is recorded as claim for tax refund in other assets (Note 13).

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

Tahun pajak 2017 (lanjutan)

Pada tanggal 6 Februari 2023, Perusahaan menerima Surat Keputusan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak PPh Badan Tahun Pajak 2017. Dalam Surat Keputusan Keberatan tersebut, Kantor Pajak hanya menyetujui sebagian permohonan keberatan Pajak PPh Badan sebesar Rp2.980. Atas keputusan yang ditolak sebesar Rp36.346, pada tanggal 5 Mei 2023, Perusahaan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan, Perusahaan belum menerima putusan dari Pengadilan Pajak.

Pada tanggal 6 Februari 2023, Perusahaan menerima Surat Keputusan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak PPN masa Desember 2017 yang isinya menyetujui seluruh permohonan keberatan PPN sebesar Rp384.

Pada tanggal 6 Februari 2023, Perusahaan menerima Surat Keputusan Keberatan atas Ketetapan Pajak PPh Pasal 23 masa Desember 2017 yang isinya menyetujui seluruh permohonan keberatan PPN sebesar Rp193.

Tahun pajak 2018

Pada tanggal 17 Juli 2019, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan No. Pemb-00202/WPJ.19/KP.0105/RIK.SIS/2019 tentang pemeriksaan lapangan untuk semua jenis pajak tahun pajak 2018.

Pada tanggal 17 April 2020, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak ("SKP") untuk tahun fiskal 2018. Berdasarkan SKP tersebut, Kantor Pajak menetapkan kurang bayar atas Pajak Penghasilan Pasal 21 ("PPh Pasal 21"), Pajak Penghasilan Pasal 23/26 ("PPh Pasal 23/26"), Pajak Penghasilan Pasal 4.2 ("PPh Pasal 4.2"), Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), dan Pajak Penghasilan Badan dengan jumlah keseluruhan Rp17.672. Hasil pemeriksaan tersebut telah disetujui Manajemen Perusahaan serta telah dibayarkan seluruhnya, kecuali atas ketetapan kurang bayar PPN sebesar Rp5.364, Pajak Penghasilan Badan Rp5.936, dan PPh Pasal 21 Rp29, Perusahaan mengajukan keberatan pajak.

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perusahaan mengajukan keberatan pajak atas ketetapan kurang bayar PPN sebesar Rp5.364, Pajak Penghasilan Badan Rp5.936, dan PPh Pasal 21 Rp29.

17. TAXATION (continued)

Tax fiscal year 2017 (continued)

On February 6, 2023, the Company received Objection Decision Letter on Corporate Income Tax (CIT) assessment letter for Fiscal Year 2017. On that objection decision, Tax Office only partially agreed on CIT objection request amounting to Rp2,980. On rejected decision of Rp36,346, on May 5, 2023, the Company has filed appeal request to Tax Court. Up to the issuance date of the financial statements, the Company has not received decision from the Tax Court.

On February 6, 2023, the Company received Objection Decision Letter on VAT assessment letter for period December 2017 which agreed all the Company's objection on VAT amounting to Rp384.

On February 6, 2023, the Company received Objection Decision Letter on Withholding Tax (WHT) 23 Assessment Letter for period December 2017 which agreed all the Company's objection on VAT amounting to Rp193.

Tax fiscal year 2018

On July 17, 2019, the Company received Field Examination Notification Letter No. Pemb-00202/WPJ.19/KP.0105/RIK.SIS/2019 regarding field examination for all taxes for fiscal year 2018.

On April 17, 2020, the Company received Tax Assessment Letters for fiscal year 2018. Based on the Assessment Letters, the Tax Office confirmed the underpayment of Article 21 Income Tax, Withholding Tax Articles 23/26, Withholding Tax Articles 4.2, Value Added Tax ("VAT"), and Corporate Income Tax with aggregating amount to Rp17,672. The result of the examination was agreed by the Company's Management and has been fully paid, except for the VAT underpayment assessment of Rp5,364, Corporate Income Tax of Rp5,936, and Income Tax Article 21 of Rp29, in which the Company file a tax objection.

On June 30, 2020, the Company has submitted tax objection for VAT underpayment assesment of Rp5,364, Corporate Income Tax of Rp5,936, and Income Tax Article 21 of Rp29.

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

Tahun pajak 2018 (lanjutan)

Pada tanggal 23 Agustus 2021, Perusahaan menerima Surat Keputusan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak PPN masa Desember 2018 yang isinya menolak seluruh keberatan Perusahaan. Pada tanggal 27 September 2021, Perusahaan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan yang ditolak sebesar Rp5.364. Permohonan banding tersebut dicatat sebagai taksiran tagihan pajak pada aset lain-lain (Catatan 13).

Pada tanggal 23 Agustus 2021, Perusahaan menerima Surat Keputusan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak PPh Badan Tahun Pajak 2018. Dalam Surat Keputusan Keberatan tersebut, Kantor Pajak hanya menyetujui sebagian permohonan keberatan Pajak PPh Badan sebesar Rp1.401. Pada tanggal 27 September 2021, Perusahaan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan yang ditolak sebesar Rp4.514. Permohonan banding tersebut dicatat sebagai taksiran tagihan pajak pada aset lain-lain (Catatan 13). Perusahaan tidak mengajukan permohonan banding atas putusan keberatan yang ditolak sebesar Rp21.

Pada tanggal 23 Agustus 2021, Perusahaan menerima Surat Keputusan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak PPh Pasal 21 masa Januari sampai Desember 2018 yang isinya menyetujui seluruh permohonan keberatan PPh Pasal 21 sebesar Rp29.

Pada tanggal 11 Oktober 2023, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengadilan Pajak No. PUT-010515.15/2021/PP/M.XVIIIB Tahun 2023 atas Ketetapan Pajak PPh Badan Tahun Pajak 2018 dan Surat Keputusan Pengadilan Pajak No. PUT-010516.16/2021/PP/M.XVIIIB Tahun 2023 atas Surat Ketetapan Kurang Bayar PPN masa Desember 2018 yang isinya mengabulkan seluruhnya banding Perusahaan. Atas hasil putusan pengadilan pajak yang mengabulkan seluruhnya banding Perusahaan atas PPN dan PPh Badan, pada tanggal 10 November 2023, Perusahaan telah menerima pengembalian sebesar Rp4.673 dan Rp4.514, sedangkan atas surat tagihan pajak ("STP") sebesar Rp691 masih dalam proses pengajuan pengembalian di kantor pajak.

Pada tanggal 9 Desember 2023, Perusahaan mengajukan surat permohonan pengembalian STP atas Surat Ketetapan Kurang Bayar PPN masa Desember 2018 sebesar Rp619.

17. TAXATION (continued)

Tax fiscal year 2018 (continued)

On August 23, 2021, the Company received Objection Decision Letter on VAT Assessment Letter for period December 2018 which rejected all the Company's objection. On September 27, 2021, the Company has filed appeal request to Tax Court on rejected decision of Rp5,364. Those appeal request is recorded as claim for tax refund in other assets (Note 13).

On August 23, 2021, the Company received Objection Decision Letter on Corporate Income Tax (CIT) Assessment Letter for Fiscal Year 2018. On that Objection Decision Letter, Tax Office only partially agreed on CIT objection request amounting to Rp1,401. On September 27, 2021, the Company has filed appeal request to Tax Court on rejected decision of Rp4,514. Those appeal request is recorded as claim for tax refund in other assets (Note 13). The Company did not apply the tax appeal request on rejected decision amounting to Rp21.

On August 23, 2021, the Company received Objection Decision Letter on Withholding Tax (WHT) 21 Assessment Letter for period from January to December 2018 which agreed all the Company's objection on WHT 21 amounting to Rp29.

On October 11, 2023, the Company received Tax Court Decision Letter No. PUT-010515.15/2021/PP/M.XVIIIB Year 2023 on Corporate Income Tax (CIT) Assessment Letter for Fiscal Year 2018 and Tax Court Decision Letter No. PUT-010516.16/2021/PP/M.XVIIIB Year 2023 on VAT Underpayment Assesment Letter period December 2018 which fully granting the Company's appeal. On the results of the tax court decision which is fully granting the Company's appeal on VAT and Corporate Income Tax, on November 10, 2023, Company has received refund amounted Rp4,673 and Rp4,514, meanwhile on the tax collection letter ("STP") amounting to Rp691 is still in the process of filing a refund at the tax office.

On December 9, 2023, the Company has filed refund letter of STP on VAT Underpayment Assessment Letter period December 2018 amounted to Rp619.

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

Tahun pajak 2018 (lanjutan)

Pada tanggal 9 Januari 2024, Perusahaan menerima Surat Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak No. MPK-124/PAN/2024 atas putusan pengadilan pajak No. PUT-010515.15/2021/PP/M.XVIIIB Tahun 2023 atas Ketetapan Pajak PPh Badan Tahun Pajak 2018 dan Surat Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak No. MPK-125/PAN/2024 atas putusan pengadilan pajak No. PUT-010516.16/2021/PP/M.XVIIIB Tahun 2023 atas Surat Ketetapan Kurang Bayar PPN masa Desember 2018.

Pada tanggal 2 Februari 2024, Perusahaan telah menyampaikan Jawaban/Kontra Memori Peninjauan Kembali atas Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan, Perusahaan belum menerima putusan dari Mahkamah Agung.

Tahun pajak 2019

Pada tanggal 7 Juni 2022, Perusahaan menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan ("SP2DK") No. SP2DK-96/WPJ.19/KP.01/2022. Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Pajak menetapkan kurang bayar atas Pajak Penghasilan Pasal 21 ("PPh Pasal 21"), Pajak Penghasilan Pasal 23/26 ("PPh Pasal 23/26"), Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), dan Pajak Penghasilan Badan dengan jumlah keseluruhan Rp4.111. Hasil penelitian tersebut telah disetujui Manajemen Perusahaan serta telah dibayarkan seluruhnya.

Tahun pajak 2020

Pada tanggal 29 Juli 2021, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan No. Pemb-00171/WPJ.19/KP.0104/RIK.SIS/2021 tentang pemeriksaan lapangan untuk semua jenis pajak tahun pajak 2020. Pada tanggal 25 Oktober 2021, Perusahaan menerima Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan No. PRIN-P-00172/WPJ.19/KP.0104/RIK.SIS/2021.

17. TAXATION (continued)

Tax fiscal year 2018 (continued)

On January 9, 2024, the Company received Judicial Review Letter which filed by Director General of Tax Letter No. MPK-124/PAN/2024 on Tax Court Decision Letter No. PUT-010515.15/2021/PP/M.XVIIIB Year 2023 on Corporate Income Tax (CIT) Assessment Letter for Fiscal Year 2018 and Judicial Review Letter which filed by Director General of Tax Letter No. MPK-125/PAN/2024 on Tax Court Decision Letter No. PUT-010516.16/2021/PP/M.XVIIIB Year 2023 on VAT Underpayment Assessment Letter period December 2018.

On February 2, 2024, the Company has filed Response/Contra Memorandum for Judicial Review on Judicial Review which filed by Director General of Taxes.

Up to the issuance date of the financial statements, the Company has not received decision from the Supreme Court.

Tax fiscal year 2019

On June 7, 2022, the Company received Request For Explanation of Data and/or Information Letter ("SP2DK") No. SP2DK-96/WPJ.19/KP.01/2022. Base on the research of data and/or Information, Tax Office confirmed the underpayment of Article 21 Income Tax, Withholding Tax Articles 23/26, Value Added Tax ("VAT"), and Corporate Income Tax with aggregating amount to Rp4,111. The result of the research of data and/or Information was agreed by the Company's Management and has been fully paid.

Tax fiscal year 2020

On July 29, 2021, the Company received Field Examination Notification Letter No. Pemb-00171/WPJ.19/KP.0104/RIK.SIS/2021 regarding field examination for all taxes for fiscal year 2020. On October 25, 2021, the Company received Change Examination Instruction Letter No. PRIN-P-00172/WPJ.19/KP.0104/RIK.SIS/2021.

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

Tahun pajak 2020 (lanjutan)

Pada tanggal 29 April 2022, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak ("SKP") untuk tahun fiskal 2020. Berdasarkan SKP tersebut, Kantor Pajak menetapkan kurang bayar atas Pajak Penghasilan Pasal 21 ("PPh Pasal 21"), Pajak Penghasilan Pasal 23/26 ("PPh Pasal 23/26"), Pajak Penghasilan Pasal 4.2 ("PPh Pasal 4.2"), Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") dengan jumlah keseluruhan Rp696. Hasil pemeriksaan tersebut telah disetujui Manajemen Perusahaan serta telah dibayarkan seluruhnya, dan Perusahaan tidak mengajukan keberatan ke Kantor Pajak.

Tahun pajak 2021

Pada tanggal 4 September 2023, Perusahaan menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan ("SP2DK") No. S-116/P2DK/KPP.1901/2023. Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Pajak menetapkan kurang bayar atas Pajak Penghasilan Pasal 21 ("PPh Pasal 21"), Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), dan Pajak Penghasilan Badan dengan jumlah keseluruhan Rp2.000. Hasil penelitian tersebut telah disetujui Manajemen Perusahaan serta telah dibayarkan seluruhnya.

Administrasi

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak untuk tahun fiskal 2008 dan tahun-tahun selanjutnya.

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 17 akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

17. TAXATION (continued)

Tax fiscal year 2020 (continued)

On April 29, 2022, the Company received Tax Assessment Letters for fiscal year 2020. Based on the Assessment Letters, the Tax Office confirmed the underpayment of Article 21 Income Tax, Withholding Tax Articles 23/26, Withholding Tax Articles 4.2, Value Added Tax ("VAT") with aggregating amount to Rp696. The result of the examination was agreed by the Company's Management and has been fully paid, and the Company not file tax objection to the Tax Office.

Tax fiscal year 2021

On September 4, 2023, the Company received Request For Explanation of Data and/or Information Letter ("SP2DK") No. S-116/P2DK/KPP.1901/2023. Based on the research of data and/or Information, Tax Office confirmed the underpayment of Article 21 Income Tax, Value Added Tax ("VAT"), and Corporate income Tax with aggregating amount to Rp2,000. The result of the research of data and/or Information was agreed by the Company's Management and has been fully paid.

Administration

Under the prevailing Taxation Laws of Indonesia, the Company calculates, determines and pays tax payable based on self-assessment. The Director General of Taxes may assess or amend taxes within 5 (five) years from the time the tax becomes due for the fiscal year 2008 and subsequent years.

The income tax calculation for the year ended December 31, 2023 as disclosed in Note 17 will be the basis in filing Annual Corporate Income Tax Return.

18. UTANG LAIN-LAIN / *18. OTHER PAYABLES*

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	**2022**	
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah			*Rupiah*
Utang *dealer*	22.410	16.648	*Dealers payables*
Utang promosi	21.001	23.508	*Promotion payables*
Utang asuransi	19.430	20.418	*Insurance payables*
Setoran konsumen	3.059	3.976	*Consumers' advances*
Utang pembiayaan - kendaraan (Catatan 10)	-	220	*Financing loans - vehicles (Note 10)*
Lain-lain	98.814	57.421	*Others*
Subtotal	164.714	122.191	*Subtotal*
Pihak-pihak berelasi			*Related parties*
Rupiah			*Rupiah*
Utang pembiayaan - kendaraan (Catatan 10 dan 32)	16.095	14.077	*Financing loans - vehicles (Notes 10 and 32)*
Utang asuransi (Catatan 32)	513	72	*Insurance payables (Note 32)*
Utang *dealer* (Catatan 32)	394	188	*Dealers payables (Note 32)*
Utang atas transaksi pembiayaan bersama (Catatan 5, 31, dan 32)	153	191	*Payables on joint financing (Notes 5, 31, and 32)*
Subtotal	17.155	14.528	*Subtotal*
Total	**181.869**	**136.719**	***Total***

Utang *dealer* merupakan utang kepada *dealer* sehubungan dengan transaksi pembelian kendaraan bermotor roda dua oleh Perusahaan untuk pembiayaan konsumen.

Dealers payables represent payables in connection with purchase transactions of two-wheeled motor vehicles by the Company for consumer financing.

Utang asuransi merupakan premi asuransi yang belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi.

Insurance payables represent insurance premiums that have not been paid yet to the insurance company.

Setoran konsumen merupakan utang yang timbul sehubungan dengan penerimaan angsuran dari konsumen dan penerimaan penjualan agunan yang ditarik kembali dari *dealer* yang belum dilunasi.

Consumers' advances represent payables in connection with the installment payment from customers and cash received from sales of repossessed motor vehicles from dealers that have not been settled.

Lain-lain terutama terdiri dari akrual biaya operasional Perusahaan.

Others mainly consist of accruals for the Company operational expenses.

18. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Utang pembiayaan kendaraan merupakan fasilitas pembiayaan kendaraan yang diperoleh dari PT Maybank Indonesia Finance, pihak berelasi (Catatan 32) dengan bunga efektif tahunan sebesar 10,56% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan PT Maybank Indonesia Finance, pihak berelasi (Catatan 32) dan PT Clipan Finance Indonesia Tbk dengan bunga efektif tahunan sebesar 10,56% dan 10,62% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Fasilitas ini dijamin dengan penyerahan hak kepemilikan secara fidusia atas kendaraan yang dibiayai tersebut (Catatan 10).

18. OTHER PAYABLES (continued)

Financing loans vehicles represent vehicles financing facilities obtained from PT Maybank Indonesia Finance, a related party (Note 32) with annual effective interest rates of 10.56% for the year ended December 31, 2023 and PT Maybank Indonesia Finance, a related party (Note 32) and PT Clipan Finance Indonesia Tbk with annual effective interest rates of 10.56% and 10.62% for the year ended December 31, 2022. These facilities are collateralized by fiduciary transfers of ownership on the assets financed (Note 10).

19. LIABILITAS SEWA

Analisis jatuh tempo liabilitas sewa sebagai berikut:

19. LEASE LIABILITIES

Maturity analysis of lease liabilities is as follows:

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	**2022**	
Jatuh tempo dalam waktu			*Due in*
Pihak ketiga			*Third parties*
1-5 tahun	2.178	830	*1-5 years*
> 5 tahun	38.536	44.731	*> 5 years*
Subtotal	40.714	45.561	*Subtotal*
Pihak berelasi (Catatan 32)			*Related party (Note 32)*
1-5 tahun	428	835	*1-5 years*
Subtotal	428	835	*Subtotal*
Total Liabilitas Sewa - neto	**41.142**	**46.396**	***Total Lease Liabilities - net***

Mutasi jumlah tercatat liabilitas sewa:

Movement of lease liabilities:

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	**2022**	
Saldo awal	46.396	50.978	*Beginning balance*
Penambahan selama tahun berjalan	5.688	5.863	*Additions for the year*
Penambahan bunga	3.247	3.861	*Accretion of interest*
Pembayaran	(14.189)	(14.306)	*Payments*
Subtotal	41.142	46.396	*Subtotal*
Dikurangi : bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2.232	1.129	*Less : current portion*
Bagian Jangka Panjang	**38.910**	**45.267**	***Long-term Portion***

20. UTANG OBLIGASI / *20. BONDS PAYABLE*

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	**2022**	
Nilai nominal obligasi			*Nominal value of bonds*
Pihak ketiga	1.539.000	1.152.800	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 32)	124.000	50.000	*Related party (Note 32)*
	1.663.000	1.202.800	
Dikurangi biaya emisi obligasi ditangguhkan (setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp11.592 dan Rp16.614 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022) (Catatan 29)			*Less unamortized bonds issuance costs (net of accumulated amortization of Rp11,592 and Rp16,614 as of December 31, 2023 and 2022, respectively) (Note 29)*
Pihak ketiga	(2.504)	(2.074)	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 32)	(243)	(111)	*Related party (Note 32)*
	(2.747)	(2.185)	
Total Utang Obligasi - neto	**1.660.253**	**1.200.615**	***Total Bonds Payable - net***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Kisaran suku bunga kontraktual tahunan			*Range of contractual annual interest rates*
Mata uang Rupiah	5,95% - 7,00%	4,25% - 9,85%	*Rupiah currency*

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Rincian nilai nominal utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 menurut tahun jatuh temponya adalah sebagai berikut:

20. BONDS PAYABLE (continued)

The details of nominal value of the bonds payable as of December 31, 2023 and 2022, by year of maturity are as follows:

Tahun / *Year*	31 Desember/ *December 31, 2023*				
	Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I/ *Continuing Bonds IV Phase I*	Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II/ *Continuing Bonds IV Phase II*	Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III/ *Continuing Bonds IV Phase III*	Total/ *Total*	
Pihak ketiga					*Third parties*
2024	198.000	-	221.000	419.000	*2024*
2025	-	435.000	-	435.000	*2025*
2026	-	-	685.000	685.000	*2026*
Subtotal	198.000	435.000	906.000	1.539.000	*Subtotal*
Pihak berelasi (Catatan 32)					*Related party (Note 32)*
2025	-	30.000	-	30.000	*2025*
2026	-	-	94.000	94.000	*2026*
Subtotal	-	30.000	94.000	124.000	*Subtotal*
Total	**198.000**	**465.000**	**1.000.000**	**1.663.000**	***Total***

Tahun / *Year*	31 Desember/ *December 31, 2023*					
	Obligasi Berkelanjutan III Tahap III/ *Continuing Bonds III Phase III*	Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV/ *Continuing Bonds III Phase IV*	Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I/ *Continuing Bonds IV Phase I*	Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II/ *Continuing Bonds IV Phase II*	Total/ *Total*	
Pihak ketiga						*Third parties*
2023	32.800	172.000	-	335.000	539.800	*2023*
2024	-	-	198.000	-	198.000	*2024*
2025	-	-	-	415.000	415.000	*2025*
Subtotal	32.800	172.000	198.000	750.000	1.152.800	*Subtotal*
Pihak berelasi (Catatan 32)						*Related party (Note 32)*
2025	-	-	-	50.000	50.000	*2025*
Subtotal	-	-	-	50.000	50.000	*Subtotal*
Total	**32.800**	**172.000**	**198.000**	**800.000**	**1.202.800**	***Total***

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III Tahap II WOM Finance Tahun 2019

Pada tanggal 29 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II WOM Finance Tahun 2019 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap II") dengan nilai nominal sebesar Rp1.675.000, yang ditawarkan pada nilai nominal (Catatan 1c).

Obligasi Berkelanjutan III Tahap II ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A dengan nilai nominal Rp931.500 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp125.500 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,15% per tahun, Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp618.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,85% per tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A, B, dan C pertama telah dibayarkan pada tanggal 29 Agustus 2019. Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap II terakhir yang sekaligus jatuh tempo dengan masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan III Tahap II telah dibayarkan pada tanggal 9 Juni 2020 untuk Seri A, pada tanggal 29 Mei 2021 untuk Seri B, dan pada tanggal 29 Mei 2022 untuk Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan terbaru atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 197/DIR/RATLTR/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 dari *Fitch Ratings*, Obligasi Berkelanjutan III Tahap II tersebut mendapat peringkat "AA(idn)" (*Double A*).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dijamin secara fidusia dengan piutang Perusahaan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap II yang terutang.

20. BONDS PAYABLE (continued)

Continuing Bonds III Phase II WOM Finance Year 2019

On May 29, 2019, the Company issued Continuing Bonds III Phase II WOM Finance Year 2019 With Fixed Interest Rate ("Continuing Bonds III Phase II") with a nominal value of Rp1,675,000, which were offered at par (Note 1c).

These Continuing Bonds III Phase II are series bonds consisting of Continuing Bonds III Phase II Series A with a nominal value of Rp931,500 and a fixed interest rate of 8.50% per annum, Continuing Bonds III Phase II Series B with a nominal value of Rp125,500 and a fixed interest rate of 9.15% per annum, Continuing Bonds III Phase II Series C with a nominal value of Rp618,000 and a fixed interest rate of 9.85% per annum.

The Continuing Bonds III Phase II interest is paid on a quarterly basis (three months) starting from the Issuance Date, the first Continuing Bonds III Phase II Series A, B, and C interest has been paid on August 29, 2019. The last Continuing Bonds III Phase II interest, which falls due at the maturity of each series of the Continuing Bonds III Phase II, has been paid on June 9, 2020 for Series A, on May 29, 2021 for Series B, and on May 29, 2022 for Series C.

Based on latest results of the annual rating on long-term debentures in accordance with Letter No. 197/DIR/RATLTR/XII/2022 dated December 16, 2022 from Fitch Ratings, the Continuing Bonds III Phase II are rated at "AA(idn)" (Double A).

These Continuing Bonds III Phase II are secured by the fiduciary transfers of the Company's current receivables from third parties in connection with the financing of the purchases of motor vehicles with an aggregate amount of not less than 60.00% of the principal amount of Continuing Bonds III Phase II payable.

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III Tahap II WOM Finance Tahun 2019 (lanjutan)

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II WOM Finance Tahun 2019 No. 77 tanggal 10 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 9 Juni 2020.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 29 Mei 2021.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri C telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 29 Mei 2022.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap III WOM Finance Tahun 2020

Pada tanggal 28 Mei 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III WOM Finance Tahun 2020 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap III") dengan nilai nominal sebesar Rp260.300, yang ditawarkan pada nilai nominal (Catatan 1c).

Obligasi Berkelanjutan III Tahap III ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A dengan nilai nominal Rp227.500 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp32.800 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,60% per tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap III dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A dan B pertama telah dibayarkan pada tanggal 28 Agustus 2020. Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap III terakhir yang sekaligus jatuh tempo dengan masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan III Tahap III telah dibayarkan pada tanggal 8 Juni 2021 untuk Seri A dan pada tanggal 28 Mei 2023 untuk Seri B.

20. BONDS PAYABLE (continued)

Continuing Bonds III Phase II WOM Finance Year 2019 (continued)

The issuance of Continuing Bonds III Phase II is covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuing Bonds III Phase II WOM Finance Year 2019 No. 77 dated May 10, 2019, of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, between the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Continuing Bonds III Phase II Series A matured and was fully paid on June 9, 2020.

Continuing Bonds III Phase II Series B matured and was fully paid on May 29, 2021.

Continuing Bonds III Phase II Series C matured and was fully paid on May 29, 2022.

Continuing Bonds III Phase III WOM Finance Year 2020

On May 28, 2020, the Company issued Continuing Bonds III Phase III WOM Finance Year 2020 With Fixed Interest Rate ("Continuing Bonds III Phase III") with a nominal value of Rp260,300, which were offered at par (Note 1c).

These Continuing Bonds III Phase III are series bonds consisting of Continuing Bonds III Phase III Series A with a nominal value of Rp227,500 and a fixed interest rate of 8.50% per annum, Continuing Bonds III Phase III Series B with a nominal value of Rp32,800 and a fixed interest rate of 9.60% per annum.

The Continuing Bonds III Phase III interest is paid on a quarterly basis (three months) starting from the Issuance Date, the first Continuing Bonds III Phase III Series A and B interest has been paid on August 28, 2020. The last Continuing Bonds III Phase III interest, which falls due at the maturity of each series of the Continuing Bonds III Phase III, has been paid on June 8, 2021 for Series A, and on May 28, 2023 for Series B.

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III Tahap III WOM Finance Tahun 2020 (lanjutan)

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan terbaru atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 197/DIR/RATLTR/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 dari *Fitch Ratings*, Obligasi Berkelanjutan III Tahap III tersebut mendapat peringkat "AA(idn)" (*Double A*).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III dijamin secara fidusia dengan piutang Perusahaan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap III yang terutang (Catatan 5, 6, dan 7).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III WOM Finance Tahun 2020 No. 06 tanggal 8 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana diubah dengan Adendum I Perjanjian Perwaliamanatan No. 35 tanggal 19 Mei 2020 yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 8 Juni 2021.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 28 Mei 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap III sebesar RpNihil dan Rp19.681 (Catatan 5, 6, dan 7).

20. BONDS PAYABLE (continued)

Continuing Bonds III Phase III WOM Finance Year 2020 (continued)

Based on latest results of the annual rating on long-term debentures in accordance with Letter No. 197/DIR/RATLTR/XII/2022 dated December 16, 2022 from Fitch Ratings, the Continuing Bonds III Phase III are rated at "AA(idn)" (Double A).

These Continuing Bonds III Phase III are secured by the fiduciary transfers of the Company's current receivables from third parties in connection with the financing of the purchases of motor vehicles with an aggregate amount of not less than 60.00% of the principal amount of Continuing Bonds III Phase III payable (Notes 5, 6, and 7).

The issuance of Continuing Bonds III Phase III is covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuing Bonds III Phase III WOM Finance Year 2020 No. 06 dated May 8, 2020, of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, between the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as amended by the Deed of Amendment I on the Trusteeship Agreement No. 35 dated May 19, 2020, of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, between the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Continuing Bonds III Phase III Series A matured and was fully paid on June 8, 2021.

Continuing Bonds III Phase III Series B matured and was fully paid on May 28, 2023.

As of December 31, 2023 and 2022, the consumer financing receivables pledged as collateral to the Continuing Bonds III Phase III amounted to RpNil and Rp19,681, respectively (Notes 5, 6, and 7).

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV WOM Finance Tahun 2020

Pada tanggal 10 September 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV WOM Finance Tahun 2020 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV") dengan nilai nominal sebesar Rp500.000, yang ditawarkan pada nilai nominal (Catatan 1c).

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Seri A dengan nilai nominal Rp328.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp172.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,15% per tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Seri A dan B pertama telah dibayarkan pada tanggal 10 Desember 2020. Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV terakhir yang sekaligus jatuh tempo dengan masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV telah dibayarkan pada tanggal 20 September 2021 untuk Seri A dan pada tanggal 10 September 2023 untuk Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan terbaru atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 197/DIR/RATLTR/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 dari *Fitch Ratings*, Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV tersebut mendapat peringkat "AA(idn)" (*Double A*).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV dijamin secara fidusia dengan piutang Perusahaan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV yang terutang (Catatan 5, 6, dan 7).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV WOM Finance Tahun 2020 No. 32 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

20. BONDS PAYABLE (continued)

Continuing Bonds III Phase IV WOM Finance Year 2020

On September 10, 2020, the Company issued Continuing Bonds III Phase IV WOM Finance Year 2020 With Fixed Interest Rate ("Continuing Bonds III Phase IV") with a nominal value of Rp500,000, which were offered at par (Note 1c).

These Continuing Bonds III Phase IV are series bonds consisting of Continuing Bonds III Phase IV Series A with a nominal value of Rp328,000 and a fixed interest rate of 8.00% per annum, Continuing Bonds III Phase IV Series B with a nominal value of Rp172,000 and a fixed interest rate of 9.15% per annum.

The Continuing Bonds III Phase IV interest is paid on a quarterly basis (three months) starting from the Issuance Date, the first Continuing Bonds III Phase IV Series A and B interest has been paid on December 10, 2020. The last Continuing Bonds III Phase IV interest, which falls due at the maturity of each series of the Continuing Bonds III Phase IV, has been paid on September 20, 2021 for Series A and on September 10, 2023 for Series B.

Based on latest results of the annual rating on long-term debentures in accordance with Letter No. 197/DIR/RATLTR/XII/2022 dated December 16, 2022 from Fitch Ratings, the Continuing Bonds III Phase IV are rated at "AA(idn)" (Double A).

These Continuing Bonds III Phase IV are secured by the fiduciary transfers of the Company's current receivables from third parties in connection with the financing of the purchases of motor vehicles with an aggregate amount of not less than 60.00% of the principal amount of Continuing Bonds III Phase IV payable (Notes 5, 6, and 7).

The issuance of Continuing Bonds III Phase IV is covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuing Bonds III Phase IV WOM Finance Year 2020 No. 32 dated August 19, 2020, of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, between the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV WOM Finance Tahun 2020 (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 20 September 2021.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 10 September 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV sebesar RpNihil dan Rp103.200 (Catatan 5, 6, dan 7).

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I WOM Finance Tahun 2021

Pada tanggal 28 Juli 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I WOM Finance Tahun 2021 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I") dengan nilai nominal sebesar Rp500.000, yang ditawarkan pada nilai nominal (Catatan 1c).

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Seri A dengan nilai nominal Rp302.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp198.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,00% per tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Seri A dan B pertama telah dibayarkan pada tanggal 28 Oktober 2021. Bunga Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I terakhir yang sekaligus jatuh tempo dengan masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I telah dibayarkan pada tanggal 8 Agustus 2022 untuk Seri A dan akan dibayarkan pada tanggal 28 Juli 2024 untuk Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan terbaru atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 208/DIR/RATLTR/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 dari *Fitch Ratings*, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I tersebut mendapat peringkat "AA(idn)" (*Double A*).

20. BONDS PAYABLE (continued)

Continuing Bonds III Phase IV WOM Finance Year 2020 (continued)

Continuing Bonds III Phase IV Series A matured and was fully paid on September 20, 2021.

Continuing Bonds III Phase IV Series B matured and was fully paid on September 10, 2023.

As of December 31, 2023 and 2022, the consumer financing receivables pledged as collateral to the Continuing Bonds III Phase IV amounted to RpNil and Rp103,200, respectively (Notes 5, 6, and 7).

Continuing Bonds IV Phase I WOM Finance Year 2021

On July 28, 2021, the Company issued Continuing Bonds IV Phase I WOM Finance Year 2021 With Fixed Interest Rate ("Continuing Bonds IV Phase I") with a nominal value of Rp500,000, which were offered at par (Note 1c).

These Continuing Bonds IV Phase I are series bonds consisting of Continuing Bonds IV Phase I Series A with a nominal value of Rp302,000 and a fixed interest rate of 5.50% per annum, Continuing Bonds IV Phase I Series B with a nominal value of Rp198,000 and a fixed interest rate of 7.00% per annum.

The Continuing Bonds IV Phase I interest is paid on a quarterly basis (three months) starting from the Issuance Date, the first Continuing Bonds IV Phase I Series A and B interest has been paid on October 28, 2021. The last Continuing Bonds IV Phase I interest, which falls due at the maturity of each series of the Continuing Bonds IV Phase I, has been paid on August 8, 2022 for Series A, and will be paid on July 28, 2024 for Series B.

Based on latest results of the annual rating on long-term debentures in accordance with Letter No. 208/DIR/RATLTR/XII/2023 dated December 8, 2023 from Fitch Ratings, the Continuing Bonds IV Phase I are rated at "AA(idn)" (Double A).

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I WOM Finance Tahun 2021 (lanjutan)

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I dijamin secara fidusia dengan piutang Perusahaan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I yang terutang (Catatan 5, 6, dan 7).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I WOM Finance Tahun 2021 No. 30 tanggal 23 April 2021, sebagaimana diubah dengan Adendum I Perjanjian Perwaliamanatan No. 31 tanggal 30 Mei 2021, sebagaimana diubah dengan Adendum II Perjanjian Perwaliamanatan No. 21 tanggal 8 Juli 2021, yang ketiganya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 8 Agustus 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I masing-masing sebesar Rp118.800 dan Rp118.800 (Catatan 5, 6, dan 7).

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II WOM Finance Tahun 2022

Pada tanggal 8 April 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II WOM Finance Tahun 2022 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II") dengan nilai nominal sebesar Rp800.000, yang ditawarkan pada nilai nominal (Catatan 1c).

20. BONDS PAYABLE (continued)

Continuing Bonds IV Phase I WOM Finance Year 2021 (continued)

These Continuing Bonds IV Phase I are secured by the fiduciary transfers of the Company's current receivables from third parties in connection with the financing of the purchases of motor vehicles with an aggregate amount of not less than 60.00% of the principal amount of Continuing Bonds IV Phase I payable (Notes 5, 6, and 7).

The issuance of Continuing Bonds IV Phase I is covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuing Bonds IV Phase I WOM Finance Year 2021 No. 30 dated April 23, 2021, as amended by the Deed of Amendment I on the Trusteeship Agreement No. 31 dated May 30, 2021, as amended by the Deed of Amendment II on the Trusteeship Agreement No. 21 dated July 8, 2021, of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, between the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Continuing Bonds IV Phase I Series A matured and was fully paid on August 8, 2022.

As of December 31, 2023 and 2022, the consumer financing receivables pledged as collateral to the Continuing Bonds IV Phase 1 amounting to Rp118,800 and Rp118,800, respectively (Notes 5, 6, and 7).

Continuing Bonds IV Phase II WOM Finance Year 2022

On April 8, 2022, the Company issued Continuing Bonds IV Phase II WOM Finance Year 2022 With Fixed Interest Rate ("Continuing Bonds IV Phase II") with a nominal value of Rp800,000, which were offered at par (Note 1c).

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II WOM Finance Tahun 2022 (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Seri A dengan nilai nominal Rp335.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 4,25% per tahun, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp465.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 6,30% per tahun.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan terbaru atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 208/DIR/RATLTR/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 dari *Fitch Ratings*, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II tersebut mendapat peringkat "AA(idn)" (*Double A*).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dijamin secara fidusia dengan piutang Perusahaan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II yang terutang (Catatan 5, 6, dan 7).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II WOM Finance Tahun 2022 No. 34 tanggal 18 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 18 April 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II masing-masing sebesar Rp279.000 dan Rp480.001 (Catatan 5, 6, dan 7).

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III WOM Finance Tahun 2023

Pada tanggal 11 April 2023, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III WOM Finance Tahun 2023 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III") dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000, yang ditawarkan pada nilai nominal (Catatan 1c).

20. *BONDS PAYABLE (continued)*

Continuing Bonds IV Phase II WOM Finance Year 2022 (continued)

These Continuing Bonds IV Phase II are series bonds consisting of Continuing Bonds IV Phase II Series A with a nominal value of Rp335,000 and a fixed interest rate of 4.25% per annum, Continuing Bonds IV Phase II Series B with a nominal value of Rp465,000 and a fixed interest rate of 6.30% per annum.

Based on latest results of the annual rating on long-term debentures in accordance with Letter No. 208/DIR/RATLTR/XII/2023 dated December 8, 2023 from Fitch Ratings, the Continuing Bonds IV Phase II are rated at "AA(idn)" (Double A).

These Continuing Bonds IV Phase II are secured by the fiduciary transfers of the Company's current receivables from third parties in connection with the financing of the purchases of motor vehicles with an aggregate amount of not less than 60.00% of the principal amount of Continuing Bonds IV Phase II payable (Notes 5, 6, and 7).

The issuance of Continuing Bonds IV Phase II is covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuing Bonds IV Phase II WOM Finance Year 2022 No. 34 dated March 18, 2022, of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, between the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Continuing Bonds IV Phase II Series A matured and was fully paid on April 18, 2023.

As of December 31, 2023 and 2022, the consumer financing receivables pledged as collateral to the Continuing Bonds IV Phase II amounting to Rp279,000 and Rp480,001, respectively (Notes 5, 6, and 7)

Continuing Bonds IV Phase III WOM Finance Year 2023

On April 11, 2023, the Company issued Continuing Bonds IV Phase III WOM Finance Year 2023 With Fixed Interest Rate ("Continuing Bonds IV Phase III") with a nominal value of Rp1,000,000, which were offered at par (Note 1c).

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III WOM Finance Tahun 2023 (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri A dengan nilai nominal Rp221.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 5,95% per tahun, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp779.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,00% per tahun

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan terbaru atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat o.. 208/DIR/RATLTR/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 dari *Fitch Ratings*, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III tersebut mendapat peringkat "AA(idn)" (*Double A*).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III dijamin secara fidusia dengan piutang Perusahaan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III yang terutang (Catatan 5, 6, dan 7).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023 No. 25 tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2023, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sebesar Rp600.000 (Catatan 5, 6, dan 7).

20. *BONDS PAYABLE (continued)*

Continuing Bonds IV Phase III WOM Finance Year 2023 (continued)

These Continuing Bonds IV Phase III are series bonds consisting of Continuing Bonds IV Phase III Series A with a nominal value of Rp221,000 and a fixed interest rate of 5.95% per annum, Continuing Bonds IV Phase III Series B with a nominal value of Rp779,000 and a fixed interest rate of 7.00% per annum.

Based on latest results of the annual rating on long-term debentures in accordance with Letter No. 208/DIR/RATLTR/XII/2023 dated December 8, 2023 from Fitch Ratings, the Continuing Bonds IV Phase III are rated at "AA(idn)" (Double A).

These Continuing Bonds IV Phase III are secured by the fiduciary transfers of the Company's current receivables from third parties in connection with the financing of the purchases of motor vehicles with an aggregate amount of not less than 60.00% of the principal amount of Continuing Bonds IV Phase III payable (Notes 5, 6, and 7).

The issuance of Continuing Bonds IV Phase III is covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuing Bonds IV WOM Finance Phase III Year 2023 No. 25 dated March 17, 2023, of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, between the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

As of December 31, 2023, the consumer financing receivables pledged as collateral to the Continuing Bonds IV Phase III amounting to Rp600,000 (Notes 5, 6, and 7).

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Sebelum dilunasinya semua pokok dan bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap II, III, IV, dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, II, III serta pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perusahaan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II, III, IV, dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, II, III Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan, antara lain, melakukan penggabungan atau peleburan usaha yang akan mempunyai akibat yang negatif terhadap Perusahaan, melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II, III, IV, dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, II, III kecuali pinjaman untuk pembiayaan usaha Perusahaan, menyatakan atau membayar pembagian dividen selama Perusahaan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, mengubah bidang usaha utama Perusahaan dan menjaminkan aset termasuk hak atas pendapatan Perusahaan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang yang menjadi jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Akta Pengakuan Utang. Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Satu tahun setelah tanggal penjatahan, Perusahaan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi. Perusahaan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan obligasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. *BONDS PAYABLE (continued)*

Prior to the redemption of the entire Continuing Bonds III Phase II, III, IV, and Continuing Bonds IV Phase I, II, III principal and payments of the interest and other charges which are the responsibility of the Company in connection with the issuance of the Continuing Bonds III Phase II, III, IV, and Continuing Bonds IV Phase I, II, III the Company, without the written consent of the Trustee shall not undertake, among others, merger or business combination, which will have a negative effect to the Company, obtain new loans which have more priority position than those arising from the Continuing Bonds III Phase II, III, IV, and Continuing Bonds IV Phase I, II, III except loans obtained to finance the Company's business, declare or pay dividends as long as the Company failed in servicing the loans based on the Trusteeship Agreement, change the main business of the Company and pledge any of the present or future assets including the rights on the Company's revenues which became the collateral based on the Trusteeship Agreement and Indebtedness Agreement. The Company has complied with the covenants in those agreements as of December 31, 2023 and 2022.

One year after the allotment date, the Company may repurchase (buy back) the bonds partially or fully prior to due date of the bonds principal. The Company has the right to treat the repurchase (buy back) to be used as the bonds redemption or to be subsequently sold at market price following the provision of Trustee Agreements and prevailing regulation.

21. MODAL SAHAM / *21. CAPITAL STOCK*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rincian kepemilikan saham Perusahaan dengan nilai nominal sebesar Rp100 (dalam nilai penuh) per lembar saham adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2023 and 2022, the details of the Company's shares of stock with a par value of Rp100 (in full amount) per share are as follows:

Pemegang Saham / *Shareholders*	31 Desember/ *December 31,* 2023 dan/*and 2022* Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Number of Shares Issued and Fully Paid*	Persentase Pemilikan/ *Percentage of Ownership*	Jumlah/ *Amount*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.349.646.729	67,49%	234.965
PT Wahana Makmur Sejati	870.600.000	25,01%	87.060
Masyarakat umum (masing-masing dibawah 5,00%)	261.234.751	7,50%	26.123
Total	**3.481.481.480**	**100,00%**	**348.148**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Laba tahun berjalan	236.407	197.603	*Income for the year*
Jumlah saham biasa yang beredar (dalam nilai penuh)	3.481.481.480	3.481.481.480	*Number of ordinary shares outstanding (in full amount)*
Laba per saham dasar (dalam nilai penuh)	**67,90**	**56,76**	***Basic earnings per share (in full amount)***

22. MODAL DISETOR LAINNYA

Modal disetor lainnya merupakan selisih antara jumlah harga jual dengan jumlah nilai nominal saham yang ditawarkan kepada masyarakat setelah dikurangi dengan seluruh beban yang berhubungan dengan penawaran umum saham Perusahaan. Rincian pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Additional paid-in capital represents the difference between the selling price and the par value of the shares offered to the public after being deducted with the total expenses related to the public issuance of the Company's shares. The details as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	**2022**	
Selisih lebih harga jual atas nilai nominal	171.852	171.852	*Excess of selling price over par the value*
Dikurangi beban emisi efek ekuitas	(11.662)	(11.662)	*Less stock issuance costs*
Neto	**160.190**	**160.190**	***Net***

Seluruh biaya emisi efek berasal dari penawaran umum yang dilakukan pada tahun 2015 dan 2004.

All stock issuance costs arose from the public offering conducted in 2015 and 2004.

23. SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA DAN DIVIDEN KAS

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan No. 91 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para pemegang saham menyetujui penambahan cadangan umum dari laba bersih Perusahaan sebesar Rp2.500 serta pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan nilai maksimal sebesar Rp59.281 atau 30,00% dari laba bersih Perusahaan dengan dividen sekitar sebesar Rp17,00 per lembar saham. Dividen tunai telah dibayarkan pada tanggal 2 Mei 2023 sebesar Rp59.185.

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 52 tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para pemegang saham menyetujui penambahan cadangan umum dari laba bersih Perusahaan sebesar Rp2.500 serta pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan nilai maksimal sebesar Rp33.183 atau 30,00% dari laba bersih Perusahaan dengan dividen sekitar sebesar Rp9,50 per lembar saham. Dividen tunai telah dibayarkan pada tanggal 26 April 2022 sebesar Rp33.075.

23. APPROPRIATION OF RETAINED EARNINGS AND CASH DIVIDENDS

Based on Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") No. 91, dated March 30, 2023 of Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, the Shareholders approved additional appropriation of retained earnings for general reserves amounting to Rp2,500 and disburse cash dividend for the year ended December 31, 2022 with maximum amount of Rp59,281 or 30.00% of Company's net income with dividend around Rp17.00 per share. The cash dividends have been paid on May 2, 2023 amounted to Rp59,185.

Based on Deed of Minutes of AGMS No. 52, dated March 24, 2022 of Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, the Shareholders approved additional appropriation of retained earnings for general reserves amounting to Rp2,500 and disburse cash dividend for the year ended December 31, 2021 with maximum amount of Rp33,183 or 30.00% of Company's net income with dividend around Rp9.50 per share. The cash dividends have been paid on April 26, 2022 amounted to Rp33,075.

24. PENDAPATAN PEMBIAYAAN KONSUMEN, MODAL USAHA, DAN SEWA PEMBIAYAAN

24. CONSUMER FINANCING, CAPITAL FINANCING, AND FINANCE LEASE INCOME

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Pihak ketiga			*Third parties*
Pendapatan pembiayaan konsumen	1.222.279	1.219.258	*Consumer financing income*
Pendapatan modal usaha	27.535	68.636	*Capital financing income*
Pendapatan sewa pembiayaan	450.939	126.973	*Finance lease income*
Total pendapatan pembiayaan konsumen, modal usaha, dan sewa pembiayaan - bruto	1.700.753	1.414.867	*Total consumer financing income, capital financing income, and finance lease income - bruto*
Dikurangi hak bank-bank sehubungan dengan transaksi kerjasama pembiayaan bersama (Catatan 31)	-	(36)	*Less amounts of the bank's rights on such income relating to the transaction of joint financing cooperation (Note 31)*
Pendapatan Pembiayaan Konsumen, Modal Usaha, dan Sewa Pembiayaan - neto	**1.700.753**	**1.414.831**	***Consumer Financing, Capital Financing, and Finance Lease Income - net***

Pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada pendapatan pembiayaan konsumen, modal usaha, dan sewa pembiayaan dari satu konsumen saja yang melebihi 10,00% dari total pendapatan konsumen.

For the years ended December 31, 2023 and 2022, the Company has no consumer financing, capital financing, and finance lease income from one customer exceeding of 10.00% of total consumer financing income.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pendapatan pembiayaan konsumen, pembiayaan modal usaha, dan sewa pembiayaan termasuk amortisasi atas pendapatan dan biaya transaksi piutang pembiayaan konsumen, pembiayaan modal usaha, dan sewa pembiayaan masing-masing sebesar Rp81.316 dan Rp47.272.

For the years ended December 31, 2023 and 2022, consumer financing, capital financing, and finance lease income includes amortization of income and transaction cost of consumer financing, capital financing, and finance lease receivables amounting to Rp81,316 and Rp47,272, respectively.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pendapatan *margin murabahah* disajikan sebagai bagian dari pendapatan pembiayaan konsumen masing-masing sebesar Rp55.734 dan Rp25.267 (Catatan 37).

For the years ended December 31, 2023, and 2022, margin murabahah was presented as part of consumer financing income amounting to Rp55,734 and Rp25,267, respectively (Note 37).

25. PENDAPATAN ADMINISTRASI

25. ADMINISTRATION INCOME

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Pendapatan komisi asuransi	41.284	33.010	*Insurance commission income*
Pendapatan administrasi	-	12.506	*Administration income*
Total	**41.284**	**45.516**	***Total***

26. PENDAPATAN LAIN-LAIN / *26. OTHER REVENUES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Pendapatan denda	92.517	103.212	*Penalty income*
Pendapatan pelunasan awal konsumen	60.762	46.548	*Income from early consumer repayment*
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan	44.636	53.220	*Collection of receivables previously written-off*
Pendapatan klaim asuransi	6.040	4.644	*Insurance claim income*
Lain-lain	36.644	15.440	*Others*
Total	**240.599**	**223.064**	***Total***

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *27. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Alih daya	302.460	299.660	*Outsourcing*
Promosi penjualan	35.946	43.157	*Sales promotions*
Premi asuransi	34.672	30.996	*Insurance premium*
Kerugian agunan yang ditarik kembali	32.804	18.394	*Losses on repossessed motor vehicle*
Transportasi dan komunikasi	31.153	27.336	*Transportation and communication*
Perbaikan dan pemeliharaan	26.077	20.802	*Repairs and maintenance*
Pemasangan jaringan	25.525	20.590	*Network installation*
Sewa	19.018	25.779	*Rentals*
Pelatihan	13.967	8.826	*Training*
Biaya aplikasi kredit	11.316	8.828	*Application credit expense*
Legalitas	10.950	8.599	*Legal*
Listrik dan air	9.581	9.530	*Electricity and water*
Materai	8.437	11.193	*Stamp*
Biaya aplikasi digital	5.564	1.553	*Application digital expense*
Percetakan	3.947	4.665	*Printing*
BPKB/STNK kendaraan	3.453	2.632	*Vehicle's BPKB/STNK*
Penanganan dan rugi *fraud*	3.365	2.140	*Fraud settlement and losses*
Iuran keanggotaan	3.102	2.959	*Membership expense*
Perjamuan tamu	2.629	3.645	*Entertainment*
Perlengkapan kantor	2.451	2.302	*Office supplies*
Honorarium konsultan	2.360	2.138	*Consultancy fees*
Alat tulis kantor	1.370	1.407	*Stationery*
Seragam/tas	1.091	89	*Uniform/bag*
Biaya pajak	857	5.205	*Tax expense*
Kebersihan lingkungan	565	517	*Cleaning service*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500)	901	908	*Others (each below Rp500)*
Total	**593.561**	**563.850**	***Total***

28. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN / *28. SALARIES AND BENEFITS EXPENSES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Gaji dan tunjangan	354.116	332.050	*Salaries and benefits*
Insentif	24.275	24.233	*Incentives*
Total	**378.391**	**356.283**	***Total***

Beban gaji dan tunjangan adalah termasuk kompensasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan beban imbalan kerja karyawan (Catatan 32 dan 33).

Salaries and benefits include compensation received by the Company's Board of Commissioners and Directors and employee benefit expense (Notes 32 and 33).

29. BEBAN PENDANAAN DAN KEUANGAN / *29. FINANCING COSTS AND FINANCING CHARGES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Bunga			*Interests*
Pihak ketiga (Catatan 14)	273.124	226.243	*Third parties (Note 14)*
Pihak-pihak berelasi (Catatan 14, 15, dan 32)	24.628	21.964	*Related parties (Notes 14, 15, and 32)*
Provisi dan administrasi bank	6.063	6.410	*Bank provision fees and administration charges*
Beban bunga aset hak-guna			*Interest expense of right-of-use assets*
Pihak ketiga	3.212	3.816	*Third party*
Pihak berelasi (Catatan 32)	35	45	*Related party (Notes 32)*
Amortisasi biaya-biaya emisi obligasi (Catatan 20 dan 32)	2.819	3.516	*Amortization on bonds issuance costs (Notes 20 and 32)*
Total	**309.881**	**261.994**	***Total***

30. BEBAN LAIN-LAIN / *30. OTHER EXPENSES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Biaya balai lelang	2.227	1.579	*Auction fee*
Bunga atas utang pembiayaan - kendaraan			*Interest on financing loans - vehicle*
Pihak berelasi (Catatan 18 dan 32)	1.625	1.057	*Related party (Notes 18 and 32)*
Pihak ketiga (Catatan 18)	7	81	*Third parties (Note 18)*
Lain-lain	16.504	14.306	*Others*
Total	**20.363**	**17.023**	***Total***

31. PERJANJIAN-PERJANJIAN KERJASAMA

PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("BMI")

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penerusan Kredit No. 2 tanggal 1 November 2004, Perusahaan telah memperoleh persetujuan kerjasama dari BMI dimana fasilitas kerjasama untuk penyaluran kredit kendaraan bermotor roda dua ditingkatkan dari Rp300.000 menjadi Rp500.000.

Seluruh fasilitas tersebut bersifat berulang (*revolving*). Porsi pembiayaan BMI dan Perusahaan masing-masing 99,00% dan 1,00% (Catatan 32).

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Perubahan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Pemberian Fasilitas Kendaraan Bermotor antara BMI dengan Perusahaan No. SPj.2023.002/DIR *Global - FIG* tanggal 13 Maret 2023, fasilitas kerjasama tersebut diubah menjadi Rp2.000.000 dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2024.

Tingkat suku bunga efektif yang diberlakukan oleh BMI kepada Perusahaan adalah berkisar antara 11,75% sampai dengan 14,25% per tahun. Sebagai jaminan adalah kendaraan bermotor yang dibiayai oleh BMI melalui Perusahaan (Catatan 5). Selain itu, Perusahaan wajib mempertahankan nilai rasio perbandingan jumlah seluruh kewajiban terhadap jumlah modal disetor (*gearing ratio*) *on-shore* dan *off-shore* tidak lebih dari 10 : 1.

Perjanjian dengan BMI adalah perjanjian *without recourse* sehingga utang bank dan piutang pembiayaan konsumen yang terkait disajikan secara neto.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah mematuhi seluruh persyaratan penting sehubungan dengan persyaratan yang diberikan oleh BMI tersebut di atas.

31. COOPERATION AGREEMENTS

PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("BMI")

Based on the Credit Channeling Cooperation Agreement No. 2 dated November 1, 2004, the Company has obtained an approval letter from BMI in which the cooperation facility for the credit channeling of two-wheeled motor vehicles was increased from Rp300,000 to Rp500,000.

All of facility was on a revolving basis. The financing portion of BMI and the Company is 99.00% and 1.00%, respectively (Note 32).

The agreement has been amended several times, the latest Amendment to the Joint Financing Cooperation Agreement of Vehicle Credit Facility between BMI and the Company No. SPj.2023.002/DIR Global - FIG dated March 13, 2023, the facility was changed to Rp2,000,000 with maturity date on March 15, 2024.

The effective interest rate charged by BMI to the Company are ranging from 11.75% to 14.25% per annum. The motor vehicles financed by BMI through the Company (Note 5) serve as collateral. In addition, the Company is obliged to maintain the gearing ratio on-shore and off-shore of not more than 10 : 1.

The arrangement with BMI is on a without recourse basis and therefore the related bank loans and consumer financing receivables are presented at net.

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has complied with all significant terms and condition related to cooperation agreement as required by BMI.

32. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi dan sifat hubungan adalah sebagai berikut:

32. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Company is engaged in transactions with related parties. The related parties and nature of relationship are as follows:

Pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat dari hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat dari transaksi/ *Nature of transaction*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("BMI")	Pemegang saham mayoritas Perusahaan/*The majority shareholder of the Company*	Rekening giro, utang obligasi, perjanjian kerjasama pembiayaan, utang subordinasi, pendapatan bunga, dan beban pendanaan/*Current accounts, bonds payable, joint financing, subordinated loan, interest income, and financing cost*
PT Maybank Indonesia Finance ("MIF")	Hubungan entitas pengendali dengan Perusahaan/*Under common ownership with the Company*	Fasilitas pembiayaan-kendaraan/*Financing facilities-vehicles*
PT Wahanaartha Ritelindo ("WARI")	Hubungan afiliasi dengan Perusahaan/*Under affiliation with the Company*	Liabilitas sewa, beban bunga aset hak-guna, dan utang *dealer*/*Lease liabilities, interest expense of right-of-use assets, and dealers payables*
PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia ("Etiqa")/*PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia ("Etiqa")*	Mempunyai pemegang akhir yang sama/*Owned by the same ultimate holder*	Utang asuransi/*Insurance payables*
Dewan Komisaris dan Direksi/*Boards of Commissioners and Directors*	Personil manajemen kunci/*Key management personnel*	Pinjaman karyawan, gaji, dan tunjangan/*Loans to employee, salaries, and benefits*

32. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

32. *TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)*

Ringkasan saldo dengan pihak-pihak berelasi dan persentase saldo dengan pihak-pihak berelasi terhadap total aset, liabilitas serta pendapatan dan beban adalah sebagai berikut:

The summary of related parties balances and percentages of related parties balances to total assets, liabilities, revenues and expenses are as follows:

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	**2022**	
ASET			***ASSETS***
Kas dan setara kas			*Cash and cash equivalents*
Bank (Catatan 4)	233.647	168.909	*Cash in banks (Note 4)*
Piutang lain-lain			*Other receivables*
Pinjaman karyawan (Catatan 8)	986	1.182	*Loans to employees (Note 8)*
Persentase terhadap total aset			***Percentage to total assets***
Kas dan setara kas			*Cash and cash equivalents*
Bank	3,52%	2,99%	*Cash in banks*
Piutang lain-lain			*Other receivables*
Pinjaman karyawan	0,01%	0,02%	*Loans to employees*
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Biaya yang masih harus dibayar			*Accrued expenses*
Beban bunga atas utang subordinasi dan utang obligasi (Catatan 15, 16, dan 20)	3.480	2.293	*Interest on subordinated loan and bonds payable (Notes 15, 16, and 20)*
Utang obligasi (Catatan 20)	123.757	49.889	*Bonds payable (Note 20)*
Utang subordinasi (Catatan 15)	200.000	200.000	*Subordinated loan (Note 15)*
Liabilitas sewa (Catatan 19)	428	835	*Lease liabilities (Note 19)*
Utang lain-lain			*Other payables*
Utang pembiayaan - kendaraan (Catatan 10 dan 18)	16.095	14.077	*Financing loans - vehicles (Notes 10 and 18)*
Utang *dealer* (Catatan 18)	513	72	*Dealers payables (Note 18)*
Utang asuransi (Catatan 18)	394	188	*Insurance payables (Note 18)*
Utang atas transaksi pembiayaan bersama (Catatan 18)	153	191	*Payables on joint financing (Note 18)*
Persentase terhadap total liabilitas			***Percentage to total liabilities***
Biaya yang masih harus dibayar			*Accrued expenses*
Beban bunga atas utang subordinasi dan utang obligasi	0,07%	0,06%	*Interest on subordinated loan and bonds payable*
Utang obligasi	2,51%	1,21%	*Bonds payable*
Utang subordinasi	4,05%	4,84%	*Subordinated loan*
Liabilitas sewa	0,01%	0,02%	*Lease liabilities*
Utang lain-lain			*Other payables*
Utang pembiayaan - kendaraan	0,33%	0,34%	*Financing loans - vehicles*
Utang *dealer*	0,01%	0,00%	*Dealers payables*
Utang asuransi	0,01%	0,00%	*Insurance payables*
Utang atas transaksi pembiayaan bersama	0,00%	0,00%	*Payables on joint financing*

32. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) / *32. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
PENDAPATAN			***REVENUES***
Pendapatan bunga kas dan setara kas - neto setelah pajak	7.865	6.880	*Interest income on cash and cash equivalents - net of tax*
Persentase terhadap total pendapatan			***Percentage to total revenues***
Pendapatan bunga kas dan setara kas - neto setelah pajak	0,39%	0,41%	*Interest income on cash and cash equivalents - net of tax*
BEBAN			***EXPENSES***
Beban bunga aset hak-guna (Catatan 29)	35	45	*Interest expense of right-of-use assets (Note 29)*
Beban pendanaan atas utang subordinasi (Catatan 15 dan 29)	17.236	18.383	*Financing costs on subordinated loan (Notes 15 and 29)*
Beban pendanaan atas utang obligasi (Catatan 20 dan 29)	7.392	3.581	*Financing cost on bonds payable (Notes 20 and 29)*
Beban lain-lain - bunga atas utang pembiayaan - kendaraan (Catatan 18 dan 30)	1.625	1.057	*Other expenses - interest on financing loans - vehicles (Notes 18 and 30)*
Persentase terhadap total beban			***Percentage to total expenses***
Beban bunga aset hak-guna	0,00%	0,00%	*Interest expense of right-of-use assets*
Beban pendanaan atas utang subordinasi	1,03%	1,30%	*Financing costs on subordinated loan*
Beban pendanaan atas utang obligasi	0,44%	0,25%	*Financing cost on bonds payable*
Beban lain-lain - bunga atas utang pembiayaan - kendaraan	0,10%	0,07%	*Other expenses - interest on financing loans - vehicles*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
	Dewan Komisaris/ *Board of Commissioners*	**Dewan Komisaris/ *Board of Commissioners***	
Imbalan kerja jangka pendek - gaji	1.922	2.997	*Short term employment benefits - salaries*
Imbalan kerja jangka pendek - tunjangan lainnya	726	623	*Short term employment benefits - others benefits*
Total	**2.648**	**3.620**	***Total***

32. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) / *32. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	2022	
	Direksi/*Board of Directors*	Direksi/*Board of Directors*	
Imbalan kerja jangka pendek - gaji	7.803	7.170	*Short term employment benefits - salaries*
Imbalan kerja jangka pendek - tunjangan lainnya	4.874	3.410	*Short term employment benefits - others benefits*
Total	**12.677**	**10.580**	***Total***

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi usaha pada umumnya yang mungkin tidak sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga (Catatan 2c).

All significant transactions with related parties are conducted under commercial terms and condition which may not be similar to those conducted with third parties (Note 2c).

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA / *33. LIABILITY FOR EMPLOYEE BENEFITS*

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja dan imbalan jangka panjang lainnya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp92.891 dan Rp90.779.

The Company accrued the liability for employee benefits and other long-term benefits as of December 31, 2023 and 2022 amounting to Rp92,891 and Rp90,779, respectively.

Rekonsiliasi jumlah liabilitas imbalan pasti neto adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the net defined liabilities are as follows:

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	2022	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	87.879	90.350	*Present value of the defined benefit obligation*
Nilai wajar aset program	(10.202)	(9.455)	*Fair Value of plan assets*
Defisit	77.677	80.895	*Deficit*
Liabilitas Imbalan Pasti - neto	**77.677**	**80.895**	***Defined Benefit Liabilities - net***
Nilai kewajiban karyawan kontrak dan alih daya	15.214	9.884	*Defined benefit obligation - contract and outsourcing employees*
Liabilitas imbalan kerja	**92.891**	**90.779**	***Liability for employee benefits***

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *33. LIABILITY FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

Perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

The changes in the present value of benefit obligation are as follows:

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	**2022**	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal tahun	90.350	89.079	*Present value of the defined benefit obligation at the beginning of the year*
Biaya jasa kini	11.280	12.040	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	(5.552)	82	*Past service cost*
Biaya bunga	6.350	5.676	*Interest cost*
Manfaat yang dibayarkan			*Benefit paid*
Pembayaran manfaat dari aset program	(7.785)	(6.678)	*Benefit paid by plan asset*
Pembayaran manfaat dari pemberi kerja	(836)	(1.795)	*Benefit paid by employer*
Keuntungan aktuarial	(5.928)	(8.054)	*Actuarial gain*
Total	**87.879**	**90.350**	***Total***

Mutasi nilai wajar atas aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the fair value of plan assets of the year are as follows:

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	**2022**	
Nilai wajar aset program pasti pada awal tahun	9.455	3.971	*Fair value of plan at the beginning of the year*
Pendapatan bunga atas aset program	682	278	*Interest income on plan assets*
Iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja	8.000	12.000	*Contribution paid by employer*
Pembayaran manfaat dari aset program	(7.785)	(6.678)	*Benefit paid by plan assets*
Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti	(150)	(116)	*Return on plan assets, excluding amounts include in net interest on the net defined benefit liability*
Nilai wajar aset program pada akhir tahun	**10.202**	**9.455**	***Fair value of plan assets at the end of year***

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *33. LIABILITY FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The changes in the liability for employee benefits are as follows:

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	**2022**	
Saldo awal	80.895	85.108	*Beginning balance*
Beban imbalan kerja karyawan selama tahun berjalan	10.320	16.140	*Employee benefits expense during the current year*
Manfaat yang dibayarkan selama tahun berjalan			*Benefit paid during the current year*
Pembayaran iuran	(8.000)	(12.000)	*Contribution paid*
Pembayaran manfaat	(836)	(1.795)	*Benefit paid*
Jumlah yang diakui di penghasilan komprehensif lainnya	(4.702)	(6.558)	*Total amount recognized in other comprehensive income*
Saldo akhir	**77.677**	**80.895**	***Ending balance***
Nilai kewajiban karyawan kontrak dan alih daya			*Defined benefit obligation - contract and outsourcing employees*
Saldo awal	9.884	82	*Beginning balance*
Beban imbalan kerja karyawan selama tahun berjalan	5.425	9.802	*Employee benefits expense during the current year*
Manfaat yang dibayarkan selama tahun berjalan			*Benefit paid during the current year*
Pembayaran manfaat	(95)	-	*Benefit paid*
Saldo akhir	**15.214**	**9.884**	***Ending balance***
Liabilitas imbalan kerja	**92.891**	**90.779**	***Liability for employee benefits***

Total beban yang diakui pada laba rugi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The total expense recognized in the profit or loss for employee benefits are as follows:

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	**2022**	
Biaya jasa kini	11.280	12.040	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	(5.552)	82	*Past service cost*
Biaya bunga - neto	5.669	5.399	*Interest cost - net*
Imbalan kerja karyawan jangka panjang lainnya	(1.077)	(1.381)	*Other long-term employee benefits*
Beban imbalan kerja karyawan selama tahun berjalan	**10.320**	**16.140**	***Employee benefits expense during the current year***

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Mulai tanggal 19 Oktober 2018, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial (pihak ketiga) terkait dengan pengelolaan program pensiun untuk kompensasi pesangon. Program tersebut memenuhi kriteria sebagai aset program.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, nilai investasi yang dikutip di pasar aktif atas instrumen pasar uang PPUKP masing-masing sebesar Rp10.202 dan Rp9.455.

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja dan imbalan jangka panjang lainnya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh Kantor Aktuaria Yusi dan Rekan berdasarkan laporannya masing-masing tanggal 8 Januari 2024 Nomor 3065/KYR/II/24 dan 18 Januari 2023 Nomor 1569/KYR/I/23, menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

33. LIABILITY FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Starting from October 19, 2018, the Company entered into Cooperation Agreement with Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial (third party) for the management of pension program for severance compensation. The program meets the criteria of plan assets.

As of December 31, 2023 and 2022, investment quoted in active market for Money Market instrument PPUKP amounting to Rp10,202 and Rp9,455, respectively.

The Company accrued the liability for employee benefits and other long-term benefits as of December 31, 2023 and 2022, based on the independent actuarial calculation prepared by Kantor Aktuaria Yusi dan Rekan, an independent actuary based on their report dated January 8, 2024 Number 3065/KYR/II/24 and January 18, 2023 Number 1569/KYR/I/23, applied the "Projected Unit Credit" method and the following assumptions:

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	**2022**	
Tingkat diskonto (per tahun)	6,37% - 7,10%	5,77% - 7,30%	*Discount rate (per annum)*
Tingkat kenaikan gaji tahunan	7,00%	7,00%	*Annual salary increases*
Tingkat mortalitas	Tabel Mortalitas Indonesia TMI 2019/ Indonesia Mortality Table TMI 2019		*Mortality rate*
Tingkat cacat	10,00% tingkat mortalitas *10.00% mortality rate*		*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri dari karyawan sebelum usia 30 tahun dan menurun secara linier sampai dengan 0,00% pada umur 53 tahun	10,00%		*Resignation rate for employee before the age of 30 and will linearly decrease until 0.00% at the age of 53*
Usia pensiun	56 tahun *56 years*	55 tahun *55 years*	*Retirement age*

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas imbalan kerja dan beban jasa kini masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

The following tables summarize the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the liability for employee benefits and current service cost as of December 31, 2023 and 2022, respectively:

	31 Desember/*December 31*, 2023		31 Desember/*December 31*, 2022		
	Nilai kini kewajiban imbalan pasti/ *Present value of the benefit obligation*	**Beban jasa kini/ *Current service cost***	**Nilai kini kewajiban imbalan pasti/ *Present value of the benefit obligation***	**Beban jasa kini/ *Current service cost***	
Kenaikan suku bunga dalam 1 poin persentase	(7.681)	(1.158)	(7.211)	(1.152)	*Increase in interest rate in 1 percentage point*
Penurunan suku bunga dalam 1 poin persentase	8.775	1.351	8.179	1.334	*Decrease in interest rate 1 percentage point*

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat kenaikan gaji masa depan, dengan variable lain dianggap tetap, terhadap liabilitas imbalan kerja dan beban jasa kini masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

33. LIABILITY FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)

The following tables summarize the sensitivity to a reasonably possible change in future salary incremental rates, with all other variables held constant, of the liability for employee benefits and current service cost as of December 31, 2023 and 2022, respectively:

	31 Desember/*December 31,* 2023		31 Desember/*December 31,* 2022		
	Nilai kini kewajiban imbalan pasti/ *Present value of the benefit cost*	Beban jasa kini/ *Current service cost*	Nilai kini kewajiban imbalan pasti/ *Present value of the benefit cost*	Beban jasa kini/ *Current service cost*	
Kenaikan gaji dalam 1 poin persentase	8.178	1.277	8.117	1.324	*Increase in salary in 1 percentage point*
Penurunan gaji dalam 1 poin persentase	(7.319)	(1.119)	(7.288)	(1.164)	*Decrease in salary in 1 percentage point*

Jatuh tempo dari liabilitas imbalan kerja yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

The maturity of the undiscounted liability for employee benefits are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2023	2022	
1 tahun	3.654	4.055	*1 year*
Antara 1 - 2 tahun	5.488	5.610	*Between 1 - 2 years*
Antara 2 - 5 tahun	23.405	24.598	*Between 2 - 5 years*
Antara 5 - 10 tahun	56.628	61.612	*Between 5 - 10 years*
Diatas 10 tahun	1.038.151	557.532	*Up 10 years*

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Perusahaan dihadapkan pada risiko pasar (tingkat suku bunga), risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional.

Kerangka Manajemen Risiko

Perusahaan memiliki Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*/"ROC") yang membantu Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan evaluasi pelaksanaan proses manajemen risiko Perusahaan secara efektif dan menyeluruh. Selain itu, Perusahaan juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*/"RMC") untuk membantu Direksi dalam rangka penerapan manajemen risiko Perusahaan sehari-hari.

Perusahaan telah menerapkan prinsip *three lines of defense* dalam pengendalian risiko secara menyeluruh dan handal. Unit Kerja Bisnis sebagai lini pertama memiliki tanggung jawab terkait pengelolaan risiko secara langsung. Sebagai lini kedua, Unit Kerja Manajemen Risiko yang memastikan kecukupan adanya sistem dan prosedur serta metodologi risiko yang digunakan serta Unit Kerja Audit Internal sebagai lini ketiga berperan sebagai *independent assurance*.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Company is exposed to market risk (interest rate risk), credit risk, liquidity risk, and operational risk.

Risk Management Framework

The Company has in place the Risk Oversight Committee ("ROC") that assists the Board of Commissioners in effective and comprehensive oversight and evaluation of the Company's risk management process. In addition, the Company has also established the Risk Management Committee ("RMC") to assist the Board of Directors in implementing daily risk management in the Company.

The Company has implemented the three lines of defense principle in its risk control. As the first line, Business Unit has direct responsibility on risk management. The Risk Management Unit as the second line ensures the adequacy of risk system, procedures and methodology that are used. The Internal Audit Unit as the third line has a role as independent assurance.

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Kerangka Manajemen Risiko (lanjutan)

Untuk mengakomodasi tren Perusahaan pembiayaan dan pertumbuhan bisnis, pedoman manajemen risiko telah disusun dalam memastikan setiap aktivitas bisnis dikelola sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Berikut adalah pilar kerangka kerja manajemen risiko Perusahaan:

Pilar 1: Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif tersebut tercermin sejak perencanaan bisnis tahunan, yang mencakup:

- Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris & Direksi;
- Komite Nominasi & Remunerasi;
- Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*);
- Komite Manajemen Risiko;
- Komite Pengarah Teknologi Informasi;
- Komite Audit Internal.

Pilar 2: Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Perusahaan mengambil langkah-langkah proaktif dalam pengelolaan profil risiko sebagai akibat tingkat kompetisi dan perubahan lingkungan bisnis. Perusahaan telah merumuskan *risk appetite*, kebijakan dan prosedur, dan penetapan batasan risiko maksimal yang dapat diambil.

Pilar 3: Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Perusahaan memastikan semua risiko yang terjadi dapat teridentifikasi, terukur, terpantau, dan dapat dikendalikan sedini mungkin secara tepat dan baik yang mencakup:

- Reviu produk baru, *credit test*, RSCA, *stress test*;
- *Credit scoring, liquidity gap, repricing mismatch, ECL* (*PD, LGD, EAD*);
- Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Manajemen Risiko, *fraud monitoring activities*;
- Aktivitas audit internal dan eksternal, mekanisme *whistle blowing, segregation of duty*.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Management Framework (continued)

To accommodate the financing Company business trend and growth, the Company has developed risk management guidelines in ensuring the management of business activities with prudential principle. The following is the Company's risk management framework pillars:

Pillar 1: Active Supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors

Active supervision is reflected since annual business planning, which includes:

- *Responsibility and authority of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors;*
- *Nomination Committee and Remuneration;*
- *Risk Oversight Committee;*
- *Risk Management Committee;*
- *Information Technology Steering Committee;*
- *Internal Audit Committee.*

Pillar 2: Policy, Procedures, and Implementation of Limits

To address competition and business environment evolution, the Company takes proactive measures in managing risk profiles. The Company has formulated the risk appetite, policy and procedures, and determined maximum risk thresholds that can be taken.

Pillar 3: Identification, Measurement, Monitoring, and Risk Management

The Company ensures that all risks can be identified, measured, monitored, and controlled at the earliest in an accurate and proper manner, which includes:

- *Reviewing new product, credit test, RSCA, stress test;*
- *Credit scoring, liquidity gap, repricing mismatch, ECL (PD, LGD, EAD);*
- *Management Information System and Risk Management Reporting, fraud monitoring activities;*
- *Internal and external audit activities, whistle blowing mechanism, segregation of duty.*

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Kerangka Manajamen Risiko (lanjutan)

Untuk mengakomodasi tren Perusahaan pembiayaan dan pertumbuhan bisnis, pedoman manajemen risiko telah disusun dalam memastikan setiap aktivitas bisnis dikelola sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Berikut adalah pilar kerangka kerja manajemen risiko Perusahaan: (lanjutan)

Pilar 4: Kecukupan Sumber Daya dan Infrastruktur

Keberhasilan fungsi dan tugas satuan kerja manajemen risiko termasuk di dalamnya ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di bidang manajemen risiko yang profesional. SDM yang unggul dan didukung infrastruktur yang baik menjadi tolak ukur keberhasilan proses penerapan manajemen risiko Perusahaan.

Risiko pasar (tingkat suku bunga)

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Kebijakan Perusahaan mengatur agar suku bunga pinjaman dari bank dan obligasi (*cost of fund*) menggunakan suku bunga tetap (*fixed rate*) agar dapat menyesuaikan dengan suku bunga tetap yang dikenakan kepada konsumen.

Tabel di bawah ini menggambarkan rincian jatuh tempo aset dan liabilitas Perusahaan yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Management Framework (continued)

To accommodate the financing Company business trend and growth, the Company has developed risk management guidelines in ensuring the management of business activities with prudential principle. The following is the Company's risk management framework pillars: (continued)

Pillar 4: Resources and Infrastructure Sufficiency

The success of risk management unit function and duties includes the availability of infrastructure and human resources (HR) with professional risk management field. Excellent HR and good support of infrastructure become the benchmark of successful risk management application process in the Company.

Market risk (interest rate risk)

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's policy is to manage its loans or bonds' interest rate (cost of fund) using fixed rate in order to match the fixed interest rate which are charged to consumers.

The following table represents a breakdown of maturity dates of the Company's assets and liabilities which are affected by interest rate.

	31 Desember/*December 31,* 2023						
		Bunga tetap/*Fixed rate*					
	Bunga mengambang/ *Floating rate*	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	1-5 tahun/ *1-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Tidak dikenakan bunga/*Non interest bearing*	Total/*Total*	
ASET							***ASSETS***
Kas dan setara kas	338.755	-	-	-	5.012	343.767	*Cash and cash equivalents*
Piutang pembiayaan konsumen	-	2.253.659	1.491.655	-	-	3.745.314	*Consumer financing receivables*
Piutang pembiayaan modal usaha	-	43.228	10.780	-	-	54.008	*Capital financing receivables*
Piutang sewa pembiayaan	-	933.621	1.415.609	-	-	2.349.230	*Finance lease receivables*
Piutang lain-lain	-	96	897	666	51.303	52.962	*Other receivables*
Total aset	338.755	3.230.604	2.918.941	666	56.315	6.545.281	*Total assets*
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Utang bank	-	1.530.798	1.095.439	-	-	2.626.237	*Bank loans*
Biaya yang masih harus dibayar - bunga	-	34.137	-	-	-	34.137	*Accrued expenses - interest*
Utang lain-lain	-	-	16.095	-	165.774	181.869	*Other payables*
Liabilitas sewa	-	-	2.606	38.536	-	41.142	*Lease liabilities*
Utang obligasi	-	418.543	1.241.710	-	-	1.660.253	*Bonds payable*
Utang subordinasi	-	200.000	-	-	-	200.000	*Subordinated loan*
Total liabilitas	-	2.183.478	2.355.850	38.536	165.774	4.743.638	*Total liabilities*
Neto	**338.755**	**1.047.126**	**563.091**	**(37.870)**	**(109.459)**	**1.801.643**	***Net***

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko pasar (tingkat suku bunga)

Tabel dibawah ini menggambarkan rincian jatuh tempo aset dan liabilitas perusahaan yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Market risk (interest rate risk)

The following table represents a breakdown of maturity dates of the Company's assets and liabilities which are affected by interest rate. (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2022						
	Bunga tetap/*Fixed rate*						
	Bunga mengambang/ *Floating rate*	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	1-5 tahun/ *1-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Tidak dikenakan bunga/*Non interest bearing*	Total/*Total*	
ASET							***ASSETS***
Kas dan setara kas	476.974	-	-	-	7.674	484.648	*Cash and cash equivalents*
Piutang pembiayaan konsumen	-	2.269.475	1.397,114	-	-	3.666.589	*Consumer financing receivables*
Piutang pembiayaan modal usaha	-	99.223	92.280	-	-	191.503	*Capital financing receivables*
Piutang sewa pembiayaan	-	445.765	711.542	-	-	1.157.307	*Finance lease receivables*
Piutang lain-lain	-	43	452	758	22.528	23.781	*Other receivables*
Total aset	476.974	2.814.506	2.201.388	758	30.202	5.523.828	*Total assets*
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Utang bank	-	1.391.726	958.410	-	-	2.350.136	*Bank loans*
Biaya yang masih harus dibayar - bunga	-	22.886	-	-	-	22.886	*Accrued expenses - interest*
Utang lain-lain	-	-	14.298	-	122.421	136.719	*Other payables*
Liabilitas sewa	-	-	1.665	44.731	-	46.396	*Lease liabilities*
Utang obligasi	-	538.820	661.795	-	-	1.200.615	*Bonds payable*
Utang subordinasi	-	-	200.000	-	-	200.000	*Subordinated loan*
Total liabilitas	-	1.953.432	1.836.168	44.731	122.421	3.956.752	*Total liabilities*
Neto	**476.974**	**861.074**	**365.220**	**(43.973)**	**(92.219)**	**1.567.076**	***Net***

Analisis sensitivitas

Manajemen risiko suku bunga terhadap batas kesenjangan suku bunga dilengkapi dengan pemantauan sensitivitas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan terhadap berbagai skenario suku bunga baku maupun non-baku. Skenario baku bulanan mencakup analisis kenaikan atau penurunan kurva imbal hasil sebesar 0,5 poin persentase.

Dalam menyusun analisis sensitivitas, Perusahaan menggunakan perubahan tingkat suku bunga pasar sebesar 0,5 poin persentase, dengan variable lain dianggap tetap terhadap pendapatan pembiayaan konsumen dan beban pendanaan.

Sensitivity analysis

The management of interest rate risk against interest rate gap limits is supplemented by monitoring the sensitivity of the Company's financial assets and liabilities to various standard and non-standard interest rate scenarios. Standard scenarios that are considered on a monthly basis include a 0.5 percentage point parallel fall or rise in all yield curves.

In preparing a sensitivity analysis, the Company uses changes in market interest rate of 0.5 percentage points, with other variables considered fixed on consumer financing income and financing costs.

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Analisis sensitivitas (lanjutan)

Sensitivity analysis (continued)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap pendapatan pembiayaan konsumen:

The following tables demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the consumer financing income:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Kenaikan suku bunga dalam 0,5 poin persentase	19.430	19.211	*Increase in interest rate in 0.5 percentage point*
Penurunan suku bunga dalam 0,5 poin persentase	(19.365)	(19.145)	*Decrease in interest rate in 0.5 percentage point*

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap beban pendanaan:

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the financing costs:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Kenaikan suku bunga dalam 0,5 poin persentase	21.087	17.024	*Increase in interest rate in 0.5 percentage point*
Penurunan suku bunga dalam 0,5 poin persentase	(21.070)	(17.017)	*Decrease in interest rate in 0.5 percentage point*

Risiko kredit

Credit risk

Risiko kredit adalah risiko jika pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam kontrak konsumen, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perusahaan melakukan analisis dan persetujuan kredit yang hati-hati, dan juga pengawasan terhadap saldo piutang pembiayaan konsumen dilakukan secara berkesinambungan untuk meminimalisasi piutang yang tidak dapat ditagih.

Credit risk is the risk that a counterparty will not meet its obligations under a customer contract, leading to a financial loss. The Company has maintained prudent analysis and credit approval and also monitored receivable balances continuously in order to minimize the exposure to bad debts.

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

- Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

  Eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit hampir seluruhnya berasal dari piutang pembiayaan konsumen, dimana eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat.

- Jaminan dan perlindungan kredit lainnya

  Nilai dan jenis jaminan yang dibutuhkan tergantung pada penilaian risiko kredit dari *counterparty*. Panduan tentang jenis jaminan dan parameter penilaian yang bisa diterima telah diimplementasikan.

  Umumnya jaminan diperlukan dalam setiap pemberian kredit sebagai sumber terakhir pelunasan kredit (*secondary source of repayment*) dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan kredit adalah dari hasil usaha ataupun pendapatan debitur.

  Jaminan yang dapat diterima oleh Perusahaan dari konsumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") atas kendaraan yang dibiayai oleh Perusahaan. Perusahaan melakukan penilaian internal terhadap unit jaminan pada saat proses inisiasi kredit.

  Perusahaan menerapkan kebijakan minimum uang muka atas pembiayaan konsumen sebesar 10% atau nilai pinjaman atas pembiayaan maksimal sebesar 90%.

- Analisis konsentrasi risiko kredit

  Konsentrasi risiko kredit timbul ketika sejumlah debitur bergerak dari aktivitas usaha yang sama atau aktivitas dalam wilayah geografis yang sama, atau ketika mereka memiliki karakteristik yang sejenis yang akan menyebabkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi atau yang lainnya.

  Perusahaan bergerak di bidang usaha pembiayaan konsumen yang pelanggannya kebanyakan adalah individu dan tidak terkonsentrasi pada wilayah geografis tertentu.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

- *Maximum exposure to credit risk*

  Company's exposure to credit risk mainly comes from the consumer financing receivables, of which the maximum exposure to credit risk equals to the carrying amount.

- *Collateral and other credit enhancements*

  The amount and type of collateral required depends on an assessment of the credit risk of the counterparty. Guidelines are implemented regarding the acceptability of types of collateral and valuation parameters.

  Generally, collateral is required for all credits extended as a second source of credit repayment and also as a form of credit risk mitigation. The primary source of credit repayment is the funds generated from business operations or income of the borrowers.

  Collaterals acceptable by the Company from debtor is the Certificate of Ownership ("BPKB") of the vehicles financed by the Company. The Company performs an internal assessement of collateral unit during the credit initiation process.

  The Company applies minimum down payment policy on consumer financing at minimum of 10% or loan to value asset at maximum of 90%.

- *Concentration of credit risk analysis*

  Concentrations of credit risk arise when a number of customers are engaged in similar business activities or activities within the same geographic region, or when they have similar characteristics that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic or other conditions.

  The Company is currently engaged in consumer financing business which the customers are mainly individuals and they are not concentrated in the specific geographic region.

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

- Analisis dampak Covid-19

  Portfolio kredit restrukturisasi dampak pandemi Covid-19 sudah berjalan dengan baik dan masih menyisakan *outstanding minimum* dan tidak berpengaruh pada total kinerja portfolio Perusahaan.

Tabel berikut menggambarkan jumlah risiko kredit dan konsentrasi risiko berdasarkan tipe pihak lawan atas kas dan setara kas, piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan modal usaha, piutang sewa pembiayaan, dan piutang lain-lain, yang dimiliki Perusahaan:

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

- *Covid-19 effects analysis*

  The restructuring credit portofolio as a effect of the Covid-19 pandemic has been running well and still has a minimum outstanding and has no effect on the total performance of the Company's portofolio.

The following table sets out the total credit risk and risk concentration based on type of counterparty of cash and cash equivalents, consumer financing receivables, capital financing receivables, finance lease receivables, and other receivables of the Company:

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	**2022**	
Kas di bank dan setara kas - neto			*Cash in bank and cash equivalents - net*
Bank	337.958	476.295	*Cash in banks*
Piutang pembiayaan konsumen - neto			*Consumer financing receivables - net*
Korporasi	23.567	7.847	*Corporate*
Individual	3.570.056	3.533.105	*Individual*
Subtotal	3.593.623	3.540.952	*Subtotal*
Piutang pembiayaan modal usaha - neto			*Capital financing receivables - net*
Korporasi	142	331	*Corporate*
Individual	51.744	185.557	*Individual*
Subtotal	51.886	185.888	*Subtotal*
Piutang sewa pembiayaan - neto			*Finance lease receivables - net*
Korporasi	216.239	106.244	*Corporate*
Individual	2.074.116	1.031.721	*Individual*
Subtotal	2.290.355	1.137.965	*Subtotal*
Piutang lain-lain			*Other receivables*
Korporasi	22.819	17.591	*Corporate*
Individual	28.279	4.188	*Individual*
Subtotal	51.098	21.779	*Subtotal*
Total	**6.324.920**	**5.362.879**	***Total***

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

Dalam menentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan, Perusahaan mempertimbangkan faktor hari tunggakan, yaitu aset keuangan yang dikategorikan kurang lancar (memiliki keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender).

In determining the allowance for impairment losses on financial assets, the Company considers the factor of day past due, which is financial assets categorized as substandard (having a late payment of principal and/or interest that has exceeded 90 (ninety) calendar days).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas:

As of December 31, 2023 and 2022, credit risk exposure of financial assets is divided into:

	31 Desember/*December 31*, 2023					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/*Neither past due nor imapired*	Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/*Past due but not imapired*	Mengalami penurunan nilai/*Impaired*	Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian/ *Expected credit loss allowances*	*Total*	
ASET KEUANGAN						***FINANCIAL ASSETS***
Kas dan setara kas - bank - neto	338.755	-	-	(797)	337.958	*Cash and cash equivalents - cash in banks - net*
Piutang pembiayaan konsumen - neto	3.175.186	471.451	98.677	(151.691)	3.593.623	*Consumer financing receivables - net*
Piutang pembiayaan modal usaha - neto	35.858	16.392	1.758	(2.122)	51.886	*Capital financing receivables - net*
Piutang sewa pembiayaan - neto	2.023.053	293.199	32.978	(58.875)	2.290.355	*Finance lease receivables - net*
Piutang lain-lain	52.962	-	-	(1.864)	51.098	*Other receivables*
Total	**5.625.814**	**781.042**	**133.413**	**(215.349)**	**6.324.920**	***Total***

	31 Desember/*December 31*, 2022					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/*Neither past due nor imapired*	Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/Past due but not imapired	Mengalami penurunan nilai/Impaired	Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian/ *Expected credit loss allowances*	*Total*	
ASET KEUANGAN						***FINANCIAL ASSETS***
Kas dan setara kas - bank - neto	476.974	-	-	(679)	476.295	*Cash and cash equivalents - cash in banks - net*
Piutang pembiayaan konsumen - neto	3.124.635	462.519	79.435	(125.637)	3.540.952	*Consumer financing receivables - net*
Piutang pembiayaan modal usaha - neto	156.222	30.265	5.016	(5.615)	185.888	*Capital financing receivables - net*
Piutang sewa pembiayaan - neto	1.077.168	71.342	8.797	(19.342)	1.137.965	*Finance lease receivables - net*
Piutang lain-lain	23.781	-	-	(2.002)	21.779	*Other receivables*
Total	**4.858.780**	**564.126**	**93.248**	**(153.275)**	**5.362.879**	***Total***

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan *aging analysis* terhadap piutang pembiayaan konsumen, piutang modal usaha dan piutang sewa pembiayaan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

The following tables summarizes the aging analysis of consumer financing receivables, capital financing receivables, and finance lease receivables which are past due but not impaired.

	31 Desember/*December 31,* 2023				
	1-30 hari/*days*	**31-60 hari/*days***	**61-90 hari/*days***	***Total***	
Piutang pembiayaan konsumen - neto	365.325	74.684	31.442	471.451	*Consumer financing receivables - net*
Piutang pembiayaan modal usaha - neto	11.297	3.328	1.767	16.392	*Capital financing receivables - net*
Piutang sewa pembiayaan - neto	228.510	40.404	24.285	293.199	*Finance lease receivables - net*
Total	**605.132**	**118.416**	**57.494**	**781.042**	***Total***

	31 Desember/*December 31,* 2022				
	1-30 hari/*days*	**31-60 hari/*days***	**61-90 hari/*days***	***Total***	
Piutang pembiayaan konsumen - neto	349.695	75.344	37.480	462.519	*Consumer financing receivables - net*
Piutang pembiayaan modal usaha - neto	24.145	4.862	1.258	30.265	*Capital financing receivables - net*
Piutang sewa pembiayaan - neto	60.615	6.062	4.665	71.342	*Finance lease receivables - net*
Total	**434.455**	**86.268**	**43.403**	**564.126**	***Total***

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian

Perusahaan telah menerapkan klasifikasi penurunan nilai berdasarkan ketentuan PSAK 71 sejak Januari 2020. Klasifikasi penurunan nilai terdiri dari 3 (tiga) *stage*: *stage* 1 atau *performing loan* atau *nonimpaired loan* yaitu kredit yang tidak mengalami penurunan nilai, *stage* 2 atau *under performing loan* yaitu kredit belum mengalami penurunan nilai namun mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal, dan *stage* 3 atau *non-performing* atau kredit telah mengalami penurunan nilai. Klasifikasi untuk kredit lebih menekankan pada apakah terdapat indikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal atau risiko gagal bayar pada setiap tanggal pelaporan.

Measurement of expected credit losses

The Company has implemented classification of impairment based on SFAS 71 since January 2020. Impairment classification consist of 3 (three) stage: stage 1 or performing loan or nonimpaired loan, stage 2 or under performing loan or nonimpaired loan but have significant increase in credit risk since the origination, and stage 3 or non-performing or impaired loan. The classification for credit places more emphasis on whether there is an indication of a significant increase in credit risk since initial recognition or risk of default at each reporting date.

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian (lanjutan)

Perusahaan melakukan pengukuran *Expected Credit Loss* ("ECL") tidak hanya menggunakan informasi masa lalu dan saat ini, tetapi juga termasuk informasi prakiraan (*forward looking*). Model dibangun untuk setiap portofolio dengan memodelkan *Observed Default Rate* ("ODR") setiap kuartal pada tingkat portofolio dengan berbagai variabel makro ekonomi dengan metode statistik regresi berganda. Oleh karena itu perhitungan ECL diharapkan memasukkan penyesuaian berwawasan kedepan (*Forward-looking Adjustment*/"FLA") yang konsisten dengan kondisi makro ekonomi.

Estimasi perubahan ECL harus mencerminkan, dan secara konsisten dengan, perubahan dalam data observasi terkait dari periode ke periode (seperti perubahan tingkat pengangguran yang merupakan indikasi kerugian kredit atas instrumen keuangan atau kelompok instrumen keuangan dan besarnya perubahan tersebut).

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko atas kekurangan dana dan untuk memitigasinya, Perusahaan telah menggunakan perangkat rencana likuiditas. Perangkat ini mempertimbangkan jatuh tempo untuk aset keuangan yaitu piutang pembiayaan konsumen, pembiayaan modal usaha, dan sewa pembiayaan dan membuat rencana arus kas dari operasi. Perusahaan mempunyai jangka waktu pinjaman dari bank yang disesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan kepada konsumen.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Measurement of expected credit losses (continued)

The Company specifically requires to measure Expected Credit Loss ("ECL") using not only past and current information, but also including forecast information (forward looking). The model is developed for each portfolio by modelling quarterly portfolio-level Observed Default Rate ("ODR") with a range of quarterly macroeconomic variables base on statistical method with multiple logistic of regression. The ECL calculations are therefore expected to include Forward-looking Adjustment ("FLA") accounting for the expected future macroeconomic conditions.

Estimates of changes in ECL should reflect, and be directionally consistent with, changes in related observable data from period to period (such as changes in unemployment rates that are indicative of credit losses on the financial instrument or in the group of financial instruments and in the magnitude of those changes).

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk of a shortage of funds and to mitigate the risk, the Company has applied liquidity planning tool. This tool considers the maturity of both its financial assets, which is consumer financing, capital financing, and finance lease receivables and prepare projected cash flows from operations. The Company has term bank loan facilities which are adjusted with the tenure of financing given to consumers.

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

Tabel di bawah ini menggambarkan profil jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan sisa jatuh tempo kontraktual (tidak didiskontokan):

The tables below summarizes the maturity profile of the Company's financial assets and liabilities as of December 31, 2023 and 2022, respectively, based on contractual remaining maturity (undiscounted):

	31 Desember/*December 31,* 2023					
	Kurang dari 3 bulan/ *Less than 3 months*	**3-12 bulan/ *3-12 months***	**Lebih dari 1-5 tahun/ *More than 1-5 years***	**Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years***	**Total/ *Total***	
ASET						***ASSETS***
Kas dan setara kas	343.767	-	-	-	343.767	*Cash and cash equivalents*
Piutang pembiayaan konsumen	970.506	2.085.821	1.802.188	-	4.858.515	*Consumer financing receivables*
Piutang pembiayaan modal usaha	16.168	34.390	11.761	-	62.319	*Capital financing receivables*
Piutang sewa pembiayaan	390.194	1.027.202	1.780.394	-	3.197.790	*Finance lease receivables*
Piutang lain-lain	51.302	96	898	666	52.962	*Other receivables*
Total aset keuangan	1.771.937	3.147.509	3.595.241	666	8.515.353	*Total financial assets*
LIABILITAS						***LIABILITIES***
Utang bank	669.231	1.013.530	1.153.935	-	2.836.696	*Bank loans*
Utang lain-lain	182.454	3.005	11.992	-	197.451	*Other payables*
Liabilitas sewa	3.981	8.755	33.861	-	46.597	*Lease liabilities*
Utang obligasi	27.709	492.264	1.340.443	-	1.860.416	*Bonds payable*
Utang subordinasi	4.344	212.939	-	-	217.283	*Subordinated loan*
Total liabilitas keuangan	887.719	1.730.493	2.540.231	-	5.158.443	*Total financial liabilities*
Perbedaan jatuh tempo	**884.218**	**1.417.016**	**1.055.010**	**666**	**3.356.910**	***Maturity gap***

	31 Desember/*December 31,* 2022					
	Kurang dari 3 bulan/ *Less than 3 months*	**3-12 bulan/ *3-12 months***	**Lebih dari 1-5 tahun/ *More than 1-5 years***	**Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years***	**Total/ *Total***	
ASET						***ASSETS***
Kas dan setara kas	484.648	-	-	-	484.648	*Cash and cash equivalents*
Piutang pembiayaan konsumen	948.485	2.082.424	1.687.753	-	4.718.662	*Consumer financing receivables*
Piutang pembiayaan modal usaha	36.944	94.998	108.106	-	240.048	*Capital financing receivables*
Piutang sewa pembiayaan	180.386	503.030	888.985	-	1.572.401	*Finance lease receivables*
Piutang lain-lain	22.556	43	442	740	23.781	*Other receivables*
Total aset keuangan	1.672.019	2.680.495	2.685.286	740	7.039.540	*Total financial assets*
LIABILITAS						***LIABILITIES***
Utang bank	446.082	1.057.846	1.003.509	-	2.507.437	*Bank loans*
Utang lain-lain	137.716	2.911	10.313	349	151.289	*Other payables*
Liabilitas sewa	3.321	9.781	42.565	2.573	58.240	*Lease liabilities*
Utang obligasi	19.070	584.777	717.338	-	1.321.185	*Bonds payable*
Utang subordinasi	4.344	12.892	217.283	-	234.519	*Subordinated loan*
Total liabilitas keuangan	610.533	1.668.207	1.991.008	2.922	4.272.670	*Total financial liabilities*
Perbedaan jatuh tempo	**1.062.486**	**1.012.288**	**694.278**	**(2.182)**	**2.766.870**	***Maturity gap***

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko operasional

Risiko operasional merupakan risiko-risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau problem eksternal yang bisa mempengaruhi operasional Perusahan. Risiko operasional umumnya dapat menimbulkan kerugian keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta kerugian potensial atas hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Risiko operasional dapat melekat pada aktivitas fungsional Perusahaan seperti perkreditan (penyediaan dana), teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Upaya meningkatkan kebutuhan manajemen risiko operasional yang efektif didorong oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Kerugian operasional signifikan yang dialami oleh industri Perusahaan Pembiayaan;
- Regulasi yang baru dan praktik terbaik dalam Perusahaan Pembiayaan di Indonesia;
- Perubahan yang relatif cepat dalam dunia bisnis;
- Tumbuhnya kebutuhan akan pengukuran kinerja;
- Perlindungan dan pengembangan terhadap nilai pemegang saham.

Dalam memberikan respon yang tepat terhadap faktor-faktor di atas, juga atas visi Perusahaan untuk tetap menjaga risiko agar tetap seimbang dengan pertumbuhan bisnis, Perusahaan menyadari kebutuhannya untuk meningkatkan kesadaran akan risiko operasional, serta kebutuhan untuk membentuk kerangka kerja manajemen risiko operasional, kebijakan, dan prosedur yang memadai serta konsisten diterapkan di Perusahaan.

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan terpeliharanya rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 untuk menyisihkan dan mempertahankan suatu dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan sampai dana cadangan tersebut mencapai 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh. Perusahaan akan terus menambah cadangan ini sampai cadangan tersebut mencapai jumlah yang diatur oleh Undang-Undang.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Operational risk

The operational risk is risks resulting from inadequacy and/or disfunction of internal process, human errors, system failures or external issues that may impact the Company's operations. In general, the operational risk can both directly and indirectly render the financial losses, as well as potential loss on failing in taking the opportunity for generating profitability. The operational risk can be embedded at the Company's functional activities such as lending, information system technology and management information system, as well as human resources management.

The effort to enhance effective operational risk management is encouraged by the following factors:

- *Significant operational losses experienced by Financing Companies industry;*
- *New regulations and best practices in Financing Companies in Indonesia;*
- *Relatively fast evolution in business environment;*
- *Increased needs of performance measurement;*
- *Shareholders' value protection and development.*

In accurately responding to the above factors, as well as the Company's vision to maintain a balance risk with business growth, the Company realizes its needs to enhance the awareness of operational risk as well as the need to establish operational risk management adequate framework, policy and procedures, which shall be consistenly applied in the Company.

Capital management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that healthy capital ratios are maintained in order to support its business and maximize shareholders value.

The Company is also required by the Limited Liability Company Law No. 40, Year 2007 to contribute and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. The Company will continue to build this reserve until such time the amount reaches the level required by Law.

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Pengelolaan modal (lanjutan)

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama tahun penyajian.

Dalam mengelola permodalan, Perusahaan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang diantaranya mengatur ketentuan sebagai berikut:

- Ekuitas Perusahaan minimum sebesar Rp100.000;
- Rasio ekuitas Perusahaan terhadap modal disetor paling rendah sebesar 50,00%;
- Rasio permodalan Perusahaan mínimum sebesar 10%;
- Jumlah pinjaman yang dimiliki Perusahaan dibandingkan modal sendiri dan utang subordinasi dikurangi penyertaan (*gearing ratio*) ditetapkan serendah-rendahnya 0 (nol) dan setinggi-tingginya 10 (sepuluh) kali, baik untuk pinjaman luar negeri maupun dalam negeri.

Gearing ratio pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Capital management (continued)

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies or processes during the year presented.

In managing capital, the Company pays attention to the enacments of Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 35/POJK.05/2018 regarding Business Operation of Multifinance Company which have some provision as follows:

- *The Company's equity minimum of Rp100,000;*
- *The Company's equity ratio amounting to minimum 50.00% of paid-up capital;*
- *The Company's capital ratio of minimum 10%;*
- *The amount of the Company's loan to equity and subordinated loan deducted by investment (gearing ratio) is the minimum of 0 (zero) and the maximum of 10 (ten) times, both for off-shore and on-shore domestic loans.*

Gearing ratio as of December 31, 2023 and 2022, calculated based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 35/POJK.05/2018 regarding Business Operation of Multifinance Company are as follows:

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	**2022**	
Pinjaman:			*Borrowing:*
Utang obligasi	1.660.253	1.200.615	*Bonds payable*
Utang bank	2.626.237	2.350.136	*Bank loans*
Utang subordinasi	200.000	200.000	*Subordinated loan*
Total pinjaman	4.486.490	3.750.751	*Total borrowing*
Ekuitas	1.695.922	1.515.032	*Equity*
Utang subordinasi	174.074	174.074	*Subordinated loan*
Total ekuitas dan utang subordinasi	1.869.996	1.689.106	*Total equity and subordinated loan*
Gearing ratio	**2,40**	**2,22**	***Gearing ratio***

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Informasi lainnya

Sesuai dengan POJK tersebut di atas, *gearing ratio* yang diperbolehkan serendah-rendahnya 0 (nol) dan setinggi-tingginya adalah 10 (sepuluh) kali. Dengan demikian Perusahaan telah mematuhi POJK.

Berdasarkan POJK No.35/POJK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi sejumlah rasio keuangan tertentu. Rasio-rasio diatur dengan rincian sebagai berikut:

Other Information

In accordance with the above mentioned POJK, the minimum gearing ratio allowable is 0 (zero) and maximum gearing ratio allowable is 10 (ten) times. Hence, the Company has complied with the POJK.

Based on POJK No. 35/POJK.05/2018 dated December 31, 2018 regarding the Organisation of Financing Company Business, the Company is required to comply with several financial ratios. The ratios are set with the following detail:

	Nilai/*Value*	Ketentuan/ *Requirement*	
Rasio piutang pembiayaan terhadap total aset	40%	Minimal/*Minimum*	*Financing to asset ratio*
Rasio saldo piutang pembiayaan investasi dan pembiayaan modal usaha terhadap total saldo piutang pembiayaan	10%	Minimal/*Minimum*	*Investment financing and capital financing to total financing receivables ratio*
Rasio *Non Performing Financing* - neto	5%	Maksimal/*Maximum*	*Non Performing Financing ratio - net*
Rasio permodalan	10%	Minimal/*Minimum*	*Capital ratio*
Modal sendiri modal disetor	50%	Minimal/*Minimum*	*Equity to fully paid capital ratio*
Gearing ratio	10	Maksimal/*Maximum*	*Gearing ratio*

Rasio rasio selain yang disebutkan diatas tidak diatur batas minimal atau maksimal. Rasio-rasio ini dibuat oleh Perusahaan berdasarkan formula sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK untuk tujuan kepatuhan terhadap peraturan, dimana rasio tersebut dapat berbeda jika rasio tersebut dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia (tidak diaudit).

Ratios other than stated above are not regulated for the minimum or maximum limit. These ratios have been prepared by the Company based on the formula as prescribed in the said OJK regulation for regulatory compliance purposes, where such ratios may differ had the ratios been computed based on Indonesian financial accounting standards (unaudited).

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	2022	
Rasio piutang pembiayaan terhadap total aset	89,45%	86,16%	*Financing to asset ratio*
Rasio saldo piutang pembiayaan terhadap pinjaman	132,31%	129,70%	*Financing receivables to borrowings ratio*
Rasio saldo piutang pembiayaan investasi dan pembiayaan modal usaha terhadap total saldo piutang pembiayaan	39,09%	26,89%	*Investment financing and capital financing to total financing receivables ratio*
Rasio *Non Performing Financing* - neto	0,90%	0,75%	*Non Performing Financing ratio - net*
Rasio *Non Performing Financing* - bruto	2,08%	1,63%	*Non Performing Financing ratio - gross*
Rasio permodalan	35,03%	38,94%	*Capital ratio*
Modal sendiri modal disetor	487,13%	435,17%	*Equity to fully paid capital ratio*
Gearing ratio	2,40	2,22	*Gearing ratio*

35. KELOMPOK INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan:

35. FINANCIAL INSTRUMENTS BY CATEGORY

The tables below present a comparison by class of the carrying amounts and fair value of the Company's financial instrument that are carried in the financial statements:

	31 Desember/*December 31,* 2023				
	Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial assets measured at amortized cost*	**Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities measured at amortized cost***	**Nilai tercatat/ *Carrying value***	**Nilai wajar/ *Fair value***	
ASET KEUANGAN					***FINANCIAL ASSETS***
Kas dan setara kas - Bank - neto	337.958	-	337.958	337.958	*Cash and cash equivalents - cash in banks - net*
Piutang pembiayaan konsumen - neto	3.593.623	-	3.593.623	3.510.623	*Consumer financing receivables - net*
Piutang pembiayaan modal usaha - neto	51.886	-	51.886	50.623	*Capital financing receivables - net*
Piutang sewa pembiayaan - neto	2.290.355	-	2.290.355	2.316.461	*Finance lease receivables - net*
Piutang lain-lain	51.098	-	51.098	51.098	*Other receivables*
Total aset keuangan	**6.324.920**	**-**	**6.324.920**	**6.266.763**	***Total financial assets***
LIABILITAS KEUANGAN					***FINANCIAL LIABILITIES***
Utang bank	-	2.626.237	2.626.237	2.721.400	*Bank loans*
Biaya yang masih harus dibayar - bunga	-	34.137	34.137	34.137	*Accrued expenses - interest*
Utang lain-lain	-	181.869	181.869	181.869	*Other payables*
Liabilitas sewa	-	41.142	41.142	41.142	*Lease liabilities*
Utang obligasi - neto	-	1.660.253	1.660.253	1.650.844	*Bonds payable - net*
Utang subordinasi	-	200.000	200.000	201.571	*Subordinated loan*
Total liabilitas keuangan	**-**	**4.743.638**	**4.743.638**	**4.830.963**	***Total financial liabilities***

35. KELOMPOK INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan: (lanjutan)

35. FINANCIAL INSTRUMENTS BY CATEGORY (continued)

The tables below present a comparison by class of the carrying amounts and fair value of the Company's financial instrument that are carried in the financial statements: (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2022				
	Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ ***Financial*** **assets** ***measured at amortized cost***	**Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/** ***Financial liabilities measured at amortized cost***	**Nilai tercatat/** ***Carrying value***	**Nilai wajar/** ***Fair value***	
ASET KEUANGAN					***FINANCIAL ASSETS***
Kas dan setara kas - bank	476.295	-	476.295	476.295	*Cash and cash equivalents - cash in banks*
Piutang pembiayaan konsumen - neto	3.540.952	-	3.540.952	3.448.523	*Consumer financing receivables - net*
Piutang pembiayaan modal usaha - neto	185.888	-	185.888	183.237	*Capital financing receivables - net*
Piutang sewa pembiayaan - neto	1.137.965	-	1.137.965	1.149.094	*Finance lease receivables - net*
Piutang lain-lain	21.779	-	21.779	21.779	*Other receivables*
Total aset keuangan	**5.362.879**	**-**	**5.362.879**	**5.278.928**	***Total financial assets***
LIABILITAS KEUANGAN					***FINANCIAL LIABILITIES***
Utang bank	-	2.350.136	2.350.136	2.361.986	*Bank loans*
Biaya yang masih harus dibayar - bunga	-	22.886	22.886	22.886	*Accrued expenses - interest*
Utang lain-lain	-	136.719	136.719	136.719	*Other payables*
Liabilitas sewa	-	46.396	46.396	46.396	*Lease liabilities*
Utang obligasi - neto	-	1.200.615	1.200.615	1.211.273	*Bonds payable - net*
Utang subordinasi	-	200.000	200.000	201.667	*Subordinated loan*
Total liabilitas keuangan	**-**	**3.956.752**	**3.956.752**	**3.980.927**	***Total financial liabilities***

35. KELOMPOK INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

Nilai wajar kas dan setara kas - bank dan biaya bunga masih harus dibayar mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Nilai wajar dari piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan modal usaha, piutang sewa pembiayaan, piutang lain-lain - pinjaman karyawan, biaya yang masih harus dibayar - bunga, utang bank, utang lain-lain, utang obligasi - neto, dan utang subordinasi ditentukan menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Nilai wajar dari utang obligasi dinilai berdasarkan harga pasar.

Hirarki nilai wajar instrumen keuangan

Perusahaan menggunakan hirarki berikut untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

1. Tingkat 1: dikutip (tidak dapat disesuaikan) dari harga pasar aktif untuk aset dan liabilitas keuangan yang identik;
2. Tingkat 2: teknik lain dimana semua *input* yang memiliki efek signifikan dalam pencatatan nilai wajar, dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
3. Tingkat 3: teknik lain dimana menggunakan *input* yang memiliki efek signifikan dalam pencatatan nilai wajar, tidak berdasarkan pada data yang diobservasi di pasar.

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Perusahaan untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

35. FINANCIAL INSTRUMENTS BY CATEGORY (continued)

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

Fair value of cash and cash equivalents - cash in bank and accrued interest expenses approximate their carrying amounts largely due to short-term maturities of these instruments.

The fair value of consumer financing receivables, capital financing receivables, finance lease receivables, other receivables - loan to employees, accrued expenses - interest, bank loans, other payables, bonds payable - net, and subordinated loan are determined by discounted cash flow using market interest rate as of December 31, 2023 and 2022.

The fair value of bonds payable are calculated using market price.

Fair value hierarchy of financial instruments

The Company adopts the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments by valuation technique:

1. *Level 1: quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities;*
2. *Level 2: other techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair value are observable, either directly or indirectly; and*
3. *Level 3: other techniques which use inputs which have significant effect on the recorded fair value that are not based on observable market data.*

The table below shows the financial instruments recognized at fair value based on the hierarchy used by the Company in determining and disclosing the fair value of financial instruments:

	31 Desember/*December 31,* 2023					
	Total nilai tercatat/ *Total carrying amount*	Nilai wajar/*Fair value*				
		Tingkat 1/ *Level 1*	Tingkat 2/ *Level 2*	Tingkat 3/ *Level 3*	Total/ *Total*	
ASET KEUANGAN						***FINANCIAL ASSETS***
Piutang pembiayaan konsumen - neto	3.593.623	-	-	3.510.623	3.510.623	*Consumer financing receivables - net*
Piutang pembiayaan modal usaha - neto	51.886	-	-	50.623	50.623	*Capital financing receivables - net*
Piutang sewa pembiayaan - neto	2.290.355	-	-	2.316.461	2.316.461	*Finance lease receivables - net*
Total aset keuangan	**5.935.864**	**-**	**-**	**5.877.707**	**5.877.707**	***Total financial assets***

35. KELOMPOK INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Perusahaan untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan: (lanjutan)

35. FINANCIAL INSTRUMENTS BY CATEGORY (continued)

The table below shows the financial instruments recognized at fair value based on the hierarchy used by the Company in determining and disclosing the fair value of financial instruments: (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2023					
	Total nilai tercatat/ *Total carrying amount*	Nilai wajar/*Fair value*				
		Tingkat 1/ *Level 1*	Tingkat 2/ *Level 2*	Tingkat 3/ *Level 3*	Total/ *Total*	
LIABILITAS KEUANGAN						***FINANCIAL LIABILITIES***
Utang bank	2.626.237	-	2.721.400	-	2.721.400	*Bank loans*
Utang obligasi - neto	1.660.253	-	1.650.844	-	1.650.844	*Bonds payable - net*
Utang subordinasi	200.000	-	201.571	-	201.571	*Subordinated loan*
Total liabilitas keuangan	**4.486.490**	**-**	**4.537.815**	**-**	**4.537.815**	***Total financial liabilities***

	31 Desember/*December 31,* 2022					
	Total nilai tercatat/ *Total carrying amount*	Nilai wajar/*Fair value*				
		Tingkat 1/ *Level 1*	Tingkat 2/ *Level 2*	Tingkat 3/ *Level 3*	Total/ *Total*	
ASET KEUANGAN						***FINANCIAL ASSETS***
Piutang pembiayaan konsumen - neto	3.540.952	-	-	3.448.523	3.448.523	*Consumer financing receivables - net*
Piutang pembiayaan modal usaha - neto	185.888	-	-	183.237	183.237	*Capital financing receivables - net*
Piutang sewa pembiayaan - neto	1.137.965	-	-	1.149.094	1.149.094	*Finance lease receivables - net*
Total aset keuangan	**4.864.805**	**-**	**-**	**4.780.854**	**4.780.854**	***Total financial assets***
LIABILITAS KEUANGAN						***FINANCIAL LIABILITIES***
Utang bank	2.350.136	-	2.361.986	-	2.361.986	*Bank loans*
Utang obligasi - neto	1.200.615	-	1.211.273	-	1.211.273	*Bonds payable - net*
Utang subordinasi	200.000	-	201.667	-	201.667	*Subordinated loan*
Total liabilitas keuangan	**3.750.751**	**-**	**3.774.926**	**-**	**3.774.926**	***Total financial liabilities***

36. LIABILITAS KONTINJENSI

Perusahaan tidak memiliki liabilitas kontinjensi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

36. CONTINGENT LIABILITY

The Company did not have any significant contingent liability as of December 31, 2023 and 2022.

37. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN - UNIT SYARIAH

37. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION - SHARIA UNIT

	31 Desember/*December 31*,		
	2023	**2022**	
PIUTANG PEMBIAYAAN *MURABAHAH*			***MURABAHAH FINANCING RECEIVABLES***
Piutang pembiayaan *murabahah* - bruto	226.276	194.263	*Murabahah financing receivables - gross*
Pendapatan pembiayaan *murabahah* yang belum diakui	(49.677)	(48.159)	*Unearned murabahah financing income*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(10.184)	(6.629)	*Allowance for impairment losses*
Piutang pembiayaan *murabahah* - neto	**166.415**	**139.475**	***Murabahah financing receivables - net***
PENDAPATAN MURABAHAH			***MURABAHAH INCOME***
Pendapatan *margin murabahah*	**55.734**	**25.267**	*Margin murabahah income*

38. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

38. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement are as follows:

	1 Januari/ *January 1,2023*	Kas masuk/ *Cash in*	Kas keluar/ *Cash out*	Perubahan non-kas/*Non-cash changes*	31 Desember/ *December 31, 2023*	
Utang bank	2.350.136	2.270.000	(1.994.610)	711	2.626.237	*Bank loans*
Utang obligasi - neto	1.200.615	1.000.000	(539.800)	(562)	1.660.253	*Bonds payable - net*
Liabilitas sewa	46.396	-	(14.189)	8.935	41.142	*Lease liabilities*
Total	**3.597.147**	**3.270.000**	**(2.548.599)**	**9.084**	**4.327.632**	***Total***

	1 Januari/ *January 1,2022*	Kas masuk/ *Cash in*	Kas keluar/ *Cash out*	Perubahan non-kas/*Non-cash changes*	31 Desember/ *December 31, 2022*	
Utang bank	1.967.885	2.240.000	(1.857.066)	(683)	2.350.136	*Bank loans*
Utang obligasi - neto	1.319.928	800.000	(920.000)	687	1.200.615	*Bonds payable - net*
Liabilitas sewa	50.978	-	(14.306)	9.724	46.396	*Lease liabilities*
Total	**3.338.791**	**3.040.000**	**(2.791.372)**	**9.728**	**3.597.147**	***Total***

39. SEGMEN OPERASI

Perusahaan melakukan kegiatan pembiayaan konsumen di beberapa wilayah di Indonesia (Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi - disingkat Jabodebek, Banten, Jawa Timur, Bali, Kalimantan dan Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera), baik untuk kendaraan bermotor roda dua baru dan bekas. Untuk itu, informasi segmen operasi disajikan sebagai bentuk primer pelaporan segmen.

39. OPERATING SEGMENT

The Company has consumer financing activities in several geographical areas in Indonesia (Jakarta, Bogor, Depok, and Bekasi - abbreviated Jabodebek, Banten, East Java, Bali, Kalimantan and Sulawesi, Central Java, West Java, and Sumatera), for new and used two-wheeled motor vehicles. Therefore, geographical operating segment is presented as the primary basis of segment reporting.

39. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

39. OPERATING SEGMENT (continued)

Segmen operasi menurut daerah geografis pemasaran adalah sebagai berikut:

The operating segment based on marketing geographical are as are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2023								
	Jabodebek, Banten/ *Jabodebek, Banten*	Jawa Timur, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi/*East Java, Bali, Kalimantan, and Sulawesi*	Jawa Tengah/ *Central Java*	Jawa Barat/ *West Java*	Sumatera/ *Sumatera*	Total/*Total*	Dikurangi Hak Bank-bank/ *Less Banks' Rights*	Jumlah - Neto/ *Amount - Net*	
Pendapatan segmen	479.818	536.562	294.189	187.617	472.720	1.970.906	-	1.970.906	*Segment revenues*
Pendapatan tidak dapat dialokasi	-	-	-	-	-	-	-	24.504	*Unallocated revenues*
Total pendapatan	479.818	536.562	294.189	187.617	472.720	1.970.906	-	1.995.410	*Total revenues*
Beban segmen:									*Segment expenses:*
Beban usaha	178.302	179.877	96.936	63.182	152.385	670.682	-	670.682	*Operating expenses*
Beban pendanaan dan keuangan	65.319	86.447	47.883	30.038	77.146	306.833	-	306.833	*Financing costs and financing charges*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	56.284	76.465	57.334	32.529	69.445	292.057	-	292.057	*Provision for impairment losses*
Beban penyusutan	11.201	12.078	7.961	5.097	10.030	46.367	-	46.367	*Depreciation expenses*
Total beban	311.106	354.867	210.114	130.846	309.006	1.315.939	-	1.315.939	*Total expenses*
Hasil segmen	**168.712**	**181.695**	**84.075**	**56.771**	**163.714**	**654.967**	**-**	**679.471**	***Segment results***
Beban tidak dapat dialokasi								321.633	*Unallocated expenses*
Beban pendanaan dan keuangan tidak dapat dialokasi								3.048	*Unallocated financing costs and financing charges*
Beban penyusutan tidak dapat dialokasi								32.067	*Unallocated depreciation expenses*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai tidak dapat dialokasi								114	*Provisions on unallocated impairment losses*
Laba sebelum beban pajak final dan beban pajak penghasilan								322.609	*Income before final tax expense and income tax expense*
Beban pajak final								2.555	*Final tax expense*
Laba sebelum beban pajak penghasilan								320.054	*Income before income tax expense*
Beban pajak penghasilan								83.647	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan								**236.407**	***Income for the year***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

Segmen operasi menurut daerah geografis pemasaran adalah sebagai berikut: (lanjutan)

39. OPERATING SEGMENT (continued)

The operating segment based on marketing geographical are as are as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2023								
	Jabodebek, Banten/ *Jabodebek, Banten*	**Kalimantan, dan Sulawesi/*East Java, Bali, Kalimantan, and Sulawesi***	**Jawa Tengah/ *Central Java***	**Jawa Barat/ *West Java***	**Sumatera/ *Sumatera***	**Total/ *Total***	**Dikurangi Hak Bank-bank/ *Less Banks' Rights***	**Jumlah - Neto/ *Amount - Net***	
Aset segmen	1.307.672	1.705.422	866.652	581.780	1.497.418	5.958.944	-	5.958.944	*Segment assets*
Aset tidak dapat dialokasi								676.771	*Unallocated assets*
Total aset								**6.635.715**	***Total assets***
Liabilitas segmen	29.034	30.259	13.970	10.658	27.890	111.811	-	111.811	*Segment liabilities*
Liabilitas tidak dapat dialokasi								4.827.982	*Unallocated liabilities*
Total liabilitas								**4.939.793**	***Total liabilities***
Perolehan aset tetap segmen	7.067	7.336	5.146	3.142	5.014	27.705	-	27.705	*Segment acquisitions of property and equipment*
Perolehan aset tetap kantor pusat								22.244	*Acquisitions of property and equipment in head office*
Total perolehan aset tetap								**49.949**	***Total acquisitions of property and equipment***

39. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

Segmen operasi menurut daerah geografis pemasaran adalah sebagai berikut: (lanjutan)

39. OPERATING SEGMENT (continued)

The operating segment based on marketing geographical are as are as follows: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2022								
	Jabodebek, Banten/ *Jabodebek, Banten*	Jawa Timur, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi/*East Java, Bali, Kalimantan, and Sulawesi*	Jawa Tengah/ *Central Java*	Jawa Barat/ *West Java*	Sumatera/ *Sumatera*	Total/*Total*	Dikurangi Hak Bank-bank/ *Less Banks' Rights*	Jumlah - Neto/ *Amount - Net*	
Pendapatan segmen	402.284	454.491	270.879	167.885	391.614	1.687.153	(36)	1.687.117	*Segment revenues*
Pendapatan tidak dapat dialokasi	-	-	-	-	-	-	-	7.388	*Unallocated revenues*
Total pendapatan	402.284	454.491	270.879	167.885	391.614	1.687.153	(36)	1.694.505	*Total revenues*
Beban segmen:									*Segment expenses:*
Beban usaha	174.979	168.577	105.423	63.900	149.060	661.939	-	661.939	*Operating expenses*
Beban pendanaan dan keuangan	56.990	71.930	40.885	26.002	62.254	258.061	(36)	258.025	*Financing costs and financing charges*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	29.386	44.589	28.514	20.827	27.953	151.269	-	151.269	*Provision for impairment losses*
Beban penyusutan	7.962	9.127	6.159	4.198	8.240	35.686	-	35.686	*Depreciation expenses*
Total beban	269.317	294.223	180.981	114.927	247.507	1.106.955	(36)	1.106.919	*Total expenses*
Hasil segmen	**132.967**	**160.268**	**89.898**	**52.958**	**144.107**	**580.198**	**-**	**587.586**	***Segment results***
Beban tidak dapat dialokasi								275.217	*Unallocated expenses*
Beban pendanaan dan keuangan tidak dapat dialokasi								3.969	*Unallocated financing costs and financing charges*
Beban penyusutan tidak dapat dialokasi								27.385	*Unallocated depreciation expenses*
Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai tidak dapat dialokasi								(1.234)	*Reversal on unallocated impairment losses*
Laba sebelum beban pajak final dan beban pajak penghasilan								282.249	*Income before final tax expense and income tax expense*
Beban pajak final								2.219	*Final tax expense*
Laba sebelum beban pajak penghasilan								280.030	*Income before income tax expense*
Beban pajak penghasilan								82.427	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan								**197.603**	***Income for the year***

39. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

Segmen operasi menurut daerah geografis pemasaran adalah sebagai berikut: (lanjutan)

39. OPERATING SEGMENT (continued)

The operating segment based on marketing geographical are as are as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2022								
	Jabodebek, Banten/ *Jabodebek, Banten*	**Jawa Timur, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi/*East Java, Bali, Kalimantan, and Sulawesi***	**Jawa Tengah/ *Central Java***	**Jawa Barat/ *West Java***	**Sumatera/ *Sumatera***	**Total/*Total***	**Dikurangi Hak Bank-bank/ *Less Banks' Rights***	**Jumlah - Neto/ *Amount - Net***	
Aset segmen	1.129.767	1.368.848	757.623	500.634	1.217.745	4.974.617	(23)	4.974.594	*Segment assets*
Aset tidak dapat dialokasi								671.632	*Unallocated assets*
Total aset								**5.646.226**	***Total assets***
Liabilitas segmen	24.207	18.783	10.910	8.445	18.716	81.061	-	81.061	*Segment liabilities*
Liabilitas tidak dapat dialokasi								4.050.133	*Unallocated liabilities*
Total liabilitas								**4.131.194**	***Total liabilities***
Perolehan aset tetap segmen	3.666	3.631	3.307	544	3.864	15.012	-	15.012	*Segment acquisitions of property and equipment*
Perolehan aset tetap kantor pusat								14.001	*Acquisitions of property and equipment in head office*
Total perolehan aset tetap								**29.013**	***Total acquisitions of property and equipment***

40. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024

Pilar Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini memberikan persyaratan dan pedoman bagi entitas untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang benar dalam menyusun laporan keuangan bertujuan umum. Akan ada 4 (empat) standar akuntansi keuangan yang saat ini diterapkan di Indonesia, yaitu:

1. Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional,
2. Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK),
3. Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Swasta/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan
4. Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah.

Standar Akuntansi Keuangan Internasional

Standar ini merupakan adopsi penuh dari *International Financial Reporting Standards (*"IFRS") yang diterjemahkan kata demi kata dan tidak ada modifikasi dari Standar IFRS, termasuk tanggal efektifnya. Entitas yang memenuhi persyaratan dapat menerapkan standar ini, sejak tanggal efektif.

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini ini mengatur penomoran baru untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang diterbitkan oleh DSAK IAI.

Amandemen PSAK 1: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- Hal yang dimaksud sebagai hak untuk menangguhkan pelunasan,
- Hak untuk menangguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- Klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan hakya untuk menangguhkan liabilitas, dan
- Hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

40. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

Effective beginning on or after January 1, 2024

Financial Accounting Standards Pillars

These standards provides requirements and guidelines for entities to apply the correct financial accounting standards in preparing general purpose financial statements. There will be 4 (four) financial accounting standards that are currently applied in Indonesia, namely:

1. *Pillar 1 International Financial Accounting Standards,*
2. *Pillar 2 Indonesian Financial Accounting Standards (SFAS),*
3. *Pillar 3 Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities/Indonesian Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability, and*
4. *Pillar 4 Indonesian Financial Accounting Standards for Micro Small and Medium Entities.*

International Financial Accounting Standard

This standard is a full-adoption of International Financial Reporting Standards ("IFRS") which is translated in a word-for-word basis and there is no modifications from IFRS Standards, including the effective date. Entities that meet the requirements can apply this standard, from the effective date.

Financial Accounting Standards Nomenclature

This standard regulates the new numbering for financial accounting standards applicable in Indonesia issued by DSAK IAI.

Amendment of SFAS 1: Non-current Liabilities with Covenants

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:

- *What is meant by a right to defer settlement,*
- *The right to defer must exist at the end of the reporting period,*
- *Classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and*
- *Only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument would the terms and conditions of a liability will not impact its classification.*

40. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 (lanjutan)

Amandemen PSAK 1: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan (lanjutan)

Selain itu, persyaratan telah diperkenalkan untuk mewajibkan pengungkapan ketika suatu kewajiban timbul dari pinjaman perjanjian diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan di masa depan dalam waktu 12 (dua belas) bulan.

Amandemen PSAK 73: Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik

Amandemen PSAK 73 Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

Amandemen PSAK 2 dan PSAK 60: Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Amandemen PSAK 2 dan PSAK 60 mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amandemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.

Amandemen ini akan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan, namun perlu diungkapkan. Amandemen tersebut diperkirakan tidak mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Manajemen masih melakukan persiapan dalam penerapan standar baru tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Perusahaan pada saat efektif, dan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan Perusahaan masih diestimasi sampai tanggal laporan keuangan.

40. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2024 (continued)

Amendment of SFAS 1: Non-current Liabilities with Covenants (continued)

In addition, a requirement has been introduced to require disclosure when a liability arising from a loan agreement is classified as non-current and the entity's right to defer settlement is contingent on compliance with future covenants within 12 (twelve) months.

Amendment of SFAS 73: Lease liability in a Sale and Leaseback

The amendment to SFAS 73 Leases specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.

Amendment of SFAS 2 and SFAS 60: Supplier Finance Arrangements

The amendments to SFAS 2 and SFAS 60 clarify the characteristics of supplier finance arrangements and require additional disclosure of such arrangements. The disclosure requirements in the amendments are intended to assist users of financial statements in understanding the effects of supplier finance arrangements on an entity's liabilities, cash flows and exposure to liquidity risk.

The amendments will be effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024. Early adoption is permitted, but will need to be disclosed.The amendments are not expected to have a material impact on the Company's financial statements.

The management intends to adopt these new standards that are considered relevant to the Company when they become effective, and the impact to the financial position and performance of the Company is still being estimated until the report date.

41. REKLAFIKASI AKUN

Laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022 telah direklasifikasi untuk mengikuti penyajian laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

41. RECLASSIFICATION OF ACCOUNT

The statement of financial position as of December 31, 2022 have been reclassified to conform with presentation of statement of financial position as of December 31, 2023 as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2022			
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	**Reklasifikasi/ *Reclassifications***	**Dilaporkan Saat Ini/ *As Currently Reported***	
PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN				***CONSUMER FINANCING RECEIVABLES***
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi bagian yang dibiayai bank	4.721.617	(2.955)	4.718.662	*Consumer financing receivables - net of amounts financed by bank*
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(1.052.842)	769	(1.052.073)	*Unearned consumer financing income*
Piutang pembiayaan konsumen	**3.668.775**	**(2.186)**	**3.666.589**	***Consumer financing receivables***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(126.829)	1.192	(125.637)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**3.541.946**	**(994)**	**3.540.952**	***Net***
PIUTANG PEMBIAYAAN MODAL USAHA				***CAPITAL FINANCING RECEIVABLES***
Piutang pembiayaan modal usaha	240.386	(338)	240.048	*Capital financing receivables*
Pendapatan pembiayaan modal usaha yang belum diakui	(48.638)	93	(48.545)	*Unearned capital financing income*
Piutang pembiayaan modal usaha	**191.748**	**(245)**	**191.503**	***Capital financing receivables***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.707)	92	(5.615)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**186.041**	**(153)**	**185.888**	***Net***
PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN				***FINANCE LEASE RECEIVABLES***
Piutang sewa pembiayaan	1.574.841	(2.440)	1.572.401	*Finance lease receivables*
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(415.870)	776	(415.094)	*Unearned finance lease income*
Piutang sewa pembiayaan	**1.158.971**	**(1.664)**	**1.157.307**	***Finance lease receivables***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(19.978)	636	(19.342)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**1.138.993**	**(1.028)**	**1.137.965**	***Net***

41. REKLAFIKASI AKUN (lanjutan)

Laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022 telah direklasifikasi untuk mengikuti penyajian laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

41. RECLASSIFICATION OF ACCOUNT (continued)

The statement of financial position as of December 31, 2022 have been reclassified to conform with presentation of statement of financial position as of December 31, 2023 as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2022			
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	**Reklasifikasi/ *Reclassifications***	**Dilaporkan Saat Ini/ *As Currently Reported***	
PIUTANG LAIN-LAIN				***OTHER RECEIVABLES***
Pihak ketiga	18.476	4.095	22.571	*Third parties*
Total Piutang Lain-lain	**19.686**	**4.095**	**23.781**	***Total Other Receivables***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(82)	(1.920)	(2.002)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**19.604**	**2.175**	**21.779**	***Net***

2023

Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan
Annual Report & Sustainability Report

INSPIRING OUR FORCES
TO GO BEYOND

WOMFinance
a member of Maybank *group*

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Altira Office Tower floor 32, 33, 35
Jl. Yos Sudarso Kav.85
Sunter Jaya, Tanjung Priok
Jakarta Utara 14350

+62 21 2188 2400
(fax.) +62 21 2188 2420

corporate_secretary@wom.co.id

www.wom.co.id